



**BUPATI MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH**

**PERATURAN BUPATI MAGELANG
NOMOR 45 TAHUN 2020**

TENTANG

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2021**

**PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG
2020**



BUPATI MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI MAGELANG
NOMOR 45 TAHUN 2020

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024, Pemerintah Daerah menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- b. bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2021 merupakan hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kabupaten Magelang Tahun 2020 yang akan dijadikan dasar penyusunan kegiatan pembangunan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2008 Nomor 28);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2009 Nomor 1);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2021.

Pasal 1

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2021 yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagai landasan dan pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Magelang dalam melaksanakan pembangunan daerah Tahun 2021.

Pasal 2

RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan pedoman bagi:

- a. penyusunan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2021 yang didahului dengan penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS);
- b. penyusunan rencana kerja Perangkat Daerah (renja PD) Kabupaten Magelang dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan; dan
- c. seluruh pelaku pembangunan dalam mendukung terlaksananya pembangunan Kabupaten Magelang Tahun 2021.

Pasal 3

(1) RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- BAB I PENDAHULUAN
- BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
- BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH
- BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2021
- BAB V KEBIJAKAN PENGEMBANGAN WILAYAH KABUPATEN MAGELANG
- BAB VI RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH
- BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH
- BAB VIII PENUTUP

(2) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Magelang.

Ditetapkan di Kota Mungkid
pada tanggal 15 Oktober 2020

BUPATI MAGELANG,

ttd

ZAENAL ARIFIN

Diundangkan di Kota Mungkid
pada tanggal 15 Oktober 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGELANG,

ttd

ADI WARYANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2020 NOMOR 47

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


SARIFUDIN, S.H.

Pembina

NIP. 196702121993121001

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	xv
BAB I PENDAHULUAN	I-1
1.1 Latar Belakang	I-1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan	I-2
1.3 Hubungan antar Dokumen	1-5
1.4 Maksud dan Tujuan	1-6
1.5 Sistematika Penyusunan RKPD	I-6
BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH	II-1
2.1 Aspek Geografis dan Demografi	II-1
2.1.1. Kondisi Geografis dan Administrasi	II-1
2.1.2. Topografi	II-2
2.1.3. Geologi	II-3
2.1.4. Hidrologi.....	II-4
2.1.5. Klimatologi	II-5
2.1.6. Penggunaan Lahan.....	II-5
2.1.7. Potensi Pengembangan Wilayah	II-7
2.1.8. Wilayah Rawan Bencana	II-11
2.1.9. Kondisi Demografi	II-15
2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat	II-22
2.2.1. Pertumbuhan Ekonomi	II-22
2.2.2. Laju Inflasi	II-32
2.2.3. PDRB Per Kapita	II-33
2.2.4. Pemerataan Pembangunan	II-34
2.2.5. Penduduk Miskin	II-36
2.2.6. Indeks Pembangunan Manusia.....	II-39
2.2.7. Angka Partisipasi Kasar.....	II-42
2.2.8. Angka Partisipasi Murni (APM)	II-43
2.2.9. Angka Partisipasi Sekolah (APS)	II-43
2.2.10. Angka Pendidikan yang di tamatkan	II-44
2.2.11. Indeks Pembangunan Gender (IPG)	II-44
2.2.12. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	II-45
2.2.13. Kebudayaan	II-46
2.3 Aspek Daya Saing Daerah.....	II-46
2.3.1. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah	II-46
2.3.2. Fokus Fasilitas Wilayah /Infrastruktur	II-48
2.3.3. Fokus Iklim Berinvestasi	II-56

2.3.4.	Fokus Sumber Daya Manusia.....	II-62
2.3.5.	Fokus Penyelenggaraan Pemerintahan	II-64
2.4	Aspek Pelayanan Umum	II-67
2.4.1.	Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar	II-67
2.4.2.	Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar	II-93
2.4.3.	Urusan Pemerintahan Pilihan.....	II-126
2.4.4.	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	II-143
2.5	Pandemik COVID 19.....	II-152
2.5.1.	Jumlah dan Sebaran Covid-19	II-153
2.5.2.	Penyediaan Jaring Pengaman Sosial (Social Safety Net)	II-156
2.5.3.	Dampak Ekonomi.....	II-157
2.6	Evaluasi Pelaksanaan Program RKPD Kabupaten Magelang Tahun 2019 dan Realisasi RPJMD	II-158
2.6.1.	Aspek Kesejahteraan Masyarakat	II-158
2.6.2.	Aspek Daya Saing.....	II-159
2.6.3.	Aspek Pelayanan Umum.....	II-160
2.7	Permasalahan Pembangunan Daerah	II-189
2.7.1.	Permasalahan Sumber Daya Manusia dan Kehidupan Beragama	II-190
2.7.2.	Permasalahan Perekonomian Daerah Berbasis Potensi Lokal yang Berdaya Saing.....	II-191
2.7.3.	Permasalahan Pembangunan Prasarana dan Sarana Daerah	II-192
2.7.4.	Permasalahan Pemanfaatan dan Pengelolaan Sumber Daya Alam Berbasis Kelestarian Lingkungan Hidup.....	II-192
2.7.5.	Permasalahan Tata Kelola Pemerintahan.....	II-192
2.7.6.	Keamanan dan Ketenteraman Masyarakat	II-193

BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN

DAERAH.....	III-1	
3.1.	Arah Kebijakan Ekonomi Daerah.....	III-1
3.1.1.	Kondisi Ekonomi Nasional.....	III-1
3.1.2.	Kondisi Ekonomi Provinsi Jawa Tengah	III-1
3.1.3.	Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2019.....	III-3
3.1.4.	Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah	III-8
3.2.	Arah Kebijakan Keuangan Daerah	III-8
3.2.1.	Arah Kebijakan Pendapatan Daerah.....	III-8
3.2.2.	Arah Kebijakan Belanja Daerah	III-11
3.2.3.	Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah	III-16

BAB IV	SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	
	TAHUN 2021	IV-1
4.1	Tujuan dan Sasaran Pembangunan	IV-2
4.2	Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah.....	IV-7
4.2.1	Arah Kebijakan Pembangunan Nasional Jangka Menengah Tahun 2020 - 2024 dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2021	IV-7
4.2.2	Arah Kebijakan dan Prioritas Pembangunan Jawa Tengah Tahun 2021	IV-10
4.2.3	Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2021	IV-16
4.3	Inovasi Daerah	IV-39
4.3.1	Paseso Merapi atau Sister Village	IV-39
4.3.2	Program MACAK (Magelang Membaca Untuk Kesejahteraan).....	IV-40
4.3.3	Centre of Service for Research (COSFRE) / Klinik Penelitian	IV-41
4.3.4	PEPAK (Percepatan Penurunan Angka Kemiskinan)	IV-42
4.3.5	Pancen A SIKK (Pantauan Bencana dengan Aplikasi Sistem Informasi Kebencanaan Kabupaten).....	IV-43
4.3.6	Budidaya tanaman bawah tegakan penghasil emas hijau (BINTANG HIJAU).....	IV-44
4.3.7	Jogo Tuk (Komunitas Penyelamat Mata Air).....	IV-45
4.3.8	PUSAKA GEMILANG (Pusat Informasi dan Komunikasi Kabupaten)	IV-46
4.3.9	Pengembangan Desa Wisata	IV-47
4.3.10	Covid Information System (CIS)	IV-48
4.4	Pokok-pokok Pikiran DPRD	IV-50
BAB V	KEBIJAKAN PENGEMBANGAN WILAYAH KABUPATEN	
	MAGELANG	V-1
5.1.	Kebijakan Umum Pengembangan Wilayah	V-1
5.1.1	Kebijakan dan Strategi Penetapan Pola Ruang Wilayah	V-1
5.1.2	Kebijakan dan Strategi Penetapan Struktur Ruang Wilayah	V-2
5.1.3	Kebijakan dan Strategi Penetapan Kawasan Strategis Wilayah Kabupaten.....	V-2
5.2.	Perwujudan Struktur Ruang dan Pola Ruang	V-3
5.2.1	Perwujudan Struktur Ruang	V-3
5.2.2	Perwujudan Pola Ruang	V-5
5.3.	Arah Pengembangan Wilayah	V-10

5.3.1	Arah Pengembangan Wilayah Kabupaten Magelang Tahun 2021	V-13
5.4.	Kesesuaian RTRW dalam Percepatan Pembangunan Ekonomi di Kabupaten Magelang.....	V-24

BAB VI RENCANA KERJA DAN PENDANAANVI-1

6.1.	Kerangka Pendanaan Tahun 2021	VI-1
6.2.	Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Tahun 2021	VI-2
6.2.1	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	VI-2
6.2.2	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	VI-7
6.3.	Pemetaan Program dan Kegiatan	VI-410

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAHVII-1

7.1.	Indikator Kinerja Utama Daerah Tahun 2021	VII-1
7.2.	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah (IKU PD)	VII-6
7.3.	Indikator Kinerja Daerah	VI-26
7.4.	Indikator Kinerja Program Prioritas Pembangunan	VII-36

BAB VIII PENUTUP VIII-1

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.	Luas Kecamatan, Jumlah Desa dan Kelurahan, serta Jarak dari Ibukota Kabupaten ke Kecamatan di Kabupaten Magelang Tahun 2018	II-2
Tabel 2.2.	Kelerengan Lahan di Kabupaten Magelang	II-3
Tabel 2.3.	Penggunaan Lahan di Kabupaten Magelang Tahun 2015-2019 (Ha).....	II-5
Tabel 2.4.	Perhitungan Luas Guna Lahan Fungsi Lindung Kabupaten Magelang 2017	II-6
Tabel 2.5.	Potensi Pengembangan Wilayah Kabupaten Magelang Berdasarkan RTRW Kabupaten Magelang.....	II-7
Tabel 2.6.	Desa Bersaudara (<i>Sister Village</i>)	II-14
Tabel 2.7.	Jumlah Penduduk di Kabupaten Magelang Tahun 2015-2019	II-15
Tabel 2.8.	Kepadatan Penduduk di Kabupaten Magelang per Kecamatan Tahun 2015-2019	II-17
Tabel 2.9.	Perkembangan Jumlah Penduduk berdasarkan Jenis Kelamin di Kabupaten Magelang Tahun 2015–2019	II-18
Tabel 2.10.	Jumlah penduduk berdasarkan kelompok umur kabupaten Magelang Tahun 2015-2019	II-19
Tabel 2.11.	Jumlah Penduduk Menurut Pendidikan yang Ditamatkan di Kabupaten Magelang Tahun 2015–2019	II-21
Tabel 2.12.	Jumlah Penduduk Menurut Agama di Kabupaten Magelang Tahun 2015–2019	II-22
Tabel 2.13.	Perkembangan Komponen PMTB dan ICOR Tahun 2015-2019.....	II-23
Tabel 2.14.	Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2010 Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Magelang Tahun 2015-2019.....	II-24
Tabel 2.15.	Nilai PDRB Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2010 Kabupaten Magelang Tahun 2015- 2019	II-25
Tabel 2.16.	Nilai PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Magelang Tahun 2015-2019	II-27
Tabel 2.17.	Perkembangan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2015-2019 Atas Dasar Harga Berlaku (Hb) dan Harga Konstan (Hk) di Kabupaten Magelang	II-28
Tabel 2.18.	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran Kabupaten Tahun 2015-2019 (Juta Rupiah)	II-29
Tabel 2.19.	PDRB Atas Dasar Harga Konstan Menurut Pengeluaran Kabupaten Tahun 2015-2019 (Juta Rupiah)	II-30
Tabel 2.20.	Distribusi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran Kabupaten Magelang Tahun 2015-2019	II-30

Tabel 2.21.	Distribusi PDRB Atas Dasar Harga Konstan Menurut Pengeluaran Kabupaten Magelang Tahun 2015-2019	II-3
Tabel 2.22.	Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan Menurut Pengeluaran Kabupaten Magelang Tahun 2015-2019.....	II-32
Tabel 2.23.	Inflasi Kabupaten Magelang Menurut Kelompok Pengeluaran (YoY) Tahun 2015-2019	II-32
Tabel 2.24.	Indeks Gini Kabupaten Magelang tahun 2015-2019	II-34
Tabel 2.25.	Pemerataan Pendapatan Versi Bank Dunia di Kabupaten Magelang Tahun 2015-2019	II-35
Tabel 2.26.	Tingkat Kemiskinan di Kabupaten Magelang Tahun 2015-2019	II-36
Tabel 2.27.	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Magelang, Prov. Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2015-2019.....	II-39
Tabel 2.28.	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) kabupaten/kota eks Karesidenan Kedu Tahun 2015-2019	II-40
Tabel 2.29.	Perbandingan Umur Harapan Hidup Kabupaten Magelang Tahun 2015-2019	II-40
Tabel 2.30.	Pengeluaran Riil Per Kapita Kabupaten Magelang Tahun 2015-2019.....	II-42
Tabel 2.31.	Angka Partisipasi Kasar (APK) di Kabupaten Magelang Tahun 2015-2019	II-42
Tabel 2.32.	Angka Partisipasi Murni di Kabupaten Magelang Tahun 2015-2019.....	II-43
Tabel 2.33.	Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah Jenjang Pendidikan Dasar Kabupaten Magelang Tahun 2015-2019	II-43
Tabel 2.34.	Angka Partisipasi Sekolah di Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa tengah dan Indonesia Tahun 2015-2019....	II-44
Tabel 2.35.	Angka Pendidikan yang Ditamatkan di Kabupaten Magelang Tahun 2015-2019	II-44
Tabel 2.36.	Indeks Pembangunan Gender (IPG) di Kabupaten Magelang Tahun 2015-2019	II-45
Tabel 2.37.	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) di Kabupaten Magelang Tahun 2015-2019	II-45
Tabel 2.38.	Perkembangan Seni dan Budaya di Kabupaten Magelang Tahun 2015-2019	II-46
Tabel 2.39.	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita Kabupaten Magelang Tahun 2018	II-46
Tabel 2.40.	Produktivitas Total Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2015-2019.....	II-47
Tabel 2.41.	Nilai Tukar Petani Kabupaten Magelang Tahun 2015-2018.....	II-48

Tabel 2.42.	Cakupan Pembangunan Infrastruktur Wilayah Berkelanjutan Kabupaten Magelang 2017-2019	II-48
Tabel 2.43.	Cakupan Pembangunan Infrastruktur Wilayah Kabupaten Magelang 2017-2019	II-49
Tabel 2.44.	Luas Kawasan Lindung di Kabupaten Magelang.....	II-50
Tabel 2.45.	Luas Kawasan Budidaya di Kabupaten Magelang.....	II-50
Tabel 2.46.	Penggunaan Lahan di Kabupaten Magelang Tahun 2015-2018.....	II-52
Tabel 2.47.	Jenis dan Jumlah Bank di Kabupaten Magelang Tahun 2015-2019.....	II-54
Tabel 2.48.	Jenis dan Jumlah Perusahaan Asuransi di Kabupaten Magelang Tahun 2015-2019	II-54
Tabel 2.49.	Jenis, Kelas, dan Jumlah Restoran di Kabupaten Magelang Tahun 2015-2019	II-55
Tabel 2.50.	Jenis dan Jumlah Penginapan/Hotel di Kabupaten Magelang Tahun 2015-2019	II-55
Tabel 2.51.	Pertumbuhan Investasi Kabupaten Magelang Tahun 2015-2019.....	II-56
Tabel 2.52.	Angka Kriminalitas Tertangani di Kabupaten Magelang Tahun 2015-2019	II-57
Tabel 2.53.	Lama Proses Perizinan di Kabupaten Magelang Tahun 2015-2019.....	II-57
Tabel 2.54.	Realisasi Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2015-2019	II-59
Tabel 2.55.	Status Desa Tahun 2018-2019	II-61
Tabel 2.56.	Partisipasi Masyarakat di Kabupaten Magelang Tahun 2015-2019.....	II-61
Tabel 2.57.	Persentase Bumdes Aktif di Kabupaten Magelang Tahun 2015-2019.....	II-62
Tabel 2.58.	Rasio Lulusan S1/S2/S3 Kabupaten Magelang Tahun 2015-2019.....	II-62
Tabel 2.59.	Rasio Ketergantungan Kabupaten Magelang Tahun 2015-2019.....	II-64
Tabel 2.60.	Cakupan Penegakan Hukum Kabupaten Magelang Tahun 2015-2019.....	II-65
Tabel 2.61.	Cakupan Peningkatan Wawasan Kebangsaan dan Politik Masyarakat di Kabupaten Magelang Tahun 2015-2019	II-66
Tabel 2.62.	Cakupan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat di Kabupaten Magelang Tahun 2015-2019	II-66
Tabel 2.63.	Angka Kelulusan di Kabupaten Magelang Tahun 2015-2019.	II-67

Tabel 2.64.	Rerata Nilai Ujian Nasional di Kabupaten Magelang Tahun 2015-2019	II-68
Tabel 2.65.	Persentase SD/MI dan SMP/MTs yang Berakreditasi Minimal B Kabupaten Magelang Tahun 2015-2019	II-68
Tabel 2.66.	Kompetensi Pendidik di Kabupaten Magelang Tahun 2015-2019	II-69
Tabel 2.67.	Angka Kematian Bayi di Kabupaten Magelang Tahun 2015-2019	II-72
Tabel 2.68.	Angka Kematian Balita per 1.000 Kelahiran Hidup di Kabupaten Magelang Tahun 2015-2019	II-72
Tabel 2.69.	Prevalensi Balita Gizi Buruk di Kabupaten Magelang Tahun 2015-2019	II-73
Tabel 2.70.	Rasio Dokter Per Satuan Penduduk di Kabupaten Magelang Tahun 2015-2019	II-74
Tabel 2.71.	Puskesmas dan Rumah Sakit Terakreditasi di Kabupaten Magelang Tahun 2015-2019	II-75
Tabel 2.72.	Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI) di Kabupaten Magelang Tahun 2015-2019	II-75
Tabel 2.73.	Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD di Kabupaten Magelang Tahun 2015-2019	II-76
Tabel 2.74.	Penderita Malaria dengan Pemeriksaan Darah (positif) di Kabupaten Magelang Tahun 2014-2019	II-77
Tabel 2.75.	Prevelensi HIV/AIDS di Kabupaten Magelang Tahun 2015-2019	II-77
Tabel 2.76.	Penyakit Tidak Menular Tahun 2015-2019 di Kab. Magelang	II-78
Tabel 2.77.	Kondisi Dasar Jalan di Kabupaten Magelang Tahun 2015-2019	II-79
Tabel 2.78.	Kondisi Permukaan Jalan di Kabupaten Magelang Sesuai Kewenangan Tahun 2015-2019	II-80
Tabel 2.79.	Kondisi Standar Jalan di Kabupaten Magelang Sesuai Kewenangan Tahun 2015-2019	II-80
Tabel 2.80.	Kondisi Dasar Jaringan Irigasi Kewenangan Kabupaten Tahun 2015-2019	II-81
Tabel 2.81.	Jaringan Irigasi Dalam Kondisi Baik Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Tahun 2015-2019	II-81
Tabel 2.82.	Pengelolaan Air Untuk Layanan Irigasi di Kabupaten Magelang Tahun 2017-2019	II-82
Tabel 2.83.	Pembangunan Gedung Pemerintah di Kabupaten Magelang Tahun 2015-2019	II-82
Tabel 2.84.	Cakupan Layanan Air Minum di Kabupaten Magelang Tahun 2015-2019	II-83

Tabel 2.85.	Cakupan Layanan Sanitasi Air Limbah Domestik di Kabupaten Magelang Tahun 2015-2019	II-84
Tabel 2.86.	Kinerja Makro Urusan Penataan Ruang Tahun 2015-2019	II-85
Tabel 2.87.	Kondisi Perumahan di Kabupaten Magelang Tahun 2015- 2019.....	II-85
Tabel 2.88.	Persentase Penanganan Kawasan Kumuh Kabupaten Magelang Tahun 2015-2019	II-86
Tabel 2.89.	Persentase Penegakan Perda di Kabupaten Magelang Tahun 2015-2019	II-87
Tabel 2.90.	Persentase Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) di Kabupaten Magelang Tahun 2015-2019	II-88
Tabel 2.91.	Cakupan Ketahanan Masyarakat Menghadapi Bencana di Kabupaten Magelang Tahun 2015-2019	II-89
Tabel 2.92.	Cakupan Peningkatan Wawasan Kebangsaan dan Politik Masyarakat di Kabupaten Magelang Tahun 2015-2019.....	II-89
Tabel 2.93.	Penanganan PMKS di Kabupaten Magelang Tahun 2015-2019	II-90
Tabel 2.94.	Jumlah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Kabupaten Magelang Tahun 2018-2019	II-91
Tabel 2.95.	Jumlah Penyandang Disabilitas yang Memperoleh Bantuan	II-91
Tabel 2.96.	Kinerja Makro Urusan Sosial Tahun 2015-2019	II-92
Tabel 2.97.	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Kabupaten Magelang Tahun 2015-2019	II-93
Tabel 2.98.	Produktivitas Tenaga Kerja di Kabupaten Magelang Tahun 2015-2019.....	II-94
Tabel 2.99.	Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Magelang Tahun 2015-2019	II-95
Tabel 2.100.	Pencari Kerja yang Ditempatkan di Kabupaten Magelang Tahun 2015-2019	II-96
Tabel 2.101.	Tenaga Kerja yang Mendapatkan Jaminan Perlindungan Sosial (Jamsostek)	II-98
Tabel 2.102.	Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah di Kabupaten Magelang Tahun 2015-2019	II-99
Tabel 2.103.	Penyelesaian Pengaduan Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindakan Kekerasan di Kabupaten Magelang Tahun 2015-2019	II-99
Tabel 2.104.	Desa, Kecamatan dan Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Magelang Tahun 2015-2019	II-100

Tabel 2.105.	Pola Pangan Harapan Ketersediaan Kabupaten Magelang Tahun 2015-2019	II-101
Tabel 2.106.	Daya Dukung Pangan Kabupaten Magelang Tahun 2019	II-103
Tabel 2.107.	Luasan Jasa Ekosistem Penyedia Pangan (JEP 1) Kabupaten Magelang	II-103
Tabel 2.108.	Kinerja Pembangunan Urusan Pertanahan Kabupaten Magelang Tahun 2015-2019	II-105
Tabel 2.109.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Magelang Tahun 2017-2019	II-105
Tabel 2.110.	Persentase Perusahaan Minimal Berpredikat Proper Biru Tahun 2017-2019	II-106
Tabel 2.111.	Persentase Pengelolaan Sampah di Kabupaten Magelang Tahun 2017-2019	II-106
Tabel 2.112.	Persentase Ruang Terbuka Hijau Terhadap Luas Wilayah Perkotaan di Kabupaten Magelang Tahun 2017-2019	II-107
Tabel 2.113.	Cakupan Konservasi Sumber Daya Alam di Kabupaten Magelang Tahun 2017-2019	II-108
Tabel 2.114.	Persentase Kasus Lingkungan dan Pengaduan Masyarakat terkait Ijin Lingkungan, PPLH, dan PUU LH yang Ditangani di Kabupaten Magelang Tahun 2015-2019	II-108
Tabel 2.115.	Rasio Perekaman KTP - elektronik dan Keluarga yang Ber KK Kabupaten Magelang Tahun 2015-2019	II-109
Tabel 2.116.	Rasio Anak (0-18) yang Berakta Kelahiran, Pasangan Berakta Perkawinan, Penduduk Meninggal Berakta Kematian Kabupaten Magelang Tahun 2015-2019	II-109
Tabel 2.117.	Cakupan Peserta KB Aktif di Kabupaten Magelang Tahun 2015-2019	II-110
Tabel 2.118.	Persentase Keluarga Pra Sejahtera Kabupaten Magelang Tahun 2015-2019	II-111
Tabel 2.119.	Persentase Keluarga Sejahtera I di Kabupaten Magelang Tahun 2015-2019	II-112
Tabel 2.120.	Prasarana Dan Sarana Perhubungan Kabupaten Magelang Tahun 2017 – 2019	II-112
Tabel 2.121.	Indikator Kinerja Perhubungan Magelang Tahun 2017-2019	II-113
Tabel 2.122.	Cakupan Ketersediaan Prasarana dan sarana TIK yang Memenuhi Standart Komunikasi Informasi di Kabupaten Magelang Tahun 2017-2019	II-114
Tabel 2.123.	Cakupan Layanan dan Diseminasi Informasi Publik di Kabupaten Magelang tahun 2015-2019	II-115

Tabel 2.124.	Cakupan Pemanfaatan dan Pengelolaan TI di Kabupaten Magelang Tahun 2015-2019	II-116
Tabel 2.125.	Persentase Koperasi Aktif di Kabupaten Magelang Tahun 2015-2019	II-117
Tabel 2.126.	Persentase Usaha Mikro dan Kecil yang dibina di Kabupaten Magelang Tahun 2015-2019	II-118
Tabel 2.127.	Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN dan PMA) di Kabupaten Magelang Tahun 2015-2019	II-119
Tabel 2.128.	Realisasi Kumulatif Nilai Investasi PMDN dan PMA di Kabupaten Magelang Tahun 2015-2019	II-119
Tabel 2.129.	Rasio Daya Serap Tenaga Kerja Perusahaan PMDN dan PMA Kabupaten Magelang Tahun 2015-2019	II-120
Tabel 2.130.	Jumlah Organisasi Pemuda di Kabupaten Magelang Tahun 2015-2019	II-121
Tabel 2.131.	Cakupan Prestasi Generasi Muda di Kabupaten Magelang Tahun 2015-2019	II-121
Tabel 2.132.	Jumlah Organisasi Olahraga di Kabupaten Magelang Tahun 2015-2019	II-122
Tabel 2.133.	Rasio Lapangan Olahraga di Kabupaten Magelang Tahun 2015-2019	II-123
Tabel 2.134.	Persentase SKPD Yang Menggunakan Sandi Secara Terintegrasi di Kabupaten Magelang Tahun 2015-2019.....	II-123
Tabel 2.135.	Persentase SKPD yang menggunakan sandi secara terintegrasi di Kabupaten Magelang Tahun 2015-2019.....	II-124
Tabel 2.136.	Jumlah Pengunjung Perpustakaan per Tahun di Kabupaten Magelang Tahun 2015-2019	II-125
Tabel 2.137.	Koleksi Buku yang Tersedia di Perpustakaan Daerah di Kabupaten Magelang Tahun 2015-2019	II-125
Tabel 2.138.	Jumlah Unit Pengolah/Pencipta Arsip yang Telah Menerapkan Arsip Secara Baku/Tertib di Kabupaten Magelang Tahun 2015-2019	II-126
Tabel 2.139.	Jumlah Kunjungan Wisatawan di Kabupaten Magelang Tahun 2015-2019	II-129
Tabel 2.140.	Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB ADHK Kabupaten Magelang Tahun 2015-2019	II-130
Tabel 2.141.	Lama Tinggal Wisatawan di Kabupaten Magelang Tahun 2015-2019	II-130
Tabel 2.142.	Jumlah Daya Tarik Wisata di Kabupaten Magelang Tahun 2015-2019	II-131
Tabel 2.143.	Perkembangan Kelas Kelompok Tani di Kabupaten Magelang Tahun 2015-2019	II-138
Tabel 2.144.	Jumlah Penyuluh di Kabupaten Magelang Tahun 2015-2019	II-139

Tabel 2.145.	Kontribusi Sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor terhadap PDRB ADHK Kabupaten Magelang Tahun 2015-2019.....	II-139
Tabel 2.146.	Pasar yang Menerima Penghargaan Tertib Ukur Kabupaten Magelang Tahun 2015-2019	II-140
Tabel 2.147.	Ekspor Bersih Perdagangan Kabupaten Magelang Tahun 2015-2019	II-141
Tabel 2.148.	Kontribusi Industri Pengolahan terhadap PDRB ADHK Kabupaten Magelang Tahun 2015-2019	II-142
Tabel 2.149.	Pertumbuhan Industri di Kabupaten Magelang Tahun 2015-2019.....	II-142
Tabel 2.150.	Capaian Kesesuaian Perencanaan Program Tahun 2015-2019.....	II-143
Tabel 2.151.	Opini BPK di Kabupaten Magelang Tahun 2015-2019	II-144
Tabel 2.152.	Persentase kenaikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Magelang Tahun 2015-2019	II-145
Tabel 2.153.	Proporsi dan Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Magelang Tahun 2015-2019	II-145
Tabel 2.154.	Persentase Tahapan Penetapan APBD Tepat Waktu Kabupaten Magelang Tahun 2015-2019	II-145
Tabel 2.155.	Kepemilikan Saham BUMD di Kabupaten Magelang Tahun 2018-2019	II-146
Tabel 2.156.	Penyertaan Modal Dan Penerimaan Deviden BUMD di Kabupaten Magelang Tahun 2018-2019	II-146
Tabel 2.157.	Pendapatan Usaha dan Laba Bersih BUMD 2015-2019 (Dalam Juta Rupiah).....	II-147
Tabel 2.158.	Kegiatan Kelitbangan Kabupaten Magelang Tahun 2015-2019.....	II-149
Tabel 2.159.	Implementasi Rencana Kelitbangan Kabupaten Magelang Tahun 2015-2019	II-150
Tabel 2.160.	Capaian Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Kabupaten Magelang Tahun 2015-2019	II-150
Tabel 2.161.	Level Kapabilitas APIP dan Nilai Maturitas SPIP Tahun 2017- 2019.....	II-151
Tabel 2.162.	Kondisi PNS Kabupaten Magelang Tahun 2015–2019	II-151
Tabel 2.163.	Komposisi Pendidikan PNS (orang) Kabupaten Magelang Tahun 2015–2019.....	II-152
Tabel 2.164.	Data PNS yang Mengikuti Diklat Jabatan Struktural Kabupaten Magelang Tahun 2015–2019 (Orang)	II-152
Tabel 2.165.	Jumlah Kasus COVID 19, Di Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2020.....	II-153

Tabel 2.166.	Jumlah Kasus COVID 19 per Kecamatan di Kabupaten Magelang sampai tanggal 5 Mei 2020	II-153
Tabel 2.167.	Capaian Kinerja Aspek Kesejahteraan Masyarakat	II-158
Tabel 2.168.	Capaian Kinerja Aspek Daya Saing	II-159
Tabel 2.169.	Capaian Kinerja Urusan Pendidikan	II-161
Tabel 2.170.	Capaian Kinerja Urusan Kesehatan	II-163
Tabel 2.171.	Capaian Kinerja Urusan Pekerjaan Umum	II-164
Tabel 2.172.	Capaian Kinerja Urusan Penataan Ruang.....	II-165
Tabel 2.173.	Capaian Kinerja Urusan Perumahan	II-165
Tabel 2.174.	Capaian Kinerja Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat	II-166
Tabel 2.175.	Capaian Kinerja Urusan Sosial	II-167
Tabel 2.176.	Capaian Kinerja Urusan Ketenagakerjaan	II-168
Tabel 2.177.	Capaian Kinerja Urusan Perhubungan	II-169
Tabel 2.178.	Capaian Kinerja Urusan Lingkungan Hidup	II-170
Tabel 2.179.	Capaian Kinerja Urusan Pertanahan	II-171
Tabel 2.180.	Capaian Kinerja Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil.....	II-171
Tabel 2.181.	Capaian Kinerja Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	II-172
Tabel 2.182.	Capaian Kinerja Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera	II-173
Tabel 2.183.	Capaian Kinerja Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah.....	II-174
Tabel 2.184.	Capaian Kinerja Urusan Penanaman Modal.....	II-175
Tabel 2.185.	Capaian Kinerja Urusan Kebudayaan	II-176
Tabel 2.186.	Capaian Kinerja Urusan Pemuda dan Olahraga.....	II-177
Tabel 2.187.	Capaian Kinerja Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	II-178
Tabel 2.188.	Capaian Kinerja Urusan Ketahanan Pangan.....	II-179
Tabel 2.189.	Capaian Kinerja Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	II-180
Tabel 2.190.	Capaian Kinerja Urusan Statistik	II-180
Tabel 2.191.	Capaian Kinerja Urusan Kearsipan.....	II-181
Tabel 2.192.	Capaian Kinerja Urusan Komunikasi dan Informatika ...	II-181
Tabel 2.193.	Capaian Kinerja Urusan Perpustakaan.....	II-182
Tabel 2.194.	Capaian Kinerja Urusan Pertanian	II-182
Tabel 2.195.	Capaian Kinerja Urusan Kehutanan	II-184
Tabel 2.196.	Capaian Kinerja Urusan Energi dan Sumberdaya Mineral	II-185
Tabel 2.197.	Capaian Kinerja Urusan Pariwisata	II-185
Tabel 2.198.	Capaian kinerja Urusan Kelautan dan Perikanan	II-186
Tabel 2.199.	Capaian kinerja Urusan Perdagangan.....	II-186
Tabel 2.200.	Capaian Kinerja Urusan Perindustrian	II-188

Tabel 2.201.	Capaian Kinerja Urusan Perencanaan Pembangunan.....	II-188
Tabel 2.202.	Capaian Kinerja Urusan Keuangan.....	II-189
Tabel 3.1.	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Magelang Tahun 2015 – 2019.....	III-3
Tabel 3.2.	Kontribusi sektor dalam PDRB Tahun 2015-2019	III-4
Tabel 3.3.	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Perkapita Kabupaten Magelang Tahun 2015 – 2019.....	III-5
Tabel 3.4.	Pertumbuhan ekonomi menurut lapangan usaha Kabupaten Magelang Tahun 2015– 2019.....	III-6
Tabel 3.5.	Target indikator makro ekonomi Tahun 2021	III-8
Tabel 3.6.	Realisasi Pendapatan Tahun 2018, Tahun 2019 dan Target Tahun 2020 dan Proyeksi Tahun 2021	III-10
Tabel 3.7.	Realisasi Belanja Tahun 2018 dan Tahun 2019, Proyeksi Tahun 2020 dan 2021	III-16
Tabel 3.8.	Realisasi Pembiayaan Tahun 2018, Target Tahun 2019 dan Target Tahun 2020 dan Proyeksi Tahun 2021	III-17
Tabel 3.9.	Realisasi APBD Tahun 2018 dan Tahun 2019, Target Tahun 2020 dan Proyeksi Tahun 2021	III-18
Tabel 4.1.	Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran serta Target Tahun 2021.....	IV-4
Tabel 4.2.	Usulan Program /Kegiatan Prioritas Nasional di Kabupaten Magelang	IV-8
Tabel 4.3.	Keselarasan Prioritas Pembangunan Kabupaten Magelang, Provinsi dan Nasional	IV-29
Tabel 4.4.	Keselarasan Indikator Pembangunan Makro Kabupaten Magelang, Jawa Tengah dan Pembangunan Nasional Tahun 2021 (pasca Covid-19).....	IV-32
Tabel 4.5.	Dukungan Kesiapan Pemerintah Kabupaten Magelang Terhadap Implementasi Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019.....	IV-34
Tabel 5.1.	Rencana Pengembangan Wilayah Kabupaten Magelang Tahun 2021.....	V-15
Tabel 5.2.	Kesesuaian RTRW dalam Percepatan Pembangunan Ekonomi di Kabupaten Magelang.....	V-24
Tabel 6.1.	Kerangka Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2021	VI-1
Tabel 6.2.	Tabel Implementasi Prioritas Pembangunan dan Program Unggulan.....	VI-24
Tabel 6.3.	Rencana Program Prioritas Kabupaten Magelang Tahun 2021	VI-54
Tabel 7.1.	Indikator Kinerja Utama Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2021	VII-1
Tabel 7.2.	Indikator Sasaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2021	VII-3

Tabel 7.3.	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2021	VII-6
Tabel 7.4.	Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Magelang Tahun 2021.....	VII-26
Tabel 7.5.	Indikator Kinerja Program Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2021.....	VII-36

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1.	Hubungan Dokumen RKPD dengan Dokumen Perencanaan yang lainnya	I-5
Gambar 2.1.	Peta Administrasi Kabupaten Magelang	II-1
Gambar 2.2.	Peta Sebaran Bahan Tambang di Kabupaten Magelang	II-3
Gambar 2.3.	Peta Rawan Bencana di Kabupaten Magelang	II-12
Gambar 2.4.	Persebaran Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Magelang Tahun 2019	II-16
Gambar 2.5.	Rasio Jenis Kelamin Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Magelang Tahun 2019	II-19
Gambar 2.6.	Piramida Penduduk Menurut Kelompok Umur di Kabupaten Magelang Tahun 2019	II-20
Gambar 2.7.	Jumlah Penduduk Menurut Pendidikan yang ditamatkan di Kabupaten Magelang Tahun 2019.....	II-22
Gambar 2.8.	Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Magelang, Prov. Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2015-2019	II-23
Gambar 2.9.	Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota se Eks Karesidenan Kedu Tahun 2015-2019	II-24
Gambar 2.10.	PDRB Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2010 Kabupaten/Kota se Eks Karesidenan Kedu Tahun 2019	II-26
Gambar 2.11.	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten/ Kota se Eks Karesidenan Kedu Tahun 2019	II-28
Gambar 2.12.	Inflasi kabupaten/kota se eks Karesidenan Kedu Tahun 2015-2019	II-33
Gambar 2.13.	PDRB Perkapita (ADHK dan ADHB) Kabupaten Magelang Tahun 2015-2019	II-33
Gambar 2.14.	PDRB Perkapita kabupaten/kota se eks Karesidenan Kedu Tahun 2017	II-34
Gambar 2.15.	Perbandingan Capaian Persentase Kemiskinan Kab. Magelang, Provinsi dan Nasional 2015-2019.....	II-37
Gambar 2.16.	Perbandingan Capaian Persentase Kemiskinan Kab. Magelang dengan Kota/ Kabupaten se Eks. Karesidenan Kedu 2015-2019.....	II-38
Gambar 2.17.	Harapan Lama Sekolah Kabupaten Magelang, Provinsi dan Nasional Tahun 2014-2018	II-41
Gambar 2.18.	Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Magelang, Provinsi dan Nasional Tahun 2014-2018	II-41
Gambar 2.19.	Persentase Pengeluaran Perkapita Komoditas Non Makanan Menurut Golongan Pengeluaran (Rp/kapita) ...	II-47
Gambar 2.20.	Jumlah Kasus Kematian Ibu di Kabupaten Magelang Tahun 2015-2019	II-70
Gambar 2.21.	Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 Kelahiran Hidup Kabupaten Magelang Tahun 2015-2019	II-71

Gambar 2.22.	Prevalensi Kasus Stunting di Kab. Magelang Tahun 2015-2017	II-73
Gambar 2.23.	Angka Kesakitan Kab. Magelang Tahun 2015-2019	II-76
Gambar 2.24.	Peta Sistem Jaringan Jalan di Kabupaten Magelang.....	II-79
Gambar 2.25.	Perbandingan TPT Kabupaten/kota di Karesidenan Kedu dan Prov. Jateng tahun 2014-2019.....	II-95
Gambar 2.26.	Perkembangan Persentase Penduduk Bekerja Menurut Lapangan Usaha Tahun 2018–2019	II-97
Gambar 2.27.	Perkembangan Persentase Penduduk Bekerja Menurut Status Pekerjaan Tahun 2015 – 2019	II-97
Gambar 2.28.	Ketersediaan Pangan Utama (Kg/jiwa/Tahun) Kabupaten Magelang Tahun 2014 – 2018	II-101
Gambar 2.29.	Skor Pola Pangan Harapan Konsumsi Kabupaten Magelang Tahun 2014-2018	II-102
Gambar 2.30.	Stabilitas Harga Pangan Kabupaten Magelang Tahun 2014-2018.....	II-102
Gambar 2.31.	Peta Sebaran Jasa Ekosistem Penyedia Pangan (JEP 1).....	II-104
Gambar 2.32.	Presentase Jasa Ekosistem Penyedia Pangan (JEP 1).....	II-104
Gambar 2.33.	Produksi Ikan Konsumsi (Ton) di Kabupaten Magelang Tahun 2014-2018	II-127
Gambar 2.34.	Produksi Benih Ikan (Juta ekor) di Kabupaten Magelang Tahun 2014-2019	II-127
Gambar 2.35.	Konsumsi Ikan di Kabupaten Magelang Tahun 2014-2018	II-128
Gambar 2.36.	Kontribusi Sub Sektor Perikanan terhadap PDRB ADHK Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan Kabupaten Magelang Tahun 2014-2017	II-129
Gambar 2.37.	Produktivitas Tanaman Bahan Makanan Utama (Ton/Ha) Kabupaten Magelang Tahun 2014-2018	II-131
Gambar 2.38.	Total Produksi Tanaman Bahan Makanan Utama Kabupaten Magelang Tahun 2014-2018 (Ton).....	II-132
Gambar 2.39.	Luas Panen Tanaman Bahan Makanan Utama di Kabupaten Magelang Tahun 2014-2018	II-133
Gambar 2.40.	Total Produksi Sayur-sayuran (Kwintal) di Kabupaten Magelang Tahun 2014-2018	II-133
Gambar 2.41.	Perkembangan Produksi Buah-Buahan (Kuintal) Kabupaten Magelang Tahun 2014-2018	II-134
Gambar 2.42.	Total Produksi Tanaman Perkebunan (Ton) Kabupaten Magelang Tahun 2014-2018	II-135
Gambar 2.43.	Total Populasi Ternak (Ekor) Kabupaten Magelang Tahun 2014-2018.....	II-135
Gambar 2.44.	Perkembangan Produksi Ternak (kg) Kabupaten Magelang Tahun 2014-2018	II-136

Gambar 2.45.	Perkembangan Populasi Ternak Unggas (Ekor) Kabupaten Magelang Tahun 2014-2018	II-137
Gambar 2.46.	Perkembangan Produksi Daging Ternak Kabupaten Magelang Tahun 2014-2018	II-137
Gambar 2.47.	Perkembangan Produksi Susu Sapi Perah Kabupaten Magelang Tahun 2014-2018	II-138
Gambar 2.48.	Perkembangan kasus COVID 19 di Kabupaten Magelang sampai tanggal 5 Mei 2020	II-154
Gambar 2.49.	Perkembangan jumlah PDP dan terkonfirmasi COVID 19 di Kabupaten Magelang sampai tanggal 5 Mei 2020	II-155
Gambar 2.50.	Sebaran kasus COVID 19 di Kabupaten Magelang sampai tanggal 5 Mei 2020	II-155
Gambar 3.1	Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Magelang 2015-2019.....	III-6
Gambar 3.2	Grafik laju inflasi Tahun 2019 menurut Kelompok Pengeluaran.....	III-7
Gambar 4.1	Tema, Prioritas, dan Fokus Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021	IV-15
Gambar 4.2	Konsep Kebijakan Pemulihan Dampak Covid-19 di Jawa Tengah Tahun 2021.....	IV-16
Gambar 4.3	Prioritas Daerah 1 Kabupaten Magelang Tahun 2021	IV-20
Gambar 4.4	Prioritas Daerah 4 Kabupaten Magelang Tahun 2021	IV-23
Gambar 4.5	Prioritas Daerah 5 Kabupaten Magelang Tahun 2021	IV-24
Gambar 4.6	Prioritas Daerah 10 Kabupaten Magelang Tahun 2021 ..	IV-27
Gambar 5.1.	Peta Struktur Ruang Wilayah Kabupaten Magelang.....	V-5
Gambar 5.2.	Peta Pola Ruang Wilayah Kabupaten Magelang.....	V-6
Gambar 5.3.	Fokus Pembangunan Tahunan Kabupaten Magelang alam RPJMD Tahun 2020-2024.....	V-14

LAMPIRAN:
PERATURAN BUPATI MAGELANG
NOMOR 45 TAHUN 2020
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH
DAERAH KABUPATEN MAGELANG
TAHUN 2021

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Magelang Tahun 2021 merupakan dokumen yang disusun berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Pemendagri) Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

RKPD Kabupaten Magelang Tahun 2021 merupakan penjabaran dari Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024, yang dalam penyusunannya memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPD) Kabupaten Magelang Tahun 2005-2025, diselaraskan dengan RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2021 serta memperhatikan berbagai dokumen perencanaan pembangunan sektoral nasional maupun daerah termasuk peraturan perundangan mengenai SPM dan Agenda Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/ *Sustainable Development Goals* (SDGs). Selanjutnya RKPD Kabupaten Magelang Tahun 2021 ini akan menjadi pedoman dalam menyusun Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA), dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2021, dan sebagai dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Magelang Tahun 2021.

Tahun 2021 merupakan tahun kedua pelaksanaan RPJMD Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024 dengan fokus pembangunan pada peningkatan kesejahteraan melalui pemerataan infrastruktur publik, yang mempunyai arah kebijakan meningkatkan keterjangkauan dan pemerataan pendidikan, pelayanan kesehatan, ketersediaan Prasarana Sarana Utilitas (PSU) perumahan dan permukiman, kuantitas atraksi pariwisata, sarana dan prasarana pertanian, infrastruktur jaringan jalan, layanan air minum dan sanitasi, infrastruktur sumber daya air serta pengamanan dan keselamatan lalu lintas. Sehingga tahun perencanaan kedua ini menjadi tahapan penting

untuk memantapkan langkah Kabupaten Magelang dalam mencapai target pembangunan jangka menengah.

RKPD Kabupaten Magelang Tahun 2021 disusun melalui pendekatan *top down, bottom up*, partisipatif, politik, teknokratik serta berorientasi secara Tematik, Holistik, Integratif dan Spasial (THIS) serta dalam penyusunannya melalui tahapan: persiapan penyusunan RKPD, penyusunan rancangan awal RKPD, penyusunan Rancangan RKPD, pelaksanaan musrenbang RKPD, perumusan rancangan akhir RKPD dan penetapan RKPD.

Proses penyusunan dokumen RKPD Kabupaten Magelang Tahun 2021 melalui serangkaian kegiatan meliputi : (1) Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal RKPD Tahun 2021; (2) Musrenbang Kelurahan; (3) Musrenbang Kecamatan; (4) Rapat Teknis antara Kecamatan dengan Perangkat Daerah yang menangani teknis; (5) Forum Perangkat Daerah; (6) Forum Rumpun Perangkat Daerah; (7) Musrenbang Kabupaten; (8) Fasilitasi RKPD oleh Gubernur; dan (9) Penetapan RKPD.

Pada tahun 2020 dunia mengalami bencana pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19). Penyebaran Covid-19 telah membawa resiko bagi kesehatan masyarakat dan aktivitas ekonomi masyarakat. Salah satu dampak pandemi ini menyebabkan berkurangnya pembiayaan pembangunan tahun 2020 akibat pengalihan pembiayaan untuk penanganan Covid-19. Diperkirakan akibat pandemi ini juga akan berpengaruh pada kondisi ekonomi tahun 2021. Sehingga pemulihan ekonomi setelah Covid-19 menjadi bagian penting dalam kerangka pembangunan tahun 2021.

RKPD Kabupaten Magelang Tahun 2021 ini menjadi pedoman dalam melaksanakan prioritas pembangunan daerah untuk pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024 serta upaya untuk pemulihan dan kebangkitan ekonomi daerah setelah pandemi Covid-19.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Penyusunan RKPD Kabupaten Magelang Tahun 2021 mendasarkan pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

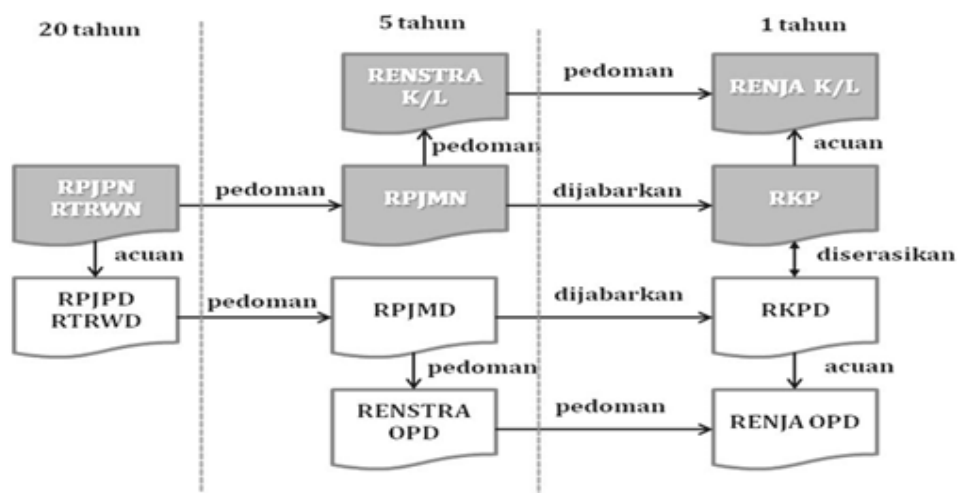
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1982 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang dari wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang ke Kecamatan Mungkid di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 36);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4697);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
19. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87);
20. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Borobudur dan sekitarnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58);
21. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Taman Nasional Gunung Merapi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 160);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 590);
25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 1 Seri E Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
26. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-

- 2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 121);
27. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 110);
 28. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2008 Nomor 7);
 29. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2009 Nomor 1);
 30. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Magelang 2010-2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2011 Nomor 5);
 31. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2016 Nomor 19).
 32. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019 Nomor 5);

1.3. Hubungan antar Dokumen

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa RKPD merupakan penjabaran dari RPJMD yang berpedoman pada RPJPD. Selanjutnya RKPD menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah untuk menyusun Renja Perangkat Daerah. Hubungan RKPD dengan dokumen perencanaan lainnya dapat dilihat pada Gambar 1.1.



Gambar 1 .1.

Hubungan Dokumen RKPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

Adanya keselarasan sistem perencanaan dan sistem penganggaran, maka RKPD harus dijadikan sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan APBD. Oleh karena itu dalam penyusunan RKPD, perlu dilakukan secara rinci dengan prioritas utama pada penetapan program dan kegiatan. Penetapan program dan kegiatan mencakup indikator dan target kinerja, serta perkiraan kebutuhan anggaran untuk mendukung pelaksanaan masing-masing program dan kegiatan.

1.4. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan RKPD Kabupaten Magelang Tahun 2021 adalah untuk menentukan arah kebijakan pembangunan daerah tahunan dan mewujudkan sinergitas rencana program dan kegiatan prioritas pembangunan daerah Tahun 2021.

Tujuan penyusunan RKPD ini adalah :

1. Memberikan landasan operasional bagi seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Magelang dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2021;
2. Menjadi alat untuk menjamin keterkaitan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan;
3. Sebagai petunjuk operasional bagi penyelenggaraan pembangunan Kabupaten Magelang pada tahun anggaran 2021.

1.5. Sistematika Penyusunan RKPD

RKPD Kabupaten Magelang Tahun 2021 disusun dengan sistematika :

BAB I PENDAHULUAN

Memuat latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen, maksud dan tujuan serta sistematika RKPD.

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Memuat kondisi umum kondisi daerah yang terdiri dari aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek daya saing daerah, aspek pelayanan umum, pandemi Covid-19, evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD Tahun 2019 dan realisasi RPJMD Kabupaten Magelang Tahun 2014-2019, serta permasalahan pembangunan daerah.

BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

Memuat tentang arah kebijakan ekonomi daerah yang terdiri atas kondisi ekonomi daerah tahun 2019, tantangan dan prospek perekonomian daerah, serta arah kebijakan keuangan daerah yang terdiri atas arah kebijakan pendapatan daerah, arah kebijakan belanja daerah serta arah kebijakan pembiayaan daerah.

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Mengemukakan secara eksplisit tujuan dan sasaran pembangunan, prioritas dan sasaran pembangunan daerah, inovasi daerah dan pokok-pokok pikiran DPRD.

**BAB V KEBIJAKAN PENGEMBANGAN WILAYAH KABUPATEN
MAGELANG**

Mengemukakan secara eksplisit kebijakan umum pengembangan wilayah Kabupaten Magelang, perwujudan struktur ruang dan pola ruang, arah pengembangan wilayah Kabupaten Magelang tahun 2021 dan kesesuaian RTRW dalam percepatan pembangunan ekonomi di Kabupaten Magelang.

BAB VI RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Memuat secara eksplisit rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, kedudukan tahun rencana (RKPD) dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Memuat indikator utama daerah tahun 2021, Indikator Kinerja utama Perangkat Daerah (IKU PD), Indikator Kinerja Daerah dan Indikator Kinerja Program Prioritas Pembangunan.

BAB VIII PENUTUP

Memuat arahan pelaksanaan RKPD Kabupaten Magelang Tahun 2021.

BAB II

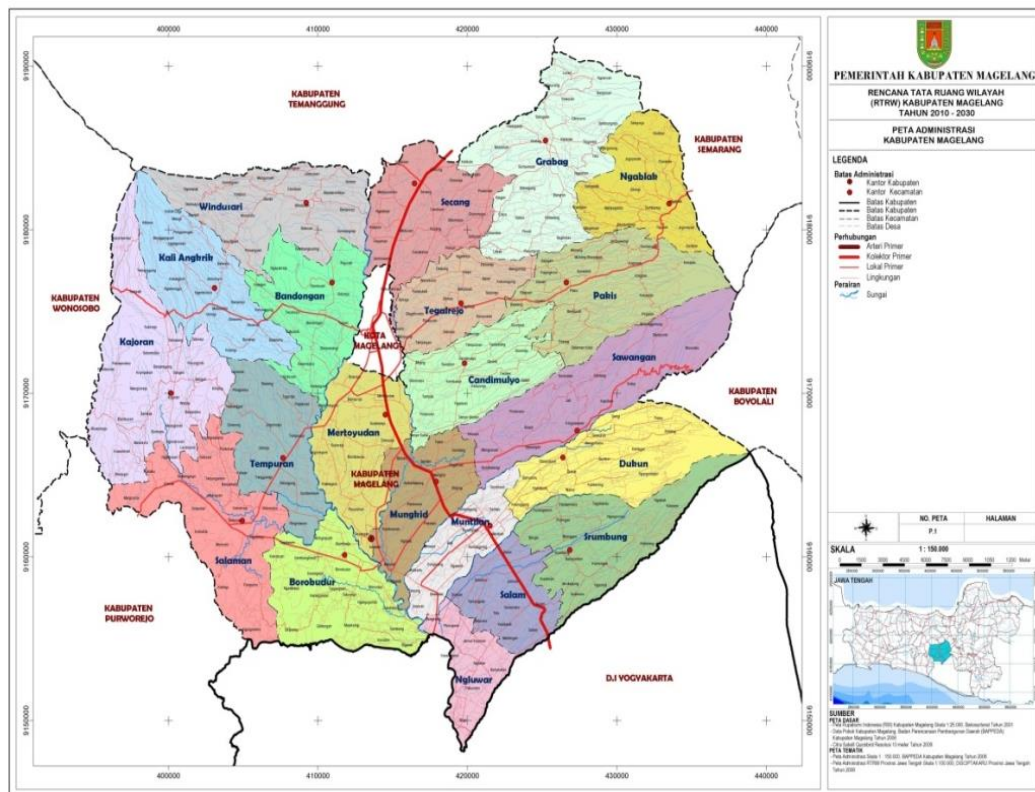
GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1 Aspek Geografi dan Demografi

2.1.1 Kondisi Geografis dan Administrasi

Kabupaten Magelang dengan ibukota di Kota Mungkid, termasuk dalam wilayah administrasi Provinsi Jawa Tengah dengan luas wilayah menurut BPS seluas 108.573 hektar atau sekitar 3,34 % dari luas Provinsi Jawa Tengah. Berdasarkan pemetaan yang digunakan dalam penyusunan revisi RTRW Kabupaten Magelang, luas wilayah Kabupaten Magelang kurang lebih adalah 113.034,84 hektar. Secara geografis, Kabupaten Magelang terletak pada posisi antara 110°01' 51" – 110°26'58" Bujur Timur dan 7°19'13" – 7°42'16" Lintang Selatan, dengan batas-batas Kabupaten Magelang sebagai berikut.

- Sebelah utara : Kabupaten Temanggung dan Kabupaten Semarang
- Sebelah timur : Kabupaten Semarang dan Kabupaten Boyolali
- Sebelah selatan : Kabupaten Purworejo dan Daerah Istimewa Yogyakarta
- Sebelah barat : Kabupaten Temanggung dan Kabupaten Wonosobo
- Bagian tengah : Kota Magelang



Sumber: RTRW Kabupaten Magelang Tahun 2010-2030

Gambar 2.1

Peta Administrasi Kabupaten Magelang

Letak Kabupaten Magelang yang strategis dapat dilihat dari posisinya, yaitu di antara dua kota besar, Kota Yogyakarta dan Kota Semarang. Selain itu, letak strategis Kabupaten Magelang juga dapat dilihat dari posisinya yang

berada di antara jalur pantura dengan jalur selatan-selatan, jalur utara-selatan dan di tengah Provinsi Jawa Tengah. Kabupaten Magelang juga berada di antara perlintasan jalur ekonomi, yaitu Semarang-Magelang-Purwokerto dan Semarang-Magelang-Yogyakarta-Solo, sehingga memudahkan aksesibilitas, mendorong perkembangan ekonomi dan pertumbuhan wilayah Kabupaten Magelang.

Berikut tabel mengenai luas masing-masing kecamatan, jumlah desa, dan kelurahan serta jarak kecamatan ke ibukota kabupaten di Kabupaten Magelang.

Tabel 2.1
Luas Kecamatan, Jumlah Desa dan Kelurahan,
serta Jarak dari Ibukota Kabupaten ke Kecamatan
di Kabupaten Magelang Tahun 2018

No.	Kecamatan	Jumlah Desa	Jumlah Kelurahan	Luas Wilayah (Km ²)	Persentase (%)	Jarak ke Ibukota Kabupaten
1	Salaman	20	-	68,87	6,34	15
2	Borobudur	20	-	54,55	5,02	4
3	Ngluwar	8	-	22,44	2,07	22
4	Salam	12	-	31,63	2,91	19
5	Srumbung	17	-	53,18	4,90	19
6	Dukun	15	-	53,40	4,92	21
7	Muntilan	13	1	28,61	2,64	17
8	Mungkid	14	2	37,40	3,44	7
9	Sawangan	15	-	72,37	6,67	15
10	Candimulyo	19	-	46,95	4,32	17
11	Mertoyudan	12	1	45,35	4,18	6
12	Tempuran	15	-	49,04	4,52	8
13	Kajoran	29	-	83,41	7,68	31
14	Kaliangkrik	20	-	57,34	5,28	34
15	Bandongan	14	-	45,79	4,22	20
16	Windusari	20	-	61,65	5,68	25
17	Secang	19	1	47,34	4,36	22
18	Tegalrejo	21	-	35,89	3,31	22
19	Pakis	20	-	69,56	6,41	29
20	Grabag	28	-	77,16	7,11	33
21	Ngablak	16	-	43,80	4,03	37
	Jumlah	367	5	1.085,73		

Sumber : Kabupaten Magelang Dalam Angka Tahun 2018

2.1.2 Topografi

Wilayah Kabupaten Magelang secara topografis sangat beragam dari dataran rendah sampai dengan dataran tinggi. Daerah yang bertopografi datar seluas 8.599 ha, bergelombang seluas 44.784 ha, topografi curam seluas 41.037 ha, dan sangat curam seluas 14.155 ha. Ketinggian wilayah antara 153-3.065 meter di atas permukaan laut. Ketinggian rata-rata 360 meter di atas permukaan laut. Kelerengan lahan dapat dilihat pada tabel berikut.

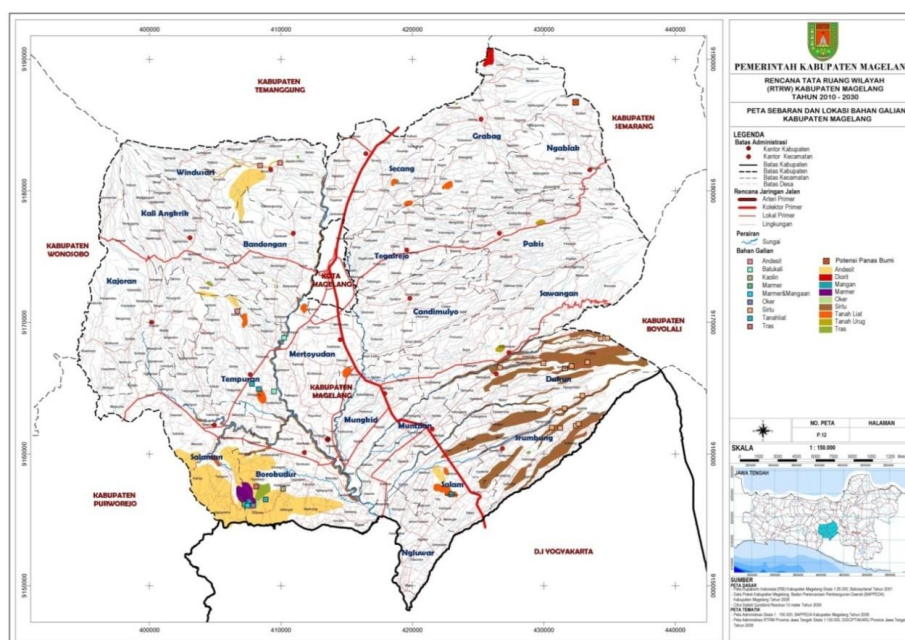
Tabel 2.2
Kelerengan Lahan di Kabupaten Magelang

No.	Kemiringan	Klasifikasi	Wilayah
1	0 - 2%	Datar	Kecamatan Mertoyudan, Secang, Windusari, Sawangan, dan Salaman ($\pm 1,5\%$ dari luas wilayah)
2	2 - 15%	Bergelombang sampai berombak	Sebagian besar kecamatan (17 kecamatan) atau 55% dari seluruh wilayah
3	15 - 40%	Bergelombang sampai berbukit	Kecamatan Windusari, Kaliangkrik, Kajoran, Srumbung, sebagian Ngablak, Pakis, Sawangan, dan sedikit di Kecamatan Dukun (meliputi 25,5% dari seluruh wilayah)
4.	> 40%	Berbukit sampai bergunung gunung	Kecamatan Windusari, Kaliangkrik, Srumbung, Ngablak, Pakis, Sawangan, dan Dukun (18% dari luas wilayah)

Sumber : RTRW Kabupaten Magelang Tahun 2010-2030

2.1.3 Geologi

Kabupaten Magelang di bagian barat daya (Kecamatan Salaman dan Borobudur bagian selatan) tersusun dari batuan breksi, andesit, dasit, tufa lapili, aglomerat, dan lava andesit yang merupakan bagian dari formasi andesit tua. Batuan dari gunung berapi yang ada di sekeliling wilayah ini merupakan unsur batuan yang membentuk Dataran Magelang berupa tanah endapan alluvial yang subur. Sementara itu, Kabupaten Magelang bagian tengah merupakan tanah endapan/alluvial yang merupakan lapukan dari batuan induknya. Sedangkan di lereng dan kaki gunung merupakan tanah endapan vulkanis.



Sumber : RTRW Kabupaten Magelang Tahun 2010-2030

Gambar 2.2
Peta Sebaran Bahan Tambang di Kabupaten Magelang

Secara fisik, Kabupaten Magelang yang berbentuk cekungan (basin) dan dikelilingi oleh Gunung Sumbing, Gunung Merapi, Gunung Merbabu, Gunung Andong, Gunung Telomoyo dan Pegunungan Menoreh memberikan manfaat positif bagi Kabupaten Magelang, seperti berlimpahnya bahan galian tambang golongan B dan C. Bahan tambang galian B dan C tersebut banyak tersebar di seluruh Kabupaten Magelang. Jenis bahan tambang yang jumlahnya relatif banyak adalah pasir batu dan marmer.

2.1.4 Hidrologi

Kabupaten Magelang memiliki curah hujan tinggi dan sumber air yang dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan pertanian, rumah tangga, dan industri serta kebutuhan lainnya. Wilayah Kabupaten Magelang terletak pada Daerah Aliran Sungai (DAS) Progo dan Bogowonto. DAS Progo bagian hulu terdapat sungai yang cukup besar, yaitu Sungai Progo. DAS Progo ini meliputi wilayah di Kecamatan Windusari, Secang, Bandongan, Mertoyudan, Tempuran, Borobudur, Mungkid, Tegalrejo, Muntilan, Salam, Ngluwar, Grabag, Sawangan, Dukun, dan Srumbung. Sedangkan DAS Bogowonto berada di sebagian kecil wilayah Kecamatan Salaman dan Kajoran.

- a. Air permukaan yaitu air yang mengalir di sungai-sungai, baik sungai besar maupun sungai kecil. Sungai besar yang ada di Kabupaten Magelang adalah Sungai Progo.
- b. Air tanah, di Kabupaten Magelang air tanah berdasarkan hidrologi dapat dibedakan menjadi 2 (dua) mandala air tanah, yaitu:
 - 1) Mandala air tanah gunung api strato, air tanah jenis ini terletak di antara puncak sampai lereng Gunung Api Merbabu, Merapi, dan Sumbing.
 - 2) Mandala air tanah antar pegunungan, air tanah jenis ini berada di antara Gunung Api Merbabu, Merapi, dan Sumbing yang terletak di ketinggian berkisar antara 300-500 m di atas permukaan laut. Air tanah di daerah ini tersedia cukup banyak dengan produktivitas aquifer yang tinggi dan muka air tanah ini cukup dangkal (<10 m) dan debit sumur mencapai 4 liter/detik.

Posisi Kabupaten Magelang yang terletak di hulu DAS Progo dan dikelilingi oleh 3 (tiga) gunung api yang menyebabkan Kabupaten Magelang kaya akan mata air. Berdasarkan Penyusunan Profiling Mata Air tahun 2018 yang dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup, Kabupaten Magelang menunjukkan bahwa terdapat 223 sumber mata air, yang mana 55 mata air merupakan sumber mata air baru yang berhasil diidentifikasi. Berdasarkan pengukuran dilakukan antara bulan Mei sampai dengan Agustus 2018, dari 223 mata air, terdapat 13 mata air diidentifikasi mati dan 5 mata air tidak ada limpasan, sehingga mata air yang memiliki debit sebanyak 205 mata air dengan total debit dari hasil perhitungan sebesar 8.173,28 liter/detik. Debit tersebut jika dikonversi dalam setahun, maka memiliki potensi air mencapai 257.752.602 m³/tahun.

Selain itu, ketiga gunung api yang ada di Kabupaten Magelang dengan kondisi fisiknya yang spesifik merupakan *recharge area* bagi DAS Kabupaten Magelang. Mata air yang bermunculan di kaki Gunung Merapi, Merbabu, dan Sumbing tersebut merupakan *discharge area*. Berdasarkan kondisi tersebut, maka dapat dikatakan bahwa *recharge area* dan *discharge area* di Kabupaten Magelang berada dalam satu wilayah administrasi. Hal tersebut akan mempermudah pengelolaan lingkungan utamanya dalam pengelolaan sumber daya air, sehingga akan terwujud tata kelola lingkungan yang lebih baik.

2.1.5 Klimatologi

Suhu rata-rata di Kabupaten Magelang adalah 25,62°C dengan kelembaban udara 82%. Curah hujan rata-rata 3.922 mm/tahun dengan jumlah hari hujan 189 hari dan kecepatan angin 1,8 knot.

Curah hujan merupakan salah satu sumber daya air yang mempengaruhi besaran debit mata air. Berdasarkan data BPS Kabupaten Magelang Tahun 2018, curah hujan pada tahun 2017 berkisar antara 0 - 506 mm/bulan. Hal tersebut menunjukkan bahwa Kabupaten Magelang mempunyai curah hujan yang tinggi.

Berdasarkan klasifikasi iklim menurut Schmidt Ferguson, Mohr maupun Oldeman, Kabupaten Magelang sebagian besar bertipe iklim basah. Suatu bulan disebut bulan kering, jika dalam satu bulan terjadi curah hujan kurang dari 60 mm. Disebut bulan basah, jika dalam satu bulan curah hujannya lebih dari 100 mm.

Bulan basah dan bulan kering dikaitkan dengan kegiatan pertanian di daerah tertentu, sehingga penggolongan iklimnya disebut juga zona agroklimat. Dengan jumlah curah hujan sebesar 200 mm tiap bulan dipandang cukup untuk membudidayakan padi sawah. Dan untuk budi daya palawija, jumlah curah hujan minimal yang diperlukan adalah 100 mm tiap bulan.

2.1.6 Penggunaan Lahan

Penggunaan lahan di Kabupaten Magelang terdiri atas lahan sawah, lahan kering dan lahan bukan pertanian. Pada tahun 2019 terdapat pengurangan luasan lahan sawah dari 36.681 hektar pada tahun 2018 menjadi 27.899 hektar, untuk lahan bukan pertanian terjadi penambahan luasan dari 22.398 hektar pada tahun 2018 menjadi 25.302 hektar pada tahun 2019.

Perkembangan penggunaan lahan di Kabupaten Magelang tahun 2015-2019 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.3

Penggunaan Lahan di Kabupaten Magelang Tahun 2015-2019 (Ha)

No.	Penggunaan Lahan	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
A	Lahan sawah					
1	Irigasi	27.898	27.653	27.732	27.732	22.911
2	Tadah hujan	8.964	9.202	8.949	8.949	4.988

No.	Penggunaan Lahan	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
	Jumlah	36.862	36.855	36.681	36.681	27.899
B	Lahan kering					
1	Tegal kebun	32.100	31.904	31.813	31.813	37.462
2	Perkebunan	399	2.219	2.317	2.317	2.725
3	Hutan rakyat	6.919	5.611	5.609	5.609	5.467
4	Padang rumput	2	2	2	2	2
5	Sementara tidak ditanami	107	7	7	7	9
6	Lainnya (kolam/empang/hutan negara)	10.016	9.807	9.746	9.746	3.207
7	Hutan Negara	-	-	-	-	6.500
	Jumlah	49.543	49.550	49.494	49.494	55.372
	Total lahan pertanian (A+B)	86.405	86.405	86.175	86.175	83.271
C	Lahan bukan pertanian					
1	(Jalan, permukiman, perkantorang, sungai, dll)	22.168	22.168	22.398	22.398	25.302
	TOTAL (A+B+C)	108.573	108.573	108.573	108.573	108.573

Sumber : Kabupaten Magelang Dalam Angka Tahun 2016 – 2020

Variasi penggunaan lahan di Kabupaten Magelang merupakan salah satu potensi sumber daya lahan. Data menunjukkan bahwa penggunaan lahan terluas adalah lahan pertanian. Oleh karena itu, sektor pertanian dijadikan unggulan karena adanya daya dukung potensi/ketersediaan lahan.

Berdasarkan hasil penghitungan KLHS RPJMD Kabupaten Magelang 2019-2024, daya dukung lahan terbangun di Kabupaten Magelang masuk dalam kategori daya dukung lahan bersyarat atau sedang dengan nilai 2,96. Dengan demikian, Kabupaten Magelang masih memiliki daya tampung bangunan yang relatif baik untuk pengembangan, namun ke depannya harus tetap memperhatikan karakteristik Kabupaten Magelang. Jika dilihat pada setiap kecamatan di Kabupaten Magelang, tidak ada kecamatan yang berada pada kategori terlampaui atau buruk. Kategori bersyarat/sedang terdapat di 12 kecamatan, yaitu di Kecamatan Borobudur, Kecamatan Candimulyo, Kecamatan Mertoyudan, Kecamatan Mungkid, Kecamatan Muntilan, Kecamatan Ngluwar, Kecamatan Salam, Kecamatan Salaman, Kecamatan Secang, Kecamatan Srumbung, Kecamatan Tegalrejo, dan Kecamatan Tempuran. Sedangkan dan kategori baik terdapat di 9 kecamatan, yaitu Kecamatan Bandongan, Kecamatan Dukun, Kecamatan Grabag, Kecamatan Kajoran, Kecamatan Kaliangkrik, Kecamatan Ngablak, Kecamatan Pakis, Kecamatan Sawangan dan Kecamatan Windusari.

Untuk mengetahui sejauh mana fungsi lindung di Kabupaten Magelang, maka perlu dilihat daya dukung fungsi lindung.

Tabel 2.4

Perhitungan Luas Guna Lahan Fungsi Lindung Kabupaten Magelang 2017

Penggunaan Lahan	Luas (Ha)	Luas (%)	Ci	$\sum (ci \times Ai)$
Cagar Budaya	102,24	0,09%	0,18	18,40
Danau	1,56	0,00%	0,98	1,53
Hutan Lindung	1.363,57	1,21%	1	1.363,57

Penggunaan Lahan	Luas (Ha)	Luas (%)	Ci	$\sum (ci \times Ai)$
Hutan Produksi Terbatas	1.792,44	1,59%	0,68	1.218,86
Hutan Produksi Tetap	2.049,51	1,81%	0,68	1.393,67
Industri	152,52	0,13%	0,18	27,45
Kebun Campur	43.060,87	38,10%	0,54	23.252,87
Kolam	16,60	0,01%	0,98	16,27
Lahan Terbuka	221,57	0,20%	0,21	46,53
Permukiman	18.912,56	16,73%	0,18	3.404,26
Rumput	0,22	0,00%	0,28	0,06
Sawah	28.688,43	25,38%	0,46	13.196,68
Taman Nasional	4.406,78	3,90%	1	4.406,78
Tegalan	11.310,22	10,01%	0,21	2.375,15
Tubuh Air	955,75	0,85%	0,98	936,64
Total	113.034,84	100%	0,46	51.658,71

Sumber: KLHS RPJMD 2019-2024

Berdasarkan tabel perhitungan di atas, maka daya dukung fungsi lindung Kabupaten Magelang memiliki koefisien 0,46 berada dalam kategori sedang. Luas lahan kebun memberikan kontribusi besar dalam daya dukung lindung yang tinggi, sementara permukiman dan lahan terbangun lainnya menyebabkan daya dukung lindung menjadi kecil.

Untuk hutan rakyat, luasannya selalu mengalami perubahan setiap tahunnya selama tahun 2014-2017. Secara implisit, penambahan luas hutan rakyat di Kabupaten Magelang menunjukkan bahwa sumber daya hutan di Kabupaten Magelang merupakan salah satu potensi ekonomi dan juga mengurangi dampak bahaya bencana alam yang sering terjadi di Kabupaten Magelang seperti bencana gerakan tanah.

2.1.7 Potensi Pengembangan Wilayah

Berdasarkan karakteristik wilayah, dapat diidentifikasi potensi pengembangan wilayah Kabupaten Magelang untuk dikembangkan sebagai kawasan budidaya sesuai dengan RTRW Kabupaten Magelang 2010-2030.

Tabel 2.5

Potensi Pengembangan Wilayah Kabupaten Magelang
Berdasarkan RTRW Kabupaten Magelang

No.	Kawasan Budidaya	Lokasi
1	Kawasan peruntukan hutan produksi	
1.a.	Hutan produksi terbatas	Kecamatan Bandongan, Grabag, Kaliangkrik, Kajoran, Ngablak, dan Windusari
1.b.	Hutan produksi tetap	Kecamatan Bandongan, Grabag, Kajoran, Kaliangkrik, Ngablak, Salaman, Tempuran, dan Windusari
2	Kawasan hutan rakyat	Kecamatan Bandongan, Borobudur, Kajoran, Kaliangkrik, Ngablak, Salam, Sawangan, Secang, Tempuran, dan Windusari

No.	Kawasan Budidaya	Lokasi
3	Kawasan peruntukan pertanian	
3.a.	Kawasan pertanian lahan basah	Kecamatan Bandongan, Borobudur, Candimulyo, Dukun, Grabag, Kajoran, Kaliangkrik, Mertoyudan, Mungkid, Muntilan, Ngablak, Ngluwar, Pakis, Salam, Salaman, Sawangan, Secang, Srumbung, Tegalrejo, Tempuran, dan Windusari
3.b.	Kawasan pertanian lahan kering	Kecamatan Bandongan, Borobudur, Candimulyo, Dukun, Grabag, Kajoran, Kaliangkrik, Mertoyudan, Mungkid, Muntilan, Ngablak, Ngluwar, Pakis, Salam, Salaman, Sawangan, Secang, Srumbung, Tegalrejo, Tempuran, dan Windusari
4	Kawasan peruntukan perkebunan	Kecamatan Grabag, Kajoran, Dukun, Borobudur, dan Salaman
5	Kawasan peruntukan perikanan	
5.a.	Daerah pembenihan	Kecamatan Muntilan, Sawangan, Dukun, Grabag, dan Mungkid
5.b.	Daerah pembesaran perikanan	Kecamatan Salam, Ngluwar, Mertoyudan, Kajoran, Bandongan, Secang, Srumbung, Candimulyo, dan Tegalrejo
6	Kawasan peruntukan peternakan	
6.a.	Kawasan peternakan besar	Kecamatan Sawangan, Candimulyo, Dukun, Kajoran, Windusari, Pakis, Ngablak, Grabag, Tegalrejo, dan Kaliangkrik, Bandongan, Secang, Srumbung, dan Salam
6.b.	Kawasan peternakan sedang	Semua kecamatan
6.c.	Kawasan peternakan unggas	Kecamatan Srumbung, Dukun, Salam, Secang, Salaman, Tempuran, Bandongan, Candimulyo, Grabag, Mertoyudan, dan Ngluwar
7	Kawasan peruntukan pertambangan	
7.a.	Kawasan peruntukan pertambangan batuan pasir batu	Kecamatan Windusari, Bandongan, Borobudur, Srumbung, Dukun, Pakis, Salam, Candimulyo, Muntilan, Ngluwar, Tempuran, Salam, Secang, Grabag, dan Salaman.
7.b.	Kawasan peruntukan pertambangan batuan marmar	Kecamatan Borobudur, Salaman, Tempuran, Bandongan, dan Windusari.
7.c.	Kawasan peruntukan pertambangan mineral logam	Kecamatan Borobudur dan Salaman
8	Kawasan peruntukan pariwisata	
8.a.	Kawasan peruntukan pariwisata budaya	Candi Borobudur, Candi Pawon, Candi Mendut, Candi Ngawen, Candi Gunung Wukir/Canggal, Candi Asu, Candi Pendem, Candi Lumbung, Candi Selogriyo, Makam Gunung Pring, Makam Kyai Raden Santri dan Mbah Jogoreso, Makam Pasteur Van Lith, Makam Kyai Condrobumi, Makam Sunan Geseng, Langgar Agung Pangeran Diponegoro, Pasarean

No.	Kawasan Budaya	Lokasi
		Pangeran Singosari, Makam Kyai Mijil, Makam Kyai Raden Syahid, dan Candi Umbul
8.b.	Kawasan peruntukan pariwisata alam	Air Terjun Sekarlangit, Air Terjun Seloprojo, Ketep Pass, Air Terjun Kedungkayang, Agro Wanawisata Sambak, Agro Wisata Salak Lumut, Pendakian Gunung Merapi, Pendakian Gunung Merbabu, Curug Silawe, dan Telaga Bleder
8.c.	Kawasan peruntukan pariwisata buatan	Taman Rekreasi Mendut, Ketep Pass, Induk Selokan Mataram (Wisata Bendungan Ancol), Taman Rekreasi Kalibening, dan Deyangan
9	Kawasan peruntukan industri	
9.a.	kawasan peruntukan industri mikro, kecil, menengah	tersebar di masing-masing kecamatan
9.b.	Kawasan peruntukan industri yang menggunakan bahan baku dan/atau proses produksinya memerlukan lokasi khusus	tersebar di masing-masing kecamatan
9.c.	Kawasan peruntukan industri besar	Kecamatan Tempuran dan Salaman
10	Kawasan peruntukan permukiman	
10.a.	Kawasan peruntukan permukiman perkotaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perkotaan-perkotaan yang masuk dalam Pusat Kegiatan Lokal (PKL) 2. Perkotaan Borobudur di Kecamatan Borobudur yang kaidah pengaturannya mengikuti Kawasan Strategis Nasional (KSN) dan Kawasan Strategis Kabupaten (KSK) 3. Ibukota-ibukota kecamatan yang meliputi ibukota kecamatan di Kecamatan Windusari, Bandongan, Kaliangkrik, Kajoran, Tempuran, Salaman, Srumbung, Dukun, Sawangan, dan Candimulyo
10.b.	Kawasan peruntukan permukiman perdesaan	tersebar di luar ibukota kecamatan
11	Kawasan peruntukan lainnya	
11.a.	Kawasan pertahanan dan keamanan	Kecamatan Bandongan, Windusari, Borobudur, Salaman, Candimulyo, dan Tempuran
11.b.	Kawasan ruang terbuka hijau perkotaan	tersebar di masing-masing kecamatan

Sumber : RTRW Kabupaten Magelang Tahun 2010-2030

Dalam rangka membentuk dan memperkuat pola keterkaitan antar kegiatan dan pusat pelayanan serta mewujudkan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan, maka pengembangan wilayah di Kabupaten Magelang dilakukan dengan cara mendorong pertumbuhan peranan sektor pertanian, pariwisata, dan industri. Peningkatan kontribusi sektor-sektor tersebut dilakukan seiring dengan terus dikembangkannya kawasan-kawasan

strategis di wilayah Kabupaten Magelang yang menjadi pendorong pertumbuhan utama (*main-prime-mover*), yaitu sebagai berikut.

- a. Kawasan strategis cepat tumbuh meliputi perkotaan Secang dan sekitarnya, Perkotaan Mertoyudan dan sekitarnya, Perkotaan Mungkid dan sekitarnya, Perkotaan Muntilan dan sekitarnya, serta Perkotaan Salam dan sekitarnya.
- b. Kawasan pertanian berbasis potensi lokal dengan konsep pengembangan agropolitan dan minapolitan, meliputi Kawasan Agropolitan Sumbing, Kawasan Agropolitan Merapi Merbabu, Kawasan Agropolitan Borobudur, dan Kawasan Minapolitan.
- c. Kawasan strategis pariwisata dengan konsep menumbuh-kembangkan potensi-potensi wisata daerah dalam rangka menciptakan beragam alternatif daya tarik wisata disamping Candi Borobudur, meliputi Kawasan Strategis Pariwisata A di Wilayah Sumbing dan sekitarnya, Kawasan Strategis B di Wilayah Merapi-Merbabu dan sekitarnya, Kawasan Strategis Pariwisata C di Wilayah Merapi dan sekitarnya, dan Kawasan Strategis Pariwisata D di Wilayah Borobudur dan sekitarnya.
- d. Kawasan peruntukan industri yang berbasis pemanfaatan dan pengembangan potensi lokal.

Di samping pusat-pusat kegiatan sebagaimana telah dijelaskan di dalam Perda RTRW Kabupaten Magelang, struktur ruang kabupaten Magelang, juga dibagi menjadi beberapa pusat pelayanan administratif, yaitu:

- a. pusat pelayanan administratif kabupaten/ibukota Kabupaten adalah Kota Mungkid;
- b. pusat pelayanan administratif kecamatan meliputi ibukota kecamatan : Salaman, Borobudur, Ngluwar, Salam, Srumbung, Dukun, Muntilan, Mungkid, Sawangan, Candimulyo, Mertoyudan, Tempuran, Kajoran, Kaliangkrik, Bandongan, Windusari, Secang, Tegalrejo, Pakis, Grabag, dan Ngablak;
- c. pusat pelayanan administratif kelurahan meliputi ibukota kelurahan : Secang, Sumberejo, Muntilan, Mendut, dan Sawitan; dan
- d. pusat pelayanan administratif desa meliputi 367 ibukota desa.

Dalam rangka memperkuat fungsi aksesibilitas dan mobilitas guna mendorong terciptanya distribusi pembangunan yang merata dan berkelanjutan ke seluruh kawasan dan pusat kegiatan, dilakukan pengembangan sarana dan prasarana wilayah. Salah satu upaya yang akan dilakukan adalah penataan ulang jaringan trayek angkutan umum. Penataan ulang jaringan trayek angkutan umum diarahkan kepada :

- a. Perkuatan akses dan mobilitas wisatawan dari Borobudur ke DTW lokal ;
- b. Perkuatan akses dan mobilitas masyarakat ke pusat-pusat kegiatan;
- c. Perkuatan akses dan mobilitas masyarakat ke pusat-pusat pelayanan;
- d. Perkuatan akses dan mobilitas di kawasan perkotaan;
- e. Perkuatan akses dan mobilitas di kawasan perdesaan.

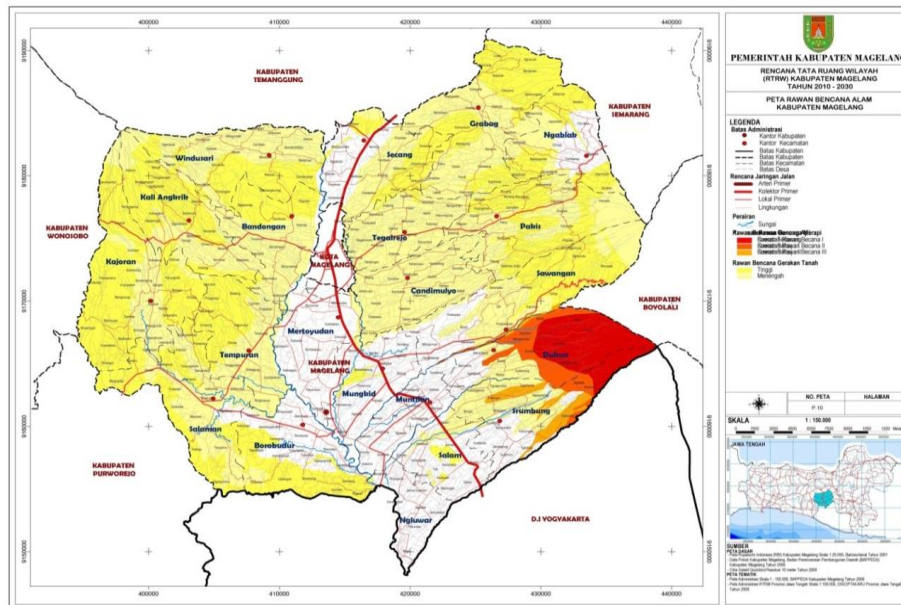
Dilihat kedudukan Kabupaten Magelang di Jawa Tengah sebagai bagian dari wilayah pengembangan Purwomanggung, maka pengembangan transportasi berupa angkutan massal Berbasis Jalan/Operasionalisasi BRT Trans Jateng pada koridor Purworejo – Magelang bisa ditangkap sebagai potensi pengembangan wilayah di Kabupaten Magelang. Banyak wilayah yang dilalui secara langsung akan berkembang secara pesat dan menimbulkan efek pada wilayah sekitarnya.

2.1.8 Wilayah Rawan Bencana

2.1.8.1. Wilayah Rawan Bencana

Kabupaten Magelang merupakan kabupaten yang sangat rawan bencana alam khususnya bencana erupsi gunung berapi dan gerakan tanah. Bencana alam yang terjadi di wilayah kabupaten ini merupakan konsekuensi dari kondisi morfologi, geologi, hidrologi wilayah, dan keberadaan Gunung Merapi. Ancaman bencana yang disebabkan oleh faktor alam yang pernah terjadi di Kabupaten Magelang, antara lain:

- a. tanah longsor di 21 kecamatan;
- b. banjir di aliran sungai terutama di Sungai Progo dan Sungai Elo;
- c. angin lesus/puting beliung yang sering terjadi di 21 kecamatan;
- d. kekeringan/krisis air bersih di 21 kecamatan (kemarau panjang), sedangkan pada musim kemarau pendek terjadi krisis air bersih di 3 kecamatan, yaitu Kecamatan Borobudur (Desa Kenalan, Desa Candirejo, Desa Kembanglimus, Desa Wringinputih, Desa Bumiharjo dan Desa Giritengah), Kecamatan Kajoran (Desa Wonogiri) serta Kecamatan Salaman (Desa Margoyoso dan Desa Ngargoretno);
- e. Kebakaran hutan;
- f. Sebagian besar Wilayah Kabupaten Magelang yang memiliki kemiringan lereng >15% dan curah hujan yang cukup tinggi menyebabkan Kabupaten Magelang rawan terhadap bencana gerakan tanah. Wilayah Kabupaten Magelang masuk dalam wilayah rawan gerakan tanah tingkat tinggi, tingkat menengah sampai dengan tingkat sangat rendah.
- g. Letusan Gunung Merapi, 3 kecamatan berada di KRB III. Wilayah KRB III berada pada radius 0-10 km, meliputi Kecamatan Srumbung (Kaliurang, Kemiren, Ngablak, Nglumut, Tegalrandu, Mranggen, Ngargosoko, dan Srumbung), Kecamatan Dukun (Sengi, Sewukan, Paten, Krinjing, Kalibening, Sumber, Ngargomulyo, dan Keningar), dan Kecamatan Sawangan (Wonolelo, Kapuhan, dan Ketep).
- h. Aliran awan panas, gas racun, lontaran batu pijar, lontaran material, aliran lava, dan aliran lahar Gunung Merapi, terdiri atas 16 desa di 3 kecamatan yang merupakan Kawasan rawan bencana II
- i. lahar/banjir dampak sekunder dari letusan Gunung Merapi meliputi : sepanjang aliran sungai Krasak, Bebeng, Sat, Putih, Blongkeng, Pabelan, Trinsing dan Apu yang merupakan Kawasan rawan bencana I



Sumber : RTRW Kabupaten Magelang Tahun 2010 - 2030

Gambar 2.3

Peta Rawan Bencana di Kabupaten Magelang

2.1.8.2. Jalur Evakuasi Dan Desa Bersaudara (*Sister Village*)

Pengelolaan risiko bencana Letusan Gunungapi di Kabupaten Magelang dilakukan melalui upaya kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana yang melibatkan semua pemangku kepentingan dan masyarakat, khususnya yang berada di kawasan rawan bencana. Saat ini Kabupaten Magelang melakukan upaya pengurangan risiko terhadap bencana Letusan Gunungapi melalui penyusunan Rencana Kontijensi, sistem peringatan dini serta pembangunan sarana dan prasarana evakuasi yang dilengkapi dengan rencana evakuasi untuk bencana erupsi gunung api. Di dalam Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten Magelang Tahun 2018-2022 upaya penanganan bencana dapat dilakukan dengan cara membangun infrastruktur evakuasi seperti rambu evakuasi, jalur evakuasi, tempat evakuasi sementara.

Jalur-jalur evakuasi yang berada di Kawasan Rawan Bencana (KRB) Gunung Merapi, di Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, kondisinya rusak parah. Padahal jalur-jalur evakuasi yang berada di desa-desa di lereng Gunung Merapi tersebut, merupakan akses satu-satunya untuk lalu lintas evakuasi warga jika sewaktu-waktu terjadi erupsi Gunung Merapi. BPBD Kabupaten Magelang telah melakukan koordinasi intensif dengan berbagai pihak terkait infrastruktur seperti jalan dan Tempat Evakuasi Akhir (TEA).

Jalan-jalan evakuasi tersebut kondisinya Sebagian besar rusak, sehingga akan mengganggu kelancaran proses evakuasi. Tetapi kendalanya, jalan-jalan tersebut merupakan jalan desa yang perbaikannya juga menjadi tanggungjawab desa, bukan DPU Kabupaten. Sehingga dengan demikian DPU tidak bisa menganggarkan perbaikan jalur-jalur evakuasi tersebut melalui APBD. Untuk itu perlu dicari solusi-solusi terbaik untuk mengatasi permasalahan tersebut. Sampai dengan tahun 2020 tercatat ada 19 jalur evakuasi yang menghubungkan kawasan/ desa rawan bencana dengan desa penyangga di bawahnya, yaitu:

- a. Dari Desa Kalibening Kec. Dukun Menuju Desa Adikarto Dan Desa Tanjung Kec. Muntilan
- b. Dari Desa Krinjing Kec. Dukun Menuju Desa Deyangan Kec. Mertoyudan
- c. Dari Desa Paten Kec. Dukun Menuju Desa Gondang, Bumirejo, Paremono Kec. Mungkid; Desa Banyurojo, Kec. Mertoyudan
- d. Dari Desa Sengi Kec. Dukun Menuju Desa Treko, Desa Senden, Kec. Mungkid Dan Desa Butuh, Desa Tirtosari, Desa Jati Kec. Sawangan
- e. dari Desa Sewukan Kec. Dukun Menuju Desa Ambartawang, Desa Rambeanak, Desa Mungkid Kec. Mungkid
- f. Dari Ngargomulyo Kec. Dukun Menuju Desa Tamanagung Kec. Muntilan
- g. Dari Sumber Kec. Dukun Menuju Desa Pucungrejo Dan Desa Ngawen Kec. Muntilan
- h. Dari Keningar Kec. Dukun Menuju Desa Ngrajek Kec. Mungkid
- i. Dari Kaliurang Kec. Srumbung Menuju Desa Jamuskauman, Desa Pakunden, Dan Desa Bligo Kec. Ngluwar
- j. Dari Desa Ngablak Kec. Srumbung Menuju Desa Kradenan Kec. Srumbung; Desa Kadiluwih, Desa Somoketro Dan Desa Tirto Kec. Salam
- k. Dari Desa Kemiren Kec. Srumbung Menuju Desa Salam Kec. Salam
- l. Dari Desa Nglumut Kec. Srumbung Menuju Desa Sucen Kec. Salam
- m. Dari Desa Srumbung Kec. Srumbung Menuju Desa Baturono Kec. Salam
- n. Dari Desa Mranggen Kec. Srumbung Menuju Desa Gunungpring Dan Desa Sokorini Kec. Muntilan
- o. Dari Desa Tegalrandu Kec. Srumbung Menuju Desa Bringin Kec. Srumbung; Ds. Pabelan Kec. Mungkid; Ds. Wanurejo Kec. Borobudur
- p. Dari Desa Ngargosoko Kec. Srumbung Menuju Desa Gulon Kec. Salam
- q. Dari Desa Kapuhan Kec. Sawangan Menuju Desa Mangunsari Kec. Sawangan
- r. Dari Desa Ketep Kec. Sawangan Menuju Ds. Podosoko Dan Wulungunung Kec. Sawangan; Ds. Ketundan Kec. Pakis; Dan Ds. Danurejo Kec. Mertoyudan
- s. Dari Desa Wonolelo Kec. Sawangan Menuju Desa Banyuroto Kec. Sawangan; Ds. Pogalan Kec. Pakis

Berkaitan dengan pengurangan risiko bencana upaya mitigasi merupakan sesuatu hal yang wajib untuk dipersiapkan. Mitigasi bencana sebagaimana dituangkan dalam undang-undang tentang penanggulangan bencana diartikan sebagai serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik (mitigasi struktural) maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana (mitigasi non struktural).

Bercermin dari pengalaman penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi korban erupsi gunung Merapi beberapa waktu yang lalu, Kabupaten Magelang memunculkan program penanggulangan bencana berbasis komunitas, yang disebut dengan sister village atau desa bersaudara. Konsep dasar dari sister village ini adalah adanya kerjasama antara desa rawan bencana erupsi sebagai asal pengungsi dengan desa diluar kawasan rawan bencana atau tidak terkena dampak erupsi sebagai tempat pengungsian. Dan tidak hanya itu konsep sister village bisa diterapkan untuk mitigasi dan penanggulangan bencana selain bencana gunung berapi seperti tanah longsor dan banjir.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Magelang terus membentuk Desa Bersaudara atau Sister Village dalam upaya mitigasi terhadap

bencana erupsi Gunung Merapi. Hingga tahun 2020 sebanyak 20 desa bersaudara yang telah terbentuk. Adapun datanya adalah sebagai berikut:

Tabel 2.6

Desa Bersaudara (*Sister Village*)

NO	DESA KAWASAN RAWAN BENCANA (KRB)		KECAMATAN	DESA TUJUAN (PENYANGGA)
	KRB III	KRB II		
1	Kaliurang 2.516 Jiwa		Srumbung	1. Jamuskauman, Kec.Ngluwar 2. Pakunden, Kec.Ngluwar 3. Bligo, Kec.Ngluwar
2	Nglumut 798 Jiwa		Srumbung	1. Sucen, Kec.Salam
3	Ngablak 2.412 Jiwa		Srumbung	1. Kradenan, Kec.Srumbung 2. Somoketro, Kec.Salam 3. Tirto, Kec.Salam 4. Kadiluwih, Kec.Salam
4	Ngargosoko 2.264 Jiwa		Srumbung	1. Gulon, Kec.Salam 2. Seloboro, Kec.Salam
5	Tegalrandu 2.297 Jiwa		Srumbung	1. Bringin, Kec.Srumbung 2. Pabelan, Kec.Mungkid 3. Wanurejo, Kec.Borobudur
6	Mranggen 4.375 Jiwa		Srumbung	1. Gunungpring, Kec.Muntilan 2. Sokorini, Kec.Muntilan
7	Srumbung 3.842 Jiwa		Srumbung	1. Baturono, Kec.Salam 2. Tersagede, Kec.Salam
8	Kemiren 1.174 Jiwa		Srumbung	1. Salam, Kec.Salam
9	Kapuhan 3.396 Jiwa		Sawangan	1. Mangunsari, Kec.Sawangan
10	Wonolelo 6.447 Jiwa		Sawangan	1. Banyuroto, Kec.Sawangan 2. Pogalan, Kec.Pakis
11	Ketep 2.420 Jiwa		Sawangan	1. Wulunggunung, Kec.Sawangan 2. Podosoko, Kec.Sawangan 3. Ketundan, Kec.Pakis
12	Sumber 3.802 Jiwa		Dukun	1. Pucungrejo, Kec.Muntilan 2. Sedayu, Kec.Muntilan 3. Ngawen, Kec.Muntilan
13	Ngargomulyo 2.514 Jiwa		Dukun	1. Tamanagung, Kec.Muntilan
14	Kalibening 2.582 Jiwa		Dukun	1. Adikarto, Kec.Muntilan 2. Tanjung, Kec.Muntilan
15	Sengi 4.404 Jiwa		Dukun	1. Jati, Kec.Sawangan 2. Tirtosari, Kec.Sawangan 3. Butuh, Kec.Sawangan 4. Senden, Kec.Mungkid 5. Treko, Kec.Mungkid
16	Sewukan 2.498 Jiwa		Dukun	1. Ambartawang, Kec.Mungkid 2. Rambeanak, Kec.Mungkid 3. Mungkid, Kec.Mungkid
17	Paten 3.092 Jiwa		Dukun	1. Gondang, Kec.Mungkid 2. Paremono, Kec.Mungkid 3. Bumirejo, Kec.Mungkid

NO	DESA KAWASAN RAWAN BENCANA (KRB)		KECAMATAN	DESA TUJUAN (PENYANGGA)
	KRB III	KRB II		
				4. Banyurojo, Kec.Mertoyudan 5. Mertoyudan, Kec.Mertoyudan
18	Keningar 605 Jiwa		Dukun	1. Ngrajek, Kec.Mungkid
19	Krinjing 2.156 Jiwa		Dukun	1. Deyangan, Kec.Mertoyudan
20		Dukun 2.456 Jiwa	Dukun	1. Bojong, Kec.Mungkid 2. Sriwedari, Kec.Muntilan
21		Mangunsoko 856 Jiwa	Dukun	1. Giyanti, Kec.Candimulyo
22	Tlogolele (Kab.Boyolali)		Selo	1. Donorojo, Kec.Mertoyudan 2. Mertoyudan, Kec.Mertoyudan

Sumber: BPBD Kabupaten Magelang, 2020

2.1.9 Kondisi Demografi

a. Jumlah dan Pertumbuhan Penduduk

Jumlah penduduk di Kabupaten Magelang pada tahun 2019 mencapai 1.295.019 jiwa. Dengan jumlah penduduk terbanyak berada di Kecamatan Mertoyudan (109.803 jiwa) kemudian Kecamatan Grabag (93.252 jiwa) dan Secang (80.894 jiwa). Sedangkan jumlah penduduk paling sedikit berada di Kecamatan Ngluwar (32.709 jiwa).

Tabel 2.7

Jumlah Penduduk di Kabupaten Magelang Tahun 2015-2019

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk (jiwa)					Pertumbuhan Penduduk (%)
		2015	2016	2017	2018	2019	
1	Salaman	76.856	73.833	73.372	73.913	74.561	2,60
2	Borobudur	61.330	61.232	61.305	62.517	62.970	5,05
3	Ngluwar	32.530	32.415	32.319	32.710	32.709	2,24
4	Salam	47.871	47.605	47.631	48.257	48.149	3,61
5	Srumbung	48.265	48.339	48.080	48.847	49.073	4,62
6	Dukun	47.025	46.730	46.900	47.187	47.110	2,59
7	Muntilan	78.857	78.871	79.136	79.372	79.348	-0,63
8	Mungkid	73.960	73.426	74.295	74.602	74.653	-1,34
9	Sawangan	59.812	57.118	57.287	57.986	57.293	1,15
10	Candimulyo	50.068	49.714	50.091	50.424	50.121	2,90
11	Mertoyudan	108.655	108.558	109.233	109.652	109.803	0,10
12	Tempuran	51.095	51.011	51.041	51.585	52.218	4,29
13	Kajoran	59.616	59.552	59.929	59.776	60.217	3,72
14	Kaliangkrik	60.178	59.161	59.575	59.405	59.808	1,72
15	Bandongan	61.074	60.858	60.916	60.481	61.085	2,35
16	Windusari	45.937	51.763	52.156	50.894	51.604	2,15
17	Secang	74.230	80.996	80.914	80.291	80.894	1,72
18	Tegalrejo	49.860	52.829	52.981	53.369	53.510	2,84
19	Pakis	51.803	52.237	52.819	53.988	54.159	9,18
20	Grabag	85.861	90.807	91.559	92.212	93.252	4,42
21	Ngablak	42.207	41.569	41.866	42.647	42.482	5,04

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk (jiwa)					Pertumbuhan Penduduk (%)
		2015	2016	2017	2018	2019	
	Jumlah	1.267.090	1.278.624	1.283.405	1.290.115	1.295.019	2,58

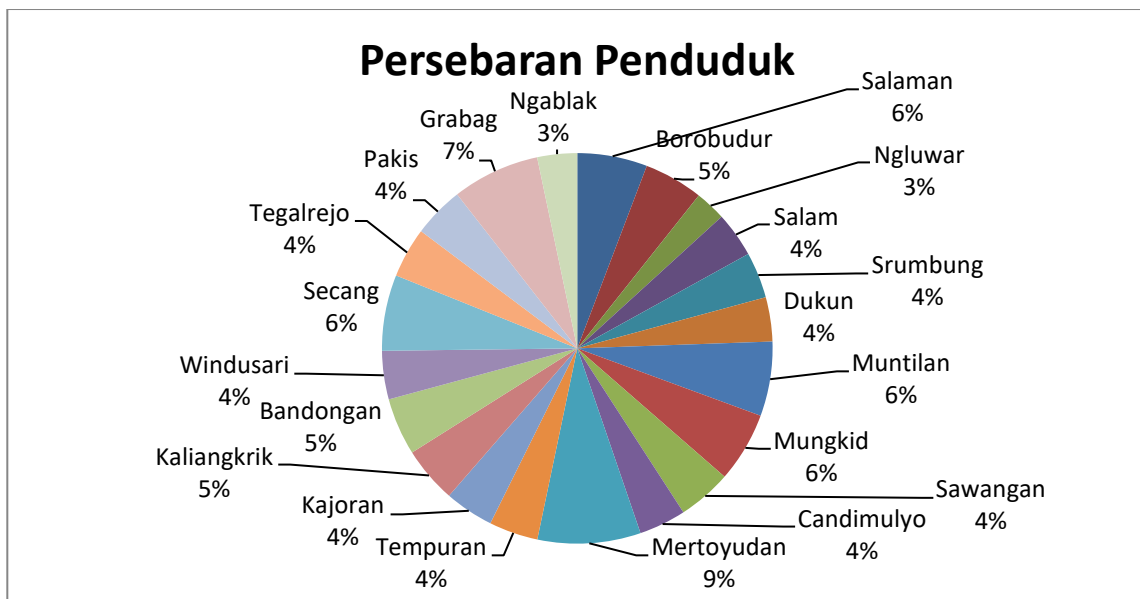
Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang, 2020

Pertumbuhan penduduk di Kabupaten Magelang selama kurun waktu tahun 2015-2019 cukup fluktuatif dengan kecenderungan meningkat. Kecamatan dengan pertumbuhan penduduk tertinggi adalah Kecamatan Pakis, yaitu sebesar 9,18%, sedangkan kecamatan yang mengalami penurunan jumlah penduduk terbanyak adalah Kecamatan Mungkid (1,34%).

Berdasarkan data, perkembangan jumlah penduduk Kabupaten Magelang selama kurun waktu tahun 2015-2019 diketahui ada 3 (tiga) kecamatan yang memiliki tren mengalami penurunan setiap tahunnya, yaitu Kecamatan Muntilan dan Mungkid, sementara kecamatan lainnya cenderung mengalami kenaikan.

b. Persebaran dan Kepadatan Penduduk

Dilihat dari sisi persebaran penduduk di Kabupaten Magelang per kecamatan, pada tahun 2019, terlihat bahwa penduduk hampir tersebar merata di semua kecamatan. Penduduk paling banyak berada di Kecamatan Mertoyudan (8,48%) disusul dengan Kecamatan Grabag (7,20%), sedangkan kecamatan dengan penduduk paling sedikit berada di Kecamatan Ngluwar (2,53%). Data distribusi penduduk di Kabupaten Magelang selengkapnya disajikan dalam grafik di bawah ini.



Sumber : Hasil Olahan, 2020.

Gambar 2.4
Persebaran Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Magelang
Tahun 2019

Penduduk akan banyak dijumpai pada daerah-daerah yang memiliki aktivitas ekonomi yang tinggi, tersedianya sarana dan prasarana sosial, transportasi yang memadai, serta kondisi sosial ekonomi yang lebih baik. Daerah yang memiliki kepadatan tinggi merupakan daerah yang memiliki perkembangan ekonomi yang tinggi dan sebaliknya. Berikut tabel yang menyajikan kepadatan penduduk di Kabupaten Magelang per kecamatan.

Tabel 2.8
Kepadatan Penduduk di Kabupaten Magelang
per Kecamatan Tahun 2015-2019

No.	Kecamatan	Luas Wilayah (km ²)	Kepadatan Penduduk (jiwa/km)				
			2015*	2016*	2017*	2018**	2019**
1	Salaman	68,87	1.115,96	1.072,06	1.065,37	1.073,22	1082.63
2	Borobudur	54,55	1.124,29	1.122,49	1.123,83	1.146,05	1154.35
3	Ngluwar	22,44	1.449,64	1.444,52	1.440,24	1.457,66	1457.62
4	Salam	31,63	1.513,47	1.505,06	1.505,88	1.525,67	1522.26
5	Srumbung	53,18	907,58	908,97	904,10	918,52	922.77
6	Dukun	53,40	880,62	875,09	878,28	883,65	882.21
7	Muntilan	28,61	2.756,27	2.756,76	2.766,03	2.774,27	2773.44
8	Mungkid	37,40	1.977,54	1.963,26	1.986,50	1.994,71	1996.07
9	Sawangan	72,37	826,48	789,25	791,58	801,24	791.67
10	Candimulyo	46,95	1.066,41	1.058,87	1.066,90	1.073,99	1067.54
11	Mertoyudan	45,35	2.395,92	2.393,78	2.408,67	2.417,91	2421.23
12	Tempuran	49,04	1.041,90	1.040,19	1.040,80	1.051,90	1064.80
13	Kajoran	83,41	714,73	713,97	718,49	716,65	721.94
14	Kaliangkrik	57,34	1.049,49	1.031,76	1.038,98	1.036,01	1043.04
15	Bandongan	45,79	1.333,78	1.329,07	1.330,33	1.320,83	1334.02
16	Windusari	61,65	745,13	839,63	846,00	825,53	837.05
17	Secang	47,34	1.568,02	1.710,94	1.709,21	1.696,05	1708.79
18	Tegalrejo	35,89	1.389,24	1.471,97	1.476,21	1.487,02	1490.94
19	Pakis	69,56	744,72	750,96	759,33	776,14	778.59
20	Grabag	77,16	1.112,77	1.176,87	1.186,61	1.195,08	1208.55
21	Ngablak	43,80	963,63	949,06	955,84	973,68	969.91
	Jumlah	1.085,73	1.167,04	1.177,66	1.182,07	1.188,25	1196,76

Sumber:

1. Kabupaten Magelang Dalam Angka Tahun 2018*
2. Hasil Olahan, Disdukcapil 2019 **

Kecamatan-kecamatan yang memiliki kepadatan penduduk tinggi biasanya terletak di wilayah perkotaan atau yang dilintasi oleh Jalan Nasional Yogyakarta-Semarang dan merupakan kawasan strategis cepat tumbuh (Kecamatan Muntilan, Secang, dan Mertoyudan). Hal ini memudahkan penduduk untuk mengakses sarana prasarana yang relatif lebih lengkap dan menjadi salah satu faktor penarik penduduk untuk tinggal disana. Selain itu, faktor geografis berupa kondisi topografi bergunung atau berbukit turut mempengaruhi persebaran penduduk karena cukup sulit

untuk pengembangan permukiman. Kepadatan penduduk tertinggi berada di Kecamatan Muntilan yang mencapai 2.773,44 jiwa/km², sedangkan kepadatan terendah berada di Kecamatan Kajoran yaitu 721,94 km/jiwa².

c. Struktur Penduduk Menurut Jenis Kelamin

Rasio Jenis kelamin (*sex ratio*) merupakan rasio yang membandingkan jumlah penduduk laki-laki dengan jumlah penduduk perempuan di suatu wilayah. Perkembangan jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin di Kabupaten Magelang secara umum memiliki angka rasio jenis kelamin (*sex ratio*) yang besar. Angka rasio jenis kelamin yang cukup besar ini menunjukkan bahwa jumlah penduduk laki-laki lebih besar dibandingkan jumlah penduduk perempuan. Dilihat dari angka rasio jenis kelaminnya, secara umum selama kurun waktu tahun 2015-2016, angka rasio jenis kelamin di Kabupaten Magelang relatif tetap, yakni 101. Pada tahun 2018 dan 2019 angka sex ratio 102 yang dapat diartikan bahwa terdapat 102 jiwa penduduk laki-laki untuk setiap 100 jiwa penduduk perempuan. Lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.9
Perkembangan Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin
di Kabupaten Magelang Tahun 2015-2019

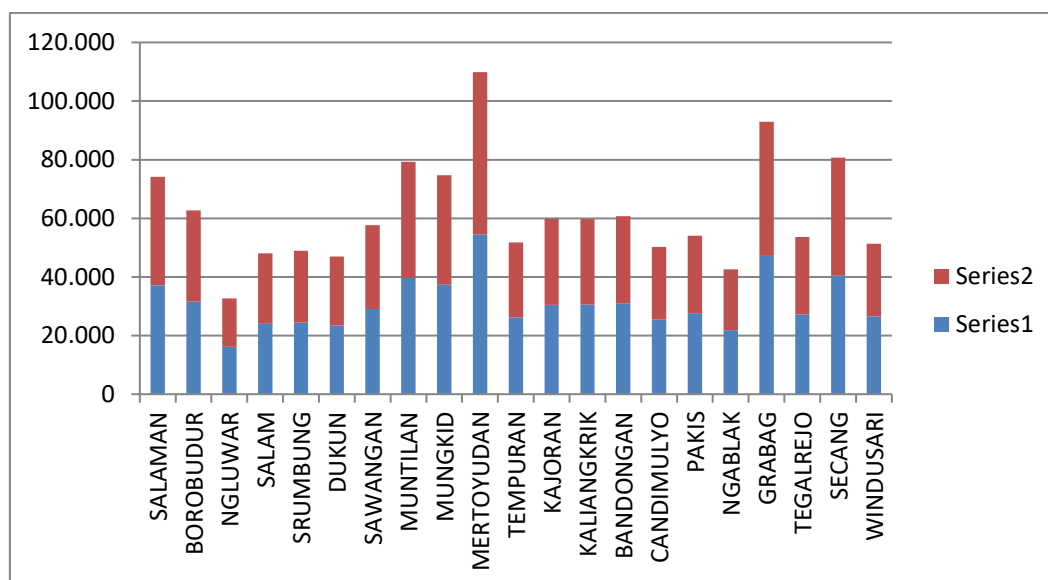
No.	Tahun	Jumlah Penduduk (Jiwa)			Sex Ratio
		Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	
1	2015*	624.973	620.523	1.245.496	101
2	2016*	630.821	626.302	1.257.123	101
3	2017*	648.458	634.947	1.283.405	102
4	2018**	650.382	639.733	1.290.115	102
5	2019**	653,106	641,913	1,295,019	102

Sumber :

1. Kabupaten Magelang Dalam Angka Tahun 2018*
2. Hasil Olahan Disdukcapil 2020**

Berdasarkan data tahun 2019, angka *sex ratio* tertinggi berada di Kecamatan Windusari, yakni 107 artinya terdapat 107 jiwa penduduk laki-laki untuk setiap 100 jiwa penduduk perempuan. Kecamatan yang memiliki angka rasio terendah adalah Kecamatan Mertoyudan dan Kecamatan Ngluwar, yakni dengan angka rasio 99, artinya hanya terdapat 99 jiwa penduduk laki-laki untuk setiap 100 jiwa penduduk perempuan. Hal tersebut mengindikasikan jumlah penduduk laki-lakinya lebih sedikit dibandingkan jumlah penduduk perempuan.

Terdapat dua kecamatan dari 21 kecamatan di Kabupaten Magelang yang penduduk laki-lakinya lebih sedikit daripada penduduk perempuannya, yaitu Kecamatan Ngluwar dan Mertoyudan sehingga di kecamatan tersebut angka *sex ratio*-nya berada di bawah angka 100, sebagaimana digambarkan pada grafik berikut.



Sumber : Hasil Olahan Disdukcapil, 2020

Gambar 2.5

Rasio Jenis Kelamin Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Magelang Tahun 2019

d. Penduduk Menurut Kelompok Umur

Struktur penduduk menurut umur dapat menggambarkan distribusi penduduk sesuai kelompok umur. Proyeksi perkembangan Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur Kabupaten Magelang Tahun 2014-2019 disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 2.10

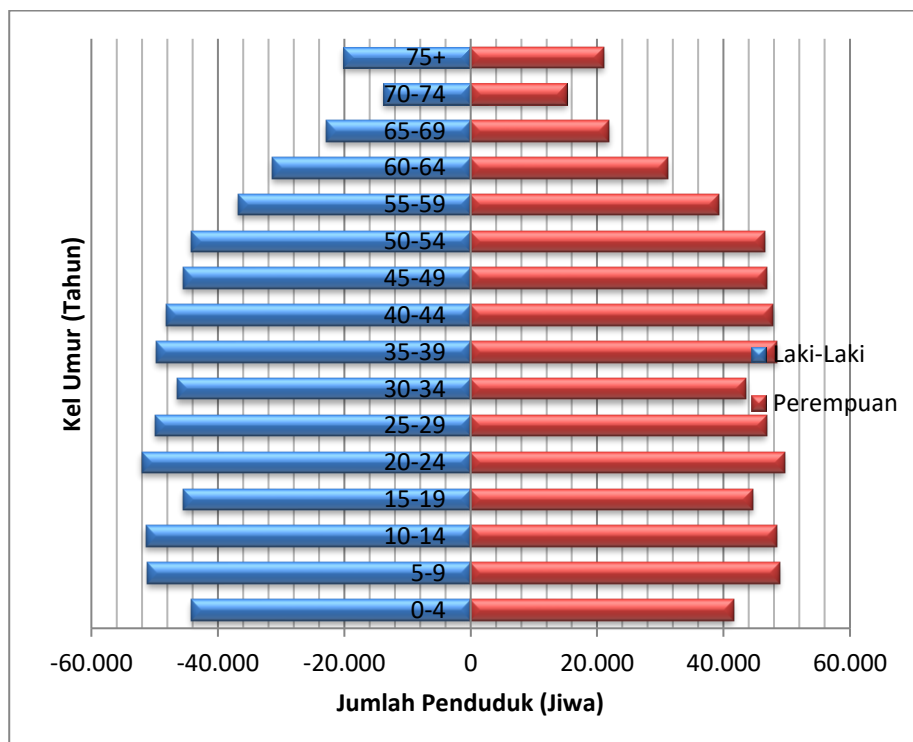
Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur Kabupaten Magelang Tahun 2015-2019

Kelompok Umur	Laki-laki					Perempuan					Laki-laki + Perempuan				
	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019
0-4	38.673	42.959	37.22	43.38	44.236	37.14	41.034	35.76	41.018	41.577	75.813	83.993	72.98	84.398	85.813
05-Sep	50.753	50.322	50.31	49.839	51.151	47.893	47.459	47.477	47.231	48.868	98.646	97.781	97.787	97.07	100.019
Okt-14	51.644	50.089	49.728	48.751	51.363	49.444	47.532	47.092	46.035	48.447	101.088	97.621	96.82	94.786	99.81
15-19	50.288	50.038	52.006	47.967	45.454	48.19	47.666	49.369	46.544	44.668	98.478	97.704	101.375	94.511	90.122
20-24	52.128	53.033	53.16	52.284	52.017	49.086	50.152	49.467	49.938	49.611	101.214	103.185	102.627	102.222	101.628
25-29	46.609	47.236	48.203	48.894	49.91	43.855	44.204	45.32	46.229	46.823	90.464	91.44	93.523	95.123	96.733
30-34	49.602	49.39	48.028	47.256	46.428	48.171	47.557	45.683	44.907	43.579	97.773	96.947	93.711	92.163	90.007
35-39	49.989	49.312	50.561	50.993	49.738	48.688	48.156	49.473	49.547	48.478	98.677	97.468	100.034	100.54	98.216
40-44	46.684	47.485	47.278	47.938	48.18	47.449	48.128	47.224	47.819	47.837	94.133	95.613	94.502	95.757	96.017
45-49	45.795	45.899	47.265	46.399	45.422	47.223	47.342	48.828	47.895	46.78	93.018	93.241	96.093	94.294	92.202
50-54	39.258	40.34	40.866	42.676	44.158	41.515	42.771	43.358	45.135	46.56	80.773	83.111	84.224	87.811	90.718
55-59	36.106	35.654	36.661	36.699	36.837	36.235	36.28	37.776	38.673	39.269	72.341	71.934	74.437	75.372	76.106
60-64	27.577	29.142	29.829	30.768	31.401	25.08	26.965	28.129	29.912	31.144	52.657	56.107	57.958	60.68	62.545
65-69	18.324	18.8	20.753	21.439	22.839	19.605	19.681	21.08	21.304	21.908	37.929	38.481	41.833	42.743	44.747
70-74	15.04	15.044	13.816	13.62	13.831	15.025	15.371	14.854	15.103	15.246	30.065	30.415	28.67	28.723	29.077
75+	21.525	21.187	22.774	21.479	20.141	22.496	22.396	24.057	22.443	21.118	44.021	43.583	46.831	43.922	41.259
Jumlah	639.995	645.93	648.458	650.382	653.106	627.095	632.694	634.947	639.733	641.913	1.267.090	1.278.624	1.283.405	1.290.115	1.295.019

Sumber : Disdukcapil Kab. Magelang, 2020

Penduduk dengan kelompok usia 5-9, 10-14, dan 15-19 tahun memiliki jumlah paling tinggi, terlihat pada piramida penduduk yang mengembang di bagian bawah. Artinya, penduduk usia muda cukup dominan di Kabupaten Magelang. komposisi penduduk menurut umur ini memperlihatkan bahwa warga usia produktif harus menanggung warga yang sudah tidak/belum produktif. Semakin besar proporsi penduduk usia tidak produktif, maka semakin besar beban yang ditanggung oleh penduduk usia produktif. Struktur penduduk menurut umur di Kabupaten Magelang dapat dilihat pada piramida penduduk berikut ini.

Pada tahun 2019, Kabupaten Magelang didominasi oleh penduduk usia produktif (15-64 tahun) sebesar 894.294 jiwa. Adapun penduduk usia nonproduktif (<15 + >65 tahun) Kabupaten Magelang adalah sebesar 400.725 jiwa. Dengan demikian, dapat diukur bahwa rasio ketergantungan (dependency ratio) sebesar 0,45 menunjukkan rata-rata 100 penduduk usia produktif (15-64 tahun) di Kabupaten Magelang masih harus menanggung kurang lebih 45 penduduk usia non produktif.



Sumber : Disdukcapil Kab. Magelang, 2020

Gambar 2.6

Piramida Penduduk Menurut Kelompok Umur di Kabupaten Magelang Tahun 2019

Berdasarkan grafik di atas, dapat dilihat bahwa Kabupaten Magelang mengalami bonus demografi dimana jumlah penduduk usia produktif lebih banyak dari usia nonproduktif. Di dalam rentang masa bonus demografi, terdapat waktu yang rasio ketergantungannya pada titik terendah, hal ini yang disebut jendela kesempatan (*window of opportunity*). Kabupaten Magelang mulai menikmati bonus demografi sejak tahun 2011 dan

berdasarkan proyeksi penduduk akan memiliki jendela kesempatan antara tahun 2017 sampai 2020.

e. Struktur Penduduk Menurut Pendidikan

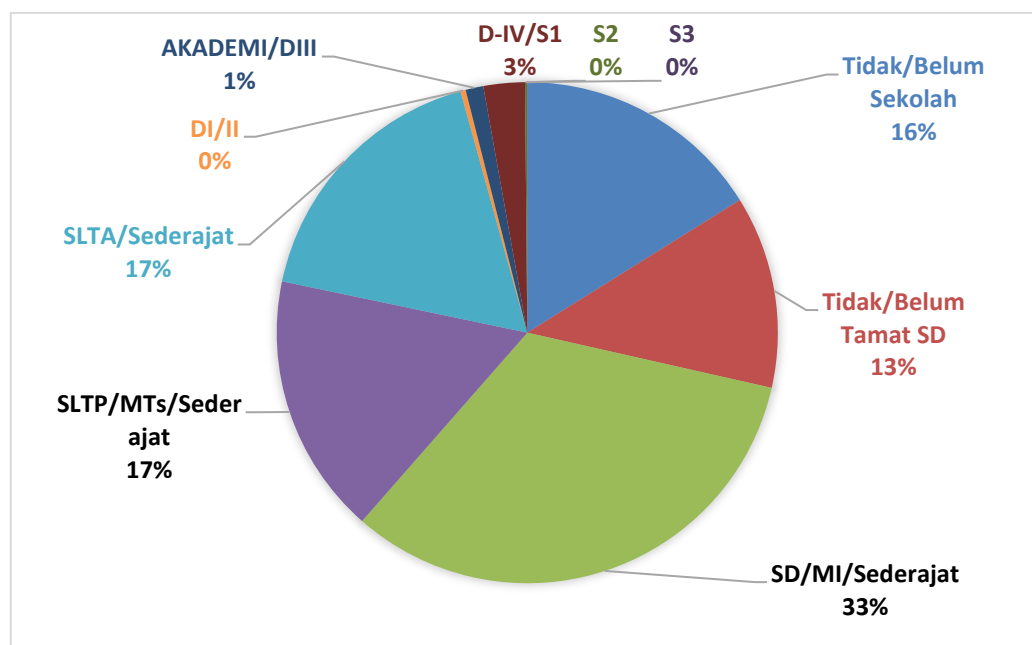
Struktur penduduk menurut pendidikan dapat dilihat dari persentase penduduk usia 5 tahun ke atas menurut status pendidikan. Data pada tahun 2015 hingga tahun 2018 menunjukkan bahwa struktur penduduk menurut pendidikan di Kabupaten Magelang masih didominasi oleh penduduk yang pendidikan terakhirnya SD/MI/ sederajat. Berikut ini adalah tabel jumlah penduduk menurut pendidikan di Kabupaten Magelang.

Tabel 2.11
Jumlah Penduduk Menurut Pendidikan yang Ditamatkan
di Kabupaten Magelang Tahun 2015-2019

No	Jenjang Pendidikan	Jumlah Penduduk (jiwa)				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Tidak/Belum Sekolah	191.559	198.444	195.188	207.959	210.559
2	Tidak/Belum Tamat SD	181.101	167.929	167.215	160.204	161.637
3	SD/MI/Sederajat	433.149	432.473	432.488	424.710	420.936
4	SLTP/MTs/Sederajat	206.408	212.419	215.060	217.129	217.310
5	SLTA/Sederajat	205.823	216.346	220.622	224.694	226.192
6	DI/II	4.682	4.527	4.421	4.324	4.219
7	AKADEMI/DIII	13.958	14.187	14.432	14.802	14.777
8	PT	30.410	32.299	33.979	36.293	37.083
	D-IV/S1				34.449	35.186
	S2				1.648	1.706
	S3				196	191
	Jumlah	1.267.090	1.278.624	1.283.405	1.290.115	1.292.713

Sumber : Disdukcapil Kab. Magelang, 2020.

Grafik berikut menunjukkan penduduk dengan pendidikan SD/MI/ sederajat mendominasi di Kabupaten Magelang selama kurun waktu pada tahun 2019. Hal ini menunjukkan masih rendahnya tingkat pendidikan sebagian besar masyarakat Kabupaten Magelang.



Sumber : Disdukcapil Kab. Magelang, 2020

Gambar 2.7
Jumlah Penduduk Menurut Pendidikan yang Ditamatkan di Kabupaten Magelang Tahun 2019

f. Struktur Penduduk Menurut Agama

Mayoritas penduduk di Kabupaten Magelang memeluk agama Islam, yaitu hingga mencapai 97%, selanjutnya penduduk beragama Katolik yakni sebesar 2%. Selain itu terdapat penduduk beragama Kristen, Hindu, Budha, Konghucu, dan aliran kepercayaan lainnya. Keberagaman agama di kabupaten ini sangat tinggi sehingga toleransi agama harus dikembangkan dan dipertahankan agar dapat hidup dengan harmonis.

Tabel 2.12
Jumlah Penduduk Menurut Agama di Kabupaten Magelang Tahun 2015-2019

No.	Agama	Jumlah Penduduk (jiwa)				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Islam	1.230.979	1.243.565	1.248.402	1.255.556	1,261,070
2	Kristen	10.657	10.544	10.532	10.562	10,448
3	Katolik	24.052	23.284	23.302	22.907	22,513
4	Hindu	207	212	197	188	175
5	Budha	309	294	291	290	285
6	Konghucu	11	11	11	9	7
7	Lainnya	875	714	670	603	521
Jumlah		1.267.090	1.278.624	1.283.405	1.290.115	1.295.019

Sumber : Disdukcapil Kab. Magelang, 2020

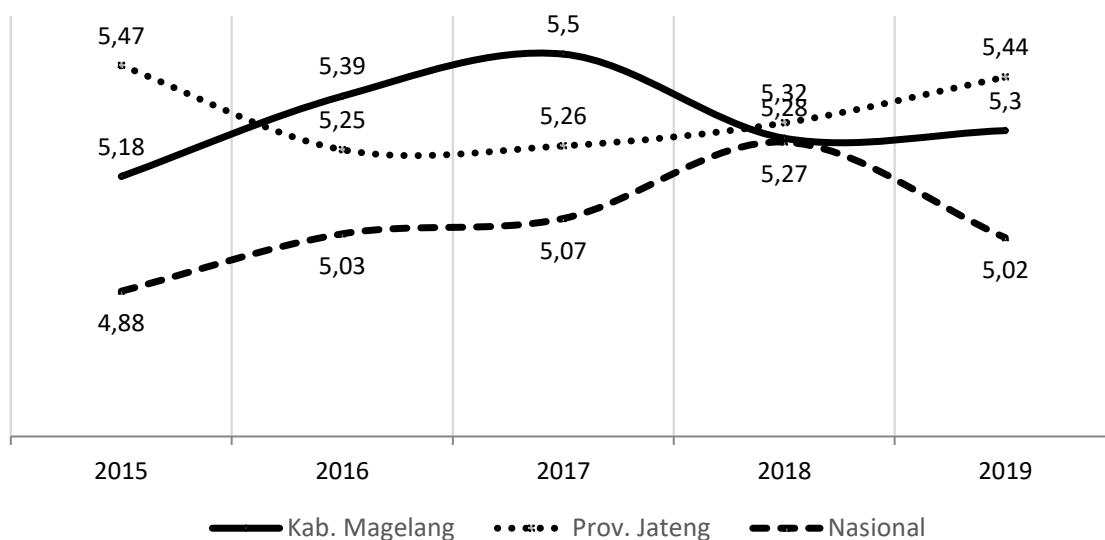
2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2.2.1 Pertumbuhan Ekonomi

Selama rentang waktu lima tahun, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Magelang relatif stabil pada kisaran 5,18% - 5,5% dengan rata-rata 5,33%, lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional (rata-rata 5,05), namun lebih rendah dibandingkan pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah (rata-

rata 5,35). Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Magelang tahun 2019 sebesar 5,33% lebih rendah dari pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah tahun 2019 sebesar 5,35% dan lebih tinggi dibandingkan nasional (5,05%).

Dari tahun 2015 sampai tahun 2017 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Magelang menunjukkan ke arah positif namun di tahun 2018 pertumbuhan ekonomi cenderung melambat dan tahun 2019 tumbuh lebih cepat. Data pertumbuhan ekonomi Kabupaten Magelang, Prov. Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2015-2019 disajikan pada gambar berikut.



Gambar 2.8

Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Magelang, Prov. Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2015-2019

Pemulihan ekonomi ini dapat dijelaskan, dari perkembangan positif pada nilai, proporsi dan pertumbuhan kompoten PMTB (Pembentukan Modal Tetap Bruto) dan ICOR (*incremental capital output ration*). Komponen PMTB pada sajian lebih menjelaskan tentang bagian dari pendapatan (*income*), yang direalisasikan menjadi investasi. ICOR merupakan parameter ekonomi makro yang menggambarkan rasio investasi kapital/modal terhadap hasil yang diperoleh (output) dengan menggunakan investasi tersebut. Sejak tahun 2016 PMTB terus mengalami peningkatan, walaupun ICOR tidak mengalami perubahan yang berarti, sebagaimana tabel berikut.

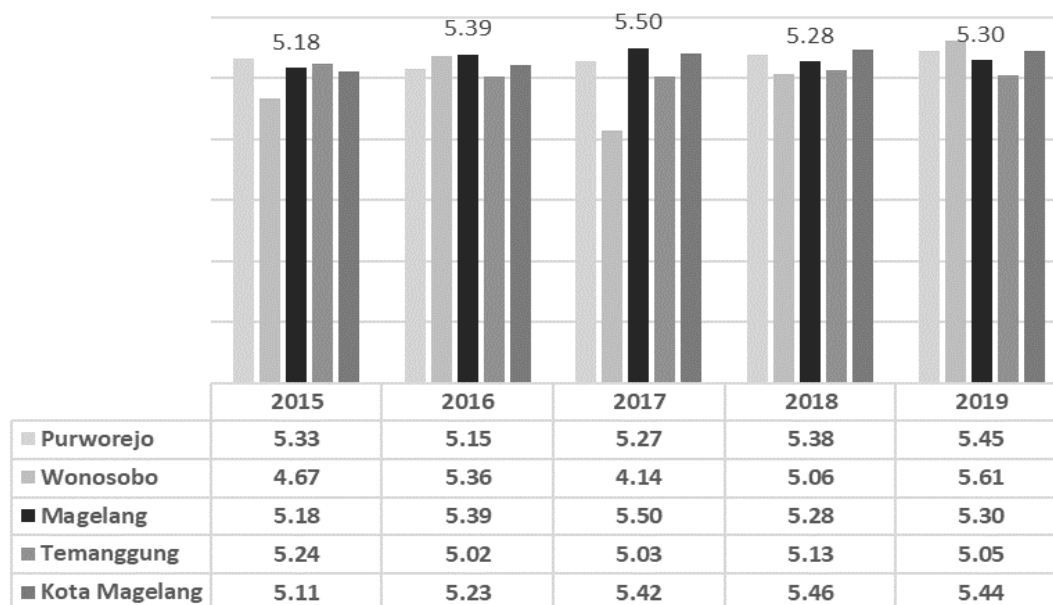
Tabel 2.13

Perkembangan Komponen PMTB dan ICOR Kabupaten Magelang Tahun 2015-2019

Uraian	Tahun				
	2015	2016	2017	2018	2019
Nilai Total PMTB					
a. ADHB (trilyun Rp.)	6,57	7,04	7,70	8,88	9,81
b. ADHK 2010 (Trilyun Rp.)	4,89	5,12	5,48	6,00	6,39
Proporsi terhada PDRB (% ADHB)	27,20	26,83	27,36	29,27	29,89
Pertumbuhan PMTB	4,49	4,81	6,97	9,49	10,75
ICOR	5,27	5,04	5,20	5,28	3,84

Sumber : BPS Kabupaten Magelang, 2020

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Magelang tahun 2015-2019 jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota se eks Karesidenan Kedu, mengalami pertumbuhan tertinggi selama dua tahun, yaitu tahun 2016 dan 2017. Kota Magelang menikmati pertumbuhan tertinggi selama dua tahun, yaitu tahun 2013 dan 2017. Data selengkapnya disajikan dalam gambar berikut.



Sumber: BPS Prov. Jateng, 2020

Gambar 2.9
Pertumbuhan Ekonomi kabupaten/kota
se eks Karesidenan Kedu Tahun 2015-2019

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Magelang tahun 2015-2019 secara sektoral didukung dengan pertumbuhan positif seluruh lapangan usaha, dengan rata-rata pertumbuhan tertinggi adalah Informasi dan Komunikasi, diikuti jasa perusahaan, dan jasa lainnya. Data selengkapnya disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 2.14
Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2010
Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Magelang Tahun 2015 – 2019

Sektor PDRB Lapangan Usaha Seri 2010	Tahun				
	2015	2016	2017	2018	2019
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3,54	3.32	1.86	3.10	0.79
B. Pertambangan dan Penggalian	1,71	2.94	4.51	3.33	4.74
C. Industri Pengolahan	5,52	5.79	4.65	5.34	6.07
D. Pengadaan Listrik dan Gas	1,50	4.83	4.91	5.39	5.55
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	1,33	2.17	7.03	5.48	4.40
F. Konstruksi	5,93	6.32	6.47	5.97	4.87
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	3,99	5.28	6.38	4.80	5.88
H. Transportasi dan Pergudangan	8,54	6.61	6.13	6.20	8.55

Sektor PDRB Lapangan Usaha Seri 2010	Tahun				
	2015	2016	2017	2018	2019
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	6,60	6.02	6.36	7.27	8.16
J. Informasi dan Komunikasi	9,45	8.09	13.35	12.77	11.38
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	8,44	9.06	5.98	4.11	3.77
L. Real Estate	7,35	6.56	6.50	5.06	5.68
M,N. Jasa Perusahaan	9,74	10.18	9.30	9.89	9.97
O. Administrasi Pemerintahan, Pertanahan dan Jaminan Sosial Wajib	4,24	2.22	2.57	3.05	3.78
P. Jasa Pendidikan	7,10	6.45	7.67	8.15	7.58
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	6,92	9.78	9.15	8.68	6.81
R,S,T,U. Jasa Lainnya	3,29	8.64	9.31	9.86	9.25
TOTAL	5.18	5.39	5.31	5.43	5.28

Sumber: BPS Kabupaten Magelang, 2020

Nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Magelang Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2010 selama tahun 2015-2019 mengalami peningkatan Rp. 4.388.502,35 juta, dari Rp. 18.86.651,97 juta (2015) menjadi Rp. 23.253.154,32 juta (2019). Data selengkapnya disajikan dalam tabel berikut.

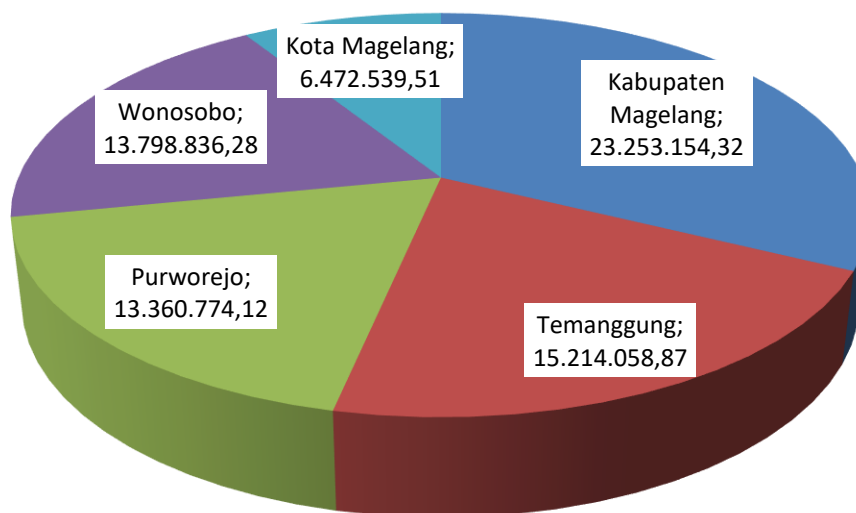
Tabel 2.15
 Nilai PDRB Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2010
 Kabupaten Magelang Tahun 2015-2019

Sektor PDRB Lapangan Usaha Seri 2010	2015	2016	2017	2018	2019
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	4.109.141	4.245.740	4.324.893	4.458.856	4.492.185,88
B. Pertambangan dan Penggalan	750.943	772.990	805.456	836.424	876.070,04
C. Industri Pengolahan	4.012.571	4.244.932	4.437.345	4.672.707	4.966.924,89
D. Pengadaan Listrik dan Gas	11.439	11.992	12.581	13.259	13.993,87
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	18.652	19.057	20.297	21.515	22.460,84
F. Konstruksi	1.791.406	1.904.581	2.023.236	2.148.795	2.253.393,53
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	2.691.442	2.833.603	3.006.270	3.165.174	3.351.229,29
H. Transportasi dan Pergudangan	729.692	777.889	825.559	876.756	951.708,06
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	776.587	823.333	875.649	940.610	1.017.360,62
J. Informasi dan Komunikasi	826.096	892.927	993.559	1.143.531	1.273.713,56

Sektor PDRB Lapangan Usaha Seri 2010	2015	2016	2017	2018	2019
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	496.492	541.480	573.355	595.696	617.952,87
L. Real Estate	399.216	425.387	452.994	476.873	503.959,62
M,N. Jasa Perusahaan	45.583	50.225	54.604	60.446	66.472,66
O. Administrasi Pemerintahan, Pertanahan dan Jaminan Sosial Wajib	683.672	698.849	716.810	738.658	766.579,33
P. Jasa Pendidikan	966.240	1.028.593	1.102.138	1.200.008	1.290.968,90
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	145.634	159.884	173.634	189.951	202.887,18
R,S,T,U. Jasa Lainnya	409.849	445.280	484.420	535.737	585.293,19
PDRB	18.864.652	19.876.744	20.882.801	22.074.996	23.253.154,32

Sumber: BPS Kabupaten Magelang, 2020

PDRB Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2010 Kabupaten Magelang tahun 2017 jika dibandingkan dengan PDRB Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2010 kabupaten/kota se eks Karesidenan Kedu, adalah yang terbesar, diikuti Kabupaten Temanggung, berikutnya Kabupaten Wonosobo, kemudian Kabupaten Purworejo dan terakhir Kota Magelang. Data selengkapnya disajikan dalam gambar berikut.



Gambar 2.10

PDRB Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2010 Kabupaten/Kota se-Eks Karesidenan Kedu Tahun 2019

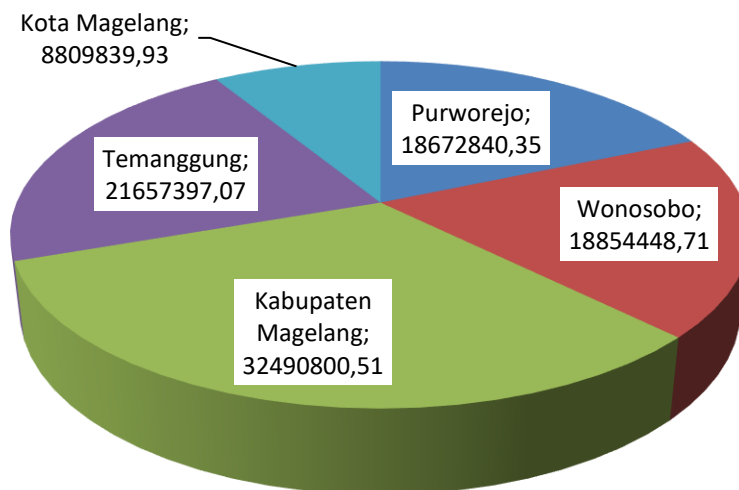
PDRB Kabupaten Magelang Atas Dasar Harga Berlaku pada periode 2015-2019 meningkat sebesar Rp. 8.342.156,35 juta, dari Rp. 24.148.644,16 juta (2015) menjadi Rp. 32.490.800,51 juta (2019). Data selengkapnya disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 2.16
 Nilai PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Magelang
 Tahun 2015-2019

Sektor PDRB Lapangan Usaha Seri 2010	2015	2016	2017	2018	2019
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	5.672.624	6.001.891	6.109.389	6.555.443	6.747.256,89
B. Pertambangan dan Penggalan	1.081.439	1.140.800	1.235.485	1.375.842	1.449.936,34
C. Industri Pengolahan	5.269.654	5.715.498	6.083.683	6.614.047	7.131.884,09
D. Pengadaan Listrik dan Gas	11.433	12.564	14.278	15.509	16.397,24
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	20.486	21.341	22.962	24.285	25.814,64
F. Konstruksi	2.240.639	2.421.237	2.653.667	2.898.453	3.133.130,46
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	3.223.591	3.516.599	3.855.484	4.119.082	4.455.795,40
H. Transportasi dan Pergudangan	820.656	879.968	997.903	1.013.867	1.119.983,35
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	980.916	1.096.807	1.201.523	1.258.715	1.379.383,03
J. Informasi dan Komunikasi	756.341	818.843	949.119	1.091.706	1.230.339,44
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	634.887	714.606	788.352	844.875	896.648,50
L. Real Estate	445.879	482.445	526.299	567.594	606.436,23
M,N. Jasa Perusahaan	55.349	63.090	71.045	81.153	91.945,66
O. Administrasi Pemerintahan, Pertanahan dan Jaminan Sosial Wajib	873.406	941.578	997.561	1.039.692	1.098.363,84
P. Jasa Pendidikan	1.388.111	1.524.253	1.699.000	1.891.208	2.086.414,39
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	188.190	208.452	231.882	254.582	276.823,81
R,S,T,U. Jasa Lainnya	485.043	548.977	607.541	678.012	744.247,19
PDRB	24.148.644,00	26.108.949,00	28.045.174,00	30.324.065	32.490.800,51

Sumber: BPS Kabupaten Magelang, 2020

PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Magelang tahun 2019 jika dibandingkan dengan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku kabupaten/kota se eks Karesidenan Kedu, adalah yang terbesar, diikuti Kab. Temanggung, berikutnya Kab. Wonosobo, kemudian Kab. Purworejo dan terakhir Kota Magelang. Data selengkapnya disajikan dalam gambar berikut.



Gambar 2.11
PDRB Atas Dasar Harga Berlaku kabupaten/kota se eks Karesidenan Kedu Tahun 2019

Sektor yang dominan perekonomian Kabupaten Magelang (ADHK) tahun 2019 adalah sektor industri pengolahan (21,36 %), kemudian pertanian, kehutanan, dan perikanan (19,32 %), selanjutnya sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (14,41%).

Kontribusi sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan cenderung mengalami penurunan, sementara itu kontribusi sektor industri pengolahan menunjukkan trend meningkat. Pertumbuhan sektor primer terus menurun, sedangkan sektor sekunder dan tersier cenderung naik. Data selengkapnya disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 2.17
Perkembangan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2015-2019 Atas Dasar Harga Berlaku (Hb) dan Harga Konstan (Hk) di Kabupaten Magelang

No	Sektor	2015		2016		2017		2018		2019	
		Hb	Hk	Hb	Hk	Hb	Hk	Hb	Hk	Hb	Hk
		%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	23,97	22,91	23,63	23,40	21,78	20,71	21,62	20,20	20,77	19,32
2	Pertambangan dan Penggalian	3,87	4,15	4,22	4,44	4,41	3,86	4,54	3,79	4,46	3,77
3	Industri Pengolahan	21,24	20,79	21,62	21,80	21,69	21,25	21,81	21,17	21,95	21,36
4	Pengadaan Listrik dan Gas	0,05	0,06	0,05	0,05	0,05	0,06	0,05	0,06	0,05	0,06
5	Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,10	0,11	0,09	0,08	0,08	0,10	0,08	0,10	0,08	0,10

No	Sektor	2015		2016		2017		2018		2019	
		Hb	Hk	Hb	Hk	Hb	Hk	Hb	Hk	Hb	Hk
		%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
6	Konstruksi	9,21	9,46	9,27	9,29	9,46	9,69	9,56	9,73	9,64	9,69
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	14,25	14,69	13,60	13,39	13,75	14,40	13,58	14,34	13,71	14,41
8	Transportasi dan Pergudangan	3,20	3,64	3,33	3,40	3,56	3,95	3,34	3,97	3,45	4,09
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	3,96	3,98	4,02	4,06	4,28	4,19	4,15	4,26	4,25	4,38
10	Informasi dan Komunikasi	3,26	3,92	3,21	3,13	3,38	4,76	3,60	5,18	3,79	5,48
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	2,62	2,56	2,57	2,66	2,81	2,75	2,79	2,70	2,76	2,66
12	Real Estate	1,82	2,04	1,83	1,85	1,88	2,17	1,87	2,16	1,87	2,17
13	Jasa Perusahaan	0,22	0,23	0,22	0,23	0,25	0,26	0,27	0,27	0,28	0,29
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	3,85	3,79	3,67	3,66	3,56	3,43	3,43	3,35	3,38	3,30
15	Jasa Pendidikan	5,66	4,81	5,82	5,77	6,06	5,28	6,24	5,44	6,42	5,55
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,74	0,72	0,77	0,78	0,83	0,83	0,84	0,86	0,85	0,87
17	Jasa Lainnya	2,00	2,15	2,07	2,01	2,17	2,32	2,24	2,43	2,29	2,52
	PDRB	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

Sumber: BPS Kabupaten Magelang, 2020

Nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Magelang menurut Pengeluaran Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2010 selama tahun 2015-2019 mengalami peningkatan sebesar Rp. 8,342,156.35 juta. Meningkat dari Rp. 24.148.644 juta (2015) menjadi Rp. 32,490,800.51 juta (2019). Data selengkapnya disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 2.18

PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran Kabupaten Magelang Tahun 2015-2019 (Juta Rupiah)

No	Komponen Pengeluaran	PDRB ADHB Menurut Pengeluaran				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	17,824,181.25	19,066,541.09	20,468,392.81	21,897,417.21	23,419,218.13
2	Pengeluaran Konsumsi LNPRT	449,989.77	489,720.93	523,285.99	576,845.07	672,077.76
3	Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	2,127,326.48	2,208,562.37	2,383,355.30	2,581,515.79	2,649,272.78
4	Pembentukan Modal Tetap Bruto	6,568,276.66	7,039,221.20	7,707,266.58	8,887,094.04	9,655,036.54
5	Perubahan Inventori	798,999.71	649,095.83	350,349.58	398,077.85	540,702.32
	Net Ekspor	(3,620,129.71)	(3,220,792.37)	(3,248,796.25)	(4,001,484.49)	(4,445,507.02)
	Produk Domestik Regional Bruto	24,148,644.16	26,232,349.05	28,183,854.01	30,339,465.47	32,490,800.51

Sumber: BPS Kabupaten Magelang, 2020.

Demikian juga dengan nilai PDRB Kabupaten Magelang Atas Dasar Harga Konstan pada periode yang sama meningkat sebesar Rp. 4.388.502,35 juta dari Rp. 18.864.652 juta (2015) menjadi Rp. 23,253,154.32 juta (2019). Data selengkapnya disajikan dalam tabel berikut

Tabel 2.19

PDRB Atas Dasar Harga Konstan Menurut Pengeluaran Kabupaten Magelang Tahun 2015-2019 (Juta Rupiah)

	Komponen Pengeluaran	PDRB ADHK Menurut Pengeluaran				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	13,707,302.81	14,317,884.58	15,007,593.11	15,647,776.86	16,376,073.96
2	Pengeluaran Konsumsi LNPRT	319,783.09	337,020.13	351,286.01	377,313.73	429,760.34
3	Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	1,464,115.58	1,472,425.17	1,522,577.72	1,596,623.15	1,633,213.53
4	Pembentukan Modal Tetap Bruto	4,889,692.78	5,124,683.83	5,481,954.78	6,002,230.75	6,303,160.94
5	Perubahan Inventori	157,169.35	175,083.72	255,867.44	325,394.89	472,863.40
	Net Ekspor	(1,673,411.64)	(1,544,853.19)	(1,644,478.05)	(1,866,543.48)	(1,961,917.85)
	Produk Domestik Regional Bruto	18,864,651.97	19,882,244.24	20,974,801.01	22,082,795.90	23,253,154.32

Sumber: BPS Kabupaten Magelang, 2020

Kontribusi pengeluaran konsumsi rumah tangga dalam PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran Kabupaten Magelang selama empat tahun mengalami penurunan, jika pada tahun 2014 Konsumsi RT sebesar 73,81%, maka pada tahun 2018 Konsumsi RT menjadi sebesar 72,21%. Demikian juga komponen *net export* (expor – import) selama lima tahun mengalami penurunan, jika pada tahun 2015 komponen net export sebesar -14,99%, pada tahun 2018 komponen net export menjadi sebesar -12,96%. Perkembangan positif terjadi pada komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB). Jika pada tahun 2015 komponen PMTB sebesar 27,20%, pada tahun 2018 komponen PMTB menjadi sebesar 29,27%. Data selengkapnya disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 2.20

Distribusi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran Kabupaten Magelang Tahun 2015-2019

No	Komponen Pengeluaran	Distribusi Persentase PDRB ADHB Menurut Pengeluaran				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	73.81	72.68	72.62	72.17	72.08
2	Pengeluaran Konsumsi LNPRT	1.86	1.87	1.86	1.9	2.07
3	Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	8.81	8.42	8.46	8.51	8.15
4	Pembentukan Modal Tetap Bruto	27.2	26.83	27.35	29.29	29.72

No	Komponen Pengeluaran	Distribusi Persentase PDRB ADHB Menurut Pengeluaran				
		2015	2016	2017	2018	2019
5	Perubahan Inventori	3.31	2.47	1.24	1.31	1.66
	Net Ekspor	-14.99	-12.28	-11.53	-13.19	-13.68
	Produk Domestik Regional Bruto	100	100	100	100	100

Sumber: BPS Kabupaten Magelang, 2020

Kontribusi pengeluaran konsumsi rumah tangga dalam PDRB Atas Dasar Harga Konstan Menurut Pengeluaran Kabupaten Magelang selama empat tahun mengalami penurunan, jika pada tahun 2015 Konsumsi RT sebesar 73.81%, maka pada tahun 2019 Konsumsi RT menjadi sebesar 72.08%. Demikian juga komponen *net export* (expor – import) selama lima tahun mengalami penurunan, jika pada tahun 2015 komponen *net export* sebesar -8,87%, pada tahun 2018 komponen *net export* menjadi sebesar 8,37%.

Perkembangan positif terjadi pada komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB). Jika pada tahun 2015 komponen PMTB sebesar 25,92%, pada tahun 2018 komponen PMTB menjadi sebesar 27,19%. Data selengkapnya disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 2.21

Distribusi PDRB Atas Dasar Harga Konstan Menurut Pengeluaran Kabupaten Magelang Tahun 2015-2019

No	Komponen Pengeluaran	Distribusi Persentase PDRB ADHB Menurut Pengeluaran				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	73.81	72.68	72.62	72.17	72.08
2	Pengeluaran Konsumsi LNPRT	1.86	1.87	1.86	1.9	2.07
3	Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	8.81	8.42	8.46	8.51	8.15
4	Pembentukan Modal Tetap Bruto	27.2	26.83	27.35	29.29	29.72
5	Perubahan Inventori	3.31	2.47	1.24	1.31	1.66
	Net Ekspor	-14.99	-12.28	-11.53	-13.19	-13.68
	Produk Domestik Regional Bruto	100	100	100	100	100

Sumber: BPS Kabupaten Magelang, 2020

Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan Menurut Pengeluaran Kabupaten Magelang selama empat tahun tumbuh diatas 5%. Jika pada tahun 2015 tumbuh sebesar 5,18%, maka pada tahun 2018 menjadi sebesar 5,43%.

Sementara itu, pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran Kabupaten Magelang selama empat tahun tumbuh diatas 7%. Namun, pertumbuhannya mengalami pelambatan. Jika pada tahun 2015 tumbuh sebesar 10,98%, maka pada tahun 2018 menjadi sebesar 7,80%.

Selain komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB), pertumbuhan komponen lain mengalami pelambatan. Jika pada tahun 2015 komponen PMTB tumbuh sebesar 4,49% (ADHK) dan 11,14 (ADHB), pada tahun 2018 komponen PMTB tumbuh sebesar 9,49% (ADHK) dan 15,33 (ADHB). Data selengkapnya disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 2.22

Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan Menurut Pengeluaran
Kabupaten Magelang Tahun 2015-2019

No	Komponen Pengeluaran	Laju Pertumbuhan PDRB ADHK Menurut Pengeluaran (Persen)				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	4.08	4.45	4.82	4.27	4.65
2	Pengeluaran Konsumsi LNPRT	-1.28	5.39	4.23	7.41	13.9
3	Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	2.43	0.57	3.41	4.86	2.29
4	Pembentukan Modal Tetap Bruto	4.49	4.81	6.97	9.49	5.01
	PDRB	5.18	5.39	5.5	5.28	5.3

Sumber: BPS Kabupaten Magelang, 2020

2.2.2 Laju Inflasi

Inflasi di Kabupaten Magelang mengalami penurunan, jika pada tahun 2015 sebesar 3,60 menjadi lebih lambat pada tahun 2018 menjadi sebesar 2,66. Pada tahun 2019 laju inflasi Kabupaten Magelang lebih lambat dari laju inflasi Provinsi Jawa Tengah (2,81) maupun Nasional (3,72). Inflasi Kabupaten Magelang pada periode 2015-2019 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.23

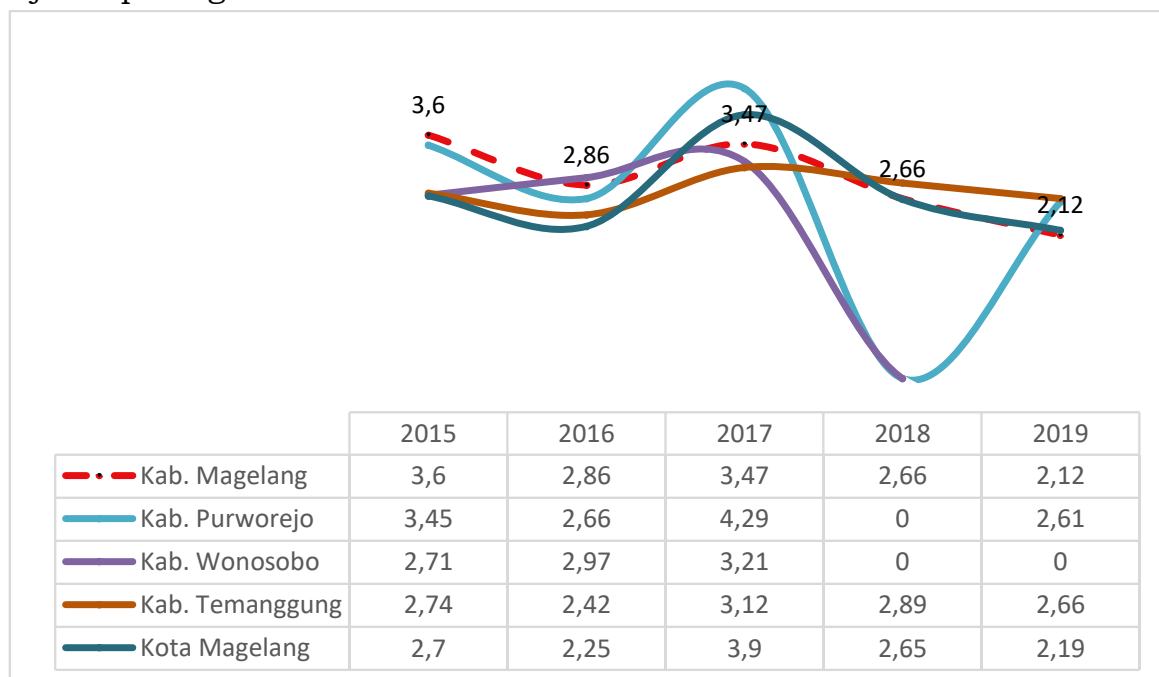
Inflasi Kabupaten Magelang Menurut Kelompok Pengeluaran (YoY)
Tahun 2015-2019

No	Kelompok Pengeluaran	Satuan	Tahun				
			2015	2016	2017	2018	2019
1	Bahan Makanan	%	3,80	6,25	2,15	3,39	3,77
2	Makanan Jadi, Minuman dan Rokok	%	6,40	5,23	2,47	2,99	2,85
3	Perumahan, Air, Listrik, Gas dan Bahan Bakar	%	5,34	1,21	5,67	1,68	1,04
4	Sandang	%	2,23	2,53	2,77	2,06	4,13
5	Kesehatan	%	3,45	2,42	2,21	2,00	2,07
6	Pendidikan, Rekreasi dan Olahraga	%	2,67	0,80	2,64	1,45	2,07
7	Transport, Komunikasi dan Jasa Keuangan	%	-1,86	2,14	5,01	3,57	-0,30
	Inflasi Kabupaten Magelang	%	3,60	2,86	3,47	2,66	2,12
	Inflasi Provinsi Jawa Tengah	%	2,73	2,36	3,71	2,83	2,81
	Inflasi Nasional	%	3,35	3,02	3,61	3,13	2,72

Sumber : BPS Kabupaten Magelang 2020

Inflasi Kabupaten Magelang, jika disandingkan dengan inflasi kabupaten/kota se eks Karesidenan Kedu, mempunyai pola yang sama. Namun, jika dihitung secara rata-rata, inflasi di Kabupaten Magelang, selama lima tahun adalah yang tertinggi, yaitu 2,94. Sementara, inflasi terendah

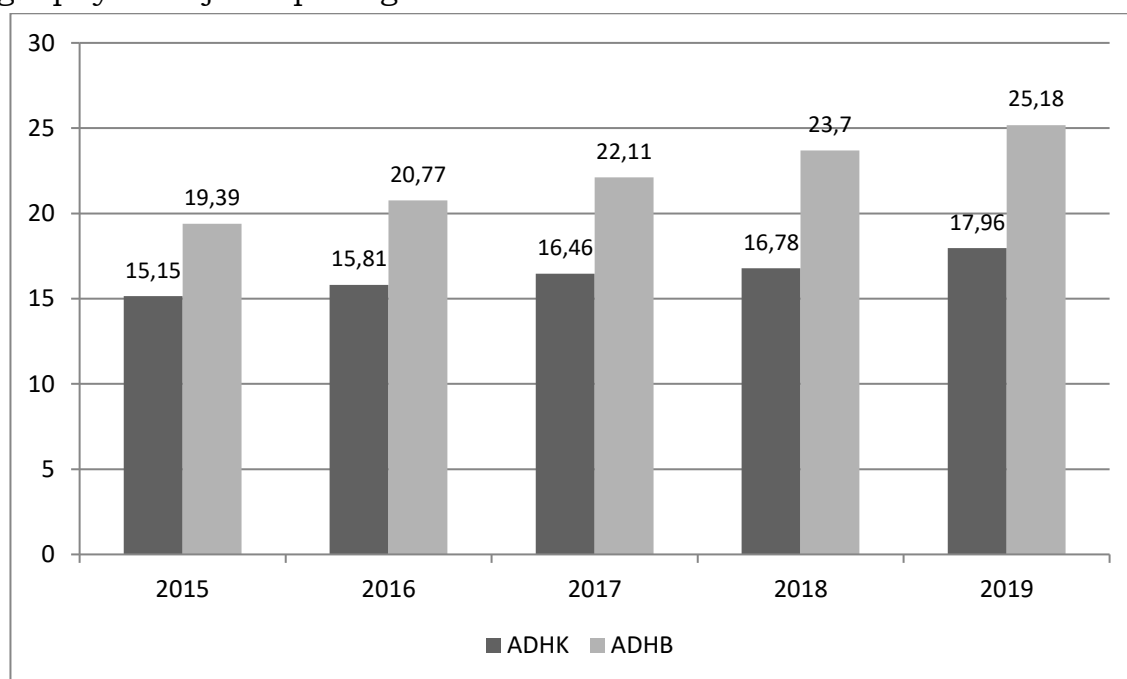
dalam lima tahun ini, dialami Kota Magelang, yaitu 2,75. Data selengkapnya disajikan pada gambar berikut.



Gambar 2.12
Inflasi kabupaten/kota se eks Karesidenan Kedu
Tahun 2015-2019

2.2.3 PDRB Per Kapita

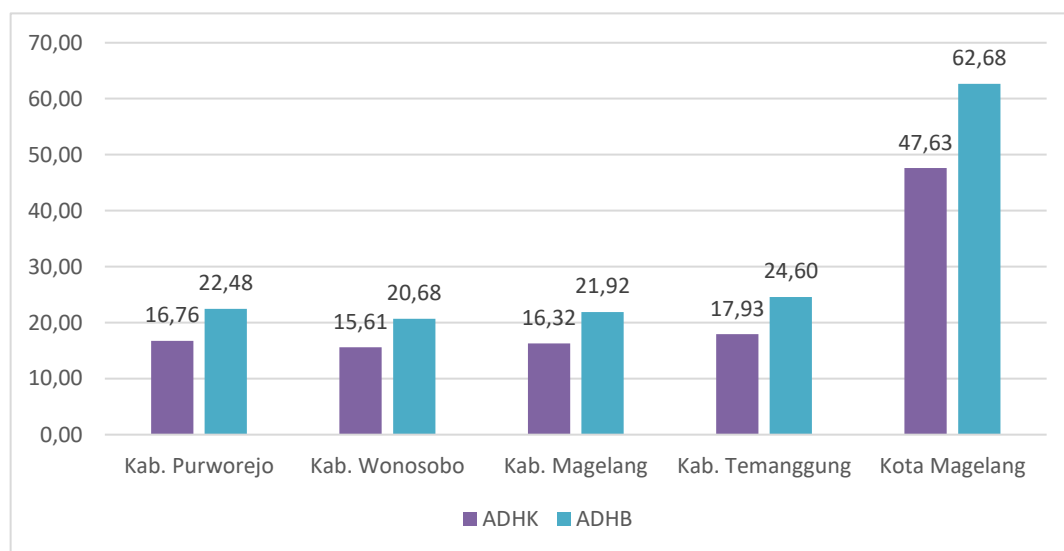
Pada tahun 2015 PDRB ADHK per kapita Kabupaten Magelang sebesar Rp.15,15 juta/tahun dan meningkat menjadi Rp.17,96/tahun pada tahun 2019. Sementara itu, pada tahun 2015 PDRB ADHB per kapita Kabupaten Magelang sebesar Rp.19,39 juta /tahun dan meningkat menjadi Rp.25,18 juta /tahun pada tahun 2019. Data PDRB Per Kapita (ADHK dan ADHB), selengkapnya disajikan pada gambar berikut.



Sumber: BPS Kabupaten Magelang Tahun 2020

Gambar 2.13
PDRB Perkapita (ADHK dan ADHB) Kabupaten Magelang
Tahun 2015-2019

PDRB Perkapita (ADHK dan ADHB Kabupaten Magelang disandingkan dengan kabupaten/kota se eks Karesidenan Kedu, berada pada urutan kedua dari bawah. PDRB Perkapita (ADHK dan ADHB Kabupaten Magelang hanya lebih tinggi dari Kab. Wonosobo. Data selengkapnya disajikan pada gambar berikut.



Gambar 2.14

PDRB Perkapita kabupaten/kota se eks Karesidenan Kedu Tahun 2017

2.2.4 Pemerataan Pembangunan

• Indeks Gini/Koefisien Gini

Indeks gini/koefisien gini merupakan salah satu indikator tingkat pemerataan distribusi pendapatan atau dengan kata lain indikator pengukur ketimpangan pendapatan. Koefisien gini merupakan suatu ukuran pemerataan yang dihitung dengan membagi penduduk berdasarkan tingkat pendapatannya, kemudian menetapkan proporsi pendapatan yang diterima masing-masing kelompok penduduk. Angka koefisien gini berkisar antara nol (pemerataan sempurna) hingga satu (ketimpangan sempurna). Angka koefisien gini yang semakin mendekati nol berarti dapat diartikan bahwa pemerataan semakin baik. Sebaliknya, apabila angka koefisien semakin mendekati 1, maka dapat diartikan bahwa ketimpangan pendapatan semakin besar.

Tabel 2.24

Indeks Gini Kabupaten Magelang tahun 2015-2019

No	Indikator	2015	2016	2017	2018	2019
1	Indeks Gini	0,34	0,37	N/A	0,344	0,342
2	Kriteria Ketimpangan	Rendah	Rendah	Rendah	Rendah	Rendah
3	Indeks Gini Provinsi Jawa Tengah	0,382	0,357	0,365	0,389	0,361

Sumber: BPS Kabupaten Magelang, 2019

Koefisien gini Kabupaten Magelang pada periode tahun 2015-2016 relatif tetap. Hal ini mengindikasikan bahwa ketimpangan pendapatan yang

terjadi masih dalam kategori ketimpangan rendah, yaitu antara 0,34-0,37. Koefisien gini Kabupaten Magelang masih lebih kecil dibandingkan dengan koefisien gini Provinsi Jawa Tengah. Artinya, kondisi distribusi pendapatan penduduk di Kabupaten Magelang masih dapat dikatakan lebih baik dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah.

- **Pemerataan Pendapatan Versi Bank Dunia**

Ketimpangan pendapatan penduduk tidak hanya dapat dilihat dari angka koefisien gini, tetapi dapat diamati dengan pendekatan pemerataan pendapatan versi Bank Dunia. Pemerataan pendapatan versi Bank Dunia merupakan pemerataan pendapatan yang diperhitungkan berdasarkan pendekatan yang dilakukan oleh Bank Dunia. Pendekatan ini mengelompokkan penduduk ke dalam tiga kelompok berdasarkan besarnya pendapatan, yakni 40% penduduk berpendapatan rendah, 40% penduduk berpendapatan menengah, dan 20% penduduk berpendapatan tinggi. Ketimpangan pendapatan diukur dengan menghitung persentase jumlah pendapatan penduduk dari kelompok yang berpendapatan 40% terendah dibandingkan total pendapatan seluruh penduduk. Kategori ketimpangan ditentukan sebagai berikut.

1. Ketimpangan pendapatan tinggi

Proporsi jumlah pendapatan dari penduduk yang masuk kategori 40 persen terendah terhadap total pendapatan seluruh penduduk kurang dari 12 persen.

2. Ketimpangan pendapatan sedang/menengah

Proporsi jumlah pendapatan dari penduduk yang masuk kategori 40 persen terendah terhadap total pendapatan seluruh penduduk antara 12-17 persen.

3. Ketimpangan pendapatan rendah

Proporsi jumlah pendapatan dari penduduk yang masuk kategori 40 persen terendah terhadap total pendapatan seluruh penduduk lebih dari 17 persen.

Tabel 2.25

Pemerataan Pendapatan Versi Bank Dunia
di Kabupaten Magelang Tahun 2015-2019

No	Kelompok Penduduk	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	40 % Penduduk Berpendapatan Terendah	19,18	N/A	18,6	18,52	17,71
2	40% Penduduk Berpendapatan Menengah	33,72	N/A	35	36,17	36,75
3	20% Penduduk Berpendapatan Tertinggi	47,10	N/A	46,41	45,41	45,53
Kriteria Ketimpangan		Rendah	N/A	Rendah	Rendah	Rendah

Sumber : BPS Kabupaten Magelang 2020

Berdasarkan pendekatan ini, distribusi pendapatan penduduk Kabupaten Magelang masuk ke dalam kategori ketimpangan pendapatan rendah. Proporsi jumlah pendapatan dari penduduk yang masuk kategori 40

persen terendah terhadap total pendapatan seluruh penduduk pada periode 2017-2019 flutuaktif, sedangkan untuk proporsi penduduk berpendapatan tinggi mengalami sedikit peningkatan pada tahun 2018-2019. Hal ini menunjukkan bahwa ketimpangan pendapatan penduduk di dalam Kabupaten Magelang cenderung tetap.

- **Indeks Williamson (Indeks Ketimpangan Wilayah)**

Indeks Williamson merupakan pendekatan kuantitatif yang digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan wilayah. Perhitungan Indeks Williamson didasarkan pada PDRB per kapita dan jumlah penduduk. Hasil pengukuran Indeks Williamson kemudian dikelompokkan ke dalam tiga kategori, yaitu:

- a. $IW < 0,4$ artinya tingkat ketimpangan rendah;
- b. $0,4 < IW < 0,5$ artinya tingkat ketimpangan moderat;
- c. $IW > 0,5$ artinya tingkat ketimpangan tinggi.

Jika Indeks Williamson semakin mendekati angka 0 maka semakin kecil ketimpangan pembangunan ekonomi. Sebaliknya apabila Indeks Williamson semakin mendekati angka 1 maka semakin besar ketimpangan pembangunan ekonomi.

Indeks Williamson Kabupaten Magelang termasuk dalam kategori moderat. Tercatat besar indeks williamson Kabupaten Magelang pada tahun 2014 sebesar 0,40 dan cenderung stagnan hingga tahun 2016. Besar nilai Indeks Williamson yang masih masuk dalam kategori moderat menunjukkan bahwa masih perlunya pemerataan ekonomi antar wilayah di Kabupaten Magelang.

2.2.5 Penduduk Miskin

Kemiskinan merupakan salah satu indikator makro terutama untuk mengukur perkembangan ekonomi suatu wilayah. Kemiskinan yang sangat erat kaitannya dengan tingkat kesejahteraan selalu menjadi fokus yang bisa diintervensi oleh Pemerintah dan menjadi prioritas dalam rencana pembangunan, baik jangka menengah maupun jangka panjang. Untuk melihat capaian indikator kemiskinan Kabupaten Magelang tahun 2015-2019 bisa dilihat di tabel di bawah ini.

Tabel 2.26
Tingkat Kemiskinan di Kabupaten Magelang Tahun 2015-2019

Indikator Kabupaten Magelang	Satuan	2015	2016	2017	2018	2019
Garis Kemiskinan	Rp/Kapita Bulan	253.866	271.800	281.237	296.327	325.921
Jumlah penduduk miskin	000 Jiwa	162,38	158,86	157,15	143,44	137,45
Persentase Jumlah Penduduk Miskin	(%)	13,07	12,67	12,42	11,23	10,67
Persentase Jumlah Penduduk Di Atas Garis Kemiskinan	(%)	86,93	87,33	87,58	88,77	89,33
Indek keparahan kemiskinan	%	0,32	0,44	0,34	0,34	0,17
Indek Kedalaman Kemiskinan	%	1,60	1,84	1,67	1,55	0,98

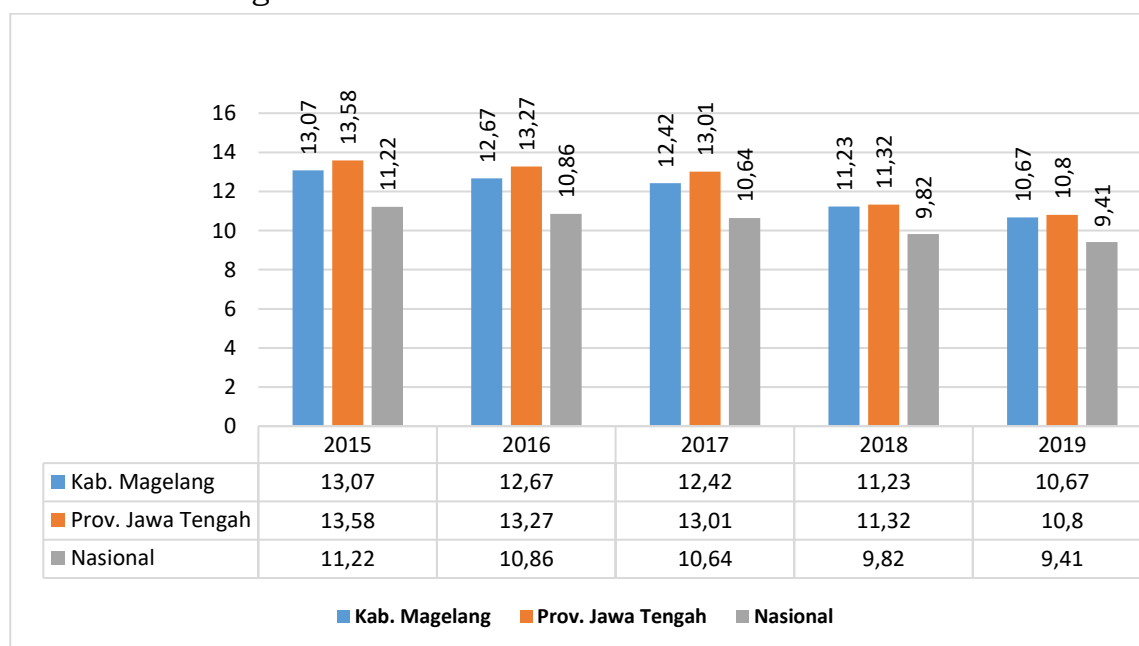
Sumber: BPS Kabupaten Magelang 2020

Dari tabel diatas menunjukkan garis kemiskinan selama 5 (lima) tahun terakhir semakin meningkat, dari Rp. 253.866,- pada tahun 2015 menjadi Rp. 325.921 pada tahun 2019. Hal ini menunjukkan tingkat pengeluaran penduduk miskin dari tahun ke tahun mengalami peningkatan.

Pada tahun 2015, persentase penduduk miskin Kabupaten Magelang mencapai 13,07% atau sebesar 162.380 jiwa. Walaupun belum mampu mencapai target yang diamanatkan dalam RPJMD 2014-2019 sebesar 8% pada tahun 2019, namun trend selama lima tahun terakhir persentase kemiskinan menunjukkan penurunan. Tahun 2019 capaian angka kemiskinan sebesar 10,67% atau 137.450 jiwa.

Indeks Kedalaman Kemiskinan (*Poverty Gap Index-P1*), merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan selama 5 (lima) tahun terakhir menunjukkan trend yang positif, dari 1,60 pada tahun 2015, turun menjadi 0,98 pada tahun 2019. Begitu pula dengan Indeks Keparahan Kemiskinan (*Proverty Severity Index-P2*), yang memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin, dimana semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin, menunjukkan trend penurunan, dari 0,32 pada tahun 2015 menjadi 0,17 pada tahun 2019.

Jika dilihat perbandingan dengan provinsi dan nasional, selama 5 (lima) tahun terakhir indikator kemiskinan, khususnya persentase angka kemiskinan dan jumlah penduduk miskin secara umum menunjukkan kecenderungan menurun. Pada periode Maret tahun 2018, capaian penurunan angka kemiskinan di Kabupaten Magelang lebih rendah dibandingkan dengan angka kemiskinan Provinsi Jawa Tengah (11,32%), namun masih berada di atas capaian nasional (9,82 %). Untuk lebih jelasnya bisa dilihat dalam gambar di bawah ini.



Sumber: BPS Kabupaten Magelang 2020

Gambar 2.15

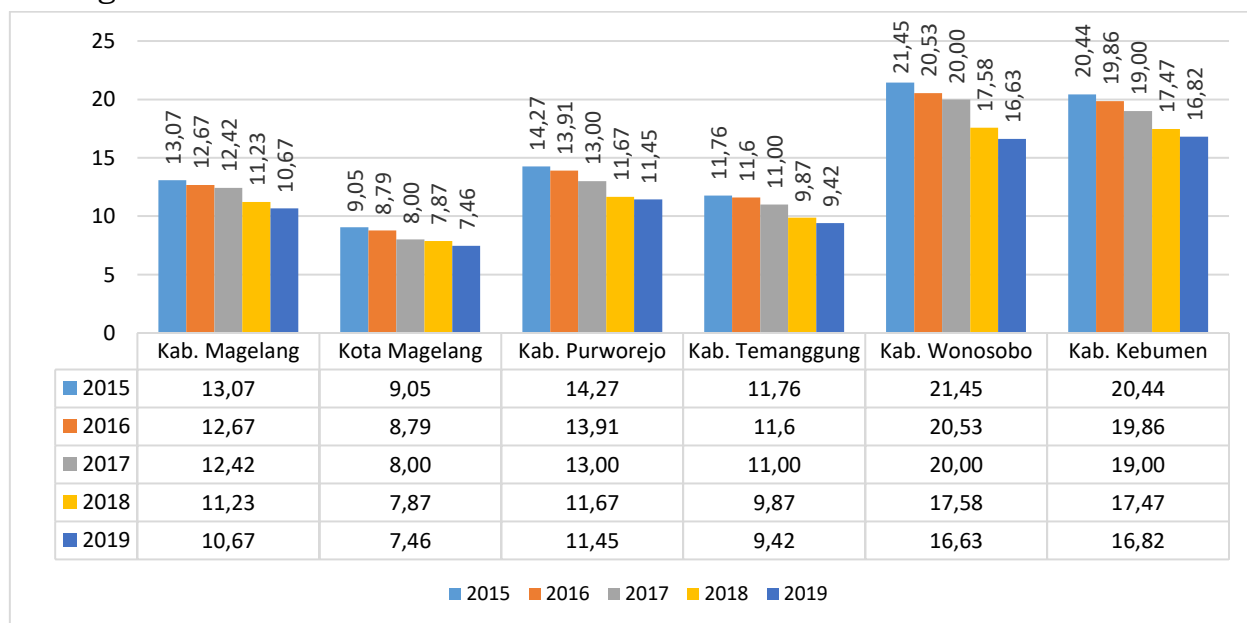
Perbandingan Capaian Persentase Kemiskinan Kab. Magelang, Provinsi dan Nasional 2015-2019

Persentase angka kemiskinan dan jumlah penduduk miskin di Kabupaten Magelang dari tahun 2015-2019 mengalami penurunan rata-rata sebesar 0,55% setiap tahunnya, adapun penurunan tertinggi terjadi pada tahun 2018 sebesar 1,19%. Demikian juga capaian provinsi dan nasional, jika dilihat di grafik di atas penurunan paling tajam terjadi pada tahun 2018.

Secara umum, penurunan angka kemiskinan tersebut dipengaruhi beberapa faktor, antara lain:1) bantuan sosial dari pemerintah turun tepat waktu, 2) nilai inflasi bisa dikendalikan, dan 3) naiknya nilai tukar petani.

Walaupun angka kemiskinan di Kabupaten Magelang mengalami penurunan yang cukup signifikan, tetapi capaian tersebut belum berhasil untuk mencapai target yang telah ditetapkan dalam RPJMD 2014-2019 dan Target SDGs yaitu sebesar 8% pada tahun 2019.

Jika dibandingkan dengan capaian angka kemiskinan di 5 (lima) Kabupaten/ Kota lainnya di eks Karesidenan Kedu, maka bisa dilihat posisi capaian Kabupaten Magelang berada pada posisi tengah, atau nomor 3 (tiga) diatas Kota Magelang dan Kabupaten Temanggung. Selengkapnya bisa dilihat dalam gambar dibawah.



Sumber: BPS Kabupaten Magelang 2020

Gambar 2.16

Perbandingan Capaian Persentase Kemiskinan Kab. Magelang dengan Kota/ Kabupaten se Eks. Karesidenan Kedu 2015-2019

Secara umum dapat dilihat bahwa penurunan angka kemiskinan di 6 (enam) Kabupaten/ Kota di eks. Karesidenan Kedu menunjukkan trend yang menurun. Capaian angka kemiskinan Kabupaten Magelang tahun 2019 berada pada posisi ke 3 (tiga), diatas Kota Magelang dan Kabupaten Temanggung, tetapi dibawah Kabupaten Wonosobo, Kabupeten Purworejo dan Kabupaten Kebumen. Penurunan angka kemiskinan tersebut secara umum dipengaruhi beberapa faktor, antara lain:1) bantuan sosial dari pemerintah turun tepat waktu, 2) nilai inflasi bisa dikendalikan, dan 3) naiknya nilai tukar petani.

Pandemi virus corona yang terjadi pada tahun 2020 memukul perekonomian seluruh dunia, termasuk Indonesia dan Kabupaten Magelang hanya dalam waktu beberapa bulan. Pandemi Covid-19 dapat memutarbalikan tren penurunan angka kemiskinan dalam 5 (lima) tahun terakhir, selama 5 (lima) tahun terakhir angka kemiskinan berhasil diturunkan sebesar 2,75% atau rata-rata 0,55% setiap tahunnya. Jumlah penduduk miskin pada Maret 2019 tercatat sebanyak 137.450 jiwa, turun dari Maret 2015 yang sebesar 162.380 jiwa. Diperkirakan pada tahun 2021 akan terjadi lonjakan jumlah penduduk miskin di Kabupaten Magelang, mengingat adanya potensi masyarakat yang rentan miskin/ hampir miskin akan jatuh di bawah garis kemiskinan. Adanya PHK masal dan kelesuan beberapa sektor ekonomi yang mengakibatkan berkurangnya pendapatan masyarakat akan menjadi faktor utama penyebab bertambahnya jumlah penduduk miskin. Pada tahun 2021 diperkirakan target penurunan angka kemiskinan sebesar 0,65% tidak akan tercapai. Guna menjaga jumlah penduduk miskin, Pemerintah Kabupaten sudah melakukan langkah-langkah strategis melalui refocusing belanja dalam APBD 2021 untuk diarahkan mengatasi dampak covid-19, antara lain melalui strategi untuk mengurangi beban pengeluaran masyarakat, khususnya masyarakat miskin dan hampir miskin, melanjutkan penyaluran bantuan sosial berupa Jaring Pengaman Sosial (JPS) yang difokuskan untuk warga yang langsung terdampak pandemi covid-19. Hal ini menjadi salah satu upaya untuk bisa menjaga agar kemiskinan tidak semakin melonjak akibat Covid-19. Adapun sasaran pemberian bantuan sosial dan jaring pengaman sosial yang dianggarkan dari APBD Kabupaten tidak hanya untuk masyarakat yang masuk dalam Data Terpadu kesejahteraan Sosial (DTKS) tetapi juga termasuk masyarakat di luar data DTKS yang terdampak covid-19 baik langsung ataupun tidak langsung.

2.2.6 Indeks Pembangunan Manusia

Pada 2019 IPM Kabupaten Magelang mencapai 69,87 mengalami kenaikan sebesar 2,74 dari tahun 2015 yang sebesar 67,13 dengan rata-rata kenaikan per tahun 0,69. IPM Kabupaten Magelang masih berada di bawah nilai IPM Provinsi Jawa Tengah (71,73) maupun Nasional (71,92). Namun, pertumbuhan IPM Kabupaten Magelang lebih tinggi dari pertumbuhan IPM Provinsi Jawa Tengah (2,24) maupun Indonesia (2,37). Data selengkapnya disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 2.27

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Magelang,
Prov. Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2015-2019

Indikator IPM	Satuan	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
Umur Harapan Hidup	Tahun	73,27	73,33	73,39	73,47	73,56
Harapan Lama Sekolah	Tahun	12,14	12,15	12,47	12,48	12,53
Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	7,19	7,40	7,41	7,57	7,77
Pengeluaran Riil Per Kapita	Ribu Rp	8.182	8.501	8.627	9,025	9.387
IPM Kabupaten Magelang		67,13	67,85	68,39	69,11	69,87

Indikator IPM	Satuan	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
Provinsi Jawa Tengah		69,49	69,98	70,52	71,12	71,73
Nasional		69,55	70,18	70,81	71,39	71,92

Sumber : BPS Kabupaten Magelang dan Jawa Tengah Tahun 2020

Jika disandingkan se eks Karesidenan Kedu, IPM Kabupaten Magelang masih berada di urutan ketiga, di bawah nilai IPM Kota Magelang dan Kabupaten Purworejo. Namun, pertumbuhan IPM Kabupaten Magelang (2,74) berada di urutan pertama dibandingkan kabupaten yang lainnya. Data selengkapnya disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 2.28

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) kabupaten/kota eks Karesidenan Kedu Tahun 2015-2019

Kabupaten / Kota	Tahun				
	2015	2016	2017	2018	2019
Kabupaten Purworejo	70,37	70,66	71,31	71,87	72,50
Kabupaten Wonosobo	65,7	66,19	66,89	67,81	68,27
Kabupaten Magelang	67,13	67,85	68,39	69,11	69,87
Kabupaten Temanggung	67,07	67,6	68,34	68,83	69,56
Kota Magelang	76,39	77,16	77,84	78,31	78,80

Sumber : BPS Jawa Tengah Tahun 2019

1. Umur Harapan Hidup

Pada 2019 Umur Harapan Hidup (UHH) Kabupaten Magelang mencapai 73,56 mengalami kenaikan sebesar 0,29 dari tahun 2015 yang sebesar 73,27. Pertumbuhan UHH Kabupaten Magelang diatas pertumbuhan UNH Provinsi Jawa Tengah namun masih dibawah pertumbuhan UNH Nasional. Data selengkapnya disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 2.29

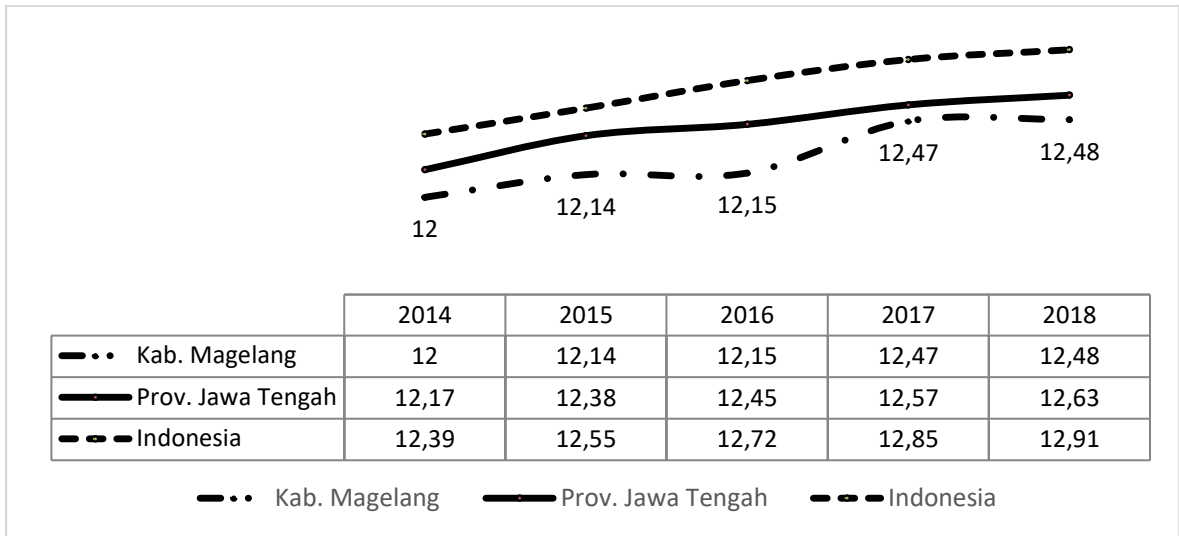
Perbandingan Umur Harapan Hidup Kabupaten Magelang Tahun 2015-2019

Indikator	Tahun				
	2015	2016	2017	2018	2019
Kabupaten Magelang	73,27	73,33	73,39	73,47	73,56
Provinsi Jawa Tengah	73,96	74,02	74,08	74,18	74,23
Nasional	70,78	70,90	71,06	71,2	71,34

Sumber : BPS Kabupaten Magelang Tahun 2020

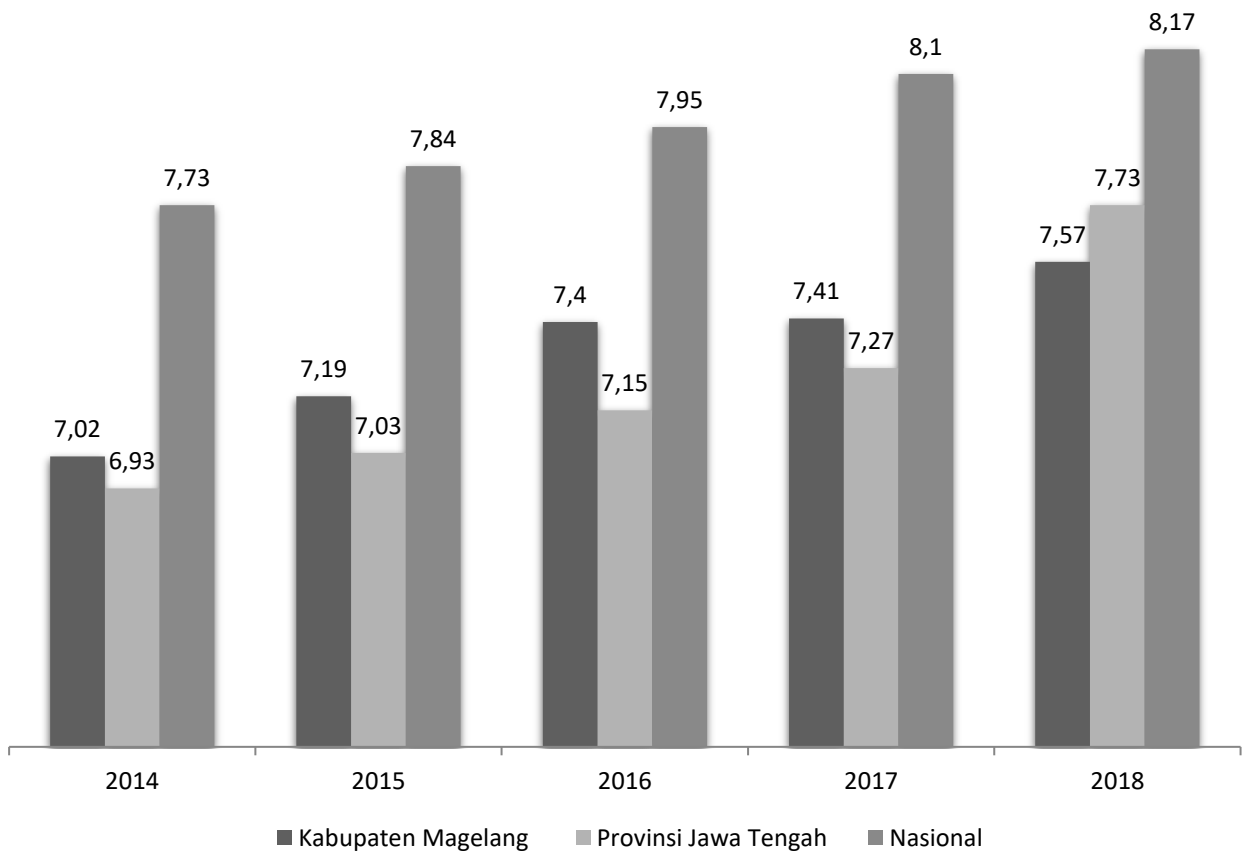
2. Harapan Lama Sekolah (HLS)

Perkembangan HLS Kabupaten Magelang pada tahun 2019 sebesar 12,53 tahun atau setara dengan SMA/SMK kelas 1. Sejak tahun 2014 HLS Kabupaten Magelang cenderung meningkat dari sebesar 12 (2014) menjadi 12,48 (2018). Harapan lama sekolah di Kabupaten Magelang tahun 2014-2017 lebih rendah dari provinsi dan nasional. Data selengkapnya disajikan dalam tabel berikut



Gambar 2.17
Harapan Lama Sekolah Kabupaten Magelang, Provinsi dan Nasional Tahun 2014-2018

3. Angka Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)



Gambar 2.18
Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Magelang, Provinsi dan Nasional Tahun 2014-2018

Pada tahun 2019 RLS Kabupaten Magelang mencapai 7,77 tahun, atau setara dengan SMP kelas 2. RLS tahun 2019 lebih tinggi RLS tahun 2018 yang mencapai 7,57 tahun. Rata-rata lama sekolah di Kabupaten Magelang

pada tahun 2014-2018 lebih tinggi daripada Jawa Tengah namun lebih rendah dari secara nasional. Sementara pada tahun 2018 Rata-rata lama sekolah di Kabupaten Magelang pada tahun 2014-2018 lebih rendah daripada Jawa Tengah dan secara nasional. Data selengkapnya disajikan dalam gambar berikut.

4. Pengeluaran per Kapita Riil yang Disesuaikan

Selama periode tahun 2015 hingga tahun 2019 pengeluaran riil per kapita Kab. Magelang meningkat 14,73%. Rata-rata pertumbuhan besarnya pengeluaran per kapita Kabupaten Magelang mencapai 3,68% per tahun, lebih tinggi dari pertumbuhan Jateng 2,95% per tahun nasional 2,83% per tahun. Namun, apabila dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah dan nasional nilai pengeluaran riil per kapita Kabupaten lebih rendah. Data selengkapnya disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 2.30

Pengeluaran Riil Per Kapita Kabupaten Magelang Tahun 2015-2019

Pengeluaran Riil Per Kapita (Ribu Rp)	Tahun				
	2015	2016	2017	2018	2019
Kabupaten Magelang	8.182	8.501	8.627	9.025	9.387
Provinsi Jawa Tengah	9.930	10.153	10.377	10.777	11.102
Nasional	10.150	10.420	10.664	11.059	11.299

Sumber : BPS Kabupaten Magelang Tahun 2020

2.2.7 Angka Partisipasi Kasar

Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam mengakses pendidikan dapat dilihat dari Angka Partisipasi Kasar (APK). Perkembangan APK Kabupaten Magelang Tahun 2015-2019 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.31

Angka Partisipasi Kasar (APK) di Kabupaten Magelang
Tahun 2015-2019

Indikator	Tahun				
	2015	2016	2017	2018	2019
Angka Partisipasi Kasar PAUD	55,57	60,27	62,64	64,79	62,73
Angka Partisipasi Kasar SD/MI/Paket A	99,87	103,69	105,87	106,76	105,30
Angka Partisipasi Kasar SMP/MTs/Paket B	84,49	82,40	88,38	91,67	91,60
Angka Partisipasi Kasar SMA/SMK/MA/Paket C	79,98	82,12	85,63	87,74	87,64

Sumber: Disdikbud Kabupaten Magelang, 2020

APK jenjang SD tahun 2016-2019 telah mencapai 100%, bahkan melampaui. Namun untuk jenjang SMP sederajat APK belum mencapai 100%. Besaran APK tidak sampai 100 menunjukkan masih ada anak yang seharusnya sekolah ternyata tidak sekolah. Hal ini secara umum

menunjukkan belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam mengakses pendidikan.

2.2.8 Angka Partisipasi Murni (APM)

Angka Partisipasi Murni (APK) menunjukkan seberapa banyak penduduk usia sekolah yang sudah dapat memanfaatkan fasilitas pendidikan sesuai pada jenjang pendidikannya. Nilai ideal APM adalah 100%. Adapun capaian APM di Kabupaten Magelang Tahun 2015-2019 bisa dilihat dalam tabel dibawah,

Tabel 2.32

Angka Partisipasi Murni di Kabupaten Magelang Tahun 2015-2019

Indikator	Tahun				
	2015	2016	2017	2018	2019
Angka Partisipasi Murni SD/MI/Paket A	86,74	89,70	92,66	94,78	98,97
Angka Partisipasi Murni SMP/MTs/Paket B	64,86	62,78	67,76	71,48	78,02
Angka Partisipasi Murni	75,8	76,24	80,21	88,18	81,42

Sumber : Disdikbud Kabupaten Magelang, 2020

APM jenjang SD dan SMP di Kabupaten Magelang pada tahun 2019 menunjukkan penurunan dibandingkan tahun 2018, dan belum mencapai angka 100%, serta untuk jenjang SMP masih relatif rendah. Hal ini menunjukkan daya serap sistem pendidikan terhadap penduduk usia sekolah di kabupaten Magelang belum optimal.

2.2.9 Angka Partisipasi Sekolah (APS)

Angka Partisipasi Sekolah (APS) pada kelompok umur 13-15 tahun mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Peningkatan APS pada kelompok umur tersebut menunjukkan bahwa akses terhadap pendidikan semakin meluas dan mudah diakses oleh masyarakat, namun masih tetap harus ditingkatkan karena belum mencapai kondisi ideal 100%.

Tabel 2.33

Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah Jenjang Pendidikan Dasar Kabupaten Magelang Tahun 2015 – 2019

No	Jenjang Pendidikan	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	7-12 th	99,37	98,18	98,94	99,81	99,91
2	13-15 th	94,08	95,65	96,45	96,78	97,41
3	16-18 th	62,40	67,24	70,36	68,05	68,36

Sumber : BPS Kabupaten Magelang, 2020

Angka Partisipasi Sekolah (APS) pada kelompok umur 7-12 tahun selama tahun 2015-2019 bersifat fluktuatif, namun apabila dibandingkan tahun 2015 ke tahun 2019 terjadi peningkatan sebesar 0,17.

Apabila dibandingkan dengan APS tingkat provinsi dan nasional, APS Kabupaten Magelang kelompok usia 7-12 tahun pada tahun 2018 lebih tinggi, demikian pula untuk kelompok usia 13-15 tahun APS

Kabupaten Magelang lebih tinggi. Berarti baik kelompok usia 7-12 ataupun usia 13-15, akses dari penduduk usia sekolah dalam menikmati pendidikan formal di sekolah masyarakat Kabupaten Magelang lebih tinggi dibanding provinsi.

Tabel 2.34

Angka Partisipasi Sekolah di Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa tengah dan Indonesia Tahun 2015-2019

No	Tahun	7-12 TAHUN			13-15 TAHUN			16-18 TAHUN		
		Kab	Prov	Nas	Kab	Prov	Nas	Kab	Prov	Nas
1	2015	99,74	99,56	99,09	94,08	95,30	94,72	62,4	67,66	70,61
2	2016	98,18	99,58	99,09	95,65	95,41	94,88	67,24	67,95	70,83
3	2017	98,94	99,62	99,14	96,45	95,48	95,08	70,36	68,48	71,42
4	2018	99,81	99,76	99,22	96,78	95,48	95,36	68,05	69,02	71,99
5	2019	99,91	99,76	99,24	97,41	96,11	95,56	68,36	69,65	72,36

Sumber: BPS Pusat dan BPS Kabupaten Magelang, 2020

2.2.10 Angka Pendidikan yang Ditamatkan

Angka pendidikan yang ditamatkan adalah angka yang memperlihatkan penduduk yang telah menyelesaikan pelajaran pada kelas atau tingkat terakhir suatu jenjang sekolah di sekolah negeri maupun swasta dengan mendapatkan surat tanda tamat belajar/ijazah. Angka ini mampu memperlihatkan pencapaian pembangunan pendidikan di suatu daerah, juga berguna untuk melakukan perencanaan penawaran tenaga kerja, terutama untuk melihat kualifikasi pendidikan angkatan kerja di suatu wilayah.

Tabel 2.35

Angka Pendidikan yang Ditamatkan di Kabupaten Magelang Tahun 2015-2019

No	APT	Satuan	2015	2016	2017	2018	2019
1	SD/MI/Sederajat	%	34,18	33,82	33,70	32,92	32,56
2	SLTP/MTs/Sederajat	%	16,29	16,61	16,76	16,83	16,81
3	SLTA/Sederajat	%	16,24	16,92	17,19	17,42	17,50
4	Perguruan Tinggi	%	3,87	3,99	4,12	4,31	4,01

Sumber : Disdukcapil Kabupaten Magelang Tahun 2020

Persentase tertinggi pada indikator angka pendidikan yang ditamatkan (APT) di Kabupaten Magelang terdapat pada jenjang pendidikan SD. Hal tersebut menunjukkan sebagian besar penduduk Magelang hanya tamat pada jenjang pendidikan SD. Untuk perkembangan APT SD/MI/Sederajat secara umum mengalami penurunan selama lima tahun terakhir. Secara umum pada tahun 2018 APT yang mengalami penurunan adalah SD, SLTP, dan Perguruan Tinggi.

2.2.11 Indeks Pembangunan Gender (IPG)

Peningkatan kualitas hidup perempuan diperlukan dalam rangka pencapaian kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan yang juga menjadi salah satu tujuan pada Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/ SDG's). Hal ini dapat digambarkan apabila angka IPM perempuan dibanding IPM laki-laki

berada pada angka 100. Angka tersebut ditunjukkan pada capaian Indeks Pembangunan Gender (IPG), yang didukung peningkatan di bidang kesehatan, pendidikan dan ekonomi. Sebagai upaya peningkatan pencapaian kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan dilakukan melalui pemberdayaan perempuan di bidang politik, ketenagakerjaan dan ekonomi yang ditunjukkan pada capaian Indeks Pemberdayaan Gender (IDG).

Secara umum IPG di Kabupaten Magelang mengalami trend yang fluktuatif, sempat berada pada angka 92,91 tahun 2015, namun mengalami penurunan menjadi 91,78 pada tahun 2019. Walaupun mengalami penurunan, tetapi capaian pembangunan gender di Kabupaten Magelang masih lebih baik dibandingkan dengan capaian propinsi dan nasional.

Tabel 2.36
Indeks Pembangunan Gender (IPG) di Kabupaten Magelang
Tahun 2015-2019

Indikator	2015	2016	2017	2018	2019
Kabupaten Magelang	92,91	N/A	91,95	92,23	91,78
Provinsi Jawa Tengah	92,21	92,22	91,94	91,95	91,89
Nasional	91,03	90,82	90,96	90,99	91,07

Sumber : BPS Kabupaten Magelang 2020

Pada tabel IPG di atas menunjukkan bahwa indeks pembangunan gender di Kabupaten Magelang cenderung menurun akan tetapi masih lebih baik dibandingkan provinsi dan nasional.

Kabupaten Magelang ke depan masih dihadapkan pada tantangan pembangunan untuk mewujudkan kesetaraan gender. Berbagai persoalan yang masih perlu menjadi perhatian ke depan antara lain; masih rendahnya Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan belum optimalnya pemenuhan kesehatan perempuan, khususnya ibu yang melahirkan, serta serta tingginya kesenjangan pendapatan antara perempuan dan laki-laki.

2.2.12 Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

Berdasarkan data tahun 2015-2018, angka IDG di Kabupaten Magelang mengalami penurunan. Angka IDG dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Pada tahun 2018, IDG di Kabupaten Magelang sebesar 71,21, mengalami peningkatan dibandingkan dengan capaian tahun 2017, sebesar 62,43. Namun jika dibandingkan capaian propinsi dan nasional, IDG Kabupaten Magelang Tahun 2018 berada pada posisi yang lebih rendah. Angka IDG tersebut menunjukkan masih cukup rendahnya peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik, sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.37
Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) di Kabupaten Magelang
Tahun 2015-2019

Indikator	2015	2016	2017	2018
Kabupaten Magelang	68,53	n/a	62,43	71,21
Provinsi Jawa Tengah	74,80	74,89	75,10	74,03
Nasional	70,83	71,39	71,74	72,10

Sumber : BPS Kabupaten Magelang 2020

2.2.13 Kebudayaan

Pencapaian pembangunan seni budaya dapat dilihat berdasarkan indikator jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya, jumlah sarana penyelenggaraan festival seni dan budaya, jumlah benda situs dan kawasan cagar budaya yang diinventarisasi, serta jumlah benda situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan.

Penyelenggaraan festival seni dan budaya di Kabupaten Magelang selama 5 tahun terakhir (2015- 2019) bersifat fluktuatif, namun menunjukkan kenaikan dari tahun 2017 ke 2019. Pada tahun 2019 jumlah sarana penyelenggaraan seni di Kabupaten Magelang sejumlah 25; dan jumlah benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan sebanyak 949.

Tabel 2.38

Perkembangan Seni dan Budaya di Kabupaten Magelang Tahun 2015-2019

No	Uraian	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1.	Jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya	44	81	38	126	167
2.	Jumlah sarana penyelenggaraan festival seni dan budaya	25	25	25	25	25
3.	Jumlah Benda Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang diinventarisasi	698	698	922	949	949
4.	Jumlah Benda Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	N/A	10	10	10	10

Sumber : Disdikbud Kabupaten Magelang Tahun 2020

2.3 Aspek Daya Saing Daerah

2.3.1. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

a. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga per Kapita

Pada Tahun 2019, rata-rata pengeluaran perkapita sebulan untuk komoditas makanan sebesar 60,85% pada kelompok pengeluaran 40 persen terbawah; 53,99% pada kelompok pengeluaran 40% tengah; dan 33,97% pada kelompok 20 % atas. Rata-rata pengeluaran perkapita sebulan untuk komoditas bukan makanan sebesar 39,15% pada kelompok pengeluaran 40% terbawah, 46,01% pada kelompok pengeluaran 40% tengah dan 66,03% pada kelompok 20% atas.

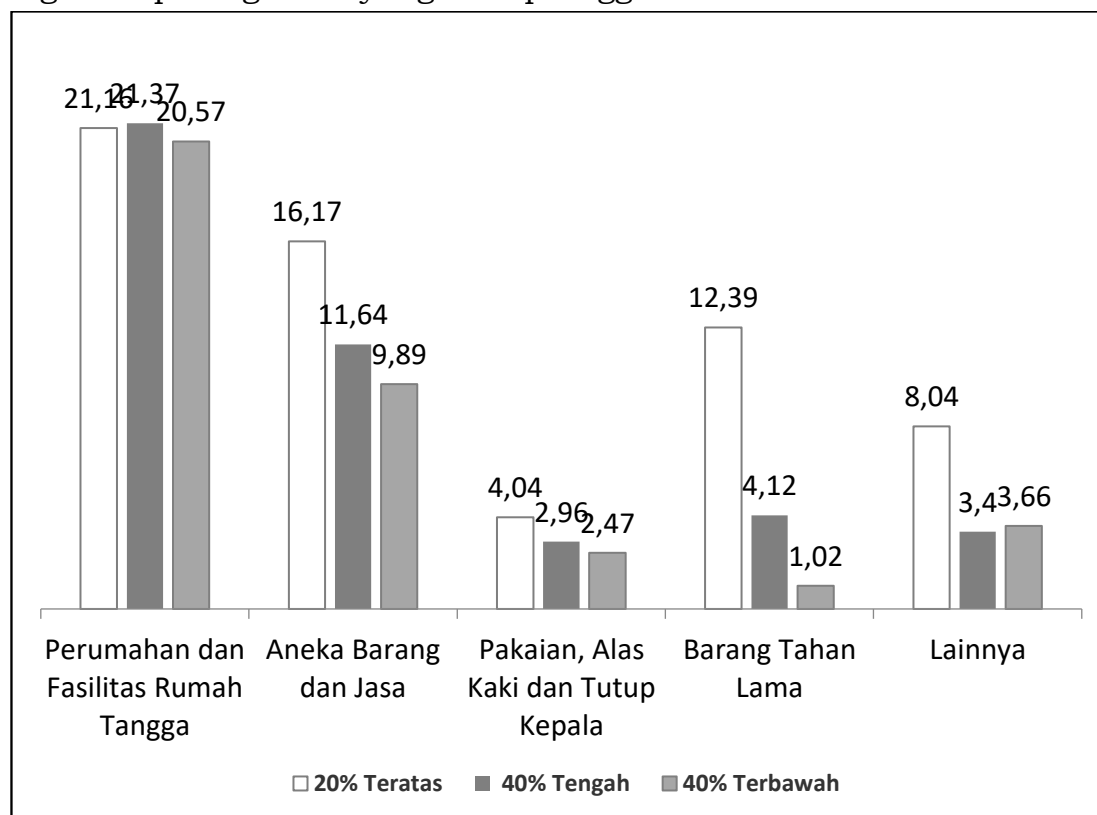
Tabel 2.39

Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita
Kabupaten Magelang Tahun 2018

Tahun	Jenis Pengeluaran	Rata-rata pengeluaran perkapita sebulan					
		Nominal (Rp.)			Persentase (%)		
		40%	40%	20%	40%	40%	20%
		Terbawah	Tengah	Teratas	Terbawah	Tengah	Teratas
2018	Makanan	230.884	408.387	693.563	62,40	56,51	38,19
	Bukan Makanan	139.152	314.316	1.122.312	37,60	43,49	61,81
2019	Makanan	239,591	439,337	688,392	60.85	53.99	33.97
	Bukan Makanan	154,125	374,359	1,337,942	39.15	46.01	66.03

Sumber: BPS Kabupaten Magelang, 2020

Tabel di atas menunjukkan pengeluaran non makanan semakin meningkat seiring dengan meningkatnya pendapatan pendekatan pengeluaran. Dari gambar terlihat bahwa semua komoditas pengeluaran non makanan mengalami peningkatan seiring dengan semakin besarnya pengeluaran penduduk, untuk komoditas perumahan cenderung persentasenya sama untuk semua kelompok pengeluaran, sedangkan untuk komoditas lainnya mengalami peningkatan yang cukup tinggi.



Sumber: BPS Kabupaten Magelang, 2019

Gambar 2.19
Persentase Pengeluaran Perkapita Komoditas Non Makanan Menurut Golongan Pengeluaran (Rp/kapita)

b. Produktivitas Total Daerah

Produktivitas total daerah Kabupaten Magelang masing-masing sektor lapangan usaha utama berkembang fluktuatif dengan kecenderungan meningkat selama periode tahun 2015 hingga tahun 2019. Pada tahun 2019 Produktivitas total daerah Kabupaten sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar Rp 33,24 juta, sektor Industri dan pengolahan sebesar Rp 54,68 Juta dan sektor jasa dan lain –lain sebesar 46,78.

Tabel 2.40
Produktivitas Total Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2015-2019

Produktivitas Total Daerah (Juta Rp)	2015	2016	2017	2018	2019
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	14,17	24,09	25,12	30,08	33,24
Industri Pengolahan	27,26	64,43	47,64	46,14	54,68
Perdagangan Besar, Eceran, Rumah Makan, dan Hotel	18,27	41,28	25,64	32,35	

Produktivitas Total Daerah (Juta Rp)	2015	2016	2017	2018	2019
Jasa Kemasyarakatan	25,80	28,65	42,68	51,85	46,78
Lain-lain	342,04	455,38	87,02	93,34	

Sumber: Bappeda dan Litbangda Kabupaten Magelang, 2020

c. Nilai Tukar Petani

Nilai Tukar Petani (NTP) Kabupaten Magelang rata-rata pada tahun 2015, 2016 dan 2018 berkisar 104,47. Hal ini berarti bahwa kondisi petani di Kabupaten Magelang sudah cukup sejahtera karena sudah mencapai lebih dari 100. Pada kondisi ini harga produksi pertanian lebih besar daripada kenaikan harga konsumsi, atau dengan kata lain pendapatan petani lebih besar dibandingkan pengeluarannya.

Tabel 2.41

Nilai Tukar Petani Kabupaten Magelang Tahun 2015-2018

No	Indikator	Satuan	2015	2016	2017	2018
1	Indeks yang diterima petani (lt)	%	137,21	145,98	N/A	134,14
2	Indeks yang dibayar petani (lb)	%	131,65	137,72	N/A	130,45
3	NTP	%	104,58	105,99	N/A	102,83

Sumber : Distan dan Pangan Kabupaten Magelang, 2020

2.3.2. Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

a. Cakupan Pembangunan Infrastruktur Wilayah Berkelanjutan

Cakupan pembangunan infrastruktur wilayah berkelanjutan merupakan indikator yang digunakan untuk menilai kinerja beberapa urusan dalam satu komposit. Komponennya terdiri dari Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) dan cakupan pembangunan infrastruktur wilayah. IKLH digunakan untuk mengukur kinerja urusan lingkungan hidup. Cakupan pembangunan infrastruktur wilayah menjadi tolak ukur kinerja urusan pekerjaan umum dan penataan ruang serta urusan perhubungan.

Tabel 2.42

Cakupan Pembangunan Infrastruktur Wilayah Berkelanjutan Kabupaten Magelang Tahun 2017 - 2019

No.	Indikator	Satuan	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	%	N/A	N/A	70,95	71,93	71,18
2.	Cakupan Pembangunan Infrastruktur Wilayah	%	N/A	N/A	54,00	56,55	61,43
3.	Cakupan Pembangunan Infrastruktur Wilayah Berkelanjutan	%	N/A	N/A	62,47	64,24	66,30

Sumber: DLH, DPUPR, Dishub: 2020.

b. Cakupan Pembangunan Infrastruktur Wilayah

Meningkatnya cakupan layanan infrastruktur wilayah dapat dilihat dari cakupan pembangunan infrastruktur wilayah. Cakupan pembangunan

infrastruktur wilayah merupakan komposit dari cakupan pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan penataan ruang, serta cakupan pembangunan infrastruktur perhubungan. Baik cakupan pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan penataan ruang, serta cakupan pembangunan infrastruktur perhubungan memiliki komponen/unsur pembentuk. Komponen/unsur pembentuk cakupan pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan penataan ruang meliputi : Cakupan peningkatan ketersediaan jalan dan bangunan pelengkap jalan; persentase jalan dan bangunan pelengkap jalan dalam kondisi baik; cakupan layanan jaringan irigasi; cakupan layanan sumber daya air; cakupan pembangunan gedung pemerintah dan publik; persentase terbangunnya landmark; cakupan bangunan gedung pemerintah dalam kondisi baik; cakupan layanan air minum; cakupan layanan sanitasi; cakupan sarana prasarana ke PU-an; cakupan layanan jasa konstruksi; persentase dokumen rekomendasi perijinan; Persentase kesesuaian tata ruang; dan cakupan kinerja pertanahan. Sedangkan cakupan pembangunan infrastruktur perhubungan dibentuk oleh komponen/unsur : persentase peningkatan ketersediaan prasarana angkutan jalan; persentase peningkatan ketersediaan fasilitas perlengkapan jalan pendukung pengamanan dan keselamatan lalu lintas; persentase peningkatan masyarakat sadar bidang keselamatan berlalu lintas; dan persentase peningkatan angkutan umum layak jalan.

Di bawah ini, cakupan pembangunan infrastruktur wilayah Kabupaten Magelang tahun 2017-2019.

Tabel 2.43

Cakupan Pembangunan Infrastruktur Wilayah Kabupaten Magelang
Tahun 2017 - 2019

No.	Indikator	Satuan	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Cakupan pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan penataan ruang	%	N/A	N/A	53,06	57,83	62,80
2.	Cakupan pembangunan infrastruktur perhubungan	%	N/A	N/A	54,93	55,27	60,05
3.	Cakupan Pembangunan Infrastruktur Wilayah	%	N/A	N/A	54,00	56,55	61,43

Sumber: DLH, DPUPR, Dishub: 2020.

c. Ketaatan terhadap RTRW

Ketaatan terhadap RTRW merupakan kesesuaian implementasi tata ruang hasil perencanaan tata ruang berdasarkan aspek administratif dan atau aspek fungsional dengan peruntukan yang direncanakan sesuai dengan RTRW. Indikator ketaatan terhadap RTRW merupakan hasil perbandingan antara realisasi RTRW dengan rencana peruntukannya, namun indikator ini belum didukung oleh ketersediaan data, sehingga digantikan dengan pembahasan mengenai luas wilayah lindung dan budidaya di Kabupaten Magelang.

Tabel 2.44
Luas Kawasan Lindung di Kabupaten Magelang

No.	Kecamatan	Luas Kawasan Lindung (Ha)		
		Hutan Lindung	Kawasan yang Memberikan Perlindungan Kawasan Bawahannya	Kaw. Perlindungan Setempat
1	Salaman	-	0,02	2.557,87
2	Borobudur	-	-	4.132,94
3	Ngluwar	-	-	1.810,98
4	Salam	-	-	2.336,49
5	Srumbung	-	17,13	3.012,54
6	Dukun	-	-	3.231,89
7	Muntilan	-	-	4.828,23
8	Mungkid	-	-	3.546,00
9	Sawangan	-	-	3.579,05
10	Candimulyo	-	0,04	4.338,49
11	Mertoyudan	35,59	-	4.011,89
12	Tempuran	-	-	3.435,01
13	Kajoran	516,30	-	2.867,77
14	Kaliangkrik	501,15	-	3.609,85
15	Bandongan	-	-	1.024,87
16	Windusari	461,25	-	2.854,02
17	Secang	-	-	4.523,48
18	Tegalrejo	-	-	3.105,16
19	Pakis	-	-	5.180,82
20	Grabag	100,24	-	3.500,57
21	Ngablak	232,49	0,01	1.930,10

Sumber: Perda Nomor 5 Tahun 2011 tentang RTRW Kabupaten Magelang 2010-2030.

Ketaatan terhadap rencana tata ruang secara makro terindikasi dengan masih tetapnya luasan yang dialokasikan oleh Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Magelang 2010-2030. Adapun kawasan lindung dialokasikan seluas kurang lebih 41.770,57 ha dan kawasan budidaya dialokasikan seluas kurang lebih 66.802,43 ha.

Tabel 2.45
Luas Kawasan Budidaya di Kabupaten Magelang

No	Kecamatan	Hutan Produksi	Hutan Produksi Terbatas	Hutan Rakyat	Kawasan Peruntukkan Industri	Kawasan Peruntukkan Perkebunan	Kawasan Peruntukkan Permukiman	Kawasan Peruntukkan Pertanian
1	Bandongan	178,38	32,40	197,90	-	659,07	834,16	1.965,25
2	Borobudur	-	-	466,00	-	2.435,19	1.274,41	1.674,93
3	Candimulyo	-	-	3,82	-	2.484,93	802,38	1.168,33
4	Dukun	-	-	-	-	2.961,78	708,29	3.001,85
5	Grabag	176,69	765,78	74,29	-	3.168,95	1.327,19	3.037,54
6	Kajoran	981,41	550,05	471,64	-	3.017,04	1.108,36	3.241,75
7	Kaliangkrik	618,81	51,59	250,86	-	1.001,69	697,78	2.889,37
8	Mertoyudan	-	-	-	-	690,09	2.434,70	1.567,28
9	Mungkid	-	-	-	-	172,37	2.534,46	3.293,45
10	Muntilan	-	-	-	-	29,73	1.007,87	1.866,71
11	Ngablak	118,75	525,20	73,10	-	1.374,57	505,99	3.437,10
12	Ngluwar	-	-	0,22	-	194,64	622,66	2.660,26

No	Kecamatan	Hutan Produksi	Hutan Produksi Terbatas	Hutan Rakyat	Kawasan Peruntukkan Industri	Kawasan Peruntukkan Perkebunan	Kawasan Peruntukkan Permukiman	Kawasan Peruntukkan Pertanian
13	Pakis	-	-	4,74	-	4.639,87	618,83	3.304,03
14	Salam	-	-	186,24	-	347,25	1.006,67	3.466,14
15	Salaman	186,58	3,26	496,62	170,26	4.420,84	1.259,36	2.708,62
16	Sawangan	-	-	396,77	-	2.706,82	698,46	3.958,24
17	Secang	-	-	28,36	-	1.239,42	1.450,16	3.546,14
18	Srumbung	-	-	-	-	3.331,54	819,81	3.477,53
19	Tegalrejo	-	-	3,68	-	971,14	985,79	1.782,13
20	Tempuran	661,49		244,29	167,60	1.547,02	1.033,71	1.914,18
21	Windusari	333,98	256,42	249,43	-	1.287,31	769,94	2.194,53

Sumber: Perda Nomor 5 Tahun 2011 tentang RTRW Kabupaten Magelang 2010-2030.

Kawasan budidaya di Kabupaten Magelang terdiri atas kawasan peruntukan hutan produksi seluas kurang lebih 3.083 hektar, hutan rakyat seluas kurang lebih 2.919 hektar, kawasan peruntukan pertanian seluas kurang lebih 79.416 hektar, kawasan peruntukkan industri seluas kurang lebih 337,09 hektar, kawasan perkebunan seluas kurang lebih 25.667 hektar, kawasan peruntukkan permukiman seluas kurang lebih 19.751 hektar, serta kawasan peruntukkan pertanian seluas kurang lebih 40.587 hektar.

d. Luas Wilayah Produktif

Berdasarkan Lampiran Permendagri 86/2017, indikator luas wilayah produktif merupakan hasil dari perbandingan antara jumlah wilayah produktif dengan jumlah luas seluruh wilayah budidaya. Sesuai dengan kesepakatan, luas wilayah produktif di Kabupaten Magelang diartikan sebagai luas wilayah pertanian produktif.

Dalam kurun waktu tahun 2015 hingga 2019, jumlah luas wilayah kawasan pertanian produktif dan jumlah luas seluruh wilayah budidaya di Kabupaten Magelang menunjukkan luasan yang sama. Jumlah luas wilayah kawasan pertanian produktif meliputi 79.416 Ha, dan jumlah luas seluruh wilayah budidaya meliputi 92.449,52 Ha. Sehingga, dalam kurun waktu yang sama persentase luas wilayah pertanian produktif juga menunjukkan nilai yang konstan, yakni sebesar 85,902%. Kawasan peruntukan pertanian di Kabupaten Magelang meliputi kawasan pertanian lahan basah dan lahan kering. Kawasan pertanian lahan basah memiliki luas kurang lebih 36.848 (tiga puluh enam ribu delapan ratus empat puluh delapan) hektar yang tersebar di seluruh kecamatan. Adapun kawasan pertanian lahan kering memiliki luas kurang lebih 42.568 (empat puluh dua ribu lima ratus enam puluh delapan) hektar yang juga tersebar di seluruh kecamatan wilayah Kabupaten Magelang. Lahan pertanian basah dan lahan pertanian kering dikelola untuk mendukung suatu program perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan yang direncanakan seluas kurang lebih 42.070 (empat puluh dua ribu tujuh puluh) hektar.

Tabel 2.46
Penggunaan Lahan di Kabupaten Magelang Tahun 2015-2018

Peruntukan	Satuan	2015	2016	2017	2018	2019
Lahan Pertanian :		86.405	86.405	86.175	86.175	83.271
1. Lahan sawah	Ha	36.882	36.855	36.855	36.681	27.899
2. Lahan bukan sawah	Ha	49.523	49.550	49.550	49.494	55.372
Lahan Bukan Pertanian	Ha	22.168	22.168	22.168	22.398	25.302
Jumlah		108.573	108.573	108.573	108.573	108.573

Sumber: Bappeda Dan Litbangda Kabupaten Magelang, 2020;

Pada tahun 2018, luas wilayah Kabupaten Magelang didominasi oleh lahan pertanian bukan sawah, yakni sebesar 46,81% dari keseluruhan wilayah kabupaten. Lahan pertanian bukan sawah menunjukkan luasan yang meningkat dalam kurun waktu tahun 2014 hingga 2016. Luas lahan sawah di Kabupaten Magelang dalam kurun waktu tahun 2014 hingga 2018 menunjukkan penurunan dari 36.892 hektar menjadi 36.681 hektar. Lahan bukan pertanian di Kabupaten Magelang dalam kurun waktu tahun 2014 sampai 2018 semakin meningkat.

e. Luas Wilayah Industri

Persentase Luas wilayah industri didapatkan dari perbandingan antara jumlah luas wilayah industri dengan luas seluruh wilayah budidaya. Dalam kurun waktu tahun 2015 hingga 2018, luas wilayah peruntukan industri dan luas wilayah budidaya di Kabupaten Magelang menunjukkan luasan yang sama, yakni 337,091 hektar dan 92.449,52 hektar. Sedangkan persentase luas wilayah industri di Kabupaten Magelang pada tahun 2019 adalah 0,364%.

f. Luas Wilayah Perkotaan

Indikator luas wilayah perkotaan merupakan hasil dari perbandingan antara jumlah wilayah perkotaan dengan jumlah luas seluruh wilayah budidaya. Sesuai dengan kesepakatan, luas wilayah perkotaan di Kabupaten Magelang dituliskan sebagai luas wilayah permukiman perkotaan. Dalam kurun waktu tahun 2015 hingga 2019, luas wilayah permukiman perkotaan di Kabupaten Magelang menunjukkan luasan yang sama yakni sebesar 8.875,48 hektar. Persentase luas wilayah permukiman perkotaan di Kabupaten Magelang mencapai 9,6%.

Berdasarkan Perda Nomor 5 Tahun 2011 tentang RTRW Kabupaten Magelang 2010-2030, kawasan peruntukan permukiman perkotaan meliputi:

- a) perkotaan-perkotaan yang masuk dalam Pusat Kegiatan Lokal (PKL);
- b) perkotaan Borobudur di Kecamatan Borobudur yang kaidah pengaturannya mengikuti Kawasan Strategis Nasional (KSN) dan Kawasan Strategis Kabupaten (KSK); dan
- c) ibukota-ibukota kecamatan, meliputi ibukota kecamatan di Kecamatan Windusari, Bandongan, Kaliangkrik, Kajoran, Tempuran, Salaman, Srumbung, Dukun, Sawangan dan Candimulyo.

g. Luas Wilayah Rawan Bencana

Indikator luas wilayah rawan bencana merupakan salah satu indikator yang disesuaikan dengan kondisi wilayah dan ketersediaan data di Kabupaten Magelang. Indikator ini dapat dikatakan menggantikan indikator luas wilayah banjir dan indikator luas wilayah kekeringan dalam Lampiran 1 Permendagri 54/2010. Indikator luas wilayah rawan bencana terdiri atas wilayah rawan bencana erupsi dan banjir lahar dingin gunung api, serta wilayah rawan bencana gerakan tanah tinggi di Kabupaten Magelang.

Kawasan rawan erupsi dan banjir lahar dingin gunung api di Kabupaten Magelang, meliputi 10 kecamatan dengan rincian:

- a) kawasan rawan erupsi dan banjir lahar dingin Gunung Merapi terletak di Kecamatan Srumbung, Dukun, Muntilan, Salam, Sawangan, Ngluwar dan Mungkid, dan
- b) kawasan rawan erupsi dan banjir lahar dingin Gunung Sumbing terletak di Kecamatan Kajoran, Kaliangkrik dan Windusari.

Secara umum, 47,62% wilayah Kabupaten Magelang masuk dalam wilayah rawan bencana erupsi dan banjir lahar dingin gunung api. Kawasan-kawasan yang sering mengalami bencana alam, seperti erupsi dan banjir lahar dingin gunung api dapat ditetapkan sebagai Kawasan Rawan Bencana I, Kawasan Rawan Bencana II dan Kawasan Rawan Bencana III.

Sebanyak 57,14% wilayah Kabupaten Magelang merupakan kawasan rawan bencana gerakan tanah tinggi. Kawasan rawan gerakan tanah tinggi meliputi 12 kecamatan, yaitu Kecamatan Kajoran, Kaliangkrik, Windusari, Tempuran, Borobudur, Salaman, Grabag, Ngablak, Pakis, Sawangan, Bandongan dan Secang. Selain gerakan tanah tinggi, Kabupaten Magelang memiliki wilayah rawan gerakan tanah menengah yang terletak di Kecamatan Kajoran, Windusari, Tempuran, Borobudur, Salaman, Grabag, Ngablak, Pakis, Sawangan, Dukun, Srumbung, Bandongan, Tegalrejo, Candimulyo dan Secang; rawan gerakan tanah rendah yang terletak di Kecamatan Borobudur, Ngablak, Sawangan, Dukun, Srumbung, Mungkid, Muntilan, Salam dan Ngluwar; dan rawan gerakan tanah sangat rendah yang terletak di Kecamatan Borobudur, Mungkid, Mertoyudan dan Secang.

h. Jenis dan Jumlah Bank dan Cabang

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat. Terdapat empat jenis bank yang dimaksudkan dalam indikator ini, yaitu bank umum pemerintah, bank umum swasta, bank pembangunan, dan bank pengkreditan rakyat. Berikut ini jumlah bank dan perusahaan asuransi yang beroperasi di Kabupaten Magelang.

Tabel 2.47
Jenis dan Jumlah Bank di Kabupaten Magelang Tahun 2015-2019

No.	Indikator	Satuan	2015	2016	2017	2018	2019
1.	KC Bank Umum	Unit	7	7	7	7	7
2.	KCP Bank Umum	Unit	50	48	48	48	48
3.	KK Bank Umum	Unit	43	43	43	43	43
4.	KP BPR	Unit	12	12	12	12	12
5.	KC BPR	Unit	19	21	21	21	21
6.	KK BPR	Unit	38	39	39	39	39
	Jumlah	Unit	169	170	170	170	170

Sumber: Kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Kabupaten Magelang, 2020

Perkembangan jumlah bank di Kabupaten Magelang cenderung tetap, serta mengalami kenaikan dan penurunan yang sangat sedikit. Jumlah bank yang beroperasi di suatu wilayah menunjukkan adanya pergerakan ekonomi dan perputaran uang yang telah berjalan di wilayah tersebut karena bank tidak hanya berperan sebagai lembaga penyimpanan, tetapi juga menyalurkan bantuan modal terutama bagi pemilik usaha.

i. Jenis dan Jumlah Perusahaan Asuransi dan Cabang

Asuransi merupakan alat untuk menanggulangi risiko (nasabah) dengan cara menanggung bersama kerugian yang mungkin terjadi dengan pihak lain (perusahaan asuransi). Perusahaan asuransi adalah jenis perusahaan yang menjalankan usaha asuransi, meliputi asuransi kerugian dan asuransi jiwa. Usaha asuransi adalah usaha jasa keuangan yang menghimpun dana masyarakat melalui pengumpulan premi asuransi, guna memberikan perlindungan kepada anggota masyarakat pemakai jasa asuransi terhadap kemungkinan timbulnya kerugian karena suatu peristiwa yang tidak pasti terhadap hidup atau meninggalnya seseorang. Perusahaan asuransi yang beroperasi di Kabupaten Magelang ada dua jenis, yaitu asuransi umum dan asuransi jiwa. Perusahaan asuransi jiwa berasal dari Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 dan BNI Life Insurance, PT. Sedangkan perusahaan asuransi umum adalah PT Asuransi Sinar Mas.

Tabel 2.48
Jenis dan Jumlah Perusahaan Asuransi di Kabupaten Magelang Tahun 2015-2019

No	Indikator	Satuan	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Asuransi Jiwa	Unit	1	2	2	2	2
2.	Asuransi Umum	Unit	1	1	1	1	1
3.	Asuransi Kerugian	Unit	0	0	0	0	0
4.	Asuransi Lainnya	Unit	0	0	0	0	0
	Jumlah	Unit	2	3	3	3	3

Sumber: Kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Kabupaten Magelang, 2020

j. Jenis, Kelas, dan Jumlah Restoran

Ketersediaan restoran pada suatu daerah menunjukkan daya tarik investasi suatu daerah terutama di bidang kuliner. Restoran juga merupakan bentuk kegiatan ekonomi di bidang perdagangan yang juga dapat mendukung sektor pariwisata. Oleh karena itu, banyaknya restoran

dan rumah makan dapat menjadi salah satu indikator perkembangan kegiatan ekonomi suatu daerah dan peluang-peluang yang ditimbulkannya.

Ada bermacam-macam jenis dan istilah restoran, antara lain restoran merupakan tempat menyantap makanan dan minuman yang disediakan dengan dipungut bayaran, tidak termasuk usaha jenis tataboga atau catering. Sementara itu, pengusaha restoran dan rumah makan adalah penyedia jasa pelayanan makanan dan minuman kepada tamu usaha pokok, seperti restoran di dalam hotel.

Dari tahun 2015- 2018 jumlah usaha restoran rumah makan kelas A berjumlah 6 unit dan meningkat menjadi 30 unit pada tahun 2019, sedangkan rumah makan kelas D sejumlah 25 unit pada tahun 2015 sampai dengan 2018 dan meningkat menjadi 75 unit pada tahun 2019. Secara umum pada tahun 2019 jumlah semua kelas rumah makan mengalami peningkatan karena di adanya *updating* data.

Tabel 2.49
Jenis, Kelas, dan Jumlah Restoran di Kabupaten Magelang
Tahun 2015-2019

No	Jenis Restoran	Satuan	2015	2016	2017	2018	2019
1	Usaha restoran golongan tertinggi	Unit	3	3	3	3	3
2	Usaha restoran golongan menengah	Unit	0	0	0	0	0
3	Usaha restoran golongan terendah	Unit	0	0	0	0	0
4	Usaha rumah makan kelas A	Unit	6	6	6	6	30
5	Usaha rumah makan kelas B	Unit	28	28	28	28	42
6	Usaha rumah makan kelas C	Unit	2	2	2	2	22
7	Usaha rumah makan kelas D	Unit	25	25	25	25	75

Sumber : Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Magelang, 2020

k. Jenis, Kelas, dan Jumlah Penginapan/Hotel

Penginapan/hotel merupakan salah satu fasilitas penunjang pariwisata pada suatu wilayah. Ketersediaan penginapan/hotel merupakan salah satu aspek yang penting dalam meningkatkan daya saing daerah, terutama dalam menerima dan melayani jumlah kunjungan dari luar daerah. Semakin berkembangnya investasi ekonomi daerah akan meningkatkan daya tarik kunjungan ke daerah tersebut dan kebutuhan akomodasi penginapan/hotel.

Tabel 2.50
Jenis dan Jumlah Penginapan/Hotel
Kabupaten Magelang Tahun 2015-2019

No	Indikator	Satuan	2015	2016	2017	2018	2019
1	Hotel Bintang	Unit					
2	Hotel Bintang 5	Unit	1	1	1	1	3
3	Hotel Bintang 4	Unit	1	1	1	1	1
4	Hotel Bintang 3	Unit	3	3	3	3	3

No	Indikator	Satuan	2015	2016	2017	2018	2019
5	Hotel Bintang 2	Unit	-	-	-	-	-
6	Hotel Bintang 1	Unit	-	-	-	-	-
7	Hotel Non Bintang/Melati	Unit	32	32	32	32	52
8	Homestay	Unit	243	243	243	243	369
	Jumlah	Unit	189	190	280	280	428

Sumber : Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Magelang, 2020

Kabupaten Magelang yang memiliki daya tarik pariwisata yang cukup besar, mampu menarik investasi berupa penyediaan akomodasi hotel. Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa jumlah hotel di Kabupaten Magelang dari tahun 2015 hingga 2019 belum mengalami peningkatan terutama hotel bintang 1 sampai hotel bintang 4. Jumlah terbanyak adalah hotel jenis *homestay* yang hingga tahun 2019 mencapai 369 unit. Sedangkan jumlah hotel nonbintang/melati mengalami peningkatan 20 unit selama lima tahun terakhir. Perkembangan jumlah *homestay* dapat menjadi salah satu indikasi adanya peningkatan permintaan penyedia akomodasi tersebut dari wisatawan dan menjadi peluang untuk mengembangkan perekonomian lokal.

2.3.3.Fokus Iklim Berinvestasi

a. Pertumbuhan Investasi

Realisasi investasi PMDN dan PMA pada periode tahun 2015-2019 menunjukkan tren peningkatan yang signifikan, yaitu sebesar Rp 476.281 juta pada tahun 2015 dan pada tahun 2019 meningkat tajam menjadi Rp 2.023.303 juta. Peningkatan jumlah proyek dan realisasi investasi ini mengindikasikan bahwa Kabupaten Magelang memiliki prospek dan daya tarik bagi para investor seiring dengan peningkatan kualitas infrastruktur, penetapan upah tenaga kerja yang kompetitif, peningkatan pelayanan melalui penyelenggaraan PTSP, dan komitmen pemerintah daerah melalui kebijakan pro investasi. Arah kebijakan investasi adalah untuk meningkatkan investasi pada jenis usaha padat modal untuk memanfaatkan bonus demografi. Pertumbuhan investasi (PMA dan PMDN) Kabupaten Magelang Tahun 2015 -2019 sebagai berikut.

Tabel 2.51
Pertumbuhan investasi Kabupaten Magelang
Tahun 2015-2019

No	Indikator	Satuan	2015	2016	2017	2018	2019
1	Total Nilai Investasi	Juta Rp	476.281	490.490	1.030.689	1.907.516	2.023.303
2	Pertumbuhan Investasi	%	2.98	110.13	91.75	21,71	6,07

Sumber : DPMPTSP Kabupaten Magelang, 2020

b. Angka Kriminalitas

Pemerintah daerah harus dapat mengendalikan kondisi ini dengan baik, agar dapat memberikan jaminan bagi keamanan investasi. Angka kriminalitas ini merupakan nilai yang menunjukkan perkembangan angka kriminalitas yang terjadi di Kabupaten Magelang pada 5 tahun terakhir.

Tabel 2.52
Angka Kriminalitas tertangani
di Kabupaten Magelang Tahun 2015-2019

No	Indikator	Satuan	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Selesai	Kasus	332	186	248	259	264
2.	Lapor	laporan	434	252	339	392	377
3.	Jumlah Penduduk	Jiwa	1,267,090	1,278,624	1,283,405	1,290,115	1.295.019
4.	Rasio	%	76.49	73.30	73.16	66.10	70,03
5.	Angka Kriminalitas		3.48	2.02	2.65	2.60	2,04

Sumber : Kesbangpol Kabupaten Magelang, 2020

Berdasarkan tabel tersebut, terlihat bahwa jumlah tindak kriminal di Kabupaten Magelang memiliki angka yang fluktuatif dan cenderung menurun. Data terakhir pada tahun 2019 capaian angka kriminalitas sebesar 2,04, mengalami penurunan dibandingkan capaian 2018 sebesar 2,60. Kriminalitas yang semakin tinggi menjadi indikator belum terciptanya kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan kegiatan preventif dalam menanggulangi angka kriminalitas yang semakin tinggi. Selain itu, kegiatan kriminalitas erat kaitannya dengan kurang terserapnya tenaga kerja di dalam lapangan kerja. Tenaga kerja yang ada belum memiliki kualitas yang dibutuhkan oleh penyedia lapangan kerja, sehingga mengakibatkan penduduk yang belum memiliki pekerjaan untuk berusaha mencari penghasilan dengan cara instan. Pemerintah diharuskan untuk berperan aktif dalam mengurangi angka kriminalitas, salah satunya dengan peningkatan kualitas penduduknya.

c. Lama Proses Perizinan

Perizinan merupakan sebuah instrumen penting dalam menumbuhkembangkan iklim investasi yang kondusif. Secara umum, lama proses pelayanan perizinan merupakan salah satu hal yang dapat menghambat atau mendorong investasi. Lama proses perizinan merupakan rata-rata waktu yang dibutuhkan untuk memperoleh suatu perizinan (dalam hari). Indikator lama proses perizinan dilihat dari waktu yang dibutuhkan untuk memperoleh suatu perizinan dalam satuan hari. Kabupaten Magelang memiliki kurang lebih 40 jenis perizinan, namun hanya beberapa perizinan saja yang memiliki banyak permintaan.

Tabel 2.53
Lama Proses Perizinan di Kabupaten Magelang Tahun 2015-2019

No	Jenis Perizinan	Lama Penyelesaian					
		Satuan	2015	2016	2017	2018	2019
1	Pendaftaran penanaman Modal		1	1	1	1	1*

No	Jenis Perizinan	Lama Penyelesaian					
		Satuan	2015	2016	2017	2018	2019
2	Izin Prinsip Penanaman Modal	Hari	3	3	3	3	3*
3	Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal	Hari	3	3	3	3	3*
4	Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal	Hari	5	5	5	5	5*
5	Izin Usaha Perdagangan (SIUP)	Hari	3	3	3	3	1*
6	Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	Hari	3	3	3	3	1*
7	Izin Usaha Industri (IUI)		14	14	14	14	1
8	Izin Perluasan Industri	Hari	7	7	7	7	*
9	Tanda Daftar Industri (TDI)	Hari	14	14	14	14	
10	Izin Usaha Pariwisata	Hari	3	3	3	3	7
11	Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK)	Hari	15	15	15	15	15
12	Izin Usaha Penggilingan Padi	Hari	4	4	4	4	5
13	Izin Usaha Angkutan Jalan	Hari	14	14	14	14	
14	Izin Usaha budidaya sarang burung sriti/walet	Hari	/a	/a	/a	n/a	
15	Izin Usaha Peternakan	Hari	14	14	14	14	
16	Izin Usaha Perikanan	Hari	14				
17	Izin Usaha Pertambangan	Hari					Ijin di Prov
18	Izin Usaha dan Izin Perluasan Industri Primer Hasil Hutan Kayu	Hari					Ijin di Prov
19	Izin Perluasan	Hari	7	7	7		
20	Izin Usaha Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal (Merger)	Hari	7	7	7		
21	Izin Usaha Perubahan	Hari	5	5	5		
22	Izin Lokasi	Hari	18	18	18		30
23	Izin Pemanfaatan Tanah	Hari	18	18	18		30
24	Izin Perubahan Penggunaan Tanah	Hari	18	18	18		30
25	Izin Gangguan dan Izin Tempat Usaha (HO)	Hari	14	14	14		
26	Izin Mendirikan / mengubah / Merobohkan Bangunan (IMB)	Hari	14	14	14	14	14
28	Izin Pemasangan Reklame	Hari	2	2		2	Uk besar 14 hari; uku kecil 5 hari
29	Izin Trayek	Hari			1086	976	
30	Dokumen Amdal. UKL/UPPL dan SPPL	Hari					
	UKL-UPL	Hari	14				
	SPL	Hari	1				
31	Izin Penyelenggaraan Pelayanan Bidang kesehatan	Hari					9 hari,operasional puskesmas 14 hari
32	Izin Riset/ Penelitian	Hari	1	1	1	1	1

Sumber : DPMPSTP Kabupaten Magelang, 2020

Ket:*) menggunakan sistem OSS

Waktu penyelesaian perizinan terlama adalah 18 hari, yaitu perizinan untuk jenis izin lokasi, izin pemanfaatan tanah, dan perubahan penggunaan tanah. Selain itu, izin usaha industri, tanda daftar industri dan izin mendirikan bangunan memakan waktu paling lama, yaitu 14 (empat belas) hari kerja. Target yang diharapkan dari lamanya proses perizinan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang adalah paling lama 9 hari. Beberapa jenis perizinan sudah dapat diusahakan kurang dari 9 hari kerja, namun beberapa lainnya masih lebih dari 9 hari. Perbedaan lamanya proses perizinan dapat disebabkan banyak sedikitnya jumlah berkas atau persyaratan yang perlu dinilai kelayakannya.

d. Jumlah dan Macam Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Pajak daerah dan retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang nantinya akan digunakan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, ada 11 jenis Pajak Daerah yang pemungutannya menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Magelang, yaitu:

- 1) Pajak Hotel;
- 2) Pajak restoran;
- 3) Pajak Hiburan;
- 4) Pajak Reklame;
- 5) Pajak Penerangan Jalan;
- 6) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
- 7) Pajak Parkir;
- 8) Pajak Air Tanah;
- 9) Pajak Sarang Burung Walet;
- 10) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan
- 11) Bea Perolehan Hak atas tanah dan Bangunan.

Sedangkan jenis retribusi yang ada di Kabupaten Magelang, antara lain retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu yang meliputi jasa pelayanan umum, jasa komersil yang biasanya disediakan oleh pihak swasta, dan perizinan tertentu yang berkaitan dengan penggunaan sumber daya alam, barang, sarana dan prasarana tertentu yang dapat mempengaruhi kepentingan umum dan kelestarian lingkungan. Dari sumber pendapatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, berikut realisasi Pajak dan retribusi Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2015-2019.

Tabel 2.54
Realisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
Kabupaten Magelang Tahun 2015-2019

Indikator	Satuan	2015	2016	2017	2018	2019
Pajak Daerah	Rp	88.960.021.815	97.101.522.117	112.344.030.430	114.115.398.812	156.814.683.648
Retribusi Daerah	Rp	15.9939.015.341	15.587.692.390	20.445.297.133	21.190.318.088	22.940.695.207

Sumber : BPPKAD Kabupaten Magelang, 2020

e. Jumlah Perda yang Mendukung Iklim Usaha

Untuk menumbuhkan iklim investasi perlu *good will* dan *political will* pemerintah yang secara umum diwujudkan ke dalam perda. Dengan adanya perda yang mengatur tentang investasi, maka ada dasar hukum yang kuat untuk mendorong masyarakat melakukan investasi. Peraturan daerah (Perda) merupakan sebuah instrumen kebijakan daerah yang sifatnya formal, melalui perda inilah dapat diindikasikan ada atau tidaknya insentif maupun disinsentif sebuah kebijakan di daerah terhadap aktivitas perekonomian.

Perda yang Mendukung Iklim Usaha pada tahun 2025 sebanyak 10 buah, dan sejak 2016 hingga 2019 jumlahnya tetap 11 buah. Peraturan Daerah terkait perizinan yang pernah dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Magelang, antara lain:

1. Peraturan Daerah nomor 8 Tahun 2005 tentang Izin Usaha Industri, Izin Perluasan, dan Tanda Daftar Industri;
2. Peraturan Daerah nomor 13 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Perizinan Penggilingan Padi di Kabupaten Magelang;
3. Peraturan Daerah nomor 10 Tahun 2011 tentang Bangunan Gedung;
4. Peraturan Daerah nomor 2 Tahun 2013 tentang Usaha Peternakan;
5. Peraturan Daerah nomor 6 Tahun 2013 tentang Pembangunan, Penataan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi;
6. Peraturan Daerah nomor 7 Tahun 2013 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, PST Perbelanjaan, dan Toko Modern;
7. Peraturan Daerah nomor 8 Tahun 2013 tentang Penanaman Modal di Kabupaten Magelang;
8. Peraturan Daerah nomor 3 Tahun 2015 tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi;
9. Peraturan Daerah nomor 17 Tahun 2016 tentang Izin Gangguan.

f. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Pemberdayaan masyarakat dan desa merupakan upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai. Hal tersebut meliputi aspek ekonomi, sosial budaya, politik, dan lingkungan hidup melalui penguatan pemerintahan desa dan kelurahan, lembaga kemasyarakatan, dan penguatan kapasitas masyarakat. Kemandirian desa ini diukur berdasarkan status desa.

Pada tahun 2018 jumlah desa yang berstatus maju, mandiri dan berkembang di Kabupaten Magelang sebanyak 292 desa dari 367 Desa (79,56%) dan pada tahun 2019 meningkat menjadi 328 Desa (89,37%). Untuk lebih jelasnya bisa dilihat dalam tabel dibawah ini.

Tabel 2.55
Status Desa Tahun 2018-2019

Status Desa	2018	2019
Sangat Tertinggal	0	0
Tertinggal	75	39
Berkembang	216	225
Maju	71	92
Mandiri	5	11
Total	367	367

Sumber: Dispermades Kabupaten Magelang, 2020

Dari data tersebut menunjukkan bahwa masih terdapat cukup banyak desa dengan status tertinggal yang berarti bahwa kemajuan dan kemandirian desa di Kabupaten Magelang perlu ditingkatkan. Status desa ini untuk mengukur tingkat kemajuan dan kemandirian desa. Dari data tersebut diketahui jumlah desa maju mandiri dan berkembang semakin meningkat. Berkaitan dengan desa kategori tertib penyelenggaraan keuangan desa, dari 367 desa di Kabupaten Magelang, sejak tahun 2017-2019 semua desa sudah tertib dalam penyelenggaraan keuangan desa. Kapasitas/ partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa di Kabupaten Magelang ditunjukkan dengan partisipasi masyarakat dalam lembaga kemasyarakatan sebagaimana tabel di bawah ini.

Tabel 2.56
Partisipasi Masyarakat di Kabupaten Magelang Tahun 2015-2019

No.	Indikator	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Jumlah PKK Aktif	394	394	394	394	394
2.	Jumlah LPMD Aktif	367	367	367	367	367
3.	Jumlah PKK	394	394	394	394	394
4.	Jumlah LPMD	367	367	367	367	367

Sumber: Dispermades Kabupaten Magelang, 2020

Pendirian BUMDes merupakan salah satu program yang diberi perhatian lebih dan dijadikan unggulan oleh Kemendes dalam upaya menjadikan Desa menjadi lebih maju dan sejahtera. Berdasarkan Peraturan Menteri Desa no 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan, Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa disebutkan dalam pasal 4 bahwa setiap desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES). Hal ini menjadi penting bagi desa untuk memiliki BUMDES ketika Desa memiliki potensi local yang dapat dikembangkan dan dapat menghasilkan nilai tambah bagi masyarakat desa karena bersinergi dengan kebijakan Pemerintah Pusat.

Sampai tahun 2019, sudah terbentuk 188 Bumdes. Adapun status ke 188 Bumdes tersebut adalah aktif (100%), mengalami kenaikan yang cukup menggembirakan dibandingkan tahun 2015 yang aktif hanya 10,64%. Selengkapnya bisa dilihat dalam tabel dibawah ini.

Tabel 2.57
Persentase Bumdes Aktif di Kabupaten Magelang
Tahun 2015-2019

No	Tahun	Jumlah	Persentase
1	2015	20/188	10,64
2	2016	60/188	31,91
3	2017	118/188	62,76
4	2018	168/188	89,36
5	2019	188/188	100

Sumber: Dispermades Kabupaten Magelang, 2020

Berkaitan dengan Pengembangan Kawasan Pedesaan yang bertujuan untuk mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan, pengembangan ekonomi, dan pemberdayaan masyarakat desa melalui pendekatan partisipatif dengan mengintegrasikan berbagai kebijakan, rencana, program, dan kegiatan para pihak pada kawasan yang ditetapkan dengan prioritas Pembangunan Kawasan Perdesaan pada pengembangan potensi dan pemecahan masalah kawasan pedesaan, Kabupaten Magelang sudah melakukan beberapa hal sebagai berikut:

- a. Tahun 2017 Fasilitasi Pembentukan Kawasan Pedesaan Kecamatan Ngluwar;
- b. Tahun 2018 Penetapan Kawasan Pedesaan berbasis pengembangan pertanian di Kecamatan Ngluwar;
- c. Tahun 2019 Fasilitasi Pembentukan Kawasan Pedesaan di Kecamatan Dukun.

2.3.4. Fokus Sumber Daya Manusia

Kualitas sumber daya manusia juga memiliki peranan penting dalam meningkatkan daya saing daerah dan perkembangan investasi di daerah. Indikator kualitas sumber daya manusia dalam rangka peningkatan daya saing daerah dapat dilihat dari kualitas tenaga kerja dan tingkat ketergantungan penduduk untuk melihat sejauh mana beban ketergantungan penduduk.

- a. Rasio Lulusan S1/S2/S3

Masyarakat merupakan obyek dan subyek pembangunan. Dalam pembahasan indikator rasio lulusan S1/S2/S3, masyarakat ditempatkan sebagai subyek pembangunan. Semakin tinggi rasio lulusan perguruan tinggi menunjukkan daerah tersebut mempunyai potensi sumberdaya manusia yang berkualitas untuk menggerakkan roda pembangunan. Ketersediaan kualitas SDM yang tinggi membuat daerah mempunyai daya saing di sektor SDM. Rasio lulusan S1/S2/S3 ini dihitung dengan rumus formula jumlah lulusan S1/S2/S3 dibagi dengan jumlah penduduk dan dikalikan dengan 10.000.

Tabel 2.58
Rasio Lulusan S1/S2/S3 Kabupaten Magelang Tahun 2015-2019

No	Indikator	Satuan	2015	2016	2017	2018	2019
1	Jumlah Lulusan S1, S2, dan S3	Jiwa	30.410	32.299	33.979	36.293	37.083
2	Jumlah Penduduk	Jiwa	1.267.090	1.272.624	1.283.405	1.290.115	1.292.713

No	Indikator	Satuan	2015	2016	2017	2018	2019
3	Rasio Lulusan S1, S2, dan S3		240,00	253,80	264,76	281,32	286,86
4	Persentase Lulusan S1, S2, dan S3 terhadap jumlah penduduk	%	2,40	2,54	2,65	2,81	2,86

Sumber: *Disdukcapil Kabupaten Magelang, 2020.*

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa persentase jumlah lulusan S1/S2/S3 selalu meningkat setiap tahunnya. Sebanyak 37.083 jiwa penduduk pada tahun 2019 sudah menamatkan perguruan tinggi atau 2,86% dari total jumlah penduduk. Persentase jumlah lulusan perguruan tinggi selama periode tahun 2015 – 2019 selalu meningkat diiringi dengan peningkatan jumlah lulusan.

Ketersediaan SDM yang berkualitas mutlak diperlukan oleh Kabupaten Magelang untuk mengolah potensi sumber daya alam yang melimpah. Pemerintah daerah harus mempunyai program-program yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas SDM, seperti salah satunya dengan memberikan beasiswa hingga perguruan tinggi ataupun bentuk subsidi lainnya sehingga memudahkan anak sekolah dapat melanjutkan pendidikan hingga jenjang yang lebih tinggi. Tingginya kualitas pendidikan penduduk diharapkan mampu menjadi gerbang perbaikan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Magelang, mengurangi pengangguran, dan meningkatkan pendapatan per kapita.

b. Rasio Ketergantungan

Apabila dilihat dari jumlah penduduk menurut kelompok umur tahun 2019 diketahui bahwa jumlah penduduk usia produktif (15-64 tahun) lebih banyak dibandingkan usia nonproduktif (0-14 tahun dan 65+ tahun), dengan komposisi 894.294 penduduk usia produktif (69.05%) dan 400.725 jiwa penduduk usia nonproduktif (30.95%). Dengan demikian, angka rasio ketergantungan di Kabupaten Magelang tahun 2019 sebesar 45 yang artinya bahwasetiap 100 penduduk usia produktif menanggung sekitar 45 orang penduduk usia tidak produktif. Kondisi ini menunjukkan bahwa di Kabupaten Magelang telah mengalami bonus demografi, di mana jumlah penduduk usia produktif lebih besar dibandingkan penduduk usia non produktif.

Dalam memanfaatkan peluang bonus demografi dengan baik, Pemerintah Kabupaten Magelang melakukan penyesuaian kebijakan ketenagakerjaan yang di antaranya untuk menciptakan kesempatan kerja dan atau menurunkan tingkat pengangguran terbuka (TPT). Pada tahun 2018, TPT Kabupaten Magelang sebesar 2,91 dan lebih rendah dari TPT Provinsi Jawa Tengah sebesar 4,51.

Tabel 2.59
Rasio Ketergantungan Kabupaten Magelang Tahun 2015-2019

No	Indikator	Satuan	2015	2016	2017	2018	2019
1	Penduduk usia < 15 tahun + usia > 64 tahun	Jiwa	409.703	391.874	384.921	394.068	400.725
2	Penduduk usia 15-64 tahun	Jiwa	835.779	886.750	898.484	895.609	894.294
3	Rasio Ketergantungan Kabupaten Magelang	%	49,02	44,19	42,84	44,00	44,80
4	Rasio Ketergantungan Provinsi Jawa Tengah	%	48,10	48,81	47,51	47,63	47,7
5	Rasio Ketergantungan Nasional	%	48,60	48,30	48,10	47,06	47,7

Sumber: Disdukcapil Kabupaten Magelang, 2020

2.3.5. Fokus Penyelenggaraan Pemerintahan

Berdasarkan Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah, salah satu indikator tata pemerintahan yang bersih dan akuntabel adalah Indeks Reformasi Birokrasi.

a. Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Magelang

Reformasi birokrasi merupakan upaya pemerintah untuk mencapai *good governance* dan melakukan pembaharuan, serta perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintah, terutama menyangkut aspek kelembagaan, ketatalaksanaan dan sumberdaya manusia aparatur. Pencapaian Reformasi Birokrasi diukur dengan Indeks reformasi birokrasi yang merupakan tingkat perkembangan instansi pemerintah dalam penerapan budaya anti korupsi, pelaksanaan anggaran secara efektif dan efisien, serta kualitas pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat. Berdasarkan penilaian dari Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Kabupaten Magelang pada Tahun 2018 mendapatkan nilai 56,45.

b. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)

Salah satu syarat *good governance* adalah akuntabilitas, di samping transparansi dan partisipasi. Dalam 8 (delapan) area perubahan birokrasi, yaitu mental aparatur, organisasi, tata laksana, peraturan perundang-undangan, sumberdaya manusia aparatur, pengawasan, akuntabilitas, dan pelayanan publik. Pencapaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) menjadi salah satu bagian pencapaian reformasi birokrasi. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan

keberhasilan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik. Nilai AKIP Kabupaten Magelang pada tahun 2014 sebesar 51,06 sedangkan di tahun 2018 berada di angka 59,05 atau nilai CC.

c. Indeks Kepuasan Masyarakat

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya. Survei IKM bertujuan untuk mengetahui tingkat kinerja unit pelayanan secara berkala sebagai bahan untuk menetapkan kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik selanjutnya.

Indek Kepuasan Masyarakat secara umum memiliki kecenderungan semakin meningkat. Pada Tahun 2014, IKM Kabupaten sebesar 75,93 atau cukup dan tahun 2018 sebesar 82,01 atau baik. Hal ini mencerminkan bahwa kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik di Kabupaten Magelang semakin baik.

d. Indeks Sistem Merit

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 40 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Merit dalam Menejemen ASN, sistem merit didefinisikan kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur atau kondisi kecacatan. Saat ini Pemerintah Kabupaten Magelang sudah berusaha menerapkan merit sistem secara proporsional. Selanjutnya, Indeks Profesionalitas ASN digunakan untuk mengukur kualitas aparatur negara. Hal ini mencerminkan kompetensi, prestasi kerja, gaji/tunjangan, dan pelanggaran disiplin. Nilai Indeks profesionalisme ASN Kabupaten Magelang pada tahun 2017 sebesar 88,29.

e. Cakupan Penegakan hukum

Cakupan penegakan hukum merupakan penilaian yang mendasarkan pada jumlah penindakan, jumlah pelanggaran, jumlah penertiban, jumlah target perencanaan penertiban, dan jumlah aduan yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.60

Cakupan Penegakan Hukum Kabupaten Magelang Tahun 2015-2019

No	Indikator	Satuan	2015	2016	2017	2018	2019
1	Jumlah penyelesaian penegakan perda	Kasus	190	174	251	81	215
2	Jumlah Pelanggaran perda	Kasus	193	175	312	85	230
3	Jumlah Penertiban	kali	3.141	216	312	288	250

No	Indikator	Satuan	2015	2016	2017	2018	2019
4	Jumlah Target perencanaan Penertiban	kali	3.141	216	312	288	250
5	Jumlah aduan	kali	0	0	0	0	0
6	Cakupan penegakan hukum	%	99,23	99,72	90,23	97,65	98,57

Sumber : Kantor Kebangpol Kabupaten Magelang, 2020

Dari data di atas, dapat dilihat cakupan penegakan hukum di Kabupaten Magelang tahun 2015-2019 menunjukkan fluktuasi. Sempat mengalami penurunan pada tahun 2017 sebesar 90,23% dan naik kembali menjadi 98,57% pada tahun 2019.

- f. Cakupan peningkatan wawasan kebangsaan dan politik masyarakat
Cakupan peningkatan wawasan kebangsaan dan politik masyarakat terdiri dari jumlah organisasi yang aktif dan yang tercatat, serta jumlah konflik sosial, sebagaimana yang disajikan tabel di bawah ini.

Tabel 2.61

Cakupan Peningkatan Wawasan Kebangsaan dan Politik Masyarakat di Kabupaten Magelang Tahun 2015-2019

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2015	2016	2017	2018	2019
1	Jumlah Ormas, LSM dan OKP yang aktif	unit	83	93	95	97	108
2	Jumlah Ormas, LSM dan OKP yang tercatat	unit	87	97	99	101	112
3	Jumlah Konflik Sosial Tertangani	unit	0	0	1	0	13
4	Jumlah Konflik Sosial	unit	0	0	1	0	13
5	Cakupan Peningkatan Wawasan Kebangsaan dan Politik Masyarakat	%	85,00	95,00	97,00	99,00	98,70

Sumber : Kantor Kebangpol Kabupaten Magelang, 2020

Dari data di atas dapat dilihat cakupan wawasan kebangsaan dan politik masyarakat selama tahun 2015-2018 menunjukkan peningkatan. Jumlah Ormas, LSM dan OKP yang aktif dan tercatat menunjukkan tren yang meningkat. Disamping itu data di atas juga menggambarkan kejadian konflik sosial relatif kecil bahkan tidak ada.

- g. Cakupan Ketenteraman dan Ketertiban

Tabel 2.62

Cakupan Ketenteraman dan Ketertiban Masyarakat di Kabupaten Magelang Tahun 2015-2019

No	Indikator	Satuan	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Cakupan Penegakan Hukum	%	99,23	99,72	90,23	90,55	98,57
2.	Cakupan Ketangguhan Masyarakat	%	20,00	47,00	66,67	74,10	99,12

No	Indikator	Satuan	2015	2016	2017	2018	2019
	Menghadapi Bencana						
3.	Cakupan Peningkatan Wawasan Kebangsaan dan Politik Masyarakat	%	85.00	95.00	97.00	99.00	98,70
4.	Cakupan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat	%	68.08	80.57	84.63	87.88	98,80

Sumber: Data diolah, 2020

Kondusifitas wilayah dapat dilihat dari frekuensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat, antara lain demonstrasi atau unjuk rasa dan tindak pidana. Demonstrasi atau unjuk rasa adalah sebuah gerakan protes yang dilakukan sekumpulan orang di hadapan umum. Unjuk rasa biasanya dilakukan untuk menyatakan pendapat kelompok tersebut atau penentang kebijakan yang dilaksanakan suatu pihak atau dapat pula dilakukan sebagai sebuah upaya penekanan secara politik oleh kepentingan kelompok. Kegiatan demonstrasi terkadang dapat menyebabkan pengrusakan terhadap benda-benda. Hal ini dapat terjadi akibat keinginan menunjukkan pendapat para pengunjung rasa yang berlebihan. Kegiatan perusakan terhadap benda-benda itulah yang terkadang menimbulkan gangguan kecil atau besar bagi rutinitas masyarakat yang berada di lingkungan tersebut, meskipun sebenarnya demonstrasi merupakan sebuah fenomena geliat dan dinamika kesadaran masyarakat untuk berpolitik.

2.4 Aspek Pelayanan Umum

2.4.1. Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

a. Pendidikan

1) Angka Kelulusan

Angka kelulusan di Kabupaten Magelang selama tahun 2015 sampai 2019 berada pada kondisi yang baik, hampir mendekati 100%. Capaian terbaik angka kelulusan SD/MI/Paket A diperoleh pada tahun 2016 yaitu sebesar 100%. Sementara itu, angka kelulusan SMP/MTs/Paket B mencapai 100% pada tahun 2015. Data angka kelulusan selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.63

Angka Kelulusan di Kabupaten Magelang
Tahun 2015-2019

Indikator	Tahun				
	2015	2016	2017	2018	2019
Angka Kelulusan SD/MI/Paket A	99,98	100,00	99,99	100,00	99,99
Angka Kelulusan SMP/MTs/Paket B	100,00	99,98	99,77	99,91	99,79

Sumber Data : Disdikbud Kabupaten Magelang, 2020

Berdasarkan data tahun 2018, angka kelulusan SD/MI di Kabupaten Magelang sebesar 100 %. Artinya proses belajar mengajar di dalam kelas

untuk mencetak murid yang sesuai kemampuan pada jenjang pendidikan tertentu yang dilakukan guru telah berhasil.

2) Rerata Nilai Ujian Nasional

Rerata nilai ujian nasional SD/MI/Paket A di Kabupaten Magelang selama tahun 2015 sampai 2019 cenderung menurun. Berbeda dengan rerata nilai ujian nasional SMP/MTs/Paket B yang cenderung naik walaupun angka kenaikannya belum signifikan. Tren untuk rerata nilai UN SD/MI/Paket A dan SMP/MTs/Paket B di Kabupaten Magelang mengalami penurunan. Penurunan nilai rata-rata tersebut dapat mengindikasikan bahwa terjadi penurunan kualitas pada lulusan peserta didik. Data rerata nilai ujian nasional disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.64
Rerata Nilai Ujian Nasional di Kabupaten Magelang
Tahun 2015-2019

Indikator	Tahun				
	2015	2016	2017	2018	2019
Rerata Nilai UN SD/MI/ Paket A	7,25	7,03	7,59	7,42	7,60
Rerata Nilai UN SMP/MTs/Paket B	6,19	5,86	5,78	5,79	5,80
Rerata Nilai UN SMA/ SMK/MA	6,72	6,45	6,69	6,61	6,70

Sumber : Disdikbud Kabupaten Magelang, 2020

3) Persentase Sekolah Berakreditasi Minimal B

Setiap sekolah/madrasah di Indonesia harus mengikuti proses akreditasi. Hasil dari akreditasi sekolah/madrasah bermanfaat bagi pemerintah daerah untuk pemetaan mutu pendidikan, pencapaian Standar Nasional Pendidikan (SNP), dan dasar pertimbangan dalam menyusun kebijakan peningkatan mutu pendidikan.

Peringkat akreditasi sekolah terdiri atas 3 (tiga) klasifikasi yaitu: A (Amat Baik) dengan nilai $85 < \text{nilai} \leq 100$; B (Baik) dengan nilai $70 < \text{nilai} \leq 85$ dan C (Cukup) dengan nilai $56 \leq \text{nilai} \leq 70$. Sekolah dikatakan layak dan cukup bermutu apabila berakreditasi minimal B.

Tabel 2.65
Persentase SD/MI dan SMP/MTs yang Berakreditasi Minimal B
Kabupaten Magelang Tahun 2015-2019

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2015	2016	2017	2018	2019
1	Persentase SD berakreditasi minimal B.	Persen	98,51	98,18	98,68	99,34	99,35
2	Persentase SMP berakreditasi minimal B.	Persen	89,60	88,19	86,82	88,37	88,38

Sumber : Disdikbud Kabupaten Magelang, 2020

Persentase SD berakreditasi minimal B di Kabupaten Magelang pada tahun 2015 sebesar 98,51%, naik menjadi 99,34% pada tahun 2018. Persentase SMP berakreditasi minimal B sebesar 89,60% pada tahun

2015, mengalami penurunan menjadi 88,37% pada tahun 2018. Walaupun belum mencapai 100%, kenaikan persentase sekolah yang berakreditasi minimal B ini menunjukkan bahwa terjadi peningkatan mutu pendidikan SD/MI.

4) Kompetensi Pendidik

Mutu tenaga pendidik saat ini tercermin dari kompetensi guru meliputi guru yang memenuhi kualifikasi S1/D4 dan guru yang bersertifikat pendidik, sebagaimana tabel dibawah ini.

Tabel 2.66

Kompetensi Pendidik di Kabupaten Magelang Tahun 2015-2019

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun				
			2015	2016	2017	2018	2019
1.	Guru memenuhi kualifikasi S1/DIV						
	1.1 Guru SD/MI	%	74.69	79.66	83.75	86,10	93,63
	1.2 Guru SMP/MTs	%	87.92	87.97	90.48	96,77	96,77
2.	Guru bersertifikasi						
	2.1. Guru SD/MI	%	81,61	82,00	84,21	86,27	86,27
	2.2. Guru SMP/MTs	%	90.78	91,00	93,36	93,21	93,21

Sumber : Disdikbud Kabupaten Magelang, 2020

Guru SD/MI yang bersertifikasi pada tahun 2015 tahun 2015 sebanyak 81,61%, tahun 2016 sebanyak 82,00%, tahun 2017 sebanyak 84,21% dan tahun 2018 sebesar 86,27%. Terlihat bahwa jumlah guru SD/MI yang memiliki kualifikasi SI/DIV menunjukkan trend yang naik. Tahun 2018 jumlah guru yang memenuhi kualifikasi SI/DIV sebanyak 86,10% berarti masih ada guru SD/MI yang belum memenuhi kualifikasi DIV/S1 sebesar 13,90 %. Selain itu, pada tahun 2018 masih terdapat permasalahan terhadap banyaknya guru non PNS (33%), yang pengangkatannya tanpa seleksi yang terstandar dan belum dipayungi regulasi yang jelas. Hal tersebut sebagai akibat tidak seimbang guru PNS SD/MI yang pensiun dengan guru PNS SD/MI yang direkrut pemerintah. Jumlah guru SMP/MTs yang memenuhi kualifikasi S1/DIV, dari tahun 2014-2018 juga mengalami peningkatan.

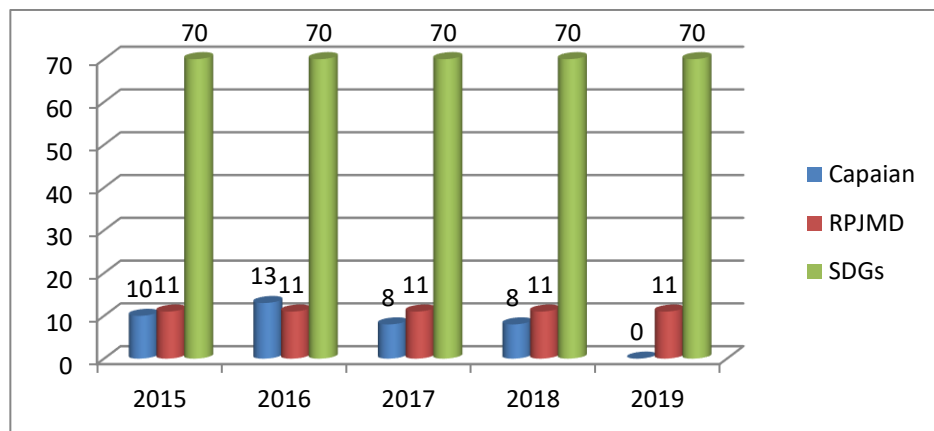
Guru yang bersertifikasi di SD/MI maupun di SMP/MTs mengalami kenaikan dari tahun 2015-2017, namun pada tahun 2018 persentase guru yang bersertifikasi mengalami penurunan karena adanya guru bersertifikasi yang pensiun sementara guru baru yang menggantikan tidak bisa langsung bersertifikasi. Persentase guru SD/MI yang bersertifikasi pada tahun 2014 sebesar % 74,86% naik menjadi 86,27% pada tahun 2018. Presentase guru SMP/MTs yang bersertifikasi pada tahun 2015 sebesar 90,78% dan naik menjadi 93,21% pada tahun 2018. Kualifikasi pendidikan guru dan kompetensi guru yang tercermin dari sertifikasi guru merupakan salah satu komponen penentu mutu pendidikan. Walaupun menunjukkan trend naik setiap tahun, jumlah guru yang memenuhi kualifikasi S1/DIV dan jumlah guru yang mendapatkan sertifikasi masih perlu ditingkatkan.

Saat ini pemerintah sedang berupaya keras untuk dapat memanfaatkan bonus demografi dengan baik. Bonus demografi dapat dimanfaatkan secara optimal melalui peningkatan kualitas pada generasi muda. Salah satu langkah agar bonus demografi menjadi berkah bagi negara yaitu meningkatkan kualitas pendidikan melalui akses pendidikan yang meluas, merata, dan berkeadilan. Menurut data BPS, pada tahun 2017 persentase pengangguran terbuka masih tergolong besar. Jika dilihat dari pendidikan terakhir yang ditempuh, lulusan SD, SMP, SMA, SMK, menyumbang banyak angka pengangguran terbuka. Oleh karena itu, dalam memanfaatkan bonus demografi dilakukan pemerataan pendidikan yang meluas dan berkeadilan. Pengembangan SDM melalui peningkatan kualitas kompetensi tenaga pendidik merupakan strategi persiapan guna menangkap peluang bonus demografi yang akan dialami Indonesia pada tahun 2020-2030.

b. Kesehatan

1) Angka Kematian Ibu

Angka kematian merupakan komposit dari empat komponen yaitu Angka Kematian Ibu (AKI), Angka Kematian Bayi (AKB), Angka Kematian Balita (AKABa), dan Angka Kematian Neonatal (AKN). AKI, AKB, AKABa dari tahun 2015-2019 sebagaimana gambar dibawah ini.



Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Magelang, 2020

Gambar 2.20

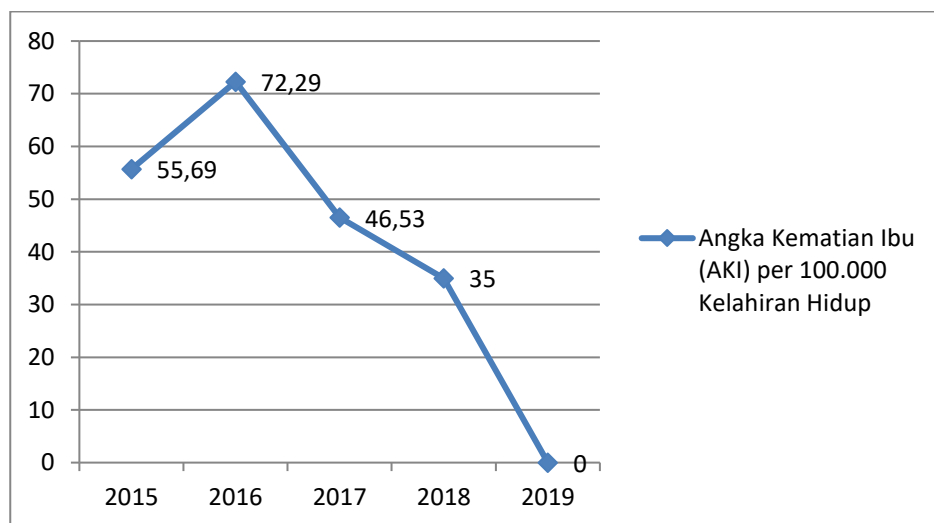
Jumlah Kasus Kematian Ibu di Kabupaten Magelang Tahun 2015-2019

Berdasarkan data Dinas Kesehatan tahun 2019, kasus kematian Ibu di Kabupaten Magelang pada tahun 2015 sebesar 10 kematian, tahun 2016 sebesar 13 kematian, tahun 2017 sebesar 8 kematian, tahun 2018 sebesar 8 kematian dan pada tahun 2019 sebesar N/A kematian ibu per jumlah kelahiran di Kabupaten Magelang. Secara umum kasus kematian ibu di Kabupaten Magelang mengalami trend penurunan dari 13 kasus pada tahun 2016 menjadi N/A kasus pada tahun 2019. Adapun penyebab utama masih adanya angka kematian ibu dikarenakan adanya penyakit bawaan/ penyerta yang tidak diperiksakan ketika masa kehamilan.

Sasaran prioritas pembangunan kesehatan salah satunya adalah ibu dan anak karena merupakan kelompok rentan yang perlu menjadi fokus

perhatian pembangunan kesehatan. Salah satu indikatornya adalah Angka Kematian Ibu (AKI) yang mencerminkan banyaknya ibu yang meninggal dari suatu penyebab kematian terkait dengan gangguan kehamilan atau penanganannya (tidak termasuk kecelakaan atau kasus insidentil) selama kehamilan, melahirkan dan dalam masa nifas (42 hari setelah melahirkan) tanpa memperhitungkan lama kehamilan per 100.000 kelahiran hidup.

Angka Kematian Ibu (AKI) Kabupaten Magelang selama tahun 2015-2019 terus menurun yaitu dari angka 72,29/100.000 KH di tahun 2016 menjadi N/A/100.000 KH di tahun 2019. Beberapa penyebab masih ditemukannya kasus kematian ibu melahirkan dan nifas antara lain pendarahan, hipertensi dalam kehamilan, infeksi, gangguan sistem peredaran darah, dan ganggua nmetabolisme. Selain itu penyebab kematian ibu juga tidak terlepas dari ketepatan waktu dalam mengakses ke pelayanan kesehatan ibu yang dilatarbelakangi oleh terlambat mengenali tanda bahaya dan mengambil keputusan. Perkembangan kondisi AKI Kabupaten Magelang selama kurun waktu tahun 2015 - 2019 sebagaimana terlihat dalam gambar berikut:



Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Magelang, 2019

Gambar 2.21

Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 Kelahiran Hidup
Kabupaten Magelang 2015 – 2019

Pemerintah Kabupaten Magelang juga mengupayakan kegiatan program perencanaan persalinan dan pencegahan komplikasi (P4K) sebagai wujud perhatian terhadap peningkatan derajat kesehatan ibu, bayi baru lahir dan anak. P4K difasilitasi oleh bidan desa dalam rangka peningkatan peran aktif suami, keluarga dan masyarakat dalam merencanakan persalinan yang aman dan persiapan menghadapi komplikasi pada ibu hamil, termasuk perencanaan pemakaian alat kontrasepsi pasca persalinan

2) Angka Kematian Bayi

Data AKB (usia < 1 tahun) di Kabupaten Magelang ditunjukkan pada tabel berikut ini.

Tabel 2.67
Angka Kematian Bayi di Kabupaten Magelang Tahun 2015-2019

No	Indikator	Satuan	2015	2016	2017	2018	2019
1	Jumlah Kematian Bayi	Bayi	131	147	114	55	143
2	Jumlah Kelahiran Hidup	Bayi	17.956	17.984	17.192	17.424	17.147
3	Angka Kematian Bayi (per 1.000 Kelahiran Hidup)	Permil	7,30	8,17	6,13	5,72	8,33

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Magelang, 2020

Berdasarkan tabel di atas, pada tahun 2015 Angka Kematian Bayi di Kabupaten Magelang sebesar 7,30 per 1.000 kelahiran hidup. AKB tersebut justru mengalami tren penurunan hingga tahun 2018, yang kemudian naik mencapai 8,33 per 1.000 kelahiran hidup di tahun 2019. Dalam gambar berikut dapat dibandingkan AKB di Kabupaten Magelang dengan target SDGs. Dalam goal SDGs 2030, AKB ditargetkan agar dapat ditekan hingga 12 per 1000 kelahiran hidup. Pada RPJMD Kabupaten Magelang Tahun 2014-2019, AKB ditargetkan pada tahun 2019 menjadi 5,71 per 1000 kelahiran hidup. Berdasarkan standar SDGs tersebut, AKB di Kabupaten Magelang berada di posisi yang sudah baik yaitu di bawah 12 sejak tahun 2015 atau 7,30 per 1000 kelahiran hidup menurut RPJMD Kabupaten Magelang Tahun 2014-2019.

3) Angka Kematian Balita

Data angka kematian balita (usia 1 hingga tepat sebelum 5 tahun) di Kabupaten Magelang dapat diamati pada tabel berikut.

Tabel 2.68
Angka Kematian Balita per 1.000 Kelahiran Hidup
di Kabupaten Magelang Tahun 2015-2019

No	Indikator	Satuan	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Jumlah Kematian Balita	Balita	70	63	47	116	154
2.	Jumlah Kelahiran Hidup	Bayi	17.956	17.984	17.192	17.424	14.147
3.	Angka Kematian Balita (per 1.000 Kelahiran Hidup)	permil	3,90	3,50	2,73	6,70	8,98

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Magelang, 2020

4) Prevalensi Balita Gizi Buruk dan Stunting

a) Balita Gizi Buruk

Balita gizi buruk merupakan balita dengan status gizi menurut berat badan (BB) dan umur (U) dengan Z-score <-3 SD dan atau dengan tanda-tanda klinis (marasmus, kwasiorkor, dan marasmus-kwasiorkor. Data prevalensi balita gizi buruk di Kabupaten Magelang dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.69
Prevalensi Balita Gizi Buruk di Kabupaten Magelang Tahun 2015-2019

No	Indikator	Satuan	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Jumlah Balita Gizi Buruk	Anak	30	36	18	15	13
2.	Jumlah Balita	Anak	99.291	98.231	97.249	89.890	85.785
3.	Prevalensi balita gizi buruk	Persen	0,03	0,04	0,02	0,02	0,02
4	Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan	Persen	100	100	100	100	100

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Magelang, 2020

b) Stunting

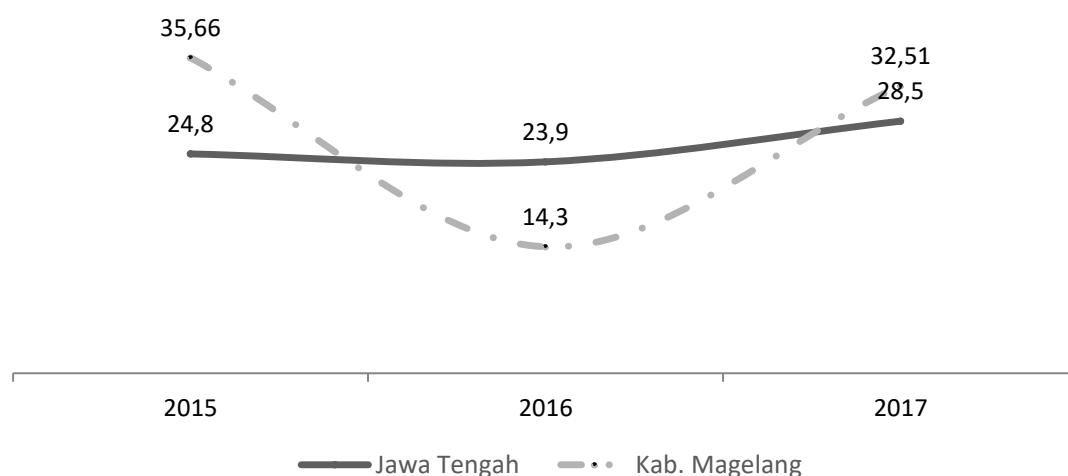
Kasus stunting ditunjukkan dengan rendahnya angka rata-rata konsumsi energi, pola asuh orang tua terhadap balita, kurangnya pengetahuan tentang kesehatan reproduksi, risiko akibat pernikahan anak, serta kurangnya ketersediaan akses air minum layak, air bersih, dan sanitasi.

Banyaknya anak yang menderita stunting ini tidak lepas dari banyaknya masalah kekurangan gizi yang terjadi pada ibu yang hamil, sehingga anak yang ada dalam kandungan mengalami kekurangan gizi untuk berkembang, sehingga terlahir dengan kondisi kurang normal.

Faktor lain yang mempengaruhi adalah akses pangan dan gizi di beberapa wilayah di Kabupaten Magelang yang masih minim. Seperti di daerah pegunungan yang jauh dari cakupan pangan bergizi.

Daerah endemik gondok seperti di pegunungan juga mempengaruhi. Kebanyakan stunting terjadi di daerah sana. Selain karena kurang cakupan pangan bergizi, bisa jadi akibat kekurangan yodium.

Pada tahun 2018 sesuai laporan dari puskesmas, prevalensi stunting sebesar 5,7. Sementara prevalensi Kasus Stunting di Kab. Magelang Tahun 2015-2017, disajikan dalam grafis berikut



Sumber data : Dinas Kesehatan Prov, Jateng dan Kab. Magelang

Gambar 2.22

Prevalensi Kasus Stunting di Kab. Magelang Tahun 2015-2017

Dari grafik di atas terlihat data dari tahun 2015-2017 merupakan data persentase hasil dari survey Pemantauan Status Gizi. Data tahun 2018 adalah data persentase laporan dari puskesmas.

5) Rasio Dokter Per Satuan Penduduk

Berdasarkan jenis profesinya, dokter dikelompokkan menjadi tiga yaitu dokter umum, dokter gigi, dan dokter spesialis yang bisa disebut dengan tenaga medis, yang disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 2.70

Rasio Dokter Per Satuan Penduduk di Kabupaten Magelang Tahun 2015-2019

No	Indikator	Satuan	2015	2016	2017	2018	2019
1	Dokter Umum	orang	88	71	123	57	57
2	Dokter Gigi	orang	38	37	44	29	25
3	Dokter Spesialis	orang	51	51	52	15	23
4	Jumlah Tenaga Medis	orang	177	159	219	101	105
5	Jumlah Penduduk (BPS)	jiwa	1.245.496	1.275.123	1.268.396	1.290.115*	1.295.019
6	Rasio Dokter Umum per satuan penduduk	per 100.000 pddk	7,07	5,57	9,70	4,42	4,40
7	Rasio Dokter Gigi per satuan penduduk	per 100.000 pddk	3,05	2,90	3,47	2,25	1,93
8	Rasio Dokter Spesialis per satuan penduduk	per 100.000 pddk	4,09	4,00	4,10	1,16	1,78
9	Rasio Tenaga Medis per satuan penduduk	per 100.000 pddk	14,21	12,47	17,27	7,83	8,11

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Magelang, 2020

*) Disdukcapil, 2019, 2020

Menurut data yang ada pada tabel di atas, secara jumlah, dokter umum dan dokter spesialis di Kabupaten Magelang mengalami penurunan kuantitas. Dokter umum tahun 2015 ada 88 orang, sedangkan dokter spesialis ada 51 orang. Di tahun 2019 jumlah dokter umum menjadi 57 orang dan dokter spesialis 23 orang. Penurunan juga terjadi pada jumlah dokter gigi yang semula berjumlah 38 orang di tahun 2015 menjadi 25 orang pada tahun 2019.

Rasio dokter umum berada pada angka 4 memiliki gap yang sangat besar dengan standar idealnya yang mencapai 43 per 100.000 penduduk. Sedangkan rasio dokter spesialis yang idealnya adalah 11 per 100.000 penduduk hanya mampu dipenuhi sebanyak 1,78 per 100.000 penduduk. Tidak jauh berbeda dengan rasio dokter gigi yang rasionya baru mampu dicapai sebanyak 1,93 per 100.000 penduduk dibandingkan standar idealnya yang sebesar 10.

6) Kualitas Puskesmas dan Rumah Sakit

Kualitas puskesmas dan rumah sakit di Kabupaten Magelang dapat dilihat dari jumlah puskesmas dan rumah sakit yang terakreditasi seperti pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.71
Puskesmas dan Rumah Sakit Terakreditasi
di Kabupaten Magelang Tahun 2015-2019

No	Uraian	Satuan	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Jumlah Puskesmas terakreditasi	Unit	29	29	29	29	29
2.	Jumlah Puskesmas yang ada	Unit	0	10	22	29	29
3.	Persentase Puskesmas terakreditasi	%	0	34,48	75,86	100,00	100,00
4.	Jumlah RSUD	Unit	1	1	1	1	1
5.	Jenjang RSUD berakreditasi	tingkat	dasar	dasar	madya	madya	madya

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Magelang, 2020

7) Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)

Cakupan desa/kelurahan UCI adalah desa/kelurahan dimana $\geq 80\%$ dari jumlah bayi yang ada di desa tersebut sudah mendapat imunisasi dasar lengkap (BCG 1 kali, DPT 3 kali, Hepatitis B 4 kali, polio 4 kali, dan campak 1 kali) dalam waktu satu tahun. Standar Pelayanan Minimal Nasional menetapkan target 100% desa/kelurahan UCI pada tahun 2010 untuk setiap kabupaten. Secara lebih lengkap dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.72
Cakupan Desa/Kelurahan *Universal Child Immunization* (UCI)
di Kabupaten Magelang Tahun 2015-2019

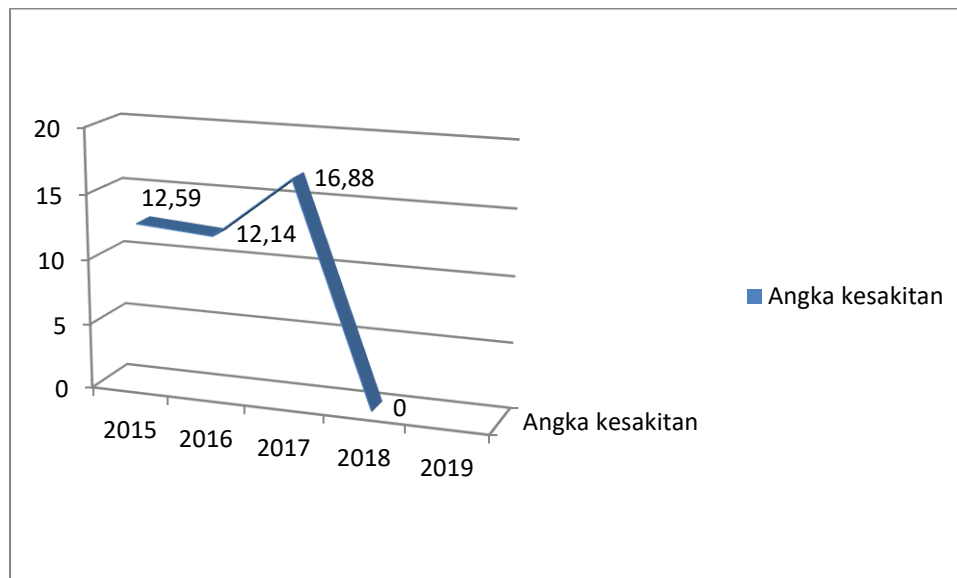
No	Indikator	Satuan	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Jumlah desa / kelurahan UCI	Unit	372	372	372	372	372
2.	Jumlah Seluruh desa/ kelurahan	Unit	372	372	372	372	372
3.	Cakupan desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	%	100	100	100	100	100

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Magelang, 2020

Cakupan desa/kelurahan UCI di Kabupaten Magelang berdasarkan tabel di atas telah mencapai 100% di setiap tahun (tahun 2015-2019). Dapat dilihat bahwa jumlah desa atau kelurahan UCI bersifat statis atau tidak berubah sejak tahun 2015 hingga 2019 yaitu sebanyak 372 desa.

8) Angka Kesakitan

Angka kesakitan Kabupaten Magelang pada tahun 2015 sebesar 12,59%, pada tahun 2016 sebesar 12,14%. Sementara pada tahun 2017 angka kesakitan meningkat menjadi 16,88. Data angka kesakitan di Kabupaten Magelang sebagai berikut.



Gambar 2.23

Angka Kesakitan Kab. Magelang Tahun 2015-2019

9) Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit Menular

a) Penyakit TBC BTA

Cakupan penemuan dan penanganan penderita TBC BTA (+) merupakan jumlah penderita baru TBC BTA (+) yang ditemukan dan diobati di suatu wilayah kerja selama satu tahun dibanding dengan jumlah perkiraan penderita baru TBC BTA (+) dalam kurun waktu yang sama.

Cakupan penemuan dan penanganan penderita TBC BTA (+) di seluruh Kabupaten Magelang pada tahun 2015 sebesar 58,93, pada tahun 2016 sebesar 44,63, pada tahun 2017 sebesar 46,12 dan pada tahun 2018 sebesar 52,95.

b) Penyakit DBD

Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD adalah persentase penderita DBD yang ditangani sesuai standar di suatu wilayah dalam kurun waktu 1 tahun dibandingkan dengan jumlah penderita DBD yang ditemukan/dilaporkan dalam kurun waktu satu tahun yang sama. Penderita DBD yang ditangani sesuai standar SOP adalah penderita DBD yang didiagnosis dan diobati/dirawat sesuai standar, ditindaklanjuti dengan penanggulangan fokus (PF).

Tabel 2.73

Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD di Kabupaten Magelang Tahun 2015-2019

No	Indikator	Satuan	2015	2016	2017	2018	2019
1	Jumlah penemuan penderita baru DBD	Jiwa	408	463	123	107	215
2	Jumlah penderita baru DBD yang diobati	Jiwa	408	463	123	107	215
3.	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	persen	100	100	100	100	100

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Magelang, 2020

Berdasarkan tabel cakupan di atas, cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD tahun 2015-2019 telah mencapai 100% sejak tahun 2015.

c) Angka Kejadian Malaria

Malaria merupakan salah satu penyakit menular yang upaya pengendaliannya menjadi komitmen global dalam Sustainable Development Goals (SDG's). Di Kabupaten Magelang, pada tahun 2015 penderita malaria dengan pemeriksaan sediaan darah (positif) sebanyak 166 jiwa. Tahun 2015 ini, merupakan jumlah kasus ini tertinggi selama kurun waktu 2015-2019. Semua kasus malaria tersebut tidak ada kematian sehingga Case Fatality Rate (CFR) adalah 0. Tahun 2016, terjadi penurunan drastis menjadi 21 jiwa, dan penderita malaria meninggal adalah 0 sehingga Case Fatality Rate-nya 0. Pada tahun 2018, jumlah penderita malaria kembali turun menjadi 4 jiwa. Penderita malaria di Kabupaten Magelang dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.74
Penderita Malaria dengan Pemeriksaan Darah (positif)
di Kabupaten Magelang Tahun 2015-2019

No	Indikator	Satuan	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Jumlah penderita malaria dengan pemeriksaan darah (positif)	Jiwa	166	21	14	4	4
2.	Jumlah penderita malaria meninggal	Jiwa	0	0	0	0	0
3.	Case Fatality Rate (CFR)	Persen	0	0	0	0	0

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Magelang, 2020

d) HIV/AIDS

HIV dan AIDS merupakan permasalahan global yang juga dirasakan oleh seluruh negara, termasuk Indonesia. Penderita HIV/AIDS menyebar diseluruh wilayah dan berbagai kalangan. Penderita HIV/AIDS di Kabupaten Magelang dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.75
Prevalensi HIV/AIDS
di Kabupaten Magelang Tahun 2015-2019

No	Indikator	Satuan	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Jumlah penderita HIV/AIDS	Jiwa	12	62	60	29	32
2.	Jumlah Penduduk (BPS)	Jiwa	1.245.496	1.275.123	1.268.396	1.290.115*	1.295.019*
3.	Prevalensi HIV/AIDS (persen) dari total populasi	Persen	0.0010	0.0049	0.0047	0.0023	0,0025

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Magelang, 2020

*) Disdukcapil, 2019

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa penderita HIV/AIDS di Kabupaten Magelang angkanya pada tahun 2015 sebesar 12 jiwa dan tahun 2019 menjadi 32 jiwa.

- 10) Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit Tidak Menular Penyakit menular yang dimaksud dalam narasi ini adalah penyakit hipertensi, Diabetes Melitus (DM), dan gangguan jiwa, seperti pada tabel berikut ini.

Tabel 2.76
Penyakit Tidak Menular Tahun 2015-2019 di Kab. Magelang

No	Indikator	Satuan	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Hipertensi	Jiwa	8.486	n/a	41.099	50.438	51.026
2.	Diabetes Melitus (DM)	Jiwa	1.346	n/a	2.812	7.077	7.404
3.	Gangguan Jiwa	Jiwa	575	n/a	889	1.434	1.450

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Magelang, 2020; data diolah

Data di atas terlihat bahwa penyakit tidak menular baik penyakit hipertensi, diabetes melitus, dan gangguan jiwa tiap tahunnya mengalami peningkatan. Kenaikan penyakit tidak menular ini salah satunya disebabkan oleh pola hidup yang kurang sehat. Untuk meminimalkan kenaikan penyakit tidak menular perlu perhatian dan penanganan yang lebih intensif.

Bonus demografi penduduk di usia produktif dapat mendorong kemajuan bangsa apabila menjadi tenaga kerja yang memiliki kompetensi tinggi.

Bonus demografi di Kabupaten Magelang menjadi tantangan sekaligus peluang bagi pemerintah daerah. Jika pemerintah daerah dapat menjaga kestabilan penduduk yang sehat dan berkualitas, bonus demografi tersebut akan menjadi peluang untuk pembangunan bangsa.

c. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

1) Jalan dan Bangunan Pelengkap Jalan

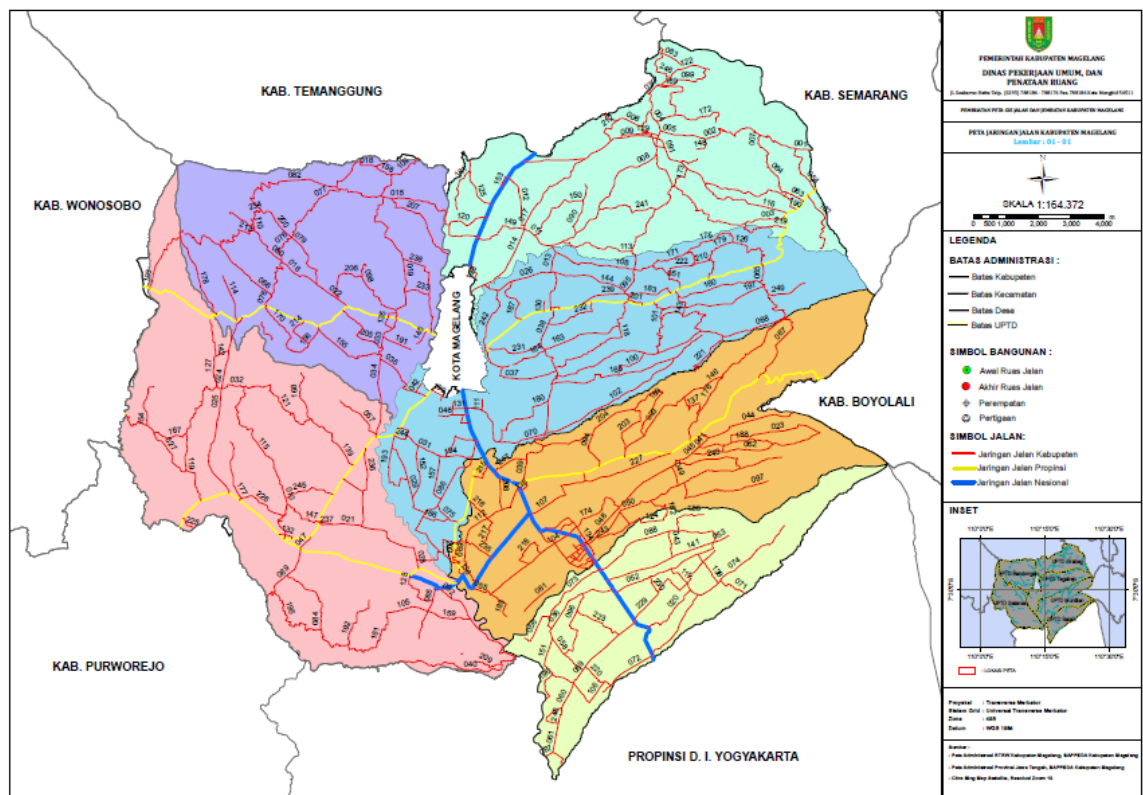
Berdasarkan Perda Nomor 5 Tahun 2011, tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Magelang Tahun 2010-2030, jalan kabupaten memiliki fungsi sebagai jalan lokal primer. Jalan yang menjadi kewenangan kabupaten di Kabupaten Magelang dari tahun 2015 terus mengalami perkembangan. Pada tahun 2015, melalui Surat Keputusan Bupati Nomor 180.182/180/KEP/25/2015 tentang Status Ruas-Ruas Jalan Sebagai Jalan Kabupaten, panjang jalan yang menjadi kewenangan kabupaten menjadi 1.000,83 km yang meliputi 249 ruas jalan sampai dengan tahun 2019. Adapun kondisi dasar jalan di Kabupaten Magelang sebagai berikut.

Tabel 2.77
Kondisi Dasar Jalan di Kabupaten Magelang Tahun 2015-2019

No	Uraian	Satuan	2015	2016	2017	2018	2019
JALAN							
1	Jalan Nasional	Km	N/A	36,40	36,40	36,40	38
2	Jalan Provinsi	Km	N/A	118,68	118,68	118,68	119
3	Jalan Kabupaten	Km	887,83	887,83	1000,83	1000,83	1000,83
4	Jalan Lingkungan	Km	N/A	N/A	2123, 31	2123, 31	2123, 31
5	Jumlah ruas jalan kab	Ruas Jalan	204	204	249	249	249
BANGUNAN PELENGKAP JALAN							
1	Jembatan kabupaten	Buah	N/A	306	337	339	344
2	Panjang jalan kab berdrainase	Km	323,56	323,56	357,5	360	374,50
3	Panjang jalan kab bertrottoar	Km	44,08	47,03	50,59	52,62	66,02
4	Panjang jalan kab yang bertalud (memiliki dinding penahan tanah)	Km	N/A	N/A	95,55	96,55	96,55

Sumber: Hasil Olahan, 2020

Ketersediaan jalan kabupaten di Kabupaten Magelang telah menghubungkan seluruh kawasan permukiman dan simpul-simpul kegiatan, baik itu kawasan permukiman dengan pusat-pusat aktivitas, ibukota kabupaten dengan 21 ibukota kecamatan, ibukota kecamatan dengan ibukota kecamatan, ataupun ibukota kecamatan dengan ibukota desa. Sebaran ketersediaan Jalan di Kabupaten Magelang dapat digambarkan dalam gambar berikut ini :



Gambar 2.24
Peta Sistem Jaringan Jalan di Kabupaten Magelang

Kondisi ketersediaan jalan kabupaten dilihat dari kondisi permukaan jalan, ditunjukkan dalam tabel berikut ini.

Tabel 2.78

Kondisi Permukaan Jalan di Kabupaten Magelang Sesuai Kewenangan Tahun 2015-2019

No	Indikator	Satuan	2015	2016	2017	2018	2019
PERMUKAAAN JALAN							
1	Baik	Km	608,34	619,80	736,88	742,30	748,547
		%	68,52	61,93	73,63	74,17	74,79
2	Sedang	Km	170,27	227,94	156,65	143,83	140,475
		%	19,18	22,78	15,65	14,37	14,04
3	Rusak	Km	88,02	120,96	96,27	95,98	93,13
		%	9,91	12,09	9,62	9,59	9,31
4	Rusak Berat	Km	21,20	32,13	11,03	18,72	18,67
		%	2,39	3,21	1,10	1,87	1,87
	Total Panjang jalan	Km	887,83	1000,83	1000,83	1000,83	1000,83
KONSTRUKSI JALAN							
1	Aspal/Penetrasi/Macadam	Km	778,61	891,61	890,38	878,11	876,11
2	Perkerasan Rigid/Beton	Km	-	-	3,15	8,02	10,02
3	Telford/Kerikil	Km	109,22	109,22	107,30	114,70	114,70
4	Tanah	Km	-	-	-	-	-

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang, 2020

Sedangkan bila dilihat sesuai dengan standar atau ketentuan jalan yang berlaku, kondisi jalan kabupaten di Kabupaten Magelang adalah sebagai berikut.

Tabel 2.79

Kondisi Standar Jalan di Kabupaten Magelang Sesuai Kewenangannya Tahun 2015 – 2019

No	Uraian	Satuan	2015	2016	2017	2018	2019
JALAN							
1	Jalan kabupaten lebar standar \geq 5,5 m (PP 34/2006)	Km	N/A	N/A	207,74	227,74	235,94
		%			20,76	22,76	23,574
BANGUNAN PELENGKAP JALAN							
1	Jembatan kabupaten kondisi baik	Unit	N/A	N/A	332	336	343
		%			80,78	81,75	83,45
2	Jembatan kabupaten yang memiliki lebar standar 5,5 m	Buah	N/A	N/A	183	183	186
		%			44,53	44,53	54
3	Panjang jalan yang memiliki drainase kondisi baik	Km	107,735	111,41	268,13	270,63	275,68
		%	33,30	34,43	75	75,17	75,16
4	Panjang jalan yang memiliki trotoar kondisi baik	Km	44,08	47,03	50,59	52,62	66,02
		%	100	100	100	100	100
5	Panjang jalan bertalud (memiliki dinding penahan tanah) kondisi baik	Km	N/A	N/A	71,66	72,66	72,66
		%			75	75,26	75,26

Sumber: Hasil Olahan, 2020

2) Irigasi

Kondisi fisik jaringan irigasi di Kabupaten Magelang dijelaskan sebagaimana pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.80

Kondisi Dasar Jaringan Irigasi Kewenangan Kabupaten Tahun 2015 – 2019

No	Jaringan Irigasi	Satuan	2015	2016	2017	2018	2019
1	Jumlah Daerah Irigasi (DI)	DI	993	993	993	993	993
2	Luas Areal Daerah Irigasi (DI)	Ha	35.693,45	35.662	35.662	35.662	35.662
3	Panjang saluran irigasi	Km	N/A	N/A	887,12	887,12	887,12
4	Jumlah bangunan irigasi	Unit	N/A	N/A	827	827	827

Sumber: Hasil Olahan, 2020

Jaringan irigasi dalam kondisi baik yang menjadi kewenangan kabupaten dari tahun 2015-2019 mengalami kenaikan. Jaringan irigasi dalam kondisi baik diukur berdasarkan luas areal daerah irigasi yang teraliri atau tercukupi airnya. Hal ini ditunjukkan pada tabel berikut ini.

Tabel 2.81

Jaringan Irigasi Dalam Kondisi Baik Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Tahun 2015 - 2019

No	Indikator	Satuan	2015	2016	2017	2018	2019
1	Baik	Ha	21.268,04	22.008	22.843	23.347	24.198
		%	59,59	61,71	64,05	65,47	67,85
3	Rusak	Ha	6.791,61	6.539	6.131	5.958	5.503
		%	19,03	18,34	17,19	16,70	15,43
4	Rusak Berat	Ha	7.633,80	7.116	6.688	6.357	5.961
		%	21,39	19,95	18,75	17,83	16,72
	Luas Daerah Irigasi (DI)	Ha	35.693,45	35.662	35.662	35.662	35.662

Sumber: DPUPR, 2020

Kondisi fisik dari infrastruktur jaringan irigasi di Kabupaten Magelang pada tahun 2017-2018 mengalami peningkatan, yaitu :

- Panjang saluran irigasi dalam kondisi baik pada tahun 2017 adalah 572,63 km, tahun 2018 menjadi 578,58 km, dan tahun 2019 menjadi 618,10 km;
- Jumlah bangunan irigasi kondisi baik pada tahun 2017 sebanyak 533 unit, tahun 2018 menjadi 563 unit, dan pada tahun 2019 menjadi 618 unit.

Dalam rangka mendukung meningkatnya layanan jaringan irigasi dan produktivitas pertanian menuju tercapainya ketahanan pangan khususnya di Kabupaten Magelang, maka perlu menjamin ketersediaan air untuk keperluan irigasi melalui pengelolaan sumber-sumber daya air yang baik.

Kebutuhan air untuk sawah irigasi seluas 28.688,43 ha di Kabupaten Magelang rata-rata sebesar 904.718.323 m³/tahun. Sedangkan bila mendasarkan pada luas Daerah Irigasi Kabupaten Magelang (35.662

Ha), maka kebutuhan air untuk sawah irigasi di Daerah Irigasi rata-rata sebesar 1.124.636.832 m³/tahun.

Ketersediaan air baku sendiri di Kabupaten Magelang mencapai 1.436.627.538 m³/tahun dengan rincian air limpasan sebanyak 1.180.874.936 m³/tahun dan potensi mata air 257.752.602 m³/tahun. Pada Tahun 2019, kebutuhan pengairan untuk sawah irigasi di area Daerah Irigasi baru terpenuhi 763.117.904 m³/tahun (67,85%).

Selama ini pemenuhan kebutuhan air untuk keperluan irigasi di Kabupaten Magelang, diperoleh melalui pemanfaatan air sungai dan mata air. Namun ketersediaan air sungai dan mata air jumlahnya terbatas terutama pada musim kemarau. Beberapa upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Magelang dalam rangka pemenuhan ketersediaan air untuk keperluan irigasi antara lain melalui pembangunan embung dan pembinaan kelembagaan petani pengelola air.

Tabel 2.82
Pengelolaan Air Untuk Layanan Irigasi
di Kabupaten Magelang Tahun 2017-2019

No	Uraian	Satuan	2017	2018	2019
1.	Jumlah embung yang terbangun	Buah	1	3	3
2.	jumlah kelembagaan petani pengelola air	Kelompok	283	283	283
3.	jumlah kelembagaan petani pengelola air, yang berfungsi dengan baik	Kelompok	83	103	103

Sumber: Perhitungan Tim KLHS RPJMD Kabupaten Magelang, 2020

3) Bangunan Gedung

Pembangunan bangunan gedung di Kabupaten Magelang mengalami peningkatan dari tahun 2017 sampai dengan 2018. Pada tahun 2017 terdapat 1451 bangunan kantor pemerintah yang telah dibangun dan bertambah menjadi 1454 unit pada tahun 2018 serta 1457 unit pada tahun 2019. Adapun perkembangan pembangunan gedung pemerintah selama 5 tahun adalah ditunjukkan pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.83
Pembangunan Gedung Pemerintah di Kabupaten Magelang
Tahun 2015-2019

No.	Indikator	Satuan	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Gedung Pemerintah Yang Dibangun	Unit	8	7	6	3	3
2.	Jumlah Gedung Pemerintah	Unit	1438	1445	1451	1454	1457

Sumber: DPUPR Kabupaten Magelang Tahun 2020; data diolah

Sedangkan pembangunan bangunan berupa landmark di kawasan perbatasan sampai dengan tahun 2018 dan 2019 sebanyak 7 unit.

Dalam rangka meningkatkan kualitas bangunan gedung, maka setiap bangunan gedung perlu memiliki SLF (Sertifikat Laik Fungsi). Sasaran

bangunan gedung yang wajib ber-SLF dimulai dari bangunan gedung pemerintah dan bangunan gedung baru.

Jumlah bangunan landmark yang masih rendah di Kabupaten Magelang, menyebabkan perlunya pembangunan landmark di beberapa lokasi, sebagai penanda yang mempertegas ciri sebuah kawasan di Kabupaten Magelang.

4) Cakupan Layanan Air Minum

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara. Kondisi cakupan layanan air minum di Kabupaten Magelang dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.84

Cakupan Layanan Air Minum di Kabupaten Magelang Tahun 2015-2019

No.	Indikator	Satuan	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Jumlah rumah tangga terlayani air minum	RT	255.553	257.724	279.671	353.485	361.375
2.	Jumlah rumah tangga	RT	324.075	325.475	336.608	407.301	411.178
3.	Cakupan Layanan Air Minum	%	78,86	79,18	83,09	86,79	87,89

Sumber: Bidang AMPL Cipta Karya, DPUPR Kabupaten Magelang Tahun 2020; data diolah

Jumlah rumah tangga terlayani air minum di Kabupaten Magelang dalam kurun waktu 2015 hingga 2019 memiliki kecenderungan meningkat sebagaimana ditampilkan pada tabel di atas. Namun demikian, capaian ini masih jauh dari target *Universal Access* yang ditetapkan oleh pemerintah pusat yaitu 100% akses masyarakat terhadap layanan air minum pada akhir tahun 2019. Sampai dengan akhir tahun 2019, masih terdapat 12,11% rumah tangga yang belum mendapat pelayanan air minum.

5) Cakupan Layanan Sanitasi Air Limbah Domestik

Capaian layanan sanitasi tidak hanya diukur dari cakupan layanan air limbah domestik saja, tetapi juga layanan pengelolaan sampah dan layanan drainase sehingga tidak terjadi genangan (lebih dari 30 cm, selama 6 jam) lebih dari 2 kali setahun. Yang menjadi urusan pekerjaan umum dan penataan ruang adalah cakupan air limbah domestik. Sedangkan layanan drainase menjadi urusan pekerjaan umum dan penataan ruang (drainase jalan kabupaten) dan urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman (drainase lingkungan), dan layanan pengelolaan sampah menjadi urusan lingkungan hidup.

Cakupan layanan sanitasi air limbah domestik di Kabupaten Magelang ditunjukkan pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.85
Cakupan Layanan Sanitasi Air Limbah Domestik
di Kabupaten Magelang Tahun 2015-2019

No	Indikator	Satuan	2015	2016	2017	2018	2019
1	Jumlah rumah tangga berakses sanitasi	Rumah tangga	258.862	263.081	274.057	348.812	395.142
2	Jumlah rumah tangga	Rumah tangga	324.075	325.475	336.608	407.301	411.178
3	Persentase rumah tangga bersanitasi	%	79,88	80,83	81,42	85,64	96,10

Sumber: DPUPR Kabupaten Magelang ,2019; Dinas Kesehatan Kabupaten Magelang , 2020

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, setiap rumah tangga minimal mempunyai satu akses pengolahan air limbah domestik. Berdasarkan data yang tertuang pada tabel di atas, masih terdapat *gap* sebesar 3,9% antara capaian dengan target ideal yaitu 100% akses masyarakat terhadap layanan sanitasi air limbah domestik pada akhir tahun 2019.

Terkait layanan drainase, di Kabupaten Magelang tidak terdapat genangan air yang melebihi ketinggian 30 cm dan berlangsung selama 6 jam atau lebih. Berdasarkan identifikasi yang dilakukan pada tahun 2017 oleh DPUPR (dalam penyusunan dokumen masterlan drainase) terdapat 37 titik lokasi genangan di 16 Kecamatan dengan total luasan 645,84 ha, dengan rata-rata ketinggian 10-15 cm dan hanya berlangsung paling lama 30 menit.

6) Sarana Prasarana Ke-Puan

Peningkatan sarana prasarana ke-Puan dilakukan dalam rangka meningkatkan kualitas konstruksi pembangunan di Kabupaten Magelang. Peningkatan sarana prasarana ke-Puan yang dimaksud meliputi peningkatan ketersediaan dan kondisi sarana prasarana ke-Puan dan peningkatan layanan jasa konstruksi. Jumlah sarana dan prasarana ke-Puan yang dimiliki oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang pada tahun 2017/2018 adalah sebanyak 122 buah dan 122 buah pada tahun 2019. Sedangkan jumlah sarana dan prasarana dalam kondisi baik adalah sejumlah 122 buah pada tahun 2017/2018 122 buah pada tahun 2019. Pada tahun 2024 direncanakan terdapat penambahan kebutuhan sarana prasarana ke-Puan menjadi 150 buah.

7) Penataan Ruang

Pengaturan penataan ruang di Kabupaten Magelang berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Borobudur dan sekitarnya, Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Taman Nasional Gunung Merapi dan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten

Magelang 2010-2030. Belum adanya rencana rinci selain ketiga dokumen tata ruang tersebut menjadikan perangkat perizinan menjadi belum memadai, sehingga kesesuaian tata ruang antara pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang masih belum optimal.

Tabel 2.86
Kinerja Makro Urusan Penataan Ruang Tahun 2015-2019

Indikator	Tahun				
	2015	2016	2017	2018	2019
Luas Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB (ha)	4.11	4.11	39,59	39,27	39,27
Jumlah IMB yang dikeluarkan (buah)	594	384	577	346	432

Sumber: DPUPR Kabupaten Magelang, 2020

d. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Dalam rangka mengakomodir prioritas nasional, Pemerintah Kabupaten Magelang menyusun sasaran daerah, salah satunya yaitu meningkatnya layanan hunian yang layak dan berkualitas dengan dilengkapi dengan sarana dan prasarana perumahan dan permukiman. Upaya mewujudkan sasaran daerah bidang perumahan tersebut diantaranya melalui penyediaan rumah layak huni, penanganan kawasan kumuh perumahan dan penyediaan sarana dan prasarana perumahan.

Peningkatan rumah layak huni diarahkan sebagai berikut.

- 1) Peningkatan kualitas rumah tidak layak huni bagi masyarakat miskin yang didasarkan pada pemutakhiran Basis Data Terpadu 2015 yang di verifikasi dan validasi pada tahun 2018;
- 2) Fasilitasi penyediaan rumah layak huni dan terjangkau bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR);
- 3) Pemenuhan SPM Perumahan Rakyat (Permen PUPR Nomor 29/2018) tentang penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten dan fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten.

Tabel 2.87
Kondisi Perumahan di Kabupaten Magelang Tahun 2015 - 2019

No.	Indikator	Satuan	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Penanganan RTLH	Unit	5.724	9.830	14.624	22.702	26.794
2.	Jumlah RTLH Yang Harus Ditingkatkan (PBDT 2015)	Unit	72.242	66.273	66.273	65.830	65.830
3.	Jumlah PBDT yang mendapatkan bantuan RTLH	unit	-	-	1.957	3.499	3.151
4.	Penyediaan rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten	Unit	-	-	13	9	-
5.	Jumlah rumah rusak akibat bencana	Unit	-	-	13	11	-
6.	Jumlah Rumah Layak Huni	Unit	176.893	276.071	277.495	291.398	310.722*
7.	Jumlah Rumah	Unit	332.943	336.610	337.246	349.150	341.893*
8.	Prosentase Rumah Layak Huni	%	53,13	82,02	82,28	83,46	90,88*

Sumber : DPRKP Kabupaten Magelang, 2020

*) data sementara

Penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) mulai dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Magelang sejak tahun 2008, melalui sumber pendanaan baik yang berasal dari APBD dan APBN. Selama periode 2008 sampai dengan 2019, pemerintah telah melakukan penanganan RTLH sebanyak 26.794 unit, dengan sasaran masyarakat miskin berdasarkan Pendataan Program Perlindungan Sosial/PPLS (2011-2015), Pemukhtahiran Basis Data Terpadu/PBDT (2016-2017), dan PBDT 2015 terverivali (2018).

Pada tahun 2019, data *backlog* rumah (selisih antara jumlah rumah tangga dengan jumlah rumah) di Kabupaten Magelang mencapai 24.902 unit. Sedangkan jumlah perumahan yang telah dibangun di Kabupaten Magelang hingga tahun 2019 sebesar 113 perumahan. Dari 113 perumahan yang dibangun, belum satupun perumahan yang diserahkan oleh pengembang kepada pemerintah Kabupaten Magelang. Sehingga pemerintah belum dapat berperan serta dalam pemeliharaan sarana dan prasarananya.

Tabel 2.88
Persentase Penanganan Kawasan Kumuh Kabupaten Magelang
Tahun 2015-2019

No	Indikator	Satuan	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Luas Kawasan kumuh	Ha	85,09	85,09	97,20	97,20	97,20
2.	Luas Kawasan kumuh yg sudah tertangani (Simulasi perhitungan pengurangan kumuh sesuai PermenPU 14/PRT/M/2018)	Ha		13.91		66.53	77,74
3.	Persentase kawasan kumuh tertangani	%		14.31		68.45	77,79
4.	Luas Kawasan kumuh yg belum tertangani	Ha		71,18		30,67	19,46
5.	Persentase kawasan kumuh yang belum tertangani	%		85,09		31,55	22,21

Sumber : DPRKP Kabupaten Magelang, 2020

Luas Kawasan Kumuh di Kabupaten Magelang ditetapkan melalui Surat Keputusan Bupati No No. 188.45/498/KEP/25/2014 (tanggal 8 Desember 2014) sebesar 85,09 ha, meliputi 9 kawasan yang tersebar di Kecamatan Secang, Kecamatan Mertoyudan, Kecamatan Muntilan, dan Kecamatan Borobudur. Kemudian melalui penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Perkotaan (RP2KPKP) pada tahun 2017, luasan kawasan permukiman kumuh perkotaan diverifikasi menjadi 97,2 ha.

Penanganan kawasan kumuh di Kabupaten Magelang telah dilaksanakan sejak tahun 2015, baik melalui dana APBN maupun APBD. Sampai dengan tahun 2019, upaya pengurangan kawasan kumuh mengalami kenaikan yang signifikan. Hasil pengurangan atau penanganan kawasan kumuh di Kabupaten Magelang yang dilakukan berdasarkan simulasi perhitungan

pengurangan kawasan kumuh di Kabupaten Magelang ditunjukkan seperti pada tabel di atas.

Upaya lain dalam rangka penanganan permukiman kumuh dan mencegah munculnya permukiman kumuh yang baru adalah dengan penyediaan sarana prasarana permukiman melalui pembangunan Prasarana Sarana Utilitas (PSU).

Salah satu PSU yang perlu dibangun seiring dengan tumbuhnya permukiman di Kabupaten Magelang, adalah tempat pemakaman umum (TPU) yang dikelola oleh pemerintah. TPU ini dimaksudkan untuk mengakomodasi kebutuhan PSU bagi warga pendatang atau warga yang tinggal di perumahan.

e. Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

1) Penegakan Perda

Jumlah penegakan perda merupakan persentase penyelesaian penegakan perda dibandingkan jumlah pelanggaran perda. Semakin tinggi persentase penegakan perda, maka semakin tinggi jumlah kasus yang berhasil diselesaikan. Hal tersebut menggambarkan kemampuan penyelesaian pelanggaran perda oleh petugas terkait. Tabel berikut menggambarkan data penegakan perda di Kabupaten Magelang.

Tabel 2.89

Persentase Penegakan Perda di Kabupaten Magelang Tahun 2015-2019

No	Indikator	Satuan	2015	2016	2017	2018	2019
1	Jumlah Penyelesaian Penegakan PERDA	Kasus	190	174	251	81	215
2	Jumlah Pelanggaran PERDA	Kasus	193	175	312	85	230
3	Penegakan PERDA	Persen	98,45	99,43	80,45	95,29	93,42

Sumber: Satpol PP dan Penanggulangan Kebakaran Kabupaten Magelang, 2020

Berdasarkan tabel diatas, terlihat bahwa jumlah pelanggaran dan di Kabupaten Magelang fluktuatif. Namun, sebagian besar pelanggaran yang terjadi sudah mampu diselesaikan. Data terakhir pada tahun 2019 menunjukkan penegakan perda di Kabupaten Magelang berada pada angka 93,42%, turun sebesar 1,87% dibanding tahun 2018 sebesar 95,29%. Walaupun mengalami penurunan, namun tingkat penyelesaian pelanggaran yang terjadi tersebut masih melebihi target setiap tahunnya yaitu 75%. Hal tersebut mengindikasikan penyelesaian masalah yang terjadi di Kabupaten Magelang sudah optimal.

2) Tingkat Waktu Tanggap (*Response Time Rate*) Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)

Bencana kebakaran merupakan bencana yang memerlukan penanganan yang cepat. Penanganan yang cepat adalah penanganan yang dilakukan tidak melebihi tingkat waktu tanggap pada daerah layanan wilayah manajemen kebakaran (WMK). Tingkat waktu tanggap adalah ≤ 15 menit. Berikut adalah persentase tingkat waktu tanggap (*response time rate*)

daerah layanan wilayah manajemen kebakaran (WMK) di Kabupaten Magelang.

Tabel 2.90
 Persentase Tingkat Waktu Tanggap (*Response Time Rate*)
 Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)
 di Kabupaten Magelang Tahun 2015-2019

No.	Indikator	Satuan	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Jumlah kejadian kebakaran dengan waktu tanggap (<i>Response Time Rate</i>) \leq 15 menit	Kejadian	75	54	35	81	99
2.	Jumlah Kejadian	Kejadian	94	72	55	155	181
3.	Tingkat Waktu Tanggap (<i>Response Time Rate</i>) Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	Persen	79,79	75,00	63,64	52,60	54,70

Sumber: Satpol PP dan Penanggulangan Kebakaran Kabupaten Magelang, 2020

Berdasarkan tabel tersebut, terlihat tingkat waktu tanggap (*response time rate*) daerah layanan wilayah manajemen kebakaran (WMK) mengalami trend penurunan, sempat berada pada angka 79,79% pada tahun 2015, turun menjadi 54,70% pada tahun 2019. Pada tahun 2019, terdapat 99 kejadian yang dikategorikan sebagai kejadian kebakaran dengan waktu tanggap \leq 15 menit dari 181 kejadian kebakaran. Jumlah tersebut masih di bawah target Standar Pelayanan Minimum (SPM) yaitu 75%. Berdasarkan hal tersebut, maka diharapkan tingkat kesigapan pemadam kebakaran dapat ditingkatkan sehingga penanganan yang dilakukan dapat lebih cepat (*response time rate*) dan risiko kerugian akibat kebakaran dapat diminimalisir.

3) Cakupan Masyarakat yang Mendapat Pengetahuan Kebencanaan

Sebagai kabupaten yang terletak di kawasan rawan bencana, Kabupaten Magelang diwajibkan untuk memberi pengetahuan kepada penduduknya terkait kebencanaan, baik itu kerentanan, kapasitas, dan ancaman yang terdapat di kabupaten. Pengetahuan tersebut digunakan untuk peningkatan kapasitas masyarakat terutama dalam menghadapi bencana yang dapat sewaktu-waktu terjadi.

Apabila belajar dari sejarah, Kabupaten Magelang merupakan kabupaten yang rentan terkena bencana, terutama bencana gunung api Merapi. Selain itu, Kabupaten Magelang juga dikelilingi oleh gunung-gunung seperti Merapi, Merbabu, dan Sumbing yang mengakibatkan Kabupaten Magelang rawan terhadap bencana tanah longsor. Oleh karena itu pengetahuan terhadap bencana menjadi penting. Di bawah ini disajikan data kebencanaan di Kabupaten Magelang.

Tabel 2.91
Cakupan Ketahanan Masyarakat Menghadapi Bencana di Kabupaten
Magelang Tahun 2015-2019

No	Uraian	Satuan	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	Jumlah Desa Tangguh Bencana	Desa	15	13	14	18	11	7
2	Jumlah Desa Rawan Bencana	Desa	372	372	372	372	372	372
3	Jumlah Penanganan Tanggap Darurat yang Dilakukan	Kejadian	168	178	195	337	433	624
4	Jumlah Sasaran Dampak Bencana yang harus Dilakukan Tanggap Bencana	Kali	168	178	195	337	433	624
5	Jumlah Kejadian Bencana yang Direkomendasikan Rehabilitasi dan Rekonstruksi	Kejadian	15	20	25	20	25	22
6	Jumlah Kejadian Bencana yang harus Dilakukan Rehabilitasi dan Rekonstruksi	Kali	5	5	5	5	5	4
7	Cakupan Ketahanan masyarakat menghadapi bencana	%	20,00	20,00	47,00	66,67	74,10	99,12

Sumber : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Magelang, 2020

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa cakupan ketahanan masyarakat menghadapi bencana di kabupaten Magelang mengalami peningkatan yang signifikan, yaitu sebesar 74,10% pada tahun 2018. Dengan adanya peningkatan tersebut diharapkan masyarakat Kabupaten Magelang, khususnya yang berada pada daerah rawan bencana memiliki ketangguhan dalam menghadapi bencana yang terjadi.

- 4) Cakupan peningkatan wawasan kebangsaan dan politik masyarakat
Cakupan peningkatan wawasan kebangsaan dan politik masyarakat terdiri dari jumlah organisasi yang aktif dan yang tercatat, serta jumlah konflik sosial, sebagaimana yang disajikan tabel di bawah ini.

Tabel 2.92
Cakupan Peningkatan Wawasan Kebangsaan dan Politik Masyarakat
di Kabupaten Magelang Tahun 2015-2019

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2015	2016	2017	2018	2019
1	Jumlah Ormas, LSM dan OKP yang aktif	unit	83	93	95	97	108
2	Jumlah Ormas, LSM dan OKP yang tercatat	unit	87	97	99	101	112
3	Jumlah Konflik Sosial Tertangani	unit	0	0	1	0	13
4	Jumlah Konflik Sosial	unit	0	0	1	0	13
5	Cakupan Peningkatan Wawasan Kebangsaan dan Politik Masyarakat	%	85,00	95,00	97,00	99,00	98,70

Sumber : Kantor Kebangpol Kabupaten Magelang, 2020

Dari data di atas dapat dilihat cakupan wawasan kebangsaan dan politik masyarakat selama tahun 2015-2018 menunjukkan peningkatan, namun pada tahun 2019 mengalami sedikit penurunan sebesar 0,30 persen. Jumlah Ormas, LSM dan OKP yang aktif dan tercatat menunjukkan tren yang meningkat. Di samping itu, data di atas juga menggambarkan kejadian konflik sosial relatif kecil bahkan tidak ada selama tahun 2015-2018 dan peningkatan konflik sosial terjadi pada tahun 2019 dengan jumlah 13 kasus.

f. Sosial

1) Sarana Sosial

Pembangunan sosial dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kualitas kesejahteraan masyarakat baik melalui kebijakan pada aspek sosial maupun aspek lainnya seperti pembangunan kehidupan beragama. Target pembangunan sosial diarahkan pada pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang sosial yaitu Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) serta Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS).

Panti pelayanan sosial memiliki peran strategis sebagai ujung tombak yang bersentuhan langsung dalam penanganan PMKS guna pemenuhan kebutuhan dasar di dalam panti. Ketersediaan sarana prasarana sosial meliputi Panti Asuhan, dimana semua panti asuhan yang ada di Kabupaten Magelang adalah milik swasta. Jumlah panti asuhan yang terdata sejumlah 39 (tiga puluh sembilan) buah.

2) PMKS yang tertangani

Penanganan PMKS dibagi ke dalam dua kelompok yaitu PMKS potensial dan non potensial. Dalam kurun waktu tahun 2015-2019 jumlah PMKS yang memperoleh bantuan mengalami kecenderungan naik, namun apabila dibandingkan dengan tahun 2018 jumlah tersebut mengalami penurunan yaitu dari 79.069 orang menjadi 67.715 pada tahun 2019.

Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dapat diketahui dari jumlah persentase yang ditangani dibagi dengan jumlah PMKS yang ada. Berdasarkan data tahun 2015-2019, persentase PMKS yang tertangani mengalami tren yang meningkat.

Tabel 2.93

Penanganan PMKS di Kabupaten Magelang Tahun 2015-2019

No	Indikator	Satuan	2015	2016	2017	2018	2019
1.	PMKS yang tertangani	Orang	3.290	40.016	38.001	79.069	67.715
2.	PMKS yang ada	Orang	112.203	131.222	131.222	170.684	136.993
3.	Penanganan PMKS	%	29,32	30,49	28,95	46,32	42,13

Sumber : Dinsos PPKB PPPA Kabupaten Magelang, 2020

Perkembangan PMKS di Kabupaten Magelang dari tahun 2015-2019 fluktuatif, hal ini disebabkan karena permasalahan sosial bersifat sangat kompleks dan dipengaruhi oleh banyak faktor. Adanya kemajauan teknologi dan perbaikan kesejahteraan tidak secara

signifikan akan mengurangi masalah sosial, karena kemajuan teknologi dan peningkatan kesejahteraan bisa menyebabkan permasalahan sosial baru.

3) Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)

Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang berperan serta untuk menjaga, menciptakan, mendukung dan memperkuat penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Populasi PSKS, sebagaimana hasil pemuktahiran data tahun 2019 terdiri atas 1.744 orang.

Tabel 2.94

Jumlah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)
Kabupaten Magelang Tahun 2018 - 2019

NO	NAMA PSKS	2018							2019						
		KODE PSKS	L	P	KK	LEMBAGA	TANPA INPUT GENDER	JUMLAH	KODE PSKS	L	P	KK	LEMBAGA	TANPA INPUT GENDER	JUMLAH
1	Pekerja Sosial Profesional	1	18	2	0	0	0	20		3	4	0	0	0	
2	Pekerja Sosial Masyarakat	2	1.022	177	1	2	0	1.202		971	127	0	0	0	1098
3	Taruna Siaga Bencana (TAGANA)	3	128	12	0	0	0	140		80	2	0	0	0	82
4	Lembaga Kesejahteraan Sosial	4	1	1	0	61	0	63		0	0	0	37	0	37
5	Karang Taruna	5	1	0	2	62	0	65		0	0	0	55	0	55
6	Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga	6	0	0	0	1	0	1		0	0	0	1	0	1
7	Keluarga Pioner	7	87	12	88	0	0	187		0	0	141	0	0	141
8	Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat	8	1	1	0	67	0	69		0	0	0	1	0	1
9	Wanita Pemimpin Kesejahteraan Sosial	9	3	388	0	0	0	391		0	299	0	0	0	299
10	Penyuluh Sosial	10	150	22	0	0	0	172		0	0	0	0	0	0
11	Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan	11	18	3	0	0	0	21		17	3	0	0	0	20
12	Dunia Usaha	12	2	0	0	44	0	46		0	0	0	3	0	3
JUMLAH			1.431	618	91	237	0	2.377		1.071	435	145	97	0	1.744

Sumber : Dinsos, PPKB PPPA Kabupaten Magelang, 2020

Tenaga Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) merupakan unsur masyarakat yang memberikan dukungan riil dalam penanganan PMKS disekitarnya. Peningkatan kapasitas PSKS merupakan upaya dalam mendorong kemampuan memberikan sumbangsih dan dukungan terhadap percepatan penanganan PMKS

4) Jumlah disabilitas dan bantuan yang diberikan

Jumlah penyandang difabel, jumlah penyandang difabel yang memperoleh bantuan dan jumlah bantuan yang diberikan bisa dilihat dalam tabel dibawah.

Tabel 2.95

Jumlah Penyandang Disabilitas yang Memperoleh Bantuan

No	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
1	Jumlah Penyandang Disabilitas	N/A	10.508	9.009	9.578	9.578

No	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
2	Jumlah Penyandang Disabilitas yang memperoleh Bantuan	343	412	417	406	442
3	Jumlah Bantuan (ribu rupiah)	620.300	741.600	797.200	1.158.600	1.465.200

Sumber : Dinsos, PPKB PPPA Kabupaten Magelang, 2020

Dari tabel di atas bisa dilihat jumlah penyandang disabilitas yang memperoleh bantuan cenderung meningkat setiap tahunnya, dimana data terakhir pada tahun 2019 jumlah penyandang disabilitas yang memperoleh bantuan sebanyak 442 orang dengan jumlah bantuan sebesar Rp. 1.465.200.000.

5) Kinerja Makro Urusan Sosial Tahun 2015-2019

Data historis kinerja makro urusan sosial tahun 2015-2019 disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 2.96
Kinerja Makro Urusan Sosial Tahun 2015-2019

Indikator	Satuan	Tahun					
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
Sarana sosial seperti panti asuhan*. Panti jompo dan panti rehabilitasi	Buah	39	39	39	39	39	39
PMKS yang tertangani	Orang	890	3.290	40.253	38.001	79.069	57.715
PMKS dan korban bencana yang mendapat perlindungan dan jaminan sosial	%	-	-	-	28,96	46,29	42,13
Penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	%	-	-	-	-	1,25	1,28
Korban bencana yang menerima bantuan sosial	%	100	100	100	100	100	100
Penduduk miskin yang memperoleh Jaminan kesehatan (JKN-PBI dan Jamkesda)	jiwa	-	-	-	752.478	759.599	727.410

Sumber: Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Magelang, 2020

Data di atas menunjukkan perkembangan PMKS dan penduduk miskin yang memperoleh bantuan pada tahun 2015-2019 meningkat. Peningkatan tersebut sangat dipengaruhi oleh penganggaran dana untuk PMKS.

6) Basis Data Terpadu Penanganan Fakir Miskin (DTKS)

Basis Data Terpadu (BDT) atau pada saat ini disebut Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) adalah sistem data elektronik dari Kementerian Sosial yang berisi nama, alamat, NIK (Nomor Induk Kependudukan), dan keterangan dasar sosial ekonomi rumah tangga dan individu, yang dijadikan acuan utama penetapan sasaran program perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan dalam skala nasional maupun daerah. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) diharapkan dapat dimanfaatkan untuk memperbaiki sasaran penerima program penanggulangan kemiskinan dan perlindungan sosial lebih akurat, memuat 40% penduduk dengan tingkat kesejahteraan terendah dan dikelompokkan ke dalam kelompok yang disebut dengan desil. Desil adalah kelompok persepuluhan sehingga seluruh rumah tangga dapat dibagi kedalam 10 desil. Pengelompokan desil adalah sebagai berikut:

- 1) Desil 1 rumah tangga dalam kelompok 10 % terendah sebesar 53.663 Rumah Tangga;
- 2) Desil 2 rumah tangga dalam kelompok 10 - 20 % terendah sebesar 52.073 Rumah Tangga;
- 3) Desil 3 rumah tangga dalam kelompok 20 - 30 % terendah sebesar 28.250 Rumah Tangga;
- 4) Desil 4 rumah tangga dalam kelompok 30 - 40 % terendah sebesar 5.892 Rumah Tangga.

Rekapitulasi DTKS Kabupaten Magelang Tahun 2020 mendasar Keputusan Menteri Sosial Nomor /HUK/2020 sebanyak 167.189 RT. Rekapitulasi BDT tersebut dilakukan verifikasi dan validasi sebagai dasar intervensi penanggulangan kemiskinan lintas sector di Kabupaten Magelang.

2.4.2. Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

a. Tenaga Kerja

1) Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Angka TPAK mengindikasikan besarnya presentase penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi di suatu wilayah. Tingkat partisipasi angkatan kerja Kabupaten Magelang sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.97

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja
di Kabupaten Magelang Tahun 2015-2019

No	Indikator	Satuan	2015	2016	2017	2018	2019
1	Jumlah penduduk angkatan kerja	Orang	657.666	677.609	722.295	699.907	741.101
2	Jumlah penduduk usia kerja (15-64 tahun)	Orang	944.483	899.809	969.654	981.963	868.013
3	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	%	69,63	75,34	74,49	71,28	74,55

No	Indikator	Satuan	2015	2016	2017	2018	2019
4	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Jawa Tengah	%	67,86	67,15	69,11	68,56	68,62
5	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Nasional	%	65,76	66,34	66,67	67,26	67,9

Sumber : BPS Kabupaten Magelang Tahun 2012,

Tingkat partisipasi angkatan kerja di Kabupaten Magelang tahun 2015 - 2019 cukup fluktuatif, namun pada tahun 2016 meningkat signifikan. Tingkat partisipasi angkatan Kabupaten Magelang tahun 2015-2019 lebih baik jika dibandingkan dengan tingkat partisipasi angkatan kerja Provinsi Jawa Tengah.

2) Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja

Peningkatan produktivitas tenaga kerja dapat dilihat dari Indeks Produktifitas Tenaga Kerja. Indeks ini diukur dari total PDRB dibandingkan dengan total angkatan kerja yang bekerja. Pada tahun 2015 produktivitas tenaga kerja sebesar Rp 36,72 juta per pekerja meningkat menjadi Rp 45,25 juta per pekerja pada tahun 2019. Dari tahun 2015 sampai dengan 2018 produktivitas tenaga kerja Kabupaten Magelang masing rendah di bandingkan produktivitas tenaga kerja Provinsi Jawa Tengah. Data selengkapnya disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.98

Produktivitas Tenaga Kerja di Kabupaten Magelang Tahun 2015-2019

No	Indikator	Satuan	2015	2016	2017	2018	2019
1	PDRB	Rp. (juta)	24.148.644	26.108.949	28.045.174	29.464.259,80	32.490.800,51
2	Total Angkatan Kerja yang Bekerja	orang	657.666	704.651	722.295	679.506	717.960
3.	Produktivitas Tenaga Kerja	Rp. (juta)	36,72	37,05	38,83	43,36	45,25
4.	Produktivitas Tenaga Kerja Prov. Jateng	Rp. (juta)	49,16	51,44	52,01	54,57	78.12

Sumber : BPS Kabupaten Magelang dan BPS Provinsi Jawa Tengah, 2020

3) Tingkat Pengangguran Terbuka

Pada tahun 2019 tingkat pengangguran terbuka (TPT) mengalami penurunan sebesar 2,04%. Jika pada tahun 2015 TPT mencapai 5,16% maka pada tahun 2019 menjadi 3,12% . Angka absolut penurunan jumlah pengangguran terbuka sebesar (10.822) orang. Jika pada tahun 2015 jumlah pengangguran terbuka mencapai 33.936 maka pada tahun 2019 menjadi 23.114 orang.

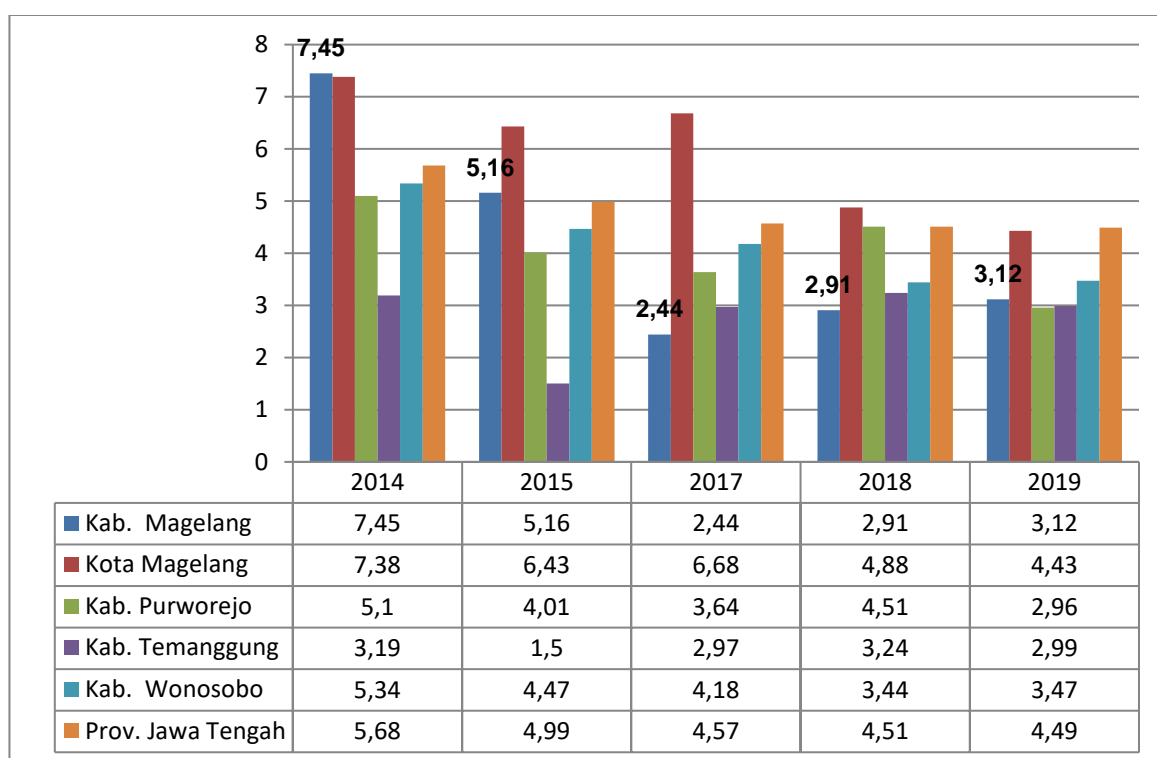
Dari tahun 2015 sampai dengan 2019 jumlah penduduk angkatan kerja meningkat sebesar 83.435 orang. Jika pada tahun 2015 jumlah penduduk angkatan kerja mencapai 657.666 orang maka pada tahun

2019 meningkat menjadi 741.101 orang. Data tingkat pengangguran terbuka disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 2.99
Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Magelang
Tahun 2015-2019

No	Indikator	Satuan	2015	2016	2017	2018	2019
1	Jumlah pengangguran terbuka	Orang	33.936	n/a	17.644	20.401	23.114
2	Jumlah penduduk angkatan kerja	Orang	657.666	n/a	722.295	699.907	741.101
3	Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Magelang	%	5,16	n/a	2,44	2,91	3,12
4	Tingkat Pengangguran Terbuka Prov. Jateng	%	4,99	n/a	4,57	4,51	4,49
5	Tingkat Pengangguran Terbuka Nasional	%	5,81	5,5	5,33	5,13	5,01

Sumber : BPS Kabupaten Magelang dan BPS Provinsi Jawa Tengah, 2020



Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, 2020

Gambar 2.25

Perbandingan TPT kabupaten/kota di Karesidenan Kedu dan Prov. Jateng tahun 2014-2019

Gambar di atas menunjukkan posisi relatif TPT Kab. Magelang pada tahun 2019 lebih rendah dibandingkan Provinsi Jawa Tengah sebesar 4,49% dan Nasional 5,01%. Sementara itu, posisi relatif TPT Kab. Magelang antar tahun 2014-2019 dibandingkan dengan rata-rata TPT kabupaten/kota di Karesidenan Kedu, selalu lebih rendah dari TPT Kota Magelang, kecuali pada tahun 2015.

4) Pencari kerja yang ditempatkan

Pencari kerja yang ditempatkan adalah perbandingan jumlah pencari kerja yang ditempatkan terhadap jumlah pencari kerja yang mendaftar. Menempatkan pencari kerja yang mendaftar merupakan salah satu program pemerintah daerah. Oleh karena itu, indikator ini dapat mencerminkan kemampuan pemerintah dalam menyediakan kesempatan lapangan pekerjaan guna mengurangi angka pengangguran. Persentase pencari kerja yang ditempatkan di Kabupaten Magelang sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.100

Pencari Kerja yang Ditempatkan di Kabupaten Magelang Tahun 2015-2018

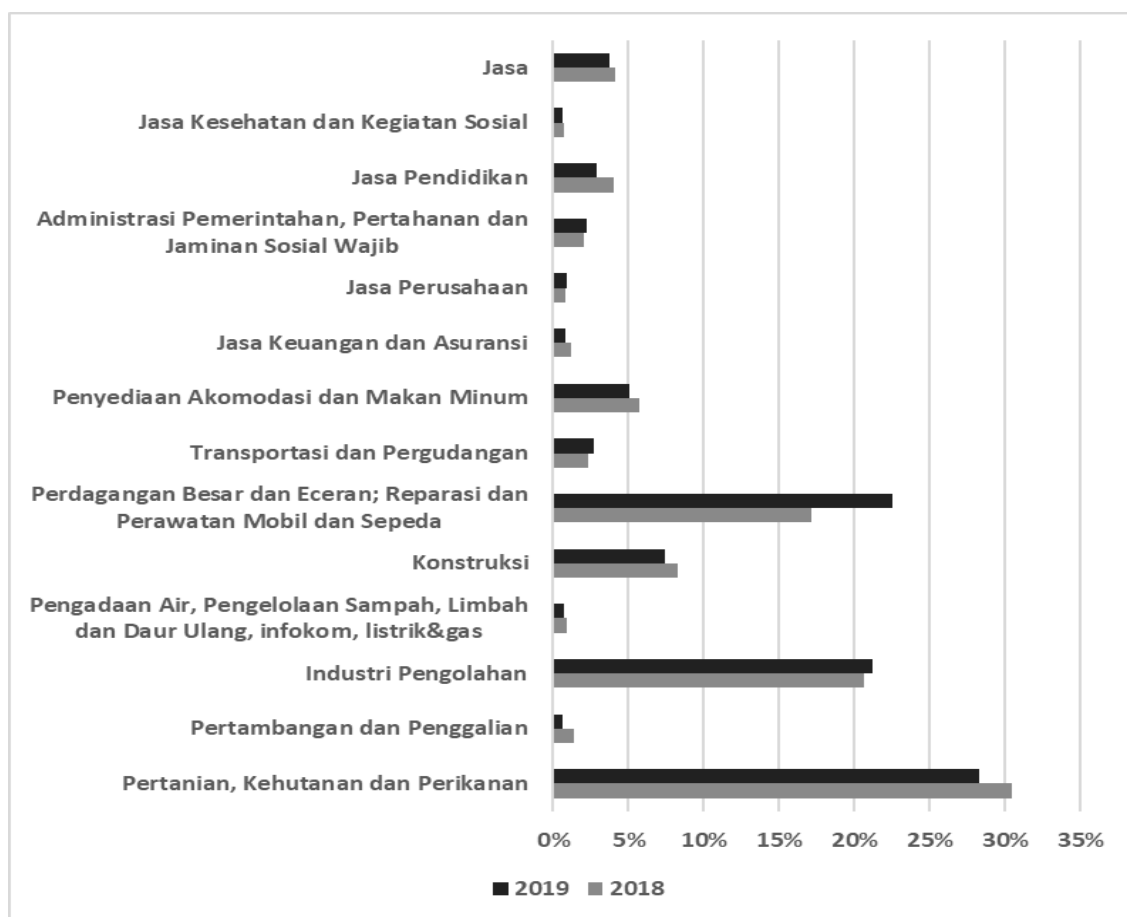
No	Indikator	Satuan	2015	2016	2017	2018
1	Jumlah pencari kerja yang ditempatkan	Orang	632	1.442	1,749	1.797
2	Pencari kerja yang terdaftar	Orang	5.996	3.573	4.038	4.193
3	Pencari kerja yang ditempatkan	%	10,54	40,36	43,31	42,86

Sumber : Kabupaten Magelang Dalam Angka, 2020

Tabel di atas menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Magelang telah melaksanakan program penempatan tenaga kerja yang mendaftar. Pada tahun 2015 jumlah pencari kerja yang terdaftar adalah sebanyak 5.996 orang dan hanya 10,54% dari jumlah tersebut yang berhasil ditempatkan atau sekitar 632 pekerja saja. Persentase pencari kerja yang ditempatkan meningkat pada tahun 2015 sampai tahun 2018 dari 10,54% menjadi 42,86. Perbedaan persentase pekerja yang ditempatkan dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti perbedaan jumlah kesempatan kerja yang tersedia dan hubungan antara pemerintah daerah dengan pihak swasta dalam menyediakan lapangan pekerjaan.

5) Persentase penduduk yang bekerja menurut lapangan usaha

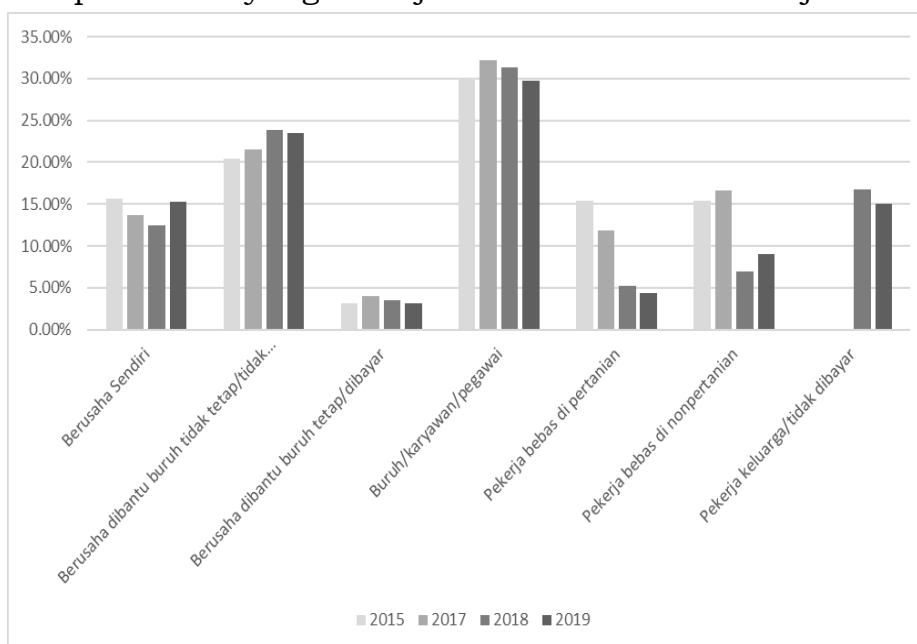
Pada tahun 2019 jumlah angkatan kerja yang bekerja mencapai 717.958 jiwa, meningkat 5,7% daripada tahun 2016 yang berjumlah 679,506 jiwa. Jika dirinci secara sektoral atau lapangan usaha penyerapan angkatan kerja terbesar adalah lapangan usaha pertanian. Namun penyerapan tenaga kerja pada lapangan usaha pertanian cenderung menurun. Pada tahun 2015 lapangan usaha pertanian mencapai 35%, pada tahun 2019 hanya sebesar 28%. Sementara itu, terjadi peningkatan penyerapan tenaga kerja terjadi pada lapangan usaha industri dan lapangan usaha perdagangan. Persentase penduduk yang bekerja menurut lapangan usaha, selengkapnya disajikan pada grafis berikut.



Gambar 2.26

Perkembangan Persentase Penduduk Bekerja Menurut Lapangan Usaha Tahun 2018-2019

6) Persentase penduduk yang bekerja menurut Status Pekerjaan



Gambar 2.27

Perkembangan Persentase Penduduk Bekerja Menurut Status Pekerjaan Tahun 2015-2019

Dihat dari status pekerjaan, sepanjang tahun 2015 hingga 2019, mayoritas pekerjaan utamanya sebagai pengusaha dan sebagai buruh/

karyawan/ pegawai. Akan tetapi masih ada 16,64 persen yang bekerja sebagai pekerja tidak dibayar/pekerja keluarga pada pekerjaan utamanya.

7) Jumlah Peserta Jaminan Perlindungan Sosial (Jamsostek)

Penyelenggaraan program jaminan sosial merupakan salah satu tanggung jawab dan kewajiban negara untuk memberikan perlindungan sosial ekonomi kepada masyarakat. Sesuai dengan kondisi kemampuan keuangan negara, Indonesia seperti halnya berbagai negara berkembang lainnya, mengembangkan program jaminan sosial berdasarkan *funded social security*, yaitu jaminan sosial yang didanai oleh peserta dan masih terbatas pada masyarakat pekerja di sektor formal. Di Kabupaten Magelang masih banyak potensi tenaga kerja yang belum mendapatkan jaminan perlindungan sosial. Adapun tenaga kerja yang sudah mendapatkan jaminan perlindungan sosial (jamsostek) bisa dilihat dalam tabel dibawah ini.

Tabel 2.101

Tenaga Kerja yang Mendapatkan Jaminan Perlindungan Sosial (Jamsostek)

NO	TAHUN	JUMLAH PERUSAHAAN	JUMLAH TENAGA KERJA	JUMLAH PESERTA JAMSOSTEK	%
1	2014	404	24,131.00	n/a	-
2	2015	341	27,041.00	11,801.00	43,64
3	2016	372	25,653.00	13,143.00	51,23
4	2017	372	25,653.00	13,143.00	51,23
5	2018	370	25,457.00	13,351.00	52,45

Sumber: Disperinaker Kabupaten Magelang, 2020

Dari tabel diatas dapat dilihat tenaga kerja yang mendapatkan jaminan perlindungan sosial (jamsostek) setiap tahun meningkat. Di sisi lain hampir separuh jumlah tenaga kerja di Kabupaten Magelang masih belum tercover jaminan sosial tenaga kerja. Hal ini disebabkan masih banyaknya tenaga kerja, khususnya sektor informal yang tidak mendaftarkan kepesertaan dalam jaminan sosial ketenagakerjaan.

b. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Meningkatnya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dapat dilihat melalui cakupan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Cakupan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dapat dilihat dari presentase perempuan di lembaga legislatif sebesar 16 % selama tahun 2015-2018.

1) Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah

Secara umum jumlah pekerja perempuan yang berada di lembaga pemerintah mengalami kecenderungan menurun. Pada tahun 2019 hanya terdapat 1,65% perempuan yang terdapat di lembaga pemerintahan. Berikut ini adalah tabel yang menunjukkan besarnya jumlah perempuan yang bekerja di lembaga pemerintah.

Tabel 2.102
 Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah
 di Kabupaten Magelang Tahun 2015-2019

No	Indikator	Satuan	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Pekerja Perempuan di Lembaga Pemerintah	Jiwa	5.926	5.415	5.304	5.008	4.905
2.	Jumlah Pekerja Perempuan	Jiwa	276.997	279.504	281.958	253.317	297.376
3.	Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah	%	2,14	1,94	1,88	1,98	1,65

Sumber : Dinsos, PPKB PPPA Kabupaten Magelang, 2020.

2) Penyelesaian Pengaduan Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindakan Kekerasan

Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan ini dapat diketahui dari jumlah pengaduan yang terselesaikan dan jumlah pengaduan secara keseluruhan. Berdasarkan data tahun 2015 sampai dengan tahun 2019, jumlah penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan di Kabupaten Magelang mengalami stagnasi yaitu pada persentase 100%. Dengan kata lain, setiap aduan yang dilaporkan dapat diselesaikan di tiap tahunnya. Berikut ini tabel yang menunjukkan jumlah penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan di Kabupaten Magelang.

Tabel 2.103
 Penyelesaian Pengaduan Perlindungan Perempuan dan Anak
 dari Tindakan Kekerasan di Kabupaten Magelang Tahun 2015-2019

Indikator	Satuan	2015	2016	2017	2018	2019
Jumlah pengaduan perlindungan perempuan dan anak yang terselesaikan	Kasus	99	113	115	75	113
Jumlah seluruh pengaduan perlindungan perempuan dan anak	Kasus	99	113	115	98	113
Penyelesaian pengaduan	Persen	100	100	100	76,53	100

Sumber : Dinsos, PPKB PPPA Kabupaten Magelang, 2020.

3) Kabupaten Layak Anak

Kabupaten/kota layak anak adalah kabupaten/kota yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha, yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak dan perlindungan anak. Jumlah desa dan kecamatan layak anak di Kabupaten Magelang sebagai berikut.

Tabel 2.104
Desa, Kecamatan dan Kabupaten
Layak Anak di Kabupaten Magelang Tahun 2015-2019

No	Urian	Satuan	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Tingkat Pratama	Desa	12	0	0	0	0
2.	Tingkat Madya	Desa	0	11	14	92	95
3.	Tingkat Nindya	Desa	0	0	0	0	0
4.	Tingkat Utama	Desa	0	0	0	0	0
1.	Tingkat Pratama	Kecamatan	0	0	0	0	0
2.	Tingkat Madya	Kecamatan	0	3	5	13	17
3.	Tingkat Nindya	Kecamatan	0	0	0	0	0
4.	Tingkat Utama	Kecamatan	0	0	0	0	0
1.	Tingkat Pratama	Kabupaten	1	0	0	0	0
2.	Tingkat Madya	Kabupaten	0	1	1	1	1
3.	Tingkat Nindya	Kabupaten	0	0	0	0	0
4.	Tingkat Utama	Kabupaten	0	0	0	0	0

Sumber : Dinsos PPKB PPA Kabupaten Magelang Tahun 2020

Sampai dengan tahun 2018, tingkat desa dan kecamatan layak anak di Kabupaten Magelang selalu meningkat. Dukungan pemerintah Kabupaten Magelang dalam pengembangan Kabupaten Layak Anak adalah melalui pemenuhan hak-hak anak dan perlindungan anak di Kabupaten Magelang dengan penguatan gugus tugas kabupaten, kecamatan dan desa, serta meningkatkan pencapaian hasil kegiatan dari klaster-klaster KLA sesuai dengan Perda nomor 20 tahun 2016 Tentang KLA, meningkatkan peran dan dukungan dunia usaha yang tergabung dlm Asosiasi Perusahaan Sahabat Anak Indonesia (APSAI) Kabupaten Magelang, serta meningkatkan peran dan dukungan media

c. Pangan

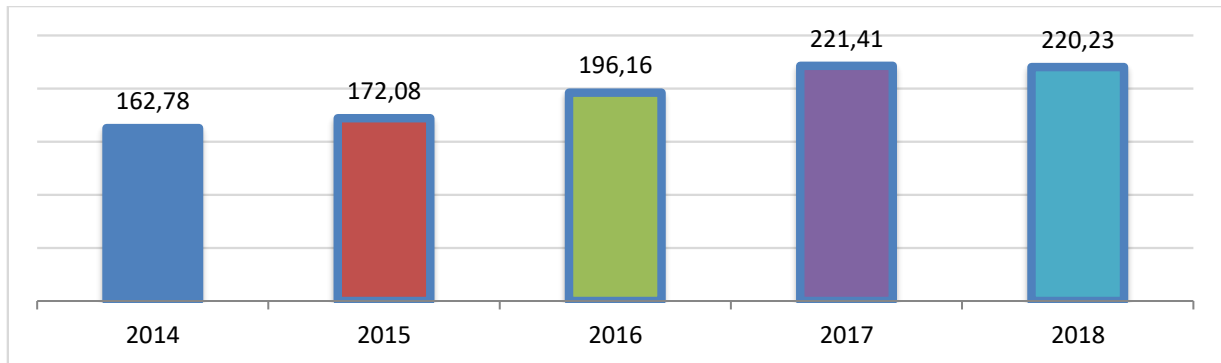
Berbagai upaya telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Magelang dalam rangka meningkatkan ketahanan pangan daerah. Hal tersebut tergambar dalam beberapa hal berikut.

1) Regulasi Ketahanan Pangan

Untuk menunjukkan komitmen yang kuat terhadap ketahanan pangan daerah, Pemerintah Kabupaten Magelang telah menyusun regulasi terkait ketahanan pangan. Regulasi ketahanan pangan di Kabupaten Magelang diwujudkan dalam bentuk peraturan bupati yang untuk pertama kalinya diundangkan dalam Peraturan Bupati Magelang Nomor 52 Tahun 2015 Tentang Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Magelang. Sehubungan dengan adanya perubahan SOTK baru, peraturan bupati tersebut kemudian diubah menjadi Peraturan Bupati Magelang Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Magelang Nomor 52 Tahun 2015 Tentang Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Magelang.

2) Ketersediaan Pangan Utama

Gambaran ketersediaan pangan utama di Kabupaten Magelang tahun 2014-2018 disajikan pada tabel dibawah ini.



Sumber : Hasil Olahan, 2019

Gambar 2.28

Ketersediaan Pangan Utama (Kg/jiwa/Tahun) Kabupaten Magelang Tahun 2014-2018

Ketersediaan pangan utama beras selama lima tahun terakhir menunjukkan peningkatan yang baik. Maka secara ketersediaan, Kabupaten Magelang sudah mencukupi kebutuhan pangan rakyatnya, jika dibandingkan dengan kebutuhan beras perkapita per tahun.

3) Pola Pangan Harapan (PPH)

Keberagaman pola konsumsi pangan ditunjukkan dengan Pola Pangan Harapan (PPH). Terdapat dua pola pangan harapan, yaitu PPH Ketersediaan dan PPH Konsumsi. Capaian skor PPH dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.105

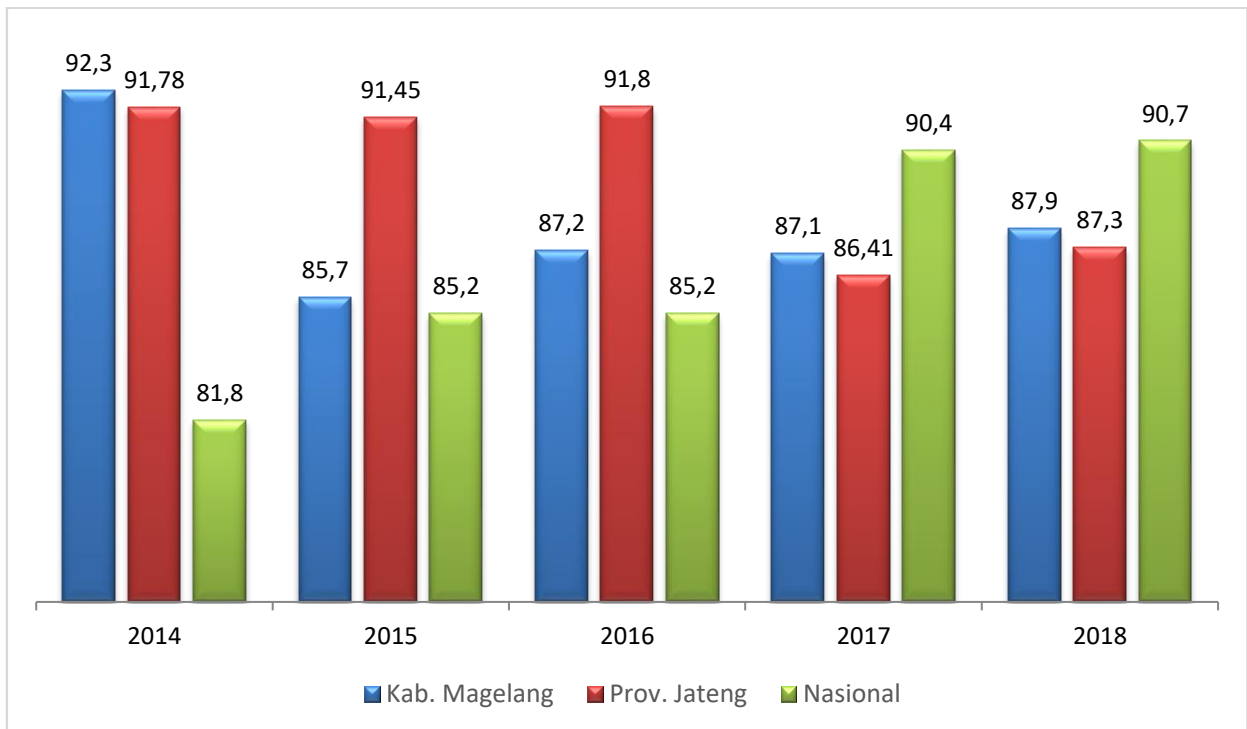
Pola Pangan Harapan Ketersediaan Kabupaten Magelang Tahun 2015-2019

No	Indikator	Satuan	2015	2016	2017	2018	2019
1	PPH Ketersediaan Kab. Magelang	%	85,42	72,85	70,60	87,36	89,61
2	PPH Ketersediaan Prov. Jawa Tengah	%	-	-	85,3	85,3	N/A

*Angka sementara

Sumber: Distan Pangan Kabupaten Magelang diolah, 2020

Pola pangan ketersediaan di Kabupaten Magelang mengalami penurunan dari tahun 2016 sebesar 72,85% menjadi 70,60% pada tahun 2017. Namun angka ini mengalami kenaikan yang cukup signifikan pada tahun berikutnya, yaitu 73,59% pada tahun 2018. Meskipun demikian, angka ini masih jauh dibawah angka ketersediaan Provinsi Jawa tengah, yaitu sebesar 85,3%.



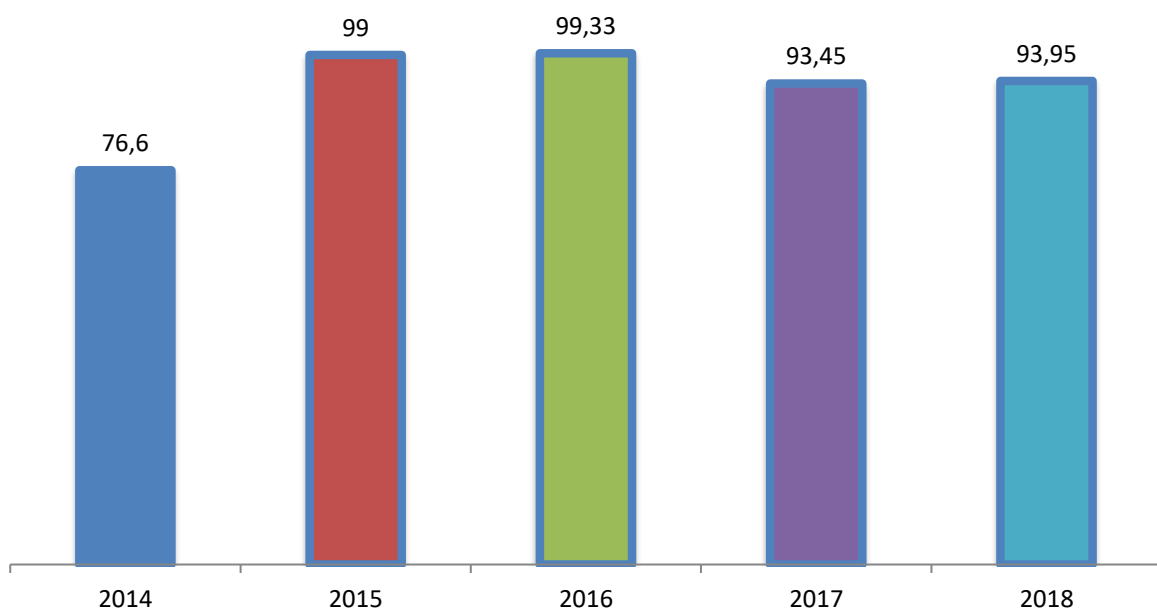
Sumber: Hasil Olahan, 2019

Gambar 2.29

Skor Pola Pangan Harapan Konsumsi Kabupaten Magelang Tahun 2014-2018

Selama kurun waktu 2015-2018, skor PPH terus meningkat, kecuali tahun 2017 yang turun dari capaian tahun sebelumnya. Dibandingkan dengan capaian Provinsi Jawa Tengah, pada tahun 2018 capaian Kabupaten Magelang lebih tinggi, namun jika dibandingkan dengan nasional, capaian Kabupaten Magelang lebih rendah.

4) Stabilitas Harga Pangan



Sumber: Hasil Olahan, 2019

Gambar 2.30

Stabilitas Harga Pangan Kabupaten Magelang Tahun 2014-2018

5) Daya Dukung Pangan

Daya dukung pangan dihitung berdasarkan rasio perbandingan kebutuhan beras terhadap produksi beras di Kabupaten Magelang. Konsumsi beras tahun 2019 berdasarkan hasil prognosis terkait konsumsi beras oleh Kementerian Pertanian sebesar 111,58 kg/perkapita/tahun. Daya dukung pangan yang dihitung berdasarkan rasio perbandingan kebutuhan beras terhadap produksi beras, yaitu indeks Daya Dukung Lahan untuk pangan (DDL). Berikut hasil perhitungan daya dukung pangan di Kabupaten Magelang.

Tabel 2.106

Daya Dukung Pangan Kabupaten Magelang 2019

Uraian	Jumlah
	2019
Jumlah produksi padi (ton)	478.199
Konversi Gabah Giling/GKG ke beras (62,74%)	300.002
Jumlah Penduduk (jiwa)	1.290.115
Angka konsumsi beras (kg/perkapita/tahun)	111,58
Jumlah beras dikonsumsi (ton)	143.951
DDL (Daya Dukung Lahan) untuk pangan	2,08
Surplus beras (Ton/Tahun)	156.071

Sumber : Hasil Olahan, 2020

Berdasarkan tabel perhitungan di atas, diketahui bahwa daya dukung lahan untuk pangan di Kabupaten Magelang sebesar 2,08 dengan kondisi surplus sebesar 156.071 ton.

6) Jasa Ekosistem Penyedia Bahan Pangan (JEP 1)

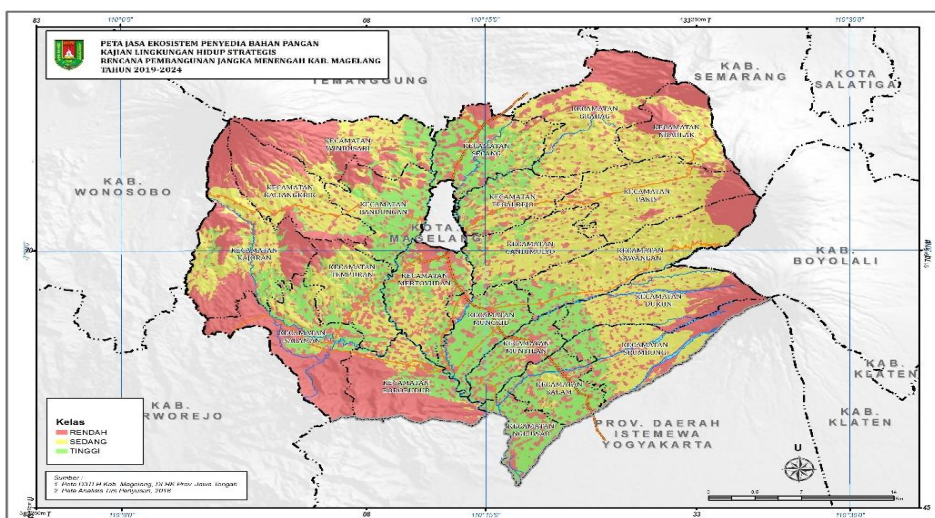
Jasa Ekosistem Penyedia Pangan (JEP 1) merupakan hasil laut, pangan dari hutan (tanaman dan hewan), hasil pertanian dan perkebunan serta hasil peternakan, dengan tujuan untuk peningkatan kualitas lingkungan untuk mendukung penyediaan pangan. Berikut kategori Jasa Ekosistem Penyedia Pangan (JEP1) di Kabupaten Magelang.

Tabel 2.107

Luasan Jasa Ekosistem Penyedia Pangan (JEP 1)
Kabupaten Magelang

KELAS	LUAS (Ha)	PERSEN
RENDAH	43.306,03	38,31%
SEDANG	45.128,48	39,92%
TINGGI	24.600,33	21,76%
TOTAL	113.034,84	100,00%

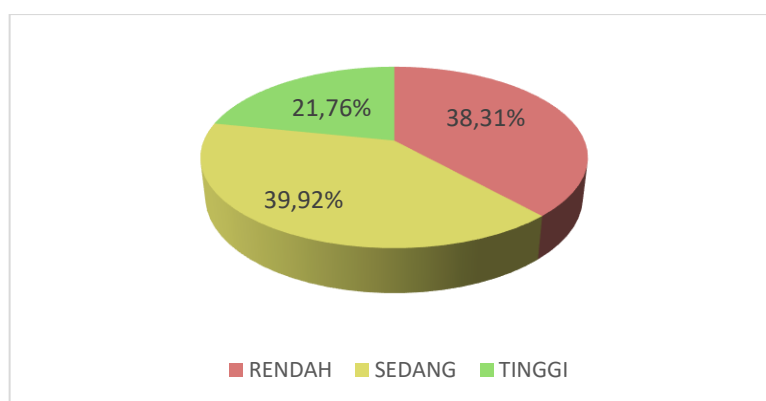
Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Magelang 2019-2024



Sumber: KLHS RPJMD Kab. Magelang 2019-2024, 2018

Gambar 2.31

Peta Sebaran Jasa Ekosistem Penyedia Pangan (JEP 1)



Sumber: KLHS RPJMD Kab. Magelang 2019-2024, 2018

Gambar 2.32

Persentase Jasa Ekosistem Penyedia Pangan (JEP 1)

Berdasarkan diagram dan peta di atas dapat dilihat bahwa Jasa Ekosistem Penyedia Pangan (JEP1) di Kabupaten Magelang lebih dominan berada pada kategori sedang dengan luas lahan 45.128,48 ha atau sebesar 39,92%, kemudian diikuti dengan kategori rendah dengan luas 43.306,03 ha atau sebesar 38,31% dan kategori dengan persentase paling kecil adalah kategori tinggi dengan luas lahan 24.600,33 ha atau sebesar 21,76%.

d. Pertanian

Urusan pertanahan menjadi urusan wajib berkaitan dengan pelayanan dasar. Dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 disebutkan bahwa urusan pertanahan memiliki tiga indikator, yaitu (1) persentase luas lahan bersertifikat, (2) penyelesaian kasus tanah negara dan (3) penyelesaian izin lokasi.

Hingga tahun 2019, terdapat 984.158 bidang tanah dengan total luasan 403,537,883 m² yang telah bersertifikat dimana pembagian terbesarnya adalah merupakan tanah hak milik yakni sebesar 382.100.784 m²,

sedangkan yang terkecil adalah hak guna usaha dengan luasan 68.900 m².

Sedangkan untuk penyelesaian kasus tanah negara dari tahun 2015-2019 sebesar 100% dimana semua permasalahan terkait dengan kasus tanah negara dapat diselesaikan seluruhnya. Indikator penyelesaian izin lokasi dikaitkan dengan investor yang akan menanamkan modalnya di wilayah Kabupaten Magelang khususnya.

Tabel 2.108
Kinerja Pembangunan Urusan Pertanahan
Kabupaten Magelang Tahun 2015-2019

No	Bidang Urusan/Indikator	Capaian kinerja Setiap Tahun									
		2015		2016		2017		2018		2019	
		Bidang	Luas (m ²)	Bidang	Luas (m ²)	Bidang	Luas (m ²)	Bidang	Luas (m ²)	Bidang	Luas (m ²)
1	Persentase luas lahan bersertifikat (%)	28,36		28,93		30,31		32,19		37,17	
	Hak Milik	375.586	293,352,719	380.322	298,742,548	404.921	312,884,055	432.284	330,570,963	478.533	382,100,784
	Hak Guna Bangunan	6.438	3,620,814	7.829	3,940,369	8.996	4,217,355	9.038	4,376,391	9.319	4,569,464
	Hak Guna Usaha	1	68.900	1	68.900	1	68.900	1	68.900	1	68.900
	Hak Pakai	1.861	9.476.822	1.934	9.861.892	2.226	10.337.741	2.869	12.918.222	3.056	15.128.226
	Hak Pengelola	10	1.093.857	10	1.093.857	10	1.093.857	10	1.093.857	10	1.093.857
	Hak Wakaf	949	353,677	983	428,136	1.050	477,184	1.111	515,863	1.141	576,652
2.	Penyelesaian kasus tanah negara (%)	100		100		100		100		100	
3.	Penyelesaian izin lokasi (%)	122,73		N/A		100		100		100	

Sumber: Kantor Pertanahan Kabupaten Magelang, 2018; Bagian Tata Pemerintahan Kabupaten Magelang, 2020

e. Lingkungan Hidup

1) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Kualitas lingkungan hidup Kabupaten Magelang termasuk dalam kategori sedang. Kualitas lingkungan hidup dilihat melalui kualitas air, kualitas udara, dan kualitas tutupan lahan.

Tabel 2.109

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Magelang Tahun 2017-2019

No.	Indikator	2017	2018	2019
1.	Indeks Kualitas Air	59,09	54,62	50,77
2.	Indeks Kualitas Udara	82,39	82,82	84,19
3.	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	71,27	76,74	76,74
4.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	70,95	71,93	76,18

Sumber: DLH Kabupaten Magelang, 2020

Indeks kualitas lingkungan hidup juga dipengaruhi oleh emisi gas rumah kaca (GRK). Berdasarkan Kajian Lingkungan Hidup Sementara (KLHS) RPJMD Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024, penyebab terjadinya emisi GRK dikelompokkan menjadi tiga sektor yaitu penggunaan energi untuk kegiatan transportasi, pertanian, dan pengelolaan limbah. Emisi GRK pada tahun 2017 di Kabupaten Magelang tertinggi berasal dari kegiatan pengadaan dan penggunaan energi untuk kegiatan transportasi sebesar 531.600 ton CO₂e (61%) dan

emisi terendah adalah dari pengelolaan limbah yaitu sebesar 71.040 ton CO₂e (8%).

2) Jumlah Usaha Peserta Proper yang Mencapai Minimal Ranking Biru

Indikator jumlah usaha peserta Proper yang mencapai minimal ranking biru merupakan salah satu indikator yang digunakan dalam mengukur ketercapaian *Sustainable Development Goals (SDG's)*. Persentase usaha dan/atau kegiatan yang minimal berpredikat Proper Biru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.110
Persentase Perusahaan Minimal Berpredikat Proper Biru
Tahun 2017-2019

No.	Indikator	Satuan	2017	2018	2019
1.	Jumlah perusahaan mencapai ranking emas	perusahaan	0	0	0
2.	Jumlah perusahaan mencapai ranking hijau	perusahaan	0	0	0
3.	Jumlah perusahaan mencapai ranking biru	perusahaan	7	7	3
4.	Jumlah perusahaan peserta Proper	perusahaan	115	115	51
5.	Persentase perusahaan minimal berpredikat Proper Biru	%	6,09	6,09	5,88

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magelang, 2020

3) Persentase Pengelolaan Sampah

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga disebutkan bahwa target pengelolaan sampah adalah 100% pada akhir tahun 2025. Target pengelolaan sampah tersebut meliputi target pengurangan sampah sebesar 30% dan penanganan sampah sebesar 70% dengan lingkup pelayanan seluruh wilayah Kabupaten/Kota.

Berdasarkan data, capaian pengelolaan sampah di Kabupaten Magelang tahun 2017 dan 2018 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.111
Persentase Pengelolaan Sampah
di Kabupaten Magelang Tahun 2017-2019

No.	Indikator	Satuan	2017	2018	2019
1.	Jumlah timbulan sampah	ton/tahun	231.482,27	233.797,09	326.135,06
2.	Jumlah pengurangan sampah melalui 3R	ton/tahun	34.238,17	44.472,43	45.132,59
3.	Jumlah sampah tertangani	ton/tahun	28.390,66	31.336,77	38.565,8
4.	Persentase jumlah sampah yang berkurang melalui 3R	%	14,79	19,02	19,11
5.	Persentase jumlah sampah yang tertangani	%	12,26	13,40	16,38
6.	Persentase pengelolaan sampah	%	27,05	32,42	35,49

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magelang, 2020

Persentase pengelolaan sampah pada tahun 2017 mencapai 27,05% dan meningkat menjadi 35,49% pada tahun 2019. Peningkatan ini lebih banyak didukung oleh adanya pengurangan sampah melalui 3R. Upaya lain terkait pengelolaan sampah yang telah dilaksanakan di Kabupaten Magelang antara lain pembentukan bank sampah, sekolah adiwiyata, dan pengelolaan sampah berbasis masyarakat lainnya.

4) Persentase ketersediaan RTH di wilayah perkotaan

Ruang Terbuka Hijau (RTH) merupakan bagian penting dalam membentuk struktur ruang wilayah perkotaan dan memiliki berbagai fungsi strategis. Secara ekologis, RTH berfungsi untuk meningkatkan kualitas udara, menjaga kelestarian air dan tanah sedangkan secara sosiologis RTH diperlukan sebagai ruang untuk berinteraksi dan rekreasi bagi penduduk di wilayah perkotaan. Persentase RTH terhadap luas wilayah perkotaan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.112

Persentase Ruang Terbuka Hijau Terhadap Luas Wilayah Perkotaan di Kabupaten Magelang Tahun 2017-2019

No.	Indikator	Satuan	2017	2018	2019
1.	Luas wilayah perkotaan	Ha	16.069,09	16.069,09	16.069,09
2.	Luas RTH publik di wilayah perkotaan	Ha	302,85	302,85	302,85
3.	Luas RTH privat di wilayah perkotaan	Ha	6.059,65	6.008,23	6.008,23
4.	Persentase ketersediaan RTH publik di wilayah perkotaan	%	1,88	1,88	1,88
5.	Persentase ketersediaan RTH privat di wilayah perkotaan	%	37,71	37,39	37,39
6.	Persentase ketersediaan RTH terhadap luas wilayah perkotaan	%	39,59	39,27	39,27

Sumber : DLH Kabupaten Magelang, Tahun 2020

Secara akumulasi, capaian ketersediaan RTH terhadap luas wilayah perkotaan sudah melampaui persentase luas RTH yang diamanahkan dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang yaitu sebesar 30%. Namun apabila dilihat per komponen indikator maka RTH publik di wilayah perkotaan belum memenuhi target yang dipersyaratkan yaitu 20%. Sedangkan ketersediaan RTH privat di wilayah perkotaan telah memenuhi syarat minimal yaitu 10%.

5) Cakupan Konservasi Sumber Daya Alam

Upaya pelaksanaan konservasi di Kabupaten Magelang meliputi konservasi daerah resapan air, rawan bencana dan mata air. Upaya ini dilakukan melalui program kampung iklim dan sekolah adiwiyata. Adapun capaian kinerja konservasi sumber daya alam tahun 2017-2018 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.113
Cakupan Konservasi Sumber Daya Alam di Kabupaten Magelang
Tahun 2017-2019

No.	Indikator	Satuan	2017	2018	2019
1	Persentase luasan daerah resapan air yang dikonservasi	%	0,82	1,34	2,41
2	Persentase luasan daerah rawan bencana yang dikonservasi	%	0,34	0,44	0,72
3	Persentase mata air yang dikonservasi	%	4,94	5,38	12,11
4	Cakupan desa/kelurahan program kampung iklim	%	1,34	1,88	3,76
5	Persentase sekolah adiwiyata	%	0,49	1,06	18,33
6	Cakupan konservasi sumber daya alam dan mitigasi perubahan iklim	%	1,59	2,02	7,47

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magelang tahun 2020

Berdasarkan tabel di atas, kinerja pelaksanaan konservasi sumber daya alam di Kabupaten Magelang masih sangat kecil. Pelaksanaan konservasi di daerah resapan air dan rawan bencana masih rendah. Berkaitan dengan upaya konservasi, perlu diperhatikan pula untuk kawasan-kawasan rawan bencana mengingat sebagian besar wilayah Kabupaten Magelang masuk dalam kawasan rawan bencana. Sebagaimana hasil analisis KLHS RPJMD 2018-2024, 73,83% wilayah Kabupaten Magelang termasuk dalam kategori Jasa Ekosistem Perlindungan Pencegahan Bencana kelas sedang.

6) Persentase kasus lingkungan dan pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, PPLH, dan PUU LH yang ditangani

Data capaian kinerja penanganan kasus lingkungan dan pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.114

Persentase Kasus Lingkungan dan Pengaduan Masyarakat terkait Izin Lingkungan, PPLH, dan PUU LH yang Ditangani di Kabupaten Magelang
Tahun 2015-2019

No.	Indikator	Satuan	2015	2016	2017	2018	2019
1	Jumlah kasus lingkungan dan pengaduan terkait ijin lingkungan, PPLH, dan PUU LH yang ditangani	Kasus	10	9	10	12	14
2	Jumlah pengaduan masyarakat terkait ijin lingkungan yang teregistrasi	Kasus	11	10	10	15	14
3	Persentase kasus lingkungan dan pengaduan terkait ijin lingkungan	%	90,91	90	100	80	100

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magelang, 2020

Dari tabel di atas, ditunjukkan bahwa kinerja penanganan kasus lingkungan di Kabupaten Magelang dapat dikatakan sangat baik.

Terlihat dari persentase jumlah kasus yang diselesaikan tidak kurang dari angka 80% dalam kurun waktu 2015 sampai dengan 2019.

f. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pelayanan publik yang baik diantaranya diukur dari pelayanan administrasi kependudukan. Kinerja urusan kependudukan dan catatan sipil dapat dilihat dari beberapa indikator pada tabel berikut ini.

Tabel 2.115

Rasio Perekaman KTP - elektronik dan Keluarga yang Ber KK
Kabupaten Magelang Tahun 2015 - 2019

No.	Indikator	Satuan	2015	2016	2017	2018	2019
1	Penduduk yang melakukan perekaman e-KTP	%	88,62	94,90	96,62	96,13	95,27
2	Penerbitan KK	%	n/a	94,89	95,46	96,05	97,02
3	Rasio Perekaman KTP – elektronik dan Keluarga yang Ber KK	%	n/a	94,90	96,04	96,09	96,045

Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Magelang Tahun 2020

Dari data di atas dapat dilihat bahwa pelayanan administrasi kependudukan semakin baik. Disamping itu, pelayanan akte kelahiran di Kabupaten Magelang semakin baik sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.116

Rasio anak (0-18) yang berakta kelahiran, Pasangan berakta perkawinan, penduduk meninggal berakta kematian Kabupaten Magelang
Tahun 2015-2019

No.	Indikator	Satuan	2015	2016	2017	2018	2019
1	Persentase penerbitan Akta Kelahiran	%	22,98	30,80	32,37	34,85	36,44
2	Persentase Penerbitan Akta perkawinan	%	36,76	38,75	33,27	42,40	41,50
3	Persentase Penerbitan Akta Kematian	%	0	0	0	0	0
4	Rasio anak (0-18) yang berakta kelahiran, Pasangan berakta perkawinan, penduduk meninggal berakta kematian	%			72,17	77,64	75,79

Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Magelang Tahun 2020

g. Keluarga Sejahtera dan KB

1) Cakupan Peserta KB Aktif

Peserta KB aktif adalah pasangan usia subur yang salah satu pasangannya masih menggunakan alat kontrasepsi dan terlindungi oleh alat kontrasepsi tersebut. Pasangan usia subur (PUS) adalah pasangan suami istri yang istrinya berusia 15-49 tahun. Angka cakupan peserta KB aktif menunjukkan tingkat pemanfaatan kontrasepsi di antara para

PUS. Data mengenai cakupan KB aktif di Kabupaten Magelang tahun 2015-2019 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.117

Cakupan Peserta KB Aktif di Kabupaten Magelang Tahun 2015-2019

No	Indikator	Satuan	2015	2016	2017	2018	2019
1	IUD	Jiwa	30.936	32.494	33.894	25.110	26.711
	MOW/MOP	Jiwa	10.452	10.400	10.687	8.800	9.131
	Kondom	Jiwa	3.725	4.025	4.150	4.931	5.202
	Implant	Jiwa	21.564	23.147	24.818	16.515	18.111
	Suntik	Jiwa	86.082	88.271	87.381	79.113	81.025
	Pil	Jiwa	20.990	21.050	20.612	14.924	14.801
	Jumlah peserta KB aktif	Jiwa	173.749	179.050	181.542	149.393	155.041
2	Jumlah Pasangan Usia Subur	Jiwa	222.973	225.057	227.752	204.431	205.292
3	Cakupan peserta KB aktif	%	80,69	80,79	79,71	73,08	75,52
4	Cakupan PUS yang ingin ber KB dan tidak terpenuhi	%	9,93	8,97	9,32	13,36	11,88
5	Presentase peserta KB aktif menggunakan alat kontrasepsi modern (CPR)	%	77,93	79,77	79,31	73,08	75,52
6	Presentase penggunaan kontrasepsi jangka panjang (MKJP)	%	36,23	36,86	38,23	33,75	34,86
7	Usia Kawin Pertama (UKP) /Rata-rata usia kawin pertama wanita	%	20,62				
8	Prosentase anggota UPPKS dari keluarga pra sejahtera	%	57,90	56,09	55,03	55,11	53,27

Sumber : Dinas Sosial. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Magelang Tahun 2020.

Berdasarkan tabel cakupan peserta KB aktif di atas, secara umum selama 5 tahun perkembangannya bisa dikatakan tidak terlalu berubah. Dalam lima tahun tersebut, rentang cakupan indikator ini berada pada posisi 80,69% - 75,52%. Jika dibandingkan dengan target SPM dari Kemenkes maupun dari BKKBN tersebut, rasio KB Aktif Kabupaten Magelang telah mencapai target karena sejak tahun 2012 cakupannya sudah lebih dari 65% bahkan lebih dari 70%.

2) Total Fertility Rate

TFR (*Total Fertility Rate*) bisa didefinisikan sebagai jumlah anak yang akan dilahirkan oleh seorang wanita sampai akhir masa reproduksinya

jika ia melampau masa-masa melahirkan anak. Capaian TFR di Kabupaten Magelang tahun 2015-2018 relatif turun. Pada tahun 2015 berada pada angka 2,26, tahun 2016 naik menjadi 2,28, tahun 2017 naik lagi menjadi 2,30 dan turun menjadi 2,17 pada tahun 2018. Salah satu faktor turunnya angka TFR adalah semakin membaiknya tingkat pendidikan masyarakat di Kabupaten Magelang.

3) Keluarga Pra-Sejahtera dan Sejahtera I

Keluarga Pra Sejahtera (KPS) adalah keluarga yang belum dapat memenuhi salah satu atau lebih dari 5 kebutuhan dasarnya (*basic needs*) sebagai Keluarga Sejahtera I, seperti kebutuhan akan pengajaran agama, pangan, papan, sandang dan kesehatan. Keluarga Sejahtera Tahap I (KSI) adalah keluarga-keluarga yang telah dapat memenuhi kebutuhan dasarnya secara minimal seperti yang telah disebutkan.

Tabel 2.118

Persentase Keluarga Pra Sejahtera Kabupaten Magelang Tahun 2015-2019

No	Indikator	Satuan	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Jumlah Keluarga Pra Sejahtera	KK	91.815	91.106	90.389	86.283	84.230
2.	Jumlah Keluarga*	Keluarga	375.160	390.618	404.777	406.420	407.128
3.	Persentase Keluarga Pra Sejahtera	Persen	24,47	23,32	22,33	21,23	20,69

Sumber : Dinas Sosial. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Magelang Tahun 2020

Berdasarkan tabel di atas, jumlah keluarga pra sejahtera di Kabupaten Magelang dalam kurun waktu lima tahun dari 2015 hingga 2019 mengalami tren parabola naik kemudian turun. Persentase tertinggi atau puncak parabola terjadi pada tahun 2015 yaitu 24,47% dengan 91.815 keluarga pra sejahtera, sedangkan persentase terendah terjadi pada tahun 2019 yaitu 20,69% dengan jumlah keluarga prasejahtera sebanyak 84.230 keluarga.

Sejenis dengan persentase keluarga pra-sejahtera, persentase keluarga sejahtera I juga memiliki tren parabola yaitu dengan pola naik kemudian turun. Puncak parabola yaitu persentase tertinggi terjadi pada tahun 2015 dengan persentase sebesar 17,15%, sedangkan persentase terendah terjadi pada tahun 2019 dengan persentase 14,74%. Secara persentase, indikator ini memiliki tren yang semakin membaik karena semakin menurun, akan tetapi bila dilihat dari jumlah keluarga sejahtera I, ternyata jumlah keluarga yang tergolong sejahtera I memiliki tren yang meningkat terus. Persentase semakin kecil karena jumlah keluarga semakin bertambah banyak, sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.119

Persentase Keluarga Sejahtera I di Kabupaten Magelang Tahun 2015-2019

No	Indikator	Satuan	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Jumlah Keluarga Sejahtera I	KK	64.327	66.341	66.340	62.141	59.995
2.	Jumlah Keluarga	Keluarga	375.160	390.618	404.777	406.420	407.128
3.	Persentase Keluarga Sejahtera I	Persen	17,15	16,98	16,39	15,24	14,74

Sumber : Dinas Sosial. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Magelang Tahun 2020.

h. Perhubungan

Perhubungan merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam menunjang pembangunan terutama mendukung perekonomian dan perkembangan wilayah. Secara umum gambaran di Kabupaten Magelang prasarana dan sarana perhubungan dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.120

Prasarana Dan Sarana Perhubungan Kabupaten Magelang
Tahun 2017 - 2019

No	Uraian	Tahun		
		2017	2018	2019
1	Data Terminal (A, B dan C)			
	Ketersediaan Terminal A	0	0	0
	Ketersediaan Terminal B	1	1	1
	Ketersediaan Terminal C	6	6	6
2	Pemenuhan Fasilitas Keselamatan jalan			
	LPJU	2,499	2,610	2,610
	APILL	18	18	18
	Guardrail	4,748	5,104	5,104
	Rambu	2,457	2,574	2,574
	Marka	11,435	11,660	11,660
3	Stasiun	0	0	0
4	pengelolaan parkir			
	Jumlah titik parkir yang dikelola	193	175	225
5	Trayek Angkutan Lalu lintas			
	Rasio Ijin trayek	82.56	74.00	60.88
	jumlah ijin trayek	1089	976	803
	jumlah kendaraan	1319	1319	1319
6	kelayakan kendaraan umum			
	rasio kelayakan	98.39	88.10	89.87
	lulus KIR	20,267	18,832	19,491
	KBWU	20,598	21,376	21,688

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Magelang, 2020

Indikator yang digunakan dalam menghitung kinerja perhubungan di Kabupaten Magelang adalah cakupan pembangunan infrastruktur perhubungan yang dihitung berdasarkan:

1. Persentase ketersediaan prasarana angkutan jalan;

2. Persentase ketersediaan fasilitas perlengkapan jalan pendukung pengamanan dan keselamatan lalu lintas;
 3. Persentase masyarakat sadar bidang keselamatan berlalu lintas; dan
 4. Persentase angkutan umum layak jalan
- Perkembangan indikator kinerja perhubungan tahun 2017 sampai tahun 2019 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.121

Indikator Kinerja Perhubungan Magelang Tahun 2015-2019

Indikator	Satuan	2015	2016	2017	2018	2019
Persentase ketersediaan prasarana angkutan jalan						
1. Jumlah halte yang terbangun	Buah	NA	NA	9	11	12
2. Jumlah terminal yang terbangun	Buah	NA	NA	6	6	6
3. Jumlah parkir yang terbangun	Titik	NA	NA	193	175	225
Persentase ketersediaan fasilitas perlengkapan jalan pendukung pengamanan dan keselamatan lalu lintas						
1. Jumlah APILL yang terbangun	Buah	NA	NA	18	18	18
2. Jumlah rambu yang terbangun	Buah	NA	NA	2.457	2.574	2.574
3. Jumlah marka yang terbangun	Meter	NA	NA	11.435	11.660	11.660
4. Jumlah zebra cross yang terbangun	Lokasi	NA	NA	10	20	20
5. Jumlah PJU yang terbangun	Titik	NA	NA	2.499	2.610	2.610
6. Jumlah guardrail yang terbangun	Meter	NA	NA	4.748	5.104	5.104
7. Jumlah ITS yang terbangun	Titik	NA	NA	-	-	-
Persentase masyarakat sadar bidang keselamatan berlalu lintas						
1. Jumlah bimbingan dan penyuluhan bidang keselamatan lalu lintas untuk angkutan umum	Orang	NA	NA	50	86	126
2. Jumlah bimbingan dan penyuluhan bidang keselamatan lalu lintas untuk pelajar	Orang	NA	NA	54	79	129
Persentase angkutan umum layak jalan						
1. Kendaraan motor yang diuji	Buah	NA	NA	20.267	18.832	19.491

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Magelang, 2020.

Pada tahun 2019, untuk ketersediaan fasilitas perlengkapan jalan tidak mengalami penambahan, hal ini dikarenakan permasalahan proses lelang kegiatan yang gagal. Dengan demikian diperlukan perencanaan yang cermat dan tepat sehingga pelaksanaan yang sudah direncanakan dapat teralisasi.

i. Komunikasi dan Informatika

Kabupaten Magelang mulai tahun 2017 sedang berupaya untuk mewujudkan Kabupaten Cerdas (*Smart Regency*). Dalam rangka mendukung terwujudnya hal tersebut maka perlu disusun indikator-indikator kinerja tambahan sebagai tolok ukur dalam ketercapaian perwujudan *smart regency*. Indikator-indikator yang sebelumnya digunakan (sesuai Lampiran Permendagri Nomor 86 Tahun 2017) mengalami penyesuaian dengan kondisi wilayah Kabupaten Magelang dan ketersediaan data yang dimiliki oleh OPD. Adapun indikator tersebut adalah sebagai berikut.

1) Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE)

Mendasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) yang merupakan kebijakan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya. Indeks SPBE Kabupaten Magelang pada tahun 2018 sebesar 2,18 masuk dalam kategori cukup, dan tahun 2019 adalah 2,74 masuk kategori baik .

2) Cakupan ketersediaan prasarana dan sarana TIK yang memenuhi standar keamanan informasi.

Cakupan ketersediaan prasarana dan sarana TIK yang memenuhi standar komunikasi informasi pada tahun 2019 terhitung 38,17% meningkat dari tahun 2018 sebesar 32,14%. Peningkatan ini dipengaruhi oleh meningkatnya PD yang terfasilitasi jaringan komunikasi data dan peningkatan cakupan layanan komunikasi yang secara teknis mengurangi *blankspot* di area Kabupaten Magelang.

Tabel 2.122

Cakupan Ketersediaan Prasarana dan sarana TIK yang memenuhi standart komunikasi informasi di Kabupaten Magelang Tahun 2015-2019

No.	Indikator	Satuan	2015	2016	2017	2018	2019
1	Cakupan PD dan Desa/Kelurahan yang terfasilitasi jaringan komunikasi data yang optimal dan stabil	%	NA	NA	11,71	23,41	39,52
2	Cakupan Layanan Komunikasi	%	NA	NA	72,72	73	75
3	Cakupan Ketersediaan Prasarana dan sarana TIK yang memenuhi standart komunikasi Informasi	%	NA	NA	28,14	32,14	38,17

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magelang Tahun 2020

3) Cakupan Layanan Informasi bagi Desa dan Perangkat Daerah

Persentase cakupan layanan informasi bagi desa dan Perangkat Daerah tahun 2018 sebesar 12,7% dan tahun 2019 meningkat menjadi 41,32%. Cakupan ini didapatkan dari persentase urusan yang terintegrasi dengan *big data* persentase layanan domain dan sub domain pemerintah yang secara teknis memerlukan kuantitas dan kualitas jaringan TIK

serta sarana lainnya. Persentase urusan yang terintegrasi dengan *big data* tahun 2017 sebesar 20,93%, 2018 sebesar 21% pada tahun 2018, dan pada tahun 2019 menjadi 23,68%.

4) Cakupan Layanan dan Diseminasi Informasi Publik

Persentase layanan *website* PD dan Desa yang memenuhi kriteria diarahkan untuk menampilkan informasi kinerja, data, layanan serta kegiatan yang dilaksanakan. Saat ini belum ada kriteria yang diberlakukan untuk mengarahkan isi dari *website* yang dimiliki PD maupun desa.

Tabel 2.123
Cakupan Layanan dan Diseminasi Informasi Publik
di Kabupaten Magelang tahun 2015-2019

No.	Indikator	Satuan	2015	2016	2017	2018	2019
1	Persentase layanan website PD dan desa yang memenuhi kriteria	%	0	0	0	0	0,13
2	Persentase diseminasi informasi melalui media massa	%	66,67	66,67	66,67	70	66,67
3	Cakupan diseminasi informasi melalui media pertunjukan rakyat	%	41,67	41,67	41,67	25	66,67
4	Cakupan diseminasi melalui media interpersonal	%	175	41,67	75	0	58,33
5	Cakupan diseminasi informasi melalui media luar ruang	%	41,67	41,67	58,33	25	100
6	Cakupan diseminasi informasi melalui media baru portal berita daerah	%	0	0	128,22	100	100
7	Cakupan layanan dan diseminasi informasi publik	%	54,17	31,95	61,65	36,67	65,30

Sumber : Diskominfo Kab. Magelang Tahun 2020

Diseminasi informasi melalui berbagai media yang dilaksanakan oleh Diskominfo pada tahun 2015 sampai dengan 2019 bergantung dengan kegiatan langsung yang belum memanfaatkan teknologi informasi, hal ini dapat dilihat dari variansi angka cakupan layanan diseminasi informasi public dari tahun 2016 sampai tahun 2019.

5) Persentase layanan *website* PD dan desa yang memenuhi kriteria

Keterbukaan informasi publik telah diamanahkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Berdasarkan undang-undang tersebut, pemerintah berkewajiban

memberikan pelayanan informasi publik kepada masyarakat yang salah satunya dilakukan menggunakan media baru berupa layanan *website* PD dan *website* desa. Tolok ukur dari layanan *website* ini adalah persentase layanan *website* PD yang memenuhi kriteria informatif dan layanan *website* desa yang memenuhi kriteria cukup informatif. Kriteria ini didasarkan pada pemeringkatan dari Badan Publik yang ditetapkan oleh Komisi Informasi Provinsi melalui penilaian kuesioner secara mandiri yang dilanjutkan dengan visitasi verifikasi. Sampai dengan saat ini, Pemerintah Kabupaten Magelang belum berpartisipasi dalam pemeringkatan layanan *website* PD sehingga belum ada data yang dapat ditampilkan.

6) Cakupan pemanfaatan dan pengelolaan TI

Cakupan pemanfaatan dan pengelolaan TI diindikasikan dengan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) serta Konten Literasi TIK yang ramah anak, wanita, disabilitas dan pelajar. Tingginya cakupan pengembangan dan pemberdayaan KIM dipengaruhi oleh aktifitas KIM di tiap kecamatan. Sedangkan konten literasi TIK diarahkan agar informasi yang disampaikan ramah anak, wanita, disabilitas dan pelajar.

Tabel 2.124

Cakupan pemanfaatan dan pengelolaan TI
di Kabupaten Magelang Tahun 2015-2019

No.	Indikator	Satuan	2015	2016	2017	2018	2019
1	Cakupan pengembangan dan pemberdayaan kelompok informasi masyarakat di tingkat kecamatan	%	119,05	119,05	119,05	100	119,05
2	Cakupan konten literasi TIK yang ramah anak, wanita, disabilitas dan pelajar	%	0	0	16,67	25	33,33
3	Cakupan pemanfaatan dan pengelolaan TI	%	61,9	61,9	67,86	62,5	76,19

Sumber : Diskominfo Kab. Magelang Tahun 2020

j. Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah

1) Persentase Koperasi Aktif

Koperasi menjadi salah satu penggerak perekonomian terutama di tingkat masyarakat golongan menengah ke bawah. Semakin besar jumlah persentase koperasi yang aktif, maka semakin besar pelayanan penunjang yang dimiliki daerah dengan menggerakkan perekonomian melalui koperasi. Pengaruh koperasi terhadap perekonomian wilayah ditunjukkan dari perannya dalam membantu menjalankan usaha mikro, kecil, dan menengah sebagai lapangan pekerjaan informal alternatif ketika pekerjaan formal tidak lagi dapat memenuhi permintaan lapangan pekerjaan.

Tabel 2.125
 Persentase Koperasi Aktif di Kabupaten Magelang
 Tahun 2015-2019

No	Indikator	Satuan	2015	2016	2017	2018	2019
1	Jumlah Koperasi Aktif	Unit	480	472	394	405	405
2	Jumlah Seluruh Koperasi	Unit	580	587	421	430	430
3	Persentase Koperasi Aktif	%	82,75	80,41	93,59	94,18	94,18

Sumber: Disdagkop UKM Kabupaten Magelang Tahun 2020

Jumlah koperasi aktif di Kabupaten Magelang selama lima tahun terakhir menunjukkan perubahan yang cenderung fluktuatif. Tahun 2015, tercatat 480 koperasi aktif atau 82,75% dari jumlah keseluruhan koperasi di Kabupaten Magelang. Pada tahun 2016 jumlah koperasi aktif mengalami penurunan hingga tahun 2017 menjadi 394 unit. Peningkatan jumlah koperasi aktif kembali terjadi pada tahun 2018 menjadi 405 unit. Walaupun jumlahnya menurun, namun persentase koperasi aktif meningkat pesat pada tahun 2017, yaitu menjadi 93,59%. Perkembangan positif ini menunjukkan bahwa keberadaan koperasi di Kabupaten Magelang menjadi salah satu media penggerak perekonomian skala kecil menengah.

2) Jumlah Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Non BPR/LKM UKM
 Usaha kecil maupun usaha menengah merupakan usaha mandiri yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang tidak ada hubungannya dengan usaha besar (bukan merupakan cabang). Jumlah UKM menjadi aspek yang diperhitungkan dalam menganalisis kondisi perekonomian wilayah karena perannya dalam perekonomian rakyat yang mandiri.

Pada tahun 2015, Jumlah UMKM non BPR/LKM UKM mencapai 106.650, pada tahun 2016 menurun menjadi 106.200, dan tidak mengalami perubahan pada tahun 2017 dan 2018.

3) Jumlah BPR/LKM

BPR adalah lembaga keuangan bank yang menerima simpanan hanya dalam bentuk deposito berjangka, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu dan menyalurkan dana sebagai usaha BPR. LKM atau Lembaga Keuangan Mikro adalah lembaga yang menyediakan jasa penyimpanan (*deposits*), kredit (*loans*), pembayaran sebagai transaksi jasa (*payment service*) serta *money transfer* yang ditujukan bagi masyarakat miskin dan pengusaha kecil. LKM memiliki fungsi sebagai lembaga yang memberikan berbagai jasa keuangan bagi masyarakat miskin dan pengusaha kecil.

Jenis BPR dan LKM yang ada di Kabupaten Magelang adalah Usaha Simpan Pinjam yang perkembangannya cukup signifikan selama lima tahun terakhir. Pada tahun 2014, jumlah BPR/LKM hanya 7 unit dan kini telah mencapai 20 unit yang tersebar di seluruh kecamatan di Kabupaten Magelang. Jumlah BPR/LKM akan menunjukkan seberapa

besar kapasitas pelayanan pendukung yang dimiliki daerah khususnya untuk masyarakat ekonomi rendah dan pengusaha kecil. Meski demikian, tidak banyak usaha mikro yang menggunakan BPR/LKM sebagai lembaga bantuan modal. Sebagian besar usaha ekonomi kecil masyarakat masih mendapatkan bantuan modal dari bank komersial dan modal pribadi.

4) Usaha Mikro dan Kecil yang Dibina

Dalam rangka mempercepat pertumbuhan ekonomi melalui perekonomian masyarakat, maka pemerintah daerah memiliki peran penting terutama untuk memberikan pembinaan terhadap usaha atau kegiatan ekonomi lokal. Pembinaan dari pemerintah dapat berbentuk fisik maupun nonfisik, seperti bantuan alat modal dan pelatihan teknis dan manajerial serta pendampingan dan fasilitasi pameran dan promosi produk. Keberhasilan dari program ini diindikasikan dengan meningkatnya omzet penjualan dan kapasitas produksi.

Persentase usaha mikro dan kecil yang telah menerima pembinaan dari seluruh usaha mikro dan kecil yang ada di Kabupaten Magelang masih sangat kecil. Meski demikian, persentasenya cenderung meningkat. Pada tahun 2015, persentase usaha mikro dan kecil yang telah mendapatkan pembinaan mencapai 1,2% dari jumlah keseluruhan unit usaha mikro yang ada. Persentase tersebut mengalami peningkatan mencapai 1,6% pada tahun 2016 dan turun lagi pada tahun 2017 menjadi 0,96. Pada tahun 2018, persentase usaha mikro dan kecil yang telah mendapatkan pembinaan kembali mengalami peningkatan mencapai 1,15%.

Tabel 2.126

Persentase Usaha Mikro dan Kecil yang dibina di Kabupaten Magelang Tahun 2015-2019

Indikator	Satuan	2015	2016	2017	2018	2019
Jumlah Usaha Mikro dan Kecil yang dibina	Unit	1.280	1.706	1.024	1.225	1.225
Jumlah Usaha Mikro dan Kecil	Unit	106.637	106.637	106.637	106.637	106.637
Persentase Usaha Mikro dan Kecil yang dibina	%	1,2	1,6	0,96	1,15	1,15

Sumber : Disdagkop UKM Kabupaten Magelang Tahun 2020

k. Penanaman Modal

1) Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA)

Jumlah investasi di suatu daerah seringkali menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi perkembangan perekonomian secara makro. Terdapat dua jenis investasi menurut sumbernya, yaitu investasi dalam negeri dan investasi luar negeri/asing. Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA) merupakan bentuk investasi

skala nasional yang menjadi penyumbang pendapatan daerah yang besar.

Tabel 2.127

Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN dan PMA) di Kabupaten Magelang Tahun 2015-2019

No	Jenis Perusahaan	Satuan	2015	2016	2017	2018	2019
1	Investor PMDN	Unit	594	517	730	1.186	2.380
2	Investor PMA	Unit	-	1	0	8	4

Sumber : DPMPTSP Kabupaten Magelang Tahun 2020

Penanaman modal di Kabupaten Magelang masih didominasi oleh penanaman modal dalam negeri, yaitu hampir seluruhnya PMDN dan hanya 1 PMA. Hal ini menunjukkan bahwa daya tarik investasi di Kabupaten Magelang untuk pihak asing masih sangat kurang. Pemerintah daerah masih memiliki pekerjaan rumah dan target baru untuk memanfaatkan potensi Kabupaten Magelang sebagai daya tarik investor asing.

2) Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA)

Besaran nilai investasi menggambarkan lebih nyata dan spesifik perkembangan investasi di suatu wilayah. Jumlah PMDN/PMA maupun proyek yang disetujui tidak dapat menjadi tolak ukur untuk menghitung kontribusi penanaman investasi terhadap perekonomian daerah. Jumlah dan nilai realisasi proyeklah yang menjadi ukuran fisik keberhasilan daerah dalam memfasilitasi PMDN/PMA dalam merealisasikan proyek. Semakin banyak realisasi proyek maka akan menggambarkan keberhasilan daerah dalam memberi fasilitas penunjang pada investor untuk merealisasikan investasi yang telah direncanakan.

Tabel 2.128

Realisasi Kumulatif Nilai Investasi PMDN dan PMA di Kabupaten Magelang Tahun 2015-2019

No	Indikator	Satuan	2015	2016	2017	2018	2019
1	Nilai Investasi PMA	Milyar Rp	-	6.000	-	68.858	68.858
2	Nilai Investasi PMDN	Milyar Rp	476.232	484.941	1.030.690	1.907.516	1.907.516
3	Total Nilai Investasi	Milyar Rp	476.232	490.490	1.030.690	1.976.374	1.976.374

Sumber : DPMPTSP Kabupaten Magelang Tahun 2020

3) Rasio Daya Serap Tenaga Kerja

Rasio daya serap tenaga kerja adalah perbandingan antara jumlah tenaga kerja bekerja pada perusahaan PMDN/PMA dengan jumlah keseluruhan PMDN/PMA. Dengan melihat rasio daya serap tenaga kerja, dapat diketahui pengaruh adanya investasi dalam menyediakan lapangan pekerjaan. Semakin besar rasio daya serap tenaga kerja pada PMDN dan PMA akan mencerminkan besarnya daya tampung di

perusahaan PMDN/PMA untuk menyerap tenaga kerja di suatu daerah dan meningkatkan kesejahteraan penduduk.

Tabel 2.129

Rasio Daya Serap Tenaga Kerja Perusahaan PMDN dan PMA
Kabupaten Magelang Tahun 2015-2019

No	Variabel	Satuan	2015	2016	2017	2018*	2019
1	Jumlah Proyek PMA dan PMDN	Unit	594	518	730	424	2.384
2	Jumlah Tenaga Kerja Yang Terserap	Orang	4.455	7.583	8.297	9.205	25.433
3	Rasio Daya Serap Tenaga Kerja		13,3	6,83	11,37	21,71	9,38

Sumber : DPMPTSP Kabupaten Magelang Tahun 2020

Besar jumlah tenaga kerja yang terserap oleh perusahaan PMDN dan PMA sangat dipengaruhi jumlah perusahaan itu sendiri. Penyerapan tenaga kerja terbanyak terjadi pada tahun 2018.

4) Kenaikan/Penurunan Nilai Realisasi PMDN

Kenaikan/penurunan nilai realisasi PMDN/PMA akan menunjukkan besar pertumbuhan nilai realisasi proyek di suatu daerah. Angka pertumbuhan ini selanjutnya dapat menjadi salah satu aspek yang menunjukkan seberapa besar pemerintah daerah mampu mempertahankan tren investasi dan daya tarik/potensi daerahnya. Selama periode 2014 hingga 2018 kecuali tahun 2016, Kabupaten Magelang mengalami kenaikan nilai investasi PMDN dan PMA, meski nilai kenaikannya berbeda-beda. Kenaikan nilai investasi PMDN dan PMA terbesar terjadi dari tahun 2016 menuju 2017, yakni sebesar 525.490 miliar rupiah, dari tahun 2014 menuju 2015 yang mampu mencapai 2.605 miliar rupiah, serta dari tahun 2015 ke tahun 2016 mencapai 5.863 miliar rupiah, serta dari tahun 2017 ke tahun 2018 dengan jumlah yang tetap. Kenaikan nilai investasi tidak hanya dipengaruhi oleh jumlah perusahaan PMDN dan PMA yang berinvestasi pada tahun terkait, tetapi juga skala perusahaan atau proyek kegiatan yang dilakukan juga sangat mempengaruhi besar nilai investasi yang ditanamkan.

1. Kepemudaan dan Olahraga

• Jumlah Organisasi Pemuda

Pembangunan kepemudaan dan olahraga merupakan salah satu upaya penting dalam peningkatan kualitas sumberdaya manusia seutuhnya. Banyaknya jumlah organisasi pemuda menunjukkan peran serta masyarakat dalam mewujudkan pembangunan. Secara umum jumlah organisasi pemuda di Kabupaten Magelang mengalami peningkatan. Pada tahun 2015 terjadi peningkatan jumlah organisasi pemuda dari 2 tahun sebelumnya yang stagnan. Pada tahun 2016 dan 2017 terdapat 26 jumlah organisasi pemuda di Kabupaten Magelang. Hal tersebut menunjukkan semakin tingginya partisipasi penduduk terhadap pembangunan daerah. Berikut ini adalah tabel jumlah organisasi pemuda di Kabupaten Magelang tahun 2015-2019.

Jumlah kegiatan kepemudaan adalah kegiatan yang diselenggarakan dalam bentuk pertandingan, perlombaan dan upacara serta kejadian atau peristiwa sejenis. Jumlah kegiatan kepemudaan dapat diketahui dari jumlah kegiatan kepemudaan dalam periode 1 (satu) tahun. Tingginya jumlah kegiatan kepemudaan menggambarkan tingginya antusiasme pemuda dalam mendukung pembangunan daerah. Berdasarkan data tahun 2015-2019, jumlah kegiatan kepemudaan di Kabupaten Magelang mengalami kecenderungan penurunan. Pada tahun 2017 mulai nampak penurunan jumlah kegiatan kepemudaan yaitu menjadi sebesar 17 kegiatan dari sebelumnya 21 kegiatan. Namun pada tahun 2018 dan 2019 kembali mengalami kenaikan menjadi 20 kegiatan, walaupun kenaikannya masih dibawah tahun 2015 dan 2016.

Tabel 2.130

Jumlah Organisasi Pemuda di Kabupaten Magelang Tahun 2015-2019

No	Indikator	Satuan	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Jumlah organisasi pemuda	organisasi	24	26	26	27	26
2.	Jumlah kegiatan kepemudaan	kegiatan	21	21	17	20	20

Sumber : Disparpora Kabupaten Magelang Tahun 2020

Generasi muda yang dapat memberikan sumbangan yang besar bagi kemajuan suatu wilayah adalah generasi muda yang berprestasi. Prestasi generasi muda di Kabupaten Magelang cenderung meningkat sebagaimana tabel cakupan prestasi generasi muda di Kabupaten Magelang sebagai berikut.

Tabel 2.131

Cakupan Prestasi Generasi Muda di Kabupaten Magelang Tahun 2015-2019

No	Indikator	Satuan	2015	2016	2017	2018	2019
1	Jumlah atlet berprestasi	orang	100	110	130	150	160
2	Jumlah atlet yang mengikuti kejuaraan	orang	540	560	570	570	590
3.	Cakupan Prestasi Generasi Muda	%	13,09	13,65	15,23	16,99	17,07
4.	Cakupan pembinaan pemuda	%	16,33	19,21	33	37	39

Sumber : Disparpora Kabupaten Magelang Tahun 2020

- Jumlah Organisasi Olahraga

Olahraga adalah segala kegiatan yang sistematis untuk mendorong, membina serta mengembangkan potensi jasmani, rohani dan sosial (Undang undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional). Organisasi olahraga pada bahasan ini adalah induk organisasi cabang olahraga. Menurut Undang undang Nomor 3 tahun 2015 tentang Sistem Keolahragaan Nasional induk organisasi cabang olahraga yang membina, mengembangkan dan mengkoordinasikan satu cabang/jenis olahraga atau gabungan organisasi cabang olahraga yang merupakan anggota federasi cabang olahraga internasional yang

bersangkutan. Jumlah organisasi olahraga dapat dihitung dari jumlah olahraga yang aktif pada saat tahun pengukuran. Banyaknya organisasi olahraga di suatu wilayah menggambarkan peran aktif masyarakat dalam bidang pengembangan olahraga. Berdasarkan data tahun 2014-2018, secara umum jumlah organisasi di Kabupaten Magelang mengalami peningkatan. Peningkatan tersebut mengindikasikan adanya peningkatan peran masyarakat dalam pembangunan daerah khususnya bidang olahraga.

Kegiatan olahraga merupakan kegiatan olahraga yang diselenggarakan oleh pemerintah, swasta atau masyarakat. Jenis kegiatan olahraga ini dapat berbentuk pertandingan dan perlombaan ataupun peristiwa sejenis. Meningkatnya jumlah kegiatan olahraga menunjukkan meningkatnya peran dan efektifitas organisasi pemuda dan/atau pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pembangunan daerah khususnya bidang olahraga. Berdasarkan data tahun 2015-2019 perkembangan jumlah kegiatan olahraga di Kabupaten Magelang mengalami peningkatan. Pada tahun 2016 terdapat 30 jumlah kegiatan olahraga, meningkat dari 3 tahun sebelumnya yang stagnan berjumlah 23 kegiatan. Namun pada tahun 2017 jumlah kegiatan menurun menjadi 24. Berikut ini adalah tabel yang menunjukkan jumlah organisasi dan kegiatan olahraga di Kabupaten Magelang tahun 2015-2019.

Tabel 2.132

Jumlah Organisasi Olahraga di Kabupaten Magelang Tahun 2015-2019

No	Indikator	Satuan	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Jumlah organisasi olahraga	organisasi	34	30	31	35	35
2.	Jumlah klub olah raga	Unit	34	34	40	40	40
3.	Jumlah kegiatan olahraga	keg	23	30	24	24	25

Sumber : Disparpora Kabupaten Magelang Tahun 2020

- Lapangan Olahraga

Lapangan olahraga dapat dilihat dari jumlah lapangan dibagi dengan jumlah penduduk per 1000 jiwa. Angka ini mampu menunjukkan ketersediaan sarana fisik untuk olahraga khususnya lapangan olahraga. Lapangan olahraga dalam hal ini dapat berbentuk lapangan bola, lapangan voli, lapangan basket atau lapangan lainnya yang peruntukannya sebagai sarana olahraga. Secara umum jumlah lapangan olahraga di Kabupaten Magelang mengalami peningkatan. Akan tetapi, seiring meningkatnya jumlah penduduk maka perkembangan lapangan olahraga per 1000 penduduk tersebut mengalami penurunan. Jumlah lapangan olahraga mengalami peningkatan, sebagaimana data perkembangan jumlah lapangan olahraga di Kabupaten Magelang dari tahun 2015-2019.

Tabel 2.133

Rasio Lapangan Olahraga di Kabupaten Magelang Tahun 2015-2019

No	Indikator	Satuan	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Jumlah lapangan olahraga	Unit	255	265	265	265	265
2.	Jumlah penduduk (BPS)	Jiwa	1.245.496	1.275.123	1.268.396	1.290.115	
3.	Lapangan olah raga per 1.000 penduduk	Unit	0,20	0,21	0,21	0,21	0,21
4	Cakupan Pembinaan olah raga	Persen	44,55	42,32	43,22	44,97	38

Sumber : Disparpora Kabupaten Magelang Tahun 2018

m. Statistik

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun terdapat 3 (tiga) indikator yang perlu diukur pada urusan statistik yaitu tersedianya sistem data dan statistik yang terintegrasi, Buku Kabupaten Dalam Angka, dan Buku PDRB.

1) Tersedianya sistem data dan statistik yang terintegrasi

Mulai tahun 2017, urusan statistik menjadi salah satu tugas pokok dan fungsi pada Dinas Komunikasi dan Informatika. Sampai dengan tahun 2018, Kabupaten Magelang belum mempunyai satu sistem data dan statistik yang terintegrasi. Pada tahun 2019 mulai dirilis sistem data statistik yang terintegrasi dengan alamat: <http://opendata.magelangkab.go.id/>. Sistem data statistik ini melingkupi semua data sektoral PD maupun Statistik Dasar dari Badan Pusat Statistik.

2) Buku Kabupaten Dalam Angka

Buku Kabupaten Dalam Angka memuat dua jenis data statistik yaitu data statistik dasar dan data statistik sektoral yang dihimpun dari instansi/dinas/lembaga pemerintah maupun swasta (data sekunder). Kontinuitas publikasi diindikasikan dengan terbitnya publikasi dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2017.

3) Buku PDRB Kabupaten

Ketersediaan publikasi Buku PDRB Kabupaten bagi pemerintah dan masyarakat adalah untuk menyediakan data yang diperlukan guna melakukan analisis pembangunan perekonomian kabupaten atau untuk mengukur kondisi perekonomian kabupaten dibandingkan dengan wilayah regional dan provinsi. Buku PDRB Kabupaten Magelang ada/tersedia tahun 2013-2017.

Tabel 2.134

Persentase SKPD Yang Menggunakan Sandi Secara Terintegrasi di Kabupaten Magelang Tahun 2015-2019

No	Indikator	Satuan	2015	2016	2017	2018	2019
1	Jumlah data sektoral yang tersedia	Buah	0	0	0	0	25
2	Jumlah data statistik sektoral yang terintegrasi dalam sistem informasi	Buah	31	31	31	31	31

No	Indikator	Satuan	2015	2016	2017	2018	2019
3	Persentase Jumlah data statistik sektoral yang terintegrasi dalam sistem informasi	Persen	0	0	0	0	80,6

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magelang Tahun 2020

n. Persandian

Urusan persandian di Kabupaten Magelang menjadi tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika. Adapun program yang telah dilaksanakan untuk mendukung urusan tersebut adalah program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa dengan satu kegiatan yaitu pengelolaan dan pengembangan persandian yang masih terbatas pada pelayanan komunikasi yakni distribusi informasi berdasarkan klasifikasi di internal Pemerintah Kabupaten Magelang.

Persandian merupakan hal yang amat penting dalam era serba teknologi informasi saat ini. Modernisasi pemerintahan akan sangat bergantung dan didukung oleh penggunaan teknologi informasi di segala aspek mulai dari administrasi perkantoran (*e-office*), perencanaan (*e-planning*), keuangan (*e-budgetting*) dan fungsi pemerintahan lainnya. Penggunaan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah akan menghadapi beberapa resiko seperti penyadapan, *hacking* dan berbagai ancaman lainnya. Untuk mengukur kinerja urusan persandian adalah persentase PD yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi perangkat daerah yang sudah terintegrasi. Data kinerja ini untuk Kabupaten Magelang belum tersedia, namun selanjutnya akan digunakan sebagai tolak ukur kinerja urusan persandian.

Tabel 2.135

Persentase SKPD yang menggunakan sandi secara terintegrasi di Kabupaten Magelang Tahun 2015-2019

No	Indikator	Satuan	2015	2016	2017	2018	2019
1	Jumlah SKPD yang menggunakan sandi dalam komunikasi perangkat daerah	Buah	0	0	0	0	0
2	Jumlah SKPD	Buah	427	427	427	427	427
3	Persentase SKPD yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi Perangkat Daerah	Persen	0	0	0	0	0

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magelang Tahun 2020

o. Perpustakaan

1) Jumlah Pengunjung Perpustakaan Daerah Per Tahun

Semakin banyak pengunjung perpustakaan menunjukkan minat membaca di masyarakat cukup tinggi. Selain itu, dengan melihat peningkatan jumlah pengunjung, dapat terlihat bahwa apakah pemerintah daerah sudah mampu menstimulasi penduduknya untuk lebih rajin membaca dalam rangka meningkatkan kualitas SDM. Jumlah

pengunjung perpustakaan daerah fluktuatif dengan data sebagai berikut.

Tabel 2.136
Jumlah Pengunjung Perpustakaan per Tahun
di Kabupaten Magelang Tahun 2015-2019

No	Indikator	Satuan	2015	2016	2017	2018	2019
1	Jumlah Pengunjung Perpustakaan per tahun	Jiwa	33.726	55.854	39.967	76.548	95.965
2	Jumlah Penduduk (BPS)	Jiwa	1.245.496	1.275.123	1.268.396	1.290.115*	1.295.019*
3	Persentase Pengunjung Perpustakaan per tahun	Persen	2,71	4,38	3,15	5,93	7,41
4	Persentase Peningkatan Pemustaka per tahun	%	-8,71	61,76	-28,06	88,30	25,37

Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Magelang Tahun 2020

*) Disdukcapil, 2019

Berdasarkan tabel di atas, persentase pengunjung perpustakaan per tahun masih kecil. Hal ini menunjukkan bahwa minat baca masyarakat di Kabupaten Magelang masih rendah.

2) Koleksi Buku yang Tersedia di Perpustakaan Daerah

Jenis koleksi buku yang tersedia menggambarkan seberapa beragamnya bacaan yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat untuk mencari ilmu dalam tiap bidangnya. Semakin banyak judul koleksi buku, maka semakin beragam bacaan yang dapat dimanfaatkan. Jumlah koleksi judul buku tersebut kemudian diwujudkan ke dalam sebuah rasio yang menggambarkan perbandingan jumlah koleksi judul buku dengan jumlah buku secara keseluruhan di perpustakaan daerah tersebut.

Tabel 2.137
Koleksi Buku yang Tersedia di Perpustakaan Daerah
di Kabupaten Magelang Tahun 2015-2019

No	Indikator	Satuan	2015	2016	2017	2018	2019
1	Jumlah Koleksi Judul Buku yang Tersedia di Perpustakaan Daerah	Judul	24.512	24.955	26.179	27.230	27.745
2	Jumlah Koleksi Jumlah Buku yang Tersedia di Perpustakaan	Eksemplar	49.990	52.683	56.724	61.030	64.120
3	Rasio koleksi buku yang tersedia di perpustakaan Kabupaten	persen	2,04	2,11	2,16	2,24	2,31
4	Target Rasio		2,06	2,11	2,15	2,20	2,24

Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Magelang Tahun 2020

Berdasarkan tabel tersebut, terlihat bahwa jumlah koleksi judul buku dan jumlah koleksi buku di perpustakaan daerah Kabupaten Magelang terus meningkat dan beragam. Angka rasio yang dihasilkan juga meningkat setiap tahunnya dikarenakan jumlah koleksi yang tersedia

semakin banyak dan judul buku yang dikoleksi juga terus bertambah. Dengan semakin beragamnya judul serta jumlahnya, diharapkan semakin banyak ragam dan jenis ilmu yang dapat diperoleh oleh masyarakat pengunjung perpustakaan.

p. Kearsipan

1) Pengelolaan Arsip Secara Baku

Tujuan penyelenggaraan kearsipan diantaranya adalah menjaga kelestarian arsip, menjamin keselamatan dan keamanan arsip sebagai bukti pertanggungjawaban dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pengelolaan arsip secara baku, yang dikelola sesuai kaidah arsip yang tertib sangat penting dilakukan agar dokumen yang ada terjamin keamanannya dan memudahkan apabila suatu saat dibutuhkan.

Dibawah ini data pengelolaan arsip secara baku atau tertib di Kabupaten Magelang.

Tabel 2.138

Jumlah Unit Pengolah/Pencipta Arsip yang Telah Menerapkan Arsip Secara Baku/Tertib di Kabupaten Magelang Tahun 2015-2019

No	Indikator	Satuan	2015	2016	2017	2018	2019
1	Jumlah Unit Pengolah/Pencipta Arsip yang Telah Menerapkan Arsip Secara Baku	Unit	289	413	536	659	782
2	Jumlah Unit Pengolah/Pencipta Arsip	Unit	734	734	734	734	734
3	Persentase Pengelolaan Arsip secara Baku/ Tertib	%	39,37	56,27	73,02	89,77	106,52

Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Magelang Tahun 2020

Tabel di atas menunjukkan bahwa tingkat penerapan pengelolaan arsip secara baku di Kabupaten Magelang belum menyentuh ke seluruh pengolah arsip/pencipta arsip, meskipun dari tahun 2015 hingga 2019 jumlahnya terus mengalami kenaikan. Hal tersebut mengindikasikan diperlukannya sosialisasi dan pendampingan kepada pengolah arsip/pencipta untuk melaksanakan pengelolaan arsip secara baku.

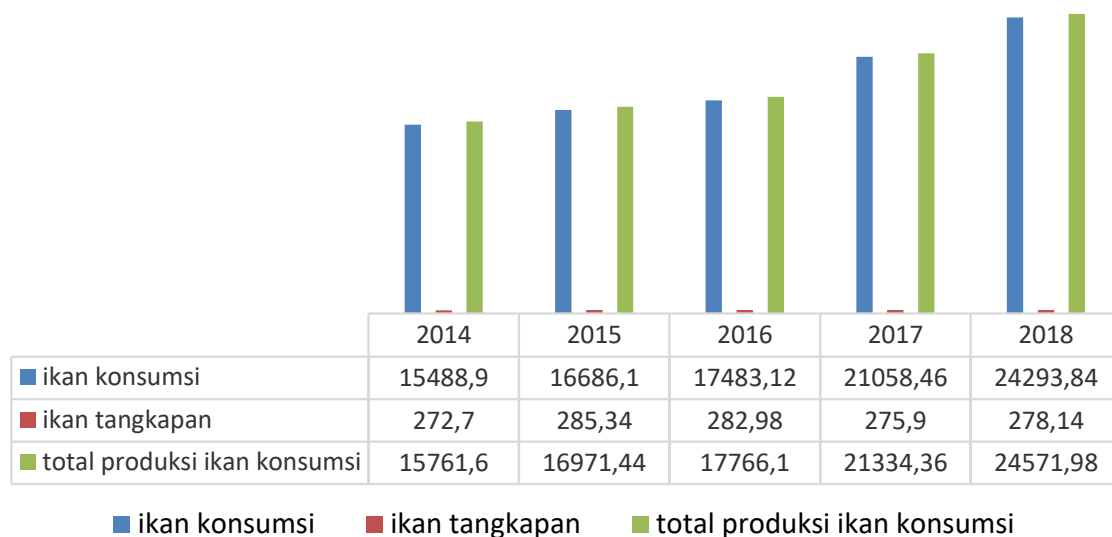
2.4.3. Urusan Pemerintahan Pilihan

a. Kelautan dan Perikanan

Sektor perikanan yang dikembangkan di Kabupaten Magelang adalah sektor perikanan darat, mengingat Kabupaten Magelang bukanlah daerah pesisir. Perikanan budidaya yang dikembangkan di Kabupaten Magelang mayoritas adalah jenis ikan tawar konsumsi. Jumlah produksi perikanan budidaya terus mengalami peningkatan dari tahun 2014 hingga tahun 2018. Begitu juga pada produksi perikanan benih, mengalami peningkatan yang cukup signifikan dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2018.

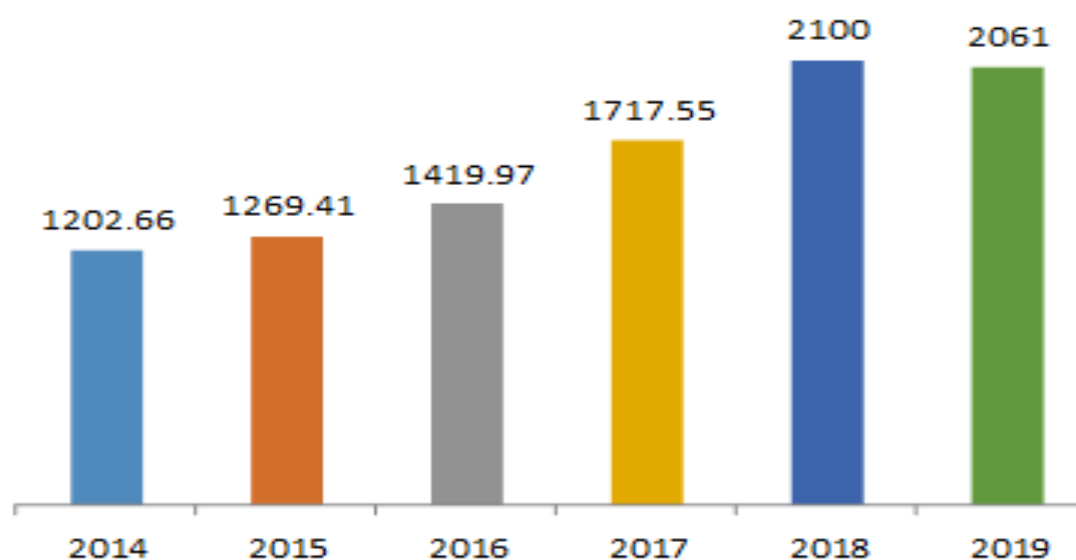
Selain perikanan budidaya, sektor perikanan di Kabupaten Magelang juga bersumber dari perikanan tangkap sungai. Jumlah produksi perikanan

tangkap memang tidak sebanyak perikanan budidaya, namun banyaknya sungai di wilayah Kabupaten Magelang berpengaruh terhadap besarnya produksi perikanan tangkap yang cenderung meningkat. Produksi perikanan tangkap mengalami peningkatan pada tahun 2014 sebesar 272,70 ton sampai tahun 2018 sebesar 278,14 ton dan 301 ton pada tahun 2019. Produksi perikanan di Kabupaten Magelang disajikan pada tabel berikut.



Sumber: Hasil Olahan, 2019

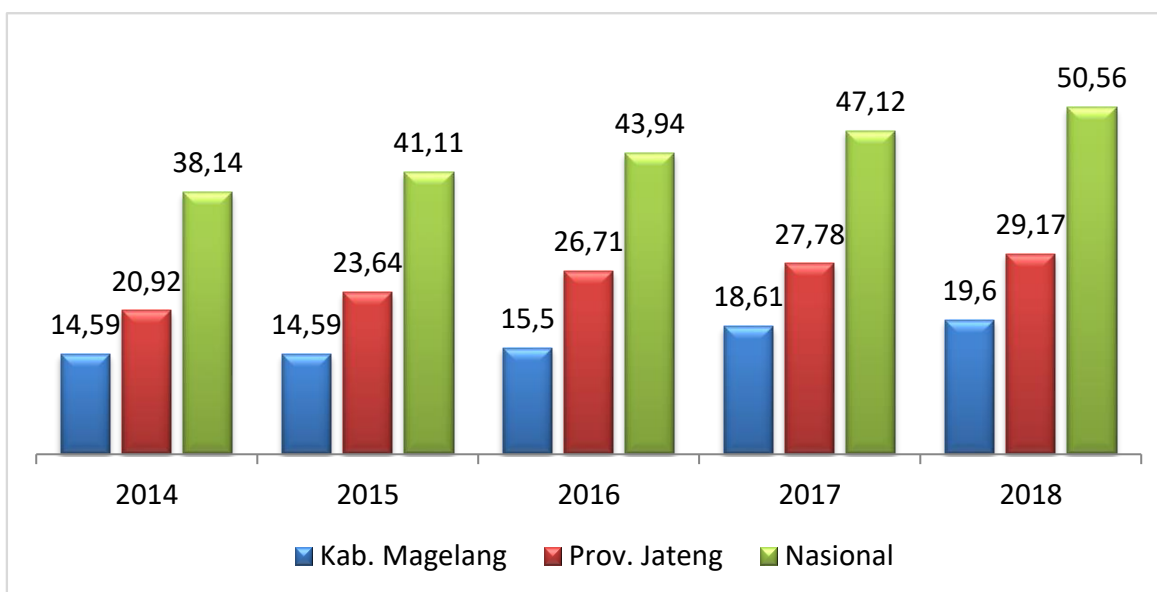
Gambar 2.33
Produksi Ikan Konsumsi (Ton) di Kabupaten Magelang
Tahun 2014-2018



Sumber: Hasil Olahan, 2019

Gambar 2.34
Produksi Benih Ikan (Juta ekor) di Kabupaten Magelang
Tahun 2014-2019

Besar konsumsi ikan menjadi salah satu indikator kesejahteraan karena berhubungan dengan variasi pangan yang dikonsumsi masyarakat untuk memenuhi kualitas gizi dan kesehatan. Ikan mengandung vitamin dan zat-zat yang dibutuhkan oleh tubuh, terutama anak-anak yang masih dalam tahap pertumbuhan. Ikan mengandung omega 3 yang berfungsi baik bagi perkembangan otak manusia, selain itu protein yang ada juga penting perannya dalam mensuplai kebutuhan dan perkembangan organ tubuh manusia.

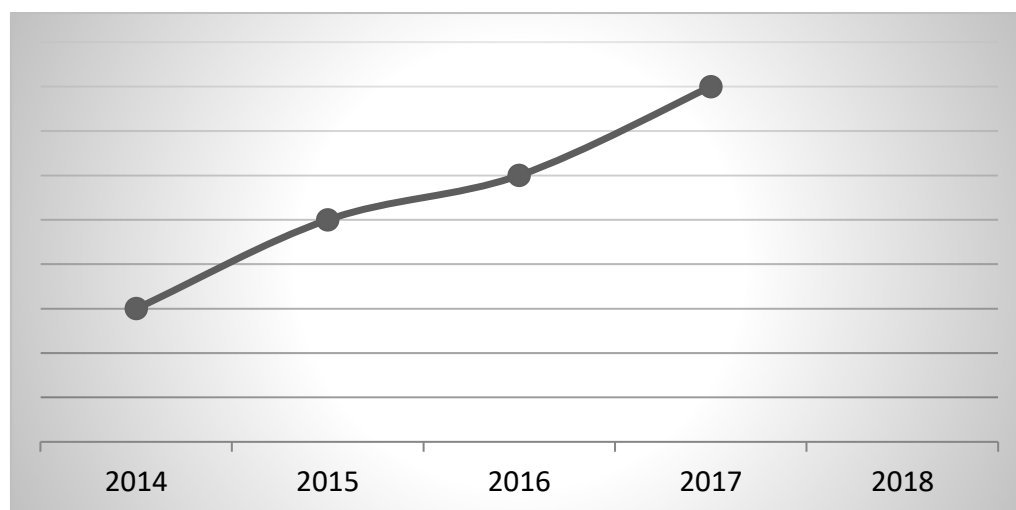


Sumber: Hasil Olahan, 2019

Gambar 2.35
Konsumsi Ikan di Kabupaten Magelang Tahun 2014-2018

Jumlah konsumsi ikan per kapita di Kabupaten Magelang meningkat secara signifikan dari tahun 2014 sampai tahun 2018. Namun hal ini masih jauh dari angka konsumsi ikan di tingkat provinsi Jawa Tengah maupun nasional. Sehingga masih diperlukan kampanye memasyarakatkan makan ikan di Kabupaten Magelang.

Perikanan sebagai bagian dari sektor pertanian dalam arti luas, juga memberi kontribusi dalam pendapatan Kabupaten Magelang melalui produk domestik regional bruto. Sebagai kabupaten yang memiliki kondisi geografis perbukitan dan dataran membuat sektor perikanan yang berkembang masih sangat terbatas. Hal ini ditunjukkan dengan masih rendahnya kontribusi perikanan di dalam PDRB yakni berada di kisaran 2,6% sejak tahun 2014 hingga tahun 2015. Namun pada tahun 2016 dan 2017 kontribusinya naik menjadi 2,7%.



Sumber: Hasil Olahan, 2019

Gambar 2.36

Kontribusi Sub Sektor Perikanan terhadap PDRB ADHK Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan Kabupaten Magelang Tahun 2014-2017

b. Pariwisata

1) Kunjungan Wisata

Pariwisata merupakan salah satu sektor penting yang mempengaruhi perekonomian wilayah. Eksistensinya mampu menjadi generator sektor lain seperti perdagangan, jasa, dan penyedia akomodasi. Indikator yang digunakan untuk menunjukkan bahwa sektor pariwisata turut berkontribusi terhadap perkembangan perekonomian wilayah adalah melalui jumlah kunjungan atau jumlah wisatawan, serta kontribusinya terhadap PDRB. Kabupaten Magelang merupakan salah satu destinasi wisata populer berkat adanya daya tarik wisata budaya dan alam, salah satunya Candi Borobudur, yang tidak hanya menarik wisatawan domestik saja, tetapi juga wisatawan mancanegara. Kunjungan wisata ke berbagai daya tarik wisata di Kabupaten Magelang pada tahun 2015 hingga tahun 2019 selalu mengalami peningkatan.

Tabel 2.139

Jumlah Kunjungan Wisatawan di Kabupaten Magelang Tahun 2015-2019

No	Indikator	2015	2016	2017	2018	2019
1	Kunjungan Wisata manca	253.258	302.979	337.515	358.673	361.050
2	Kunjungan Wisata nusantara	3.902.502	4.223.671	5.064.569	5.977.422	6.150.331
Jumlah		4.155.760	4.526.650	5.402.084	6.336.095	6.511.381
Peningkatan Jumlah Kunjungan		247.830	370.890	875.434	934.011	175.286

Sumber :Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Magelang Tahun 2020

Pada tahun 2015 kunjungan wisata hanya mencapai 41.155.760 selama setahun dan meningkat hingga 6.511.381 pada tahun 2019. Selisih jumlah kunjungan mancanegara dengan kunjungan domestik masih

terpaut cukup besar. Sejak tahun 2015 hingga 2019, pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara rata rata kurang 14%.

2) Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB

Kontribusi sektor pariwisata pada PDRB, direpresentasikan dalam sektor. Sektor ini kemudian dibagi menjadi dua subsektor, yaitu penyedia akomodasi dan penyedia makan dan minum. Subsektor penyedia akomodasi mencakup kegiatan penyediaan akomodasi jangka pendek seperti hotel dan penginapan. Sedangkan subsektor penyedia makan minum meliputi pelayanan makan minum untuk dikonsumsi segera seperti restoran, baik restoran tradisional, *self service*, maupun *take away*.

Tabel 2.140
Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB (ADHK)
Kabupaten Magelang Tahun 2015-2019

Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
PDRB ADHK Kabupaten Magelang	18.838.351,97	19.855.844,24	20.882.801,00	22.082.795,90	23.253.154,32
PDRB Kategori Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum (juta Rp)	776.587,13	823.333,08	875.649,00	940 610	1.017.360,62
Kontribusi terhadap PDRB (%)	4,12%	4,15%	4,19%	4,15	4,25
Pertumbuhan (%)	6,60%	6,02%	6,35%	7,27	8,16

Sumber: Bappeda dan Litbangda Kabupaten Magelang diolah, Tahun 2020

3) Lama Tinggal Wisatawan

Lama tinggal wisatawan menjadi salah satu indikator utama sektor pariwisata. Lama tinggal wisatawan mempengaruhi besarnya belanja wisatawan di suatu wilayah sehingga menggerakkan sektor ekonomi riil. Lama tinggal wisatawan di Kabupaten Magelang cenderung meningkat dengan nilai yang tidak begitu signifikan. Mulai tahun 2015 sampai tahun 2016 mengalami kenaikan, setelah itu mengalami penurunan pada tahun 2017 dan kembali naik pada tahun 2018 dengan nilai rata-rata yang hampir sama dengan tahun 2016. Lambatnya tingkat kenaikan rata-rata lama tinggal wisatawan di Kabupaten Magelang disebabkan masih lemahnya dukungan atraksi malam hari, tempat penginapan, terbatasnya daya tarik wisata dan paket wisata yang cenderung menjadikan DTW di wilayah Kabupaten Magelang bukan sebagai tujuan utama wisata.

Tabel 2.141
Lama Tinggal Wisatawan di Kabupaten Magelang Tahun 2015-2019

No	Indikator	Satuan	2015	2016	2017	2018	2019
1	Wisman	Hari	1,64	1,14	1,004	1,65	1,71
2	Wisnu	Hari	1,31	1,01	1,006	1,31	1,32
	Rata-rata	Hari	1,35	1,47	1,075	1,48	1,51
	Peningkatan Lama Tinggal					0,475	

Sumber :Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Magelang Tahun 2020

4) Jumlah Daya Tarik Wisata (DTW)

Magelang memiliki beragam jenis DTW yang dikelompokkan menjadi empat klasifikasi yaitu DTW alam, budaya, buatan, dan minat khusus, dan lainnya yang tidak masuk dalam klasifikasi empat tersebut. Daya tarik wisata yang paling dominan di Kabupaten Magelang adalah daya tarik wisata alam yaitu sejumlah 82. Kemudian disusul dengan daya tarik wisata berbentuk *event*.

Tabel 2.142

Jumlah Daya Tarik Wisata di Kabupaten Magelang Tahun 2015-2019

No	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
1	DTW Alam	18	20	22	82	82
2	DTW Budaya	12	14	16	18	18
3	DTW Buatan	13	15	16	29	29
4	DTW Minat Khusus	24	25	26	29	29
5	Lain-lain (event)	46	48	50	53	55

Sumber : Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Magelang Tahun 2020

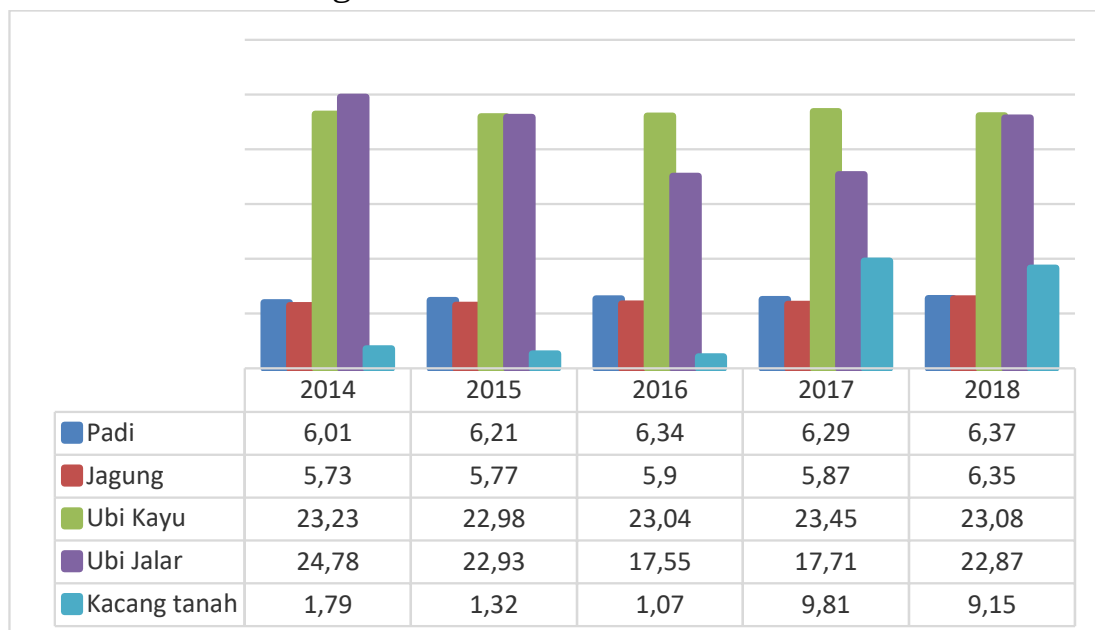
c. Pertanian

Gambaran tentang kondisi pembangunan pertanian di Kabupaten Magelang dapat dijelaskan sebagai berikut.

1) Produktivitas Padi atau Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya per Hektar

a) Produktivitas Tanaman Bahan Makanan Utama

Tanaman bahan makanan utama di Kabupaten Magelang terdiri dari padi, jagung, ubi kayu, ubi jalar dan kacang tanah. Perkembangan produktivitas dari tanaman tersebut selama lima tahun terakhir dapat diketahui melalui gambar di bawah ini.



Sumber: Hasil Olahan, 2019

Gambar 2.37

Produktivitas Tanaman Bahan Makanan Utama (Ton/Ha)
Kabupaten Magelang Tahun 2014-2018

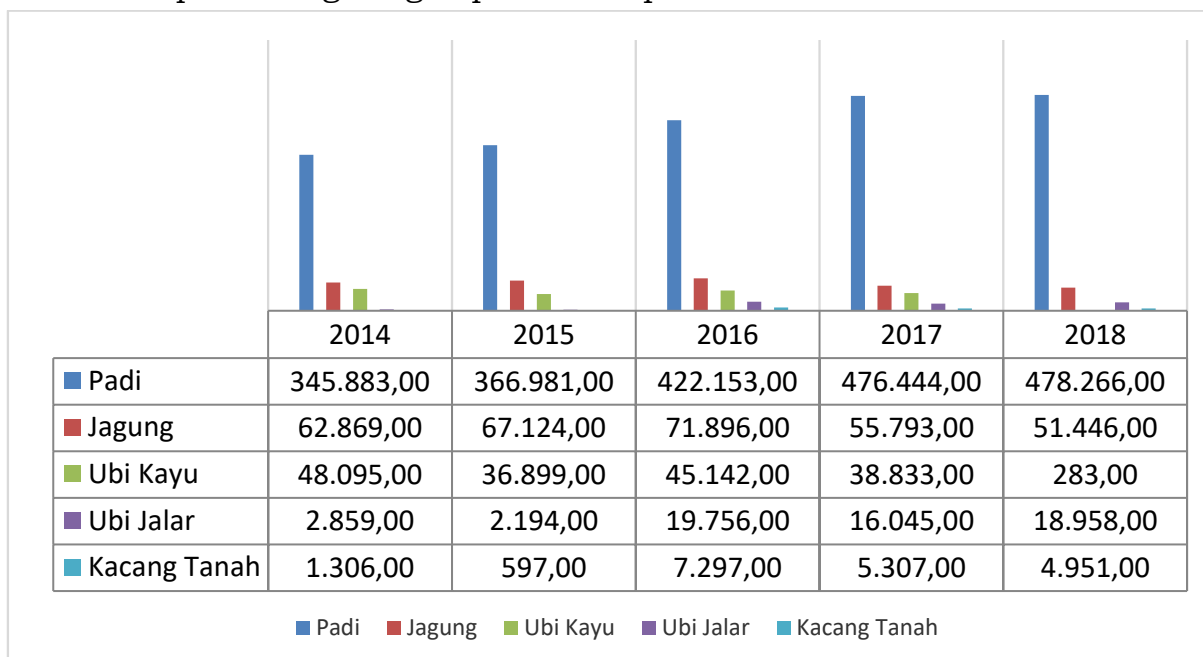
Produktivitas padi, jagung, ubi kayu cenderung tetap, meskipun ada kenaikan namun tidak terlalu signifikan. Produktivitas tertinggi

diantara komoditas tersebut adalah golongan ubi-ubian. Produktivitas ubi kayu adalah yang tertinggi pada tahun 2017 yakni mencapai 23,45 Ha dengan tren perkembangan yang relatif stabil dari tahun ke tahun. Ubi jalar menyusul dengan 22,87 ton/ha pada tahun 2018 meningkat cukup signifikan dari tahun sebelumnya yang hanya mencapai 17,71 ton/ha.

Berbeda dengan ubi jalar dan ubi kayu, produktivitas padi di Kabupaten Magelang meningkat dari tahun ke tahun dan pada tahun 2018 hingga mencapai 6,37 ton/ha. Perkembangan produktivitas padi menunjukkan perkembangan yang terus meningkat perlahan dibanding produktivitas jagung yang cenderung stagnan selama lima tahun terakhir.

b) Total Produksi Tanaman Bahan Makanan Utama

Apabila dilihat dari besar jumlah produksi tanaman bahan makanan utama, padi merupakan tanaman pangan dengan jumlah terbesar dibandingkan jenis tanaman pangan utama lainnya. Padi sebagai bahan pangan utama yang mentah sebelum menjadi beras, memiliki peran penting dalam upaya pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat. Total produksi komoditas tanaman pangan penting di Kabupaten Magelang dapat dilihat pada tabel berikut ini.

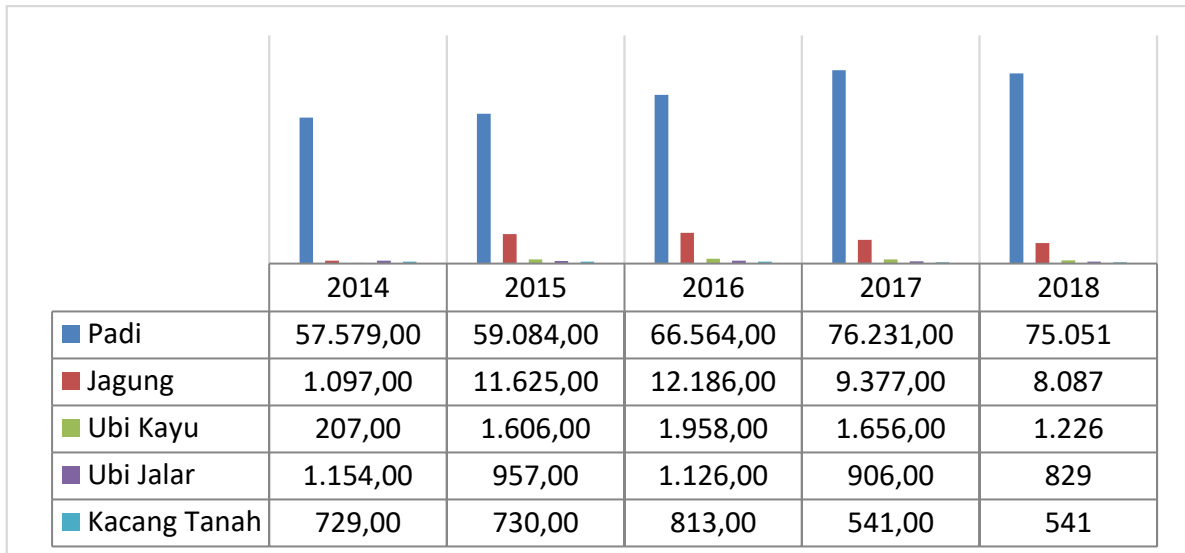


Sumber: Hasil Olahan, 2019

Gambar 2.38
Total Produksi Tanaman Bahan Makanan Utama
Kabupaten Magelang Tahun 2014-2018 (Ton)

Total produksi padi mengalami peningkatan dari tahun 2014 sampai tahun 2017 sementara komoditas jagung, ubi kayu, ubi jalar dan kacang tanah mengalami penurunan produksi karena lahan bergiliran untuk peningkatan produksi padi (Pajale). Hal ini dapat dilihat dari

luas panen tanaman bahan makanan di Kabupaten Magelang pada tabel di bawah ini.



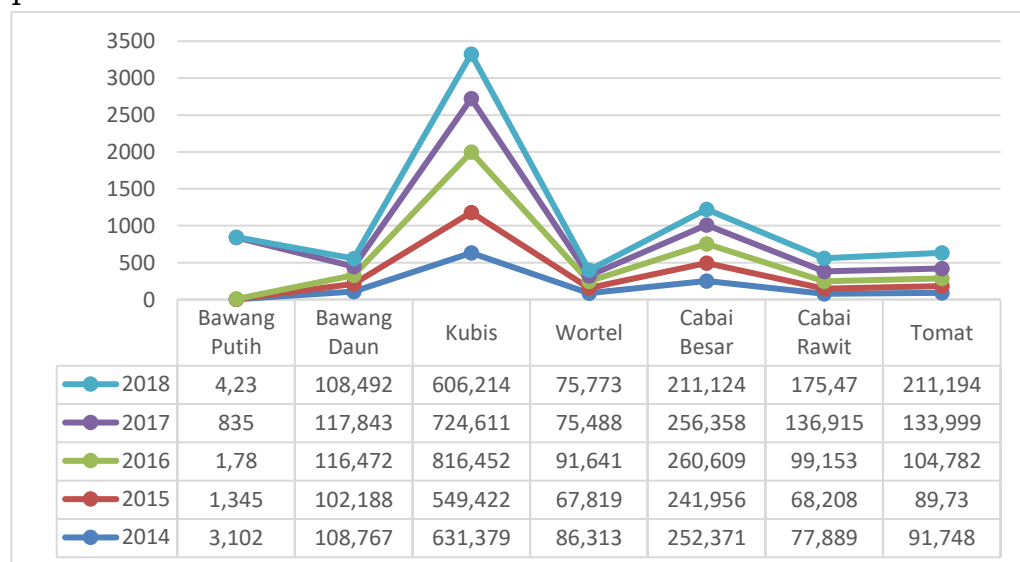
Sumber: Hasil Olahan, 2019

Gambar 2.39

Luas Panen Tanaman Bahan Makanan Utama di Kabupaten Magelang Tahun 2014-2018

c) Total Produksi Komoditas Sayur-sayuran

Sebagai daerah yang memiliki lahan pertanian yang potensial dengan iklim yang sesuai, Kabupaten Magelang tidak hanya menghasilkan padi tetapi juga komoditas sayur-sayuran. Komoditas sayuran merupakan komoditas yang penting setelah komoditas tanaman pangan. Jenis dan karakteristik tanah serta kondisi geografis Kabupaten Magelang yang sebagian besar adalah wilayah tangkapan air membuat kabupaten ini sangat potensial untuk ditanami komoditas sayur-sayuran. Produksi beberapa jenis sayuran yang dihasilkan Kabupaten Magelang dari tahun ke tahun dapat dilihat pada tabel di bawah ini.



Sumber: Hasil Olahan, 2019

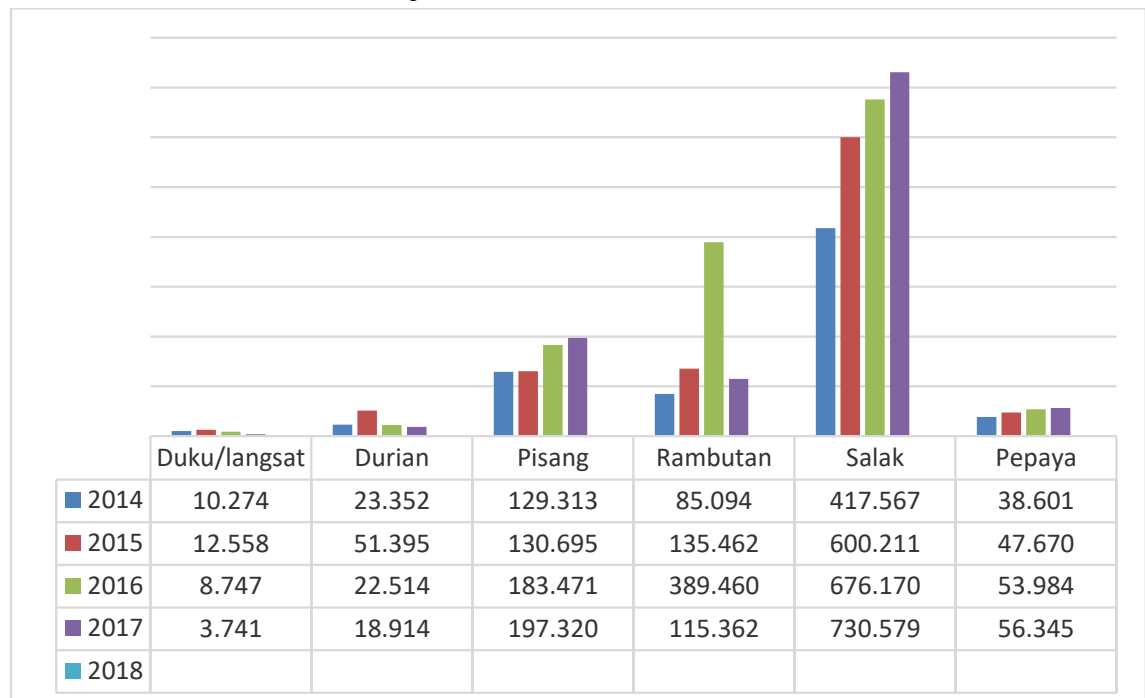
Gambar 2.40

Total Produksi Sayur-sayuran (Kwintal) di Kabupaten Magelang Tahun 2014-2018

Komoditas sayuran penting di Kabupaten Magelang antara lain kubis, bawang daun, wortel, tomat, cabai rawit, cabai besar dan bawang putih (sedang dikembangkan). Perkembangan produksi hampir seluruh komoditas sayuran fluktuatif namun relatif stabil dari tahun 2014-2018, dengan kecenderungan positif.

d) Total Produksi Komoditas Buah-Buahan

Komoditas buah-buahan merupakan komoditas pertanian lainnya yang penting setelah tanaman pangan dan sayuran, yang mampu memberikan nilai tambah secara ekonomi bagi masyarakat tani. Komoditas buah-buahan umumnya rata-rata memproduksi setahun sekali. Komoditas buah-buahan pada umumnya bisa diproduksi di semua kabupaten dan kota. Beberapa jenis buah dengan produksi tertinggi antara lain salak, pisang, pepaya, dan rambutan. Unggulnya buah-buahan tersebut tidak lepas dari kondisi lingkungan yang subur untuk menanam buah jenis tertentu.



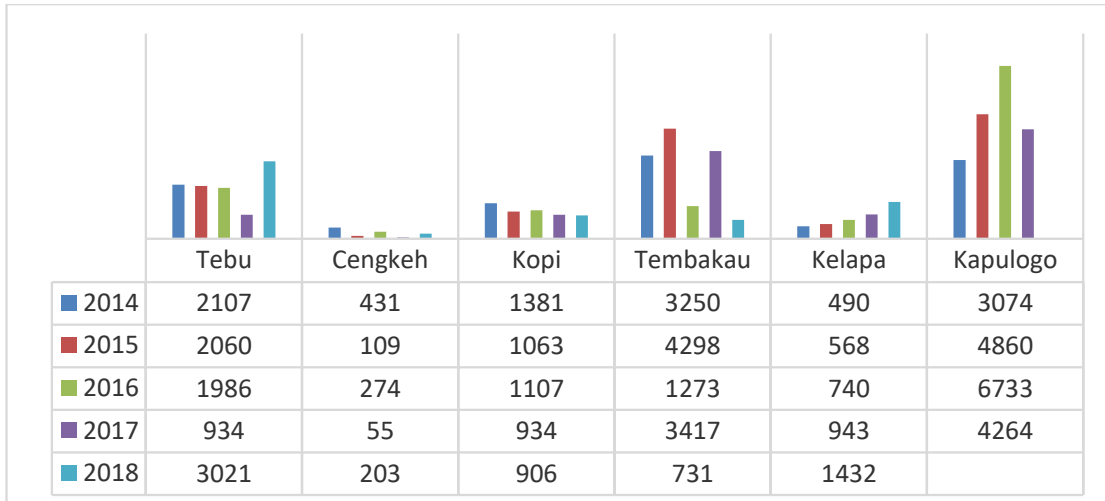
Sumber: Hasil Olahan, 2019

Gambar 2.41
Perkembangan Produksi Buah-Buahan (Kuintal)
Kabupaten Magelang Tahun 2014-2018

Komoditas buah salak merupakan salah satu komoditas unggulan daerah yang produksinya mencapai 730.579 kwintal pada tahun 2017 dengan tren perkembangan yang selalu meningkat sebesar 8,05% dari tahun 2016 ke tahun 2017. Produksi buah terbesar selanjutnya adalah pisang yang mencapai 197.320 kwintal atau meningkat 7,55% dari produksi tahun sebelumnya. Sama halnya dengan pisang, komoditas jambu biji juga mengalami peningkatan produksi hingga 39,22% dari tahun sebelumnya.

e) Total Produksi Komoditas Tanaman Perkebunan

Produksi tanaman perkebunan di Kabupaten Magelang fluktuatif, didominasi oleh tanaman perkebunan tembakau dan kapulaga, hal ini dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

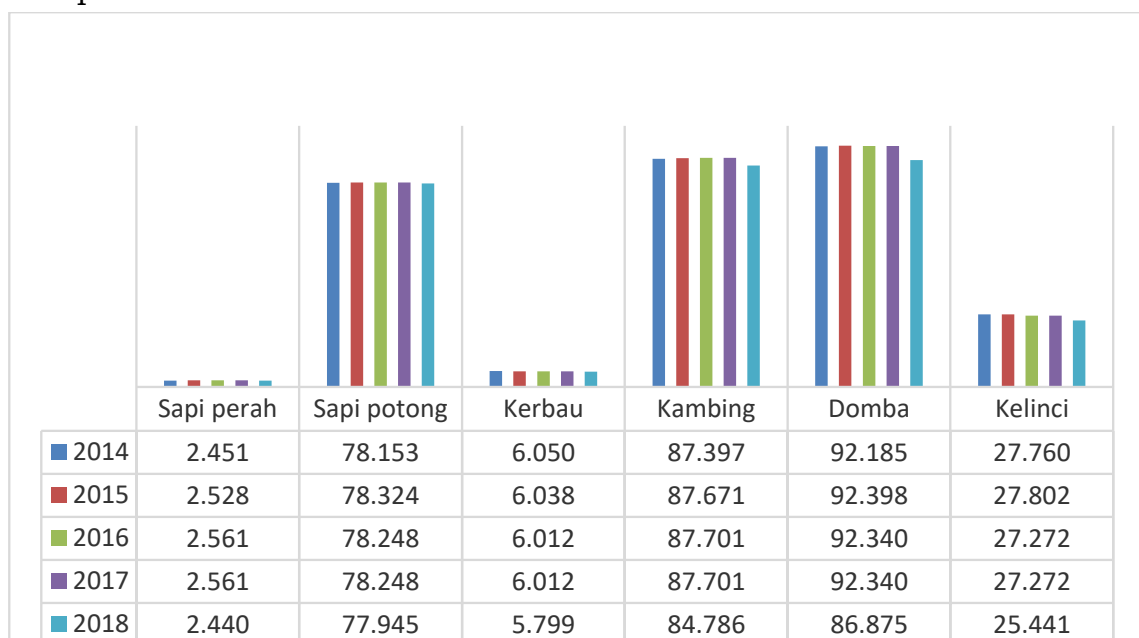


Sumber: Hasil Olahan, 2019

Gambar 2.42

Total Produksi Tanaman Perkebunan (Ton) Kabupaten Magelang Tahun 2014-2018

Peternakan sebagai bagian dari kegiatan pertanian memiliki peran penting dalam perekonomian wilayah. Selain sebagai sumber protein hewani bagi kebutuhan manusia, ternak juga seringkali digunakan sebagai tenaga pengolah lahan persawahan. Teknologi mutakhir saat ini juga telah mampu mengubah kotoran sapi menjadi pupuk organik dan alternatif sumber energi atau dikenal dengan biogas bagi rumah tangga. Banyaknya manfaat dari sektor perekonomian berbasis peternakan, membuat sektor yang bersumber dari *livestock* ini perlu diperhatikan.

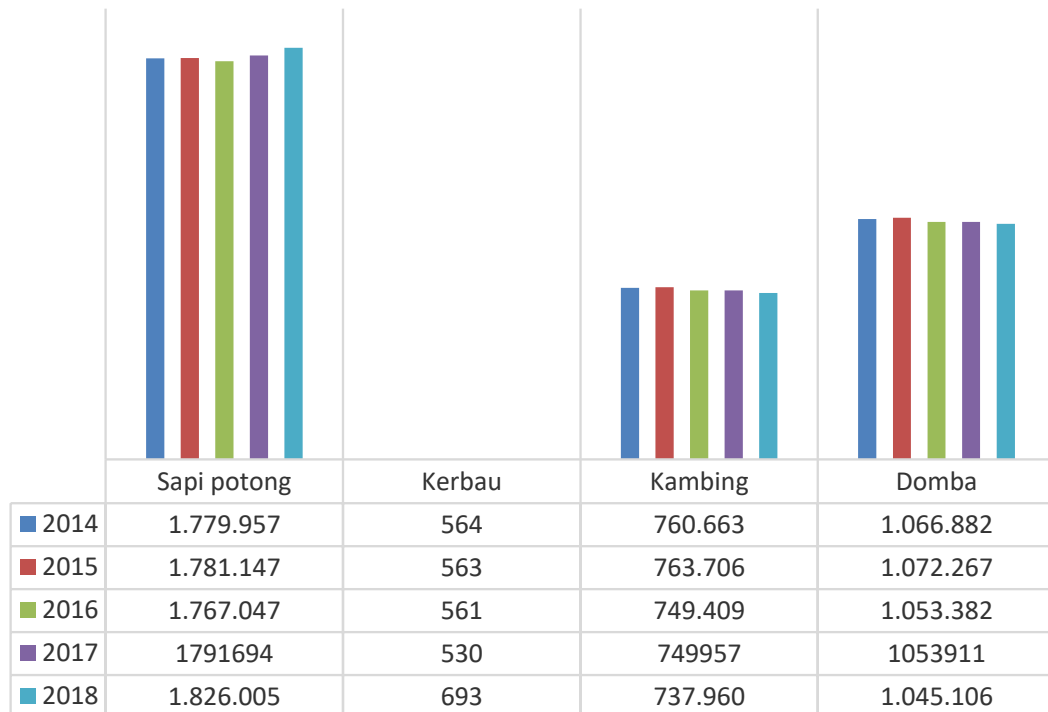


Sumber: Hasil Olahan, 2019

Gambar 2.43

Total Populasi Ternak (Ekor) Kabupaten Magelang Tahun 2014-2018

Tabel di atas menunjukkan bahwa perkembangan populasi masing-masing ternak berbeda, namun cenderung meningkat. Kenaikan jumlah populasi paling signifikan terjadi pada kambing dan domba. Populasi domba pada tahun 2017 mencapai 92.340 ekor dan disusul kambing sebanyak 87.701 ekor. Sedangkan populasi sapi potong, kerbau, dan kelinci mengalami penurunan.



Sumber: Hasil Olahan, 2019

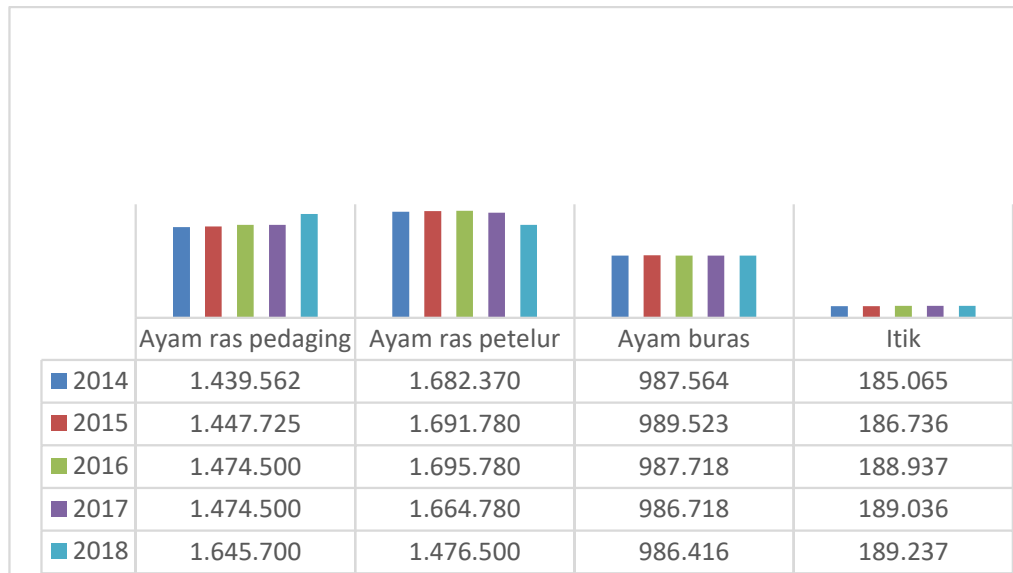
Gambar 2.44

Perkembangan Produksi Ternak (kg) Kabupaten Magelang
Tahun 2014-2018

Perkembangan jumlah produksi hewan ternak di Kabupaten Magelang cenderung meningkat untuk daging sapi dan kerbau, sedangkan untuk daging kambing dan domba, cenderung menurun. Produksi daging sapi meningkat dari 1.779,957 kg pada tahun 2014 menjadi 1.826.005 kg pada tahun 2018. Sedangkan produksi daging kerbau juga meningkat dari 564 kg pada tahun 2014 menjadi 693 kg pada tahun 2018. Sementara itu, produksi daging kambing mengalami penurunan dari 760.663 kg pada tahun 2014 menjadi 737.960 pada tahun 2018. Sama halnya yang terjadi pada produksi daging domba, menurun dari 1.006.882 pada tahun 2014 menjadi 1.045.106 pada tahun 2018.

Tidak hanya memiliki potensi peternakan ruminansia, Kabupaten Magelang juga memiliki aktivitas pertanian disektor peternakan unggas. Perkembangan populasi ternak unggas dan hasil produksinya merupakan gambaran tingkat ketersediaan sumber bahan protein

nasional. Perkembangan ternak unggas selama lima tahun terakhir relatif meningkat positif di semua jenis unggas.

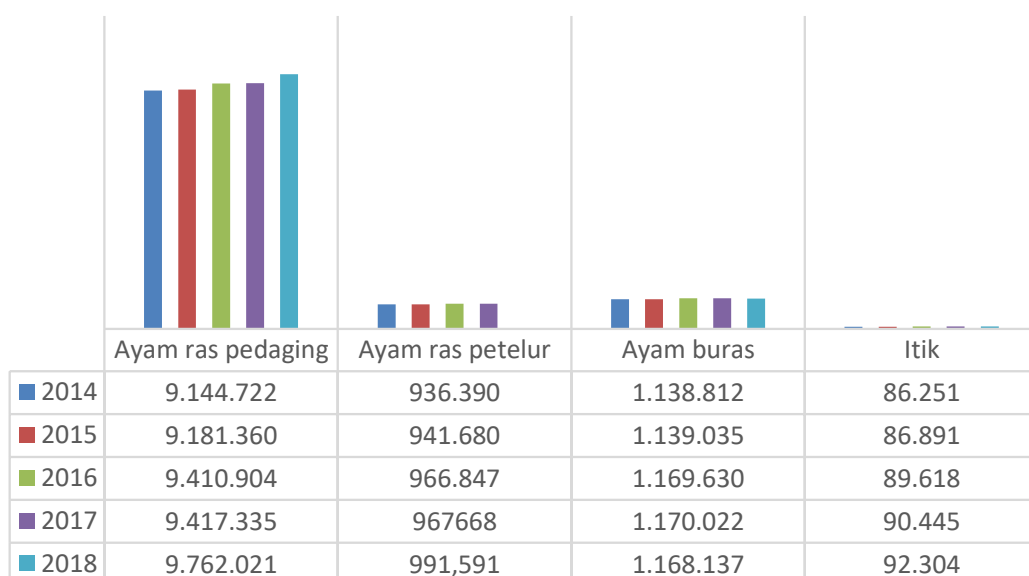


Sumber: Hasil Olahan, 2019

Gambar 2.45

Perkembangan Populasi Ternak Unggas (Ekor) Kabupaten Magelang Tahun 2014-2018

Populasi ternak unggas yang terbesar di Kabupaten Magelang adalah ayam petelur. Populasi ayam petelur mencapai 1.695.700 ekor pada tahun 2016. Angka ini disusul oleh ayam pedaging sebesar 1.474.500 ekor dan ayam kampung 987.718 ekor. Kenaikan populasi terbesar adalah ayam pedaging, sedangkan populasi burung puyuh dan angsa menurun pada tahun terakhir.

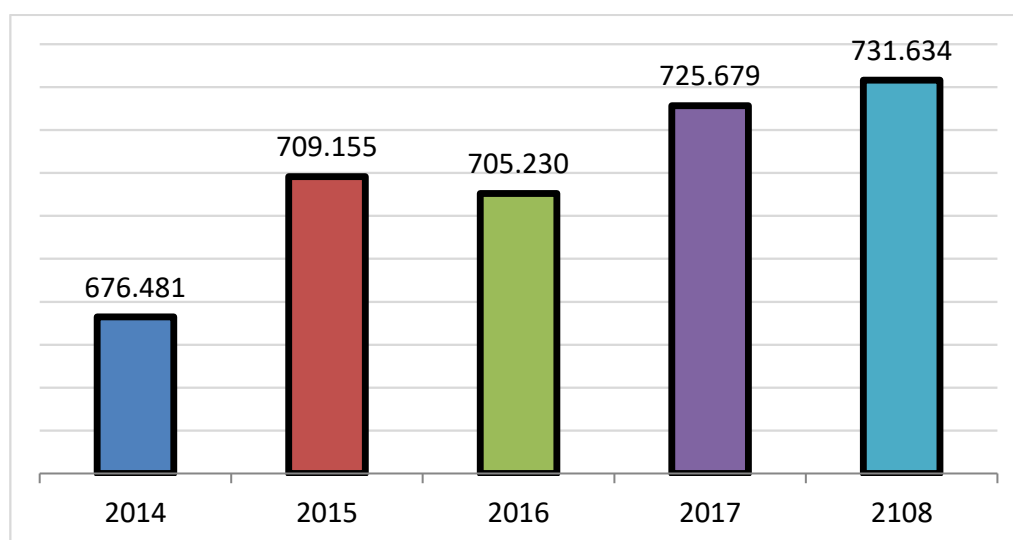


Sumber: Hasil Olahan, 2019

Gambar 2.46

Perkembangan Produksi Daging Ternak Kabupaten Magelang Tahun 2014-2018

Selain daging, manfaat yang dapat diperoleh dari ternak ruminansia adalah produksi susu segar dari sapi perah untuk melengkapi pemenuhan gizi penduduk. Selama lima tahun terakhir produksi susu segar di Kabupaten Magelang terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2012 produksi susu sapi segar mencapai 487.743 liter dan meningkat tajam di tahun 2013 hingga mencapai 662.567 liter. Angka ini terus meningkat perlahan dan kini produksi susu sapi segar telah mencapai 705.231 liter pada tahun 2016.



Sumber: Hasil Olahan, 2019

Gambar 2.47
Perkembangan Produksi Susu Sapi Perah
Kabupaten Magelang Tahun 2014-2018

f) Sumber Daya Manusia Pertanian

Kualitas sumber daya manusia pertanian dapat dilihat dari perkembangan kelas kelompok tani. Berikut disajikan perkembangan kelas kelompok tani di Kabupaten Magelang. Semakin berhasil penyuluhan yang dilaksanakan, maka semakin banyak kelompok tani dengan kelas madya dan utama.

Tabel 2.143
Perkembangan Kelas Kelompok Tani
Kabupaten Magelang Tahun 2015-2019

Kelas Kelompok	2015	2016	2017	2018	2019*
Pemula	1615	1772	1534	1599	1599
Lanjut	776	872	1125	1149	1149
Madya	111	132	99	101	101
Utama	12	17	9	9	9
Jumlah Total	2514	2793	2767	2858	2858

Sumber : Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Magelang, 2020

Kelompok tani yang menempati kelas madya dan utama masih sangat kecil dibandingkan dengan total kelompok tani yang ada. Pada tahun 2019, 55% kelompok tani masih berada pada kelas pemula, 40% pada

kelas lanjut, dan hanya 3,5% yang berada pada kelas madya serta 0,3% yang sudah berada pada kelas utama.

Keberlangsungan pembinaan kelompok tani sangat erat hubungannya dengan keberadaan tenaga penyuluh pertanian yang ada baik tenaga penyuluh ASN maupun tenaga penyuluh THL. Terdistribusinya pembinaan juga tidak lepas dari adanya penyuluh pertanian yang diterjunkan ke lapangan. Berikut ini adalah jumlah penyuluh yang ada di Kabupaten Magelang. Jumlah penyuluh swadaya lebih besar dibandingkan dengan jumlah penyuluh dari pemerintah maupun swasta.

Tabel 2.144

Jumlah Penyuluh di Kabupaten Magelang Tahun 2015-2019

No	Indikator	Satuan	2015	2016	2017	2018	2019*
	Penyuluh Pemerintah Tingkat Kabupaten	Orang	8	8	6	6	6
	Penyuluh Pemerintah Tingkat Kecamatan	Orang					
1	Penyuluh PNS	Orang	120	118	125	117	117
2	Penyuluh THL-TBPP	Orang	155	150	102	102	102
	Penyuluh Swadaya	Orang	525	525	540	540	540
	Penyuluh Swasta	Orang	42	42	42	42	42

Sumber : Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Magelang, 2020

Selama lima tahun terakhir, keberadaan tenaga penyuluhan baik di tingkat kabupaten maupun di tingkat kecamatan terus berkurang. Hal ini disebabkan banyaknya penyuluh ASN yang memasuki masa pensiun. Berlawanan dengan hal tersebut, jumlah penyuluh swadaya dan penyuluh swasta justru semakin meningkat.

d. Perdagangan

1) Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB

Perubahan klasifikasi PDRB menurut lapangan usaha tahun dasar 2000 menjadi tahun dasar 2010 turut mengubah klasifikasi subsektor perdagangan. Semula, subsektor perdagangan termasuk di dalam kategori sektor perdagangan, hotel dan restoran. Namun kini berubah menjadi sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor. Sektor ini meliputi kegiatan ekonomi di bidang perdagangan skala besar maupun eceran atau perdagangan skala masyarakat umum untuk konsumsi perorangan dan rumah tangga. Jenis barang dan jasa yang termasuk dalam kategori ini antara lain semua yang berhubungan dengan mobil dan motor, termasuk lori dan truk, hingga suku cadang dan aksesoris mobil dan motor.

Tabel 2.145

Kontribusi Sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor terhadap PDRB ADHK Kabupaten Magelang Tahun 2015-2019

Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
PDRB Kabupaten Magelang	19.855.844,24	20.882.801	20.882.801	30.339.465,47	32.490.800,51

Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
PDRB Sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor (Juta Rp)	2.833.603,46	3.006.270	3.006.270	4.119.082,07	4.455.795,40
Kontribusi (%)	14,29%	14,27%	14,40%	13,58	13,71
Pertumbuhan PDRB sektor (%)	3,99%	5,28%	6,09%	4,80	5,88

Sumber: BPS Kabupaten Magelang, 2020

Sektor perdagangan dalam PDRB merupakan sektor sekunder kedua paling besar yang berkontribusi untuk PDRB Kabupaten Magelang setelah sektor industri pengolahan. Kontribusinya terhadap PDRB Kabupaten Magelang relatif menurun secara perlahan selama lima tahun terakhir. Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB Kabupaten pada tahun 2014 mencapai 14,43% dan terus menurun hingga hanya 14,27% pada tahun 2016. Meski persentase kontribusinya terhadap total PDRB kabupaten, nilai riil PDRB sektor perdagangan tetap mengalami peningkatan. Peningkatan terbesar terjadi dari tahun 2015 ke 2016, yakni dari 2.691.442,36 juta rupiah menjadi 2.833.603,46, atau sebesar 5,28%.

2) Pasar Tertib Ukur

Untuk melindungi dan menjaga kepercayaan konsumen perlu diciptakan pasar tertib ukur. Di Kabupaten Magelang telah dilakukan penilaian terhadap pasar yang tertib ukur. Jumlah pasar yang telah menerima penghargaan tertib ukur di Kabupaten Magelang adalah sebagai berikut.

Tabel 2.146

Pasar yang Menerima Penghargaan Tertib Ukur Kabupaten Magelang Tahun 2015-2019

No	Indikator	Satuan	2015	2016	2017	2018	2019*
1	Jumlah Pasar Tertib Ukur	Unit	1	2	4	6	6
2	Jumlah Pasar	Unit	17	17	17	17	17
	Persentase	%	0	6	24	35	35

Sumber : Disdagkop UKM Kabupaten Magelang Tahun 2020

Dari sejumlah 20 unit pasar yang dikelola Pemerintah Kabupaten Magelang yang tersebar di wilayah Kabupaten Magelang. Sampai Tahun 2019 telah memiliki 6 pasar yang telah menerima penghargaan sebagai Pasar Tertib Ukur dari Kementerian Koperasi yaitu Pasar Salaman, Mungkid, Bandongan, Secang, Grabag, dan Talun. Hal ini perlu dilanjutkan karena selain untuk melindungi dan menjaga kepercayaan konsumen terhadap keakuratan timbangan dan alat ukur dalam

perdagangan, juga bisa meningkatkan pemanfaatan pasar rakyat oleh masyarakat lokal.

3) Ekspor Bersih Perdagangan

Nilai ekspor bersih perdagangan dapat menjadi salah satu indikator yang menunjukkan perkembangan kegiatan ekonomi terkait produksi barang dan perdagangan. Jika nilai ekspor bersih perdagangan positif, maka neraca perdagangan dikatakan positif atau surplus dan sebaliknya defisit.

Tabel 2.147

Ekspor Bersih Perdagangan Kabupaten Magelang Tahun 2015-2019

No	Indikator	Satuan	2015	2016	2017	2018	2019
1	Nilai Ekspor	US \$	102.372.685,5	94.310.307,20	102.981.326,5	87.180.566,41	115.629.634,19
2	Nilai Impor	US \$	1.843.877,79	1.233.499,55	1.149.602,58	1.098.663,30	17.417.125,97
3	Ekspor Bersih Perdagangan	000 US \$	88.304.242,79	100.528.807,7	101.831.724	86.081.903,11	98.212.508,22

Sumber : Disdagkop UKM Kab. Magelang Tahun 2020

Selama lima tahun terakhir, nilai ekspor bersih perdagangan Kabupaten Magelang positif atau surplus dengan trend fluktuatif, meski kenaikan ataupun penurunannya tidak signifikan. Hal ini menunjukkan Kabupaten Magelang berkontribusi positif terhadap upaya peningkatan nilai ekspor nasional.

Tabel di atas menunjukkan bahwa hingga saat ini nilai ekspor masih lebih besar dibandingkan nilai impor, meski keduanya sama-sama mengalami kenaikan dan penurunan sepanjang tahun 2015 hingga 2018. Nilai ekspor bersih secara bertahap meningkat mulai tahun 2015 dan mencapai puncaknya pada tahun 2017, yaitu sebesar US\$101.831.723,96, namun kemudian menurun kembali pada tahun 2018 dengan penurunan yang signifikan. Kenaikan dan penurunan nilai ekspor sangat dipengaruhi oleh kondisi ekonomi makro dan moneter. Saat ekonomi dunia melemah maka nilai ekspor Kabupaten Magelang menurun meskipun masih positif atau surplus.

e. Perindustrian

1) Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB

Sektor industri pengolahan merupakan sektor sekunder penyumbang terbesar dalam PDRB Kabupaten Magelang dan sektor terbesar kedua setelah sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan. Sektor industri pengolahan meliputi kegiatan ekonomi di bidang perubahan secara kimia atau fisik dari bahan, unsur atau komponen menjadi produk baru. Bahan baku industri pengolahan dapat berasal dari pertanian, kehutanan, perikanan, pertambangan, dan penggalian yang selanjutnya diolah menjadi barang yang memiliki nilai tambah. Kabupaten Magelang yang memiliki potensi alam melimpah merupakan salah satu faktor

pesatnya perkembangan industri pengolahan baik pengolahan produk pertanian, kehutanan, perikanan hingga pertambangan penggalian.

Tabel 2.148

Kontribusi Industri Pengolahan terhadap PDRB ADHK
Kabupaten Magelang Tahun 2015-2019

Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
PDRB ADHK Kabupaten Magelang	18.838.351,97	19.855.844,24	20.882.801	22.082.795,90	23.253.154,32
PDRB Kategori Industri Pengolahan (juta Rp)	3.997.570,79	4.230.032,32	4.437.345	4.682.707,22	4.966.924,89
Kontribusi terhadap PDRB (%)	21,22%	21,30%	21,25%	21,87	21,95
Pertumbuhan (%)	5,13%	5,82%	4,53%	5,34	6,07

Sumber: BPS Kabupaten Magelang Tahun, 2020

Apabila dilihat dari segi perkembangan kontribusinya terhadap PDRB dari tahun ke tahun, persentase kontribusi sektor ini memiliki kecenderungan naik, meski tidak signifikan, seiring dengan kenaikan nilai riilnya. Pada tahun 2015, kontribusi sektor industri pengolahan mencapai 21,22% dan terus naik dengan pertumbuhan rata-rata 6,06% hingga tahun 2019. Pada tahun 2019 besar nilai riil sektor industri pengolahan telah mampu mencapai 4.966.924,89 juta rupiah dan berkontribusi sebesar 21,95% terhadap total PDRB kabupaten.

2) Pertumbuhan Industri

Sama halnya dengan sektor perdagangan, sektor industri juga merupakan indikator yang dapat menggambarkan tingkatan perkembangan ekonomi suatu wilayah dilihat dari kemampuannya mengolah bahan baku dan tidak lagi bergantung pada kegiatan primer. Pada tahun 2014 jumlah industri kecil menengah di Kabupaten Magelang mencapai 38.427 unit. Angka ini terus meningkat dengan pertumbuhan terbesar pada tahun 2015, yakni naik 7,8% dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2018 jumlah industri kecil menengah di Kabupaten Magelang sudah mampu mencapai 39.712 unit. Sedangkan industri besar di Kabupaten Magelang didominasi oleh industri di sektor energi. Industri ini paling banyak berkembang di Kecamatan Tempuran, Mungkid, dan Mertoyudan. Perkembangan industri besar dan sedang selama periode tahun 2014 hingga 2016 cenderung menurun.

Tabel 2.149

Pertumbuhan Industri di Kabupaten Magelang Tahun 2015-2019

No	Indikator	Satuan	2015	2016	2017	2018	2019
1	Industri Besar	Unit	20	18	6	27	27
2	Industri Sedang*	Unit	52	39	*	*	*
3	Industri kecil	Unit	39.548	39.580	39,602	39 601	39 624
4	Industri menengah	Unit	123	132	132	144	148

No	Indikator	Satuan	2015	2016	2017	2018	2019
5	Total usaha industri kecil dan menengah	Unit	39.671	39.712	39,734	39 745	39 772
6	Pertumbuhan usaha industri kecil dan menengah	%	7,8	3,7	0,05	0,08	0,07

Sumber : Kabupaten Magelang Dalam Angka Tahun 2020

Ket: * Berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian No. 64 Tahun 2017, kategori Industri terdiri dari : Industri Kecil, Menengah dan besar.

Apabila dilihat dari skala industri, hampir 99% merupakan jenis industri kecil. Pada tahun 2016, jumlah industri kecil mencapai 39.580 dari total unit usaha sebanyak 39.712 unit. Sedangkan jumlah industri menengah hanya sebesar 132 unit atau 0,3% dari total jumlah unit usaha. Perkembangan industri yang tengah berlangsung di Kabupaten Magelang menandakan sudah adanya usaha mewujudkan kemandirian ekonomi masyarakat untuk mengurangi pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan. Tingginya pertumbuhan industri juga terbukti mampu melampaui target yang ditetapkan Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang sejak tiga tahun terakhir.

2.4.4. Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan

a. Perencanaan

Konsistensi dan akurasi perencanaan pembangunan daerah telah dilaksanakan mulai tahun 2017 dengan dukungan aplikasi yang berbasis teknologi informasi, berupa Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan (SIPPD), Sistem Informasi Usulan Masyarakat (SiUma), Sistem Informasi Daftar Usulan RKP Desa (Sidudes), Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan (SIPPD) Versi 2, Sistem Informasi Pokok Pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah/DPRD (SiPokir), Sistem Informasi Pengendalian dan Pelaporan (Sidalap). Untuk menjamin ketepatan sasaran pembangunan telah digunakan data album kemiskinan yang berbasis aplikasi sistem penanggulangan kemiskinan (Sinangkis).

Kualitas perencanaan pembangunan daerah diukur dengan kesesuaian perencanaan program yang membandingkan kesesuaian antara rencana/indikator dan realisasi pelaksanaan program dan kegiatan.

Tabel 2.150

Capaian Kesesuaian Perencanaan Program Tahun 2015-2019

No	Uraian	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Jumlah Program RKPD	184	176	165	174	155
2	Jumlah Program RPJMD	184	176	185	184	191
3	Konsistensi penjabaran program RPJMD ke dalam RKPD (%)	100	100	89,19	94,57	81,15
5	Pemenuhan dokumen perencanaan pembangunan jangka panjang dan menengah daerah (%)	100	100	100	100	100

Sumber data: Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Magelang, 2020

Dalam rangka mewujudkan perencanaan yang berkualitas perlu didukung oleh sumberdaya yang memadai, salah satunya sumber daya manusia (SDM). Berdasarkan hasil analisis kebutuhan pegawai, jumlah SDM Perencana di perangkat daerah sejumlah 10 orang, atau baru terpenuhi 45,45% dari total kebutuhan SDM perencana yang sejumlah 22 orang.

b. Keuangan

1) Opini BPK

Opini BPK merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*), kepatuhan terhadap peraturan perundangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern.

Tabel 2.151

Opini BPK di Kabupaten Magelang Tahun 2015-2019

No.	Indikator	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Opini BPK	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP
2.	Target	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP

Sumber: BPPKAD Kabupaten Magelang, 2020

Tabel diatas menunjukkan bahwa Kabupaten Magelang sejak tahun 2015 hingga 2016 selalu memperoleh opini WDP (Wajar Dengan Pengecualian) yaitu opini audit yang diterbitkan jika sebagian besar informasi dalam laporan keuangan bebas dari salah saji material, kecuali untuk rekening atau item tertentu dinilai tidak wajar. Namun, ketidakwajaran tersebut tidak mempengaruhi kewajaran laporan keuangan secara keseluruhan.

Pada tahun 2017-2019 Kabupaten Magelang bisa memperoleh opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian). Diharapkan ke depannya hal ini bisa dipertahankan dalam pelaporan keuangan dengan menggunakan prinsip akuntansi yang baik dan wajar sehingga terus memperoleh hasil WTP.

2) Persentase Peningkatan PAD

Salah satu sumber pendapatan dan belanja daerah adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pendapatan asli daerah dimasukkan kedalam sumber APBD untuk memberikan kewenangan pada pemerintah daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai wujud dari desentralisasi. PAD dapat bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan Lain-lain PAD yang sah. Lain-lain PAD yang sah terdiri dari hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga, keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, dan komisi/potongan/bentuk lain sebagai akibat dari penjualan da/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah.

Tabel 2.152
Persentase kenaikan Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Kabupaten Magelang Tahun 2015-2019

Uraian	Tahun				
	2015	2016	2017	2018	2019
Pajak daerah	88.960.021.815	97.101.522.117	112.344.030.430	124.444.072.963	156.814.683.648
Retribusi daerah	15.939.015.341	15.587.692.390	20.445.297.126	18.186.191.392	22.940.695.207
Hasil pengelolaan keuangan daerah yang dipisahkan	15.264.432.303	17.643.064.538	20.805.304.738	28.634.358.666	23.700.417.768
Lain-lain PAD yang sah	141.405.622.324	158.153.399.083	249.966.606.016	153.833.704.215	183.881.925.327
Total Pendapatan Asli Daerah	261.569.091.783	288.485.678.128	403.561.238.310	325.098.327.236	387.337,721.950
Persentase Kenaikan PAD	7,89	10,29	39,89	(19,44)	19,15

Sumber : BPPKAD Kabupaten Magelang, 2020

Sumber PAD terbesar Kabupaten Magelang adalah dari pajak daerah dan lain-lain PAD yang sah, yakni menyumbang masing-masing 40,49% dan 47,47% terhadap PAD kabupaten pada tahun 2019.

Tabel 2.153
Proporsi dan Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Kabupaten Magelang Tahun 2015-2019

Uraian	Proporsi					Rata-rata Pertumbuhan
	2015	2016	2017	2018	2019	
Pendapatan Asli Daerah						
Pajak daerah	34,01	33,66	27,84	38,28	40,49	4,33
Retribusi daerah	6,09	5,40	5,07	5,59	5,92	-15,87
Hasil pengelolaan keuangan daerah yang dipisahkan	5,84	6,12	5,16	8,81	6,12	3,43
Lain-lain PAD yang sah	54,06	54,82	61,94	47,32	47,47	-0,23

Sumber : BPPKAD Kabupaten Magelang, 2020

Pertumbuhan rata-rata PAD selama tahun 2015 hingga 2019 sudah mengalami peningkatan. Peningkatan nilai PAD tidak terlepas dari meningkatnya nilai realisasi masing-masing sumber PAD. Hampir seluruh sumber PAD juga mengalami pertumbuhan positif kecuali retribusi daerah dan lain-lain PAD yang sah.

Salah satu indikator *good governance* adalah adalah APBD yang ditetapkan tepat waktu, oleh karena itu di bawah ini disajikan penetapan APBD yang tepat waktu.

Tabel 2.154
Persentase Tahapan Penetapan APBD Tepat Waktu Kabupaten Magelang
Tahun 2015-2019

Uraian	Tahun				
	2015	2016	2017	2018	2019
Penetapan tahapan APBD Tepat Waktu	Tidak tepat waktu	Tepat waktu	Tidak tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu

Sumber : BKKPAD Kabupaten Magelang, 2020

3) Peningkatan Pengelolaan BUMD

Saat ini Pemkab Magelang mengelola 6 BUMD, dengan kepemilikan saham, sebagai berikut.

Tabel 2.155

Kepemilikan Saham BUMD di Kabupaten Magelang Tahun 2018 – 2019

No.	Nama BUMD	Kepemilikan Saham	
		2018	2019
1	PT Bank Pembangunan Daerah	0,48 %	0,92 %
2	PT PRPP	0,64 %	0,64 %
3	PD BPR BKK Muntilan	49 %	49 %
4	PD BKK Tempuran*	49 %	-
	PT BKK Jateng (Perseroda)*	-	1,43 %
5	PD BPR Bapas 69	100 %	100 %
6	PDAM Tirta Gemilang	100 %	100 %
7	PD Aneka Usaha	100 %	100 %

Sumber : Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Magelang, 2020

* Catatan:

Berdasarkan hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) PD BKK Tempuran per tanggal 2 Juli 2019 hari Selasa bertempat di Ruang Rapat Gedung B Lantai V Kantor Gubernur Jawa Tengah Jl. Pahlawan No. 9 Semarang, sudah di konsolidasi dengan 26 PD BKK se Jawa Tengah menjadi PT BKK JATENG (Perseroda). Secara akumulasi penyertaan modal sampai dengan tahun 2018 dan penerimaan deviden sampai dengan tahun 2018 sebagai berikut.

Tabel 2.156

Penyertaan Modal Dan Penerimaan Deviden BUMD di Kabupaten Magelang Tahun 2018 – 2019

No.	Nama BUMD	Akumulasi s.d 2018		2019	
		Penyertaan Modal (juta)	Penerimaan Deviden (juta)	Penyertaan Modal (juta)	Penerimaan Deviden (juta)
1	PT Bank Pembangunan Daerah	27.888,00	27.705,07	5.704,00	3.230,29
2	PT PRPP	560,00	0	0	0
3	PD BPR BKK Muntilan	9.800,00	5.762,22	0	1.000,63
4	PD BKK Tempuran	4.900,00	1.048,67	0	0
	PT BKK Jateng (Perseroda)	4.900,00	0	0	0
5	PD BPR Bapas 69	50.000,00	101.108,81	0	15.884,34
6	PDAM Tirta Gemilang	28.250,00	24.476,72	4.500,00	3.470,75
7	PD Aneka Usaha	3.100,00	382,35	0	114,10

Sumber : Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Magelang, 2020

Berdasarkan rekapitulasi laporan keuangan *audited* BUMD Kabupaten Magelang periode tahun 2015-2019. Beberapa kinerja keuangan BUMD yang mendukung peningkatan kontribusi kepada pendapatan dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 2.157
Pendapatan Usaha dan Laba Bersih BUMD 2015-2019
(Dalam Juta Rupiah)

NO	BUMD	URAIAN	TAHUN					
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	PT BPD	Pendapatan	4.261.260,00	4.967.453,00	5.673.340,00	6.563.629,00	6.875.885,00	7.600.613,00
		Laba bersih	741.848	815.176	980.770	1.191.497,00	1.249.134,00	1.053.659,00
2	PT PRPP *	Pendapatan	5.804,53	8.304,79	6.144,91	11.003,67	9.508,14	9.663,82
		Laba bersih	351,48	601,73	839,28	1.621,96	2.004,83	2.142,85
3	BPR Bank Bapas 69	Pendapatan	81.010,05	93.094,50	107.971,61	116.601,79	123.319,86	135.418,28
		Laba bersih	17.294,70	20.413,68	25.207,03	26.217,62	29.094,64	33.467,07
4	BPR BKK Muntilan	Pendapatan	16.746,51	18.452,24	19.639,25	22.000,77	23.360,44	27.350,52
		Laba bersih	3.007,71	3.203,87	3.343,65	3.390,77	3.749,36	4.141,28
5	BKK Tempuran	Pendapatan	6.144,64	6.226,50	6.908,99	8.221,36	9.640,14	0
		Laba bersih	586,94	39,13	756,89	841,15	955,87	0
	PT BKK Jateng (Perseroda)	Pendapatan	0	0	0	0	0	9.151,99
		Laba bersih	0	0	0	0	0	(2.337,68)
6	PDAM Tirta Gemilang	Pendapatan	26.040,80	34.460,95	35.646,13	38.135,56	42.136,82	46.681,70
		Laba bersih	4.590,38	4.970,96	5.052,85	5.637,93	6.185,39	7.244,53
7	Aneka Usaha	Pendapatan	2.945,75	3.512,31	3.735,68	4.740,17	5.115,75	6.629,24
		Laba bersih	107,49	158,67	168,86	329,60	250,12	204,41

Sumber : Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Magelang Tahun 2020

* Catatan:

- PT PRPP sampai dengan hasil usaha tahun 2018 belum menyetorkan deviden, laba PT PRPP digunakan untuk menutup kerugian komulatif.

Secara kinerja dan keuangan, BUMD Pemkab Magelang menunjukkan kecenderungan membaik. Hal ini ditunjukkan semakin meningkatnya beberapa aspek, yaitu keuangan, aset, pembinaan usaha baru (*startup*) dan UKM, pendapatan dan laba, serta pelayanan pemenuhan kebutuhan dasar, antara lain air bersih.

Namun untuk mencapai kinerja yang lebih tinggi, terdapat beberapa permasalahan, antara lain manajemen/pengelolaan, regulasi, SDM, modal, sinergi antar BUMD dan inovasi bisnis serta daya saing.

4) Alternatif pembiayaan non-APBD

Mengingat tingginya kebutuhan anggaran dalam mewujudkan penyediaan infrastruktur dan layanan publik lainnya serta terbatasnya anggaran yang dapat dialokasikan untuk keperluan dimaksud, maka Pemerintah Kabupaten Magelang dituntut untuk mampu mencari sumber-sumber alternatif pembiayaan lain untuk memenuhi kebutuhan pembangunan daerah.

Ada beberapa alternatif pembiayaan non-APBD yang dapat dimanfaatkan oleh pemerintah daerah dan dimungkinkan berdasarkan peraturan perundang-undangan, di antaranya skema pinjaman dan hibah, skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) dan skema penerbitan obligasi daerah.

Namun demikian, Pemerintah Kabupaten Magelang harus mempertimbangkan dan mampu menghitung kemampuan dalam menjalankan kewajiban pengembalian pembiayaan yang diperoleh dari berbagai skema dimaksud.

Skema KPBU dan Obligasi Daerah merupakan pendekatan/skema yang relatif baru dalam penyediaan infrastruktur dan layanan publik di Kabupaten Magelang, sehingga perlu dilakukan berbagai langkah strategis dalam penyiapan pengimplementasian dari sisi regulasi, kelembagaan, kapasitas SDM, dan lain-lain.

Selain skema pembiayaan yang relatif baru tersebut di atas, adapula bentuk pelibatan lain dari pihak swasta yang telah dimanfaatkan, yaitu skema Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Dunia Usaha (TSLDU)/ *Corporate Social Responsibility* (CSR).

Selain pembiayaan yang berasal dari pemerintah dan pihak swasta, terdapat potensi pembiayaan yang cukup signifikan dan belum dioptimalkan oleh pemerintah, yaitu pendanaan yang bersifat swadaya dan berasal dari komunitas/masyarakat itu sendiri. Selama ini, pola pembiayaan yang bersumber dari dana masyarakat telah banyak digunakan untuk keperluan aktivitas yang berbasis komunitas seperti pembangunan rumah ibadah, aktivitas sosial kemasyarakatan, dan lain-lain. Untuk lebih menggerakkan potensi swa-pendanaan Pemerintah Kabupaten Magelang perlu mendorong dan melakukan pembinaan melalui tokoh-tokoh masyarakat, memberikan stimulan dan apresiasi terhadap komunitas masyarakat yang mampu memberdayakan potensi yang ada di mereka untuk meningkatkan kualitas lingkungan serta kesejahteraan masyarakat setempat.

Di samping itu, masih terdapat peluang untuk mendapatkan sumber pembiayaan alternatif khususnya dari instrumen pemanfaatan ruang, seperti kewajiban Surat Izin Penunjukan Penggunaan Tanah (SIPPT) dan pengenaan kompensasi pelampauan Koefisien Lantai Bangunan (KLB) sebagai salah satu bentuk disinsentif dalam proses pemanfaatan ruang.

Tantangan utama yang dihadapi dalam pengimplementasian instrumen tersebut di atas dalam konteks sebagai alternatif pembiayaan

pembangunan adalah pengintegrasian program dan pengadministrasian ke dalam sistem perencanaan dan pengelolaan keuangan daerah.

c. Penelitian dan Pengembangan

Kelitbangan meliputi kegiatan penelitian, pengembangan, pengkajian, penerapan, perekayasa, pengoperasian serta evaluasi kebijakan. Keluaran kelitbangan sebagai berikut.

- 1) Penelitian dan pengkajian baik yang strategis, aktual dan kompetitif yang diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan rekomendasi.
- 2) Pengembangan berupa Naskah Akademik, Rancangan Regulasi, pemodelan kebijakan/program.
- 3) Perekayasa berupa Pedoman umum/teknis pelaksanaan model kebijakan/program.
- 4) Penerapan berupa uji coba model program pada daerah percontohan.
- 5) Pengoperasionalan berupa Penerapan model kebijakan/program secara lebih luas/ menyeluruh dan pendampingan.
- 6) Evaluasi Kebijakan berupa rekomendasi lanjut dengan perbaikan/dicabut/dihentikan.

Terdapat empat tahap pemanfaatan keluaran kelitbangan/proses inovasi yaitu inisiasi, internalisasi (adopsi, adaptasi, replikasi), institusionalisasi dan keberlanjutan. Sasaran inovasi berupa peningkatan layanan publik, pemberdayaan dan peran serta masyarakat serta peningkatan daya saing daerah.

Tabel 2.158
Kegiatan Kelitbangan Kabupaten Magelang Tahun 2015-2019

No	Indikator	Satuan	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Penelitian/pengkajian/evaluasi kebijakan yang dibiayai APBD Kabupaten	Buah	-	-	1	3	18
2.	Naskah akademik yang disusun	Buah	-	-	8	1	3
3.	inovasi yang didampingi	Buah	-	-	6	6	6
4	Jumlah Penelitian diluar APBD Kabupaten	Buah	411	430	450	461	471
5	Kerja sama kelitbangan	Buah	-	-	1	11	1
6	Deseminasi/penerapan	Buah	-	-	1	0	1
7	HAKI	Buah	-	-	0	2	1
8	Pameran Inovasi	Buah	-	-	2	2	2
9	Jurnal/publikasi yang diterbitkan	Edisi	-	-	2	1	1
10	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan.	%	-	-	-	66,7	100
11	Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah	%	-	-	-	0	0

Sumber : *Bappeda dan Litbangda Kabupaten Magelang, 2020*

Kegiatan kelitbangan yang dilaksanakan diharapkan dapat mendorong implementasi rencana kelitbangan di Kabupaten Magelang. Implementasi rencana kelitbangan Kabupaten Magelang sebagaimana tabel di bawah ini.

Tabel 2.159
Implementasi Rencana Kelitbangan Kabupaten Magelang
Tahun 2015-2019

No	Indikator	Satuan	2015	2016	2017	2018	2019
1	Jumlah Kelitbangan dalam RKPD	buah	-	-	1	3	3
2	Jumlah Kelitbangan dalam RPJMD	Buah	-	-	1	3	3
3	Implementasi Rencana Kelitbangan	Buah	-	-	1	3	3

Sumber : Bappeda dan Litbangda Kabupaten Magelang, 2020

Hal ini diharapkan dapat mendorong hasil kegiatan kelitbangan dalam memberikan pertimbangan perencanaan pembangunan daerah serta penerapan teknologi dan inovasi daerah.

d. Pengawasan

Peran pengawasan dalam pembangunan di Kabupaten Magelang sangat penting, karena fungsi ini sangat diperlukan dalam upaya menjamin penyelenggaraan urusan pemerintahan sesuai dengan kaidah yang ada. Fungsi pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah dilaksanakan melalui pemeriksaan, evaluasi dan reviu. Realisasi pelaksanaan fungsi pengawasan tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 disajikan pada tabel berikut ini. Trend adanya temuan pemeriksaan cenderung mengalami fluktuasi baik itu pada pemeriksaan reguler untuk PD, kasus, desa. Hal ini mengindikasikan bahwa sistem pengendalian internal sebagai bagian dari fungsi pengawasan pelaksanaan pembangunan daerah belum optimal. Untuk rata-rata jumlah temuan pemeriksaan terbanyak ada pada pemeriksaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan pemeriksaan reguler karena jumlah obyek pemeriksaan yang paling banyak yaitu desa dan PD. Capaian peningkatan Sistem Pengawasan Internal dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.160
Capaian Peningkatan Sistem Pengawasan Internal
Kabupaten Magelang Tahun 2015-2019

No	Jenis Obrik	Hasil (LHP,LHE, LHR)				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Pemeriksaan Berkala/Reguler	216	216	216	216	216
2	Pemeriksaan Khusus/ Kasus	14	62	4	7	18
3	Pemeriksaan Penyelenggara Pemerintahan Desa	110	150	160	172	172
4	Review Laporan Keuangan PD	1 LHR	2 LHR	2 LHR	8 LHR	14 LHR
6	Implementasi SPIP	1	1	10	12	15
7	Evaluasi LKJIP	15 LHE	27 LHE	24 LHE	23 LHE	23 LHE

Sumber : Inspektorat Kabupaten Magelang, 2020

Untuk Evaluasi LKjIP pada tahun 2017 dilaksanakan pada 49 PD, yang nilainya meningkat sebanyak 22 PD atau sebesar 56,41% dari total PD. Jika dibandingkan dengan evaluasi tahun sebelumnya terdapat kenaikan jumlah PD yang nilainya meningkat sebesar 46,67%. Hal ini berarti kualitas kinerja pelaporan kinerja PD semakin meningkat.

Berdasarkan data dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan dapat kita lihat bahwa penilaian BPKP terhadap perangkat daerah dapat dilihat posisi nilai maturitas SPIP Kabupaten Magelang tahun 2017 kategori terdefinisi. Sementara itu hasil penilaian Inspektorat Daerah yang dilakukan terhadap semua Perangkat Daerah pada tahun 2017 menunjukkan nilai 3,15. Nilai maturitas ini dapat diartikan bahwa Pemerintah Kabupaten Magelang telah melakukan praktik pengendalian intern, namun tidak terdokumentasi dengan baik dan pelaksanaannya tergantung pada individu, belum melibatkan semua unit organisasi. Efektifitas pengendalian ini belum dievaluasi sehingga banyak terjadi kelemahan yang belum ditangani secara memadai. Hal ini bisa dilakukan dengan meningkatkan kapabilitas APIP dan maturitas SPIP. Nilai kapabilitas APIP semakin meningkat sebagaimana tabel dibawah ini.

Tabel 2.161

Level Kapabilitas APIP dan Nilai Maturitas SPIP Tahun 2017 – 2019

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2015	2016	2017	2018	2019
1	Level Kapabilitas APIP	level	1	2-	2	2+	3
2	Nilai Maturitas SPIP		1,88	2	2,92	3	3

Sumber data : Inspektorat Kabupaten Magelang, 2020

e. Kepegawaian, pendidikan dan pelatihan

Aspek peningkatan kapasitas SDM Aparatur sebagai upaya untuk mewujudkan profesionalisme dan mendukung peningkatan pelayanan administrasi kepegawaian yang dilaksanakan melalui: Pengadaan CPNS, Pengangkatan CPNS dan PNS, serta Penyelenggaraan dan Pengiriman Diklat Penjurusan yang terdiri dari : Diklat Prajabatan dan Diklat Kepemimpinan; Diklat Teknis dan Diklat Fungsional; Pengembangan Karir yaitu Promosi dan Uji Kompetensi; Kesejahteraan Pegawai yaitu Kenaikan Pangkat, Kenaikan Gaji Berkala. Pengajian dan Pensiun.

Tabel 2.162

Kondisi PNS Kabupaten Magelang Tahun 2015–2019

No	Golongan	Tahun				
		2015	2016	2017*	2018	2019
1	I	213	185	170	145	140
2	II	1.697	1.487	1.380	1.226	1.166
3	III	4.811	4.511	4.469	4.450	4.380
4	IV	4.051	3.446	3.209	2.798	2.571
Jumlah		10.605	9.629	9.229	8.619	8.257

* Pengambilan data Tahun 2017 diambil per 1 Januari 2020

Sumber : Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Magelang, 2019

Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui bahwa terdapat penurunan jumlah PNS sejak Tahun 2015 sampai dengan 2019 dengan rata-rata penurunan tiap tahun sejumlah 587. Pada Tahun 2016 terjadi penurunan yang signifikan yaitu sejumlah 976. Adapun penyebab penurunan ini adalah PNS memasuki masa purna tugas, PNS meninggal dunia, PNS pensiun Atas Permintaan Sendiri, pengalihan PNS guru SLB dan SMA/SMK menjadi PNS Provinsi, dan adanya mutasi keluar daerah. Data selengkapnya disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.163

Komposisi Pendidikan PNS (orang)
Kabupaten Magelang Tahun 2015 – 2019

No	Pendidikan	Tahun									
		2015		2016		2017		2018		2019	
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
1	S3	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
2	S2	313	199	281	181	291	192	277	196	273	199
3	S1	2.31	3.51	1.97	3.21	1.88	3.17	1.73	3.04	1.64	2963
4	D –	302	734	270	713	232	773	222	779	198	806
5	D – II	344	583	269	483	203	405	175	370	159	327
6	D – I	42	116	32	104	30	91	23	82	17	67
7	SMA	1.07	752	977	695	912	644	795	579	775	540
8	SMP	317	24	293	21	263	19	235	17	191	14
9	SD	139	4	122	4	108	4	91	5	73	4
Jumlah		575	4.84	4.21	5.41	3.92	5.30	3.54	5.07	332	4930
		10.603		9.629		9.228		8619		8257	

Sumber : Badan Kepegawaian. Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Magelang, 2020

Pada tahun 2019 komposisi pendidikan PNS Kabupaten Magelang didominasi oleh lulusan S1/D-IV, dengan persentase sebesar 55,76%; kemudian lulusan SMA sebesar 15,93%. lulusan D-III sebesar 12,16%; lulusan D-II sebesar 5,89%; lulusan S2 sebesar 5,72%; lulusan SMP sebesar 2,48%; lulusan D-I sebesar 1,02%; serta lulusan SD sebesar 0,93%.

Tabel 2.164

Data PNS yang Mengikuti Diklat Jabatan Struktural
Kabupaten Magelang Tahun 2015–2019 (Orang)

No	Uraian	Jumlah				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Adum (Diklat Pim IV)	33	30	27	22	3
2	Spama (Diklat Pim III)	14	9	7	6	0
3	Spamen (Diklat Pim II)	3	6	-	-	0

Sumber : Badan Kepegawaian. Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Magelang, 2020

2.5 Pandemi COVID-19

Pandemi virus korona 2019–2020 atau dikenal sebagai pandemi COVID-19 adalah peristiwa menyebarnya penyakit virus korona 2019, di seluruh

dunia. Penyakit ini disebabkan oleh virus korona jenis baru yang diberi nama SARS-CoV-2. Virus ini bisa menyebar dengan cepat dan menimbulkan gejala yang bisa berujung pada kematian jika tidak ditangani dengan segera dan benar. Selain itu, belum ada anti-virus atau vaksin untuk COVID-19 ini. WHO memperkirakan masa inkubasi virus corona adalah 1-14 hari. Namun, dalam catatan WHO, di banyak kasus, masa inkubasi virus ini umumnya hanya lima hari.

Wabah COVID-19 pertama kali terdeteksi di Kota Wuhan, Provinsi Hubei, Tiongkok pada bulan Desember 2019, dan ditetapkan sebagai pandemi oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) pada 11 Maret 2020. Hingga 6 Mei 2020, kurang lebih 3.728.254 kasus COVID-19 telah dilaporkan di lebih dari 210 negara dan wilayah, mengakibatkan 258.360 orang meninggal dunia dan 1.242.575 orang sembuh.

2.5.1. Jumlah dan Sebaran COVID-19

Negara Indonesia merupakan salah satu negara yang terdampak COVID-19. Wilayah yang terdampak meliputi 335 kabupaten/kota di 34 provinsi yang tersebar di Indonesia. Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh BNPB, jumlah kasus COVID-19 terus mengalami peningkatan dari hari ke hari. Adapun jumlah kasus virus korona di Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah, dan Nasional ditunjukkan pada tabel berikut ini.

Tabel 2.165

Jumlah Kasus COVID-19 di Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2020

No	Kasus	Nasional	Jawa Tengah	Magelang
1	Positif	12071	862	30
2	Sembuh	243	199	3
3	Meninggal	2197	74	2
		5 Mei	6 Mei (14.11)	5 Mei (15.00)

Sumber : BNPB, <https://corona.jatengprov.go.id>, <https://infocorona.magelangkab.go.id/>

Kasus COVID-19 di Kabupaten Magelang pertama kali terdeteksi pada kurun waktu 16 Maret 2020 yaitu terdapat 2 (dua) orang Pasien Dalam Pengawasan (PDP) COVID-19. Jumlah kasus ini terus bertambah sehingga sampai tanggal 5 Mei 2020 terdapat 94 Orang Dalam Pengawasan (ODP), 21 Pasien Dalam Pengawasan (PDP) dan 25 orang terkonfirmasi positif COVID-19. Secara lengkap kasus COVID-19 di Kabupaten Magelang di setiap Kecamatan disajikan pada tabel di bawah ini.

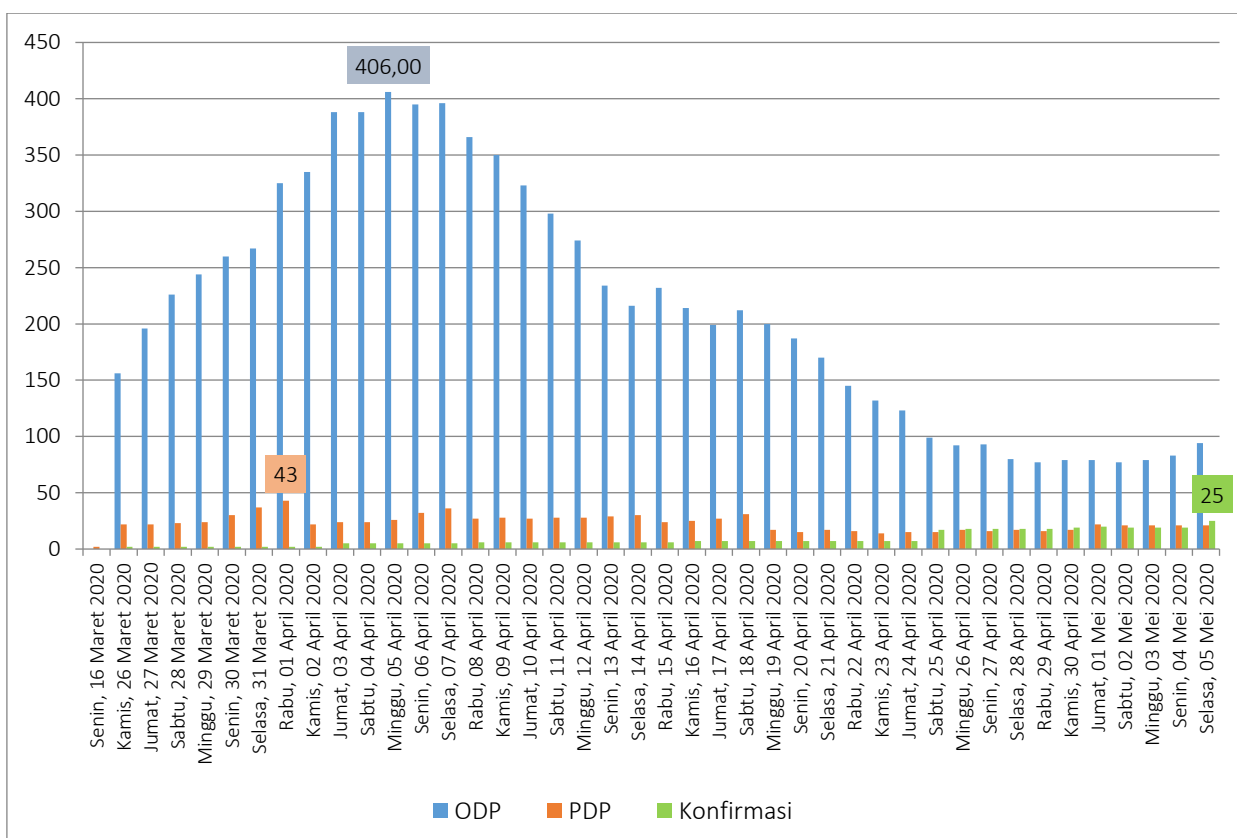
Tabel 2.166

Jumlah Kasus COVID-19 Per Kecamatan di Kabupaten Magelang Sampai Dengan Tanggal 5 Mei 2020

No	NAMA KECAMATAN	ODP	PDP	PDP Pulang Kondisi Membaik	PDP Meninggal Dunia	Konfirmasi (masih dirawat)	Konfirmasi Sembuh	Konfirmasi Meninggal
1	SALAMAN	8	0	7	0	0	1	0
2	BOROBUDUR	14	1	2	0	1	1	0

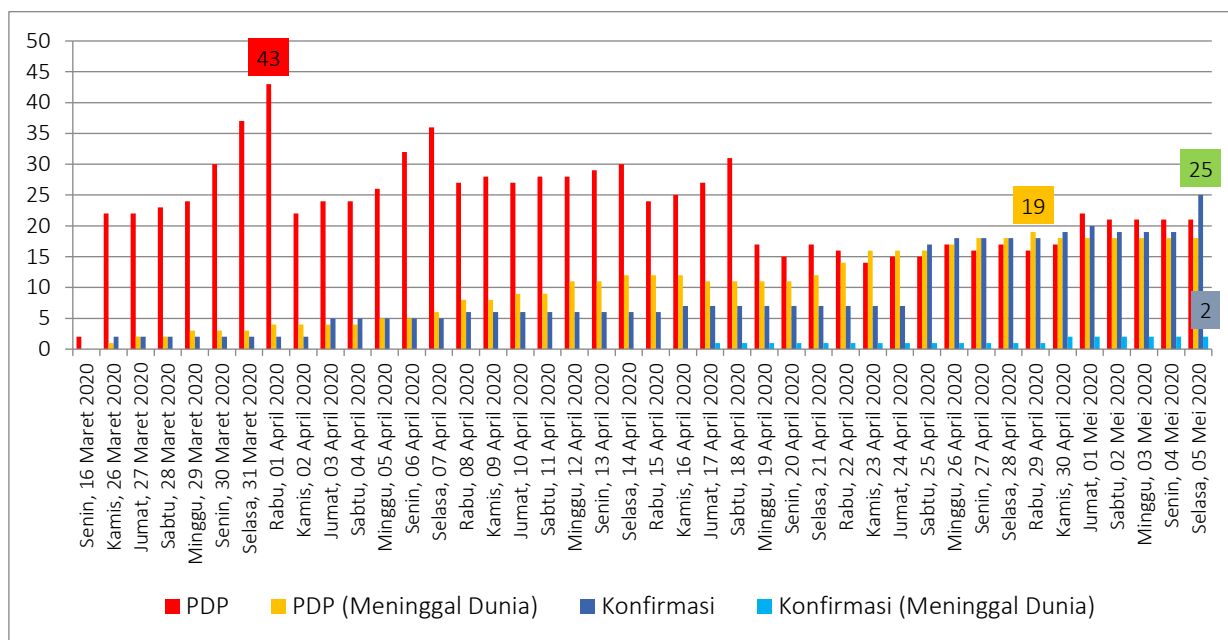
No	NAMA KECAMATAN	ODP	PDP	PDP Pulang Kondisi Membaik	PDP Meninggal Dunia	Konfirmasi (masih dirawat)	Konfirmasi Sembuh	Konfirmasi Meninggal
3	NGLUWAR	3	0	1	1	0	0	0
4	SALAM	3	0	0	1	0	0	0
5	SRUMBUNG	0	1	0	1	1	0	0
6	DUKUN	3	1	1	0	1	0	0
7	SAWANGAN	2	0	3	1	0	0	0
8	MUNTILAN	9	0	5	1	0	0	0
9	MUNGKID	1	1	8	2	0	0	0
10	MERTOYUDAN	8	4	11	3	2	0	0
11	TEMPURAN	2	0	3	1	0	0	0
12	KAJORAN	4	0	1	1	1	0	0
13	KALIANGKRIK	2	0	3	0	0	0	0
14	BANDONGAN	0	3	7	1	2	0	0
15	CANDIMULYO	10	1	8	0	6	0	0
16	PAKIS	5	0	3	0	0	0	0
17	NGABLAK	3	5	3	1	4	0	0
18	GRABAG	1	1	6	2	0	0	0
19	TEGALREJO	3	1	12	0	1	1	0
20	SECANG	11	2	14	2	6	0	2
21	WINDUSARI	2	0	1	0	0	0	0
	Total	94	21	99	18	25	3	2

Sumber : <https://infocorona.magelangkab.go.id/>

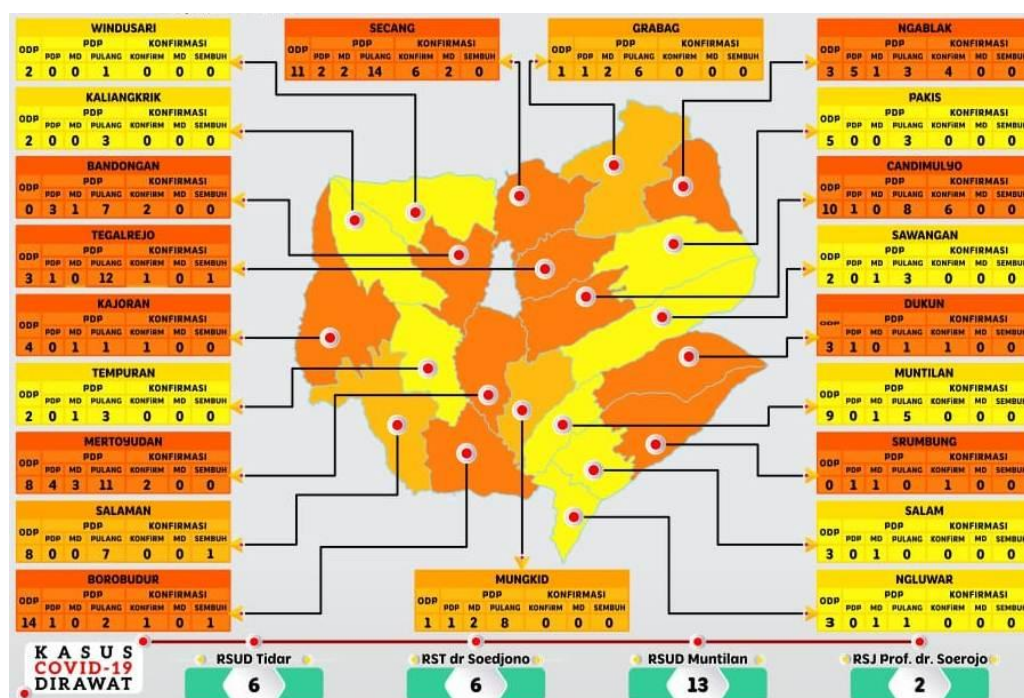


Gambar 2.48
Perkembangan Kasus COVID-19 di Kabupaten Magelang
Sampai Dengan Tanggal 5 Mei 2020

Apabila dilihat jadi jumlah kasus COVID-19, peningkatan jumlah ODP di Kabupaten Magelang bersifat fluktuatif dengan jumlah terbanyak adalah pada tanggal 5 April 2020 yaitu sebanyak 406 ODP. Adapun untuk jumlah PDP telah terjadi penambahan yang cukup signifikan dari 2 orang PDP pada awal ditemukan kasus di Kabupaten Magelang menjadi 21 orang PDP pada tanggal 5 Mei 2020. Sementara itu, jumlah orang yang tenkonfirmasi/positif COVID-19 pada tanggal 5 Mei 2020 sebanyak 25 orang. Berikut ini ditampilkan grafik perkembangan jumlah ODP, PDP dan Konfirmasi COVID-19.



Gambar 2.49
Perkembangan Jumlah PDP dan Terkonfirmasi COVID-19 di Kabupaten Magelang Sampai Dengan Tanggal 5 Mei 2020



Gambar 2.50
Sebaran Kasus COVID-19 di Kabupaten Magelang Sampai Dengan Tanggal 5 Mei 2020

Pada gambar di atas kasus COVID-19 di Kabupaten Magelang telah menyebar di seluruh Kecamatan. Data pada tanggal 5 Mei 2020, Kecamatan dengan jumlah ODP terbanyak adalah Kecamatan Borobudur yaitu 14 orang, dan Kecamatan dengan PDP terbanyak adalah Kecamatan Ngablak yaitu 5 orang.

2.5.2. Penyediaan Jaring Pengaman Sosial (Social Safety Net)

Penyediaan Jaring Pengaman Sosial (JPS) berupa pemberian Hibah Bansos dalam bentuk uang dan/atau barang dari pemerintah daerah secara memadai terutama ke pada individu/masyarakat yang terdampak atau memiliki resiko sosial seperti keluarga miskin, pekerja sektor informal/harian dan individu/masyarakat lainnya yang memiliki resiko sosial akibat terdampak COVID-19.

Pemberian JPS untuk Program Perlindungan Sosial diutamakan menggunakan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yaitu sistem data elektronik yang memuat informasi sosial, ekonomi, dan demografi dari sekitar 99 juta individu dengan status kesejahteraan terendah di Indonesia. DTKS digunakan untuk memperbaiki kualitas perencanaan program, memperbaiki penggunaan anggaran, dan sumber daya program perlindungan sosial. Dengan menggunakan data dari DTKS, jumlah dan sasaran penerima manfaat program dapat dianalisa sejak awal perencanaan program. Hal ini akan membantu mengurangi kesalahan dalam penetapan sasaran program perlindungan sosial.

Berdasarkan DTKS, di Kabupaten Magelang terdapat 590.328 jiwa/173.447 KK penduduk miskin. Sejumlah 141.922 KK mendapat bantuan berupa program sembako yang terdiri dari 84.507 KK sudah menerima bantuan dan sejumlah 57.415 KK merupakan data tambahan yang saat ini sudah dalam proses pencetakan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS). Dengan demikian masih terdapat KK miskin dalam DTKS yang belum menerima JPS sebanyak 31.525 KK. Skenario pemberian JPS kepada KK miskin ini sebanyak 15.292 KK akan mendapat Bantuan Sosial Tunai (BST) dan sebanyak 16.233 KK telah diusulkan ke APBD Provinsi Jawa Tengah namun belum ada keputusan. Apabila tidak terakomodasi dengan bantuan APBD Provinsi Jawa Tengah maka sepenuhnya akan dibiayai melalui APBD Kabupaten Magelang melalui program bantuan sembako Rp 200.000,- selama 9 bulan atau dengan skenario BST sebesar Rp. 600.000,- x 3 bulan.

Data Non DTKS berdasarkan usulan desa/ kelurahan yang telah masuk dalam data base Dinsos Provinsi Jawa Tengah ada sebanyak 114.000 KK. Pemerintah Provinsi akan membantu 57.000 KK dengan bantuan sebesar Rp. 200.000,-/ bulan selama 3 bulan. Agar terdapat kesamaan dalam penerimaan bantuan sebesar Rp. 600.000,-/ bulan maka Pemerintah Kabupaten Magelang mengalokasikan tambahan anggaran sebesar Rp. 400.000,-/bulan selama 3 bulan. Adapun sisanya sebanyak 57.000 KK penanganannya direncanakan melalui Dana Desa sebesar Rp. 600.000,-/bulan selama 3 bulan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri

Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020.

Pada dasarnya ketentuan dalam penyaluran JPS baik melalui program PKH, Sembako/BPNT, BST, Kartu Prakerja dan BLT DD tidak terjadi duplikasi. Penerima manfaat diutamakan masuk dalam DTKS dan bagi yang belum agar diusulkan masuk DTKS melalui musyawarah desa.

2.5.3. Dampak Ekonomi

Pandemi COVID-19 yang terjadi saat ini menyebabkan munculnya dampak ekonomi baik secara global dan nasional termasuk juga bagi Kabupaten Magelang. Pada awalnya, Pandemi COVID-19 hanya mempengaruhi sisi eksternal perekonomian berupa kenaikan harga produk-produk impor dari China. Namun seiring dengan menyebarnya virus secara cepat, maka kestabilan ekonomi menjadi ikut terdampak yang disebabkan oleh pertumbuhan ekonomi yang melambat, meningkatnya pengangguran akibat pemutusan hubungan kerja (PHK) dan penurunan daya beli masyarakat.

Kebijakan pemerintah pusat yang disampaikan pada konferensi pers 16 Maret 2020 oleh Bapak Presiden, bahwa untuk menghambat penularan COVID-19 adalah dengan mengurangi mobilitas orang dari satu tempat ke tempat yang lain, menjaga jarak, dan mengurangi kerumunan orang yang membawa risiko lebih besar pada penyebaran COVID-19. Hal ini tentunya membawa konsekuensi pada kondisi perekonomian. Guncangan akibat pandemi COVID-19 telah mempengaruhi sisi permintaan dan penawaran. Dari sisi permintaan, terjadinya praktek social distancing membuat keleluasaan untuk mengonsumsi barang akan menurun yang berimplikasi pada menurunnya permintaan barang tersebut. Akibatnya, perusahaan tidak memperoleh pendapatan yang maksimal dan berusaha menurunkan biaya produksinya salah satunya dengan melakukan PHK. Sebaliknya dari sisi penawaran, penurunan permintaan konsumsi barang menyebabkan produksi menjadi terganggu, pabrik menurunkan atau bahkan menghentikan produksinya sehingga pabrik-pabrik tutup dan banyak orang yang kehilangan pekerjaan.

Di Kabupaten Magelang, pandemi COVID-19 telah benar-benar dirasakan membawa dampak negatif dari sisi perekonomian. Sektor-sektor strategis yang menjadi penggerak roda perekonomian di Kabupaten Magelang adalah sektor-sektor yang paling rentan terkena dampak yaitu sektor pariwisata, perdagangan dan industri, pertanian dan peternakan, serta usaha kecil dan menengah. Pembatasan mobilitas orang sebagaimana arahan Presiden menyebabkan penurunan aktivitas wisata baik wisatawan nusantara maupun mancanegara. Hal ini menyebabkan penurunan kunjungan pada tempat wisata, hotel, dan restoran. Beberapa hotel di Kabupaten Magelang sudah mengurangi jumlah pegawainya bahkan ada yang menghentikan sementara aktivitasnya. Beberapa tempat wisata juga

ditutup sementara untuk mengurangi potensi penyebaran COVID-19 termasuk tempat wisata Candi Borobudur.

Sektor pariwisata merupakan sektor yang mempunyai rantai ekonomi paling panjang dan melibatkan manusia. Satu destinasi wisata mampu menggerakkan sektor lain seperti perdagangan, hotel, restoran, transportasi domestik, jasa pemandu wisata, hingga maskapai penerbangan. Jika destinasi wisata ditutup, maka sektor-sektor ini yang akan terkena dampak lanjutan. Lebih jauh lagi, sektor perdagangan, hotel dan restoran yang terdampak penurunan aktivitas wisata akan mempengaruhi sektor lain berupa penurunan permintaan terhadap hasil pertanian dan peternakan.

Di Kabupaten Magelang, data masyarakat terdampak pandemi COVID-19 pada sektor pariwisata yang berhasil dihimpun meliputi pelaku usaha pariwisata sebanyak 1.200 dan pelaku usaha ekonomi kreatif sebanyak 237 orang. Adapun pada sektor UKM, terdapat 824 UKM yang telah ber Nomor Induk Berusaha (NIB) dan ber Ijin Usaha Mikro Kecil (IUMK). Masyarakat terdampak di sektor ekonomi inilah yang nantinya direncanakan mendapat bantuan dari Pemerintah yang dapat berupa uang, sembako, maupun bantuan padat karya.

2.6 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun 2019 dan Realisasi RPJMD



2.6.1. Aspek Kesejahteraan Masyarakat




Kinerja pembangunan Aspek Kesejahteraan Masyarakat ditunjukkan dengan 10 indikator kinerja. Pada tahun 2019, jika diukur dari target indikator RPJMD, dari 10 indikator tersebut sebanyak 3 indikator berstatus tercapai, 3 indikator berstatus akan tercapai, dan 4 indikator berstatus perlu kerja keras. Data selengkapnya disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 2.167

Capaian Kinerja Aspek Kesejahteraan Masyarakat

No.	Program dan Indikator Kinerja Program	Target RPJMD 2014-2019	Target RKPD 2019	Realisasi Tahun 2019	Kinerja RPJMD s.d Tahun 2019	Status*	OPD
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Angka Usia Harapan Hidup	70,56	70,56	73,56	104		Setda
2	Indeks Gini**	0,295	0,295	0,361	81		Setda
3	Indeks Williamson (Indeks Ketimpangan Regional)	0,4046	0,4046	0,447	98		Setda
4	Persentase penduduk miskin**	8,00	8,00	10,67	75		Setda
5	IPM	75,94	75,94	77,96	102		Setda
6	Pertumbuhan PDRB	6,4 – 7,1	6,4 – 7,1	5,30	83		Setda
7	PDRB per kapita	15,06	15,06	25,18	167		Setda
8	Laju inflasi	4±1	4±1	2,12	142		Setda
9	Rasio penduduk yang bekerja	97,97	97,97	96,76	99		Setda
10	Angka kriminalitas per sepuluh ribu penduduk	1,45	1,45	2,04	70		Setda

No.	Program dan Indikator Kinerja Program	Target RPJMD 2014-2019	Target RKPD 2019	Realisasi Tahun 2019	Kinerja RPJMD s.d Tahun 2019	Status*	OPD
1	2	3	4	5	6	7	8
11	Angka melek huruf	93,95	93,95	95,03	101,15		Disdikbud
12	Angka rata-rata lama sekolah	10,00	10,00	7,77	77,70		Disdikbud

Status* :  : Tercapai;  : Akan Tercapai;  : Perlu Kerja Keras

Indikator berstatus perlu kerja keras untuk mencapainya yaitu indeks gini, pertumbuhan PDRB, persentase penduduk miskin dan Angka kriminalitas. Faktor penghambat belum tercapainya indikator pertumbuhan PDRB adalah:

- Adanya penurunan investasi yang ditunjukkan dalam angka Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB). Pada tahun 2014 PMTB sebesar 26,96%, terus menurun menjadi 29,27% pada tahun 2018.
- Adanya penurunan *Incremental Capital Output Ratio* (ICOR). Pada tahun 2013 ICOR Kab. Magelang sebesar 4,47 menurun menjadi 5,45 pada tahun 2017.




Faktor penghambat belum tercapainya indikator kinerja persentase penduduk miskin adalah:

- Data base kemiskinan belum sepenuhnya digunakan dalam penanggulangan kemiskinan.
- Penanggulangan kemiskinan belum memaksimalkan integrasi berbagai sektor dan stakeholder yang terkait, sehingga hasil yang diperoleh kurang maksimal.
- Kenaikan biaya hidup masyarakat yang tidak diimbangi dengan kenaikan pendapatan masyarakat khususnya kaum petani.

2.6.2. Aspek Daya Saing

Kinerja pembangunan aspek daya saing ditunjukkan dengan 9 indikator kinerja. Pada tahun 2019 jika diukur dari target indikator RPJMD, dari 9 indikator kinerja program pada aspek daya saing, 8 indikator berstatus tercapai dan 1 indikator berstatus akan tercapai. Data selengkapnya disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 2.168
Capaian Kinerja Aspek Daya Saing

No	Program dan Indikator Kinerja Program	Target RPJMD 2014-2019	Target RKPD 2019	Realisasi	Kinerja RPJMD s.d Tahun 2019 (%)	Status*	OPD
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Pengeluaran konsumsi rumah tangga	38,38	38,38	57,70	150		Setda
2	Pengeluaran konsumsi non pangan per kapita	37,03	37,03	47,11	127		Setda
3	Nilai tukar petani	106,99	106,99	102,83	96		Setda

No	Program dan Indikator Kinerja Program	Target RPJMD 2014-2019	Target RKPD 2019	Realisasi	Kinerja RPJMD s.d Tahun 2019 (%)	Status*	OPD
1	2	3	4	5	6	7	8
4	Rasio Panjang Jalan Per Jumlah Kendaraan	0,0017	0,0017	0,0023	135,29	●	Setda
5	Persentase Rumah Tangga (RT) yang Menggunakan Air Bersih	76,80	76,80	87,89	114,44	●	Setda
6	Luas Wilayah Industri	0,37	0,37	0,37	100	●	Setda
7	Lama Proses Perijinan (Hari)	9	9	9	100	●	Setda
8	Opini BPK 'WTP'	WTP	WTP	WTP	100	●	Setda
9	Nilai AKIP	B	B	B	100	●	Setda

Status* : ● : Tercapai; ► : Akan Tercapai; ▼ : Perlu Kerja Keras

Faktor pendorong tercapainya 8 (delapan) indikator kinerja pembangunan aspek daya saing adalah:

- Faktor yang mendorong peningkatan daya saing adalah yakni ekonomi makro, infrastruktur, keuangan dan institusi publik.
- Infrastruktur yang termasuk ke dalam proyek Asian Games lalu dan proyek pemerintah pusat lainnya itu ternyata memberikan dampak yang signifikan.

Faktor penghambat belum tercapainya indikator kinerja persentase nilai tukar petani adalah:

- Penyebab belum tercapainya target NTP adalah berkurangnya indeks yang diterima (harga hasil produksi pertanian) dan meningkatnya indeks yang dibayarkan (harga faktor produksi pertanian). Dengan kata lain, hasil jual pertanian yang didapat berkurang, sehingga penerimaan terpengkas. Bisa disebabkan oleh turunnya harga, maupun turunnya volume penjualan. Dan/atau, sarana produksi pertanian meningkat harganya, sehingga pengeluaran petani bertambah.

2.6.3. Aspek Pelayanan Umum

2.6.3.1. Fokus Layanan Urusan Wajib Pelayanan Dasar

2.6.3.1.1. Pendidikan

Kinerja pembangunan urusan pendidikan ditunjukkan dengan 23 indikator kinerja. Pada tahun 2019, jika diukur dari target indikator RPJMD, dari 23 indikator tersebut sebanyak 12 indikator berstatus tercapai, 5 indikator berstatus akan tercapai, dan 3 indikator berstatus perlu kerja keras, sedangkan 3 indikator lainnya belum tersedia data. Data selengkapnya disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 2.169
Capaian Kinerja Urusan Pendidikan

No	Program dan Indikator Kinerja Program	Target RPJMD 2014-2019	Target RKPDP 2019	Realisasi Tahun 2019	Kinerja RPJMD s.d. Tahun 2019	Status*	OPD
1	2	3	4	5	6	7	8
1	APK PAUD	54,54	54,54	62,73	115,02		Disdikbud
2	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/ MI/Paket A	97,09	97,09	98,97	101,94		Disdikbud
3	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B	82,65	82,65	78,02	94,40		Disdikbud
4	Angka Partisipasi Murni (APM)) SMA/SMK/MA/Paket C	66,56	66,56	81,42	122,33		Kewenangan Provinsi
5	Angka Partisipasi Kasar SD/MI/ Paket A	101,84	101,84	105,30	103,40		Disdikbud
6	Angka Partisipasi Kasar SMP/MTs/ Paket B	97,56	97,56	91,60	93,89		Disdikbud
7	Angka Partisipasi Kasar SMA/SMK/MA/Paket C	80,00	80,00	87,64	109,55		Kewenangan Provinsi
8	Angka Putus Sekolah SD/MI **	0,14	0,14	0,05	167,86		Disdikbud
9	Angka Putus Sekolah SMP/MTs **	0,57	0,57	0,19	166,67		Disdikbud
10	Angka Putus Sekolah SMA/SMK/MA **	0,81	0,81	NA	NA		Kewenangan Provinsi
11	Angka Kelulusan (AL) SD/MI	99,98	99,98	99,99	100,01		Disdikbud
12	Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	99,99	99,99	99,79	99,80		Disdikbud
13	Angka Kelulusan (AL) SMA/ SMK/MA	99,98	99,98	NA	NA		Kewenangan Provinsi
14	Rerata Nilai UN SD/MI	7,75	7,75	7,60	98,06		Disdikbud
15	Rerata Nilai UN SMP/ MTs	6,49	6,49	5,80	89,37		Disdikbud
16	Rerata Nilai UN SMA/ MA/SMK	7,18	7,18	6,70	3,31		Kewenangan Provinsi
17	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	88,00	88,00	93,63	106,40		Disdikbud
18	Angka melanjutkan (AM) SD/MI ke SMP/MTs	89,62	89,62	89,62	109,07		Disdikbud
19	Angka melanjutkan (AM) SMP/MTs ke SMU/ MK/MA	71,55	71,55	71,55	108,36		Kewenangan Provinsi
20	Persentase ruang kelas sesuai SNP SD/SDLB /MI	86,74	86,74	86,74	97,08		Disdikbud
21	Persentase ruang kelas sesuai SNP SMP/MTS	91,43	91,43	91,43	92,05		Disdikbud

Status* : : Tercapai; : Akan Tercapai; : Perlu Kerja Keras

Faktor pendukung tercapainya indikator kinerja program urusan pendidikan adalah:

- a. Keseriusan dari Pemerintah Daerah dalam mendukung urusan pendidikan.
- b. Koordinasi serta kerjasama yang baik dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait.
- c. Adanya regulasi terkait Dana Alokasi Khusus (DAK) sehingga DAK dan Silpa DAK dapat dimanfaatkan dan dialokasikan dengan baik.
- d. Kerjasama dan peran aktif berbagai stakeholder pendidikan dalam menangani pendidikan di Kabupaten Magelang
- e. Semangat dan etos kerja yang tinggi dari jajaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Magelang

Adapun faktor penghambat tidak tercapainya indikator kinerja program, khususnya tidak tercapainya target APM dan APK adalah:

- a. Anak yang berusia diluar usia sekolah jenjang tertentu yang bersekolah pada jenjang tertentu.
- b. Belum meratanya kualitas pendidikan di kecamatan-kecamatan.
- c. Pembiayaan melalui BOSDA relatif masih rendah.
- d. Anak usia sekolah yang tidak sekolah dan angka putus sekolah cukup tinggi .
- e. Anak usia sekolah Kabupaten Magelang yang bersekolah di luar Kabupaten Magelang cukup banyak.
- f. Regulasi yang membatasi penghitungan APK dengan sekat kewilayahan.

Faktor penghambat belum tercapainya indikator program terkait nilai UN adalah:

- a. Belum optimalnya proses belajar mengajar di sekolah.
- b. Keterbatasan kualitas dan kuantitas tenaga pendidik dan kependidikan.
- c. Keterbatasan sarana dan prasarana pendidikan.
- d. Partisipasi orangtua dan masyarakat kurang optimal.











Tindak lanjut yang akan dilaksanakan untuk mengatasi hambatan dan mempertahankan faktor pendorong adalah:




- a. Peningkatan mutu pendidikan di semua komponen (8 standar nasional pendidikan).
- b. Penyediaan dan penambahan sarana dan prasarana pendidikan.
- c. Peningkatan partisipasi stakeholders lain dan masyarakat untuk memajukan pendidikan di Kabupaten Magelang.

2.6.3.1.2. Kesehatan

Kinerja pembangunan urusan kesehatan ditunjukkan dengan 10 indikator kinerja, Pada tahun 2019, jika diukur dari target indikator RPJMD, dari 10 indikator tersebut sebanyak 6 indikator berstatus tercapai, 4 indikator berstatus perlu kerja keras. Data selengkapnya disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 2.170
Capaian Kinerja Urusan Kesehatan

No.	Program dan Indikator Kinerja Program	Target RPJMD 2014-2019	Target RKPD 2019	Realisasi Tahun 2019	Kinerja RPJMD s.d Tahun 2019	Status*	OPD
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Kasus Kematian Ibu Melahirkan	11	11	8	127.27		Dinkes
2	Angka Kematian Bayi (AKB)	6,50	6,50	8.33	71.85		Dinkes
3	Persentase Balita Gizi Buruk	0,15	0,15	0.02	71.85		Dinkes
4	Angka Kematian Balita Per 1000 Kelahiran Hidup	8,00	8,00	8.98	87.75		Dinkes
5	Cakupan Penemuan Dan Penangan-an Penderita Penyakit DBD	100	100	100	100.00		Dinkes
6	Cakupan Desa/ Kelurahan Universal Child Immuni-zation (UCI)	100	100	100	100.00		Dinkes
7	Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan	100	100	100	100.00		Dinkes
8	Cakupan Penemuan Dan Penanganan Penderita Penyakit TBC BTA	90,00	90,00	100	111.11		Dinkes
9	Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat Miskin	100	100	95	95.00		Dinkes
10	Cakupan Kunjungan Bayi	95,00	95,00	97.26	102.38		Dinkes

Status* :  : Tercapai;  : Akan Tercapai;  : Perlu Kerja Keras

Dalam hal menekan angka kematian ibu melahirkan, Kabupaten Magelang sudah berhasil mencapai target SDGs. Hal ini ditunjukkan dengan jumlah kasus kematian ibu di Kabupaten Magelang sebesar 11, jauh dibawah target SDGs yaitu sebesar 70. Beberapa indikator lain juga menunjukkan tren yang semakin baik antara lain angka kematian bayi, persentase balita gizi buruk, Angka Kematian Balita Per 1000 Kelahiran Hidup dan cakupan kunjungan bayi.

Faktor pendukung tercapainya indikator kinerja program urusan kesehatan adalah:

- a. Komitmen dari pemerintah kabupaten untuk memajukan pelayanan kesehatan untuk masyarakat Kabupaten Magelang.
- b. Ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai.
- c. Ketersediaan anggaran yang cukup, baik yang bersumber dari APBD Kabupaten Magelang maupun anggaran DAK.

Faktor penghambat tidak tercapainya indikator kinerja urusan kesehatan adalah:

- a. Belum optimalnya keterlibatan pemangku kepentingan lain dalam pembangunan sector kesehatan, khususnya masyarakat sendiri.




- b. Pemerataan sarana dan prasarana kesehatan belum optimal.
- c. Masih kurangnya SDM sector kesehatan, baik secara kualitas maupun kuantitas.
- d. Masih rendahnya tingkat pendidikan masyarakat, khususnya yang berada di daerah pelosok.
- e. Belum optimalnya akses pelayanan kesehatan.




2.6.3.1.3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

2.6.3.1.3.1. Pekerjaan Umum

Kinerja urusan pekerjaan umum ditunjukkan dalam 3 indikator. Pada tahun 2019, jika diukur dari target indikator RPJMD, dari 3 indikator tersebut semua indikator sudah berstatus tercapai. Data selengkapnya disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 2.171
Capaian Kinerja Urusan Pekerjaan Umum

No.	Program dan Indikator Kinerja Program	Target RPJMD 2014-2019	Target RKPD 2019	Realisasi Tahun 2019	Kinerja RPJMD s.d Tahun 2019	Status	OPD
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Panjang Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Baik	69,73	69,73	74,79	107,26		DPUPR
2	Luas Jaringan Irigasi	30,57	30,57	65,43	214,03		DPUPR
3	Luas Irigasi Kabupaten Dalam Kondisi Baik	67,40	67,40	67,799	100,59		DPUPR


Status* :  : Tercapai;  : Akan Tercapai;  : Perlu Kerja Keras




Faktor pendukung tercapainya indikator kinerja program urusan pekerjaan umum adalah bahwa urusan pekerjaan umum merupakan salah satu program prioritas Bupati periode tahun 2014-2019. Oleh karena itu, banyak sumber daya yang diarahkan untuk mencapai target indikator kinerja. Selain itu, Perangkat Daerah yang menangani urusan pekerjaan umum melaksanakan kegiatan dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia dengan efektif dan efisien sehingga hasil kinerja melampaui target.

2.6.3.1.3.2. Penataan Ruang

Kinerja urusan penataan ruang ditunjukkan dalam 7 indikator. Pada tahun 2018, jika diukur dari target indikator RPJMD, dari 7 indikator tersebut sebanyak 4 indikator berstatus tercapai, 1 indikator berstatus akan tercapai, dan 2 indikator berstatus perlu kerja keras. Data selengkapnya disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 2.172
Capaian Kinerja Urusan Penataan Ruang

No.	Program dan Indikator Kinerja Program	Target RPJMD 2014-2019	Target Tahun 2019	Realisasi Tahun 2019	Kinerja RPJMD s.d Tahun 2019	Status	OPD
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Ruang Terbuka Hijau Perkotaan Per Satuan Luas Wilayah Target	>30	>30	39,27	100		DPUPR
2	Rasio Bangunan Ber- IMB Per Satuan Bangunan	4,00	4,00	3,6	90		DPUPR
3	Ruang Publik yang Berubah Peruntukannya	0	0	0	100		DPUPR
4	Luas Kawasan Lindung (ha)	25,886	25.886	25.886	100		DPUPR
5	Luas Kawasan Budidaya (ha)	82,687	82.687	82.687	100		DPUPR
6	Jumlah IMB Yang Dikeluarkan	676	676	432	63,90		DPUPR
7	Tersedianya Informasi Mengenai Rencana Tata Ruang (RTR) Wilayah Kabupaten/Kota Beserta Rencana Rincinya Melalui Peta Analog Dan Peta Digital	38	38	35	92,11		DPUPR

Status* :  : Tercapai;  : Akan Tercapai;  : Perlu Kerja Keras




Faktor pendorong tercapainya indikator kinerja program urusan penataan ruang adalah konsistensi Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan regulasi penataan ruang. Faktor penghambat tidak tercapainya indikator kinerja urusan penataan ruang adalah sebagai berikut:


1. Belum optimalnya sosialisasi fungsi IMB kepada masyarakat.
2. Belum selesainya revisi perda 5 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Magelang.

2.6.3.1.3.3. Perumahan dan Kawasan Pemukiman

Kinerja urusan perumahan ditunjukkan dalam 3 indikator. Pada tahun 2019 jika diukur dari target indikator RPJMD, dari 3 indikator tersebut sebanyak 2 indikator berstatus tercapai dan 1 indikator berstatus perlu kerja keras. Data selengkapnya disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 2.173
Capaian Kinerja Urusan Perumahan

No.	Program dan Indikator Kinerja Program	Target RPJMD 2014-2019	Target Tahun 2019	Realisasi Tahun 2019	Kinerja RPJMD s.d Tahun 2019	Status	OPD
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Rumah Tangga Ber-Sanitasi (%)	84,20	84,20	96,10	114,13		DPRKP
2	Lingkungan Pemukiman Kumuh (%)	2,45	2,45	2,16	114,84		DPRKP
3	Rumah Layak Huni (%)	85,00	85,00	51	60		DPRKP

Status* :  : Tercapai;  : Akan Tercapai;  : Perlu Kerja Keras

Faktor yang mendukung indikator kinerja persentase lingkungan pemukiman kumuh adalah telah tersusunnya dokumen Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman kumuh Perkotaan (RP2KPKP) serta adanya bantuan fisik penanganan permukiman kumuh melalui APBN dan APBD Provinsi.

Faktor pendukung tercapainya indikator kinerja persentase rumah tangga bersanitasi adalah adanya kolaborasi yang baik dalam penyediaan sarana sanitasi dari berbagai pihak baik pemerintah daerah, pusat, masyarakat dan lembaga donor.

Adapun faktor penghambat belum tercapainya indikator Rumah Layak Huni adalah karena jumlah penanganan rumah layak huni di Kabupaten Magelang tiap tahun mengalami kenaikan yang tidak sebanding dengan kenaikan jumlah seluruh rumah di Kabupaten Magelang. Walaupun belum tercapai namun adanya bantuan penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dari provinsi, Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dari pusat dan program penanganan RTLH APBD Kabupaten Magelang sangat membantu penanganan RTLH.

2.6.3.1.3.4. Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat

Kinerja pembangunan urusan ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat daerah ditunjukkan dengan 6 indikator kinerja.

Pada tahun 2018 jika diukur dari target indikator RPJMD, dari 6 indikator tersebut sebanyak 4 indikator berstatus tercapai, 1 indikator berstatus perlu kerja keras, dan 1 indikator belum tersedia data. Data selengkapnya disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 2.174

Capaian Kinerja Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat

No.	Program dan Indikator Kinerja Program	Target RPJMD 2014-2019	Target Tahun 2019	Realisasi Tahun 2019	Kinerja RPJMD s.d Tahun 2019	Status	OPD
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja Per 10.000 Penduduk	0,44	0,44	0,67	152,96	●	Satpol PP & PK
2	Cakupan Petugas Linmas per Jumlah 10.000 Penduduk	100,87	100,87	87,82	87,07	▼	Kesbangpol
3	Sistem Informasi Pelayanan Perijinan Dan Adiministrasi Pemerintah	4	4	N/A	N/A		DPMPPTSP
4	Penegakan PERDA	75	75	93,48	124,64	●	Satpol PP & PK
5	Persentase Peningkatan PAD	12,02	12,02	19,15	159,32	●	DPPKAD
6	Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat	ada	ada	ada	100	●	Bag Organisasi

Status* : ● : Tercapai; ► : Akan Tercapai; ▼ : Perlu Kerja Keras



Faktor pendorong tercapainya indikator adalah adanya komitmen dari seluruh komponen masyarakat, khususnya PD teknis dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi urusan ketertiban dan keamanan.




Faktor penghambat tidak tercapainya indikator cakupan petugas Linmas per sepuluh ribu jumlah penduduk adalah karena selama ini menjadi anggota Linmas merupakan satu pilihan untuk kegiatan sosial yang secara ekonomi belum dapat dijadikan sebagai pekerjaan yang dapat menopang kebutuhan rumah tangga. Perekrutan anggota baru tidak sebanding dengan jumlah anggota Linmas yang pensiun maupun meninggal dunia sehingga pertumbuhan jumlah anggota Linmas tidak sebanding dengan pertumbuhan jumlah penduduk.

2.6.3.1.3.5. Sosial

Kinerja pembangunan urusan sosial ditunjukkan dengan 2 indikator kinerja. Pada tahun 2019 jika diukur dari target indikator RPJMD, dari 1 indikator berstatus tercapai dan 1 indikator perlu kerja keras. Data selengkapnya disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 2.175
Capaian Kinerja Urusan Sosial

No.	Program dan Indikator Kinerja Program	Target RPJMD 2014-2019	Target Tahun 2019	Realisasi Tahun 2019	Kinerja RPJMD s.d Tahun 2019	Status	OPD
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Sarana Sosial Seperti Panti Asuhan Panti Jompo dan Panti Rehabilitasi	34	34	39	114,70		Dinsos PPPK PPKB
2	PMKS yang Memperoleh Bantuan Sosial	20,00	20,00	57,715	42,13		Dinsos PPPK PPKB

Status* :  : Tercapai;  : Akan Tercapai;  : Perlu Kerja Keras

Pendekatan penanganan PMKS dilakukan melalui 4 (empat) pilar yakni perlindungan social, rehabilitasi social, pemberdayaan sosial dan jaminan sosial. Melalui pendekatan ini tidak semua penanganan PMKS bermuara pada bantuan. Namun disesuaikan dengan permasalahan yang dihadapi dan kondisi masing-masing PMKS. Penanganan PMKS dibagi ke dalam dua kelompok yaitu PMKS potensial dan non potensial. Dalam kurun waktu Tahun 2013-2018 jumlah PMKS yang memperoleh bantuan mengalami kenaikan secara signifikan dimana sampai dengan tahun 2018 capaian kerja sebesar 46,32 persen, jauh melampaui target sebesar 28,95 persen.

Faktor pendorong keberhasilan indikator kinerja urusan Sosial adalah :

- Perhatian yang serius dari pemerintah daerah dalam menangani permasalahan sosial di Kabupaten Magelang.
- Adanya ketersediaan dana untuk pembinaan panti sehingga partisipasi panti untuk tumbuh kembang bertambah.
- Adanya program Keluarga Harapan dari Pusat yang sasarannya di Kabupaten Magelang sehingga menambah jumlah PMKS yang memperoleh bantuan.

- d. Adanya peran serta stakeholder serta masyarakat dalam penanganan masalah-masalah sosial di Kabupaten Magelang.
- e. Pendataan PMKS yang dilakukan secara periodik.

2.6.3.2. Fokus Layanan Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar

2.6.3.2.1. Ketenagakerjaan

Kinerja pembangunan Urusan Ketenagakerjaan ditunjukkan dengan 6 indikator kinerja. Pada tahun 2019 jika diukur dari target indikator RPJMD, dari 6 indikator tersebut sebanyak 2 indikator berstatus tercapai, 3 indikator berstatus akan tercapai, dan 1 indikator menjadi kewenangan provinsi. Sementara 1 indikator belum dapat dianalisis karena belum ada data. Data selengkapnya disajikan dalam tabel berikut

Tabel 2.176
Capaian Kinerja Urusan Ketenagakerjaan

No.	Program dan Indikator Kinerja Program	Target RPJMD 2014-2019	Target Tahun 2019	Realisasi Tahun 2019	Kinerja RPJMD s.d. Tahun 2019	Status	OPD
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Angka Partisipasi Angkatan Kerja	76,65	76,65	74,55	97,5		Disperinaker
2	Angka Sengketa Pengusaha-Pekerja Per Tahun	1,28	1,28	1,09	117		Disperinaker
3	Pencari Kerja Yang Ditempatkan	54,27	54,27	51,88	96		Disperinaker
4	Tingkat Pengangguran Terbuka **	3,02	3,02	3,12	97		Disperinaker
5	Keselamatan dan Perlindungan	79,00	79,00				Kewenangan provinsi
6	Penyelesaian Perselisihan Buruh dan Pengusaha Terhadap Kebijakan Pemerintah Daerah	100	100	100	100		Disperinaker

Status* : : Tercapai; : Akan Tercapai; : Perlu Kerja Keras

Faktor pendorong tercapainya dua Indikator Kinerja Program:

- Optimalnya pelaksanaan pendampingan dari Serikat Pekerja dalam proses penyelesaian perselisihan ketenagakerjaan;
- Pekerja dan pengusaha saling menyepakati penyelesaian melalui Perjanjian Bersama dengan fasilitas petugas Mediator hubungan Industrial;
- Lembaga kerjasama Tripartit berfungsi optimal sebagai sarana komunikasi dan tukar pendapat bagi pemerintah, organisasi pengusaha dan organisasi pekerja (Serikat Buruh).








Faktor penghambat tidak tercapainya Indikator Kinerja Program:




- Informasi lowongan dari dunia usaha/pengusaha masih belum optimal;
- Kecenderungan orientasi pencari kerja yang masih sangat pilih-pilih pekerjaan;
- Lowongan kerja tidak sesuai dengan kualifikasi kompetensi pencari kerja.

2.6.3.2.2. Perhubungan

Kinerja urusan perhubungan ditunjukkan dalam 7 indikator. Pada tahun 2019 jika diukur dari target indikator RPJMD, dari 7 indikator tersebut sebanyak 3 indikator berstatus tercapai, 1 indikator berstatus akan tercapai, dan 3 indikator berstatus perlu kerja keras. Data selengkapnya disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 2.177
Capaian Kinerja Urusan Perhubungan

No.	Program dan Indikator Kinerja Program	Target RPJMD 2014-2019	Target Tahun 2019	Realisasi Tahun 2019	Kinerja RPJMD s.d. Tahun 2019	Status	OPD
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum	3.705.271	3.705.271	2.373.220	64		Dishub
2	Jumlah Ijin Trayek	1.069	1.069	803	75		Dishub
3	Rasio Uji Kir Kendaraan	96,7	96,7	89,87	92,94		Dishub
4	Jumlah Terminal Bis	8	8	6	75		Dishub
5	Lama Pengujian Kelayakan Angkutan Umum (KIR)	32	32	32	100		Dishub
6	Tersedianya Unit Pengujian Kendaraan Bermotor Bagi Kendaraan Wajib Uji	ada	ada	ada	100		Dishub
7	Pemasangan Rambu-Rambu	94,00	94,00	111,72	111,72		Dishub

Status* :  : Tercapai;  : Akan Tercapai;  : Perlu Kerja Keras

Faktor pendukung tercapainya indikator kinerja program urusan perhubungan adalah:

- a. Perencanaan kegiatan/program yang baik.
- b. Dukungan ketersediaan dana.
- c. Pelaksanaan kegiatan/program yang baik .
- d. Sarana dan prasarana mendukung.

Sedangkan faktor yang menyebabkan beberapa indikator kinerja program urusan perhubungan belum tercapai yaitu:

- a. Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum

Indikator ini belum tercapai karena:

- 1) Adanya Kecenderungan masyarakat menggunakan kendaraan pribadi dibanding kendaraan umum.
- 2) Kurang nyamannya fasilitas angkutan umum dan fasilitas di terminal.
- 3) Waktu tunggu angkutan umum yang relatif lama.
- 4) Banyak agen bus/angkutan umum yang melakukan jemput bola pada penumpang sehingga minat masyarakat masuk terminal menurun.

b. Jumlah ijin trayek

Indikator ini belum tercapai dikarenakan saat ini banyak kendaraan yang sudah habis masa ijin trayek. Namun ijin trayeknya tidak diperpanjang lagi karena sepi penumpang. Masyarakat lebih sering memanfaatkan jasa angkutan *online*.

c. Rasio Uji KIR Kendaraan

Indikator ini belum tercapai karena adanya keterlambatan pemilik kendaraan wajib uji yang tidak melakukan uji kendaraan bermotor.

d. Jumlah Terminal Bis.





Faktor penghambat tidak tercapainya indikator jumlah terminal bis adalah karena keberadaan Terminal Muntilan yang sudah menjadi kewenangan Provinsi, dan rencana pembangunan Terminal Sawangan yang belum terealisasi karena gagalnya proses pengadaan tanahnya.




2.6.3.2.3. Lingkungan Hidup

Kinerja pembangunan urusan lingkungan hidup ditunjukkan dengan 5 indikator kinerja. Capaian sampai dengan triwulan dua tahun 2019 dari 5 indikator tersebut sebanyak 4 indikator berstatus tercapai dan 1 indikator berstatus perlu kerja keras. Data selengkapnya disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 2.178

Capaian Kinerja Urusan Lingkungan Hidup

No.	Program dan Indikator Kinerja Program	Target RPJMD 2014-2019	Target Tahun 2019	Realisasi Tahun 2019	Kinerja RPJMD s.d. Tahun 2019	Status	OPD
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Persentase Penanganan Sampah	31,00	31,00	38,07	108,78		DLH
2	Cakupan Penghijauan Wilayah Rawan Longsor & Sumber Mata Air	2,10	2,10	6,30	300,03		DLH
3	Cakupan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan UKL-UPL	30	30	43,80	146,01		DLH
4	Rasio Tempat Pembuangan Sampah (TPS) Per Satuan Penduduk	1,76	1,76	2,32	131,90		DLH
5	Jumlah Daya Tampung TPS (M ³)	2.300.000	2.300.000	297.475	12,93		DLH

Status* :  : Tercapai;  : Akan Tercapai;  : Perlu Kerja Keras

Secara umum, faktor pendorong tercapainya indikator kinerja program urusan lingkungan hidup adalah:

- Sinergitas antar stakeholder baik di tingkat daerah, provinsi, maupun pusat.
- Adanya peningkatan peran masyarakat dalam pengelolaan lingkungan terutama dalam pengelolaan sampah.
- Pelaksanaan pengelolaan sampah berbasis masyarakat.

Sedangkan indikator jumlah daya tampung TPS masih memerlukan upaya keras untuk mencapainya dikarenakan belum terealisasinya pengadaan TPA di Kabupaten Magelang.

Adapun faktor penghambat ketercapaian indikator cakupan penghijauan wilayah rawan longsor dan sumber mata air adalah masih kurangnya sinergitas antara pemerintah dan masyarakat dalam pelaksanaan konservasi.

2.6.3.2.4. Pertanahan

Kinerja urusan pertanahan ditunjukkan dalam 2 indikator. Pada tahun 2019 jika diukur dari target indikator RPJMD, dari 2 indikator tersebut semuanya berstatus tercapai. Data selengkapnya disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 2.179
Capaian Kinerja Urusan Pertanahan

No	Program dan Indikator Kinerja Program	Target RPJMD 2014-2019	Target RKPDP 2019	Realisasi Tahun 2019	Kinerja RPJMD s.d. Tahun 2019	Status	OPD
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Persentase Luas Lahan Bersertifikat	33,83	33,83	37,17	110	●	Kewenangan BPN
2	Penyelesaian Izin Lokasi	100	100	100	100	●	DPUPR

Status* : ● : Tercapai; ► : Akan Tercapai; ▼ : Perlu Kerja Keras

Faktor pendorong keberhasilan indikator kinerja program urusan pertanahan adalah:

1. Kesadaran masyarakat untuk mensertifikatkan lahannya cukup tinggi;
2. Pelayanan pengurusan pensertifikatan lahan dan izin lokasi tidak berbelit-belit;
3. Biaya sertifikat dan izin lokasi relatif terjangkau;
4. Tingginya program pemerintah terkait pelayanan sertifikasi tanah.

2.6.3.2.5. Kependudukan dan Catatan Sipil

Kinerja urusan kependudukan dan catatan sipil ditunjukkan dengan 4 indikator. Pada tahun 2019 jika diukur dari target indikator RPJMD, dari 4 indikator tersebut sebanyak 3 indikator berstatus tercapai dan 1 indikator berstatus akan tercapai. Data selengkapnya disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 2.180
Capaian Kinerja Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil

No.	Program dan Indikator Kinerja Program	Target RPJMD 2014-2019	Target Tahun 2019	Realisasi Tahun 2019	Kinerja RPJMD s.d Tahun 2019	Status	OPD
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Rasio Penduduk Ber KTP Per Satuan Penduduk	91,87	91,87	98,68	107,41	●	Disdukcapil
2	Bayi Berakte Kelahiran	100	100	91,92	91,92	►	Disdukcapil
3	Rasio Pasangan Berakte Nikah	1,80	1,80	46,57	2587,22	●	Disdukcapil
4	Penerapan KTP Nasional Berbasis NIK	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	●	Disdukcapil

Status* : ● : Tercapai; ► : Akan Tercapai; ▼ : Perlu Kerja Keras

Faktor pendorong keberhasilan indikator kinerja program urusan Kependudukan dan Catatan Sipil adalah:

- a. Disdukcapil sudah mulai melakukan upaya jemput bola pelayanan pencatatan sipil.
- b. Kegiatan Sosialisasi Administrasi kependudukan kepada masyarakat semakin diintensifkan.
- c. Pembebasan biaya untuk beberapa pelayanan pengurusan administrasi kependudukan.

Indikator kinerja program yang belum tercapai adalah prosentase bayi berakte kelahiran dan rasio pasangan berakte nikah. Hal ini disebabkan beberapa faktor penghambat yaitu:




- a. Faktor geografis, yaitu domisili pemohon akte kelahiran jauh dari kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.
- b. Kendala jaringan internet yang kurang lancar di beberapa wilayah, sehingga berpengaruh pada jangka waktu pembuatan dokumen kependudukan.
- c. Keterbatasan blangko E-KTP dari pusat sehingga pencetakan E-KTP tidak sesuai standar waktu.
- d. Kesadaran masyarakat dalam membuat dokumen kependudukan masih rendah, dimana masyarakat biasanya membuat dokumen kependudukan manakala dibutuhkan.




2.6.3.2.6. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kinerja urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ditunjukkan dalam 3 indikator. Pada tahun 2019 jika diukur dari target indikator RPJMD, dari 3 indikator tersebut sebanyak 1 indikator berstatus tercapai dan 2 indikator berstatus perlu kerja keras. Data selengkapnya disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 2.181

Capaian Kinerja Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

No.	Program dan Indikator Kinerja Program	Target RPJMD 2014-2019	Target Tahun 2019	Realisasi Tahun 2019	Kinerja RPJMD s.d Tahun 2019	Status	OPD
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Persentase Partisipasi Perempuan Di Lembaga Pemerintah	2,56	2,56	1,98	77,34		Dinsos PPKB PPPA
2	Rasio KDRT	0,024	0,024	0,023	104,17		Dinsos PPKB PPPA
3	Penyelesaian Pengaduan Perlindungan Perempuan Dan Anak Dari Tindakan Kekerasan	100	100	75,51	75,51		Dinsos PPKB PPPA

Status* :  : Tercapai;  : Akan Tercapai;  : Perlu Kerja Kerasv

Faktor pendorong keberhasilan indikator kinerja program urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah semakin

membbaiknya tingkat pendidikan masyarakat serta mulai tumbuhnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pencegahan KDRT.






Indikator kinerja program yang belum tercapai adalah persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah dan Penyelesaian Pengaduan Perlindungan Perempuan Dan Anak Dari Tindakan Kekerasan. Faktor penghambat ketercapaian indikator Persentase Partisipasi Perempuan Di Lembaga Pemerintah adalah adanya ASN perempuan yang pensiun dan adanya kebijakan moratorium ASN sehingga Pemerintah Kabupaten Magelang tidak dapat menambah ASN perempuan. Sedangkan faktor penghambat ketercapaian indikator Penyelesaian Pengaduan Perlindungan Perempuan Dan Anak Dari Tindakan Kekerasan adalah belum mantapnya pola pencegahan dan penanganan kasus kekerasan berbasis gender dan anak melalui P2T2A seamanah dan jaringan PTT Kecamatan dan Desa/Kelurahan.




2.6.3.2.7. Berencana dan Keluarga Sejahtera

Kinerja urusan keluarga berencana dan keluarga sejahtera ditunjukkan dalam 5 indikator. Pada tahun 2019 jika diukur dari target indikator RPJMD, dari 5 indikator tersebut sebanyak 2 indikator berstatus tercapai, 2 indikator berstatus akan tercapai, dan 1 indikator berstatus perlu kerja keras. Data selengkapnya disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 2.182

Capaian Kinerja Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

No.	Program dan Indikator Kinerja Program	Target RPJMD 2014-2019	Target Tahun 2019	Realisasi Tahun 2019	Kinerja RPJMD s.d Tahun 2019	Status	OPD
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Rata-Rata Jumlah Anak Per Keluarga	1,57	1,57	1,16	73,88		Dinsos PPKB PPPA
2	Rasio Akseptor KB	81,50	81,50	75,52	92,66		Dinsos PPKB PPPA
3	Cakupan Peserta KB Aktif (%)	80,89	80,89	75,52	93,36		Dinsos PPKB PPPA
4	Keluarga Pra Sejahtera(%)	20,18	20,18	20,69	102,53		Dinsos PPKB PPPA
5	Keluarga Sejahtera I (%)	14,38	14,38	14,74	102,50		Dinsos PPKB PPPA

Status* :  : Tercapai;  : Akan Tercapai;  : Perlu Kerja Keras

Faktor pendorong keberhasilan pencapaian indikator ini adalah:

- Norma keluarga kecil bahagia sejahtera (NKKBS) sudah melembaga di lapisan masyarakat.
- Fasilitas dan akses pelayanan KB semakin mudah.
- Sarana komunikasi informasi dan edukasi lebih bervariasi dan tersebar baik melalui media luar ruang maupun media dalam ruang.
- Semakin efektifnya program penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Magelang.
- Membbaiknya kesejahteraan masyarakat.

Sementara itu indikator yang belum mencapai target ada 3 yaitu rasio akseptor KB, cakupan peserta KB aktif (%) dan keluarga sejahtera (%). Adapun Faktor penghambat dari ketiga indikator diatas adalah :





- a. Kenaikan jumlah pasangan usia subur tidak langsung diikuti dengan kenaikan kesertaan ber KB. Penambahan jumlah PUS tersebut berasal dari dari pengantin baru yang tidak langsung ikut KB karena menginginkan untuk segera mempunyai anak.
- b. Adanya PUS yang *drop out* KB karena ingin punya anak lagi. Ada pula yang usianya telah melebihi 45 tahun dan merasa aman tidak ber-KB padahal masih termasuk subur.
- c. Tingkat kesadaran masyarakat untuk melakukan KB, khususnya laki-laki masih belum optimal.
- d. Masih rendahnya tingkat pendidikan masyarakat




2.6.3.2.8. Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Kinerja pembangunan Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah ditunjukkan dengan 4 indikator kinerja. Pada tahun 2019 untuk diukur capaian target indikator RPJMD, 3 indikator berstatus tercapai, dan 1 indikator berstatus perlu kerja keras. Data selengkapnya disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 2.183

Capaian Kinerja Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

No.	Program dan Indikator Kinerja Program	Target RPJMD 2014-2019	Target Tahun 2019	Realisasi Tahun 2019	Kinerja RPJMD s.d Tahun 2019	Status	OPD
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Persentase Koperasi Aktif	78,18	Persen	82,76	106,43		Disdagkop UKM
2	Jumlah UKM non BPR/LKM UKM	106.384	-	106.200	99,81		Disdagkop UKM
3	Jumlah BPR/LKM	382	-	297	79,2		Disdagkop UKM
4	Usaha Mikro dan Kecil yang dibina	0,38	Persen	1,01	280,56		Disdagkop UKM

Status* :  : Tercapai;  : Akan Tercapai;  : Perlu Kerja Keras

Faktor pendorong tercapainya 3 (tiga) Indikator Kinerja Program:

- Penambahan jumlah koperasi aktif, sebanyak 9 koperasi
- Pembinaan dan pengawasan koperasi, berhasil menjadikan 5 koperasi kembali aktif, yaitu:
 - 1) KIKS BMT Mitra Insan Mandiri;
 - 2) KIKS BMT Al Kausar;
 - 3) KSPPS BMT Amanah Mulia;
 - 4) KSPPS Darul Rizqi;
 - 5) KSU Ngudi Lestari.
- Pendataan dan pemutakhiran data untuk monitoring dan evaluasi koperasi yang aktif secara kelembagaan maupun usaha. Saat ini telah diterbitkan 100 sertifikat NIK bagi koperasi aktif.

Penyebab tidak tercapainya satu Indikator Kinerja Program:

- Kalah bersaing dengan banyaknya Bank Umum mulai masuk ke sektor mikro yang selama ini digarap oleh BPR/BPRS.
- Terjari booming konsep Syariah, yaitu banyaknya Bank Umum baik milik negara maupun swasta yang membentuk Bank Syariah maupun unit layanan syariah;
- Banyaknya Kredit/Pembiayaan yang macet (non performing loan),
- BPR/BPRS sangat tergantung pada deposito yang mempunyai tingkat bunga tinggi, sehingga cost of fund lebih tinggi dibandingkan bank umum

Agar Lembaga Keuangan Mikro dapat terus bertahan di tengah persaingan yang semakin ketat, maka dilakukan langkah – langkah untuk memperbaiki baik dari sisi intern maupun ekstern.

Dari sisi intern antara lain membenahan SDM baik posisi staf maupun tingkat manajerial serta pemilik saham terkait pengambilan keputusan, perbaikan IT serta audit intern yang cakap, sehingga fraud dapat segera diketahui, penambahan jaringan pemasaran/kantor tentunya disesuaikan dengan kemampuan permodalan, program-program pemasaran yang menarik atau inovasi produk baik funding maupun landing mengingat banyak BPR/BPRS yang mengalami masalah likuiditas, serta kemudahan syarat pencairan kredit bagi masyarakat

2.6.3.2.9. Penanaman Modal

Kinerja pembangunan urusan penanaman modal ditunjukkan dengan 4 indikator kinerja. Pada tahun 2019 jika diukur dari target indikator RPJMD, dari 4 indikator tersebut, 3 indikator berstatus tercapai dan 1 indikator berstatus perlu kerja keras. Data selengkapnya disajikan dalam tabel berikut

Tabel 2.184

Capaian Kinerja Urusan Penanaman Modal

No.	Program dan Indikator Kinerja Program	Target RPJMD 2014-2019	Target RKPD 2019	Realisasi Tahun 2019	Kinerja RPJMD Tahun 2019	Status	OPD
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA)	1.164	1.164	2.384	204	●	DPMPPTSP
2	Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA)	724.647	724.647	50.490	103	●	DPMPPTSP
3	Rasio Daya Serap Tenaga Kerja	31,19	31,19	10,66	35	▼	DPMPPTSP
4	Kenaikan / Penurunan Nilai Realisasi PMDN (Milyar Rupiah)	359	359	48.579,03	13.531	●	DPMPPTSP

Status* : ● : Tercapai; ► : Akan Tercapai; ▼ : Perlu Kerja Keras

Faktor pendorong tercapainya 3 (tiga) Indikator Kinerja Program:

- Penerapan OSS (Online Single Submission).
- Para investor dapat memperbaharui izinnya secara mandiri di manapun dan kapanpun.
- Tidak adanya pendampingan dari petugas pelayanan.

Penyebab tidak tercapainya satu Indikator Kinerja Program:




- Kurangnya pengembangan pendidikan formal dengan menyesuaikan kurikulum pendidikan dengan dunia usaha,
- Kurangnya pengembangan pendidikan non formal dengan optimalisasi Balai Latihan Kerja (BLK) di daerah – daerah dengan kurikulum /materi pelatihan sesuai kebutuhan dunia usaha.
- Untuk mengatasi keterbatasan kesempatan kerja perlu pengembangan industri padat karya yang dapat menyerap banyak tenaga kerja serta pemberdayaan ternaga kerja dan pengembangan usaha sektor informasi di daerah.




2.6.3.2.10. Kebudayaan

Kinerja pembangunan urusan kebudayaan ditunjukkan dengan 3 indikator kinerja. Pada tahun 2019, dari 2 indikator kinerja program urusan kebudayaan semuanya berstatus tercapai dan 1 indikator perlu kerja keras. Data selengkapnya disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 2.185

Capaian Kinerja Urusan Kebudayaan

No.	Program dan Indikator Kinerja Program	Target RPJMD 2014-2019	Target RKPD 2019	Realisasi Tahun 2019	Kinerja RPJMD s.d Tahun 2019	Status	OPD
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya	38	38	167	439,47		Disdikbud
2	Sarana Penyelenggaraan Seni Dan Budaya	18	18	25	138,89		Disdikbud
3	Benda. Situs Dan Kawasan Cagar Budaya Yang Dilestarikan	70,00	70,00	10	14,28		Disdikbud






Status* :  : Tercapai;  : Akan Tercapai;  : Perlu Kerja Keras




Faktor pendorong tercapainya indikator Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya adalah karena Kabupaten Magelang kaya akan sumber daya Budaya yang oleh pemerintah daerah di dukung dengan pendanaan untuk penyelenggaraan festival. Sedangkan untuk indikator benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan mampu melampaui target disebabkan adanya komitmen Pemerintah Kabupaten untuk membentuk Tim Ahli Cagar Budaya (TACB) di Kabupaten Magelang sejak tahun 2015. Sehingga upaya-upaya pendaftaran, pelestarian dan pemanfaatan benda/bangunan cagar budaya bisa berjalan secara optimal.

2.6.3.2.11. Pemuda dan Olahraga

Kinerja pembangunan urusan pemuda dan olahraga ditunjukkan dengan 5 indikator kinerja. Pada tahun 2019 dari 5 indikator kinerja program urusan Pemuda dan Olahraga, 2 indikator berstatus tercapai, 2 indikator berstatus akan tercapai dan 1 indikator perlu kerja keras. Data selengkapnya disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 2.186
Capaian Kinerja Urusan Pemuda dan Olahraga

No.	Program dan Indikator Kinerja Program	Target RPJMD 2014-2019	Target RKPD 2019	Realisasi Tahun 2019	Kinerja RPJMD s.d Tahun 2019	Status	OPD
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Jumlah Organisasi Pemuda	27	27	26	96,29		Disparpora
2	Jumlah Organisasi Olahraga	36	36	35	97,22		Disparpora
3	Jumlah Kegiatan Kepemudaan	19	19	20	100		Disparpora
4	Jumlah Kegiatan Olahraga	24	24	25	100		Disparpora
5	Lapangan Olahraga	2,00	2,00	0,21	10,5		Disparpora

Status* :  : Tercapai;  : Akan Tercapai;  : Perlu Kerja Keras

Faktor pendorong tercapainya 2 (dua) indikator kinerja program adalah:

- Keaktifan pengurus organisasi pemuda khususnya KNPI dan karang taruna;
- Berkembangnya teknologi informasi mempermudah berkomunikasi;
- Meningkatkan motivasi pemuda untuk berorganisasi.

Faktor penghambat tidak tercapainya 3 (tiga) indikator kinerja program adalah:







- Keterbatasan anggaran;
- Rentang usia pemuda menurut uu 40/2009 sementara pemuda aktif berusia diatas 30 tahun;
- Penyebab yg ketiga, belum adanya sarpras kepemudaan, antara lain gedung pemuda, ruang atau tempat untuk beraktualisasi, berkreasi dan berekspresi;
- Keterbatasan SDM sesuai cabang olahraga yg belum terbentuk di kabupaten magelang misal senam, anggar dan paralayang;
- Keterbatasan lahan sehingga sulit membuat lapangan baru.




2.6.3.2.12. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

Kinerja pembangunan urusan kesatuan bangsa dan politik dalam negeri ditunjukkan dengan 6 indikator kinerja. Pada tahun 2019 dari 6 indikator kinerja program urusan Kesatuan Bangsa dan politik dalam negeri, 4 indikator berstatus tercapai, dan 2 berstatus tercapai. Data selengkapnya disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 2.187

Capaian Kinerja Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

No.	Program dan Indikator Kinerja Program	Target RPJMD 2014-2019	Target Tahun 2019	Realisasi Tahun 2019	Kinerja RPJMD s.d Tahun 2019	Status	OPD
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Kegiatan Pembinaan Terhadap LSM. Ormas Dan OKP	12	12	12	100		Kantor Kesbangpol
2	Kegiatan Pembinaan Politik Daerah	12	12	12	100		Kantor Kesbangpol
3	Cakupan masyarakat yang mendapat pengetahuan kebencanaan	100	100	98,97	98,97		Kantor Kesbangpol
4	Cakupan masyarakat terdampak bencana yang mendapat pelayanan tanggap darurat	100	100	103,51	103,51		Kantor Kesbangpol
5	Cakupan dokumen rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana	100	100	100	100		Kantor Kesbangpol
6	Cakupan masyarakat yang sudah mendapatkan pelayanan rehabilitasi rekonstruksi pasca bencana	100	100	94	94		Kantor Kesbangpol

Status* :  : Tercapai;  : Akan Tercapai;  : Perlu Kerja Keras

Faktor pendorong tercapainya indikator kinerja program urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri adalah:

- Adanya Partisipasi dan kesadaran masyarakat yang tinggi terhadap kebencanaan.
- Dukungan anggaran dari pemerintah pusat, pemerintah daerah dan stakeholder.
- Ketersediaan SDM yang kompeten.
- Peningkatan kapasitas SDM secara berkelanjutan.
- Merupakan urusan wajib pelayanan dasar yang mempunyai standar pelayanan minimal yang wajib dilaksanakan pemerintah daerah.

Sedangkan faktor penghambat tidak tercapainya indikator Kegiatan Pembinaan Politik Daerah adalah adanya ketidaktepatan perumusan target indikator kinerja pada level perencanaan PD.

2.6.3.2.13. Ketahanan Pangan



Sebagai kebutuhan dasar dan salah satu hak asasi manusia (pasal 27 UUD 1945 dan UU No. 7/1996,) pangan mempunyai arti dan peran yang sangat penting bagi kehidupan suatu bangsa.


Ketersediaan pangan yang lebih kecil dibandingkan kebutuhannya dapat menciptakan ketidak-stabilan ekonomi. Berbagai gejolak sosial dan politik dapat juga terjadi jika ketahanan pangan terganggu. Kondisi pangan yang kritis ini bahkan dapat membahayakan stabilitas ekonomi dan stabilitas Nasional.

Pengertian ketahanan pangan, menurut UU No. 18/2012 tentang Pangan, adalah "kondisi terpenuhinya Pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan".

Kinerja pembangunan urusan ketahanan pangan ditunjukkan dengan 2 indikator kinerja. Pada tahun 2019 dari 2 indikator kinerja program urusan Ketahanan Pangan, 2 indikator berstatus tercapai. Data selengkapnya disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 2.188
Capaian Kinerja Urusan Ketahanan Pangan

No.	Program dan Indikator Kinerja Program	Target RPJMD 2014-2019	Target Tahun 2019	Realisasi Tahun 2019	Kinerja RPJMD s.d Tahun 2019	Status	OPD
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Ketersediaan Pangan Utama Beras	188.1	188,1	216,63	115		Distan & Pangan
2	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Daerah	93,1	93,1	87,9	100		Distan & Pangan

Status* :  : Tercapai;  : Akan Tercapai;  : Perlu Kerja Keras

Faktor pendorong tercapainya indikator diatas adalah:

- Produksi komoditi pangan yang cukup banyak dan tidak berfluktuasi karena pengaruh iklim/cuaca.
- Penanganan panen dan pasca panen;
- Kemampuan mengatasi permasalahan yang muncul lainnya di dalam distribusi pangan.
- Tataniaga yang baik.




Dengan pertimbangan permasalahan pangan tersebut di atas maka kebijaksanaan pangan nasional harus dapat mengakomodasikan dan menyeimbangkan antara aspek penawaran/produksi dan permintaan.




2.6.3.2.14. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kinerja Pembangunan urusan pemberdayaan masyarakat dan desa ditunjukkan dengan 3 indikator kinerja. Pada tahun 2019 dari 3 indikator kinerja program urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, 1 indikator kinerja berstatus akan tercapai, 1 indikator kinerja perlu kerja keras, dan 1 indikator berstatus tercapai. Data selengkapnya disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 2.189

Capaian Kinerja Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

No.	Program dan Indikator Kinerja Program	Target RPJMD 2014-2019	Target RKPD 2019	Realisasi Tahun 2019	Kinerja RPJMD s.d Tahun 2019	Status	OPD
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Cakupan Pembi-naan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)	19,00	persen	17,52	92,21		Dispermades
2	Cakupan Kelompok Binaan PKK	39,52	persen	33,63	85,10		Dispermades
3	Jumlah LSM	6	buah	6	100		Dispermades

Status* :  : Tercapai;  : Akan Tercapai;  : Perlu Kerja Keras

Faktor penghambat atas ketidak capaian 1 indikator diatas adalah:

1. Peran organisasi PKK masih dipandang sebelah mata.
2. Dukungan anggaran untuk PKK dan LSM relative masih rendah.
3. Masih rendahnya kesadaran untuk membentuk lembaga swadaya yang non profit.




2.6.3.2.15. Statistik

Kinerja pembangunan urusan statistik ditunjukkan dengan 2 indikator kinerja. Capaian kinerja sampai dengan triwulan dua tahun 2019 dari 2 indikator tersebut semua telah tercapai. Data selengkapnya disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 2.190

Capaian Kinerja Urusan Statistik

No.	Program dan Indikator Kinerja Program	Target RPJMD 2014-2019	Target Tahun 2019	Realisasi Tahun 2019	Kinerja RPJMD s.d Tahun 2019	Status	OPD
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Buku "Kabupaten Dalam Angka"	ada	ada	ada	100		Diskominfo
2	Buku "PDRB Kabupaten"	ada	ada	ada	100		Diskominfo



Status* :  : Tercapai;  : Akan Tercapai;  : Perlu Kerja Keras




Faktor pendorong tercapainya urusan statistik adalah adanya kerjasama yang baik dengan stakeholder pengampu data.

2.6.3.2.16. Kearsipan

Kinerja pembangunan urusan kearsipan ditunjukkan dengan 2 indikator kinerja. Semua indikator kinerja program urusan kearsipan pada tahun 2019 telah tercapai. Capaian ini merupakan capaian akumulasi dari tahun 2014. Realisasi capaian yang melebihi target ini dikarenakan adanya tambahan kegiatan monitoring evaluasi diluar jadwal dan adanya permintaan dari desa-desa. Indikator peningkatan SDM pengelola kearsipan juga realisasinya melampaui target karena didukung oleh kegiatan sosialisasi dan kegiatan workshop. Data selengkapnya disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 2.191
Capaian Kinerja Urusan Kearsipan

No.	Program dan Indikator Kinerja Program	Target RPJMD 2014-2019	Target Tahun 2019	Realisasi Tahun 2019	Kinerja RPJMD s.d Tahun 2019	Status	OPD
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Pengelolaan Arsip Secara Baku	100	100	106,52	106		Dispuspa
2	Peningkatan SDM Pengelola Kearsipan	329	329	1.151	350		Dispuspa




Status* :  : Tercapai;  : Akan Tercapai;  : Perlu Kerja Keras

2.6.3.2.17. Komunikasi dan Informatika

Kinerja pembangunan urusan komunikasi dan informatika ditunjukkan dengan 3 indikator kinerja. Capaian sampai dengan triwulan dua tahun 2019 dari 3 indikator tersebut semuanya telah tercapai. Data selengkapnya disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 2.192
Capaian Kinerja Urusan Komunikasi dan Informatika

No.	Program dan Indikator Kinerja Program	Target RPJMD 2014-2019	Target Tahun 2019	Realisasi Tahun 2019	Kinerja RPJMD s.d Tahun 2019	Status	OPD
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Jumlah Penyiaran Radio/TV Lokal	6	6	8	100		Diskominfo
2	Web Site Milik Pemerintah Daerah	ada	Ada	Ada	100		Diskominfo
3	Jumlah Surat Kabar Nasional/Lokal	9/3	9/3	9/3	100		Diskominfo

Status* :  : Tercapai;  : Akan Tercapai;  : Perlu Kerja Keras

Faktor pendorong tercapainya indikator kinerja urusan komunikasi dan informatika adalah:

- a. Partisipasi masyarakat yang tinggi.
- b. Komitmen Pemda dalam penyebarluasan informasi kepada masyarakat tinggi.

2.6.3.2.18. Perpustakaan

Kinerja pembangunan urusan perpustakaan ditunjukkan dengan 3 indikator kinerja. Dari 3 indikator kinerja program urusan perpustakaan, pada tahun 2019, 3 indikator berstatus tercapai. Data selengkapnya disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 2.193
Capaian Kinerja Urusan Perpustakaan

No.	Program dan Indikator Kinerja Program	Target RPJMD 2014-2019	Target Tahun 2019	Realisasi Tahun 2019	Kinerja RPJMD s.d Tahun 2019	Status	OPD
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Jumlah Perpustakaan	815	815	841	103,19	●	Dispuspa
2	Jumlah Pengunjung Perpustakaan Per Tahun	45.335	45.335	95.965	119,96	●	Dispuspa
3	Rasio Koleksi Buku Yang Tersedia Di Perpustakaan Daerah	2,24	2,24	2,31	104,06	●	Dispuspa

Status* : ● : Tercapai; ► : Akan Tercapai; ▼ : Perlu Kerja Keras

Faktor pendorong tercapainya indikator kinerja urusan perpustakaan adalah:

- Meningkatnya sarana dan prasarana perpustakaan.
- Meningkatnya mutu dan jenis layanan perpustakaan.
- Meningkatnya jam kunjung pemustaka.
- Ketersediaan dana.
- Dukungan dan komitmen pemerintah daerah untuk meningkatkan mutu perpustakaan.

2.6.3.3. Fokus Layanan Urusan Pilihan

2.5.3.3.1. Pertanian

Kinerja pembangunan urusan pertanian ditunjukkan dengan 21 indikator kinerja. Dimana, 9 indikator berada dalam kewenangan Dinas Pertanian dan Pangan, 12 indikator berada dalam kewenangan Dinas Peterikan.

Pada tahun 2019 dari 7 indikator berada dalam kewenangan Dinas Pertanian dan Pangan: 3 indikator berstatus tercapai, 1 indikator berstatus akan tercapai, dan 3 indikator perlu kerja keras.

Untuk evaluasi capaian 14 indikator berada dalam kewenangan Dinas Peterikan, 10 indikator berstatus tercapai, 1 indikator berstatus akan tercapai, dan 1 indikator perlu kerja keras. Data selengkapnya disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 2.194
Capaian Kinerja Urusan Pertanian

No.	Program dan Indikator Kinerja Program	Target RPJMD 2014-2019	Target Tahun 2019	Realisasi Tahun 2019	Kinerja RPJMD s.d Tahun 2019	Status	OPD
1	2	3	4	5	6	7	8
	Produktivitas Padi Atau Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya Per Hektar						
1	Produktivitas Padi	60,10	60,10	62,70	104	●	Distan & pangan
2	Produksi Padi	355.676	355.676	436.593	123	●	Distan & pangan

No.	Program dan Indikator Kinerja Program	Target RPJMD 2014-2019	Target Tahun 2019	Realisasi Tahun 2019	Kinerja RPJMD s.d Tahun 2019	Status	OPD
3	Produktivitas Jagung	59,30	59,30	61,23	103	●	Distan & pangan
4	Produksi Jagung	74.337	74.337	41776	56,2	▼	Distan & pangan
5	Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap PDRB **	20,03	20,03	21,31	94	▶	Distan & pangan
6	Kontribusi Sub Sektor Pertanian (Tanaman Pangan) Terhadap PDRB ADHB (%) sektor pertanian	71,84	71,84	28,75	40	▼	Distan & pangan
7	Kontribusi Sub Sektor Perkebunan Terhadap PDRB/ADHB sektor pertanian	7,73	7,73	5,26	68	▼	Distan & pangan
8	Kontribusi Sub Sektor Peternakan Terhadap PDRB sektor pertanian	13,09	13,09	20,05	154	●	Distan & pangan
9	Cakupan Bina Kelompok Petani	14,9	2,7	15,3	104	●	Distan & pangan
	Produksi Hewan ternak						
10	Sapi potong	1.862.169	1.825.656	1.862.342	102,01	●	Dinas Peterikan
11	Kerbau	541	530	693	130,75	●	Dinas Peterikan
12	Kambing	793.265	777.711	793.276	102,00	●	Dinas Peterikan
13	Domba	1.115.626	1.093.751	1.115.659	102,00	●	Dinas Peterikan
	Produksi Hewan Unggas						
14	Ayam Pedaging	9.957.1	9.761,90	9.958.094	102,01	●	Dinas Peterikan
15	Ayam Ras Petelur	1.019.5	999,59	1.064.208	106,46	●	Dinas Peterikan
16	Ayam Buras	1.239.98	1.215,67	1.240.374	102,03	●	Dinas Peterikan
17	Itik	94.106	92.260	95.455	103,46	●	Dinas Peterikan
18	Sapi Perah	746.158	731.528	746.220	102,01	●	Dinas Peterikan
	Angka Konsumsi Protein Hewani (Gr/Kap/Hr)						
19	a. daging	6,20	5,95	6,03	101,34	●	Dinas Peterikan
20	b. telur	4,65	4,35	4,06	93,33	▶	Dinas Peterikan
21	c. susu	0.11	0,08	0,04	50,00	▼	Dinas Peterikan

Status* : ● : Tercapai; ▶ : Akan Tercapai; ▼ : Perlu Kerja Keras

Faktor pendorong tercapainya 3 (tiga) Indikator Kinerja Program (Produktivitas Padi Atau Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya Per Hektar):

- Konsistensi pelaksanaan 'agriculture extenstion',

- Terkendalinya serangan organisme pengganggu tanaman (OPT),
- Peningkatan sarana dan prasarana produksi.

Penyebab tidak tercapainya 4 (empat) Indikator Kinerja Program (Produktivitas Padi Atau Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya Per Hektar):

- Dampak perubahan iklim (global warming).

Faktor pendorong tercapainya 12 (dua belas) Indikator Kinerja Program (Peternakan):

- Potensi sumber daya alam dan SDM mendukung usaha bidang peternakan;
- Potensi pasar lokal dan pasar luar daerah mendukung pemasaran produk peternakan;
- Pendampingan dan fasilitasi peternak oleh Dinas Peternakan dan Perikanan.

Penyebab tidak tercapainya 2 (dua) Indikator Kinerja Program (Peternakan):




- Populasi sapi perah laktasi (yang menghasilkan susu) tidak mencapai lebih dari 20% sisanya merupakan sapi perah jantan dan betina yang tidak laktasi;
- Tidak ada penambahan populasi sapi perah karena belum adanya program penambahan populasi sapi perah di daerah potensi sapi perah.
- Peternak sapi perah kurang begitu menguasai teknis budidaya sapi perah dengan baik karena lebih rumit dibandingkan budidaya sapi potong terutama penanganan saat laktasi;
- Rendahnya tingkat konsumsi susu masyarakat Kabupaten Magelang sehingga perlu dilakukan kampanye gerakan minum susu dan telur secara berkelanjutan untuk meningkatkan angka konsumsi susu dan telur.

2.5.3.3.2. Kehutanan

Kinerja pembangunan urusan kehutanan ditunjukkan dengan 2 indikator kinerja. Indikator tersebut tidak bisa dievaluasi karena saat ini indikator kehutanan sudah menjadi kewenangan Provinsi. Data selengkapnya disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 2.195
Capaian Kinerja Urusan Kehutanan

No.	Program dan Indikator Kinerja Program	Target RPJMD 2014-2019	Target Tahun 2019	Realisasi Tahun 2019	Kinerja RPJMD s.d Tahun 2019	Status	OPD
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kritis	2.822	2.822	NA	NA		Kewenangan Provinsi
2	Kontribusi Sektor Kehutanan Terhadap PDRB Sektor Pertanian/ Perkebunan (%)	4,66	4,66	NA	NA		Kewenangan Provinsi

Status* :  : Tercapai;  : Akan Tercapai;  : Perlu Kerja Keras




2.5.3.3.3. Energi dan Sumberdaya Mineral

Kinerja pembangunan urusan energi dan sumber daya mineral ditunjukkan dengan 2 indikator kinerja. Pada tahun 2019, 1 indikator berstatus tercapai, 1 indikator tidak tersedia data. Namun, urusan energi dan sumberdaya mineral sudah menjadi kewenangan Provinsi. Data selengkapnya disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 2.196

Capaian Kinerja Urusan Energi dan Sumberdaya Mineral

No.	Program dan Indikator Kinerja Program	Target RPJMD 2014-2019	Target RKPD 2019	Realisasi Tahun 2019	Kinerja RPJMD s.d Tahun 2019	Status	OPD
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Persentase Pertambangan Berijin	50	Persen	NA	NA		Kewenangan Provinsi
2	Kontribusi Sektor Pertambangan Terhadap PDRB	2,64	Persen	4,48	NA		Kewenangan Provinsi




Status* :  : Tercapai;  : Akan Tercapai;  : Perlu Kerja Keras




2.5.3.3.4. Pariwisata

Kinerja pembangunan urusan pariwisata ditunjukkan dengan 3 indikator kinerja. Pada tahun 2019 dari 3 indikator kinerja program urusan Pariwisata, 1 indikator berstatus akan tercapai dan 2 indikator perlu kerja keras. Data selengkapnya disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 2.197

Capaian Kinerja Urusan Pariwisata

No.	Program dan Indikator Kinerja Program	Target RPJMD 2014-2019	Target RKPD 2019	Realisasi Tahun 2019	Kinerja RPJMD s.d Tahun 2019	Status	OPD
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Kunjungan Wisata Manca Negara	860.549	860.549	698.565	81,17		Dispar pora
2	Kunjungan Wisata Nusantara	6.594.051	6.594.051	6.150.331	93,27		
3	Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PDRB (%)	6,89	6,89	4,25	61,68		

Status* :  : Tercapai;  : Akan Tercapai;  : Perlu Kerja Keras

Penyebab tidak tercapainya Indikator Kinerja Program:

- Pelaksanaan Pilpres dan Pilkada tahun 2019 mempengaruhi kunjungan wisata;
- Lebih berkembangnya destinasi wisata di daerah lain;
- Menurunnya jumlah kunjungan wisata berpengaruh pada capaian indikator kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB.

2.5.3.3.5. Kelautan dan Perikanan

Kinerja pembangunan urusan kelautan dan perikanan ditunjukkan dengan 5 indikator kinerja. Pada tahun 2019 dari 4 indikator kinerja program urusan Peternakan dan Perikanan, seluruh indikator berstatus tercapai. Data selengkapnya disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 2.198
Capaian kinerja Urusan Kelautan dan Perikanan

No.	Program dan Indikator Kinerja Program	Target RPJMD 2014-2019	Target Tahun 2019	Realisasi Tahun 2019	Kinerja RPJMD s.d Tahun 2019	Status	OPD
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Produksi Perikanan (Benih)	2.000	2.000	2.061.277	120	●	Dinas Peterikan
2	Produksi Perikanan Budidaya	18.000	18.000	25.122	119	●	Dinas Peterikan
3	Produksi Perikanan Tangkap	263,57	263,57	301.004	109	●	Dinas Peterikan
4	Konsumsi Ikan	15,75	15,75	20,18	108	●	Dinas Peterikan
5	Kontribusi Sub Sektor Perikanan Terhadap PDRB Sector Pertanian	2,68	2,68	2,90	108	●	Dinas Peterikan

Status* : ● : Tercapai; ► : Akan Tercapai; ▼ : Perlu Kerja Keras

Faktor pendorong tercapainya semua Indikator Kinerja Program:

- Penggunaan induk ikan kualitas unggulan dan bersertifikat melalui Unit Pembenihan Rakyat (UPR) sehingga menghasilkan tingkat produktivitas tinggi
- Penggunaan benih kualitas unggulan oleh Kelompok pembudidaya ikan (Pokdakan) untuk budidaya pembesaran ikan konsumsi.
- Pendampingan dan fasilitasi kelompok pelaku perikanan oleh Dinas Peternakan dan Perikanan.
- Penyelenggaraan Kampanye Gemar Makan Ikan yang selama ini sudah dilakukan secara setiap tahun dengan sasaran anak-anak sekolah ikut mendorong meningkatnya konsumsi ikan masyarakat.

2.5.3.3.6. Perdagangan

Kinerja pembangunan urusan perdagangan ditunjukkan dengan 3 indikator kinerja. Pada tahun 2019 dari 3 indikator kinerja program urusan Perdagangan, 1 indikator berstatus tercapai, 1 indikator berstatus akan tercapai dan 1 indikator perlu kerja keras. Data selengkapnya disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 2.199
Capaian kinerja Urusan Perdagangan

No.	Program dan Indikator Kinerja Program	Target RPJMD 2014-2019	Target RKPDP 2019	Realisasi Tahun 2019	Kinerja RPJMD s.d Tahun 2019	Status*	OPD
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB (%)	9,98	9,98	13,71	137	●	Disdagkop UKM
2	Ekspor Bersih Perdagangan (Juta US\$)	89	89	87,18	97,95	►	Disdagkop UKM

No.	Program dan Indikator Kinerja Program	Target RPJMD 2014-2019	Target RKPD 2019	Realisasi Tahun 2019	Kinerja RPJMD s.d Tahun 2019	Status*	OPD
3	Cakupan Bina Kelompok Pedagang/ Usaha Informal (%)	13,55	13,55	3,90	28,78	▼	Disdagkop UKM

Status* : ● : Tercapai; ► : Akan Tercapai; ▼ : Perlu Kerja Keras

Faktor pendorong tercapainya 1 (satu) Indikator Kinerja Program:

- Sumber Daya Alam.
Kabupaten Magelang memiliki sumber daya alam dari Gunung yang mengelilingi Kabupaten baik berupa hasil pertanian, hasil perkebunan dan keindahan alam yang mendukung sektor perdagangan baik wisata, kuliner maupun perdagangan barang dan jasa
- Kondisi Geografis
Kondisi Geografis Kabupaten Magelang yang strategis, dekat dengan Bandara Yogyakarta dan Semarang serta pelabuhan semarang mendukung usaha sektor perdagangan.
- Memperluas Pasar / ekspansi Pasar
Didasari pada keinginan untuk mendapatkan keuntungan yang besar mendorong untuk memperluas pasar. Semakin luas pasaran produk, tentu pembelinya semakin banyak.
- Perkembangan IPTEK
Dengan perkembangan IPTEK memudahkan masyarakat melakukan promosi dan jual beli barang dan jasa.
- Tren dan gaya hidup
Tidak dipungkiri Lifestyle dan tren menjadi faktor pendorong perdagangan. contoh gaya hidup sehat yang menimbulkan dibukanya usaha fitnes dan gym untuk memebuhi kebutuhan akan gaya hidup tersebut.

Penyebab tidak tercapainya 2 (dua) Indikator Kinerja Program:

- Perubahan regulasi terkait produk olahan kayu di negara tujuan mengingat produk ekspor kab Magelang didominasi oleh produk hasil olahan kayu hal ini berdampak dengan turunnya nilai ekspor
- Akibat adanya perang dagang antara Cina dan USA
- Menurunnya permintaan produk ekspor olahan kayu.

2.5.3.3.7. Perindustrian

Kinerja pembangunan urusan perindustrian ditunjukkan dengan 3 indikator kinerja. Pada tahun 2018 dari 3 indikator kinerja program urusan Perindustrian, 2 indikator berstatus tercapai, 1 indikator belum tersedia data. Data selengkapnya disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 2.200
Capaian Kinerja Urusan Perindustrian

No.	Program dan Indikator Kinerja Program	Target RPJMD 2014-2019	Target Tahun 2019	Realisasi Tahun 2019	Kinerja RPJMD s.d Tahun 2019	Status	OPD
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Cakupan Bina Kelompok Pengrajin	16,83	2,81	3,65	130	●	Disperinaker
2	Kontribusi Sektor Industri Terhadap PDRB (%)	17,95	17,97	21,95	123	●	Disperinaker
3	Pertumbuhan Sektor Industri.	3,76	3,76	6,07	161	●	Disperinaker

Status* : ● : Tercapai; ► : Akan Tercapai; ▼ : Perlu Kerja Keras

Faktor pendorong tercapainya dua Indikator Kinerja Program:

- Partisipasi aktif para pelaku industri kecil dan menengah;
- Dukungan Sumber Daya Manusia Pembina Industri;
- Adanya dukungan anggaran, baik APBD Kabupaten Magelang, APBD Provinsi Jawa Tengah maupun APBN.

Faktor penghambat tidak tercapainya Indikator Kinerja Program:

- Lemahnya kualitas SDM dan tingkat pendidikan SDM dari pelaku IKM;
- sistem penganggaran yang tidak fleksibel.

2.6.3.4. Fokus Layanan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan

2.5.3.4.1. Perencanaan Pembangunan

Kinerja urusan perencanaan pembangunan ditunjukkan dalam 4 indikator dengan 4 Indikator berstatus tercapai. Selengkapnya sebagai berikut.

Tabel 2.201
Capaian Kinerja Urusan Perencanaan Pembangunan

No.	Program dan Indikator Kinerja Program	Target RPJMD 2014-2019	Target Tahun 2019	Realisasi Tahun 2019	Kinerja RPJMD s.d Tahun 2019	Status	OPD
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJPD Yg Telah Ditetapkan Dgn PERDA	ada	ada	ada	100	●	Bappeda
2	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yg telah ditetapkan dgn PERDA/PERKADA	ada	ada	ada	100	●	Bappeda
3	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yg telah ditetapkan dgn PERKADA	ada	ada	ada	100	●	Bappeda
4	Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD	100	100	82,15	93,34	►	Bappeda

Status* : ● : Tercapai; ► : Akan Tercapai; ▼ : Perlu Kerja Keras

Faktor pendorong tercapainya Indikator Kinerja Program:

- Kelengkapan data kinerja yang memudahkan pelaksanaan evaluasi dokumen perencanaan;
- Dukungan teknologi informasi dalam proses penyusunan dokumen perencanaan;
- Koordinasi dan kerjasama seluruh perangkat daerah dalam memberikan informasi terkait proses perumusan dokumen perencanaan.




2.5.3.4.2. Keuangan

Kinerja pembangunan urusan keuangan diukur dengan satu indikator yaitu persentase peningkatan PAD. Dari target peningkatan PAD 12,02 per tahun pada tahun 2019 tercapai 19,15 atau 159,32 persen.

Tabel 2.202

Capaian Kinerja Urusan Keuangan

No.	Program dan Indikator Kinerja Program	Target RPJMD 2014-2019	Target Tahun 2019	Realisasi Tahun 2019	Kinerja RPJMD s.d Tahun 2019	Status	OPD
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Persentase Peningkatan PAD	12,02	12,02	19,15	159,32		DPPKAD

Status* :  : Tercapai;  : Akan Tercapai;  : Perlu Kerja Keras

Faktor pendorong tercapainya Indikator Kinerja Program:

- Pertumbuhan rata-rata PAD selama tahun 2015 hingga 2019 sudah mengalami peningkatan. Peningkatan nilai PAD tidak terlepas dari meningkatnya nilai realisasi masing-masing sumber PAD. Hampir seluruh sumber PAD juga mengalami pertumbuhan positif kecuali retribusi daerah dan lain-lain PAD yang sah.

2.7 Permasalahan Pembangunan Daerah

Permasalahan pembangunan daerah merupakan “*gap expectation*” antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan, serta antara apa yang ingin dicapai dimasa datang dengan kondisi riil saat perencanaan disusun. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak diantisipasi.

Secara umum permasalahan pembangunan daerah pada masing-masing urusan pemerintahan di Kabupaten Magelang pada tahun 2014- 2019 dikelompokkan dalam 6 (enam) bidang permasalahan yaitu (1) permasalahan sumberdaya manusia dan kehidupan beragama, (2) permasalahan perekonomian daerah berbasis potensi lokal yang berdaya saing, (3) permasalahan pembangunan prasarana dan sarana daerah, (4) permasalahan pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam berbasis kelestarian lingkungan hidup, (5) permasalahan tata kelola pemerintahan dan (6) permasalahan keamanan dan ketenteraman masyarakat.

2.7.1. Permasalahan Sumber Daya Manusia dan Kehidupan Beragama

1. Urusan Pendidikan
 - a. Rendahnya APK jenjang pendidikan SMA/SMK/MA/Paket C;
 - b. Rendahnya APM jenjang pendidikan SMA/SMK/MA/Paket C;
 - c. Masih rendahnya partisipasi pada jenjang pendidikan dasar (SD/MI dan SMP/MTs);
 - d. Kurangnya kualitas dan kuantitas guru;
 - e. Belum optimalnya ketersediaan, keterjangkauan, kualitas, kesetaraan dan kepastian dalam penyelenggaraan pendidikan;
 - f. Kurangnya sarana prasana pendidikan.
2. Urusan Kesehatan
 - a. Tingginya Angka Kematian Bayi (AKB);
 - b. Kurangnya kualitas lingkungan dan perilaku hidup sehat masyarakat;
 - c. Belum optimalnya kuantitas dan kualitas sarana prasarana kesehatan;
 - d. Tingginya prosentase balita gizi buruk.
3. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak
 - a. Kurangnya pemberdayaan perempuan;
 - b. Belum optimalnya upaya perlindungan anak.
4. Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
 - a. Tingginya laju pertumbuhan penduduk.
5. Urusan Sosial
 - a. Banyaknya penyandang masalah kesejahteraan sosial;
 - b. Belum optimalnya kuantitas dan kualitas sarana prasarana keagamaan.
6. Urusan Kebudayaan
 - a. Kurangnya perhatian, perlindungan dan pelestarian budaya;
 - b. Kurangnya perhatian, perlindungan dan pelestarian terhadap benda cagar budaya.
7. Urusan Pemuda dan Olah Raga
 - a. Terbatasnya sarana dan prasarana keolahragaan.
8. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
 - a. Belum optimalnya pemberdayaan masyarakat perdesaan;
 - b. Tingginya angka kemiskinan;
 - c. Rendahnya partisipasi masyarakat miskin dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi program dan kegiatan pembangunan terkait pengentasan kemiskinan.
9. Urusan Perpustakaan
 - a. Terbatasnya sarana, prasarana perpustakaan daerah;
 - b. Rendahnya minat baca masyarakat.
10. Urusan Ketransmigrasian
 - a. Rendahnya keinginan untuk bertransmigrasi.

2.7.2. Permasalahan Perekonomian Daerah Berbasis Potensi Lokal yang Berdaya Saing

1. Urusan Ketenagakerjaan
 - a. Tingginya angka pengangguran.
2. Urusan Penanaman Modal
 - a. Rendahnya daya saing daerah;
 - b. Belum optimalnya kewenangan pelayanan perijinan penanaman modal;
 - c. Belum optimalnya jumlah dan nilai investasi berskala nasional/PMDN;
 - d. Belum optimalnya pengendalian pelaksanaan penanaman modal.
3. Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
 - a. Rendahnya pengelolaan manajemen koperasi;
 - b. Rendahnya SDM usaha kecil dan menengah;
 - c. Kurangnya akses permodalan;
 - d. Terbatasnya akses dan informasi pasar;
 - e. Belum adanya pusat perdagangan bersama/UMKM center.
4. Urusan Ketahanan Pangan
 - a. Belum optimalnya upaya-upaya penganekaragaman bahan pangan;
 - b. Belum optimalnya upaya-upaya pengamanan pangan.
5. Urusan Pertanian
 - a. Semakin meningkatnya kebutuhan pemenuhan pangan masyarakat;
 - b. Berkurangnya lahan pertanian karena alih fungsi lahan ke non pertanian;
 - c. Rendahnya daya saing produk-produk pertanian;
 - d. Rendahnya akses pasar komoditas pertanian bagi petani dan kelompok tani;
 - e. Lemahnya kapasitas kelembagaan petani;
 - f. Belum optimalnya pengembangan potensi peternakan.
6. Urusan Pariwisata
 - a. Kurangnya sarana dan prasarana pariwisata;
 - b. Kurangnya SDM pelaku pariwisata ;
 - c. Kurangnya manajemen pengelolaan pariwisata.
7. Urusan Perikanan
 - a. Belum optimalnya pengembangan potensi perbenihan ikan darat.
8. Urusan Perdagangan
 - a. Terbatasnya sarana prasarana perdagangan yang memadai.
9. Urusan Perindustrian;
 - a. Kurangnya daya saing produk industri kecil dan menengah
 - b. Terbatasnya SDM;
 - c. Kurangnya akses permodalan industri;
 - d. Belum teridentifikasikannya keunggulan spasial untuk meningkatkan daya saing daerah.

2.7.3. Permasalahan Pembangunan Prasarana dan Sarana Daerah

1. Urusan Pekerjaan Umum
 - a. Rendahnya kualitas dan kuantitas sarana prasarana dan infrastruktur untuk memperlancar akses perekonomian di perkotaan dan pedesaan;
 - b. Adanya kerusakan jalan dan jembatan;
 - c. Rasio jaringan irigasi yang masih relatif kecil dan adanya kerusakan bangunan irigasi akibat dari letusan Gunung Merapi;
 - d. Kurangnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan irigasi.
2. Urusan Perumahan
 - a. Rendahnya cakupan akses rumah tangga pengguna air bersih yang layak dan berkelanjutan;
 - b. Rendahnya cakupan akses rumah tangga pengguna sanitasi yang layak dan berkelanjutan;
 - c. Masih terdapat lingkungan permukiman kumuh yang tersebar di semua kecamatan;
 - d. Tingginya angka rumah tidak layak huni.
3. Urusan Perhubungan
 - a. Kurangnya sarana dan prasarana penunjang perhubungan.
4. Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral
 - a. Belum optimalnya pengembangan dan pemanfaatan sumber-sumber energi terbarukan.

2.7.4. Permasalahan Pemanfaatan dan Pengelolaan Sumber Daya Alam Berbasis Kelestarian Lingkungan Hidup

1. Urusan Penataan Ruang
 - a. Penambangan tidak berijin;
 - b. Alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian tidak berijin;
 - c. Banyaknya bangunan di sepanjang aliran sungai yang berhulu di Merapi.
2. Urusan Lingkungan Hidup
 - a. Masih rendahnya cakupan wilayah pelayanan persampahan;
 - b. Rasio TPS yang masih rendah;
 - c. Kerusakan lingkungan akibat bencana alam;
 - d. Kerusakan lingkungan akibat pencemaran lingkungan.
3. Urusan Kehutanan
 - a. Kurangnya partisipasi dan kepedulian masyarakat dalam dukungan penyelamatan, pemulihan, pemeliharaan dan pemberdayaan hutan.

2.7.5. Permasalahan Tata Kelola Pemerintahan

1. Urusan Perencanaan Pembangunan
 - a. Belum optimalnya proses dan mekanisme pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah yang demokratis, partisipatif, aspiratif, transparan dan akuntabel.
2. Urusan Pertanahan
 - a. Banyaknya kepemilikan tanah yang belum bersertifikat.

3. Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil
 - a. Rendahnya tingkat kesadaran masyarakat untuk memiliki dokumen kependudukan.
4. Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
 - a. Kurang efektif dan efisiensinya penyelenggaraan pemerintahan di daerah;
 - b. Belum optimalnya pengelolaan Pendapatan Asli Daerah dan aset daerah.
5. Urusan Statistik
 - a. Kurangnya sinkronisasi data statistik pemerintahan dan pembangunan yang dimiliki SKPD dan instansi pemerintah.
6. Urusan Kearsipan
 - a. Rendahnya SDM pengelolaan kearsipan.
7. Urusan Komunikasi dan Informatika
 - a. Terbatasnya akses informasi yang didapat masyarakat;
 - b. Kurangnya sumberdaya manusia pengelola komunikasi dan informatika.

2.7.6. Keamanan dan Ketenteraman Masyarakat

1. Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
 - a. Rendahnya kesadaran hukum masyarakat;
 - b. Belum optimalnya pengendalian terhadap kondisi rawan bencana;
 - c. Kurangnya kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana;
 - d. Terbatasnya anggaran, personil dan perlengkapan penegakan hukum;
 - e. Meningkatnya potensi kerawanan keamanan, ketertiban terkait dengan perubahan sosial, pengangguran dan berkembangnya paham ekstrim (terorisme).

BAB III

KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Arah kebijakan ekonomi daerah didasarkan pada Misi kedua RPJMD Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024 yaitu meningkatkan daya saing daerah yang berbasis pada potensi lokal dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan hidup, dengan sasaran meningkatnya daya saing ekonomi daerah dengan indikator peningkatan nilai PDRB sektor pertanian, peningkatan nilai PDRB perindustrian pengolahan, Tingkat Kesempatan Kerja (TKK), persentase peningkatan SHU koperasi (di atas rata-rata inflasi), persentase kenaikan kelas usaha mikro, peningkatan PDRB sektor pariwisata, jumlah nilai investasi PMA, jumlah nilai investasi PMDN, indeks ketentraman dan ketertiban masyarakat, cakupan prestasi generasi muda, dan Indeks Desa Membangun (IDM).

3.1.1. Kondisi Ekonomi Nasional

Tidak berbeda dengan negara lain di dunia, pandemi Covid-19 berdampak besar terhadap ekonomi Indonesia. Prospek pertumbuhan ekonomi tahun 2020 yang pada awalnya ditargetkan mencapai 5,3 persen, direvisi ke bawah menjadi -0,4-2,3 persen dengan mempertimbangkan terjadinya perlambatan pada hampir semua komponen PDB. Melihat realisasi pertumbuhan triwulan I 2020 yang melambat signifikan menjadi sebesar 3,0 persen, pertumbuhan ekonomi tahun 2020 diperkirakan melambat mendekati nol dengan puncak penurunan terjadi pada triwulan II 2020.

Sehubungan dengan potensi pelemahan ekonomi yang tajam pada tahun 2020, tahun 2021 merupakan tahun kunci untuk pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19 terutama dalam rangka mengejar target jangka menengah dan panjang. Upaya pemulihan ekonomi terus dilakukan dengan mengaktifkan kembali mesin penggerak ekonomi: industri, pariwisata, dan investasi melalui perbaikan pada berbagai aspek. Aktifnya mesin penggerak ekonomi diperlukan untuk menyerap tenaga kerja yang kehilangan pekerjaan serta menggerakkan usaha-usaha lain yang terkait.

Melalui upaya pemulihan ekonomi yang telah dilakukan, diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi mencapai 4,5-5,5 persen pada tahun 2021

3.1.2. Kondisi Ekonomi Provinsi Jawa Tengah

Terjadinya pandemi global Covid-19 di akhir tahun 2019 secara global telah memunculkan krisis yang dampaknya bersifat multisektor dengan cakupan yang sangat luas pada tingkatan global, regional, nasional sampai dengan level lokal dan mikro, dimana krisis tersebut juga menyebabkan tekanan yang sangat kuat pada perekonomian Jawa Tengah pada berbagai lapangan usaha, khususnya pada terutama dari sisi perdagangan luar negeri dan pariwisata. Prospek pertumbuhan ekonomi global tahun 2020 semakin menurun akibat terganggunya produksi global dan melemahnya konsumsi global.

Perekonomian Jawa Tengah pada triwulan I tahun 2020 dibandingkan dengan triwulan I tahun 2019 hanya tumbuh 2,60 persen. Pertumbuhan tersebut didukung oleh semua lapangan usaha kecuali Pertanian, Kehutanan dan Perikanan yang mengalami kontraksi (pertumbuhan negatif) sebesar 2,57 persen. Namun perlambatan juga terjadi pada seluruh komponen pengeluaran pada triwulan I tahun 2020, dari sisi lapangan usaha dimana kinerja sektor industri pengolahan dan perdagangan, serta konstruksi cenderung menurun yang disebabkan melemahnya konsumsi domestik maupun permintaan luar negeri akibat wabah pandemi Covid-19 yang telah melanda di hampir semua negara di dunia. Pandemi tersebut telah memunculkan berbagai kondisi yang antara lain adalah terjadinya *Supply Shock* dengan dampak utama pada perekonomian adalah menurunnya aktivitas investasi di Jawa Tengah, yang tahap selanjutnya berpengaruh pada pendapatan masyarakat dan konsumsi yang pada kondisi normal mendorong terjadinya aktivitas perekonomian yang ideal.

Mengacu pada telaah kondisi perekonomian Jawa Tengah, hasil permodelan perhitungan asumsi ekonomi makro, dan hasil rilis berita perekonomian Jawa Tengah dari berbagai institusi, maka pada tahun 2020 pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah diproyeksikan akan berada pada kisaran angka 2,3 – 3,1 persen dengan *outlook* sebesar 2,76 persen. Sedangkan pada tahun 2021 kondisi perekonomian Jawa Tengah diperkirakan mulai membaik melalui berbagai upaya yang dilakukan oleh berbagai pihak guna mengurangi dampak pandemi Covid-19, sehingga capaian pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah pada tahun 2021 di proyeksikan pada kisaran 3,8 – 4,8 persen dengan *outlook* sebesar 4,41 persen. Sedangkan proyeksi pengendalian inflasi berada pada kisaran $3,0 \pm 1$ persen, yang dapat dicapai melalui perkuatan distribusi, ketersediaan dan kecukupan bahan kebutuhan pokok masyarakat, serta terjaganya ekspektasi positif masyarakat.

Terkait dengan upaya Pemerintah Provinsi Jawa Tengah pada pemulihan dan peningkatan perekonomian yang terdampak pandemi Covid-19, kebijakan diarahkan pada upaya untuk mencegah terjadinya berbagai kerawanan sosial, keamanan dan politik, yang muncul disebabkan kondisi perekonomian menurun serta mengurangi jumlah kemiskinan dan pengangguran. Intervensi kebijakan jangka sangat pendek-segera, jangka pendek *urgent* dan jangka menengah panjang dilakukan antara lain dengan pemenuhan kebutuhan dasar, mengurangi beban pengeluaran, mengurangi tingkat pengangguran, penyelamatan UMKM, penyediaan lapangan kerja di desa melalui berbagai kegiatan padat karya, menjaga ketahanan UMKM, pemulihan dan pemberdayaan ekonomi dan pengembangan kapasitas ekonomi kreatif. Program/kegiatan yang dilaksanakan mensinergikan berbagai komponen pembiayaan baik dari pusat, provinsi, kabupaten/kota serta masyarakat lainnya dengan sasaran utama masyarakat dan UMKM yang terdampak Covid-19. Diharapkan melalui kebijakan tersebut diharapkan akan mampu segera memulihkan kondisi perekonomian masyarakat yang sebelumnya sempat menurun. Berikut adalah gambaran proyeksi kondisi ekonomi Jawa Tengah tahun 2020 dan 2021.

3.1.3. Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2019

Perkembangan kondisi ekonomi daerah dapat dilihat dari indikator ekonomi makro serta perekonomian daerah. Perekonomian suatu daerah tidak dapat terlepas dengan perekonomian regional, perekonomian nasional bahkan perekonomian global. Ada faktor-faktor perekonomian yang tidak dapat dikendalikan oleh daerah seperti yang menyangkut kebijakan pemerintah pusat menyangkut sektor moneter maupun sektor riil.

Beberapa kondisi yang berpotensi berpengaruh terhadap pelambatan perekonomian global yang perlu diwaspadai antara lain meliputi kebijakan moneter negara-negara maju serta ketidakpastian kondisi pasar keuangan global yang berdampak pada pelemahan nilai tukar rupiah, pemulihan pertumbuhan ekonomi negara-negara mitra dagang Indonesia, kelesuan transaksi perdagangan dunia, meningkatnya daya saing eksternal serta ketergantungan bahan baku impor industri manufaktur dan produk konsumsi masyarakat.

a. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

PDRB Kabupaten Magelang atas dasar harga berlaku dari tahun 2015 – 2019 mengalami peningkatan yang fluktuatif. Pada tahun 2015, PDRB Kabupaten Magelang atas dasar harga berlaku sebesar Rp.24,148 triliun. Pada tahun 2016 mengalami kenaikan sebesar 8,63% menjadi Rp.26,232 triliun dan meningkat menjadi Rp.28,183 triliun pada tahun 2017 atau mengalami kenaikan sebesar 7,44%. Pada tahun 2018 naik sebesar 7,65% menjadi Rp.30,339 triliun sedangkan tahun 2019 naik sebesar 7,09% menjadi Rp.32,490 triliun.

Untuk PDRB atas dasar harga konstan pada tahun 2015 sebesar Rp.18,864 triliun, pada tahun 2016 meningkat menjadi Rp.19,882 triliun atau mengalami kenaikan 5,39 %. Pada tahun 2017 mengalami kenaikan sebesar 5,50% menjadi Rp.20,974 triliun dan tahun 2018 naik sebesar 5,28% menjadi Rp.22,082 triliun sedangkan tahun 2019 naik sebesar 5,30% menjadi Rp.23.253 triliun. Data selengkapnya dapat dilihat pada tabel 3.1 berikut :

Tabel 3.1.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Magelang Tahun 2015 – 2019

No	Tahun	PDRB (juta Rp.)	
		ADHB	ADHK 2010
1	2015	24.148.644,16	18.864.651,97
2	2016	26.232.349,05	19.882.244,24
3	2017	28.183.854,01	20.974.801,01
4	2018	30.339.465,47	22.082.795,90
5	2019	32.490.800,51	23.253.154,32

b. Peranan Sektor dalam Pembentukan PDRB

Kekuatan perekonomian Kabupaten Magelang terletak pada tiga sektor utama, yaitu sektor pertanian, kehutanan dan perikanan, sektor industri pengolahan dan sektor perdagangan besar dan eceran. Tahun 2019, besaran

kontribusi PDRB yang terbesar adalah industri pengolahan sebesar 21,95%, disusul pertanian sebesar 20,77% dan perdagangan sebesar 13,71%.

Apabila dikelompokkan dalam tiga kelompok yaitu sektor primer, sekunder dan tersier, pada tahun 2019 sektor tersier memberikan kontribusi terbesar yaitu 43,05%, disusul sektor sekunder sebesar 31,72% dan sektor primer sebesar 25,23%. Jika dilihat perkembangan dari tahun 2015-2019, kontribusi sektor primer semakin menurun dari tahun ke tahun, dari tahun 2015 sebesar 27,97% menjadi 25,23% pada tahun 2019.

Kontribusi sektor sekunder dari tahun 2015–2019 cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2015 kontribusi sektor sekunder sebesar 31,23% meningkat menjadi 31,72% pada tahun 2019.

Kontribusi sektor tersier dalam pembentukan PDRB Kabupaten Magelang merupakan penyumbang tertinggi kontribusi dan terdapat kecenderungan naik dari tahun ke tahun. Pada tahun 2015 kontribusi sektor tersier sebesar 40,81% meningkat menjadi 43,05% pada tahun 2019.

Tabel 3.2.
Kontribusi sektor dalam PDRB Tahun 2015-2019

No	Sektor	Kontribusi terhadap PDRB (%)				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Primer	27,97	27,40	26,54	26,12	25,23
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	23,49	22,92	22,01	21,59	20,77
B	Pertambangan dan Penggalian	4,48	4,48	4,53	4,53	4,46
2	Sekunder	31,23	31,44	31,37	31,55	31,72
C	Industri Pengolahan	21,82	22,08	21,91	21,87	21,95
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08
F	Konstruksi	9,28	9,23	9,33	9,55	9,64
3	Tersier	40,81	41,16	42,09	42,32	43,05
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	13,35	13,43	13,63	13,58	13,71
H	Transportasi dan Pergudangan	3,40	3,36	3,37	3,34	3,45
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	4,06	4,14	4,14	4,15	4,25
J	Informasi dan Komunikasi	3,13	3,13	3,44	3,60	3,79
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	2,63	2,71	2,79	2,78	2,76
L	Real Estate	1,85	1,84	1,87	1,87	1,87
M,N	Jasa Perusahaan	0,23	0,24	0,25	0,27	0,28

No	Sektor	Kontribusi terhadap PDRB (%)				
		2015	2016	2017	2018	2019
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial	3,62	3,59	3,54	3,43	3,38
P	Jasa Pendidikan	5,75	5,82	6,07	6,23	6,42
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,78	0,80	0,82	0,84	0,85
R,S,T, U	Jasa lainnya	2,01	2,10	2,17	2,23	2,29

c. PDRB Per Kapita

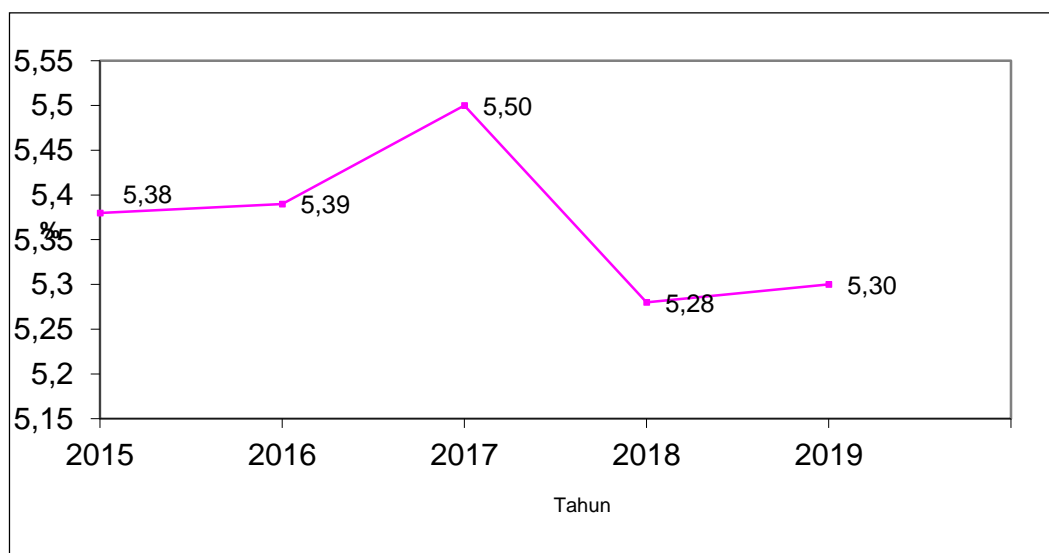
PDRB perkapita Kabupaten Magelang atas dasar harga berlaku (ADHB) tahun 2015 sebesar Rp.19,388 juta, meningkat menjadi Rp.20,866 juta pada tahun 2016 dan meningkat lagi menjadi Rp.22,176 juta pada tahun 2017. Sedangkan tahun 2018 PDRB perkapita sebesar Rp.23,697 juta dan naik menjadi Rp.25,180 juta pada tahun 2019. Data selengkapnya dapat dilihat pada tabel 3.3 berikut ini.

Tabel 3.3.
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Perkapita
Kabupaten Magelang Tahun 2015 – 2019

No	Tahun	PDRB Per Kapita (Rp. juta)
1	2015	19,388
2	2016	20,866
3	2017	22,176
4	2018	23,697
5	2019	25,180

d. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Magelang dari tahun 2015 – 2019 mendasari pada perhitungan PDRB yang sudah diperbaharui, mengalami fluktuasi, dari 5,38 % pada tahun 2015, naik menjadi 5,39 % pada tahun 2016 dan 5,50 % pada tahun 2017. Pada tahun 2018 mengalami pelambatan menjadi 5,28% dan pada tahun 2019 naik menjadi 5,30%.



Gambar 3.1

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Magelang 2015-2019

Tabel 3.4.

Pertumbuhan ekonomi menurut lapangan usaha Kabupaten Magelang
Tahun 2015 – 2019

NO	Sektor	2015	2016	2017	2018	2019
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3.54	3.32	2.52	2.39	0.79
2	Pertambangan dan Penggalian	1.71	3.14	4.51	3.33	4.74
3	Industri Pengolahan	5.52	5.63	4.88	5.34	6.07
4	Pengadaan Listrik dan Gas	1.50	4.84	4.91	5.39	5.55
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	1.33	2.17	7.03	5.48	4.40
6	Konstruksi	5.93	6.32	6.47	5.97	4.87
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	3.99	5.48	6.38	4.80	5.88
8	Transportasi dan Pergudangan	8.54	6.61	6.13	6.20	8.55
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	6.60	6.16	6.36	7.27	8.16
10	Informasi dan Komunikasi	9.45	8.30	13.35	12.77	11.38
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	8.44	8.74	5.98	4.08	3.77
12	Real Estate	7.35	6.76	6.50	5.06	5.68
13	Jasa Perusahaan	9.74	10.40	9.30	9.89	9.97
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial	4.24	2.22	2.57	3.05	3.78
15	Jasa Pendidikan	7.10	6.65	7.67	8.15	7.58
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	6.92	9.96	9.15	8.68	6.81
17	Jasa lainnya	3.29	8.85	9.31	9.86	9.25
	PDRB	5.18	5.39	5.50	5.28	5.30

Sementara itu, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Magelang Tahun 2020 akan menghadapi tekanan sejumlah faktor, seperti merosotnya perdagangan dunia, depresi rupiah, turunnya daya beli, serta melemahnya kinerja UMKM dan industri sebagai dampak dari pandemi Covid-19.

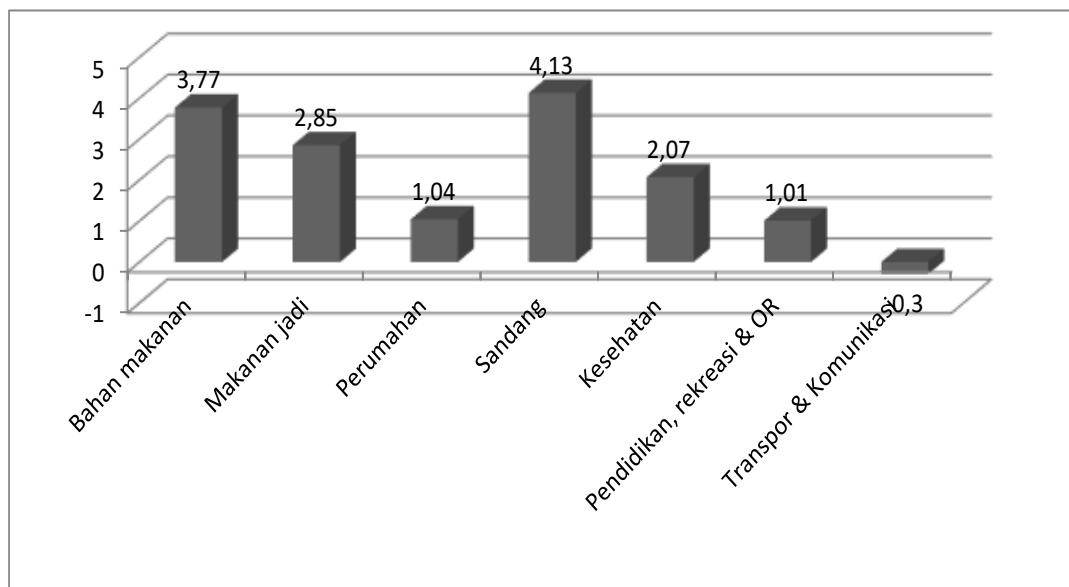
e. Inflasi

Angka inflasi dapat dijadikan sebagai salah satu indikator untuk melihat kondisi perekonomian suatu daerah. Angka tersebut menunjukkan indikator stabilitas ekonomi yang mencerminkan tingkat perubahan harga di suatu wilayah. Laju inflasi biasanya disebabkan oleh naik turunnya harga, produksi serta distribusi barang dan jasa dan juga disebabkan peredaran uang di suatu daerah.

Selama Tahun 2019, laju inflasi di Kabupaten Magelang mencapai 2,12 persen, lebih rendah dibanding tahun 2018 yang laju inflasinya sebesar 2,66 persen. Angka ini sama dengan laju inflasi nasional sebesar 2,72 dan lebih rendah dibandingkan dengan laju inflasi provinsi Jawa Tengah yang sebesar 2,81 persen.

Selama periode Januari-Desember 2019 dapat dilihat bahwa inflasi tertinggi terjadi pada bulan Mei 2019 sebesar 0,68 persen. Inflasi terendah terjadi pada September 2019 sebesar minus 0,27 persen (terjadi deflasi).

Inflasi menurut kelompok pengeluaran selama periode Januari-Desember 2019 bisa dilihat dalam grafik. Laju inflasi pada tahun 2019 tertinggi pada kelompok sandang sebesar 4,13%, kelompok bahan makanan 3,77%, kelompok makanan jadi sebesar 2,85%, kemudian kelompok kesehatan sebesar 2,07%, diikuti kelompok perumahan sebesar 1,04%, kelompok pendidikan sebesar 1,01%, dan terakhir kelompok transportasi sebesar minus 0,3%.



Gambar 3.2

Grafik laju inflasi Tahun 2019 menurut Kelompok Pengeluaran

Keberhasilan pemerintah menekan laju inflasi pada level satu digit menunjukkan bahwa fluktuasi harga barang dan jasa di Kabupaten Magelang pada tahun 2019 masih dapat dikendalikan. Kondisi ini sesuai dengan target yang ditetapkan pada kisaran angka 4%.

3.1.4. Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah

Meskipun kondisi ekonomi tahun 2020 akan menghadapi tekanan sejumlah faktor sebagai dampak pandemi Covid-19, namun diharapkan perekonomian tahun 2021 akan lebih baik dibanding tahun sebelumnya. Kebijakan pemerintah terkait *refocusing* untuk meningkatkan kapasitas penanganan kesehatan dan hal-hal terkait kesehatan, penanganan dampak ekonomi terutama menjaga agar dunia usaha daerah masing-masing tetap hidup, serta penyediaan jaring pengaman sosial (*social safety net*) diharapkan dapat menjaga kondisi ekonomi yang stabil.

Pada tahun 2021 perekonomian Kabupaten Magelang diharapkan masih menunjukkan prospek yang positif. Target indikator ekonomi makro tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.5.

Target indikator makro ekonomi Tahun 2021

No.	Indikator Ekonomi	RKPD 2020	Perubahan RKPD 2020	Target 2021
1	Pertumbuhan ekonomi	5,1 – 5,6 %	1,7 – 2,9 %	3,3 – 4,3 %
2	PDRB Perkapita ADHB	Rp. 26,70 Juta	Rp. 23,45 Juta	Rp. 24,73 Juta
3	Inflasi	3,5 ± 1 %	3,5 ± 1 %	2,5 – 4,0 %
4	Tingkat Kemiskinan	9,93 %	13,90 – 12,80 %	12,44 – 11,52 %
5	Tingkat Pengangguran Terbuka	2,4 – 3,0 %	5,38 – 6,25 %	4,54 – 5,17 %

Sumber : RPJMD Kab. Magelang Tahun 2019-2024

3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Salah satu elemen penting dalam proses pembangunan daerah adalah ketersediaan anggaran. Dokumen RKPD merupakan skenario kebijakan pembangunan sebagai representasi dari rencana kerja pemerintah untuk mewujudkan tujuan pembangunan tahunan. Implementasi RKPD yang dalam implementasinya akan didukung oleh alokasi anggaran dari berbagai sumber dana yang meliputi APBD Kabupaten Magelang, APBD Propinsi dan APBN serta peran swasta maupun swadaya masyarakat.

3.2.1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan. Anggaran pendapatan daerah disusun sebagai kesatuan sistem komprehensif dan tersusun atas dasar potensi yang dikelola oleh Perangkat Daerah (PD) sebagai unit penghasil pendapatan daerah. Pendapatan daerah di Kabupaten Magelang diupayakan ada kenaikan setiap tahun.

Untuk menjaga kapasitas PAD dan dalam upaya kedepan untuk memperkuat kemampuan fiskal, perlu dilakukan :

- a. Peningkatan koordinasi dan komunikasi dengan pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi untuk pengoptimalan penerimaan dana transfer dan lain-lain pendapatan daerah yang sah;
- b. Peningkatan kualitas dan kuantitas petugas atau pengelola pajak daerah;
- c. Perbaikan kualitas pemungutan dan pelayanan pajak daerah dengan perbaikan/*update* teknologi informasi seperti system pembayaran dan pelaporan pajak secara online (e-SPTPD, SIMBPHTB, SISMIOP,e-PBB, e-MBLB, e-Retribusi);
- d. Sosialisasi untuk meningkatkan kepada masyarakat khususnya para wajib pajak dan retribusi daerah;
- e. Peninjauan kembali terhadap dasar perhitungan perpajakan daerah seperti tarif, NJOP PBB dsb;
- f. Meningkatkan koordinasi dan komunikasi dengan SKPD penghasil untuk menggali potensi retribusi daerah;
- g. Peningkatan produktivitas BUMD agar bagi hasil laba BUMD meningkat melalui penyehatan sistem manajemen serta peningkatan penyertaan modal;
- h. Pengelolaan manajemen kas yang optimal dengan memanfaatkan anggaran yang menganggur untuk diinvestasikan seperti deposito untuk meningkatkan penerimaan pendapatan dari lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Syah.

Realisasi pendapatan Tahun 2018 dan 2019, target pendapatan daerah Tahun 2020-2021 yang meliputi PAD, Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Syah, dapat dilihat dalam tabel 3.6.

Tabel 3.6.
Realisasi Pendapatan Tahun 2018 dan Tahun 2019
dan Target Tahun 2020 dan Proyeksi Tahun 2021

No.	Uraian	Realisasi 2018	Realisasi 2019	Target 2020	Proyeksi 2021
I	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	325.098.327.236	417.178.099.961	406.095.299.000	265.817.615.504
1	Pajak Daerah	124.444.072.963	156.886.789.644	154.840.377.355	88.169.544.504
2	Retribusi Daerah	18.186.191.392	22.934.190.849	46.334.305.486	18.903.610.000
3	Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	28.634.358.666	23.700.417.768	27.548.499.396	14.905.520.000
4	Lain-lain PAD Yang Sah	153.833.704.215	213.656.701.700	177.372.116.763	143.838.941.000
II	BAGIAN DANA PERIMBANGAN	1.398.132.841.570	1.500.585.586.102	1.569.695.524.000	1.470.878.244.406
1	Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak	36.431.591.975	28.247.886.437	36.028.834.000	35.217.956.406
2	Dana Alokasi Umum (DAU)	1.060.540.612.000	1.097.366.974.000	1.109.430.605.000	1.007.277.736.000
3	Dana Alokasi Khusus (DAK)	301.160.637.595	327.189.198.665	374.065.573.000	400.439.976.000
4	Dana Insentif Daerah (DID)	-	47.781.527.000	50.170.512.000	27.942.576.000
III	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	581.273.629.232	564.558.471.818	667.015.401.000	676.034.650.000
1	Hibah	91.762.241.127	1.500.000.000	109.619.800.000	114.269.600.000
2	Dana Bagi Hasil Pajak dr Prov. Dan Pemerintah Daerah Lainnya	154.791.322.105	167.256.161.818	162.385.323.000	170.720.941.000
3	Dana penyesuaian dan otsus	-	-	-	-
4	Bantuan Keuangan dari Prov. Atau Pemerintah Daerah Lainnya	9.359.234.000	12.730.533.000	-	-
5	Dana Desa	325.360.832.000	383.071.777.000	395.010.278.000	391.044.109.000
	J U M L A H	2.304.504.798.038	2.482.322.157.881	2.642.806.224.000	2.412.730.509.910

Sumber : BPPKAD, 2020.

Asumsi Proyeksi Pendapatan Asli Daerah 2021 mengalami kenaikan apabila dibandingkan dengan Target PAD setelah Pergeseran 2020 dikarenakan :

1. Pajak Daerah mengalami kenaikan dikarenakan :
 - a. Sudah mulai membaiknya perekonomian walaupun belum normal seperti pada saat belum adanya Pandemi Covid-19 ;
 - b. Sudah mulai membaiknya daya beli masyarakat ;
2. Retribusi Daerah mengalami kenaikan dikarenakan sudah mulai adanya aktivitas dunia usaha di masyarakat sehingga roda perekonomian mulai membaik walaupun belum normal seperti sebelum adanya Pandemi Covid-19.

3. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan mengalami penurunan dikarenakan Laba Perusda Tahun 2021 adalah hasil laba atau usaha pada Tahun 2020 imbas dari Pandemi Covid-19 , yang terdiri dari :
 - a. sektor perbankan mengalami penurunan dikarenakan penundaan pembayaran dari kredit UMKM;
 - b. PDAM mengalami penurunan laba dikarenakan penghapusan denda, pemberian keringanan 100% untuk pelanggan kategori rumah tangga A, dan pemberian keringanan sebesar 50% untuk pelanggan kategori sosial atas pemakaian air pada Bulan April, Mei dan Juni 2020,
 - c. Perusahaan Daerah Aneka Usaha (PDAU) mengalami penurunan laba dikarenakan belum pulihnya ekonomi baik nasional maupun daerah dan adanya rasionalisasi belanja barang dan jasa di pemerintah daerah sebesar 33%.

Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah mengalami kenaikan yang besar pada penerimaan BLUD dari Dinas Kesehatan dan RSUD Muntilan karena diasumsikan jumlah layanan dan jadwal pelayanan kesehatan sudah kembali normal.

3.2.2. Arah Kebijakan Belanja Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, belanja daerah digunakan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah yang terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan.

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, disebutkan bahwa penerapan anggaran berbasis prestasi kerja. Sistem ini memerlukan kriteria pengendalian kinerja dan evaluasi serta untuk menghindari duplikasi dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran perangkat daerah, sehingga perlu dilakukan penyatuan sistem akuntabilitas kinerja dalam sistem anggaran daerah.

Pemerintah daerah menetapkan target capaian kinerja setiap belanja, baik dalam konteks daerah, satuan kerja perangkat daerah, maupun program dan kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Program dan kegiatan harus memberikan informasi yang jelas dan terukur serta memiliki korelasi langsung dengan keluaran yang diharapkan dari program dan kegiatan dimaksud ditinjau dari aspek indikator, tolok ukur dan target kerjanya.

Kebijakan belanja daerah diarahkan untuk menunjang pencapaian visi dan misi Kabupaten Magelang dalam mendanai pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan daerah, dan memiliki dasar hukum yang melandasinya serta untuk pengendalian dan pemulihan pasca Covid-19.

Belanja daerah dirinci menurut urusan pemerintahan daerah, bidang urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, rincian objek, dan sub rincian objek belanja daerah. Struktur belanja daerah dalam APBD Tahun Anggaran 2021 berdasarkan

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, diuraikan sebagai berikut:

1. Belanja Operasi
 - a. Belanja Pegawai;
 - b. Belanja Barang dan Jasa;
 - c. Belanja Bunga;
 - d. Belanja Subsidi;
 - e. Belanja Hibah; dan
 - f. Belanja Bantuan Sosial.
2. Belanja Modal
 - a. Belanja Tanah;
 - b. Belanja Peralatan dan Mesin;
 - c. Belanja Bangunan dan Gedung;
 - d. Belanja Jalan;
 - e. Belanja Irigasi dan Jaringan;
 - f. Belanja Aset Tetap lainnya.
3. Belanja Tidak Terduga
4. Belanja Transfer
 - a. Belanja Bagi Hasil;
 - b. Belanja Bantuan Keuangan

Pemerintah Kabupaten Magelang juga mengalokasikan belanja untuk mendanai urusan pemerintahan daerah yang besarnya telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain alokasi belanja untuk fungsi pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pengawasan, peningkatan kompetensi sumber daya manusia, dan kelurahan atau desa

Belanja daerah berpedoman pada standar harga satuan regional, analisis standar belanja, rencana kebutuhan barang milik daerah dan/atau standar teknis yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang selanjutnya digunakan untuk menyusun RKA-SKPD dalam penyusunan rancangan Perda tentang APBD

Standar harga satuan regional digunakan sebagai dasar dalam menyusun standar harga satuan pada masing-masing daerah dengan berpedoman pada peraturan presiden mengenai Standar Harga Satuan Regional. Dalam hal pemerintah daerah telah menetapkan standar harga satuan lebih rendah dari standar harga satuan regional, maka pemerintah daerah tetap dapat menggunakan standar harga satuan tersebut. Pemerintah daerah dalam pengadaan barang/jasa mengutamakan penggunaan produksi dalam negeri guna memberikan kontribusi dalam peningkatan penggunaan produk dalam negeri sebagaimana maksud Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Arah kebijakan untuk Belanja Operasi untuk Tahun Anggaran 2021 adalah :

1. Mencukupi kebutuhan belanja pegawai, antara lain :

- a. gaji pokok dan tunjangan ASN belum memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan ASN, serta memperhitungkan pemberian gaji ketiga belas dan tunjangan hari raya,
 - b. Belum memperhitungkan belanja pegawai untuk kebutuhan pengangkatan Calon ASN sesuai formasi pegawai Tahun 2021,
 - c. kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan akses yang besarnya maksimum 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan,
 - d. jaminan kesehatan bagi kepala daerah/wakil kepala daerah, pimpinan dan anggota DPRD serta ASN/PNS daerah, jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi ASN, jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi kepala daerah/wakil kepala daerah serta pimpinan dan anggota DPRD,
 - e. Pemberian tambahan penghasilan kepada pegawai sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah,
 - f. Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah,
 - g. Pemberian Insentif Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bagi Pejabat/PNSD yang melaksanakan tugas pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah atau pelayanan lainnya,
2. Untuk mencukupi belanja barang dan jasa, sebagai berikut
- Belanja barang dan jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah guna pencapaian sasaran prioritas daerah yang tercantum dalam RPJMD, antara lain berupa
- a. belanja barang pakai habis, bahan/material,
 - b. jasa kantor, jasa asuransi,
 - c. perawatan kendaraan bermotor,
 - d. cetak/penggandaan,
 - e. sewa rumah/gedung/ gudang/parkir,
 - f. sewa sarana mobilitas, sewa alat berat,
 - g. sewa perlengkapan dan peralatan kantor,
 - h. makanan dan minuman,
 - i. pakaian dinas dan atributnya,
 - j. pakaian kerja,
 - k. pakaian khusus dan hari-hari tertentu,
 - l. perjalanan dinas, perjalanan dinas pindah tugas, pemulangan pegawai,
 - m. pemeliharaan,
 - n. jasa konsultasi,
 - o. jasa ketersediaan pelayanan (availability payment),
 - p. lain-lain pengadaan barang/jasa, belanja lainnya yang sejenis,

- q. belanja barang dan/atau jasa yang diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga,
 - r. belanja barang dan/atau jasa yang dijual kepada masyarakat atau pihak ketiga,
 - s. belanja beasiswa pendidikan PNS, belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS,
 - t. belanja pemberian uang yang diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat
3. Mencukupi Belanja hibah,
 Belanja Hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintah daerah sesuai kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.
 Hibah juga berupa pemberian bantuan keuangan kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan juga untuk mencukupi belanja hibah wajib yang bersumber dari pendapatan transfer
4. Mencukupi belanja bantuan sosial yang digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan
 Menganggarkan belanja hibah dan bansos dalam rangka menunjang prioritas daerah dengan mempedomani Undang – Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679), dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD. Disamping itu Pemerintah Kabupaten Magelang juga mengalokasikan Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Desa guna percepatan pembangunan di desa sesuai kewenangannya.
 Pemberian Bantuan Keuangan kepada partai politik berpedoman pada Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 4 Tahun 2010 tentang Bantuan Keuangan keuangan kepada Partai Politik di Kabupaten Magelang.

Arah kebijakan belanja Modal untuk Tahun Anggaran 2021 adalah untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan publik serta pertumbuhan ekonomi daerah.

Arah kebijakan Belanja Tidak Terduga untuk Tahun Anggaran 2021 adalah digunakan untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya

Arah Kebijakan Belanja Transfer terdiri dari :

1. Belanja Bagi Hasil

Dalam rangka pelaksanaan pasal 72 ayat (1) huruf c dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan pasal 97 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Kabupaten Magelang menganggarkan belanja Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) dari rencana pajak daerah dan retribusi daerah

2. Belanja Bantuan Keuangan

Dengan mempedomani Pasal 72 ayat (1) huruf b dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan Pasal 95 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019, Pemerintah Kabupaten Magelang menganggarkan bantuan Keuangan dengan tujuan dalam rangka memberikan manfaat bagi pemberi dan/atau penerima bantuan keuangan, untuk mengatasi kesenjangan fiskal dan membantu capaian kinerja program prioritas pemerintah daerah penerima bantuan keuangan sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan penerima bantuan.

Pemerintah Kabupaten Magelang juga menganggarkan belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat dengan mempedomani Pasal 72 ayat (1) huruf b dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan Pasal 95 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019.

Adapun rincian perkembangan alokasi belanja dari tahun 2018 - 2020 dan proyeksi tahun 2021 disajikan dalam Tabel 3.7.

Tabel 3.7.
Realisasi Belanja Tahun 2018 dan Tahun 2019
dan Proyeksi Tahun 2020 dan 2021

No.	Uraian	Realisasi 2018	Realisasi 2019	Target 2020	Proyeksi 2021
2	BELANJA DAERAH				
2.1.	Belanja Tidak Langsung	1.469.755.920.226	1.600.619.506.377	1.662.470.964.000	1.715.521.147.174
	1 Belanja Pegawai	843.116.457.075	840.371.055.411	923.633.387.000	904.165.611.091
	2 Belanja Bunga		-		
	3 Belanja Subsidi		-		
	4 Belanja Hibah	55.322.664.784	46.064.197.000	66.990.180.000	62.651.553.200
	5 Belanja Bantuan Sosial	40.944.365.000	30.198.609.000	8.268.100.000	35.054.295.000
	6 Belanja Bagi Hasil Kpd Prov/Kab/Kota/Desa	15.546.920.254	18.900.059.265	21.899.049.000	12.241.276.890
	7 Belanja Bantuan Keuangan	513.879.513.113	665.011.830.701	636.680.248.000	618.465.834.993
	8 Belanja Tidak Terduga	946.000.000	73.755.000	5.000.000.000	82.942.576.000
2.2.	Belanja Langsung	1.018.093.312.487	876.760.016.030	1.069.808.121.000	762.415.165.427
	Belanja pegawai	82.099.898.924	76.845.581.615		
	Belanja barang dan jasa	434.066.204.801	437.478.395.378		
	Belanja modal	501.927.208.762	362.436.039.037		
	Jumlah Belanja	2.487.849.232.713	2.477.379.522.407	2.732.279.085.000	2.477.936.312.601

Sumber : BPPKAD, 2020.

Pada prinsipnya kebijakan belanja daerah berpedoman pada prinsip penganggaran dengan pendekatan anggaran kinerja, yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan, dengan tetap memperhatikan kewenangan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran yang menjamin efektivitas dan efisiensi pemanfaatan anggaran dengan mendasarkan pada skala prioritas program dan strategis pembangunan daerah.

3.2.3. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan merupakan transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk menutup selisih antara pendapatan dan belanja daerah. Pembiayaan daerah tersebut bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran sebelumnya (SiLPA), pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah dan obligasi daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman dan penerimaan piutang daerah.

Komponen pembiayaan daerah penggunaannya diarahkan untuk menutup beban hutang atau kewajiban kepada pihak ketiga, dan apabila memungkinkan dapat pula dialokasikan untuk pembentukan dana cadangan, penyertaan modal kepada BUMD atau investasi daerah lainnya dalam rangka menciptakan kemandirian usaha dan pemberian pinjaman daerah. Sehingga pada akhirnya tetap diupayakan anggaran yang berimbang setelah pembiayaan.

Perkembangan penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah tahun anggaran 2018 s.d. 2021 dapat dilihat dalam Tabel 3.8. dibawah ini.

Tabel 3.8.
Realisasi Pembiayaan Tahun 2018 dan Tahun 2019
dan Target Tahun 2020 dan Proyeksi Tahun 2021

No	Uraian	Realisasi 2018	Realisasi 2019	Target 2020	Proyeksi 2021
3.1.	Penerimaan Pembiayaan daerah	565.955.368.294	222.336.981.082	95.176.861.000	70.909.802.691
3.1.1	Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SILPA)	434.704.300.294	222.336.981.082	95.176.861.000	70.909.802.691
3.1.2	Pencairan Dana Cadangan	131.251.068.000	0	0	
3.1.3	Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan	0		0	0
3.1.4	Penerimaan pinjaman daerah	0		0	0
3.1.5	Penerimaan kembali pemberian pinjaman	0	0	0	0
3.1.6	Penerimaan piutang daerah	0		0	0
3.1.7	Penerimaan hasil penarikan	0		0	0
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	565.955.368.294	222.336.981.082	95.176.861.000	70.909.802.691
3.2	Pengeluaran Pembiayaan daerah	25.755.000.000	11.704.000.000	5.704.000.000	5.704.000.000
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	-	0	0	0
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemda	25.755.000.000	11.704.000.000	5.704.000.000	5.704.000.000
3.2.3	Pembayaran Pokok Utang	0		0	0
3.2.4	Pemberian Pinjaman Daerah	0	0	0	0
	JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN	25.755.000.000	11.704.000.000	5.704.000.000	5.704.000.000
	Pembiayaan neto	540.200.368.294	210.632.981.082	89.472.861.000	65.205.802.691
	Sisa Lebih Pembiayaan Tahun Anggaran Berkenaan (SILPA)	356.855.933.619	215.575.616.556		

Sumber : BPPKAD, 2020.

Proyeksi kapasitas riil dihitung berdasarkan penerimaan pendapatan dan pembiayaan daerah dikurangi belanja wajib dan mengikat serta pengeluaran pembiayaan yang digunakan untuk mendanai pembangunan daerah tahun berkenaan. Proyeksi kapasitas riil keuangan daerah untuk mendanai pembangunan daerah pada tahun 2021 sebesar Rp.1.573.770.701.510, menurun dibanding tahun 2020 sebesar Rp.1.808.645.698.000.

Secara keseluruhan, Realisasi APBD Tahun 2018 dan Tahun 2019 dan Proyeksi Tahun 2020 dan 2021 dapat dilihat dalam Tabel 3.9.

Tabel 3.9.

Realisasi APBD Tahun 2018 - 2019, Target Tahun 2020 dan Proyeksi Tahun 2021

No.	Uraian	Realisasi 2018	Realisasi 2019	Target 2020	Proyeksi 2021
1.1	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	325.098.327.236	417.178.099.961	406.095.299.000	265.817.615.504
1.1.1	Hasil Pajak Daerah	124.444.072.963	156.886.789.644	154.840.377.355	88.169.544.504
1.1.2	Hasil Retribusi Daerah	18.186.191.392	22.934.190.849	46.334305.486	18.903.610.000
1.1.3	Hasil Perusahaan milik daerah dan Pengelolaan Kekayaan daerah yang dipisahkan	28.634.358.666	23.700.417.768	27.548.499.396	14.905.520.000
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli daerah yg sah	153.833.704.215	213.656.701.700	177.372.116.763	143.838.941.000
1.2	Bagian Dana Perimbangan	1.398.132.841.570	1.500.585.586.102	1.569.695.524.000	1.470.878.244.406
1.2.1	Bagi Hasil Pajak / Bukan Pajak	36.431.591.975	28.247.886.437	36.028.834.000	35.217.956.406
1.2.2	D A U	1.060.540.612.000	1.097.366.974.000	1.109.430.605.000	1.007.277.736.000
1.2.3	D A K	301.160.637.595	327.189.198.665	374.065.573.000	400.439.976.000
1.2.4	DID	-	47.781.527.000	50.170.512.000	27.942.576.000
1.3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah	581.273.629.232	644.163.935.000	667.015.401.000	676.034.650.000
1.3.1	Pendapatan Hibah	91.762.241.127	1.500.000.000	109.619.800.000	114.269.600.000
1.3.2	Dana darurat		0		
1.3.3	Dana bagi hasil pajak dr Provinsi dan Pemda Lain	154.791.322.105	167.256.161.818	162.385.323.000	170.720.941.000
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi khusus		0	0	
1.3.5	Bantuan Keuangan dr Provinsi dan Pemda Lain	9.359.234.000	12.730.533.000	0	
1.3.6	Dana Desa	325.360.832.000	383.071.777.000	395.010.278.000	391.044.109.000
A	JUMLAH PENDAPATAN	2.304.504.798.038	2.482.322.157.881	2.642.806.224.000	2.412.730.509.910
2.1	Belanja Tidak Langsung	1.469.755.920.226	1.600.619.506.377	1.662.470.964.000	1.715.521.147.174
2.1.1	Belanja Pegawai	843.116.457.075	840.371.055.411	923.633.387.000	904.165.611.091

No.	Uraian	Realisasi 2018	Realisasi 2019	Target 2020	Proyeksi 2021
2.1.2	Belanja bunga		0		
2.1.3	Belanja subsidi		0		
2.1.4	Belanja Hibah	55.322.664.784	46.064.197.000	66.990.180.000	62.651.553.200
2.1.5	Belanja bantuan Sosial	40.944.365.000	30.198.609.000	8.268.100.000	35.054.295.000
2.1.6	Belanja Bagi Hasil Kepada Prov. Kab. Kota dan desa	15.546.920.254	18.900.059.265	21.899.049.000	12.241.276.890
2.1.7	Belanja Bant. Keuangan Kpd Provinsi/Kab dan Pemerintah Desa.	513.879.513.113	665.011.830.701	636.680.248.000	618.465.834.993
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	946.000.000	73.755.000	5.000.000.000	82.942.576.000
B	JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.469.755.920.226	1.600.619.506.377	1.662.470.964.000	1.715.521.147.174
2.2	Belanja Langsung	1.018.093.312.487	876.760.016.030	1.069.808.121.000	762.415.165.427
2.2.1	Belanja pegawai	82.099.898.924	76.845.581.615	110.571.527.044	
2.2.2	Belanja barang dan jasa	434.066.204.801	437.478.395.378	584.758.863.264	
2.2.3	Belanja modal	501.927.208.762	362.436.039.037	374.477.730.692	
C	JUMLAH BELANJA LANGSUNG	1.018.093.312.487	876.760.016.030	1.069.808.121.000	762.415.165.427
D	TOTAL JUMLAH BELANJA	2.487.849.232.713	2.477.379.522.407	2.732.279.085.000	2.477.936.312.601
	SURPLUS/(DEFISIT)	(183.344.434.675)	4.942.635.474	(89.472.861.000)	(65.205.802.691)
3.1.	Penerimaan Pembiayaan daerah	565.955.368.294	222.336.981.082	118.772.058.088	70.909.802.691
3.1.1	Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SILPA)	434.704.300.294	222.336.981.082	95.176.861.000	70.909.802.691
3.1.2	Pencairan Dana Cadangan	131.251.068.000	0	0	
3.1.3	Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan				
3.1.4	Penerimaan pinjaman daerah		0		
3.1.5	Penerimaan kembali pemberian pinjaman	-	0	0	

No.	Uraian	Realisasi 2018	Realisasi 2019	Target 2020	Proyeksi 2021
3.1.6	Penerimaan piutang daerah		0		
3.1.7	Penerimaan hasil penarikan		0		
E	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	565.955.368.294	222.336.981.082	95.176.861.000	70.909.802.691
3.2	Pengeluaran Pembiayaan daerah	25.755.000.000	11.704.000.000	5.704.000.000	5.704.000.000
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	-	0	0	0
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemda	25.755.000.000	11.704.000.000	5.704.000.000	5.704.000.000
3.2.3	Pembayaran Pokok Utang		0	0	
3.2.4	Pemberian Pinjaman Daerah	-	0	0	
F	JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN	25.755.000.000	11.704.000.000	5.704.000.000	5.704.000.000
	Pembiayaan Netto	540.200.368.294	210.632.981.082	89.472.861.000	65.205.802.691
G	Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan (SILPA)	356.855.933.619	215.575.616.556	0	0

Sumber : BPPKAD, Bappeda dan Litbangda, 2020.

BAB IV

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2021

Tahun 2021 merupakan tahun kedua pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Magelang tahun 2019-2024. Penyusunan rumusan sasaran dan prioritas pembangunan daerah Kabupaten Magelang dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Tahun 2021 mengacu kepada (1) RPJMD Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024, (2) hasil evaluasi kinerja RKPD Tahun 2020, (3) arah kebijakan dan prioritas pembangunan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021, (4) arah kebijakan dan prioritas nasional Tahun 2021.

Berdasarkan arah kebijakan pembangunan lima tahun ke depan, guna mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan sejalan dengan visi dan misi pembangunan Kabupaten Magelang tahun 2019-2024 maka tema pembangunan tahun 2021 adalah “Peningkatan kesejahteraan melalui pemerataan infrastruktur publik.” Hal ini mengandung makna bahwa Pemerintah Kabupaten Magelang mempunyai komitmen yang besar untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera melalui pemerataan infrastruktur publik. Tidak dapat dipungkiri bahwa infrastruktur publik dapat menjadi pendorong bagi pertumbuhan ekonomi baik melalui peningkatan aktivitas perekonomian masyarakat maupun untuk menarik adanya investasi yang pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun kemudian, karena adanya kejadian luar biasa berupa pandemi *coronavirus disease 2019* (Covid-19) pada tahun 2020 ini, yang berimbas pada timbulnya permasalahan pada aspek kesehatan, sosial masyarakat dan melemahnya perekonomian mikro maupun makro, maka tema pembangunan tahun 2021 Kabupaten Magelang menjadi **“Penguatan kesejahteraan masyarakat dan ekonomi lokal”**

Pelaksanaan tema ini membutuhkan komitmen, dukungan, dan partisipasi yang kuat dari segenap pemangku kepentingan pembangunan, sehingga pengelolaannya akan lebih komprehensif dari sisi perencanaan, kelembagaan, penganggaran, dan implementasinya. Selain itu diperlukan juga integrasi antar dokumen perencanaan dari semua tingkatan pemerintahan untuk mewujudkan keselarasan prioritas pembangunan antara Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah dan prioritas nasional.

Untuk mendukung tema tersebut di atas, diperlukan hal-hal sebagai berikut.

1. Evaluasi pelaksanaan pembangunan Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Bab II buku ini.
2. Prioritas pembangunan Kabupaten Magelang tahun 2021 mengacu pada RPJMD Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024, yang diselaraskan dengan kebijakan pemulihan dampak covid-19
3. Fokus pelaksanaan prioritas pembangunan Kabupaten Magelang Tahun 2021 diantaranya *recovery* dampak pandemi Covid-19.

4. Penyusunan prioritas dan sasaran pembangunan diarahkan untuk menjamin terwujudnya visi misi Pemerintah Kabupaten Magelang sebagaimana tertuang dalam RPJMD 2019-2024 dan mendukung terwujudnya prioritas pembangunan provinsi dan nasional.

4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Visi pembangunan Kabupaten Magelang sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024 adalah “Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Magelang yang Sejahtera, Berdaya Saing dan Amanah” (SEDAYA AMANAH). Visi tersebut mengandung tiga kata kunci yaitu Sejahtera, Berdaya Saing, dan Amanah disingkat menjadi “Sedaya Amanah”. Sedaya dalam bahasa Jawa mempunyai arti semua (*sedoyo*) sehingga sedaya amanah bermakna bahwa seluruh pemangku kebijakan dan pemangku kepentingan, di semua tingkatan, harus menjaga amanah dalam menjalankan peran dan fungsinya. Adapun makna dari ketiga kata kunci yang terkandung pada visi adalah sebagai berikut.

- 1) Sejahtera adalah terwujudnya masyarakat Kabupaten Magelang yang sejahtera, yaitu kondisi yang dapat terpenuhi kebutuhan dasar meliputi kebutuhan ekonomi (*materiil*) maupun sosial (*spirituail*), dengan kata lain kebutuhan dasar masyarakat telah terpenuhi secara lahir batin secara adil dan merata. Dalam terminologi Jawa adalah *wareg, wutuh, waras dan wasis*. *Wareg* adalah terpenuhinya kebutuhan pangan, *wutuh* adalah terpenuhinya kebutuhan sandang dan papan, *waras* adalah terjaminnya kesehatan masyarakat lahir batin, jasmani rohani dan *wasis* adalah terwujudnya masyarakat yang cerdas dan berakhlak mulia.
- 2) Berdaya saing adalah terwujudnya masyarakat Kabupaten Magelang yang berdaya saing, yaitu kemampuan masyarakat untuk mencapai kemajuan yang lebih tinggi serta berkelanjutan di tengah persaingan dengan daerah lain baik domestik maupun internasional. Hal ini dilakukan dengan cara memanfaatkan sumber daya yang dimiliki sehingga menjadi keunggulan kompetitif. Pada akhirnya daerah akan memiliki daya saing yang strategis dengan menciptakan iklim investasi yang kondusif, budaya inovasi serta pengembangan dan pemanfaatan teknologi.
- 3) Amanah adalah terwujudnya masyarakat Kabupaten Magelang yang amanah, yaitu keinginan kuat untuk mewujudkan pemerintahan yang demokratis, baik dan bersih yang ditandai dengan transparansi, partisipasi, inovasi dan akuntabel, sehingga mampu menciptakan dan menjaga solidaritas, kepercayaan, kejujuran, kerjasama, dan komitmen yang baik dalam pelayanan publik.

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, maka dilaksanakan 3 (tiga) misi pembangunan daerah sebagai berikut.

- 1) Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat yang sejahtera dan berakhlak mulia.
- 2) Meningkatkan daya saing daerah yang berbasis pada potensi lokal dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan hidup.
- 3) Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang amanah.

Upaya mewujudkan pencapaian visi, misi pembangunan Kabupaten Magelang tahun 2019-2024 meliputi 5 (lima) tujuan dengan 9 (sembilan) indikator tujuan dan 15 (lima belas) sasaran daerah dengan 24 (dua puluh empat) indikator sasaran daerah. Secara rinci, misi, tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Magelang selama lima tahun ke depan diuraikan sebagai berikut:

- 1) Misi pertama “Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat yang sejahtera dan berakhlak mulia”. Misi ini memiliki tujuan dan sasaran sebagai berikut.
 - a. Tujuan pertama pada misi pertama adalah meningkatnya kualitas sumber daya manusia dengan indikatornya yaitu Indek Pembangunan Manusia (IPM). Sasaran pada tujuan ini adalah:
 - (1) meningkatnya kinerja pembangunan pendidikan dengan indikatornya yaitu rata-rata lama sekolah, harapan lama sekolah, dan persentase SD dan SMP yang berakreditasi minimal B;
 - (2) meningkatnya kinerja pembangunan kesehatan dengan indikatornya yaitu angka harapan hidup.
 - b. Tujuan kedua pada misi pertama adalah meningkatnya paritas daya beli masyarakat dengan indikatornya yaitu angka kemiskinan, pengeluaran perkapita riil yang disesuaikan, dan inflasi. Sasaran pada tujuan ini adalah:
 - (1) menurunnya jumlah PMKS dengan indikator persentase penurunan PMKS;
 - (2) meningkatnya ketahanan pangan daerah dengan indikator indeks ketahanan pangan;
 - (3) Terkendalinya tingkat pengangguran terbuka dengan indikator tingkat pengangguran terbuka (TPT);
 - (4) meningkatnya layanan hunian yang layak dan berkualitas dengan indikator cakupan hunian layak dan berkualitas.
 - c. Tujuan ketiga pada misi pertama adalah meningkatnya pembangunan berbasis gender dengan indikator Indeks Pembangunan Gender (IPG). Sasaran pada tujuan ini adalah meningkatnya keberdayaan gender dengan indikator Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) dan kategori kabupaten layak anak.
- 2) Misi kedua “Meningkatkan daya saing daerah yang berbasis pada potensi lokal dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan hidup”. Misi ini memiliki tujuan meningkatnya daya saing daerah dengan indikator Cakupan Pembangunan Infrastruktur Wilayah Berkelanjutan, Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE), dan PDRB perkapita. Sasaran pada tujuan ini adalah:
 - a. tercapainya kualitas lingkungan hidup yang baik dengan indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH);
 - b. meningkatnya cakupan layanan infrastruktur dengan indikator cakupan pembangunan infrastruktur wilayah;

- c. meningkatnya daya saing ekonomi daerah dengan indikator nilai PDRB sektor perdagangan, nilai PDRB sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan, nilai PDRB sektor industri pengolahan, nilai PDRB sektor pariwisata, pertumbuhan investasi, cakupan ketentraman dan ketertiban masyarakat, dan indeks desa membangun.
- 3) Misi ketiga “Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Amanah”. Misi ini memiliki tujuan meningkatnya tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel dengan indikator Indeks Reformasi Birokrasi (IRB). Adapun sasaran daerah yang ditetapkan untuk mewujudkan tujuan dari misi ketiga adalah:
- a. meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan dengan indikator sasaran nilai AKIP;
 - b. meningkatnya tata kelola pemerintahan berbasis teknologi informasi dan komunikasi dengan indikator sasaran Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE);
 - c. meningkatnya pengelolaan pendapatan, keuangan dan aset daerah dengan indikator sasaran opini BPK;
 - d. meningkatnya kualitas pelayanan publik dengan indikator sasaran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM);
 - e. meningkatnya kinerja sistem manajemen kepegawaian dengan indikator sasaran Indeks Sistem Merit.

Pembangunan daerah tahun 2021 merupakan tahun kedua tahap keempat RPJPD Kabupaten Magelang Tahun 2005-2025. Konsistensi keterkaitan tujuan, sasaran pokok, arah kebijakan pembangunan tahun 2021 dirumuskan dalam rangka pencapaian visi jangka panjang Kabupaten Magelang. Selanjutnya, sebagai landasan pelaksanaan pembangunan dalam RKPD 2021 maka target dari indikator tujuan dan sasaran ditetapkan dengan mengacu pada RPJMD Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024 dan pada beberapa target indikator makro mempertimbangkan dampak Covid-19. Beberapa indikator makro, yaitu IPM, Laju Pertumbuhan Ekonomi, Inflasi, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) serta angka kemiskinan dikoreksi dari target di RPJMD tahun 2019-2024, dengan mempertimbangkan dampak Covid-19. Selengkapannya keterkaitan visi, misi, tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024 serta target yang akan dicapai pada tahun 2021 tersaji pada tabel 4.1 berikut :

Tabel 4.1
Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran serta Target Tahun 2021

VISI: KABUPATEN MAGELANG YANG SEJAHTERA, BERDAYA SAING DAN AMANAH					
Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Satuan	Target Tahun 2021
Misi 1: Meningkatkan	Meningkatnya kualitas		Indek Pembangunan Manusia (IPM)	Angka (0-100)	69,82

Kualitas Kehidupan Masyarakat yang Sejahtera dan Berakhlak Mulia	sumber daya manusia	Meningkatnya kinerja pembangunan pendidikan	Rata-rata lama sekolah	Tahun	8	
			Harapan lama sekolah	Tahun	12,92	
			Persentase SD dan SMP yang berakreditasi minimal B	%	94,79	
		Meningkatnya kinerja pembangunan kesehatan	Angka harapan hidup	Tahun	73,61	
	Meningkatnya paritas daya beli masyarakat		Angka Kemiskinan	%	12,44-11,52	
			Pengeluaran perkapita riil yang disesuaikan	Ribu Rp	9.762,42	
			Inflasi	%	3,0 ± 1	
		Menurunnya jumlah PMKS	Persentase penurunan PMKS	%	0,58	
		Meningkatnya ketahanan pangan daerah	Indeks ketahanan pangan	Angka (0-100)	79,47	
		Terkendalinya tingkat pengangguran terbuka	Tingkat pengangguran terbuka (TPT)	%	4,54-5,17	
		Meningkatnya layanan hunian yang layak dan berkualitas	Cakupan hunian layak dan berkualitas	%	68,66	
	Meningkatnya pembangunan berbasis gender		Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Angka (0-100)	93,31	
			Meningkatnya keberdayaan gender	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Angka (0-100)	69,63
			Kategori Kabupaten Layak Anak	-	Nindya	
Misi 2: Meningkatkan Daya Saing Daerah yang Berbasis pada Potensi Lokal dengan Tetap Menjaga Kelestarian Lingkungan	Meningkatnya daya saing daerah		Cakupan Pembangunan Infrastruktur Wilayah Berkelanjutan	%	72,98	
			Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	%	3,3-4,3	
			PDRB perkapita	Juta Rp	28,21	
		Tercapainya	Indeks Kualitas	Angka	72,14	

Hidup		kualitas lingkungan hidup yang baik	Lingkungan Hidup (IKLH)	(0-100)	
		Meningkatnya cakupan layanan infrastruktur	Cakupan pembangunan infrastruktur wilayah	%	73,81
		Meningkatnya daya saing ekonomi daerah	Nilai PDRB sektor perdagangan	Milyar Rp	5.208,43
			Nilai PDRB sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan	Milyar Rp	7.748,63
			Nilai PDRB sektor industri pengolahan	Milyar Rp	8.139,80
			Nilai PDRB sektor pariwisata	Milyar Rp	1.630,14
			Pertumbuhan investasi	%	5
			Cakupan ketentraman dan ketertiban masyarakat	%	83,62
			Indeks desa membangun	Angka (0-1)	0,69
Misi 3: Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Amanah	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang bersih dan <i>akuntabel</i>		Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)	Angka (0-100)	67,25
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan	Nilai AKIP	Angka (0-100) (Huruf)	65,02 (B)
		Meningkatnya tata kelola pemerintahan berbasis teknologi informasi dan komunikasi	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Angka (0-5)	2,51-2,61
		Meningkatnya pengelolaan pendapatan, keuangan dan aset daerah	Opini BPK	-	WTP
		Meningkatnya	Indeks Kepuasan	Angka	83,75

		kualitas pelayanan publik	Masyarakat (IKM)	(0-100)	
		Meningkatnya kinerja sistem manajemen kepegawaian	Indeks Sistem Merit	Angka (0-1)	0,60

4.2 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

Dalam rangka pencapaian visi melalui upaya pengembangan misi, maka setiap misi tersebut akan ditindaklanjuti dengan pelaksanaan prioritas pembangunan daerah secara sinergis, berkesinambungan, dan sesuai ketentuan yang berlaku. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pencapaian misi adalah sebagai berikut.

4.2.1 Arah Kebijakan Pembangunan Nasional Jangka Menengah Tahun 2020 - 2024 dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2021

a. Arah Kebijakan dan Prioritas Pembangunan Nasional Jangka Menengah Tahun 2020 - 2024

Berdasarkan RPJMN Tahun 2020-2024, kebijakan pembangunan nasional diarahkan pada upaya pencapaian visi **“Terwujudnya Indonesia Yang Maju, Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong”**. Visi tersebut akan diwujudkan melalui pelaksanaan 9 (sembilan) Misi pembangunan yang dikenal dengan Nawacita kedua yaitu:

1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia.
2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing.
3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan.
4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan.
5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa.
6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.
7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga.
8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya.
9. Sinergi Pemerintah Daerah dalam kerangka negara kesatuan.

Selanjutnya sebagai strategi dalam pelaksanaan misi Nawacita kedua, Presiden menetapkan 5 (lima) arahan utama yang mencakup Pembangunan Sumber Daya Manusia, Pembangunan Infrastruktur, Penyederhanaan Regulasi, Penyederhanaan Birokrasi, dan Transformasi Ekonomi.

Dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi pembangunan jangka menengah nasional, terdapat 7 (tujuh) agenda prioritas pembangunan nasional yang harus diperhatikan sesuai dengan tingkat kewenangan dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pokok pembangunan nasional. Adapun 7 (tujuh) agenda prioritas pembangunan nasional yaitu:

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan;

2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan;
3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing;
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan;
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar;
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim;
7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.

Beberapa *Major Project* yang mendukung prioritas pembangunan sebagaimana tertuang dalam RPJMN 2020-2024 adalah sebagai berikut:

1. 10 (sepuluh) destinasi pariwisata prioritas.
2. 9 (sembilan) kawasan industri di luar Jawa dan 31 (tiga puluh satu) smelter.
3. Industri 4.0 di 5 (lima) sub sektor prioritas.
4. Pendidikan dan pelatihan vokasi untuk industri 4.0.
5. Jaringan pelabuhan utama terpadu.

Berkaitan dengan hal tersebut, Kabupaten Magelang termasuk menjadi salah satu sasaran lokasi pelaksanaan *Major Project* untuk penyelesaian kawasan pariwisata prioritas yaitu Kawasan Strategis Pariwisata Nasional Borobudur. Hal ini tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal-Semarang-Salatiga-Demak-Grobogan, Kawasan Purworejo-Wonosobo –Magelang-Temanggung, dan Kawasan Tegal-Brebes-Pemalang. Usulan program/kegiatan berdasarkan lampiran Perpres 79 Tahun 2019 yang berlokasi di Kabupaten Magelang sebanyak 16 (enam belas) usulan dengan sumber pendanaan dari APBN dan KPBU. Secara rinci usulan program/kegiatan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.2
Usulan Program/Kegiatan Prioritas Nasional di Kabupaten Magelang

NO.	LOKASI	PROGRAM/ KEGIATAN	ESTIMASI BIAYA (MILYAR)	SUMBER DANA
1	Kab. Magelang	Pembangunan Bendungan Pasuruhan, Kab. Magelang	1.500	APBN
2	Kab. Magelang dan Kota Magelang	Revitalisasi sempadan Sungai Progo (<i>river amenity</i>), Kabupaten Magelang dan Kota Magelang	50	APBN
3	Kab. Magelang	Pembangunan Jalan Tol Ruas Tol Bawen-Yogya, Kab. Magelang	30.000	KPBU
4	Kab. Magelang	Pembangunan Jalan Magelang -Kaliangkrik B.ts. Kab. Wonosobo, Kab. Magelang	45	APBN
5	Kab. Magelang	Pembangunan ruas Jalan	52	APBN

NO.	LOKASI	PROGRAM/ KEGIATAN	ESTIMASI BIAYA (MILYAR)	SUMBER DANA
		Manglong Kalikodil, Kab. Magelang		
6	Kab. Magelang	Pembangunan Gedung Pusat Pemadam Kebakaran Kawasan Borobudur, Kab. Magelang	65	
7	Kab. Magelang	Peningkatan infrastruktur di Kawasan Borobudur, Kab. Magelang	100	APBN
8	Kab. Magelang	Penyediaan TPST Penyangga Kawasan Borobudur, Kab. Magelang	100	APBN
9	Kab. Magelang	Pembangunan TPA/TPST Regional, Kab. Magelang	200	APBN
10	Kab. Magelang	Penataan akses poros Mendut-Pawon Borobudur, Kab. Magelang	57	APBN
11	Kab. Magelang	Pembangunan gerbang dan koridor Palbapang Borobudur, Blondo Borobudur, Gerbang/ Rest Area Koridor Kembanglimus Borobudur, Kab. Magelang	50	APBN
12	Kab. Magelang	Penataan kawasan ruang terbuka publik Candi Borobudur, Kab. Magelang	68	APBN
13	Kab. Magelang	Pembangunan Anjungan Cerdas Candi Borobudur, Kab. Magelang	1.100	KPBU
14	Kab. Magelang	Revitalisasi Pasar Ngablak, Pasar Kaponan, Pasar Salaman, Pasar Mungkid dan Pasar Windusari, Kab. Magelang	265	APBN
15	Kab. Magelang	Pembangunan wisata kreatif Simpang Mendut (Taman Kreasi Mendut/ Museum Widayat/Taman Anggrek), Kab. Magelang	50	APBN
16	Kab. Magelang	Pembangunan Sekolah vokasi Pariwisata/ SMK Pariwisata, Kab. Magelang	200	APBN

Sumber: Perpres 79 Tahun 2019

b. Prioritas Pembangunan Nasional dalam RKP Tahun 2021

Rencana pembangunan nasional tahun 2021 dipengaruhi oleh dinamika

pandemi Covid-19. Dalam kebijakannya, pemerintah pusat membagi 4 tahap kebijakan dalam merespon pandemi Covid-19, yaitu tahap 1-3 merupakan respon penanganan darurat Covid-19 yang dilakukan di tahun 2020, dan tahap 4 adalah tahapan pemulihan pasca pandemi Covid-19 yang tertuang dalam RKP Tahun 2021. Maka dalam rencana pembangunan nasional yang tertuang dalam RKP Tahun 2021, tema yang diangkat merupakan tema pembangunan yang sifatnya adaptif dan responsif terhadap pandemi Covid-19 dan proses pemulihannya.

Pembangunan nasional dalam RKP Tahun 2021 mengangkat tema "**Mempercepat Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Sosial**". Tema ini merupakan tema yang telah disesuaikan dari rencana pembangunan yang tertuang dalam RPJMN Tahun 2019-2024 yaitu "Meningkatkan Industri, Pariwisata dan Investasi di Berbagai Wilayah Didukung oleh SDM, dan Infrastruktur Untuk Pertumbuhan Berkualitas". Fokus pembangunan nasional di tahun 2021 adalah Pemulihan Industri, Pariwisata, dan Investasi, Reformasi Sistem Kesehatan Nasional, Reformasi Sistem Jaring Pengaman Sosial, dan Reformasi Sistem Ketahanan Bencana. Fokus pembangunan ini dilakukan dengan cara memberikan penekanan terhadap agenda pembangunan tertentu yang relevan terhadap situasi yang dihadapi dan intervensi yang akan dilakukan pada tahun 2021. Agenda pembangunan nasional tahun 2021 yang menjadi prioritas nasional meliputi:

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan;
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan;
3. Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing;
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan;
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar;
6. Membangun lingkungan hidup, ketahanan bencana, dan perubahan iklim;
7. Memperkuat stabilitas politik, hukum, pertahanan, dan keamanan (polhukhankam) dan transformasi pelayanan publik.

Rencana pembangunan nasional tahun 2021 adalah dalam rangka pencapaian beberapa sasaran makro yaitu:

1. Pertumbuhan ekonomi pada kisaran 4,5 - 5,5 persen;
2. Tingkat kemiskinan sebesar 9,2 - 9,7 persen;
3. Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 7,5 - 8,2 persen;
4. Indeks Pembangunan Manusia sebesar 72,78 - 72,90.

4.2.2 Arah Kebijakan dan Prioritas Pembangunan Jawa Tengah Tahun 2021

Kebijakan pembangunan Provinsi Jawa Tengah tahun 2021 diarahkan untuk "Percepatan Pemulihan Perekonomian dan Kehidupan Masyarakat didukung penguatan daya saing SDM", dengan prioritas:

1. Peningkatan pertumbuhan dan pertahanan ekonomi daerah dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan hidup;

2. Percepatan pengurangan kemiskinan dan pengangguran
3. Peningkatan dan pemulihan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia menuju SDM berdaya saing;
4. Penguatan ketahanan bencana
5. Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan dan kondusivitas wilayah serta peningkatan kapasitas dan ketahanan fiskal daerah

Dengan memperhatikan rencana kebijakan pemulihan dampak Covid-19 di Jawa Tengah dan kebijakan pembangunan nasional dalam RKP Tahun 2021 maka arah kebijakan pembangunan Jawa Tengah tahun 2021 disesuaikan dari kebijakan pembangunan yang telah ditetapkan sebelumnya dalam RPJMD Tahun 2018-2023. Kebijakan pembangunan daerah Jawa Tengah tahun 2021 diarahkan pada proses pemulihan dampak Covid-19 dengan tetap melakukan antisipasi terhadap kemungkinan masih terjadinya kasus Covid-19.

Arah kebijakan pembangunan daerah Jawa Tengah tahun 2021 diarahkan pada "**Percepatan Pemulihan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Didukung Penguatan Daya Saing SDM**". Arah kebijakan pembangunan ini telah dilakukan penyesuaian dari arah kebijakan "Peningkatan Kesejahteraan dan Perekonomian Masyarakat Didukung Penguatan Daya Saing SDM". Arah kebijakan pembangunan daerah Jawa Tengah tahun 2021 ini dijabarkan dalam prioritas daerah tahun 2021 yang juga telah dilakukan penyesuaian yaitu sebagai berikut:

1. Peningkatan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi daerah dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan hidup

Kebijakan pemulihan dan penguatan perekonomian daerah ini menjadi prioritas pembangunan di tahun 2021 terutama untuk memulihkan perekonomian daerah yang melambat akibat pandemi Covid-19. Kebijakan ini diarahkan pada strategi mendorong peningkatan produksi sektor-sektor yang menjadi unggulan Jawa Tengah seperti pertanian (yang cukup tahan dari dampak pandemi), industri pengolahan, perdagangan, pariwisata. Selain itu juga diarahkan pada pemulihan iklim investasi untuk mendorong masuknya kembali investasi di Jawa Tengah. Upaya mendorong ekspor juga mulai dilakukan kembali, dan mendorong juga upaya substitusi bahan baku impor guna menekan impor di Jawa Tengah. Inflasi juga terus dikendalikan untuk tetap menjaga harga barang di pasar sehingga konsumsi masyarakat tetap terjaga. Pemberdayaan UKM juga dilakukan dengan berbagai strategi antara lain pelatihan, fasilitasi modal dan pasar, dan lainnya. Roda perekonomian daerah akan bergerak kembali dengan didukung oleh infrastruktur sebagai instrumen distribusi barang dan jasa, seperti jalan, transportasi, air bersih, listrik, dan lainnya.

Kebijakan untuk peningkatan pertumbuhan ekonomi dalam upaya pemulihan perekonomian daerah tetap juga memperhatikan keberlanjutan lingkungan hidup. Dampak positif yang bisa dirasakan dalam masa pandemi Covid-19 antara lain adalah membaiknya kondisi lingkungan karena kebijakan pembatasan kegiatan masyarakat dan *work from home*. Untuk itu

kebijakan penguatan keberlanjutan lingkungan hidup di tahun 2021 tetap diarahkan pada perbaikan kerusakan sumberdaya alam, pengurangan pencemaran lingkungan hidup, serta penurunan emisi GRK sejalan dengan masa pemulihan perekonomian daerah.

Prioritas peningkatan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi daerah dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan hidup difokuskan pada :

- a. Peningkatan produksi dan produktivitas pertanian, perkebunan, dan peternakan, serta kualitas produk pertanian
- b. Peningkatan produksi dan kualitas hasil perikanan
- c. Penguatan ketersediaan pangan
- d. Peningkatan produksi dan produktivitas usaha dan industri kecil dan menengah
- e. Peningkatan pariwisata daerah
- f. Perbaikan iklim dan kepastian investasi yang semakin kondusif
- g. Memacu konsumsi rumah tangga dan korporasi melalui penyediaan barang dan jasa yang dihasilkan oleh sektor-sektor usaha dari Jawa Tengah, memacu ekspor dan meminimalisir impor, serta menjaga agar tingkat inflasi tetap rendah untuk menjaga daya beli masyarakat
- h. Penguatan infrastruktur untuk meningkatkan aksesibilitas dan kelancaran distribusi barang-jasa, serta konektivitas antar wilayah, pusat pertumbuhan baru baik skala regional maupun lokal serta kawasan perbatasan, kawasan peruntukan industri dan wisata untuk mendukung perekonomian, pemerataan dan pengembangan wilayah, serta mendukung peningkatan keselamatan orang/penumpang
- i. Pengawasan dan pemantapan pelaksanaan Perpres Nomor 79 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal-Semarang-Salatiga-Demak-Grobogan, Kawasan Purworejo-Wonosobo-Magelang-Temanggung dan Kawasan Brebes-Tegal-Pemalang
- j. Melanjutkan dan mempertahankan kualitas lingkungan yang diindikasikan membaik pada masa terjadinya pandemi Covid-19

2. Percepatan pengurangan kemiskinan dan pengangguran

Kebijakan pengurangan kemiskinan dilakukan dengan dua pendekatan yaitu pemenuhan *basic life access* untuk mengurangi beban pengeluaran, dan *sustainable livelihood* untuk meningkatkan pendapatan masyarakat. Sasaran kebijakan ini terutama adalah untuk penduduk miskin dan rentan miskin, serta penduduk terdampak Covid-19 secara sosial dan ekonomi. Sedangkan kebijakan penurunan pengangguran diarahkan pada perluasan lapangan pekerjaan, peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja, serta perlindungan bagi pekerja dan pencari kerja yang terdampak pandemi Covid-19.

Prioritas percepatan pengurangan kemiskinan dan pengangguran difokuskan pada :

- a. Pengurangan Kemiskinan
 - 1) Penyediaan *basic life access* untuk penduduk miskin perkotaan dan perdesaan utamanya pada kelompok petani, nelayan, buruh, pelaku

UKM dan kelompok rentan lainnya dalam mengurangi beban pengeluaran

- 2) Penguatan *sustainable livelihood* dalam upaya meningkatkan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin dan rentan miskin
 - 3) Penguatan tugas dan fungsi kelembagaan penanggulangan kemiskinan/TKPKD dengan Satgas Kemiskinan; fasilitasi pengembangan Sistem Layanan Rujukan Terpadu (SLRT) dan penguatan validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan terintegrasi dengan *database* potensi SDM pencari kerja, serta peningkatan sumber pembiayaan alternatif
- b. Menurunkan angka pengangguran
- 1) Peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja agar memiliki kompetensi dan jiwa kewirausahaan yang tinggi guna memasuki pasar kerja, pengembangan dan penguatan BLK yang sesuai kebutuhan industri, sertifikasi kompetensi tenaga kerja, dan peningkatan kompetensi dunia usaha dalam pelatihan ketrampilan yang berbasis *link and match*
 - 2) Perluasan kesempatan kerja dengan menciptakan kondisi lingkungan yang bersaing dan ramah bagi investasi utamanya investasi industri padat karya dan melibatkan yang lebih luas UMKM Jawa Tengah dalam supply chain industri di Jawa Tengah serta membuka akses pasar tenaga kerja bagi pencari kerja milenial;
 - 3) Peningkatan perlindungan, kepatuhan, dan pengawasan tenaga kerja diantaranya melalui BPJS Ketenagakerjaan, serta perlindungan tenaga kerja perempuan dan anak.

3. Pemulihan dan peningkatan kualitas hidup dan kapasitas sumberdaya manusia menuju SDM berdaya saing

Kebijakan ini diarahkan pada peningkatan pelayanan pendidikan terutama adaptasi terhadap perubahan akibat pandemi Covid-19 dengan penyediaan atau pengembangan teknologi digital untuk mendukung pembelajaran virtual, dengan tetap melakukan pemerataan layanan pendidikan yang baik; penguatan *health security*, peningkatan pelayanan kesehatan, serta pemerataan layanan kesehatan.

Prioritas pemulihan dan peningkatan kualitas hidup dan kapasitas sumberdaya manusia menuju SDM berdaya saing difokuskan pada :

- a. Perbaikan kualitas dan akses penyelenggaraan pendidikan secara luas agar semua anak usia sekolah dapat bersekolah sebagai implementasi Sekolah Tanpa Sekat
- b. Penguatan *health security* masyarakat dan sistem kesehatan daerah
- c. Peningkatan akses dan kualitas perlindungan perempuan dan anak serta pemberdayaan perempuan melalui pencegahan terhadap kekerasan perempuan dan anak; peningkatan akses politik untuk perempuan; peningkatan kualitas keluarga; serta pencegahan *trafficking*
- d. Peningkatan akses, perlindungan, pemberdayaan dan pelayanan bagi kelompok disabilitas serta lansia produktif dan non produktif

4. Penguatan ketahanan bencana

Kebijakan ini diarahkan untuk meningkatkan ketahanan masyarakat dan daerah dalam menghadapi bencana alam dan non alam melalui penguatan mitigasi, adaptasi, kedaruratan, dan pemulihan dampak bencana. Ketahanan bencana dibangun dari dukungan berbagai sektor seperti kesehatan, pangan, transportasi, perdagangan, pariwisata, dan lain-lainnya.

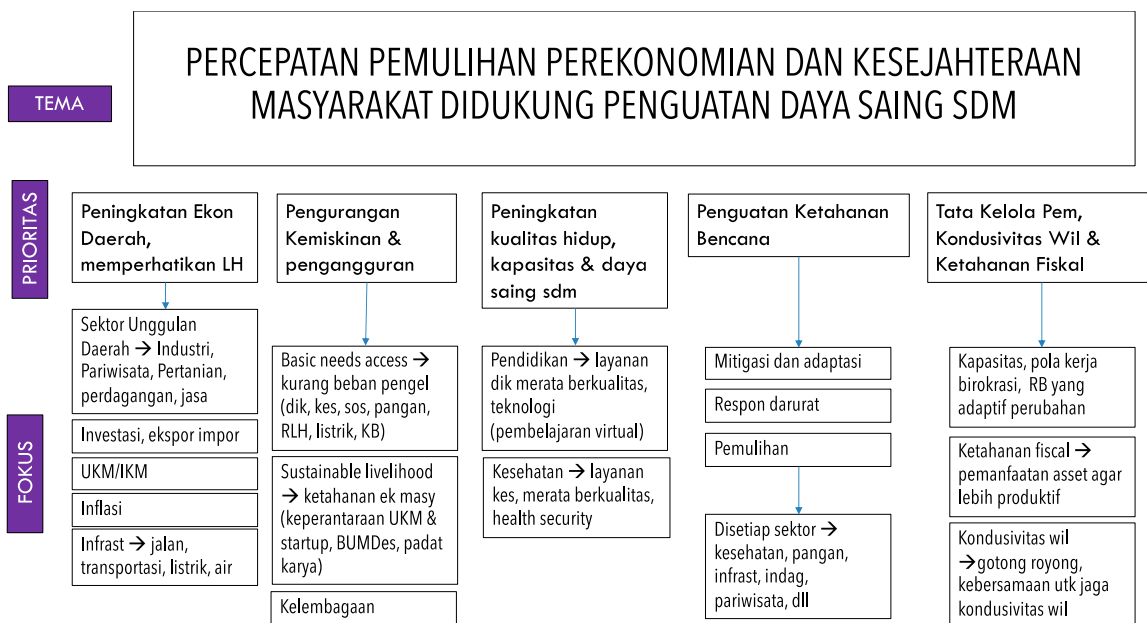
Prioritas Penguatan ketahanan bencana, difokuskan pada penguatan upaya mitigasi, respon darurat, pemulihan dan adaptasi transformatif melalui perencanaan kebencanaan, penyadaran masyarakat, peningkatan kapasitas penanggulangan bencana, mengurangi kerentanan, penyediaan pusat manajemen krisis, penguatan sistem logistik, penyediaan hunian darurat, serta pemulihan pasca bencana untuk mewujudkan kemampuan adaptasi masyarakat menuju kondisi “*new normal*”;

5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kondusivitas wilayah serta peningkatan kapasitas dan ketahanan fiskal daerah

Kebijakan tata kelola pemerintahan diarahkan pada penguatan kapasitas, pola kerja birokrasi, dan reformasi birokrasi yang lebih adaptif terhadap segala dinamika yang terjadi seperti saat terjadinya pandemi Covid-19. Kebijakan kondusivitas wilayah diarahkan pada penguatan kebersamaan, dan gotong royong dalam masa pemulihan Covid-19 untuk menciptakan suasana yang kondusif di tengah masyarakat. Sedangkan kebijakan peningkatan kapasitas dan ketahanan fiskal daerah diarahkan pada peningkatan pendapatan asli daerah dengan pemanfaatan aset agar lebih produktif, ditengah melambatkan sumber-sumber pendapatan yang berasal dari pajak.

Prioritas Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kondusivitas wilayah, serta peningkatan kapasitas dan ketahanan fiskal daerah, difokuskan pada:

- a. Percepatan implementasi reformasi birokrasi secara menyeluruh hingga menjangkau unit kerja terkecil agar lebih responsif dan adaptif terhadap perubahan dan dampaknya terutama pasca pandemi Covid-19;
- b. Peningkatan kapasitas dan ketahanan fiskal keuangan daerah terutama pada masa pemulihan pasca pandemi Covid-19;
- c. Peningkatan kondusivitas wilayah dengan menjaga kebersamaan dan gotong royong di masyarakat untukantisipasi dampak sosial akibat pandemi Covid-19.



Gambar 4.1
Tema, Prioritas, dan Fokus Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021

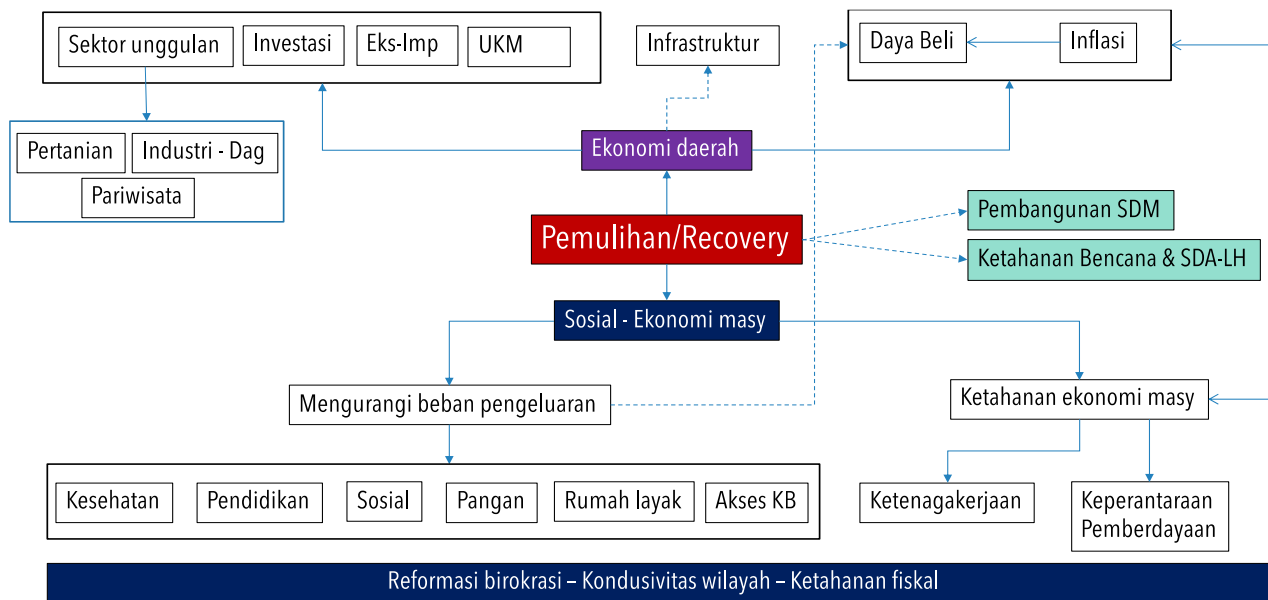
Berdasarkan arah kebijakan pengembangan wilayah Provinsi Jawa Tengah untuk mewujudkan pembangunan Jawa Tengah yang lebih menekankan pada karakter dan potensi wilayah maka dikembangkan 8 (delapan) wilayah pengembangan utama. Kabupaten Magelang masuk dalam wilayah pengembangan Purwomanggung yang meliputi Kabupaten Purworejo, Wonosobo, Kabupaten Magelang, Kota Magelang dan Temanggung.

Arah kebijakan, prioritas dan fokus pembangunan daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2021 merupakan upaya untuk mencapai target kinerja utama daerah tahun 2021 yaitu:

1. Persentase penurunan konflik SARA sebesar 15,00 persen;
2. Indeks Reformasi Birokrasi sebesar 78,00;
3. Angka Kemiskinan turun menjadi 11,94 – 11,02 persen;
4. Indeks Gini sebesar 0,365;
5. Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 4,94 – 5,67 persen;
6. Pertumbuhan Ekonomi antara 3,80 – 4,80 persen;
7. Inflasi pada angka $3,0 \pm 1$ persen;
8. PDRB per kapita sebesar 41,87 juta rupiah;
9. Indeks Williamson sebesar 0,595;
10. Nilai Tukar Petani 103,00;
11. Indeks Pembangunan Manusia sebesar 72,49;
12. Indeks Pembangunan Gender sebesar 92,12; dan
13. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup sebesar 67,02.

Secara umum kebijakan penanganan Covid di Jawa Tengah pada tahun 2021 difokuskan pada dua hal yaitu 1) secara makro adalah pemulihan kondisi perekonomian daerah dalam rangka menjaga pertumbuhan ekonomi tetap positif; dan 2) secara mikro adalah pemulihan kondisi sosial ekonomi masyarakat yang terdampak langsung dari pandemi Covid-19 ini seperti pelaku UMKM, penduduk miskin dan rentan miskin, penganggur akibat PHK,

dan lainnya. Kebijakan ini tetap didukung dengan kebijakan pembangunan sumberdaya manusia yang paripurna antara lain di bidang pendidikan dan kesehatan, memperhatikan keberlanjutan lingkungan hidup dan ketahanan bencana, tetap menjaga kondusivitas wilayah, serta tetap membangun tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih sebagai pondasi pengarusutamaan pembangunan daerah. Adapun Konsep Kebijakan Pemulihan Dampak Covid-19 di Jawa Tengah Tahun 2021 adalah sebagaimana gambar di bawah ini.



Gambar 4.2
Konsep Kebijakan Pemulihan Dampak Covid-19
di Jawa Tengah Tahun 2021

4.2.3 Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2021

Pandemi Covid-19 yang terjadi saat ini telah menimbulkan kerugian secara sosial ekonomi di Kabupaten Magelang. Kerugian ini antara lain:

1. Aktivitas kunjungan wisatawan baik domestik maupun mancanegara turun.
2. Industri *meeting, incentive, conference & exhibition* mengalami kelesuan
3. Pelaku usaha di sektor perhotelan dan restoran mengalami penurunan tingkat kunjungan
4. Sektor Manufaktur, utamanya yang selama ini mengandalkan bahan baku impor mengalami kekurangan bahan baku
5. Sektor transportasi umum mengalami kelesuan
6. Terjadi inflasi pada barang-barang pabrikan
7. Naiknya harga-harga bahan pokok penting
8. Banyak orang kehilangan pekerjaan
9. Timbulnya rasa curiga dan hilangnya kepercayaan terhadap orang-orang yang ada di seputaran kita atau yang baru kita kenal
10. Kebijakan belajar dari rumah menimbulkan beberapa kesulitan baru bagi kalangan tertentu
11. Rawannya resiko terkena COVID-19 bagi masyarakat khususnya tenaga Kesehatan

Kerugian-kerugian di atas membawa dampak negatif di Kabupaten

Magelang, diantaranya adalah:

1. Pengangguran meningkat
2. Kemiskinan meningkat
3. Kesejahteraan masyarakat turun
4. Kemampuan pemerintah dalam membiayai pembangunan menurun

Upaya Pemerintah Kabupaten Magelang dalam pencegahan dan penanganan Pandemi COVID-19 pada saat ini, dilaksanakan melalui tiga hal yaitu Penyediaan Jaring Pengaman Sosial (JPS), Penanganan Dampak Ekonomi dan Penanganan Kesehatan sebagai berikut :

1. Penyediaan Jaring Pengaman Sosial/ *Social Safety Net*
 - a. Bantuan program sembako untuk penduduk yang masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)
 - b. Bantuan Sosial Tunai (BST) bagi penduduk yang masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan belum menerima bantuan program sembako
 - c. Bantuan Sosial Tunai bagi penduduk Non Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (Non DTKS) berdasarkan usulan desa/ kelurahan, yang terkena dampak Covid-19
2. Penanganan dampak ekonomi
 - a. Pemberian sembako ataupun kompensasi penurunan omzet yang mengakibatkan penurunan pendapatan kepada UKM
 - b. Padat Karya kepada pelaku pariwisata terdampak Covid-19 yang diusulkan oleh Disparpora Kabupaten Magelang.
 - c. Restrukturisasi dan *Reschedule* pembayaran kredit bagi UMKM di Kabupaten Magelang
 - d. Pemesanan produk alat kesehatan seperti APD, *handsanitizer*, desinfektan dan masker kain pada pelaku usaha lokal
 - e. Pembelian produk UMKM oleh Pemerintah Kabupaten Magelang yang nantinya akan dijadikan salah satu komponen barang hibah/bansos bagi warga masyarakat
 - f. Memberikan keringanan retribusi pasar kepada para pedagang
 - g. Memberikan fasilitasi dan pembinaan pemasaran *online* kepada UMKM dalam memasarkan produknya
3. Penanganan Kesehatan
 - a. Penyelenggaraan Surveilans Penyakit Menular dan Keracunan Makanan yang berpotensi KLB serta Penanganan Krisis Kesehatan
 - b. Pengadaan Perbekalan Kesehatan (BMHP) dan Reagensia
 - c. Pengadaan obat dan perbekalan kesehatan
 - d. Promosi Kesehatan (Melaksanakan protokol kesehatan sesuai standar yang berlaku, Cuci tangan pakai sabun, pakai masker, Sosialisasi karakteristik virus, penyebarannya dan penularannya, *social dan physical distancing*)

Sejalan dengan kebijakan pusat dan provinsi Jawa Tengah, dengan adanya Pandemi COVID-19, maka pada tahun 2021 disusun skenario pemulihan pada sektor-sektor yang terdampak. Arah kebijakan yang telah disusun sebelum dan selama pandemi Covid-19 tetap diterapkan, dengan

beberapa penyesuaian yaitu pembiayaan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan disesuaikan dengan urutan prioritas sebagai berikut :

1. Mendukung pemulihan akibat dampak Pandemi COVID-19;
2. Mendukung 10 (sepuluh) prioritas pembangunan Kabupaten Magelang (Dasa Cita Bupati dan Wakil Bupati);
3. Mendukung prioritas lainnya.

Dalam rangka *recovery*/pemulihan dampak pandemic Covid-19, Kabupaten Magelang telah menyiapkan langkah-langkah strategis pada tahun 2021 yaitu sebagai berikut :

1. Pemulihan sosial ekonomi pasca covid-19 pada sektor strategis yang paling rentan terkena dampak, terutama di beberapa sektor berikut:
 - a. Pariwisata, dengan _angkah-langkah :
 - 1) Keringanan pungutan pajak pelaku usaha pariwisata seperti hotel dan restoran;
 - 2) Penyiapan stimulus ekonomi bagi para pelaku usaha di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif dengan skema yang jelas, transparan, dan terukur;
 - 3) Memberikan dukungan kepada para pelaku pariwisata dari sisi ketenagakerjaan, utilitas, keringanan retribusi serta relaksasi pinjaman.
 - b. Perdagangan dan industri manufaktur
 - 1) Keringanan pajak daerah dan retribusi;
 - 2) Intervensi Pemerintah Daerah untuk mencari pasar alternatif untuk ekspor, selain ke Tiongkok;
 - 3) Sosialisasi kepada para pedagang di pasar untuk mengembangkan metode pemasaran *online* (pesan antar);
 - 4) Memberikan keringanan retribusi pasar kepada para pedagang.
 - c. Pertanian dan peternakan
 - 1) Bantuan-bantuan pada sektor pertanian dan peternakan (bantuan benih dan bibit kepada petani yang terdaftar sebagai anggota Poktan atau Gapoktan);
 - 2) Memperluas dan memperlancar distribusi dan transportasi hasil pertanian dan peternakan;
 - 3) Memperluas pasar hasil pertanian dan peternakan;
 - 4) Mendukung usaha ekonomi informal di sektor pertanian dan peternakan;
 - 5) Peningkatan produksi pertanian dan perikanan;
 - 6) Stabilisasi stok dan harga pangan;
 - 7) Mendorong optimalisasi lahan;
 - 8) Menciptakan efisiensi rantai pemasaran produk pertanian dengan tetap keberpihakan pada petani, misalnya dengan memfasilitasi kerja sama antara petani dan produsen dengan sejumlah layanan antar berbasis online, mengoptimalkan dan memperluas Pasar Mitra Tani dan Toko Tani.
 - d. UMKM

- 1) Mendorong BUMDes untuk melaksanakan konversi usaha, termasuk sinergi dan kolaborasi antar BUMDes seperti tukar menukar produk BUMDes;
 - 2) Dimasukkannya produk UMKM sebagai salah satu komponen barang E-Warung yang telah berjalan di desa-desa;
 - 3) Pemberian insentif UMKM terdampak covid 19;
 - 4) Memfasilitasi kemudahan berusaha atau Investasi;
 - 5) Fasilitasi dan pembinaan pemasaran *online* kepada UMKM dalam memasarkan produknya;
 - 6) Strategi digitalisasi UMKM untuk mempertahankan UMKM agar tetap berjalan dan meningkatkan keuntungan dengan melebarkan pasar penjualan sehingga dapat dijangkau oleh semua konsumen dengan bantuan teknologi.
- e. Pendidikan
- 1) Program rekonstruksi semangat belajar
 - 2) Meningkatkan keterjangkauan biaya pendidikan bagi anak usia sekolah; khususnya untuk warga miskin
 - 3) Mengupayakan pembelajaran jarak jauh yang berkualitas yang dilakukan secara terbuka dan inovatif, disesuaikan kondisi peserta didik, terutama terkait dengan pilihan teknologi
 - 4) Pembudayaan Hidup sehat
- f. Kesehatan
- 1) Meningkatkan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) kesehatan jiwa masyarakat
 - 2) Pengadaan *Extra Fooding*
 - 3) Pelayanan RS Merah Putih
 - 4) Pelayanan RS Candi Umbul
 - 5) Pelayanan RS Bukit Menoreh
- g. Sosial
- 1) Memperkuat jaring pengaman sosial daerah (*social safety net*)
 - 2) Meningkatkan ketertiban masyarakat dan keamanan lingkungan
 - 3) Penguatan masyarakat Tangguh bencana
2. Melaksanakan 5 Arahannya Utama Presiden :
- a. Pembangunan sumber daya manusia
 - b. Pembangunan infrastruktur
 - c. Penyederhanaan regulasi
 - d. Penyederhanaan birokrasi
 - e. Transformasi ekonomi

Adapun implementasi RKPDP 2021 dalam mendukung 10 (sepuluh) prioritas pembangunan Kabupaten Magelang (Dasa Cita Bupati dan Wakil Bupati) dirumuskan sebagai berikut:

1. Prioritas kehidupan beragama dan berakhlak mulia

Kebijakan untuk kehidupan beragama dan berakhlak mulia diarahkan pada upaya peningkatan kualitas kehidupan beragama untuk mewujudkan

masyarakat Kabupaten Magelang yang berakhlak mulia.

Pada tahun 2021 pembangunan kehidupan beragama dan berakhlak mulia difokuskan pada :

- a). Persiapan pembangunan *Islamic Center*.
- b). Bantuan pembangunan tempat ibadah.
- c). Bantuan kepada ormas keagamaan, pesantren, madrasah diniyah, TPA, TPQ, dan majelis taklim sebagai penguatan pendidikan karakter.
- d). Peningkatan kesejahteraan guru mengaji.



Gambar 4.3
Prioritas Daerah 1 Kabupaten Magelang Tahun 2021

2. Prioritas pendidikan

Kebijakan pada urusan pendidikan diarahkan pada upaya (1) peningkatan partisipasi masyarakat dalam mengakses pendidikan, (2) peningkatan mutu pendidikan, (3) peningkatan perluasan dan akses layanan pendidikan bagi seluruh masyarakat pada jenjang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan menengah, serta pendidikan nonformal dan informal.

Pada tahun 2021 pembangunan bidang pendidikan difokuskan pada:

- a). Pemberian beasiswa bagi siswa miskin, untuk meningkatkan keterjangkauan biaya pendidikan bagi anak usia sekolah, khususnya warga miskin;
- b). Meningkatkan sarana dan prasarana fasilitas Pendidikan yang dilakukan secara bertahap sesuai kemendesakan dan pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) serta pemenuhan kapasitas dan peningkatan mutu
- c). Meningkatkan kesejahteraan guru tidak tetap/pegawai tidak tetap (GTT/PTT) pada sekolah swasta dan negeri termasuk guru PAUD dan TK, melalui pemberian honorarium bagi GTT dan PTT di PAUD, SD dan SMP Negeri dan swasta dengan meningkatkan efisiensi dan efektifitasnya

- d). Peningkatan kompetensi tenaga pendidik dan kependidikan, melalui bimbingan teknis dan pelaksanaan sertifikasi guru
- e). Penyiapan tenaga kerja terdidik yang siap kerja baik melalui pendidikan formal maupun nonformal,
- f). Pencapaian wajib belajar 9 tahun, melalui penyelenggaraan bantuan operasional sekolah (BOS); fasilitasi dan pengembangan peserta didik; pendampingan sekolah inklusi, pendampingan sekolah ramah anak; pendampingan sekolah adiwiyata, mengupayakan pembelajaran jarak jauh yang berkualitas yang dilakukan secara terbuka dan inovatif, disesuaikan kondisi peserta didik, terutama terkait dengan pilihan teknologi
- g). Pendidikan anak usia dini melalui penambahan jumlah lembaga PAUD-HI dan peningkatan persentase lembaga PAUD yang terakreditasi.
- h). Penguatan basis data pendidikan;
- i). Penguatan pendidikan karakter, melalui pembinaan pendidikan karakter di semua jenjang pendidikan, termasuk Pembudayaan Hidup sehat
- j). Pemulihan motivasi belajar siswa pasca pandemic covid-19

3. Prioritas kesehatan

Kebijakan pada urusan kesehatan diarahkan pada (1) meningkatnya pelayanan kesehatan, (2) meningkatnya kualitas lembaga pelayanan kesehatan, dan (3) meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat.

Pada tahun 2021 pembangunan bidang kesehatan difokuskan pada :

- a). Bantuan ambulan desa.
- b). Mengoptimalkan layanan puskesmas rawat inap, melalui peningkatan mutu pelayanan Puskesmas
- c). Peningkatan Puskesmas menjadi rumah sakit tanpa kelas (Grabag dan Salaman).
- d). Peningkatan pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah,
- e). Peningkatan sarana prasarana puskesmas dan rumah sakit, melalui peningkatan sarana prasarana 29 puskesmas dan 4 rumah sakit daerah
- f). Peningkatan kuantitas dan kualitas SDM Kesehatan, dilakukan melalui peningkatan kapasitas, penilaian, pembinaan sarana dan tenaga kesehatan, pengelolaan BLUD, penyelenggaraan imunisasi serta kursus kepada penjamah makanan;
- g). Penguatan basis data kesehatan.
- h). Peningkatan kesehatan lansia, dengan memberikan pelayanan kesehatan bagi lansia yang salah satunya melalui posyandu lansia.
- i). Peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak, antara lain untuk pelayanan gizi keluarga; menekan Ibu Hamil dan anak dari gizi kurang/buruk, menangani ibu dan anak beresiko
- j). Pengendalian dan pencegahan penyakit menular dan tidak menular. kegiatan diarahkan pada pencegahan dan penanggulangan penyakit menular melalui desa posbindu, puskesmas yang melaksanakan pelayanan terpadu TPM, serta pelayanan deteksi dini kanker sesuai standar; pencegahan dan pengendalian penyakit DBD, malaria dan

- penyakit *zoonosis*; surveilans penyakit tidak menular, serta penanggulangan kesehatan jiwa masyarakat
- k). Peningkatan upaya kesehatan masyarakat.
 - l). Pengembangan perencanaan kesehatan secara terpadu.

4. Prioritas penanggulangan kemiskinan

Kebijakan pada penanggulangan kemiskinan diarahkan untuk (1) mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin, (2) meningkatkan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin, (3) menjamin perkembangan dan keberlanjutan Usaha Mikro Kecil, dan (4) sinergitas kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan.

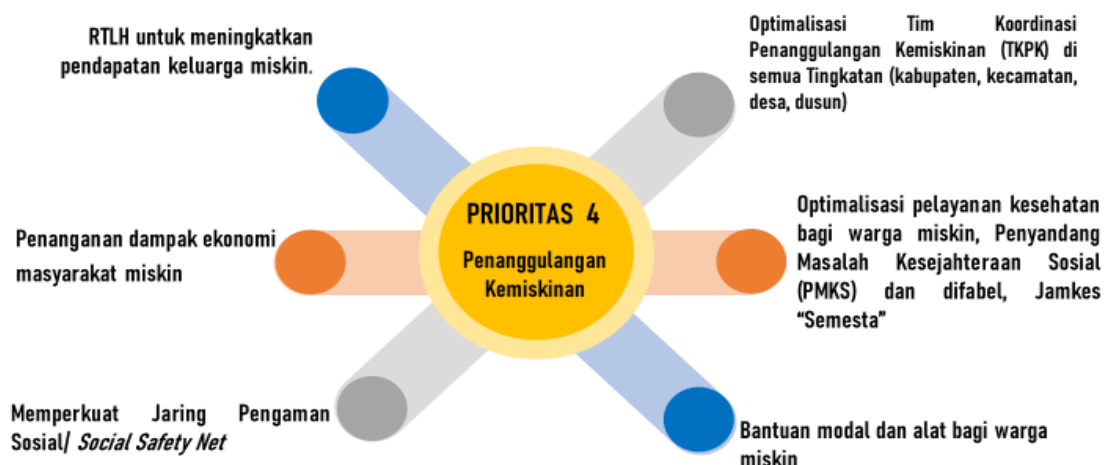
Pada tahun 2021, penanggulangan kemiskinan difokuskan pada :

- a. RTLH untuk meningkatkan kualitas rumah keluarga miskin.

RTLH dimaksudkan untuk meringankan beban pengeluaran keluarga miskin berupa bantuan stimulan pembangunan rumah tidak layak huni (RTLH) dan sanitasi. Di samping itu ada aspek pemberdayaan ekonomi terhadap pemilik rumah untuk peningkatan pendapatan keluarga. Model pembiayaan untuk penanganan rumah tidak layak huni (RTLH) berupa bantuan stimulan kepada penerima melalui mekanisme belanja bantuan sosial.

Sasaran penanganan bantuan RTLH yaitu:

- 1) Masyarakat yang masuk data *by name by adres* yang diperoleh dari Pemutakhiran Basis Data Terpadu (PBDT) Tahun 2015;
- 2) Penetapan penerima bansos RTLH dibuat setelah data diverifikasi lapangan;
- 3) Sasaran desa/kelurahan penerima bansos RTLH adalah desa/kelurahan yang masuk dalam kategori desa/kelurahan miskin dengan prioritas tinggi;
- 4) Pengecualian desa sasaran di luar desa diberikan sesuai dengan kebijakan yang berlaku, seperti desa berdikari atau ditentukan lain;
 - a). Optimalisasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) di semua Tingkatan (kabupaten, kecamatan, desa, dusun), melalui Penguatan kelembagaan penanggulangan kemiskinan; penguatan koordinasi dan sinergitas, berbasis komunitas, serta pelibatan seluruh pemangku kepentingan, melalui pengelolaan dan pemanfaatan basis data terpadu (BDT) sebagai data tunggal dalam rangka mendukung intervensi penanggulangan kemiskinan lintas sector;
 - b). Optimalisasi pelayanan kesehatan bagi warga miskin, Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan difabel, Jamkes “Semesta”;
 - c). Bantuan modal dan alat bagi warga miskin;
 - d). Memperkuat Jaring Pengaman Sosial/ *Social Safety Net*;
 - e). Penanganan dampak ekonomi masyarakat miskin.



Gambar 4.4

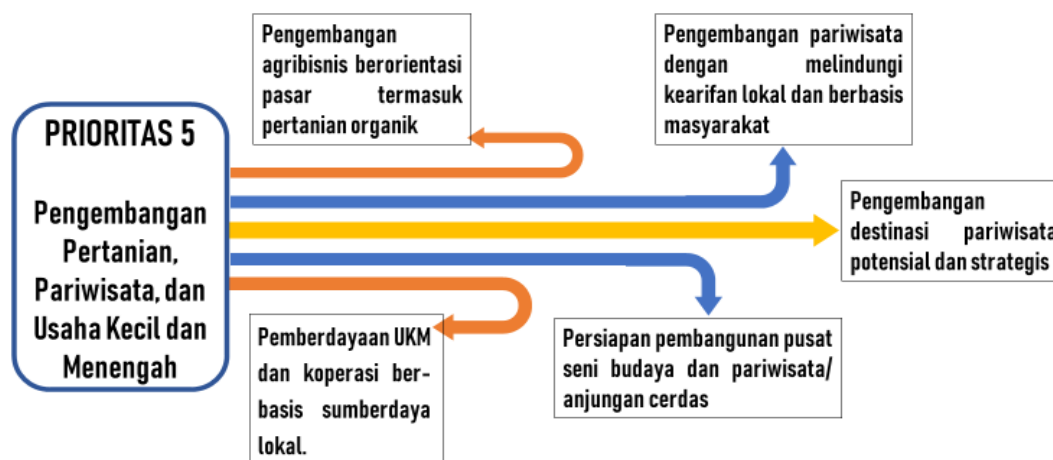
Prioritas Daerah 4 Kabupaten Magelang Tahun 2021

5. Prioritas pengembangan pertanian, pariwisata, dan Usaha kecil dan menengah

Pada tahun 2021, peningkatan ketahanan pangan, urusan pariwisata diarahkan untuk peningkatan kunjungan dan lama tinggal wisata, serta industri kecil dan menengah diarahkan untuk pengembangan wirausaha, peningkatan kualitas kelembagaan koperasi, dan peningkatan pengembangan usaha mikro. Pada tahun 2021, pengembangan pertanian, pariwisata, serta industri kecil dan menengah difokuskan pada :

- a). Pengembangan agribisnis berorientasi pasar termasuk pertanian organik. Kegiatan diarahkan pada peningkatan daya saing produk tanaman pangan; peningkatan daya saing produk tanaman buah dan florikultura; peningkatan daya saing produk tanaman sayuran dan tanaman obat; peningkatan daya saing tanaman semusim perkebunan; gelar promosi produk pertanian unggulan; penumbuhan sentra buah lokal mendukung agrowisata; peningkatan daya saing tanaman penyegar; peningkatan daya saing tanaman tahunan dan rempah;
- b). Pengembangan pariwisata dengan melindungi kearifan lokal dan berbasis masyarakat, kegiatan diarahkan pada peningkatan kapasitas SDM pelaku usaha pariwisata; pembinaan kelembagaan pariwisata; pemasaran dan promosi pariwisata; pembinaan komunitas/ pelaku ekonomi kreatif; serta penyiapan stimulus ekonomi bagi para pelaku usaha di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif terdampak Covid-19;
- c). Pengembangan destinasi pariwisata potensial dan strategis, kegiatan diarahkan pada penataan dan pengelolaan daya tarik wisata, serta penataan kawasan pariwisata;
- d). Persiapan pembangunan pusat seni budaya dan pariwisata/ anjungan cerdas;
- e). Pemberdayaan UKM dan koperasi berbasis sumberdaya lokal, melalui

pembinaan dan penataan pedagang kaki lima dan asongan, pengembangan kemitraan, fasilitasi promosi produk serta pembinaan pemasaran *online* kepada UMKM, peningkatan kapasitas SDM dan sarana prasarana bagi usaha mikro, penguatan kelembagaan dan legalitas usaha, pembinaan usaha menengah, penguatan ekonomi masyarakat untuk penanggulangan kemiskinan, digitalisasi UMKM, pemberian insentif UMKM terdampak covid 19.



Gambar 4.5
Prioritas Daerah 5 Kabupaten Magelang Tahun 2021

6. Prioritas sarana dan prasarana (infrastruktur) publik

Prioritas ini diampu oleh beberapa urusan, yaitu urusan pekerjaan umum dan urusan perhubungan. Urusan pekerjaan umum, kebijakannya diarahkan pada meningkatnya cakupan dan kualitas layanan infrastruktur pekerjaan umum dan penataan ruang serta meningkatnya layanan hunian yang layak dan sehat. Sementara itu, kebijakan urusan perhubungan diarahkan untuk meningkatkan cakupan dan kualitas layanan infrastruktur perhubungan.

Pada tahun 2021, pembangunan prioritas sarana dan prasarana (infrastruktur) publik difokuskan pada :

- a). Peningkatan infrastruktur (jalan, jembatan, bendung, embung, irigasi, dan sarana ekonomi), kegiatan diarahkan pada peningkatan jalan dan jembatan; peningkatan pelengkap jalan, pembangunan/peningkatan/rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi, pengembangan dan penguatan pengelola irigasi dan SDA;
- b). Peningkatan aksesibilitas dan konektifitas di seluruh wilayah Kabupaten Magelang untuk mengoptimalkan potensi di masing-masing wilayah, melalui pembangunan jalan dan jembatan, pemeliharaan jalan dan jembatan, dan pembangunan pelengkap jalan;
- c). Pemenuhan akses air minum melalui pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) perkotaan dan pedesaan.; pembangunan sistem

- penyediaan air minum (SPAM); peningkatan dan pengembangan layanan air minum;
- d). Pemenuhan akses sanitasi layak bagi masyarakat, melalui penanganan permukiman kumuh dan penyediaan PSU permukiman;
- e). Pembangunan gedung-gedung pemerintah yang diarahkan pada Pembangunan dan rehabilitasi bangunan gedung pemerintah;
- f). Pembangunan sarana dan prasarana perhubungan, melalui pembangunan PJU dan pemeliharaan LPJU; pemeliharaan dan pengadaan sarana perlengkapan jalan untuk pembangunan ITS, rambu, guardrail, marka jalan, zebra cross serta pemeliharaan APILL; pengembangan pelayanan angkutan.

7. Prioritas lingkungan hidup

Kebijakan urusan lingkungan hidup diarahkan pada meningkatnya pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam berbasis kelestarian lingkungan.

Pada tahun 2021, pembangunan bidang lingkungan hidup difokuskan pada :

- a). Pengelolaan sampah mandiri dan pengelolaan sampah berbasis masyarakat, melalui peningkatan kinerja pengelolaan penanganan sampah, peningkatan peran serta masyarakat dalam pengurangan sampah melalui pembangunan TPS;
- b). Penyediaan sarana dan prasarana persampahan. melalui penyediaan sarana dan prasarana penanganan sampah, pengelolaan dan penyediaan sarana dan prasarana pengurangan sampah;
- g). Konservasi lingkungan hidup termasuk perlindungan mata air, antara lain melalui konservasi sumber daya alam (SDA) untuk meningkatkan debit mata air dan konservasi mata air;
- h). Pengembangan ruang terbuka hijau dan penataan hunian kumuh, antara lain melalui peningkatan kinerja pengelolaan ruang terbuka hijau publik, peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan ruang terbuka hijau;
- i). Pengendalian pencemaran lingkungan, melalui pengendalian pencemaran limbah B3, pengendalian pencemaran air dan tanah;
- j). Peningkatan peran masyarakat dalam pengelolaan lingkungan, melalui peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian pencemaran air dan tanah.

8. Prioritas birokrasi dan tata kelola pemerintahan

Pembangunan reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan diarahkan pada peningkatan layanan publik yang semakin transparan, partisipatif, inovatif dan akuntabel.

Pada tahun 2021 pembangunan pada prioritas reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan difokuskan pada :

- a). *E-government/ smart regency*, antara lain melalui fasilitasi pengelolaan aplikasi perangkat daerah, penyelenggaraan ekosistem TIK di perangkat daerah dan desa;

- b). Optimalisasi pemanfaatan berbagai sumber pembiayaan pembangunan yang inovatif (CSR, obligasi daerah dan kerja sama dengan dunia usaha);
- c). Peningkatan layanan publik, melalui peningkatan penyelenggaraan pelayanan terpadu kecamatan (PATEN), fasilitasi penyelesaian konflik-konflik pertanahan, fasilitasi penyelenggaraan otonomi daerah dan standar pelayanan minimal (SPM), fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan desa;
- d). Peningkatan iklim investasi yang tetap memperhatikan pelestarian lingkungan hidup, melalui fasilitasi dan koordinasi kerjasama bidang investasi, penyusunan profil potensi investasi unggulan kabupaten magelang, fasilitasi promosi dan pemasaran potensi investasi;
- e). Sinergi perencanaan, penganggaran, kepegawaian dan pengawasan;
- f). Peningkatan kualitas pelayanan administrasi kependudukan (dokumen kependudukan), melalui pengelolaan sistem informasi administrasi kependudukan (SI AK);
- g). Meningkatkan kerja sama dengan lembaga pemerintah, perguruan tinggi dan swasta, melalui fasilitasi/pembentukan kerjasama daerah;
- h). Melanjutkan reformasi birokrasi;
- i). Penataan dan pengelolaan Aparatur Sipil Negara (ASN) secara profesional dan akuntabel, seperti mengutamakan kebutuhan Pendidikan dan Pelatihan yang sifatnya mendasar dan menunda Pendidikan dan Pelatihan yang sifatnya pengembangan dan memproses kelanjutan perekrutan CPNS.

9. Prioritas ketenteraman, ketertiban dan penanggulangan bencana

Kebijakan urusan keamanan dan ketertiban diarahkan untuk (1) meningkatnya ketertiban hukum, (2) meningkatnya kapasitas masyarakat dalam mitigasi bencana, dan (3) meningkatnya wawasan kebangsaan dan politik masyarakat.

Pada tahun 2021, peningkatan ketenteraman, ketertiban dan penanggulangan bencana difokuskan pada:

- a). Peningkatan kondusivitas ketenteraman dan ketertiban, antara lain melalui pengamanan obyek vital dan keramaian daerah, operasi represif non yustisi, patroli wilayah dan pembinaan masyarakat, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan peraturan perundang-undangan daerah, serta penanganan perkara pelanggaran peraturan perundang-undangan daerah;
- b). Penguatan sistem penanggulangan bencana (legislasi, kelembagaan, dan pendanaan). Kegiatan diarahkan pada mitigasi bencana, pelatihan pencegahan dan mitigasi, penyediaan peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan terhadap bencana, manajemen pusdalops penanggulangan bencana, fasilitasi rehabilitasi dan rekonstruksi; fasilitasi dan koordinasi penilaian *post disaster need assessment* (PDNA) dan JITU PASNA, komunikasi, informasi dan edukasi rawan bencana.

10. Prioritas kepemudaan dan olah raga

Prioritas pembangunan pada bidang kepemudaan dan olahraga diarahkan pada peningkatan kesempatan yang seluas-luasnya kepada

generasi muda untuk berprestasi. Pada tahun 2021, pembangunan pada prioritas kepemudaan dan olahraga difokuskan pada:

- a). Peningkatan peran serta kepemudaan, yang diarahkan pada perlindungan dan pemberdayaan lembaga pemuda serta pemberdayaan dan pengembangan pemuda;
- b). Pengembangan pembinaan olahraga berprestasi, melalui pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi, peningkatan sarana prasarana olahraga, pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi, implementasi IPTEK dalam pembinaan olahraga;
- c). Peningkatan pengembangan olahraga sepakbola dengan mengoptimalkan peran serta swasta;
- d). Penghargaan atlet berprestasi.



Gambar 4.6
Prioritas Daerah 10 Kabupaten Magelang Tahun 2021

Arah kebijakan, prioritas dan fokus pembangunan daerah Kabupaten Magelang tahun 2021 merupakan upaya untuk mencapai target kinerja utama daerah tahun 2021 yaitu:

1. Indeks Pembangunan Manusia sebesar 69,82;
2. Inflasi pada angka $3,0 \pm 1$ persen;
3. Pengeluaran per kapita riil yang disesuaikan 9.762,42 ribu rupiah;
4. Angka Kemiskinan menjadi 12,44 – 11,52 persen;
5. Indeks Pembangunan Gender sebesar 93,31;
6. Laju Pertumbuhan Ekonomi antara 3,3 – 4,3 persen
7. PDRB per kapita sebesar 24,46 juta rupiah;
8. Cakupan pembangunan Infrastruktur Wilayah Berkelanjutan sebesar 72,98 persen;
9. Indeks Reformasi Birokrasi sebesar 67,25;

Untuk mencapai keberhasilan pembangunan Kabupaten Magelang tahun 2021 yang sejalan dengan agenda prioritas pembangunan Jawa Tengah tahun 2021 dan arah kebijakan dan prioritas nasional tahun 2021, maka diperlukan komitmen dan kaidah-kaidah dalam pembangunan yang

berorientasi pada kesejahteraan masyarakat dan menjaga lingkungan yang berkelanjutan dari seluruh aparat pemerintah Kabupaten Magelang serta pemangku kepentingan pembangunan. Adapun keselarasan antara agenda prioritas pembangunan nasional, prioritas pembangunan Provinsi Jawa Tengah, dan prioritas pembangunan Kabupaten Magelang tertuang dalam tabel 4.3.

Tabel 4.3
Keselarasan Prioritas Pembangunan Kabupaten Magelang, Provinsi dan Nasional

No	Prioritas Kabupaten Magelang	Prioritas Provinsi Jawa Tengah	Prioritas Nasional
1	2	3	4
1	Kehidupan beragama dan akhlak mulia	PD 3 : Peningkatan dan pemulihan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia menuju SDM berdaya saing;	PN 4 : Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan a. Revolusi mental dan pembinaan ideologi Pancasila b. Moderasi beragama
2	Pendidikan	PD 3 : Peningkatan dan pemulihan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia menuju SDM berdaya saing;	PN 2 : Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan a. Penguatan kemampuan SDM dan IPTEK berbasis keunggulan wilayah PN 3 : Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing a. Peningkatan pemerataan layanan pendidikan berkualitas PN 4 : Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan a. Pemajuan dan pelestarian kebudayaan b. Penguatan budaya literasi, inovasi, dan kreativitas
3	Kesehatan	PD 3 : Peningkatan dan pemulihan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia menuju SDM berdaya saing;	PN 3 : Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing a. Peningkatan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta
4	Penanggulangan kemiskinan	PD 2 : Percepatan pengurangan kemiskinan dan pengangguran	PN 3 : Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing a. Pengentasan kemiskinan b. Peningkatan produktivitas dan daya saing
5	Pengembangan pertanian, pariwisata, dan usaha kecil dan menengah (UKM)	PD 1: Peningkatan pertumbuhan dan pertahanan ekonomi daerah dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan hidup;	PN 1 : Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan a. Pengelolaan sumber daya ekonomi yang mencakup pemenuhan pangan dan pertanian serta pengelolaan kemaritiman, kelautan dan perikanan, sumber daya air, sumber daya energi dan kehutanan

No	Prioritas Kabupaten Magelang	Prioritas Provinsi Jawa Tengah	Prioritas Nasional
1	2	3	4
			<ul style="list-style-type: none"> b. Akselerasi peningkatan nilai tambah pertanian dan perikanan, kemaritiman, energi, industri, pariwisata, serta ekonomi kreatif dan digital PN 2 : Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan <ul style="list-style-type: none"> a. Pengembangan sektor/komoditas/kegiatan unggulan daerah
6	Sarana dan prasarana (infrastruktur) publik	PD 1: Peningkatan pertumbuhan dan pertahanan ekonomi daerah dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan hidup;	PN 2 : Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan <ul style="list-style-type: none"> a. Penyebaran pusat-pusat pertumbuhan ke wilayah yang belum berkembang b. Peningkatan infrastruktur dan pelayanan dasar secara merata PN 5 : Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar <ul style="list-style-type: none"> a. Pembangunan infrastruktur pelayanan dasar b. Pembangunan konektivitas multimoda untuk mendukung pertumbuhan ekonomi c. Pengembangan infrastruktur perkotaan d. Pembangunan energi dan ketenagalistrikan
7	Lingkungan hidup	PD 1: Peningkatan pertumbuhan dan pertahanan ekonomi daerah dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan hidup;	PN 2 : Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan <ul style="list-style-type: none"> a. Peningkatan daya dukung lingkungan serta ketahanan bencana dan perubahan iklim PN 6 : Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim <ul style="list-style-type: none"> a. Peningkatan kualitas lingkungan hidup b. Peningkatan ketahanan bencana dan perubahan iklim c. Pembangunan rendah karbon
8	Birokrasi dan tata kelola pemerintahan	PD 5 : Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan dan	PN 7 : Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik

No	Prioritas Kabupaten Magelang	Prioritas Provinsi Jawa Tengah	Prioritas Nasional
1	2	3	4
		<p>kondusivitas wilayah serta peningkatan kapasitas dan ketahanan fiskal daerah</p>	<p>a. Reformasi kelembagaan birokrasi untuk pelayanan publik berkualitas b. Penataan kapasitas lembaga demokrasi, penguatan kesetaraan dan kebebasan c. Perbaikan sistem peradilan, penataan regulasi dan tata kelola keamanan siber d. Peningkatan akses terhadap keadilan dan sistem anti korupsi</p>
9	<p>Ketenteraman, ketertiban dan penanggulangan bencana</p>	<p>PD 4 : Penguatan ketahanan bencana</p>	<p>PN 2 : Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan a. Peningkatan daya dukung lingkungan serta ketahan bencana dan perubahan iklim PN 6 : Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim a. Peningkatan ketahanan bencana dan perubahan iklim PN 7 : Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik a. Peningkatan rasa aman, peningkatan kemampuan pertahanan dan industri pertahanan</p>
10	<p>Kepemudaan dan olah raga</p>	<p>PD 3: Peningkatan dan pemulihan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia menuju SDM berdaya saing;</p>	<p>PN 3 : Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing a. Peningkatan kualitas anak, perempuan, dan pemuda</p>

Beberapa indikator makro, yaitu Laju Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), angka kemiskinan IPM dan Inflasi, dikoreksi dari target di RPJMD tahun 2019-2024, dengan mempertimbangkan dampak Covid-19. Keselarasan Indikator Pembangunan Makro Kabupaten Magelang, Jawa Tengah dan Pembangunan Nasional Tahun 2021 (pasca Covid-19) tertuang dalam tabel 4.4.

Tabel 4.4
Keselarasan Indikator Pembangunan Makro Kabupaten Magelang, Jawa Tengah dan Pembangunan Nasional Tahun 2021 (pasca Covid-19)

Indikator Sasaran Pembangunan	Target Sasaran Kabupaten Magelang	Target Sasaran Jawa Tengah	Target Sasaran Nasional
a. Pertumbuhan ekonomi	3,3 – 4,3%	3,8 – 4,8%	4,5 – 5,5%
b. Tingkat Pengangguran Terbuka	4,54 – 5,17%	4,94 – 5,67%	7,5 – 8,2%
c. Angka kemiskinan	12,44 – 11,52%	11,94 – 11,02%	9,2 – 9,7%
d. Indeks Pembangunan Manusia	69,82	72,49	72,78 – 72,90

Keselarasn pembangunan antara pusat dan daerah juga diwujudkan dalam bentuk kesiapan Pemerintah Kabupaten Magelang dalam mendukung pelaksanaan program/kegiatan prioritas nasional yang dilaksanakan di Kabupaten Magelang terkait dengan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional Borobudur sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 79 tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal-Semarang-Salatiga-Demak-Grobogan, Kawasan Purworejo-Wonosobo –Magelang-Temanggung, dan Kawasan Tegal-Brebes-Pemalang. Peraturan Presiden ini terdiri dari 12 pasal yang memiliki fungsi sebagai peoman bagi Menteri dan Kepala Lembaga serta Perangkat Daerah tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota untuk menetapkan kebijakan sektoral dalam rangka pelaksanaan percepatan pembangunan Kawasan, yang dituangkan dalam dokumen rencana strategis masing-masing kementerian/lembaga sebagai bagian dari dokumen perencanaan pembangunan. Percepatan pembangunan kawasan ini dilakukan guna meningkatkan daya saing kawasan yang berdampak pada pertumbuhan investasi dan peningkatan perekonomian nasional yang terintegrasi dan berkelanjutan.

Sebagaimana Peraturan Presiden nomor 3 tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional yang juga berlaku untuk pelaksanaan dari Peraturan Presiden nomor 79 tahun 2019, mengamanatkan bahwa dalam hal lokasi Proyek Strategis Nasional tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah, Rencana Detil Tata Ruang Daerah, atau Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dan secara teknis tidak memungkinkan untuk dipindahkan dari lokasi yang direncanakan, dapat dilakukan penyesuaian tata ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang penataan ruang.

Kabupaten Magelang masuk dalam kawasan Purworejo-Wonosobo – Magelang-Temanggung (Purwomanggung). Aktivitas ekonomi Purwomanggung didominasi sektor pertanian, perkebunan, dan pariwisata, dengan potensi utama di bidang pariwisata dan pertanian. Destinasi wisata Purwomanggung berpusat di Kawasan Candi Borobudur, didukung potensi pariwisata sejauh 50—100 km dari Borobudur ke arah koridor Yogyakarta-Dieng (Wonosobo)-Solo/Sangiran hingga Semarang. Potensi lain Purwomanggung berasal dari sektor unggulan pertanian berupa tanaman pangan dan hortikultura yang dapat dioptimalkan sebagai agroindustri.

Potensi pengembangan wisata Kawasan Purwomanggung yang ada di Kabupaten Magelang adalah Candi Borobudur, Candi Pawon dan Candi Mendut, Ketep Pass, Taman Nasional Gunung Merapi-Merbabu, Taman Rekreasi, Desa Wisata, Pusat Kerajinan, dan Agrowisata. Potensi pengembangan sektor pertanian di Kabupaten Magelang berupa potensi tanaman pangan/palawija (padi, jagung, ubi jalar) dan hortikultura (cabe rawit, kubis, kentang, bawang merah, dan sayuran lainnya).

Ada 3 tantangan dalam pengembangan Kawasan Purwomanggung di Kabupaten Magelang, yaitu : (1). tantangan fisik alam dimana Kabupaten Magelang merupakan daerah yang rawan terhadap erupsi gunung api, banjir lahar, kekeringan dan angin puting beliung, (2). tantangan ekonomi berupa belum optimalnya pemanfaatan sarana STA, pertumbuhan ekonomi yang masih dibawah 5,5%, ketergantungan pada sektor pertanian masih tinggi dan belum didukung industri pengolahan pertanian, (3). Tantangan sosial dimana Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) masih lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata Jawa Tengah, IPM lebih rendah dibanding IPM Jawa Tengah, kondisi *stunting* dan angka kemiskinan cukup tinggi

Dukungan Pemerintah Kabupaten Magelang terhadap implementasi Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019 dapat dilihat pada tabel 4.5.

Tabel 4.5
Dukungan Kesiapan Pemerintah Kabupaten Magelang
Terhadap Implementasi Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019

No.	Program/ Kegiatan	Nilai Investasi (Milyar)	Sumber Dana	Kesiapan Kelengkapan				Pelaksana kegiatan	Dukungan Pemda Kab Magelang
				Lahan	FS	DED	Ijin Lingkungan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Pembangunan Bendungan Pasuruhan, Kab. Magelang	1.500	APBN	Belum Tersedia	2017	2018	AMDAL	Kementerian PUPR melalui BBWSO	koordinatif
2	Pembangunan Jalan Tol Ruas Tol Bawen-Yogya, Kab. Magelang	30.000	KPBU	Belum Tersedia				Kementerian PUPR melalui Badan Penyelenggara Jalan Tol	koordinatif
3	Pembangunan Jalan Magelang - Kaliangkrik Bts. Kab. Wonosobo, Kab. Magelang	45	APBN	Pemprov				Binamarga Prov. Jateng	koordinatif
4	Pembangunan ruas Jalan Manglong Kalikodil, Kab. Magelang	52	APBN	Tersedia	-	-	-	DPUPR	Penyiapan DED yang dilaksanakan secara bertahap dimulai tahun 2020.
5	Pembangunan Gedung Pusat	65	APBN	Belum Tersedia	belum	belum		Satpol PP dan Damkar /	Penyiapan dokumen studi kelayakan dan

No.	Program/ Kegiatan	Nilai Investasi (Milyar)	Sumber Dana	Kesiapan Kelengkapan				Pelaksanaan kegiatan	Dukungan Pemda Kab Magelang
				Lahan	FS	DED	Ijin Lingkungan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Pemadam Kebakaran Kawasan Borobudur, Kab. Magelang							Kementerian PUPR	dokumen perencanaan ditahun 2021
6	Peningkatan infrastruktur di Kawasan Borobudur, Kab. Magelang	100	APBN					Kementerian PUPR	Dokumen Perencanaan dan Kesiapan lahan sesuai item pekerjaan. <ul style="list-style-type: none"> • Lahan dan DED untuk terminal Borobudur, Salaman & Secang • Lahan dan DED untuk drainase dan trotoar jl lingkungan borobudur
7	Penyediaan TPST Penyangga Kawasan Borobudur, Kab. Magelang	100	APBN					DLH	Sudah dilakukan studi kelayakan. Penyiapan lahan Penyusunan dokumen perencanaannya dan

No.	Program/ Kegiatan	Nilai Investasi (Milyar)	Sumber Dana	Kesiapan Kelengkapan				Pelaksanaan kegiatan	Dukungan Pemda Kab Magelang
				Lahan	FS	DED	Ijin Lingkungan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									dokumen lingkungan dimulai tahun 2020.
8	Pembangunan TPA/TPST Regional, Kab. Magelang	200	APBN	2020-2021 oleh Pemprov Jateng	2019	-	Ijin Lingkungan 2020	DLHK Provinsi Jateng	Telah disiapkan DED dan UKL UPL untuk pembangunan jembatan Rejosari serta pembebasan lahan untuk akses jembatan sebagai penghubung dengan Kota Magelang
9	Penataan akses poros Mendut-Pawon Borobudur, Kab. Magelang	57	APBN	2020 oleh Kementerian PUPR	2020	2021		Kementerian PUPR-Ditjen Cipta Karya	Koordinatif, Penyiapan lahan
10	Pembangunan gerbang dan koridor Palbapang Borobudur, Blondo Borobudur, Gerbang/ Rest Area Koridor Kembanglimus Borobudur, Kab.	50	APBN	2020 oleh Kementerian PUPR	2020	2020		Kementerian PUPR-Ditjen Bina Marga dan Dirjen Cipta Karya	Koordinatif, Penyiapan relokasi untuk SD Negeri Blondo. Penyiapan lahan di Kembanglimus

No.	Program/ Kegiatan	Nilai Investasi (Milyar)	Sumber Dana	Kesiapan Kelengkapan				Pelaksana kegiatan	Dukungan Pemda Kab Magelang
				Lahan	FS	DED	Ijin Lingkungan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Magelang								
11	Penataan kawasan ruang terbuka publik Candi Borobudur, Kab. Magelang	68	APBN	Tersedia, PT TWC dan Kementerian PUPR	2020	2020		Kementerian PUPR-Ditjen Cipta Karya	Koordinatif
12	Pembangunan Anjungan Cerdas Candi Borobudur, Kab. Magelang	1.100	KPBU	Belum tersedia	2020	2020		Kementerian PUPR-Ditjen Cipta Karya	Penyusunan dokumen kajian kelayakan. Penyiapan lahan
13	Revitalisasi Pasar Ngablak, Pasar Kaponan, Pasar Salaman, Pasar Mungkid dan Pasar Windusari, Kab. Magelang	265	APBN	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Disdagkop UKM	Penyiapan dokumen lingkungan dan DED di setiap lokasi Penyiapan lahan Penyiapan pasar penampungan sementara

No.	Program/ Kegiatan	Nilai Investasi (Milyar)	Sumber Dana	Kesiapan Kelengkapan				Pelaksanaan kegiatan	Dukungan Pemda Kab Magelang
				Lahan	FS	DED	Ijin Lingkungan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
14	Pembangunan wisata kreatif Simpang Mendut (Taman Kreasi Mendut/ Museum Widayat/Taman Anggrek), Kab. Magelang	50	APBN	Tersedia milik Pemda	2020	Belum tersedia	Andallalin belum tersedia	Kementerian PUPR-Ditjen Cipta Karya	Penyiapan Lahan. Penyusunan Studi Kelayakan dan Dokumen Perencanaan
15	Pembangunan Sekolah vokasi Pariwisata/ SMK Pariwisata, Kab. Magelang	200	APBN	Belum tersedia	Belum tersedia	Belum Tersedia	Andallalin belum tersedia	Pemprov Jateng	Penyusunan studi kelayakan

4.3 Inovasi Daerah

4.3.1 Paseso Merapi atau *Sister Village*

Paseduluran Deso (PASESO) MERAPI atau *sister village* merupakan sebuah sistem dalam penanganan pengungsi letusan Gunung Merapi yang dikembangkan oleh Kabupaten Magelang melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Pendekatan yang dilakukan pada sistem ini adalah pendekatan kelembagaan melalui persaudaraan dengan membentuk desa bersaudara (*sister village*) untuk pengurangan risiko bencana berbasis masyarakat.

Konsep inovasi dari sistem ini adalah memperbesar skala pengungsian, yang semula dari rumah ke rumah menjadi Desa ke Desa. Dalam praktek PASESO atau *sister village*, ada desa penyangga di daerah aman sebagai penampung masyarakat dari desa yang tertimpa bencana yaitu dengan cara seperti melamar pengantin. Lamaran desa tersebut dapat diterima, ditolak atau sudah diterima namun gagal menjadi pasangan. Apabila lamaran diterima, maka perpasangan atau persaudaraan antara kedua desa ini dikuatkan dengan MOU, selayaknya pengantin dengan buku nikahnya.

Setelah diterapkannya PASESO di Kabupaten Magelang, sudah terbentuk 19 pasang desa bersaudara berbasis situs dengan memanfaatkan Sistem Informasi Desa (SID) di Kawasan Rawan Bencana dan di 42 desa penyangga sehingga penanganan pengungsi lebih tertata dan korban dapat diminimalisir. Sebelumnya, jika korban bencana gunung Merapi mengungsi, terjadi kesemrawutan dan ketidakpastian tempat mengungsi.

Contoh praktek PASESO/*Sister Village* adalah persaudaraan antara Desa Sumber dan Desa Ngargomulyo di Kecamatan Dukun dengan Desa Ngawen dan Desa Tamanagung di Kecamatan Muntilan. Jika aktivitas Gunung Merapi meningkat, warga Desa Sumber dan Ngargomulyo telah siap. Mereka mengetahui akan mengungsi kemana. Misalnya warga Desa Sumber mengungsi ke desa saudaranya yakni Desa Ngawen Muntilan. Sedangkan Desa Ngargomulyo bersaudara dengan Desa Tamanagung Muntilan.

PASESO/*Sister Village* ini mampu menjawab permasalahan manajemen dari pengelolaan bencana Gunung Merapi di Kabupaten Magelang. Sistem ini mampu menciptakan “perasaan nyaman di zona aman” pada para pengungsi bencana Gunung Merapi. Keberhasilan Paseso dapat dilihat dari sudah direplikasinya inovasi ini di berbagai daerah lain dalam penanganan pengungsi, seperti Gunung Kelud di Kediri, Gunung Agung di Bali dengan (program Semeton), dan Gunung Sinabung di Medan.



4.3.2 Program MACAK (Magelang Membaca Untuk Kesejahteraan)

Literasi mempunyai peranan penting dalam mendorong kesejahteraan masyarakat, dan perpustakaan mempunyai peran strategis dalam meningkatkan literasi masyarakat melalui penyediaan informasi, baik cetak maupun *online*. Literasi didapat melalui pendidikan sekolah maupun program *adult literacy* (literasi untuk orang dewasa). Program Literasi untuk Orang Dewasa menghasilkan beberapa manfaat, khususnya membangun *self esteem* (kepercayaan diri) dan *empowerment* (pemberdayaan).

Paradigma masa lalu beranggapan bahwa perpustakaan adalah sebuah gudang buku yang bersifat statis. Agar perpustakaan mampu mengambil peran untuk meningkatkan kemampuan literasi masyarakat guna mendorong kesejahteraan, paradigma lama ini harus ditransformasi, dengan memosisikan perpustakaan sebagai wahana untuk pemberdayaan masyarakat dengan pendekatan teknologi informasi guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kabupaten Magelang telah melakukan transformasi perpustakaan daerah. Guna mendorong terwujudnya transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial di Kabupaten Magelang, maka Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Magelang melakukan inovasi melalui program “MACAK” (Magelang Membaca Untuk Kesejahteraan). Program MACAK memfungsikan perpustakaan sebagai sarana yang memfasilitasi masyarakat dalam mengembangkan potensinya, yang merupakan bentuk nyata dukungan terhadap program revolusi mental yang digaungkan Pemerintah pusat. Program “MACAK” dilaksanakan dengan kegiatan berupa pemberian wawasan, pengetahuan, dan sekaligus keterampilan bagi masyarakat pengguna perpustakaan. Kegiatan ini memiliki tujuan memperkuat peran perpustakaan dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan kemampuan literasi yang meningkatkan kreativitas masyarakat dan mengurangi kemiskinan akses informasi, sebagai upaya penguatan kesejahteraan social.



4.3.3 Centre of Service for Research (COSFRE) / Klinik Penelitian

Salah satu input dalam perencanaan dan pengambilan kebijakan pembangunan adalah hasil penelitian. Penelitian yang berkualitas membutuhkan sumber daya manusia (SDM) yang mumpuni dan anggaran yang cukup. Akan tetapi hampir di semua level pemerintahan SDM dan anggaran menjadi penyebab minimnya jumlah penelitian yang dilakukan oleh pemerintah, padahal salah satu indikator perencanaan dan pengambilan kebijakan yang baik adalah berdasarkan pada hasil penelitian. Disisi lain terdapat banyak penelitian yang dilakukan oleh perorangan maupun lembaga, seperti mahasiswa, perguruan tinggi dan lembaga swasta lainnya. Peneliti meminta ijin penelitian kepada pemerintah Kabupaten Magelang.

Penelitian-penelitian yang dilakukan oleh pihak non pemerintah ini belum difasilitasi secara substansial dan hasilnya belum dimanfaatkan oleh Pemerintah Kabupaten Magelang karena ada keraguan terhadap kualitas hasil penelitian. Di samping itu hanya sedikit hasil penelitian yang diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten Magelang. Pada tahun 2018 terdapat 464 buah penelitian. Apabila satu penelitian diasumsikan memerlukan pembiayaan Rp. 10 juta, maka terdapat sumber daya senilai kurang lebih Rp. 4,64 milyar yang dapat dimanfaatkan. Hasil-hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan sehingga akan mendukung *planning by research*.

Guna mendukung kegiatan penelitian, Pemerintah Kabupaten Magelang melalui Bappeda dan Litbangda menyediakan fasilitas COSFRE (*Centre of Service For Research*), yaitu fasilitas yang diberikan kepada para peneliti berupa layanan sebelum penelitian, saat pelaksanaan penelitian maupun paska penelitian, dengan kewajiban menyerahkan hasil penelitian kepada Pemerintah Kabupaten Magelang. Peneliti dilayani baik data, fasilitasi bertemu

stakeholders, diskusi dan seminar, sehingga hasil penelitian yang dilakukan semakin berkualitas dan dapat dimanfaatkan oleh Pemerintah Kabupaten Magelang. Penelitian yang difasilitasi secara menyeluruh adalah penelitian terpilih yang mendukung prioritas pembangunan Kabupaten Magelang. COSFRE ini diharapkan memiliki *multiplayer effect* dalam menciptakan iklim yang kondusif dan ramah bagi para peneliti baik tingkat lokal, regional nasional maupun internasional untuk melakukan kegiatan penelitiannya di Kabupaten Magelang.



4.3.4 PEPAK (Percepatan Penurunan Angka Kemiskinan)

Kemiskinan merupakan salah satu indikator makro keberhasilan pembangunan. Kemiskinan erat kaitannya dengan tingkat kesejahteraan masyarakat yang menjadi fokus Pemerintah dan menjadi prioritas dalam rencana pembangunan, baik jangka menengah maupun jangka panjang.

Pada tahun 2014, persentase penduduk miskin Kabupaten Magelang mencapai 12,98% atau sebesar 160,48 ribu jiwa. Angka ini terus mengalami penurunan secara perlahan hingga mencapai angka 10,67% atau 137,45 ribu jiwa pada tahun 2019. Indeks Kedalaman Kemiskinan (*Poverty Gap Index-P1*), selama 6 (enam) tahun terakhir menunjukkan tren positif, dari 2,07 pada tahun 2014, turun menjadi 0,98 pada tahun 2019. Begitu pula dengan Indeks Keparahan Kemiskinan (*Poverty Severity Index-P2*), menunjukkan tren penurunan, dari 0,47 pada tahun 2014 menjadi 0,17 pada tahun 2019. Pada tahun 2019, capaian penurunan angka kemiskinan di Kabupaten Magelang lebih rendah dibandingkan dengan angka kemiskinan Provinsi Jawa Tengah (10,8%), namun masih berada di atas capaian nasional (9,41 %).

Walaupun angka kemiskinan di Kabupaten Magelang mengalami penurunan yang cukup signifikan, tetapi capaian tersebut masih jauh dari target yang telah ditetapkan dalam RPJMD 2014-2019 dan Target SDGs sebesar 8% pada tahun 2019

Amanat RPJMD Kabupaten tahun 2019-2024, angka kemiskinan ditargetkan sebesar 9,43-10,43 dan pada akhir periode (tahun 2024) ditargetkan 6,83-7,83. Guna mempercepat penurunan angka kemiskinan agar target pembangunan tercapai, maka pemerintah Kabupaten Magelang melakukan Program PEPAK (Percepatan Penurunan Angka Kemiskinan). Program ini merupakan program penanggulangan kemiskinan yang melibatkan multisektor, multistakeholder dan dilakukan secara komprehensif. Selain itu kegiatan dilaksanakan secara terstruktur, dimana pada semua tingkatan (Kabupaten, Kecamatan, Desa dan Dusun) ada kelembagaan Tim Penanggulangan Kemiskinannya; sistematis, dimana penanggulangan kemiskinan dilakukan oleh lembaga-lembaga yang ada dengan melibatkan multisektor dan multistakeholder serta masif, yaitu dilaksanakan secara terus menerus dan merata.



4.3.5 Pancen A SIKK (Pantauan Bencana dengan Aplikasi Sistem Informasi Kebencanaan Kabupaten)

Kabupaten Magelang memiliki luas 1.085,73 Km² atau sekitar 3,34% dari luas Provinsi Jawa Tengah. Secara administratif, Kabupaten Magelang memiliki 21 Kecamatan, terdiri dari 367 desa dan 5 kelurahan. Jumlah penduduk Kabupaten Magelang pada tahun 2019 sebanyak 1.295.019 jiwa. Batas-batas wilayah sebagai berikut :

- Sebelah utara : Kabupaten Temanggung dan Kabupaten Semarang
- Sebelah timur : Kabupaten Semarang dan Kabupaten Boyolali
- Sebelah selatan : Kabupaten Purworejo dan Daerah Istimewa Yogyakarta
- Sebelah barat : Kabupaten Temanggung dan Kabupaten Wonosobo
- Bagian tengah : Kota Magelang

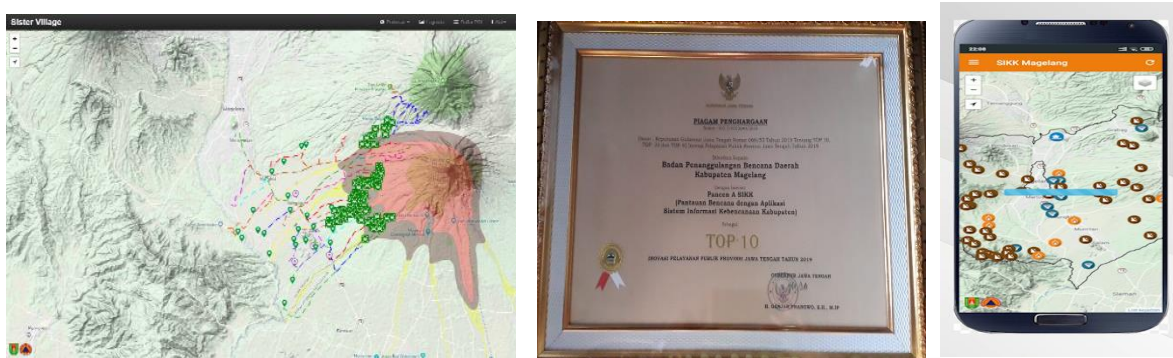
Kabupaten Magelang termasuk daerah rawan bencana. Jenis bencana yang ada di Kabupaten Magelang yaitu erupsi merapi, banjir, tanah longsor, kebakaran, angin kencang, kekeringan, gempa bumi dan kejadian lain. Bencana yang datang dapat disebabkan oleh faktor alam maupun akibat dari ulah manusia. Hal ini terbukti dengan semakin meningkatnya jumlah kejadian bencana setiap tahunnya. Ancaman bencana dapat menyebabkan korban jiwa dan kerusakan harta benda. Kejadian bencana di Kabupaten Magelang dari

tahun 2013 – 2018 adalah 301, 172, 187, 204, 352, 477 kejadian. Didominasi oleh tanah longsor dan angin kencang.

BNPB sebagai badan negara yang menangani masalah bencana telah membakukan dan menyeragamkan data bencana di seluruh wilayah Indonesia. Standardisasi data kebencanaan disusun agar dapat menjadi acuan dan pedoman bagi BPBD dalam pelaporan kejadian bencana. Dalam standardisasi data kebencanaan ini, terdiri dari data pra bencana, tanggap darurat dan pasca bencana.

BPBD Kabupaten Magelang menggunakan standarisasi data kebencanaan tersebut sebagai acuan dalam membangun Sistem Informasi Kebencanaan Kabupaten (SIKK). Melalui dukungan SIKK diharapkan BPBD Kabupaten Magelang akan lebih mudah mewujudkan kabupaten yang tanggap, cepat, tepat dan tangguh menghadapi bencana.

Tersedianya Pantauan Bencana dengan Aplikasi Sistem Informasi Kebencanaan Kabupaten (Pancen A SIKK) berbasis Web. Aplikasi ini dapat dimanfaatkan untuk menghimpun, mengelola dan mendiseminasikan informasi kebencanaan di Kabupaten Magelang. Pemangku kepentingan dan masyarakat dapat memantau informasi kebencanaan melalui link <http://sikk.bpbdmagelang.id>. Dapat juga melihat informasi bencana melalui smartphone dengan mengunduh dari playstore beralamat <https://play.google.com/store/apps/details?id=info.sikk.bpbdmagelang>,



4.3.6 Budidaya tanaman bawah tegakan penghasil emas hijau (BINTANG HIJAU)

Bintang Hijau merupakan sebuah gagasan ide pengelolaan hutan bersama masyarakat di sekitar kecamatan Tempuran melalui budidaya tanaman bawah tegakan seperti bio farmaka. Gagasan ini berawal dari kegiatan masyarakat yang menebang kayu secara sembarangan tanpa memedulikan kelestarian hutan bahkan cenderung merusak hutan dan mengganggu ekosistem alam. Dampak dari terganggunya ekosistem hutan/alam adalah berkurangnya keragaman hayati, yang dapat menjadi pengendali hama atau penanda musim, kemudian terjadi longsor dan yang cukup dirasakan masyarakat adalah berkurangnya sumber-sumber mata air. Berkaitan dengan hal tersebut perlu ada cara pengelolaan hutan yang berkelanjutan, baik ekonomi, lingkungan maupun sosial.

Konsep inovasi Bintang hijau adalah mengelola hutan untuk kesejahteraan masyarakat melalui budidaya tanaman di bawah tegakan yaitu

bio farmaka. Berdasarkan pengalaman dan pengamatan, tanaman bio farmaka yang dapat dikembangkan adalah tanaman yang memerlukan naungan 70 % seperti kunyit, temulawak, lempuyang dan kunci. Petani memperoleh penghasilan tanpa mengeksploitasi hutan secara berlebihan. Setiap tahapan prosesnya mulai dari budidaya sampai pengolahan mampu menarik tenaga kerja. Pemuda Tani mulai memanfaatkan wisata herbal dan ibu-ibu tani dapat mengisi waktu luang memproses produk seperti mulai dari pengeringan, pemotongan, pembuatan simplisia sampai pembuatan sabun. Tidak hanya sebatas itu sebagian masyarakat lain juga terdorong untuk berperan sebagai pedagang/supplier, usaha transportasi.

Saat ini kegiatan “Bintang Hijau” yang berawal dari 2 (dua) desa yaitu Desa Temanggal dan Desa Growong di Kecamatan Tempuran telah berkembang ke 7 desa yang lain yaitu Desa Pringombo, Desa Kemutuk, Desa Bawang, Desa Tugurejo, Desa Jogomulyo dan Desa Ringinanom. Apabila dilihat jumlah lahan, awal kegiatan hanya 2 Ha sekarang sudah berkembang menjadi 90 Ha.

Bintang Hijau sudah membantu menjawab permasalahan pengelolaan hutan yang berkelanjutan. Konservasi hutan berjalan, masyarakat berpenghasilan dan merata. Selain itu, investor/pabrik juga tertarik untuk bekerjasama, serta kalangan akademis seperti UNTID dan UMM juga berkontribusi memberikan pelatihan diversifikasi produk.



4.3.7 Jogo Tuk (Komunitas Penyelamat Mata Air)

Bertambah tahun, keadaan iklim semakin tidak menentu. Jangka waktu musim kemarau Panjang sehingga banyak mata air yang mati atau mengecil debitnya, sumur kandas hingga dasarnya, dan sungai-sungai mengering. Alam telah mengalami penurunan kualitas dan tak lagi bisa menopang kebutuhan air bersih. Apabila tidak ada tindakan penyelamatan mata air secepatnya, maka tidak mustahil dalam waktu tidak lama akan terjadi kekeringan dan krisis air bersih. Penurunan potensi air baik secara kualitas maupun kuantitas akan menjadi masalah serius apabila dalam pengelolaannya tidak

dilaksanakan dengan baik dan bijaksana dengan memperhatikan aspek konservasi, pemanfaatan dan pengendaliannya.

Sesuai Undang-Undang No 7 tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, bahwa aspek Konservasi Sumber Daya Air memiliki peran yang sangat penting, mengingat bahwa dampak dari kerusakan lingkungan sebagai akibat degradasi hutan dan lahan, selain menyebabkan kelangkaan air juga akan menimbulkan terjadinya banjir dan tanah longsor. Oleh karena itu perlu suatu tindakan konkret untuk memulihkan keseimbangan ketersediaan air, seperti penanaman tanaman keras terutama yang bersifat menahan air, pengelolaan air hujan maupun pemanfaatan air secara bijak oleh semua pihak.

Guna menyelamatkan mata air terhindar dari krisis air bersih, kabupaten Magelang melakukan inovasi membentuk komunitas penyelamat mata air yang diberi nama JOGO TUK. Komunitas ini di bentuk di tingkat Desa dengan Surat Keputusan Kepala Desa. Kegiatan yang dilakukan komunitas Jogo Tuk diantaranya adalah melaksanakan inventarisasi mata air, menghitung debit mata air dan melaksanakan konservasi mata air baik secara vegetative maupun sipil teknis.

Dengan berkembangnya komunitas Jogo Tuk ini diharapkan mata air yang ada di Kabupaten Magelang akan tetap bertahan dan ketersediaan air bersih tetap melimpah sehingga terhindar dari krisis air.



4.3.8 PUSAKA GEMILANG (Pusat Informasi dan Komunikasi Kabupaten)

Pemerintah Kabupaten Magelang menghadapi kesulitan dalam melakukan integrasi data lintas sektoral. Data lintas sektoral dari OPD, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Akademisi, Masyarakat dan Stakeholder sulit untuk dihimpun dan kurang bias dipertanggungjawabkan validitasnya.

Validitas data yang rendah mempengaruhi kualitas perencanaan pembangunan di Kabupaten Magelang. Permasalahan data yang sering tidak konsisten antar OPD maupun dengan stakeholder lainnya diharapkan dapat diselesaikan dengan memanfaatkan kemajuan teknologi pada era revolusi industri 4.0 ini.

Beberapa kendala pelayanan publik Pemerintah Kabupaten Magelang yang sering terjadi di masyarakat antara lain adalah lambatnya penanganan, mahalnya biaya pelayanan, tidak transparannya pelayanan hingga sulitnya prosedur pelayanan. Selain itu data dan pelayanan publik pada OPD masih banyak yang bersifat sektoral, sehingga terdapat banyak layanan public. Hal

ini menyulitkan masyarakat pengguna layanan public. Guna mempermudah masyarakat dalam mengakses layanan publik, diperlukan upaya untuk memperbaiki pelayanan publik serta mengantisipasi kekurangan atas kualitas layanan. Pemerintah Kabupaten Magelang perlu menjamin kualitas penyelenggaraan pelayanan public dengan mengintegrasikan seluruh layanan public yang meliputi layanan perizinan, administrasi kependudukan, aduan, layanan kedaruratan serta layanan public lainnya dengan memanfaatkan kemajuan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK).

Berdasarkan beberapa permasalahan diatas, dalam rangka peningkatan kualitas layanan public pemerintah Kabupaten Magelang menerapkan sebuah inovasi dalam bentuk portal data terintegrasi dan layanan terpadu melalui PUSAKA GEMILANG.

Program Pusaka Gemilang memiliki 2 fokus utama yaitu integrasi data dan layanan public terpadu. meliputi :

a. Portal Data Terbuka Terintegrasi.

Portal data ini digerakan secara online oleh produsen data dari OPD, universitas, lembaga swasta, dan instansi vertikal pemilik data strategis daerah. Data yang dihimpun merupakan data yang digunakan untuk menyusun atau menyampaikan perencanaan pembangunan dan monitoring maupun evaluasi yang ada di Kabupaten Magelang. Selain itu pemanfaatan portal data dalam Pusaka Gemilang merupakan wujud peningkatan kualitas pelayanan publik melalui penyajian data daerah yang lebih valid, mudah, dan cepat.

b. Portal Layanan Terpadu.

Portal layanan terpadu ini mengintegrasikan beberapa layanan public pada beberapa OPD seperti layanan perizinan, administrasi kependudukan, aduan masyarakat, layanan kedaruratan serta layanan public lainnya dalam satu Portal yang memudahkan masyarakat.



4.3.9 Pengembangan Desa Wisata

Pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Magelang bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Salah satu upaya mencapai tujuan tersebut adalah dengan melakukan pengembangan pariwisata. Kabupaten magelang merupakan wilayah yang memiliki potensi wisata yang memadai dan memiliki daya tarik

yang cukup tinggi bagi wisatawan terlebih adanya dukungan keberadaan candi Borobudur.

Saat ini minat wisatawan cenderung pada konsep wisata alam pedesaan (*back to nature*). Pengembangan desa wisata adalah salah satu pilihan wisata yang tepat, dan pengembangan desa wisata ini menjadi solusi bagi permasalahan kemiskinan, pelestarian budaya, dan pelestarian lingkungan hidup. Pembangunan desa wisata di Kabupaten Magelang dilakukan melalui konsep Pariwisata berbasis masyarakat dapat memberikan kesempatan kepada masyarakat lokal untuk mengontrol dan terlibat aktif dalam manajemen dan pembangunan kepariwisataan yang ada serta memberikan kesempatan pada masyarakat yang terlibat langsung dalam usaha-usaha kepariwisataan.

Untuk mewujudkan pengembangan desa wisata dapat berjalan dan dikelola dengan baik maka pemerintah Kabupaten Magelang memfasilitasi keterlibatan yang luas dari komunitas lokal dalam proses pengembangan dan memaksimalkan nilai manfaat sosial dan ekonomi dari kegiatan pariwisata untuk masyarakat setempat. Masyarakat lokal memiliki kedudukan yang sama pentingnya sebagai salah satu pemangku kepentingan (*stakeholder*) dalam pembangunan kepariwisataan, selain pihak pemerintah dan industri swasta.

Pengembangan desa wisata di Kabupaten Magelang diarahkan untuk:

- a. Meningkatnya kapasitas, peran dan inisiatif masyarakat pembangunan kepariwisataan.
- b. Meningkatnya posisi dan kualitas keterlibatan/partisipasi masyarakat.
- c. Meningkatnya nilai manfaat positif pembangunan kepariwisataan bagi kesejahteraan ekonomi masyarakat.
- d. Meningkatnya kemampuan masyarakat dalam menjalankan



4.3.10. Covid Information System (CIS)

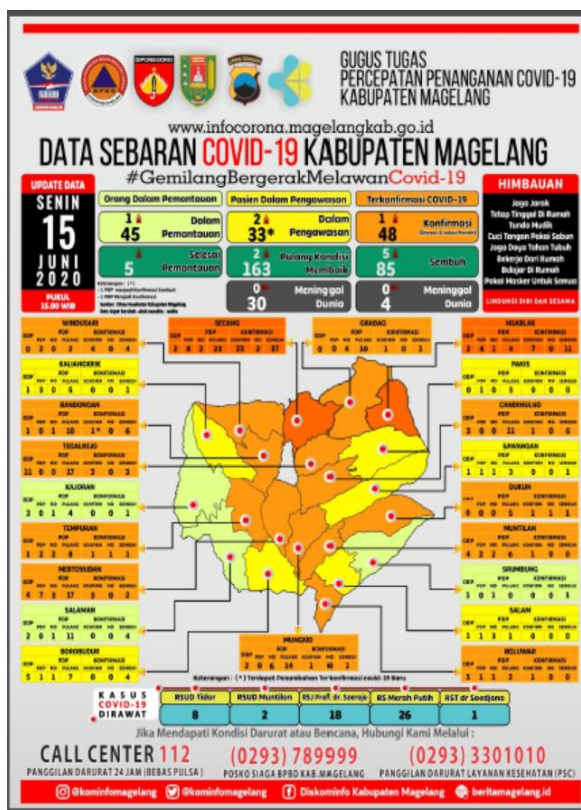
Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) telah ditetapkan sebagai kejadian bencana non alam oleh Presiden yang kemudian ditindaklanjuti dengan surat pernyataan bencana oleh Bupati Magelang. Penyebaran virus yang meluas dan berlangsung cepat di masyarakat menyebabkan dampak di berbagai sektor baik sosial maupun ekonomi. Untuk mencegah dan menangani dampak

tersebut, perlu respon dan kebijakan Pemerintah yang cepat dan tepat dengan dukungan data yang akurat.

Covid Information System (CIS) merupakan inovasi sistem pelaporan data *Covid-19* yang dikembangkan oleh Kabupaten Magelang melalui Dinas Kesehatan yang bekerjasama dengan Dinas Komunikasi dan Informatika. Konsep dari aplikasi ini adalah penyajian data *Covid-19* secara *real time by name by adress* mencakup ODP, PDP, Konfirmasi (positif *Covid-19*), sembuh, meninggal dunia, dll. *CIS* tersebut dilengkapi dengan berbagai fitur yang memudahkan dalam penyajian informasi seperti grafik dan peta sebaran per kecamatan secara *time series*.

Inovasi lain yang dikembangkan dari aplikasi *CIS* adalah adanya data rekam jejak dan waktu setiap kasus *Covid-19* dari mulai ada gejala, diagnosa awal, pemeriksaan *rapid test* maupun *SWAB*, perawatan, sampai kemudian seseorang dinyatakan sembuh. Selain itu, aplikasi juga dilengkapi dengan peta *tracking* dari setiap orang yang dinyatakan konfirmasi (positif *Covid-19*). Peta *tracking* ini menjadi sangat penting untuk menentukan orang-orang yang perlu segera dilakukan tindakan seperti pemeriksaan kesehatan atau isolasi untuk memutus rantai penularan *Covid-19*. Dari peta *tracking*, Pemerintah juga dapat menghitung angka reproduksi kasus *Covid-19* sebagai dasar untuk penentuan status daerah secara riil.

Setelah diterapkannya aplikasi *CIS*, Dinas Kesehatan beserta Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magelang masih terus mengembangkan aplikasi tersebut untuk dapat diintegrasikan dengan aplikasi *Covid-19* di tingkat Provinsi Jawa Tengah dan aplikasi Bersatu Lawan *Covid-19* (BLC) yang dibuat oleh Gugus Tugas Nasional. Integrasi dari ketiga aplikasi tersebut selain dapat menjawab permasalahan data, juga dapat menyediakan informasi status daerah dalam rangka kesiapan menuju tatanan kenormalan baru (*new normal*). Hal ini akan dapat menjadi dasar pengambilan kebijakan bagi Pemerintah untuk menentukan kegiatan di tingkat masyarakat sehingga dapat produktif dan aman *Covid-19*.



1.4. Pokok-Pokok Pikiran DPRD

Dalam upaya mewujudkan pencapaian Visi Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang, tahun 2021 merupakan tahun kedua dari pembangunan lima tahun ke depan. Perjalanan pencapaian visi Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang, dapat dijadikan sebagai acuan untuk melihat seberapa besar capaian yang telah diperoleh dan seberapa besar penyimpangan dari target yang telah ditetapkan. Apabila ternyata penyimpangan jauh lebih besar dari upaya pencapaian target, maka tahun 2021 harus dijadikan starting point untuk mengejar ketertinggalan yang telah terjadi. Hal ini agar supaya Visi Kabupaten Magelang berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024, yaitu Kabupaten Magelang yang “Sedaya Amanah” (Sejahtera, Berdaya Saing, dan Amanah) dapat terwujud. Untuk lebih mengoperasionalkan visi tersebut maka disusun 3 misi, yakni meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat yang sejahtera dan berakhlak mulia, meningkatkan daya saing daerah yang berbasis pada potensi lokal dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan, dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang amanah. Kemudian, misi ini difokuskan kedalam Dasa Cita (10 prioritas pembangunan), meliputi : kehidupan beragama dan akhlak mulia, Pendidikan, Kesehatan, Penanggulangan Kemiskinan, Pengembangan Sektor Unggulan Secara Terpadu, Peningkatan Sarana dan Prasarana Publik, Lingkungan Hidup, Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan, Ketentraman Ketertiban dan Penanggulangan Bencana, Kepemudaan dan Olah raga. Dalam upaya perwujudan visi tersebut, dibutuhkan teknis pengawalan

dan strategi pelaksanaan dilapangan yang tepat yang dilakukan oleh eksekutif, legislatif, dan *stakeholders* lainnya.

Tahapan kegiatan yang tidak kalah penting yang harus disusun dalam upaya perwujudan visi tersebut diatas adalah bagaimana menjabarkan dokumen RPJMD menjadi Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) setiap tahunnya. RKPD merupakan Dokumen Induk Tahunan yang memuat seluruh aspirasi masyarakat Kabupaten Magelang, tidak terkecuali termasuk bagaimana upaya mewujudkan visi Kabupaten Magelang dalam bentuk kebijakan dan program setiap tahunnya.

Setelah RKPD dapat disepakati melalui Musrenbang di tingkat Pemerintah Kabupaten Magelang, maka akan dijabarkan lebih lanjut menjadi dokumen KUA dan PPAS. Kedua Dokumen inilah yang selanjutnya menjadi dasar untuk penyusunan dokumen RKA-SKPD sebagai komponen penyusunan RAPBD pada tahun berjalan. Mekanisme penyusunan dokumen tersebut harus runtut, berkesinambungan dan berjenjang. Didalam Dokumen RKPD, salah satu bentuk usulan keterwakilan masyarakat melalui DPRD Kabupaten Magelang yaitu berupa dokumen Pokok-pokok Pikiran DPRD Kabupaten Magelang, yang terangkum ke dalam seluruh urusan kewenangan pemerintah di tingkat provinsi. Dengan demikian maka dokumen Pokok-pokok Pikiran DPRD Kabupaten Magelang, merupakan dokumen yang sangat penting dan strategis untuk mendasari dan mengarahkan pelaksanaan pembangunan agar tidak lepas terhadap perwujudan visi Kabupaten Magelang. Disamping itu dokumen ini juga sangat dibatasi terkait dengan faktor waktu penyelesaiannya, karena Pokok-pokok Pikiran DPRD sangat diperlukan sebagai bahan penyusunan draf awal dokumen RKPD. Selanjutnya proses penyusunan Pokok-pokok Pikiran DPRD memperhatikan pula beberapa Peraturan Perundang-undangan.

Pokok-pokok Pikiran DPRD Kabupaten Magelang disampaikan kepada Bupati melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) paling lambat minggu kedua pada bulan Februari pada tahun berjalan. Pokok-pokok Pikiran DPRD Kabupaten Magelang harus dapat disampaikan tepat waktu agar pembahasan dokumen turunannya seperti RKPD, KUA dan PPAS, serta RKA dan RAPBD menjadi lebih terarah dan efektif karena dalam pembahasan sifatnya hanya tinggal penyesuaian saja. Implikasi keterlambatan penyampaian Pokok-pokok Pikiran DPRD Kabupaten Magelang kepada Bupati akan mengganggu mekanisme, tidak efektif dan dapat menyita waktu penyelesaian APBD. Pokok-pokok Pikiran DPRD Kabupaten Magelang memiliki peran yang sangat penting dan strategis baik dari sisi muatan substansi materi maupun ketepatan waktu penyelesaian dan penyampaiannya kepada Bupati Dengan demikian maka kunci penyusunan dokumen Pokok-pokok Pikiran DPRD harus dapat diselesaikan secara cermat dan dapat diserahkan kepada Bupati dengan tepat waktu.

Maksud dan Tujuan

Penyusunan Dokumen Pokok-pokok Pikiran DPRD dimaksudkan sebagai upaya DPRD Kabupaten Magelang dalam mengarahkan dan mengawasi

strategi pelaksanaan program pembangunan Kabupaten Magelang, dalam upaya mewujudkan tercapainya visi Kabupaten Magelang "Sedaya Amanah" (Sejahtera, Berdaya Saing, dan Amanah). Adapun tujuan disusunnya Pokok-pokok Pikiran DPRD yaitu :

1. Memberikan bahan, arahan sekaligus masukan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang, dalam menyusun dokumen awal draf RKPD Tahun Anggaran 2021.
2. Memudahkan dan mengefektifkan penyusunan dokumen RKPD, KUA, PPAS, RKA- SKPD, dan RAPBD Tahun Anggaran 2021
3. Mengarahkan dan memfokuskan upaya pencapaian visi Kabupaten Magelang melalui perencanaan dan penganggaran APBD Tahun Anggaran 2021.
4. Mengarahkan penyusunan kebijakan dan program pembangunan sesuai dengan RPJPD dan RPJMD
5. Mewujudkan aspirasi masyarakat Daerah Kabupaten Magelang dalam pelaksanaan pembangunan melalui fungsi representasi DPRD Kabupaten Magelang.
6. Mendukung terwujudnya tingkat kesejahteraan masyarakat Daerah Kabupaten Magelang yang lebih baik.

Ruang Lingkup

Penyusunan Pokok-pokok Pikiran DPRD Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2021, cakupannya meliputi seluruh urusan kewenangan pemerintah Kabupaten Magelang, isu strategis dan dinamis yang berkembang di masyarakat saat ini, hasil pelaksanaan reses DPRD, hasil aspirasi masyarakat berdasarkan audiensi, masukan kelompok masyarakat.

Prioritas Pembangunan Tahun 2021

Dasa Cita (10 Prioritas Pembangunan) meliputi:

1. Kehidupan beragama dan akhlak mulia dengan tujuan meningkatkan kualitas kehidupan beragama untuk mewujudkan akhlak mulia;
 - a. Bahwa tempat ibadah membutuhkan perhatian yang baik dari pemerintah daerah, baik dari segi pembangunan, pemeliharaan maupun sarana prasarana lainnya.
 - b. Dibutuhkan perbaikan database pesantren, madrasah diniyyah, TPA & TPQ agar kedepan termasuk kesejahteraan guru ngaji dapat tersentuh program Pemerintah Daerah, baik sarana prasarana maupun peningkatan kesejahteraan gurunya.
 - c. Bantuan sarana prasarana bagi Majelis Taklim, Jamaah Pengajian dan Ormas Keagamaan untuk dipermudah, mengingat aktifitas warga masyarakat baik melalui majlis taklim, jamaah pengajian maupun kegiatan ormas keagamaan sudah menjadi rutinitas.
 - d. Pembangunan maupun pemeliharaan makam desa maupun makam tokoh agama diharapkan juga mendapatkan perhatian yang sama, baik dari pemerintahan desa hingga pemerintah daerah.
 - e. Fasilitasi peningkatan kualitas umat beragama

- f. Peningkatan keimanan dan ketaqwaan pada Tuhan Yang Maha Esa.
 - g. Peningkatan pemahaman dan pengamalan ajaran agama
 - h. Peningkatan upaya-upaya pencegahan penyimpangan ajaran agama
 - i. Peningkatan sarana dan prasarana rumah ibadah dan kegiatan ibadah
 - j. Peningkatan Kerukunan antar umat beragama
 - k. Penguatan organisasi keagamaan dalam membangun keberagaman dan toleransi dalam keberbhinnekaan sebagai ciri masyarakat Kabupaten Magelang
2. Pendidikan, untuk meningkatkan pemerataan Pendidikan yang seluas-luasnya dan peningkatan mutu Pendidikan;
- a. Dibutuhkannya perhatian Pemerintah Daerah untuk memperjuangkan nasib tenaga honorer dan K2 serta dicarikan solusi penyelesaian ditengah rencana pemerintah menghapus tenaga honorer.
 - b. Program Kartu Indonesia Pintar (KIP) yang tidak efektif dan banyak tidak tepat sasaran, karena banyak warga miskin yang belum terdaftar sebagai peserta KIP.
 - c. Gedung/ruang perpustakaan yang belum memperoleh tempat yang terhormat di lingkungan sekolah. Dimana distribusi buku sekolah yang melimpah tidak diimbangi dengan kesiapan gedung/ruang perpustakaan yang memadai.
 - d. Pemerintah Daerah harus memperhatikan sekolah Madrasah, Guru Madrasah dan juga Guru Ngaji Desa melalui alokasi dana khusus yang sesuai dengan aturan yang ada.
 - e. Pemberian Bantuan Operasional (BOP)
 - f. Pemberian Bantuan Operasional sekolah negeri/ swasta
 - g. Perbaikan sistem pencairan bantuan operasional yang memudahkan penerima bantuan
 - h. Peningkatan sarana prasarana sekolah
 - i. Pembangunan ruang kelas baru bagi sekolah negeri/ swasta
 - j. Rehabilitasi ruang kelas
 - k. Pembangunan jamban sekolah yang layak
 - l. Pembangunan laboratorium komputer
 - m. Pengadaan komputer pembelajaran
 - n. Bantuan pengembangan dan operasional Madrasah Ibtidaiyah
 - o. Masih minimnya sarana dan prasarana pendidikan terutama Pendidikan yang dibawah naungan Kementrian Agama Misalnya MI, MTs, MA yang berstatus swasta
 - p. Masih banyak GTT/PTT yang perlu diperhatikan, tentunya kesejahteraan mereka
 - q. Penambahan insentif untuk guru-guru Madin/ Majelis taklim yang ada di dusun-dusun.
 - r. Pemerataan pembangunan sarana dan prasarana sekolah
 - s. Pendidikan memupuk kita menjadi individu dewasa yang mampu merencanakan masa depan dan mengambil keputusan yang tepat, untuk itu Pemerintah Kabupaten Magelang diminta untuk

memperhatikan lembaga swasta dan termasuk juga pondok pesantren karena selama ini terkesankan setengah hati serta memperhatikan nasib Guru PAUD dan TK yang sampai saat ini masih minim kaitanya pengalokasian intensif.

- t. Proses belajar mengajar akan berjalan dengan baik dan benar secara efektif jika didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai, yang akan memberikan kemudahan bagi guru maupun siswa dalam kegiatan belajar mengajar. Mengingat minimnya sarana dan prasarana TPQ ataupun TPA maka Pemerintah Kabupaten Magelang segera tanggap hal tersebut untuk merealisasikan.
- u. Mewujudkan Wajib Belajar 12 Tahun.
- v. Peningkatan sarana dan prasarana olah raga di sekolah
- w. Pemantaban dan peningkatan prestasi anak didik
- x. Program pengembangan akreditasi sekolah.
- y. Mewujudkan zonasi sekolah dengan menegakan peraturan tentang tata ruang (RT/RW) bagi peningkatan mutu anak didik.
- z. Meningkatkan mutu pendidik diantaranya melalui penuntasan sertifikasi bagi guru.
- aa. Mengembangkan pendidikan karakter berbasis budaya,
- bb. Mengembangkan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus.
- cc. Mengoptimalkan teknologi komunikasi dan informasi untuk tujuan pendidikan.
- dd. Meningkatkan manajemen pendidikan, antara lain kebijakan penerimaan siswa, partisipasi biaya sekolah dsb.
- ee. Meningkatkan pendidikan berbasis ketrampilan (*life skill*).
- ff. Peningkatan pendidikan anak usia dini (PAUD).
- gg. Program kerjasama dan kemitraan perguruan tinggi dengan pendidikan dasar dan menengah dalam pengembangan jejaring dan peningkatan kapasitas pendidik.
- hh. Mengoptimalkan dan mengembangkan pariwisata pendidikan
- ii. Mengembangkan perpustakaan dan laboratorium sebagai sarana peningkatan mutu pendidikan.
- jj. Penguatan kurikulum sekolah yang terkini, berbudaya, agamis, anti narkoba dalam rangka membentuk manusia/SDM yang berkarakter unggul
- kk. Peningkatan mutu pendidikan untuk mencapai standar nasional dan internasional melalui Program penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas dan terjangkau bagi seluruh masyarakat
- ll. Program peningkatan kualitas pendidikan teknik dan atau kejuruan dengan cara revitalisasi sarana prasarana agar sesuai dengan kemajuan dunia teknologi, dikembangkan pendidikan sistem ganda atau magang dan pengembangan inovasi teknologi dengan bermitra kepada industri maju.
- mm. Program peningkatan ruang public dan taman kota bagi aktualisasi pemuda baik sarana olahraga, seni dan kegiatan positif lainnya.

- nn. Penghargaan yang sepadan terhadap pemuda, pelajar, mahasiswa berprestasi, atlet maupun mantan atlet.
 - oo. Penyelenggaraan even-even olahraga baik prestasi maupun non prestasi dalam skala nasional maupun internasional.
 - pp. Pengembangan Program beasiswa bagi siswa kurang mampu.
 - qq. Program penguatan Pendidikan di bidang pertanian melalui fasilitasi pada sekolah-sekolah berbasis Pertanian.
3. Kesehatan, untuk meningkatkan layanan kesehatan masyarakat yang semakin baik dan terjangkau;
- a. Peningkatan pelayanan kesehatan terhadap anak, ibu hamil, difabel dan lansia untuk lebih diperhatikan.
 - b. Penerima manfaat program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) Kabupaten Magelang dimana penerima bantuan iuran (PBI) saat ini masih bermasalah untuk segera diselesaikan, sehingga tidak ada lagi JKN-KIS ditolak RS ketika berobat.
 - c. Peningkatan kesehatan warga melalui optimalisasi BPJS
 - a. Bantuan jaminan kesehatan kepada masyarakat kurang mampu
 - b. Perbaikan sistem BPJS yang mempermudah dan meringankan masyarakat
 - d. Harus ada pembagian yang jelas antara yang menjadapatkan JKN dan JKD
 - e. Banyak kasus yang ada dimasyarakat yang secara ekonomi tidak mampu akan tetapi masyarakat tersebut tidak tercover di JKN maupun JKD sehingga terkendala untuk mendapatkan pelayanan kesehatan.
 - f. Pembaruan data base peserta JKN, JKD dan Jamkesmas secara berkala dan terukur.
 - g. Program pengembangan manajemen kesehatan. yang meliputi: melakukan koordinasi dan sinkronisasi terhadap model-model jaminan pembiayaan kesehatan se-Kabupaten Magelang sehingga menuju *total coverage*
 - h. Program mengurangi risiko penyakit degeneratif dan mengurangi sebaran penyakit menular melalui gerakan masyarakat sadar tentang pola hidup bersih dan sehat
 - i. Penguatan Program pencegahan dan penanggulangan penyakit (endemik DBD serta HIV AIDS) berbasis masyarakat
 - j. Meningkatkan Usia Harapan Hidup melalui layanan posyandu lansia baik kualitas maupun kuantitasnya.
 - k. Standarisasi layanan kesehatan baik primer maupun sekunder antara lain melalui penambahan bangsal perawatan kelas III dan meningkatkan jumlah Puskesmas dengan fasilitas rawat inap.
 - l. Program Peningkatan mutu layanan kesehatan di seluruh Kabupaten Magelang melalui penyediaan dokter, spesialis, psikolog, dan tenaga medis di seluruh rumah sakit dan puskesmas di Kabupaten Magelang.
 - m. Program hibah untuk kader kesehatan Desa dan guru – guru PAUD

- n. Menjadikan Kabupaten Magelang sebagai Daerah yang ramah anak melalui “Kampung Ramah Anak”.
 - o. Mengkampanyekan sayang anak, memberikan ruang pada anak untuk berkembang dengan batasan nilai-nilai luhur bangsa tanpa harus kehilangan jati diri
 - p. Pengarusutamaan gender dalam semua aspek pembangunan
 - q. Peningkatkan pemberdayaan perempuan yang memperkuat kehidupan keluarga termasuk memperkuat ekonomi keluarga.
 - r. Revitalisasi Pelaksanaan program KB di Kabupaten Magelang berbasis masyarakat.
 - s. Penguatan SDM tenaga lapangan KB
 - t. Program kesehatan reproduksi remaja
 - u. Program peningkatan dan penguatan ketahanan keluarga
 - v. Program perbaikan gizi masyarakat
4. Penanggulangan Kemiskinan, yaitu penurunan angka kemiskinan secara signifikan melalui penanggulangan kemiskinan secara terintegrasi;
- a. Bantuan RLTH (Rumah Tidak Layak Huni) mohon diperbanyak, ditingkatkan jumlahnya dan dapat dinaikan anggarannya serta diberikan perhatian khusus terkait mekanisme penyaluran dan pengawasan penggunaan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang.
 - b. Bantuan modal dan alat, baik pertukangan, perbengkelan, pertanian, perikanan, peternakan maupun usaha lainnya ternyata sangat membantu. Untuk itu perlu diperkuat serta dipermudah aturannya agar bisa menyasar masyarakat yang lebih luas.
 - c. Fasilitasi terhadap difabel dan warga miskin agar secara ekonomi lebih baik dan layak, perlu dilakukan pendampingan secara berkala melalui kegiatan-kegiatan pelatihan kewirausahaan.
 - d. Regulasi SPBU bagi pedagang kecil BBM eceran yang diwajibkan juga untuk membeli BBM jenis Pertamina menjadi keluhan, mengingat modal yang dimiliki oleh pedagang kecil sedikit dan pembeli BBM jenis Pertamina eceran rendah
 - e. Mentoring kewirausahaan kepada masyarakat miskin
 - f. Pemberian modal usaha kepada masyarakat miskin
 - g. Pembinaan wirausaha secara intensif kepada masyarakat miskin
 - h. Pemerintah daerah untuk memenuhi kebutuhan perumahan bagi keluarga miskin, yakni dengan memperluas akses layanan perumahan dan permukiman yang sehat dan layak huni bagi masyarakat miskin. Disamping itu upaya lainnya yang juga dilakukan adalah dengan memberikan bantuan sarana dan prasarana dasar permukiman bagi masyarakat miskin dan berpenghasilan rendah
 - i. Peningkatan kapasitas Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial melalui Pelatihan sumber daya yang mendukung profesionalitas Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial.
 - j. Evaluasi program pengentasan kemiskinan melalui program bantuan warga miskin produktif,

- k. Melakukan riset pelaksanaan program pengurangan angka kemiskinan agar ditemukan cara yang paling efektif dan efisien dalam pengurangan angka kemiskinan berbasis masyarakat,
 - l. Program Mobilisasi Potensi sumber dalam pemutakhiran data penduduk miskin dan pemetaan penyandang masalah sosial (PMKS)
 - m. Menurunkan angka penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS)
 - n. Menggiatkan dan menumbuhkan kembali nilai-nilai budaya bangsa (gotong royong, kesetiakawanan sosial) sebagai perekat sosial melalui berbagai media budaya.
 - o. Implementasi Perda yang ada kaitannya dengan Gepeng dan Disabilitas.
 - p. Peningkatan kapasitas Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial melalui Pelatihan sumber daya yang mendukung profesionalitas Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial.
5. Pengembangan Sektor Unggulan Secara Terpadu, melalui pemanfaatan sector pertanian, pariwisata dan UKM untuk mendongkrak kesejahteraan rakyat;
- a. Bimbingan dan penyuluhan terhadap home industri untuk pengelolaan, distribusi dan pemasaran untuk menunjang perekonomian masyarakat desa, khususnya di daerah wisata.
 - b. Adat dan budaya masyarakat Kabupaten Magelang mohon diberdayakan, karena bagian dari kearifan lokal. Termasuk salah satunya dengan meningkatkan potensi yang ada di desa sebagai wahana atau wisata alam bagi masyarakat.
 - c. Pentingnya dibangun sistem ekonomi yang diterapkan oleh Pemerintah Daerah untuk peningkatan ekonomi keluarga (UMKM) melalui dana Hibah/Bansos, BKD PNPM maupun P2KP maupun dana lain yang sesuai aturan. Termasuk mengintegrasikan dengan pengembangan sektor pertanian dan pariwisata
 - d. Peningkatan produksi buah dan sayuran
 - a. Pelatihan *Good Handling Process* (GHP) untuk optimalisasi pemanenan tanaman buah dan sayuran
 - e. Peningkatan produksi jumlah hewan kecil (kambing)
 - 1) Bantuan bibit kepada kelompok peternak
 - 2) Pembinaan peternakan secara berkala untuk meningkatkan kapasitas produksi
 - f. Peningkatan perekonomian masyarakat desa
 - g. Pembinaan UMKM yang memproduksi komoditas unggulan di masing-masing desa
 - h. Pelatihan batik cap kepada pengrajin batik
 - i. Bantuan alat kepada pengrajin batik cap
 - j. Bantuan alat kepada kelompok jahit
 - k. Pemanfaatan teknologi informasi untuk pengembangan dunia bisnis
 - l. Optimalisasi internet sebagai media jual beli daring
 - m. Peningkatan produktivitas pertanian

- n. Pembangunan saluran irigasi pertanian
- o. Pembangunan jalan usaha tani
- p. Konsep pariwisata secara umum dengan memanfaatkan candi Borobudur sebagai magnet utama.
- q. Banyak destinasi wisata yang muncul didesa – desa akan tetapi eksistensi wisata tersebut tidak bisa bertahan lama, kisaran paling lama hanya sekitar 2 tahun,
- r. Perlunya integrasi pariwisata yang ada, mulai dari destinasi, kuliner, budaya, penginapan bahkan transportasi
- s. Pembangunan dibidang pertanian harus bisa memberikan suplai irigasi yang cukup untuk produksi pertanian
- t. Sinergi untuk antara dinas pertanian dan kehutanan sehingga bisa menyelamatkan sumber mata air
- u. Dalam mendukung produksi pertanian bantuan sarana pertanian yang dilakukan melalui kegiatan dinas diharapkan betul-betul tepat sasaran terutama untuk irigasi, sarana pertanian.
- v. Pengolahan tanah lahan pangan merupakan salah satu kegiatan dalam persiapan lahan yang sangat berpengaruh terhadap kelangsungan hidup tanaman yang dibudidayakan, sehingga hasil produksi tanaman dapat ditingkatkan melalui perbaikan struktur tanah sebagai media tanamnya. Peralatan pengolahan tanah sangat penting untuk mempersiapkan lahan sesuai dengan kebutuhan hidup tanaman. Dalam pengolahan lahan pangan ini diharapkan peran aktif dari dinas dalam upaya pembinaan dan pemberian bantuan. Bantuan yang diberikan dari dinas diharapkan dapat merata tidak hanya pada daerah tertentu
- w. Jalan pertanian merupakan prasarana transportasi pada kawasan pertanian untuk memperlancar mobilitas alat dan mesin pertanian, pengangkutan sarana produksi menuju lahan pertanian dan mengangkut hasil produk pertanian dari lahan menuju tempat penyimpanan, tempat pengolahan, atau pasar. Mengingat sarana tersebut masih minim untuk meningkatkan sekaligus memberdayakan para petani mohon segera di tambahkan alokasinya. Dengan adanya JUT diharapkan mobilitas Alsintan, pupuk maupun hasil produksi pertanian semakin mudah dan petani akan semakin termotivasi untuk meningkatkan kapasitas produksi pangan di wilayah mereka.
- x. Untuk meminimalisir pengangguran serta pemberdayaan perempuan ataupun kepemudaan guna memperlancar ekonomi maka perlu penambahan pendidikan keterampilan dan kewirausahaan.
- y. Pemerintah Kabupaten harus lebih intensif memperhatikan Kelompok Wanita Tani terutama untuk sering dibudayakan dan di akses bantuan untuk membantu dalam memanfaatkan lahan pekarangan agar produktif
- z. Para petani menginginkan lancarnya distribusi pupuk dan bahkan perlu ada akses bantuan khusus untuk pupuk karena selama ini sangat kesulitan mendapat pupuk.

- aa. Pemerintah Kabupaten Magelang harus selalu menjamin terhadap peredaran Gas Elpiji agar selalu terpenuhi dan jangan sampai terjadi kelangkaan.
 - bb. Program penguatan branding pariwisata Kabupaten Magelang untuk peningkatan jumlah wisatawan
 - cc. Program penguatan dan pengembangan kapasitas sumber daya desa wisata/kampung wisata yang terukur dan terstruktur sebagai ciri khas Kabupaten Magelang yang memiliki *value* dan merupakan diferensiasi Pariwisata berbasis budaya
 - dd. Program penguatan daya dukung pariwisata untuk membuat terobosan-terobosan sehingga waktu tinggal di Kabupaten Magelang bagi para wisatawan akan lebih lama,
 - ee. Program optimalisasi potensi – potensi wisata yang ada, sehingga jumlah wisatawan baik wisatawan nusantara (Wisnus) maupun wisatawan mancanegara (Wisman) bisa meningkat dengan signifikan, khususnya bagi wisman yang mengalami *trend* pasang surut dalam tingkat kunjungan ke Kabupaten Magelang,
 - ff. Program pembukaan, penciptaan atau pengembangan infrastruktur pariwisata dan penguatan insan pariwisata serta stake holder terkait pariwisata
 - gg. Program peningkatan kecintaan wisata berbasis budaya dan wisata edukatif dengan menggerakkan para siswa dari sekolah-sekolah di Kabupaten Magelang maupun promosi kepada siswa diluar Kabupaten Magelang
 - hh. Program Pengembangan wisata edukasi dan *agro tourism* sebagai asset dan potensi Kabupaten Magelang yang potensial,
 - ii. Program peningkatan promosi melalui media di dalam dan luar negeri
 - jj. Program Menjadikan trotoar jalan utama sebagai etalase seni budaya yang memberi *value* pariwisata
6. Peningkatan Sarana dan Prasarana Publik, yaitu peningkatan kualitas dan kuantitas sarana-prasarana public;
- a. Pembangunan infrastruktur jalan, sarana pertanian, sarana pendidikan dan infrastruktur – infrastruktur lain di Kabupaten Magelang mohon ditingkatkan.
 - b. Khusus untuk infrastruktur jalan yang dilalui truck muatan Galian C dan masih menjadi kewenangan Pemerintah Daerah, untuk diatur regulasi serta kesepakatan-kesepakatan dengan para pengusaha penambangan bagaimana supaya pemeliharaan jalan dikerjakan dengan biaya bersama, akan tetapi tidak menyalahi aturan.
 - c. Pengadaan penerangan jalan umum, untuk diperluas hingga ke pelosok desa termasuk wilayah perbatasan. Dan khusus penerangan jalan umum yang instalasinya oleh warga masyarakat mengambil langsung dari tiang PLN untuk difasilitasi pemasangan meterannya, termasuk beban biaya penggunaannya.

- d. Perlunya dibangun pompa-pompa air tenaga surya, termasuk penampungnya dan juga pembangunan jaringan air bersih di wilayah - wilayah yang sering terdampak kekeringan. Selain untuk kebutuhan warga masyarakat, juga bisa sebagai sarana pengairan pertanian di musim kemarau.
- e. Pembangunan dan perbaikan jalan
 - 1) Pembangunan jalan
 - 2) Perbaikan dan perawatan jalan
 - 3) Peningkatan kualitas jalan
- f. Peningkatan kualitas sanitasi
 - 1) Pembangunan jamban umum di sepanjang jalan utama kabupaten
- g. Peningkatan kualitas pengairan sawah
- h. Peningkatan pemanfaatan air permukaan
- i. Pembangunan saluran air minum
- j. Dengan adanya perkembangan pembangunan jalan raya yang terjadi di Kabupaten Magelang maka akan berdampak pada peningkatan kepadatan jalan raya. Suatu perlengkapan jalan raya sebagai penunjang keamanan penerangan di jalan raya adalah lampu penerangan jalan umum (LPJU). Kondisi penerangan jalan umum ini sebagian belum sesuai standard dan belum menggunakan alat pencatat pembatas listrik. Lampu-lampu yang dipakai masih banyak yang menggunakan lampu dengan daya watt tinggi tetapi lumen rendah, dan juga semakin banyak lampu penerangan jalan liar yang dipasang sendiri oleh masyarakat, sehingga meminta peningkatan LPJU sampai ke daerah terpencil. Dalam menentukan kebutuhan penerangan jalan perlu diperhatikan
- k. Dalam kegiatan penyediaan rumah layak huni kebutuhan basis data RTLH dalam skala micro menjadi kebutuhan yang nyata sangat perlu diprioritaskan dan diperbanyak serta dipercepat karena masih banyak rumah warga miskin yang belum tersentuh.
- l. Demi keselamatan umum, Pemda berupaya memaksimalkan faktor penunjang jalan raya seperti halnya keberadaan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) dan penerangan jalan menuju dusun-dusun.
- m. Ketersediaan tempat pembuangan sampah (TPS) di kawasan pedesaan masih sangat minim. Maka dari itu masyarakat mengajukan di beberapa dusun untuk pengadaan bak sampah / tempat pembuangan sampah (TPS).
- n. Salah satu jenis sumber daya berbasis air yang bermutu baik dan biasa dimanfaatkan oleh manusia untuk dikonsumsi atau dalam melakukan aktifitas mereka sehari-hari. Terkait sumber daya berbasis air yang bermutu baik masyarakat sangat mengharapkan Pemda untuk merealisasikan pengadaan air bersih.
- o. Untuk program BKK yang dikucurkan di desa hendaknya tidak hanya untuk kegiatan infrastruktur

7. Lingkungan Hidup, yaitu peningkatan kualitas lingkungan hidup dengan konservasi untuk kesejahteraan masyarakat;
 - a. Di musim penghujan ini, TPA Sampah di Pasuruhan perlu dipantau terkait dengan potensi munculnya virus dan bakteri yang mengganggu warga masyarakat, sehingga pencegahan dan penanggulangannya bisa lebih dini.
 - b. Perlu pembaharuan database pengelolaan sampah mandiri dan pengelolaan sampah berbasis masyarakat, karena setelah dicermati kegiatan tersebut ada hanya pada saat adanya program saja, tidak berkelanjutan.
 - c. Kerusakan lingkungan khususnya di wilayah lereng Merapi, apalagi di wilayah konservasi untuk mendapatkan perhatian lebih besar mengingat potensi kehilangan mata air sangat nyata, apabila tidak diimbangi dengan penataan lingkungan hidup yang baik.
 - d. Pentingnya dibangun embung dan atau bendung di wilayah lereng Merapi, selain untuk menjaga ekosistem lingkungan hidup juga bisa menjadi sarana peningkatan kesejahteraan masyarakat.
 - e. Optimalisasi lahan Perhutani untuk kemakmuran rakyat
 - f. Peminjaman lahan Perhutani kepada masyarakat untuk kesejahteraan desa
 - g. Pengelolaan sampah
 - h. Pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sampah di lingkungan desa
 - i. Pelatihan daur ulang sampah plastik
 - j. Pelatihan pembuatan kompos dengan bahan dasar sampah organik
 - k. Pengelolaan limbah
 - l. Pembangunan stasiun pengelolaan limbah cair di desa-desa yang memiliki sentra usaha tahu
 - m. Penebaran bibit ikan di sungai/kali sebagai bentuk pelestarian ekosistem sungai

8. Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan, yaitu pemberian layanan public yang semakin transparan, partisipatif, inovatif dan akuntabel;
 - a. Sinergitas dalam perencanaan dan penganggaran antar lembaga, antar instansi di Pemerintah Daerah masih sangat rendah. Salah satunya dapat dirasakan dalam pelaksanaan E-Pokir TA 2018 dan TA 2019, antara Bappeda dengan Admin Bangda, Tata Pemerintahan dan SKPD lainnya tidak terjadi sinergi yang baik sehingga E-Pokir kesannya hanya program yang dipaksakan karena tidak terintegrasi antar lembaga, antar instansi.
 - b. Adanya kesan investasi khususnya yang ada dibidang galian C terkesan tidak transparan dan justru merusak lingkungan hidup. Termasuk berdirinya pabrik pakan ternak yang ada di Sidoagung Tempuran, berpotensi adanya pencemaran lingkungan.
 - c. Pelayanan publik di RSUD Muntilan masih rendah, perlu adanya peningkatan khususnya bagi warga miskin.

- d. Program dan kegiatan SKPD selama ini terkesan monoton, belum sejalan dengan visi misi pembangunan daerah, sehingga diharapkan kedepan bisa lebih inovatif dan menjangkau seluruh wilayah yang ada di Kabupaten Magelang.
 - e. Perbaiki sistem berkenaan dengan kependudukan dan catatan sipil yang memudahkan masyarakat
 - f. Perbaiki sistem pembuatan e-KTP yang memudahkan masyarakat
 - g. Masyarakat sangat mengharapkan peningkatan pelayanan terutama di Catatan Sipil
 - h. Di beberapa desa mengeluhkan adanya biaya Pologoro yang dikenakan oleh desa pada saat sertifikasi tanah, sedangkan di daerah lain ada yang tidak dikenakan. Untuk itu agar pemerintah melalui instansi terkait melakukan sosialisasi sampai ditingkat RT sesuai PP No. 24 Tahun 2007 tentang Pendaftaran Tanah, supaya masyarakat dan perangkat desa paham akan peraturan tersebut, sehingga tidak menimbulkan keresahan di masyarakat dengan adanya pembayaran yang berbeda di masing-masing desa.
 - i. Perlunya pengawasan dan pembinaan yang lebih baik terhadap kinerja perangkat desa utamanya dalam transparansi pelaksanaan anggaran desa
9. Ketentraman Ketertiban dan Penanggulangan Bencana, yaitu peningkatan ketenteraman, ketertiban dan kesiapsiagaan menghadapi bencana;
- a. Perlunya program pelatihan kebencanaan di tingkat sekolah menengah.
 - b. Perlunya ditertibkan panti pijat, penginapan dan tempat hiburan yang berpotensi meresahkan masyarakat
 - c. Penanggulangan kekeringan
 - 1) Penanggulangan kekeringan di daerah yang rawan terdampak kekurangan air pada musim kemarau
 - 2) Reboisasi daerah resapan air
 - 3) Penanaman bibit pohon aren sebagai upaya konservasi air di daerah rawan kekeringan
 - d. Peningkatan pemahaman masyarakat tentang keselamatan berlalu lintas
 - 1) Sosialisasi keselamatan berlalu lintas kepada pelajar SMP
 - 2) Sosialisasi keselamatan berlalu lintas kepada pelajar SMA
 - 3) Sosialisasi keselamatan berlalu lintas kepada masyarakat umum
 - e. Pembentukan tim siaga bencana
 - 1) Pembentukan tim siaga bencana masing-masing desa dengan melibatkan karang taruna desa
 - 2) Bantuan alat kepada tim siaga bencana desa
 - f. Pembangunan jalur evakuasi bencana
 - g. Penindaktegasan kepada pelaku *illegal fishing*
 - h. Perlu di tingkatkan lagi Kesiapsiagaan penanganan masalah keamanan, ketertiban, dan penanggulangan bencana untuk lebih mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, terkait tugas pokok dan fungsi Satpol PP dan Linmas, seperti penegakan peraturan daerah dan tugas

keamanan. Mereka akan memberikan layanan kepada masyarakat, termasuk perlindungan terhadap gangguan ketertiban umum yang dapat terjadi, bahkan penanganan terhadap bencana

10. Kepemudaan dan Olahraga, yaitu peningkatan kesempatan yang seluas-luasnya kepada generasi muda untuk berprestasi.
 - a. Pemerintah Kabupaten Magelang diharapkan untuk melakukan pembinaan terhadap pelaku usaha kecil serta melakukan pelatihan bagi kelompok usaha bagi pemuda.
 - b. Pembinaan bagi atlet muda dan pemberian penghargaan bagi yang berprestasi masih kurang mendapatkan perhatian Pemerintah Daerah.
 - c. Pemanfaatan stadion yang masih belum maksimal, justru mengindikasikan rendahnya perhatian Pemerintah Daerah terhadap olahraga.
 - d. Pemberdayaan pemuda desa melalui berbagai kegiatan produktif
 - 1) Pembinaan pemuda dalam rangka optimalisasi potensi desa
 - 2) Pendidikan sejarah bagi remaja milenial

BAB V

KEBIJAKAN PENGEMBANGAN WILAYAH KABUPATEN MAGELANG

5.1 Kebijakan Umum Pengembangan Wilayah

Perencanaan pengembangan wilayah pada prinsipnya bertujuan mengintegrasikan rencana tata ruang wilayah dengan rencana pembangunan daerah. Dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Magelang yang tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Magelang Tahun 2010-2030, tujuan penataan ruang Kabupaten Magelang adalah mewujudkan ruang wilayah kabupaten sebagai sentra agrobisnis berbasis pada pertanian, pariwisata dan industri yang mengutamakan pemanfaatan potensi lokal melalui sinergitas pembangunan perdesaan-perkotaan, yang memperhatikan pelestarian fungsi wilayah sebagai daerah resapan air, sedangkan visi Pembangunan Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024 yaitu terwujudnya masyarakat Kabupaten Magelang yang Sejahtera, Berdaya Saing dan Amanah (Sedaya Amanah).

5.1.1 Kebijakan dan Strategi Penetapan Pola Ruang Wilayah

Kebijakan dan strategi penetapan pola ruang wilayah kabupaten antara lain sebagai berikut.

- a. Kebijakan dan strategi pengembangan kawasan lindung
 - 1) Kebijakan dan strategi pengembangan kawasan hutan lindung;
 - 2) Kebijakan dan strategi pengembangan kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
 - 3) Kebijakan dan strategi pengembangan kawasan perlindungan setempat;
 - 4) Kebijakan dan strategi pengembangan kawasan pelestarian alam dan kawasan cagar budaya;
 - 5) Kebijakan dan strategi pengembangan kawasan rawan bencana alam;
 - 6) Kebijakan dan strategi pengembangan kawasan lindung geologi;
 - 7) Kebijakan pengembangan kawasan lindung lainnya, berupa pemeliharaan dan pelestarian kawasan perlindungan plasma nutfah.
- b. Kebijakan dan strategi pengembangan kawasan budidaya
 - 1) Kebijakan dan strategi pengembangan kawasan peruntukan hutan produksi;
 - 2) Kebijakan dan strategi pengembangan kawasan hutan rakyat;
 - 3) Kebijakan dan strategi pengembangan kawasan peruntukan pertanian;
 - 4) Kebijakan dan strategi pengembangan kawasan peruntukan perkebunan;
 - 5) Kebijakan dan strategi pengembangan kawasan peruntukan perikanan;
 - 6) Kebijakan dan strategi pengembangan kawasan peruntukan peternakan;
 - 7) Kebijakan dan strategi pengembangan kawasan peruntukan pertambangan;

- 8) Kebijakan dan strategi pengembangan kawasan peruntukan industri;
- 9) Kebijakan dan strategi pengembangan kawasan peruntukan pariwisata;
- 10) Kebijakan dan strategi pengembangan kawasan peruntukan permukiman;
- 11) Kebijakan dan strategi pengembangan kawasan peruntukan lainnya
Kebijakan pengembangan kawasan peruntukan lainnya meliputi kebijakan pengembangan kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan serta pengembangan kawasan peruntukan ruang terbuka hijau.

5.1.2 Kebijakan dan Strategi Penetapan Struktur Ruang Wilayah

Kebijakan dan strategi penetapan struktur ruang wilayah mendasarkan pada implementasi struktur ruang wilayah kabupaten yang telah ditetapkan antara lain:

- a. Kebijakan dan strategi pengembangan kawasan perdesaan.
- b. Kebijakan dan strategi pengembangan kawasan perkotaan.
- c. Kebijakan dan strategi sistem jaringan prasarana wilayah

Terkait dengan kebijakan dan strategi pengembangan wilayah yang bukan merupakan kewenangan kabupaten misalnya proyek strategis nasional, maka pemerintah kabupaten akan memberikan dukungan dalam percepatan proyek strategis nasional. Salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten adalah penyelarasan regulasi di tingkat daerah, fasilitasi pembebasan lahan, fasilitasi pelaksanaan sosialisasi, dan advokasi pemberdayaan masyarakat.

5.1.3 Kebijakan dan Strategi Penetapan Kawasan Strategis Wilayah Kabupaten

Kebijakan dan strategi penetapan kawasan strategis kabupaten meliputi:

- a. Kebijakan dan strategi penetapan kawasan strategis pertumbuhan ekonomi
Kebijakan penetapan kawasan strategis pertumbuhan ekonomi, berupa:
 - 1) pengembangan dan peningkatan fungsi kawasan cepat tumbuh pada koridor jalan arteri nasional secara ketat dan terbatas, dengan strategi meliputi:
 - a) mengatur dan merencanakan zona-zona pertumbuhan kawasan; dan
 - b) menyediakan sarana dan prasarana pendukung kegiatan ekonomi.
 - 2) pengembangan kawasan agropolitan untuk mengurangi kesenjangan tingkat perkembangan antar kawasan, dengan strategi meliputi:
 - a) mengembangkan kegiatan budidaya unggulan beserta infrastruktur secara sinergis untuk mendorong perekonomian kawasan dan wilayah sekitarnya; dan
 - b) mengembangkan pusat pertumbuhan berbasis potensi sumber daya alam.

- b. Kebijakan dan strategi penetapan kawasan strategis sosial dan budaya
Kebijakan penetapan kawasan strategis sosial dan budaya berupa pengelolaan kawasan strategis sosial budaya Borobudur mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2014 Tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Borobudur dan Sekitarnya, dengan strategi meliputi:
- 1) meningkatkan nilai kawasan yang ditetapkan sebagai warisan dunia;
 - 2) menyediakan sarana dan prasarana pendukung kegiatan;
 - 3) melakukan optimasi pengembangan kawasan melalui peningkatan nilai sosial budaya kawasan;
 - 4) membatasi perkembangan lahan terbangun di sekitar kawasan; dan
 - 5) mengembangkan kawasan Borobudur dengan tetap memperhatikan aspek sosial budaya masyarakat setempat.
- c. Kebijakan dan strategi penetapan kawasan strategis fungsi dan daya dukung lingkungan hidup
Kebijakan penetapan kawasan strategis fungsi dan daya dukung lingkungan hidup dilaksanakan mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2014 Tentang Rencana Tata Ruang Taman Nasional Gunung Merapi. Beberapa strateginya meliputi:
- 1) memelihara habitat dan ekosistem asli dengan karakteristik budaya lokal;
 - 2) mendukung kelestarian kawasan taman nasional dan kawasan penyangga melalui perlindungan, pengawetan dan pemanfaatan sumber daya hayati secara lestari;
 - 3) memanfaatkan kawasan taman nasional untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, pariwisata dan rekreasi;
 - 4) melestarikan fungsi resapan air di kawasan hulu DAS Mikro;
 - 5) menjaga fungsi resapan air di kawasan terbangun;
 - 6) membatasi perkembangan lahan terbangun; dan
 - 7) mengembangkan dan memanfaatkan imbal jasa lingkungan.

5.2 Perwujudan Struktur Ruang dan Pola Ruang

5.2.1 Perwujudan Struktur Ruang

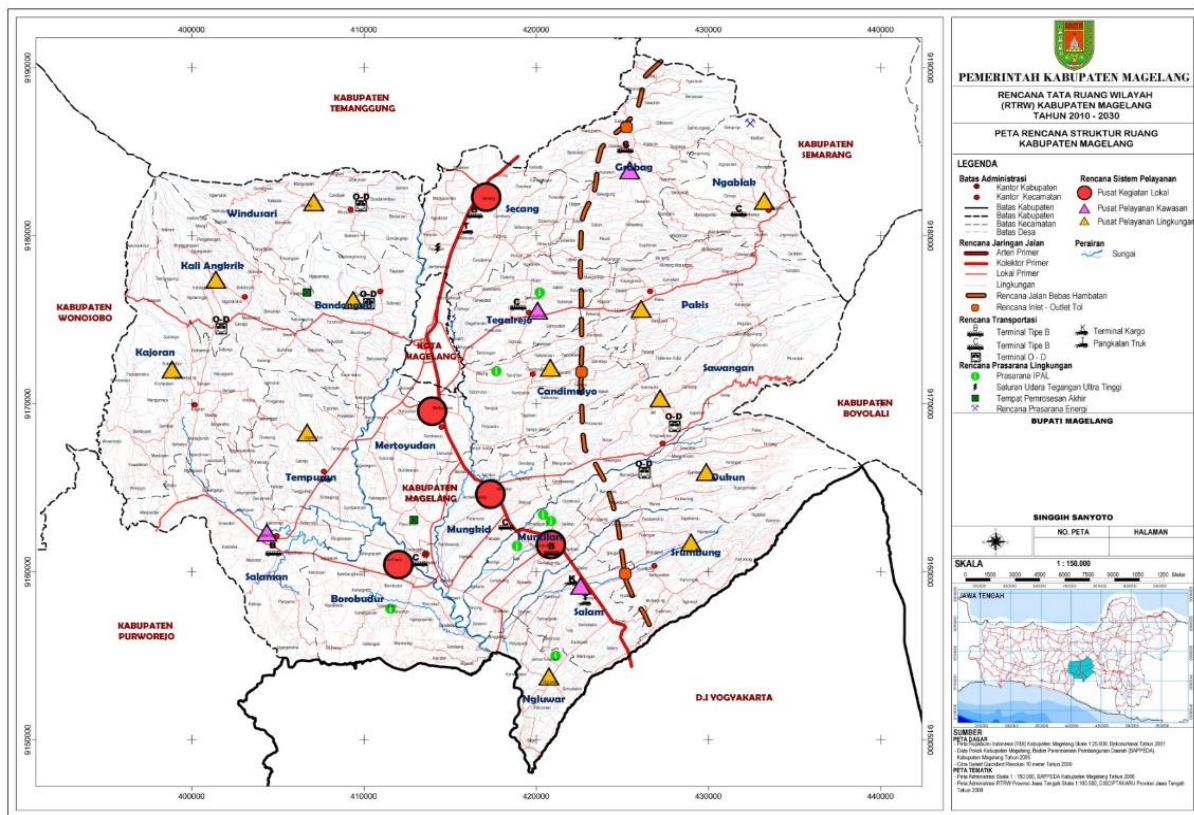
Rencana struktur ruang dimaksudkan untuk dapat mewujudkan pola keterkaitan antar kegiatan dan pusat-pusat kegiatan yang akan dikembangkan. Struktur ruang wilayah diwujudkan berdasarkan arahan pengembangan sistem pusat pelayanan dan jaringan prasarana wilayah. Sistem pusat pelayanan dibagi menjadi dua yaitu sistem perkotaan dan sistem perdesaan.

a. Sistem Perkotaan

- 1) Pengembangan PKL;
Pengembangan PKL meliputi:
 - a. Kawasan Perkotaan Mungkid;
 - b. Kawasan Perkotaan Muntilan;
 - c. Kawasan Perkotaan Mertoyudan;

- d. Kawasan Perkotaan Borobudur yang mengacu pada Kawasan Strategis Nasional (KSN) Borobudur; dan
 - e. Kawasan Perkotaan Secang.
- 2) Pengembangan PPK ;
Pengembangan PPK meliputi:
- a. Ibu Kota Kecamatan Salaman;
 - b. Ibu Kota Kecamatan Grabag;
 - c. Ibu Kota Kecamatan Salam;
 - d. Ibu Kota Kecamatan Sawangan;
 - e. Ibu Kota Kecamatan Bandongan; dan
 - f. Ibu Kota Kecamatan Tegalrejo.
- 3) Pengembangan PPL.
Pengembangan PPL meliputi:
- a. Ibu Kota Kecamatan Ngablak;
 - b. Ibu Kota Kecamatan Pakis;
 - c. Ibu Kota Kecamatan Windusari;
 - d. Ibu Kota Kecamatan Kaliangkrik;
 - e. Ibu Kota Kecamatan Kajoran;
 - f. Ibu Kota Kecamatan Tempuran;
 - g. Ibu Kota Kecamatan Candimulyo;
 - h. Ibu Kota Kecamatan Dukun;
 - i. Ibu Kota Kecamatan Srumbung; dan
 - j. Ibu Kota Kecamatan Ngluwar.
- b. Sistem Perdesaan
Sistem perdesaan meliputi kawasan terpilih pusat pengembangan desa yang terdiri dari Desa Pusat Pertumbuhan dan Desa Pendukung (*hinterland*).
Pengembangan desa pusat pertumbuhan dilakukan dengan menumbuhkan banyak pusat kegiatan dengan prioritas pengembangan sektor pertanian, pariwisata dan industri kecil menengah sebagai desa pusat pertumbuhan. Desa pusat pertumbuhan meliputi :
- 1) Desa Salamkanci, Kecamatan Bandongan;
 - 2) Desa Candirejo, Kecamatan Borobudur;
 - 3) Desa Giyanti, Kecamatan Candimulyo;
 - 4) Desa Sewukan, Kecamatan Dukun;
 - 5) Desa Losari dan Cokro, Kecamatan Grabag ;
 - 6) Desa Sambak, Kecamatan Kajoran;
 - 7) Desa Beseran, Kecamatan Kaliangkrik;
 - 8) Desa Bondowoso dan Kalinegoro, Kecamatan Mertoyudan;
 - 9) Desa Paremono, Kecamatan Mungkid;
 - 10) Desa Gunungpring, Kecamatan Muntilan;
 - 11) Desa Tejosari, Kecamatan Ngablak;
 - 12) Desa Bligo, Kecamatan Ngluwar;
 - 13) Desa Kaponan, Kecamatan Pakis ;
 - 14) Desa Gulon, Kecamatan Salam;

- 15) Desa Kalisalak dan Krasak, Kecamatan Salaman;
- 16) Desa Ketep, Kecamatan Sawangan;
- 17) Desa Pucang, Kecamatan Secang;
- 18) Desa Kamongan, Kecamatan Srumbung;
- 19) Desa Banyuurip, Kecamatan Tegalrejo;
- 20) Desa Bawang, Kecamatan Tempuran; dan
- 21) Desa Banjarsari, Kecamatan Windusari.



Sumber : RTRW Kabupaten Magelang Tahun 2010-2030

Gambar 5.1.

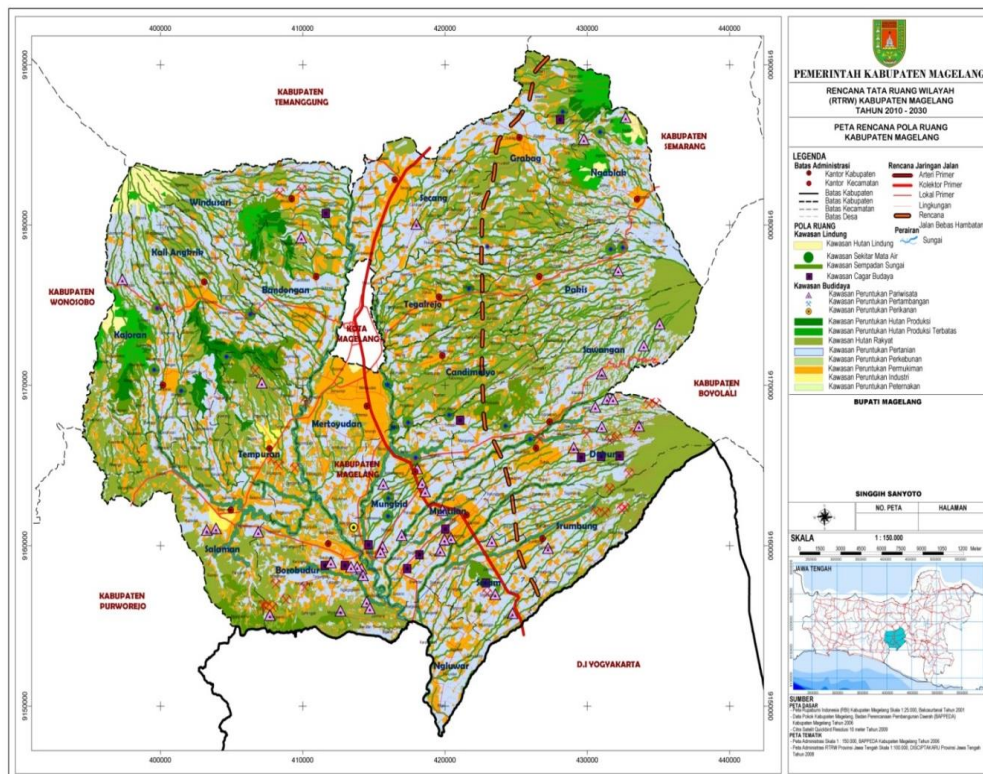
Peta Struktur Ruang Wilayah Kabupaten Magelang

5.2.2 Perwujudan Pola Ruang

Rencana pola ruang Kabupaten Magelang dibagi menjadi 2 yaitu kawasan lindung dan kawasan budidaya. Kawasan lindung berfungsi utama untuk melindungi kelestarian sumber daya alam, sumber daya buatan seperti tanah, air, iklim, tumbuhan, keanekaragaman hayati, satwa, tipe ekosistem dan keunikan alam serta nilai budaya dan sejarah bangsa. Di dalam kawasan ini tidak diperkenankan adanya kegiatan budidaya yang dapat mengurangi atau merusak fungsi lindungnya, kecuali digunakan untuk meningkatkan fungsi lindungnya. Kawasan lindung yang terdapat di Kabupaten Magelang dapat dibedakan menjadi 6 sebagai berikut.

- a. Kawasan hutan lindung meliputi Kecamatan Grabag, Kecamatan Kajoran, Kecamatan Kaliangkrik, Kecamatan Ngablak, Kecamatan Windusari.
- b. Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya, berupa kawasan resapan air berada di sebagian Kecamatan Bandongan, Kajoran, Sawangan, Kaliangkrik, Windusari, Grabag, Ngablak, Pakis, Dukun dan Srumbung.

- c. Kawasan perlindungan setempat meliputi Kawasan Sekitar Mata Air dan Kawasan Sempadan Sungai. Kawasan Sekitar Mata Air tersebar di Kecamatan Salaman, Sawangan, Mungkid, Muntilan, Bandongan, Secang, Tempuran, Kajoran, Grabag, Borobudur, Kaliangkrik, Dukun, Candimulyo, Windusari, Mertoyudan dan Ngablak. Kawasan sempadan sungai di Kabupaten Magelang meliputi sempadan sungai besar, sempadan sungai sedang, sempadan sungai kecil dan sempadan sungai di kawasan perkotaan.
- d. Kawasan pelestarian alam dan cagar budaya meliputi Kawasan Taman Nasional dan Kawasan Cagar Budaya. Kawasan Taman Nasional meliputi Taman Nasional Gunung Merapi dan Taman Nasional Gunung Merbabu. Sedangkan kawasan cagar budaya merupakan kawasan yang ditetapkan untuk melindungi kekayaan budaya bangsa berupa peninggalan-peninggalan sejarah, bangunan arkeologi dan monumen nasional, dan keragaman bentuk geologi, yang berguna untuk pengembangan ilmu pengetahuan dari ancaman kepunahan yang disebabkan oleh kegiatan alam maupun manusia.
- e. Kawasan rawan bencana alam meliputi Kawasan Rawan Letusan Gunung Merapi, Kawasan Rawan Gempa Bumi, dan Kawasan Rawan Gerakan Tanah.
- f. Kawasan lindung geologi berupa kawasan imbuhan air, ditetapkan untuk melindungi kawasan cekungan air tanah. Kawasan imbuhan air terletak di cekungan Magelang-Temanggung.
- g. Kawasan lindung lainnya berupa Kawasan Perlindungan Plasma Nutfah, terintegrasi dalam kawasan Taman Nasional Gunung Merapi dan Taman Nasional Gunung Merbabu.



Sumber : RTRW Kabupaten Magelang Tahun 2010-2030

Gambar 5.2.

Peta Pola Ruang Wilayah Kabupaten Magelang

Kawasan budidaya merupakan kawasan yang memiliki kondisi fisik dan potensi sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan bagi kepentingan produksi dalam rangka memenuhi kebutuhan manusia. Kawasan budidaya terdiri dari:

a. Kawasan peruntukan hutan produksi

Hutan produksi terbatas memiliki luas kurang lebih 2.038 (dua ribu tiga puluh delapan) hektar, meliputi Kecamatan Bandongan, Kecamatan Grabag, Kecamatan Kaliangkrik, Kecamatan Kajoran, Kecamatan Ngablak, dan Kecamatan Windusari. Hutan produksi tetap memiliki luas kurang lebih 1.765 (seribu tujuh ratus enam puluh lima) hektar, meliputi Kecamatan Bandongan, Kecamatan Grabag, Kecamatan Kajoran, Kecamatan Kaliangkrik, Kecamatan Ngablak, Kecamatan Salaman, Kecamatan Tempuran, dan Kecamatan Windusari.

b. Kawasan hutan rakyat

Kawasan hutan rakyat memiliki luas kurang lebih 2.919 (dua ribu sembilan ratus sembilan belas) hektar, meliputi Kecamatan Bandongan, Kecamatan Borobudur, Kecamatan Kajoran, Kecamatan Kaliangkrik, Kecamatan Ngablak, Kecamatan Salam, Kecamatan Sawangan, Kecamatan Secang, Kecamatan Tempuran, dan Kecamatan Windusari, seluas kurang lebih 146 (seratus empat puluh enam) hektar.

c. Kawasan peruntukan pertanian

Kawasan pertanian lahan basah memiliki luas kurang lebih 36.848 (tiga puluh enam ribu delapan ratus empat puluh delapan) hektar, terdapat di Kecamatan Bandongan, Kecamatan Borobudur, Kecamatan Candimulyo, Kecamatan Dukun, Kecamatan Grabag, Kecamatan Kajoran, Kecamatan Kaliangkrik, Kecamatan Mertoyudan, Kecamatan Mungkid, Kecamatan Muntilan, Kecamatan Ngablak, Kecamatan Ngluwar, Kecamatan Pakis, Kecamatan Salam, Kecamatan Salaman, Kecamatan Sawangan, Kecamatan Secang, Kecamatan Srumbung, Kecamatan Tegalrejo, Kecamatan Tempuran, dan Kecamatan Windusari. Kawasan pertanian lahan kering memiliki luas kurang lebih 42.568 (empat puluh dua ribu lima ratus enam puluh delapan) hektar, terdapat di Kecamatan Bandongan, Kecamatan Borobudur, Kecamatan Candimulyo, Kecamatan Dukun, Kecamatan Grabag, Kecamatan Kajoran, Kecamatan Kaliangkrik, Kecamatan Mertoyudan, Kecamatan Mungkid, Kecamatan Muntilan, Kecamatan Ngablak, Kecamatan Ngluwar, Kecamatan Pakis, Kecamatan Salam, Kecamatan Salaman, Kecamatan Sawangan, Kecamatan Secang, Kecamatan Srumbung, Kecamatan Tegalrejo, Kecamatan Tempuran, dan Kecamatan Windusari. Lahan pertanian basah dan lahan pertanian kering dikelola untuk mendukung suatu program perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan yang direncanakan seluas kurang lebih 42.070 (empat puluh dua ribu tujuh puluh) hektar.

d. Kawasan peruntukan perkebunan

Perkebunan kopi memiliki luas kurang lebih 1.278 (seribu dua ratus tujuh puluh delapan) hektar terletak di Kecamatan Grabag, Kajoran, Dukun, Borobudur dan Salaman.

- e. Kawasan peruntukan perikanan
Kawasan peruntukan perikanan diarahkan pada perikanan air tawar berupa kawasan minapolitan. Kawasan peruntukan perikanan memiliki luas kurang lebih 2.611 (dua ribu enam ratus sebelas) hektar, meliputi:
- 1) Daerah pembenihan, berada di Kecamatan Muntilan, Kecamatan Sawangan, Kecamatan Dukun, Kecamatan Grabag, Kecamatan Mungkid;
 - 2) Daerah pembesaran perikanan, berada di Kecamatan Salam, Kecamatan Ngluwar, Kecamatan Mertoyudan, Kecamatan Kajoran, Kecamatan Bandongan, Kecamatan Secang, Kecamatan Srumbung, Kecamatan Candimulyo, dan Kecamatan Tegalrejo.
- f. Kawasan peruntukan peternakan
- 1) Ternak besar meliputi ternak sapi di Kecamatan Sawangan, Candimulyo, Dukun, Kajoran, Windusari, Pakis, Ngablak, Grabag, Tegalrejo dan Kaliangkrik; dan ternak kerbau di Kecamatan Bandongan, Windusari, Secang, Srumbung, Dukun dan Salam.
 - 2) Ternak sedang berupa ternak kambing dan domba di semua kecamatan.
 - 3) Ternak unggas berupa ternak ayam di Kecamatan Srumbung, Dukun, Salam, Secang, Salaman, Tempuran, Bandongan, Candimulyo, Grabag, Mertoyudan dan Ngluwar.
- g. Kawasan peruntukan pertambangan
- 1) Kawasan peruntukan pertambangan mineral logam dan batuan
 - a) Kawasan peruntukan pertambangan batuan meliputi pasir batu di Kecamatan Windusari, Bandongan, Borobudur, Srumbung, Dukun, Pakis, Salam, Candimulyo, Muntilan, Ngluwar, Tempuran, Mungkid, Sawangan dan Secang, tanah liat di Kecamatan Borobudur, Tempuran, Salam, Secang, Grabag dan Salaman, dan batu gamping di Kecamatan Borobudur dan Salaman.
 - b) Kawasan peruntukan pertambangan batuan meliputi marmer di Kecamatan Borobudur dan Salaman, trass di Kecamatan Borobudur dan Tempuran, kaolin di Kecamatan Borobudur, oker di Kecamatan Borobudur dan Bandongan, andesit di Kecamatan Borobudur, Tempuran dan Windusari.
 - c) Kawasan peruntukan pertambangan mineral logam meliputi mangaan di Kecamatan Borobudur dan Salaman.
 - 2) Kawasan pertambangan panas bumi terletak di Kecamatan Grabag dan Ngablak.
- h. Kawasan peruntukan pariwisata
- 1) Kawasan peruntukan pariwisata budaya meliputi Candi Borobudur, Candi Pawon, Candi Mendut, Candi Ngawen, Candi Gunung Wukir/Canggal, Candi Asu, Candi Pendem, Candi Lumbung, Candi Selogriyo, Makam Gunung Pring, Makam Kyai Raden Santri dan Mbah Jogoreso, Makam Pasteur Van Lith, Makam Kyai Condrobumi, Makam Sunan Geseng, Langgar Agung Pangeran Diponegoro, Pesarean

- Pangeran Singosari, Makam Kyai Mijil, Makam Kyai Raden Syahid dan Candi Umbul.
- 2) Kawasan peruntukan pariwisata alam meliputi Air Terjun Sekarlangit, Air Terjun Seloprojo, Ketep Pass, Air Terjun Kedungkayang, Agro Wanawisata Sambak, Agro Wisata Salak Lumut, Pendakian Gunung Merapi, Pendakian Gunung Merbabu, Curug Silawe dan Telaga Bleder.
 - 3) Kawasan peruntukan pariwisata buatan meliputi Taman Rekreasi Mendut, Ketep Pass, Induk Selokan Mataram (Wisata Bendungan Ancol), Taman Rekreasi Kalibening dan Deyangan.
- i. Kawasan peruntukan industri
- 1) Kawasan peruntukan industri mikro, kecil, menengah tersebar di masing-masing kecamatan.
 - 2) Kawasan peruntukan industri yang menggunakan bahan baku dan/atau proses produksinya memerlukan lokasi khusus tersebar di masing-masing kecamatan.
 - 3) Kawasan peruntukan industri besar ditetapkan di Kecamatan Tempuran dan Salaman.
- j. Kawasan peruntukan permukiman
- 1) Kawasan peruntukan permukiman perkotaan, meliputi:
 - a) Perkotaan-perkotaan yang masuk dalam Pusat Kegiatan Lokal (PKL);
 - b) Perkotaan Borobudur di Kecamatan Borobudur yang kaidah pengaturannya mengikuti Kawasan Strategis Nasional (KSN) dan Kawasan Strategis Kabupaten (KSK);
 - c) Ibu kota-ibu kota kecamatan, meliputi ibu kota kecamatan di Kecamatan Windusari, Bandongan, Kaliangkrik, Kajoran, Tempuran, Salaman, Srumbung, Dukun, Sawangan dan Candimulyo.
 - 2) Kawasan peruntukan permukiman perdesaan tersebar di luar ibu kota kecamatan.
- k. Kawasan peruntukan lainnya
- Kawasan ini meliputi kawasan pertahanan dan keamanan dan kawasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) perkotaan. Pengelolaan kawasan pertahanan dan keamanan hanya diperuntukkan untuk kegiatan pertahanan dan keamanan yang dilakukan secara selektif di dalam dan di sekitar kawasan untuk menjaga fungsi pertahanan dan keamanan. Kawasan pertahanan dan keamanan berupa kawasan militer yang tersebar di Kecamatan Bandongan, Windusari, Borobudur, Salaman, Candimulyo dan Tempuran. Kawasan ruang terbuka hijau perkotaan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas kawasan perkotaan yang terdiri dari Ruang Terbuka Hijau publik 20% (dua puluh persen) dan Ruang Terbuka Hijau privat 10% (sepuluh persen).

5.3 Arah Pengembangan Wilayah

Pengembangan wilayah Kabupaten Magelang ditujukan untuk mewujudkan ruang wilayah Kabupaten Magelang sebagai sentra agrobisnis berbasis pada pertanian, pariwisata, dan industri yang mengutamakan pemanfaatan potensi lokal melalui sinergitas pembangunan perdesaan-perkotaan, yang memperhatikan pelestarian fungsi wilayah sebagai daerah resapan air.

Berdasarkan potensi pertanian dan pariwisata, terdapat pusat-pusat pertumbuhan sebagai berikut.

- a. Pusat pertumbuhan Kota Mungkid, yang didukung oleh wilayah Kecamatan Borobudur, Mungkid, Mertoyudan, Salaman dan Tempuran diprioritaskan sebagai:
 - 1) pusat pengembangan wisata budaya; dan
 - 2) pusat pengembangan desa wisata dengan mengarahkan pada upaya pembibitan tanaman dan upaya konservasi lingkungan.
- b. Pusat pertumbuhan Kaliangkrik, yang didukung oleh wilayah Kecamatan Kaliangkrik, Windusari, Kajoran dan Bandongan diprioritaskan sebagai:
 - 1) pusat penghasil tanaman padi dan hortikultura;
 - 2) pusat pengembangan wisata alam; dan
 - 3) pusat pemasaran olahan pertanian daerah ke arah Kabupaten Temanggung dan Wonosobo.
- c. Pusat pertumbuhan Tegalrejo, yang didukung oleh wilayah Kecamatan Tegalrejo Secang, Candimulyo, Grabag, Pakis dan Ngablak diprioritaskan sebagai:
 - 1) pusat penghasil dan pemasaran tanaman sayuran dan bunga;
 - 2) pusat pengembangan peternakan sapi potong dan ayam potong; dan
 - 3) pusat penelitian bidang pertanian (Politeknik Pembangunan Pertanian di Kecamatan Tegalrejo).
- d. Pusat pertumbuhan Dukun, yang didukung oleh wilayah Kecamatan Dukun, Sawangan, dan Srumbung diprioritaskan sebagai:
 - 1) pusat perdagangan hasil pertanian kawasan agropolitan Merapi-Merbabu (Pasar Sewukan); dan
 - 2) pusat penghasil salak Nglumut.
- e. Pusat pertumbuhan Salam, yang didukung oleh wilayah Kecamatan Salam Muntilan, dan Ngluwar diprioritaskan sebagai:
 - 1) pusat pemasaran hasil pertanian skala regional (antar kabupaten), nasional (antar provinsi); dan
 - 2) pusat *rest area* daerah wisata.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Magelang Tahun 2010-2030, strategi pengembangan kawasan perkotaan, meliputi:

- a. meningkatkan keterkaitan antara kawasan perkotaan satu dan lainnya dan kawasan perdesaan satu dengan lainnya berbasis sistem perwilayahan;

- b. meningkatkan kualitas pelayanan dan prasarana untuk mendukung akses layanan antar kawasan perkotaan dan antara kawasan perkotaan dengan perdesaan;
- c. meningkatkan keterhubungan kawasan perkotaan dengan wilayah yang berbatasan agar tercipta hubungan sosial, ekonomi, fisik yang lebih baik di tingkat regional dan nasional;
- d. menciptakan peluang ekonomi sesuai dengan potensi dan akses kawasan perkotaan; dan
- e. mengarahkan pengembangan wilayah di Kabupaten melalui pemantapan fungsi PKL dan PPK.

Pengembangan Kabupaten Magelang berdasarkan sistem perwilayahan meliputi:

- a. Wilayah Pengembangan Sapujoran (Salaman-Tempuran-Kajoran) dengan fungsi utama yaitu:
 - 1) Kecamatan Salaman sebagai pusat perdagangan, ekonomi, kesehatan, pendidikan, pertanian dan pendukung pengembangan pariwisata;
 - 2) Kecamatan Tempuran sebagai pusat pengembangan industri, perdagangan dan ekonomi; dan
 - 3) Kecamatan Kajoran sebagai pusat pengembangan pertanian, peternakan, perikanan dan pariwisata.
- b. Wilayah Pengembangan Mertomundur (Mertoyudan-Mungkid-Borobudur) dengan fungsi utama yaitu:
 - 1) Kecamatan Mertoyudan sebagai pusat pengembangan perdagangan dan jasa, pendidikan, pertanian dan aktivitas penunjang pariwisata;
 - 2) Kecamatan Mungkid sebagai pusat pemerintahan kabupaten, pengembangan perdagangan, pertanian dan aktivitas penunjang pariwisata;
 - 3) Kecamatan Borobudur sebagai pusat pengembangan pariwisata, pertanian dan aktivitas penunjang pariwisata.
- c. Wilayah Pengembangan Tilawar (Muntilan-Salam-Ngluwar) dengan fungsi utama yaitu:
 - 1) Kecamatan Muntilan sebagai pusat perdagangan, dan aktivitas pendukung pariwisata;
 - 2) Kecamatan Salam sebagai aktivitas pendukung pariwisata, dan pertanian; dan
 - 3) Kecamatan Ngluwar sebagai pengembangan pertanian.
- d. Wilayah Pengembangan Sawangrukun (Sawangan-Srumbung-Dukun) dengan fungsi utama yaitu:
 - 1) Kecamatan Sawangan sebagai pusat pengembangan pariwisata, pengembangan pertanian dan peternakan, aktivitas pendukung pariwisata dan konservasi alam;
 - 2) Kecamatan Srumbung sebagai pengembangan pertanian dan peternakan dan konservasi alam; dan
 - 3) Kecamatan Dukun sebagai pusat perdagangan, pengembangan pertanian dan peternakan dan konservasi alam.

- e. Wilayah Pengembangan Grapala (Grabag-Pakis-Ngablak) dengan fungsi utama yaitu:
 - 1) Kecamatan Grabag sebagai pusat pengembangan perdagangan, pertanian dan peternakan, pengembangan pendidikan dan aktivitas pendukung pariwisata;
 - 2) Kecamatan Pakis sebagai pengembangan pertanian, peternakan dan konservasi alam; dan
 - 3) Kecamatan Ngablak sebagai pengembangan pertanian, peternakan dan konservasi alam.
- f. Wilayah Pengembangan Segamulyo (Secang-Tegalrejo-Candimulyo) dengan fungsi utama yaitu:
 - 1) Kecamatan Secang sebagai pengembangan pertanian, perdagangan dan kerajinan;
 - 2) Kecamatan Tegalrejo sebagai pengembangan pendidikan, pertanian dan peternakan; dan
 - 3) Kecamatan Candimulyo sebagai pengembangan pertanian dan peternakan.
- g. Wilayah Pengembangan Bakalsari (Bandongan-Kaliangrik-Windusari) meliputi Kecamatan Bandongan, Kaliangrik, dan Windusari mempunyai fungsi utama sebagai berikut:
 - 1) Kecamatan Bandongan sebagai pengembangan pertanian, pendidikan, perdagangan dan aktivitas pendukung pariwisata;
 - 2) Kecamatan Kaliangrik sebagai pengembangan pertanian, pariwisata dan konservasi alam; dan
 - 3) Kecamatan Windusari pengembangan pertanian, pariwisata dan konservasi alam.

Upaya untuk mengoptimalkan pengembangan wilayah di setiap sistem perwilayahan maka pembangunan kewilayahan berpedoman pada rencana tata ruang wilayah dan potensi wilayah antara lain meliputi:

- a. Pengembangan kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi berupa:
 - 1) pengembangan dan peningkatan fungsi kawasan cepat tumbuh pada koridor jalan arteri nasional meliputi Kecamatan Secang, Mertoyudan, Muntilan, dan Salam; dan
 - 2) pengembangan kawasan agropolitan meliputi Agropolitan Borobudur, Agropolitan Merapi-Merbabu dan Agropolitan Sumbing.
- b. Pengembangan kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial budaya berupa pengelolaan kawasan strategis sosial budaya Borobudur meliputi Kecamatan Borobudur dan Mungkid.
- c. Pengembangan kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup berupa:
 - 1) pemantapan fungsi Taman Nasional Gunung Merapi meliputi Kecamatan Srumbung, Dukun, dan Sawangan;
 - 2) pemantapan fungsi Taman Nasional Gunung Merbabu;
 - 3) pemantapan fungsi DAS Mikro; dan
 - 4) pengembangan kawasan strategis pariwisata.

- d. Pengembangan kawasan perbatasan berupa:
- 1) pembangunan dan rehabilitasi jalan beserta bangunan pelengkapannya di kawasan perbatasan;
 - 2) pembangunan *landmark* guna mempertegas batas wilayah dan memberikan ciri khas wilayah;
 - 3) perapatan batas wilayah; dan
 - 4) pengembangan potensi perekonomian di kawasan perbatasan.

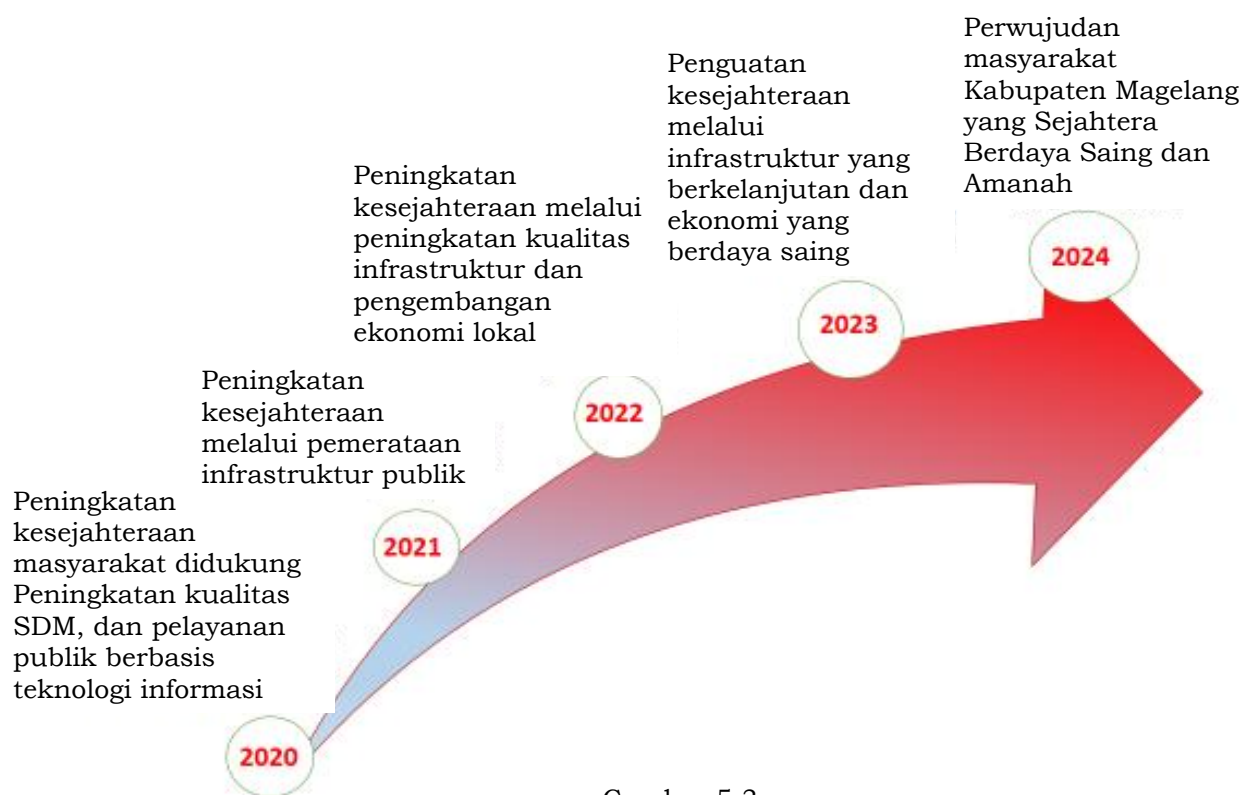
RPJMD Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024 diarahkan untuk merencanakan pembangunan dengan mengikuti rencana tata ruang wilayah, yaitu menjabarkan dari setiap perwujudan kawasan strategis kabupaten. Hal ini tercantum dalam matrik indikasi program utama RTRW Kabupaten Magelang Tahun 2010-2030, meliputi:

- a. Perwujudan kawasan cepat tumbuh pada koridor jalan arteri nasional
 - 1) kawasan perkotaan Secang dan sekitarnya;
 - 2) kawasan perkotaan Mertoyudan dan sekitarnya;
 - 3) kawasan perkotaan Mungkid dan sekitarnya; dan
 - 4) kawasan perkotaan Muntilan dan sekitarnya.
- b. Perwujudan Kawasan Agropolitan Borobudur, Agropolitan Merapi-Merbabu, dan Agropolitan Sumbing.
- c. Pengaturan dan pengendalian kawasan strategis berbasis DAS Mikro dengan penyusunan rencana Manajemen DAS Mikro (MDM);
- d. Pengaturan dan pengendalian kawasan Borobudur dan sekitarnya; dan
- e. Perwujudan kawasan strategis lingkungan hidup melalui rehabilitasi lahan dan hutan di sekitar Taman Nasional Gunung Merapi dan Taman Nasional Gunung Merbabu.

Dengan arah kebijakan pengembangan wilayah Kabupaten Magelang ini, maka program yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024 telah memperhatikan dan sesuai dengan arah pengembangan wilayah yang tertuang dalam RTRW Kabupaten Magelang, RTRW Provinsi Jawa Tengah dan RTRWN.

5.3.1 Arah Pengembangan Wilayah Kabupaten Magelang Tahun 2021

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran pembangunan sejalan dengan visi dan misi pembangunan Kabupaten Magelang lima tahun ke depan, ditetapkan arah kebijakan yang akan menjadi arah kebijakan perencanaan pembangunan tahunan dalam lima tahun. Arah kebijakan ini diharapkan menjadi acuan dan pedoman penentuan fokus dan prioritas pembangunan setiap tahunnya selama lima tahun kedepan.



Gambar 5.3.
Fokus Pembangunan Tahunan Kabupaten Magelang
dalam RPJMD Tahun 2020-2024

Untuk tahun 2021, fokus pembangunan diarahkan pada Peningkatan kesejahteraan melalui pemerataan infrastruktur publik, dengan arah kebijakan sebagai berikut:

- Meningkatkan keterjangkauan dan pemerataan pendidikan
- Meningkatkan pelayanan kesehatan
- Meningkatkan ketersediaan Prasarana Sarana Utilitas (PSU) perumahan dan permukiman
- Meningkatkan kuantitas atraksi pariwisata
- Meningkatkan sarana dan prasarana pertanian
- Meningkatkan infrastruktur jaringan jalan
- Meningkatkan layanan air minum dan sanitasi
- Meningkatkan infrastruktur sumber daya air
- Meningkatkan pengamanan dan keselamatan lalu lintas

Tabel 5.1.
Rencana Pengembangan Wilayah Kabupaten Magelang Tahun 2021

Program Utama Dalam Indikasi Program RTRW	Program/Kegiatan Perangkat Daerah	Indikator Kinerja	Keterangan	Anggaran	Lokasi
Pengembangan Prasarana Terminal Penumpang dan Angkutan Barang	Program pengembangan jaringan prasarana angkutan jalan				
	Peningkatan Pengelolaan Terminal Angkutan Darat	Jumlah terminal yang dikelola	6 unit	342.000.000,-	Kecamatan Borobudur, Salaman, Bandongan, Tegalrejo, Secang, Grabag
Pengembangan sistem Jaringan Telekomunikasi	Program Pengembangan Sarana Prasarana Teknologi Informasi dan Komunikasi				
1. Pengembangan Sistem Jaringan Kabel 2. Pengembangan Sistem Jaringan Nirkabel 3. Pengembangan Sistem Jaringan Satelit	Layanan pengelolaan akses internet, intranet dan interkoneksi jaringan intra pemerintah daerah dan perbaikan peralatan operasional sarana TIK	OPD, unit kerja OPD dan desa/kelurahan terfasilitasi jaringan komunikasi data yang optimal dan stabil	257 SKPD dan desa	2.851.111.000,-	Kabupaten Magelang
		Jumlah bandwidth internet yang disalurkan	700 Mbps		
Pengembangan sistem Jaringan Prasarana Lainnya	Program Peningkatan Kinerja Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau				
Pengembangan Sarana Olahraga dan taman rekreasi	Peningkatan kinerja pengelolaan ruang terbuka hijau publik	Jumlah kendaraan yang dikelola	10 Unit	2.525.931.700,-	Kabupaten Magelang

Program Utama Dalam Indikasi Program RTRW	Program/Kegiatan Perangkat Daerah	Indikator Kinerja	Keterangan	Anggaran	Lokasi
		Jumlah alat yang dikelola	65 unit		
		Jumlah kendaraan yang dibeli	1 unit		
		Jumlah alat yang dibeli	6 Unit		
		Jumlah Pengelola RTH publik yang dikelola	70 Orang		
		Jumlah bahan (pupuk dan obat) pengelolaan RTH	1 Paket		
		Jumlah Bangunan Konstruksi Pengelolaan RTH	1 Paket		
		Jumlah Bahan Konstruksi Pengelolaan RTH Yang Dibeli	1 Paket		
		Jumlah mechanical electrical yang dibeli	35 Unit		
		Jumlah Bibit Tanaman yang dibeli	2 Paket		
		Penyusunan DED	1 paket		
		Pembebasan lahan	1 paket		
		Pembangunan RTH	2 paket		
Perwujudan kawasan lindung Rehabilitasi lahan kritis dan terlantar serta pengembalian fungsi kawasan lindung	Program Konservasi Sumber Daya Alam dan Mitigasi Dampak Perubahan Iklim			259.176.030,-	Kabupaten Magelang
	Konservasi Lahan Kritis dan Rawan Bencana	Penghijauan untuk konservasi rawan bencana	50 Ha		
		Penyusunan Dokumen Status Kerusakan	1 paket		

Program Utama Dalam Indikasi Program RTRW	Program/Kegiatan Perangkat Daerah	Indikator Kinerja	Keterangan	Anggaran	Lokasi
		Jumlah peserta sosialisasi	600 orang		
		Jumlah Peserta Bimtek	200 orang		
		Jumlah peserta yang mengikuti Gerakan Penanaman	400 orang		
Pengembangan sistem Jaringan Prasarana Lainnya	Program Pengembangan dan Peningkatan Kualitas Perumahan				
Pengembangan Sarana Perumahan	Pengembangan Perumahan Umum, Khusus dan Swadaya	Tercapainya fasilitasi, pengembangan perumahan umum oleh pengembang	2 lokasi	720.000.000,-	Kabupaten Magelang
		Tercapainya fasilitasi penyediaan rumah MBR melalui perumahan subsidi	50 unit		
		Tercapainya fasilitasi pembangunan/rehabilitasi rumah swadaya	3.000 unit		
		Tercapainya fasilitasi rumah layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah	100 persen		
Pengembangan Jaringan Jalan	Program Peningkatan akses dan kualitas jalan				
Pembangunan Prasarana Jalan	Rehabilitasi /Pemeliharaan Jalan dan Pelengkap Jalan	Panjang jalan kabupaten kondisi baik	764,79 km	10.000.000.000,-	Kabupaten Magelang
		Jumlah Jembatan kabupaten kondiis baik	357 jembatan		
		Panjang drainase kabupaten kondiis baik	277,63 km		
		Panjang trotoar kabupaten	58,62 km		

Program Utama Dalam Indikasi Program RTRW	Program/Kegiatan Perangkat Daerah	Indikator Kinerja	Keterangan	Anggaran	Lokasi
		kondisi baik			
		Panjang dinding penahan (talud) jalan kondisi baik	75,66%		
Pengembangan sistem jaringan sumber daya air	Program Peningkatan dan Pengembangan Bangunan Gedung dan AMPL				
Pengembangan Jaringan Air Bersih	Pembangunan Sarana Sanitasi (DAK REGULER)	Jumlah Desa terbangun sarpras pengolahan limbah	6 Desa	3.142.435.000,-	Desa Sukorejo, Desa Payaman, Desa Sutopati, Desa Ngendrosari, Desa Ngargosari, Desa Wuwuharjo
	Peningkatan dan Pengembangan Layanan Air Minum	Jumlah BP SPAM terbina	40 BP SPAM	1.150.000.000,-	Desa Sidorejo, Desa Trasan, Desa Sewukan, Desa Mangunrejo, Desa Mangunrejo, Desa Sriwedari, Desa Gejakan, Desa Kebonrejo, Desa Banjarharjo, Desa Sudimoro, Desa Kaliurang, Desa Jerukagung, Desa Banyuadem, Desa Ngablak, Desa Polengan, Desa Krogowan, Desa Gondowangi, Desa Sawangan, Desa Kalegen, Desa Krumpakan, Desa Jambe, Desa Sonorejo,
		Jumlah Desa terbangun Sarana Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS)	21 Desa		

Program Utama Dalam Indikasi Program RTRW	Program/Kegiatan Perangkat Daerah	Indikator Kinerja	Keterangan	Anggaran	Lokasi
					Desa Ngasinan, Desa Jati, Desa Salam, Desa Giriwetan, Desa Pucungsari, Desa Lebak, Desa Sugihmas, Desa Purwosari, Desa Giyanti
Pengembangan jaringan irigasi	Operasi jaringan irigasi	Jumlah Pintu Airnya yang terpelihara	5 Pintu Air	75.000.000,-	Kabupaten Magelang
		Jumlah D.I. yang dibangun bangunan ukur	6 D.I.		
		Jumlah Dokumen Pedoman Pola Tanam	1 Dokumen (21 kecamatan)		
		Jumlah data debit daerah irigasi	60 D.I		
	Pemeliharaan jaringan irigasi	Panjang saluran irigasi kondisi baik	598,18 meter	750.000.000,-	Kabupaten Magelang
		Jumlah bangunan irigasi kondisi baik	662 unit		
		Luas areal sawah DI yang teraliri air irigasi	25.612,951 Ha		
Pembuatan zona-zona bencana alam	Program Penanggulangan Bencana				
Mitigasi Bencana	Mitigasi Bencana	Jml peserta apel	350 peserta	200.000.000,-	Kabupaten Magelang
		Jumlah Rakor PRB	3 kali		
		Jumlah Pemantauan daerah rawan bencana	10 kali		
		Jumlah LEWS	5 Unit		

Program Utama Dalam Indikasi Program RTRW	Program/Kegiatan Perangkat Daerah	Indikator Kinerja	Keterangan	Anggaran	Lokasi
		Jumlah Kegiatan lomba	2 Kali		
		Jumlah studi komparasi kasi trantib dan kesra	1 kali		
Gladi Penanganan Bencana kepada masyarakat	Program Penanggulangan Kebakaran				
	Peningkatan Kesiapsiagaan Penanggulangan Kebakaran	Jumlah WMK yang terbangun	2 WMK	4.636.895.000,-	Kabupaten Magelang
		Jumlah pemadam kebakarn yang mendapatkan diklat/bimtek	40 orang		
		Jumlah THL pemadam kebakaran yang tersedia	287 orang		
		Jumlah seragam dan atribut pemadam kebakaran yang disediakan	50 stel		
		Frekuensi pembinaan fisik personil damkar	48 kali		
		Jumlah pkt pendataan ancaman kebakaran	1 paket		
		Jumlah personil damkar yang mengikuti bimtek kualifikasi aparatur pemadam kebakaran	40 orang		
Studi Cagar budaya	Program Perlindungan dan Pengembangan Kebudayaan				

Program Utama Dalam Indikasi Program RTRW	Program/Kegiatan Perangkat Daerah	Indikator Kinerja	Keterangan	Anggaran	Lokasi
	Perlindungan Benda Cagar Budaya	jumlah BCB yang dipelihara	949 BCB	192.300.000,-	Kabupaten Magelang
		Jumlah Juru pelihara yang mendapat pembinaan	90 orang		
Pengembangan Sarana Kesehatan	Program Peningkatan Kualitas Puskesmas dan Rumah Sakit				
	Pembangunan Puskesmas	Jumlah pembangunan gedung puskesmas	2 gedung	9.195.436,000,-	Kecamatan Sawangan dan Salaman
	Program Kesehatan Masyarakat	Cakupan Kesehatan ibu, anak, lansia gizi	64 persen	1.500.000.000	
		Cakupan kesehatan lingkungan	78 persen		
		Cakupan pemberdayaan masyarakat	62 persen		
		Pelayanan kesehatan ibu hamil	100 persen		
		Pelayanan kesehatan ibu bersalin	100 persen		
		Pelayanan kesehatan balita	100 persen		
		Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	100 persen		
Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	100 persen				
Pengembangan Sarana Olahraga dan taman rekreasi	Program Pembinaan dan Peningkatan Sarana Prasarana Olahraga				
	Peningkatan Sarana Prasarana Olahraga	Jumlah Pengadaan Alat Olahraga	180 buah	1.350.000.000,-	Sport center Mungkid

Program Utama Dalam Indikasi Program RTRW	Program/Kegiatan Perangkat Daerah	Indikator Kinerja	Keterangan	Anggaran	Lokasi
		Jumlah Atlet berprestasi	595 orang		
		Jumlah DED yang tersusun	2 Dokumen DED GOR dan Lapangan dan penataan lingkungan		
		Jumlah Stadion yang dipelihara	1 buah		
		Jumlah dokumen lingkungan dan ANDALALIN yang tersusun	2		
	Program Peningkatan Sarana Prasarana dan Industri Pariwisata				
	Penataan dan Pengelolaan Daya Tarik Wisata	Jumlah Daya Tarik Wisata Yang Dikembangkan	3 buah	3.677.826.000,-	Kabupaten Magelang DTW TR Mendut, DTW Candi Umbul, DTW Telaga Bleder, DTW, Candi Mendut, Candi Pawon, DTW TR Kalibening
		Jumlah DTW yang di kelola	6 DTW		
		Jumlah dokumen FS/ DED/ UKL/UPL tersusun	2 dokumen		
		Jumlah Desa Wisata yang terbangun	5 Desa		
	Peningkatan Kapasitas SDM Pelaku Usaha Pariwisata	Jumlah SDM Pokdarwis yang terfasilitasi	38 orang	120.000.000,-	Kabupaten Magelang

Program Utama Dalam Indikasi Program RTRW	Program/Kegiatan Perangkat Daerah	Indikator Kinerja	Keterangan	Anggaran	Lokasi
		Jumlah Usaha pariwisata yang terbina	5 kelompok		
	Penataan dan Pengelolaan Daya Tarik Wisata Ketep Pass	Jumlah DTW yang ditata dan dikelola	1 DTW	2.000.000.000,-	Kabupaten Magelang
		jumlah DTW yang dikembangkan	1 DTW		
Pengembangan sistem pengolahan hasil perikanan	Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan dan sistem penyuluhan				
Pengembangan sistem pemasaran hasil perikanan	Peningkatan jaringan pemasaran/promosi perikanan	Jumlah promosi/jaringan pemasaran produksi perikanan	2 event/keg	94.000.000,-	Kabupaten Magelang
		Sarpras pemasaran hasil perikanan	2 kelompok		
		Fasilitasi edukasi perikanan	10.000 orang		

Sumber: Hasil Olahan, 2020

5.4 Kesesuaian RTRW dalam Percepatan Pembangunan Ekonomi di Kabupaten Magelang

Dalam rangka mendukung percepatan pembangunan ekonomi di Jawa Tengah, telah diterbitkan Peraturan Presiden RI Nomor 79 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal - Semarang - Salatiga - Demak Grobogan, Kawasan Purworejo – Wonosobo – Magelang - Temanggung, Dan Kawasan Brebes – Tegal – Pemalang. Percepatan pembangunan ekonomi ini dilakukan guna meningkatkan daya saing kawasan yang berdampak pada pertumbuhan investasi dan peningkatan perekonomian nasional yang terintegrasi dalam Rencana Induk Pembangunan Kawasan.

Dalam Rencana Induk Pembangunan Kawasan, terdapat 15 usulan program/kegiatan yang berlokasi di Kabupaten Magelang. Program/kegiatan tersebut dipastikan akan berdampak pada pengembangan wilayah di Kabupaten Magelang sehingga diperlukan dukungan pemerintah Kabupaten untuk memastikan integrasi program/kegiatan ke dalam pola ruang dan struktur ruang dalam RTRW Kabupaten Magelang yang saat ini masuk pada tahap revisi RTRW.

Tabel 5.2.

Kesesuaian RTRW dalam Percepatan Pembangunan Ekonomi di Kabupaten Magelang

NO.	PROGRAM/ KEGIATAN	ESTIMASI BIAYA (MILYAR)	SUMBER DANA	KESESUAIAN DENGAN RTRW
1	Pembangunan Bendungan Pasuruhan, Kab. Magelang	1.500	APBN	Rencana pembangunnn sudah sesuai dengan RTRW Pasal 15 berupa kebijakan dan strategi pengembangan sistem jaringan sumber daya air
2	Pembangunan Jalan Tol Ruas Tol Bawen-Yogya, Kab. Magelang	30.000	KPBU	Pembangunan jalan tol ruas Bawen – Yogyakarta sudah sesuai dalam RTRW Pasal 51 dan indikasi program RTRW, namun detail trasenya akan diakomodir dalam revisi RTRW
3	Pembangunan Jalan Magelang -Kaliangkrik B.ts. Kab. Wonosobo, Kab. Magelang	45	APBN	Pembangunan ruas jalan ini sudah sesuai dengan lampiran indikasi program RTRW, berupa pengembangan jalan strategis Magelang - Wonosobo
4	Pembangunan ruas Jalan Manglong Kalikodil, Kab. Magelang	52	APBN	Pembangunan ruas jalan ini sudah sesuai dengan lampiran II RTRW berupa rencana pengembangan jaringan jalan kabupaten
5	Pembangunan Gedung Pusat Pemadam Kebakaran Kawasan Borobudur, Kab. Magelang	65	APBN	Rencana penataan ini sudah sesuai dengan lampiran indikasi program RTRW yaitu perwujudan kawasan peruntukan pariwisata berupa peningkatan fasilitas penunjang obyek daya tarik wisata untuk

NO.	PROGRAM/ KEGIATAN	ESTIMASI BIAYA (MILYAR)	SUMBER DANA	KESESUAIAN DENGAN RTRW
				meningkatkan daya tarik wisata
6	Peningkatan infrastruktur di Kawasan Borobudur, Kab. Magelang	100	APBN	Rencana peningkatan infrastruktur sudah sesuai dengan indikasi program dalam RTRW berupa perwujudan kawasan strategis sosial budaya di Borobudur, secara detail akan dimasukkan dalam revisi RTRW
7	Penyediaan TPST Penyangga Kawasan Borobudur, Kab. Magelang	100	APBN	Rencana penyediaan TPST sudah sesuai dengan RTRW berupa pembangunan pengolahan sampah di Kabupaten Magelang, secara detail kegiatan ini akan dimasukkan dalam revisi RTRW
8	Pembangunan TPA/TPST Regional, Kab. Magelang	200	APBN	Rencana pembangunan TPA/TPST Regional sudah sesuai dengan RTRW dan lampiran RTRW berupa pembuatan rencana pengolahan sampah regional
9	Penataan akses poros Mendut-Pawon Borobudur, Kab. Magelang	57	APBN	Rencana penataan ini sudah sesuai dengan lampiran indikasi program RTRW yaitu perwujudan kawasan peruntukan pariwisata berupa peningkatan fasilitas penunjang obyek daya tarik wisata untuk meningkatkan daya tarik wisata
10	Pembangunan gerbang dan koridor Palbapang Borobudur, Blondo Borobudur, Gerbang/ Rest Area Koridor Kembanglimus Borobudur, Kab. Magelang	50	APBN	Rencana pembangunan ini sudah sesuai dengan lampiran indikasi program RTRW yaitu perwujudan kawasan peruntukan pariwisata berupa peningkatan fasilitas penunjang obyek daya tarik wisata untuk meningkatkan daya tarik wisata
11	Penataan kawasan ruang terbuka publik Candi Borobudur, Kab. Magelang	68	APBN	Rencana penataan ini sudah sesuai dengan lampiran indikasi program RTRW yaitu perwujudan kawasan peruntukan pariwisata berupa peningkatan fasilitas penunjang obyek daya tarik wisata untuk meningkatkan daya tarik wisata
12	Pembangunan Anjungan Cerdas Candi Borobudur, Kab. Magelang	1.100	KPBU	Rencana pembangunan ini sudah sesuai dengan lampiran indikasi program RTRW yaitu perwujudan kawasan peruntukan pariwisata berupa

NO.	PROGRAM/ KEGIATAN	ESTIMASI BIAYA (MILYAR)	SUMBER DANA	KESESUAIAN DENGAN RTRW
				peningkatan fasilitas penunjang obyek daya tarik wisata untuk meningkatkan daya tarik wisata
13	Revitalisasi Pasar Ngablak, Pasar Kaponan, Pasar Salaman, Pasar Mungkid dan Pasar Windusari, Kab. Magelang	265	APBN	Rencana pembangunan ini sudah sesuai dengan RTRW Pasal 58 yaitu Arahannya pengembangan sistem jaringan prasarana wilayah lainnya berupa fasilitas ekonomi, berupa pembangunan pasar tradisional dan modern skala wilayah di lokasi strategis kawasan perkotaan PKL
14	Pembangunan wisata kreatif Simpang Mendut (Taman Kreasi Mendut/ Museum Widayat/Taman Anggrek), Kab. Magelang	50	APBN	Rencana pembangunan ini sudah sesuai dengan RTRW Pasal 37 yaitu Kebijakan pengembangan kawasan peruntukan pariwisata berupa pengembangan kawasan peruntukan pariwisata yang ramah lingkungan dimana Taman Rekreasi Mendut masuk dalam pariwisata buatan
15	Pembangunan Sekolah vokasi Pariwisata/ SMK Pariwisata, Kab. Magelang	200	APBN	Rencana pembangunan sudah sesuai dengan RTRW Pasal 18 yaitu salah satu Strategi pengembangan fasilitas pendidikan berupa meningkatkan pelayanan fasilitas pendidikan menengah secara merata dan seimbang sesuai kebutuhan

Sumber: Hasil Olahan, 2020

BAB VI
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

6.1. Kerangka Pendanaan Tahun 2021

Berdasarkan hasil analisis keuangan pada bab sebelumnya, maka kerangka pendanaan untuk tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 6.1.

Kerangka Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah
Kabupaten Magelang Tahun 2021

Uraian	Proyeksi Tahun 2021
Pendapatan	2.412.730.509.910
Pendapatan Asli Daerah (PAD)	265.817.615.504
Hasil Pajak Daerah	88.169.544.504
Hasil Retribusi Daerah	18.903.610.000
Hasil Perusahaan milik daerah dan Pengelolaan Kekayaan daerah yang dipisahkan	14.905.520.000
Lain-lain Pendapatan Asli daerah yg sah	143.838.941.000
Bagian Dana Perimbangan	1.470.878.244.406
Bagi Hasil Pajak / Bukan Pajak	35.217.956.406
D A U	1.007.277.736.000
D A K	400.439.976.000
DID	27.942.576.000
Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah	676.034.650.000
Pendapatan Hibah	114.269.600.000
Dana darurat	
Dana bagi hasil pajak dr Provinsi dan Pemda Lain	170.720.941.000
Dana Penyesuaian dan Otonomi khusus	
Bantuan Keuangan dr Provinsi dan Pemda Lain	
Dana Desa	391.044.109.000
Belanja	2.477.936.312.601
Belanja Tidak Langsung	1.715.521.147.174
Belanja Langsung	762.415.165.427
Surplus/Defisit	(65.205.802.691)
Penerimaan Pembiayaan	70.909.802.691
Pengeluaran Pembiayaan	5.704.000.000
Pembiayaan Netto	65.205.802.691
Total APBD	2.477.936.312.601

6.2. Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Tahun 2021

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan berdasarkan kewenangan adalah sebagai berikut.

6.2.1. Urusan Wajib Pelayanan Dasar

Alokasi anggaran dalam urusan ini digunakan untuk membiayai kewajiban dalam upaya pemenuhan standar pelayanan minimal (SPM) yang berkelanjutan, yaitu sebagai berikut.

1. Pendidikan

Program prioritas yang akan dilaksanakan adalah :

a. program pendidikan sekolah dasar

kegiatan diarahkan pada : penyelenggaraan US-USBN SD/MI 913 sekolah; penyelenggaraan bantuan operasional sekolah (BOS) SD sejumlah 604 sekolah; jumlah sekolah yang difasilitasi pengembangan kurikulumnya 342 sekolah; jumlah guru yang dibintek kurikulum baru sebanyak 1.036 guru; jumlah sekolah model dan rujukan yang mendapat pendampingan 19 sekolah; jumlah sekolah inklusi yang mendapat pendampingan 30 sekolah; jumlah sekolah adiwiyata yang mendapat pendampingan 42 sekolah; pembinaan pendidikan karakter SD sebanyak 151 sekolah; pengembangan dan penjaminan mutu SD sejumlah 125 sekolah; peningkatan mutu sarana prasarana pendidikan SD sebanyak 180 sekolah.

Program ini diarahkan pada pencapaian indikator penurunan angka putus sekolah SD/MI sebesar 0,06%, angka melanjutkan SD/MI ke SMP/MTs sebesar 92%, persentase SD dengan siswa ideal sebesar 40,56%, persentase SD yang menerapkan pendidikan karakter sebesar 50,08% serta persentase SD dengan sarpras sesuai Standar Nasional Pendidikan (SNP) sebesar 73,96 %.

b. program pendidikan sekolah menengah pertama

kegiatan diarahkan pada penyelenggaraan bantuan operasional sekolah (BOS) 27.036 siswa; jumlah sekolah model dan rujukan yang mendapat pendampingan 12 sekolah, jumlah sekolah inklusi yang mendapat pendampingan 4 sekolah, jumlah sekolah yang mendapat bantuan pendampingan program ramah anak 16 sekolah; jumlah sekolah adiwiyata yang mendapat pendampingan 8 sekolah; peningkatan mutu sarana prasarana SMP sebanyak 26 paket.

Program ini diarahkan pada pencapaian indikator penurunan angka putus sekolah SMP/MTs sebesar 0,23 %, angka melanjutkan SMP ke SMA/SMK/MA sebesar 80,45 %, persentase SMP yang menerapkan pendidikan karakter sebanyak 53,85 %, persentase SMP dengan jumlah siswa ideal sebanyak 36,72 %, serta persentase SMP dengan sarpras sesuai standar nasional pendidikan (SNP) sebanyak 74,42 %;

c. program pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal

kegiatan diarahkan fasilitasi GOPTKI dan Bunda PAUD di 21 kecamatan, 46 lembaga PAUD yang difasilitasi menjadi PAUD HI, pendampingan operasional BOP PAUD untuk 800 lembaga; penyelenggaraan kejar paket A sebanyak 4 kelompok, kejar paket B sebanyak 30 kelompok dan kejar

paket C sebanyak 60 kelompok; peningkatan mutu sarana prasarana untuk 50 PAUD.

Program ini diarahkan pada pencapaian indikator persentase PNF terakreditasi (LKP, PKBM) sebanyak 67,39 % dan persentase PAUD terakreditasi sebanyak 60,22 %;

- d. program pembinaan guru dan tenaga kependidikan kegiatan diarahkan pada peningkatan kompetensi guru dan tenaga pendidikan sebanyak 320 orang; pelaksanaan sertifikasi guru dan pengawas sebanyak 3.000 orang; bantuan operasional tenaga pendidik dan kependidikan sebanyak 1.662 orang.

Program ini diarahkan pada pencapaian indikator persentase guru bersertifikat 92%, dan persentase guru yang lulus uji kompetensi guru 67,45%.

2. Kesehatan

Program prioritas yang akan dilaksanakan adalah :

- a. program pelayanan kesehatan

kegiatan diarahkan pada pengadaan bahan dan pemeriksaan laboratorium sebanyak 3 bahan; peningkatan mutu pelayanan 54 FKTP; pelayanan kesehatan masyarakat miskin anggota BPJS; peningkatan mutu pelayanan 29 BLUD Puskesmas;

program ini diarahkan pada pencapaian indikator cakupan mutu pelayanan RS 35%, cakupan mutu pelayanan laboratorium 35% dan cakupan mutu pelayanan FKTP 35%;

- b. program peningkatan kualitas puskesmas dan rumah sakit

kegiatan diarahkan pada peningkatan sarana prasarana 2 puskesmas dan 4 rumah sakit daerah;

program ini diarahkan pada pencapaian indikator persentase puskesmas /jejaring/jaringan/labkesmas/IFK yang memiliki sarana dan prasarana dalam kondisi baik sebesar 35%, dan persentase RS yang memiliki sarana dan prasarana dalam kondisi baik 35%

- c. program pencegahan dan pengendalian penyakit

kegiatan diarahkan pada pencegahan dan penanggulangan: penyakit menular melalui desa posbindu, puskesmas yang melaksanakan pelayanan terpadu TPM, serta pelayanan deteksi dini kanker sesuai standar; pencegahan dan pengendalian penyakit DBD, malaria dan penyakit zoonosis; surveilans penyakit tidak menular, serta penanggulangan kesehatan jiwa masyarakat;

program ini diarahkan pada pencapaian indikator cakupan pencegahan dan pengendalian penyakit menular 80%, cakupan pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular 100%, cakupan surveilans dan imunisasi 70%, pelayanan kesehatan penderita hipertensi 100%, pelayanan kesehatan penderita diabetes mellitus 100%, pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat 100%, pelayanan kesehatan orang terduga TB 100%, pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV 100%, dan pelayanan kesehatan pada usia produktif 100%;

d. program sumber daya kesehatan

kegiatan diarahkan pada pengadaan pengadaan perbekalan kesehatan (BMHP) dan reagensia pengadaan alat kesehatan untuk perawatan kesehatan bagi penderita gangguan janin dan kehamilan, pengadaan obat dan perbekalan kesehatan sebagai upaya dalam pemenuhan ketersediaan perbekalan kesehatan dan reagensia, kebutuhan obat, serta alat kesehatan di Puskesmas. Upaya yang dilakukan untuk peningkatan sumber daya manusia dilakukan melalui peningkatan kapasitas, penilaian, pembinaan sarana dan tenaga kesehatan, pengelolaan BLUD, penyelenggaraan imunisasi serta kursus kepada penjamah makanan; program ini diarahkan pada pencapaian indikator cakupan sumber daya manusia kesehatan sebanyak 84%, dan cakupan sarana prasarana dan pembinaan sumber daya kesehatan sebanyak 88%;

e. program kesehatan masyarakat

kegiatan diarahkan antara lain untuk pelayanan gizi keluarga; pelayanan kesehatan ibu, anak, dan lansia guna menekan bumil dan anak gizi kurang/buruk, menangani ibu dan anak beresiko; program ini diarahkan pada pencapaian indikator cakupan kesehatan ibu, anak, lansia sebanyak 64%, cakupan kesehatan lingkungan, kesjaor sebanyak 78%, cakupan pemberdayaan masyarakat dan promosi kesehatan sebanyak 62%, pelayanan kesehatan ibu hamil 100%, pelayanan kesehatan ibu bersalin 100%, pelayanan kesehatan bayi baru lahir 100%, pelayanan kesehatan balita 100%, pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar 100%, dan pelayanan kesehatan pada usia lanjut 100%;

3. Pekerjaan Umum dan Penataan ruang

Program prioritas yang akan dilaksanakan adalah:

a. program peningkatan akses dan kualitas jalan

kegiatan diarahkan pada pembangunan dan peningkatan jalan kabupaten serta pemeliharaan jalan sepanjang 748.5 km serta pemeliharaan bangunan pelengkap jalan berupa drainase, trotoar dan talud jalan melalui pemeliharaan di 6 wilayah UPT DPUPR.

program ini diarahkan pada pencapaian indikator cakupan ketersediaan jalan dan bangunan pelengkap jalan sebesar 95%; persentase jalan dan bangunan pelengkap jalan dalam kondisi baik sebesar 78%;

b. program peningkatan layanan sumber daya air dan jaringan irigasi

kegiatan diarahkan pada pembangunan/peningkatan/rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi dengan harapan jaringan irigasi dalam kondisi baik sepanjang 598,18 meter dalam kondisi baik dan dapat mengairi sawah seluas 23.512 Ha; konservasi sumber daya alam (SDA) untuk meningkatkan debit 3 mata air dan konservasi 5 mata air; pengembangan dan penguatan pengelola irigasi dan SDA untuk 15 DI; program ini diarahkan pada pencapaian indikator cakupan layanan jaringan irigasi 85%; dan cakupan layanan sumber daya air 74%;

c. program peningkatan dan pengembangan bangunan gedung dan AMPL

kegiatan diarahkan pada Pembangunan 1 unit berupa pembangunan lanjutan gedung VIP dan ruang rawat inap kelas di RSDMP serta rehabilitasi bangunan gedung pemerintah di kompleks setda dan pemeliharaan ringan di beberapa gedung kantor SKPD; pembangunan sistem penyediaan air minum (SPAM). Disamping itu diarahkan untuk peningkatan dan pengembangan layanan air minum melalui pendampingan Program Pamsimas di 4 lokasi dan peningkatan dan pengembangan layanan sanitasi di beberapa desa.

program ini diarahkan pada pencapaian indikator cakupan pembangunan gedung pemerintah dan publik sebesar 99%, cakupan bangunan gedung pemerintah dalam kondisi baik sebanyak 25%, cakupan layanan air minum sebesar 89%, cakupan layanan sanitasi air limbah domestik sebanyak 88%, serta persentase terbangunnya landmark sebesar 75%;

d. program pengembangan sarana dan prasarana ke-PU-an

kegiatan diarahkan pada pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana serta alat-alat laboratorium ke PU-an;

program ini diarahkan pada pencapaian indikator cakupan sarana prasarana ke-PU-an sebesar 86% dan cakupan layanan jasa konstruksi sebesar 62%;

e. program pemanfaatan dan pengendalian tata ruang,

kegiatan diarahkan pada pengadaan tanah ke-PU-an dan fasilitasi sertifikat tanah, fasilitasi penyelenggaraan, penataan, pengendalian, dan pemanfaatan ruang daerah;

program ini diarahkan pada pencapaian indikator persentase rekomendasi perijinan sebesar 45%; persentase kesesuaian tata ruang sebesar 50% dan cakupan kinerja pertanahan.

4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Program prioritas yang akan dilaksanakan adalah:

a. program pengembangan dan peningkatan kualitas perumahan

kegiatan diarahkan pada pengembangan perumahan akibat bencana 100%, pengembangan perumahan umum, khusus dan swadaya anatara lain dengan melaksanakan fasilitasi 1.500 unit, serta fasilitasi layanan teknis *sitiplan* pada proses perijinan pengembangan perumahan.

program ini diarahkan pada pencapaian indikator persentase penanganan PSU perumahan sebesar 48%; persentase penanganan rumah tidak layak huni sebesar 50%; persentase fasilitasi penyediaan rumah bagi MBR sebesar 68%; persentase penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana sebesar 100%; dan persentase fasilitasi penyediaan rumah bagi relokasi warga yang terdampak proyek pemerintah sebesar 100%;

b. program pengembangan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman,

kegiatan diarahkan pada penuntasan penanganan permukiman kumuh serta fasilitasi Program Kotaku dan pelaksanaan review penentuan Kawasan Kumuh di Kabupaten Magelang;

program ini diarahkan pada pencapaian indikator persentase penanganan kawasan permukiman kumuh 84%; persentase pengendalian kawasan permukiman 71%; dan persentase penanganan PSU permukiman 100%;

5. Ketentraman dan Ketertiban Umum, serta Perlindungan Masyarakat

Program prioritas yang akan dilaksanakan adalah:

- a. program peningkatan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat
kegiatan diarahkan pada pengamanan obyek vital dan keramaian daerah sebanyak 200 kali, patroli wilayah sebanyak 252 kali dan pembinaan anggota satlinmas sebanyak 420 orang;
program ini diarahkan pada pencapaian indikator persentase penertiban yang dilaksanakan 100%; persentase satlinmas yang aktif 72%; dan persentase pengamanan dan pengawalan 100%;
- b. program penegakan perda
kegiatan diarahkan pada penanganan perkara pelanggaran peraturan perundang-undangan daerah sebanyak 14 kasus;
program ini diarahkan pada pencapaian indikator persentase penegakan perda sebesar 95,8%;
- c. program penanggulangan kebakaran
kegiatan diarahkan pada peningkatan kesiapsiagaan penanggulangan kebakaran dengan frekuensi pelaksanaan pemadaman kebakaran dan penyelamatan sebanyak 100 kali; layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran sebanyak 400 orang; pembinaan penanggulangan kebakaran 6 lokasi;
program ini diarahkan pada pencapaian indikator persentase layanan pemadaman, penyelamatan, dan evakuasi korban dan terdampak kebakaran dalam tingkat waktu tanggap sebesar 61%;
- d. program penanggulangan bencana
kegiatan diarahkan pada mitigasi bencana, pelatihan pencegahan dan mitigasi; penyediaan peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan terhadap bencana; manajemen pusdalops PB; fasilitasi rehabilitasi dan rekonstruksi; fasilitasi dan koordinasi penilaian *post disaster need assessment* (PDNA) dan JITU PASNA; komunikasi, informasi dan edukasi rawan bencana;
program ini diarahkan pada pencapaian indikator persentase pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana sebesar 41,39%; persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi sebesar 100%; persentase pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi sebesar 85%; dan persentase pelayanan informasi rawan bencana sebesar 36,96%;
- e. program peningkatan wawasan kebangsaan dan politik masyarakat
kegiatan diarahkan pada kegiatan pembinaan politik daerah dan organisasi kemasyarakatan sebanyak 6 kali; peningkatan kewaspadaan dini daerah dan fasilitasi penanganan konflik sosial, peningkatan peran dan fungsi tim kewaspadaan dini daerah, kegiatan peningkatan kesadaran bela negara, penyelenggaraan pendidikan wawasan

kebangsaan dan pelestarian nilai-nilai kepahlawanan sebanyak 300 orang;

program ini diarahkan pada pencapaian indikator persentase ormas yang aktif sebanyak 98%, persentase konflik sosial tertangani 100%, dan persentase kegiatan pembinaan politik 100%.

6. Sosial

Program prioritas yang akan dilaksanakan adalah:

a. Program penanganan dan perlindungan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS)

Kegiatan diarahkan pada penanganan PMKS melalui rumah singgah sejumlah 60 orang; perlindungan dan jaminan sosial sejumlah 55.303 orang; rehabilitasi sosial sejumlah 560 orang;

Program ini diarahkan pada pencapaian indikator persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, gelandangan dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti 100%, persentase PMKS lainnya diluar panti yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar 33%, persentase PMKS dan korban bencana yang mendapat perlindungan dan jaminan sosial 45%, persentase penyandang disabilitas, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan social 2%, dan persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana kabupaten 100%;

b. Program pemberdayaan sosial

Kegiatan diarahkan pada penanganan fakir miskin sebanyak 150 orang; pemberdayaan sosial sebanyak 30 orang; optimalisasi data kemiskinan sebanyak 12.000 KK; fasilitasi program bantuan sosial pangan sebanyak 76.945 KPM;

Program ini diarahkan pada pencapaian indikator persentase PSKS dapat melaksanakan usaha kesejahteraan sosial (UKS) sebanyak 8% dan persentase fakir miskin yang divalidasi sebanyak 100%.

6.2.2. Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar

1. Tenaga Kerja

Program prioritas yang akan dilaksanakan adalah

a. program pengembangan kompetensi, penempatan dan perluasan kesempatan kerja;

kegiatannya diarahkan pada kegiatan pelatihan ketrampilan dan sertifikasi tenaga kerja; kegiatan penempatan tenaga kerja sejumlah 1.880 orang; penguatan sarana dan prasarana kelembagaan pelatihan; program ini diarahkan pada pencapaian indikator cakupan pengembangan kompetensi, penempatan, dan perluasan kesempatan kerja sebanyak 80%;

b. program pembinaan hubungan industrial dan produktivitas pekerja;

kegiatannya diarahkan pada pembinaan hubungan industrial; pembinaan pengupahan; peningkatan kompetensi pekerja; program ini diarahkan pada pencapaian indikator cakupan pembinaan

hubungan industrial dan produktivitas pekerja sebesar 82%.

2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Program prioritas yang akan dilaksanakan adalah program pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan dan anak. Kegiatan diarahkan pada peningkatan kualitas hidup perempuan (pkhp) sebanyak 17 organisasi; penanganan terpadu korban kekerasan berbasis gender dan anak sebanyak 80 kasus

Program ini diarahkan pada pencapaian indikator persentase perempuan dalam organisasi kemasyarakatan yang mendapatkan peningkatan kapasitas pada sektor politik, hukum, ekonomi, sosial dan budaya sebanyak 45,%; persentase lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan dan anak yang memiliki SDM dan sarpras sesuai standar sebanyak 71%; persentase perempuan dan anak korban kekerasan yang dilayani sesuai standar sebanyak 100%; serta persentase kelembagaan pelayanan pemenuhan hak anak sesuai standar sebanyak 100%.

3. Pangan

Program prioritas yang akan dilaksanakan adalah program peningkatan ketahanan pangan. Program ini diarahkan pada pencapaian indikator ketersediaan energi per kapita 2.200 kkal; ketersediaan protein per kapita 53 gram; penguatan cadangan pangan sebesar 65%; pencapaian skor pola pangan harapan (PPH) sebanyak 88 indeks; persentase pengawasan dan pembinaan keamanan pangan sebanyak 90%; penanganan daerah rawan pangan sebanyak 67%; ketersediaan informasi pasokan harga dan akses pangan di daerah sebanyak 91%; dan stabilitas harga dan pasokan pangan sebesar 93%.

Kegiatan diarahkan pada pembinaan dan pengembangan kemandirian pangan; pengelolaan cadangan pangan daerah; peningkatan panganekaragaman konsumsi pangan dan Pengembangan olahan pangan lokal berbasis agribisnis.

4. Pertanahan

Program prioritas yang akan dilaksanakan adalah program pemanfaatan dan pengendalian tata ruang. Kegiatan diarahkan pada fasilitasi sertifikasi tanah milik kabuptaen sebanyak 40 bidang dan pengadaan tanah ke-PU-an sebanyak 40 bidang;

Program ini diarahkan pada pencapaian indikator cakupan kinerja pertanahan sebesar 50%.

5. Lingkungan Hidup

Program prioritas yang akan dilaksanakan adalah:

a. Program pengendalian pencemaran kegiatan diarahkan pada pemantauan kualitas air sungai di 15 sungai dan fasilitasi pengendalian pencemaran dengan menyediakan laboratorium lingkungan yang terakreditasi.

b. Program peningkatan kapasitas dan tata lingkungan hidup; kegiatan diarahkan pada fasilitasi pelayanan dan pengawasan dokumen lingkungan hidup untuk 1.627 usaha/kegiatan, penyusunan naskah RPPLH dan daya dukung daya tampung pendukung RPPLH dan

pelaporan pelaksanaan RPPLH.

program ini diarahkan pada pencapaian indikator persentase usaha dan/atau kegiatan yang berdokumen lingkungan, persentase ketersediaan dokumen perencanaan dan pelaporan lingkungan hidup daerah, persentase kasus lingkungan dan pengaduan masyarakat terkait ijin lingkungan, PPLH, dan PUU LH yang ditangani serta persentase desa bersih sehat yang mendapat penghargaan di bidang LH;

- c. Program peningkatan kinerja pengelolaan sampah; kegiatan diarahkan pada Pengurangan sampah dengan pembinaan Bank sampah dan TPS 3R. untuk penanganan sampah dengan mengoptimalkan TPSS yang ada. penambahan 1 rumah kompos dan 6 Arm roll (DAK)
 - d. Program peningkatan kinerja pengelolaan ruang terbuka hijau; kegiatan diarahkan pada pemeliharaan rutin ruang terbuka hijau publik; Program konservasi sumber daya alam dan mitigasi dampak perubahan iklim, kegiatan diarahkan pada profiling mata air, pembentukan komunitas jogo tuk, pembinaan sekolah adiwiyata dan pembinaan program kampung iklim (PROKLIM);
6. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Program prioritas yang akan dilaksanakan adalah:
- a. program pelayanan administrasi kependudukan; kegiatan diarahkan pada fasilitasi penerbitan perubahan identitas penduduk 81.000 lembar; fasilitasi penerbitan pindah datang dan pendataan penduduk 14.500 lembar; program ini diarahkan pada pencapaian indikator persentase penduduk yang melakukan perekaman KTP 98% dan persentase penerbitan KK 97%;
 - b. program pelayanan pencatatan sipil; kegiatan diarahkan pada pelayanan penerbitan akta kematian dan kelahiran 31.000 lembar; pelayanan penerbitan akte perceraian, perkawinan, perubahan status anak dan pewarganegaraan 350 lembar; program ini diarahkan pada pencapaian indikator persentase penerbitan akta kelahiran 92%; persentase penerbitan akta perkawinan 60% serta persentase penerbitan akta kematian 70%;
 - c. program pengelolaan informasi administrasi kependudukan (PIAK) dan pemanfaatan data; kegiatan diarahkan pada pengelolaan sistem informasi administrasi kependudukan (SIK) di 21 kecamatan; fasilitasi & evaluasi pemanfaatan data dan pengelolaan dokumen 30.500 dokumen; program ini diarahkan pada pencapaian indikator persentase pengelolaan informasi administrasi kependudukan 75%; dan persentase pemanfaatan data 90%;
7. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Program prioritas yang akan dilaksanakan adalah:
- a. program pemberdayaan masyarakat dan desa;

- kegiatan diarahkan pada pembinaan dan pengembangan lembaga ekonomi pemerintah desa dan masyarakat sebanyak 140 buah; fasilitasi kegiatan teknologi tepat guna di 173 lembaga; fasilitasi pengembangan swadaya masyarakat di 6 desa; program ini diarahkan pada pencapaian indikator persentase fasilitasi TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD); persentase pasar desa dengan pengelolaan baik; persentase BUMDES dalam strata maju, berkembang dan tumbuh; persentase TTG yang difasilitasi; persentase KP SPAMS yang berstatus mandiri; serta persentase pengembangan partisipasi dan swadaya masyarakat;
- b. program pembinaan pemerintahan dan kelembagaan desa; kegiatan diarahkan pada fasilitasi penegakan batas desa di 1 kecamatan; fasilitasi pengisian data informasi desa di 180 desa/kelurahan dan pendataan IDM; program ini diarahkan pada pencapaian indikator persentase pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa; persentase kecamatan yang selesai dipetakan batas desanya; persentase LKD (LPM, Karangtaruna, PKK, RT, RW dan POSYANDU) berprestasi; dan persentase pemutakhiran data-data desa dan kelurahan;
- c. program perencanaan, pengelolaan keuangan dan aset desa kegiatan diarahkan pada penguatan dan pengembangan perencanaan pembangunan desa di 367 desa; program ini diarahkan pada pencapaian indikator persentase pemenuhan perencanaan desa tepat waktu; persentase desa yang difasilitasi pengelolaan keuangannya; dan persentase desa yang akurat dan tertib administrasi pengelolaan aset desa nya;
8. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Program prioritas yang akan dilaksanakan adalah:
- a. program keluarga berencana; kegiatan diarahkan pada jaminan pelayanan keluarga berencana sebanyak 842 orang; fasilitasi peningkatan pelayanan keluarga berencana melalui peningkatan sarana prasarana pelayanan KB sebanyak 4 unit; program ini diarahkan pada pencapaian indikator persentase peningkatan partisipasi ber-KB 2,42%; cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat 91%; cakupan PUS yang ingin ber KB dan tidak terpenuhi (*unmet need*) 11,92%, persentase peserta KB aktif menggunakan alat kontrasepsi modern (CPR) 75,5%; serta persentase penggunaan kontrasepsi jangka panjang (MKJP) 35,37%;
- b. program pembangunan ketahanan keluarga kegiatan diarahkan pada pengendalian penduduk dan informasi keluarga; ketahanan dan kesejahteraan keluarga; program ini diarahkan pada pencapaian indikator Usia Kawin Pertama (UKP) pada 21,3 tahun, cakupan pembangunan ketahanan keluarga 56,67%; persentase anggota UPPKS dari keluarga pra sejahtera 55,89%;

persentase perangkat daerah yang berperan dalam pembangunan daerah melalui kampung KB 39,6%.

9. Perhubungan

Program prioritas yang akan dilaksanakan adalah:

- a. program pengembangan jaringan prasarana angkutan jalan; kegiatan diarahkan pada pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana terminal angkutan darat di 6 lokasi dan pengelolaan parkir sebanyak 250 titik.
program ini diarahkan pada pencapaian indikator persentase ketersediaan prasarana angkutan jalan sebesar 85%;
- b. program peningkatan pengamanan dan keselamatan lalu lintas; kegiatan diarahkan pada pengelolaan LPJU untuk pembangunan dan pemeliharaan sebanyak LPJU; pemeliharaan dan pengadaan sarana perlengkapan jalan seperti rambu, guardrail, marka jalan, zebra cross serta pemeliharaan APILL serta pengembangan pelayanan angkutan 2 trayek;
program ini diarahkan pada pencapaian indikator persentase ketersediaan fasilitas perlengkapan jalan pendukung pengamanan dan keselamatan lalu lintas sebesar 69%, serta persentase masyarakat sadar keselamatan berlalu lintas sebesar 55%;
- c. program peningkatan pelayanan angkutan
kegiatan diarahkan pada uji kelayakan sarana transportasi guna keselamatan penumpang jumlah bukti lulus uji sebanyak 12.000 set serta pemeliharaan dan pengadaan alat uji kendaraan bermotor.
program ini diarahkan pada pencapaian indikator persentase layanan uji kendaraan bermotor wajib uji sebesar 91%

10. Komunikasi dan Informatika

Program prioritas yang akan dilaksanakan adalah:

- a. program pengelolaan aplikasi informatika;
kegiatan diarahkan pada fasilitasi pengelolaan aplikasi SKPD sebanyak 8 aplikasi; penyelenggaraan ekosistem TIK di SKPD dan desa;
program ini diarahkan pada pencapaian indikator persentase urusan yang terintegrasi dalam pengelolaan BIG DATA 50%, persentase layanan domain dan subdomain pemerintah 20,68% dan persentase ketersediaan dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja pengelolaan TIK 100%;
- b. program pengelolaan informasi dan komunikasi publik
kegiatan diarahkan pada pengelolaan diseminasi informasi melalui media masa; fasilitasi pengelolaan layanan keterbukaan informasi publik.
Program ini diarahkan pada pencapaian indikator persentase layanan website PD dan desa yang memenuhi kriteria 26,45; cakupan diseminasi informasi melalui media pertunjukan rakyat 100%, cakupan diseminasi melalui media interpersonal 100%, cakupan diseminasi informasi melalui media luar ruang 100%, persentase diseminasi informasi melalui media massa 100%, cakupan diseminasi informasi melalui media baru portal

berita daerah 100%, cakupan pengembangan dan pemberdayaan kelompok informasi masyarakat di tingkat kecamatan 100%, cakupan konten literasi TIK yang ramah anak, wanita, disabilitas dan pelajar 100%;

c. Persandian

Program prioritas yang akan dilaksanakan adalah program persandian; kegiatan diarahkan pada pengelolaan persandian dan telekomunikasi; program ini diarahkan pada pencapaian indikator persentase PD yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi perangkat daerah sebesar 20%;

11. Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Program prioritas yang akan dilaksanakan adalah:

a. program peningkatan kualitas kelembagaan koperasi;

kegiatan diarahkan pada pengawasan koperasi sebanyak 55 lembaga; peningkatan kualitas kelembagaan dan daya saing koperasi 125 pengelola; peningkatan dan pengembangan jaringan kerjasama usaha koperasi sebanyak 30 koperasi; program ini diarahkan pada pencapaian indikator indeks kualitas kelembagaan koperasi 78%;

b. peningkatan pemberdayaan usaha mikro;

kegiatan diarahkan pada pembinaan dan penataan pedagang kaki lima sebanyak 140 orang dan asongan sebanyak 200 orang; pengembangan kemitraan dan fasilitasi promosi produk UMKM 205 UMKM; peningkatan kapasitas SDM dan sarana prasarana bagi usaha mikro sebanyak 225 UMKM; penguatan kelembagaan dan legalitas usaha, perijinan sebanyak 30 UMKM dan pembinaan usaha menengah sebanyak 50 lembaga; penguatan ekonomi masyarakat untuk penanggulangan kemiskinan, focus pada pelatihan sebanyak 160 orang dan bantuan untuk 80 orang program ini diarahkan pada pencapaian indikator cakupan pemberdayaan usaha mikro 0.73%

12. Penanaman Modal

Program prioritas yang akan dilaksanakan adalah:

a. program peningkatan dan pelayanan investasi;

kegiatan diarahkan pada fasilitasi dan koordinasi kerjasama bidang investasi (CJIBF); penyusunan profil potensi investasi unggulan kabupaten magelang; fasilitasi promosi dan pemasaran potensi investasi; program ini diarahkan pada pencapaian indikator persentase realisasi investasi 61,20%;

b. program pemantauan dan pengendalian investasi;

kegiatan diarahkan pada pengendalian, monitoring, evaluasi pelayanan perizinan dan penanganan pengaduan; pengelolaan bahan dan data informasi perizinan;

program ini diarahkan pada pencapaian indikator persentase pemantauan dan pengendalian investasi 0,01%;

c. program pelayanan perizinan;

kegiatan diarahkan pada fasilitasi operasional pelayanan pendaftaran perijinan sebanyak 4.000 perijinan; fasilitasi operasional pelayanan penerbitan perijinan sebanyak 4.000 perijinan;

program ini diarahkan pada pencapaian indikator persentase pelayanan perizinan 1%.

13. Kepemudaan dan Olahraga

Program prioritas yang akan dilaksanakan adalah:

a. program pembinaan dan peningkatan sarana prasarana olahraga;

kegiatan diarahkan pada pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi fokus pada pembinaan 595 atlet dan 200 atlit berprestasi; peningkatan sarana prasarana olahraga; pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi sebanyak 2.000 orang; Implementasi IPTEK dalam pembinaan olahraga 675 atlit

program ini diarahkan pada pencapaian indikator pembinaan olahraga 44%;

b. program peningkatan peran serta pemuda dalam pembangunan;

kegiatan diarahkan pada: perlindungan dan pemberdayaan lembaga pemuda; pemberdayaan dan pengembangan pemuda;

program ini diarahkan pada pencapaian indikator pembinaan pemuda 59%.

14. Statistik

program prioritas yang akan dilaksanakan adalah program pengelolaan dan pengembangan statistik;

kegiatan diarahkan pada penyusunan dokumen statistik sektoral sebanyak 9 jenis buku; koordinasi pengintegrasian data tingkat kabupaten sebanyak 60 data SKPD;

program ini diarahkan untuk pencapaian indikator persentase ketersediaan data statistik sektoral sebesar 100%; dan persentase data statistik sektoral yang terintegrasikan dalam sistem informasi sebesar 100%

15. Kebudayaan

program prioritas yang akan dilaksanakan adalah program perlindungan dan pengembangan kebudayaan;

kegiatan diarahkan pada pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah meliputi: pembinaan kelompok adat 21 kelompok; pelestarian permainan tradisional 15 jenis; fasilitasi dan inventarisasi budaya 100 kesenian dan 13 film; perlindungan benda cagar budaya sebanyak 939 unit dan 90 jupel yang dibina; pertunjukkan seni dan budaya untuk 4 festival, 10 pertunjukkan seni, dan 6 kelompok kesenian yang dikirim.

program ini diarahkan untuk pencapaian indikator persentase karya budaya yang terlayani 4,20%; persentase kelompok seni budaya yang aktif 11,59%; dan persentase benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan 84,13%.

16. Perpustakaan

program prioritas yang akan dilaksanakan adalah program pengelolaan dan pengembangan perpustakaan;

kegiatan diarahkan pada pengembangan perpustakaan melalui peningkatan SDM; pengembangan kerjasama dengan 15 unit; dan akreditasi untuk 10 perpustakaan; pengembangan perpustakaan melalui penambahan judul sebanyak 550 judul dan bahan pustaka sebanyak 3.500 exemplar;

program ini diarahkan untuk pencapaian indikator rasio judul koleksi bahan pustaka di perpustakaan kabupaten; angka kepuasan pemustaka; dan rasio pustakawan dan tenaga teknis perpustakaan yang mengikuti bimtek, sosialisasi dan workshop.

17. Kearsipan

Program prioritas yang akan dilaksanakan adalah:

- a. program pembinaan, pengembangan dan pengawasan kearsipan
kegiatan diarahkan pada pelayanan perpustakaan 90.000 orang; pengembangan perpustakaan 150 perpustakaan; penyediaan bahan pustaka 550 judul buku;
program ini diarahkan untuk pencapaian indikator rasio judul koleksi bahan pustaka di perpustakaan kabupaten sebesar 0,02%; angka kepuasan pemustaka 80; rasio pustakawan dan tenaga teknis perpustakaan yang mengikuti bimtek, sosialisasi dan workshop sebanyak 56%;
- b. program pembinaan, pengembangan dan pengawasan kearsipan;
kegiatan diarahkan pada pembinaan dan pengembangan SDM kearsipan sebanyak 120 orang;
program ini diarahkan untuk pencapaian indikator persentase pencipta arsip yang tertib arsip 53%;
- c. program pengelolaan dan pelestarian arsip;
kegiatan diarahkan pada pengolahan arsip dinamis dan statis sebanyak 16.500 berkas
program ini diarahkan untuk pencapaian indikator persentase peningkatan arsip yang dikelola sebesar 6%.

A. Urusan Pilihan

1. Kelautan dan Perikanan

Program prioritas yang akan dilaksanakan adalah:

- a. Program pengembangan budidaya perikanan, kesehatan ikan dan lingkungan. Program ini diarahkan pada pencapaian indikator cakupan pengembangan budidaya perikanan 5% dan cakupan

kesehatan ikan dan lingkungan 100%.

Kegiatan diarahkan pada Intensifikasi dan Ekstensifikasi Budidaya Perikanan (DBHCHT), Rehabilitasi/Pembangunan Sarana Prasarana Perikanan (DAK)

- b. Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan dan sistem penyuluhan. Program ini diarahkan pada pencapaian indikator cakupan optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan 5%; cakupan bina kelompok pembudidaya ikan 5%; dan cakupan pengembangan kawasan budidaya perikanan air tawar 3%. Program ini diarahkan pada kegiatan : Peningkatan jaringan pemasaran/promosi perikanan; Pengembangan usaha pelayanan perikanan (PUPP).

2. Pariwisata

Program prioritas yang akan dilaksanakan adalah:

- a. program peningkatan sarana prasarana pariwisata dan industri pariwisata
kegiatan diarahkan pada penataan dan pengelolaan daya tarik wisata 3 DTW dan 5 desa wisata; penataan kawasan pariwisata daya tarik wisata 2 lokasi DTW; peningkatan kapasitas SDM pelaku usaha pariwisata untuk 38 pokdarwis; penataan dan pengelolaan daya tarik wisata Ketep Pass
program ini diarahkan pada pencapaian indikator sarana prasarana dan industri pariwisata dalam kondisi baik 45%;
- b. program pengembangan kelembagaan, pemasaran pariwisata, dan ekonomi kreatif ;
kegiatan diarahkan pada pembinaan kelembagaan pariwisata 50%; pemasaran dan promosi pariwisata 73%; pembinaan komunitas/pelaku ekonomi kreatif 6 komunitas;
program ini diarahkan pada pencapaian indikator cakupan pengembangan kelembagaan, pemasaran pariwisata dan ekonomi kreatif 59%.

3. Pertanian

Program prioritas yang akan dilaksanakan adalah:

- a. Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan. Program ini diarahkan untuk pencapaian indikator produktivitas padi 60 kw/ha; produktivitas kopi 9 kw/ha; produktivitas cabai 69 kw/ha; produktivitas bawang putih 61 kw/ha; produktivitas cengkeh 1 kw/ha;
Kegiatan diarahkan pada Pengembangan Benih Tanaman Unggulan, Penyediaan Sarana Produksi Tanaman Hias dan Anggrek, Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tembakau (DBHCHT), Pengembangan Tanaman Penyegar (DBHCHT).

- b. Program peningkatan sarana dan prasarana pertanian. Program ini diarahkan untuk pencapaian indikator cakupan ketersediaan sarana dan prasarana pertanian/ perkebunan sebanyak 3,59%.
Kegiatan diarahkan pada peningkatan sarana prasarana dan infrastruktur pertanian; Modernisasi dan mekanisasi pertanian.
- c. Program pemberdayaan sumber daya manusia pertanian. Program ini diarahkan untuk pencapaian cakupan pembinaan kelembagaan tani 37%.
Kegiatan diarahkan pada kegiatan Peningkatan Kelembagaan Petani Tembakau.
- d. Program peningkatan daya saing produk pertanian. program ini diarahkan untuk pencapaian indikator persentase kerjasama/kemitraan yang terjalin sebanyak 20%.
Kegiatan diarahkan pada Peningkatan Daya Saing Tanaman Semusim Perkebunan (DBHCHT), Pembinaan Kemitraan Petani Tembakau (DBHCHT), Penumbuhan Sentra Buah Lokal Mendukung Agrowisata (DBHCHT).
- e. Program peningkatan produksi hasil peternakan. Program ini diarahkan untuk pencapaian indikator cakupan peningkatan produksi hasil peternakan 2%; Cakupan peningkatan sarana dan prasarana peternakan 3% dan Cakupan penerapan teknologi peternakan 75%;
Kegiatan diarahkan pada; Pengembangan itik Magelang; Pengembangan Sarana Prasarana Peternakan (DAK), Peningkatan Pelayanan Inseminasi Buatan.
- f. Program pencegahan dan penanggulangan penyakit hewan. Program ini diarahkan untuk pencapaian indikator cakupan pencegahan dan penanggulangan penyakit hewan 100%.
Kegiatan diarahkan pada Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Hewan Menular; Peningkatan Kesehatan Masyarakat Veteriner; Surveillens dan Pengujian Penyakit Hewan dan Ikan; dan Peningkatan Pelayanan Puskesmas. Pengawasan Pemotongan Hewan Qurban, Pengawasan Obat Hewan dan Pelayanan Jasa Medik, Peningkatan Pelayanan Rumah Potong Hewan.

4. Perdagangan

Program prioritas yang akan dilaksanakan adalah:

- a. program peningkatan dan pengembangan perdagangan;
kegiatan diarahkan pada pengawasan dan pengembangan distribusi perdagangan; pengembangan kerjasama dan promosi perdagangan; pengawasan pita cukai legal dan illegal;
program ini diarahkan pada pencapaian indikator pertumbuhan ekspor barang non migas 3% dan persentase disparitas harga antar pasar <10%; persentase pengawasan perdagangan sesuai dengan ketentuan 80%;

- b. program pemberdayaan dan penataan pasar; kegiatan diarahkan pada peningkatan sarana dan prasarana pasar focus pada rehab 3 pasar dan penyusunan 3 dokumen teknis pembangunan pasar; pemberdayaan pasar melalui pendataan pedagang pasar di 1 lokasi, penataanpedagang pasar di 3 lokasi, dan penertiban pedagang pasar di 14 lokasi; pembangunan pasar 1 unit; pengelolaan pendapatan pasar di 14 pasar daerah; program ini diarahkan pada pencapaian indikator persentase pasar rakyat dengan sarana prasarana dan pengelolaan yang baik 86%;
- c. program peningkatan dan pengembangan kemetrollogian; kegiatan diarahkan pada pendataan UTTP metrologi di 4 kecamatan; peningkatan pelayanan metrologi sebanyak 115 kali; peningkatan pengawasan metrologi 1.470 kali; fasilitasi penilaian metrologi 1 lokasi pasar tertib ukur; program ini diarahkan pada pencapaian indikator persentase jumlah UTTP bertanda tera sah 58%;

5. Perindustrian

Program prioritas yang akan dilaksanakan adalah program pengembangan industri;

kegiatan diarahkan pada peningkatan kapasitas industri makanan minuman 190 unit; peningkatan kapasitas industri makanan minuman 50 unit; peningkatan kapasitas industri kerajinan dan aneka100 unit; penumbuhan dan pengembangan sentra industri kecil 3 sentra; fasilitasi kepemilikan hak atas kekayaan intelektual bagi industri 60 unit; program ini diarahkan pada pencapaian indikator cakupan bina industri kecil 1%.

B. Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan

1. Perencanaan

Program prioritas yang akan dilaksanakan adalah:

- a. program perencanaan pembangunan daerah; kegiatan diarahkan pada perencanaan umum pembangunan daerah 2 dokumen; evaluasi dokumen perencanaan pembangunan daerah 2 dokumen; pengelolaan data dan laporan pembangunan daerah2 laporan; program ini diarahkan pada pencapaian indikator persentase kesepakatan musrenbang yang masuk ke dalam RKPD 100%; persentase pemenuhan dokumen perencanaan pembangunan jangka panjang dan menengah daerah 100%; konsistensi penjabaran program RPJMD ke dalam RKPD 100%;
- b. program perencanaan pembangunan bidang tata ruang, pengembangan wilayah dan infrastruktur; kegiatan diarahkan pada; perencanaan tata ruang dan pengembangan wilayah 36 indikator; perencanaan tata ruang dan pengembangan

- wilayah 20 indikator;
program ini diarahkan pada pencapaian indikator kinerja program bidang tata ruang pengembangan wilayah dan infrastruktur 90%;
- c. program perencanaan pembangunan bidang ekonomi dan sumber daya alam;
kegiatan diarahkan pada perencanaan pembangunan sektor pertanian dan pangan 27 indikator; perencanaan pengembangan dunia usaha 14 indikator;
program ini diarahkan pada pencapaian indikator kinerja program bidang ekonomi dan sumber daya alam 82% ;
- d. program perencanaan pembangunan bidang pemerintahan, sosial dan budaya
kegiatan diarahkan pada perencanaan sektor pemerintahan umum 96 indikator; perencanaan sektor kesejahteraan sosial 26 indikator; perencanaan sektor pendidikan dan kebudayaan 12 indikator; perencanaan sektor akuntabilitas pemerintahan 9 indikator;
program ini diarahkan pada pencapaian indikator kinerja program bidang pemerintahan, sosial, dan budaya 67.14%.

2. Keuangan

Program prioritas yang akan dilaksanakan adalah:

- a. program pengelolaan pendapatan daerah;
kegiatan diarahkan pada pengelolaan pendapatan daerah; pendataan dan pendaftaran obyek dan subyek pajak;
program ini diarahkan pada pencapaian indikator persentase kenaikan pajak 11%, persentase kenaikan retribusi 16%, persentase penyelesaian penagihan atas ketetapan pajak daerah 100%;
- b. program pengelolaan keuangan daerah;
kegiatan diarahkan pada penyusunan peraturan tentang pengelolaan keuangan daerah; penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD dan perubahan APBD; pengelolaan kas daerah; pengendalian perbendaharaan; penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD; penyusunan KUA dan PPAS;
program ini diarahkan pada pencapaian indikator persentase tahapan penganggaran yang dilakukan tepat waktu 100%, persentase serapan APBD 100%, persentase penerimaan pendapatan di RKUD 100%, penerapan SAP berbasis akrual yang baik dan benar 100%;
- c. program pengelolaan aset daerah
kegiatan diarahkan pada pembinaan, pengelolaan, pengawasan dan pengendalian barang milik daerah 300 orang; manajemen pengelolaan BMD 48 OPD; pengolahan data barang milik daerah 4 dokumen;
program ini diarahkan pada pencapaian indikator persentase PD tertib administrasi pengelolaan BMD (Barang Milik Daerah/Aset) 100%;

3. Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

Program prioritas yang akan dilaksanakan adalah:

- a. program informasi dan pengadaan pegawai;
kegiatan diarahkan pada validasi database kepegawaian ASN 9.228 ASN; pengelolaan manajemen pengadaan dan pelayanan ASN 575 formasi;
program ini diarahkan pada pencapaian indikator persentase kelengkapan dokumen kepegawaian dalam SIMPEG 75%, serta persentase keterisian formasi pegawai 75,10%;
- b. program pengembangan sumber daya aparatur;
kegiatan diarahkan pada pengelolaan diklat dasar dan penjenjangan 350 ASN; pengembangan kompetensi kualifikasi pendidikan ASN dan sertifikasi 300 ASN; penataan ASN 240 ASN; pengembangan jabatan fungsional 750 ASN;
program ini diarahkan pada pencapaian indikator persentase ASN yang lulus diklat 100%, persentase ASN yang meningkat kualifikasinya 9,70%, persentase keterisian jabatan pimpinan tinggi 82%, administrator dan pengawas serta persentase ASN yang terevaluasi kinerjanya 79%;
- c. program kesejahteraan dan pembinaan pegawai;
kegiatan diarahkan pada fasilitasi layanan kesejahteraan dan penghargaan ASN; fasilitasi pemberhentian ASN;
program ini diarahkan pada pencapaian indikator persentase pembinaan ASN 0,40% dan persentase ASN yang mendapat layanan administrasi kesejahteraan ASN 100%.

4. Penelitian dan Pengembangan

Program prioritas yang akan dilaksanakan adalah program penelitian dan pengkajian daerah;

Kegiatan diarahkan pada penelitian dan pengembangan pemerintahan sosial dan budaya; penelitian dan pengembangan ekonomi dan pengembangan wilayah; penelitian dan pengembangan ekonomi dan pengembangan wilayah;

program ini diarahkan pada pencapaian indikator persentase pemanfaatan hasil kelitbangan dan persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah 100%.

5. Pengawasan

Program prioritas yang akan dilaksanakan adalah program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH,

kegiatan diarahkan pada pelaksanaan pengawasan internal 144 obrik; implementasi spis aada 23 dokumen; pencegahan dan pemberantasan pungutan liar 12 laporan

program ini diarahkan pada pencapaian indikator persentase jumlah laporan hasil pengawasan 100%; persentase jumlah tindak lanjut yang terselesaikan 87%; persentase dokumen SPIP PD yang memadai 70%; serta angka capaian nilai aksi pencegahan korupsi 80%.

6. Fungsi Lainnya

Program prioritas yang akan dilaksanakan adalah:

- a. program pelayanan publik kecamatan
kegiatan diarahkan pada penyelenggaraan pelayanan terpadu kecamatan (PATEN);
program ini diarahkan pada pencapaian indikator persentase pelayanan publik sesuai SOP dan SP;
- b. program peningkatan penyelenggaraan pemerintahan kecamatan
kegiatan diarahkan pada peningkatan tata kelola kecamatan pemerintahan desa/kelurahan; peningkatan keberdayaan dan partisipasi masyarakat dalam membangun desa; peningkatan kualitas kesejahteraan masyarakat; dan Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Wawasan Kebangsaan.
program ini diarahkan pada pencapaian indikator persentase kegiatan yang dikoordinasikan dan persentase desa yang tertib administrasi;
- c. program peningkatan pelayanan kedinasan DPRD
kegiatan diarahkan pada penyusunan dan pembahasan produk hukum; peningkatan kapasitas DPRD; kegiatan reses DPRD; pelayanan kehumasan dan publikasi DPRD
program ini diarahkan pada pencapaian indikator persentase pemenuhan fasilitasi raperda 83%; persentase pemenuhan fasilitasi kebijakan anggaran 100%; dan Persentase Pemenuhan Fasilitasi Rekomendasi DPRD 100%.
- d. program penataan peraturan perundang-undangan dan bantuan hukum
kegiatan diarahkan pada Perencanaan, Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi serta Asistensi Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah 23 dokumen; Penyusunan Peraturan Bupati/Peraturan Bersama Kepala Daerah, Keputusan Bupati dan Keputusan Kepala Perangkat Daerah 520 dokumen penanganan permasalahan hukum 27 kasus dan harmonisasi konsep kesepakatan bersama dan/atau perjanjian kerjasama 30 konsep;
program ini diarahkan pada pencapaian indikator persentase produk hukum daerah yang disusun tepat asas 100%; persentase kesesuaian produk hukum daerah yang dikaji sesuai asas 100%; serta persentase permasalahan hukum yang didampingi 100%;
- e. program perumusan dan pengendalian kebijakan pemerintahan
kegiatan diarahkan pada Peningkatan Koordinasi dan Evaluasi Pelayanan Publik Bidang Pemerintahan Umum; fasilitasi

penyelenggaraan otonomi daerah dan standar pelayanan minimal (SPM); fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan desa.

program ini diarahkan pada pencapaian indikator persentase kebijakan pemerintahan yang dijalankan 90%;

- f. program perumusan dan pengendalian kebijakan kesejahteraan rakyat dan kemasyarakatan

kegiatan diarahkan pada peningkatan koordinasi dan harmonisasi kebijakan kesejahteraan sosial; peningkatan koordinasi dan harmonisasi kebijakan bidang agama, pendidikan dan budaya;

program ini diarahkan pada pencapaian indikator cakupan perumusan dan pengendalian kebijakan kesejahteraan rakyat dan kemasyarakatan 100%;

- g. program perumusan dan pengendalian kebijakan perekonomian

kegiatan diarahkan pada pembinaan BUMD; Pelaksanaan Kegiatan Pendukung Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat; pelaksanaan kegiatan pendukung stabilitas ekonomi masyarakat; Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Program DBHCHT; dan Pengendalian, Pengawasan, Monitoring dan Pelaporan Peredaran Pupuk dan LPG Bersubsidi.

program ini diarahkan pada pencapaian indikator persentase kebijakan perekonomian yang dijalankan 100%; persentase BUMD yang berkinerja baik 100%; serta persentase peningkatan sumbangan BUMD pada PAD 12%;

- h. program perumusan dan pengendalian kebijakan pembangunan

kegiatan diarahkan pada Administrasi Perencanaan Pembangunan; penyusunan LKPJ; dan pengendalian, evaluasi dan pelaporan administrasi pembangunan;

program ini diarahkan pada pencapaian indikator cakupan penyusunan pedoman perencanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pembangunan daerah 100%;

- i. program pengembangan kelembagaan, tata laksana dan peningkatan kinerja organisasi;

kegiatan diarahkan pada peningkatan kesesuaian kelembagaan OPD terhadap peraturan perundangan; peningkatan kualitas pelayanan publik perangkat daerah; peningkatan kinerja organisasi perangkat daerah; dan Pengembangan Kebijakan Pendayagunaan Aparatur Daerah dan Reformasi Birokrasi.

program ini diarahkan pada pencapaian indikator persentase dokumen kelembagaan yang ditindaklanjuti 100%; persentase dokumen ketatalaksanaan yang diterapkan 100%; persentase unit pelayanan publik yang mendapat nilai baik 100%; serta persentase dokumen evaluasi kinerja PD yang disusun tepat waktu 100%;

- j. program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah;
kegiatan diarahkan pada Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor; Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Jabatan; Pemeliharaan dan Rehabilitasi Rumah Jabatan; Pemeliharaan Kendaraan Dinas Jabatan; fasilitasi kegiatan kepala daerah dan wakil kepala daerah; Penyelenggaraan Rapat Dinas dan Penerimaan Tamu.
program ini diarahkan pada pencapaian indikator cakupan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah 100%;
- k. program peningkatan kualitas pengadaan barang/jasa;
kegiatan diarahkan pada pengelolaan pengadaan barang/jasa; pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik; pembinaan dan advokasi pengadaan barang/jasa;
program ini diarahkan pada pencapaian indikator indeks kematangan UKPBJ 4 level;
- l. program kehumasan dan layanan keprotokolan;
kegiatan diarahkan pada analisis pemberitaan, naskah pidato, dan dokumentasi; peliputan, editorial, dan publikasi; serta layanan keprotokolan
program ini diarahkan pada pencapaian indikator cakupan kinerja kehumasan dan layanan keprotokolan 100%.

Dalam rangka mendukung operasional perangkat daerah, disediakan program pendukung operasional perangkat daerah, yaitu:

1. Program manajemen administrasi pelayanan umum, dan kepegawaian perangkat daerah;
kegiatan diarahkan pada pengelolaan surat menyurat, kearsipan dan bahan pustaka; penyelenggaraan koordinasi dan konsultasi perangkat daerah; pengadaan dan pengelolaan perlengkapan dan peralatan gedung kantor, rumah dinas dan gedung pemerintah lainnya; pengadaan dan pengelolaan perlengkapan dan peralatan gedung kantor, rumah dinas dan gedung pemerintah lainnya; pemeliharaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor, rumah dinas dan gedung pemerintah lainnya; rehabilitasi sedang/berat gedung kantor, rumah dinas dan gedung pemerintah lainnya; peningkatan kapasitas dan disiplin aparatur sipil negara;
2. Program perencanaan, keuangan dan evaluasi kinerja perangkat daerah;
kegiatan diarahkan pada penyediaan jasa administrasi keuangan; penyediaan jasa administrasi keuangan; penyusunan laporan kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja perangkat daerah; penyusunan dokumen norma, standar, prosedur, dan kriteria perangkat daerah; sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah;

Adapun program prioritas pembangunan daerah dan kegiatan beserta kerangka pendanaannya secara rinci dapat dilihat pada Lampiran.

Di samping program prioritas pembangunan daerah, program unggulan yang disebut “Dasa Cita” juga perlu mendapat perhatian bersama. Adapun implementasi prioritas pembangunan dan program unggulan dapat dilihat pada tabel 6.2.

Tabel 6.2.
Implementasi Prioritas Pembangunan dan Program Unggulan

No.	Program Unggulan	Nomenklatur Program dan Kegiatan	Uraian Kegiatan	Vol	Satuan	Lokasi	Sumber Pembiayaan	Perangkat Daerah Pelaksana	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Kehidupan beragama dan akhlak mulia								
	a. Pembangunan <i>Islamic center</i>		Pembangunan Islamic centre, kerjasama pemerintah provinsi dan kabupaten			Kelurahan Sawitan Kecamatan Mungkid	APBD Provinsi		Pemerintah kabupaten telah menyediakan tanah seluas 1,6 ha. Kekurangan luasan lahan dipenuhi oleh Pemprov (3,4 ha)
	c. Bantuan Pembangunan tempat ibadah	Belanja Transfer	Belanja Hibah untuk pembangunan tempat ibadah			21 kecamatan	APBD	Bagian Kesra	Pemberian hibah uang untuk pembangunan tempat ibadah, @ maksimal Rp.10 juta
	d. Bantuan kepada ormas keagamaan, pesantren, madrasah diniyah, TPA, TPQ, majelis taklim sebagai penguatan pendidikan karakter.	Belanja Transfer	Belanja Hibah kepada ormas keagamaan dan pesantren				APBD	Bagian Kesra	Pemberian hibah uang untuk ormas keagamaan dan pesantren
	e. Peningkatan kesejahteraan guru ngaji	Belanja transfer	Belanja Hibah uang kepada guru mengaji dan guru rohani di lembaga non fromal			21 kecamatan	APBD	Bagian Kesra	Pemberian hibah uang per orang per tahun Rp.1.200.000,00
2	Pendidikan								
	a. Pemberian beasiswa bagi siswa miskin dan mahasiswa miskin	Belanja Bantuan Sosial	Beasiswa SD	630	Siswa	21 kecamatan	APBD	Disdikbud	Beasiswa bagi siswa miskin pada jenjang SD
			Beasiswa SMP	1.500	Siswa	21 kecamatan	APBD	Disdikbud	Beasiswa bagi siswa miskin pada jenjang SMP

No.	Program Unggulan	Nomenklatur Program dan Kegiatan	Uraian Kegiatan	Vol	Satuan	Lokasi	Sumber Pembiayaan	Perangkat Daerah Pelaksana	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Program Indonesia Pintar (PIP) SD	52.000	Siswa	21 kecamatan	APBN	Disdikbud	Beasiswa bagi siswa miskin pada jenjang SD per orang/tahun Rp. 450.000,-
			Program Indonesia Pintar (PIP) SMP	16.650	Siswa	21 kecamatan	APBN	Disdikbud	Beasiswa bagi siswa miskin pada jenjang SMP per orang/tahun Rp. 750.000,-
	b. Meningkatkan sarana dan prasarana fasilitas pendidikan	Program Pendidikan Sekolah Dasar							
		Peningkatan Mutu Sarana Prasarana Pendidikan SD Negeri, Swasta	Peningkatan Sarpras SD	50	Sekolah	21 kecamatan	APBD	Disdikbud	Sumber Dana APBD Kabupaten
		Peningkatan Mutu Sarana Prasarana Pendidikan SD Negeri, Swasta (DAK)	Peningkatan Sarpras SD	226	sekolah	21 kecamatan	APBD	Disdikbud	sumber dana DAK
		Program Pendidikan Sekolah Menengah Pertama							
		Peningkatan Mutu Sarana Prasarana Pendidikan SMP Negeri, Swasta							
			pembangunan talud & pagar sekolah	12	Paket	Kab. Magelang	APBD	Disdikbud	
			pengadaan media pembelajaran	273	Unit	Kab. Magelang	APBD	Disdikbud	
			pengadaan genset	26	Unit	Kab. Magelang	APBD	Disdikbud	
			pengadaan komputer jaringan	18	Paket	Kab. Magelang	APBD	Disdikbud	

No.	Program Unggulan	Nomenklatur Program dan Kegiatan	Uraian Kegiatan	Vol	Satuan	Lokasi	Sumber Pembiayaan	Perangkat Daerah Pelaksana	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Program Pendidikan Sekolah Menengah Pertama							
		Peningkatan mutu sarana prasarana PAUD dan Dikmas							
			Jumlah PAUD yang menerima APE (88 PAUD)	50	PAUD	Kab. Magelang	APBD	Disdikbud	
			Jumlah lembaga PAUD yang menerima Bantuan Sarpras (88 PAUD)	50	PAUD	Kab. Magelang	APBD	Disdikbud	
			Jumlah Lembaga LKP/PKBM yang menerima bantuan Sarpras	5	Lembaga	Kab. Magelang	APBD	Disdikbud	
	c. Meningkatkan kesejahteraan Guru Tidak Tetap/ Pegawai Tidak Tetap pada sekolah swasta dan negeri termasuk guru PAUD/ TK.	Untuk sekolah negeri : Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS)							
		Untuk Sekolah swasta : masuk ke dalam belanja hibah	GTT lulus uji kompetensi (UMK)	1.444	Orang	Kab. Magelang	APBD	Disdikbud	Besaran bantuan per orang/bulan sebesar Rp.2.042.200,00. Diberikan selama 1 tahun.
			PTT lulus uji kompetensi (Rp. 1 juta)	792	Orang	Kab. Magelang	APBD	Disdikbud	Besaran bantuan per orang/bulan sebesar Rp. 1.000.000,00. Diberikan selama 1 tahun.

No.	Program Unggulan	Nomenklatur Program dan Kegiatan	Uraian Kegiatan	Vol	Satuan	Lokasi	Sumber Pembiayaan	Perangkat Daerah Pelaksana	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			GTT dan PTT tidak lulus uji kompetensi masa kerja >20 tahun	3	Orang	Kab. Magelang	APBD	Disdikbud	Besaran bantuan per orang/bulan sebesar Rp.1.000.000,00. Diberikan selama 1 tahun.
			GTT tidak lulus uji kompetensi masa kerja 10-20 tahun	25	Orang	Kab. Magelang	APBD	Disdikbud	Besaran bantuan per orang/bulan sebesar Rp.850.000,00. Diberikan selama 1 tahun.
			PTT tidak lulus uji kompetensi masa kerja 10-20 tahun	6	Orang	Kab. Magelang	APBD	Disdikbud	Besaran bantuan per orang/bulan sebesar Rp.800.000,00. Diberikan selama 1 tahun.
			GTT tidak lulus uji kompetensi masa kerja 5-10 tahun	17	Orang	Kab. Magelang	APBD	Disdikbud	Besaran bantuan per orang/bulan sebesar Rp.750.000,00. Diberikan selama 1 tahun.
			PTT tidak lulus uji kompetensi masa kerja 5-10 tahun	15	Orang	Kab. Magelang	APBD	Disdikbud	Besaran bantuan per orang/bulan sebesar Rp.700.000,00. Diberikan selama 1 tahun.
	d. Peningkatan kompetensi tenaga pendidik dan kependidikan melalui beasiswa sekolah lanjut	Program Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan							
		Peningkatan Kompetensi Guru dan Tenaga Pendidian							

No.	Program Unggulan	Nomenklatur Program dan Kegiatan	Uraian Kegiatan	Vol	Satuan	Lokasi	Sumber Pembiayaan	Perangkat Daerah Pelaksana	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Beasiswa sekolah lanjut (S1)	5	Orang	Kab. Magelang	APBD		Pemberian beasiswa sekolah lanjut berupa biaya SPP bagi tenaga pendidik per orang/semester maksimal Rp.2.500.000,00
			Beasiswa sekolah lanjut (S2)	5	orang	Kab. Magelang	APBD		Pemberian beasiswa sekolah lanjut berupa biaya SPP bagi tenaga pendidik per orang/semester maksimal Rp.5.000.000,00
			Pendidikan Profesi Guru	20	orang	Kab. Magelang	APBD		Pemberian bantuan biaya PPG berupa biaya SPP bagi tenaga pendidik per orang maksimal Rp.7.500.000,00
	e. Peningkatan dan pengembangan Sekolah Menengah Atas dan Kejuruan.		Advokasi ke pemerintah provinsi					Pemprov Jateng	Fasilitasi peningkatan dan pengembangan SMA dan SMK ke pemerintah Provinsi
	f. Penyiapan tenaga kerja terdidik yang siap kerja baik melalui pendidikan formal maupun nonformal.	Program Pengembangan Kompetensi, Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja							
		Pelatihan Ketrampilan dan Sertifikasi Tenaga Kerja	Fasilitasi pelatihan bagi pencari kerja dan ujian Sertifikasi bagi tenaga kerja yang memenuhi kualifikasi keterampilan	128	orang	Balai Latihan Kerja Kab. Magelang	APBD	Disperinaker	Peningkatan keahlian/keterampilan bagi pencari kerja

No.	Program Unggulan	Nomenklatur Program dan Kegiatan	Uraian Kegiatan	Vol	Satuan	Lokasi	Sumber Pembiayaan	Perangkat Daerah Pelaksana	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			jumlah pencaker miskin yang mengikuti seleksi magang	50	orang	Kab. Magelang		Disperinaker	
		Program Pembinaan Hubungan Industrial dan Produktivitas Pekerja							
			Prosentase Izin LPKS yang diterbitkan (100%)	100	Persen	Kab. Magelang	APBD	Disperinaker	
3	Kesehatan								
	a. Bantuan Ambulan desa.	Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK)	Bantuan kepada Pemerintah Desa			Kab. Magelang	APBD	Dinkes	bantuan sarana ambulan untuk desa.
	b. Mengoptimalkan layanan Puskesmas Rawat Inap	Program Pelayanan Kesehatan							
		Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)	Jumlah FKTP	54	FKTP				Peningkatan sarana dan prasarana fasilitas kesehatan tingkat Pertama
	c. Peningkatan puskesmas menjadi rumah sakit tanpa kelas (Grabag dan Salaman).	Program Pelayanan Kesehatan							
		Pelayanan RS Candi Umbul	Pelayanan RS tanpa kelas (Grabag dan Salaman)	2	RSUD	Salaman dan Grabag	APBD	Dinkes	Peningkatan status Puskes-mas rawat inap menjadi rumah sakit tanpa kelas (Grabag 1 dan Salaman 1)
		Pelayanan RS Bukit Menoreh							

No.	Program Unggulan	Nomenklatur Program dan Kegiatan	Uraian Kegiatan	Vol	Satuan	Lokasi	Sumber Pembiayaan	Perangkat Daerah Pelaksana	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	d. Peningkatan pelayanan rumah sakit umum daerah	Pelayanan RS Merah Putih	Melengkapi kekurangan persyaratan, sarana prasarana dan SDM	1	RSUD	Blondo, Mertoyudan	APBD	Dinkes	Pelayanan rumah sakit baru bisa berjalan sesuai dengan tahapan standar pelayanan rumah sakit
		Program Peningkatan Kualitas Puskesmas dan Rumah Sakit (BLUD)							
		Pelayanan dan Pendukung Pelayanan Rumah Sakit	Meningkatkan pelayanan sesuai standar pelayanan	1	RSUD	Muntilan	BLUD	RSUD Muntilan	
		Akreditasi Rumah Sakit	Meningkatkan nilai akreditasi RS menjadi Type C paripurna	1	RSUD	RSUD Muntilan	BLUD	RSUD Muntilan	
		Pembinaan Akreditasi Puskesmas	Mewujudkan puskesmas terakreditasi	29	Puskesmas	kecamatan	APBD/DAK	Dinkes	
	e. Peningkatan sarana prasarna puskesmas dan rumah sakit	Program Peningkatan Kualitas Puskesmas dan Rumah Sakit							
		Pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana	Pengadaan sarana dan prasarana	2	paket	32 UPT	DAK	Dinkes	Pengadaan sarana : Pembangunan Gedung IFK, Pembangunan Gedung Labkes Pengadaan prasarana : Pengadaan mobil Promosi Kesehatan , Pengadaan IPAL, pengadaan cold storage, pengadaan lansia kit, pengadaan posyandu kit, pengadaan UKS kit,

No.	Program Unggulan	Nomenklatur Program dan Kegiatan	Uraian Kegiatan	Vol	Satuan	Lokasi	Sumber Pembiayaan	Perangkat Daerah Pelaksana	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									pengadaan Alkes Labkesda,
	g. Peningkatan kuantitas dan kualitas SDM kesehatan.	Program Sumber Daya Kesehatan							
		Perencanaan, Peningkatan Kapasitas, Penilaian, Pembinaan Sarana dan Tenaga Kesehatan	Tterlatihnya tenaga kesehatan (dokter, bidan, perawat, pelaksana Gizi) di puskesmas serta pembinaan perijinan nakes di fasyankes				APBD	Dinkes, RSUD dan BKPPD	
4	Penanggulangan Kemiskinan								
	a. RTLH Plus untuk meningkatkan pendapatan keluarga miskin.	Belanja Bansos	Pemberian bantuan stimulan bagi masyarakat miskin agar memiliki rumah yang layak huni, bersanitasi layak.	1.500	unit	21 Kecamatan	APBD	DPRKP	RTLH mengacu pada data BDT. Besar bantuan Rp. 15 jt per unit.
	b. Optimalisasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) di semua Tingkatan (kabupaten, kecamatan, desa, dusun)	Program Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan, Sosial dan Budaya							
		Perencanaan Sektor Kesejahteraan Sosial	Peningkatan kapasitas anggota TPK kecamatan dan Desa (Bimtek), Pelaksanaan Monev dan Pemberian TPK Awards bagi TPK Desa dengan kinerja yang terbaik	2	dokumen	Kab. Magelang	APBD	Bappeda dan Litbangda	Peningkatan kapasitas anggota TPK kecamatan dan Desa (Bimtek), Pelaksanaan Monev dan Pemberian TPK Awards bagi TPK Desa dengan kinerja yang terbaik

No.	Program Unggulan	Nomenklatur Program dan Kegiatan	Uraian Kegiatan	Vol	Satuan	Lokasi	Sumber Pembiayaan	Perangkat Daerah Pelaksana	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Program Pemberdayaan Sosial							
		Optimalisasi Data Kemiskinan	Verifikasi dan validasi data kemiskinan oleh desa dibawah koordinasi Dinsos			Kab. Magelang	APBD	Dinsos, PPKB, PPPA	
		Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan							
		Peningkatan Kualitas Kesejahteraan Masyarakat	Koordinasi pemutakhiran data kemiskinan per desa, serta pelaporan kegiatan/aktivitas penanggulangan kemiskinan di desa			Kab. Magelang	APBD	21 kecamatan	
	c. Optimalisasi Pelayanan Kesehatan Bagi Warga Miskin, Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan difabel, Jamkes "Semesta"	Program Pemberdayaan Sosial							
		Fasilitasi Program Bantuan Sosial, Pangan	Jumlah KPM penerima Bantuan Sosial Pangan yang terfasilitasi (Gulkin)	76,495	KPM	Kab. Magelang	APBD	Dinsos PPKB PPPA	
			Penanganan PMKS Melalui Rumah Singgah	60	kelompok	Kab. Magelang	APBD		
		Optimalisasi Data Kemiskinan	Jumlah verifikasi dan validasi data Basic Data Terpadu (BDT) dan Data PMKS (Gulkin)	12.000	KK	Kab. Magelang	APBD		Verifikasi dan Validasi untuk pemutakhiran warga miskin

No.	Program Unggulan	Nomenklatur Program dan Kegiatan	Uraian Kegiatan	Vol	Satuan	Lokasi	Sumber Pembiayaan	Perangkat Daerah Pelaksana	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Penanganan Fakir Miskin	Jumlah Fakir Miskin yang diberdayakan (Gulkin)	150	orang	Kab. Magelang	APBD		
		Program Pelayanan Kesehatan							
		Pelayanan kesehatan Masyarakat Miskin (Maskin) Non JAMKESMAS (Gulkin)	Pembiayaan Iuran BPJS bagi masyarakat miskin dan pembiayaan jamkesda non peserta BPJS	68.000	jiwa	Kab. Magelang	APBD	Dinkes	Pemberian Kartu Indonesia Sehat (KIS) yang dibayarkan tahun 2021 sebanyak ± 68.000 jiwa.
									Presentase pembayaran Klaim Masyarakat Miskin (Maskin) yang benar (100%)
		Belanja Tidak Langsung: Belanja Bantuan Sosial (Bansos)	Melakukan verifikasi dan rekomendasi untuk pemberian bantuan sosial berupa, bantuan biaya rawat inap di rumah sakit bagi pasien non peserta BPJS dan non jamkesda (Bansos Tak terencana)			RS yang bekerjasama dengan pemkab Magelang	APBD	BPKAD dan Dinsos PPKB PPPA	Perlindungan dan Jaminan Sosial, serta Bantuan Sosial (Bansos Tak Terencana)
	d. Bantuan Modal dan Alat bagi warga miskin	Program Peningkatan Ketahanan Pangan							
		Pengembangan olahan pangan lokal berbasis agribisnis	Pelatihan, Pembinaan dan bantuan pada pengembangan olahan pangan lokal untuk diversifikasi pangan	21	kelompok	Kab. Magelang	DBHCHT	Distanpangan	Sasaran utama program adalah kepala rumah tangga miskin yang mata pencahariannya sebagai buruh tani dan
		Peningkatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan	Pembinaan dan Pemberian bantuan bibit tanaman, ternak dan ikan pada	21	Lokasi	21 Kecamatan	DAK	Distan Pangan	Membantu Kemandirian dalam pemenuhan pangan keluarga

No.	Program Unggulan	Nomenklatur Program dan Kegiatan	Uraian Kegiatan	Vol	Satuan	Lokasi	Sumber Pembiayaan	Perangkat Daerah Pelaksana	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			masyarakat						
		Pengelolaan Cadangan pangan daerah	Menyiapkan bahan pangan sebagai cadangan pangan saat kondisi rawan pangan	25	Ton	Kab. Magelang	APBD	Distan Pangan	Menyiapkan pangan gabah untuk memenuhi kebutuhan daerah yang mengalami kerawanan pangan
		Program Pengembangan Kompetensi, Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja							
		Kegiatan Pelatihan Ketrampilan dan Sertifikasi Tenaga Kerja	jumlah pencaker miskin yang mengikuti seleksi magang	50	orang	(Balai Latihan Kerja Kab. Magelang)	APBD	Disperinaker	Sebagai persiapan bagi pencaker dari warga miskin untuk mengikuti seleksi magang yang difasilitasi Provinsi Jateng
5	Pengembangan Pertanian, Pariwisata dan UMKM								
	a. Pengembangan agribisnis berorientasi pasar termasuk Pertanian Organik	Program Peningkatan Daya Saing Produk Pertanian							
		Peningkatan Daya Saing Tanaman Semusim perkebunan	Pengadaan sarana pasca panen perkebunan	10	Kelompok	Windusari, Ngablak Ngluwar, Muntilan, Pakis, sawangan, Borobudur, Kaliangkrik	DBHCHT	Distan dan pangan	
		Program Peningkatan Produksi Hasil							

No.	Program Unggulan	Nomenklatur Program dan Kegiatan	Uraian Kegiatan	Vol	Satuan	Lokasi	Sumber Pembiayaan	Perangkat Daerah Pelaksana	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Peternakan							
		Pengembangan Sarana Prasarana Peternakan	Penyediaan sarana prasarana peternakan (unit)	10	kelompok	Kab. Magelang	APBD	Dispeterikan	
		Peningkatan Pelayanan Inseminasi Buatan	akseptor yang mendapat pelayanan Inseminasi Buatan (ekor)	9000	ekor	Kab. Magelang	APBD	Dispeterikan	
		Pengembangan Itik Magelang (DBHCHT)	Pembinaan, Pemberian bantuan pada kelompok pembudidaya Itik	20	kelompok	Kab. Magelang	DBHCHT	Dispeterikan	Penguatan kelompok ternak itik Magelang untuk meningkatkan populasi itik magelang
		Pengembangan Sarana Prasarana Peternakan (DBHCHT)	Pendampingan dan Pemberian bantuan sarana prasarana peternakan bagi kelompok ternak	10	Kelompok	Kab. Magelang	DBHCHT	Dispeterikan	Penguatan kelompok peternak
		Program Pengembangan Budidaya Perikanan, Kesehatan Ikan dan Lingkungan							
		Peningkatan Kapasitas dan Revitalisasi BBI Lokal	produksi benih ikan BBI	4 juta	ekor	Kab. Magelang	APBD	Dispeterikan	
	b. Pengembangan pariwisata dengan melindungi kearifan lokal dan berbasis masyarakat	Program Peningkatan Sarana Prasarana dan Industri Pariwisata							
		Peningkatan Kapasitas SDM Pelaku Usaha Pariwisata	Pelatihan dan pembinaan SDM Pokdarwis	38	Orang	Kab. Magelang	APBD	Disparpora	1) Pengembangan destinasi wisata berbasis masyarakat
									2) Pembinaan desa wisata

No.	Program Unggulan	Nomenklatur Program dan Kegiatan	Uraian Kegiatan	Vol	Satuan	Lokasi	Sumber Pembiayaan	Perangkat Daerah Pelaksana	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Program Pengembangan Kelembagaan, Pemasaran Pariwisata dan ekonomi kreatif	Pelatihan dan pembinaan usaha pariwisata	5	kelompok	Kab. Magelang	APBD	Disparpora	
		Pembinaan Komunitas/ Pelaku Ekonomi Kreatif	Fasilitasi komunitas ekonomi kreatif	6	komunitas	Kab. Magelang	APBD	Disparpora	Pembinaan komunitas pelaku ekonomi kreatif
	c. Pengembangan destinasi pariwisata potensial dan strategis	Program Pengembangan Kelembagaan, Pemasaran Pariwisata dan ekonomi kreatif							
		Pemasaran dan promosi Pariwisata	Fasilitasi pelaksanaan even, pengembangan pemasaran dan promosi DTW serta pengembangan jaringan pariwisata	4	kegiatan	Kab. Magelang	APBD	Disparpora	1) Pengembangan promosi DTW unggulan Kabupaten Magelang yang dikelola Pemkab atau masyarakat
									2) Membangun <i>Destination Branding</i> dalam meningkatkan citra wisata Magelang
	d. Pembangunan Pusat Seni Budaya dan Pariwisata/ Anjungan Cerdas		Dalam rangka pengembangan KSPN Borobudur, direncanakan Pembangunan DTW pariwisata yang terintegrasi. Pusat informasi wisata cinderamata, kuliner atraksi dan pertunjukan seni dan budaya, dan rest area	1	paket		APBN		Fasilitasi dan advokasi ke Pemerintah Pusat

No.	Program Unggulan	Nomenklatur Program dan Kegiatan	Uraian Kegiatan	Vol	Satuan	Lokasi	Sumber Pembiayaan	Perangkat Daerah Pelaksana	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	e. Pemberdayaan UKM dan Koperasi berbasis sumberdaya lokal	Program Pemberdayaan Usaha Mikro							
		Peningkatan Kapasitas SDM dan Sarana Prasarana bagi Usaha Mikro	Pelatihan dan fasilitasi hibah bansos bagi usaha mikro	200	Orang	Kab. Magelang	APBD	Disdagkop UKM	Pelatihan manajemen, dan pengelolaan usaha bagi pelaku usaha mikro
		Penguatan Kelembagaan dan Legalitas Usaha	Fasilitasi perijinan usaha bagi UMKM	30	UMKM	Kab. Magelang	APBD	Disdagkop UKM	
6	Sarana dan Prasarana Publik								
		Program Peningkatan akses dan kualitas jalan							
	a. Peningkatan infrastruktur (jalan, jembatan, bendung, embung, irigasi, dan sarana ekonomi).	Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Pelengkap Jalan	Rehab/pemeliharaan untuk mempertahankan kemantapan jalan/kondisi baik jalan maupun pelengkap jalan:			Kab. Magelang			
			a. peningkatan jalan dan (b.) jalan kondisi baik				APBD	DPUPR	Sasaran rehab/pemeliharaan jalan adalah jalan kabupaten di 6 wilayah UPT yang mengalami kerusakan berat
			c.trotoar				APBD	DPUPR	Sasaran rehab/pemeliharaan trotoar adalah trotoar jalan kabupaten di 6 wilayah UPT yang mengalami kerusakan berat

No.	Program Unggulan	Nomenklatur Program dan Kegiatan	Uraian Kegiatan	Vol	Satuan	Lokasi	Sumber Pembiayaan	Perangkat Daerah Pelaksana	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			d.drainase				APBD	DPUPR	Sasaran rehab/pemeliharaan drainase adalah drainase jalan kabupaten di 6 wilayah UPT yang mengalami kerusakan berat
		Program Peningkatan layanan Sumber Daya Air dan Jaringan irigasi							
		Pemeliharaan Jaringan Irigasi	Pembangunan jaringan irigasi di wilayah Daerah Irigasi untuk meningkatkan luas daerah sawah DI yang dialiri:			Kab. Magelang	APBD	DPUPR	pembangunan saluran irigasi dan bangunan irigasi, pembangunan embun
			sawah	898,455	Ha		APBD	DPUPR	
			Bangunan Irigasi	10	Unit		APBD	DPUPR	
		Rehabilitasi / Pembangunan Jaringan Irigasi	Pembangunan/Rehab bangunan irigasi untuk menjaga bangunan irigasi dan Jaringan DI kondisi baik			Kab. Magelang			
			jaringan DI	6,475	M		APBD	DPUPR	
			Bangunan Irigasi	18	Unit	Kab. Magelang	APBD	DPUPR	
		Pembangunan dan Rehabilitasi Bangunan Gedung Pemerintah	Pembangunan dan rehabilitasi bangunan Gedung pemerintah untuk menjadikan Gedung yang layak fungsi						Penataan bangunan Gedung kantor di Komplek Setda Kabupaten Magelang untuk mencukupi kebutuhan SOTK.

No.	Program Unggulan	Nomenklatur Program dan Kegiatan	Uraian Kegiatan	Vol	Satuan	Lokasi	Sumber Pembiayaan	Perangkat Daerah Pelaksana	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									Pembangunan landmark di kawasan perbatasan,
			Pembangunan	1	Unit	Gedung VIP dan rawat inap kelas di RSDMP	APBD	DPUPR	
			Rehab Gedung	4	Unit		APBD	DPUPR	
		Program Manajemen Administrasi Pelayanan Umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah							
			Perluasan tanah kantor kecamatan Windusari	5.000	M2		APBD	BPPKAD	
		Peningkatan dan Pengembangan Layanan Air Minum	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum untuk peningkatan Akses layanan air minum ke Sambungan Rumah dengan perpipaan	4	desa	Kab. Magelang	APBD	DPUPR	
	b. Peningkatan aksesibilitas dan konektivitas di seluruh wilayah Kabupaten Magelang untuk mengoptimalkan potensi di masing- masing wilayah	Program Pengembangan Jaringan Prasarana Angkutan Jalan							
		Pemeliharaan dan Pengembangan Prasarana Sarana Perhubungan							

No.	Program Unggulan	Nomenklatur Program dan Kegiatan	Uraian Kegiatan	Vol	Satuan	Lokasi	Sumber Pembiayaan	Perangkat Daerah Pelaksana	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Peningkatan Pengelolaan Terminal Angkutan Darat							
			Peningkatan pengelolaan terminal angkutan darat	6	lokasi	Kab. Magelang	APBD	Dinas Perhubungan	
		Pengembangan Pelayanan Angkutan	Penataan dan Pembinaan Angkutan	2	Trayek	Kab. Magelang	APBD	Dinas Perhubungan	
		Program Peningkatan Pengamanan dan Keselamatan Lalu Lintas							
		Pengelolaan LPJU	Pembangunan dan Pemeliharaan LPJU	3,000	Titik	Kab. Magelang	APBD	Dinas Perhubungan	Pemeliharaan pada 3.000 titik LPJU dengan prioritas yang mengalami kerusakan
		Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perlengkapan Jalan	Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkap Jalan						
			Rambu,	70	buah	Kab. Magelang	APBD	Dinas Perhubungan	
			Guardrill,	600	meter	Kab. Magelang	APBD	Dinas Perhubungan	
			Marka,	3.908	meter	Kab. Magelang	APBD	Dinas Perhubungan	
			Zebra Cross,	10	lokasi	Kab. Magelang	APBD	Dinas Perhubungan	
			APILL	18	buah	Kab. Magelang	APBD	Dinas Perhubungan	
7	Lingkungan Hidup								

No.	Program Unggulan	Nomenklatur Program dan Kegiatan	Uraian Kegiatan	Vol	Satuan	Lokasi	Sumber Pembiayaan	Perangkat Daerah Pelaksana	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	a. Pengelolaan Borobudur, Merapi dan Sumbing berbasis konservasi untuk kesejahteraan masyarakat	Program Peningkatan Kapasitas dan Tata Lingkungan Hidup							
		Penanganan Kasus dan Penaatan Lingkungan Hidup;	Fasilitasi penyelesaian aduan kasus lingkungan hidup	25	Kasus	Kab. Magelang	APBD	DLH	1) Pengendalian pemanfaatan ruang melalui ijin lingkungan
									2) Implementasi Kampung Proklam, mata air yang dikonservasi, konservasi di kawasan rawan bencana dan resapan air
		Fasilitasi Pelayanan dan Pengawasan Dokumen Lingkungan Hidup.	fasilitasi perijinan lingkungan hidup dan monitoring perijinan lingkungan hidup	1,437	Unit Usaha	Kab. Magelang	APBD	DLH	
		Program Konservasi Sumber Daya Alam dan Mitigasi Dampak Perubahan Iklim							
		Pengendalian dan Adaptasi Perubahan Iklim.	Menginisiasi dan mengawal:						
			Sekolah Adiwiyata,	50	Sekolah	Kab. Magelang	APBD	DLH	
			Kalpataru	1	Kalpataru	Kab. Magelang	APBD	DLH	
			Kampung Iklim	35	Desa Proklam	Kab. Magelang	APBD	DLH	
	b. Pengelolaan Sampah Mandiri (3R) dan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat								

No.	Program Unggulan	Nomenklatur Program dan Kegiatan	Uraian Kegiatan	Vol	Satuan	Lokasi	Sumber Pembiayaan	Perangkat Daerah Pelaksana	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengurangan Sampah.	Menginisiasi dan mengawal memfasilitasi Bank Sampah	100	Bank Sampah	Kab. Magelang	APBD	DLH	1) Pembentukan bank sampah, pembinaan pengelola bank sampah
									2) Bantuan hibah alat pengolah sampah pada kelompok pengolah sampah berbasis masyarakat;
									3) Pengawasan ditujukan pada lebih dari 600 Bank Sampah yang telah terbentuk sd tahun 9
	c. Penyediaan sarana dan prasarana persampahan	Penyediaan Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah;	Penyediaan Sarana Penanganan Sampah dari hulu sampai dengan hilir	1	TPST	Kab. Magelang	APBD	DLH	1) Pembangunan TPST, TPS 3R, TPSS
									2) Revitalisasi TPA
	d. Konservasi lingkungan hidup termasuk perlindungan mata air.	Program Konservasi Sumber Daya Alam dan Mitigasi Dampak Perubahan Iklim							
		Konservasi Kawasan Resapan Air;	Upaya mempertahankan fungsi Kawasan resapan air	60	ha	Kab. Magelang	APBD	DLH	Konservasi mata air
		Konservasi Lahan Kritis dan Rawan Bencana	Pengelolaan lahan untuk pengurangan lahan kritis di Daerah Rawan Bencana	50	Ha	Kab. Magelang	APBD	DLH	Konservasi lahan kritis
	e. Pengembangan Ruang Terbuka Hijau dan Penataan Hunian Kumuh	Program Peningkatan Kinerja Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau							

No.	Program Unggulan	Nomenklatur Program dan Kegiatan	Uraian Kegiatan	Vol	Satuan	Lokasi	Sumber Pembiayaan	Perangkat Daerah Pelaksana	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Peningkatan Kinerja Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Publik	Pengelolaan dan peningkatan kualitas taman dan Ruang Terbuka Publik	65	RTH	Kab. Magelang	APBD	DLH	Penyediaan, pengelolaan dan revitalisasi RTH Publik
		Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau.	Identifikasi potensi RTH dan Pembangunan RTH di Sekolah dan Perdesaan	2	Paket	Kab. Magelang	APBD	DLH	
		Program Pengembangan Kawasan Permukiman							
		Penanganan Permukiman Kumuh	jumlah permukiman kawasan kumuh yang ditangani	5,12	ha	Kawasan Kumuh	APBD	DPRKP	Penanganan permukiman kumuh di 3 kecamatan (9 kawasan) yang masuk dalam SK Bupati
			Jumlah kawasan permukiman yang ditingkatkan kualitasnya	5	kawasan	Kab. Magelang	APBD	DPRKP	Pengembangan Kawasan perdesaan untuk pengembangan social budaya
		Pengendalian Kawasan Permukiman	penyusunan perencanaan dan pengendalian kawasan permukiman	2	dokumen	Kab. Magelang	APBD	DPRKP	Penyiapan studi perencanaan dalam rangka pengendalian Kawasan kumuh di Kabupaten Magelang dan pengembangan potensi social ekonomi di Kawasan perdesaan
8	Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan								
	a. E-Government / Smart Regency	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika							

No.	Program Unggulan	Nomenklatur Program dan Kegiatan	Uraian Kegiatan	Vol	Satuan	Lokasi	Sumber Pembiayaan	Perangkat Daerah Pelaksana	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Fasilitasi pengelolaan aplikasi SKPD;	Memfasilitasi pembangunan dan Operasionalisasi Aplikasi Pendukung Kinerja SKPD	6	Aplikasi	Kab. Magelang	APBD	Dinas Kominfo	Penyediaan dan pengelolaan <i>dashboard</i> bupati, pembangunan <i>command centre</i> , dan <i>call centre</i>
		Penyelenggaraan ekosistem TIK;	Memfasilitasi terselenggarakannya Pelayanan masyarakat berbasis TIK dengan ukuran Indeks SPBE	14	SKPD	Kab. Magelang	APBD	Dinas Kominfo	Integrasi informasi ke dalam BIG DATA
				75	SKPD dan Desa		APBD	Dinas Kominfo	
		Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik		1	Dok SPBE		APBD	Dinas Kominfo	
		Diseminasi informasi melalui media publik;	Mensosialisasikan informasi dengan berbagai media publik	36	Kali	Kab. Magelang	APBD	Dinas Kominfo	
		Pengelolaan diseminasi informasi melalui media masa	Pengelolaan Informasi melalui berbagai media: Radio, Majalah, Media on Line	2,19	berita	Kab. Magelang	APBD	Dinas Kominfo	
	b. Optimalisasi Pemanfaatan berbagai sumber pendapatan yang inovatif (CSR, Obligasi daerah dan kerjasama dengan dunia usaha)		Koordinasi dengan kelompok/lembaga kemasyarakatan yang peduli dengan pendidikan, kesehatan, lingkungan dan konservasi SDA					Bag Perekonomian, Bappeda dan Litbangda	Pemanfaatan CSR untuk konservasi, penanganan rumah tidak layak huni, beasiswa pendidikan, penanganan TBC, HIV, dan kanker
	c. Peningkatan layanan publik professional dan akuntabel.	Program Pengembangan Kelembangan, Tatalaksana dan Peningkatan Kinerja Organisasi							

No.	Program Unggulan	Nomenklatur Program dan Kegiatan	Uraian Kegiatan	Vol	Satuan	Lokasi	Sumber Pembiayaan	Perangkat Daerah Pelaksana	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Perangkat Daerah							
			Pengembangan Inovasi Pelayanan Publik, Kegiatan pelayanan yang diberikan oleh SKPD yang langsung dirasakan oleh masyarakat, dengan mengedepankan keramahan, kecepatan, ketepatan dan kepuasan	8	SKPD	Kab. Magelang	APBD	Setda	Koordinator pengembangan inovasi SKPD
								Puskemas, RSUD, Disdukcapil, DPMPTSP, Dispeterikan, Dispuspa, Kecamatan, BPBD	Seluruh SKPD mengembangkan inovasi pelayanan publik, sebagai bentuk pelayanan kepada masyarakat.
	d. Peningkatan iklim investasi yang tetap memperhatikan pelestarian lingkungan hidup							DPMPTSP, DLH	Perijinan yang dikeluarkan harus tetap memperhatikan keberlanjutan lingkungan usaha serta pemanfaatan bahan yang ramah lingkungan
	e. Sinergi Perencanaan, Penganggaran, Kepegawaian dan Pengawasan	Program Perencanaan Pembangunan Daerah							
		Perencanaan Umum,	Pengembangan sistem informasi terintegrasi antara perencanaan, pengelolaan keuangan	7	paket	Kab. Magelang	APBD	Bappeda dan Litbangda, BPPKAD, Setda (Admin	Pengembangan sistem informasi kepegawaian perencanaan penganggaran

No.	Program Unggulan	Nomenklatur Program dan Kegiatan	Uraian Kegiatan	Vol	Satuan	Lokasi	Sumber Pembiayaan	Perangkat Daerah Pelaksana	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			daerah, pengelolaan barang milik daerah, pelaksanaan sistem akuntansi, laporan pertanggungjawaban APBD dan evaluasi, melalui aplikasi Sistem Informasi Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPPAD)					Bangda)	monitoring evaluasi terpadu
		Program Pengelolaan Keuangan Daerah							
		Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Perubahan APBD, Pengelolaan Kasda, Pengumpulan dan Pengolahan Data dalam rangka SAKD,	Pengembangan sistem informasi terintegrasi antara perencanaan, pengelolaan keuangan daerah, pelaksanaan sistem akuntansi, laporan pertanggungjawaban APBD dan evaluasi, melalui aplikasi Sistem Informasi Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPPAD)	1	Paket	Kab. Magelang	APBD		Pengembangan sistem informasi kepegawaian perencanaan penganggaran monitoring evaluasi terpadu
		Program Pengelolaan Aset Daerah							
		Pengolahan Data Barang Milik Daerah	Pengembangan sistem informasi terintegrasi antara pengelolaan keuangan daerah dan asset daerah, sistem akuntansi, laporan pertanggungjawaban APBD dan evaluasi	1	Paket	Kab. Magelang	APBD	BPPKAD	

No.	Program Unggulan	Nomenklatur Program dan Kegiatan	Uraian Kegiatan	Vol	Satuan	Lokasi	Sumber Pembiayaan	Perangkat Daerah Pelaksana	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	f. Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan (dokumen kependudukan)	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (PIAK) dan Pemanfaatan Data							
		Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK)	Lancarnya Pelayanan Adminduk dan Tertib Adminduk			21 kecamatan		Disdukcapil	
		Program Pelayanan Pencatatan Sipil							
		Pelayanan Penerbitan Akta Kematian dan Kelahiran	Dokumen Akta Kematian dan Kelahiran yang diterbitkan	31.000	lembar	21 kecamatan		Disdukcapil	
		Program Pelayanan Administrasi Kependudukan							
		Fasilitasi Penerbitan Perubahan Identitas Penduduk	Jumlah Dokumen Perubahan Identitas Penduduk	81.000	lembar	21 kecamatan		Disdukcapil	
	g. Meningkatkan Kerjasama dengan lembaga pemerintah, perguruan tinggi dan swasta		Penekanan: 1) Gulkin (verval sd evaluasi) 2) Litbang 3) sitem pemberdayaan masyarakat 4) Investasi 5) Pemerintahan dan Pembangunan	2	paket		APBD	Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah (TKKSD); Bag Tapem; Bappeda & Litabangda	Penyusunan SO, Kerjasama, Promosi Potensi Investasi, Perjanjian Kerja Sama dan Monev
	h. Melanjutkan Reformasi birokrasi	Program Pengelolaan Keuangan Daerah							

No.	Program Unggulan	Nomenklatur Program dan Kegiatan	Uraian Kegiatan	Vol	Satuan	Lokasi	Sumber Pembiayaan	Perangkat Daerah Pelaksana	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Perubahan APBD	Penyusunan Raperda APBD dan APBD Perubahan	2	Raperda		APBD	BPPKAD	Penyusunan Tahapan APBD Tepat Waktu, Transparansi pengadaan barang jasa, Peningkatan inovasi ASN
		Program Pengembangan Kelembangan, Tatalaksana dan Peningkatan Kinerja Organisasi							
		Pengembangan Kebijakan Pendayagunaan Aparatur Daerah dan Reformasi Birokrasi	Akselerasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Penyusunan Renja RB)	48	Perangda	Setda	APBD	Setda (Bag Organisasi)	
			Percepatan pelaksanaan 8 Area Perubahan RB	1	paket	Setda	APBD	Setda (Bag Organisasi)	
		Program Peningkatan Kualitas Pengadaan Barang/Jasa							
		Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Optimalisasi peran dan fungsi Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	1	Paket	Setda	APBD	Setda (Bag. Pengadaan Barjas)	
		Program Pengembangan Kelembangan, Tatalaksana dan Peningkatan Kinerja Organisasi							
		Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Perangkat	Pengembangan inovasi pelayanan publik	3	unit	Setda	APBD	Setda (Bag Organisasi)	

No.	Program Unggulan	Nomenklatur Program dan Kegiatan	Uraian Kegiatan	Vol	Satuan	Lokasi	Sumber Pembiayaan	Perangkat Daerah Pelaksana	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Daerah							
			unit pelayanan publik yang melakukan survei kepuasan masyarakat	150	unit	Setda	APBD	Setda (Bag Organisasi)	
	i. Penataan dan pengelolaan Aparatur Sipil Negara (ASN) secara profesional dan akuntabel.	Program Pengembangan Kelembangan, Tatalaksana dan Peningkatan Kinerja Organisasi							
		Peningkatan Kesesuaian Kelembagaan OPD terhadap Peraturan Perundangan;	Evaluasi SOT, Evaluasi Jabatan, Peningkatan kapasitas	1	Dok	Setda	APBD	Setda (Bag Organisasi), BKPPD	Informasi Evaluasi Jabatan dan Standart Kompetensi jabatan dimanfaatkan sebagai standar penggajian dan pemberian insentif kepada pegawai, serta sebagai dasara penempatan dan formasi jabatan, termasuk dalam pengembangan dan promosi jabatan
		Program Pengembangan Sumber Daya Aparatur							
		Pengembangan kompetensi kualifikasi pendidikan ASN dan Sertifikasi	pengembangan kompetensi kualifikasi ASN	300	ASN		APBD	BKPPD	
			ujian kompetensi	50	ASN				

No.	Program Unggulan	Nomenklatur Program dan Kegiatan	Uraian Kegiatan	Vol	Satuan	Lokasi	Sumber Pembiayaan	Perangkat Daerah Pelaksana	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Penataan ASN	mutasi/promosi/peng gasan pejabat ASN	240	ASN		APBD	BKPPD	
9	Ketenteraman, Ketertiban dan Penanggulangan Bencana								
		Program Peningkatan Ketertarikan dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat							
	a. Peningkatan kondusifitas ketenteraman dan ketertiban	Deteksi Dini dan Pengendalian Massa	pelaksanaan deteksi dini lokasi rawan gangguan tribum tranmas dan pengendalian massa	33	kali	Kab. Magelang	APBD	Satpol PP dan PK	Frekuensi pelaksanaan deteksi dini lokasi rawan gangguan tribum tranmas dan pengendalian massa
		Program Penegakan Perda							
		Penanganan Perkara Pelanggaran Peraturan Perundang-undangan Daerah	warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan perda dan perkara**	200	orang	Kab. Magelang	APBD	Satpol PP dan PK	
		Program Penanggulangan Kebakaran							
		Peningkatan Kesiapsiagaan Penanggulangan Kebakaran	Jumlah sarana dan prasarana yang terbangun serta peningkatan kapasitas SDM dalam menghadapi bencana kebakaran	48	kali	Kab. Magelang	APBD	Satpol PP dan PK	

No.	Program Unggulan	Nomenklatur Program dan Kegiatan	Uraian Kegiatan	Vol	Satuan	Lokasi	Sumber Pembiayaan	Perangkat Daerah Pelaksana	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Pemadaman Kebakaran dan Penyelamatan Korban	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran dan Jumlah layanan penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia (operasi darurat non kebakaran)	100	kali	Kab. Magelang	APBD	Satpol PP dan PK	
		Program Peningkatan Wawasan Kebangsaan dan Politik Masyarakat							
		Peningkatan Kesadaran Bela Negara, Penyelenggaraan Pendidikan Wawasan Kebangsaan dan Pelestarian Nilai-Nilai Kepahlawanan	Soialisasi Bela negara, PPWK (Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2 Tentang Pedoman Pendidikan Wawasan Keangsaan)	300	orang	Kab. Magelang	APBD	Satpol PP dan PK	Peningkatan wawasan kebangsaan
	b. Penguatan Sistem Penanggulangan Bencana	Program Penanggulangan Bencana							
	(legislasi, kelembagaan dan pendanaan)	Pelatihan pencegahan dan mitigasi (pengembangan sister village dan pembentukan desa tangguh bencana)	meliputi pengembangan sister village sebanyak 33 pasang desa (66 desa; pembentukan destana 5 desa)	71	desa	Kab. Magelang	APBD	BPBD	Pengembangan <i>sister village</i> , desa tangguh bencana, TEA dan sistem informasi kebencanaan

No.	Program Unggulan	Nomenklatur Program dan Kegiatan	Uraian Kegiatan	Vol	Satuan	Lokasi	Sumber Pembiayaan	Perangkat Daerah Pelaksana	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Fasilitasi rehabilitasi dan rekonstruksi	Jumlah lokasi rehabilitasi daerah rawan bencana dan fasilitasi penyusunan ded TEA	5	lokasi	Kab. Magelang	APBD	BPBD	
		Komunikasi, informasi dan edukasi rawan bencana	Jumlah penyebarluasan informasi penanggulangan bencana	10	kali	Kab. Magelang	APBD	BPBD	
10	Pemuda dan Olah Raga								
	a. Peningkatan peran serta Kepemudaan	Peningkatan Peran Serta Pemuda dalam Pembangunan							
		Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda	Fasilitasi kegiatan kepemudaan dan pramuka, Pendampingan pemuda berprestasi dan pengembangan wirausaha pemuda	7	Sub kegiatan	Kab. Magelang	APBD	Disparpora	
		Perlindungan dan Pemberdayaan Lembaga Pemuda	Pemberdayaan Lembaga/ organisasi pemuda dengan peningkatan pemahaman Manajemen organisasi, penyuluhan, rakor kepemudaan bagi pengurus organisasi dan fasilitasi upacara	4	Sub kegiatan	Kab. Magelang	APBD	Disparpora	
	b. Pembangunan Sport Centre dan pengembangan pembinaan olah raga	Program Pembinaan dan Peningkatan Sarana Prasarana Olahraga							

No.	Program Unggulan	Nomenklatur Program dan Kegiatan	Uraian Kegiatan	Vol	Satuan	Lokasi	Sumber Pembiayaan	Perangkat Daerah Pelaksana	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	berprestasi								
		Peningkatan Sarana Prasarana Olahraga	Penyusunan DED, kajian lingkungan dan Amdalalin sport center dan pemeliharaan Stadion	3	Dokumen	Stadion di Desa Bumirejo Kec. Mungkid	APBD	Disparpora	GOR dan Lapangan serta penataan lingkungan
			Jumlah Pengadaan Alat Olahraga	180	unit	Kab. Magelang	APBD	Disparpora	Pembangunan gedung olah raga
	c. Peningkatan pengembangan olah raga sepak bola dengan mengoptimalkan peran serta swasta		Dukungan Fasilitas KONI Kab. Magelang dalam pembinaan atlet olah raga sepakbola dan cabang olah raga lainnya	1	paket	Kab. Magelang	APBD	Disparpora	
	d. Penghargaan atlet berprestasi								
		Peningkatan Sarana Prasarana Olahraga	Pembinaan atlet berprestasi	595	atlit	Kab. Magelang	APBD	Disparpora	
		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi	Pembinaan, kompetisi, pengiriman atlet dan pemberian penghargaan bagi atlet berprestasi	3	Sub kegiatan	Kab. Magelang	APBD	Disparpora	Fasilitas untuk system kaderisasi atlet olah raga Kabupaten Magelang

Secara keseluruhan rencana program prioritas Kabupaten Magelang Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 6.3.
Rencana Program Prioritas Kabupaten Magelang Tahun 2021

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	562.039.536.365
01.01	Pendidikan	172.414.148.635
1.1.1.1.1.1.7.	Program Manajemen Administrasi Pelayanan Umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah	3.377.743.000
1.1.1.1.1.1.8.	Program Perencanaan, Keuangan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	728.681.000
1.1.1.1.1.1.23.	Program Pendidikan Sekolah Dasar	84.478.342.120
1.1.1.1.1.1.24.	Program Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	35.268.841.560
1.1.1.1.1.1.25.	Program Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal	3.349.224.955
1.1.1.1.1.1.26.	Program Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan	45.211.316.000
01.02	Kesehatan	279.455.464.519
1.2.1.2.1.1.7.	Program Manajemen Administrasi Pelayanan Umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah	1.464.399.999
1.2.1.2.1.1.8.	Program Perencanaan, Keuangan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	146.000.000
1.2.1.2.1.1.34.	Program Pelayanan Kesehatan	120.914.131.542
1.2.1.2.1.1.35.	Program Peningkatan Kualitas Puskesmas dan Rumah Sakit	16.651.472.151
1.2.1.2.1.1.36.	Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	22.064.948.768
1.2.1.2.1.1.37.	Program Sumber Daya Kesehatan	13.199.371.699
1.2.1.2.1.1.38.	Program Kesehatan Masyarakat	2.235.094.360
1.2.1.2.2.1.35.	Program Peningkatan Kualitas Puskesmas dan Rumah Sakit	.780.046.000
01.03	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	91.991.729.051
1.3.1.3.1.1.7.	Program Manajemen Administrasi Pelayanan Umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah	903.411.662
1.3.1.3.1.1.8.	Program Perencanaan, Keuangan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	151.100.400
1.3.1.3.1.1.36.	Program Peningkatan akses dan kualitas jalan	21.036.403.320
1.3.1.3.1.1.37.	Program Peningkatan layanan Sumber Daya Air dan Jaringan irigasi	4.907.443.730
1.3.1.3.1.1.38.	Program Peningkatan dan Pengembangan Bangunan Gedung dan AMPL	64.118.169.939
1.3.1.3.1.1.39.	Program Pengembangan sarana dan prasarana ke PU an	650.000.000
1.3.1.3.1.1.40.	Program Pemanfaatan dan Pengendalian Tata Ruang	225.200.000
01.04	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	2.909.266.750
1.4.1.4.1.1.7.	Program Manajemen Administrasi Pelayanan Umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah	295.580.000
1.4.1.4.1.1.8.	Program Perencanaan, Keuangan dan	35.344.750

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
1.4.1.4.1.1.23.	Program Pengembangan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman	294.000.000
1.4.1.4.1.1.25.	Program Pengembangan dan Peningkatan Kualitas Perumahan	2.284.342.000
01.05	Sosial	13.569.954.000
1.5.1.5.1.1.7.	Program Manajemen Administrasi Pelayanan Umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah	639.219.000
1.5.1.5.1.1.8.	Program Perencanaan Keuangan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	43.723.000
1.5.1.5.1.1.25.	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	2.394.854.000
1.5.1.5.1.1.26.	Program Penegakan Perda	183.263.000
1.5.1.5.1.1.27.	Program Penanggulangan Kebakaran	7.296.983.000
1.5.1.5.2.1.7.	Program Manajemen Administrasi Pelayanan Umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah	129.800.250
1.5.1.5.2.1.8.	Program Perencanaan Keuangan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	29.443.750
1.5.1.5.2.1.24.	Program Peningkatan Wawasan Kebangsaan dan Politik Masyarakat	488.144.000
1.5.1.6.2.1.7.	Program Manajemen Administrasi Pelayanan Umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah	607.555.000
1.5.1.6.2.1.8.	Program Perencanaan Keuangan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	86.352.000
1.5.1.6.2.1.23.	Program Penanggulangan Bencana	1.670.617.000
01.06	Sosial	1.698.973.410
1.6.1.6.1.1.7.	Program Manajemen Administrasi Pelayanan Umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah	823.914.910
1.6.1.6.1.1.8.	Program Perencanaan, Keuangan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	47.500.000
1.6.1.6.1.1.23.	Program Penanganan dan Perlindungan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	397.558.500
1.6.1.6.1.1.24.	Program Pemberdayaan Sosial	430.000.000
2	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	78.390.566.449
02.01	Tenaga Kerja	2.122.887.145
2.1.2.1.1.1.7.	Program Manajemen Administrasi Pelayanan Umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah	564.052.593
2.1.2.1.1.1.8.	Program Perencanaan, Keuangan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	91.322.000
2.1.2.1.1.1.18.	Program Pengembangan Kompetensi, Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja	1.384.015.152
2.1.2.1.1.1.20.	Program Pembinaan Hubungan Industrial dan Produktivitas Pekerja	83.497.400
02.02	Sosial	582.094.670
2.2.1.6.1.1.20.	Program Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Perempuan dan Anak	582.094.670
02.03	Pangan	963.311.770
2.3.2.3.1.1.15.	Program Peningkatan Ketahanan Pangan	963.311.770
02.05	Lingkungan Hidup	16.004.764.583
2.5.2.5.1.1.7.	Program Manajemen Administrasi Pelayanan	645.494.797

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
	Umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah	
2.5.2.5.1.1.8.	Program Perencanaan, Keuangan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	90.929.705
2.5.2.5.1.1.29.	Program Pengendalian Pencemaran Lingkungan dan Gas Rumah Kaca	406.043.382
2.5.2.5.1.1.30.	Program Peningkatan Kapasitas dan Tata Lingkungan Hidup	596.908.679
2.5.2.5.1.1.31.	Program Peningkatan Kinerja Pengelolaan Sampah	11.480.280.290
2.5.2.5.1.1.32.	Program Peningkatan Kinerja Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau	2.525.931.700
2.5.2.5.1.1.33.	Program Konservasi Sumber Daya Alam dan Mitigasi Dampak Perubahan Iklim	259.176.030
02.06	Administrasi Kependudukan dan Capil	5.551.093.850
2.6.2.6.1.1.7.	Program Manajemen Administrasi Pelayanan Umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah	450.647.750
2.6.2.6.1.1.8.	Program Perencanaan Keuangan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	58.840.500
2.6.2.6.1.1.16.	Program Pelayanan Administrasi Kependudukan	3.707.571.100
2.6.2.6.1.1.17.	Program Pelayanan Pencatatan Sipil	608.444.000
2.6.2.6.1.1.18.	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (PIAK) dan Pemanfaatan Data	725.590.500
02.07	Pemberdayaan Masyarakat Desa	7.340.924.412
2.7.2.7.1.1.7.2	Program Manajemen Administrasi Pelayanan Umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah	592.228.025
2.7.2.7.1.1.8.	Program Perencanaan, Keuangan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	42.909.188
2.7.2.7.1.1.21.	Program Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	1.141.757.200
2.7.2.7.1.1.22.	Program Pembinaan Pemerintahan dan Kelembagaan Desa	526.574.900
2.7.2.7.1.1.23.	Program Perencanaan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa	5.037.455.099
02.08	Sosial	7.482.532.500
2.8.1.6.1.1.15.	Program Keluarga Berencana	7.305.891.000
2.8.1.6.1.1.26.	Program Pembangunan Ketahanan Keluarga	176.641.500
02.09	Perhubungan	23.668.155.630
2.9.2.9.1.1.7.	Program Manajemen Administrasi Pelayanan Umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah	1.047.233.180
2.9.2.9.1.1.8.	Program Perencanaan, Keuangan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	210.258.720
2.9.2.9.1.1.17.	Program peningkatan pelayanan angkutan	828.538.920
2.9.2.9.1.1.22.	Program Pengembangan Jaringan Prasarana Angkutan Jalan	1.026.746.760
2.9.2.9.1.1.23.	Program Peningkatan Pengamanan dan Keselamatan Lalu Lintas	20.555.378.050
02.10	Komunikasi dan Informatika	4.942.403.810
2.10.2.10.1.1.7.	Program Manajemen Administrasi Pelayanan Umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah	505.424.000
2.10.2.10.1.1.8.	Program Perencanaan, Keuangan dan	75.052.000

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
2.10.2.10.1.1.19.	Program Pengembangan Sarana Prasarana Teknologi Informasi dan Komunikasi	2.851.111.000
2.10.2.10.1.1.21.	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	292.443.000
2.10.2.10.1.1.23.	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	1.218.373.810
02.11	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	2.047.574.000
2.11.2.11.1.1.7.	Program Manajemen Administrasi Pelayanan Umum dan Kepegawaian	1.336.874.000
2.11.2.11.1.1.8.	Program Perencanaan, Keuangan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	120.396.000
2.11.2.11.1.1.18.	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	290.304.000
2.11.2.11.1.1.19.	Program Pemberdayaan Usaha Mikro	300.000.000
02.12	Penanaman Modal	1.166.812.212
2.12.2.12.1.1.7.	Program Manajemen Administrasi Pelayanan Umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah	456.319.
2.12.2.12.1.1.8.	Program Perencanaan, Keuangan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	61.781.000
2.12.2.12.1.1.18.	Program Peningkatan dan Pelayanan Investasi	372.462.000
2.12.2.12.1.1.19.	Program Pemantauan dan Pengendalian Investasi	26.250.000
2.12.2.12.1.1.20.	Program Pelayanan perijinan	250.000.000
02.13	Kepemudaan dan Olah Raga	3.570.000.000
2.13.2.13.1.1.7.	Program Manajemen Administrasi Pelayanan Umum dan Kepegawaian	760.174.000
2.13.2.13.1.1.8.	Program Perencanaan, Keuangan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	109.826.000
2.13.2.13.1.1.20.	Program Pembinaan dan Peningkatan Sarana Prasarana Olahraga	2.500.000.000
2.13.2.13.1.1.22.	Peningkatan Peran Serta Pemuda dalam Pembangunan	200.000.000
02.14	Komunikasi dan Informatika	284.226.000
2.14.2.10.1.1.17.	Program Pengelolaan dan Pengembangan Statistik	284.226.000
02.15	Komunikasi dan Informatika	485.075.000
2.15.2.10.1.1.15.	Program Persandian	485.075.000
02.16	Pendidikan	467.594.000
2.16.1.1.1.1.21.	Program Perlindungan dan Pengembangan Kebudayaan	467.594.000
02.17	Perpustakaan	1.547.194.615
2.17.2.17.1.1.7.	Program Manajemen Administrasi Pelayanan Umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah	780.306.040
2.17.2.17.1.1.8.	Program Perencanaan, Keuangan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	58.929.575
2.17.2.17.1.1.17.	Program Pengelolaan dan Pengembangan Perpustakaan	707.959.000
02.18	Perpustakaan	163.922.252
2.18.2.17.1.1.20.	Program Pembinaan, Pengembangan dan Pengawasan Kearsipan	0
2.18.2.17.1.1.21.	Program Pengelolaan dan Pelestarian Arsip	163.922.252
3	Urusan Pilihan	59.528.449.526

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
03.01	Kelautan dan Perikanan	2.885.236.000
3.1.3.1.1.1.7.	Program Manajemen Administrasi Pelayanan Umum dan Kepegawaian Perangkat daerah	948.500.000
3.1.3.1.1.1.8.	Program Perencanaan, Keuangan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	192.000.000
3.1.3.1.1.1.28.	Program Pengembangan Budidaya Perikanan, Kesehatan Ikan dan Lingkungan	1.578.736.000
3.1.3.1.1.1.29.	Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan dan Sistem Penyuluhan	166.000.000
03.02	Kepemudaan dan Olah Raga	17.460.619.880
3.2.2.13.1.1.18.	Program Peningkatan Sarana Prasarana dan Industri Pariwisata	16.830.619.880
3.2.2.13.1.1.19.	Program Pengembangan Kelembagaan, Pemasaran Pariwisata dan ekonomi kreatif	630.000.000
03.03	Kelautan dan Perikanan	31.306.193.531
3.3.2.3.1.1.7.	Program Manajemen Administrasi Pelayanan Umum dan Kepegawaian Perangkat daerah	1.003.287.970
3.3.2.3.1.1.8.	Program Perencanaan, Keuangan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	76.670.000
3.3.2.3.1.1.19.	Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan	1.075.725.000
3.3.2.3.1.1.27.	Program Peningkatan Daya Saing Produk Pertanian	335.000.000
3.3.2.3.1.1.28.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pertanian	26.756.241.773
3.3.2.3.1.1.29.	Program Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Pertanian	100.000.000
3.3.3.1.1.1.22.	Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	1.548.268.788
3.3.3.1.1.1.30.	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Hewan	411.000.000
03.06	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	7.098.340.375
3.6.2.11.1.1.21.	Program Peningkatan dan Pengembangan Perdagangan	420.000.000
3.6.2.11.1.1.22.	Program Pemberdayaan dan Penataan Pasar	6.383.340.375
3.6.2.11.1.1.23.	Program Peningkatan dan Pengembangan Pelayanan Kemetrolgian	295.000.000
03.07	Tenaga Kerja	778.059.740
3.7.2.1.1.1.20.	Program Pengembangan industri	778.059.740
4	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	62.456.613.087
04.01	Administrasi Pemerintahan	34.551.046.825
4.1.4.1.3.7.40.	Program Kehumasan dan Layanan Keprotokolan	423.000.000
4.1.4.1.3.1.7.	Program Manajemen Administrasi Pelayanan Umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah	10.857.525.800
4.1.4.1.5.1.42.	Program Pelayanan Publik Kecamatan	726.720.000
4.1.4.1.3.3.32.	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan dan Bantuan Hukum	390.332.000
4.1.4.1.3.2.37.	Program Pengembangan Kelembangan, Tatalaksana dan Peningkatan Kinerja Organisasi	165.620.000
4.1.4.1.3.9.39.	Program Peningkatan Kualitas Pengadaan	353.605.000

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
	Barang/Jasa	
4.1.4.1.4.1.41.	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan DPRD	7.905.763.000
4.1.4.1.3.8.16.	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala daerah/ Wakil Kepala Daerah	2.927.850.000
4.1.4.1.5.1.43.	Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	7.375.014.700
4.1.4.1.3.1.8.	Program Perencanaan, Keuangan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	746.835.625
4.1.4.1.3.6.34.	Program Perumusan dan Pengendalian Kebijakan Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan	1.526.257.000
4.1.4.1.3.5.36.	Program Perumusan dan Pengendalian Kebijakan Pembangunan	245.931.200
4.1.4.1.3.1.33.	Program Perumusan dan Pengendalian Kebijakan Pemerintahan	723.950.000
4.1.4.1.3.4.35.	Program Perumusan dan Pengendalian Kebijakan Perekonomian	182.642.500
04.02	Pengawasan	1.749.401.500
4.2.4.2.1.1.7.	Program Manajemen Administrasi Pelayanan Umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah	521.141.000
4.2.4.2.1.1.8.	Program Perencanaan, Keuangan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	50.624.000
4.2.4.2.1.1.20.	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	1.177.636.500
04.03	Perencanaan	3.241.363.000
4.3.4.3.1.1.7.	Program Manajemen Administrasi Pelayanan Umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah	885.639.000
4.3.4.3.1.1.8.	Program Perencanaan, Keuangan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	83.193.000
4.3.4.3.1.1.21.	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	948.151.000
4.3.4.3.1.1.27.	Program Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam	135.488.000
4.3.4.3.1.1.28.	Program Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan, Sosial dan Budaya	638.243.000
4.3.4.3.1.1.29.	Program Perencanaan Pembangunan Bidang Tata Ruang, Pengembangan Wilayah dan Infrastruktur	550.649.000
04.04	Keuangan	17.051.300.237
4.4.4.4.5.1.7.	Program Manajemen Administrasi Pelayanan Umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah	930.974.999
4.4.4.4.5.1.8.	Program Perencanaan, Keuangan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	240.831.000
4.4.4.4.5.1.18.	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	7.018.003.713
4.4.4.4.5.1.19.	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	4.492.071.810
4.4.4.4.5.1.20.	Program Pengelolaan Aset Daerah	4.369.418.715
04.05	Kepegawaian	5.227.501.525
4.5.4.5.34.1.7.	Program Manajemen Administrasi Pelayanan Umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah	289.722.250
4.5.4.5.34.1.8.	Program Perencanaan, Keuangan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	49.307.675
4.5.4.5.34.1.32.	Program Informasi dan Pengadaan Pegawai	955.445.600

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
4.5.4.5.34.1.33.	Program Pengembangan Sumber Daya Aparatur	3.701.135.000
4.5.4.5.34.1.34.	Program Kesejahteraan dan Pembinaan Pegawai	231.891.000
04.07	Perencanaan	636.000.000
4.7.4.3.1.1.15.	Program Penelitian dan Pengkajian Daerah	636.000.000
		762.415.165.427

PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH

KABUPATEN MAGELANG

TAHUN 2021

Nama Perangkat Daerah : DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Urusan Wajib Pelayanan Dasar				172.414.148.635			196.748.609.000
1.1	Pendidikan				172.414.148.635			196.748.609.000
1.1.1.1.1.1.1.1.7.101	Program Manajemen Administrasi Pelayanan Umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah	Prosentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah		100 %	3.377.743.000		100 %	6.985.000.000
1.1.1.1.1.1.1.1.7.101.1	Pengelolaan Surat Menyurat, Kearsipan dan Bahan Pustaka	Jumlah Surat yang dikelola Jumlah Kecamatan yang terlayani	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Disdikbud Kab. Magelang	80000 surat 21 Kecamatan	199.133.000	80000 surat 21 Kecamatan	350.000.000
1.1.1.1.1.1.1.1.7.101.2	Penyelenggaraan Koordinasi dan Konsultasi Perangkat Daerah	jumlah rapat koordinasi luar daerah Jumlah yang melaksanakan perjalanan luar daerah jumlah rapat koordinasi dalam daerah Jumlah perjalanan Dinas dalam daerah Jumlah kecamatan yang terlayani jumlah laporan hibah bansos	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Disdikbud	250 kali 80 orang 45 kali 400 SPPD 21 kecamatan 1 dokumen	500.000.000	250 kali 80 orang 45 kali 400 SPPD 21 kecamatan 1 dokumen	1.405.000.000

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1.1.1.1.1.1.1.7.101.3	Pengadaan dan Pengelolaan Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor, Rumah Dinas dan Gedung Pemerintah Lainnya	jumlah paket pengadaan perlengkapan/peralatan	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Disdikbud Kab. Magelang	2 paket	678.610.000	2 paket	2.070.000.000
		Dokumen aset			1 dokumen		1 dokumen	
1.1.1.1.1.1.1.7.101.4	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor/ Rumah Dinas/ Gedung Pemerintah Lainnya	Jumlah Gedung Kantor yang dipelihara	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Kantor Disdikbud dan wilayah Kecamatan	22 gedung kantor	1.100.000.000	22 gedung kantor	1.100.000.000
		Jumlah bulan pembayaran komunikasi, air, listrik dan surat kabar			696 rekening bulan		696 rekening bulan	
1.1.1.1.1.1.1.7.101.5	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor, Rumah dinas dan Gedung Pemerintah Lainnya	jumlah perlengkapan yang dipelihara	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Disdikbud	1 komplek Gedung Kantor	900.000.000	1 komplek Gedung Kantor	1.410.000.000
		jumlah peralatan yang dipelihara			40 unit komputer/laptop		40 unit komputer/laptop	
		jumlah kendaraan dinas roda 4 yang dipelihara			7 unit		7 unit	
		jumlah kendaraan dinas roda 2 yang dipelihara			90 unit		90 unit	
1.1.1.1.1.1.1.7.101.6	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor, Rumah Dinas dan Gedung Pemerintah Lainnya	jumlah paket rehabilitasi sedng/berat gedung kantor	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Disdikbud	1 paket	0	1 paket	400.000.000
1.1.1.1.1.1.1.7.101.7	Peningkatan Kapasitas dan Disiplin Aparatur Sipil Negara	jumlah ASN yang dibina	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Disdikbud	150 orang	0	150 orang	250.000.000
		Jumlah seragam dan Atribut ASN yang disediakan			0 stel		0 stel	
		volume rapat kerja dinas			1 kali		1 kali	
1.1.1.1.1.1.1.8.101	Program Perencanaan, Keuangan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan pelaporan keuangan dan kinerja			100 %	728.681.000	100 %	2.145.000.000

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
1.1.1.1.1.1.1.1.8.101.1	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	jumlah bulan pelayanan jasa	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Disdikbud	12 bulan	173.437.000		12 bulan	335.000.000
		Jumlah RKAS, RAPBS yang diteliti			59 Sekolah			59 Sekolah	
1.1.1.1.1.1.1.1.8.101.2	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen Renstra yang tersusun	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Disdikbud Kabupaten Magelang	1 Dokumen	55.244.000		1 Dokumen	135.000.000
		Dokumen Renja yang tersusun			1 Dokumen			1 Dokumen	
		Dokumen Profil Pendidikan yang tersusun			1 Dokumen			1 Dokumen	
1.1.1.1.1.1.1.1.8.101.3	Penyusunan Laporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Bulanan dan Tahunan (LKJIP, LKPJ, LPPD, PK dan RFK)	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Disdikbud Kab. Magelang	17 Laporan	500.000.000		17 Laporan	1.575.000.000
		Tersedianya data pokok pendidikan online			1 data online			1 data online	
		Jumlah Dokumen Profil Perangkat Daerah yang tersusun			1 Dokumen			1 Dokumen	
1.1.1.1.1.1.1.1.8.101.4	Penyusunan Dokumen Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Perangkat Daerah	Laporan SPM	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Disdikbud Kab. Magelang	1 Dokumen	0		1 Dokumen	100.000.000
		Jumlah SOP yg disahkan			5 SOP			5 SOP	
1.1.1.1.1.1.1.1.23.101	Program Pendidikan Sekolah Dasar	Angka Putus Sekolah SD/MI			0.06 %	84.478.342.120		0.06 %	90.348.526.000
		Angka Melanjutkan SD/MI ke SMP/MTs			92.00 %			92.00 %	
		Persentase SD dengan Siswa Ideal			40.56 %			40.56 %	
		Persentase SD yang Menerapkan Pendidikan Karakter			50.08 %			50.08 %	
		Persentase SD dengan sarpras sesuai Standar Nasional Pendidikan (SNP)			73.96 %			73.96 %	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
1.1.1.1.1.1.1.1.23.101.1	Penyelenggaraan US-USBN SD/MI	Jumlah sekolah penyelenggara US-USBN SD/MI yang difasilitasi	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Disdikbud Kab.Magelang	913 sekolah	500.000.000		913 sekolah	735.741.000
1.1.1.1.1.1.1.1.23.101.4	Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SD Kec. Salaman	Jumlah siswa penerima BOS	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	SDN di Kec. Salaman	30 SD	3.701.700.000		30 SD	3.520.000.000
1.1.1.1.1.1.1.1.23.101.5	Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SD Kec. Borobudur	Jumlah siswa penerima BOS	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	SDN di Kec. Borobudur	27 SD	3.006.900.000		27 SD	2.911.200.000
1.1.1.1.1.1.1.1.23.101.6	Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SD Kec. Ngluwar	Jumlah siswa penerima BOS	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	SDN di Kec. Ngluwar	19 SD	1.642.500.000		19 SD	1.532.800.000
1.1.1.1.1.1.1.1.23.101.7	Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SD Kec. Salam	Jumlah siswa penerima BOS	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	SDN di Kec. Salam	19 SD	2.128.500.000		19 SD	2.012.000.000
1.1.1.1.1.1.1.1.23.101.8	Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SD Kec. Srumbung	Jumlah siswa penerima BOS	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	SDN di Kec. Srumbung	27 SD	2.093.400.000		27 SD	2.023.200.000
1.1.1.1.1.1.1.1.23.101.9	Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SD Kec. Dukun	Jumlah siswa penerima BOS	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	SDN di Kec. Dukun	25 SD	2.158.200.000		25 SD	2.090.400.000
1.1.1.1.1.1.1.1.23.101.10	Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SD Kec. Sawangan	Jumlah siswa penerima BOS	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	SDN di Kec. Sawangan	28 SD	2.934.000.000		28 SD	2.821.600.000

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1.1.1.1.1.1.1.1.23.101.11	Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SD Kec. Muntilan	Jumlah siswa penerima BOS	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	SDN di Kec. Muntilan	30 SD	4.140.900.000	30 SD	3.848.000.000
1.1.1.1.1.1.1.1.23.101.12	Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SD Kec. Mungkid	Jumlah siswa penerima BOS	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	SDN di Kec. Mungkid	24 SD	2.987.100.000	24 SD	2.850.400.000
1.1.1.1.1.1.1.1.23.101.13	Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SD Kec. Mertoyudan	Jumlah siswa penerima BOS	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	SDN di Kec. Mertoyudan	36 SD	4.689.000.000	36 SD	4.440.000.000
1.1.1.1.1.1.1.1.23.101.14	Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SD Kec. Tempuran	Jumlah siswa penerima BOS	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	SDN di Kec. Tempuran	23 SD	3.096.000.000	23 SD	2.849.600.000
1.1.1.1.1.1.1.1.23.101.15	Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SD Kec. Kajoran	Jumlah siswa penerima BOS	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	SDN di Kec. Kajoran	29 SD	3.077.100.000	29 SD	2.768.800.000
1.1.1.1.1.1.1.1.23.101.16	Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SD Kec. Kaliangkrik	Jumlah siswa penerima BOS	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	SDN di Kec. Kaliangkrik	23 SD	2.582.100.000	23 SD	2.446.400.000
1.1.1.1.1.1.1.1.23.101.17	Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SD Kec. Bandongan	Jumlah siswa penerima BOS	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	SDN di Kec. Bandongan	27 SD	2.719.800.000	27 SD	2.545.600.000
1.1.1.1.1.1.1.1.23.101.18	Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SD Kec. Candimulyo	Jumlah siswa penerima BOS	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	SDN di Kec. Candimulyo	26 SD	2.778.300.000	26 SD	2.624.800.000

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1.1.1.1.1.1.1.1.23.101.19	Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SD Kec. Pakis	Jumlah siswa penerima BOS	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	SDN di Kec. Pakis	31 SD	3.408.300.000		31 SD 3.088.000.000
1.1.1.1.1.1.1.1.23.101.20	Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SD Kec. Ngablak	Jumlah siswa penerima BOS	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	SDN Di Kec. Ngablak	23 SD	2.627.100.000		23 SD 2.349.600.000
1.1.1.1.1.1.1.1.23.101.21	Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SD Grabag	Jumlah siswa penerima BOS	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	SDN di Kec. Grabag	34 SD	5.208.300.000		34 SD 4.825.600.000
1.1.1.1.1.1.1.1.23.101.22	Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SD Kec. Tegalrejo	Jumlah siswa penerima BOS	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	SDN di Kec. Tegalrejo	26 SD	3.077.100.000		26 SD 2.874.400.000
1.1.1.1.1.1.1.1.23.101.23	Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SD Kec. Secang	Jumlah siswa penerima BOS	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	SDN di Kec. Secang	23 SD	3.393.900.000		23 SD 3.240.800.000
1.1.1.1.1.1.1.1.23.101.24	Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SD Kec. Windusari	Jumlah siswa penerima BOS	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	SDN di Kec. Windusari	21 SD	2.611.800.000		21 SD 2.412.000.000
1.1.1.1.1.1.1.1.23.101.25	Pengembangan Kurikulum SD	Jumlah sekolah yang difasilitasi pengembangan kurikulumnya	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Disdikbud Kab. Magelang	342 Sekolah	0		342 Sekolah
		Jumlah guru yang dibintek kurikulum baru			1036 guru			1036 guru
1.1.1.1.1.1.1.1.23.101.26	Pendampingan BSM dan Gulkin SD	Jumlah penerima bantuan BSM SD yang didampingi	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Disdikbud kab. Magelang	45000 Siswa	0		45000 Siswa
		Jumlah penerima Gulkin SD yang didampingi			630 Siswa			630 Siswa

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1.1.1.1.1.1.1.1.23.101.27	Penyelenggaraan MBS SD	Jumlah sekolah yang mengembangkan MBS	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Disdikbud Kab. magelang	21 Sekolah	0	21 Sekolah	344.740.000
		Jumlah komite sekolah yang dilibatkan dalam MBS			105 Komite sekolah		105 Komite sekolah	
1.1.1.1.1.1.1.1.23.101.28	Pendampingan Operasional BOS SD	Jumlah SD penerima BOS	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Disdikbud Kab. Magelang	604 Sekolah	938.420.000	604 Sekolah	3.753.680.000
		Jumlah penerima BOSDA SDS/MIS			361 Sekolah		361 Sekolah	
		Jumlah penerima BOSDA SDN			84270 Siswa		84270 Siswa	
1.1.1.1.1.1.1.1.23.101.29	Fasilitasi dan Pengembangan SD	Jumlah sekolah model dan rujukan yang mendapat pendampingan	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	wilayah Kab. Magelang	19 Sekolah	0	19 Sekolah	820.000.000
		Jumlah sekolah inklusi yang mendapat pendampingan			30 Sekolah		30 Sekolah	
		Jumlah sekolah Adiwiyata yang mendapat pendampingan			42 Sekolah		42 Sekolah	
		Jumlah sekolah aman bencana yang memiliki SOP			125 siswa dan guru		125 siswa dan guru	
		Jumlah sekolah yang mendapat bantuan pendampingan program ramah anak			0 sekolah		0 sekolah	
1.1.1.1.1.1.1.1.23.101.30	Pembinaan dan Pengembangan Kelembagaan SD	Jumlah sekolah yang difasilitasi penataan kelembagaan	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Wilayah Kab. Magelang	50 Sekolah	0	50 Sekolah	20.000.000

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1.1.1.1.1.1.1.1.23.101.31	Fasilitasi dan Pengembangan Peserta Didik	Jumlah lomba yang terselenggara	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Kab. Magelang	50 Kegiatan	0	50 Kegiatan	1.435.715.000
		Jumlah penerima beasiswa prestasi			1859 Siswa		1859 Siswa	
		Jumlah sekolah pengimplementasi pendidikan karakter			151 sekolah		151 sekolah	
		Jumlah juknis pendidikan karakter			1 juknis		1 juknis	
1.1.1.1.1.1.1.1.23.101.32	Pembinaan Pendidikan Karakter SD	Jumlah penyelenggara sekolah berkarakter	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Wilayah Kab. Magelang	151 Sekolah	0	151 Sekolah	150.000.000
1.1.1.1.1.1.1.1.23.101.33	Pengembangan dan Penjaminan Mutu SD	Jumlah penyelenggara lomba perpustakaan	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Wilayah Kab. Magelang	21 Sekolah	0	21 Sekolah	289.450.000
		Jumlah sekolah yang didampingi pelaksanaan akreditasinya			125 Sekolah		125 Sekolah	
		Jumlah sekolah peserta lomba gugus (SD Inti)			93 SD Inti		93 SD Inti	
1.1.1.1.1.1.1.1.23.101.34	Bantuan Peningkatan dan Pengembangan Pembelajaran SD (Ban Gub)	jumlah paket bantuan	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	SD di Wilayah Kab. Magelang	5 paket	0	5 paket	30.000.000
1.1.1.1.1.1.1.1.23.101.36	Peningkatan Mutu Sarana Prasarana Pendidikan SD Negeri, Swasta (DAK)	Jumlah penerima bantuan	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	SD di wilayah Kab. Magelang	180 Sekolah	18.977.922.120	180 Sekolah	15.834.000.000
1.1.1.1.1.1.1.1.23.101.37	Peningkatan Mutu Sarana Prasarana Pendidikan SD Negeri, Swasta	Jumlah penerima bantuan	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Wilayah Kab. Magelang	66 Sekolah	0	66 Sekolah	6.000.000.000
1.1.1.1.1.1.1.1.23.101.38	Fasilitasi PPDB SD	Jumah SDN yang melaksanakan PPDB	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	SD di wilayah Kab. Magelang	551 SD	0	551 SD	50.000.000

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
1.1.1.1.1.1.1.1.24.101	Program Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Angka Putus Sekolah SMP/MTs			0.23 %	35.268.841.560		0.23 %	49.656.245.000
		Angka Melanjutkan SMP/MTs ke SMA/SMK/MA			80.45 %			80.45 %	
		Persentase SMP yang Menerapkan Pendidikan Karakter			53.85 %			53.85 %	
		Persentase SMP dengan Jumlah Siswa Ideal			36.72 %			36.72 %	
		Persentase SMP dengan Sarpras sesuai Standar Nasional Pendidikan (SNP)			74.42 %			74.42 %	
1.1.1.1.1.1.1.1.24.101.1	Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 1 Muntilan	Jumlah siswa penerima BOS	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	SMPN 1 Muntilan	556 Siswa	652.300.000		556 Siswa	588.000.000
1.1.1.1.1.1.1.1.24.101.2	Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 2 MUNTILAN	Jumlah siswa penerima BOS	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	SMPN 2 MUNTILAN	576 Siswa	619.300.000		576 Siswa	576.000.000
1.1.1.1.1.1.1.1.24.101.3	Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 3 MUNTILAN	Jumlah siswa penerima BOS	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	SMPN 3 MUNTILAN	664 Siswa	718.300.000		664 Siswa	672.000.000
1.1.1.1.1.1.1.1.24.101.4	Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 1 SALAMAN	Jumlah siswa penerima BOS	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	SMPN 1 SALAMAN	586 Siswa	671.000.000		586 Siswa	588.000.000
1.1.1.1.1.1.1.1.24.101.5	Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 2 SALAMAN	Jumlah siswa penerima BOS	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	SMPN 2 SALAMAN	354 Siswa	323.400.000		354 Siswa	384.000.000

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
1.1.1.1.1.1.1.1.24.101.6	Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 3 SALAMAN	Jumlah siswa penerima BOS	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	SMPN 3 SALAMAN	576 Siswa	557.700.000		576 Siswa	576.000.000
1.1.1.1.1.1.1.1.24.101.7	Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 1 BOROBUDUR	Jumlah siswa penerima BOS	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	SMPN 1 BOROBUDUR	697 Siswa	751.300.000		697 Siswa	697.000.000
1.1.1.1.1.1.1.1.24.101.8	Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 2 BOROBUDUR	Jumlah siswa penerima BOS	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	SMPN 2 BOROBUDUR	261 Siswa	297.000.000		261 Siswa	288.000.000
1.1.1.1.1.1.1.1.24.101.9	Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 1 SRUMBUNG	Jumlah siswa penerima BOS	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	SMPN 1 SRUMBUNG	650 Siswa	819.500.000		650 Siswa	664.000.000
1.1.1.1.1.1.1.1.24.101.10	Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 2 SRUMBUNG	Jumlah siswa penerima BOS	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	SMPN 2 SRUMBUNG	431 Siswa	471.900.000		431 Siswa	431.000.000
1.1.1.1.1.1.1.1.24.101.11	Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 1 DUKUN	Jumlah siswa penerima BOS	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	SMPN 1 DUKUN	576 Siswa	620.400.000		576 Siswa	576.000.000
1.1.1.1.1.1.1.1.24.101.12	Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 2 DUKUN	Jumlah siswa penerima BOS	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	SMPN 2 DUKUN	261 Siswa	272.800.000		261 Siswa	290.000.000

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1.1.1.1.1.1.1.1.24.101.13	Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 1 MUNGKID	Jumlah siswa penerima BOS	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	SMPN 1 MUNGKID	768 Siswa	825.000.000	768 Siswa	768.000.000
1.1.1.1.1.1.1.1.24.101.14	Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 2 MUNGKID	Jumlah siswa penerima BOS	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	SMPN2 MUNGKID	160 Siswa	521.400.000	160 Siswa	160.000.000
1.1.1.1.1.1.1.1.24.101.15	Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 1 KOTAMUNGKID	Jumlah siswa penerima BOS	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	SMPN 1 KOTA MUNGKID	571 Siswa	625.900.000	571 Siswa	576.000.000
1.1.1.1.1.1.1.1.24.101.16	Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 2 MERTOYUDAN	Jumlah siswa penerima BOS	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	SMPN 2 MERTOYUDAN	608 Siswa	665.500.000	608 Siswa	672.000.000
1.1.1.1.1.1.1.1.24.101.17	Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 3 MERTOYUDAN	Jumlah siswa penerima BOS	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	SMPN 3 MERTOYUDAN	576 Siswa	643.500.000	576 Siswa	576.000.000
1.1.1.1.1.1.1.1.24.101.18	Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 1 MERTOYUDAN	Jumlah siswa penerima BOS	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	SMPN 1 MERTOYUDAN	475 Siswa	521.400.000	475 Siswa	480.000.000
1.1.1.1.1.1.1.1.24.101.19	Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 1 TEGALREJO	Jumlah siswa penerima BOS	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	SMPN 1 TEGALREJO	638 Siswa	653.400.000	638 Siswa	576.000.000

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1.1.1.1.1.1.1.1.24.101.20	Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 2 TEGALREJO	Jumlah siswa penerima BOS	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	SMPN 2 TEGALREJO	280 Siswa	245.300.000	280 Siswa	300.000.000
1.1.1.1.1.1.1.1.24.101.21	Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 1 BANDONGAN	Jumlah siswa penerima BOS	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	SMPN 1 BANDONGAN	576 Siswa	657.800.000	576 Siswa	576.000.000
1.1.1.1.1.1.1.1.24.101.22	Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 2 BANDONGAN	Jumlah siswa penerima BOS	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	SMPN 2 BANDONGAN	503 Siswa	512.600.000	503 Siswa	576.000.000
1.1.1.1.1.1.1.1.24.101.23	Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 1 GRABAG	Jumlah siswa penerima BOS	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	SMPN 1 GRABAG	567 Siswa	627.000.000	567 Siswa	576.000.000
1.1.1.1.1.1.1.1.24.101.24	Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 2 GRABAG	Jumlah siswa penerima BOS	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	SMPN 2 GRABAG	559 Siswa	680.900.000	559 Siswa	576.000.000
1.1.1.1.1.1.1.1.24.101.25	Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 3 GRABAG	Jumlah siswa penerima BOS	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	SMPN 3 GRABAG	446 Siswa	432.300.000	446 Siswa	480.000.000
1.1.1.1.1.1.1.1.24.101.26	Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 1 GLUWAR	Jumlah siswa penerima BOS	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	SMPN 1 NGLUWAR	663 Siswa	733.700.000	663 Siswa	672.000.000

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1.1.1.1.1.1.1.1.24.101.27	Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 1 TEMPURAN	Jumlah siswa penerima BOS	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	SMPN 1 TEMPURAN	667 Siswa	784.300.000	667 Siswa	672.000.000
1.1.1.1.1.1.1.1.24.101.28	Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 2 TEMPURAN	Jumlah siswa penerima BOS	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	SMPN 2 TEMPURAN	529 Siswa	498.300.000	529 Siswa	576.000.000
1.1.1.1.1.1.1.1.24.101.29	Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 3 TEMPURAN	Jumlah siswa penerima BOS	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	SMPN 3 TEMPURAN	138 Siswa	115.500.000	138 Siswa	150.000.000
1.1.1.1.1.1.1.1.24.101.30	Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 1 SECANG	Jumlah siswa penerima BOS	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	SMPN 1 SECANG	566 Siswa	622.600.000	566 Siswa	576.000.000
1.1.1.1.1.1.1.1.24.101.31	Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 2 SECANG	Jumlah siswa penerima BOS	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	SMPN 2 SECANG	744 Siswa	834.900.000	744 Siswa	750.000.000
1.1.1.1.1.1.1.1.24.101.32	Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 3 SECANG	Jumlah siswa penerima BOS	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	SMPN 3 SECANG	269 Siswa	260.700.000	269 Siswa	288.000.000
1.1.1.1.1.1.1.1.24.101.33	Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 1 SAWANGAN	Jumlah siswa penerima BOS	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	SMPN 1 SAWANGAN	576 Siswa	620.400.000	576 Siswa	576.000.000

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1.1.1.1.1.1.1.1.24.101.34	Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 2 SAWANGAN	Jumlah siswa penerima BOS	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	SMPN 2 SAWANGAN	392 Siswa	423.500.000	392 Siswa	480.000.000
1.1.1.1.1.1.1.1.24.101.35	Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 3 SAWANGAN	Jumlah siswa penerima BOS	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	SMPN 3 SAWANGAN	361 Siswa	368.500.000	361 Siswa	384.000.000
1.1.1.1.1.1.1.1.24.101.36	Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 1 CANDIMULYO	Jumlah siswa penerima BOS	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	SMPN 1 CANDIMULYO	574 Siswa	643.500.000	574 Siswa	576.000.000
1.1.1.1.1.1.1.1.24.101.37	Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 2 CANDIMULYO	Jumlah siswa penerima BOS	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	SMPN 2 CANDIMULYO	567 Siswa	623.700.000	567 Siswa	576.000.000
1.1.1.1.1.1.1.1.24.101.38	Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 3 CANDIMULYO	Jumlah siswa penerima BOS	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	SMPN 3 CANDIMULYO	245 Siswa	248.600.000	245 Siswa	277.000.000
1.1.1.1.1.1.1.1.24.101.39	Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 1 SALAM	Jumlah siswa penerima BOS	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	SMPN 1 SALAM	576 Siswa	625.900.000	576 Siswa	576.000.000
1.1.1.1.1.1.1.1.24.101.40	Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 2 SALAM	Jumlah siswa penerima BOS	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	SMPN 2 SALAM	563 Siswa	619.300.000	563 Siswa	576.000.000

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
1.1.1.1.1.1.1.1.24.101.41	Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 3 SALAM	Jumlah siswa penerima BOS	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	SMPN 3 SALAM	535 Siswa	561.000.000		535 Siswa	545.000.000
1.1.1.1.1.1.1.1.24.101.42	Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 1 KAJORAN	Jumlah siswa penerima BOS	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	SMPN 1 KAJORAN	776 Siswa	815.100.000		776 Siswa	776.000.000
1.1.1.1.1.1.1.1.24.101.43	Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 2 KAJORAN	Jumlah siswa penerima BOS	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	SMPN 2 KAJORAN	539 Siswa	403.700.000		539 Siswa	384.000.000
1.1.1.1.1.1.1.1.24.101.44	Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 1 KALIANGKRIK	Jumlah siswa penerima BOS	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	SMPN 1 KALIANGKRIK	294 Siswa	440.000.000		294 Siswa	384.000.000
1.1.1.1.1.1.1.1.24.101.45	Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 2 KALIANGKRIK	Jumlah siswa penerima BOS	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	SMPN 2 KALIANGKRIK	272 Siswa	324.500.000		272 Siswa	315.000.000
1.1.1.1.1.1.1.1.24.101.46	Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 1 PAKIS	Jumlah siswa penerima BOS	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	SMPN 1 PAKIS	384 Siswa	273.900.000		384 Siswa	384.000.000
1.1.1.1.1.1.1.1.24.101.47	Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 2 PAKIS	Jumlah siswa penerima BOS	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	SMPN 2 PAKIS	384 Siswa	411.400.000		384 Siswa	384.000.000
1.1.1.1.1.1.1.1.24.101.48	Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 3 PAKIS	Jumlah siswa penerima BOS	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	SMPN 3 PAKIS	341 Siswa	401.500.000		341 Siswa	349.000.000

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1.1.1.1.1.1.1.1.24.101.49	Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 1 NGABLAH	Jumlah siswa penerima BOS	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN SMPN 1 NGABLAH	162 Siswa	441.100.000		162 Siswa	162.000.000
1.1.1.1.1.1.1.1.24.101.50	Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 2 NGABLAH	Jumlah siswa penerima BOS	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN SMPN 2 NGABLAH	96 Siswa	163.900.000		96 Siswa	96.000.000
1.1.1.1.1.1.1.1.24.101.51	Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 1 WINDUSARI	Jumlah siswa penerima BOS	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN SMPN 1 WINDUSARI	364 Siswa	444.400.000		364 Siswa	404.000.000
1.1.1.1.1.1.1.1.24.101.52	Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 2 WINDUSARI	Jumlah siswa penerima BOS	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN SMPN 2 WINDUSARI	380 Siswa	431.200.000		380 Siswa	384.000.000
1.1.1.1.1.1.1.1.24.101.53	Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 3 SATAP BOROBUDUR	Jumlah siswa penerima BOS	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN SMPN 3 SATAP BOROBUDUR	82 Siswa	89.100.000		82 Siswa	83.000.000
1.1.1.1.1.1.1.1.24.101.54	Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 4 SATAP WARANGAN PAKIS	Jumlah siswa penerima BOS	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN SMPN 4 SATAP WARANGAN PAKIS	196 Siswa	149.600.000		196 Siswa	200.000.000
1.1.1.1.1.1.1.1.24.101.55	Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 5 SATAP POGALAN PAKIS	Jumlah siswa penerima BOS	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN SMPN 5 SATAP POGALAN PAKIS	51 Siswa	104.500.000		51 Siswa	60.000.000

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
1.1.1.1.1.1.1.1.24.101.56	Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 4 BANDUNGREJO NGABLAK	Jumlah siswa penerima BOS	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	SMPN 4 BANDUNGREJO NGABLAK	100 Siswa	83.600.000		100 Siswa	110.000.000
1.1.1.1.1.1.1.1.24.101.57	Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 4 SATAP WONOLELO SAWANGAN	Jumlah siswa penerima BOS	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	SMPN 4 SATAP WONOLELO SAWANGAN	115 Siswa	140.800.000		115 Siswa	117.000.000
1.1.1.1.1.1.1.1.24.101.58	Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 3 SATAP PRAPELAN KALIANGKRIK	Jumlah siswa penerima BOS	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	SMPN 3 SATAP PRAPELAN KALIANGKRIK	288 Siswa	368.500.000		288 Siswa	288.000.000
1.1.1.1.1.1.1.1.24.101.59	Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 4 SATAP SALAMAN	Jumlah siswa penerima BOS	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	SMPN 4 SATAP SALAMAN	72 Siswa	73.700.000		72 Siswa	74.000.000
1.1.1.1.1.1.1.1.24.101.60	Penyelenggaraan UN	Jumlah SMP/MTs yang terfasilitasi	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	SMP di wilayah Kab. Magelang	213 sekolah/madrasah	300.000.000		213 sekolah/madrasah	525.000.000
1.1.1.1.1.1.1.1.24.101.61	Pendampingan Operasional BOS SMP	Jumlah penerima BOS	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	SPM di Wilayah Kab. Magelang	130 sekolah	500.000.000		130 sekolah	1.737.300.000
		Jumlah SMP Swasta penerima BOSDA			68 sekolah			68 sekolah	
		Jumlah M.Ts penerima BOSDA			71 madrasah			71 madrasah	
		Jumlah laporan BOS			130 sekolah			130 sekolah	
		Jumlah laporan BOSDA SMP Swasta dan M.Ts			139 sekolah/madrasah			139 sekolah/madrasah	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
1.1.1.1.1.1.1.1.24.101.62	Pengembangan dan penjaminan mutu SMP	Jumlah mapel yang ditekankan	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Wilayah Kab. Magelang	4 mapel	130.000.000		4 mapel	1.030.000.000
		Jumlah sekolah yang mengikuti lomba perpustakaan			21 sekolah			21 sekolah	
		Jumlah sekolah yang disurveil akreditasi			26 sekolah			26 sekolah	
		Jumlah SMP Terbuka yang difasilitasi			15 sekolah			15 sekolah	
		Jumlah SMP Terbuka yang mengikuti lomojari			15 sekolah			15 sekolah	
1.1.1.1.1.1.1.1.24.101.63	Pendampingan BSM dan GULKIN SMP	Jumlah siswa yang menerima BSM/Gulkin	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Wilayah Kab. Magelang	1600 anak	0		1600 anak	655.000.000
1.1.1.1.1.1.1.1.24.101.64	Pengembangan Kurikulum	Jumlah sekolah yang difasilitasi penguatan kurikulum	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Wilayah Kab. Magelang	130 sekolah	0		130 sekolah	200.000.000
1.1.1.1.1.1.1.1.24.101.65	Fasilitasi PPDB	Jumlah sekolah dengan PPDB Online	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Wilayah Kab. Magelang	59 SMPN	149.940.000		59 SMPN	273.585.000
1.1.1.1.1.1.1.1.24.101.66	Fasilitasi dan Pengembangan Peserta Didik SMP	Jumlah lomba yang terselenggara	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Wilayah Kab. Magelang	33 kegiatan	0		33 kegiatan	1.300.000.000
		Jumlah penerima beasiswa prestasi			1300 anak			1300 anak	
		Jumlah sekolah yang didampingi untuk mengimplementasikan pendidikan karakter			16 sekolah			16 sekolah	
		Jumlah juknis pendidikan karakter			1 juknis			1 juknis	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1.1.1.1.1.1.1.1.24.101.67	Fasilitasi dan pengembangan SMP	Jumlah sekolah model dan rujukan yang mendapat pendampingan	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Wilayah Kab. Magelang	12 sekolah	0	12 sekolah	350.000.000
		Jumlah sekolah inklusi yang mendapat pendampingan			4 sekolah		4 sekolah	
		Jumlah sekolah adiwiyata yang mendapat pendampingan			8 sekolah		8 sekolah	
		Jumlah sekolah yang mendapat bantuan pendampingan program ramah anak			16 sekolah		16 sekolah	
1.1.1.1.1.1.1.1.24.101.68	Bantuan Peningkatan dan Pengembangan Pembelajaran SMP (Ban Gub)	Jumlah paket bantuan	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	SMPN di Kab. Magelang	4 Paket	0	4 Paket	10.000.000
1.1.1.1.1.1.1.1.24.101.70	Pembinaan dan Pengembangan Kelembagaan SMP	Kesesuaian antar hasil akreditasi dengan layanan pendidikan	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Wilayah Kab. Magelang	26 sekolah	0	26 sekolah	130.000.000
1.1.1.1.1.1.1.1.24.101.72	Peningkatan Mutu Sarana Prasarana SMP	Jumlah paket talud & pagar sekolah	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Wilayah Kab. Magelang	13 paket	0	13 paket	9.767.360.000
		Jumlah pengadaan media pembelajaran			482 unit		482 unit	
		Jumlah pengadaan genset			3 unit		3 unit	
		Jumlah paket pengadaan komputer jaringan			3 paket		3 paket	
1.1.1.1.1.1.1.1.24.101.73	Peningkatan Mutu Sarana Prasarana Pendidikan SMP Negeri, Swasta (DAK)	Jumlah paket sarpras sekolah	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Wilayah Kab. Magelang	26 paket	5.657.101.560	26 paket	7.252.000.000

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1.1.1.1.1.1.1.1.25.101	Program Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal	Persentase PNF Terakreditaasi (LKP, PKBM)		67.39 %	3.349.224.955		67.39 %	7.860.866.000
		Persentase PAUD Terakreditasi (TK, KB, SPS)		60.22 %			60.22 %	
1.1.1.1.1.1.1.1.25.101.1	Pembelajaran PAUD	Pendidik PAUD yang mengikuti workshop	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Wilayah Kab. Magelang	200 orang	0	200 orang	600.000.000
		Jumlah pendidik yang mengikuti bintek			300 orang		300 orang	
1.1.1.1.1.1.1.1.25.101.2	Fasilitasi dan pengembangan PAUD	Jumlah Kecamatan yang difasilitasi GOPTKI dan BUNDA PAUD	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Wilayah Kabupaten Magelang	21 Kelompok	287.145.600	21 Kelompok	294.000.000
		Jumlah Gugus PAUD yang difasilitasi			21 Gugus		21 Gugus	
		Jumlah kegiatan Semarak PAUD			1 Lomba		1 Lomba	
		Jumlah PAUD yang difasilitasi menjadi PAUD HI			46 Lembaga		46 Lembaga	
1.1.1.1.1.1.1.1.25.101.3	Pendampingan Operasional BOP PAUD	Jumlah lembaga yang terfasilitasi BOP PAUD	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Wilayah Kab. Magelang	800 lembaga	200.000.000	800 lembaga	1.420.866.000
		Jumlah pendidik PAUD yang menerima Bantuan Transport			0 guru		0 guru	
1.1.1.1.1.1.1.1.25.101.4	Penyelenggaraan Kejar Paket A, B dan C	Jumlah Kelompok/Lembaga Paket A yang difasilitasi	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Wilayah Kab. Magelang	4 Lembaga	500.000.000	4 Lembaga	1.695.000.000
		Jumlah Kelompok/Lembaga Paket B yang difasilitasi			30 Lembaga		30 Lembaga	
		Jumlah Kelompok/Lembaga Paket C yang difasilitasi			60 Lembaga		60 Lembaga	
		Jumlah tutor yang mengikuti Pelatihan E-Learning			40 orang		40 orang	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1.1.1.1.1.1.1.1.25.101.5	Fasilitasi Pengembangan Pendidikan Masyarakat dan Keluarga	Jumlah lembaga yang mendapatkan sosialisasi Bindikel	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Wilayah Kab. Magelang	440 Lembaga	0	440 Lembaga	250.000.000
		Lembaga TBM penerima bantuan			30 Lembaga		30 Lembaga	
1.1.1.1.1.1.1.1.25.101.6	Penyelenggaraan UNPK Paket A,B dan C	Jumlah siswa paket ABC yang difasilitasi USBN dan UN	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Wilayah Kab. Magelang	850 orang	200.000.000	850 orang	350.000.000
1.1.1.1.1.1.1.1.25.101.7	Peningkatan mutu sarana prasarana Paud dan Dikmas	Jumlah PAUD yang menerima APE	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Lembaga PAUD dan Dikmas di Kab. Magelang	50 PAUD	100.000.000	50 PAUD	685.000.000
		Jumlah lembaga PAUD yang menerima Bantuan Sarpras			50 PAUD		50 PAUD	
		Jumlah Lembaga LKP/PKBM yang menerima bantuan Sarpras			0 Lembaga		0 Lembaga	
1.1.1.1.1.1.1.1.25.101.8	Pembinaan dan Pengembangan Kelembagaan PAUD dan Dikmas	Jumlah Lembaga Paud dan Dikmas yang difasilitasi proses akreditasi	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Wilayah Kab. Magelang	75 Lembaga	0	75 Lembaga	230.000.000
		Jumlah lembaga PAud dan Dikmas yang dibina sesuai dengan tupoksi			120 Peserta		120 Peserta	
		Jumlah peserta lomba apresiasi PAud dan Dikmas yang difasilitasi			15 orang		15 orang	
1.1.1.1.1.1.1.1.25.101.9	Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan (DAK Non Fisik)	Jumlah penerima BOP Kesetaraan	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Wilayah Kab. Magelang	21 Lembaga	767.376.565	21 Lembaga	836.000.000
1.1.1.1.1.1.1.1.25.101.10	Peningkatan Mutu Sarana Prasarana SKB (DAK)	Jumlah bantuan yang diterima	MENOREH, SALAMAN	SKB Salaman, Jln Salaman No. 61	1 paket	1.294.702.790	1 paket	1.500.000.000

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
1.1.1.1.1.1.1.1.26.101	Program Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan	Persentase Guru Bersertifikat			92.00 %	45.211.316.000		92.00 %	39.752.972.000
		Persentase Guru Yang Lulus Uji Kompetensi Guru			67.45 %			67.45 %	
1.1.1.1.1.1.1.1.26.101.1	Pembinaan GTK	Jumlah guru yang mengikuti peningkatan integritas	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Wilayah Kab. Magelang	750 Orang	0		750 Orang	400.000.000
		Jumlah laporan hasil kegiatan penataan guru			1 dokumen			1 dokumen	
		Jumlah laporan penanganan kasus			1 dokumen			1 dokumen	
		Jumlah laporan pelayanan administrasi kepegawaian			1 dokumen			1 dokumen	
1.1.1.1.1.1.1.1.26.101.2	Fasilitasi Pengembangan Keprofesionalan Berkelanjutan (PKB)	Jumlah kegiatan fasilitasi PKB	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Wilayah Kab. Magelang	1 Kegiatan	0		1 Kegiatan	300.000.000
1.1.1.1.1.1.1.1.26.101.3	Peningkatan Kompetensi Guru dan Tenaga Pendidian	Jumlah peserta bintek peningkatan kompetensi GTK	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Guru dan Tenaga Kependidikan di Kab. Magelang	160 Orang	200.000.000		160 Orang	700.000.000
		Jumlah peserta bintek Tim PAK			40 Orang			40 Orang	
		Jumlah peserta bintek assesor PKG			40 Orang			40 Orang	
		Jumlah peserta bintek guru sekolah inklusi			40 Orang			40 Orang	
		Jumlah peserta bintek pendidikan karakter			40 Orang			40 Orang	
1.1.1.1.1.1.1.1.26.101.4	Penilaian Angka Kredit (PAK)	Jumlah guru yang difasilitasi angka kredit	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Wilayah Kabupaten Magelang	3000 Orang	100.000.000		3000 Orang	177.500.000

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1.1.1.1.1.1.1.26.101.5	Pelaksanaan Sertifikasi guru dan Pengawas	Jumlah guru dan pengawas yang difasilitasi sertifikasinya	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Wilayah Kab. Magelang	3000 Orang	0	3000 Orang	75.000.000
1.1.1.1.1.1.1.26.101.6	Pemilihan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Berprestasi	Jumlah kegiatan seleksi pendidik dan tenaga kependidikan formal dan non formal	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Disdiokbud Kab. Magelang	2 Kegiatan	0	2 Kegiatan	385.000.000
1.1.1.1.1.1.1.26.101.7	BOSDA (Sekolah Negeri)	Jumlah pendidik dan tenaga kependidikan yang mendapatkan BOSDA	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Wilayah Kabupaten Magelang	1662 orang	44.611.316.000	1662 orang	37.265.472.000
1.1.1.1.1.1.1.26.101.8	Peningkatan Kreativitas Pegawai	jumlah peserta kegiatan peningkatan kreatifitas pegawai	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Disdikbud Kab. Magelang	45 Orang	50.000.000	45 Orang	50.000.000
1.1.1.1.1.1.1.26.101.9	Pengembangan Karir	Jumlah kepala sekolah yang dinilai kinerjanya/PKKS	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Wilayah Kabupaten Magelang	45 orang	250.000.000	45 orang	400.000.000
		Jumlah peserta penyiapan dan pembekalan calon KS dan pengawas			70 orang		70 orang	
2	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar					467.594.000		3.795.766.000
2.16	Pendidikan					467.594.000		3.795.766.000
2.16.2.16.1.1.1.21.216	Program Perlindungan dan Pengembangan Kebudayaan	Persentase Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan			11.59 Persen	467.594.000	11.59 Persen	3.795.766.000
		Persentase Karya Budaya yang Terlayani			4.20 Persen		4.20 Persen	
		Persentase Kelompok Seni Budaya yang Aktif			84.13 Persen		84.13 Persen	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
2.16.2.16.1.1.1.1.21.216.1	Pelestarian dan Aktualisasi Adat Budaya Daerah	Jumlah Kelompok Adat Yang Dibina	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Wilayah Kab. Magelang	22 Kelompok	0	22 Kelompok	740.000.000
		Jumlah permainan tradisional yang dilestarikan			15 Jenis		15 Jenis	
		Jumlah Naskah Jawa dan Geguritan yang dihasilkan			0 Naskah		0 Naskah	
		Jumlah Tosan Aji yang dijamah dan dipamerkan			0 Buah		0 Buah	
		Jumlah Upacara Tradisi yang Difasilitasi			21 Upacara Tradisi		21 Upacara Tradisi	
2.16.2.16.1.1.1.1.21.216.2	Sejarah dan Pelestarian Nilai Tradisi	Jumlah OPK WBTB	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Wilayah Kab. Magelang	3 Kelompok	0	3 Kelompok	227.327.700
		Jumlah peserta penghayat kepercayaan			11 organisasi		11 organisasi	
		Jumlah peserta lawatan sejarah			90 orang		90 orang	
2.16.2.16.1.1.1.1.21.216.3	Pertunjukan Seni Budaya	Jumlah Festival	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Wilayah Kab. Magelang	4 festival	275.294.000	4 festival	1.725.000.000
		Jumlah pertunjukan			10 pertunjukan		10 pertunjukan	
		Jumlah Kesenian yang dikirim			6 Kelompok		6 Kelompok	
2.16.2.16.1.1.1.1.21.216.4	Fasilitasi dan Infentarisasi Seni Budaya	Jumlah Kesenian yang didata	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Wilayah Kab. Magelang	100 kesenian	0	100 kesenian	80.000.000
		Jumlah Film Dokumenter yang dihasilkan			3 Film		3 Film	
		Jumlah Kesenian yang didokumentasikan			10 Dokumen		10 Dokumen	
2.16.2.16.1.1.1.1.21.216.5	Perlindungan Benda Cagar Budaya	jumlah BCB yang dipelihara	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Wilayah Kabupaten Magelang	949 BCB	192.300.000	949 BCB	360.554.000
		Jumlah Juru pelihara yang mendapat pembinaan			90 orang		90 orang	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
2.16.2.16.1.1.1.1.21.216.6	Edukasi Berbasis Kebudayaan	Jumlah peserta kemah budaya	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Wilayah Kab. Magelang	250 orang	0		250 orang	212.884.300
		Jumlah peserta lomba karya ilmiah			80 orang			80 orang	
		Jumlah peserta edukasi berbasis budaya			220 orang			220 orang	
2.16.2.16.1.1.1.1.21.216.7	Bantuan Operasional Penyelenggaraan Musium dan Taman Budaya (DAK Non Fisik)	Operasional penyelenggaraan museum dan taman budaya	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Wilayah Kab. Magelang	1 paket	0		1 paket	450.000.000
Total						172.881.742.635			200.544.375.000

PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH

KABUPATEN MAGELANG

TAHUN 2021

Nama Perangkat Daerah : DINAS KESEHATAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
1	2	3	4		5	6	7	8	9
1	Urusan Wajib Pelayanan Dasar					176.675.418.519			344.526.255.043
1.2	Kesehatan					176.675.418.519			344.526.255.043
1.2.1.2.1.2.1.1.7.102	Program Manajemen Administrasi Pelayanan Umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Pelayanan Umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah			100 persen	1.464.399.999		100 persen	60.782.050.000
1.2.1.2.1.2.1.1.7.102.1	Pengelolaan Surat Menyurat, Kearsipan dan Bahan Pustaka	Jumlah surat yang dikelola	DINAS KESEHATAN	Dinas Kesehatan	8100 surat	50.000.000		8100 surat	90.000.000
1.2.1.2.1.2.1.1.7.102.2	Penyelenggaraan Koordinasi dan Konsultasi Perangkat Daerah	Jumlah perjalanan dinas luar daerah yang terlaksana	DINAS KESEHATAN	Dinas Kesehatan	65 OH	84.999.999		65 OH	200.000.000
		Jumlah rapat koordinasi yang diselenggarakan			35 OK			35 OK	
		Jumlah perjalanan dinas dalam daerah yang terlaksana			35 OH			35 OH	
1.2.1.2.1.2.1.1.7.102.3	Pengadaan dan Pengelolaan Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya	Jumlah paket pengadaan perlengkapan gedung kantor	DINAS KESEHATAN	Dinas Kesehatan dan UPT	4 paket	670.000.000		4 paket	3.000.000.000
		Jumlah paket pengadaan peralatan gedung kantor			4 paket			4 paket	
1.2.1.2.1.2.1.1.7.102.4	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya	Jumlah paket gedung yang dipelihara	DINAS KESEHATAN	Dinas Kesehatan dan UPT	3 paket	359.400.000		3 paket	350.000.000
1.2.1.2.1.2.1.1.7.102.5	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya	Jumlah paket pemeliharaan peralatan gedung kantor	DINAS KESEHATAN	Dinas Kesehatan dan UPT	1 paket	300.000.000		1 paket	732.050.000
		Jumlah paket pemeliharaan perlengkapan gedung kantor			1 paket			1 paket	
1.2.1.2.1.2.1.1.7.102.6	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya	Jumlah paket rehab gedung	DINAS KESEHATAN	Dinas Kesehatan dan UPT	1 paket	0		1 paket	6.000.000.000
1.2.1.2.1.2.1.1.7.102.7	Peningkatan Kapasitas dan Disiplin Aparatur Sipil Negara	Frekuensi pembinaan ASN	DINAS KESEHATAN	Dinas Kesehatan dan UPT	12 kali	0		12 kali	10.000.000
1.2.1.2.1.2.1.1.7.102.8	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah paket pengadaan kendaraan dinas	DINAS KESEHATAN	Dinas Kesehatan	1 paket	0		1 paket	400.000.000
1.2.1.2.1.2.1.1.7.102.9	Pengadaan Tanah	Jumlah paket pengadaan tanah	DINAS KESEHATAN	Puskesmas	2 paket	0		2 paket	50.000.000.000

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
1.2.1.2.1.2.1.1.8.102	Program Perencanaan, Keuangan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian perencanaan, evaluasi kinerja OPD, dan keuangan perangkat daerah			100 persen	146.000.000		100 persen	180.000.000
1.2.1.2.1.2.1.1.8.102.1	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah laporan keuangan yang tersusun	DINAS KESEHATAN	Dinas Kesehatan	6 dokumen	116.000.000		6 dokumen	150.000.000
1.2.1.2.1.2.1.1.8.102.2	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen renja perangkat daerah yang tersusun	DINAS KESEHATAN		2 dokumen	10.000.000		2 dokumen	10.000.000
		Jumlah dokumen perencanaan			8 dokumen			8 dokumen	
1.2.1.2.1.2.1.1.8.102.3	Penyusunan Laporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen pelaporan tahunan yang tersusun	DINAS KESEHATAN		15 dokumen	10.000.000		15 dokumen	10.000.000
		Jumlah dokumen monitoring, evaluasi dan pelaporan tribulanan yang tersusun			20 dokumen			20 dokumen	
		Jumlah dokumen pelaporan bulanan yang tersusun			15 dokumen			15 dokumen	
		Jumlah kegiatan evaluasi kinerja			50 kali			50 kali	
		Jumlah Dokumen Profil Perangkat Daerah yang tersusun			1 Dokumen			1 Dokumen	
1.2.1.2.1.2.1.1.8.102.4	Penyusunan Dokumen Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Perangkat Daerah	Jumlah dokumen data perangkat daerah yang tersusun	DINAS KESEHATAN		1 paket	10.000.000		1 paket	10.000.000
		Cakupan pengembangan e-government			100 %			100 %	
1.2.1.2.1.2.1.1.34.102	Program Pelayanan Kesehatan	Cakupan Mutu Pelayanan FKTP			35 persen	60.914.131.542		35 persen	127.993.197.000
		Cakupan Mutu Pelayanan FKTL			35 persen			35 persen	
		Cakupan Mutu Pelayanan Laboratorium			35 persen			35 persen	
1.2.1.2.1.2.1.1.34.102.1	Pengadaan Bahan dan Pemeriksaan Laboratorium	Jumlah bahan pemeriksaan laboratorium sesuai jumlah parameter pemeriksaan	DINAS KESEHATAN	Dinas Kesehatan dan UPT	3 bahan	0		3 bahan	200.000.000
1.2.1.2.1.2.1.1.34.102.2	Penyediaan Jasa Pelayanan Medis Umum	Jumlah parameter yang diperiksa dan jasa medis	DINAS KESEHATAN	Dinas Kesehatan dan UPT	142 parameter	100.000.000		142 parameter	100.000.000
1.2.1.2.1.2.1.1.34.102.4	Pelayanan kesehatan Masyarakat Miskin (Maskin) Non JAMKESMAS (Gulkin)	Presentase pembayaran Klaim Masyarakat Miskin (Maskin) yang benar	DINAS KESEHATAN	Dinas Kesehatan	100 %	16.678.025.543		100 %	33.186.280.000
1.2.1.2.1.2.1.1.34.102.5	Pelayanan kesehatan khusus dan tradisional	Persentase pembayaran klaim pelayanan kesehatan khusus yang benar	DINAS KESEHATAN	Dinas Kesehatan dan UPT	100 %	0		100 %	50.000.000
		Persentase pembinaan penyehat tradisional			70 %			70 %	
1.2.1.2.1.2.1.1.34.102.6	Jaminan Persalinan (DAK Non Fisik)	Presentase pembayaran klaim Jampersal Yang Benar	DINAS KESEHATAN	Dinas Kesehatan	100 %	3.032.083.000		100 %	2.812.277.000
1.2.1.2.1.2.1.1.34.102.7	Peningkatan Mutu Pelayanan FKTP	Jumlah FKTP yang dibina	DINAS KESEHATAN	Dinas Kesehatan dan UPT	54 FKTP	70.000.000		54 FKTP	1.300.000.000

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
1.2.1.2.1.2.1.1.34.102.8	Pembinaan Akreditasi Puskesmas (DAK)	Jumlah puskesmas terakreditasi	DINAS KESEHATAN	Dinas Kesehatan dan UPT	29 puskesmas	1.713.978.000		29 puskesmas	1.844.640.000
1.2.1.2.1.2.1.1.34.102.9	Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Rujukan	Persentase mutu pelayanan rujukan	DINAS KESEHATAN	Dinas Kesehatan dan UPT	75 %	350.000.000		75 %	1.000.000.000
1.2.1.2.1.2.1.1.34.102.10	Pembinaan dan Pengembangan Pelayanan Kesehatan Rujukan	Persentase pembinaan dan pengembangan Pelayanan Rujukan	DINAS KESEHATAN	Dinas Kesehatan dan UPT	100 %	0		100 %	100.000.000
1.2.1.2.1.2.1.1.34.102.11	Pelayanan RS Merah Putih	Persentase layanan RS	DINAS KESEHATAN	Dinas Kesehatan	100 %	37.370.045.000		100 %	73.200.000.000
1.2.1.2.1.2.1.1.34.102.12	Pelayanan RS Candi Umbul	Persentase layanan RS	DINAS KESEHATAN	Dinas Kesehatan	100 %	800.000.000		100 %	7.100.000.000
1.2.1.2.1.2.1.1.34.102.13	Pelayanan RS Bukit Menoreh	Persentase layanan RS	DINAS KESEHATAN	Dinas Kesehatan	100 %	799.999.999		100 %	7.100.000.000
1.2.1.2.1.2.1.1.35.102	Program Peningkatan Kualitas Puskesmas dan Rumah Sakit	Persentase puskesmas/jejaring/jaringan/labkesmas/IFK yang memiliki sarana dan prasarana dalam kondisi baik			35 persen	16.651.472.151		35 persen	15.840.000.000
		Persentase RS yang memiliki sarana dan prasarana dalam kondisi baik			35 persen			35 persen	
1.2.1.2.1.2.1.1.35.102.7	Pembangunan Puskesmas	Jumlah pembangunan gedung puskesmas	DINAS KESEHATAN	Puskesmas	2 gedung	0		2 gedung	11.000.000.000
1.2.1.1.35.102.7.2	Pembangunan Puskesmas		DINAS KESEHATAN	Puskesmas Secang 2	1 Paket	4.597.718.000			4.597.718.000
1.2.1.1.35.102.7.1	Pembangunan Puskesmas		DINAS KESEHATAN	Puskesmas Pakis	1 paket	4.597.718.000			4.597.718.000
1.2.1.2.1.2.1.1.35.102.10	Pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana	Jumlah pemenuhan sarana dan prasarana	DINAS KESEHATAN	Dinas Kesehatan dan UPT	2 paket	16.651.472.151		2 paket	4.840.000.000
1.2.1.1.35.102.10.4	Pembangunan Instalasi Farmasi Kesehatan		DINAS KESEHATAN	Instalasi Farmasi Kesehatan	1 Paket	2.639.621.301			2.639.621.301
1.2.1.1.35.102.10.5	Pembangunan Laboratorium Kesehatan Masyarakat		DINAS KESEHATAN	Laboratorium Kesehatan Masyarakat	1 Paket	8.036.470.000			8.036.470.000
1.2.1.1.35.102.10.3	Pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana (DAK Penugasan)		DINAS KESEHATAN	Dinas Kesehatan	1 paket	715.463.209			1.584.981.000
1.2.1.1.35.102.10.1	Pengadaan sarana dan prasarana		DINAS KESEHATAN	Dinas Kesehatan	1 paket	0			4.840.000.000
1.2.1.1.35.102.10.2	Pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana (DAK Reguler)		DINAS KESEHATAN	Dinas Kesehatan	1 paket	4.647.107.000			1.931.065.457

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
1.2.1.2.1.2.1.1.36.102	Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Cakupan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular			80 Persen	2.617.459.768		80 Persen	10.674.052.000
		Cakupan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular			100 persen			100 persen	
		Cakupan Surveilans dan Imunisasi			70 persen			70 persen	
		Pelayanan kesehatan penderita hipertensi *)			100 persen			100 persen	
		Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus *)			100 persen			100 persen	
		Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat *)			100 persen			100 persen	
		Pelayanan kesehatan orang terduga TB*)			100 persen			100 persen	
		Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV *)			100 persen			100 persen	
		Pelayanan kesehatan pada usia produktif *)			100 persen			100 persen	
1.2.1.2.1.2.1.1.36.102.1	Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular	Persentase desa dengan Posbindu Aktif	DINAS KESEHATAN	Dinas Kesehatan dan UPT	70 %	300.000.000		70 %	2.000.000.000
		Persentase Puskesmas yang melaksanakan Pelayanan Terpadu PTM			50 %			50 %	
		Persentase pelayanan Deteksi Dini Kanker sesuai standar			20 %			20 %	
1.2.1.2.1.2.1.1.36.102.2	Penanggulangan kesehatan Jiwa Masyarakat	Persentase Desa Siaga Sehat Jiwa yang terbentuk	DINAS KESEHATAN	Dinas Kesehatan dan UPT	50 %	0		50 %	1.000.000.000
1.2.1.2.1.2.1.1.36.102.4	Penyelenggaraan Surveilans Penyakit Menular dan Keracunan Makanan yang berpotensi KLB serta Penanganan Krisis Kesehatan	Persentase Desa/Kelurahan yang mengalami krisis kesehatan ditangani <24 jam	DINAS KESEHATAN	Dinas Kesehatan dan UPT	100 %	10.000.000		100 %	250.000.000
		Persentase Desa/Kelurahan yang mengalami KLB penyakit menular dan keracunan makanan ditangani <24 jam			100 %			100 %	
1.2.1.2.1.2.1.1.36.102.6	Bantuan Operasional Kesehatan Upaya Kesehatan Masyarakat Kabupaten (DAK Non Fisik)	Persentase capaian pelaksanaan kegiatan UKM rujukan mendukung preventif dan promotif kesehatan	DINAS KESEHATAN	Dinas Kesehatan dan UPT	85 %	1.205.121.000		85 %	1.309.204.000
1.2.1.2.1.2.1.1.36.102.7	Dukungan Manajemen (DAK Non Fisik)	Persentase capaian pelaksanaan kegiatan dukungan manajemen mendukung preventif dan promotif kesehatan	DINAS KESEHATAN	Dinas Kesehatan	85 %	68.898.000		85 %	68.898.000
1.2.1.2.1.2.1.1.36.102.8	Pencegahan dan pengendalian penyakit TB, HIV/AIDS dan penyakit menular terabaikan	Cakupan penanganan kasus penyakit menular langsung terabaikan sesuai standar	DINAS KESEHATAN	Dinas Kesehatan dan UPT	70 %	833.440.768		70 %	1.000.000.000
1.2.1.2.1.2.1.1.36.102.9	Pencegahan dan Pengendalian Penyakit DBD, Malaria dan Penyakit Zoonosis	Cakupan penanganan kasus DBD	DINAS KESEHATAN	Dinas Kesehatan dan UPT	85 %	200.000.000		85 %	1.210.000.000
		Cakupan penanganan kasus malaria			85 %			85 %	
		Cakupan penanganan kasus zoonosis			85 %			85 %	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1.2.1.2.1.2.1.1.36.102.10	Pengendalian dan Pencegahan Penyakit (DAK Penugasan)	Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan pencegahan dan pengendalian penyakit	DINAS KESEHATAN	Dinas Kesehatan dan UPT	75 %	0	75 %	3.585.950.000
1.2.1.2.1.2.1.1.36.102.40	Penyelenggaraan Imunisasi	Cakupan imunisasi dasar lengkap	DINAS KESEHATAN	Dinas Kesehatan dan UPT	95 %	0	95 %	250.000.000
1.2.1.2.1.2.1.1.37.102	Program Sumber Daya Kesehatan	Cakupan sumber daya manusia kesehatan			84 persen	13.199.371.699	84 persen	14.692.234.240
		Cakupan sarana prasarana dan pembinaan sumber daya kesehatan			88 persen		88 persen	
1.2.1.2.1.2.1.1.37.102.1	Pemeliharaan dan Kalibrasi Alat Kesehatan	Persentase alat kesehatan yang dikalibrasi	DINAS KESEHATAN	Puskesmas	70 %	0	70 %	181.500.000
1.2.1.2.1.2.1.1.37.102.2	Pengadaan Perbekalan Kesehatan (BMHP) dan Reagensia	Persentase ketersediaan Perbekalan kesehatan dan reagensia di Puskesmas	DINAS KESEHATAN	Dinas Kesehatan dan UPT	100 %	6.664.526.542	100 %	2.057.000.000
1.2.1.1.37.102.2.1	Pengadaan Perbekalan Kesehatan (BMHP) dan Reagensia (DBHCHT)		DINAS KESEHATAN	Dinas Kesehatan dan UPT	1 paket	1.500.000.000		1.500.000.000
1.2.1.1.37.102.2.2	Pengadaan Bahan Habis Pakai (BHP) (DAK)		DINAS KESEHATAN	Dinas Kesehatan dan UPT	1 paket	5.145.579.042		5.145.579.042
1.2.1.2.1.2.1.1.37.102.3	Pengadaan Alat Kesehatan Untuk Perawatan Kesehatan Bagi Penderita Gangguan Janin dan Kehamilan Akibat Asap Rokok (DBHCHT)	Jumlah pengadaan alat kesehatan	DINAS KESEHATAN	Puskesmas	1 paket	1.300.000.000	1 paket	1.815.000.000
1.2.1.2.1.2.1.1.37.102.4	Pengadaan obat dan perbekalan kesehatan	Persentase ketersediaan obat dan buffer stock	DINAS KESEHATAN	Puskesmas	100 %	1.500.000.000	100 %	2.541.000.000
1.2.1.2.1.2.1.1.37.102.5	Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan (DAK)	Persentase ketersediaan obat dan buffer stock	DINAS KESEHATAN	Puskesmas	100 %	3.038.205.157	100 %	7.300.830.240
1.2.1.2.1.2.1.1.37.102.6	Pengadaan Obat Gizi (DAK Penugasan)	Persentase ketersediaan obat dan buffer stock	DINAS KESEHATAN	Puskesmas	100 %	0	100 %	0
1.2.1.2.1.2.1.1.37.102.7	Kursus Penjamah Makanan-Minuman	Persentase penjamah makanan yang meningkat pengetahuannya	DINAS KESEHATAN	Dinas Kesehatan	100 %	0	100 %	27.830.000
1.2.1.2.1.2.1.1.37.102.8	Pengawasan dan Peninjauan Sarana Produksi dan Distribusi Obat dan Makanan dan Alat Kesehatan	Persentase lokasi pembinaan pengawasan obat dan makanan	DINAS KESEHATAN	Dinas Kesehatan	100 %	0	100 %	75.000.000
1.2.1.2.1.2.1.1.37.102.9	Pembinaan Pengelolaan BLUD	Persentase pembinaan UPT BLUD	DINAS KESEHATAN	Dinas Kesehatan dan UPT	100 %	0	100 %	70.000.000

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
1.2.1.2.1.2.1.1.37.102.10	Perencanaan, Peningkatan Kapasitas, Penilaian, Pembinaan Sarana dan Tenaga Kesehatan	Persentase terlatihnya tenaga kesehatan (dokter, bidan, perawat, pelaksana Gizi) di puskesmas serta pembinaan perijinan nakes di fasyankes	DINAS KESEHATAN	Dinas Kesehatan dan UPT	80 %	15.000.000		80 %	80.000.000
		Persentase tenaga kesehatan berijin			100 %			100 %	
		Persentase pelaksanaan penilaian angka kredit dan ukom jabfung nakes			100 %			100 %	
1.2.1.2.1.2.1.1.37.102.11	Pengelolaan obat (pemantauan, penyimpanan, distribusi dan pemusnahan)	Persentase fasilitasi manajemen pengelolaan obat di UPT	DINAS KESEHATAN	Dinas Kesehatan dan UPT	100 %	30.000.000		100 %	50.000.000
1.2.1.2.1.2.1.1.37.102.12	Perencanaan, pengusulan, monev, pembinaan obat	Jumlah dokumen perencanaan, pengusulan, monev dan pembinaan obat	DINAS KESEHATAN	Dinas Kesehatan dan UPT	4 dokumen	0		4 dokumen	114.950.000
1.2.1.2.1.2.1.1.37.102.13	Distribusi Obat dan E-Logistik	Persentase distribusi obat dan E logistik di UPT	DINAS KESEHATAN	Dinas Kesehatan dan UPT	100 %	651.640.000		100 %	379.124.000
1.2.1.1.37.102.13.3	Pengawasan Makanan & Minuman Industri Rumah Tangga		DINAS KESEHATAN	Dinas Kesehatan dan UPT	1 paket	563.987.000			563.987.000
1.2.1.1.37.102.13.2	Pengawasan Fasilitas Pelayanan Kefarmasian		DINAS KESEHATAN	Dinas Kesehatan dan UPT	1 paket	0			55.839.000
1.2.1.1.37.102.13.1	BOK Farmasi		DINAS KESEHATAN	Dinas Kesehatan dan UPT	1 paket	87.653.000			87.653.000
1.2.1.2.1.2.1.1.38.102	Program Kesehatan Masyarakat	Cakupan Kesehatan Ibu, Anak, Lansia, Gizi			64 persen	2.235.094.360		64 persen	6.088.643.000
		Cakupan Kesehatan Lingkungan, Kesjaor			78 persen			78 persen	
		Cakupan Pemberdayaan Masyarakat dan Promosi Kesehatan			62 persen			62 persen	
		Pelayanan kesehatan ibu hamil *)			100 persen			100 persen	
		Pelayanan kesehatan ibu bersalin *)			100 persen			100 persen	
		Pelayanan kesehatan bayi baru lahir*)			100 persen			100 persen	
		Pelayanan kesehatan balita*)			100 persen			100 persen	
		Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar *)			100 persen			100 persen	
		Pelayanan kesehatan pada usia lanjut *)			100 persen			100 persen	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1.2.1.2.1.2.1.1.38.102.1	Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Desa ODF/ Stop buang Air Besar Sembarangan	DINAS KESEHATAN	Dinas Kesehatan	372 Desa	37.598.560	372 Desa	200.000.000
		Jumlah desa melaksanakan STBM			12 Desa		12 Desa	
		Persentase penduduk dengan akses air bersih			85 %		85 %	
		Persentase pengelolaan sampah rumah tangga memenuhi syarat			85 %		85 %	
		Persentase TTU memenuhi syarat			80 %		80 %	
		Persentase Rumah Tangga sehat			85 %		85 %	
		Jumlah TPA yang diintervensi			2 TPA		2 TPA	
		Persentase pengelolaan limbah cair rumah tangga memenuhi syarat			85 %		85 %	
		Persentase TPM yang memenuhi syarat kesehatan			75 %		75 %	
		Jumlah TPS yang diintervensi			5 TPS		5 TPS	
1.2.1.2.1.2.1.1.38.102.2	Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olah Raga	Jumlah Kelompok/Klub olahraga yang dibina	DINAS KESEHATAN	Dinas Kesehatan dan UPT	40 Kelompok/Klub	0	40 Kelompok/Klub	100.198.000
		Persentase Layanan Pengukuran Kebugaran calon jamaah haji			60 %		60 %	
		Persentase pengukuran kebugaran jasmani pada anak sekolah			65 %		65 %	
		Persentase Pekerja formal mendapatkan konseling			60 %		60 %	
		Persentase Pekerja informal mendapatkan konseling			55 %		55 %	
		Persentase Upaya Promotif dan preventif yang dilakukan pada kelompok kesehatan kerja			60 %		60 %	
1.2.1.2.1.2.1.1.38.102.4	Upaya Promosi Kesehatan	Persentase ketersediaan media dan pelaksanaan kegiatan promosi kesehatan	DINAS KESEHATAN	Dinas Kesehatan dan UPT	74 %	82.795.680	74 %	75.000.000
1.2.1.2.1.2.1.1.38.102.5	Pemberdayaan Masyarakat	Persentase UKBM yang terbentuk	DINAS KESEHATAN	Dinas Kesehatan dan UPT	50 %	0	50 %	75.000.000

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1.2.1.2.1.2.1.1.38.102.6	Pelayanan Gizi Keluarga	Jumlah obat penanggulangan kekurangan gizi, bahan percontohan dan pemeriksaan TSH dan IUE ibu hamil dan TSH bayi	DINAS KESEHATAN	Dinas Kesehatan dan UPT	2 paket vit A, 1 paket bahan percontohan, TSH dan IUE ih 1000 org, TSH bayi 300 org	672.197.120	2 paket vit A, 1 paket bahan percontohan, TSH dan IUE ih 1000 org, TSH bayi 300 org	2.638.445.000
		Jumlah keluarga memahami dan disurvey kadarzi			200 keluarga		200 keluarga	
		Jumlah pelaksana gizi yang ditingkatkan kapasitasnya tentang SKPG dan dietetik klinik			SKPG 29 orang dan Dietetik klinik 34 orang dietetik klinik		SKPG 29 orang dan Dietetik klinik 34 orang dietetik klinik	
		Jumlah balita gizi kurang/buruk dan bumil KEK dilayani			balita gizkur/buruk 600 org, ih kek 700 org bumil KEK		balita gizkur/buruk 600 org, ih kek 700 org bumil KEK	
		jumlah rakor gaky, monitoring garam beryodium, pengadaan iodium tester			2 kali, 21 kec dan 1700 iodium tester		2 kali, 21 kec dan 1700 iodium tester	
		jumlah ibu hamil dan ratri diperiksa hb			IH 1000 orang, ratri 1000 orang orang		IH 1000 orang, ratri 1000 orang orang	
1.2.1.1.38.102.6.3	Penguatan Intervensi Stunting (DAK NF)		DINAS KESEHATAN	Dinas Kesehatan dan UPT	1 paket	0		1.120.095.000
1.2.1.1.38.102.6.2	Bantuan Operasional Kesehatan Stunting (DAK NF)		DINAS KESEHATAN	Dinas Kesehatan dan UPT	1 paket	561.050.000		750.000.000
1.2.1.1.38.102.6.1	Pelayanan Gizi Keluarga		DINAS KESEHATAN	Dinas Kesehatan	1 paket	130.197.120		768.350.000
1.2.1.2.1.2.1.1.38.102.7	Pelayanan Kesehatan Ibu, Anak, dan Lansia	jumlah pembahasan risti/kematian ibu dan anak (FGD) di tingkat desa	DINAS KESEHATAN	Dinas Kesehatan dan UPT	10 kasus	1.442.503.000	10 kasus	3.000.000.000
		Jumlah pembahasan rakor kesga gizi			12 kali		12 kali	
		Jumlah rekomendasi hasil pembahasan kematian ibu dan anak tk kabupaten			6 kali		6 kali	
		Jumlah pertemuan pemanfaatan PWS KIA dan kohort ibu hamil, optimalisasi P4K serta pencatatan pelaporan KB			4 kali		4 kali	
		Jumlah pembahasan program lansia tk kabupaten			12 kali		12 kali	
		Jumlah kasus KDRT dan KTPA yang dilayani			13 kasus		13 kasus	
		Jumlah refreshing puskesmas santun lansia			29 puskesmas		29 puskesmas	
1.2.1.2.1.2.1.2.34.102	Program Pelayanan Kesehatan	Cakupan mutu pelayanan FKTP			35 %	4.120.259.900		6.017.433.693

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1.2.1.2.1.2.1.2.34.102.14	Peningkatan Mutu Pelayanan BLUD Puskesmas Salaman 1	Persentase Mutu Pelayanan BLUD	PUSKESMAS SALAMAN I	Puskesmas Salaman I	100 %	4.120.259.900	100 %	6.017.433.693
1.2.1.2.1.2.1.2.36.102	Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Cakupan pencegahan dan pengendalian penyakit menular			80 %	642.206.896	80 %	642.206.896
1.2.1.2.1.2.1.2.36.102.11	Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Salaman 1 (DAK Non Fisik)	Persentase Capaian Pelaksanaan Kegiatan Mendukung Pencegahan & Pengendalian Penyakit, Preventif & Promotif Kesehatan	PUSKESMAS SALAMAN I	Puskesmas Salaman 1	85 %	642.206.896	85 %	642.206.896
1.2.1.2.1.2.1.3.34.102	Program Pelayanan Kesehatan	Cakupan mutu pelayanan FKTP			35 %	1.076.630.600	35 %	1.799.961.400
1.2.1.2.1.2.1.3.34.102.17	Peningkatan Mutu Pelayanan BLUD Puskesmas Salaman 2	Persentase Mutu Pelayanan BLUD	PUSKESMAS SALAMAN II	Puskesmas Salaman 2	100 %	1.076.630.600	100 %	1.799.961.400
1.2.1.2.1.2.1.3.36.102	Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Cakupan pencegahan dan pengendalian penyakit menular			80 %	642.206.896	80 %	642.206.893
1.2.1.2.1.2.1.3.36.102.12	Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Salaman 2 (DAK Non Fisik)	Persentase Capaian Pelaksanaan Kegiatan Mendukung Pencegahan & Pengendalian Penyakit, Preventif & Promotif Kesehatan	PUSKESMAS SALAMAN II	Puskesmas Salaman 2	85 %	642.206.896	85 %	642.206.893
1.2.1.2.1.2.1.4.34.102	Program Pelayanan Kesehatan	Cakupan mutu pelayanan FKTP			35 %	3.970.573.000	35 %	5.901.050.400
1.2.1.2.1.2.1.4.34.102.18	Peningkatan Mutu Pelayanan BLUD Puskesmas Borobudur	Persentase Mutu Pelayanan BLUD	PUSKESMAS BOROBUDUR	Puskesmas Borobudur	100 %	3.970.573.000	100 %	5.901.050.400
1.2.1.2.1.2.1.4.36.102	Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Cakupan pencegahan dan pengendalian penyakit menular			80 %	642.206.896	80 %	642.206.892
1.2.1.2.1.2.1.4.36.102.13	Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Borobudur (DAK Non Fisik)	Persentase Capaian Pelaksanaan Kegiatan Mendukung Pencegahan & Pengendalian Penyakit, Preventif & Promotif Kesehatan	PUSKESMAS BOROBUDUR	Puskesmas Borobudur	85 %	642.206.896	85 %	642.206.892
1.2.1.2.1.2.1.5.34.102	Program Pelayanan Kesehatan	Cakupan mutu pelayanan FKTP			35 %	1.147.444.400	35 %	1.627.025.900
1.2.1.2.1.2.1.5.34.102.19	Peningkatan Mutu Pelayanan BLUD Puskesmas Ngluwar	Persentase Mutu Pelayanan BLUD	PUSKESMAS NGLUWAR	Puskesmas Ngluwar	100 %	1.147.444.400	100 %	1.627.025.900
1.2.1.2.1.2.1.5.36.102	Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Cakupan pencegahan dan pengendalian penyakit menular			80 %	707.031.864	80 %	707.031.864
1.2.1.2.1.2.1.5.36.102.14	Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Ngluwar (DAK Non Fisik)	Persentase Capaian Pelaksanaan Kegiatan Mendukung Pencegahan & Pengendalian Penyakit, Preventif & Promotif Kesehatan	PUSKESMAS NGLUWAR	Puskesmas Ngluwar	85 %	707.031.864	85 %	707.031.864
1.2.1.2.1.2.1.6.34.102	Program Pelayanan Kesehatan	Cakupan mutu pelayanan FKTP			35 %	1.502.866.800	35 %	2.305.130.200
1.2.1.2.1.2.1.6.34.102.20	Peningkatan Mutu Pelayanan BLUD Puskesmas Salam	Persentase Mutu Pelayanan BLUD	PUSKESMAS SALAM	Puskesmas Salam	100 %	1.502.866.800	100 %	2.305.130.200
1.2.1.2.1.2.1.6.36.102	Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Cakupan pencegahan dan pengendalian penyakit menular			80 %	642.206.896	80 %	642.206.896
1.2.1.2.1.2.1.6.36.102.15	Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Salam (DAK Non Fisik)	Persentase Capaian Pelaksanaan Kegiatan Mendukung Pencegahan & Pengendalian Penyakit, Preventif & Promotif Kesehatan	PUSKESMAS SALAM	Puskesmas Salam	85 %	642.206.896	85 %	642.206.896
1.2.1.2.1.2.1.7.34.102	Program Pelayanan Kesehatan	Cakupan mutu pelayanan FKTP			35 %	1.510.129.300	35 %	2.277.263.600

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1.2.1.2.1.2.1.7.34.102.21	Peningkatan Mutu Pelayanan BLUD Puskesmas Srumbung	Persentase Mutu Pelayanan BLUD	PUSKESMAS SRUMBUNG	Puskesmas Srumbung	100 %	1.510.129.300	100 %	2.277.263.600
1.2.1.2.1.2.1.7.36.102	Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Cakupan pencegahan dan pengendalian penyakit menular			80 %	779.959.954	80 %	779.959.952
1.2.1.2.1.2.1.7.36.102.16	Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Srumbung (DAK Non Fisik)	Persentase Capaian Pelaksanaan Kegiatan Mendukung Pencegahan & Pengendalian Penyakit, Preventif & Promotif Kesehatan	PUSKESMAS SRUMBUNG	Puskesmas Srumbung	85 %	779.959.954	85 %	779.959.952
1.2.1.2.1.2.1.8.34.102	Program Pelayanan Kesehatan	Cakupan mutu pelayanan FKTP			35 %	2.004.295.250	35 %	3.094.124.600
1.2.1.2.1.2.1.8.34.102.22	Peningkatan Mutu Pelayanan BLUD Puskesmas Dukun	Persentase Mutu Pelayanan BLUD	PUSKESMAS DUKUN	Puskesmas Dukun	100 %	2.004.295.250	100 %	3.094.124.600
1.2.1.2.1.2.1.8.36.102	Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Cakupan pencegahan dan pengendalian penyakit menular			80 %	642.206.896	80 %	642.206.892
1.2.1.2.1.2.1.8.36.102.17	Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Dukun (DAK Non Fisik)	Persentase Capaian Pelaksanaan Kegiatan Mendukung Pencegahan & Pengendalian Penyakit, Preventif & Promotif Kesehatan	PUSKESMAS DUKUN	Puskesmas Dukun	85 %	642.206.896	85 %	642.206.892
1.2.1.2.1.2.1.9.34.102	Program Pelayanan Kesehatan	Cakupan mutu pelayanan FKTP			35 %	1.544.575.800	35 %	2.516.509.700
1.2.1.2.1.2.1.9.34.102.23	Peningkatan Mutu Pelayanan BLUD Puskesmas Sawangan 1	Persentase Mutu Pelayanan BLUD	PUSKESMAS SAWANGAN I	Puskesmas Sawangan 1	100 %	1.544.575.800	100 %	2.516.509.700
1.2.1.2.1.2.1.9.36.102	Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Cakupan pencegahan dan pengendalian penyakit menular			80 %	642.206.896	80 %	642.206.896
1.2.1.2.1.2.1.9.36.102.18	Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Sawangan 1 (DAK Non Fisik)	Persentase Capaian Pelaksanaan Kegiatan Mendukung Pencegahan & Pengendalian Penyakit, Preventif & Promotif Kesehatan	PUSKESMAS SAWANGAN I	Puskesmas Sawangan 1	85 %	642.206.896	85 %	642.206.896
1.2.1.2.1.2.1.10.34.102	Program Pelayanan Kesehatan	Cakupan mutu pelayanan FKTP			35 %	1.373.675.350	35 %	1.672.199.200
1.2.1.2.1.2.1.10.34.102.24	Peningkatan Mutu Pelayanan BLUD Puskesmas Sawangan 2	Persentase Mutu Pelayanan BLUD	PUSKESMAS SAWANGAN II	Puskesmas Sawangan 2	100 %	1.373.675.350	100 %	1.672.199.200
1.2.1.2.1.2.1.10.36.102	Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Cakupan pencegahan dan pengendalian penyakit menular			80 %	527.973.400	80 %	527.973.400
1.2.1.2.1.2.1.10.36.102.19	Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Sawangan 2 (DAK Non Fisik)	Persentase Capaian Pelaksanaan Kegiatan Mendukung Pencegahan & Pengendalian Penyakit, Preventif & Promotif Kesehatan	PUSKESMAS SAWANGAN II	Puskesmas Sawangan 2	85 %	527.973.400	85 %	527.973.400
1.2.1.2.1.2.1.11.34.102	Program Pelayanan Kesehatan	Cakupan mutu pelayanan FKTP			35 %	1.249.719.900	35 %	1.948.285.800
1.2.1.2.1.2.1.11.34.102.25	Peningkatan Mutu Pelayanan BLUD Puskesmas Muntilan 1	Persentase Mutu Pelayanan BLUD	PUSKESMAS MUNTILAN I	Puskesmas Muntilan 1	100 %	1.249.719.900	100 %	1.948.285.800
1.2.1.2.1.2.1.11.36.102	Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Cakupan pencegahan dan pengendalian penyakit menular			80 %	642.206.896	80 %	642.206.896
1.2.1.2.1.2.1.11.36.102.20	Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Muntilan 1 (DAK Non Fisik)	Persentase Capaian Pelaksanaan Kegiatan Mendukung Pencegahan & Pengendalian Penyakit, Preventif & Promotif Kesehatan	PUSKESMAS MUNTILAN I	Puskesmas Muntilan 1	85 %	642.206.896	85 %	642.206.896
1.2.1.2.1.2.1.12.34.102	Program Pelayanan Kesehatan	Cakupan Mutu Pelayanan FKTP			35 %	1.587.319.600	35 %	2.345.588.823

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1.2.1.2.1.2.1.12.34.102.26	Peningkatan Mutu Pelayanan BLUD Puskesmas Muntilan 2	Persentase Mutu Pelayanan BLUD	PUSKESMAS MUNTILAN II	Puskesmas Muntilan 2	100 %	1.587.319.600	100 %	2.345.588.823
1.2.1.2.1.2.1.12.36.102	Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Cakupan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular			80 %	690.825.622	80 %	690.825.622
1.2.1.2.1.2.1.12.36.102.21	Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Muntilan 2 (DAK Non Fisik)	Persentase Capaian Pelaksanaan Kegiatan Mendukung Pencegahan & Pengendalian Penyakit, Preventif & Promotif Kesehatan	PUSKESMAS MUNTILAN II	Puskesmas Muntilan 2	85 %	690.825.622	85 %	690.825.622
1.2.1.2.1.2.1.13.34.102	Program Pelayanan Kesehatan	Cakupan Mutu Pelayanan FKTP			35 %	2.683.220.450	35 %	4.032.562.900
1.2.1.2.1.2.1.13.34.102.27	Peningkatan Mutu Pelayanan BLUD Puskesmas Mungkid	Persentase Mutu Pelayanan BLUD	PUSKESMAS MUNGKID	Puskesmas Mungkid	100 %	2.683.220.450	100 %	4.032.562.900
1.2.1.2.1.2.1.13.36.102	Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Cakupan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular			80 %	755.650.590	80 %	755.650.590
1.2.1.2.1.2.1.13.36.102.22	Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Mungkid (DAK Non Fisik)	Persentase Capaian Pelaksanaan Kegiatan Mendukung Pencegahan & Pengendalian Penyakit, Preventif & Promotif Kesehatan	PUSKESMAS MUNGKID	Puskesmas Mungkid	85 %	755.650.590	85 %	755.650.590
1.2.1.2.1.2.1.14.34.102	Program Pelayanan Kesehatan	Cakupan Pelayanan Kesehatan			100 %	1.474.292.850	100 %	2.414.323.500
1.2.1.2.1.2.1.14.34.102.28	Peningkatan Mutu Pelayanan BLUD Puskesmas Mertoyudan 1	Persentase Mutu Pelayanan BLUD	PUSKESMAS MERTOYUDAN I	Puskesmas Mertoyudan 1	100 %	1.474.292.850	100 %	2.414.323.500
1.2.1.2.1.2.1.14.36.102	Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Cakupan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular			80 %	682.722.501	80 %	682.722.501
1.2.1.2.1.2.1.14.36.102.23	Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Mertoyudan 1 (DAK Non Fisik)	Persentase Capaian Pelaksanaan Kegiatan Mendukung Pencegahan & Pengendalian Penyakit, Preventif & Promotif Kesehatan	PUSKESMAS MERTOYUDAN I	Puskesmas Mertoyudan 1	85 %	682.722.501	85 %	682.722.501
1.2.1.2.1.2.1.15.34.102	Program Pelayanan Kesehatan	Cakupan Pelayanan Kesehatan			100 %	1.775.664.950	100 %	2.506.142.800
1.2.1.2.1.2.1.15.34.102.29	Peningkatan Mutu Pelayanan BLUD Puskesmas Mertoyudan 2	Persentase Mutu Pelayanan BLUD	PUSKESMAS MERTOYUDAN II	Puskesmas Mertoyudan 2	100 %	1.775.664.950	100 %	2.506.142.800
1.2.1.2.1.2.1.15.36.102	Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Cakupan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit			100 %	642.206.896	100 %	642.206.896
1.2.1.2.1.2.1.15.36.102.24	Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Mertoyudan 2 (DAK Non Fisik)	Persentase Capaian Pelaksanaan Kegiatan Mendukung Pencegahan & Pengendalian Penyakit, Preventif & Promotif Kesehatan	PUSKESMAS MERTOYUDAN II	Puskesmas Mertoyudan 2	85 %	642.206.896	85 %	642.206.896
1.2.1.2.1.2.1.16.34.102	Program Pelayanan Kesehatan	Cakupan Mutu Pelayanan FKTP			100 %	2.496.731.100	100 %	3.827.869.000
1.2.1.2.1.2.1.16.34.102.30	Peningkatan Mutu Pelayanan BLUD Puskesmas Tempuran	Persentase Mutu Pelayanan BLUD	PUSKESMAS TEMPURAN	Puskesmas Tempuran	35 %	2.496.731.100	35 %	3.827.869.000
1.2.1.2.1.2.1.16.36.102	Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Cakupan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular			100 %	654.086.896	100 %	654.086.896
1.2.1.2.1.2.1.16.36.102.25	Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Tempuran (DAK Non Fisik)	Persentase Capaian Pelaksanaan Kegiatan Mendukung Pencegahan & Pengendalian Penyakit, Preventif & Promotif Kesehatan	PUSKESMAS TEMPURAN	Puskesmas Tempuran	85 %	654.086.896	85 %	654.086.896
1.2.1.2.1.2.1.17.34.102	Program Pelayanan Kesehatan	Cakupan Pelayanan Kesehatan			100 %	1.889.777.000	100 %	2.596.598.500

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1.2.1.2.1.2.1.17.34.102.31	Peningkatan Mutu Pelayanan BLUD Puskesmas Kajoran 1	Persentase Mutu Pelayanan BLUD	PUSKESMAS KAJORAN I	Puskesmas Kajoran 1	100 %	1.889.777.000	100 %	2.596.598.500
1.2.1.2.1.2.1.17.36.102	Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Cakupan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular			80 %	642.206.896	80 %	642.206.896
1.2.1.2.1.2.1.17.36.102.26	Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Kajoran 1 (DAK Non Fisik)	Persentase Capaian Pelaksanaan Kegiatan Mendukung Pencegahan & Pengendalian Penyakit, Preventif & Promotif Kesehatan	PUSKESMAS KAJORAN I	Puskesmas Kajoran 1	85 %	642.206.896	85 %	642.206.896
1.2.1.2.1.2.1.18.34.102	Program Pelayanan Kesehatan	Cakupan mutu pelayanan FKTP			35 %	1.127.148.100	35 %	1.499.767.000
1.2.1.2.1.2.1.18.34.102.32	Peningkatan Mutu Pelayanan BLUD Puskesmas Kajoran 2	Persentase Mutu Pelayanan BLUD	PUSKESMAS KAJORAN II	Puskesmas Kajoran 2	100 %	1.127.148.100	100 %	1.499.767.000
1.2.1.2.1.2.1.18.36.102	Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Cakupan pencegahan dan pengendalian penyakit menular			80 %	611.881.110	80 %	611.881.110
1.2.1.2.1.2.1.18.36.102.27	Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Kajoran 2 (DAK Non Fisik)	Persentase Capaian Pelaksanaan Kegiatan Mendukung Pencegahan & Pengendalian Penyakit, Preventif & Promotif Kesehatan	PUSKESMAS KAJORAN II	Puskesmas Kajoran 2	85 %	611.881.110	85 %	611.881.110
1.2.1.2.1.2.1.19.34.102	Program Pelayanan Kesehatan	Cakupan Mutu Pelayanan FKTP			35 %	3.047.936.400	35 %	4.962.732.500
1.2.1.2.1.2.1.19.34.102.33	Peningkatan Mutu Pelayanan BLUD Puskesmas Kaliangkrik	Persentase Mutu Pelayanan BLUD	PUSKESMAS KALIANGKRIK	Puskesmas Kaliangkrik	100 %	3.047.936.400	100 %	4.962.732.500
1.2.1.2.1.2.1.19.36.102	Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Cakupan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular			80 %	642.206.896	80 %	642.206.896
1.2.1.2.1.2.1.19.36.102.28	Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Kaliangkrik (DAK Non Fisik)	Persentase Capaian Pelaksanaan Kegiatan Mendukung Pencegahan & Pengendalian Penyakit, Preventif & Promotif Kesehatan	PUSKESMAS KALIANGKRIK	Puskesmas Kaliangkrik	85 %	642.206.896	85 %	642.206.896
1.2.1.2.1.2.1.20.34.102	Program Pelayanan Kesehatan	Cakupan mutu pelayanan FKTP			35 %	3.172.072.300	35 %	5.311.096.400
1.2.1.2.1.2.1.20.34.102.34	Peningkatan Mutu Pelayanan BLUD Puskesmas Bandongan	Persentase Mutu Pelayanan BLUD	PUSKESMAS BANDONGAN	Puskesmas Bandongan	100 %	3.172.072.300	100 %	5.311.096.400
1.2.1.2.1.2.1.20.36.102	Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Cakupan pencegahan dan pengendalian penyakit menular			80 %	642.206.896	80 %	642.206.896
1.2.1.2.1.2.1.20.36.102.29	Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Bandongan (DAK Non Fisik)	Persentase Capaian Pelaksanaan Kegiatan Mendukung Pencegahan & Pengendalian Penyakit, Preventif & Promotif Kesehatan	PUSKESMAS BANDONGAN	Puskesmas Bandongan	85 %	642.206.896	85 %	642.206.896
1.2.1.2.1.2.1.21.34.102	Program Pelayanan Kesehatan	Cakupan mutu pelayanan FKTP			35 %	2.175.377.100	35 %	3.259.969.000
1.2.1.2.1.2.1.21.34.102.35	Peningkatan Mutu Pelayanan BLUD Puskesmas Candimulyo	Persentase Mutu Pelayanan BLUD	PUSKESMAS CANDIMULYO	Puskesmas Candimulyo	100 %	2.175.377.100	100 %	3.259.969.000
1.2.1.2.1.2.1.21.36.102	Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Cakupan pencegahan dan pengendalian penyakit menular			80 %	642.206.896	80 %	642.206.896
1.2.1.2.1.2.1.21.36.102.30	Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Candimulyo (DAK Non Fisik)	Persentase Capaian Pelaksanaan Kegiatan Mendukung Pencegahan & Pengendalian Penyakit, Preventif & Promotif Kesehatan	PUSKESMAS CANDIMULYO	Puskesmas Candimulyo	85 %	642.206.896	85 %	642.206.896
1.2.1.2.1.2.1.22.34.102	Program Pelayanan Kesehatan	Cakupan Mutu Pelayanan FKTP			35 %	2.709.617.600	35 %	3.888.804.600

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1.2.1.2.1.2.1.22.34.102.36	Peningkatan Mutu Pelayanan BLUD Puskesmas Pakis	Persentase Mutu Pelayanan BLUD	PUSKESMAS PAKIS	Puskesmas Pakis	100 %	2.709.617.600	100 %	3.888.804.600
1.2.1.2.1.2.1.22.36.102	Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Cakupan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular			80 %	642.206.896	80 %	642.206.896
1.2.1.2.1.2.1.22.36.102.31	Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Pakis (DAK Non Fisik)	Persentase Capaian Pelaksanaan Kegiatan Mendukung Pencegahan & Pengendalian Penyakit, Preventif & Promotif Kesehatan	PUSKESMAS PAKIS	Puskesmas Pakis	85 %	642.206.896	85 %	642.206.896
1.2.1.2.1.2.1.23.34.102	Program Pelayanan Kesehatan	Cakupan Mutu Pelayanan FKTP			35 %	1.475.696.600	35 %	2.327.127.900
1.2.1.2.1.2.1.23.34.102.37	Peningkatan Mutu Pelayanan BLUD Puskesmas Ngablak	Persentase Mutu Pelayanan BLUD	PUSKESMAS NGABLAK	Puskesmas Ngablak	100 %	1.475.696.600	100 %	2.327.127.900
1.2.1.2.1.2.1.23.36.102	Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Cakupan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular			80 %	642.206.896	80 %	642.206.896
1.2.1.2.1.2.1.23.36.102.32	Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Ngablak (DAK Non Fisik)	Persentase Capaian Pelaksanaan Kegiatan Mendukung Pencegahan & Pengendalian Penyakit, Preventif & Promotif Kesehatan	PUSKESMAS NGABLAK	Puskesmas Ngablak	85 %	642.206.896	85 %	642.206.896
1.2.1.2.1.2.1.24.34.102	Program Pelayanan Kesehatan	Cakupan Mutu Pelayanan FKTP			35 %	5.508.628.000	35 %	7.260.059.900
1.2.1.2.1.2.1.24.34.102.38	Peningkatan Mutu Pelayanan BLUD Puskesmas Grabag 1	Persentase Mutu Pelayanan BLUD	PUSKESMAS GRABAG I	Puskesmas Grabag 1	100 %	5.508.628.000	100 %	7.260.059.900
1.2.1.2.1.2.1.24.36.102	Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Cakupan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular			80 %	788.063.075	80 %	788.063.075
1.2.1.2.1.2.1.24.36.102.33	Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Grabag 1 (DAK Non Fisik)	Persentase Capaian Pelaksanaan Kegiatan Mendukung Pencegahan & Pengendalian Penyakit, Preventif & Promotif Kesehatan	PUSKESMAS GRABAG I	Puskesmas Grabag 1	85 %	788.063.075	85 %	788.063.075
1.2.1.2.1.2.1.25.34.102	Program Pelayanan Kesehatan	Cakupan Mutu Pelayanan FKTP			35 %	989.486.900	35 %	1.422.391.000
1.2.1.2.1.2.1.25.34.102.39	Peningkatan Mutu Pelayanan BLUD Puskesmas Grabag 2	Persentase Mutu Pelayanan BLUD	PUSKESMAS GRABAG II	Puskesmas Grabag 2	100 %	989.486.900	100 %	1.422.391.000
1.2.1.2.1.2.1.25.36.102	Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Cakupan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular			80 %	642.206.896	80 %	642.206.896
1.2.1.2.1.2.1.25.36.102.34	Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Grabag 2 (DAK Non Fisik)	Persentase Capaian Pelaksanaan Kegiatan Mendukung Pencegahan & Pengendalian Penyakit, Preventif & Promotif Kesehatan	PUSKESMAS GRABAG II	Puskesmas Grabag 2	85 %	642.206.896	85 %	642.206.896
1.2.1.2.1.2.1.26.34.102	Program Pelayanan Kesehatan	Cakupan Mutu Pelayanan FKTP			35 %	1.861.930.300	35 %	2.861.044.400
1.2.1.2.1.2.1.26.34.102.40	Peningkatan Mutu Pelayanan BLUD Puskesmas Tegalrejo	Persentase Mutu Pelayanan BLUD	PUSKESMAS TEGALREJO	Puskesmas Tegalrejo	100 %	1.861.930.300	100 %	2.861.044.400
1.2.1.2.1.2.1.26.36.102	Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Cakupan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular			80 %	812.372.438	80 %	812.372.438
1.2.1.2.1.2.1.26.36.102.35	Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Tegalrejo (DAK Non Fisik)	Persentase Capaian Pelaksanaan Kegiatan Mendukung Pencegahan & Pengendalian Penyakit, Preventif & Promotif Kesehatan	PUSKESMAS TEGALREJO	Puskesmas Tegalrejo	85 %	812.372.438	85 %	812.372.438
1.2.1.2.1.2.1.27.34.102	Program Pelayanan Kesehatan	Cakupan Mutu Pelayanan FKTP			35 %	2.053.879.700	35 %	3.100.019.200

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1.2.1.2.1.2.1.27.34.102.41	Peningkatan Mutu Pelayanan BLUD Puskesmas Secang 1	Persentase Mutu Pelayanan BLUD	PUSKESMAS SECANG I	Puskesmas Secang 1	100 %	2.053.879.700	100 %	3.100.019.200
1.2.1.2.1.2.1.27.36.102	Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Cakupan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular			80 %	642.206.896	80 %	642.206.896
1.2.1.2.1.2.1.27.36.102.36	Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Secang 1 (DAK Non Fisik)	Persentase Capaian Pelaksanaan Kegiatan Mendukung Pencegahan & Pengendalian Penyakit, Preventif & Promotif Kesehatan	PUSKESMAS SECANG I	Puskesmas Secang 1	85 %	642.206.896	85 %	642.206.896
1.2.1.2.1.2.1.28.34.102	Program Pelayanan Kesehatan	Cakupan Mutu Pelayanan FKTP			35 %	1.510.043.000	35 %	2.149.986.900
1.2.1.2.1.2.1.28.34.102.42	Peningkatan Mutu Pelayanan BLUD Puskesmas Secang 2	Persentase Mutu Pelayanan BLUD	PUSKESMAS SECANG II	Puskesmas Secang 2	100 %	1.510.043.000	100 %	2.149.986.900
1.2.1.2.1.2.1.28.36.102	Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Cakupan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular			80 %	715.134.985	80 %	715.134.985
1.2.1.2.1.2.1.28.36.102.37	Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Secang 2 (DAK Non Fisik)	Persentase Capaian Pelaksanaan Kegiatan Mendukung Pencegahan & Pengendalian Penyakit, Preventif & Promotif Kesehatan	PUSKESMAS SECANG II	Puskesmas Secang 2	85 %	715.134.985	85 %	715.134.985
1.2.1.2.1.2.1.29.34.102	Program Pelayanan Kesehatan	Cakupan Mutu Pelayanan FKTP			35 %	2.165.341.300	35 %	2.858.739.400
1.2.1.2.1.2.1.29.34.102.43	Peningkatan Mutu Pelayanan BLUD Puskesmas Windusari	Persentase Mutu Pelayanan BLUD	PUSKESMAS WINDUSARI	Puskesmas Windusari	100 %	2.165.341.300	100 %	2.858.739.400
1.2.1.2.1.2.1.29.36.102	Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Cakupan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular			80 %	804.269.333	80 %	804.269.333
1.2.1.2.1.2.1.29.36.102.38	Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Windusari (DAK Non Fisik)	Persentase Capaian Pelaksanaan Kegiatan Mendukung Pencegahan & Pengendalian Penyakit, Preventif & Promotif Kesehatan	PUSKESMAS WINDUSARI	Puskesmas Windusari	85 %	804.269.333	85 %	804.269.333
1.2.1.2.1.2.1.30.34.102	Program Pelayanan Kesehatan	Cakupan Mutu Pelayanan FKTP			35 %	795.666.450	35 %	1.044.781.600
1.2.1.2.1.2.1.30.34.102.44	Peningkatan Mutu Pelayanan BLUD Puskesmas Kota Mungkid	Persentase Mutu Pelayanan BLUD	PUSKESMAS KOTAMUNGKID	Puskesmas Kota Mungkid	100 %	795.666.450	100 %	1.044.781.600
1.2.1.2.1.2.1.30.36.102	Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Cakupan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular			80 %	642.206.896	80 %	642.206.896
1.2.1.2.1.2.1.30.36.102.39	Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Kota Mungkid (DAK Non Fisik)	Persentase Capaian Pelaksanaan Kegiatan Mendukung Pencegahan & Pengendalian Penyakit, Preventif & Promotif Kesehatan	PUSKESMAS KOTAMUNGKID	Puskesmas Kota Mungkid	85 %	642.206.896	85 %	642.206.896
Total						176.675.418.519		344.526.255.043

PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH

KABUPATEN MAGELANG

TAHUN 2021

Nama Perangkat Daerah : RSUD MUNTILAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Urusan Wajib Pelayanan Dasar				102.780.046.000			74.767.873.795
1.2	Kesehatan				102.780.046.000			74.767.873.795
1.2.1.2.1.2.2.1.35.102	Program Peningkatan Kualitas Puskesmas dan Rumah Sakit	Persentase Standar Pelayanan Minimal (SPM) RS Yang Terpenuhi			102.780.046.000		69,5 %	74.767.873.795
		Nilai Kepuasan Masyarakat Pelayanan Rumah Sakit					79,8 %	
1.2.1.2.1.2.2.1.35.102.1	Pelayanan dan Pendukung Pelayanan Rumah Sakit (Belanja BLUD)	Cakupan Pelayanan dan Pendukung Pelayanan Rumah Sakit selama 1 tahun	RSUD MUNTILAN	Jl. Kartini No. 13 Muntilan	100 %	50.112.576.000	100 %	72.238.947.295
1.2.2.1.35.102.1.1	Belanja Pegawai		RSUD MUNTILAN	Jl. Kartini No.13 Muntilan	1 Paket	5.535.313.600		5.535.313.600
1.2.2.1.35.102.1.2	Belanja Barang dan Jasa		RSUD MUNTILAN	Jl. Kartini No.13 Muntilan	1 Paket	60.218.316.214		63.703.633.695
1.2.2.1.35.102.1.3	Belanja Modal		RSUD MUNTILAN	Jl. Kartini No.13 Muntilan	1 Paket	3.500.000.000		3.000.000.000
1.2.1.2.1.2.2.1.35.102.2	Akreditasi Rumah Sakit	Jumlah Pelaksanaan Survei Akreditasi RS Oleh KARS	RSUD MUNTILAN	Jl. Kartini No 13 Muntilan	1 Kali	140.000.000	1 Kali	200.000.000
1.2.2.1.35.102.2.1	Belanja Bahan Habis Pakai		RSUD MUNTILAN	Jl. Kartini No. 13 Muntilan	1 Paket	26.226.800		26.226.800
1.2.2.1.35.102.2.2	Belanja Cetak dan Penggandaan		RSUD MUNTILAN	Jl. Kartini No. 13 Muntilan	1 Paket	44.573.200		44.573.200

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1.2.2.1.35.102.2.3	Belanja makanan dan minuman		RSUD MUNTILAN	Jl. Kartini No.13 Muntilan	1 Paket	69.350.000		69.350.000	
1.2.2.1.35.102.2.4	Belanja Perjalanan Dinas		RSUD MUNTILAN	Jl. Kartini No. 13 Muntilan	1 Paket	5.650.000		5.650.000	
1.2.2.1.35.102.2.5	Belanja Kursus, Pelatihan Sosialisasi dan Bimbingan Teknis		RSUD MUNTILAN	Jl. Kartini No. 13 Muntilan	1 Paket	36.000.000		36.000.000	
1.2.2.1.35.102.2.6	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber		RSUD MUNTILAN	Jl. Kartini No. 13 Muntilan	1 Paket	18.200.000		18.200.000	
1.2.1.2.1.2.2.1.35.102.3	Pengadaan Sarana Prasarana Pendukung Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah Sarpras Yang Diadakan	RSUD MUNTILAN	Jl. Kartini No. 13 Muntilan	1 Paket	0	1 Paket	0	
1.2.2.1.35.102.3.1	BELANJA MODAL GEDUNG DAN BANGUNAN		RSUD MUNTILAN	Jl. Kartini No. 13 Muntilan	1 Paket	1.676.000.000		0	
1.2.2.1.35.102.3.2	BELANJA MODAL JALAN, IRIGASI, DAN JARINGAN		RSUD MUNTILAN	Jl. Kartini No. 13 Muntilan	1 Paket	3.250.000.000		0	
1.2.1.2.1.2.2.1.35.102.6	Pengadaan Peralatan Kesehatan Pendukung Pelayanan Rumah Sakit (DAK)	Jumlah Alkes Yang Diadakan	RSUD MUNTILAN	Jl. Kartini No 13 Muntilan	1 Paket	52.527.470.000	1 Paket	2.328.926.500	
1.2.2.1.35.102.6.1	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran		RSUD MUNTILAN	Jl. Kartini No.13 Muntilan	1 Paket	2.328.926.500		2.328.926.499	
Total						102.780.046.000		74.767.873.795	

PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH

KABUPATEN MAGELANG

TAHUN 2021

Nama Perangkat Daerah : DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Urusan Wajib Pelayanan Dasar				91.991.729.051			178.062.805.758
1.3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang				91.991.729.051			178.062.805.758
1.3.1.3.1.3.1.1.7.103	Program Manajemen Administrasi Pelayanan Umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah			100 %	903.411.662	100 %	2.341.628.686
1.3.1.3.1.3.1.1.7.103.1	Pengelolaan Surat Menyurat, Kearsipan dan Bahan Pustaka	Jumlah surat yang dikelola	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	-	4000 surat	29.281.662	4000 surat	54.509.211
1.3.1.3.1.3.1.1.7.103.2	Penyelenggaraan Koordinasi dan Konsultasi Perangkat Daerah	Jumlah perjalanan dinas dan rapat Jumlah perjalanan dinas luar daerah	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	DPUPR Kabupaten Magelang	462 kali 17 PD	100.000.000	462 kali 17 PD	171.407.305
1.3.1.3.1.3.1.1.7.103.3	Pengadaan dan Pengelolaan Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya	Jumlah pengadaan peralatan kantor Jumlah pengadaan perlengkapan kantor	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	DPUPR Kabupaten Magelang	21 unit 0 unit	0	21 unit 0 unit	300.000.000
1.3.1.3.1.3.1.1.7.103.4	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya	jumlah alat listrik dan alat kebersihan yang dipelihara Jumlah rekening yang dibayarkan Jumlah THL yang diberi Honor	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	DPUPR Kabupaten Magelang	41 alat 5 rekening 5 THL	243.000.000	41 alat 5 rekening 5 THL	378.905.373

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1.3.1.3.1.3.1.1.7.103.5	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	DPUPR Kabupaten Magelang	17 buah	531.130.000		17 buah	1.202.459.117
		Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara			97 unit			97 unit	
		Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara			49 buah			49 buah	
		Jumlah Jaringan LAN dan Server yang terpelihara			1 paket			1 paket	
1.3.1.3.1.3.1.1.7.103.7	Peningkatan Kapasitas dan Disiplin Aparatur Sipil Negara	Jumlah pegawai yang diberi honor	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	DPUPR Kabupaten Magelang	1 Tenaga Kontrak	0		1 Tenaga Kontrak	34.347.680
1.3.1.3.1.3.1.1.7.103.8	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas yang diadakan	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	DPUPR Kabupaten Magelang	6 unit	0		6 unit	200.000.000
1.3.1.3.1.3.1.1.8.103	Program Perencanaan, Keuangan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian perencanaan, evaluasi kinerja OPD, dan keuangan perangkat daerah			100 %	151.100.400		100 %	295.814.608
1.3.1.3.1.3.1.1.8.103.1	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah laporan keuangan yang tersusun	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	DPUPR Kabupaten Magelang	10 laporan	116.100.400		10 laporan	196.478.590
1.3.1.3.1.3.1.1.8.103.2	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renja tersusun	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	DPUPR Kabupaten Magelang	1 dokumen	20.000.000		1 dokumen	50.204.788
		Jumlah Dokumen Renstra tersusun			1 dokumen			1 dokumen	
1.3.1.3.1.3.1.1.8.103.3	Penyusunan Laporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan capaian kinerja dan keuangan yang tersusun	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	DPUPR Kabupaten Magelang	15 laporan	15.000.000		15 laporan	49.131.230
		Jumlah Perjalanan Dinas			132 kali			132 kali	
		jumlah dokumen profil perangkat daerah yang tersusun			1 dokumen			1 dokumen	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
1.3.1.3.1.3.1.1.36.103	Program Peningkatan akses dan kualitas jalan	Cakupan ketersediaan jalan dan bangunan pelengkap jalan			95,77 PERSEN	21.036.403.320		95,77 PERSEN	74.373.436.135
		Persentase jalan dan bangunan pelengkap jalan dalam kondisi baik			78,89 PERSEN			78,89 PERSEN	
1.3.1.3.1.3.1.1.36.103.1	Pembangunan dan Peningkatan Jalan	Panjang Jalan yang ditingkatkan	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Kabupaten Magelang	10 km	0		10 km	10.071.077.323
		Panjang Jalan yang dilebarkan 5,5 m			6 km			6 km	
		jumlah ruas jalan yang ditingkatkan kecepatannya 40 km/jam			2 ruas			2 ruas	
		Jumlah jembatan yang dilebarkan 5,5 m			7 Paket			7 Paket	
1.3.1.3.1.3.1.1.36.103.3	Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Pelengkap Jalan	Panjang jalan kabupaten kondisi baik	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Kabupaten Magelang	764,79 km	10.000.000.000		764,79 km	15.057.349.632
		Jumlah Jembatan kabupaten kondiis baik			357 jembatan			357 jembatan	
		Panjang drainase kabupaten kondiis baik			277,63 km			277,63 km	
		Panjang trotoar kabupaten kondiis baik			58.62 km			58.62 km	
		Panjang dinding penahan (talud) jalan kondisi baik			75,66 %			75,66 %	
1.3.1.1.36.103.3.1	Pengadaan CPHMA (Asbuton)/ CPAC-Asbuton		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	DPUPR Kabupaten Magelang	1 paket	200.000.000			0
1.3.1.1.36.103.3.2	Pengadaan Hotmix (Latasir) UPT Salaman		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	DPUPR Kabupaten Magelang	1 paket	200.000.000			0
1.3.1.1.36.103.3.3	Pengadaan Hotmix (Latasir) UPT Bandongan		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	DPUPR Kabupate Magelang	1 paket	200.000.000			0

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1.3.1.1.36.103.3.4	Pengadaan Hotmix (Latasir) UPT Grabag		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	DPUPR Kabupaten Magelang	1 paket	200.000.000		0
1.3.1.1.36.103.3.5	Pengadaan Hotmix (Latasir) UPT Tegalrejo		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	DPUPR Kabupaten Magelang	1 paket	200.000.000		0
1.3.1.1.36.103.3.6	Pengadaan Hotmix (Latasir) UPT Muntilan		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	DPUPR Kabupaten Magelang	1 paket	200.000.000		0
1.3.1.1.36.103.3.7	Pengadaan Hotmix (HRS) UPT Salaman		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	DPUPR Kabupaten Magelang	1 paket	200.000.000		0
1.3.1.1.36.103.3.8	Pengadaan Hotmix (HRS) UPT Bandongan		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	DPUPR Kabupaten Magelang	1 paket	200.000.000		0
1.3.1.1.36.103.3.9	Pengadaan Hotmix (HRS) UPT Grabag		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	DPUPR Kabupaten Magelang	1 paket	200.000.000		0
1.3.1.1.36.103.3.10	Pengadaan Hotmix (HRS) UPT Tegalrejo		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	DPUPR Kabupaten Magelang	1 paket	200.000.000		0
1.3.1.1.36.103.3.11	Pengadaan Emulsi CRS - 1 untuk Latasir		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	DPUPR Kabupaten Magelang	1 paket	196.062.180		0
1.3.1.1.36.103.3.12	Pengadaan Emulsi CRS - 1 untuk HRS dan AC-WCL		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	DPUPR Kabupaten Magelang	1 paket	108.000.000		0
1.3.1.1.36.103.3.13	Pengadaan Aspal Panas		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	DPUPR Kabupaten Magelang	1 paket	199.000.000		0
1.3.1.1.36.103.3.14	Pengadaan CRS-1 (perekat Ogem, Dgem, HRS, ATB, AC-WC)		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	DPUPR Kabupaten Magelang	1 paket	98.840.771		0
1.3.1.1.36.103.3.15	Pengadaan Emulsi (aspal dingin) CMS-2 untuk Ogem		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	DPUPR Kabupaten Magelang	1 paket	154.713.600		0
1.3.1.1.36.103.3.16	Pengadaan Emulsi (aspal dingin) CSS-1 untuk Dgem		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	DPUPR Kabupaten Magelang	1 paket	140.000.000		0

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1.3.1.1.36.103.3.17	Pengadaan HOTMIX (HRS-WCL)(mendesak)		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	DPUPR Kabupaten Magelang	1 paket	154.713.600		0
1.3.1.1.36.103.3.18	Pengadaan HOTMIX (AC-WCL)(mendesak)		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	DPUPR Kabupaten Magelang	1 paket	140.000.000		0
1.3.1.1.36.103.3.19	Pengadaan batu pecah mesin untuk telford, beton, lapen, slury seal dll		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	DPUPR Kabupaten Magelang	1 paket	146.977.920		0
1.3.1.1.36.103.3.20	Pengadaan agregat untuk lapis pondasi agregat kelas A dan B		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	DPUPR Kabupaten Magelang	1 paket	135.000.000		0
1.3.1.1.36.103.3.21	Pengadaan batu kali, semen PC, cat tembok, papan nama biner		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	DPUPR Kabupaten Magelang	1 paket	80.000.000		0
1.3.1.1.36.103.3.22	Pengadaan material perkompal, pal KM, pal HM		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	DPUPR Kabupaten Magelang	1 paket	67.000.000		0
1.3.1.1.36.103.3.23	Upah pembuatan dan pemasangan perkompal jalan, patok KM, HM		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	DPUPR Kabupaten Magelang	1 paket	40.000.000		0
1.3.1.1.36.103.3.24	Upah penambalan jalan (Latasir, Ogem dll)		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	DPUPR Kabupaten Magelang	1 paket	350.000.000		0
1.3.1.1.36.103.3.25	Biaya bahan bakar peralatan untuk penambalan jalan		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	DPUPR Kabupaten Magelang	1 paket	371.000.000		0
1.3.1.1.36.103.3.26	Unit potong rumput (3 bh) dg Dump Truck (tanpa tenaga)		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	DPUPR Kabupaten Magelang	1 paket	134.300.000		0
1.3.1.1.36.103.3.27	Pengadaan material untuk drainase di wilayah DPUPR UPT Salaman		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	DPUPR Kabupaten Magelang	1 paket	102.112.799		0
1.3.1.1.36.103.3.28	Pengadaan material untuk drainase di wilayah DPUPR UPT Bandongan		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	DPUPR Kabupaten Magelang	1 paket	102.112.799		0
1.3.1.1.36.103.3.29	Pengadaan material untuk drainase di wilayah DPUPR UPT Grabag		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	DPUPR Kabupaten Magelang	1 paket	122.112.799		0

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1.3.1.1.36.103.3.30	Pengadaan material untuk drainase di wilayah DPUPR UPT Tegalrejo		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	DPUPR Kabupaten Magelang	1 paket	124.363.725		0
1.3.1.1.36.103.3.31	Pengadaan material untuk drainase di wilayah DPUPR UPT Muntilan		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	DPUPR Kabupaten Magelang	1 paket	102.112.799		0
1.3.1.1.36.103.3.32	Pengadaan material untuk drainase di wilayah DPUPR UPT Salam		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	DPUPR Kabupaten Magelang	1 paket	90.622.000		0
1.3.1.1.36.103.3.33	Upah swakelola pemeliharaan rutin drainase wilayah DPUPR UPT Salaman		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	DPUPR Kabupaten Magelang	1 paket	72.260.798		0
1.3.1.1.36.103.3.34	Upah swakelola pemeliharaan rutin drainase wilayah DPUPR UPT Bandongan		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	DPUPR Kabupaten Magelang	1 paket	71.076.000		0
1.3.1.1.36.103.3.35	Upah swakelola pemeliharaan rutin drainase wilayah DPUPR UPT Grabag		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	DPUPR Kabupaten Magelang	1 paket	71.076.000		0
1.3.1.1.36.103.3.36	Upah swakelola pemeliharaan rutin drainase wilayah DPUPR UPT Tegalrejo		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	DPUPR Kabupaten Magelang	1 paket	71.076.000		0
1.3.1.1.36.103.3.37	Upah swakelola pemeliharaan rutin drainase wilayah DPUPR UPT Muntilan		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	DPUPR Kabupaten Magelang	1 paket	71.076.000		0
1.3.1.1.36.103.3.38	Upah swakelola pemeliharaan rutin drainase wilayah DPUPR UPT Salam		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	DPUPR Kabupaten Magelang	1 paket	42.249.207		0
1.3.1.1.36.103.3.39	Pengadaan material untuk trotoar di wilayah DPUPR UPT Salaman		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	DPUPR Kabupaten Magelang	1 paket	82.891.000		0
1.3.1.1.36.103.3.40	Pengadaan material untuk trotoar di wilayah DPUPR UPT Bandongan		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	DPUPR Kabupaten Magelang	1 paket	82.891.000		0

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1.3.1.1.36.103.3.41	Pengadaan material untuk trotoar di wilayah DPUPR UPT Grabag		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	DPUPR Kabupaten Magelang	1 paket	82.891.000		0
1.3.1.1.36.103.3.69	Upah swakelola Pemeliharaan Rutin Jembatan UPT Wil.Salaman		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	DPUPR Kabupaten Magelang	1 paket	140.000.000		0
1.3.1.1.36.103.3.70	Upah swakelola Pemeliharaan Rutin Jembatan UPT Wil.Bandongan		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	DPUPR Kabupaten Magelang	1 paket	140.000.000		0
1.3.1.1.36.103.3.67	Pengadaan material untuk jembatan di Wilayah DPUPR UPT Muntilan		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	DPUPR Kabupaten Magelang	1 paket	198.000.000		0
1.3.1.1.36.103.3.68	Pengadaan material untuk jembatan di Wilayah DPUPR UPT Salam		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	DPUPR Kabupaten Magelang	1 paket	162.329.000		0
1.3.1.1.36.103.3.66	Pengadaan material untuk jembatan di Wilayah DPUPR UPT Tegalrejo		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	DPUPR Kabupaten Magelang	1 paket	198.000.000		0
1.3.1.1.36.103.3.64	Pengadaan material untuk jembatan di Wilayah DPUPR UPT Bandongan		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	DPUPR Kabupaten Magelang	1 paket	198.000.000		0
1.3.1.1.36.103.3.65	Pengadaan material untuk jembatan di Wilayah DPUPR UPT Grabag		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	DPUPR Kabupaten Magelang	1 paket	198.000.000		0
1.3.1.1.36.103.3.54	Pengadaan material untuk talud di wilayah DPUPR UPT Tegalrejo		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	DPUPR Kabupaten Magelang	1 paket	192.999.000		0
1.3.1.1.36.103.3.55	Pengadaan material untuk talud di wilayah DPUPR UPT Muntilan		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	DPUPR Kabupaten Magelang	1 paket	192.999.000		0
1.3.1.1.36.103.3.56	Pengadaan material untuk talud di wilayah DPUPR UPT Salam		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	DPUPR Kabupaten Magelang	1 paket	175.999.000		0
1.3.1.1.36.103.3.57	Upah swakelola pemeliharaan rutin talud wilayah DPUPR UPT Salaman		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	DPUPR Kabupaten Magelang	1 paket	135.599.000		0

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1.3.1.1.36.103.3.58	Upah swakelola pemeliharaan rutin talud wilayah DPUPR UPT Bandongan		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	DPUPR Kabupaten Magelang	1 paket	135.599.000		0
1.3.1.1.36.103.3.59	Upah swakelola pemeliharaan rutin talud wilayah DPUPR UPT Grabag		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	DPUPR Kabupaten Magelang	1 paket	135.599.000		0
1.3.1.1.36.103.3.60	Upah swakelola pemeliharaan rutin talud wilayah DPUPR UPT Tegalrejo		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	DPUPR Kabupaten Magelang	1 paket	135.599.000		0
1.3.1.1.36.103.3.61	Upah swakelola pemeliharaan rutin talud wilayah DPUPR UPT Muntilan		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	DPUPR Kabupaten Magelang	1 paket	135.599.000		-2
1.3.1.1.36.103.3.62	Upah swakelola pemeliharaan rutin talud wilayah DPUPR UPT Salam		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	DPUPR Kabupaten Magelang	1 paket	119.340.000		0
1.3.1.1.36.103.3.63	Pengadaan material untuk jembatan di Wilayah DPUPR UPT Salaman		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	DPUPR Kabupaten Magelang	1 paket	198.000.000		0
1.3.1.1.36.103.3.42	Pengadaan material untuk trotoar di wilayah DPUPR UPT Tegalrejo		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	DPUPR Kabupaten Magelang	1 paket	82.891.000		0
1.3.1.1.36.103.3.43	Pengadaan material untuk trotoar di wilayah DPUPR UPT Muntilan		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	DPUPR Kabupaten Magelang	1 paket	82.891.000		0
1.3.1.1.36.103.3.44	Pengadaan material untuk trotoar di wilayah DPUPR UPT Salam		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	DPUPR Kabupaten Magelang	1 paket	75.590.000		0
1.3.1.1.36.103.3.45	Upah swakelola pemeliharaan rutin trotoar wilayah DPUPR UPT Salaman		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	DPUPR Kabupaten Magelang	1 paket	58.238.000		0
1.3.1.1.36.103.3.46	Upah swakelola pemeliharaan rutin trotoar wilayah DPUPR UPT Bandongan		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	DPUPR Kabupaten Magelang	1 paket	58.238.000		0

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1.3.1.1.36.103.3.47	Upah swakelola pemeliharaan rutin trotoar wilayah DPUPR UPT Grabag		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	DPUPR Kabupaten Magelang	1 paket	58.238.000		0
1.3.1.1.36.103.3.48	Upah swakelola pemeliharaan rutin trotoar wilayah DPUPR UPT Tegalrejo		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	DPUPR Kabupaten Magelang	1 paket	60.498.000		0
1.3.1.1.36.103.3.49	Upah swakelola pemeliharaan rutin trotoar wilayah DPUPR UPT Muntilan		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	DPUPR Kabupaten Magelang	1 paket	58.238.000		0
1.3.1.1.36.103.3.50	Upah swakelola pemeliharaan rutin trotoar wilayah DPUPR UPT Salam		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	DPUPR Kabupaten Magelang	1 paket	49.000.000		-5
1.3.1.1.36.103.3.51	Pengadaan material untuk talud di wilayah DPUPR UPT Salaman		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	DPUPR Kabupaten Magelang	1 paket	192.999.000		0
1.3.1.1.36.103.3.52	Pengadaan material untuk talud di wilayah DPUPR UPT Bandongan		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	DPUPR Kabupaten Magelang	1 paket	192.999.000		0
1.3.1.1.36.103.3.53	Pengadaan material untuk talud di wilayah DPUPR UPT Grabag		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	DPUPR Kabupaten Magelang	1 paket	192.999.000		0
1.3.1.1.36.103.3.71	Upah swakelola Pemeliharaan Rutin Jembatan UPT Wil.Grabag		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	DPUPR Kabupaten Magelang	1 paket	140.000.000		0
1.3.1.1.36.103.3.72	Upah swakelola Pemeliharaan Rutin Jembatan UPT Wil.Tegalrejo		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	DPUPR Kabupaten Magelang	1 paket	140.000.000		0
1.3.1.1.36.103.3.73	Upah swakelola Pemeliharaan Rutin Jembatan UPT Wil.Muntilan		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	DPUPR Kabupaten Magelang	1 paket	140.000.000		0
1.3.1.1.36.103.3.74	Upah swakelola Pemeliharaan Rutin Jembatan UPT Wil.Salam		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	DPUPR Kabupaten Magelang	1 paket	86.000.000		0

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1.3.1.1.36.103.3.75	Belanja Operasional Kegiatan Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Pelengkap Jalan		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	DPUPR Kabupaten Magelang	1 paket	462.330.968		0
1.3.1.3.1.3.1.1.36.103.4	Pembangunan dan Peningkatan Pelengkap jalan	Jumlah jembatan yang dibangun/ditingkatkan	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	kabupaten magelang	12 Paket	0	12 Paket	15.588.119.180
		Panjang drainase jalan yang dibangun/ditingkatkan			0.5 km		0.5 km	
		Panjang trotoar yang dibangun/ditingkatkan			0 km		0 km	
		Panjang tanggul yang dibangun/ditingkatkan			0.5 km		0.5 km	
1.3.1.3.1.3.1.1.36.103.5	Penyediaan dan Pengelolaan Data / Informasi Jalan	Jumlah Dokumen Tersusun	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	DPUPR Kab. Magelang	1 Paket	0	1 Paket	300.000.000
1.3.1.3.1.3.1.1.36.103.7	Peningkatan Jalan Kabupaten (DAK Reguler)	Panjang Jalan yang ditingkatkan	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Kabupaten Magelang	10 km	11.036.403.320	10 km	20.636.318.000
1.3.1.3.1.3.1.1.36.103.10	Peningkatan Jembatan Kabupaten (Bangub)	Jumlah jembatan yang ditingkatkan	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Kabupaten Magelang	1 jembatan	0	1 jembatan	200.000.000
1.3.1.3.1.3.1.1.36.103.11	Peningkatan Jalan Kabupaten (DAK Penugasan)	Panjang Jalan yang ditingkatkan	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Jl. Soekarno-Hatta, Kota Mungkid	10 km	0	10 km	12.120.572.000
1.3.1.3.1.3.1.1.36.103.12	Peningkatan Jalan Kabupaten (Bangub)	Jumlah jembatan yang ditingkatkan	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Jl. Soekarno-Hatta, Kota Mungkid	1 Paket	0	1 Paket	200.000.000
1.3.1.3.1.3.1.1.36.103.13	Peningkatan Jembatan Kabupaten (DAK)	Jumlah jembatan yang ditingkatkan	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Kabupaten Magelang	1 jembatan	0	1 jembatan	200.000.000
1.3.1.3.1.3.1.1.37.103	Program Peningkatan layanan Sumber Daya Air dan Jaringan irigasi	Cakupan layanan jaringan irigasi			85,25 PERSEN	4.907.443.730	85,25 PERSEN	26.526.001.200
		Cakupan layanan Sumber Daya Air			74,20 PERSEN		74,20 PERSEN	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja
1.3.1.3.1.3.1.1.37.103.1	Pengembangan dan Penguatan Pengelola Irigasi dan SDA	Jumlah sosialisasi peningkatan pengelola irigasi dan SDA	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Kabupaten Magelang	15 (30 org) kali	0	15 (30 org) kali	2.034.300.000
		Jumlah rapat koordinasi forum koordinasi daerah irigasi			6 rapat		6 rapat	
		Jumlah Daerah Irigasi yang disosialisasi sertifikasi tanah			5 D.I		5 D.I	
		Jumlah Daerah Irigasi yang disertifikat tanah irigasinya			5 D.I.		5 D.I.	
		Jumlah tanggul percontohan saluran terbangun			10 D.I.		10 D.I.	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1.3.1.3.1.3.1.1.37.103.2	Peningkatan Pengelolaan Irigasi Partisipatif	Jumlah dokumen AKNPI dan Penyediaan Air yang tersusun	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Kabupaten Magelang	30 Dokumen (30 D.I.) Dokumen	0	30 Dokumen (30 D.I.) Dokumen	6.453.503.000
		Luas daerah irigasi yang terpelihara dan D.I yang direncanakan konstruksi			1873 Ha		1873 Ha	
		Jumlah data Informasi Wilayah Konservasi Air Tanah yang tersedia			50 buah		50 buah	
		Jumlah data pemetaan Daerah Irigasi yang akurat tentang Jaringan Irigasi			178 D.I.		178 D.I.	
		Jumlah data studi potensi pengembangan Jaringan irigasi Air Tanah (JIAT) yang tersedia			8 lokasi		8 lokasi	
		Jumlah Jaringan irigasi Air Tanah (JIAT) yang terbangun			4 Titik		4 Titik	
		Jumlah data Daerah Irigasi yang di laksanakan Pengelolaan Aset Irigasi (PAI)			11 D.I		11 D.I	
		Jumlah Jaringan Irigasi Air Tanah (JIAT) yang terpelihara			0 Titik		0 Titik	
		Jumlah Dokumen perencanaan Daerah Irigasi			64 Dokumen		64 Dokumen	
		1.3.1.3.1.3.1.1.37.103.3			Rehabilitasi Jaringan Irigasi (DAK)		Luas cakupan layanan jaringan irigasi yang direhab	
Jumlah D.I yang direncanakan pembangunan	5 Daerah Irigasi		5 Daerah Irigasi					

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1.3.1.3.1.3.1.1.37.103.4	Operasi Jaringan Irigasi	Jumlah Pintu Airnya yang terpelihara	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Kabupaten magelang	5 Pintu Air	195.970.000	5 Pintu Air	394.751.500
		Jumlah D.I. yang dibangun bangunan ukur			6 D.I.		6 D.I.	
		Jumlah Dokumen Pedoman Pola Tanam			1 Dokumen (21 Kecamatan) Dokumen		1 Dokumen (21 Kecamatan) Dokumen	
		Jumlah data debit daerah irigasi			60 D.I		60 D.I	
1.3.1.1.37.103.4.3	Belanja Alat Tulis Kantor		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Sawitan Mungkid	1 Paket	9.108.000		0
1.3.1.1.37.103.4.4	Belanja Dokumentasi/ Dekorasi		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Sawitan Mungkid	1 Paket	985.000		0
1.3.1.1.37.103.4.5	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Sawitan Mungkid	200 OH	14.400.000		-5
1.3.1.1.37.103.4.6	Belanja Cetak dan Penggandaan		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Sawitan Mungkid	29552 lembar	6.797.000		0
1.3.1.1.37.103.4.7	Belanja Penjilidan		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Sawitan Mungkid	100 Bh	1.500.000		0
1.3.1.1.37.103.4.8	Belanja Makanan dan Minuman		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Sawitan Mungkid	760 OH	15.390.000		0
1.3.1.1.37.103.4.9	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Sawitan Mungkid	758 OH	53.910.000		0
1.3.1.1.37.103.4.10	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Sawitan Mungkid	45 OH	19.400.000		0

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
1.3.1.3.1.3.1.1.37.103.5	Pemeliharaan Jaringan Irigasi	Luas areal sawah DI yang teraliri air irigasi	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Kabupaten Magelang	25612.951 Ha	750.000.000		25612.951 Ha	6.454.877.000
		Panjang saluran irigasi kondisi baik			598.182 meter			598.182 meter	
		Jumlah bangunan irigasi kondisi baik			662 unit			662 unit	
1.3.1.3.1.3.1.1.37.103.6	Rehabilitasi / Pembangunan Jaringan Irigasi	Cakupan akses sawah beririgasi	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Kabupaten Magelang	692.53 Ha	0		692.53 Ha	5.683.177.500
		Jumlah bangunan irigasi yang dibangun			12 unit			12 unit	
		Penyusunan Studi dan Perencanaan untuk pembangunan irigasi dan layanan SDA			4 Dokumen			4 Dokumen	
		Pembangunan embung			0 Embung			0 Embung	
1.3.1.3.1.3.1.1.37.103.7	Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	Meningkatnya debit air layanan sarana air baku untuk irigasi pada mata air	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Kabupaten Magelang	4 Mata Air	0		4 Mata Air	1.151.150.000
		Perencanaan konservasi mata air			0 Mata Air			0 Mata Air	
1.3.1.3.1.3.1.1.38.103	Program Peningkatan dan Pengembangan Bangunan Gedung dan AMPL	Cakupan pembangunan gedung pemerintah dan publik			99,52 PERSEN	64.118.169.939		99,52 PERSEN	67.003.152.948
		Cakupan Bangunan Gedung Pemerintah dalam kondisi baik			25 PERSEN			25 PERSEN	
		Cakupan layanan air minum*			89,91 PERSEN			89,91 PERSEN	
		Cakupan layanan sanitasi air limbah domestik*			88,73 PERSEN			88,73 PERSEN	
		Persentase terbangunnya Landmark			75,00 PERSEN			75,00 PERSEN	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1.3.1.3.1.3.1.1.38.103.2	Pengawasan dan Fasilitasi Bangunan Gedung	Jumlah rekomendasi laik fungsi yang dikeluarkan	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Kab. Magelang	5 rekomendasi	0	5 rekomendasi	365.000.000
		Jumlah Perda tersusun			1 Perda		1 Perda	
1.3.1.3.1.3.1.1.38.103.3	Pembangunan dan Rehabilitasi Bangunan Gedung Pemerintah	Jumlah bangunan gedung pemerintah yang terbangun	SAWITAN, MUNGKID	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	4 gedung	51.514.929.000	4 gedung	39.400.000.000
		Jumlah Gedung yang direhabilitasi			10 Gedung		10 Gedung	
		Jumlah DED tersusun			3 Dokumen		3 Dokumen	
1.3.1.3.1.3.1.1.38.103.6	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) DAK REGULER	Jumlah Desa terbangun SPAM	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	DPUPRKab. Magelang	0 Desa	0	0 Desa	1.738.812.000
1.3.1.3.1.3.1.1.38.103.7	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) DAK PENUKASAN	Jumlah Desa terbangun SPAM	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Kabupaten Magelang	8 Desa	6.607.093.620	8 Desa	3.045.900.000
1.3.1.3.1.3.1.1.38.103.8	Pembangunan Sarana Sanitasi (DAK REGULER)	Jumlah Desa terbangun sarpras pengolahan limbah	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Kab. Magelang	6 Desa	4.802.703.570	6 Desa	3.456.678.500
1.3.1.1.38.103.8.5	Pembangunan IPAL Komunal Desa Munengwarangan Kec. Pakis		PAKIS, MUNENGWARANGAN	IPAL Komunal Desa Munengwarangan Kec. Pakis	1 paket	500.000.000		0
1.3.1.1.38.103.8.6	Pembangunan IPAL Komunal Dusun Kwilet Desa Ketunggeng Kec. Dukun		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	IPAL Komunal Dusun Kwilet Desa Ketunggeng Kec. Dukun	1 paket	491.500.000		0
1.3.1.1.38.103.8.7	Pembangunan IPAL Komunal Desa Sriwedari Kec. Muntilan		MUNTILAN, SRIWEDARI	IPAL Komunal Desa Sriwedari Kec. Muntilan	1 paket	450.000.000		0
1.3.1.1.38.103.8.4	Pembangunan IPAL Komunal Desa Pagergunung Kec. Ngablak		NGABLAK, PAGERGUNUNG	IPAL Komunal Desa Pagergunung Kec. Ngablak	1 paket	500.000.000		0
1.3.1.1.38.103.8.2	Pembangunan IPAL Komunal Desa Sukorejo Kec. Kajoran		KAJORAN, SUKOREJO	IPAL Komunal Desa Sukorejo Kec. Kajoran	1 paket	450.000.000		0

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1.3.1.1.38.103.8.1	BOP Kegiatan Pembangunan Sarana Sanitasi (DAK Reguler)		MUNGKID, SAWITAN	Jl. Soekarno-Hatta no. 6 Kota Mungkid	1 paket	300.935.000		331.028.500
1.3.1.1.38.103.8.3	Pembangunan IPAL Komunal Desa Payaman Kec. Secang		SECANG, PAYAMAN	IPAL Komunal Desa Payaman Kec. Secang	1 paket	450.000.000		0
1.3.1.3.1.3.1.1.38.103.9	Peningkatan dan Pengembangan Layanan Air Minum	Jumlah BP SPAM terbina	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Kabupaten Magelang	40 BP SPAM	1.193.443.749		40 BP SPAM
		Jumlah Desa terbangun Sarana Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS)			21 Desa			21 Desa
1.3.1.3.1.3.1.1.38.103.10	Fasilitasi Keciptakarya	Jumlah dokumen RPI2JM tersusun	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Kabupaten Magelang	0 dokumen	0		0 dokumen
		Jumlah Desa terfasilitasi hibah bansos			700 lokasi			700 lokasi
		Jumlah Landmark terbangun			1 lokasi			1 lokasi
1.3.1.3.1.3.1.1.38.103.11	Peningkatan dan Pengembangan Layanan Sanitasi	Jumlah BP SLBM terbina	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Kabupaten Magelang	50 BP SLBM	0		50 BP SLBM
		Jumlah Desa terbangun Sarana dan Prasarana Air Limbah			8 Desa			8 Desa
1.3.1.3.1.3.1.1.39.103	Program Pengembangan sarana dan prasarana ke PU an	Cakupan sarana prasarana ke PU-an			86 PERSEN	650.000.000		86 PERSEN
		Cakupan layanan Jasa konstruksi			62,95 PERSEN			62,95 PERSEN
1.3.1.3.1.3.1.1.39.103.1	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ke PU - an	Sarana Prasarana Ke-PU-an yang terpelihara	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Kabupaten Magelang	46 unit	600.000.000		46 unit
		Jumlah Sarana Prasarana ke PU an yang diadakan			1 unit			1 unit

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1.3.1.1.39.103.1.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat - Pengadaan Pick-up		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Jl. Soekarno Hatta No 6 Kota Mungkid	1 unit	200.000.000		480.000.000	
1.3.1.1.39.103.1.1	Belanja operasional		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Jl. Soekarno-Hatta, Kota Mungkid	1 paket	21.692.000		70.000.000	
1.3.1.1.39.103.1.3	Rehabilitasi/Pemeliharaan Alat-alat berat		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Jl. Soekarno-Hatta, Kota Mungkid	1 paket	666.533.000		750.000.000	
1.3.1.3.1.3.1.1.39.103.2	Fasilitasi dan Pengawasan Jasa Konstruksi	Jumlah buku standar satuan harga	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Kabupaten Magelang	15 buku	0	15 buku	224.261.400	
		Jumlah masyarakat jasa konstruksi yang terbina			30 orang		30 orang		
		Jumlah permohonan IUJK			15 pemohon		15 pemohon		
1.3.1.3.1.3.1.1.39.103.3	Pengadaan / Pemeliharaan alat - alat laboratorium ke PU - an	Jumlah alat laboratorium yang diadakan	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Kabupaten Magelang	4 unit	50.000.000	4 unit	162.750.000	
		Jumlah alat laboratorium yang terpeihara			15 unit		15 unit		
1.3.1.1.39.103.3.4	Belanja Pemeliharaan Sarana dan prasaranya lainnya - Kalibrasi Manometer		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Jl. Soekarno-Hatta, Kota Mungkid	2 buah	6.000.000		6.000.000	
1.3.1.1.39.103.3.3	Belanja Pemeliharaan Sarana dan prasaranya lainnya - Tera Timbangan		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Jl. Soekarno-Hatta, Kota Mungkid	6 set	6.000.000		6.000.000	
1.3.1.1.39.103.3.6	Belanja Pemeliharaan Sarana dan prasaranya lainnya - Kalibrasi Pesawat Ukur		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Jl. Soekarno-Hatta, Kota Mungkid	1 kali	7.500.000		15.000.000	
1.3.1.1.39.103.3.5	Belanja Pemeliharaan Sarana dan prasaranya lainnya - Kalibrasi Hammer test + anvil		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Jl. Soekarno-Hatta, Kota Mungkid	2 buah	9.000.000		9.000.000	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1.3.1.1.39.103.3.12	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Measuring / Testing Device - Hidrolik concrete beam		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Jl. Soekarno-Hatta, Kota Mungkid	1 set	24.371.000		45.807.000
1.3.1.1.39.103.3.10	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Timbangan - Timbangan Digital		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Jl. Soekarno-Hatta, Kota Mungkid	1 buah	4.589.000		12.900.000
1.3.1.1.39.103.3.9	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Perkakas Bengkel Khusus - Oven Memmert		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Jl. Soekarno-Hatta, Kota Mungkid	1 unit	40.310.000		47.300.000
1.3.1.1.39.103.3.8	Belanja Pemeliharaan Sarana dan prasaranya lainnya - Kalibrasi Dial		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Jl. Soekarno-Hatta, Kota Mungkid	2 buah	600.000		600.000
1.3.1.1.39.103.3.7	Belanja Pemeliharaan Sarana dan prasaranya lainnya - Kalibrasi Profing Ring		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Jl. Soekarno-Hatta, Kota Mungkid	1 set	4.000.000		8.000.000
1.3.1.1.39.103.3.7	Belanja operasional		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Jl. Soekarno Hatta Kota Mungkid	1 paket	3.425.000		15.000.000
1.3.1.1.39.103.3.2	Belanja Pemeliharaan Sarana dan prasaranya lainnya - Kalibrasi Kuat Tekan		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Jl. Soekarno-Hatta, Kota Mungkid	1 buah	7.500.000		7.500.000
1.3.1.3.1.3.1.1.40.103	Program Pemanfaatan dan Pengendalian Tata Ruang	Persentase Dokumen Rekomendasi Perijinan			45,96 PERSEN	225.200.000		45,96 PERSEN
		Persentase kesesuaian tata ruang			50,87 PERSEN			50,87 PERSEN
		Cakupan kinerja pertanahan			50,00 PERSEN			50,00 PERSEN
1.3.1.3.1.3.1.1.40.103.1	Fasilitasi Penyelenggaraan Penataan Ruang Daerah	Jumlah Dokumen Tersusun	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Kabupaten Magelang	1 Dokumen	103.000.000		302.283.410
1.3.1.3.1.3.1.1.40.103.2	Koordinasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Jumlah Laporan yang disusun,	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Kab Magelang	1 Dokumen	46.600.000		187.282.348

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1.3.1.3.1.3.1.1.40.103.3	Fasilitasi Informasi Tata Ruang	Jumlah Rekomendasi yang dikeluarkan	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Wilayah Kabupaten Magelang	300 Rekomendasi	75.600.000		300 Rekomendasi	405.953.137
1.3.1.1.40.103.3.1	Belanja Operasional Fasilitasi Informasi Tata Ruang		MUNGKID, SAWITAN	Kab. Magelang	1 Paket	112.750.800			0
1.3.1.1.40.103.3.3	Belanja Modal Pengadaan rambu rambu		MUNGKID, SAWITAN	Kab. Magelang	1 Paket	50.000.000			0
1.3.1.1.40.103.3.2	Belanja Pemeliharaan Sarana dan Prasarana lainnya		MUNGKID, SAWITAN	Kab. Magelang	1 Paket	77.127.800			0
1.3.1.3.1.3.1.1.40.103.6	Fasilitasi Pengadaan Tanah	Jumlah Tanah Aset Daerah yang dilakukan sertifikasi	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Wilayah Kabupaten Magelang	25 Bidang	0		25 Bidang	121.000.000
1.3.1.3.1.3.1.1.40.103.7	Penyusunan Dokumen Ketataruangan	Jumlah Dokumen Tersusun	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Kecamatan Tempuran Kabupaten Magelang	1 Dokumen	0		1 Dokumen	332.751.331
1.3.1.3.1.3.1.1.40.103.8	Pengadaan Tanah untuk Pembangunan ke PU an	Jumlah Bidang tanah yang diadakan	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Wilayah Kabupaten Magelang	31 Bidang	0		31 Bidang	4.576.940.555
Total						91.991.729.051			178.062.805.758

PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH

KABUPATEN MAGELANG

TAHUN 2021

Nama Perangkat Daerah : DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Urusan Wajib Pelayanan Dasar				2.909.266.750			10.005.125.000
1.4	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman				2.909.266.750			10.005.125.000
1.4.1.4.1.4.1.1.7.104	Program Manajemen Administrasi Pelayanan Umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah	Presentase Ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah			100 persen	295.580.000	100 persen	493.000.000
1.4.1.4.1.4.1.1.7.104.1	Pengelolaan Surat Menyurat, Kearsipan dan Bahan Pustaka	Jumlah surat yang dikelola	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	DPRKP	4000 surat	7.700.000	4000 surat	13.000.000
1.4.1.4.1.4.1.1.7.104.2	Penyelenggaraan Koordinasi dan Konsultasi Perangkat Daerah	Jumlah perjalanan dinas luar daerah yang terlaksana	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	DPRKP Kab. Magelang	48 kali	46.900.000	48 kali	70.000.000
		Jumlah perjalanan dinas dalam daerah yang terlaksana			240 kali		240 kali	
		Jumlah rapat koordinasi yang diselenggarakan			12 kali		12 kali	
1.4.1.4.1.4.1.1.7.104.3	Pengadaan dan Pengelolaan Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya	Jumlah paket pengadaan perlengkapan gedung kantor	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	DPRKP	4 unit	0	4 unit	20.000.000
		Jumlah paket pengadaan peralatan gedung kantor			- paket		- paket	
1.4.1.4.1.4.1.1.7.104.4	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya	Luas gedung kantor yang dipelihara	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	DPRKP	1 unit	109.730.000	1 unit	140.000.000
		Jumlah rekening air, listrik, telepon, internet dan surat kabar			5 rekening		5 rekening	
		Jumlah tenaga harlep			4 harlep		4 harlep	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja
1.4.1.4.1.4.1.1.7.104.5	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya	Jumlah peralatan yang dipelihara	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	DPRKP	17 unit	131.250.000	17 unit	250.000.000
		Jumlah perlengkapan yang dipelihara			6 buah		6 buah	
		Jumlah kendaraan dinas roda empat yang dipelihara			5 unit		5 unit	
		Jumlah kendaraan dinas roda dua yang dipelihara			11 unit		11 unit	
1.4.1.4.1.4.1.1.8.104	Program Perencanaan, Keuangan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Presentase Ketercapaian Perencanaan, Evaluasi Kinerja OPD, dan Keuangan Perangkat Daerah			100 persen	35.344.750	100 persen	61.000.000
1.4.1.4.1.4.1.1.8.104.1	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah laporan keuangan yang tersusun	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	DPRKP Kab. Magelang	10 laporan	28.377.750	10 laporan	45.000.000
1.4.1.4.1.4.1.1.8.104.2	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen renstra perangkat daerah yang tersusun	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	DPRKP Kab. Magelang	0 dokumen	4.170.000	0 dokumen	7.000.000
		Jumlah dokumen renja perangkat daerah yang tersusun			1 dokumen		1 dokumen	
1.4.1.4.1.4.1.1.8.104.3	Penyusunan Laporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen pelaporan tahunan yang tersusun	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	DPRKP	15 laporan	2.797.000	15 laporan	9.000.000
		Jumlah dokumen monitoring, evaluasi dan pelaporan tribulanan yang tersusun			4 dokumen		4 dokumen	
		jumlah dokumen profil perangkat daerah yang tersusun			1 dokumen		1 dokumen	
1.4.1.4.1.4.1.1.23.104	Program Pengembangan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman	Persentase penanganan kawasan permukiman kumuh			84,23 PERSEN	294.000.000	84,23 PERSEN	6.150.000.000
		Persentase pengendalian kawasan permukiman			71,70 PERSEN		71,70 PERSEN	
		Persentase penyediaan TPU			0 PERSEN		0 PERSEN	
		Persentase penanganan PSU Permukiman			100 PERSEN		100 PERSEN	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
1.4.1.4.1.4.1.1.23.104.1	Fasilitasi dan Penataan Kawasan Permukiman	Jumlah cakupan kawasan permukiman yang tertata	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	DPRKP Kab. Magelang	3 lokasi	75.000.000		3 lokasi	800.000.000
1.4.1.4.1.4.1.1.23.104.2	Penanganan Permukiman Kumuh	jumlah permukiman kawasan kumuh yang ditangani	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	DPRKP Kab. Magelang	81,87 Hektar	90.000.000		81,87 Hektar	3.000.000.000
		Jumlah kawasan permukiman yang ditingkatkan kualitasnya			5 kawasan			5 kawasan	
1.4.1.4.1.4.1.1.23.104.3	Pengendalian Kawasan Permukiman	Jumlah perangkat perencanaan dan pengendalian kawasan permukiman	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	DPRKP Kab. Magelang	2 dokumen	129.000.000		2 dokumen	350.000.000
1.4.1.4.1.4.1.1.23.104.4	Penyediaan PSU Permukiman	Jumlah PSU Permukiman yang ditangani	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	DPRKP Kab. Magelang	3 lokasi	0		3 lokasi	2.000.000.000
		Tersedianya lahan pemakaman yang dikelola oleh pemerintah			- lokasi			- lokasi	
1.4.1.4.1.4.1.1.25.104	Program Pengembangan dan Peningkatan Kualitas Perumahan	Persentase penanganan rumah tidak layak huni			48,16 PERSEN	2.284.342.000		48,16 PERSEN	3.301.125.000
		Persentase Fasilitasi penyediaan rumah bagi MBR			50 PERSEN			50 PERSEN	
		Persentase penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana			68,52 PERSEN			68,52 PERSEN	
		Persentase fasilitasi penyediaan rumah bagi relokasi warga yang terdampak proyek pemerintah*			100 PERSEN			100 PERSEN	
		Persentase penanganan PSU Perumahan			100 PERSEN			100 PERSEN	
1.4.1.4.1.4.1.1.25.104.2	Pengendalian Perumahan	Jumlah dokumen laporan pengendalian	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	DPRKP	3 dokumen	40.000.000		3 dokumen	90.000.000
1.4.1.4.1.4.1.1.25.104.3	Pengembangan Perumahan Akibat Bencana	Terbangunnya / terehabilitasinya hunian korban bencana	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	DPRKP Kab. Magelang	100 PERSEN	0		100 PERSEN	1.000.000.000

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
			Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1.4.1.4.1.4.1.1.25.104.4	Pengembangan Perumahan Umum, Khusus dan Swadaya	Tercapainya fasilitasi, pengembangan perumahan umum oleh pengembang	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	DPRKP Kab. Magelang	2 lokasi	984.200.000		2 lokasi	1.600.000.000
		Tercapainya fasilitasi penyediaan rumah MBR melalui perumahan subsidi			50 unit			50 unit	
		Tercapainya fasilitasi pembangunan/rehabilitasi rumah swadaya			3000 unit			3000 unit	
		Tercapainya fasilitasi rumah layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah			100 PERSEN			100 PERSEN	
1.4.1.4.1.4.1.1.25.104.6	Perencanaan Perumahan	Jumlah dokumen perencanaan	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	DPRKP	4 dokumen	0		4 dokumen	150.000.000
1.4.1.4.1.4.1.1.25.104.7	Fasilitasi dan Stimulasi Rumah Tidak Layak Huni (DAK)	Tercapainya fasilitasi pembangunan / rehabilitasi perumahan	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	DPRKP Kab. Magelang	100 unit	1.260.142.000		100 unit	461.125.000
Total						2.909.266.750			10.005.125.000

PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH

KABUPATEN MAGELANG

TAHUN 2021

Nama Perangkat Daerah : SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Urusan Wajib Pelayanan Dasar				10.558.042.000			13.425.517.000
1.5	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat				10.558.042.000			13.425.517.000
1.5.1.5.1.1.7.105	Program Manajemen Administrasi Pelayanan Umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah			100 %	639.219.000	100 %	1.262.603.000
1.5.1.5.1.1.7.105.1	Pengelolaan Surat Menyurat, Kearsipan dan Bahan Pustaka	Jumlah surat yang dikelola	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN	1000 surat	6.030.000	1000 surat	9.000.000
		Jumlah arsip yang dikelola			0 arsip		0 arsip	
		Jumlah bahan pustaka yang dikelola			0 bahan pustaka		0 bahan pustaka	
1.5.1.5.1.1.7.105.2	Penyelenggaraan Koordinasi dan Konsultasi Perangkat Daerah	Jumlah perjalanan dinas luar daerah yang terlaksana	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN	SATPOL PP DAN PK, WILAYAH KABUPATEN MAGELANG, LUAR WILAYAH KABUPATEN MAGELANG	40 kali	44.000.000	40 kali	140.000.000
		Jumlah rapat koordinasi yang diselenggarakan			12 kali		12 kali	
		Jumlah perjalanan dinas dalam daerah yang terlaksana			20 kali		20 kali	
1.5.1.5.1.1.7.105.3	Pengadaan dan Pengelolaan Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya	Jumlah paket pengadaan perlengkapan gedung kantor	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN	1 paket	0	1 paket	76.843.000
		Jumlah paket pengadaan peralatan gedung kantor			1 paket		1 paket	
		Jumlah aset yang dikelola			0 unit		0 unit	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1.5.1.5.1.5.1.1.7.105.4	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya	Luas gedung kantor yang dipelihara	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN	1223 m2	138.262.000	1223 m2	150.000.000
		Jumlah rekening air, listrik, telepon, dan surat kabar			48 rekening bulan		48 rekening bulan	
1.5.1.5.1.5.1.1.7.105.5	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya	Jumlah peralatan yang dipelihara	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN	32 unit	299.141.000	32 unit	570.000.000
		Jumlah perlengkapan yang dipelihara			0 unit		0 unit	
		Jumlah kendaraan dinas roda empat atau lebih yang dipelihara			22 unit		22 unit	
		Jumlah kendaraan dinas roda dua yang dipelihara			14 unit		14 unit	
1.5.1.5.1.5.1.1.7.105.7	Peningkatan Kapasitas dan Disiplin Aparatur Sipil Negara	Frekuensi pembinaan ASN	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN	22 kali	151.786.000	22 kali	316.760.000
		Jumlah ASN yang dibina			50 orang		50 orang	
		Jumlah tenaga honoror/kontrak			2 orang		2 orang	
		Jumlah seragam dan atribut ASN yang disediakan			51 stel		51 stel	
		Jumlah JFT yang terrealisasi penilaian angka kreditnya			9 orang		9 orang	
1.5.1.5.1.5.1.1.8.105	Program Perencanaan Keuangan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian perencanaan, evaluasi kinerja perangkat daerah, dan keuangan perangkat daerah			100 %	43.723.000	100 %	80.000.000
1.5.1.5.1.5.1.1.8.105.1	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah kegiatan yang dikelola	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN	22 kegiatan	30.673.000	22 kegiatan	50.000.000
		Jumlah laporan keuangan yang tersusun			3 laporan		3 laporan	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja
1.5.1.5.1.5.1.1.8.105.2	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Renstra Perangkat Daerah yang tersusun	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN	0 dokumen	6.700.000	0 dokumen	10.000.000
		Jumlah dokumen Renja Perangkat Daerah yang tersusun			2 dokumen		2 dokumen	
1.5.1.5.1.5.1.1.8.105.3	Penyusunan Laporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen pelaporan tahunan yang tersusun	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN	3 laporan	3.000.000	3 laporan	10.000.000
		Jumlah dokumen monitoring, evaluasi, dan pelaporan tribulanan yang tersusun			2 laporan		2 laporan	
		Jumlah dokumen pelaporan bulanan yang tersusun			1 laporan		1 laporan	
		Jumlah dokumen evaluasi jangka menengah yang tersusun			0 dokumen		0 dokumen	
		Jumlah Dokumen Profil Perangkat Daerah yang tersusun			1 Dokumen		1 Dokumen	
1.5.1.5.1.5.1.1.8.105.4	Penyusunan Dokumen Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Perangkat Daerah	Jumlah Standar Operasional Prosedur yang tersusun	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN	3 SOP	3.350.000	3 SOP	10.000.000
		Jumlah Standar Pelayanan yang tersusun			1 SP		1 SP	
		Jumlah Daftar Informasi Publik			1 dokumen		1 dokumen	
		Jumlah dokumen pengendalian intern yang tersusun			1 dokumen		1 dokumen	
		Jumlah dokumen data perangkat daerah yang tersusun			1 dokumen		1 dokumen	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
1.5.1.5.1.5.1.1.25.105	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	Persentase penertiban yang dilaksanakan			100 %	2.394.854.000		100 %	3.404.419.000
		Persentase satlinmas yang aktif			72 %			72 %	
		Persentase pengamanan dan pengawalan			100 %			100 %	
1.5.1.5.1.5.1.1.25.105.1	Operasi Represif Non Yustisi	Frekuensi pelaksanaan operasi represif non yustisi	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN	Kabupaten Magelang	60 kali	0		60 kali	100.000.000
1.5.1.5.1.5.1.1.25.105.2	Deteksi Dini dan Pengendalian Massa	Frekuensi pelaksanaan deteksi dini lokasi rawan gangguan tibum tranmas	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN	Kabupaten Magelang	21 kali	0		21 kali	55.100.000
		Frekuensi pelaksanaan pengendalian massa			12 kali			12 kali	
1.5.1.5.1.5.1.1.25.105.3	Pengelolaan Data Berbasis SIG	Jumlah laporan data trantibum yang tersusun	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN	Kabupaten Magelang	12 laporan	0		12 laporan	80.000.000

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1.5.1.5.1.5.1.1.25.105.4	Pembinaan dan Pemberdayaan Satlinmas	Frekuensi pembinaan/pemberdayaan satlinmas inti kabupaten	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN	Kabupaten Magelang	1 kali	30.000.000	1 kali	256.723.000
		Jumlah anggota satlinmas inti kabupaten yang mendapatkan pembinaan/pemberdayaan			105 orang		105 orang	
		Frekuensi pembinaan/pemberdayaan anggota satlinmas kecamatan			3 kali		3 kali	
		Jumlah anggota satlinmas kecamatan yang mendapatkan pembinaan/pemberdayaan			315 orang		315 orang	
		Frekuensi pengerahan satlinmas pada upacara dan pengamanan hari besar nasional/kegiatan daerah			17 kali		17 kali	
		Cakupan petugas perlindungan masyarakat (Linmas)			92 %		92 %	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1.5.1.5.1.5.1.1.25.105.5	Pengamanan Obyek Vital dan Keramaian Daerah	Frekuensi pelaksanaan pengamanan	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN, BANYUROJO MERTOYUDAM, DEYANGAN MERTOYUDAN, GULON SALAM, SAWITAN MUNGKID, CANDIREJO BOROBUDUR, SEDAYU MUNTILAN	200 kali	2.079.931.000	200 kali	2.427.972.000
		Jumlah tenaga pengamanan/security yang tersedia			42 orang		42 orang	
		Jumlah tenaga bantu polisi pamong praja yang tersedia			40 orang		40 orang	
		Jumlah paket pengadaan sarana dan prasarana pengamanan			0 paket		0 paket	
		Frekuensi pembinaan tenaga pengamanan/security			4 kali		4 kali	
		Frekuensi pembinaan tenaga bantu polisi pamong praja			4 kali		4 kali	
		Jumlah seragam dan atribut tenaga pengamanan/security yang disediakan			42 stel		42 stel	
		Jumlah seragam dan atribut tenaga bantu polisi pamong prajayang disediakan			0 stel		0 stel	
1.5.1.5.1.5.1.1.25.105.6	Pengawasan Bupati, Pejabat dan Tamu Penting	Frekuensi pelaksanaan pengawasan	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN	Kabupaten Magelang	85 kali	88.440.000	85 kali	132.000.000
		Jumlah paket pengadaan sarana dan prasarana pengawasan			0 paket		0 paket	
1.5.1.5.1.5.1.1.25.105.7	Patroli Wilayah dan Pembinaan Masyarakat	Frekuensi pelaksanaan patroli wilayah	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN	Kabupaten Magelang	252 kali	196.483.000	252 kali	351.624.000
		Jumlah masyarakat yang mendapatkan pembinaan			336 orang		336 orang	
		Jumlah paket pengadaan sarana dan prasarana patroli			1 paket		1 paket	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja
1.5.1.5.1.5.1.1.25.105.8	Fasilitasi Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat (DAK)	Jumlah paket pengadaan sarana dan prasarana peningkatan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN	0 paket	0	0 paket	1.000.000
		Frekuensi fasilitasi			0 kali		0 kali	
1.5.1.5.1.5.1.1.26.105	Program Penegakan Perda	Persentase penegakan perda			95.80 %	183.263.000	95.80 %	598.900.000
1.5.1.5.1.5.1.1.26.105.1	Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan Daerah	Frekuensi pembinaan dan pengawasan pelaksanaan peraturan perundang- undangan daerah	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN	Kabupaten Magelang	228 kali	0	228 kali	398.000.000
		Jumlah raperda yang tersusun			0 dokumen		0 dokumen	
		Jumlah paket pengadaan sarana dan prasarana pembinaan dan pengawasan pelaksanaan peraturan perundang- undangan daerah			0 paket		0 paket	
		Jumlah paket pengadaan software aplikasi pembinaan dan pengawasan pelaksanaan perda			1 paket		1 paket	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1.5.1.5.1.5.1.1.26.105.2	Penanganan Perkara Pelanggaran Peraturan Perundang-undangan Daerah	Jumlah penanganan perkara	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN	Kabupaten Magelang	14 kasus	108.263.000	14 kasus	198.900.000
		Jumlah PPNS yang terfasilitasi			12 orang		12 orang	
		Jumlah paket pengadaan sarana dan prasarana penanganan perkara			0 paket		0 paket	
		Jumlah warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan perda dan perkada**			14 orang		14 orang	
		Jumlah paket pengadaan software aplikasi pemberkasan perkara pelanggaran perda			1 paket		1 paket	
		Jumlah warga negara yang terdampak akibat dari penegakan hukum perda dan perkada			14 orang		14 orang	
1.5.1.5.1.5.1.1.26.105.3	Fasilitasi Penegakan Perda (DAK)	Jumlah paket pengadaan sarana dan prasarana penegakan perda	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN	0 paket	0	0 paket	1.000.000
		Frekuensi fasilitasi			0 kali		0 kali	
1.5.1.5.1.5.1.1.26.105.4	Pengendalian dan Pengawasan Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT)	Frekuensi pengendalian dan pengawasan cukai hasil tembakau	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN	0 kali	75.000.000	0 kali	1.000.000
1.5.1.5.1.5.1.1.27.105	Program Penanggulangan Kebakaran	Persentase layanan pemadaman, penyelamatan, dan evakuasi korban dan terdampak kebakaran dalam tingkat waktu tanggap			61 %	7.296.983.000	61 %	8.079.595.000

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1.5.1.5.1.5.1.1.27.105.1	Pembinaan Penanggulangan Kebakaran	Jumlah sasaran sosialisasi masyarakat tanggap kebakaran	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN	Kabupaten Magelang	6 lokasi	0	6 lokasi	194.595.000
		Jumlah sasaran pelatihan simulasi dan penyuluhan masyarakat relawan kebakaran			2 lokasi		2 lokasi	
		Jumlah SKKL yang tersusun			1 SKKL		1 SKKL	
		Jumlah Desa/Kelurahan Siaga Kebakaran yang terbentuk			1 desa/kelurahan		1 desa/kelurahan	
		Frekuensi penerimaan kunjungan PAUD/TK, SD, SLTP, SLTA			60 kali		60 kali	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1.5.1.5.1.5.1.1.27.105.2	Peningkatan Kesiapsiagaan Penanggulangan Kebakaran	Jumlah WMK yang terbangun	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN	2 WMK	7.044.553.000	2 WMK	7.500.000.000
		Jumlah paket pengadaan sarana dan prasarana pemadam kebakaran			0 paket		0 paket	
		Jumlah paket pengadaan APD			0 paket		0 paket	
		Jumlah pemadam kebakaran yang mendapatkan diklat/bimtek			40 orang		40 orang	
		Jumlah THL pemadam kebakaran yang tersedia			287 orang		287 orang	
		Jumlah dokumen RISPK yang tersusun			0 dokumen		0 dokumen	
		Jumlah paket pengadaan mobil pemadam kebakaran			0 paket		0 paket	
		Jumlah paket pembangunan sistem hydrant kota			0 paket		0 paket	
		Jumlah seragam dan atribut pemadam kebakaran yang disediakan			50 stel		50 stel	
		Frekuensi pembinaan fisik personil damkar			48 kali		48 kali	
		Jumlah paket pendataan ancaman kebakaran			1 paket		1 paket	
		Jumlah paket pelaksanaan pelayanan inspeksi kebakaran			1 paket		1 paket	
		Jumlah personil damkar yang mengikuti bimtek kualifikasi aparatur pemadam kebakaran			40 orang		40 orang	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1.5.1.5.1.5.1.1.27.105.3	Pemadaman Kebakaran dan Penyelamatan Korban	Jumlah paket pengadaan sarana dan prasarana penyelamatan	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN	KABUPATEN MAGELANG	1 paket	252.430.000	1 paket	384.000.000
		Frekuensi pelaksanaan pemadaman kebakaran			100 kali		100 kali	
		Frekuensi pelaksanaan penyelamatan			100 kali		100 kali	
		Jumlah paket pengadaan mobil rescue/ambulance			1 paket		1 paket	
		Jumlah paket pengadaan APD penyelamatan			1 paket		1 paket	
		Jumlah paket pelaksanaan investigasi pasca kebakaran			100 paket		100 paket	
		Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran**			400 orang		400 orang	
		Jumlah layanan penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia (operasi darurat non kebakaran)			100 kali		100 kali	
1.5.1.5.1.5.1.1.27.105.4	Fasilitasi Penanggulangan Kebakaran (DAK)	Jumlah paket pengadaan sarana dan prasarana penanggulangan kebakaran	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN	0 paket	0	0 paket	1.000.000
		Frekuensi fasilitasi			0 kali		0 kali	
Total						10.558.042.000		13.425.517.000

PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH

KABUPATEN MAGELANG

TAHUN 2021

Nama Perangkat Daerah : KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
1	2	3	4		5	6	7	8	9
1	Urusan Wajib Pelayanan Dasar					647.388.000			1.286.300.000
1.5	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat					647.388.000			1.286.300.000
1.5.1.5.1.5.2.1.7.105	Program Manajemen Administrasi Pelayanan Umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah	cakupan Manajemen Administrasi Pelayanan Umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah			100 %	129.800.250		100 %	252.300.000
1.5.1.5.1.5.2.1.7.105.1	Pengelolaan Surat Menyurat, Kearsipan dan Bahan Pustaka	jumlah surat yang dikelola	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	kota mungkid	1800 surat	6.150.000		1800 surat	6.300.000
1.5.2.1.7.105.1.1	Pengelolaan Surat Menyurat, Kearsipan dan Bahan Pustaka		KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Kantor Kesbangpol	1800 surat	6.300.000			65.000.000
1.5.1.5.1.5.2.1.7.105.2	Penyelenggaraan Koordinasi dan Konsultasi Perangkat Daerah	jumlah perjalanan dinas luar daerah jumlah perjalanan dinas dalam daerah	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	kota mungkid	25 perjalanan dinas 23 perjalanan dinas	59.407.500		25 perjalanan dinas 23 perjalanan dinas	62.000.000
1.5.2.1.7.105.2.1	Penyelenggaraan Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah		KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Kantor Kesbangpol	23 perjalanan	17.609.400			21.000.000
1.5.2.1.7.105.2.2	Penyelenggaraan Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah		KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Kantor Kesbangpol	25 perjalanan dinas	44.390.600			62.000.000

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1.5.1.5.1.5.2.1.7.105.3	Pengadaan dan Pengelolaan Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya	jumlah peralatan yang dibeli	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	KOTA MUNGKID	3 peralatan	0	3 peralatan	60.000.000
		jumlah perlengkapan yang dibeli			3 buah		3 buah	
1.5.2.1.7.105.3.1	Pengadaan dan Pengelolaan Perlengkapan Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya		KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Kantor Kesbangpol	3 perlengkapan	20.000.000		60.000.000
1.5.2.1.7.105.3.2	Pengadaan dan Pengelolaan Peralatan		KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Kantor Kesbangpol	3 peralatan	10.000.000		60.000.000
1.5.1.5.1.5.2.1.7.105.4	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya	luas gedung yang dipelihara	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Kantor Kesbangpol	1550 m2	32.295.000	1550 m2	52.000.000
1.5.2.1.7.105.4.1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Air dan Listrik		KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Kantor Kesbangpol	5 rekening	20.000.000		21.000.000
1.5.2.1.7.105.4.2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor		KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Kantor Kesbangpol	1550 m2	21.000.000		22.000.000
1.5.1.5.1.5.2.1.7.105.5	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya	jumlah peralatan yang dipelihara	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Kantor Kesbangpol	12 peralatan	31.947.750	12 peralatan	72.000.000
1.5.2.1.7.105.5.1	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya		KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Kantor Kesbangpol	12 peralatan	42.597.000		67.000.000
1.5.1.5.1.5.2.1.7.105.6	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya	jumlah paket	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	KESBANGPOL	0 paket	0	0 paket	0
1.5.1.5.1.5.2.1.8.105	Program Perencanaan Keuangan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan Perencanaan Keuangan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			100 %	29.443.750	100 %	58.000.000

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1.5.1.5.1.5.2.1.8.105.1	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	jumlah kegiatan yang dikelola	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	KESBANGPOL	15 kegiatan	27.561.250		15 kegiatan	44.000.000
1.5.2.1.8.105.1.1	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan		KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Kantor Kesbangpol	14 kegiatan	42.000.000			28.140.000
1.5.1.5.1.5.2.1.8.105.3	Penyusunan Laporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	jumlah dokumen pelaporan tahunan yang tersusun	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	KESBANGPOL	5 dokumen	1.882.500		5 dokumen	14.000.000
		jumlah dokumen monitoring, evaluasi dan pelaporan tribulanan yang tersusun			4 %			4 %	
		Jumlah dokumen pelaporan bulanan yang tersusun			4 dokumen			4 dokumen	
		Jumlah Dokumen Profil Perangkat Daerah yang tersusun			1 Dokumen			1 Dokumen	
1.5.1.5.1.5.2.1.24.105	Program Peningkatan Wawasan Kebangsaan dan Politik Masyarakat	Presentase ormas yang aktif			98 PERSEN	488.144.000		98 PERSEN	976.000.000
		Persentase konflik sosial tertangani			100 PERSEN			100 PERSEN	
		Persentase kegiatan pembinaan politik			100 PERSEN			100 PERSEN	
1.5.1.5.1.5.2.1.24.105.1	Kegiatan Pembinaan Politik Daerah	Jumlah kegiatan pembinaan politik daerah	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	kantor kesbangpol	6 kegiatan	50.000.000		6 kegiatan	154.000.000
1.5.2.1.24.105.1.1	Verifikasi Administrasi Bantuan Keuangan Partai Politik		KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Kantor Kesbangpol	9 parpol	30.000.000			31.000.000
1.5.2.1.24.105.1.2	Peningkatan Kapasitas Pengurus Partai Politik		KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Kantor Kesbangpol	6 kegiatan	100.000.000			101.000.000

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
1.5.1.5.1.5.2.1.24.105.2	Kegiatan Peningkatan Kewaspadaan Dini Daerah dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	jumlah angka kriminalitas	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	kantor kesbangpol	2,45 kejadian kriminal / 10.000 penduduk	169.510.000		2,45 kejadian kriminal / 10.000 penduduk	256.000.000
1.5.2.1.24.105.2.1	Peningkatan Peran dan Fungsi Tim Kewaspadaan Dini Daerah (Wasdinda)		KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Kabupaten Magelang	2 kejadian kriminal / 10.000 penduduk	146.139.000			224.000.000
1.5.2.1.24.105.2.1	Peningkatan Peran dan Fungsi Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM)		KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Kantor Kesbangpol	100 orang	23.371.000			26.000.000
1.5.1.5.1.5.2.1.24.105.3	Kegiatan Pembinaan Organisasi Kemasyarakatan	jumlah kegiatan pembinaan ormas	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Kabupaten Magelang	6 kegiatan	0		6 kegiatan	130.000.000
1.5.2.1.24.105.3.1	Kegiatan Pembinaan Organisasi Kemasyarakatan		KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Kantor Kesbangpol	0 Kegiatan	89.100.000			0
1.5.1.5.1.5.2.1.24.105.4	Kegiatan Peningkatan Kesadaran Bela Negara, Penyelenggaraan Pendidikan Wawasan Kebangsaan dan Pelestarian Nilai-Nilai Kepahlawanan	jumlah peserta	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Kabupaten Magelang	300 orang	268.634.000		300 orang	324.000.000
1.5.2.1.24.105.4.1	Peningkatan Kesadaran Bela Negara		KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Kabupaten Magelang	150 orang	295.500.000			295.500.000
1.5.2.1.24.105.4.2	Pelestarian Nilai-Nilai Kepahlawanan		KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Kabupaten Magelang	100 orang	26.700.000			27.699.997
1.5.2.1.24.105.4.3	Penyelenggaraan Pendidikan Wawasan Kebangsaan		KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Kabupaten Magelang	50 orang	8.700.000			9.700.000
1.5.1.5.1.5.2.1.24.105.5	Kegiatan Ketahanan Seni, Budaya dan Ekonomi	jumlah peserta	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	kantor kesbangpol	200 orang	0		200 orang	84.000.000
1.5.2.1.24.105.5.1	Peningkatan Peran Forum Pembauran Kebangsaan (FPK)		KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Kabupaten Magelang	50 orang	21.600.000			25.508.000

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1.5.2.1.24.105.5.2	Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)		KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Kabupaten Magelang	150 orang	29.400.000			58.492.000
1.5.1.5.1.5.2.1.24.105.6	Kegiatan Ketahanan Agama dan Kemasyarakatan	jumlah peserta	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	kantor kesbangpol	200 orang	0		200 orang	28.000.000
1.5.2.1.24.105.6.1	Kegiatan Ketahanan Agama dan Kemasyarakatan		KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Kabupaten Magelang	50 orang	17.000.000			17.000.000
Total						647.388.000			1.286.300.000

PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH

KABUPATEN MAGELANG

TAHUN 2021

Nama Perangkat Daerah : DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
1	2	3	4		5	6	7	8	9
1	Urusan Wajib Pelayanan Dasar					1.698.973.410			8.360.202.900
1.6	Sosial					1.698.973.410			8.360.202.900
1.6.1.6.1.6.1.1.7.106	Program Manajemen Administrasi Pelayanan Umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah			100 persen	823.914.910		100 persen	3.006.509.000
1.6.1.6.1.6.1.1.7.106.1	Pengelolaan Surat Menyurat, Kearsipan dan Bahan Pustaka	Jumlah surat yang dikelola	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	DINSOS PPKB PPPA	4000 Surat	30.498.942		4000 Surat	48.959.000
1.6.1.6.1.6.1.1.7.106.2	Penyelenggaraan Koordinasi dan Konsultasi Perangkat Daerah	Jumlah Perjalanan Dinas Luar Daerah yang terlaksana	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	DINSOS PPKB PPPA	100 Kali	80.000.000		100 Kali	187.550.000
		Jumlah Perjalanan Dinas Dalam Daerah yang terlaksana			145 Kali			145 Kali	
		Jumlah Rapat Koordinasi yang diselenggarakan			35 Kali			35 Kali	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
1.6.1.6.1.6.1.1.7.106.3	Pengadaan dan Pengelolaan Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya	Jumlah paket pengadaan perlengkapan gedung kantor	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	DINSOS PPKB PPPA	0 Paket	0	0 Paket	1.030.000.000	
		Jumlah paket pengadaan peralatan gedung kantor			10 Paket		10 Paket		
1.6.1.6.1.6.1.1.7.106.4	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya	Luas Gedung Kantor Yang Dipelihara	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	DINSOS PPKB PPPA	12616 M2	266.281.000	12616 M2	360.000.000	
		Jumlah Rekening Tagihan yang dibayarkan			108 rekening/tagihan		108 rekening/tagihan		
1.6.1.6.1.6.1.1.7.106.5	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya	Jumlah peralatan yang dipelihara	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	DINSOS PPKB PPPA	40 Peralatan Kantor	372.134.968	40 Peralatan Kantor	1.032.000.000	
		Jumlah Perlengkapan yang dipelihara			20 Set		20 Set		
		Jumlah Kendaraan Dinas Roda Dua yang dipelihara			139 Unit		139 Unit		
		Jumlah Kendaraan Dinas Roda Empat yang dipelihara			13 Unit		13 Unit		
		Jumlah Kendaraan Roda Tiga Yang Dipelihara			1 Unit		1 Unit		
		Jumlah peralatan dapur umum yang dipelihara			2 Paket		2 Paket		
		Jumlah Peralatan Mupen yang Dipelihara			1 Paket		1 Paket		
		Jumlah Peralatan Muyan yang Dipelihara			1 Paket		1 Paket		

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1.6.1.6.1.6.1.1.7.106.6	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya	Jumlah Paket Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	DINSOS PPKB PPPA	1 Unit Gedung	0		1 Unit Gedung	200.000.000
1.6.1.6.1.6.1.1.7.106.7	Peningkatan Kapasitas dan Disiplin Aparatur Sipil Negara	Jumlah ASN yang dibina	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	DINSOS PPKB PPPA	60 Orang	75.000.000		60 Orang	148.000.000
		Jumlah tenaga honorer/ kontrak			4 Orang			4 Orang	
		Jumlah JFT yang terfasilitasi penilaian angka kreditnya			64 Orang			64 Orang	
		Frekuensi Pembinaan ASN			12 kali			12 kali	
1.6.1.6.1.6.1.1.8.106	Program Perencanaan, Keuangan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian perencanaan, evaluasi kinerja OPD, dan keuangan perangkat daerah			100 persen	47.500.000		100 persen	93.190.000
1.6.1.6.1.6.1.1.8.106.1	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah Kegiatan yang dikelola	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	DINSOS PPKB PPPA	31 Kegiatan	32.000.000		31 Kegiatan	58.190.000
1.6.1.6.1.6.1.1.8.106.2	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah yang tersusun	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	DINSOS PPKB PPPA	0 Dokumen	7.500.000		0 Dokumen	10.000.000
		Jumlah Dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah yang tersusun			1 Dokumen			1 Dokumen	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1.6.1.6.1.6.1.1.8.106.3	Penyusunan Laporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pelaporan Tahunan yang tersusun	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	DINSOS PPKB PPPA	5 Dokumen	8.000.000	5 Dokumen	25.000.000	
		Laporan Dokumen monitoring evaluasi dan pelaporan tribulanan yang tersusun			8 Dokumen		8 Dokumen		
		Jumlah Dokumen Pelaporan bulanan yang tersusun			12 Dokumen		12 Dokumen		
		Jumlah Dokumen Profil Perangkat Daerah yang tersusun			1 Dokumen		1 Dokumen		
1.6.1.6.1.6.1.1.23.106	Program Penanganan dan Perlindungan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Persentase PMKS lainnya diluar panti yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar*			33,95 persen	397.558.500	33,95 persen	2.683.865.200	
		Persentase PMKS dan korban bencana yang mendapat perlindungan dan jaminan sosial			45,25 persen		45,25 persen		
		Persentase penyandang disabilitas, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial*			2,57 persen		2,57 persen		
		Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana kabupaten **			100 persen		100 persen		
		Persentase Penyandang Disabilitas terlantar, Anak terlantar, Lanjut Usia terlantar, dan Gelandangan dan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti * **			100 persen		100 persen		

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1.6.1.6.1.6.1.1.23.106.1	Rehabilitasi Sosial	Jumlah anak yang bermasalah sosial yang mendapatkan penanganan sosial di luar panti (Gulkin)	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	DINSOS PPKB PPPA	120 Orang	98.358.500		120 Orang	1.575.000.000
		Jumlah gelandangan, pengemis dan tuna sosial lainnya yang mendapatkan penanganan sosial di luar panti (Gulkin)			100 Orang			100 Orang	
		Jumlah penyandang disabilitas yang mendapatkan penanganan sosial (Gulkin)			240 Orang			240 Orang	
		Jumlah lanjut usia terlantar yang mendapatkan penanganan sosial* (Gulkin)			120 Orang			120 Orang	
1.6.1.6.1.6.1.1.23.106.2	Penanganan PMKS Melalui Rumah Singgah	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut usia terlantar, Gelandangan dan Pengemis, dan PMKS lainnya di luar panti yang mendapatkan penanganan dalam Rumah Singgah ** (Gulkin)	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	DINSOS PPKB PPPA	60 Orang	99.200.000		60 Orang	300.000.000

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1.6.1.6.1.6.1.1.23.106.3	Perlindungan dan Jaminan Sosial	Jumlah KPM PKH yang terfasilitasi dalam Program Keluarga Harapan* (Gulkin)	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	DINSOS PPKB PPPA	55303 Keluarga	200.000.000	55303 Keluarga	808.865.200
		Jumlah PMKS yang terfasilitasi dalam pengajuan bantuan sosial terencana (Gulkin)			1500 Proposal		1500 Proposal	
		Jumlah proposal yang terverifikasi (Gulkin)			1000 Proposal		1000 Proposal	
		Jumlah Korban bencana yang terfasilitasi penanganan korban bencana			80 KK		80 KK	
		Jumlah Call Center yang terbentuk (Gulkin)			1 Unit		1 Unit	
1.6.1.6.1.6.1.1.24.106	Program Pemberdayaan Sosial	Persentase PSKS dapat melaksanakan usaha kesejahteraan sosial (UKS)			8,96 persen	430.000.000	8,96 persen	2.576.638.700
		Persentase Fakir Miskin yang diberdayakan			0,20 persen		0,20 persen	
		Persentase fakir miskin yang divalidasi			100 persen		100 persen	
1.6.1.6.1.6.1.1.24.106.1	Penanganan Fakir Miskin	Jumlah Fakir Miskin yang diberdayakan (Gulkin)	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	DINSOS PPKB PPPA	150 Orang	0	150 Orang	231.638.700

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1.6.1.6.1.6.1.1.24.106.2	Pemberdayaan Sosial	Jumlah Pendamping dan Pelaku Usaha Kesejahteraan Sosial yang mendapatkan pembinaan	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	DINSOS PPKB PPPA	171 Orang	130.000.000		171 Orang	375.000.000
		Jumlah masyarakat yang mendapatkan diklat Tagana Muda			30 Orang			30 Orang	
1.6.1.6.1.6.1.1.24.106.3	Fasilitasi Komda Lansia	Frekuensi Fasilitasi yang dilaksanakan	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	DINSOS PPKB PPPA	6 Kali	0		6 Kali	70.000.000
1.6.1.6.1.6.1.1.24.106.4	Optimalisasi Data Kemiskinan	Jumlah verifikasi dan validasi data Basic Data Terpadu (BDT) dan Data PMKS (Gulkin)	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	DINSOS PPKB PPPA	12000 KK	150.000.000		12000 KK	1.000.000.000
1.6.1.6.1.6.1.1.24.106.5	Fasilitasi Program Bantuan Sosial Pangan	Jumlah KPM penerima Bantuan Sosial Pangan yang terfasilitasi (Gulkin)	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	DINSOS PPKB PPPA	76495 KPM	150.000.000		76495 KPM	900.000.000
		Jumlah Kelompok Penerima Manfaat Bansos (Gulkin)			6 Kelompok			6 Kelompok	
2	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar					8.064.627.170			10.437.965.000
2.2	Sosial					582.094.670			1.534.800.000

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
2.2.2.2.1.6.1.1.20.202	Program Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Perempuan dan Anak	Persentase perempuan dalam organisasi kemasyarakatan yang mendapatkan peningkatan kapasitas pada sektor politik, hukum, ekonomi, sosial dan budaya*			45,13 %	582.094.670	45,13 %	1.534.800.000
		Persentase lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan dan anak yang memiliki SDM dan sarpras sesuai standar			71 %		71 %	
		Persentase Perempuan dan anak korban kekerasan yang dilayani sesuai standar*			100 %		100 %	
		Presentase kelembagaan pelayanan pemenuhan hak anak sesuai standar			100 %		100 %	
2.2.2.2.1.6.1.1.20.202.1	Implementasi Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Mitra Gender (Advokasi PUG)	Jml SKPD penyusun PPRG*	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Wilayah se Kabupaten Magelang	7 SKPD	0	7 SKPD	197.200.000
		Jml perangkat desa yg mewakili PUG*			120 Orang		120 Orang	
2.2.2.2.1.6.1.1.20.202.2	Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan (PKHP)	Organisasi perempuan yg ditangani dan aktif*	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Wilayah se Kabupaten Magelang	17 Organisasi	0	17 Organisasi	197.200.000
		Jumlah perempuan yang aktif di KPPI*			50 Orang		50 Orang	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
2.2.2.2.1.6.1.1.20.202.3	Percepatan Pencapaian Menuju Kabupaten Layak Anak	Jml Desa layak anak	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Wilayah se Kabupaten Magelang	10 Desa	130.264.670	10 Desa	570.200.000
		Jumlah anak menjadi peserta forum anak tingkat desa dan kecamatan			150 Anak		150 Anak	
		Jumlah Kampung Anak Sejahtera yang terbentuk			5 Desa		5 Desa	
2.2.2.2.1.6.1.1.20.202.4	Penanganan Terpadu Korban Kekerasan Berkas Gender dan Anak	Jumlah kasus perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan, pengarahan oleh petugas terlatih*	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Wilayah se Kabupaten Magelang	80 Kasus	451.830.000	80 Kasus	570.200.000
2.8	Sosial					7.482.532.500		8.903.165.000
2.8.2.8.1.6.1.1.15.208	Program Keluarga Berencana	Persentase Peningkatan partisipasi ber-KB			2,42 %	7.305.891.000	2,42 %	8.215.665.000
		Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat			91 %		91 %	
		Cakupan PUS yang ingin ber KB dan tidak terpenuhi (unmet need)*			11,92 %		11,92 %	
		Persentase peserta KB aktif menggunakan alat kontrasepsi modern (CPR)*			75,5 %		75,5 %	
		Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)*			35,37 %		35,37 %	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
2.8.2.8.1.6.1.1.15.208.21	Jaminan Pelayanan Keluarga Berencana	Jumlah Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) dan Motivator KB yang mendapatkan Pembinaan	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	WILAYAH SE KABUPATEN MAGELANG	842 Orang	200.000.000		842 Orang	710.046.000
		Jumlah Peserta KB MO yang terlayani*			130 Akseptor			130 Akseptor	
		Jumlah peserta KB MKJP yang terlayani*			4500 Akseptor			4500 Akseptor	
2.8.2.8.1.6.1.1.15.208.22	Integrasi Pelayanan KB Bersama Mitra Kerja Melalui Momentum	Jumlah momentum penyelenggaraan kegiatan	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	WILAYAH SE KABUPATEN MAGELANG	7 Momentum	0		7 Momentum	50.319.000
2.8.2.8.1.6.1.1.15.208.23	Optimalisasi KIE dan Konseling KKBPK	Frekuensi KIE Program KKBPK*	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	WILAYAH SE KABUPATEN MAGELANG	60 Kali	0		60 Kali	85.800.000
2.8.2.8.1.6.1.1.15.208.24	Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Keluarga Berencana (DAK)	Jumlah Sarana dan Prasarana Pelayanan KB yang tersedia	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	WILAYAH SE KABUPATEN MAGELANG	4 Jenis	258.640.000		4 Jenis	985.410.000

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
2.8.2.8.1.6.1.1.15.208.25	Bantuan Operasional Keluarga Berencana (DAK)	Jumlah Balai KB yang terfasilitasi	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	WILAYAH SE KABUPATEN MAGELANG	21 Balai KB	6.847.251.000	21 Balai KB	6.384.090.000
2.8.2.8.1.6.1.1.26.208	Program Pembangunan Ketahanan Keluarga	Usia Kawin Pertama (UKP)*			21,3 tahun	176.641.500	21,3 tahun	687.500.000
		Cakupan pembangunan ketahanan keluarga			56,67 %		56,67 %	
		Persentase anggota UPPKS dari keluarga pra sejahtera			55,89 %		55,89 %	
		Persentase perangkat daerah yang berperan dalam pembangunan daerah melalui kampung KB			39,6 %		39,6 %	
2.8.2.8.1.6.1.1.26.208.1	Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga	Jumlah Data Kepala Keluarga Tervalidasi	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	DINSOS PPKB PPPA	407130 KK	126.641.500	407130 KK	362.000.000
		Jumlah IMP dan PLKB yang mendapatkan sosialisasi UKP			422 Orang		422 Orang	
		Jumlah Desa yang melaksanakan program KKBPK oleh IMP			372 Desa		372 Desa	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
2.8.2.8.1.6.1.1.26.208.2	Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Anggota BKB yang dibina dan menjadi peserta KB	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	DINSOS PPKB PPPA	300 Orang	0	300 Orang	250.000.000
		Jumlah Anggota BKR yang dibina dan menjadi peserta KB			200 Orang		200 Orang	
		Jumlah Anggota BKL yang dibina dan menjadi peserta KB			300 Orang		300 Orang	
		Jumlah anggota UPPKS dari Keluarga Prasejahtera yang mendapatkan pembinaan dan pelatihan ketrampilan ketahanan ekonomi			321 Orang		321 Orang	
		Jumlah Poktan yang dievaluasi program pembangunan ketahanan keluarga			84 Kelompok		84 Kelompok	
		Jumlah Anggota Kelompok PIK Remaja Masyarakat di Kampung KB yang menjadi sasaran Advokasi dan KIE Kesehatan Reproduksi Remaja			500 Orang		500 Orang	
2.8.2.8.1.6.1.1.26.208.3	Advokasi dan KIE Kampung KB Bagi SKPD, Sosialisasi bagi Pokja Tingkat Kabupaten Pencanangan dan Evaluasi Kampung KB	Jumlah Kampung KB terbentuk dan terevaluasi	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	DINSOS PPKB PPPA	10 Lokasi	50.000.000	10 Lokasi	75.500.000
Total					9.763.600.580		18.798.167.900	

PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH

KABUPATEN MAGELANG

TAHUN 2021

Nama Perangkat Daerah : BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD)

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
1	2	3	4		5	6	7	8	9
1	Urusan Wajib Pelayanan Dasar					2.364.524.000			8.271.638.000
1.5	Sosial					2.364.524.000			8.271.638.000
1.5.1.5.1.6.2.1.7.105	Program Manajemen Administrasi Pelayanan Umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah			100 %	607.555.000		100 %	2.240.000.000
1.5.1.5.1.6.2.1.7.105.1	Pengelolaan Surat Menyurat, Kearsipan dan Bahan Pustaka	Jumlah surat yang dikelola	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD)	Kabupaten Magelang	3000 surat	25.000.000		3000 surat	40.000.000
		Jumlah arsip yang dikelola			26 dokumen arsip			26 dokumen arsip	
		Jumlah bahan pustaka yang dikelola			100 Dokumen pustaka			100 Dokumen pustaka	
1.5.1.5.1.6.2.1.7.105.2	Penyelenggaraan Koordinasi dan Konsultasi Perangkat Daerah	Jumlah perjalanan dinas dalam daerah yang terlaksana	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD)	BPBD Kabupaten Magelang	23 kali perjalanan	100.000.000		23 kali perjalanan	240.000.000
		Jumlah layanan hubungan Masyarakat dan keprotokolan			15 kali layanan			15 kali layanan	
		Jumlah perjalanan dinas luar daerah yang terlaksana			32 kali perjalanan			32 kali perjalanan	
		Jumlah rapat koordinasi yang diselenggarakan			25 kali rapat			25 kali rapat	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1.5.1.5.1.6.2.1.7.105.3	Pengadaan dan Pengelolaan Perengkapan dan Peralatan Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya	Jumlah paket pengadaan perlengkapan gedung kantor	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD)	BPBD Kabupaten Magelang	2 Almari besi	0	2 Almari besi	350.000.000
		Jumlah paket pengadaan perlengkapan gedung kantor			2 Filling kabinet		2 Filling kabinet	
		Jumlah paket pengadaan perlengkapan gedung kantor			2 rak arsip		2 rak arsip	
		Jumlah paket pengadaan perlengkapan gedung kantor			3 rak logistik		3 rak logistik	
		Jumlah paket pengadaan perlengkapan gedung kantor			0 kursi eselon 2		0 kursi eselon 2	
		Jumlah paket pengadaan perlengkapan gedung kantor			0 kursi eselon 3		0 kursi eselon 3	
		Jumlah paket pengadaan perlengkapan gedung kantor			0 kursi eselon 4		0 kursi eselon 4	
		Jumlah paket pengadaan perlengkapan gedung kantor			1 set kursi tamu		1 set kursi tamu	
		Jumlah paket pengadaan peralatan gedung kantor			0 unit mesin pemotong rumput		0 unit mesin pemotong rumput	
		Jumlah paket pengadaan peralatan gedung kantor			2 unit komputer PC		2 unit komputer PC	
		Jumlah paket pengadaan peralatan gedung kantor			2 unit notebook		2 unit notebook	
		Jumlah paket pengadaan peralatan gedung kantor			2 unit printer		2 unit printer	
		Jumlah paket pengadaan peralatan gedung kantor			1 unit handycame		1 unit handycame	
		Jumlah paket pengadaan peralatan gedung kantor			1 Tripot screen		1 Tripot screen	
		Jumlah paket pengadaan peralatan gedung kantor			1 unit wereless		1 unit wereless	
		Jumlah paket pengadaan peralatan gedung kantor			2 unit UPS		2 unit UPS	
		Jumlah paket pengadaan peralatan gedung kantor			0 unit audio visual		0 unit audio visual	
		Jumlah paket pengadaan peralatan gedung kantor			0 unit genset silent		0 unit genset silent	
1.5.1.5.1.6.2.1.7.105.4	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya	Luas gedung kantor yang dipelihara	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD)	BPBD Kabupaten Magelang	2046 meter persegi	212.555.000	2046 meter persegi	200.000.000
		Jumlah kebutuhan Jasa komunikasi,			3 surat kabar		3 surat kabar	
		Jumlah kebutuhan Jasa komunikasi,			2 rekening telepon		2 rekening telepon	
		Jumlah kebutuhan Jasa komunikasi,			1 rekening faximile		1 rekening faximile	
		umlah kebutuhan Jasa SDA,			1 rekening air		1 rekening air	
		Jumlah kebutuhan Jasa Listrik			3 rekening listrik		3 rekening listrik	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1.5.1.5.1.6.2.1.7.105.5	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD)	BPBD Kabupaten Magelang	2 unit truk	270.000.000	2 unit truk	800.000.000
		Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara			2 unit tangki		2 unit tangki	
		Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara			7 unit mobil		7 unit mobil	
		Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara			12 unit sepeda motor		12 unit sepeda motor	
		Jumlah peralatan yang dipelihara			6 unit komputer PC		6 unit komputer PC	
		jumlah peralatan yang dipelihara			4 unit mesin ketik		4 unit mesin ketik	
		jumlah peralatan yang dipelihara			4 unit notebook		4 unit notebook	
		jumlah peralatan yang dipelihara			4 unit LCD		4 unit LCD	
		jumlah peralatan yang dipelihara			20 unit HT		20 unit HT	
		jumlah peralatan yang dipelihara			10 unit RIG		10 unit RIG	
		jumlah peralatan yang dipelihara			1 unit RPU		1 unit RPU	
		jumlah peralatan yang dipelihara			1 mesin fax		1 mesin fax	
		jumlah peralatan yang dipelihara			2 unit camera digital		2 unit camera digital	
		jumlah peralatan yang dipelihara			4 unit UPS		4 unit UPS	
		jumlah peralatan yang dipelihara			0 unit stabilizer		0 unit stabilizer	
		jumlah peralatan yang dipelihara			1 paket jaringan internet		1 paket jaringan internet	
		jumlah peralatan yang dipelihara			1 unit pesawat telepon		1 unit pesawat telepon	
		jumlah peralatan yang dipelihara			0 unit monitor		0 unit monitor	
		jumlah peralatan yang dipelihara			6 unit printer		6 unit printer	
		jumlah peralatan yang dipelihara			1 unit drone		1 unit drone	
		jumlah peralatan yang dipelihara			10 unit AC		10 unit AC	
		Jumlah perlengkapan yang dipelihara			0 unit kursi putar		0 unit kursi putar	
		Jumlah perlengkapan yang dipelihara			10 unit kursi staf		10 unit kursi staf	
		Jumlah perlengkapan yang dipelihara			0 unit meja kursi tamu		0 unit meja kursi tamu	
		Jumlah perlengkapan yang dipelihara			3 unit filling kabinet		3 unit filling kabinet	
		Jumlah perlengkapan yang dipelihara			0 unit almari besi		0 unit almari besi	
		Jumlah perlengkapan yang dipelihara			2 unit almari kayu		2 unit almari kayu	
Jumlah perlengkapan yang dipelihara	0 unit rak besi	0 unit rak besi						
Jumlah perlengkapan yang dipelihara	10 unit meja 1/2 biro	10 unit meja 1/2 biro						
Jumlah perlengkapan yang dipelihara	5 unit meja 1 biro	5 unit meja 1 biro						
1.5.1.5.1.6.2.1.7.105.6	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya	Jumlah paket rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD)	BPBD Kabupaten Magelang	5 gedung	0	5 gedung	550.000.000
1.5.1.5.1.6.2.1.7.105.7	Peningkatan Kapasitas dan Disiplin Aparatur Sipil Negara	Frekuensi pembinaan ASN dan jumlah ASN yang dibina	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD)	BPBD Kabupaten Magelang	60 orang, kali	0	60 orang, kali	60.000.000
		Jumlah seragam dan atribut ASN yang disediakan			60 stel pakaian PDH/PDL/Olag raga		60 stel pakaian PDH/PDL/Olag raga	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
1.5.1.5.1.6.2.1.8.105	Program Perencanaan Keuangan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian perencanaan, evaluasi kinerja OPD, dan keuangan perangkat daerah			100 %	86.352.000		100 %	94.000.000
1.5.1.5.1.6.2.1.8.105.1	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah kegiatan yang dikelola	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD)	BPBD Kabupaten Magelang	22 kegiatan	59.925.000		22 kegiatan	44.000.000
		Jumlah laporan keuangan yang tersusun			6 laporan SPJ Fungsional, Realisasi dan Prognosis Akuntansi, LRA, Neraca, CaLK			6 laporan SRJ Fungsional, Realisasi dan Prognosis Akuntansi, LRA, Neraca, CaLK	
1.5.1.5.1.6.2.1.8.105.2	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Renstra Perangkat Daerah yang tersusun	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD)	BPBD Kabupaten Magelang	0 Dokumen	18.427.000		0 Dokumen	15.000.000
		Jumlah dokumen Renja Perangkat Daerah yang tersusun			2 Dokumen			2 Dokumen	
1.5.1.5.1.6.2.1.8.105.3	Penyusunan Laporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen pelaporan tahunan yang tersusun	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD)	BPBD Kabupaten Magelang	4 Dokumen LKPj, LKjIP, LPPD, dan pelaporan tahunan lainnya yang sejenis	3.000.000		4 Dokumen LKPj, LKjIP, LPPD, dan pelaporan tahunan lainnya yang sejenis	25.000.000
		Jumlah dokumen pelaporan tribunalan yang tersusun			2 dokumen Monitoring PK, Evaluasi RKPd			2 dokumen Monitoring PK, Evaluasi RKPd	
		Jumlah dokumen pelaporan bulanan yang tersusun			3 dokumen Simoneva, laporan di luar APBD dan Laporan bencana			3 dokumen Simoneva, laporan di luar APBD dan Laporan bencana	
		Jumlah Dokumen Profil Perangkat Daerah yang tersusun			1 Dokumen			1 Dokumen	
1.5.1.5.1.6.2.1.8.105.4	Penyusunan Dokumen Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Perangkat Daerah	Jumlah dokumen SOP yang tersusun	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD)	BPBD Kabupaten Magelang	1 dokumen	5.000.000		1 dokumen	10.000.000
		Jumlah Daftar Informasi Publik yang tersusun			1 Dokumen			1 Dokumen	
		Jumlah dokumen SP yang tersusun			0 Dokumen			0 Dokumen	
		Jumlah dokumen Rencana Tindak Pengendalian yang tersusun (RTP) dan Evaluasi RTP)			1 Dokumen			1 Dokumen	
1.5.1.5.1.6.2.1.23.105	Program Penanggulangan Bencana	Persentase Pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana			41.39 %	1.670.617.000		41.39 %	5.937.638.000
		Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi			100 %			100 %	
		Persentase pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi			85 %			85 %	
		Persentase pelayanan informasi rawan bencana			36,96 %			36,96 %	
1.5.1.5.1.6.2.1.23.105.1	Mitigasi Bencana	Jml peserta apel**	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD)	Kabupaten Magelang	350 peserta	200.000.000		350 peserta	467.704.400
		Jumlah Rakor PRB**			3 kali			3 kali	
		Jumlah Pemantauan daerah rawan bencana**			10 kali			10 kali	
		Jumlah koordinasi luar daerah			0 kali			0 kali	
		Jumlah LEWS***			5 Unit			5 Unit	
		Jumlah Kegiatan lomba**			2 Kali			2 Kali	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1.5.1.5.1.6.2.1.23.105.2	Pelatihan pencegahan dan mitigasi	Jumlah peserta Pelatihan PB***	KENALAN, BOROBUDUR	Ds. Kenalan Kec. Borobudur; Desa Kemiren Kec. Srumbung; Ds. Kebonrejo Kec. Salaman; Ds. Banyusidi Kec. Pakis; Ds. Sidoagung Kec. Tempuran; Ds. Dukun Kec. Dukun;	100 orang	0	100 orang	684.444.000
		Jumlah Pembentukan Destana***			5 desa		5 desa	
		jumlah peserta simulasi PRB untuk warga huntap**			50 orang		50 orang	
		Jumlah peserta simulasi darurat pelajar***			200 orang		200 orang	
		Jumlah peserta latihan dan Gladi evakuasi***			50 orang pelatihan		50 orang pelatihan	
		Jumlah peserta latihan dan Gladi evakuasi***			80 orang gladi posko		80 orang gladi posko	
		Jumlah peserta latihan dan Gladi evakuasi***			200 orang gladi lapang		200 orang gladi lapang	
		Jumlah pembentukan desa bersaudara***			2 pasang desa		2 pasang desa	
		Jumlah pengembangan desa bersaudara***			3 3 pasang desa		3 3 pasang desa	
		Jml peserta fasilitasi Sosek Pascabencana**			50 orang		50 orang	
1.5.1.5.1.6.2.1.23.105.3	Penyediaan peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah peralatan PB**	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD)	Kabupaten Magelang	0 unit Dump Truck	0	0 unit Dump Truck	996.814.000
		Jumlah peralatan PB**			0 unit backhoe		0 unit backhoe	
		Jumlah peralatan PB**			0 unit trailer		0 unit trailer	
		Jumlah peralatan PB**			0 unit doublecabin		0 unit doublecabin	
		Jumlah peralatan PB**			0 set repeater portable		0 set repeater portable	
		Jumlah peralatan PB**			0 set antena repeater		0 set antena repeater	
		Jumlah peralatan PB**			0 set kabel repeater		0 set kabel repeater	
		Jumlah peralatan PB**			0 unit timbangan digital		0 unit timbangan digital	
		Jumlah peralatan PB**			2 unit gergaji mesin		2 unit gergaji mesin	
		Jumlah peralatan PB**			0 set pompa air		0 set pompa air	
		Jumlah peralatan PB**			0 set selang pompa air		0 set selang pompa air	
		Jumlah peralatan PB**			2 set peralatan perbengkelan		2 set peralatan perbengkelan	
		Jumlah peralatan PB**			1 unit gerobag dorong		1 unit gerobag dorong	
		Jumlah peralatan PB**			0 unit timbangan duduk		0 unit timbangan duduk	
		Jumlah peralatan PB**			0 set vertical rescue		0 set vertical rescue	
		Jumlah peralatan PB**			0 unit motor trail		0 unit motor trail	
		Jumlah APD**			60 set APD (sepatu, helm, pakaian, celana, kacamata, sarung tangan, jas hujan)		60 set APD (sepatu, helm, pakaian, celana, kacamata, sarung tangan, jas hujan)	
		Jumlah peralatan PB**			0 tangki air		0 tangki air	
1.5.1.5.1.6.2.1.23.105.4	Manajemen Pusalops PB	jml media sosial**	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD)	21 kecamatan	5 buah	668.077.000	5 buah	885.000.000
		jml hari piket**			365 hari		365 hari	
		jml sistem informasi kebencanaan***			1 sistem		1 sistem	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1.5.1.5.1.6.2.1.23.105.5	Manajemen penanganan Darurat Bencana	Jumlah Fasilitas DSP dan DTT** Jml pengerahan TRC dan Relawan** Jumlah hari piket TRC**	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD)	21 kecamatan	2 kegiatan 600 orang 365 hari	215.536.000	2 kegiatan 600 orang 365 hari	500.000.000
1.5.1.5.1.6.2.1.23.105.6	Manajemen Logistik dan peralatan bencana	jumlah paket logistik jumlah pengambilan logistik jml proposal** Jml dropping air jumlah distribusi logistik jumlah rapat koordinasi Jumlah peralatan kebencanaan** Jumlah peralatan kebencanaan** Jumlah peralatan kebencanaan** Jumlah peralatan kebencanaan** Jumlah peralatan kebencanaan** Jumlah peralatan kebencanaan** Jumlah peralatan kebencanaan** Jumlah peralatan kebencanaan** Jumlah peralatan kebencanaan** Jumlah peralatan kebencanaan** Jumlah peralatan kebencanaan**	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD)	Kabupaten Magelang	1 paket 5 kali 0 proposal 500 tangki 100 kali 2 kali 0 unit genset 0 unit pompa air 0 unit Chainsaw 0 unit Perahu Karet 0 unit lampu sorot 0 Unit Tandu 0 unit water treatment 0 unit velbed 0 Unit peralatan dapur umum 0 Unit gas apar	487.004.000	1 paket 5 kali 0 proposal 500 tangki 100 kali 2 kali 0 unit genset 0 unit pompa air 0 unit Chainsaw 0 unit Perahu Karet 0 unit lampu sorot 0 Unit Tandu 0 unit water treatment 0 unit velbed 0 Unit peralatan dapur umum 0 Unit gas apar	846.849.000
1.5.1.5.1.6.2.1.23.105.8	Fasilitasi rehabilitasi dan rekonstruksi	Jml dokumen DED TEA *** Jumlah lokasi rehabilitasi daerahn rawan bencana	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD)	Kabupaten Magelang	0 dokumen 8 lokasi	0	0 dokumen 8 lokasi	415.481.000
1.6.2.1.23.105.8.1	Fasilitasi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana		BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD)	Jl. Soekarno Hatta No. 7A Kota Mungkid	1 Kegiatan	270.049.200		415.481.000
1.5.1.5.1.6.2.1.23.105.9	Pengadaan tanah, huntara dan huntap	jumlah bidang tanah	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD)	Kabupaten Magelang	1 bidang	100.000.000	1 bidang	650.000.000
1.5.1.5.1.6.2.1.23.105.10	Penyusunan Dokumen Penanggulangan Bencana	Jumlah dokumen PB (KRB, RPB, PDRP, RENKON, Amanat perda)***	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD)	BPBD Kabupaten Magelang	1 Dokumen	0	1 Dokumen	75.000.000
1.5.1.5.1.6.2.1.23.105.11	Manajemen dan perencanaan penanggulangan Bencana	jumlah kegiatan** jumlah kegiatan*** jumlah kegiatan** jumlah kegiatan** Jumlah tim pengarah PB**	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD)	BPBD Kabupaten Magelang	5 Rakor PB 1 Kegiatan penilaian IKD 1 monev perbup 18 th 2016 1 monev RPB 22 orang	0	5 Rakor PB 1 Kegiatan penilaian IKD 1 monev perbup 18 th 2016 1 monev RPB 22 orang	190.000.000
1.5.1.5.1.6.2.1.23.105.12	Fasilitasi dan Koordinasi Penilaian Post Disasster Need Assesment (PDNA) dan JITU PASNA	Jumlah personil* jumlah Dokumen*	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD)	BPBD Kabupaten Magelang	40 orang 1 dokumen	0	40 orang 1 dokumen	100.000.000

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1.6.2.1.23.105.12.1	Fasilitasi dan Koordinasi Penilaian Post Disaster Need Assessment (PDNA) dan JITU PASNA		BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD)	Jl. Soekarno Hatta No. 7 A Kota Mungkid	1 Kegiatan	64.675.000		100.000.000
1.5.1.5.1.6.2.1.23.105.13	Penyusunan Dokumen Kajian Risiko Bencana	Jumlah dokumen KRB***	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD)	BPBD Kabupaten Magelang	1 dokumen	0	1 dokumen	50.000.000
1.5.1.5.1.6.2.1.23.105.14	Komunikasi, informasi dan edukasi rawan bencana	Jumlah sosialisasi***	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD)	Kabupaten Magelang	6 kali	0	6 kali	76.345.600
		Jumlah rambu evakuasi**			50 buah		50 buah	
		Jumlah penyebarluasan informasi penanggulangan bencana***			10 kali		10 kali	
		Jumlah Rakor kasi kesra dan trantib**			3 kali		3 kali	
		Jumlah studi komparasi kasi trantib dan kesra			1 kali		1 kali	
Total						2.364.524.000		8.271.638.000

PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH

KABUPATEN MAGELANG

TAHUN 2021

Nama Perangkat Daerah : DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
2	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar				2.122.887.145			4.717.917.656	
2.1	Tenaga Kerja				2.122.887.145			4.717.917.656	
2.1.2.1.2.1.1.1.7.201	Program Manajemen Administrasi Pelayanan Umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah	persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah			94,44 persen	564.052.593		94,44 persen	1.062.310.525
2.1.2.1.2.1.1.1.7.201.10	Pengelolaan Surat Menyurat, Kearsipan dan Bahan Pustaka	Jumlah Surat yang Dikelola	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	6100 berkas	14.711.401		6100 berkas	33.790.097
2.1.2.1.2.1.1.1.7.201.11	Penyelenggaraan Koordinasi dan Konsultasi Perangkat Daerah	Jumlah Perjalanan Dinas Luar Daerah Jumlah rapat Koordinasi Yang Diselenggarakan Jumlah Perjalanan Dinas Dalam Daerah yang terlaksana	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	123 kali perjalanan 15 kali 364 kali perjalanan	73.186.000		123 kali perjalanan 15 kali 364 kali perjalanan	150.000.000
2.1.2.1.2.1.1.1.7.201.12	Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor/ Rumah Dinas/ Gedung Pemerintah Lainnya	Jumlah Paket Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Jumlah Paket Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	1 paket 1 paket	0		1 paket 1 paket	100.000.000
2.1.2.1.2.1.1.1.7.201.13	Pemeliharaan Rutin Berkala Gedung Kantor/ Rumah Dinas/ Gedung Pemerintah Lainnya	Luas Gedung Kantor yang dipelihara Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	7170 m2 108 kali	312.616.192		7170 m2 108 kali	361.872.280

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
2.1.2.1.2.1.1.1.7.201.14	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan gedung kantor/ Rumah Dinas/ Gedung Pemerintah Lainnya	Jumlah Peralatan yang dipelihara	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	92 unit	163.539.000		92 unit	400.000.000
		Jumlah Perlengkapan yang dipelihara			113 unit			113 unit	
		Jumlah Kendaraan Dinas roda 4 yang dipelihara			10 unit			10 unit	
		Jumlah Kendaraan Dinas roda 2 yang dipelihara			22 unit			22 unit	
2.1.2.1.2.1.1.1.7.201.15	Rehabilitasi sedang berat gedung kantor/ Rumah Dinas/ Gedung Pemerintah Lainnya	Jumlah Paket Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	1 paket	0		1 paket	0
2.1.2.1.2.1.1.1.7.201.16	Peningkatan Kapasitas dan Disiplin Aparatur Sipil Negara	Jumlah JFT yang Terfasilitasi Angka Kreditnya	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	37 orang	0		37 orang	16.648.148
2.1.2.1.2.1.1.1.8.201	Program Perencanaan, Keuangan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian perencanaan, evaluasi kinerja OPD, dan keuangan perangkat daerah			95 persen	91.322.000		95 persen	115.824.211
2.1.2.1.2.1.1.1.8.201.6	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah Kegiatan Yang dikelola	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	22 kegiatan	78.022.000		22 kegiatan	85.824.211
		Jumlah Laporan Keuangan yang tersusun			75 laporan			75 laporan	
2.1.2.1.2.1.1.1.8.201.7	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renstra Perangkat Daerah Yang disusun	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	0 dokumen	6.600.000		0 dokumen	10.000.000
		Jumlah Dokumen Renja Perangkat Daerah Yang disusun			4 dokumen			4 dokumen	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
			Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
2.1.2.1.2.1.1.1.8.201.8	Penyusunan Laporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	Jumlah Dokumen Pelaporan Tahunan Yang Tersusun	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	4 dokumen	6.700.000		4 dokumen	10.000.000
		Jumlah Dokumen Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Tahunan yang tersusun			12 dokumen			12 dokumen	
		Jumlah Dokumen Pelaporan Bulanan Yang tersusun			2 dokumen			2 dokumen	
		Jumlah dokumen evaluasi jangka menengah yang tersusun			0 dokumen			0 dokumen	
		Jumlah Dokumen Profil Perangkat Daerah yang tersusun			1 dokumen			1 dokumen	
2.1.2.1.2.1.1.1.8.201.9	Penyusunan Dokumen Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Perangkat Daerah	Jumlah SOP yang tersusun	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	15 dokumen	0		15 dokumen	10.000.000
		Jumlah Dokumen Pengendalian Intern Yang disusun			1 dokumen			1 dokumen	
2.1.2.1.2.1.1.1.18.201	Program Pengembangan Kompetensi, Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja	Cakupan pengembangan kompetensi, penempatan dan perluasan kesempatan kerja			80,6 %	1.384.015.152		80,6 %	2.577.500.000
2.1.2.1.2.1.1.1.18.201.1	Kegiatan Pelatihan Ketrampilan dan Sertifikasi Tenaga Kerja	persentase kelulusan peserta pelatihan	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	90 %	497.600.000		90 %	700.000.000
		persentase peserta memperoleh sertifikasi			90 %			90 %	
		jumlah pencaker miskin yang mengikuti seleksi magang			50 Orang			50 Orang	
2.1.2.1.2.1.1.1.18.201.2	Kegiatan Penempatan Tenaga Kerja	Jumlah pencaker dan catrans yang ditempatkan	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	1880 orang	136.415.152		1880 orang	570.000.000
		Jumlah pelayanan ketenagakerjaan yang terstandar ISO			1 unit pelayanan			1 unit pelayanan	
2.1.2.1.2.1.1.1.18.201.3	Kegiatan Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah Pencaker yang bekerja	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	100 orang	0		100 orang	400.000.000
		Jumlah Peserta Padat Karya			88 orang			88 orang	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
2.1.2.1.2.1.1.1.18.201.4	Penguatan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Pelatihan (DBHCHT)	Jumlah sarana peralatan pelatihan yang tersedia	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	1 paket	750.000.000		1 paket	907.500.000
		jumlah prasarana gedung yang terehabilitasi			1 paket			1 paket	
		Kios Three in one yang terbentuk			60 persen			60 persen	
2.1.2.1.2.1.1.1.20.201	Program Pembinaan Hubungan Industrial dan Produktivitas Pekerja	Cakupan Pembinaan Hubungan Industrial dan Produktivitas Pekerja			82,74 %	83.497.400		82,74 %	962.282.920
2.1.2.1.2.1.1.1.20.201.1	Kegiatan Pembinaan Hubungan Industrial	Jumlah Peraturan Perusahaan/Perjanjian Kerja Bersama yang diterbitkan	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	122 unit	83.497.400		122 unit	260.712.287
		Persentase kasus yang diselesaikan melalui Perjanjian Bersama			80 %			80 %	
		Jumlah Lembaga Kerja Sama Bipartit yang diterbitkan			10 unit			10 unit	
2.1.2.1.2.1.1.1.20.201.2	Kegiatan Pembinaan Pengupahan	Persentase Perusahaan Menerapkan Upah Minimum Kabupaten	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	90 %	0		90 %	201.570.633
		Persentase perusahaan yang mempunyai struktur dan skala upah			48 %			48 %	
2.1.2.1.2.1.1.1.20.201.3	Kegiatan Pembinaan Kapasitas Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Prosentase Izin LPKS yang diterbitkan	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	100 %	0		100 %	50.000.000
2.1.2.1.2.1.1.1.20.201.4	Kegiatan Peningkatan Kompetensi Pekerja	Prosentase pekerja yang lulus pelatihan	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	90 %	0		90 %	450.000.000
3	Urusan Pilihan					778.059.740			1.273.909.995
3.7	Tenaga Kerja					778.059.740			1.273.909.995
3.7.3.7.2.1.1.1.20.307	Program Pengembangan industri	Cakupan Bina Industri Kecil			1,435 %	778.059.740		1,435 %	1.273.909.995

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
3.7.3.7.2.1.1.1.20.307.1	Kegiatan Peningkatan Kapasitas Industri Makanan Minuman	Jumlah Industri Makanan Minuman yang terbina	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	190 unit IKM	0		190 unit IKM	300.000.000
3.7.3.7.2.1.1.1.20.307.2	Kegiatan Peningkatan Kapasitas Industri Logam Kimia Elektronika	Jumlah Industri Logam Kimia Elektronika yang terbina	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	50 unit IKM	0		50 unit IKM	150.000.000
3.7.3.7.2.1.1.1.20.307.3	Kegiatan Peningkatan Kapasitas Industri Kerajinan dan Aneka	Jumlah industri Kerajinan dan Aneka yang terbina	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	100 unit IKM	50.000.000		100 unit IKM	442.410.000
3.7.3.7.2.1.1.1.20.307.4	Kegiatan Penumbuhan dan Pengembangan Sentra Industri Kecil	Jumlah sentra industri kecil yang terbina	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	3 sentra	618.059.740		3 sentra	199.999.995
		Aplikasi database IKM yang ter update			1 unit aplikasi			1 unit aplikasi	
3.7.3.7.2.1.1.1.20.307.5	Fasilitasi Kepemilikan Hak atas Kekayaan Intelektual bagi Industri Kecil (DBHCHT)	Jumlah IKM yang Terfasilitasi Pendaftaran HAKI	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	60 unit IKM	110.000.000		60 unit IKM	181.500.000
Total						2.900.946.885			5.991.827.651

PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH

KABUPATEN MAGELANG

TAHUN 2021

Nama Perangkat Daerah : DINAS PERTANIAN DAN PANGAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
2	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar				963.311.770			1.319.271.850	
2.3	Pangan				963.311.770			1.319.271.850	
2.3.2.3.2.3.1.1.15.203	Program Peningkatan Ketahanan Pangan	Ketersediaan energi per kapita			2000 Kkal	963.311.770		2000 Kkal	1.319.271.850
		Ketersediaan protein per kapita			53 gram			53 gram	
		Penguatan cadangan pangan			65 %			65 %	
		Pencapaian skor Pola Pangan Harapan (PPH)			88,2 indeks			88,2 indeks	
		Persentase pengawasan dan pembinaan keamanan pangan			90 %			90 %	
		Penanganan daerah rawan pangan			67,5 %			67,5 %	
		Ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses pangan di daerah			91 %			91 %	
		Stabilitas harga dan pasokan pangan			93,2 %			93,2 %	
2.3.2.3.2.3.1.1.15.203.50	Analisis Ketersediaan dan Kerawanan Pangan	Jumlah laporan analisa data Neraca Bahan Makanan (NBM)	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	21 Kecamatan di Kab. Magelang	1 dokumen laporan	26.950.000		1 dokumen laporan	70.000.000
		Jumlah laporan analisis data Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG)			1 dokumen laporan			1 dokumen laporan	
		Jumlah peta daerah rawan pangan yang disusun			0 dokumen			0 dokumen	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
2.3.2.3.2.3.1.1.15.203.51	Pembinaan dan Pengembangan Kemandirian Pangan	Jumlah pengembangan desa mandiri pangan	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	Tempuran, Salaman, Windusari, Grabag, Ngablak	5 desa	0		5 desa	250.000.000
		Jumlah dokumen kesepakatan Forum Dewan Ketahanan Pangan			1 dokumen			1 dokumen	
2.3.2.3.2.3.1.1.15.203.52	Pengelolaan Cadangan Pangan Daerah	Jumlah pengelolaan cadangan pangan daerah	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	Kab. Magelang	25 ton	200.000.000		25 ton	200.000.000
2.3.2.3.2.3.1.1.15.203.53	Pengembangan dan Penguatan Distribusi Pangan	Jumlah laporan analisis data informasi alur distribusi dan harga pangan strategis	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	21 kecamatan	1 dokumen laporan	0		1 dokumen laporan	75.000.000
		Jumlah lembaga distribusi pangan masyarakat yang produktif			15 lembaga			15 lembaga	
		Jumlah hasil pemantuan lembaga distribusi pangan masyarakat yang terdampingi			1 dokumen			1 dokumen	
2.3.2.3.2.3.1.1.15.203.54	Peningkatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan	Jumlah laporan analisis skor Pola Pangan Harapan (PPH)	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	21 kecamatan	1 dokumen laporan	515.000.000		1 dokumen laporan	400.000.000
		Jumlah pembinaan pemanfaatan pekarangan			10 kelompok			10 kelompok	
		Jumlah peserta sosialisasi penyusunan menu B2SA			75 orang			75 orang	
		Jumlah fasilitasi lomba/ festival pangan			3 jenis			3 jenis	
2.3.2.3.2.3.1.1.15.203.55	Pembinaan dan Pengawasan Keamanan Pangan	Jumlah dokumen hasil laporan uji keamanan pangan	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	21 kecamatan	1 dokumen laporan	69.495.000		1 dokumen laporan	150.000.000
		Jumlah peserta pembinaan mutu dan keamanan pangan			50 orang			50 orang	
2.3.2.3.2.3.1.1.15.203.56	Pengembangan Olahan Pangan Lokal Berbasis Agribisnis (DBHCHT)	Jumlah Kelompok yang melaksanakan pemanfaatan pekarangan	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	21 kecamatan	21 kelompok	151.866.770		21 kelompok	174.271.850
3	Urusan Pilihan					29.346.924.743			16.731.132.137
3.3	Pangan					29.346.924.743			16.731.132.137

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
3.3.3.3.2.3.1.1.7.303	Program Manajemen Administrasi Pelayanan Umum dan Kepegawaian Perangkat daerah	Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah			100 %	1.003.287.970		100 %	1.702.250.000
3.3.3.3.2.3.1.1.7.303.1	Pengelolaan Surat Menyurat, Kearsipan dan Bahan Pustaka	Jumlah surat yang dikelola	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	Distan dan Pangan Kab. Magelang	3700 surat	56.100.000		3700 surat	58.500.000
		jumlah judul buku yang tersedia			15 judul			15 judul	
3.3.3.3.2.3.1.1.7.303.2	Penyelenggaraan Koordinasi dan Konsultasi Perangkat Daerah	Jumlah perjalanan dinas luar daerah yang terlaksana	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	Distan dan Pangan Kab. Magelang	25 kali	100.000.000		25 kali	150.000.000
		Jumlah rapat koordinasi yang diselenggarakan			26 kali			26 kali	
		Jumlah perjalanan dinas dalam daerah yang terlaksana			0 kali			0 kali	
3.3.3.3.2.3.1.1.7.303.3	Pengadaan dan Pengelolaan Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya	Jumlah paket pengadaan perlengkapan gedung kantor	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	Distan dan Pangan Kab. Magelang	1 paket	29.760.000		1 paket	59.250.000
		Jumlah paket pengadaan peralatan gedung kantor			21 paket			21 paket	
3.3.3.3.2.3.1.1.7.303.4	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya	Jumlah gedung kantor yang terpelihara	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	Distan dan Pangan Kab. Magelang	14 unit	173.502.580		14 unit	200.000.000
		Jumlah bulan pemenuhan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik			60 bulan			60 bulan	
3.3.3.3.2.3.1.1.7.303.5	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	Distan dan Pangan Kab. Magelang	91 unit	605.670.390		91 unit	1.184.500.000
		Jumlah kendaraan dinas roda empat yang dipelihara			5 unit			5 unit	
		Jumlah kendaraan dinas roda dua yang dipelihara			108 unit			108 unit	
		Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara			10 unit			10 unit	
3.3.3.3.2.3.1.1.7.303.7	Peningkatan Kapasitas dan Disiplin Aparatur Sipil Negara	Frekuensi pembinaan ASN	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	Distan dan Pangan Kab. Magelang	1 tahun	38.255.000		1 tahun	50.000.000
		Jumlah ASN yang dibina			191 orang			191 orang	
		Jumlah JFT yang terfasilitasi penilaian angka kreditnya			75 orang			75 orang	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
3.3.3.3.2.3.1.1.8.303	Program Perencanaan, Keuangan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian perencanaan, evaluasi kinerja OPD, dan keuangan perangkat daerah			100 %	76.670.000		100 %	117.756.000
3.3.3.3.2.3.1.1.8.303.1	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah kegiatan yang dikelola	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	Distan dan Pangan Kab. Magelang	50 kegiatan	50.000.000		50 kegiatan	72.576.000
		Jumlah laporan keuangan yang tersusun			6 laporan			6 laporan	
3.3.3.3.2.3.1.1.8.303.2	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Renstra Perangkat Daerah yang tersusun	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	distan dan pangan kab. magelang	1 dokumen	8.520.000		1 dokumen	12.272.000
		Jumlah dokumen Renja Perangkat Daerah yang tersusun			1 dokumen			1 dokumen	
3.3.3.3.2.3.1.1.8.303.3	Penyusunan Laporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen pelaporan tahunan yang tersusun	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	Distan dan Pangan Kab. Magelang	5 dokumen	8.150.000		5 dokumen	18.138.000
		Jumlah dokumen monitoring , evaluasi, dan pelaporan tribulanan yang tersusun			4 dokumen			4 dokumen	
		Jumlah dokumen pelaporan bulanan yang tersusun			3 dokumen			3 dokumen	
		Jumlah dokumen evaluasi jangka menengah yang tersusun			1 dokumen			1 dokumen	
		Jumlah profil perangkat daerah yang tersusun			1 dokumen			1 dokumen	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
3.3.3.3.2.3.1.1.8.303.4	Penyusunan Dokumen Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Perangkat Daerah	Jumlah Standar Operasional Prosedur yang tersusun	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	Distan dan Pangan Kab. Magelang	1 dokumen	10.000.000	1 dokumen	14.770.000
		Jumlah Standar Pelayanan yang tersusun			1 dokumen		1 dokumen	
		Jumlah Daftar Informasi Publik			1 dokumen		1 dokumen	
		Jumlah dokumen pengendalian intern yang tersusun			1 dokumen		1 dokumen	
		Jumlah dokumen data perangkat daerah yang tersusun			1 dokumen		1 dokumen	
		Jumlah dokumen peraturan bidang pertanian dan pangan yang disusun			1 dokumen		1 dokumen	
3.3.3.3.2.3.1.1.19.303	Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan	Produktivitas padi			60,3 kw/ha	1.075.725.000	60,3 kw/ha	2.984.609.000
		Produktivitas jagung			50,32 kw/ha		50,32 kw/ha	
		Produktivitas kopi			9,00 kw/ha		9,00 kw/ha	
		Produktivitas cabai			69,85 kw/ha		69,85 kw/ha	
		Produktivitas bawang putih			61,72 kw/ha		61,72 kw/ha	
		Produktivitas cengkeh			1,92 kw/ha		1,92 kw/ha	
		Produktivitas kelapa dalam			14,60 kw/ha		14,60 kw/ha	
		Produktivitas salak			0,07 kw/pohon		0,07 kw/pohon	
		Produktivitas jeruk			0,12 kw/pohon		0,12 kw/pohon	
		Produktivitas kelengkeng			0,79 kw/pohon		0,79 kw/pohon	
3.3.3.3.2.3.1.1.19.303.20	Pelayanan Perijinan dan Pembinaan Produsen Benih Pertanian	Jumlah produsen benih pertanian yang dibina	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	21 kecamatan	35 Orang	9.450.000	35 Orang	24.000.000
3.3.3.3.2.3.1.1.19.303.75	Pengembangan Tanaman Buah dan Florikultura	Jumlah sarana produksi tanaman buah	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	Candimulyo, Srumbung	900 pohon	0	900 pohon	200.000.000
		Jumlah SL GAP tanaman buah yang dilaksanakan			4 paket		4 paket	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
3.3.3.3.2.3.1.1.19.303.76	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan	Jumlah sarana produksi padi	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	Ngluwar, Tegalrejo, Salam, Salaman, Bandongan	15 paket	0		15 paket	320.000.000
		Jumlah SL GAP/SOP padi			1 paket			1 paket	
		Jumlah sarana produksi jagung			6 paket			6 paket	
		Jumlah SL GAP/SOP jagung			1 paket			1 paket	
3.3.3.3.2.3.1.1.19.303.77	Peningkatan Produksi Tanaman Sayuran dan Tanaman Obat	Jumlah sarana produksi tanaman sayuran dan tanaman obat	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	Pakis, Ngablak, Kaliangkrik, Sawangan	6 paket	0		6 paket	350.000.000
		jumlah bimtek SL GAP/SOP tanaman sayuran dan tanaman obat			6 lokasi			6 lokasi	
3.3.3.3.2.3.1.1.19.303.78	Peningkatan Produksi Tanaman Semusim Perkebunan	Jumlah pembinaan asosiasi petani tebu	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	Salaman, Borobudur, Pakis	1 asosiasi	0		1 asosiasi	200.000.000
		Jumlah pengembangan tanaman vanili			2 kelompok tani			2 kelompok tani	
3.3.3.3.2.3.1.1.19.303.81	Pengembangan Benih Tanaman Unggulan	Jumlah pembinaan penangkar benih tanaman unggulan	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	Distan dan Pangan Kab. Magelang	3 penangkar benih	90.930.000		3 penangkar benih	200.000.000
		Jumlah penumbuhan penangkar benih tanaman unggulan			2 penangkar benih			2 penangkar benih	
		Jumlah kebun dinas yang dikelola			1 kebun			1 kebun	
3.3.3.3.2.3.1.1.19.303.82	Penyediaan Sarana Produksi Tanaman Hias dan Anggrek	Jumlah penyediaan sarana dan prasarana tanaman anggrek	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	UPT Taman Anggrek Borobudur	1 unit (greenhouse)	75.345.000		1 unit (greenhouse)	150.000.000
		Jumlah bibit tanaman anggrek spesies yang dibudidayakan			70 batang			70 batang	
		Jumlah bibit tanaman anggrek kultur in vitro yang dibudidayakan			500 botol			500 botol	
		Jumlah bibit tanaman hias yang dibudidayakan			100 batang			100 batang	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
3.3.3.3.2.3.1.1.19.303.83	Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tembakau (DBHCHT)	Jumlah bantuan pupuk yang disalurkan ke kelompok tani	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	Windusari, Sawangan, Borobudur, Ngablak, Pakis, Ngluwar, Kaliangkrik, Salam	10 kelompok tani	300.000.000	10 kelompok tani	500.000.000
		Jumlah pemuliaan varietas tembakau		1 varietas	1 varietas			
3.3.3.3.2.3.1.1.19.303.84	Pengembangan Tanaman Penyegar (DBHCHT)	Jumlah bibit kopi yang tersalurkan	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	Sawangan, Borobudur, Slaman, Kajoran, Ngablak, Windusari	26300 batang	300.000.000	26300 batang	740.609.000
		Jumlah bibit teh yang tersalurkan			7000 batang		7000 batang	
		Jumlah bibit cengkeh yang tersalurkan			9400 batang		9400 batang	
3.3.3.3.2.3.1.1.19.303.85	Pengembangan Tanaman Tahunan dan Rempah (DBHCHT)	Jumlah bibit kelapa yang tersalurkan	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	Borobudur, Ngablak, Slaman, Secang, Sawangan, Dukun	10000 batang	300.000.000	10000 batang	300.000.000
		Jumlah bibit lada yang tersalurkan			9000 batang		9000 batang	
3.3.3.3.2.3.1.1.27.303	Program Peningkatan Daya Saing Produk Pertanian	Persentase Peningkatan Kerjasama/ Kemitraan yang Terjalin			20 %	335.000.000	20 %	2.470.000.000
		Persentase luas lahan pertanian yang disertifikasi organik			5,45 %		5,45 %	
3.3.3.3.2.3.1.1.27.303.1	Peningkatan Daya Saing Produk Tanaman Pangan	jumlah peralatan, sarana dan prasarana pasca panen Padi	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	Ngluwar, Tegalrejo, Salam, Slaman, Bandongan, Muntilan	10 unit	0	10 unit	400.000.000
		jumlah bimtek pengelolaan pasca panen (SL GHP)			1 paket		1 paket	
		jumlah peralatan, sarana dan prasarana pasca panen jagung			1 unit		1 unit	
		jumlah bimtek pengelolaan pasca panen (SL GHP) jagung			1 paket		1 paket	
		jumlah pembinaan kelompok tani organik tanaman pangan			1 kelompok		1 kelompok	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
3.3.3.3.2.3.1.1.27.303.2	Peningkatan Daya Saing Produk Tanaman Buah dan Florikultura	Jumlah sosialisasi /Bimtek GHP buah dan Florikultura	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	Candimulyo, Borobudur, Srumbung, Salaman	2 paket	0		2 paket	200.000.000
		jumlah peralatan, sarana dan prasarana pasca panen buah dan flori			1 paket			1 paket	
3.3.3.3.2.3.1.1.27.303.3	Peningkatan Daya Saing Produk Tanaman Sayuran dan Tanaman Obat	jumlah peralatan, sarana dan prasarana pasca panen tanaman sayuran dan tanaman obat	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	Kaliangkrik	2 paket	0		2 paket	250.000.000
		jumlah bintek pengelolaan pasca panen tanaman sayuran dan tanaman obat			2 paket			2 paket	
		Jumlah pendampingan sertifikasi organik tanaman sayuran dan tanaman obat			1 kelompok			1 kelompok	
3.3.3.3.2.3.1.1.27.303.4	Peningkatan Daya Saing Tanaman Semusim Perkebunan (D BHCHT)	Jumlah pengadaan alat pasca panen tembakau	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	Windusari, Ngablak, Ngluwar, Muntilan, Pakis, Sawangan, borobudur, Kaliangkrik	10 kelompok	300.000.000		10 kelompok	495.000.000
3.3.3.3.2.3.1.1.27.303.5	Gelara Promosi Produk Pertanian Unggulan	Jumlah penyelenggaraan gelar promosi produk unggulan, temu usaha dan pameran hasil penyuluhan pertanian	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	Tingkat Kab. Magelang, Provinsi, Nasional	4 kali	0		4 kali	250.000.000
		Jumlah fasilitasi pemasaran hasil lewat online shop			1 kali			1 kali	
		jumlah kerjasama lembaga pemasaran dan dengan lembaga tani			1 kerjasama			1 kerjasama	
		Jumlah lembaga ekonomi petani yang ditumbuhkan			1 lembaga			1 lembaga	
3.3.3.3.2.3.1.1.27.303.6	Pembinaan Kemitraan Petani Tembakau (DBHCHT)	jumlah pembinaan kemitraan petani tembakau	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	4 kecamatan	4 kelompok tani	20.000.000		4 kelompok tani	25.000.000

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
3.3.3.3.2.3.1.1.27.303.7	Penumbuhan Sentra Buah Lokal Mendukung Agrowisata (DBHCHT)	jumlah penumbuhan sentra buah lokal	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	4 kecamatan (Borobudur, Salaman, Candimulyo, Srumbung)	4 lokasi	15.000.000		4 lokasi	450.000.000
3.3.3.3.2.3.1.1.27.303.8	Peningkatan Daya Saing Tanaman Penyegar	Jumlah pengadaan alat pasca panen kopi	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	distan dan pangan	4 paket	0		4 paket	200.000.000
		Jumlah luas lahan sertifikasi organik kopi			20 Ha			20 Ha	
3.3.3.3.2.3.1.1.27.303.9	Peningkatan Daya Saing Tanaman Tahunan dan Rempah	Jumlah pengadaan alat pasca panen kelapa	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	Salaman, Candimulyo	2 paket	0		2 paket	200.000.000
		Jumlah luas sertifikasi tanaman kelapa			20 Ha			20 Ha	
3.3.3.3.2.3.1.1.28.303	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pertanian	Cakupan ketersediaan sarana dan prasarana pertanian/ perkebunan			3,59 %	26.756.241.773		3,59 %	8.055.267.137
3.3.3.3.2.3.1.1.28.303.1	Peningkatan Pengelolaan Irigasi Partisipatif	Jumlah pembinaan kelompok P3A	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	21 Kecamatan	135 kelompok	22.850.000		135 kelompok	65.000.000
3.3.3.3.2.3.1.1.28.303.2	Peningkatan Infrastruktur Pendukung Produksi Pertanian	Jumlah jalan usaha tani yang dibangun	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	21 Kecamatan	4 unit	0		4 unit	1.643.000.000
		Jumlah jaringan irigasi tersier, irigasi perpipaan dan irigasi sumur tanah dangkal yang dibangun			3 unit			3 unit	
		Jumlah dam parit yang dibangun			1 unit			1 unit	
		Jumlah embung yang dibangun			1 unit			1 unit	
		Jumlah fasilitasi pengelolaan hibah bansos			372 desa			372 desa	
3.3.3.3.2.3.1.1.28.303.3	Peningkatan Sarana, Prasarana dan Infrastruktuktur Pertanian (DAK)	Jumlah sarana dan prasarana infrastruktur pertanian yang dibangun	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	Kabupaten Magelang	25 paket	4.651.509.273		25 paket	4.875.999.808

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
			Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
3.3.3.3.2.3.1.1.28.303.4	Modernisasi dan Mekanisasi Pertanian	Jumlah pengadaan alat mesin pertanian	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	Kab. Magelang	1 paket	21.675.800.000		1 paket	645.267.329
		Jumlah bimbingan pengelolaan alsin/UPJA			4 kali			4 kali	
		Jumlah operasional brigade alsin			1 kali			1 kali	
3.3.3.3.2.3.1.1.28.303.5	Penyediaan Bufferstock Pengendalian Hama dan Penyakit Tanaman	Jumlah pengadaan obat-obatan pengendali hama penyakit	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	21 Kecamatan	1 paket	65.845.000		1 paket	150.000.000
3.3.3.3.2.3.1.1.28.303.6	Peningkatan Pengelolaan dan Pemanfaatan Pupuk	Jumlah pembinaan pengelolaan dan pemanfaatan pupuk	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	Kabupaten Magelang	20 kelompok tani	0		20 kelompok tani	50.000.000
		Jumlah distributor dan penyalur pupuk yang dibina			6 distributor			6 distributor	
3.3.3.3.2.3.1.1.28.303.7	Pengadaan Alat Mesin Perkebunan (DBHCHT)	jumlah pengadaan alat mesin perkebunan	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	13 Lokasi di Kab. Magelang	20 unit	300.000.000		20 unit	500.000.000
3.3.3.3.2.3.1.1.28.303.8	Pembiayaan Pertanian	Jumlah asuransi usaha tani	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	Kabupaten Magelang	2500 Ha	40.237.500		2500 Ha	126.000.000
		Jumlah permodalan usaha tani			3 LKM			3 LKM	
3.3.3.3.2.3.1.1.29.303	Program Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Pertanian	Cakupan Pembinaan Kelompok Tani			37,60 PERSEN	100.000.000		37,60 PERSEN	1.401.250.000

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
3.3.3.3.2.3.1.1.29.303.1	Penumbuhan, Pengembangan dan Penguatan Kapasitas Lembaga Petani	Jumlah penyusunan, pengumpulan dan updating data kelembagaan tani	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	21 Kecamatan	1 dokumen	0	1 dokumen	300.000.000	
		Jumlah penumbuhan, pengembangan, dan penguatan kapasitas kelembagaan tani (LKM, P4S, KTNA, Kelompok Tani, Gapoktan dan KTNA)			10 lembaga		10 lembaga		
		Jumlah penumbuhan, pengembangan dan penguatan kapasitas kelembagaan penyuluhan (Posludhes, BPP)			1 lembaga		1 lembaga		
		Jumlah kerjasama yang terjalin antara penyuluh dengan lembaga litbang pertanian			1 kerjasama		1 kerjasama		
		Jumlah penilaian kelas kelompok tani (Pemula, Lanjut, Madya, Utama)			4 kelas		4 kelas		
3.3.3.3.2.3.1.1.29.303.3	Penyusunan Program dan Programa Penyuluhan	jumlah dokumen programa penyuluhan yang disusun	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	21 Kecamatan	22 dokumen	0	22 dokumen	150.000.000	
3.3.3.3.2.3.1.1.29.303.4	Fasilitasi Pelaksanaan Metode Penyuluhan Pertanian	Jumlah penyebaran informasi dan siaran radio	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	21 Kecamatan	22 paket	0	22 paket	200.000.000	
		Jumlah demplot BPP yang difasilitasi			21 BPP		21 BPP		
3.3.3.3.2.3.1.1.29.303.5	Peningkatan Kapasitas Pelaku Utama dan Pelaku Usaha	Jumlah pelaku utama dan pelaku usaha yang meningkat kapasitas pengetahuan, sikap dan keterampilannya	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	21 kecamatan	700 orang	0	700 orang	151.250.000	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
3.3.3.3.2.3.1.1.29.303.6	Peningkatan Kapasitas SDM Penyuluh Pertanian	Jumlah penyuluh pertanian pemerintah, swasta dan swadaya yang meningkat kapasitasnya	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	21 kecamatan	260 orang	0	260 orang	500.000.000	
		Jumlah penyuluh yang kompeten sesuai standar LSP			50 orang		50 orang		
		jumlah laporan survey tingkat kepuasan petani thd layanan penyuluhan			1 dokumen		1 dokumen		
		Jumlah pelatihan penyuluh di BPP			210 orang		210 orang		
3.3.3.3.2.3.1.1.29.303.7	Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani Tembakau (DBHCHT)	Jumlah peningkatan kapasitas lembaga petani tembakau	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	21 kecamatan	2 kelompok	100.000.000	2 kelompok	100.000.000	
Total						30.310.236.513		18.050.403.987	

PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH

KABUPATEN MAGELANG

TAHUN 2021

Nama Perangkat Daerah : DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
1	2	3	4		5	6	7	8	9
2	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar					16.004.764.583			25.110.000.000
2.5	Lingkungan Hidup					16.004.764.583			25.110.000.000
2.5.2.5.2.5.1.1.7.205	Program Manajemen Administrasi Pelayanan Umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah			100 %	645.494.797		100 %	1.080.000.000
2.5.2.5.2.5.1.1.7.205.1	Pengelolaan Surat Menyurat, Kearsipan dan Bahan Pustaka	Jumlah surat yang dikelola	DEYANGAN, MERTOYUDAN	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magelang	6000 Surat	24.880.000		6000 Surat	30.000.000
		Jumlah arsip yang dikelola			4 Jenis Arsip			4 Jenis Arsip	
2.5.2.5.2.5.1.1.7.205.2	Penyelenggaraan Koordinasi dan Konsultasi Perangkat Daerah	Jumlah perjalanan dinas luar daerah yang terlaksana	DEYANGAN, MERTOYUDAN	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magelang	115 Orang Hari	100.000.000		115 Orang Hari	200.000.000
		Jumlah rapat koordinasi yang diselenggarakan			19 Rapat			19 Rapat	
		Jumlah perjalanan dinas dalam daerah yang terlaksana			156 Orang Hari			156 Orang Hari	
		Jumlah layanan humas dan protokol yang dilaksanakan			6 Kali			6 Kali	
2.5.2.5.2.5.1.1.7.205.3	Pengadaan dan Pengelolaan Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya	Jumlah paket pengadaan perlengkapan gedung kantor	DEYANGAN, MERTOYUDAN	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magelang	1 Paket	0		1 Paket	200.000.000
		Jumlah paket pengadaan peralatan gedung kantor			1 Paket			1 Paket	
		Jumlah aset yang dikelola			1 Paket			1 Paket	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
2.5.2.5.2.5.1.1.7.205.4	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya	Luas gedung kantor yang dipelihara	DEYANGAN, MERTOYUDAN	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magelang	22500 m2	120.089.000	22500 m2	220.000.000
		Jumlah rekening air, listrik, telepon dan surat kabar yang dibayar			204 rekening bulan		204 rekening bulan	
2.5.2.5.2.5.1.1.7.205.5	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya	Jumlah peralatan yang dipelihara	DEYANGAN, MERTOYUDAN	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magelang	45 Unit	187.500.000	45 Unit	250.000.000
		Jumlah perlengkapan yang dipelihara			30 Unit		30 Unit	
		Jumlah kendaraan dinas roda empat yang dipelihara			8 Unit		8 Unit	
		Jumlah kendaraan dinas roda dua yang dipelihara			12 Unit		12 Unit	
2.5.2.5.2.5.1.1.7.205.6	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya	Jumlah paket rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	DEYANGAN, MERTOYUDAN	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magelang	1 Paket	213.025.797	1 Paket	130.000.000
2.5.2.5.2.5.1.1.7.205.15	Peningkatan Kapasitas dan Disiplin Aparatur Sipil Negara	Frekuensi pembinaan ASN	DEYANGAN, MERTOYUDAN	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magelang	3 Kali	0	3 Kali	50.000.000
		Jumlah ASN yang dibina			103 Orang		103 Orang	
		Jumlah seragam dan atribut ASN yang disediakan			0 Paket		0 Paket	
		Jumlah JFT yang terfasilitasi penilaian angka kreditnya			6 Orang		6 Orang	
2.5.2.5.2.5.1.1.8.205	Program Perencanaan, Keuangan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian perencanaan, evaluasi kinerja OPD, dan keuangan perangkat daerah			100 %	90.929.705	100 %	280.000.000
2.5.2.5.2.5.1.1.8.205.1	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah laporan keuangan yang tersusun	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	5 Dokumen	68.929.705	5 Dokumen	130.000.000
		Jumlah Kegiatan Yang dikelola			42 Kegiatan		42 Kegiatan	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
2.5.2.5.2.5.1.1.8.205.2	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Renstra Perangkat Daerah yang tersusun	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	0 Dokumen	16.000.000		0 Dokumen	50.000.000
		Jumlah dokumen Renja Perangkat Daerah yang tersusun			1 Dokumen			1 Dokumen	
2.5.2.5.2.5.1.1.8.205.3	Penyusunan Laporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen pelaporan tahunan yang tersusun	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	4 Dokumen	6.000.000		4 Dokumen	50.000.000
		Jumlah dokumen monitoring , evaluasi, dan pelaporan tribulanan yang tersusun			12 Dokumen			12 Dokumen	
		Jumlah dokumen pelaporan bulanan yang tersusun			12 Dokumen			12 Dokumen	
		Jumlah dokumen evaluasi jangka menengah yang tersusun			1 Dokumen			1 Dokumen	
		Jumlah dokumen profil Perangkat Daerah yang tersusun			1 Dokumen			1 Dokumen	
2.5.2.5.2.5.1.1.8.205.4	Penyusunan Dokumen Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Perangkat Daerah	Jumlah Standar Operasional Prosedur yang tersusun	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	0 Dokumen	0		0 Dokumen	50.000.000
		Jumlah Standar Pelayanan yang tersusun			0 Dokumen			0 Dokumen	
		Jumlah dokumen pengendalian intern yang tersusun			1 Dokumen			1 Dokumen	
		Jumlah dokumen data perangkat daerah yang tersusun			1 Dokumen			1 Dokumen	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
2.5.2.5.2.5.1.1.29.205	Program Pengendalian Pencemaran Lingkungan dan Gas Rumah Kaca	Persentase usaha dan/atau kegiatan yang mentaati persyaratan teknis pengendalian pencemaran udara			39 %	406.043.382		39 %	2.050.000.000
		Proporsi limbah B3 yang dikelola sesuai peraturan perundangan (sektor industri)*			68 %			68 %	
		Persentase usaha dan/atau kegiatan mentaati persyaratan teknis pengendalian pencemaran air			46 %			46 %	
		Persentase parameter uji kualitas lingkungan yang terakreditasi			18 %			18 %	
2.5.2.5.2.5.1.1.29.205.1	Pengendalian Pencemaran Udara dan Gas Rumah Kaca.	Jumlah usaha/kegiatan yang dipantau PPU	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	Kota Mungkid, Sawangan, Srumbung, Dukun, Salam, Tempuran, Mertoyudan, Salaman, Secang, Tegalrejo, Grabag	10 Usaha/Kegiatan	0		10 Usaha/Kegiatan	300.000.000
		Jumlah usaha/kegiatan yang disosialisasi			40 usaha/kegiatan			40 usaha/kegiatan	
		Jumlah peserta sosialisasi			80 orang			80 orang	
		Jumlah dokumen pengendalian kualitas udara yang dibuat			1 dokumen			1 dokumen	
		Jumlah lokasi pengujian kualitas udara ambien			8 lokasi			8 lokasi	
		Jumlah usaha/kegiatan yang dibina			30 usaha/kegiatan			30 usaha/kegiatan	
		Jumlah pengujian kualitas air hujan yang dilaksanakan			0 Paket			0 Paket	
		Tersusunnya Profil Emisi Gas Rumah Kaca (GRK)*			1 Dokumen			1 Dokumen	
2.5.1.1.29.205.1.2	Koordinasi, Singkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi		MUNGKID, SAWITAN	Kantor Bupati Kab. Magelang	10 Usaha/Kegiatan	0		21.000.000	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
2.5.2.5.2.5.1.1.29.205.2	Pengendalian Pencemaran Limbah B3	Jumlah usaha/kegiatan yang disosialisasi	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	dlh kab magelang	50 usaha/kegiatan	86.900.000	50 usaha/kegiatan	150.000.000
		Jumlah Rekomendasi/ijin TPS Limbah B3 yang dikeluarkan			5 Rekomendasi/ijin		5 Rekomendasi/ijin	
		Jumlah dokumen yang dibuat			1 dokumen		1 dokumen	
2.5.1.1.29.205.2.2	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3		MUNGKID, SAWITAN	Kabupaten Magelang	5 Rekomendasi/ Ijin	31.418.100		31.418.100
2.5.1.1.29.205.2.1	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 Dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik		MUNGKID, SAWITAN	Kabupaten Magelang	40 Usaha/ Kegiatan	73.581.900		73.581.900
2.5.2.5.2.5.1.1.29.205.3	Pengendalian Pencemaran Air dan Tanah	Jumlah dokumen yang dibuat	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	DLH Kab Magelang	1 dokumen	0	1 dokumen	300.000.000
		Jumlah usaha/kegiatan yang dipantau			10 usaha/kegiatan		10 usaha/kegiatan	
		Jumlah sungai yang diuji			15 Sungai		15 Sungai	
		Jumlah usaha/kegiatan yang disosialisasi			30 usaha/kegiatan		30 usaha/kegiatan	
		Jumlah rekomendasi/ijin IPLC yang dikeluarkan			3 rekomendasi/ijin		3 rekomendasi/ijin	
		Jumlah embung/waduk yang diuji			0 Paket		0 Paket	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
2.5.2.5.2.5.1.1.29.205.4	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengendalian Pencemaran Air dan Tanah.	Jumlah peserta sosialisasi	TAMANAGUNG, MUNTILAN	Bandongan, Mertoyudan, Mungkid	100 orang	0	100 orang	500.000.000
		Jumlah kelompok peduli sungai yang terbentuk			1 kelompok		1 kelompok	
		Jumlah titik lokasi bersih kali			3 Sungai		3 Sungai	
		Jumlah sarpras pemeliharaan sungai			1 paket		1 paket	
		Jumlah sarpras PPA yang diadakan			1 paket		1 paket	
2.5.1.1.29.205.4.1	Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran		DINAS LINGKUNGAN HIDUP	dlh kab magelang	1 paket	0		500.000.000
2.5.2.5.2.5.1.1.29.205.5	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan.	Jumlah Sampel yang diperiksa	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	UPTD Laboratorium Lingkungan	250 Sampel	278.198.172	250 Sampel	500.000.000
		Jumlah Peralatan Laboratorium yang dibeli			1 Paket		1 Paket	
		Jumlah Bahan Kimia/ Reagen yang dibeli			1 Paket		1 Paket	
		Jumlah Limbah yang dikelola			800 Kg		800 Kg	
		Jumlah Peralatan Laboratorium yang dipelihara			1 Paket		1 Paket	
2.5.2.5.2.5.1.1.29.205.6	Peningkatan Kapasitas Laboratorium Lingkungan.	Jumlah Personel yang mengikuti Bimtek	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	2 Pelatihan	40.945.210	2 Pelatihan	300.000.000
		Jumlah Sistem yang dikelola			1 Paket		1 Paket	
		Jumlah Parameter yang Terakreditasi			16 Parameter		16 Parameter	
		Pengelolaan Sistem Layanan Laboratorium Lingkungan Terakreditasi			1 Paket		1 Paket	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
2.5.2.5.2.5.1.1.30.205	Program Peningkatan Kapasitas dan Tata Lingkungan Hidup	Persentase usaha dan/atau kegiatan yang berdokumen lingkungan		69 %	596.908.679		69 %	750.000.000	
		Persentase ketersediaan dokumen perencanaan dan pelaporan lingkungan hidup daerah		100 %		100 %			
		Persentase kasus lingkungan dan pengaduan masyarakat terkait ijin lingkungan, PPLH, dan PUU LH yang ditangani		100 %		100 %			
		Persentase Desa Bersih Sehat yang mendapat penghargaan di bidang LH		48 %		48 %			
2.5.2.5.2.5.1.1.30.205.1	Fasilitasi Pelayanan dan Pengawasan Dokumen Lingkungan Hidup.	Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang difasilitasi	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	DLH	84.529.999		1627 Usaha dan/atau Kegiatan	200.000.000	
		Jumlah usaha dan/atau kegiatan di bidang pemanfaatan sumber daya alam yang diawasi					6 Usaha dan/atau Kegiatan		6 Usaha dan/atau Kegiatan
		Jumlah peserta sosialisasi					0 peserta		0 peserta
		Jumlah peserta bimtek di bidang Lingkungan Hidup					20 Peserta		20 Peserta
		Sarana dan prasarana pengawasan usaha dan/atau kegiatan					0 paket		0 paket
		Jumlah usaha dan/atau kegiatan non tambang yang diawasi					15 Usaha dan/atau Kegiatan		15 Usaha dan/atau Kegiatan
		Jumlah kendaraan teknis pengawasan yang dibeli dan pemeliharaan					0 paket		0 paket
		Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup Kegiatan DLH					0 paket		0 paket

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
2.5.2.5.2.5.1.1.30.205.2	Pengkajian dan Pengembangan Informasi Lingkungan Hidup.	Jumlah dokumen IKLH	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	DLH	2 dokumen	512.378.680		2 dokumen	300.000.000
		Jumlah dokumen IKPLHD			1 dokumen			1 dokumen	
		Jumlah dokumen laporan evaluasi Sistem Informasi Lingkungan Hidup			1 dokumen			1 dokumen	
		Pembuatan dan pemeliharaan sistem informasi dan komunikasi lingkungan hidup			0 Paket			0 Paket	
		Jumlah peserta bimtek Sistem Informasi dan Komunikasi Lingkungan Hidup			0 peserta			0 peserta	
		Jumlah dokumen penyusunan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup			1 paket			1 paket	
		Penyusunan RPPLH			0 Dokumen			0 Dokumen	
2.5.2.5.2.5.1.1.30.205.3	Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup.	Jumlah penghargaan bidang lingkungan hidup yang diberikan	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	DLH	6 penghargaan	0		6 penghargaan	150.000.000
		Jumlah penyusunan peraturan bidang lingkungan hidup			0 rancangan			0 rancangan	
		Jumlah peserta bimtek penguatan tim penanganan kasus lingkungan hidup			0 orang			0 orang	
		Jumlah peserta sosialisasi peraturan perundangan di bidang lingkungan hidup			0 orang			0 orang	
		Jumlah peserta sosialisasi adipura			40 orang			40 orang	
		Jumlah fasilitasi pelaksanaan adipura			2 kali			2 kali	
		Jumlah Peserta Lomba Bersih Sehat			21 peserta			21 peserta	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
2.5.2.5.2.5.1.1.30.205.4	Penanganan Kasus dan Penaatan Lingkungan Hidup.	Jumlah kasus lingkungan hidup yang ditindaklanjuti/ditangani	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	DLH	25 kasus	0	25 kasus	100.000.000
		Jumlah Pelaporan Pelaksanaan Dokumen Lingkungan yang di evaluasi			16 laporan		16 laporan	
		Jumlah surat teguran dan sanksi yang diterbitkan			15 surat		15 surat	
		Jumlah peserta sosialisasi tata cara pengaduan			20 orang		20 orang	
		Jumlah pengujian laboratorium kualitas lingkungan hidup untuk penyelesaian sengketa lingkungan			0 titik		0 titik	
2.5.2.5.2.5.1.1.31.205	Program Peningkatan Kinerja Pengelolaan Sampah	Persentase jumlah sampah yang tertangani*			21,12 %	11.480.280.290	21,12 %	11.950.000.000
		Persentase cakupan area pelayanan sampah			8,06 %		8,06 %	
		Persentase jumlah sampah yang berkurang melalui 3R*			21,78 %		21,78 %	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
2.5.2.5.2.5.1.1.31.205.1	Penyediaan Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah.	Lahan TPST yang dibeli	KEBONSARI, BOROBUDUR	Kebonsari Borobudur	1 Paket	0	1 Paket	5.000.000.000
		Jumlah TPST yang dibangun			0 Paket		0 Paket	
		Jumlah TPSS yang direvitalisasi/dibangun			0 Paket		0 Paket	
		Jumlah Kendaraan yang dibeli			1 Unit		1 Unit	
		Jumlah kemandoran direhab/dibangun			0 Unit		0 Unit	
		Jumlah UPT dibangun			0 Unit		0 Unit	
		Jumlah alat berat TPST yang dibeli			1 Paket		1 Paket	
		Jumlah Dokumen Perencanaan dan Kelayakan yang disusun			1 Dokumen		1 Dokumen	
		Jumlah Alat Pengolah Sampah Yang dibeli			0 Paket		0 Paket	
		Jumlah TPS 3R Kelurahan yang dibangun dan dikelola			0 Paket		0 Paket	
		Jumlah Lahan TPSS yang dibeli			0 Paket		0 Paket	
		Sistem Informasi Penanganan Sampah			1 paket		1 paket	
		Lahan TPS3R yang dibeli			1 Paket		1 Paket	
		Jumlah Alat GPS Kendaraan dan Kelengkapan instalasinya yang dibeli			1 Paket		1 Paket	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
2.5.2.5.2.5.1.1.31.205.2	Peningkatan Kinerja Pengelolaan Penanganan Sampah.	Jumlah Alat yang dipelihara	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	Dinas lingkungan hidup kabupaten magelang	189 Unit	7.141.710.290	189 Unit	1.000.000.000
		Jumlah kendaraan yang dikelola			34 Unit		34 Unit	
		Jumlah Pengelola Penanganan Sampah yang dikelola			182 Orang		182 Orang	
		Jumlah Bangunan Konstruksi Pemeliharaan Sarpras			0 Paket		0 Paket	
		Jumlah mechanical electrical yang dibeli			0 Paket		0 Paket	
		Jumlah Bahan Pengolah Sampah dan Lindi			0 Paket		0 Paket	
		Jumlah Laporan Penanganan Sampah			0 Dokumen		0 Dokumen	
2.5.2.5.2.5.1.1.31.205.3	Pengelolaan dan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengurangan Sampah.	Jumlah Alat yang dipelihara	DEYANGAN, MERTOYUDAN	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magelang	4 Unit	424.570.000	4 Unit	700.000.000
		Jumlah kendaraan yang dikelola			5 Unit		5 Unit	
		Jumlah Pengelola Pengurangan Sampah yang dikelola			35 Orang		35 Orang	
		Jumlah mechanical electrical yang dibeli			1 Paket		1 Paket	
		Jumlah Bahan Pengolah Sampah yang dibeli			1 Paket		1 Paket	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
2.5.2.5.2.5.1.1.31.205.4	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengurangan Sampah.	Jumlah sosialisasi	DEYANGAN, MERTOYUDAN	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magelang	21 Kali	0	21 Kali	750.000.000
		Jumlah Bank sampah Yang dibina			100 Unit		100 Unit	
		Jumlah Lomba Bank Sampah yang dilaksanakan			1 Paket		1 Paket	
		Jumlah lomba TPS 3R yang dilaksanakan			1 Paket		1 Paket	
		Jumlah bantuan pengelolaan sarana dan prasarana untuk Bank Sampah			1 Paket		1 Paket	
		Jumlah bantuan sarana dan prasarana pengelolaan TPS 3R			1 Paket		1 Paket	
		Fasilitasi Gerakan Pungut Sampah			6 Kali		6 Kali	
		Pembentukan Bank Sampah Kantor dan Sekolah			10 Unit		10 Unit	
		Jumlah Laporan Pengurangan Sampah			1 Dokumen		1 Dokumen	
		Pembangunan TPS 3R			1 Paket		1 Paket	
		Jumlah publikasi pengurangan sampah yang dibuat			1 Paket		1 Paket	
		Sistem Informasi Pengurangan Sampah			1 Paket		1 Paket	
2.5.1.1.31.205.4.4	Peningkatan Peran Serta dalam Pengelolaan Persampahan		MERTOYUDAN, DEYANGAN	21 Kecamatan Kabupaten Magelang	1 Paket	0		750.000.000
2.5.2.5.2.5.1.1.31.205.10	Pengelolaan dan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengurangan Sampah (DAK)	Jumlah sarana dan prasarana pengurangan sampah yang dibeli	MUNGKID, MUNGKID	-	1 Paket	3.914.000.000	1 Paket	4.500.000.000

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
2.5.2.5.2.5.1.1.32.205	Program Peningkatan Kinerja Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau	Persentase Ketersediaan RTH Publik di Wilayah Perkotaan			1,88 %	2.525.931.700		1,88 %	5.950.000.000
		Persentase RTH Publik yang terkelola			25,37 %			25,37 %	
		Persentase Ketersediaan RTH Privat di Wilayah Perkotaan			37,71 %			37,71 %	
2.5.2.5.2.5.1.1.32.205.1	Peningkatan Kinerja Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Publik.	Jumlah kendaraan yang dikelola	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	Kabupaten Magelang	10 Unit	2.525.931.700		10 Unit	5.000.000.000
		Jumlah alat yang dikelola			65 unit			65 unit	
		Jumlah kendaraan yang dibeli			1 unit			1 unit	
		Jumlah alat yang dibeli			6 Unit			6 Unit	
		Jumlah Pengelola RTH publik yang dikelola			70 Orang			70 Orang	
		Jumlah bahan (pupuk dan obat) pengelolaan RTH			1 Paket			1 Paket	
		Jumlah Bangunan Konstruksi Pengelolaan RTH			1 Paket			1 Paket	
		Jumlah Bahan Konstruksi Pengelolaan RTH Yang Dibeli			1 Paket			1 Paket	
		Jumlah mechanical electrical yang dibeli			35 Unit			35 Unit	
		Jumlah Bibit Tanaman yang dibeli			2 Paket			2 Paket	
		Penyusunan DED			1 paket			1 paket	
		identifikasi sempadan (kepemilikan,kewenangan)			0 paket			0 paket	
		Pembebasan lahan			0 paket			0 paket	
		Pembangunan RTH			2 paket			2 paket	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
2.5.2.5.2.5.1.1.32.205.2	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau.	Jumlah bantuan hibah yang diterima masyarakat	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	Kabupaten Magelang	0 paket	0	0 paket	950.000.000
		Pendataan dan identifikasi sekolah			0 paket		0 paket	
		Penyusunan DED RTH sekolah sekolah			0 paket		0 paket	
		Pembangunan RTH sekolah			1 paket		1 paket	
		Fasilitasi pembangunan RTH di wilayah pedesaan			0 paket		0 paket	
		Sosialisasi RTH			1 paket		1 paket	
2.5.2.5.2.5.1.1.33.205	Program Konservasi Sumber Daya Alam dan Mitigasi Dampak Perubahan Iklim	Persentase luasan daerah resapan air yang dikonservasi			2,62 PERSEN	259.176.030	2,62 PERSEN	3.050.000.000
		Persentase luasan daerah rawan bencana yang dikonservasi			0,66 PERSEN		0,66 PERSEN	
		Persentase mata air yang dikonservasi			19 PERSEN		19 PERSEN	
		Cakupan desa/kelurahan program kampung iklim			5,91 PERSEN		5,91 PERSEN	
		Persentase sekolah Adiwiyata			16,82 PERSEN		16,82 PERSEN	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
2.5.2.5.2.5.1.1.33.205.1	Pengendalian dan Adaptasi Perubahan Iklim.	Jumlah Sekolah Adiwiyata yang di bina	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	Kabupaten Magelang	50 sekolah	0	50 sekolah	650.000.000
		jumlah fasilitasi saptas sekolah Negeri Adiwiyata			0 paket		0 paket	
		Jumlah fasilitasi saptas sekolah swasta Adiwiyata			0 paket		0 paket	
		Jumlah Peserta sosialisasi Sekolah Adiwiyata			300 orang		300 orang	
		Jumlah peserta Bimtek Sekolah Adiwiyata			200 orang		200 orang	
		Jumlah penerima penghargaan Kalpataru			1 orang/kelompok		1 orang/kelompok	
		Jumlah Pramuka saka kalpataru yang dibina			1 kelompok		1 kelompok	
		Jumlah Desa Proklam yang dibina			50 Desa		50 Desa	
		Jumlah fasilitasi saptas Desa proklam			1 paket		1 paket	
		Jumlah peserta Bimtek Proklam			350 orang		350 orang	
		Fasilitasi Hari LH yang dilaksanakan			1 Kali		1 Kali	
2.5.2.5.2.5.1.1.33.205.2	Konservasi Lahan Kritis dan Rawan Bencana.	Review dokumen kajian status kerusakan lahan	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	Kabupaten Magelang	0 Dokumen	259.176.030	0 Dokumen	750.000.000
		Penghijauan untuk konservasi rawan bencana			50 Ha		50 Ha	
		Penyusunan Dokumen Status Kerusakan			1 paket		1 paket	
		Jumlah peserta sosialisasi			600 orang		600 orang	
		Jumlah Peserta Bimtek			200 orang		200 orang	
		Jumlah peserta yang mengikuti Gerakan Penanaman			400 orang		400 orang	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
2.5.1.1.33.205.2.1	Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Sekitar TAHURA Kabupaten/Kota		DINAS LINGKUNGAN HIDUP	Kabupaten Magelang	12 paket	447.310.000		500.000.000
2.5.1.1.33.205.2.1	Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Sekitar TAHURA Kabupaten/Kota		DINAS LINGKUNGAN HIDUP	Kabupaten Magelang	1 paket	162.690.000		200.000.000
2.5.1.1.33.205.2.1	Bantuan Bibit Buah Apokat		GRABAG, SEWORAN	DESA SEWORAN	1 paket	40.000.000		40.000.000
2.5.2.5.2.5.1.1.33.205.3	Konservasi Kawasan Resapan Air..	Jumlah alat biopori yang dibeli	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	Kabupaten Magelang	1 paket	0	1 paket	1.500.000.000
		Jumlah sumur resapan yang dibuat			0 paket		0 paket	
		Jumlah dokumen kajian yang dibuat			1 dokumen		1 dokumen	
		luas lahan yang dikonservasi			40 ha		40 ha	
		jumlah orang yang disosialisai			200 orang		200 orang	
		Jumlah komunitas mata air yang dibentuk			10 kelompok		10 kelompok	
		Paket tanah yang dibeli di sekitar mata air			1 Paket		1 Paket	
		Pembuatan senderan pengaman mata air			0 Paket		0 Paket	
		Jumlah pohon aren yang diselamatkan			1 paket		1 paket	
		Jumlah pohon yang ditanam dari Bank Pohon			1000 Pohon		1000 Pohon	
		Tersedianya Sistem Informasi Sumber Mata Air*			0 Paket		0 Paket	
2.5.1.1.33.205.3.1	Belanja Modal		DINAS LINGKUNGAN HIDUP	Kabupaten Magelang	3 paket	0		370.000.000

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
2.5.1.1.33.205.3.1	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati		DINAS LINGKUNGAN HIDUP	Kabupaten Magelang	1 1	0		100.000.000
2.5.1.1.33.205.3.1	Belanja Hibah barang yang akan disenggarakan kepada masyarakat kabupaten magelang		DINAS LINGKUNGAN HIDUP	Kabupaten Magelang	5 paket	0		550.000.000
2.5.1.1.33.205.3.1	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati		DINAS LINGKUNGAN HIDUP	Kabupaten Magelang	9 paket	0		450.000.000
2.5.2.5.2.5.1.1.33.205.4	Konervasi Keanekaragaman Hayati.	jumlah dokumen yang dibuat	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	Kabupaten Magelang	1 dokumen	0	1 dokumen	150.000.000
		Jumlah tanaman langka yang ditanam			1 Paket		1 Paket	
2.5.1.1.33.205.4.1	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati		DINAS LINGKUNGAN HIDUP	Kabupaten Magelang	7 paket	0		150.000.000
2.5.1.1.33.205.4.1	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati		DINAS LINGKUNGAN HIDUP	Kabupaten Magelang	2 paket	0		100.000.000

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja
2.5.1.1.33.205.4.2	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati		DINAS LINGKUNGAN HIDUP	Kabupaten Magelang	1 paket	0		60.000.000
Total							16.004.764.583	25.110.000.000

PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH

KABUPATEN MAGELANG

TAHUN 2021

Nama Perangkat Daerah : DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar				5.551.093.850			7.476.054.000
2.6	Administrasi Kependudukan dan Capil				5.551.093.850			7.476.054.000
2.6.2.6.2.6.1.1.7.206	Program Manajemen Administrasi Pelayanan Umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah		100 %	450.647.750		100 %	1.142.000.000
2.6.2.6.2.6.1.1.7.206.1	Pengelolaan Surat Menyurat, Kearsipan dan Bahan Pustaka	Jumlah surat yang dikelola	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Disdukcapil	2000 surat	11.128.750	2000 surat	24.000.000
		Jumlah arsip yang dikelola			90 arsip spj		90 arsip spj	
2.6.2.6.2.6.1.1.7.206.2	Penyelenggaraan Koordinasi dan Konsultasi Perangkat Daerah	Jumlah perjalanan dinas luar daerah yang terlaksana	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Disdukcapil	40 Perjalanan	69.520.000	40 Perjalanan	115.000.000
		Jumlah rapat koordinasi yang diselenggarakan			6 rapat		6 rapat	
		Jumlah perjalanan dinas dalam daerah yang terlaksana			88 perjalanan dalam daerah		88 perjalanan dalam daerah	
2.6.2.6.2.6.1.1.7.206.3	Pengadaan dan Pengelolaan Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya	Jumlah paket pengadaan perlengkapan gedung kantor	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Disdukcapil	2 paket	0	2 paket	200.000.000
		Jumlah paket pengadaan peralatan gedung kantor			3 paket		3 paket	
2.6.2.6.2.6.1.1.7.206.4	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya	Luas gedung kantor yang dipelihara	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Disdukcapil	757 meter persegi	205.999.000	757 meter persegi	237.000.000
		Jumlah rekening tagihan yang dibayar			48 rekening bulan		48 rekening bulan	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
2.6.2.6.2.6.1.1.7.206.5	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya	Jumlah peralatan yang dipelihara	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Disdukcapil	38 unit	164.000.000		38 unit	341.000.000
		Jumlah perlengkapan yang dipelihara			50 unit			50 unit	
		Jumlah kendaraan dinas roda empat yang dipelihara			6 unit			6 unit	
		Jumlah kendaraan dinas roda dua yang dipelihara			10 unit			10 unit	
2.6.2.6.2.6.1.1.7.206.6	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya	Jumlah paket rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Disdukcapil	2 paket	0		2 paket	150.000.000
2.6.2.6.2.6.1.1.7.206.7	Peningkatan Kapasitas dan Disiplin Aparatur Sipil Negara	Frekuensi pembinaan ASN	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Disdukcapil	1 Rapat Kerja	0		1 Rapat Kerja	75.000.000
		Jumlah ASN yang dibina			40 personil			40 personil	
		Jumlah tenaga honorer/kontrak			38 personil			38 personil	
2.6.2.6.2.6.1.1.8.206	Program Perencanaan Keuangan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian perencanaan, evaluasi kinerja OPD, dan keuangan perangkat daerah			100 %	58.840.500		100 %	127.000.000
2.6.2.6.2.6.1.1.8.206.1	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah laporan keuangan yang tersusun	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Disdukcapil	14 laporan	51.680.000		14 laporan	89.000.000
		Jumlah kegiatan yang dikelola			20 kegiatan			20 kegiatan	
2.6.2.6.2.6.1.1.8.206.2	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Renstra Perangkat Daerah yang tersusun	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Disdukcapil	na Dokumen Renstra	5.082.500		na Dokumen Renstra	12.000.000
		Jumlah dokumen Renja Perangkat Daerah yang tersusun			2 Dokumen Renja			2 Dokumen Renja	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
2.6.2.6.2.6.1.1.8.206.3	Penyusunan Laporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen pelaporan tahunan yang tersusun	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Disdukcapil	3 Dokumen Pelaporan	2.078.000		3 Dokumen Pelaporan	16.000.000
		Jumlah dokumen monitoring , evaluasi, dan pelaporan tribulanan yang tersusun			12 laporan			12 laporan	
		Jumlah dokumen pelaporan bulanan yang tersusun			12 laporan			12 laporan	
		Jumlah dokumen evaluasi jangka menengah yang tersusun			1 dokumen			1 dokumen	
		Jumlah Dokumen Profil Perangkat Daerah yang tersusun			1 Dokumen			1 Dokumen	
2.6.2.6.2.6.1.1.8.206.4	Penyusunan Dokumen Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Perangkat Daerah	Jumlah Standar Operasional Prosedur yang tersusun	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Disdukcapil	21 Dokumen	0		21 Dokumen	10.000.000
		Jumlah Standar Pelayanan yang tersusun			21 Dokumen			21 Dokumen	
2.6.2.6.2.6.1.1.16.206	Program Pelayanan Administrasi Kependudukan	Persentase penerbitan KK			97,85 %	3.707.571.100		97,85 %	4.355.054.000
		Persentase Penduduk yang melakukan perekaman KTP			98,2 %			98,2 %	
2.6.2.6.2.6.1.1.16.206.1	Fasilitasi Penerbitan Perubahan Identitas Penduduk	Jumlah Dokumen Perubahan Identitas Penduduk	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Disdukcapil	81000 lembar	1.183.540.100		81000 lembar	1.080.054.000
2.6.2.6.2.6.1.1.16.206.2	Fasilitasi Penerbitan Pindah Datang dan Pendataan Penduduk	Jumlah Penerbitan Surat Pindah Datang Penduduk	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Disdukcapil	14500 lembar	0		14500 lembar	75.000.000
		Pendataan Penduduk rentan dan orang asing			160 orang			160 orang	
2.6.2.6.2.6.1.1.16.206.3	DAK (Pelayanan Adminduk)	Kualitas pelayanan cepat dan tertib administrasi kependudukan	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Disdukcapil	100 %	2.524.031.000		100 %	3.200.000.000

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
2.6.2.6.2.6.1.1.17.206	Program Pelayanan Pencatatan Sipil	Persentase penerbitan Akta Kelahiran			92,5 %	608.444.000		92,5 %	852.000.000
		Persentase Penerbitan Akta perkawinan			60 %		60 %		
		Persentase Penerbitan Akta Kematian			70 %		70 %		
2.6.2.6.2.6.1.1.17.206.1	Pelayanan Penerbitan Akta Kematian dan Kelahiran	Jumlah Dokumen Akta Kematian dan Kelahiran yang diterbitkan	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Disdukcapil	31000 lembar	558.444.000		31000 lembar	740.000.000
2.6.2.6.2.6.1.1.17.206.2	Pelayanan Penerbitan Akte Perceraian, Perkawinan, Perubahan Status Anak dan Pewarganegaraan	Jumlah Dokumen Akte Perceraian, Perkawinan, Perubahan Status Anak dan Pewarganegaraan yg diterbitkan	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Disdukcapil	350 lembar	50.000.000		350 lembar	112.000.000
2.6.2.6.2.6.1.1.18.206	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (PIAK) dan Pemanfaatan Data	Persentase Pengelolaan Informasi Adiministrasi Kependudukan			75 %	725.590.500		75 %	1.000.000.000
		Persentase Pemanfaatan Data			90 %		90 %		
2.6.2.6.2.6.1.1.18.206.1	Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIK)	Lancarnya Pelayanan Admuduk dan Tertib Admuduk	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Disdukcapil dan Kabupaten Magelang	21 kecamatan	655.590.500		21 kecamatan	830.000.000
		Jenis buku yang diterbitkan			1 buku		1 buku		
2.6.2.6.2.6.1.1.18.206.2	Fasilitasi & evaluasi Pemanfaatan Data dan Pengelolaan Dokumen	Jumlah Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan Data	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Disdukcapil	24 Perjanjian Kerja Sama	70.000.000		24 Perjanjian Kerja Sama	170.000.000
		Jumlah Dokumen yang dipelihara			30500 dokumen		30500 dokumen		
		Jumlah dokumen yang didigitalisasi			6200 dokumen		6200 dokumen		
Total						5.551.093.850			7.476.054.000

PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH

KABUPATEN MAGELANG

TAHUN 2021

Nama Perangkat Daerah : DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar				7.340.924.412			5.146.400.000
2.7	Pemberdayaan Masyarakat Desa				7.340.924.412			5.146.400.000
2.7.2.7.2.7.1.1.7.207	Program Manajemen Administrasi Pelayanan Umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah		100 %	592.228.025		100 %	1.006.000.000
2.7.2.7.2.7.1.1.7.207.1	Pengelolaan Surat Menyurat, Kearsipan dan Bahan Pustaka	Jumlah surat yang dikelola	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	DISPERMADES	3000 surat	87.222.000	3000 surat	55.000.000
		Jumlah arsip yang dikelola			820 buah		820 buah	
		Jumlah bahan pustaka yang dikelola			15 buah		15 buah	
2.7.2.7.2.7.1.1.7.207.2	Penyelenggaraan Koordinasi dan Konsultasi Perangkat Daerah	Jumlah perjalanan dinas luar daerah yang terlaksana	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	80 kali	126.900.000	80 kali	146.000.000
		Jumlah rapat koordinasi yang diselenggarakan			15 kali		15 kali	
		Jumlah perjalanan dinas dalam daerah yang terlaksana			100 kali		100 kali	
2.7.2.7.2.7.1.1.7.207.3	Pengadaan dan Pengelolaan Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya	Jumlah paket pengadaan perlengkapan gedung kantor	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	1 paket	0	1 paket	150.000.000
		Jumlah paket pengadaan peralatan gedung kantor			1 paket		1 paket	
		Jumlah aset yang dikelola			152 buah		152 buah	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja
2.7.2.7.2.7.1.1.7.207.4	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya	Luas gedung kantor yang dipelihara	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Dispermades Kab. Magelang	741 m2	130.861.500	741 m2	130.000.000
		Jumlah rekening/tagihan yang dibayar			36 rekening		36 rekening	
2.7.2.7.2.7.1.1.7.207.5	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya	Jumlah peralatan yang dipelihara	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	25 buah	247.244.525	25 buah	345.000.000
		Jumlah perlengkapan yang dipelihara			10 buah		10 buah	
		Jumlah kendaraan dinas roda empat yang dipelihara			4 buah		4 buah	
		Jumlah kendaraan dinas roda dua yang dipelihara			13 buah		13 buah	
2.7.2.7.2.7.1.1.7.207.6	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya	Jumlah paket rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	1 paket	0	1 paket	80.000.000
2.7.2.7.2.7.1.1.7.207.7	Peningkatan Kapasitas dan Disiplin Aparatur Sipil Negara	Frekuensi pembinaan ASN	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	4 kali	0	4 kali	100.000.000
		Jumlah ASN yang dibina			40 orang		40 orang	
		Jumlah tenaga honorar/kontrak			4 orang		4 orang	
		Jumlah JFT yang terfasilitasi penilaian angka kreditnya			3 orang		3 orang	
2.7.2.7.2.7.1.1.8.207	Program Perencanaan, Keuangan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian perencanaan, evaluasi kinerja OPD, dan keuangan perangkat daerah			100 %	42.909.188	100 %	192.000.000
2.7.2.7.2.7.1.1.8.207.1	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah kegiatan yang dikelola	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Dispermades	25 kegiatan	33.970.000	25 kegiatan	55.000.000
		Jumlah laporan keuangan yang tersusun			1 laporan		1 laporan	
2.7.2.7.2.7.1.1.8.207.2	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Renstra Perangkat Daerah yang tersusun	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Dispermades	0 dokumen	7.385.928	0 dokumen	40.000.000
		Jumlah dokumen Renja Perangkat Daerah yang tersusun			2 dokumen		2 dokumen	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
			Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
2.7.2.7.2.7.1.1.8.207.3	Penyusunan Laporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen pelaporan tahunan yang tersusun	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Dispermades	3 dokumen	1.553.260		3 dokumen	47.000.000
		Jumlah dokumen monitoring , evaluasi, dan pelaporan tribunalan yang tersusun			4 dokumen			4 dokumen	
		Jumlah dokumen pelaporan bulanan yang tersusun			12 dokumen			12 dokumen	
		Jumlah Dokumen Profil Perangkat Daerah yang tersusun			1 Dokumen			1 Dokumen	
2.7.2.7.2.7.1.1.8.207.4	Penyusunan Dokumen Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Perangkat Daerah	Jumlah SOP yang tersusun	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Dispermades	1 buah	0		1 buah	50.000.000
		Jumlah SP yang tersusun			0 buah			0 buah	
		Jumlah Daftar Informasi Publik			0 buah			0 buah	
		Jumlah dokumen pengendalian intern yang tersusun			1 buah			1 buah	
2.7.2.7.2.7.1.1.21.207	Program Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Persentase pasar desa dengan pengelolaan baik			49.18 PERSEN	1.141.757.200		49.18 PERSEN	1.805.400.000
		Persentase BUMDES dalam strata maju, berkembang dan tumbuh			38.15 PERSEN			38.15 PERSEN	
		Persentase TTG yang difasilitasi			44.59 PERSEN			44.59 PERSEN	
		Persentase KP SPAMS yang berstatus mandiri			88.24 PERSEN			88.24 PERSEN	
		Persentase pengembangan partisipasi dan swadaya masyarakat			1.63 PERSEN			1.63 PERSEN	
		Persentase fasilitasi TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD)			100 PERSEN			100 PERSEN	
2.7.2.7.2.7.1.1.21.207.1	Penguatan Kapasitas Kelompok Pengelola Sistem Penyediaan Air Minum dan Sanitasi (SPAMS)	Jumlah KP SPAMS berstatus mandiri	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	150 buah	15.840.500		150 buah	80.000.000

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja
2.7.2.7.2.7.1.1.21.207.2	Penguatan kapasitas pengelola pasar desa	Jumlah pengelola pasar desa yang dibina	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	10 buah	0	10 buah	65.000.000
2.7.2.7.2.7.1.1.21.207.3	Pembinaan dan Pengembangan Lembaga Ekonomi Pemerintah Desa dan Masyarakat	Jumlah BUMDES dalam strata maju, berkembang dan tumbuh	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	140 buah	76.690.000	140 buah	175.000.000
		Jumlah kecamatan yang difasilitasi Lembaga ekonomi masyarakat-nya			21 kecamatan		21 kecamatan	
2.7.2.7.2.7.1.1.21.207.4	Fasilitasi Kegiatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah kelembagaan TTG yang difasilitasi	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	173 buah	0	173 buah	263.000.000
2.7.2.7.2.7.1.1.21.207.5	Fasilitasi Pengembangan Swadaya Masyarakat	Jumlah desa dalam strata berkembang dan cepat berkembang yang masuk nominasi lomba desa	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	6 desa	0	6 desa	190.000.000
2.7.2.7.2.7.1.1.21.207.6	TNI Manunggal Membangun Desa	Jumlah desa yang difasilitasi kegiatan TMMD	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	3 desa	1.016.726.700	3 desa	600.000.000
2.7.2.7.2.7.1.1.21.207.7	Fasilitasi Pengembangan Sosial Budaya	Jumlah Posyandu yang berprestasi	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	6 buah	32.500.000	6 buah	432.400.000
		Jumlah masyarakat mitra P2MBG			50 orang		50 orang	
		Jumlah satgas adat istiadat yang terbentuk			5 buah		5 buah	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
			Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
2.7.2.7.2.7.1.1.22.207	Program Pembinaan Pemerintahan dan Kelembagaan Desa	Persentase pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa			100 %	526.574.900		100 %	1.633.000.000
		Persentase Kecamatan yang selesai dipetakan batas desanya			4.76 %		4.76 %		
		Persentase LKD (LPM, Karangtaruna, PKK, RT, RW dan POSYANDU) berprestasi			0.54 %		0.54 %		
		Persentase pemutakhiran data-data desa dan kelurahan			48.39 %		48.39 %		
2.7.2.7.2.7.1.1.22.207.1	Fasilitasi dan Pembinaan Aparatur Pemerintahan Desa	Jumlah desa yang terfasilitasi kegiatan pengisian Kepala Desa, perangkat desa dan BPD serta penanganan kasus-nya	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Kabupaten Magelang	367 desa	154.040.000		367 desa	400.000.000
2.7.2.7.2.7.1.1.22.207.2	Fasilitasi Penegasan Batas Desa	Jumlah kecamatan yang selesai dipetakan Batas Desa-nya	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	kecamatan di Kabupaten Magelang	1 kecamatan	0		1 kecamatan	73.000.000
2.7.2.7.2.7.1.1.22.207.3	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Kemasyarakatan Desa	Jumlah LKD (LPM, Karang taruna, RT, RW) yang berprestasi	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Kabupaten Magelang	6 buah	372.534.900		6 buah	800.000.000
		Jumlah PKK aktif yang dibina			21 Desa/Kec		21 Desa/Kec		
2.7.2.7.2.7.1.1.22.207.4	Fasilitasi Pengisian Data Informasi Desa	Jumlah data informasi desa yang dimutakhirkan	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Kabupaten Magelang	180 desa/kel	0		180 desa/kel	360.000.000
		Jumlah monitoring dan evaluasi pencapaian IDM			4 kali		4 kali		
		Jumlah laporan pendataan IDM			1 dokumen		1 dokumen		

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
			Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
2.7.2.7.2.7.1.1.23.207	Program Perencanaan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa	Persentase pemenuhan perencanaan desa tepat waktu			100 %	5.037.455.099		100 %	510.000.000
		Persentase desa yang difasilitasi pengelolaan keuangannya			100 %		100 %		
		Persentase desa yang akurat dan tertib administrasi pengelolaan aset desa nya			40,87 %		40,87 %		
2.7.2.7.2.7.1.1.23.207.1	Penguatan dan Pengembangan Perencanaan Pembangunan Desa	Jumlah desa yang menyusun RPJMDesa tepat waktu	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Dispermades Kab. Magelang	0 desa	82.750.000		0 desa	165.000.000
		Jumlah desa yang menyusun RKPDesa tepat waktu			367 desa		367 desa		
		Jumlah fasilitasi kawasan pedesaan			1 kawasan pedesaan		1 kawasan pedesaan		
2.7.2.7.2.7.1.1.23.207.2	Fasilitasi, pembinaan, monitoring dan evaluasi bantuan keuangan kepada desa	Jumlah desa yang difasilitasi pengelolaan keuangan-nya	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Dispermades Kab. Magelang	367 desa	4.954.705.099		367 desa	225.000.000
2.7.2.7.2.7.1.1.23.207.3	Fasilitasi, pembinaan, monitoring dan evaluasi aset desa	Jumlah desa yang akurat dan tertib administrasi pengelolaan aset desa-nya	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Dispermades Kab. magelang	150 desa	0		150 desa	120.000.000
Total						7.340.924.412			5.146.400.000

PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH

KABUPATEN MAGELANG

TAHUN 2021

Nama Perangkat Daerah : DINAS PERHUBUNGAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar				23.668.155.630			51.927.571.000
2.9	Perhubungan				23.668.155.630			51.927.571.000
2.9.2.9.2.9.1.1.7.209	Program Manajemen Administrasi Pelayanan Umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah			50 %	1.047.233.180	50 %	2.729.588.000
2.9.2.9.2.9.1.1.7.209.1	Pengelolaan Surat Menyurat, Kearsipan dan Bahan Pustaka	Jumlah surat yang dikelola Jumlah arsip yang dikelola	DINAS PERHUBUNGAN	Dinas Perhubungan	6400 surat 2 arsip yang dikelola	50.993.180	6400 surat 2 arsip yang dikelola	107.757.000
2.9.2.9.2.9.1.1.7.209.2	Penyelenggaraan Koordinasi dan Konsultasi Perangkat Daerah	Jumlah perjalanan dinas luar daerah yang terlaksana Jumlah rapat koordinasi yang diselenggarakan Jumlah perjalanan dinas dalam daerah yang terlaksana	DINAS PERHUBUNGAN	DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN MAGELANG	250 kali 0 kali 377 kali	90.000.000	250 kali 0 kali 377 kali	302.500.000
2.9.2.9.2.9.1.1.7.209.3	Pengadaan dan Pengelolaan Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya	Jumlah paket pengadaan peralatan gedung kantor Jumlah paket pengadaan perlengkapan gedung kantor	DINAS PERHUBUNGAN	Kecamatan Mungkid	1 paket 1 paket	0	1 paket 1 paket	365.681.000

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
2.9.2.9.2.9.1.1.7.209.4	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya	Luas gedung yang dipelihara	DINAS PERHUBUNGAN	Kec. Mungkid	57633 m2	450.000.000		57633 m2	672.260.000
		Jumlah Rekening Jasa Telfon yang terbayar			3 rekening			3 rekening	
		Jumlah Rekening Jasa Listrik yang terbayar			9 rekening			9 rekening	
		Jumlah Rekening Jasa Air yang terbayar			6 rekening			6 rekening	
		Jumlah surat kabar yang terbayar			2 surat kabar			2 surat kabar	
		Jumlah Rekening Jasa Internet yang terbayar			1 rekening			1 rekening	
		Jumlah gedung kantor yang dipelihara			1 paket			1 paket	
		Jumlah tenaga harlep			7 Harlep			7 Harlep	
		Jumlah alat listrik dan kebersihan			1 paket			1 paket	
2.9.2.9.2.9.1.1.7.209.5	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya	Jumlah peralatan kantor yang dipelihara	DINAS PERHUBUNGAN	Kecamatan Mungkid	1 paket	315.000.000		1 paket	433.071.000
		Jumlah perlengkapan kantor yang dipelihara			1 paket			1 paket	
		Jumlah kendaraan roda dua yang dipelihara			25 kendaraan			25 kendaraan	
		Jumlah kendaraan roda empat yang dipelihara			8 kendaraan			8 kendaraan	
2.9.2.9.2.9.1.1.7.209.6	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya	Jumlah paket rehabilitasi sedang / berat gedung kantor	DINAS PERHUBUNGAN	Kec. Mungkid	0 paket	0		0 paket	401.554.000
		Jumlah paket rehabilitasi sedang/berat terminal			0 paket			0 paket	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
2.9.2.9.2.9.1.1.7.209.7	Peningkatan Kapasitas dan Disiplin Aparatur Sipil Negara	Frekuensi pembinaan ASN	DINAS PERHUBUNGAN	Kecamatan Mungkid	6 kali	141.240.000		6 kali	446.765.000
		Jumlah ASN yang dibina			85 pegawai			85 pegawai	
		Jumlah tenaga honorer/kontrak			39 Harlep/SS			39 Harlep/SS	
		Jumlah seragam dan atribut ASN yang disediakan			85 set			85 set	
		Jumlah JFT yang terfasilitasi penilaian angka kreditnya			7 JFT			7 JFT	
2.9.2.9.2.9.1.1.8.209	Program Perencanaan, Keuangan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian perencanaan, evaluasi kinerja OPD dan keuangan perangkat daerah			50.00 %	210.258.720		50.00 %	297.943.000
2.9.2.9.2.9.1.1.8.209.1	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah kegiatan yang dikelola	DINAS PERHUBUNGAN	Kecamatan Mungkid	25 kegiatan	170.559.800		25 kegiatan	177.943.000
2.9.2.9.2.9.1.1.8.209.2	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen renja perangkat daerah yang tersusun	DINAS PERHUBUNGAN	Kecamatan Mungkid	2 dokumen	10.000.000		2 dokumen	50.000.000
		Jumlah dokumen renstra perangkat daerah yang tersusun			1 dokumen			1 dokumen	
2.9.2.9.2.9.1.1.8.209.3	Penyusunan Laporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen pelaporan bulanan dan tahunan yang tersusun	DINAS PERHUBUNGAN	Kecamatan Mungkid	13 dokumen	29.698.920		13 dokumen	50.000.000
		Jumlah dokumen monitoring, evaluasi dan pelaporan tribulanan yang tersusun			12 dokumen			12 dokumen	
		Jumlah dokumen profil Perangkat Daerah yang tersusun			1 Dokumen			1 Dokumen	
2.9.2.9.2.9.1.1.8.209.4	Penyusunan Dokumen Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Perangkat Daerah	Jumlah SOP yang tersusun	DINAS PERHUBUNGAN	Kecamatan Mungkid	1 dokumen	0		1 dokumen	20.000.000
		Jumlah dokumen pengendalian internal yang tersusun			1 dokumen			1 dokumen	
2.9.2.9.2.9.1.1.17.209	Program peningkatan pelayanan angkutan	Persentase layanan uji kendaraan bermotor wajib uji			91,70 PERSEN	828.538.920		91,70 PERSEN	8.575.000.000

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
2.9.2.9.2.9.1.1.17.209.26	Uji Kelayakan Sarana Transportasi Guna Keselamatan Penumpang	Jumlah bukti lulus uji	DINAS PERHUBUNGAN	Kecamatan Mungkid	12000 set	770.698.920	12000 set	8.500.000.000
		Pengadaan mobil uji keliling			0 kendaraan		0 kendaraan	
		Pembangunan Gedung Uji			0 paket		0 paket	
		Jumah dokumen FS			0 dokumen		0 dokumen	
		Jumlah dokumen appraisal harga tanah lokasi gedung uji			0 dokumen		0 dokumen	
		Jumlah dokumen DED			1 dokumen		1 dokumen	
		Jumlah dokumen Andalalin			1 dokumen		1 dokumen	
		Pengadaan tanah gedung uji			0 paket		0 paket	
2.9.2.9.2.9.1.1.17.209.27	Pemeliharaan dan Pengadaan Alat Uji Kendaraan Bermotor	Jumlah pemeliharaan alat uji dan pengadaan alat uji	DINAS PERHUBUNGAN	Kecamatan Mungkid	12 alat uji	57.840.000	12 alat uji	75.000.000
2.9.2.9.2.9.1.1.22.209	Program Pengembangan Jaringan Prasarana Angkutan Jalan	Persentase ketersediaan prasarana angkutan jalan			85,82 PERSEN	1.026.746.760	85,82 PERSEN	2.050.000.000
2.9.2.9.2.9.1.1.22.209.1	Pemeliharaan dan Pengembangan Prasarana Sarana Perhubungan	Jumlah halte yang terbangun	DINAS PERHUBUNGAN	Kecamatan mungkid	1 halte	0	1 halte	200.000.000
		Jumlah halte yang dipelihara			2 halte		2 halte	
2.9.2.9.2.9.1.1.22.209.2	Pengelolaan Parkir	Jumlah titik parkir yang dikelola	DINAS PERHUBUNGAN	Kabupaten Magelang	250 titik	291.746.760	250 titik	300.000.000
2.9.2.9.2.9.1.1.22.209.3	Survey Potensi Parkir	Jumlah dokumen survey potensi parkir	DINAS PERHUBUNGAN	Kabupaten Magelang	1 dokumen	0	1 dokumen	50.000.000
2.9.2.9.2.9.1.1.22.209.4	Peningkatan Pengelolaan Terminal Angkutan Darat	Jumlah terminal yang dikelola	DINAS PERHUBUNGAN	Kabupaten Magelang	6 unit	735.000.000	6 unit	500.000.000
2.9.2.9.2.9.1.1.22.209.5	Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal Angkutan Darat	Jumlah terminal yang dibangun / dikembangkan	DINAS PERHUBUNGAN	Kabupaten Magelang	1 lokasi	0	1 lokasi	1.000.000.000

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
2.9.2.9.2.9.1.1.23.209	Program Peningkatan Pengamanan dan Keselamatan Lalu Lintas	Persentase ketersediaan fasilitas perlengkapan jalan pendukung pengamanan dan keselamatan lalu lintas			69,24 PERSEN	20.555.378.050		69,24 PERSEN	38.275.040.000
		Persentase masyarakat sadar bidang keselamatan berlalu lintas			55,73 PERSEN		55,73 PERSEN		
2.9.2.9.2.9.1.1.23.209.1	Pengamanan Lalu Lintas untuk Acara Tertentu	Jumlah pelaksanaan penilaian wahana tata nugraha	DINAS PERHUBUNGAN	Kecamatan Mungkid, Kecamatan Muntilan	1 kali	15.000.000		1 kali	190.000.000
		Jumlah Pengamanan Tamu Pemda &CFD;			76 kali		76 kali		
2.9.2.9.2.9.1.1.23.209.2	Pengembangan Pelayanan Angkutan	Jumlah trayek yang ditata	DINAS PERHUBUNGAN	Kabupaten magelang	2 trayek	40.000.000		2 trayek	225.000.000
		Jumlah pembinaan angkutan orang			2 kali		2 kali		
		Jumlah dokumen profil perhubungan			1 dokumen		1 dokumen		
2.9.2.9.2.9.1.1.23.209.3	Pembayaran Rekening LPJU	Jumlah rekening PJU yang terbayarkan	DINAS PERHUBUNGAN	Kabupaten Magelang	3 rayon	18.563.724.000		3 rayon	19.000.800.000
2.9.2.9.2.9.1.1.23.209.4	Pengelolaan LPJU	Jumlah PJU yang terbangun	DINAS PERHUBUNGAN	Kabupaten Magelang	443 titik	1.087.572.000		443 titik	14.398.029.000
		Jumlah Pemeliharaan LPJU			3000 titik		3000 titik		
		Jumlah meterisasi			1 paket		1 paket		
2.9.2.9.2.9.1.1.23.209.5	Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perlengkapan Jalan	Jumlah ITS yang terbangun	DINAS PERHUBUNGAN	Kabupaten Magelang	0 titik	200.000.000		0 titik	3.500.000.000
		Jumlah rambu yang terbangun			70 buah		70 buah		
		Jumlah Guardrail yang terbangun			600 meter		600 meter		
		Jumlah Marka Jalan yang terbangun			3908 meter		3908 meter		
		Jumlah Zebra Cross yang Terbangun			10 lokasi		10 lokasi		
		Jumlah APILL yang terpelihara			18 buah		18 buah		

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
2.9.2.9.2.9.1.1.23.209.6	Peningkatan Keselamatan LLAJ	Jumlah bimbingan dan penyuluhan bidang keselamatan lalu lintas untuk angkutan umum	DINAS PERHUBUNGAN	Kabupaten Magelang	40 peserta	634.082.050	40 peserta	911.211.000
		Jumlah bimbingan dan penyuluhan bidang keselamatan lalu lintas untuk pelajar			70 peserta		70 peserta	
		Jumlah operasi laik jalan			48 kali		48 kali	
		Jumlah posko angkutan lebaran, natal & tahun baru			2 kali		2 kali	
		Jumlah Bus Angkutan Mudik Lebaran Gratis			3 unit		3 unit	
		Jumlah timbangan portable yang terbeli			0 buah		0 buah	
2.9.2.9.2.9.1.1.23.209.7	Fasilitasi Koordinasi LLAJ	Jumlah koordinasi dan pelaksanaan Forum LLAJ	DINAS PERHUBUNGAN	Kabupaten Magelang	2 kali	15.000.000	2 kali	50.000.000
Total						23.668.155.630		51.927.571.000

PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH

KABUPATEN MAGELANG

TAHUN 2021

Nama Perangkat Daerah : DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar				5.711.704.810			13.038.230.000
2.10	Komunikasi dan Informatika				4.942.403.810			11.188.230.000
2.10.2.10.2.10.1.1.7.210	Program Manajemen Administrasi Pelayanan Umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah			100 %	505.424.000	100 %	1.205.000.000
2.10.2.10.2.10.1.1.7.210.1	Pengelolaan Surat Menyurat, Kearsipan dan Bahan Pustaka	Jumlah surat yang dikelola	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Diskominfo	1600 surat	22.225.000	1600 surat	45.000.000
2.10.2.10.2.10.1.1.7.210.2	Penyelenggaraan Koordinasi dan Konsultasi Perangkat Daerah	Jumlah perjalanan dinas luar daerah yang terlaksana	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Diskominfo	75 kali	68.600.000	75 kali	215.000.000
		Jumlah perjalanan dinas dalam daerah yang terlaksana			320 kali		320 kali	
		Jumlah rapat koordinasi yang diselenggarakan			35 kali		35 kali	
2.10.2.10.2.10.1.1.7.210.3	Pengadaan dan Pengelolaan Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya	Jumlah paket pengadaan perlengkapan gedung kantor	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Diskominfo	0 paket	0	0 paket	370.000.000
		Jumlah paket pengadaan peralatan gedung kantor			1 paket		1 paket	
2.10.2.10.2.10.1.1.7.210.4	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya	Luas gedung kantor yang dipelihara	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Diskominfo	2500 M2	206.339.000	2500 M2	260.000.000
		Jumlah rekening air, listrik, telepon, dan surat kabar			48 rekening bulan		48 rekening bulan	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
2.10.2.10.2.10.1.1.7.210.5	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya	Jumlah peralatan yang dipelihara	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Diskominfo	1 paket alat	208.260.000		1 paket alat	315.000.000
		Jumlah perlengkapan yang dipelihara			5 jenis			5 jenis	
		Jumlah kendaraan dinas roda empat yang dipelihara			4 buah			4 buah	
		Jumlah kendaraan dinas roda dua yang dipelihara			12 buah			12 buah	
2.10.2.10.2.10.1.1.8.210	Program Perencanaan, Keuangan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian perencanaan, evaluasi kinerja OPD, dan keuangan perangkat daerah			100 %	75.052.000		100 %	135.000.000
2.10.2.10.2.10.1.1.8.210.1	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah kegiatan yang dikelola	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Diskominfo	22 kegiatan	65.987.000		22 kegiatan	75.000.000
		Jumlah laporan keuangan yang tersusun			8 dokumen			8 dokumen	
2.10.2.10.2.10.1.1.8.210.2	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Renstra Perangkat Daerah yang tersusun	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Diskominfo	1 dokumen	4.925.000		1 dokumen	10.000.000
		Jumlah dokumen Renja Perangkat Daerah yang tersusun			2 dokumen			2 dokumen	
2.10.2.10.2.10.1.1.8.210.3	Penyusunan Laporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen pelaporan tahunan yang tersusun	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Diskominfo	4 dokumen	4.140.000		4 dokumen	10.000.000
		Jumlah dokumen monitoring , evaluasi, dan pelaporan tribulanan yang tersusun			2 dokumen			2 dokumen	
		Jumlah dokumen pelaporan bulanan yang tersusun			1 dokumen			1 dokumen	
		Jumlah dokumen evaluasi jangka menengah yang tersusun			1 dokumen			1 dokumen	
		Jumlah dokumen profil Perangkat Daerah yang tersusun			1 Dokumen			1 Dokumen	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
2.10.2.10.2.10.1.1.8.210.4	Penyusunan Dokumen Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Perangkat Daerah	Jumlah Standar Operasional Prosedur yang tersusun	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Diskominfo	4 SOP	0	4 SOP	40.000.000
		Jumlah dokumen data perangkat daerah yang tersusun			0 dokumen		0 dokumen	
2.10.2.10.2.10.1.1.19.210	Program Pengembangan Sarana Prasarana Teknologi Informasi dan Komunikasi	Cakupan PD dan Desa/Kelurahan terfasilitasi jaringan komunikasi data yang optimal dan stabil			60.19 PERSEN	2.851.111.000	60.19 PERSEN	5.353.230.000
		Cakupan Layanan Komunikasi			77 PERSEN		77 PERSEN	
2.10.2.10.2.10.1.1.19.210.1	Layanan pengelolaan akses internet, intranet dan interkoneksi jaringan intra pemerintah daerah dan perbaikan peralatan operasional sarana TIK	OPD, unit kerja OPD, dan Desa/Kelurahan terfasilitasi jaringan komunikasi data yang optimal dan stabil	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Diskominfo	257 SKPD dan Desa	2.851.111.000	257 SKPD dan Desa	4.553.230.000
		Jumlah bandwidth internet yang disalurkan			700 Mbps		700 Mbps	
2.10.2.10.2.10.1.1.19.210.2	Layanan infrastruktur dasar data center, disaster recovery center dan TIK center	Jumlah Layanan Data Center, Disaster Recovery Center dan Infrastruktur TIK	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Diskominfo	3 paket layanan	0	3 paket layanan	600.000.000
2.10.2.10.2.10.1.1.19.210.3	Pengelolaan penarikan retribusi pengendalian dan pengawasan menara telekomunikasi	Jumlah layanan komunikasi dan pengelolaan menara telekomunikasi	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Diskominfo	223 menara telekomunikasi	0	223 menara telekomunikasi	200.000.000
		Jumlah provider menara yang retribusinya terpungut			15 provider		15 provider	
2.10.2.10.2.10.1.1.21.210	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Persentase urusan yang terintegrasi dalam pengelolaan BIG DATA			50 %	292.443.000	50 %	445.000.000
		Persentase layanan domain dan subdomain pemerintah			20.68 %		20.68 %	
		Persentase ketersediaan dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja pengelolaan TIK			100 %		100 %	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
2.10.2.10.2.10.1.1.21.210.1	Fasilitasi pengelolaan aplikasi SKPD	Jumlah aplikasi SKPD dan desa yang terfasilitasi	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Diskominfo	8 Aplikasi	292.443.000	8 Aplikasi	350.000.000
		Jumlah ketersediaan dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja pengelolaan TIK			2 dokumen		2 dokumen	
2.10.2.10.2.10.1.1.21.210.2	Penyelenggaraan ekosistem TIK	Jumlah SKPD dan desa yang menggunakan domain dan sub domain	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Diskominfo	29 SKPD dan Desa	0	29 SKPD dan Desa	95.000.000
		Jumlah desa yang potensinya terupdate dalam aplikasi Jelajah Magelang			165 Desa		165 Desa	
		Jumlah dokumen penilaian mandiri indeks SPBE yang disusun			1 dokumen		1 dokumen	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
2.10.2.10.2.10.1.1.23.210	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase layanan website PD dan Desa yang memenuhi kriteria		26.45 %	1.218.373.810		26.45 %	4.050.000.000
		Cakupan diseminasi informasi melalui media massa		100 %		100 %		
		Cakupan diseminasi informasi melalui media pertunjukan rakyat		100 %		100 %		
		Cakupan diseminasi informasi melalui media interpersonal		100 %		100 %		
		Cakupan diseminasi informasi melalui media luar ruang		100 %		100 %		
		Cakupan diseminasi informasi melalui media baru portal berita daerah		100 %		100 %		
		Cakupan Pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di tingkat kecamatan		100 %		100 %		
		Cakupan Konten Literasi TIK yang ramah anak, wanita, disabilitas dan pelajar		66.67 %		66.67 %		
2.10.2.10.2.10.1.1.23.210.1	Sosialisasi ketentuan di bidang cukai tembakau	Jumlah Diseminasi dan Distribusi Informasi Ketentuan Dibiidang Cukai Tembakau	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Diskominfo	4 kali	75.000.000	4 kali	100.000.000

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
2.10.2.10.2.10.1.1.23.210.2	Pengelolaan diseminasi informasi melalui media masa	Pengelolaan siaran LPPL Radio Gemilang	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Diskominfo	19 jam/hari	831.270.000	19 jam/hari	2.450.000.000
		Jumlah diseminasi dan distribusi informasi melalui media radio			6 kegiatan		6 kegiatan	
		Jumlah diseminasi dan distribusi informasi melalui media cetak Majalah Suara Gemilang			18000 eksemplar		18000 eksemplar	
		Jumlah diseminasi informasi melalui media televisi			10 siaran		10 siaran	
		Jumlah portal berita daerah beritamagelang.id			2190 berita		2190 berita	
		Jumlah layanan pengaduan Pemerintah Kabupaten Magelang			10 siaran		10 siaran	
2.10.2.10.2.10.1.1.23.210.3	Diseminasi informasi melalui media publik	Jumlah diseminasi dan distribusi informasi melalui media luar ruang	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Diskominfo	12 kali	312.103.810	12 kali	900.000.000
		Jumlah diseminasi dan distribusi informasi melalui media pertunjukan rakyat			12 kali		12 kali	
		Jumlah penyebarluasan Informasi yang bersifat penyuluhan melalui media interpersonal atau Wahana Komunikasi Masyarakat			12 kali		12 kali	
2.10.2.10.2.10.1.1.23.210.4	Fasilitasi pengelolaan layanan keterbukaan informasi publik	Jumlah website SKPD dan desa /kelurahan yang mendapat kriteria cukup informatif	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Diskominfo	72 SKPD dan desa/kelurahan	0	72 SKPD dan desa/kelurahan	600.000.000
		Jumlah pengembangan aplikasi monografi kelurahan dan desa, dan website portal informasi			2 aplikasi		2 aplikasi	
		Jumlah pengembangan dan pemberdayaan KIM			22 KIM		22 KIM	
2.14	Komunikasi dan Informatika				284.226.000			1.100.000.000

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
2.14.2.14.2.10.1.1.17.214	Program Pengelolaan dan Pengembangan Statistik	Persentase ketersediaan data statistik sektoral			100 %	284.226.000	100 %	1.100.000.000
		Persentase data statistik sektoral yang terintegrasi dalam sistem informasi			100 %		100 %	
2.14.2.14.2.10.1.1.17.214.1	Penyusunan dokumen statistik sektoral	Jumlah buku statistik daerah yang tersusun	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Diskominfo	9 jenis buku	284.226.000	9 jenis buku	750.000.000
2.14.2.14.2.10.1.1.17.214.2	Koordinasi pengintegrasian data tingkat Kabupaten	Jumlah data yang terintegrasi	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Diskominfo	60 data SKPD	0	60 data SKPD	350.000.000
2.15	Komunikasi dan Informatika					485.075.000		750.000.000
2.15.2.15.2.10.1.1.15.215	Program Persandian	Persentase PD yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi Perangkat Daerah			20 %	485.075.000	20 %	750.000.000

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
2.15.2.15.2.10.1.1.15.215.1	Pengelolaan persandian dan telekomunikasi	Jumlah sarana dan prasarana persandian dan telekomunikasi	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Diskominfo	2 paket	485.075.000	2 paket	750.000.000
		Jumlah peralatan sandi, berita sandi dan berita telekomunikasi kedinasan yang terkelola			31800 berita dan telepon		31800 berita dan telepon	
		Jumlah pemeliharaan dan perbaikan infrastruktur jaringan telepon pemda kabupaten Magelang			1 paket		1 paket	
		Jumlah Perangkat Daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi Perangkat Daerah			12 SKPD		12 SKPD	
		Jumlah peraturan tentang tata kelola keamanan informasi			1 Peraturan		1 Peraturan	
		Prosentase sistem elektronik yang sudah diidentifikasi kerentanan dan resikonya sesuai SOP			100 %		100 %	
		Prosentase pengguna layanan Command Center Kabupaten Magelang			100 %		100 %	
Total					5.711.704.810		13.038.230.000	

PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH

KABUPATEN MAGELANG

TAHUN 2021

Nama Perangkat Daerah : DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar				2.047.574.000			10.732.300.000
2.11	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah				2.047.574.000			10.732.300.000
2.11.2.11.2.11.1.1.7.211	Program Manajemen Administrasi Pelayanan Umum dan Kepegawaian	Cakupan Pelayanan Umum			100 %	1.336.874.000	100 %	5.402.300.000
2.11.2.11.2.11.1.1.7.211.1	Pengelolaan Surat Menyurat, Kearsipan dan Bahan Pustaka	Jumlah surat yang dikelola jumlah kebutuhan barang cetakan pelayanan kantor	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	Jl. Soekarno- Hatta Kota Mungkid	2800 surat 1 paket	60.000.000	2800 surat 1 paket	75.000.000
2.11.2.11.2.11.1.1.7.211.2	Penyelenggaraan Koordinasi dan Konsultasi Perangkat Daerah	Jumlah perjalanan dinas luar daerah yang terlaksananya Jumlah rapat koordinasi yang di selenggarakan Jumlah perjalanan dinas dalam daerah	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	Jl Soekarno- Hatta Kota Mungkid	87 kali 36 kali 155 kali	300.000.000	87 kali 36 kali 155 kali	440.000.000
2.11.1.1.7.211.2.1	Penyelenggaraan Koordinasi dan Konsultansi Perangkat Daerah		MUNGKID, SAWITAN	Jl. Soekarno- Hatta	103 kali	220.000.000		222.420.000
2.11.2.11.2.11.1.1.7.211.3	Pengadaan dan Pengelolaan Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya	Jumlah paket pengadaan perlengkapan gedung kantor Jumlah paket pengadaan peralatan gedung kantor Pengelolaan aset	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	Jl Soekarno- Hatta Kota Mungkid	2 Paket 3 Paket 2 Gedung	0	2 Paket 3 Paket 2 Gedung	1.057.300.000

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
			Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
2.11.2.11.2.11.1.1.7.211.4	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	Jl Soekarno- Hatta Kota Mungkid	17 Kantor dan Pasar	396.874.000		17 Kantor dan Pasar	1.660.000.000
		Jumlah rekening atau tagihan yang dibayar			12 Bulan			12 Bulan	
2.11.2.11.2.11.1.1.7.211.5	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya	Jumlah peraltan yang dipelihara	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	Jl Soekarno- Hatta Kota Mungkid	2 aplikasi siHati	580.000.000		2 aplikasi siHati	1.170.000.000
		Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara			43 kendaraan			43 kendaraan	
2.11.2.11.2.11.1.1.7.211.6	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya	Jumlah gedung yang direhabilitasi	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	Jl Soekarno- Hatta Kota Mungkid	1 gedung	0		1 gedung	700.000.000
2.11.2.11.2.11.1.1.7.211.7	Peningkatan Kapasitas dan Disiplin Aparatur Sipil Negara	Jumlah tenaga kontrak	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	Jl Soekarno- Hatta Kota Mungkid	1 orang	0		1 orang	300.000.000
		Jumlah sporting Staff Program			1 Orang			1 Orang	
2.11.2.11.2.11.1.1.8.211	Program Perencanaan, Keuangan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian perencanaan, evaluasi kinerja OPD dan Keuangan perangkat daerah			100 %	120.396.000		100 %	167.000.000
2.11.2.11.2.11.1.1.8.211.1	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah kegiatan yang dikelola	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	Jl Soekarno- Hatta Kota Mungkid	1 kegiatan	80.396.000		1 kegiatan	117.000.000
		Jumlah laporan keuangan yang tersusun			12 Laporan			12 Laporan	
2.11.2.11.2.11.1.1.8.211.2	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Renstra	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	Jl Soekarno- Hatta Kota Mungkid	0 Dokumen	20.000.000		0 Dokumen	25.000.000
		Jumlah dokumen renja Perangkat Daerah Yang tersusun			1 Dokumen			1 Dokumen	
		Jumlah Dokumen tahunan yang tersusun			5 Dokumen			5 Dokumen	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
2.11.2.11.2.11.1.1.8.211.3	Penyusunan Laporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen monitoring evaluasi tribulanan yang tersusun	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	Jl Soekarno- Hatta Kota Mungkid	4 laporan	20.000.000		4 laporan	25.000.000
		Jumlah dokumen pelaporan bulanan yang tersusun			1 laporan			1 laporan	
		jumlah dokumen tahunan yang tersusun			1 dokumen			1 dokumen	
2.11.2.11.2.11.1.1.8.211.4	Penyusunan Dokumen Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen SOP yang tersusun	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	Jl Soekarno- Hatta Kota Mungkid	0 SOP	0		0 SOP	0
2.11.2.11.2.11.1.1.18.211	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	cakupan peningkatan kualitas kelembagaan koperasi			78,13 PERSEN	290.304.000		78,13 PERSEN	632.000.000
2.11.2.11.2.11.1.1.18.211.19	Pengawasan Koperasi	Jumlah koperasi yang terawasi	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	Jl Soekarno- Hatta Kota Mungkid	55 koperasi	100.000.000		55 koperasi	122.000.000
2.11.2.11.2.11.1.1.18.211.20	Peningkatan Kualitas Kelembagaan dan daya saing Koperasi	Jumlah pengelola koperasi yang meningkat kompetensinya	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	Jl Soekarno- Hatta Kota Mungkid	5 orang	190.304.000		5 orang	350.000.000
		jumlah pengelola koperasi yang meningkat kapasitasnya			125 orang			125 orang	
2.11.2.11.2.11.1.1.18.211.21	Peningkatan dan Pengembangan Jaringan Kerjasama Usaha Koperasi	Jumlah jaringan kerjasama usaha koperasi yang terbentuk	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	Jl Soekarno- Hatta Kota Mungkid	30 koperasi	0		30 koperasi	160.000.000
2.11.2.11.2.11.1.1.19.211	Program Pemberdayaan Usaha Mikro	cakupan pemberdayaan usaha mikro			0,73 %	300.000.000		0,73 %	4.531.000.000

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
2.11.2.11.2.11.1.1.19.211.1	Pembinaan dan Penataan Pedagang Kaki Lima dan Asongan	Jumlah Pedagang Kaki Lima yang terbina dan tertata	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	Jl Soekarno- Hatta Kota Mungkid	140 orang	0		140 orang	3.116.000.000
		Jumlah Area Pedagang Kaki Lima yang terbangun			2 lokasi			2 lokasi	
		Pengadaan tanah untuk Lokasi PKL dan Asongan baru			1 lokasi			1 lokasi	
		Jumlah pedagang asongan yang terbina			200 orang			200 orang	
2.11.2.11.2.11.1.1.19.211.2	Pengembangan Kemitraan dan Fasilitasi Promosi Produk UMKM	Jumlah Kemitraan yang terjalin	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	Jl Soekarno- Hatta Kota Mungkid	205 UMKM	0		205 UMKM	500.000.000
		Jumlah penyelenggaraan mengikuti Jawa Tengah Fair			1 kali			1 kali	
2.11.2.11.2.11.1.1.19.211.3	Peningkatan Kapasitas SDM dan Sarana Prasarana bagi Usaha Mikro	Jumlah fasilitasi hibah bansos	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	Jl Soekarno- Hatta Kota Mungkid	200 UMKM	200.000.000		200 UMKM	450.000.000
		Jumlah pelaku usaha yang meningkatkan kapasitasnya			225 umkm			225 umkm	
2.11.2.11.2.11.1.1.19.211.4	Penguatan Kelembagaan dan Legalitas Usaha	Jumlah fasilitasi perijinan	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	Jl Soekarno- Hatta Kota Mungkid	30 UMKM	100.000.000		30 UMKM	165.000.000
		jumlah UM yang dibina			50 UM			50 UM	
2.11.2.11.2.11.1.1.19.211.5	Penguatan Ekonomi Masyarakat untuk Penanggulangan Kemiskinan	Jumlah warga miskin yang terlatih	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	Jl Soekarno- Hatta Kota Mungkid	160 warga miskin	0		160 warga miskin	300.000.000
		Jumlah warga miskin yang mendapat bantuan			80 warga miskin			80 warga miskin	
3	Urusan Pilihan					7.098.340.375			21.788.076.100
3.6	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah					7.098.340.375			21.788.076.100

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
3.6.3.6.2.11.1.1.21.306	Program Peningkatan dan Pengembangan Perdagangan	Peningkatan pertumbuhan ekspor barang non migas			3% %	420.000.000		3% %	1.400.000.000
		fluktuasi harga bapok (10 komoditas):beras,minyak goreng,gula pasir, cabe merah keriting, cabe rawit merah,daging sapi,daging ayam ras,telur ayam ras,bawang merah,terigu			<10% %			<10% %	
		Persentase pengawasan perdagangan sesuai dengan ketentuan			80 %			80 %	
3.6.3.6.2.11.1.1.21.306.3	Pengawasan dan Pengembangan Distribusi Perdagangan	Jumlah frekwensi pengawasan barang kena cukai yang dikendalikan peredarannya(minol dan rokok)	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	JI Soekarno- Hatta Kota Mungkid	36 kali	300.000.000		36 kali	650.000.000
		Jumlah Frekwensi pengawasan toko modern dan waralaba			30 kali			30 kali	
		Jumlah frekwensi pengawasan tertib usaha dibidang perdagangan			42 kali			42 kali	
		Jumlah data Profil perdagangan yang tersusun			1 Dokumen			1 Dokumen	
		pelaksanaan pasar murah dan operasi pasar			30 kali			30 kali	
		jumlah KPL yang terverifikasi			106 KPL			106 KPL	
		Jumlah pserta sosialisasi pasar aman			225 orang			225 orang	
		jumlah laporan informasi harga bapokting			260 Dokumen			260 Dokumen	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
3.6.3.6.2.11.1.1.21.306.4	Pengembangan kerjasama dan promosi perdagangan	Jumlah promosi skala internasional yang diikuti	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	Jl Soekarno- Hatta Kota Mungkid	1 kali	0	1 kali	600.000.000
		Jumlah promosi skala nasional yang diikuti			1 kali		1 kali	
		Jumlah monitoring realisasi ekspor			4 kali		4 kali	
		Jumlah Fasilitasi pendampingan Design produk ekspor			20 pelaku usaha		20 pelaku usaha	
		jumlah Fasilitasi Eksportir tangguh			3 pelaku usaha		3 pelaku usaha	
		Jumlah Fasilitasi Pasar Lelang			2 Pelaku usaha		2 Pelaku usaha	
3.6.3.6.2.11.1.1.21.306.5	Pengawasan Pita Cukai Legal dan Ilegal (DBCHT)	Jumlah peserta sosialisasi cukai	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	Jl Soekarno- Hatta Kota Mungkid	200 Orang	120.000.000	200 Orang	150.000.000
		ferkuensi kampanye			2 kali		2 kali	
3.6.3.6.2.11.1.1.22.306	Program Pemberdayaan dan Penataan Pasar	Persentase pasar rakyat dengan sarana prasarana dan pengelolaan yang baik			86 %	6.383.340.375	86 %	18.938.076.100
3.6.3.6.2.11.1.1.22.306.1	Peningkatan sarana dan prasarana pasar	Jumlah pasar yang direhab	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	Jl Soekarno- Hatta Kota Mungkid	3 Pasar	5.228.340.375	3 Pasar	16.297.421.100
		Jumlah dokumen DED pasar yang tersusun			1 Dokumen		1 Dokumen	
		Jumlah Pemulihan lokasi pasar sementara			1 lokasi		1 lokasi	
		Jumlah UKL URL yang tersusun			3 Dokumen		3 Dokumen	
		Jumlah dokumen study kelayakan pasar yang tersusun			1 Dokumen		1 Dokumen	
		Jumlah dokumen Study amdal yang tersusun			3 Dokumen		3 Dokumen	
		Jumlah sarana perdagangan yang terbangun			3 dokumen		3 dokumen	
		Jumlah dokumen studi Andalalin yang tersusun			5 Dokumen		5 Dokumen	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
3.6.3.6.2.11.1.1.22.306.2	Pengelolaan Pendapatan Pasar	Jumlah pasar yang dikelola pendapatannya	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	Jl Soekarno- Hatta Kota Mungkid	14 pasar	180.000.000		14 pasar	300.000.000
3.6.3.6.2.11.1.1.22.306.3	Pemberdayaan Pasar	Penataan Pedagang pasar	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	Jl Soekarno- Hatta Kota Mungkid	3 Pasar	975.000.000		3 Pasar	840.655.000
		Penertiban terpadu lingkungan pasar			14 Pasar			14 Pasar	
		Pemberdayaan para pihak terkait pasar			1 pasar			1 pasar	
		Pendataan Pasar			1 Pasar			1 Pasar	
3.6.3.6.2.11.1.1.22.306.4	Pembangunan Pasar (DAK)	Jumlah pasar rakyat yang terevitalisasi dana APBN	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	Jl Soekarno- Hatta Kota Mungkid	1 unit	0		1 unit	1.500.000.000
3.6.3.6.2.11.1.1.23.306	Program Peningkatan dan Pengembangan Pelayanan Kemetrologian	Persentase peningkatan jumlah UTTP bertanda tera sah			58 %	295.000.000		58 %	1.450.000.000
3.6.3.6.2.11.1.1.23.306.1	Pendataan UTP Metrologi	jumlah lokasi UTP yang terdata	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	Jl Soekarno- Hatta Kota Mungkid	4 kecamatan	0		4 kecamatan	200.000.000
3.6.3.6.2.11.1.1.23.306.2	Peningkatan Pelayanan Metrologi	Jumlah pelayanan metrologi	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	Jl Soekarno- Hatta Kota Mungkid	115 -kali	295.000.000		115 -kali	500.000.000
3.6.3.6.2.11.1.1.23.306.3	Peningkatan Pengawasan Metrologi	Jumlah UTP, BDKT dan SI yang diawasi	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	Jl Soekarno- Hatta Kota Mungkid	1470 unit	0		1470 unit	300.000.000

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja
3.6.3.6.2.11.1.1.23.306.4	Fasilitasi Penilaian Metrologi	Penilaian PTU pasar tertib ukur	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	Jl Soekarno- Hatta Kota Mungkid	1 unit pasar	0	1 unit pasar	450.000.000
		Penilaian penambahan ruang lingkup			0 pelayanan		0 pelayanan	
		jumlah evaluasi kemetrolagian			1 kali		1 kali	
Total					9.145.914.375		32.520.376.100	

PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH

KABUPATEN MAGELANG

TAHUN 2021

Nama Perangkat Daerah : DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
1	2	3	4		5	6	7	8	9
2	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar					1.166.812.212			2.531.228.523
2.12	Penanaman Modal					1.166.812.212			2.531.228.523
2.12.2.12.2.12.1.1.7.212	Program Manajemen Administrasi Pelayanan Umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah	persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah			100 %	456.319.212		100 %	1.133.478.523
2.12.2.12.2.12.1.1.7.212.1	Pengelolaan Surat Menyurat, Kearsipan dan Bahan Pustaka	jumlah surat yang dikolola jumlah arsip yang dikelola	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	Jl. Soekarno Hatta No. 20 Kota Mungkid	2800 surat 11000 arsip	47.491.280		2800 surat 11000 arsip	90.583.998
2.12.2.12.2.12.1.1.7.212.2	Penyelenggaraan Koordinasi dan Konsultasi Perangkat Daerah	jumlah perjalanan luar daerah yang terlaksana jumlah rapat koordinasi yang diselenggarakan jumlah perjalanan dinas dalam daerah yang terlaksana jumlah layanan humas protokol yang dilaksanakan	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	Jl. Soekarno Hatta No. 20 Kota Mungkid	60 perjalanan dinas 12 rapat 25 perjalanan dinas 12 layanan	75.000.000		60 perjalanan dinas 12 rapat 25 perjalanan dinas 12 layanan	150.000.000

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
2.12.2.12.2.12.1.1.7.212.3	Pengadaan dan Pengelolaan Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya	jumlah paket pengadaan perlengkapan gedung kantor	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	Jl. Soekarno Hatta No. 20 Kota Mungkid	1 paket	0	1 paket	100.000.000
		jumlah paket pengadaan peralatan gedung kantor			1 paket		1 paket	
		jumlah aset yang dikelola			531 aset		531 aset	
2.12.2.12.2.12.1.1.7.212.4	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya	luas gedung kantor yang dipelihara	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	Jl. Soekarno - Hatta No. 20 Kota Mungkid	2646 m2	159.880.000	2646 m2	199.420.000
2.12.2.12.2.12.1.1.7.212.5	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya	jumlah peralatan yang dipelihara	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	Jl. Soekarno Hatta No. 20 Kota Mungkid	71 alat	173.947.932	71 alat	310.974.525
		jumlah perlengkapan yang dipelihara			131 perlengkapan		131 perlengkapan	
		jumlah kendaraan dinas roda empat yang dipelihara			3 unit		3 unit	
		jumlah kendaraan dinas roda dua yang dipelihara			11 unit		11 unit	
2.12.2.12.2.12.1.1.7.212.6	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya	jumlah paket rehabilitasi sedang / berat gedung kantor	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DPMPSTP,Jl. Soekarno Hatta No. 20 Kota Mungkid	3 paket	0	3 paket	200.000.000
2.12.2.12.2.12.1.1.7.212.7	Peningkatan Kapasitas dan Disiplin Aparatur Sipil Negara	frekuensi pembinaan ASN	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	Jl. Soekarno Hatta No. 20 Kota Mungkid	1 kali	0	1 kali	82.500.000
		jumlah ASN yang dibina			40 orang		40 orang	
		jumlah seragam dan atribut ASN yang disediakan			0 set		0 set	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
2.12.2.12.2.12.1.1.8.212	Program Perencanaan, Keuangan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	persentase ketercapaian perencanaan , evaluasi kinerja OPD, dan Kueangan perangkat daerah			100 %	61.781.000		100 %	105.000.000
2.12.2.12.2.12.1.1.8.212.1	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	jumlah kegiatan yang dikelola	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	Jl. Soekarno Hatta No. 20 Kota Mungkid	31 kegiatan	53.600.000		31 kegiatan	85.000.000
		jumlah laporan keuangan yang disusun			17 laporan			17 laporan	
2.12.2.12.2.12.1.1.8.212.2	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen renstra yang disusun	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DPMPTSP,Jl. Soekarno Hatta No. 20 Kota Mungkid	0 dokumen	4.860.000		0 dokumen	10.000.000
		jumlah dokumen Renja perangkat daerah yang disusun			2 dokumen			2 dokumen	
2.12.2.12.2.12.1.1.8.212.3	Penyusunan Laporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	jumlah dokumen tahunan yang tersusun	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DPMPTSP,Jl. Soekarno Hatta No. 20 Kota Mungkid	5 dokumen	3.321.000		5 dokumen	10.000.000
		jumlah dokumen monitoring evaluasi dan pelaporan tribulanan yang tersusun			3 dokumen			3 dokumen	
		jumlah dokumen evaluasi jangka menengah yang tersusun			2 dokumen			2 dokumen	
2.12.2.12.2.12.1.1.18.212	Program Peningkatan dan Pelayanan Investasi	Persentase realisasi investasi			61.2 PERSEN	372.462.000		61.2 PERSEN	462.750.000
2.12.2.12.2.12.1.1.18.212.1	Penyusunan Profil Potensi Investasi Unggulan Kabupaten Magelang	Frekuensi studi	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DPMPTSP Kabupaten Magelang d.a. Jl. Soekarno - Hatta nomor 20 Kota Mungkid	1 kali	0		1 kali	110.250.000
		Jumlah profil investasi yang disusun			1 paket			1 paket	
		Jumlah profil direktorinyang disusun			1 paket			1 paket	
2.12.2.12.2.12.1.1.18.212.2	Fasilitasi Promosi dan Pemasaran Potensi Investasi	frekuensi promosi	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	Jl. Soekarno Hatta No. 20 Kota Mungkid	5 kali	372.462.000		5 kali	300.000.000
		jumlah bahan sarpras promosi yang dibuat			1 paket			1 paket	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
2.12.2.12.2.12.1.1.18.212.3	Fasilitasi dan koordinasi Kerjasama bidang Investasi (CJIBF)	Frekuensi fasilitasi	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	Jl. Soekarno Hatta No. 20 Kota Mungkid	1 kali	0		1 kali	52.500.000
2.12.2.12.2.12.1.1.19.212	Program Pemantauan dan Pengendalian Investasi	Persentase pemantauan dan pengendalian investasi			0.01 PERSEN	26.250.000		0.01 PERSEN	130.000.000
2.12.2.12.2.12.1.1.19.212.1	Pengendalian, monitoring, evaluasi pelayanan perizinan dan penanganan Pengaduan	jumlah perusahaan yang dimonitor	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DPMPTSP Jln.Soekarno - Hatta No. 20 Kota Mungkid	30 perusahaan	0		30 perusahaan	50.000.000
		jumlah pengaduan yang ditangani			6 pengaduan			6 pengaduan	
2.12.2.12.2.12.1.1.19.212.2	Pengelolaan bahan dan data informasi perizinan	jumlah bahan dan data informasi perizinan yang dikelola	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DPMPTSP,Jln.Soekarno - Hatta No. 20 Kota Mungkid	65 data	26.250.000		65 data	80.000.000
		jumlah kecamatan yang disosialisasi			4 Kecamatan			4 Kecamatan	
2.12.2.12.2.12.1.1.20.212	Program Pelayanan perijinan	Persentase pelayanan perijinan			1 PERSEN	250.000.000		1 PERSEN	700.000.000
2.12.2.12.2.12.1.1.20.212.1	Fasilitasi Operasional Pelayanan Pendaftaran Perijinan	jumlah permohonan perizinan yang diterima	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DPMPTSP	4000 izin	100.000.000		4000 izin	400.000.000
2.12.2.12.2.12.1.1.20.212.2	Fasilitasi Operasional Pelayanan Penerbitan Perijinan	jumlah perizinan yang diterbitkan/ditolak	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DPMPTSP	4000 izin	150.000.000		4000 izin	300.000.000
		jumlah perijinan online non OSS			10 perijinan online non OSS			10 perijinan online non OSS	
Total						1.166.812.212			2.531.228.523

PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH

KABUPATEN MAGELANG

TAHUN 2021

Nama Perangkat Daerah : DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
1	2	3	4		5	6	7	8	9
2	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar					3.570.000.000			15.751.500.000
2.13	Kepemudaan dan Olah Raga					3.570.000.000			15.751.500.000
2.13.2.13.2.13.1.1.7.213	Program Manajemen Administrasi Pelayanan Umum dan Kepegawaian	Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah			100 %	760.174.000		100 %	870.000.000
2.13.2.13.2.13.1.1.7.213.1	Pengelolaan Surat Menyurat, Kearsipan dan Bahan Pustaka	Jumlah surat yang dikelola	DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga	7600 buah	24.000.000		7600 buah	30.000.000
2.13.2.13.2.13.1.1.7.213.2	Penyelenggaraan Koordinasi dan Konsultasi Perangkat Daerah	Jumlah perjalanan dinas luar daerah yang terlaksana	DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga	35 kali	126.000.000		35 kali	210.000.000
		Jumlah rapat koordinasi yang diselenggarakan			18 kali			18 kali	
		Jumlah perjalanan dinas dalam daerah yang terlaksana			240 kali			240 kali	
2.13.2.13.2.13.1.1.7.213.4	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya	Jumlah Rekening Yang Dibayar	DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA		96 rekening bulan	260.000.000		96 rekening bulan	260.000.000
		Jumlah gedung yang dipelihara			2 gedung			2 gedung	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
2.13.2.13.2.13.1.1.7.213.5	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya	Jumlah peralatan yang dipelihara	DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga	40 buah	198.000.000		40 buah	220.000.000
		Jumlah perlengkapan yang dipelihara			10 buah			10 buah	
		Jumlah kendaraan dinas roda empat yang dipelihara			5 buah			5 buah	
		Jumlah kendaraan dinas roda dua yang dipelihara			11 buah			11 buah	
2.13.2.13.2.13.1.1.7.213.6	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya	Jumlah paket rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga	1 paket	0		1 paket	50.000.000
2.13.2.13.2.13.1.1.7.213.7	Peningkatan Kapasitas dan Disiplin Aparatur Sipil Negara	Frekuensi pembinaan ASN	DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	disparpora	12 kali	152.174.000		12 kali	100.000.000
		Jumlah ASN yang dibina			50 orang			50 orang	
		Jumlah tenaga honorar/kontrak			4 orang			4 orang	
2.13.2.13.2.13.1.1.8.213	Program Perencanaan, Keuangan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian perencanaan, evaluasi kinerja OPD, dan keuangan perangkat daerah			100 %	109.826.000		100 %	82.000.000
2.13.2.13.2.13.1.1.8.213.1	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah kegiatan yang dikelola	DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	disparpora	25 kegiatan	69.826.000		25 kegiatan	62.000.000
		Jumlah laporan keuangan yang tersusun			12 laporan			12 laporan	
2.13.2.13.2.13.1.1.8.213.2	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Renstra Perangkat Daerah yang tersusun	DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga	0 dokumen	20.000.000		0 dokumen	10.000.000
		Jumlah dokumen Renja Perangkat Daerah yang tersusun			2 dokumen			2 dokumen	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
2.13.2.13.2.13.1.1.8.213.3	Penyusunan Laporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen pelaporan tahunan yang tersusun	DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga	4 dokumen	20.000.000		4 dokumen	10.000.000
		Jumlah dokumen pelaporan bulanan yang tersusun			3 dokumen			3 dokumen	
		Jumlah dokumen monitoring , evaluasi, dan pelaporan tribulanan yang tersusun			10 dokumen			10 dokumen	
		Jumlah dokumen evaluasi jangka menengah yang tersusun			2 dokumen			2 dokumen	
2.13.2.13.2.13.1.1.20.213	Program Pembinaan dan Peningkatan Sarana Prasarana Olahraga	Cakupan pembinaan olahraga			44,00 %	2.500.000.000		44,00 %	13.965.000.000
2.13.2.13.2.13.1.1.20.213.28	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi	Jumlah Kegiatan Olahraga	DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga	16 kegiatan	1.000.000.000		16 kegiatan	4.840.000.000
		Jumlah Atlet yang dikirim			595 orang			595 orang	
		Jumlah Atlet berprestasi			200 orang			200 orang	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
2.13.2.13.2.13.1.1.20.213.29	Peningkatan Sarana Prasarana Olahraga	Jumlah Pengadaan Alat Olahraga	DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga	180 buah	1.350.000.000		180 buah	8.575.000.000
		Jumlah Atlet berprestasi			595 orang			595 orang	
		Jumlah Gedung Olahraga terbangun			0 unit			0 unit	
		Jumlah DED yang tersusun			2 Dokumen DED GOR dan Lapangan dan penataan lingkungan			2 Dokumen DED GOR dan Lapangan dan penataan lingkungan	
		Jumlah Pengadaan lampu Stadion			0 Paket			0 Paket	
		Jumlah Pengadaan Perlengkapan GOR			0 set			0 set	
		Jumlah Stadion yang dipelihara			1 buah			1 buah	
		Jumlah Masterplan Sport center yang tersusun			0 dokumen			0 dokumen	
		Jumlah dokumen lingkungan dan ANDALALIN yang tersusun			0 2			0 2	
2.13.2.13.2.13.1.1.20.213.30	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Jumlah Peserta Olahraga Rekreasi	DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga	2000 orang	150.000.000		2000 orang	150.000.000
2.13.2.13.2.13.1.1.20.213.31	Implementasi IPTEK dalam Pembinaan Olahraga	Jumlah atlit yang dikembangkan sesuai dengan potensinya	DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga	675 orang	0		675 orang	400.000.000
2.13.2.13.2.13.1.1.22.213	Peningkatan Peran Serta Pemuda dalam Pembangunan	cakupan pembinaan pemuda			44,00 %	200.000.000		44,00 %	834.500.000

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
2.13.2.13.2.13.1.1.22.213.1	Perlindungan dan Pemberdayaan Lembaga Pemuda	Jumlah Peserta yang memahami Manajemen Organisasi Masyarakat Pemuda	DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	-	60 orang	40.000.000		60 orang	376.500.000
		Jumlah Peserta Penyuluhan Bahaya Narkoba dan HIV/AIDS			300 orang			300 orang	
		Jumlah Peserta Rakor Kepemudaan			42 orang			42 orang	
		Jumlah Peserta Upacara Hari Besar Nasional			200 orang			200 orang	
2.13.2.13.2.13.1.1.22.213.2	Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda	Jumlah Peserta: Lomba Tata Upacara Bendera dan Baris Berbaris	DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	-	126 orang	160.000.000		126 orang	458.000.000
		Jumlah Peserta Seleksi, Pembentukan dan Penetapan PASKIBRAKA			150 orang			150 orang	
		Jumlah Peserta Jambore Pemuda dan Pengiriman Bakti Pemuda Antar Provinsi			42 orang			42 orang	
		Jumlah Peserta yang terampil berwirausaha			5 orang			5 orang	
		Jumlah Peserta yang lolos Seleksi Pemuda berprestasi			12 orang			12 orang	
		Jumlah Peserta Fasilitasi Kegiatan Pramuka			200 orang			200 orang	
		Jumlah Peserta Lomba Kepemudaan			84 Tim/orang			84 Tim/orang	
3	Urusan Pilihan					17.460.619.880		14.701.714.999	
3.2	Kepemudaan dan Olah Raga					17.460.619.880		14.701.714.999	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
3.2.3.2.2.13.1.1.18.302	Program Peningkatan Sarana Prasarana dan Industri Pariwisata	Cakupan peningkatan sarana prasarana dan industri pariwisata dalam kondisi baik			45,45 %	16.830.619.880		45,45 %	12.896.714.999
3.2.3.2.2.13.1.1.18.302.1	Penataan dan Pengelolaan Daya Tarik Wisata	Jumlah Daya Tarik Wisata Yang Dikembangkan	DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	Parpora	3 buah	3.677.826.000		3 buah	7.500.000.000
		Jumlah DTW yang di kelola			6 DTW			6 DTW	
		Jumlah dokumen FS/ DED/ UKL/UPL tersusun			2 dokumen			2 dokumen	
		Jumlah Desa Wisata yang terbangun			5 Desa			5 Desa	
3.2.3.2.2.13.1.1.18.302.2	Pelayanan Kepariwisataaan (DAK)	Jumlah Pelatihan SDM Bidang Pariwisata	DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	disparpora	10 kali	862.578.000		10 kali	1.020.000.000
3.2.3.2.2.13.1.1.18.302.3	Penataan Kawasan Pariwisata Daya Tarik Wisata (DAK)	Jumlah DTW Yang ditata	DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	disparpora	2 buah	10.170.215.880		2 buah	1.226.714.999
3.2.3.2.2.13.1.1.18.302.4	Peningkatan Kapasitas SDM Pelaku Usaha Pariwisata	Jumlah SDM Pokdarwis yang terfasilitasi	DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	Kabupaten Magelang	38 orang	120.000.000		38 orang	150.000.000
		Jumlah Usaha pariwisata yang terbina			5 kelompok			5 kelompok	
3.2.3.2.2.13.1.1.18.302.5	Penataan dan Pengelolaan Daya Tarik Wisata Ketep Pass	Jumlah DTW yang ditata dan dikelola	DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	Wisata Ketep Pass	1 DTW	2.000.000.000		1 DTW	3.000.000.000
		jumlah DTW yang dikembangkan			1 DTW			1 DTW	
3.2.3.2.2.13.1.1.19.302	Program Pengembangan Kelembagaan, Pemasaran Pariwisata dan ekonomi kreatif	Cakupan Pengembangan Kelembagaan, Pemasaran Pariwisata dan ekonomi kreatif			59,67 %	630.000.000		59,67 %	1.805.000.000

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
3.2.3.2.2.13.1.1.19.302.1	Pembinaan Kelembagaan Pariwisata	Cakupan fasilitas lembaga pariwisata	DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	Kabupaten Magelang	50 %	30.000.000		50 %	105.000.000
3.2.3.2.2.13.1.1.19.302.2	Pemasaran dan promosi Pariwisata	Cakupan bauran promosi pariwisata (jml event, jml sarana pemasaran, jml jaringan promosi pariwisata)	DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	Kabupaten Magelang	73,15 %	400.000.000		73,15 %	1.300.000.000
		Jumlah Aplikasi Wisata yang diupdate/ dikembangkan			0 aplikasi			0 aplikasi	
		Jumlah Branding pariwisata yang tersusun dan tersosialisasi			0 branding			0 branding	
		Jumlah penyelenggaraan informasi TIC			1 kegiatan			1 kegiatan	
3.2.3.2.2.13.1.1.19.302.3	Pembinaan Komunitas/ Pelaku Ekonomi Kreatif	Jumlah Komunitas Ekonomi kreatif yang terfasilitasi	DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	Kabupaten Magelang	6 komunitas	200.000.000		6 komunitas	400.000.000
Total						21.030.619.880			30.453.214.999

PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH

KABUPATEN MAGELANG

TAHUN 2021

Nama Perangkat Daerah : DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar				1.711.116.867			3.603.949.698
2.17	Perpustakaan				1.547.194.615			3.085.923.500
2.17.2.17.2.17.1.1.7.217	Program Manajemen Administrasi Pelayanan Umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat Daerah		100 %	780.306.040		100 %	1.520.800.000
2.17.2.17.2.17.1.1.7.217.1	Pengelolaan Surat Menyurat, Kearsipan dan Bahan Pustaka	Jumlah surat yang dikelola	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	Dispuspa	3200 surat		3200 surat	57.728.000
		Jumlah arsip yang dikelola			3200 Dokumen		3200 Dokumen	
		Jumlah bahan pustaka yang dikelola			30 Jenis bahan pustaka		30 Jenis bahan pustaka	
2.17.2.17.2.17.1.1.7.217.2	Penyelenggaraan Koordinasi dan Konsultasi Perangkat Daerah	Jumlah perjalanan dinas luar daerah yang terlaksana	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	Dispuspa	75 OK kali perjalanan	155.876.000	75 OK kali perjalanan	230.072.000
		jumlah rapat koordinasi yang di selenggarakan			36 kali rapat		36 kali rapat	
		Jumlah perjalanan dinas dalam daerah yang terlaksana			400 kali perjalanan		400 kali perjalanan	
		Jumlah layanan humas dan protokol yang dilaksanakan			0 kali		0 kali	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
2.17.2.17.2.17.1.1.7.217.3	Pengadaan dan Pengelolaan Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor, Rumah Dinas dan Gedung Pemerintah Lainnya	Jumlah paket pengadaan perlengkapan gedung kantor	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	Dispuspa	2 paket, 13 Jenis	0	2 paket, 13 Jenis	400.000.000
		Jumlah paket pengadaan peralatan gedung kantor			2 paket, 6 Jenis		2 paket, 6 Jenis	
		Jumlah Aset yang dikelola			20 jenis		20 jenis	
2.17.2.17.2.17.1.1.7.217.4	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor/ Rumah Dinas/ Gedung Pemerintah Lainnya	luas gedung kantor yang terpelihara	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	Dispuspa	6 gedung, (4080 m)	461.125.000	6 gedung, (4080 m)	574.000.000
		Jenis dan Jumlah rekening			168 Rekening bulan		168 Rekening bulan	
2.17.2.17.2.17.1.1.7.217.5	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor, Rumah dinas dan Gedung Pemerintah Lainnya	Jumlah peralatan yang dipelihara	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	Dispuspa	4 Jenis Peralatan (8 buah)	124.708.500	4 Jenis Peralatan (8 buah)	174.000.000
		Jumlah perlengkapan yang dipelihara			3 Jenis Alat		3 Jenis Alat	
		Jumlah kendaraan roda empat yang dipelihara			6 mobil		6 mobil	
		Jumlah kendaraan roda dua yang dipelihara			9 motor		9 motor	
2.17.2.17.2.17.1.1.7.217.6	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor, Rumah Dinas dan Gedung Pemerintah Lainnya	Jumlah paket rehabilitasi sedang/berat gedung	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	Dispuspa	1 paket (2 gedung)	0	1 paket (2 gedung)	0

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
2.17.2.17.2.17.1.1.7.217.7	Peningkatan Kapasitas dan Disiplin Aparatur Sipil Negara	Frekuensi pembinaan ASN	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	Dispuspa	12 kali rapat	0	12 kali rapat	85.000.000
		Jumlah ASN yang dibina			24 orang		24 orang	
		Jumlah tenaga honorer/kontrak			0 orang		0 orang	
		Jumlah seragam dan atribut ASN yang disediakan			0 paket seragam		0 paket seragam	
		Jumlah JFT yang terfasilitasi penilaian angka kreditnya			32 Pustakawan/Arsiparis		32 Pustakawan/Arsiparis	
		Jumlah hari pelayanan kesehatan			131 hari		131 hari	
2.17.2.17.2.17.1.1.8.217	Program Perencanaan, Keuangan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian perencanaan, evaluasi kinerja OPD, dan keuangan perangkat daerah perangkat Daerah			100 %	58.929.575	100 %	90.123.500
2.17.2.17.2.17.1.1.8.217.1	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah kegiatan yang dikelola	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	Dispuspa	19 Kegiatan	48.544.575	19 Kegiatan	61.000.000
		Jumlah laporan keuangan yang tersusun			16 laporan		16 laporan	
2.17.2.17.2.17.1.1.8.217.2	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Renstra Perangkat Daerah yang tersusun	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	Dispuspa	0 Dokumen	7.385.000	0 Dokumen	8.123.500
		Jumlah dokumen Renja Perangkat Daerah yang tersusun			2 Dokumen		2 Dokumen	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
2.17.2.17.2.17.1.1.8.217.3	Penyusunan Laporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen pelaporan Tahunan yang tersusun	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	Dispuspa	4 Dokumen	3.000.000		4 Dokumen	10.500.000
		Jumlah dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan tribulanan yang tersusun			2 Dokumen			2 Dokumen	
		Jumlah Dokumen pelaporan bulanan yang tersusun			1 Dokumen			1 Dokumen	
		Jumlah Dokumen evaluasi jangka menengah yang tersusun			0 Dokumen			0 Dokumen	
		Jumlah Dokumen Profil Perangkat Daerah yang tersusun			1 Dokumen			1 Dokumen	
2.17.2.17.2.17.1.1.8.217.4	Penyusunan Dokumen Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Perangkat Daerah	Jumlah Standar Operasional Prosedur yang tersusun	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	Dispuspa	1 Dokumen	0		1 Dokumen	10.500.000
		Jumlah Standar Pelayanan yang tersusun			2 Dokumen			2 Dokumen	
		Jumlah Daftar Informasi publik			1 Dokumen			1 Dokumen	
		Jumlah dokumen Rencana Tindak Pengendalian yang tersusun (RTP dan Evaluasi RTP)			2 Dokumen			2 Dokumen	
2.17.2.17.2.17.1.1.17.217	Program Pengelolaan dan Pengembangan Perpustakaan	Rasio judul koleksi bahan pustaka di Perpustakaan Kabupaten			0,0230 %	707.959.000		0,0230 %	1.475.000.000
		Angka kepuasan pemustaka			80 Angka			80 Angka	
		Rasio Pustakawan dan Tenaga Teknis Perpustakaan yang Mengikuti Bimtek, Sosialisasi dan Workshop			56,25 %			56,25 %	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
2.17.2.17.2.17.1.1.17.217.1	Pelayanan Perpustakaan	Jumlah Pengunjung Jumlah Perpustakaan yang menerapkan Inlistite	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	Dispuspa	90000 Orang 3 Perpustakaan	236.165.000	90000 Orang 3 Perpustakaan	500.000.000
2.17.2.17.2.17.1.1.17.217.2	Pengembangan Perpustakaan	Jumlah Perpustakaan yang dibina dan di monitoring Jumlah pelatihan perpustakaan berbasis inklusi Jumlah kerjasama Jumlah SDM Perpustakaan yang telah bimtek, PAK, , sosialisasi dan workshop Jumlah peraturan yang tersusun Jumlah perpustakaan yang difasilitasi proses akreditasinya	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	Dispuspa	150 Perpustakaan 6 Pelatihan 15 Kerjasama 100 Orang 2 Dokumen 10 perpustakaan	471.794.000	150 Perpustakaan 6 Pelatihan 15 Kerjasama 100 Orang 2 Dokumen 10 perpustakaan	125.000.000
2.17.2.17.2.17.1.1.17.217.3	Promosi Perpustakaan	Jumlah jenis Media Promosi (Media Sosial , Elektronik, Cetak, Baliho/Leaflet), Jumlah jenis lomba	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	Dispuspa	4 Jenis Media promosi 7 jenis lomba	0	4 Jenis Media promosi 7 jenis lomba	350.000.000
2.17.2.17.2.17.1.1.17.217.4	Penyediaan Bahan Pustaka	Terbelinya jumlah judul Bahan Pustaka Jumlah bahan pustaka yang diolah Jumlah kegiatan Pelaksanaan Stock Opname Jumlah bahan pustaka yang dirawat	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	Dispuspa	550 Judul 3500 Exemplar 1 kegiatan 2500 Exemplar	0	550 Judul 3500 Exemplar 1 kegiatan 2500 Exemplar	500.000.000
2.18	Perpustakaan					163.922.252		518.026.198

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
2.18.2.18.2.17.1.1.20.218	Program Pembinaan, Pengembangan dan Pengawasan Kearsipan	Persentase pencipta Arsip yang tertib arsip		53,85 %	0		53,85 %	230.574.325
2.18.2.18.2.17.1.1.20.218.1	Pembinaan dan Pengembangan SDM Kearsipan .	Jumlah Peserta yang mengikuti Sosialisasi/Workshop	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	Dispuspa	120 Orang	0	120 Orang	101.761.100
		Jumlah Arsiparis yang mengikuti kompetensi			21 Orang		21 Orang	
		Jumlah pedoman yang disusun			1 pedoman		1 pedoman	
		Jumlah pengelola/pencipta arsip yang mengikuti lomba			0 Pencipta Arsip		0 Pencipta Arsip	
2.18.2.18.2.17.1.1.20.218.2	Pengawasan Kearsipan	Jumlah pencipta arsip yang diaudit	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	Dispuspa	30 Pencipta Arsip	0	30 Pencipta Arsip	128.813.225
		Jumlah pencipta arsip yang dimonitoring			50 Pencipta Arsip		50 Pencipta Arsip	
		Jumlah pencipta arsip percontohan			4 Pencipta Arsip		4 Pencipta Arsip	
2.18.2.18.2.17.1.1.21.218	Program Pengelolaan dan Pelestarian Arsip	Persentase peningkatan Arsip yang dikelola		6,45 %	163.922.252		6,45 %	287.451.873
2.18.2.18.2.17.1.1.21.218.1	Pengolahan Arsip Dinamis dan Statis	Jumlah arsip yang dikelola	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	Dispuspa	16500 berkas	163.922.252	16500 berkas	160.544.313
		Jumlah SKPD yang diakuisi			2 SKPD		2 SKPD	
		Jumlah arsip yang dilestarikan			550 berkas		550 berkas	
		Jumlah arsip yang diselamatkan			200 berkas		200 berkas	
		Jumlah Arsip yang dimusnahkan			NA berkas		NA berkas	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
2.18.2.18.2.17.1.1.21.218.2	Layanan dan Pemanfaatan Kearsipan	Jumlah pameran yang dilaksanakan	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	Dispuspa	2 kali	0	2 kali	126.907.560
		Jumlah NSA yang diterbitkan			1 NSA		1 NSA	
Total						1.711.116.867		3.603.949.698

PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH

KABUPATEN MAGELANG

TAHUN 2021

Nama Perangkat Daerah : DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
1	2	3	4		5	6	7	8	9
3	Urusan Pilihan					4.844.504.788			10.546.913.989
3.1	Kelautan dan Perikanan					2.885.236.000			5.352.053.996
3.1.3.1.3.1.1.1.7.301	Program Manajemen Administrasi Pelayanan Umum dan Kepegawaian Perangkat daerah	Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah			100 %	948.500.000		100 %	1.575.623.996
3.1.3.1.3.1.1.1.7.301.1	Pengelolaan Surat Menyurat, Kearsipan dan Bahan Pustaka	jumlah surat yang dikelola	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN	Dinas Peternakan dan Perikanan	6000 surat	31.000.000		6000 surat	46.627.000
3.1.3.1.3.1.1.1.7.301.2	Penyelenggaraan Koordinasi dan Konsultasi Perangkat Daerah	Jumlah perjalanan dinas luar daerah yang terlaksana	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN	Dinas Peternakan dan Perikanan	12 bulan	94.000.000		12 bulan	158.997.000
		Jumlah rapat koordinasi yang diselenggarakan			12 kali			12 kali	
		Jumlah perjalanan dinas dalam daerah yang terlaksana			12 bulan			12 bulan	
3.1.3.1.3.1.1.1.7.301.3	Pengadaan dan Pengelolaan Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya	Jumlah paket pengadaan perlengkapan gedung kantor	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN	Dinas Peternakan dan Perikanan	1 paket	60.000.000		1 paket	100.000.000
		Jumlah paket pengadaan peralatan gedung kantor			1 paket			1 paket	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
3.1.3.1.3.1.1.1.7.301.4	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya	Jumlah gedung/bangunan kantor yang dipelihara	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN	Dinas Peternakan dan Perikanan	12 gedung	498.500.000	12 gedung	600.000.000
		Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik			12 bulan		12 bulan	
3.1.3.1.3.1.1.1.7.301.5	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya	Jumlah peralatan yang dipelihara	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN	Dinas Peternakan dan Perikanan	50 unit	265.000.000	50 unit	469.999.996
		Jumlah perlengkapan yang dipelihara			1 paket		1 paket	
		Jumlah kendaraan dinas roda empat dan roda dua yang dipelihara			51 unit		51 unit	
3.1.3.1.3.1.1.1.7.301.6	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya	Jumlah paket rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN	Dinas Peternakan dan Perikanan	2 paket	0	2 paket	200.000.000
3.1.3.1.3.1.1.1.8.301	Program Perencanaan, Keuangan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian perencanaan, evaluasi kinerja OPD, dan keuangan perangkat daerah			100 %	192.000.000	100 %	196.000.000
3.1.3.1.3.1.1.1.8.301.1	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah kegiatan yang dikelola	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN	Dinas Peternakan dan Perikanan	27 kegiatan	100.000.000	27 kegiatan	104.000.000
		Jumlah laporan keuangan yang tersusun			5 laporan		5 laporan	
3.1.3.1.3.1.1.1.8.301.2	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Renstra Perangkat Daerah yang tersusun	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN	Dinas Peternakan dan Perikanan	1 dokumen	10.000.000	1 dokumen	10.000.000
		Jumlah dokumen Renja Perangkat Daerah yang tersusun			5 dokumen		5 dokumen	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
3.1.3.1.3.1.1.1.8.301.3	Penyusunan Laporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen pelaporan tahunan yang tersusun	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN	Dinas Peternakan dan Perikanan	- dokumen	82.000.000	- dokumen	82.000.000
		Jumlah dokumen monitoring, evaluasi, dan pelaporan tribulanan yang tersusun			4 dokumen		4 dokumen	
		Jumlah dokumen pelaporan bulanan yang tersusun			3 dokumen		3 dokumen	
		Jumlah dokumen evaluasi jangka menengah yang tersusun			- dokumen		- dokumen	
		Jumlah profil perangkat daerah yang tersusun			1 dokumen		1 dokumen	
3.1.3.1.3.1.1.1.28.301	Program Pengembangan Budidaya Perikanan, Kesehatan Ikan dan Lingkungan	Cakupan pengembangan budidaya perikanan			5 %	1.578.736.000	5 %	2.774.430.000
		Cakupan kesehatan ikan dan lingkungan			100 %		100 %	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
3.1.3.1.3.1.1.1.28.301.1	Intensifikasi dan Ekstensifikasi Budaya Perikanan	Jumlah kelompok penerima induk ikan hias (kelompok)	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN	Dinas Peternakan dan Perikanan	2 kelompok	0	2 kelompok	400.000.000
		Jumlah Demplot UPR secara terpadu			0 lokasi/kelompok		0 lokasi/kelompok	
		Jumlah yang terfasilitasi sertifikat CPIB dan CBIB pada yang terfasilitasi (RTP/Kelompok)			0 RTP/kelompok		0 RTP/kelompok	
		Jumlah pokdakan pembudidaya kolam ikan pekarangan (KK miskin) yang terfasilitasi bantuan			8 kelompok		8 kelompok	
		Jumlah pokdakan minapadi yang terfasilitasi			0 kelompok		0 kelompok	
		Fasilitasi pertemuan pelaku kawasan Minapolitan			90 orang		90 orang	
3.1.1.1.28.301.1.3	Budidaya Ternak dan Ikan		SECANG, PUCANG	BALAI DESA PUCANG	1 paket	50.000.000		0
3.1.1.1.28.301.1.2	Pengadaan Induk Ikan (Nila, Mas, Lele)		MUNTILAN, MENAYU	Balai Desa Menayu	1 paket	100.000.000		0
3.1.1.1.28.301.1.1	Pelatihan budidaya dan Bantuan Bibit Ikan		CANDIMULYO, TRENTEN	Desa Trenten	1 paket	50.000.000		0
3.1.1.1.28.301.1.4	Mina Padi		MUNGKID, RAMBEANAK	KANTOR DESA RAMBEANAK	1 paket	50.000.000		0
3.1.3.1.3.1.1.1.28.301.2	Peningkatan Kapasitas dan Revitalisasi BBI Lokal	Jumlah produksi benih ikan BBI	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN	BBI Sawangan dan Grabag	4000000 ekor	164.000.000	4000000 ekor	164.000.000

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
3.1.3.1.3.1.1.1.28.301.3	Rehabilitasi/Pembangunan Sarana Prasarana Perikanan	Jumlah Pembangunan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Perikanan (paket)	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN	Dinas Peternakan dan Perikanan	3 paket/kelompok	0	3 paket/kelompok	500.000.000
		Pengadaan tanah perluasan dan pembangunan pasar ikan bojong			0 paket		0 paket	
		Dokumen perencanaan pembelian tanah pasar ikan bojong			0 dokumen		0 dokumen	
3.1.3.1.3.1.1.1.28.301.4	Peningkatan Kesehatan Ikan dan Lingkungan	jumlah vitamin, obat, vaksin kesehatan lingkungan dan budidaya perikanan	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN	Dinas Peternakan dan Perikanan	1 paket	20.000.000	1 paket	35.000.000
3.1.3.1.3.1.1.1.28.301.5	Pelestarian Sumber Daya Hayati Perikanan	Jumlah titik penebaran (lokasi)	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN	Dinas Peternakan dan Perikanan	7 lokasi	0	7 lokasi	65.000.000
		Jumlah ikan ditebar di perairan umum (ekor)			43260 ekor		43260 ekor	
3.1.3.1.3.1.1.1.28.301.6	Intensifikasi dan Ekstensifikasi Budidaya Perikanan (DBHCHT)	Jumlah pokdakan pembudidaya kolam pekarangan (KK non miskin) yang terfasilitasi bantuan	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN	Dinas Peternakan dan Perikanan	10 kelompok	384.306.000	10 kelompok	600.000.000
		Jumlah pokdakan pembenihan (KK non miskin) yang terfasilitasi bantuan induk ikan			9 kelompok		9 kelompok	
3.1.1.1.28.301.6.1	Bantuan Induk Gurami		SRUMBUNG, PUCANGANOM	Desa Pucanganom	1 paket	30.000.000		0
3.1.3.1.3.1.1.1.28.301.7	Rehabilitasi/Pembangunan Sarana Prasarana Perikanan (DAK)	Jumlah Pembangunan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Perikanan (paket)	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN	Dinas Peternakan dan Perikanan	5 paket/kelompok	1.010.430.000	5 paket/kelompok	1.010.430.000

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
3.1.3.1.3.1.1.1.29.301	Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan dan Sistem Penyuluhan	Cakupan optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan			5 %	166.000.000		5 %	806.000.000
		Angka konsumsi ikan			19,90 kg perkapita pertahun			19,90 kg perkapita pertahun	
		Cakupan bina kelompok pembudidaya ikan			5 %			5 %	
		Cakupan pengembangan kawasan budidaya perikanan air tawar			3 %			3 %	
3.1.3.1.3.1.1.1.29.301.1	Gerakan Makan Ikan (Gemarikan)	Jumlah peserta Gemarikan (orang)	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN	Dinas Peternakan dan Perikanan	1750 orang	0		1750 orang	365.000.000
		Sosialisasi Forikan Kecamatan			0 event/kegiatan			0 event/kegiatan	
3.1.3.1.3.1.1.1.29.301.2	Peningkatan Mutu Olahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Jumlah peserta bintek pengolahan dan pemasaran hasil perikanan (orang)	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN	Dinas Peternakan dan Perikanan	105 orang	0		105 orang	125.000.000
		Pembinaan fasilitasi dan sertifikasi produk olahan perikanan (unit)			2 unit			2 unit	
3.1.3.1.3.1.1.1.29.301.3	Peningkatan Jaringan Pemasaran/Promosi Perikanan	Jumlah promosi/jaringan pemasaran produksi perikanan	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN	Dinas Peternakan dan Perikanan	2 event/kegiatan	116.000.000		2 event/kegiatan	116.000.000
		Sapras pemasaran hasil perikanan			2 kelompok			2 kelompok	
		Fasilitasi edukasi perikanan (orang)			10000 orang			10000 orang	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
			Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
3.1.3.1.3.1.1.1.29.301.4	Pengembangan Usaha Pelayanan Perikanan (PUPP)	Jumlah Fasilitasi/ Sosialisasi Peningkatan Kelembagaan Kelompok Perikanan	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN	Dinas Peternakan dan Perikanan	20 kelompok	50.000.000		20 kelompok	200.000.000
		Fasilitasi ijin usaha perikanan			5 ijin usaha			5 ijin usaha	
		Pemantauan peredaran ikan konsumsi			21 lokasi/kecamatan			21 lokasi/kecamatan	
		Jumlah pelaku usaha perikanan yang terfasilitasi dalam lembaga ekonomi keuangan			30 orang			30 orang	
3.3	Kelautan dan Perikanan					1.959.268.788			5.194.859.993
3.3.3.3.3.1.1.1.22.303	Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	Cakupan Peningkatan Produksi Hasil Peternakan			2 %	1.548.268.788		2 %	4.082.659.993
		Cakupan peningkatan sarana dan prasarana peternakan			3 %			3 %	
		Cakupan penerapan teknologi peternakan			75 %			75 %	
		Cakupan peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan			3 %			3 %	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
3.3.3.3.3.1.1.1.22.303.8	Pengembangan Agribisnis Peternakan	Jumlah kelompok peternak kambing/domba/PE yang terfasilitasi	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN	Dinas Peternakan dan Perikanan	20 kelompok	0	20 kelompok	750.000.000
		Jumlah induk ternak sapi perah/sapi potong/sapi betina produktif (ekor) yang terfasilitasi pakan ternak			50 ekor		50 ekor	
		Jumlah kelompok Peternak Ayam Buras KK miskin dan KK non miskin yang terfasilitasi bantuan			10 kelompok		10 kelompok	
		Jumlah kelompok Peternak Kelinci yang terfasilitasi bantuan			4 kelompok		4 kelompok	
3.1.1.1.22.303.8.5	Peternakan Kambing		GRABAG, KETAWANG	DESA KETAWANG	1 paket	200.000.000		0
3.1.1.1.22.303.8.4	Pelatihan Budidaya Kambing		GRABAG, SEWORAN	BALAI DESA SEWORAN	1 paket	50.000.000		0
3.1.1.1.22.303.8.3	Pelatihan Budidaya Ternak Kambing		GRABAG, KALIKUTO	DESA KALIKUTO	1 paket	30.000.000		0
3.1.1.1.22.303.8.2	budidaya sapi dan kambing		DUKUN, KALIBENING	Desa Kalibening	1 paket	150.000.000		0
3.1.1.1.22.303.8.1	PELATIHAN BUDIDAYA KELINCI		GRABAG, BANARAN	Balai desa Banaran	1 paket	50.000.000		0
3.1.1.1.22.303.8.8	Bantuan Ternak Domba		MERTOYUDAN, BANYUROJO	SEKARAN	1 paket	100.000.000		0
3.1.1.1.22.303.8.9	Pelatihan Peternakan Kambing		SECANG, SIDOMULYO	Desa Sidomulyo	1 paket	40.000.000		0
3.1.1.1.22.303.8.6	Pelatihan Budidaya Kambing		KAJORAN, SUKOREJO	sukorejo	1 paket	100.000.000		0

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
3.3.3.3.3.1.1.1.22.303.10	Pembinaan Kelompok ternak	Pembinaan kelompok penerima bantuan	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN	Dinas Peternakan dan Perikanan	20 orang	0	20 orang	449.999.998
		Jumlah pelaksanaan Pembinaan Pelaku Usaha Peternakan (orang)			20 orang		20 orang	
		pengiriman PENAS			- orang		- orang	
		Jumlah kontes ternak			1 paket		1 paket	
3.3.3.3.3.1.1.1.22.303.16	Pengembangan itik Magelang	Jumlah kelompok pembibitan itik Magelang yang terfasilitasi bantuan (paket)	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN	Dinas Peternakan dan Perikanan	5 kelompok	0	5 kelompok	300.000.000
3.3.3.3.3.1.1.1.22.303.23	Pengembangan Itik Magelang (DBHCHT)	Jumlah kelompok pengembangan itik Magelang yang terfasilitasi bantuan (paket)	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN	Dinas Peternakan dan Perikanan	20 kelompok	219.589.982	20 kelompok	600.000.000
3.3.3.3.3.1.1.1.22.303.26	Pengembangan Sarana Prasarana dan Alat Produksi Peternakan	Sapras Peternakan, Pasar hewan, RPH/RPU, Puskesmas	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN	Dinas Peternakan dan Perikanan	32 lokasi/paket/unit	0	32 lokasi/paket/unit	1.382.581.816
3.1.1.1.22.303.26.1	bantuan pembuatan kandang dan bantuan ternak sapi		PAKIS, KAJANGKOSO	kajangkoso	1 paket	150.000.000		0
3.3.3.3.3.1.1.1.22.303.32	Penyusunan dan Sosialisasi Peraturan Perundangan Peternakan Perikanan	Jumlah peserta sosialisasi (orang)	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN	Dinas Peternakan dan Perikanan	40 orang	10.000.000	40 orang	50.000.000
3.3.3.3.3.1.1.1.22.303.33	Pengembangan Sarana Prasarana Peternakan (DAK)	Jumlah sarana prasarana peternakan (unit)	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN	Peterikan	10 kelompok/unit	1.224.678.806	10 kelompok/unit	355.078.179

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja
3.3.3.3.3.1.1.1.22.303.35	Pengelolaan dan Pemasaran Produk Hasil Peternakan	Pembinaan peternak dan Jumlah jejaring untuk promosi pengelolaan dan pemasaran hasil produksi dan pengolahan hasil peternakan	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN	Dinas Peternakan dan Perikanan	0 orang	0	0 orang	100.000.000
		Jumlah peserta bintek (orang)			60 orang		60 orang	
3.3.3.3.3.1.1.1.22.303.36	Peningkatan Pelayanan Inseminasi Buatan	Jumlah akseptor yang mendapat pelayanan Inseminasi Buatan (ekor)	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN	Dinas Peternakan dan Perikanan	9000 ekor	94.000.000	9000 ekor	95.000.000
3.3.3.3.3.1.1.1.30.303	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Hewan	Cakupan pencegahan dan penanggulangan penyakit hewan			100 %	411.000.000	100 %	1.112.200.000
3.3.3.3.3.1.1.1.30.303.1	Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Hewan Menular	Pengendalian kasus penyakit hewan menular (ekor) dan jumlah lokasi pencegahan dan penanggulangan penyakit hewan menular/zoonosis	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN	Dinas Peternakan Perikanan Kab Magelang	21 lokasi/kecamatan	52.000.000	21 lokasi/kecamatan	339.200.000
		Sosialisasi penyakit hewan (orang)			50 orang		50 orang	
3.3.3.3.3.1.1.1.30.303.2	Peningkatan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Pembinaan Penyedia bahan PAH yang ASUH (Aman Sehat Utuh Halal) (orang)	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN	Dinas Peternakan dan Perikanan	100 orang	7.500.000	100 orang	350.000.000
		Sosialisasi gerakan minum susu dan telur (orang)			2750 orang		2750 orang	
3.3.3.3.3.1.1.1.30.303.3	Pengawasan Pematangan Hewan Qurban	Jumlah lokasi pemantauan (desa)	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN	Dinas Peternakan dan Perikanan	376 desa	7.500.000	376 desa	85.000.000
		Jumlah peserta pelatihan jagal yang sehat/juleha (orang)			320 orang		320 orang	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
3.3.3.3.3.1.1.1.30.303.4	Pengawasan Obat Hewan dan Pelayanan Jasa Medik	Jumlah lokasi poultry/pet shop/toko obat hewan/depo/klinik hewan yang diawasi se Kabupaten Magelang (unit)	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN	Dinas Peternakan dan Perikanan	40 unit	10.000.000		40 unit	75.000.000
		Sosialisasi jasa medik, pengawasan obat (orang)			110 orang			110 orang	
3.3.3.3.3.1.1.1.30.303.5	Surveillens dan Pengujian Penyakit Hewan dan Ikan	Jumlah sampel pengujian penyakit	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN	Dinas Peternakan dan Perikanan	1000 sampel	75.000.000		1000 sampel	85.000.000
3.3.3.3.3.1.1.1.30.303.6	Peningkatan Pelayanan Rumah Potong Hewan	Jumlah hewan yang dilayani (ekor)	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN	Dinas Peternakan dan Perikanan	1449 ekor	68.000.000		1449 ekor	75.000.000
3.3.3.3.3.1.1.1.30.303.7	Peningkatan Pelayanan Puskesmas	Jumlah hewan yang dilayani (ekor)	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN	Dinas Peternakan dan Perikanan	1500 ekor	191.000.000		1500 ekor	103.000.000
Total						4.844.504.788			10.546.913.989

PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH

KABUPATEN MAGELANG

TAHUN 2021

Nama Perangkat Daerah : DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
1	2	3	4		5	6	7	8	9
3	Urusan Pilihan					4.844.504.788			10.546.913.989
3.1	Kelautan dan Perikanan					2.885.236.000			5.352.053.996
3.1.3.1.3.1.1.1.7.301	Program Manajemen Administrasi Pelayanan Umum dan Kepegawaian Perangkat daerah	Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah			100 %	948.500.000		100 %	1.575.623.996
3.1.3.1.3.1.1.1.7.301.1	Pengelolaan Surat Menyurat, Kearsipan dan Bahan Pustaka	jumlah surat yang dikelola	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN	Dinas Peternakan dan Perikanan	6000 surat	31.000.000		6000 surat	46.627.000
3.1.3.1.3.1.1.1.7.301.2	Penyelenggaraan Koordinasi dan Konsultasi Perangkat Daerah	Jumlah perjalanan dinas luar daerah yang terlaksana	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN	Dinas Peternakan dan Perikanan	12 bulan	94.000.000		12 bulan	158.997.000
		Jumlah rapat koordinasi yang diselenggarakan			12 kali			12 kali	
		Jumlah perjalanan dinas dalam daerah yang terlaksana			12 bulan			12 bulan	
3.1.3.1.3.1.1.1.7.301.3	Pengadaan dan Pengelolaan Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya	Jumlah paket pengadaan perlengkapan gedung kantor	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN	Dinas Peternakan dan Perikanan	1 paket	60.000.000		1 paket	100.000.000
		Jumlah paket pengadaan peralatan gedung kantor			1 paket			1 paket	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja
3.1.3.1.3.1.1.1.7.301.4	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya	Jumlah gedung/bangunan kantor yang dipelihara	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN	Dinas Peternakan dan Perikanan	12 gedung	498.500.000	12 gedung	600.000.000
		Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik			12 bulan		12 bulan	
3.1.3.1.3.1.1.1.7.301.5	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya	Jumlah peralatan yang dipelihara	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN	Dinas Peternakan dan Perikanan	50 unit	265.000.000	50 unit	469.999.996
		Jumlah perlengkapan yang dipelihara			1 paket		1 paket	
		Jumlah kendaraan dinas roda empat dan roda dua yang dipelihara			51 unit		51 unit	
3.1.3.1.3.1.1.1.7.301.6	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya	Jumlah paket rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN	Dinas Peternakan dan Perikanan	2 paket	0	2 paket	200.000.000
3.1.3.1.3.1.1.1.8.301	Program Perencanaan, Keuangan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian perencanaan, evaluasi kinerja OPD, dan keuangan perangkat daerah			100 %	192.000.000	100 %	196.000.000
3.1.3.1.3.1.1.1.8.301.1	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah kegiatan yang dikelola	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN	Dinas Peternakan dan Perikanan	27 kegiatan	100.000.000	27 kegiatan	104.000.000
		Jumlah laporan keuangan yang tersusun			5 laporan		5 laporan	
3.1.3.1.3.1.1.1.8.301.2	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Renstra Perangkat Daerah yang tersusun	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN	Dinas Peternakan dan Perikanan	1 dokumen	10.000.000	1 dokumen	10.000.000
		Jumlah dokumen Renja Perangkat Daerah yang tersusun			5 dokumen		5 dokumen	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
3.1.3.1.3.1.1.1.8.301.3	Penyusunan Laporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen pelaporan tahunan yang tersusun	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN	Dinas Peternakan dan Perikanan	- dokumen	82.000.000	- dokumen	82.000.000
		Jumlah dokumen monitoring, evaluasi, dan pelaporan tribulanan yang tersusun			4 dokumen		4 dokumen	
		Jumlah dokumen pelaporan bulanan yang tersusun			3 dokumen		3 dokumen	
		Jumlah dokumen evaluasi jangka menengah yang tersusun			- dokumen		- dokumen	
		Jumlah profil perangkat daerah yang tersusun			1 dokumen		1 dokumen	
3.1.3.1.3.1.1.1.28.301	Program Pengembangan Budidaya Perikanan, Kesehatan Ikan dan Lingkungan	Cakupan pengembangan budidaya perikanan			5 %	1.578.736.000	5 %	2.774.430.000
		Cakupan kesehatan ikan dan lingkungan			100 %		100 %	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
3.1.3.1.3.1.1.1.28.301.1	Intensifikasi dan Ekstensifikasi Budaya Perikanan	Jumlah kelompok penerima induk ikan hias (kelompok)	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN	Dinas Peternakan dan Perikanan	2 kelompok	0	2 kelompok	400.000.000
		Jumlah Demplot UPR secara terpadu			0 lokasi/kelompok		0 lokasi/kelompok	
		Jumlah yang terfasilitasi sertifikat CPIB dan CBIB pada yang terfasilitasi (RTP/Kelompok)			0 RTP/kelompok		0 RTP/kelompok	
		Jumlah pokdakan pembudidaya kolam ikan pekarangan (KK miskin) yang terfasilitasi bantuan			8 kelompok		8 kelompok	
		Jumlah pokdakan minapadi yang terfasilitasi			0 kelompok		0 kelompok	
		Fasilitasi pertemuan pelaku kawasan Minapolitan			90 orang		90 orang	
3.1.1.1.28.301.1.3	Budidaya Ternak dan Ikan		SECANG, PUCANG	BALAI DESA PUCANG	1 paket	50.000.000		0
3.1.1.1.28.301.1.2	Pengadaan Induk Ikan (Nila, Mas, Lele)		MUNTILAN, MENAYU	Balai Desa Menayu	1 paket	100.000.000		0
3.1.1.1.28.301.1.1	Pelatihan budidaya dan Bantuan Bibit Ikan		CANDIMULYO, TRENTEN	Desa Trenten	1 paket	50.000.000		0
3.1.1.1.28.301.1.4	Mina Padi		MUNGKID, RAMBEANAK	KANTOR DESA RAMBEANAK	1 paket	50.000.000		0
3.1.3.1.3.1.1.1.28.301.2	Peningkatan Kapasitas dan Revitalisasi BBI Lokal	Jumlah produksi benih ikan BBI	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN	BBI Sawangan dan Grabag	4000000 ekor	164.000.000	4000000 ekor	164.000.000

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
3.1.3.1.3.1.1.1.28.301.3	Rehabilitasi/Pembangunan Sarana Prasarana Perikanan	Jumlah Pembangunan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Perikanan (paket)	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN	Dinas Peternakan dan Perikanan	3 paket/kelompok	0	3 paket/kelompok	500.000.000
		Pengadaan tanah perluasan dan pembangunan pasar ikan bojong			0 paket		0 paket	
		Dokumen perencanaan pembelian tanah pasar ikan bojong			0 dokumen		0 dokumen	
3.1.3.1.3.1.1.1.28.301.4	Peningkatan Kesehatan Ikan dan Lingkungan	jumlah vitamin, obat, vaksin kesehatan lingkungan dan budidaya perikanan	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN	Dinas Peternakan dan Perikanan	1 paket	20.000.000	1 paket	35.000.000
3.1.3.1.3.1.1.1.28.301.5	Pelestarian Sumber Daya Hayati Perikanan	Jumlah titik penebaran (lokasi)	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN	Dinas Peternakan dan Perikanan	7 lokasi	0	7 lokasi	65.000.000
		Jumlah ikan ditebar di perairan umum (ekor)			43260 ekor		43260 ekor	
3.1.3.1.3.1.1.1.28.301.6	Intensifikasi dan Ekstensifikasi Budidaya Perikanan (DBHCHT)	Jumlah pokdakan pembudidaya kolam pekarangan (KK non miskin) yang terfasilitasi bantuan	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN	Dinas Peternakan dan Perikanan	10 kelompok	384.306.000	10 kelompok	600.000.000
		Jumlah pokdakan pembenihan (KK non miskin) yang terfasilitasi bantuan induk ikan			9 kelompok		9 kelompok	
3.1.1.1.28.301.6.1	Bantuan Induk Gurami		SRUMBUNG, PUCANGANOM	Desa Pucanganom	1 paket	30.000.000		0
3.1.3.1.3.1.1.1.28.301.7	Rehabilitasi/Pembangunan Sarana Prasarana Perikanan (DAK)	Jumlah Pembangunan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Perikanan (paket)	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN	Dinas Peternakan dan Perikanan	5 paket/kelompok	1.010.430.000	5 paket/kelompok	1.010.430.000

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
3.1.3.1.3.1.1.1.29.301	Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan dan Sistem Penyuluhan	Cakupan optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan			5 %	166.000.000		5 %	806.000.000
		Angka konsumsi ikan			19,90 kg perkapita pertahun			19,90 kg perkapita pertahun	
		Cakupan bina kelompok pembudidaya ikan			5 %			5 %	
		Cakupan pengembangan kawasan budidaya perikanan air tawar			3 %			3 %	
3.1.3.1.3.1.1.1.29.301.1	Gerakan Makan Ikan (Gemarikan)	Jumlah peserta Gemarikan (orang)	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN	Dinas Peternakan dan Perikanan	1750 orang	0		1750 orang	365.000.000
		Sosialisasi Forikan Kecamatan			0 event/kegiatan			0 event/kegiatan	
3.1.3.1.3.1.1.1.29.301.2	Peningkatan Mutu Olahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Jumlah peserta bintek pengolahan dan pemasaran hasil perikanan (orang)	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN	Dinas Peternakan dan Perikanan	105 orang	0		105 orang	125.000.000
		Pembinaan fasilitasi dan sertifikasi produk olahan perikanan (unit)			2 unit			2 unit	
3.1.3.1.3.1.1.1.29.301.3	Peningkatan Jaringan Pemasaran/Promosi Perikanan	Jumlah promosi/jaringan pemasaran produksi perikanan	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN	Dinas Peternakan dan Perikanan	2 event/kegiatan	116.000.000		2 event/kegiatan	116.000.000
		Sapras pemasaran hasil perikanan			2 kelompok			2 kelompok	
		Fasilitasi edukasi perikanan (orang)			10000 orang			10000 orang	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
3.1.3.1.3.1.1.1.29.301.4	Pengembangan Usaha Pelayanan Perikanan (PUPP)	Jumlah Fasilitasi/ Sosialisasi Peningkatan Kelembagaan Kelompok Perikanan	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN	Dinas Peternakan dan Perikanan	20 kelompok	50.000.000	20 kelompok	200.000.000
		Fasilitasi ijin usaha perikanan			5 ijin usaha		5 ijin usaha	
		Pemantauan peredaran ikan konsumsi			21 lokasi/kecamatan		21 lokasi/kecamatan	
		Jumlah pelaku usaha perikanan yang terfasilitasi dalam lembaga ekonomi keuangan			30 orang		30 orang	
3.3	Kelautan dan Perikanan					1.959.268.788		5.194.859.993
3.3.3.3.3.1.1.1.22.303	Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	Cakupan Peningkatan Produksi Hasil Peternakan			2 %	1.548.268.788	2 %	4.082.659.993
		Cakupan peningkatan sarana dan prasarana peternakan			3 %		3 %	
		Cakupan penerapan teknologi peternakan			75 %		75 %	
		Cakupan peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan			3 %		3 %	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja
3.3.3.3.3.1.1.1.22.303.8	Pengembangan Agribisnis Peternakan	Jumlah kelompok peternak kambing/domba/PE yang terfasilitasi	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN	Dinas Peternakan dan Perikanan	20 kelompok	0	20 kelompok	750.000.000
		Jumlah induk ternak sapi perah/sapi potong/sapi betina produktif (ekor) yang terfasilitasi pakan ternak			50 ekor		50 ekor	
		Jumlah kelompok Peternak Ayam Buras KK miskin dan KK non miskin yang terfasilitasi bantuan			10 kelompok		10 kelompok	
		Jumlah kelompok Peternak Kelinci yang terfasilitasi bantuan			4 kelompok		4 kelompok	
3.1.1.1.22.303.8.5	Peternakan Kambing		GRABAG, KETAWANG	DESA KETAWANG	1 paket	200.000.000		0
3.1.1.1.22.303.8.4	Pelatihan Budidaya Kambing		GRABAG, SEWORAN	BALAI DESA SEWORAN	1 paket	50.000.000		0
3.1.1.1.22.303.8.3	Pelatihan Budidaya Ternak Kambing		GRABAG, KALIKUTO	DESA KALIKUTO	1 paket	30.000.000		0
3.1.1.1.22.303.8.2	budidaya sapi dan kambing		DUKUN, KALIBENING	Desa Kalibening	1 paket	150.000.000		0
3.1.1.1.22.303.8.1	PELATIHAN BUDIDAYA KELINCI		GRABAG, BANARAN	Balai desa Banaran	1 paket	50.000.000		0
3.1.1.1.22.303.8.8	Bantuan Ternak Domba		MERTOYUDAN, BANYUROJO	SEKARAN	1 paket	100.000.000		0
3.1.1.1.22.303.8.9	Pelatihan Peternakan Kambing		SECANG, SIDOMULYO	Desa Sidomulyo	1 paket	40.000.000		0
3.1.1.1.22.303.8.6	Pelatihan Budidaya Kambing		KAJORAN, SUKOREJO	sukorejo	1 paket	100.000.000		0

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
3.3.3.3.3.1.1.1.22.303.10	Pembinaan Kelompok ternak	Pembinaan kelompok penerima bantuan	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN	Dinas Peternakan dan Perikanan	20 orang	0	20 orang	449.999.998
		Jumlah pelaksanaan Pembinaan Pelaku Usaha Peternakan (orang)			20 orang		20 orang	
		pengiriman PENAS			- orang		- orang	
		Jumlah kontes ternak			1 paket		1 paket	
3.3.3.3.3.1.1.1.22.303.16	Pengembangan itik Magelang	Jumlah kelompok pembibitan itik Magelang yang terfasilitasi bantuan (paket)	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN	Dinas Peternakan dan Perikanan	5 kelompok	0	5 kelompok	300.000.000
3.3.3.3.3.1.1.1.22.303.23	Pengembangan Itik Magelang (DBHCHT)	Jumlah kelompok pengembangan itik Magelang yang terfasilitasi bantuan (paket)	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN	Dinas Peternakan dan Perikanan	20 kelompok	219.589.982	20 kelompok	600.000.000
3.3.3.3.3.1.1.1.22.303.26	Pengembangan Sarana Prasarana dan Alat Produksi Peternakan	Sapras Peternakan, Pasar hewan, RPH/RPU, Puskesmas	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN	Dinas Peternakan dan Perikanan	32 lokasi/paket/unit	0	32 lokasi/paket/unit	1.382.581.816
3.1.1.1.22.303.26.1	bantuan pembuatan kandang dan bantuan ternak sapi		PAKIS, KAJANGKOSO	kajangkoso	1 paket	150.000.000		0
3.3.3.3.3.1.1.1.22.303.32	Penyusunan dan Sosialisasi Peraturan Perundangan Peternakan Perikanan	Jumlah peserta sosialisasi (orang)	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN	Dinas Peternakan dan Perikanan	40 orang	10.000.000	40 orang	50.000.000
3.3.3.3.3.1.1.1.22.303.33	Pengembangan Sarana Prasarana Peternakan (DAK)	Jumlah sarana prasarana peternakan (unit)	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN	Peterikan	10 kelompok/unit	1.224.678.806	10 kelompok/unit	355.078.179

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja
3.3.3.3.3.1.1.1.22.303.35	Pengelolaan dan Pemasaran Produk Hasil Peternakan	Pembinaan peternak dan Jumlah jejaring untuk promosi pengelolaan dan pemasaran hasil produksi dan pengolahan hasil peternakan	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN	Dinas Peternakan dan Perikanan	0 orang	0	0 orang	100.000.000
		Jumlah peserta bintek (orang)			60 orang		60 orang	
3.3.3.3.3.1.1.1.22.303.36	Peningkatan Pelayanan Inseminasi Buatan	Jumlah akseptor yang mendapat pelayanan Inseminasi Buatan (ekor)	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN	Dinas Peternakan dan Perikanan	9000 ekor	94.000.000	9000 ekor	95.000.000
3.3.3.3.3.1.1.1.30.303	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Hewan	Cakupan pencegahan dan penanggulangan penyakit hewan			100 %	411.000.000	100 %	1.112.200.000
3.3.3.3.3.1.1.1.30.303.1	Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Hewan Menular	Pengendalian kasus penyakit hewan menular (ekor) dan jumlah lokasi pencegahan dan penanggulangan penyakit hewan menular/zoonosis	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN	Dinas Peternakan Perikanan Kab Magelang	21 lokasi/kecamatan	52.000.000	21 lokasi/kecamatan	339.200.000
		Sosialisasi penyakit hewan (orang)			50 orang		50 orang	
3.3.3.3.3.1.1.1.30.303.2	Peningkatan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Pembinaan Penyedia bahan PAH yang ASUH (Aman Sehat Utuh Halal) (orang)	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN	Dinas Peternakan dan Perikanan	100 orang	7.500.000	100 orang	350.000.000
		Sosialisasi gerakan minum susu dan telur (orang)			2750 orang		2750 orang	
3.3.3.3.3.1.1.1.30.303.3	Pengawasan Pematangan Hewan Qurban	Jumlah lokasi pemantauan (desa)	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN	Dinas Peternakan dan Perikanan	376 desa	7.500.000	376 desa	85.000.000
		Jumlah peserta pelatihan jagal yang sehat/juleha (orang)			320 orang		320 orang	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
3.3.3.3.3.1.1.1.30.303.4	Pengawasan Obat Hewan dan Pelayanan Jasa Medik	Jumlah lokasi poultry/pet shop/toko obat hewan/depo/klinik hewan yang diawasi se Kabupaten Magelang (unit)	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN	Dinas Peternakan dan Perikanan	40 unit	10.000.000		40 unit	75.000.000
		Sosialisasi jasa medik, pengawasan obat (orang)			110 orang			110 orang	
3.3.3.3.3.1.1.1.30.303.5	Surveillens dan Pengujian Penyakit Hewan dan Ikan	Jumlah sampel pengujian penyakit	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN	Dinas Peternakan dan Perikanan	1000 sampel	75.000.000		1000 sampel	85.000.000
3.3.3.3.3.1.1.1.30.303.6	Peningkatan Pelayanan Rumah Potong Hewan	Jumlah hewan yang dilayani (ekor)	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN	Dinas Peternakan dan Perikanan	1449 ekor	68.000.000		1449 ekor	75.000.000
3.3.3.3.3.1.1.1.30.303.7	Peningkatan Pelayanan Puskesmas	Jumlah hewan yang dilayani (ekor)	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN	Dinas Peternakan dan Perikanan	1500 ekor	191.000.000		1500 ekor	103.000.000
Total						4.844.504.788			10.546.913.989

PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH

KABUPATEN MAGELANG

TAHUN 2021

Nama Perangkat Daerah : SEKRETARIAT DAERAH

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
1	2	3	4		5	6	7	8	9
4	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang					13.156.714.780			21.532.073.829
4.1	Administrasi Pemerintahan					13.156.714.780			21.532.073.829
4.1.4.1.4.1.3.1.7.401	Program Manajemen Administrasi Pelayanan Umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah			100 persen	101.800.000		100 persen	192.140.000
4.1.4.1.4.1.3.1.7.401.1	Pengelolaan Surat Menyurat, Kearsipan dan Bahan Pustaka	Jumlah surat yang dikelola	SEKRETARIAT DAERAH - Bagian Tata Pemerintahan	Kabupaten Magelang	750 surat	6.700.000	750 surat	10.000.000	
		Jumlah arsip yang di kelola			450 dokumen		450 dokumen		
4.1.4.1.4.1.3.1.7.401.2	Penyelenggaraan Koordinasi dan Konsultasi Perangkat Daerah	Jumlah rapat koordinasi yang diselenggarakan	SEKRETARIAT DAERAH - Bagian Tata Pemerintahan	Kabupaten Magelang dan Luar Daerah Kabupaten Magelang	70 rapat	75.000.000	70 rapat	152.140.000	
		Jumlah perjalanan dinas luar daerah yang terlaksana			90 perjalanan dinas		90 perjalanan dinas		
		Jumlah perjalanan dinas dalam daerah yang terlaksana			250 perjalanan dinas		250 perjalanan dinas		
4.1.4.1.4.1.3.1.7.401.3	Pengadaan dan Pengelolaan Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya	Jumlah paket pengadaan perlengkapan gedung kantor	SEKRETARIAT DAERAH - Bagian Tata Pemerintahan	Bagian Pemerintahan	3 paket	13.400.000	3 paket	20.000.000	
		Jumlah paket pengadaan peralatan gedung kantor			4 paket		4 paket		
		Jumlah aset yang di kelola			60 buah		60 buah		

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
4.1.4.1.4.1.3.1.7.401.5	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya	Jumlah peralatan yang dipelihara	SEKRETARIAT DAERAH - Bagian Tata Pemerintahan	Bagian Pemerintahan	60 buah	6.700.000	60 buah	10.000.000
		Jumlah perlengkapan yang dipelihara			90 buah		90 buah	
		Jumlah kendaraan dinas roda empat yang dipelihara			1 unit		1 unit	
		Jumlah kendaraan dinas roda dua yang dipelihara			4 unit		4 unit	
4.1.4.1.4.1.3.1.8.401	Program Perencanaan, Keuangan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian perencanaan, evaluasi kinerja OPD, dan keuangan perangkat daerah			100 persen	18.414.000	100 persen	40.000.000
4.1.4.1.4.1.3.1.8.401.1	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah kegiatan yang dikelola	SEKRETARIAT DAERAH - Bagian Tata Pemerintahan	Bagian Pemerintahan	17 kegiatan	9.764.000	17 kegiatan	20.000.000
		Jumlah laporan keuangan yang tersusun			12 dokumen		12 dokumen	
4.1.4.1.4.1.3.1.8.401.2	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Renstra Perangkat Daerah yang tersusun	SEKRETARIAT DAERAH - Bagian Tata Pemerintahan	Bagian Pemerintahan	1 dokumen	5.035.000	1 dokumen	10.000.000
		Jumlah dokumen Renja Perangkat Daerah yang tersusun			2 dokumen		2 dokumen	
4.1.4.1.4.1.3.1.8.401.3	Penyusunan Laporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen pelaporan yang tersusun	SEKRETARIAT DAERAH - Bagian Tata Pemerintahan	Bagian Pemerintahan	4 dokumen	3.615.000	4 dokumen	10.000.000
		Jumlah dokumen monitoring , evaluasi, dan pelaporan per-tribulanan yang tersusun			4 dokumen		4 dokumen	
		Jumlah dokumen evaluasi jangka menengah yang tersusun			2 dokumen		2 dokumen	
4.1.4.1.4.1.3.1.33.401	Program Perumusan dan Pengendalian Kebijakan Pemerintahan	persentase kebijakan pemerintahan yang dijalankan			90 persen	723.950.000	90 persen	1.890.000.000
4.1.4.1.4.1.3.1.33.401.1	Peningkatan Koordinasi dan Evaluasi Pelayanan Publik Bidang Pemerintahan Umum	Jumlah kecamatan yang melaksanakan paten	SEKRETARIAT DAERAH - Bagian Tata Pemerintahan	Kabupaten Magelang dan Luar Daerah Kabupaten Magelang	21 kecamatan	100.000.000	21 kecamatan	450.000.000
		jumlah fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan kecamatan			21 kecamatan		21 kecamatan	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
4.1.4.1.4.1.3.1.33.401.2	Fasilitasi Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan	Jumlah konflik pertanahan yang difasilitasi penyelesaiannya	SEKRETARIAT DAERAH - Bagian Tata Pemerintahan	Kabupaten Magelang	3 dokumen	0	3 dokumen	50.000.000
4.1.4.1.4.1.3.1.33.401.3	Fasilitasi Penyelenggaraan Otonomi Daerah dan Standar Pelayanan Minimal (SPM)	Jumlah Dokumen LPPD	SEKRETARIAT DAERAH - Bagian Tata Pemerintahan	Kabupaten Magelang dan Luar Daerah Kabupaten Magelang	1 kali	588.950.000	1 kali	1.000.000.000
		Jumlah Dokumen Tapal Batas Wilayah Administrasi Antar Daerah			2 dokumen		2 dokumen	
		Jumlah Dokumen Unsur Rupabumi yang Nama-namanya Telah Dibakukan			1 dokumen		1 dokumen	
		Jumlah Desk Pilkada			na kali		na kali	
		Jumlah Pelantikan KDH/WKDH			na kali		na kali	
		Jumlah Desk Pemilu			na kali		na kali	
		Jumlah Laporan SPM			1 dokumen		1 dokumen	
		Jumlah koordinasi dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan			12 kali		12 kali	
4.1.4.1.4.1.3.1.33.401.4	Fasilitasi/Pembentukan Kerjasama Daerah	Jumlah dokumen Kerjasama Antar Daerah	SEKRETARIAT DAERAH - Bagian Tata Pemerintahan	Kabupaten Magelang dan Luar Daerah Kabupaten Magelang	10 dokumen	0	10 dokumen	80.000.000
		Jumlah dokumen Kerjasama Dengan Pihak Ketiga			25 dokumen		25 dokumen	
		Jumlah Kontribusi/ Iuran APKASI			1 Tahun		1 Tahun	
		Jumlah Kontribusi/ Iuran FORSESDASI			1 Tahun		1 Tahun	
4.1.4.1.4.1.3.1.33.401.5	Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Jumlah rumusan konsep kewenangan desa	SEKRETARIAT DAERAH - Bagian Tata Pemerintahan	Kabupaten Magelang	0 dokumen	35.000.000	0 dokumen	210.000.000
		Jumlah Produk Hukum Daerah tentang Desa			5 dokumen		5 dokumen	
		Jumlah laporan monitoring dan evaluasi desa			73 dokumen		73 dokumen	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja
4.1.4.1.4.1.3.1.33.401.6	Fasilitasi Penyelenggaraan Pemberdayaan Desa	Jumlah pemerintah desa yang difasilitasi pencairan Bantuan Keuangan Khusus	SEKRETARIAT DAERAH - Bagian Tata Pemerintahan	Kabupaten Magelang	367 kali	0	367 kali	100.000.000
		Jumlah Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan pemberdayaan dan pemerintahan desa			12 kali		12 kali	
4.1.4.1.4.1.3.2.7.401	Program Manajemen Administrasi Pelayanan Umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah			100 persen	109.608.000	100 persen	258.320.000
4.1.4.1.4.1.3.2.7.401.1	Pengelolaan Surat Menyurat, Kearsipan dan Bahan Pustaka	Jumlah surat yang dikelola	SEKRETARIAT DAERAH - Bagian Organisasi	Bagian Organisasi, Sekretariat Daerah	4800 surat	5.695.000	4800 surat	8.500.000
		Jumlah arsip yang dikelola			160 Arsip		160 Arsip	
4.1.4.1.4.1.3.2.7.401.2	Penyelenggaraan Koordinasi dan Konsultasi Perangkat Daerah	Jumlah perjalanan dinas luar daerah yang terlaksana	SEKRETARIAT DAERAH - Bagian Organisasi	Bagian Organisasi, Sekretariat Daerah	80 Perjalanan	50.000.000	80 Perjalanan	150.000.000
		Jumlah perjalanan dinas dalam daerah yang terlaksana			35 Perjalanan		35 Perjalanan	
		Jumlah rapat koordinasi yang diselenggarakan			20 Rapat		20 Rapat	
4.1.4.1.4.1.3.2.7.401.3	Pengadaan dan Pengelolaan Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya	Jumlah paket pengadaan perlengkapan gedung kantor	SEKRETARIAT DAERAH - Bagian Organisasi	Bagian Organisasi Setda Kab.Magelang	3 Paket	43.306.000	3 Paket	67.000.000
		Jumlah paket pengadaan peralatan gedung kantor			2 Paket		2 Paket	
4.1.4.1.4.1.3.2.7.401.5	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya	Jumlah peralatan yang dipelihara	SEKRETARIAT DAERAH - Bagian Organisasi	Bagian Organisasi Setda Kab.Magelang	20 unit	5.137.000	20 unit	7.820.000
		Jumlah perlengkapan yang dipelihara			20 Unit		20 Unit	
4.1.4.1.4.1.3.2.7.401.7	Peningkatan Kapasitas dan Disiplin Aparatur Sipil Negara	Frekuensi pembinaan ASN	SEKRETARIAT DAERAH - Bagian Organisasi	Bagian Umum, Sekretariat Daerah	4 Kali	5.470.000	4 Kali	25.000.000
4.1.4.1.4.1.3.2.8.401	Program Perencanaan, Keuangan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian perencanaan, evaluasi kinerja OPD, dan keuangan perangkat daerah			100 Persen	23.015.000	100 Persen	46.500.000

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
4.1.4.1.4.1.3.2.8.401.1	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah kegiatan yang dikelola	SEKRETARIAT DAERAH - Bagian Organisasi	Sekretariat Daerah	13 Kegiatan	4.350.000		13 Kegiatan	6.500.000
4.1.4.1.4.1.3.2.8.401.2	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Renstra Perangkat Daerah yang tersusun	SEKRETARIAT DAERAH - Bagian Organisasi	Bagian Administrasi Pembangunan, Sekretariat Daerah	1 Dokumen	4.270.000		1 Dokumen	10.000.000
		Jumlah dokumen Renja Perangkat Daerah yang tersusun			2 Dokumen			2 Dokumen	
4.1.4.1.4.1.3.2.8.401.3	Penyusunan Laporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen pelaporan yang tersusun	SEKRETARIAT DAERAH - Bagian Organisasi	Bagian Administrasi Pembangunan, Sekretariat Daerah	4 Dokumen	4.270.000		4 Dokumen	10.000.000
		Jumlah dokumen monitoring, evaluasi dan pelaporan pertribulan uang tersusun			4 Dokumen			4 Dokumen	
		Jumlah dokumen jangka menengah yang tersusun			2 dokumen			2 dokumen	
		Jumlah Dokumen Profil Perangkat Daerah yang tersusun			1 Dokumen			1 Dokumen	
4.1.4.1.4.1.3.2.8.401.4	Penyusunan Dokumen Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Perangkat Daerah	Jumlah Norma, Standart, prosedur dan kriteria perangkat daerah yang tersusun	SEKRETARIAT DAERAH - Bagian Organisasi	Bagian Adminstrasi Pembangunan, Sekretariat Daerah	15 dokumen	10.125.000		15 dokumen	20.000.000
4.1.4.1.4.1.3.2.37.401	Program Pengembangan Kelembangan, Tatalaksana dan Peningkatan Kinerja Organisasi	Persentase dokumen kelembagaan yang ditindaklanjuti			100 Persen	165.620.000		100 Persen	915.000.000
		Persentase dokumen ketatalaksanaan yang diterapkan			100 Persen			100 Persen	
		Persentase unit pelayanan publik yang mendapat nilai baik			100 Persen			100 Persen	
		Persentase dokumen evaluasi kinerja PD yang disusun tepat waktu			100 Persen			100 Persen	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
4.1.4.1.4.1.3.2.37.401.1	Peningkatan Kesesuaian Kelembagaan OPD terhadap Peraturan Perundangan	Jumlah dokumen evaluasi kelembagaan yang disusun	SEKRETARIAT DAERAH - Bagian Organisasi	Sekretariat Daerah	1 Dokumen	74.200.000		1 Dokumen	100.000.000
4.1.4.1.4.1.3.2.37.401.2	Penyusunan Evaluasi Jabatan dan Standar Kompetensi Jabatan SKPD	Jumlah dokumen evaluasi jabatan	SEKRETARIAT DAERAH - Bagian Organisasi	Bagian Organisasi Kab.Magelang	1 Dokumen	0	1 Dokumen	200.000.000	
		Jumlah kamus standart kompetensi jabatan yang disusun			48 Dokumen		48 Dokumen		
4.1.4.1.4.1.3.2.37.401.3	Pengembangan Ketatalaksanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen ketatalaksanaan perangkat daerah yang disusun	SEKRETARIAT DAERAH - Bagian Organisasi	Sekretariat Daerah	1 Dokumen	0	1 Dokumen	80.000.000	
		Jumlah dokumen Proses Bisnis perangkat daerah yang disusun			24 Dokumen		24 Dokumen		
4.1.4.1.4.1.3.2.37.401.4	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Perangkat Daerah	Jumlah unit pelayanan publik yang melakukan survei kepuasan masyarakat	SEKRETARIAT DAERAH - Bagian Organisasi	Sekretariat Daerah	150 Unit	41.420.000	150 Unit	175.000.000	
		Jumlah inovasi Pelayanan publik yang diikutsertakan dalam lombak			3 Unit		3 Unit		
4.1.4.1.4.1.3.2.37.401.5	Peningkatan Kinerja Organisasi Perangkat Daerah	Jumlah dokumen penetapan perjanjian kinerja yang disusun	SEKRETARIAT DAERAH - Bagian Organisasi	Sekretariat Daerah	4 Dokumen	25.000.000	4 Dokumen	210.000.000	
		Jumlah dokumen laporan kinerja yang disusun			2 Dokumen		2 Dokumen		
4.1.4.1.4.1.3.2.37.401.6	Pengembangan Kebijakan Pendayagunaan Aparatur Daerah dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Reformasi Birokrasi	SEKRETARIAT DAERAH - Bagian Organisasi	Sekretariat Daerah	0 Dokumen	25.000.000	0 Dokumen	150.000.000	
		Jumlah SKPD yang menyusun Rencana Aksi Reformasi Birokrasi			0 Dokumen		0 Dokumen		
		Jumlah SKPD yang mengembangkan Zona Integritas			3 SKPD		3 SKPD		
		Jumlah SKPD yang mengembangkan Budaya Kerja			4 SKPD		4 SKPD		

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
4.1.4.1.4.1.3.3.7.401	Program Manajemen Administrasi Pelayanan Umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah			100 Persen	122.820.000		100 Persen	230.000.000
4.1.4.1.4.1.3.3.7.401.1	Pengelolaan Surat Menyurat, Kearsipan dan Bahan Pustaka	Jumlah surat yang dikelola	SEKRETARIAT DAERAH - Bagian Hukum	Bagian Hukum	3000 Surat	7.620.000		3000 Surat	20.000.000
4.1.4.1.4.1.3.3.7.401.2	Penyelenggaraan Koordinasi dan Konsultasi Perangkat Daerah	Jumlah perjalanan dinas luar daerah yang terlaksana	SEKRETARIAT DAERAH - Bagian Hukum	Bagian Hukum	50 kali	75.000.000		50 kali	150.000.000
		Jumlah perjalanan dinas dalam daerah yang terlaksana			50 kali			50 kali	
		Jumlah rapat koordinasi yang diselenggarakan			15 kali			15 kali	
4.1.4.1.4.1.3.3.7.401.3	Pengadaan dan Pengelolaan Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya	Jumlah paket pengadaan perlengkapan gedung kantor	SEKRETARIAT DAERAH - Bagian Hukum	Bagian Hukum	1 paket	33.500.000		1 paket	50.000.000
		Jumlah paket pengadaan peralatan gedung kantor			0 paket			0 paket	
4.1.4.1.4.1.3.3.7.401.5	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya	Jumlah peralatan yang dipelihara	SEKRETARIAT DAERAH - Bagian Hukum	Bagian Hukum	7 peralatan	6.700.000		7 peralatan	10.000.000
4.1.4.1.4.1.3.3.8.401	Program Perencanaan, Keuangan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian perencanaan, evaluasi kinerja OPD dan keuangan perangkat daerah			100 persen	10.050.000		100 persen	15.000.000
4.1.4.1.4.1.3.3.8.401.1	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah kegiatan yang dikelola	SEKRETARIAT DAERAH - Bagian Hukum	Bagian Hukum	11 kegiatan	10.050.000		11 kegiatan	15.000.000
4.1.4.1.4.1.3.3.32.401	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan dan Bantuan Hukum	Persentase Produk Hukum Daerah yang disusun tepat asas			100 Persen	390.332.000		100 Persen	845.988.000
		Persentase produk hukum daerah yang dikaji sesuai asas			100 Persen			100 Persen	
		Persentase permasalahan hukum yang didampingi			100 Persen			100 Persen	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
4.1.4.1.4.1.3.3.32.401.1	Perencanaan, Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi serta Asistensi Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Propemperda	SEKRETARIAT DAERAH - Bagian Hukum	Bagian Hukum	2 Dokumen	155.166.000		2 Dokumen	200.000.000
		Jumlah dokumen Raperda			12 Dokumen			12 Dokumen	
		Jumlah Raperda yang dibahas di tingkat DPRD			9 Dokumen			9 Dokumen	
4.1.4.1.4.1.3.3.32.401.2	Penyusunan Peraturan Bupati/Peraturan Bersama Kepala Daerah, Keputusan Bupati dan Keputusan Kepala Perangkat Daerah	Jumlah Peraturan Bupati/Peraturan Bersama Kepala Daerah yang disusun	SEKRETARIAT DAERAH - Bagian Hukum	Bagian Hukum	40 Dokumen	107.583.000		40 Dokumen	150.000.000
		Jumlah Keputusan Bupati/Keputusan Kepala SKPD yang disusun			480 Dokumen			480 Dokumen	
4.1.4.1.4.1.3.3.32.401.3	Kajian dan Evaluasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen kajian dan evaluasi Peraturan perundang-undangan yang disusun	SEKRETARIAT DAERAH - Bagian Hukum	Bagian Hukum	6 Dokumen	0		6 Dokumen	89.988.000
4.1.4.1.4.1.3.3.32.401.4	Pengelolaan JDIIH	Jumlah Dokumen Hukum yang dikelola	SEKRETARIAT DAERAH - Bagian Hukum	Bagian Hukum	60 Dokumen	0		60 Dokumen	100.000.000
4.1.4.1.4.1.3.3.32.401.5	Penanganan Permasalahan Hukum dan Harmonisasi Konsep Kesepakatan Bersama dan/atau Perjanjian Kerjasama	Jumlah Permasalahan Hukum Litigasi dan Non Litigasi yang ditangani	SEKRETARIAT DAERAH - Bagian Hukum	Bagian Hukum	27 Permasalahan Hukum	127.583.000		27 Permasalahan Hukum	230.000.000
		Jumlah Konsep Kesepakatan bersama dan/ atau perjanjian kerjasama yang diharmonisasi			30 Konsep			30 Konsep	
4.1.4.1.4.1.3.3.32.401.6	Penyuluhan Hukum dan HAM	Jumlah Penyuluhan Hukum	SEKRETARIAT DAERAH - Bagian Hukum	Bagian Hukum	6 Kali	0		6 Kali	76.000.000
		Jumlah Laporan Capaian Aksi HAM dan Penilaian Kabupaten Kota Peduli HAM yang disusun			5 Dokumen			5 Dokumen	
4.1.4.1.4.1.3.4.7.401	Program Manajemen Administrasi Pelayanan Umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Pelayanan Umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah			100 Persen	78.125.000		100 Persen	186.000.000
4.1.4.1.4.1.3.4.7.401.1	Pengelolaan Surat Menyurat, Kearsipan dan Bahan Pustaka	Jumlah Surat yang Dikelola	SEKRETARIAT DAERAH - Bagian Perekonomian	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SDA SETDA KABUPATEN MAGELANG	1300 surat	7.370.000		1300 surat	12.000.000
		Jumlah Arsip yang Dikelola			300 Dokumen			300 Dokumen	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
4.1.4.1.4.1.3.4.7.401.2	Penyelenggaraan Koordinasi dan Konsultasi Perangkat Daerah	Jumlah Perjalanan Dinas Luar Daerah yang Terlaksana	SEKRETARIAT DAERAH - Bagian Perekonomian	Bagian Perekonomian dan SDA Setda Kabupaten Magelang	55 kali	64.725.000		55 kali	130.000.000
		Jumlah Rapat Koordinasi yang Diselenggarakan			12 Rapat			12 Rapat	
		Jumlah Perjalanan Dinas Dalam Daerah yang Terlaksana			100 Kali			100 Kali	
4.1.4.1.4.1.3.4.7.401.3	Pengadaan dan Pengelolaan Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya	Jumlah Paket Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	SEKRETARIAT DAERAH - Bagian Perekonomian	Bagian Perekonomian dan SDA	1 Paket	0		1 Paket	30.000.000
		Jumlah Paket Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor			1 Paket			1 Paket	
4.1.4.1.4.1.3.4.7.401.5	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya	Jumlah Peralatan yang dipelihara	SEKRETARIAT DAERAH - Bagian Perekonomian	Bagian Perekonomian dan SDA Setda Kabupaten Magelang	14 Unit	6.030.000		14 Unit	14.000.000
4.1.4.1.4.1.3.4.8.401	Program Perencanaan, Keuangan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Perencanaan, Evaluasi Kinerja OPD, dan Keuangan Perangkat Daerah			100 Persen	5.832.750		100 Persen	10.000.000
4.1.4.1.4.1.3.4.8.401.1	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah Kegiatan yang Dikelola	SEKRETARIAT DAERAH - Bagian Perekonomian	Bagian Perekonomian dan SDA Setda Kabupaten Magelang	11 Kegiatan	5.832.750		11 Kegiatan	10.000.000
		Jumlah Laporan Keuangan Yang Tersusun			132 Laporan			132 Laporan	
4.1.4.1.4.1.3.4.35.401	Program Perumusan dan Pengendalian Kebijakan Perekonomian	Persentase Kebijakan Perekonomian yang Dijalankan			100 Persen	182.642.500		100 Persen	669.999.999
		Persentase BUMD yang Berkinerja Baik			100 Persen			100 Persen	
		Persentase Peningkatan Sumbangan BUMD pada PAD			12 Persen			12 Persen	
4.1.4.1.4.1.3.4.35.401.1	Pembinaan BUMD	Jumlah BUMD yang Dibina	SEKRETARIAT DAERAH - Bagian Perekonomian	Bagian Perekonomian dan SDA Setda Kabupaten Magelang	5 BUMD	50.000.000		5 BUMD	174.999.999
		Jumlah Dewan Pengawas atau Komisaris dan Direksi BUMD yang Diseleksi			3 Orang			3 Orang	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
4.1.4.1.4.1.3.4.35.401.2	Penyusunan Kajian Pengembangan BUMD	Jumlah Dokumen Peraturan yang Disusun	SEKRETARIAT DAERAH - Bagian Perekonomian	Bagian Perekonomian dan SDA Setda Kabupaten Magelang	3 Dokumen	0	3 Dokumen	75.000.000
		Jumlah Dokumen Kajian Pengembangan BUMD			2 Dokumen		2 Dokumen	
4.1.4.1.4.1.3.4.35.401.3	Pelaksanaan Kegiatan Pendukung Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan TPAKD	SEKRETARIAT DAERAH - Bagian Perekonomian	Bagian Perekonomian dan Setda Kabupaten Magelang	1 Dokumen	40.000.000	1 Dokumen	180.000.000
		Jumlah Dokumen Rekapitulasi Program Kegiatan Prioritas yang Difasilitasi Melalui Program TJSJL dan PKBL			1 Dokumen		1 Dokumen	
		Jumlah LKM yang Dipersiapkan Untuk Berbadan Hukum dan Berijin			10 LKM		10 LKM	
		Jumlah Database SIKP			1 Database		1 Database	
4.1.4.1.4.1.3.4.35.401.4	Pelaksanaan Kegiatan Pendukung Stabilitas Ekonomi Masyarakat	Jumlah Dokumen Laporan Kegiatan Tim Pengendalian Inflasi Daerah	SEKRETARIAT DAERAH - Bagian Perekonomian	Bagian Perekonomian dan SDA Setda Kabupaten Magelang	2 Dokumen	42.312.500	2 Dokumen	105.000.000
		Jumlah Forum Penyelenggaraan Posko Terpadu			2 Forum		2 Forum	
4.1.4.1.4.1.3.4.35.401.5	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Program DBHCHT	Jumlah SKPD Pelaksana Pengguna DBHCHT	SEKRETARIAT DAERAH - Bagian Perekonomian	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SDA SETDA KABUPATEN MAGELANG	7 SKPD	25.000.000	7 SKPD	25.000.000
4.1.4.1.4.1.3.4.35.401.6	Pengendalian, Pengawasan, Monitoring dan Pelaporan Peredaran Pupuk dan LPG Bersubsidi	Jumlah Kios Pupuk Lengkap yang Dimonitoring	SEKRETARIAT DAERAH - Bagian Perekonomian	Bagian Perekonomian dan SDA Setda Kabupaten Magelang	96 Kios Pupuk Lengkap (KPL)	25.330.000	96 Kios Pupuk Lengkap (KPL)	110.000.000
		Jumlah Pangkalan yang Dimonitoring			105 Pangkalan		105 Pangkalan	
4.1.4.1.4.1.3.5.7.401	Program Manajemen Administrasi Pelayanan Umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah			100 Persen	59.118.000	100 Persen	166.000.000
4.1.4.1.4.1.3.5.7.401.1	Pengelolaan Surat Menyurat, Kearsipan dan Bahan Pustaka	Jumlah surat yang dikelola	SEKRETARIAT DAERAH - Bagian Admin Bangsa	Bagian administrasi pembangunan daerah setda kab magelang	2000 Surat	6.030.000	2000 Surat	9.000.000

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
4.1.4.1.4.1.3.5.7.401.2	Penyelenggaraan Koordinasi dan Konsultasi Perangkat Daerah	Jumlah perjalanan dinas luar daerah yang terlaksana	SEKRETARIAT DAERAH - Bagian Admin Bangda	Bagian Administrasi Pembangunan Daerah Setda Kab Magelang	45 Perjalanan	45.000.000		45 Perjalanan	72.000.000
		Jumlah perjalanan dinas dalam daerah yang terlaksana			35 Perjalanan			35 Perjalanan	
		Jumlah rapat koordinasi yang diselenggarakan			15 rapat			15 rapat	
4.1.4.1.4.1.3.5.7.401.3	Pengadaan dan Pengelolaan Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya	Jumlah paket pengadaan perlengkapan gedung kantor	SEKRETARIAT DAERAH - Bagian Admin Bangda	Bagian Administrasi Pembangunan Daerah Setda	2 Paket	0		2 Paket	70.000.000
		Jumlah paket pengadaan peralatan gedung kantor			3 Paket			3 Paket	
4.1.4.1.4.1.3.5.7.401.5	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya	Jumlah peralatan yang dipelihara	SEKRETARIAT DAERAH - Bagian Admin Bangda	Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kab. Magelang	20 Unit	8.088.000		20 Unit	15.000.000
		Jumlah perlengkapan yang dipelihara			10 Unit			10 Unit	
4.1.4.1.4.1.3.5.8.401	Program Perencanaan, Keuangan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian perencanaan, evaluasi kinerja OPD, dan keuangan perangkat daerah			100 Persen	12.225.000		100 Persen	26.400.000
4.1.4.1.4.1.3.5.8.401.1	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah kegiatan yang dikelola	SEKRETARIAT DAERAH - Bagian Admin Bangda	Bagian administrasi pembangunan daerah setda kab magelang	12 Kegiatan	4.290.000		12 Kegiatan	6.400.000
		Jumlah laporan keuangan yang tersusun			144 Laporan			144 Laporan	
4.1.4.1.4.1.3.5.8.401.2	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Renstra Perangkat Daerah yang tersusun	SEKRETARIAT DAERAH - Bagian Admin Bangda	Bagian administrasi pembangunan daerah setda kab magelang	1 Dokumen	5.935.000		1 Dokumen	10.000.000
		Jumlah dokumen Renja Perangkat Daerah yang tersusun			2 Dokumen			2 Dokumen	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
4.1.4.1.4.1.3.5.8.401.3	Penyusunan Laporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen pelaporan yang tersusun	SEKRETARIAT DAERAH - Bagian Admin Bangda	Bagian administrasi pembangunan daerah setda kab magelang	4 Dokumen	2.000.000		4 Dokumen	10.000.000
		Jumlah dokumen monitoring, evaluasi dan pelaporan pertribulan uang tersusun			4 Dokumen			4 Dokumen	
		Jumlah dokumen jangka menengah yang tersusun			2 Dokumen			2 Dokumen	
		Jumlah Dokumen Profil Perangkat Daerah yang tersusun			1 Dokumen			1 Dokumen	
4.1.4.1.4.1.3.5.36.401	Program Perumusan dan Pengendalian Kebijakan Pembangunan	Cakupan penyusunan pedoman perencanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pembangunan daerah			100 Persen	245.931.200		100 Persen	675.000.000
4.1.4.1.4.1.3.5.36.401.1	Administrasi Perencanaan Pembangunan	Jumlah pedoman perencanaan pembangunan yang disusun	SEKRETARIAT DAERAH - Bagian Admin Bangda	Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kab. Magelang	2 Dokumen	93.284.200		2 Dokumen	225.000.000
		Jumlah daftar calon penerima hibah bansos			2 Daftar			2 Daftar	
4.1.4.1.4.1.3.5.36.401.2	Penyusunan LKPJ	Dokumen LKPJ yang disusun	SEKRETARIAT DAERAH - Bagian Admin Bangda	Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kab. Magelang	1 Dokumen	68.200.000		1 Dokumen	200.000.000
		Jumlah dokumen LAMJ yang tersusun			0 dokumen			0 dokumen	
4.1.4.1.4.1.3.5.36.401.3	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Administrasi Pembangunan	Pelaporan administrasi pembangunan yang tersusun : laporan perkembangan kegiatan APBD, Bankeu dan DAK	SEKRETARIAT DAERAH - Bagian Admin Bangda	Bagian administrasi pembangunan setda kab magelang	28 Laporan	84.447.000		28 Laporan	250.000.000
4.1.4.1.4.1.3.6.7.401	Program Manajemen Administrasi Pelayanan Umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah			100 Persen	55.550.000		100 Persen	80.400.000
4.1.4.1.4.1.3.6.7.401.1	Pengelolaan Surat Menyurat, Kearsipan dan Bahan Pustaka	Jumlah surat yang dikelola	SEKRETARIAT DAERAH - Bagian Kesra	Bagian Kesejahteraan Rakyat	600 Surat	4.460.000		600 Surat	6.700.000

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
4.1.4.1.4.1.3.6.7.401.2	Penyelenggaraan Koordinasi dan Konsultasi Perangkat Daerah	Jumlah perjalanan dinas dalam daerah yang terlaksana	SEKRETARIAT DAERAH - Bagian Kesra	Bagian Kesra	400 Perjalanan	47.070.000		400 Perjalanan	58.290.000
		Jumlah perjalanan dinas luar daerah yang terlaksana			60 Perjalanan			60 Perjalanan	
		Jumlah rapat koordinasi yang diselenggarakan			9 Rapat			9 Rapat	
4.1.4.1.4.1.3.6.7.401.3	Pengadaan dan Pengelolaan Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya	Jumlah paket pengadaan peralatan gedung kantor	SEKRETARIAT DAERAH - Bagian Kesra	Bagian Kesra	3 Paket	0		3 Paket	10.050.000
4.1.4.1.4.1.3.6.7.401.5	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya	Jumlah peralatan yang yang dikelola	SEKRETARIAT DAERAH - Bagian Kesra	Bagian Kesra	4 Paket	4.020.000		4 Paket	5.360.000
4.1.4.1.4.1.3.6.8.401	Program Perencanaan, Keuangan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian perencanaan, evaluasi kinerja OPD dan keuangan perangkat daerah			100 Persen	8.309.000		100 Persen	9.380.000
4.1.4.1.4.1.3.6.8.401.1	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah kegiatan yang dikelola	SEKRETARIAT DAERAH - Bagian Kesra	Bagian Kesra	12 Bulan	8.309.000		12 Bulan	9.380.000
4.1.4.1.4.1.3.6.34.401	Program Perumusan dan Pengendalian Kebijakan Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan	Cakupan Perumusan dan Pengendalian Kebijakan Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan			100 Persen	1.526.257.000		100 Persen	1.876.557.500
4.1.4.1.4.1.3.6.34.401.1	Peningkatan Koordinasi dan Harmonisasi Kebijakan Kesejahteraan Sosial	Jumlah dokumen kebijakan kesra dan masyarakat bidang kesejahteraan sosial	SEKRETARIAT DAERAH - Bagian Kesra	Bagian Kesra	4 Dokumen	78.628.500		4 Dokumen	123.837.500
4.1.4.1.4.1.3.6.34.401.2	Peningkatan Koordinasi dan Harmonisasi Kebijakan Perlindungan Perempuan dan Anak	Jumlah pelaksanaan kebijakan kesra dan masyarakat bidang perlindungan perempuan dan anak	SEKRETARIAT DAERAH - Bagian Kesra	Bagian Kesra	4 Dokumen	19.990.000		4 Dokumen	20.770.000

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
4.1.4.1.4.1.3.6.34.401.3	Peningkatan Koordinasi dan Harmonisasi Kebijakan Bidang Agama, Pendidikan dan Budaya	Jumlah kebijakan kesra dan kemasyarakatan bidang agama, pendidikan dan budaya	SEKRETARIAT DAERAH - Bagian Kesra	Bagian Kesra	9 Dokumen	1.427.638.500	9 Dokumen	1.731.950.000
		Jumlah Bulan Pengelolaan Islamic Center			12 Bulan		12 Bulan	
4.1.4.1.4.1.3.7.7.401	Program Manajemen Administrasi Pelayanan Umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah			100 Persen	172.660.580	100 Persen	214.550.580
4.1.4.1.4.1.3.7.7.401.1	Pengelolaan Surat Menyurat, Kearsipan dan Bahan Pustaka	Jumlah surat yang dikelola	SEKRETARIAT DAERAH - Bagian Humas dan Protokol	Bag. Humas dan Protokol	750 surat	55.219.430	750 surat	55.219.430
		Jumlah bahan bacaan yang disediakan			468 eksemplar		468 eksemplar	
		Jumlah buku himpunan klipng yang disusun			12 buku		12 buku	
4.1.4.1.4.1.3.7.7.401.2	Penyelenggaraan Koordinasi dan Konsultasi Perangkat Daerah	Jumlah Perjalanan Dinas Luar Daerah yang terlaksana	SEKRETARIAT DAERAH - Bagian Humas dan Protokol	Bagiam Protokol dan Komunikasi Pimpinan	90 Perjalanan	75.000.000	90 Perjalanan	116.890.000
		Jumlah rapat koordinasi yang diselenggarakan			5 rapat		5 rapat	
		Jumlah perjalanan dinas dalam daerah yang terlaksanakan			600 perjalanan		600 perjalanan	
4.1.4.1.4.1.3.7.7.401.3	Pengadaan dan Pengelolaan Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya	Jumlah paket pengadaan perlengkapan gedung kantor	SEKRETARIAT DAERAH - Bagian Humas dan Protokol	Bag. Protokol dan Komunikasi Pimpinan	1 paket	31.386.150	1 paket	31.386.150
		Jumlah paket pengadaan peralatan gedung kantor			2 paket		2 paket	
4.1.4.1.4.1.3.7.7.401.5	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya	Jumlah peralatan yang dipelihara	SEKRETARIAT DAERAH - Bagian Humas dan Protokol	Bag. Protokol dan Komunikasi Pimpinan	15 peralatan	11.055.000	15 peralatan	11.055.000
4.1.4.1.4.1.3.7.8.401	Program Perencanaan, Keuangan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian perencanaan, evaluasi kinerja OPD, dan keuangan perangkat daerah			100 Persen	7.698.750	100 Persen	10.265.000

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
4.1.4.1.4.1.3.7.8.401.1	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah kegiatan yang dikelola	SEKRETARIAT DAERAH - Bagian Humas dan Protokol	Bag. Protokol dan Komunikasi Pimpinan	8 kegiatan	7.698.750	8 kegiatan	10.265.000
4.1.4.1.4.1.3.7.40.401	Program Kehumasan dan Layanan Keprotokolan	Cakupan Kinerja Kehumasan dan Layanan Keprotokolan			100 Persen	423.000.000	100 Persen	965.288.750
4.1.4.1.4.1.3.7.40.401.1	Analisis Pemberitaan, Naskah Pidato, dan Dokumentasi	Jumlah dokumen analisis pemberitaan, naskah pidato, dan dokumentasi yang disusun	SEKRETARIAT DAERAH - Bagian Humas dan Protokol	Bag. Protokol dan Komunikasi Pimpinan	24 Dokumen	25.000.000	24 Dokumen	75.492.500
		Sistem Aplikasi Analisis Pemberitaan			0 Paket		0 Paket	
4.1.4.1.4.1.3.7.40.401.2	Peliputan, Editorial, dan Publikasi	Jumlah dokumen peliputan, editorial, dan publikasi yang disusun	SEKRETARIAT DAERAH - Bagian Humas dan Protokol	Bag. Protokol dan Komunikasi Pimpinan	66 Dokumen	348.000.000	66 Dokumen	785.900.000
4.1.4.1.4.1.3.7.40.401.3	Layanan Keprotokolan	Jumlah Layanan Keprotokolan	SEKRETARIAT DAERAH - Bagian Humas dan Protokol	Bag. Protokol dan Komunikasi Pimpinan	120 Kali	50.000.000	120 Kali	103.896.250
4.1.4.1.4.1.3.8.7.401	Program Manajemen Administrasi Pelayanan Umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah	Prosentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah			100 persen	5.281.875.000	100 persen	6.369.081.000
4.1.4.1.4.1.3.8.7.401.1	Pengelolaan Surat Menyurat, Kearsipan dan Bahan Pustaka	Jumlah surat yang dikelola	SEKRETARIAT DAERAH - Bagian Umum	Sekretariat Daerah - Bagian Umum	5000 surat	91.000.000	5000 surat	180.050.000
		Jumlah pengelolaan agenda surat menyurat Pimpinan Daerah			22 agenda		22 agenda	
		Jumlah laporan monitoring dan evaluasi persuratan			12 buku		12 buku	
4.1.4.1.4.1.3.8.7.401.2	Penyelenggaraan Koordinasi dan Konsultasi Perangkat Daerah	Jumlah perjalanan dinas luar daerah yang terlaksana	SEKRETARIAT DAERAH - Bagian Umum	Sekretariat Daerah - Bagian Umum	277 kali	400.000.000	277 kali	779.000.000
		Jumlah perjalanan dinas dalam daerah yang terlaksana			860 kali		860 kali	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
			Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
4.1.4.1.4.1.3.8.7.401.3	Pengadaan dan Pengelolaan Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya	Jumlah paket pengadaan perlengkapan gedung kantor	SEKRETARIAT DAERAH - Bagian Umum	Sekretariat Daerah - Bagian Umum	2 paket	164.880.000		2 paket	246.090.000
		Jumlah paket pengadaan peralatan gedung kantor			7 paket			7 paket	
		Jumlah aset dikelola			6750 buah			6750 buah	
4.1.4.1.4.1.3.8.7.401.4	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	SEKRETARIAT DAERAH - Bagian Umum	Sekretariat Daerah - Bagian Umum	9 gedung	2.426.082.000		9 gedung	2.504.673.000
		Jumlah rekening tagihan			3 rekening			3 rekening	
4.1.4.1.4.1.3.8.7.401.5	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya	Jumlah peralatan yang dipelihara	SEKRETARIAT DAERAH - Bagian Umum	Sekretariat Daerah - Bagian Umum	8 macam	1.121.627.000		8 macam	1.356.982.000
		Jumlah perlengkapan yang dipelihara			44 jenis			44 jenis	
		Jumlah kendaraan yang dipelihara			90 buah			90 buah	
4.1.4.1.4.1.3.8.7.401.6	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya	Jumlah paket rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	SEKRETARIAT DAERAH - Bagian Umum	Sekretariat Daerah - Bagian Umum	2 paket	196.000.000		2 paket	420.000.000
4.1.4.1.4.1.3.8.7.401.7	Peningkatan Kapasitas dan Disiplin Aparatur Sipil Negara	Jumlah tenaga kontrak yang ada di Setda	SEKRETARIAT DAERAH - Bagian Umum	Sekretariat Daerah - Bagian Umum	22 orang	882.286.000		22 orang	882.286.000
4.1.4.1.4.1.3.8.8.401	Program Perencanaan, Keuangan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Prosentase ketercapaian perencanaan, evaluasi kinerja OPD, dan keuangan perangkat daerah			100 Persen	150.426.000		100 Persen	224.516.000
4.1.4.1.4.1.3.8.8.401.1	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah kegiatan yang dikelola	SEKRETARIAT DAERAH - Bagian Umum	Sekretariat Daerah - Bagian Umum	14 kegiatan	150.426.000		14 kegiatan	224.516.000
		Jumlah pengelolaan administrasi keuangan bagian			9 bagian			9 bagian	
4.1.4.1.4.1.3.8.16.401	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala daerah/ Wakil Kepala Daerah	Cakupan peningkatan pelayanan kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah			100 persen	2.927.850.000		100 persen	3.835.687.000

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
4.1.4.1.4.1.3.8.16.401.10	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disewa untuk kegiatan - kegiatan pemerintah daerah	SEKRETARIAT DAERAH - Bagian Umum	Sekretariat Daerah - Bagian Umum	29.488 kali, buah, meter, paket.	329.307.000		29.488 kali, buah, meter, paket.	483.560.000
4.1.4.1.4.1.3.8.16.401.11	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Jabatan	Jumlah/ macam pengadaan peralatan rumah jabatan	SEKRETARIAT DAERAH - Bagian Umum	Sekretariat Daerah - Bagian Umum	5 paket	229.290.000	5 paket	139.000.000	
		Jumlah/ macam pengadaan perlengkapan rumah jabatan			5 paket		5 paket		
4.1.4.1.4.1.3.8.16.401.12	Pemeliharaan dan Rehabilitasi Rumah Jabatan	Jumlah rumah jabatan yang dipelihara	SEKRETARIAT DAERAH - Bagian Umum	Sekretariat Daerah - Bagian Umum	2 paket	224.852.000	2 paket	292.031.000	
		Jumlah/ macam rehabilitasi rumah jabatan			2 paket		2 paket		
4.1.4.1.4.1.3.8.16.401.13	Pemeliharaan Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas jabatan yang dipelihara	SEKRETARIAT DAERAH - Bagian Umum	Sekretariat Daerah - Bagian Umum	4 buah	320.664.000		4 buah	382.216.000
4.1.4.1.4.1.3.8.16.401.14	Fasilitasi Kegiatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah personil yang disediakan jasa pemeliharaan kesehatan KDH dan WKDH	SEKRETARIAT DAERAH - Bagian Umum	Sekretariat Daerah - Bagian Umum	7 orang	923.737.000	7 orang	1.086.750.000	
		Jumlah bulan pemenuhan kebutuhan rumah tangga KDH/ WKDH			12 bulan		12 bulan		
		Jumlah koordinasi dan konsultasi serta perjalanan dinas luar daerah yang dilaksanakan KDH/ WKDH.			70 kali		70 kali		
		Jumlah cinderamata dan karangan bunga yang tersedia selama satu tahun			326 buah/paket/set		326 buah/paket/set		
		Jumlah/ macam pengadaan pakaian dinas KDH/ WKDH			56 stel, buah, pasang		56 stel, buah, pasang		
		Jumlah kursus/ diklat yang diikuti KDH/ WKDH			4 kali		4 kali		
4.1.4.1.4.1.3.8.16.401.15	Penyelenggaraan Rapat Dinas dan Penerimaan Tamu	Jumlah rapat dinas dan penerimaan tamu pemerintah daerah	SEKRETARIAT DAERAH - Bagian Umum	Sekretariat Daerah - Bagian Umum	24.384 dos/paket	900.000.000		24.384 dos/paket	1.452.130.000
4.1.4.1.4.1.3.9.39.401	Program Peningkatan Kualitas Pengadaan Barang/Jasa	Indeks Kematangan UKPBJ			4 level	353.605.000		4 level	1.780.000.000

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
4.1.4.1.4.1.3.9.39.401.1	Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa	Jumlah pengadaan barang/jasa yang dilayani	SEKRETARIAT DAERAH - Bagian Pengadaan Barang Dan Jasa	Sekretariat Daerah	210 -Paket	213.605.000		210 -Paket	900.000.000
4.1.4.1.4.1.3.9.39.401.2	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa	Jumlah lembaga pengadaan barang/jasa yang terbina / teradvokasi	SEKRETARIAT DAERAH - Bagian Pengadaan Barang Dan Jasa	Sekretariat Daerah	1 Unit	100.000.000		1 Unit	800.000.000
		Jumlah pelaku pengadaan barang/jasa yang terbina / teradvokasi			50 Orang			50 Orang	
4.1.4.1.4.1.3.9.39.401.3	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah layanan pengadaan secara elektronik yang dikelola	SEKRETARIAT DAERAH - Bagian Pengadaan Barang Dan Jasa	Sekretariat Daerah	5 Sistem	40.000.000		5 Sistem	80.000.000
Total						13.156.714.780			21.532.073.829

PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH

KABUPATEN MAGELANG

TAHUN 2021

Nama Perangkat Daerah : SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang				9.511.855.000			23.341.774.600
4.1	Administrasi Pemerintahan				9.511.855.000			23.341.774.600
4.1.4.1.4.1.4.1.7.401	Program Manajemen Administrasi Pelayanan Umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah	Presentase ketercapaian Pelayanan Umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah			100 %	1.545.591.000	100 %	3.479.701.000
4.1.4.1.4.1.4.1.7.401.1	Pengelolaan Surat Menyurat, Kearsipan dan Bahan Pustaka	Jumlah surat yang dikelola	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	Sekretariat DPRD Kabupaten Magelang	2250 surat	60.408.000	2250 surat	90.166.000
Jumlah arsip yang dikelola		20 Jenis Dokumen arsip			20 Jenis Dokumen arsip			
Jumlah bahan pustaka yang dikelola		6 Jenis Bahan Pustaka			6 Jenis Bahan Pustaka			
4.1.4.1.4.1.4.1.7.401.2	Penyelenggaraan Koordinasi dan Konsultasi Perangkat Daerah	Jumlah perjalanan dinas luar daerah yang terlaksana	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	Sekretariat DPRD Kabupaten Magelang	53 Perjalanan Dinas	400.000.000	53 Perjalanan Dinas	1.334.661.000
Jumlah perjalanan dinas dalam daerah yang terlaksana		150 Perjalanan Dinas			150 Perjalanan Dinas			
Frekuensi Jamuan dan Rapat Koordinasi yang diselenggarakan		13 kali			13 kali			

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
4.1.4.1.4.1.4.1.7.401.3	Pengadaan dan Pengelolaan Peralatan dan Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya	Jumlah paket pengadaan perlengkapan gedung kantor	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	Sekretariat DPRD Kab. Magelang	2 Jenis	0	2 Jenis	65.000.000
		Jumlah paket pengadaan peralatan gedung kantor			1 Jenis		1 Jenis	
		Jumlah Dokumen aset yang dikelola			2 Dokumen		2 Dokumen	
		Jumlah Plaket yang dibeli			125 Buah Plaket		125 Buah Plaket	
		Jumlah paket pengadaan mebel kantor			2 Jenis		2 Jenis	
4.1.4.1.4.1.4.1.7.401.4	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya	Luas gedung kantor yang dipelihara	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	Sekretariat DPRD Kabupaten Magelang	2.889 M2	400.000.000	2.889 M2	601.077.000
		Luas Rumdin yang dipelihara			419,84 M2		419,84 M2	
		Jumlah Rekening			36 Jenis Rekening		36 Jenis Rekening	
4.1.4.1.4.1.4.1.7.401.5	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya	Jumlah peralatan yang dipelihara	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	Sekretariat DPRD Kabupaten Magelang	2 Jenis Peralatan	437.102.000	2 Jenis Peralatan	582.269.000
		Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara			18 Unit Kendaraan Dinas		18 Unit Kendaraan Dinas	
		Jumlah Mebelair yang dipelihara			3 Unit Mebel		3 Unit Mebel	
		Jumlah Perlengkapan Kantor yang Dipelihara			2 Unit		2 Unit	
4.1.4.1.4.1.4.1.7.401.6	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya	Jumlah paket rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	Sekretariat DPRD Kabupaten Magelang	1 paket	48.081.000	1 paket	150.000.000
		Jumlah paket rehabilitasi sedang/berat rumdin			1 Paket		1 Paket	
4.1.4.1.4.1.4.1.7.401.7	Peningkatan Kapasitas dan Disiplin Aparatur Sipil Negara	Jumlah tenaga honorer/kontrak	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	Sekretariat DPRD Kabupaten Magelang	1 org	200.000.000	1 org	656.528.000
		Jumlah seragam dan atribut yang disediakan			5 jenis		5 jenis	
		Jumlah bintek yang diikuti oeh aparatur			6 Kali		6 Kali	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
4.1.4.1.4.1.4.1.8.401	Program Perencanaan, Keuangan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Presentase Ketercapaian perencanaan, evaluasi kinerja OPD dan keuangan perangkat daerah.			100 %	60.501.000		100 %	83.012.000
4.1.4.1.4.1.4.1.8.401.1	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	JumlahBulan yang mengelola kegiatan rutin	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	Sekretariat DPRD Kabupaten Magelang	12 Bulan	53.990.000		12 Bulan	77.129.000
4.1.4.1.4.1.4.1.8.401.2	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Renstra Perangkat Daerah yang tersusun	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	Sekretariat DPRD Kabupaten Magelang	1 Dokumen	5.283.000		1 Dokumen	4.128.000
		Jumlah dokumen Renja Perangkat Daerah yang tersusun			2 Dokumen			2 Dokumen	
4.1.4.1.4.1.4.1.8.401.3	Penyusunan Laporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen pelaporan, monitoring dan evaluasi yang tersusun	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	Sekretariat DPRD Kabupaten Magelang	23 Laporan	1.228.000		23 Laporan	1.755.000
		Jumlah dokumen profil PD yang tersusun			1 dokumen			1 dokumen	
4.1.4.1.4.1.4.1.41.401	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan DPRD	Persentase Pemenuhan Fasilitasi Raperda			83,33 %	7.905.763.000		83,33 %	19.779.061.600
		Persentase Pemenuhan Fasilitasi Kebijakan Anggaran			100 %			100 %	
		Persentase Pemenuhan Fasilitasi Rekomendasi DPRD			100 %			100 %	
4.1.4.1.4.1.4.1.41.401.1	Penyelenggaraan Rapat-Rapat DPRD	Frekuensi Rapat Paripurna yang terlaksana	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	Sekretariat DPRD Kabupaten Magelang	25 Kali	300.000.000		25 Kali	682.000.000
		Jumlah Rapat Alat Kelengkapan yang terlaksana			385 -Kali			385 -Kali	
		Jumlah Rapat Fraksi yang terlaksana			12 Kali Rapat			12 Kali Rapat	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
			Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
4.1.4.1.4.1.4.1.41.401.2	Penyusunan dan Pembahasan Produk Hukum	Jumlah Perda yang ditetapkan	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	Sekretariat DPRD Kabupaten Magelang	12 Perda	250.000.000		12 Perda	1.655.499.000
		Frekuensi Rapat Pendampingan Pembahasan LKPJ			5 Kali			5 Kali	
		Jumlah Dokumen Kajian Tunjangan Transportasi dan Perumahan			0 Dokumen			0 Dokumen	
4.1.4.1.4.1.4.1.41.401.3	Peningkatan Kapasitas DPRD	Jumlah Perjalanan Dinas DPRD	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	Sekretariat DPRD Kabupaten Magelang	50 Kunjungan	6.000.000.000		50 Kunjungan	15.000.000.000
		Frekuensi Bintek DPRD			6 Kali			6 Kali	
4.1.4.1.4.1.4.1.41.401.4	Kegiatan Reses DPRD	Frekuensi Reses DPRD	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	Sekretariat DPRD Kabupaten Magelang	3 Kali	946.156.000		3 Kali	958.346.000
4.1.4.1.4.1.4.1.41.401.5	Pelayanan Kehumasan dan Publikasi DPRD	Jumlah Kegiatan Kehumasan DPRD	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	Sekretariat DPRD Kabupaten Magelang	6 Kegiatan	300.000.000		6 Kegiatan	1.373.389.600
4.1.4.1.4.1.4.1.41.401.6	Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan	Jumlah Anggota DPRD yang diberikan jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	Sekretariat DPRD Kabupaten Magelang	50 Orang	109.607.000		50 Orang	109.827.000
Total						9.511.855.000			23.341.774.600

PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH

KABUPATEN MAGELANG

TAHUN 2021

Nama Perangkat Daerah : KECAMATAN SALAMAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
			Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4		5	6	7	8	9
4	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang					250.639.750			673.499.990
4.1	Administrasi Pemerintahan					250.639.750			673.499.990
4.1.4.1.4.1.5.1.7.401	Program Manajemen Administrasi Pelayanan Umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah			100 %	139.533.750		100 %	325.499.996
4.1.4.1.4.1.5.1.7.401.1	Pengelolaan Surat Menyurat, Kearsipan dan Bahan Pustaka	Jumlah surat yang dikelola	KECAMATAN SALAMAN	Kecamatan Salaman	1500 surat	8.260.000		1500 surat	7.500.000
		Jumlah arsip yang dikelola			1000 arsip			1000 arsip	
		Jumlah bahan pustaka yang dikelola			200 buku			200 buku	
4.1.4.1.4.1.5.1.7.401.2	Penyelenggaraan Koordinasi dan Konsultasi Perangkat Daerah	Jumlah rapat koordinasi yang diselenggarakan	KECAMATAN SALAMAN	Kecamatan Salaman	20 kali	16.140.000		20 kali	39.999.996
		Jumlah perjalanan dinas dalam yang dilaksanakan			115 kali			115 kali	
		Jumlah layanan humas dan protokol yang dilaksanakan			2 layanan			2 layanan	
4.1.4.1.4.1.5.1.7.401.3	Pengadaan dan Pengelolaan Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya	Jumlah paket pengadaan perlengkapan gedung kantor	KECAMATAN SALAMAN	Kecamatan Salaman	1 paket	0		1 paket	45.000.000
		Jumlah paket pengadaan peralatan gedung kantor			1 paket			1 paket	
		Jumlah aset yang dikelola			400 unit			400 unit	
4.1.4.1.4.1.5.1.7.401.4	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya	Luas gedung kantor yang dipelihara	KECAMATAN SALAMAN	Kecamatan Salaman	2400 m2	69.680.000		2400 m2	95.000.000
		Jumlah rekening/bulan yang dibayar dalam 1 tahun			48 rekening bulan			48 rekening bulan	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
			Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
4.1.4.1.4.1.5.1.7.401.5	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	KECAMATAN SALAMAN	Kecamatan Salaman	20 unit	45.453.750		20 unit	88.000.000
		Jumlah perlengkapan yang dipelihara			60 unit			60 unit	
		Jumlah kendaraan roda 4 yang dipelihara			1 unit			1 unit	
		Jumlah kendaraan roda 2 yang dipelihara			7 unit			7 unit	
4.1.4.1.4.1.5.1.7.401.6	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya	Jumlah paket rehabilitasi sedang/ berat gedung kantor	KECAMATAN SALAMAN	Kecamatan Salaman	1 Paket	0		1 Paket	50.000.000
4.1.4.1.4.1.5.1.8.401	Program Perencanaan, Keuangan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian evaluasi kinerja OPD dan keuangan perangkat daerah			100 %	18.941.000		100 %	38.999.999
4.1.4.1.4.1.5.1.8.401.1	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah kegiatan yang dikelola	KECAMATAN SALAMAN	Kecamatan Salaman	13 kegiatan	16.200.000		13 kegiatan	24.000.000
		Jumlah laporan keuangan yang tersusun			2 laporan			2 laporan	
4.1.4.1.4.1.5.1.8.401.2	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Renstra perangkat daerah yang tersusun	KECAMATAN SALAMAN	Kabupaten Magelang	0 dokumen	1.425.000		0 dokumen	5.000.000
		Jumlah dokumen Renja PD yang tersusun			2 dokumen			2 dokumen	
		jumlah dokumen Rencana Kerja Operasional yang tersusun			1 dokumen			1 dokumen	
		Jumlah dokumen RPTK yang tersusun			1 dokumen			1 dokumen	
4.1.4.1.4.1.5.1.8.401.3	Penyusunan Laporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen laporan tahunan yang tersusun	KECAMATAN SALAMAN	Kec Salaman	4 dokumen	1.316.000		4 dokumen	5.000.000
		Jumlah dokumen monitoring, evaluasi, dan pelaporan tribulanan yang tersusun			8 dokumen			8 dokumen	
		Jumlah dokumen pelaporan bulanan yang tersusun			12 dokumen			12 dokumen	
		Jumlah dokumen evaluasi jangka menengah yang tersusun			0 dokumen			0 dokumen	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja
4.1.4.1.4.1.5.1.8.401.4	Penyusunan Dokumen Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Perangkat Daerah	Jumlah dokumen SOP yang disusun	KECAMATAN SALAMAN	Kabupaten Magelang	11 dokumen	0	11 dokumen	4.999.999
		Jumlah dokumen SP yang tersusun			11 dokumen		11 dokumen	
		Jumlah dokumen Daftar Informasi Publik			1 dokumen		1 dokumen	
		Jumlah dokumen pengendalian intern (SPIP) yang tersusun			1 dokumen		1 dokumen	
		Jumlah dokumen data perangkat daerah yang tersusun			1 dokumen		1 dokumen	
4.1.4.1.4.1.5.1.42.401	Program Pelayanan Publik Kecamatan	Persentase pelayanan publik sesuai SOP dan SP			90 %	32.730.000	90 %	29.000.000
4.1.4.1.4.1.5.1.42.401.1	Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Kecamatan (PATEN)	Jumlah Dokumen Terlayani	KECAMATAN SALAMAN	Kecamatan Salaman	12000 Dokumen	32.730.000	12000 Dokumen	29.000.000
4.1.4.1.4.1.5.1.43.401	Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	Persentase kegiatan yang dikoordinasikan			100 %	59.435.000	100 %	279.999.995
		Persentase desa yang tertib administrasi			100 %		100 %	
4.1.4.1.4.1.5.1.43.401.1	Peningkatan Tata Kelola Kecamatan Pemerintahan Desa/Kelurahan	Jumlah Desa yang terbina administrasinya	KECAMATAN SALAMAN	Kecamatan Salaman	20 Desa	9.555.000	20 Desa	70.000.000
		Jumlah desa terfasilitasi pengelolaan keuangan desa			20 Desa		20 Desa	
		Jumlah Kepala Desa terpilih			0 orang		0 orang	
		Jumlah Perangkat Desa terisi			15 Orang		15 Orang	
		Jumlah Anggota BPD yang terbina			20 orang		20 orang	
		Jumlah Desa Lunas PBB			18 Desa		18 Desa	
		Jumlah desa yang terbina administrasinya			20 desa		20 desa	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
			Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
4.1.4.1.4.1.5.1.43.401.2	Peningkatan Keberdayaan dan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa	Jumlah dokumen perencanaan desa yang tersusun	KECAMATAN SALAMAN	Kecamatan Salaman	20 Dokumen	15.570.000		20 Dokumen	65.000.000
		Jumlah desa yang terfasilitasi bantuan keuangan kepada desa			20 Desa			20 Desa	
		Jumlah dokumen profil desa yang tersusun			20 Dokumen			20 Dokumen	
		Jumlah peserta musrenbangkec			135 Orang			135 Orang	
		Jumlah desa yang terfasilitasi evaluasi perkembangan desa			20 Desa			20 Desa	
		Jumlah lembaga kemasyarakatan desa yang dibina			20 Lembaga			20 Lembaga	
4.1.4.1.4.1.5.1.43.401.3	Peningkatan Kualitas Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah TP PKK Desa yang dibina	KECAMATAN SALAMAN	Kecamatan Salaman	20 TP PKK	21.950.000		20 TP PKK	85.000.000
		Jumlah desa/kel terkoordinasi penanggulangan kemiskinan			20 Desa			20 Desa	
		Jumlah peserta yang dilatih dan dikirimkan dalam lomba kebudayaan			95 Orang			95 Orang	
		Jumlah Desa Layak Anak			1 desa			1 desa	
		Jumlah kegiatan Penyelenggaraan Festival Budaya			3 kali			3 kali	
4.1.4.1.4.1.5.1.43.401.4	Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Wawasan Kebangsaan	Frekuensi koordinasi Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan	KECAMATAN SALAMAN	Kecamatan Salaman	12 kali	12.360.000		12 kali	59.999.995
		Jumlah desa yang difasilitasi penanggulangan bencana			20 desa			20 desa	
		Jumlah satlinmas desa yang terbina			20 orang			20 orang	
		Jumlah peraturan perundang undangan yang disosialisasikan			2 peraturan			2 peraturan	
		Jumlah anggota paskibra yang terbina			80 orang			80 orang	
Total					250.639.750			673.499.990	

PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH

KABUPATEN MAGELANG

TAHUN 2021

Nama Perangkat Daerah : KECAMATAN BOROBUKUR

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang				269.231.750			733.000.000
4.1	Administrasi Pemerintahan				269.231.750			733.000.000
4.1.4.1.4.1.6.1.7.401	Program Manajemen Administrasi Pelayanan Umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah			100 %	158.125.750	100 %	403.000.000
4.1.4.1.4.1.6.1.7.401.1	Pengelolaan Surat Menyurat, Kearsipan dan Bahan Pustaka	Jumlah surat yang dikelola Jumlah arsip yang dikelola Jumlah bahan pustaka yang dikelola	KECAMATAN BOROBUDUR	KEC. BOROBUDUR.	2400 surat 1080 arsip 116 buku	8.260.000	2400 surat 1080 arsip 116 buku	7.500.000
4.1.4.1.4.1.6.1.7.401.2	Penyelenggaraan Koordinasi dan Konsultasi Perangkat Daerah	Jumlah rapat koordinasi yang diselenggarakan Jumlah perjalanan dinas dalam daerah yang terlaksana Jumlah layanan Humas dan Protokol yang dilaksanakan	KECAMATAN BOROBUDUR	KECAMATAN BOROBUDUR	9 kali 83 kali 12 layanan	16.140.000	9 kali 83 kali 12 layanan	60.000.000
4.1.4.1.4.1.6.1.7.401.3	Pengadaan dan Pengelolaan Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya	Jumlah paket pengadaan perlengkapan gedung kantor Jumlah paket pengadaan peralatan gedung kantor Jumlah aset yang dikelola	KECAMATAN BOROBUDUR	KEC. BOROBUDUR.	1 Paket 0 Paket 464 unit	0	1 Paket 0 Paket 464 unit	50.000.000
4.1.4.1.4.1.6.1.7.401.4	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya	Luas gedung kantor yang dipelihara Jumlah rekening/bulan yang dibayar dalam 1 tahun	KECAMATAN BOROBUDUR	KEC. BOROBUDUR.	5.201 m2 60 rekening bulan	88.272.000	5.201 m2 60 rekening bulan	140.000.000

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
4.1.4.1.4.1.6.1.7.401.5	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya	Jumlah peralatan yang dipelihara	KECAMATAN BOROBUDUR	KEC. BOROBUDUR.	15 unit	45.453.750		15 unit	88.000.000
		Jumlah perlengkapan yang dipelihara			32 unit			32 unit	
		Jumlah kendaraan roda 4 yang dipelihara			1 unit			1 unit	
		Jumlah kendaraan roda 2 yang dipelihara			7 unit			7 unit	
4.1.4.1.4.1.6.1.7.401.6	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya	Jumlah paket rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	KECAMATAN BOROBUDUR	KEC. BOROBUDUR.	1 paket	0		1 paket	50.000.000
4.1.4.1.4.1.6.1.7.401.7	Peningkatan Kapasitas dan Disiplin Aparatur Sipil Negara	Frekuensi pembinaan ASN	KECAMATAN BOROBUDUR	KEC. BOROBUDUR.	12 kali	0		12 kali	7.500.000
		Jumlah JFT yang terfasilitasi penilaian Angka Kreditnya			2 orang			2 orang	
		Jumlah ASN yang terfasilitasi penilaian kerjanya			16 orang			16 orang	
4.1.4.1.4.1.6.1.8.401	Program Perencanaan, Keuangan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Prosentase ketercapaian perencanaan evaluasi kinerja OPD dan keuangan perangkat daerah			100 %	18.941.000		100 %	40.000.000
4.1.4.1.4.1.6.1.8.401.1	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah kegiatan yang dikelola	KECAMATAN BOROBUDUR	KEC. BOROBUDUR.	16 kegiatan	16.200.000		16 kegiatan	25.000.000
		Jumlah laporan keuangan yang tersusun			12 dokumen			12 dokumen	
4.1.4.1.4.1.6.1.8.401.2	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Renstra PD yang tersusun	KECAMATAN BOROBUDUR	KEC. BOROBUDUR.	0 dokumen	1.425.000		0 dokumen	5.000.000
		Jumlah dokumen Renja PD yang tersusun			2 dokumen			2 dokumen	
		Jumlah dokumen Rencana Kerja Operasional yang disusun			1 dokumen			1 dokumen	
		Jumlah dokumen RPTK yang tersusun			1 dokumen			1 dokumen	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
4.1.4.1.4.1.6.1.8.401.3	Penyusunan Laporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen laporan Tahunan yang tersusun	KECAMATAN BOROBUDUR	KEC. BOROBUDUR.	4 dokumen	1.316.000		4 dokumen	5.000.000
		Jumlah dokumen monitoring, evaluasi, dan pelaporan tribunalan yang tersusun			4 dokumen			4 dokumen	
		Jumlah dokumen pelaporan bulanan yang tersusun			12 dokumen			12 dokumen	
		Jumlah dokumen evaluasi jangka menengah yang tersusun			0 dokumen			0 dokumen	
4.1.4.1.4.1.6.1.8.401.4	Penyusunan Dokumen Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Perangkat Daerah	Jumlah dokumen SOP yang disusun	KECAMATAN BOROBUDUR	KEC. BOROBUDUR.	2 dokumen	0		2 dokumen	5.000.000
		Jumlah dokumen SP yang tersusun			1 dokumen			1 dokumen	
		Jumlah dokumen Daftar Informasi Publik			8 dokumen			8 dokumen	
		Jumlah dokumen pengendalian intern (SPIP) yang disusun			1 dokumen			1 dokumen	
		Jumlah dokumen data perangkat daerah yang tersusun			0 dokumen			0 dokumen	
4.1.4.1.4.1.6.1.42.401	Program Pelayanan Publik Kecamatan	Persentase Pelayanan Publik Sesuai SOP dan SP			90 %	32.730.000		90 %	30.000.000
4.1.4.1.4.1.6.1.42.401.1	Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Kecamatan (PATEN)	Jumlah dokumen terlayani	KECAMATAN BOROBUDUR	KEC. BOROBUDUR.	9500 dokumen	32.730.000		9500 dokumen	30.000.000
4.1.4.1.4.1.6.1.43.401	Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	Persentase kegiatan yang dikoordinasikan			100 %	59.435.000		100 %	260.000.000
		Persentase desa yang tertib administrasi			80 %			80 %	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
			Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
4.1.4.1.4.1.6.1.43.401.1	Peningkatan Tata Kelola Kecamatan Pemerintahan Desa/Kelurahan	Jumlah desa yang terfasilitasi pengelolaan keuangan desa	KECAMATAN BOROBUDUR	KEC. BOROBUDUR.	20 desa	9.555.000		20 desa	70.000.000
		Jumlah Kepala Desa terpilih			0 orang			0 orang	
		Jumlah perangkat desa terisi			2 orang			2 orang	
		Jumlah perangkat desa yang terbina			250 orang			250 orang	
		Jumlah Anggota BPD yang terbina			80 orang			80 orang	
		Jumlah desa lunas PBB			12 desa			12 desa	
		Jumlah desa yang terbina administrasinya			20 desa			20 desa	
4.1.4.1.4.1.6.1.43.401.2	Peningkatan Keberdayaan dan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa	Jumlah desa yang terfasilitasi bantuan keuangan kepada desa	KECAMATAN BOROBUDUR	KEC. BOROBUDUR.	20 desa	15.570.000		20 desa	55.000.000
		Jumlah dokumen profil desa yang tersusun			10 dokumen			10 dokumen	
		Jumlah lembaga kemasyarakatan desa yang dibina			20 lembaga			20 lembaga	
		Jumlah desa yang terfasilitasi evaluasi perkembangan desa			20 desa			20 desa	
		Jumlah dokumen perencanaan desa yang tersusun			20 dokumen			20 dokumen	
		Jumlah peserta musrenbangkec			250 orang			250 orang	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja
4.1.4.1.4.1.6.1.43.401.3	Peningkatan Kualitas Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah TP PKK Desa/Kel yang dibina	KECAMATAN BOROBUDUR	KEC. BOROBUDUR.	20 TP PKK	21.950.000	20 TP PKK	85.000.000
		Jumlah desa/kel terkoordinasi penanggulangan kemiskinan			20 desa/kelurahan		20 desa/kelurahan	
		Jumlah peserta yang dilatih dan dikirimkan dalam lomba kebudayaan			150 orang		150 orang	
		Jumlah Desa/Kel Layak Anak			0 desa/kelurahan		0 desa/kelurahan	
		Jumlah kegiatan Penyelenggaraan Festival Budaya			0 kegiatan		0 kegiatan	
4.1.4.1.4.1.6.1.43.401.4	Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Wawasan Kebangsaan	Jumlah satlinmas desa yang terbina	KECAMATAN BOROBUDUR	KEC. BOROBUDUR.	0 orang	12.360.000	0 orang	50.000.000
		Jumlah frekuensi koordinasi forum komunikasi pimpinan kecamatan			12 kali		12 kali	
		Jumlah desa yang terfasilitasi penanggulangan bencana			20 desa		20 desa	
		Jumlah peraturan perundang undangan yang disosialisasikan			0 peraturan		0 peraturan	
		Jumlah anggota paskibra yang terbina			0 orang		0 orang	
Total					269.231.750		733.000.000	

PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH

KABUPATEN MAGELANG

TAHUN 2021

Nama Perangkat Daerah : KECAMATAN NGLUWAR

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang				253.184.000			507.000.000
4.1	Administrasi Pemerintahan				253.184.000			507.000.000
4.1.4.1.4.1.7.1.7.401	Program Manajemen Administrasi Pelayanan Umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah	Presentase ketercapaian Pelayanan Umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah			100 %	143.405.000	100 %	269.000.000
4.1.4.1.4.1.7.1.7.401.1	Pengelolaan Surat Menyurat, Kearsipan dan Bahan Pustaka	Jumlah surat yang dikelola	KECAMATAN NGLUWAR	Kecamatan Ngluwar	1300 surat	4.125.000	1300 surat	7.500.000
		Jumlah arsip yang dikelola			200 arsip		200 arsip	
		Jumlah bahan pustaka yang dikelola			100 buku		100 buku	
4.1.4.1.4.1.7.1.7.401.2	Penyelenggaraan Koordinasi dan Konsultasi Perangkat Daerah	Jumlah rapat koordinasi yang diselenggarakan	KECAMATAN NGLUWAR	Kecamatan Ngluwar	24 kali	24.800.000	24 kali	38.000.000
		Jumlah perjalanan dinas dalam daerah yang terlaksana			192 kali		192 kali	
		Jumlah layanan Humas dan protokol yang dilaksanakan			4 layanan		4 layanan	
4.1.4.1.4.1.7.1.7.401.3	Pengadaan dan Pengelolaan Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya	Jumlah paket pengadaan perlengkapan gedung kantor	KECAMATAN NGLUWAR	Kecamatan Ngluwar	0 paket	0	0 paket	40.000.000
		Jumlah paket pengadaan peralatan gedung kantor			0 paket		0 paket	
		Jumlah aset yang dikelola			400 unit		400 unit	
4.1.4.1.4.1.7.1.7.401.4	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya	Luas gedung kantor yang dipelihara	KECAMATAN NGLUWAR	Kecamatan Ngluwar	4322 m2	69.990.000	4322 m2	86.000.000
		Jumlah rekening/bulan yang dibayar dalam 1 tahun			36 rekening bulan		36 rekening bulan	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
			Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
4.1.4.1.4.1.7.1.7.401.5	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya	Jumlah kendaraan dinas roda empat yang dipelihara	KECAMATAN NGLUWAR	Kecamatan Ngluwar	1 unit	44.490.000		1 unit	80.000.000
		Jumlah peralatan kantor yang dipelihara			17 unit			17 unit	
		Jumlah perlengkapan kantor yang dipelihara			20 unit			20 unit	
		Jumlah kendaraan roda dua yang dipelihara			7 unit			7 unit	
4.1.4.1.4.1.7.1.7.401.6	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya	Jumlah paket rehab sedang/berat gedung kantor	KECAMATAN NGLUWAR	Kecamatan Ngluwar	1 paket	0		1 paket	10.000.000
4.1.4.1.4.1.7.1.7.401.7	Peningkatan Kapasitas dan Disiplin Aparatur Sipil Negara	Frekuensi pembinaan ASN	KECAMATAN NGLUWAR	Kecamatan Ngluwar	12 kali	0		12 kali	7.500.000
		Jumlah JFT yang terfasilitasi penilaian Angka Kreditnya			0 orang			0 orang	
		Jumlah ASN yang terfasilitasi penilaian kinerjanya			12 orang			12 orang	
4.1.4.1.4.1.7.1.8.401	Program Perencanaan, Keuangan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Presentase Ketercapaian perencanaan, evaluasi kinerja OPD dan keuangan perangkat daerah			100 %	17.614.000		100 %	37.000.000
4.1.4.1.4.1.7.1.8.401.1	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah kegiatan yang dikelola	KECAMATAN NGLUWAR	Kecamatan Ngluwar	16 kegiatan	16.200.000		16 kegiatan	22.000.000
		Jumlah laporan keuangan yang tersusun			12 laporan			12 laporan	
4.1.4.1.4.1.7.1.8.401.2	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen RPTK yang tersusun	KECAMATAN NGLUWAR	Kecamatan Ngluwar	1 dokumen	545.000		1 dokumen	5.000.000
		Jumlah dokumen Renstra PD yang tersusun			0 dokumen			0 dokumen	
		Jumlah dokumen Renja PD yang tersusun			2 dokumen			2 dokumen	
		Jumlah dokumen Rencana Kerja Operasional yang disusun			1 dokumen			1 dokumen	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
			Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
4.1.4.1.4.1.7.1.8.401.3	Penyusunan Laporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen laporan Tahunan yang tersusun	KECAMATAN NGLUWAR	Kecamatan Ngluwar	4 dokumen	869.000		4 dokumen	5.000.000
		Jumlah dokumen monitoring, evaluasi, dan pelaporan tribulanan yang tersusun			8 dokumen			8 dokumen	
		Jumlah dokumen pelaporan bulanan yang tersusun			12 dokumen			12 dokumen	
		Jumah dokumen evaluasi jangka menengah yang tersusun			0 dokumen			0 dokumen	
4.1.4.1.4.1.7.1.8.401.4	Penyusunan Dokumen Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Perangkat Daerah	Jumlah dokumen SOP yang tersusun	KECAMATAN NGLUWAR	Kecamatan Ngluwar	2 dokumen	0		2 dokumen	5.000.000
		Jumlah dokumen SP yang tersusun			1 dokumen			1 dokumen	
		Jumlah dokumen Daftar Informasi Publik			8 dokumen			8 dokumen	
		Jumlah dokumen pengendalian intern (SPIP) yang disusun			1 dokumen			1 dokumen	
		Jumlah dokumen data perangkat daerah yang tersusun			1 dokumen			1 dokumen	
4.1.4.1.4.1.7.1.42.401	Program Pelayanan Publik Kecamatan	Persentase Pelayanan Publik Sesuai SOP dan SP			100 %	32.730.000		100 %	30.000.000
4.1.4.1.4.1.7.1.42.401.1	Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Kecamatan (PATEN)	Jumlah dokumen yang terlayani	KECAMATAN NGLUWAR	Kecamatan Ngluwar	2400 dokumen	32.730.000		2400 dokumen	30.000.000
4.1.4.1.4.1.7.1.43.401	Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	Persentase kegiatan yang dikoordinasikan			100 %	59.435.000		100 %	171.000.000
		Persentase desa yang tertib Administrasi			80 %		80 %		
4.1.4.1.4.1.7.1.43.401.1	Peningkatan Tata Kelola Kecamatan Pemerintahan Desa/Kelurahan	Jumlah desa lunas PBB	KECAMATAN NGLUWAR	Kecamatan Ngluwar	8 desa	9.555.000		8 desa	48.000.000
		Jumlah perangkat desa terisi			10 orang			10 orang	
		Jumlah desa yang terfasilitasi pengelolaan keuangan desa			8 desa			8 desa	
		Jumlah Kepala Desa Terpilih			0 orang			0 orang	
		Jumlah Perangkat Desa yang terbina			200 orang			200 orang	
		Jumlah anggota BPD yang terbina			40 orang			40 orang	
		Jumlah desa yang terbina administrasinya			8 desa			8 desa	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja
4.1.4.1.4.1.7.1.43.401.2	Peningkatan Keberdayaan dan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa	Jumlah desa yang terfasilitasi bantuan keuangan kepada desa	KECAMATAN NGLUWAR	Kecamatan Ngluwar	8 desa	15.570.000	8 desa	35.000.000
		Jumlah dokumen profil desa yang tersusun			8 dokumen		8 dokumen	
		Jumlah lembaga kemasyarakatan desa yang dibina			8 lembaga		8 lembaga	
		Jumlah desa yang terfasilitasi evaluasi perkembangan desa			8 desa		8 desa	
		Jumlah dokumen perencanaan desa yang tersusun			20 dokumen		20 dokumen	
		Jumlah peserta musrenbangkec			65 orang		65 orang	
4.1.4.1.4.1.7.1.43.401.3	Peningkatan Kualitas Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah TP PKK Desa yang dibina	KECAMATAN NGLUWAR	Kecamatan Ngluwar	8 TP PKK desa	21.950.000	8 TP PKK desa	56.000.000
		Jumlah desa/kel terkoordinasi penanggulangan kemiskinan			8 desa		8 desa	
		Jumlah peserta yang dilatih dan dikirimkan dalam lomba kebudayaan			150 orang		150 orang	
		Jumlah Desa/Kel Layak Anak			0 desa		0 desa	
		Jumlah kegiatan penyelenggaraan Festival Budaya			3 kegiatan		3 kegiatan	
4.1.4.1.4.1.7.1.43.401.4	Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Wawasan Kebangsaan	Jumlah satlinmas desa yang dibina	KECAMATAN NGLUWAR	Kecamatan Ngluwar	8 orang	12.360.000	8 orang	32.000.000
		Jumlah/frekuensi koordinasi forum komunikasi pimpinan kecamatan			12 kali		12 kali	
		Jumlah desa yang terfasilitasi penanggulangan bencana			8 desa		8 desa	
		Jumlah peraturan perundangan-undangan yang disosialisasikan			4 peraturan		4 peraturan	
		Jumlah anggota paskibra yang terbina			80 orang		80 orang	
Total					253.184.000		507.000.000	

PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH

KABUPATEN MAGELANG

TAHUN 2021

Nama Perangkat Daerah : KECAMATAN SALAM

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang				255.382.550			312.518.400
4.1	Administrasi Pemerintahan				255.382.550			312.518.400
4.1.4.1.4.1.8.1.7.401	Program Manajemen Administrasi Pelayanan Umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah		100 %	133.698.500		100 %	185.286.900
4.1.4.1.4.1.8.1.7.401.1	Pengelolaan Surat Menyurat, Kearsipan dan Bahan Pustaka	Jumlah Surat yang dikelola	KECAMATAN SALAM	Jl. Magelang- Yogya Km. 21 Telepon (0293) 588053 Salam Kode Pos 56484	1500 surat		1500 surat	4.698.100
		Jumlah arsip yg dikelola			6000 arsip		6000 arsip	
		Jumlah bahan pustaka yang dikelola			250 buku		250 buku	
4.1.4.1.4.1.8.1.7.401.2	Penyelenggaraan Koordinasi dan Konsultasi Perangkat Daerah	Jumlah rapat koordinasi yang dilaksanakan	KECAMATAN SALAM	Jl. Magelang- Yogya Km. 21 Telepon (0293) 588053 Salam Kode Pos 56484	43 kali	24.800.000	43 kali	25.638.000
		Jumlah perjalanan dinas yg dilaksanakan			95 kali		95 kali	
		Jumlah layanan humas dan protokol yang dilaksanakan			12 kali		12 kali	
4.1.4.1.4.1.8.1.7.401.3	Pengadaan dan Pengelolaan Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya	Jumlah paket pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	KECAMATAN SALAM	Jl. Magelang- Yogya Km. 21 Telepon (0293) 588053 Salam Kode Pos 56484	0 paket	0	0 paket	14.740.000
		Jumlah paket pengadaan Peralatan gedung kantor			1 paket		1 paket	
		Jumlah aset yang dikelola			300 unit		300 unit	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
4.1.4.1.4.1.8.1.7.401.4	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya	Luas gedung kantor yg dipelihara	KECAMATAN SALAM	Kecamatan Salam	950 m2	67.086.000	950 m2	71.256.800	
		Jumlah rekening/bulan yang dibayarkan selama satu tahun			36 rekening bulan		36 rekening bulan		
4.1.4.1.4.1.8.1.7.401.5	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya	Jumlah peralatan yang dipelihara	KECAMATAN SALAM	Kecamatan Salam	18 unit	37.687.500	18 unit	47.990.000	
		Jumlah kendaraan dinas roda empat yang dipelihara			1 unit		1 unit		
		Jumlah kendaraan dinas roda dua yang dipelihara			7 unit		7 unit		
		Jumlah perlengkapan yang dipelihara			15 unit		15 unit		
4.1.4.1.4.1.8.1.7.401.6	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya	Jumlah paket rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	KECAMATAN SALAM	Kabupaten Magelang	1 paket	0	1 paket	20.000.000	
4.1.4.1.4.1.8.1.7.401.7	Peningkatan Kapasitas dan Disiplin Aparatur Sipil Negara	Frekuensi pembinaan ASN	KECAMATAN SALAM	Kecamatan Salam	1 kali	0	1 kali	964.000	
		Jumlah ASN yang terfasilitasi penilaian kinerjanya			14 orang		14 orang		
		Jumlah JFT yg terfasilitasi penilaian angka kreditnya			1 orang		1 orang		
4.1.4.1.4.1.8.1.8.401	Program Perencanaan, Keuangan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian perencanaan, evaluasi kinerja OPD, dan keuangan perangkat daerah			100 %	22.900.000	100 %	20.724.000	
4.1.4.1.4.1.8.1.8.401.1	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah kegiatan keuangan yang dikelola	KECAMATAN SALAM	Kecamatan Salam	16 kegiatan	16.200.000	16 kegiatan	17.744.000	
		Jumlah laporan keuangan yang tersusun			6 dokumen		6 dokumen		

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
4.1.4.1.4.1.8.1.8.401.2	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Renstra PD yang tersusun	KECAMATAN SALAM	Kecamatan Salam	0 dokumen	3.350.000		0 dokumen	1.067.000
		Jumlah dokumen Renja PD yang tersusun			2 dokumen			2 dokumen	
		Jumlah dokumen Rencana Kerja Operasional yang tersusun			1 dokumen			1 dokumen	
		Jumlah dokumen RPTK yang tersusun			1 dokumen			1 dokumen	
4.1.4.1.4.1.8.1.8.401.3	Penyusunan Laporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen pelaporan tahunan yang tersusun	KECAMATAN SALAM	Kecamatan Salam	4 dokumen	3.350.000		4 dokumen	1.235.000
		Jumlah dokumen pelaporan bulanan yang tersusun			12 dokumen			12 dokumen	
		Jumlah dokumen evaluasi jangka menengah yg tersusun			0 dokumen			0 dokumen	
		Jumlah dokumen monitoring evaluasi dan pelaporan tribulanan yang tersusun			4 dokumen			4 dokumen	
4.1.4.1.4.1.8.1.8.401.4	Penyusunan Dokumen Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Perangkat Daerah	Jumlah dokumen SOP yang tersusun	KECAMATAN SALAM	Kecamatan Salam	5 dokumen	0		5 dokumen	678.000
		Jumlah dokumen SP yang tersusun			5 dokumen			5 dokumen	
		Jumlah dokumen Daftar Informasi Publik			1 dokumen			1 dokumen	
		Jumlah dokumen pengendalian intern (SPIP) yang disusun			1 dokumen			1 dokumen	
		Jumlah dokumen data perangkat daerah yang tersusun			1 dokumen			1 dokumen	
4.1.4.1.4.1.8.1.42.401	Program Pelayanan Publik Kecamatan	Persentase pelayanan publik sesuai SOP da SP			90 %	32.730.000		90 %	4.080.000
4.1.4.1.4.1.8.1.42.401.1	Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Kecamatan (PATEN)	Jumlah dokumen yang terlayani	KECAMATAN SALAM	Kecamatan Salam	5000 dokumen	32.730.000		5000 dokumen	4.080.000
4.1.4.1.4.1.8.1.43.401	Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	Prosentase Kegiatan yang Dikoordinasikan			100 %	66.054.050		100 %	102.427.500
		Prosentase Desa yang Tertib Adminstrasi			41.66 %		41.66 %		

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
4.1.4.1.4.1.8.1.43.401.1	Peningkatan Tata Kelola Kecamatan Pemerintahan Desa/Kelurahan	Jumlah desa terfasilitasi pengelolaan keuangan desa	KECAMATAN SALAM	Kecamatan Salam	12 desa	9.555.000	12 desa	22.582.000
		Jumlah kepala desa terpilih			0 orang		0 orang	
		Jumlah perangkat desa terisi			4 orang		4 orang	
		Jumlah anggota BPD terbina			0 orang		0 orang	
		Jumlah desa lunas PBB			12 desa		12 desa	
		Jumlah perangkat desa terbina			150 orang		150 orang	
		Jumlah desa yang terbina administrasinya			12 desa		12 desa	
4.1.4.1.4.1.8.1.43.401.2	Peningkatan Keberdayaan dan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa	Jumlah desa yang terfasilitasi bantuan keuangan kepada desa	KECAMATAN SALAM	Kecamatan Salam	12 desa	15.570.000	12 desa	23.746.000
		Jumlah dokumen profil desa yang tersusun			12 dokumen		12 dokumen	
		Jumlah lembaga kemasyarakatan desa yang dibina			12 lembaga		12 lembaga	
		Jumlah dokumen perencanaan desa yang tersusun			12 dokumen		12 dokumen	
		Jumlah desa yang terfasilitasi evaluasi perkembangan desa			12 desa		12 desa	
		Jumlah peserta musrenbangkec			90 orang		90 orang	
4.1.4.1.4.1.8.1.43.401.3	Peningkatan Kualitas Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah desa/kelurahan terkoordinasi penanggulangan kemiskinan	KECAMATAN SALAM	Kecamatan Salam	12 desa/kelurahan	21.949.050	12 desa/kelurahan	27.849.500
		Jumlah TP PKK desa/kelurahan yang dibina			12 desa/kelurahan		12 desa/kelurahan	
		Jumlah peserta yang dilatih dan dikirimkan dalam lomba kebudayaan			75 orang		75 orang	
		Jumlah desa/kelurahan layak anak			0 desa/kelurahan		0 desa/kelurahan	
		Jumlah kegiatan penyelenggaraan Festival Budaya			1 kali		1 kali	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
4.1.4.1.4.1.8.1.43.401.4	Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Wawasan Kebangsaan	Jumlah / frekuensi koordinasi forum komunikasi pimpinan kecamatan	KECAMATAN SALAM	Kecamatan Salam	12 kali	18.980.000		12 kali	28.250.000
		Jumlah desa yang difasilitasi penanggulangan bencana			12 desa			12 desa	
		Jumlah satlinmas yang terbina			12 orang			12 orang	
		Jumlah peraturan perundangan- undangan yang disosialisasikan			2 peraturan			2 peraturan	
		Jumlah anggota paskibra yang terbina			80 orang			80 orang	
Total						255.382.550		312.518.400	

PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH

KABUPATEN MAGELANG

TAHUN 2021

Nama Perangkat Daerah : KECAMATAN SRUMBUNG

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang				228.204.000			554.000.000
4.1	Administrasi Pemerintahan				228.204.000			554.000.000
4.1.4.1.4.1.9.1.7.401	Program Manajemen Administrasi Pelayanan Umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah			80 %	118.758.000	80 %	260.000.000
4.1.4.1.4.1.9.1.7.401.1	Pengelolaan Surat Menyurat, Kearsipan dan Bahan Pustaka	Jumlah surat yang dikelola	KECAMATAN SRUMBUNG	Kecamatan Srumbung	1500 surat	5.025.000	1500 surat	7.500.000
		Jumlah arsip yang dikelola			1500 surat		1500 surat	
		Jumlah bahan pustaka yang dikelola			125 buku		125 buku	
4.1.4.1.4.1.9.1.7.401.2	Penyelenggaraan Koordinasi dan Konsultasi Perangkat Daerah	Jumlah rapat koordinasi yang diselenggarakan	KECAMATAN SRUMBUNG	Kecamatan Srumbung	15 kali	7.500.000	15 kali	30.000.000
		Jumlah perjalanan dinas dalam daerah yang terlaksana			60 kali		60 kali	
		Jumlah Layanan Humas dan protokol yang dilaksanakan			12 kali		12 kali	
4.1.4.1.4.1.9.1.7.401.3	Pengadaan dan Pengelolaan Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya	Jumlah paket pengadaan perlengkapan gedung kantor	KECAMATAN SRUMBUNG	Kecamatan Srumbung	0 paket	0	0 paket	30.000.000
		Jumlah paket pengadaan peralatan gedung kantor			0 paket		0 paket	
		Jumlah aset yang dikelola			113 buah		113 buah	
4.1.4.1.4.1.9.1.7.401.4	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya	Luas gedung kantor yang dipelihara	KECAMATAN SRUMBUNG	Kecamatan Srumbung	5000 m2	60.000.000	5000 m2	70.000.000
		Jumlah rekening/bulan yang dibayar dalam 1 tahun			36 rekening bulan		36 rekening bulan	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja
4.1.4.1.4.1.9.1.7.401.5	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya	Jumlah peralatan yang dipelihara	KECAMATAN SRUMBUNG	Kecamatan Srumbung	20 unit	46.233.000	20 unit	95.000.000
		Jumlah perlengkapan yang dipelihara			2 unit		2 unit	
		Jumlah kendaraan dinas roda 4 yang dipelihara			1 unit		1 unit	
		Jumlah kendaraan dinas roda 2 yang dipelihara			7 unit		7 unit	
4.1.4.1.4.1.9.1.7.401.6	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya	Jumlah paket rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	KECAMATAN SRUMBUNG	Kecamatan Srumbung	0 Paket	0	0 Paket	20.000.000
4.1.4.1.4.1.9.1.7.401.7	Peningkatan Kapasitas dan Disiplin Aparatur Sipil Negara	Frekuensi pembinaan ASN	KECAMATAN SRUMBUNG	Kecamatan Srumbung	12 kali	0	12 kali	7.500.000
		Jumlah JFT yang terfasilitasi penilaian Angka Kreditnya			0 orang		0 orang	
		Jumlah ASN yang terfasilitasi penilaian kinerjanya			11 orang		11 orang	
4.1.4.1.4.1.9.1.8.401	Program Perencanaan, Keuangan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian perencanaan, evaluasi kinerja OPD, dan keuangan perangkat daerah			100 %	17.732.000	100 %	32.500.000
4.1.4.1.4.1.9.1.8.401.1	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah kegiatan yang dikelola	KECAMATAN SRUMBUNG	Kecamatan Srumbung	16 kegiatan	16.200.000	16 kegiatan	17.500.000
		Jumlah laporan keuangan yang tersusun			5 dokumen		5 dokumen	
4.1.4.1.4.1.9.1.8.401.2	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Renstra PD yang tersusun	KECAMATAN SRUMBUNG	Kecamatan Srumbung	0 dokumen	955.000	0 dokumen	5.000.000
		Jumlah dokumen Renja PD yang tersusun			2 dokumen		2 dokumen	
		Jumlah dokumen RPTK yang tersusun			1 dokumen		1 dokumen	
		Jumlah dokumen Rencana Kerja Operasional yang disusun			1 dokumen		1 dokumen	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
			Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
4.1.4.1.4.1.9.1.8.401.3	Penyusunan Laporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen laporan Tahunan yang tersusun	KECAMATAN SRUMBUNG	Kecamatan Srumbung	4 dokumen	577.000		4 dokumen	5.000.000
		Jumlah dokumen pelaporan bulanan yang tersusun			12 dokumen			12 dokumen	
		Jumlah dokumen monitoring, evaluasi, dan pelaporan tribulanan yang tersusun			8 dokumen			8 dokumen	
		Jumlah dokumen evaluasi jangka menengah yang tersusun			0 dokumen			0 dokumen	
4.1.4.1.4.1.9.1.8.401.4	Penyusunan Dokumen Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Perangkat Daerah	Jumlah dokumen SOP yang tersusun	KECAMATAN SRUMBUNG	Kecamatan Srumbung	2 dokumen	0		2 dokumen	5.000.000
		Jumlah dokumen SP yang tersusun			2 dokumen			2 dokumen	
		Jumlah Daftar Informasi Publik			1 dokumen			1 dokumen	
		Jumlah dokumen pengendalian intern (SPIP) yang disusun			1 dokumen			1 dokumen	
		Jumlah dokumen data perangkat daerah yang tersusun			1 dokumen			1 dokumen	
4.1.4.1.4.1.9.1.42.401	Program Pelayanan Publik Kecamatan	Persentase pelayanan publik sesuai SOP dan SP			100 %	30.200.000		100 %	17.500.000
4.1.4.1.4.1.9.1.42.401.1	Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Kecamatan (PATEN)	Jumlah dokumen yang terlayani	KECAMATAN SRUMBUNG	Kecamatan Srumbung	4800 dokumen	30.200.000		4800 dokumen	17.500.000
4.1.4.1.4.1.9.1.43.401	Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	Persentase kegiatan yang dikoordinasikan			87 %	61.514.000		87 %	244.000.000
		Persentase desa yang tertib administrasi			60 %			60 %	
4.1.4.1.4.1.9.1.43.401.1	Peningkatan Tata Kelola Kecamatan Pemerintahan Desa/Kelurahan	Jumlah Kepala Desa Terpilih	KECAMATAN SRUMBUNG	Kecamatan Srumbung	0 orang	9.329.000		0 orang	70.000.000
		Jumlah desa lunas PBB			17 desa			17 desa	
		Jumlah desa yang terfasilitasi pengelolaan keuangan desa			17 desa			17 desa	
		Jumlah perangkat desa terisi			5 orang			5 orang	
		Jumlah perangkat desa yang terbina			217 orang			217 orang	
		Jumlah Anggota BPD yang terbina			85 orang			85 orang	
		Jumlah desa yang terbina administrasinya			17 desa			17 desa	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja
4.1.4.1.4.1.9.1.43.401.2	Peningkatan Keberdayaan dan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa	Jumlah desa yang terfasilitasi bantuan keuangan kepada desa	KECAMATAN SRUMBUNG	Kecamatan Srumbung	17 desa	11.959.000		17 desa
		Jumlah dokumen profil desa yang tersusun			17 dokumen			17 dokumen
		Jumlah lembaga kemasyarakatan desa yang dibina			17 lembaga			17 lembaga
		Jumlah desa yang terfasilitasi evaluasi perkembangan desa			17 desa			17 desa
		Jumlah dokumen perencanaan desa yang tersusun			17 dokumen			17 dokumen
		Jumlah peserta musrenbangkec			120 orang			120 orang
4.1.4.1.4.1.9.1.43.401.3	Peningkatan Kualitas Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah desa terkoordinasi penanggulangan kemiskinan	KECAMATAN SRUMBUNG	Kecamatan Srumbung	17 desa	26.132.000		17 desa
		Jumlah TP PKK Desa yang terbina			17 TP PKK			17 TP PKK
		Jumlah desa layak anak			17 desa			17 desa
		Jumlah peserta yang dilatih dan dikirimkan dalam lomba kebudayaan			0 orang			0 orang
		Jumlah kegiatan penyelenggaraan Festival Budaya			0 kegiatan			0 kegiatan
4.1.4.1.4.1.9.1.43.401.4	Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Wawasan Kebangsaan	Jumlah Satlinmas desa yang dibina	KECAMATAN SRUMBUNG	Kecamatan Srumbung	0 orang	14.094.000		0 orang
		Jumlah frekuensi koordinasi forum komunikasi pimpinan kecamatan			12 kali			12 kali
		Jumlah desa yang difasilitasi penanggulangan bencana			17 desa			17 desa
		Jumlah peraturan perundangan-undangan yang disosialisasikan			0 peraturan			0 peraturan
		Jumlah anggota paskibra yang terbina			80 orang			80 orang
Total					228.204.000			554.000.000

PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH

KABUPATEN MAGELANG

TAHUN 2021

Nama Perangkat Daerah : KECAMATAN DUKUN

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang				215.448.000			340.923.000
4.1	Administrasi Pemerintahan				215.448.000			340.923.000
4.1.4.1.4.1.10.1.7.401	Program Manajemen Administrasi Pelayanan Umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah	Prosentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah			100 %	92.037.000	100 %	154.870.000
4.1.4.1.4.1.10.1.7.401.1	Pengelolaan Surat Menyurat, Kearsipan dan Bahan Pustaka	Jumlah Surat yang dikelola	KRINJING, DUKUN	Kecamatan Dukun	1005 surat	5.025.000	1005 surat	5.025.000
		Jumlah arsip yang dikelola			67 arsip		67 arsip	
		Jumlah bahan pustaka yang dikelola			34 buku		34 buku	
4.1.4.1.4.1.10.1.7.401.2	Penyelenggaraan Koordinasi dan Konsultasi Perangkat Daerah	Jumlah Perjalanan Dinas Dalam Daerah yang terlaksana	KECAMATAN DUKUN	Kecamatan Dukun	140 kali	7.500.000	140 kali	26.800.000
		Jumlah Rapat Koordinasi yang diselenggarakan			9 kali		9 kali	
		Jumlah layanan humas dan protokol yang dilaksanakan			14 layanan		14 layanan	
4.1.4.1.4.1.10.1.7.401.3	Pengadaan dan Pengelolaan Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya	Jumlah paket pengadaan perlengkapan gedung kantor	KECAMATAN DUKUN	Kecamatan Dukun	1 paket	0	1 paket	26.800.000
		Jumlah paket pengadaan peralatan gedung kantor			1 paket		1 paket	
		Jumlah aset yang dikelola			714 barang		714 barang	
4.1.4.1.4.1.10.1.7.401.4	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya	Luas gedung kantor yang dipelihara	KECAMATAN DUKUN	Kecamatan Dukun	1054 m2	33.279.000	1054 m2	28.140.000
		Jumlah rekening per bulan yang dibayar dalam 1 tahun			36 rekening bulan		36 rekening bulan	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
			Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
4.1.4.1.4.1.10.1.7.401.5	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya	Jumlah peralatan yang dipelihara	KECAMATAN DUKUN	Kecamatan Dukun	8 unit	46.233.000		8 unit	50.250.000
		Jumlah perlengkapan yang dipelihara			31 unit			31 unit	
		Jumlah kendaraan Roda empat yang dipelihara			1 mobil			1 mobil	
		Jumlah kendaraan dinas roda dua yang dipelihara			7 motor			7 motor	
4.1.4.1.4.1.10.1.7.401.6	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya	jumlah paket rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	KECAMATAN DUKUN	Kecamatan Dukun	1 paket	0		1 paket	13.400.000
4.1.4.1.4.1.10.1.7.401.7	Peningkatan Kapasitas dan Disiplin Aparatur Sipil Negara	Jumlah frekuensi pembinaan ASN	KECAMATAN DUKUN	Kecamatan Dukun	4 kali	0		4 kali	4.455.000
		Jumlah ASN yang terfasilitasi penilaian kinerjanya			12 orang			12 orang	
		Jumlah JFT yang terfasilitasi penilaian angka kreditnya			0 orang			0 orang	
4.1.4.1.4.1.10.1.8.401	Program Perencanaan, Keuangan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Prosentase ketercapaian perencanaan evaluasi kinerja OPD dan keuangan perangkat daerah			100 %	16.197.000		100 %	24.142.000
4.1.4.1.4.1.10.1.8.401.1	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah kegiatan yang dikelola	KECAMATAN DUKUN	Kecamatan Dukun	11 Kegiatan	14.665.000		11 Kegiatan	14.740.000
4.1.4.1.4.1.10.1.8.401.2	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	jumlah dokumen renstra perangkat daerah yang tersusun	KECAMATAN DUKUN	Kecamatan Dukun	0 dokumen	955.000		0 dokumen	3.350.000
		jumlah dokumen renja perangkat daerah yang tersusun			2 dokumen			2 dokumen	
		Jumlah dokumen Rencana Kerja Operasional yang disusun			1 dokumen			1 dokumen	
		Jumlah dokumen RPTK yang tersusun			1 dokumen			1 dokumen	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
4.1.4.1.4.1.10.1.8.401.3	Penyusunan Laporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen laporan tahunan yang tersusun	KECAMATAN DUKUN	Kecamatan Dukun	4 dokumen	577.000		4 dokumen	3.350.000
		Jumlah dokumen monitoring, evaluasi dan pelaporan tribulanan yang tersusun			8 dokumen			8 dokumen	
		Jumlah dokumen laporan bulanan yang tersusun			12 dokumen			12 dokumen	
		Jumlah dokumen evaluasi jangka menengah yang tersusun			0 dokumen			0 dokumen	
4.1.4.1.4.1.10.1.8.401.4	Penyusunan Dokumen Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Perangkat Daerah	Jumlah Standar Operasional Prosedur yang tersusun	KECAMATAN DUKUN	Kecamatan Dukun	10 Dokumen	0		10 Dokumen	2.702.000
		Jumlah Standar Pelayanan yang tersusun			1 Dokumen			1 Dokumen	
		Jumlah Daftar Informasi Publik			5 Dokumen			5 Dokumen	
		Jumlah Dokumen Pengendalian Intern yang tersusun			1 Dokumen			1 Dokumen	
		Jumlah Dokumen data perangkat daerah yang tersusun			1 Dokumen			1 Dokumen	
4.1.4.1.4.1.10.1.42.401	Program Pelayanan Publik Kecamatan	Prosentase Pelayanan publik sesuai SOP dan SP			100 %	45.700.000		100 %	20.100.000
4.1.4.1.4.1.10.1.42.401.1	Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Kecamatan (PATEN)	Jumlah dokumen terlayani	KECAMATAN DUKUN	Kecamatan Dukun	804 Dokumen	45.700.000		804 Dokumen	20.100.000
4.1.4.1.4.1.10.1.43.401	Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	Persentase kegiatan yang dikoordinasikan			100 %	61.514.000		100 %	141.811.000
		Persentase desa yang tertib Administrasi			100 %		100 %		

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
4.1.4.1.4.1.10.1.43.401.1	Peningkatan Tata Kelola Kecamatan Pemerintahan Desa/Kelurahan	jumlah kepala desa terpilih	KECAMATAN DUKUN	Kecamatan Dukun	0 orang	9.329.000	0 orang	39.851.000
		Jumlah perangkat desa terisi			15 orang		15 orang	
		Jumlah desa lunas PBB			15 desa		15 desa	
		Jumlah desa yang terfasilitasi pengelolaan keuangan desa			15 desa		15 desa	
		Jumlah Perangkat yang terbina			100 Orang		100 Orang	
		Jumlah anggota BPD yang terbina			60 orang		60 orang	
		Jumlah desa yang terbina administrasinya			15 desa		15 desa	
4.1.4.1.4.1.10.1.43.401.2	Peningkatan Keberdayaan dan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa	Jumlah desa yang terfasilitasi bantuan keuangan kepada desa	KECAMATAN DUKUN	Kecamatan Dukun	15 desa	11.959.000	15 desa	34.960.000
		Jumlah dokumen profil desa yang tersusun			1 dokumen		1 dokumen	
		Jumlah lembaga kemasyarakatan desa yang dibina			3 lembaga		3 lembaga	
		Jumlah desa yang terfasilitasi evaluasi perkembangan desa			15 desa		15 desa	
		Jumlah dokumen perencanaan desa yang tersusun			15 dokumen		15 dokumen	
		Jumlah peserta musrenbang kec			105 orang		105 orang	
4.1.4.1.4.1.10.1.43.401.3	Peningkatan Kualitas Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah desa/kel terkoordinasi penanggulangan kemiskinan	KECAMATAN DUKUN	Kecamatan Dukun	15 desa	26.132.000	15 desa	40.200.000
		Jumlah TP PKK Desa/Kel yang dibina			15 TP PKK Desa/ Kel		15 TP PKK Desa/ Kel	
		Jumlah peserta yang dilatih dan dikirimkan dalam lomba kebudayaan			3 orang		3 orang	
		Jumlah desa/kel layak anak			15 desa		15 desa	
		Jumlah kegiatan penyelenggaraan Festival Budaya			1 kali		1 kali	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja
4.1.4.1.4.1.10.1.43.401.4	Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Wawasan Kebangsaan	Terbinanya satlinmas desa yang dibina	KECAMATAN DUKUN	Kecamatan Dukun	15 orang	14.094.000	15 orang	26.800.000
		Jumlah Frekuensi koordinasi Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan			6 kali		6 kali	
		Jumlah desa yang difasilitasi penanggulangan bencana			15 desa		15 desa	
		Jumlah paskibraka yang terbina			80 orang		80 orang	
		Jumlah peraturan perundang undangan yang disosialisasikan			3 peraturan		3 peraturan	
Total						215.448.000		340.923.000

PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH

KABUPATEN MAGELANG

TAHUN 2021

Nama Perangkat Daerah : KECAMATAN SAWANGAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
			Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4		5	6	7	8	9
4	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang					221.868.780			545.776.000
4.1	Administrasi Pemerintahan					221.868.780			545.776.000
4.1.4.1.4.1.11.1.7.401	Program Manajemen Administrasi Pelayanan Umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah	Presentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah			100 %	107.622.780		100 %	293.276.000
4.1.4.1.4.1.11.1.7.401.1	Pengelolaan Surat Menyurat, Kearsipan dan Bahan Pustaka	Jumlah surat yang dikelola	KECAMATAN SAWANGAN	Kecamatan Sawangan	1500 surat	5.025.000		1500 surat	7.500.000
		Jumlah arsip yang dikelola			1600 arsip			1600 arsip	
		Jumlah bahan pustaka yang dikelola			360 buku			360 buku	
4.1.4.1.4.1.11.1.7.401.2	Penyelenggaraan Koordinasi dan Konsultasi Perangkat Daerah	Jumlah rapat koordinasi yang diselenggarakan	KECAMATAN SAWANGAN	Kecamatan Sawangan	40 kali	7.500.000		40 kali	40.000.000
		Jumlah perjalanan dinas dalam daerah yang terlaksana			200 kali			200 kali	
		Jumlah Layanan Humas dan protokol yang dilaksanakan			10 layanan			10 layanan	
4.1.4.1.4.1.11.1.7.401.3	Pengadaan dan Pengelolaan Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya	Jumlah paket pengadaan perlengkapan gedung kantor	KECAMATAN SAWANGAN	Kecamatan Sawangan	3 Paket	0		3 Paket	40.000.000
		Jumlah paket pengadaan peralatan gedung kantor			2 Paket			2 Paket	
		Jumlah aset yang dikelola			150 unit			150 unit	
4.1.4.1.4.1.11.1.7.401.4	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya	Luas gedung kantor yang dipelihara	KECAMATAN SAWANGAN	Kecamatan Sawangan	2000 m2	48.864.780		2000 m2	90.000.000
		Jumlah rekening/bulan yang dibayar dalam 1 tahun			36 rekening bulan			36 rekening bulan	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja
4.1.4.1.4.1.11.1.7.401.5	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya	Jumlah peralatan yang dipelihara	KECAMATAN SAWANGAN	Kecamatan Sawangan	14 unit	46.233.000	14 unit	78.000.000
		Jumlah perlengkapan yang dipelihara			5 unit		5 unit	
		Jumlah kendaraan dinas roda empat yang dipelihara			1 unit		1 unit	
		Jumlah kendaraan roda dua yang dipelihara			7 unit		7 unit	
4.1.4.1.4.1.11.1.7.401.6	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya	Jumlah paket rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	KECAMATAN SAWANGAN	Kecamatan Sawangan	0 Paket	0	0 Paket	30.000.000
4.1.4.1.4.1.11.1.7.401.7	Peningkatan Kapasitas dan Disiplin Aparatur Sipil Negara	Frekuensi pembinaan ASN	KECAMATAN SAWANGAN	Kecamatan Sawangan	12 kali	0	12 kali	7.776.000
		Jumlah ASN yang terfasilitasi penilaian kerjanya			20 orang		20 orang	
		Jumlah JFT yang terfasilitasi penilaian Angka Kreditnya			0 orang		0 orang	
4.1.4.1.4.1.11.1.8.401	Program Perencanaan, Keuangan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian perencanaan, evaluasi kinerja OPD, dan keuangan perangkat daerah			100 %	17.732.000	100 %	32.500.000
4.1.4.1.4.1.11.1.8.401.1	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah kegiatan yang dikelola	KECAMATAN SAWANGAN	Kecamatan Sawangan	15 kegiatan	16.200.000	15 kegiatan	17.500.000
		Jumlah laporan keuangan yang tersusun			1 laporan		1 laporan	
4.1.4.1.4.1.11.1.8.401.2	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Renstra PD yang tersusun	KECAMATAN SAWANGAN	Kecamatan Sawangan	0 Dokumen	955.000	0 Dokumen	5.000.000
		Jumlah dokumen Renja PD yang tersusun			2 Dokumen		2 Dokumen	
		Jumlah dokumen RPTK yang tersusun			1 Dokumen		1 Dokumen	
		Jumlah dokumen Rencana Kerja Operasional yang disusun			1 dokumen		1 dokumen	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
			Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
4.1.4.1.4.1.11.1.8.401.3	Penyusunan Laporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen laporan Tahunan yang tersusun	KECAMATAN SAWANGAN	Kecamatan Sawangan	4 Dokumen	577.000		4 Dokumen	5.000.000
		Jumlah dokumen monitoring, evaluasi, dan pelaporan tribulanan yang tersusun			8 Dokumen			8 Dokumen	
		Jumlah dokumen pelaporan bulanan yang tersusun			12 Dokumen			12 Dokumen	
		Jumlah dokumen evaluasi jangka menengah yang tersusun			0 Dokumen			0 Dokumen	
4.1.4.1.4.1.11.1.8.401.4	Penyusunan Dokumen Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Perangkat Daerah	Jumlah dokumen SOP yang tersusun	KECAMATAN SAWANGAN	Kecamatan Sawangan	1 Dokumen	0		1 Dokumen	5.000.000
		Jumlah dokumen SP yang tersusun			5 Dokumen			5 Dokumen	
		Jumlah dokumen pengendalian intern (SPIP) yang disusun			1 Dokumen			1 Dokumen	
		Jumlah dokumen Daftar Informasi Publik			2 Dokumen			2 Dokumen	
		Jumlah dokumen data perangkat daerah yang tersusun			1 Dokumen			1 Dokumen	
4.1.4.1.4.1.11.1.42.401	Program Pelayanan Publik Kecamatan	Persentase Pelayanan Publik Sesuai SOP dan SP			85 %	35.000.000		85 %	35.000.000
4.1.4.1.4.1.11.1.42.401.1	Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Kecamatan (PATEN)	Jumlah dokumen yang terlayani	KECAMATAN SAWANGAN	Kecamatan Sawangan	6000 Dokumen	35.000.000		6000 Dokumen	35.000.000
4.1.4.1.4.1.11.1.43.401	Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	Persentase kegiatan yang dikoordinasikan.			100 %	61.514.000		100 %	185.000.000
		Persentase desa yang tertib administrasi			70 %			70 %	
4.1.4.1.4.1.11.1.43.401.1	Peningkatan Tata Kelola Kecamatan Pemerintahan Desa/Kelurahan	Jumlah desa yang terfasilitasi pengelolaan keuangan desa	KECAMATAN SAWANGAN	Kecamatan Sawangan	15 desa	9.329.000		15 desa	45.000.000
		Jumlah kepala desa terpilih			0 orang			0 orang	
		Jumlah perangkat desa yang terisi			2 orang			2 orang	
		Jumlah desa lunas PBB			10 desa			10 desa	
		Jumlah Perangkat Desa yang terbina			225 orang			225 orang	
		Jumlah Anggota BPD yang terbina			30 orang			30 orang	
		Jumlah desa yang terbina administrasinya			15 desa			15 desa	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja
4.1.4.1.4.1.11.1.43.401.2	Peningkatan Keberdayaan dan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa	Jumlah desa yang terfasilitasi bantuan keuangan kepada desa	KECAMATAN SAWANGAN	Kecamatan Sawangan	15 Desa	11.959.000		15 Desa
		Jumlah dokumen profil desa yang tersusun			15 Dokumen			15 Dokumen
		Jumlah lembaga kemasyarakatan desa yang dibina			15 Lembaga			15 Lembaga
		Jumlah desa yang terfasilitasi evaluasi perkembangan desa			15 Desa			15 Desa
		Jumlah dokumen perencanaan desa yang tersusun			15 Dokumen			15 Dokumen
		Jumlah peserta musrenbang kecamatan			105 Orang			105 Orang
4.1.4.1.4.1.11.1.43.401.3	Peningkatan Kualitas Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah desa yang terkoordinasi penanggulangan kemiskinannya	KECAMATAN SAWANGAN	Kecamatan Sawangan	15 Desa	26.132.000		15 Desa
		Jumlah peserta yang dilatih dan dikirimkan dalam lomba kebudayaan			60 Orang			60 Orang
		Jumlah Desa Layak Anak			2 Desa			2 Desa
		Jumlah kegiatan penyelenggaraan Festival Budaya			1 Kegiatan			1 Kegiatan
		Jumlah TP PKK desa yang dibina			15 TP PKK			15 TP PKK
4.1.4.1.4.1.11.1.43.401.4	Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Wawasan Kebangsaan	Jumlah/ frekuensi koordinasi forum komunikasi pimpinan kecamatan	KECAMATAN SAWANGAN	Kecamatan Sawangan	12 Kali	14.094.000		12 Kali
		Jumlah desa yang difasilitasi penanggulangan bencana			15 Desa			15 Desa
		Jumlah satlinmas desa yang terbina			15 Desa			15 Desa
		Jumlah peraturan perundangan-undangan yang disosialisasikan			4 Peraturan			4 Peraturan
		Jumlah anggota paskibra yang terbina			70 Orang			70 Orang
Total					221.868.780		545.776.000	

PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH

KABUPATEN MAGELANG

TAHUN 2021

Nama Perangkat Daerah : KECAMATAN MUNTILAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang				1.714.452.050			2.126.917.800
4.1	Administrasi Pemerintahan				1.714.452.050			2.126.917.800
4.1.4.1.4.1.12.1.7.401	Program Manajemen Administrasi Pelayanan Umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah			100 %	186.208.500	100 %	263.000.000
4.1.4.1.4.1.12.1.7.401.1	Pengelolaan Surat Menyurat, Kearsipan dan Bahan Pustaka	Jumlah surat yang dikelola	KECAMATAN MUNTILAN	Kec. Muntilan	1000 Surat	4.125.000	1000 Surat	7.500.000
		Jumlah arsip yang dikelola			1000 arsip		1000 arsip	
		Jumlah bahan pustaka yang dikelola			8 buku		8 buku	
4.1.4.1.4.1.12.1.7.401.2	Penyelenggaraan Koordinasi dan Konsultasi Perangkat Daerah	Jumlah rapat koordinasi yang diselenggarakan	KECAMATAN MUNTILAN	Kec. Muntilan	22 kali	24.800.000	22 kali	40.000.000
		Jumlah perjalanan dinas dalam daerah yang terlaksana			200 kali		200 kali	
		Jumlah layanan humas dan protokol yang dilaksanakan			16 kali		16 kali	
4.1.4.1.4.1.12.1.7.401.3	Pengadaan dan Pengelolaan Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya	Jumlah paket pengadaan perlengkapan gedung kantor	KECAMATAN MUNTILAN	Kec. Muntilan	0 Paket	0	0 Paket	40.000.000
		Jumlah paket pengadaan peralatan gedung kantor			0 Paket		0 Paket	
		Jumlah aset yang dikelola			50 unit		50 unit	
4.1.4.1.4.1.12.1.7.401.4	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya	Luas gedung kantor yang dipelihara	KECAMATAN MUNTILAN	Kec. Muntilan	1200 m2	69.596.000	1200 m2	90.000.000
		Jumlah rekening/bulan yang dibayarkan dalam 1 tahun			60 rekening bulan		60 rekening bulan	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
			Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
4.1.4.1.4.1.12.1.7.401.5	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya	Jumlah peralatan yang dipelihara	KECAMATAN MUNTILAN	Kec. Muntilan	9 unit	37.687.500		9 unit	58.000.000
		Jumlah perlengkapan yang dipelihara			15 unit			15 unit	
		Jumlah kendaraan dinas roda empat yang dipelihara			2 unit			2 unit	
		Jumlah kendaraan dinas roda dua yang dipelihara			7 Unit			7 Unit	
4.1.4.1.4.1.12.1.7.401.6	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya	Jumlah paket rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	KECAMATAN MUNTILAN	Kec. Muntilan	0 Paket	50.000.000		0 Paket	20.000.000
4.1.4.1.4.1.12.1.7.401.7	Peningkatan Kapasitas dan Disiplin Aparatur Sipil Negara	Frekuensi Pembinaan ASN	KECAMATAN MUNTILAN	Kec. Muntilan	0 kali	0		0 kali	7.500.000
		Jumlah JFT yang terfasilitasi Angka Kreditnya			0 orang			0 orang	
		Jumlah ASN yang terfasilitasi penilaian kerjanya			0 orang			0 orang	
4.1.4.1.4.1.12.1.8.401	Program Perencanaan, Keuangan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian perencanaan , evaluasi kinerja OPD, dan keuangan perangkat daerah			100 %	30.332.500		100 %	59.500.000
4.1.4.1.4.1.12.1.8.401.1	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah kegiatan yang dikelola	KECAMATAN MUNTILAN	Kec. Muntilan	13 Kegiatan	23.632.500		13 Kegiatan	44.500.000
		Jumlah laporan keuangan yang tersusun			5 Dokumen			5 Dokumen	
4.1.4.1.4.1.12.1.8.401.2	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Renstra PD yang tersusun	KECAMATAN MUNTILAN	Kec. Muntilan	0 Dokumen	3.350.000		0 Dokumen	5.000.000
		Jumlah dokumen Renja PD yang tersusun			2 Dokumen			2 Dokumen	
		Jumlah dokumen Rencana Kerja Operasional yang tersusun			1 dokumen			1 dokumen	
		Jumlah dokumen RPTK yang tersusun			1 dokumen			1 dokumen	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
4.1.4.1.4.1.12.1.8.401.3	Penyusunan Laporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen laporan tahunan yang tersusun	KECAMATAN MUNTILAN	Kec. Muntilan	4 Dokumen	3.350.000		4 Dokumen	5.000.000
		Jumlah dokumen monitoring, evaluasi dan pelaporan tribulanan yang tersusun			8 Dokumen			8 Dokumen	
		Jumlah dokumen pelaporan bulanan yang tersusun			12 Dokumen			12 Dokumen	
		jumlah dokumen evaluasi jangka menengah yang tersusun			0 dokumen			0 dokumen	
4.1.4.1.4.1.12.1.8.401.4	Penyusunan Dokumen Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Perangkat Daerah	Jumlah SOP yang tersusun	KECAMATAN MUNTILAN	Kec. Muntilan	1 Dokumen	0		1 Dokumen	5.000.000
		Jumlah Standar Pelayanan yang tersusun			1 Dokumen			1 Dokumen	
		Jumlah dokumen Daftar Informasi Publik			1 dokumen			1 dokumen	
		Jumlah dokumen pengendalian intern (SIPP) yang tersusun			1 dokumen			1 dokumen	
		Jumlah dokumen data perangkat daerah yang tersusun			1 dokumen			1 dokumen	
4.1.4.1.4.1.12.1.42.401	Program Pelayanan Publik Kecamatan	Persentase Pelayanan Publik Sesuai SOP dan SP			100 %	57.652.000		100 %	34.000.000
4.1.4.1.4.1.12.1.42.401.1	Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Kecamatan (PATEN)	Jumlah dokumen terlayani	KECAMATAN MUNTILAN	Kec. Muntilan	7500 Dokumen	57.652.000		7500 Dokumen	34.000.000
4.1.4.1.4.1.12.1.43.401	Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	Persentase kegiatan yang dikoordinasikan			100 %	59.434.050		100 %	190.000.000
		Prosentase desa/kel yang tertib administrasi			66 %			66 %	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
4.1.4.1.4.1.12.1.43.401.1	Peningkatan Tata Kelola Kecamatan Pemerintahan Desa/Kelurahan	Jumlah desa/kelurahan terfasilitasi pengelolaan keuangan desa	KECAMATAN MUNTILAN	Kec. Muntilan	14 Desa/Kel	9.555.000		14 Desa/Kel
		Jumlah Kepala Desa Terpilih			0 Orang			0 Orang
		Jumlah perangkat desa yang terisi			3 Orang			3 Orang
		Jumlah Perangkat Desa yang terbina			26 Orang			26 Orang
		Jumlah anggota BPD yang terbina			26 Orang			26 Orang
		Jumlah desa/kelurahan lunas PBB			9 Desa/kel			9 Desa/kel
		Jumlah desa/kelurahan yang terbina administrasinya			14 Desa/kel			14 Desa/kel
4.1.4.1.4.1.12.1.43.401.2	Peningkatan Keberdayaan dan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa	Jumlah desa/kelurahan yang terfasilitasi bantuan keuangan kepada desa	KECAMATAN MUNTILAN	Kec. Muntilan	14 Desa/kel	15.570.000		14 Desa/kel
		Jumlah dokumen Profil desa/kelurahan yang tersusun			0 dokumen			0 dokumen
		Jumlah lembaga kemasyarakatan desa yang dibina			0 lembaga			0 lembaga
		Jumlah desa/kelurahan yang terfasilitasi evaluasi perkembangan desa/kelurahan			14 Desa/kel			14 Desa/kel
		Jumlah dokumen perencanaan desa yang tersusun			13 dokumen			13 dokumen
		Jumlah peserta musrenbangkec			150 orang			150 orang
4.1.4.1.4.1.12.1.43.401.3	Peningkatan Kualitas Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah desa/kel terkoordinasi penanggulangan kemiskinan	KECAMATAN MUNTILAN	Kec. Muntilan	14 Desa/Kel	21.949.050		14 Desa/Kel
		Jumlah TP PKK Desa/Kel yang dibina			14 Desa/Kel			14 Desa/Kel
		Jumlah peserta yang dilatih dan dikirimkan dalam lomba kebudayaan			25 Orang			25 Orang
		Jumlah Desa/Kel Layak Anak			0 Desa/Kel			0 Desa/Kel
		Jumlah kegiatan penyelenggaraan festival budaya			0 Kali			0 Kali

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
4.1.4.1.4.1.12.1.43.401.4	Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Wawasan Kebangsaan	Frekwensi koordinasi forum pimpinan kecamatan	KECAMATAN MUNTILAN	Kec. Muntilan	12 Kali	12.360.000		12 Kali	40.000.000
		Jumlah desa/kel yang difasilitasi penanggulangan bencana			14 Desa/kel			14 Desa/kel	
		Jumlah Satlimas desa yang dibina			0 Orang			0 Orang	
		Jumlah anggota paskibraka yang terbina			0 orang			0 orang	
		Jumlah peraturan perundang-undangan yang di sosialisasikan			0 peraturan			0 peraturan	
4.1.4.1.4.1.12.2.7.401	Program Manajemen Administrasi Pelayanan Umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah			100 %	104.047.000		100 %	171.050.000
4.1.4.1.4.1.12.2.7.401.1	Pengelolaan Surat Menyurat, Kearsipan dan Bahan Pustaka	Jumlah surat yang dikelola	MUNTILAN, MUNTILAN	Kelurahan Muntilan	1700 Surat	2.144.000		1700 Surat	3.200.000
4.1.4.1.4.1.12.2.7.401.2	Penyelenggaraan Koordinasi dan Konsultasi Perangkat Daerah	Jumlah rapat koordinasi yang diselenggarakan	KELURAHAN MUNTILAN		12 Kali pertemuan	15.855.000		12 Kali pertemuan	25.000.000
		Jumlah perjalanan dinas dalam daerah yang terlaksana			187 Kali perjalanan dd			187 Kali perjalanan dd	
4.1.4.1.4.1.12.2.7.401.3	Pengadaan dan Pengelolaan Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya	Jumlah paket pengadaan perlengkapan gedung kantor	MUNTILAN, MUNTILAN	Kelurahan Muntilan	0 Paket	0		0 Paket	36.850.000
		Jumlah paket pengadaan peralatan gedung kantor			2 Paket			2 Paket	
4.1.4.1.4.1.12.2.7.401.4	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya	Luas gedung kantor yang dipelihara	KELURAHAN MUNTILAN	Kel. Muntilan Kec. Muntilan	1300 m2	65.948.000		1300 m2	46.000.000
		Jumlah rekening yang dibayarkan			60 rekening			60 rekening	
4.1.4.1.4.1.12.2.7.401.5	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya	Jumlah peralatan yang dipelihara	MUNTILAN, MUNTILAN	Kel. MUntilan Kec. Muntilan	28 Unit	20.100.000		28 Unit	40.000.000
		Jumlah kendaraan dinas roda dua yang dipelihara			6 Unit			6 Unit	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
4.1.4.1.4.1.12.2.7.401.6	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya	Jumlah gedung yang direhab	MUNTILAN, MUNTILAN	Kelurahan Muntilan	0 unit	0		0 unit	20.000.000
4.1.4.1.4.1.12.2.8.401	Program Perencanaan, Keuangan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian perencanaan , evaluasi kinerja OPD, dan keuangan perangkat daerah			100 %	1.834.000		100 %	6.500.000
4.1.4.1.4.1.12.2.8.401.1	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah kegiatan yang dikelola	MUNTILAN, MUNTILAN	Kelurahan Muntilan Kecamatan Muntilan	11 Kegiatan	1.759.000		11 Kegiatan	3.500.000
4.1.4.1.4.1.12.2.8.401.3	Penyusunan Laporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen pelaporan bulanan yang tersusun	MUNTILAN, MUNTILAN	Kel. Muntilan Kec. MUntilan	12 Dokumen	75.000		12 Dokumen	3.000.000
4.1.4.1.4.1.12.2.43.401	Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	Prosetase kegiatan yang dikoordinasikan			100 %	1.274.944.000		100 %	1.402.867.800
4.1.4.1.4.1.12.2.43.401.5	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Kelurahan	Frekuensi rakor pembinaan dan penyuluhan pemerintahan dan pembangunan	MUNTILAN, MUNTILAN	Kel. Muntilan Kec. Muntilan	10 Kali	18.747.000		10 Kali	44.000.000
		Jumlah laporan kependudukan			4 laporan			4 laporan	
		Jumlah pokok pajak daerah PBB kelurahan yang terbayar			296938364 rupiah			296938364 rupiah	
4.1.4.1.4.1.12.2.43.401.6	Peningkatan Keberdayaan dan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan	Jumlah lembaga kelurahan yang aktif dalam pembangunan	KELURAHAN MUNTILAN		5 lembaga	1.195.897.000		5 lembaga	1.238.867.800
		Jumlah paket sarana dan prasarana kelurahan yang dibangun			1 paket			1 paket	
		Jumlah peserta musrenbang kelurahan			40 orang			40 orang	
		Jumlah proposal hibah/bansos yang terfasilitasi			5 Proposal			5 Proposal	
4.1.4.1.4.1.12.2.43.401.7	Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban serta Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Pokja yang dibina	MUNTILAN, MUNTILAN	Kelurahan Muntilan	4 Pokja	60.300.000		4 Pokja	120.000.000
		Jumlah Posyandu yang dibina			12 Posyandu			12 Posyandu	
		Jumlah anggota Satlinmas yang aktif dan terlatih			40 Orang			40 Orang	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Total					1.714.452.050		2.126.917.800	

PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH

KABUPATEN MAGELANG

TAHUN 2021

Nama Perangkat Daerah : KECAMATAN MUNGKID

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang				2.791.615.300			3.227.434.000
4.1	Administrasi Pemerintahan				2.791.615.300			3.227.434.000
4.1.4.1.4.1.13.1.7.401	Program Manajemen Administrasi Pelayanan Umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah			100 %	148.758.000	100 %	312.500.000
4.1.4.1.4.1.13.1.7.401.1	Pengelolaan Surat Menyurat, Kearsipan dan Bahan Pustaka	Jumlah surat yang dikelola Jumlah arsip yang dikelola Jumlah bahan pustaka yang dikelola	KECAMATAN MUNGKID	Kecamatan Mungkid	1700 surat 1000 arsip 200 buku	5.025.000	1700 surat 1000 arsip 200 buku	7.500.000
4.1.4.1.4.1.13.1.7.401.2	Penyelenggaraan Koordinasi dan Konsultasi Perangkat Daerah	Jumlah rapat koordinasi yang diselenggarakan Jumlah perjalanan dinas dalam daerah yang terlaksana Jumlah layanan humas dan protokol yang dilaksanakan	KECAMATAN MUNGKID	Kecamatan Mungkid	12 kali 24 kali 2 layanan	7.500.000	12 kali 24 kali 2 layanan	40.000.000
4.1.4.1.4.1.13.1.7.401.3	Pengadaan dan Pengelolaan Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya	Jumlah paket pengadaan peralatan gedung kantor Jumlah paket pengadaan perlengkapan gedung Jumlah aset yang dikelola	KECAMATAN MUNGKID	Kecamatan Mungkid	1 paket 1 paket 400 unit	0	1 paket 1 paket 400 unit	40.000.000
4.1.4.1.4.1.13.1.7.401.4	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya	Luas rumah dinas yang dipelihara Jumlah rekening/bulan yang dibayar dalam satu tahun	KECAMATAN MUNGKID	Kecamatan Mungkid	1441 m2 48 rekening bulan	90.000.000	1441 m2 48 rekening bulan	90.000.000

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
4.1.4.1.4.1.13.1.7.401.5	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya	Jumlah perlengkapan yang dipelihara	KECAMATAN MUNGKID	Kecamatan Mungkid	8 unit	46.233.000	8 unit	90.000.000
		Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara			10 unit		10 unit	
		Jumlah kendaraan dinas roda empat yang dipelihara			1 unit		1 unit	
		Jumlah kendaraan dinas roda dua yang dipelihara			7 unit		7 unit	
4.1.4.1.4.1.13.1.7.401.6	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya	Jumlah paket rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	KECAMATAN MUNGKID	Kecamatan Mungkid	1 paket	0	1 paket	40.000.000
4.1.4.1.4.1.13.1.7.401.7	Peningkatan Kapasitas dan Disiplin Aparatur Sipil Negara	Frekuensi pembinaan ASN	KECAMATAN MUNGKID	Kabupaten Magelang	12 kali	0	12 kali	5.000.000
		Jumlah JFT yang terfasilitasi penilaian angka kreditnya			0 orang		0 orang	
		Jumlah ASN yang terfasilitasi penilaian kinerjanya			15 orang		15 orang	
4.1.4.1.4.1.13.1.8.401	Program Perencanaan, Keuangan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Presentase Ketercapaian perencanaan, evaluasi kinerja OPD dan keuangan perangkat daerah.			100 %	17.732.000	100 %	32.280.000
4.1.4.1.4.1.13.1.8.401.1	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah kegiatan yang dikelola	KECAMATAN MUNGKID	Kecamatan Mungkid	16 kegiatan	16.200.000	16 kegiatan	25.000.000
		Jumlah laporan keuangan yang disusun			3 laporan		3 laporan	
4.1.4.1.4.1.13.1.8.401.2	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Renstra perangkat daerah yang tersusun	KECAMATAN MUNGKID	Kecamatan Mungkid	0 dokumen	955.000	0 dokumen	2.160.000
		Jumlah dokumen Renja PD yang tersusun			2 dokumen		2 dokumen	
		jumlah dokumen Rencana Kerja Operasional yang tersusun			1 dokumen		1 dokumen	
		Jumlah dokumen RPTK yang tersusun			1 dokumen		1 dokumen	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
4.1.4.1.4.1.13.1.8.401.3	Penyusunan Laporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen laporan tahunan yang tersusun	KECAMATAN MUNGKID	Kecamatan Mungkid	4 dokumen	577.000		4 dokumen	2.560.000
		Jumlah dokumen monitoring, evaluasi, dan pelaporan tribulanan yang tersusun			8 dokumen			8 dokumen	
		Jumlah dokumen laporan bulanan yang tersusun			12 dokumen			12 dokumen	
		Jumlah dokumen evaluasi jangka menengah yang tersusun			0 dokumen			0 dokumen	
4.1.4.1.4.1.13.1.8.401.4	Penyusunan Dokumen Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Perangkat Daerah	Jumlah dokumen SOP yang disusun	KECAMATAN MUNGKID	Kecamatan Mungkid	10 dokumen	0		10 dokumen	2.560.000
		Jumlah dokumen SP yang tersusun			5 dokumen			5 dokumen	
		Jumlah dokumen Daftar Informasi Publik			1 dokumen			1 dokumen	
		Jumlah dokumen pengendalian intern (SPIP) yang disusun			1 dokumen			1 dokumen	
		Jumlah dokumen data perangkat daerah yang tersusun			1 dokumen			1 dokumen	
4.1.4.1.4.1.13.1.42.401	Program Pelayanan Publik Kecamatan	Persentase pelayanan publik sesuai SOP dan SP			100 %	30.200.000		100 %	9.352.000
4.1.4.1.4.1.13.1.42.401.1	Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Kecamatan (PATEN)	jumlah dokumen yang terlayani	KECAMATAN MUNGKID	Kecamatan Mungkid	600 dokumen	30.200.000		600 dokumen	9.352.000
4.1.4.1.4.1.13.1.43.401	Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	Persentase kegiatan yang dikoordinasikan			100 %	61.514.000		100 %	160.000.000
		Persentase desa/kel yang tertib Administrasi			83 %		83 %		
4.1.4.1.4.1.13.1.43.401.1	Peningkatan Tata Kelola Kecamatan Pemerintahan Desa/Kelurahan	Jumlah desa yang terfasilitasi pengelolaan keuangan desa	KECAMATAN MUNGKID	Kecamatan Mungkid	16 desa	9.329.000		16 desa	50.000.000
		jumlah kepala desa terpilih			0 orang			0 orang	
		Jumlah perangkat desa terisi			0 orang			0 orang	
		Jumlah desa lunas PBB			16 desa			16 desa	
		Jumlah perangkat desa terbina			16 orang			16 orang	
		jumlah anggota BPD yang terbina			8 orang			8 orang	
		Jumlah desa yang terbina administrasinya			16 desa			16 desa	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
4.1.4.1.4.1.13.1.43.401.2	Peningkatan Keberdayaan dan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa	jumlah desa yang terfasilitasi bantuan keuangan kepada desa	KECAMATAN MUNGKID	Kecamatan Mungkid	16 desa	11.959.000		16 desa	30.000.000
		jumlah dokumen profil desa yang tersusun			16 dokumen			16 dokumen	
		jumlah lembaga kemasyarakatan desa yang terbina			16 lembaga			16 lembaga	
		Jumlah desa yang terfasilitasi evaluasi perkembangan desa			16 desa			16 desa	
		jumlah dokumen perencanaan desa yang tersusun			16 dokumen			16 dokumen	
		Jumlah peserta musrenbang kecamatan			110 orang			110 orang	
4.1.4.1.4.1.13.1.43.401.3	Peningkatan Kualitas Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah desa/kel terkoordinasi penanggulangan kemiskinan	KECAMATAN MUNGKID	Kecamatan Mungkid	16 Desa/Kel	26.132.000		16 Desa/Kel	40.000.000
		Jumlah TP PKK Desa/Kel yang dibina			16 TP PKK			16 TP PKK	
		jumlah peserta yang dilatih dan dikirimkan dalam lomba kebudayaan			15 peserta			15 peserta	
		jumlah desa/kel layak anak			1 desa/kel			1 desa/kel	
		Jumlah kegiatan penyelenggaraan festival seni dan budaya			1 kali			1 kali	
4.1.4.1.4.1.13.1.43.401.4	Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Wawasan Kebangsaan	Jumlah frekuensi koordinasi forum komunikasi pimpinan kecamatan	KECAMATAN MUNGKID	Kecamatan Mungkid	12 kali	14.094.000		12 kali	40.000.000
		Jumlah desa yang difasilitasi penanggulangan bencana			16 desa			16 desa	
		jumlah satlinmas desa terbina			16 satlinmas			16 satlinmas	
		Jumlah peraturan perundang-undangan yang disosialisasikan			1 peraturan			1 peraturan	
		jumlah anggota paskibra yang terbina			80 orang			80 orang	
4.1.4.1.4.1.13.2.7.401	Program Manajemen Administrasi Pelayanan Umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah	Prosentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah			100 %	71.129.000		100 %	59.005.000

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
4.1.4.1.4.1.13.2.7.401.1	Pengelolaan Surat Menyurat, Kearsipan dan Bahan Pustaka	Jumlah surat yang dikelola	MENDUT, MUNGKID	mendut	1100 surat	2.110.000	1100 surat	2.345.000
		Jumlah arsip yang dikelola			500 arsip		500 arsip	
		Jumlah bahan pustaka yang dikelola			485 buku		485 buku	
4.1.4.1.4.1.13.2.7.401.2	Penyelenggaraan Koordinasi dan Konsultasi Perangkat Daerah	Jumlah rapat koordinasi yang diselenggarakan	KELURAHAN MENDUT	Kelurahan Mendut	12 kali	9.045.000	12 kali	1.050.000
		Jumlah perjalanan dinas dalam daerah yang terlaksana			30 kali		30 kali	
		Jumlah layanan humas dan protokol yang dilaksanakan			2 layanan		2 layanan	
4.1.4.1.4.1.13.2.7.401.3	Pengadaan dan Pengelolaan Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya	Jumlah paket pengadaan perlengkapan gedung kantor	KELURAHAN MENDUT	Kelurahan Mendut	1 paket	15.075.000	1 paket	16.750.000
		Jumlah paket pengadaan peralatan gedung kantor			1 paket		1 paket	
		Jumlah aset yang dikelola			200 unit		200 unit	
4.1.4.1.4.1.13.2.7.401.4	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya	Luas gedung kantor yang dipelihara	KELURAHAN MENDUT	Kelurahan Mendut	200 m2	25.000.000	200 m2	16.750.000
		jumlah rekening/bulan yang dibayar dalam 1 tahun			48 rekening bulan		48 rekening bulan	
4.1.4.1.4.1.13.2.7.401.5	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya	Jumlah perlengkapan yang dipelihara	KELURAHAN MENDUT	Kelurahan Mendut	10 unit	19.899.000	10 unit	22.110.000
		Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara			10 unit		10 unit	
		Jumlah kendaraan dinas roda dua yang dipelihara			5 unit		5 unit	
4.1.4.1.4.1.13.2.8.401	Program Perencanaan, Keuangan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian perencanaan, evaluasi, kinerja dan keuangan daerah			100 %	7.225.800	100 %	10.839.000
4.1.4.1.4.1.13.2.8.401.1	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	MENDUT, MUNGKID	Kelurahan Mendut	100 %	6.000.000	100 %	8.829.000
4.1.4.1.4.1.13.2.8.401.3	Penyusunan Laporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen laporan bulanan yang tersusun	MENDUT, MUNGKID	Mendut	12 dokumen	1.225.800	12 dokumen	2.010.000

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
4.1.4.1.4.1.13.2.43.401	Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	Persentase kegiatan yang dikoordinasikan			100 %	1.222.876.000		100 %	1.225.958.000
4.1.4.1.4.1.13.2.43.401.5	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Kelurahan	Frekuensi Rakor Pembinaan dan penyuluhan Pemerintahan dan Pembangunan	KELURAHAN MENDUT	Kelurahan Mendut	10 Kali	15.075.000		10 Kali	16.750.000
		Jumlah laporan kependudukan			12 laporan			12 laporan	
		Jumlah pokok pajak daerah PBB kelurahan terbayar			0 Rupiah			0 Rupiah	
4.1.4.1.4.1.13.2.43.401.6	Peningkatan Keberdayaan dan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan	Jumlah lembaga kelurahan yang aktif dalam pembangunan	MENDUT, MUNGKID	Mendut	7 lembaga	1.195.138.000		7 lembaga	1.195.138.000
		Jumlah paket sarana dan prasarana kelurahan yang dibangun			7 paket			7 paket	
		Jumlah peserta Musrenbang kelurahan			40 orang			40 orang	
		Jumlah proposal hibah/bansos yang terfasilitasi			20 proposal			20 proposal	
4.1.4.1.4.1.13.2.43.401.7	Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban serta Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah pokja yang di bina	MENDUT, MUNGKID	Kelurahan Mendut	4 Pokja	12.663.000		4 Pokja	14.070.000
		Jumlah posyandu yang di bina			7 posyandu			7 posyandu	
		Jumlah anggota satlinmas yang aktif dan terlatih			25 orang			25 orang	
4.1.4.1.4.1.13.3.7.401	Program Manajemen Administrasi Pelayanan Umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah			100 %	81.447.500		100 %	166.000.000
4.1.4.1.4.1.13.3.7.401.1	Pengelolaan Surat Menyurat, Kearsipan dan Bahan Pustaka	Jumlah surat yang dikelola	KELURAHAN SAWITAN	Kel. Sawitan	2600 surat	3.350.000		2600 surat	5.000.000
		Jumlah arsip yang dikelola			500 arsip			500 arsip	
		Jumlah bahan pustaka yang dikelola			200 buku			200 buku	
4.1.4.1.4.1.13.3.7.401.2	Penyelenggaraan Koordinasi dan Konsultasi Perangkat Daerah	Jumlah rapat koordinasi yang diselenggarakan	KELURAHAN SAWITAN	Kelurahan Sawitan	12 kali	2.040.000		12 kali	18.500.000
		Jumlah perjalanan dinas dalam daerah yang terlaksana			32 kali			32 kali	
		Jumlah layanan humas dan protokol yang dilaksanakan			2 layanan			2 layanan	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
4.1.4.1.4.1.13.3.7.401.3	Pengadaan dan Pengelolaan Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya	Jumlah paket pengadaan perlengkapan gedung kantor	KELURAHAN SAWITAN	Kelurahan Sawitan	1 paket	0	1 paket	28.500.000
		Jumlah paket pengadaan peralatan gedung kantor			1 paket		1 paket	
		Jumlah aset yang dikelola			200 unit		200 unit	
4.1.4.1.4.1.13.3.7.401.4	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya	Luas gedung kantor yang dipelihara	KELURAHAN SAWITAN	Kelurahan Sawitan	629 m2	60.000.000	629 m2	65.000.000
		jumlah rekening/bulan yang dibayar dalam 1 tahun			36 rekening bulan		36 rekening bulan	
4.1.4.1.4.1.13.3.7.401.5	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang di pelihara	KELURAHAN SAWITAN	Kelurahan Sawitan	5 unit	16.057.500	5 unit	49.000.000
		Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara			9 unit		9 unit	
		Jumlah kendaraan dinas roda dua yang dipelihara			5 unit		5 unit	
4.1.4.1.4.1.13.3.8.401	Program Perencanaan, Keuangan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian perencanaan, evaluasi kinerja, dan keuangan perangkat daerah			100 %	6.000.000	100 %	12.000.000
4.1.4.1.4.1.13.3.8.401.1	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah kegiatan yang dikelola	KELURAHAN SAWITAN	Kelurahan Sawitan	12 kegiatan	6.000.000	12 kegiatan	12.000.000
4.1.4.1.4.1.13.3.43.401	Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	Persentase kegiatan yang dikoordinasikan			100 %	1.144.733.000	100 %	1.239.500.000
4.1.4.1.4.1.13.3.43.401.5	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Kelurahan	Frekuensi Rakor Pembinaan dan Penyuluhan Pemerintahan dan Pembangunan	KELURAHAN SAWITAN	Kelurahan Sawitan	12 kali	5.833.000	12 kali	11.500.000
		Jumlah laporan kependudukan			12 laporan		12 laporan	
		Jumlah pokok pajak daerah PBB kelurahan terbayar			0 rupiah		0 rupiah	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
4.1.4.1.4.1.13.3.43.401.6	Peningkatan Keberdayaan dan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan	Jumlah lembaga kelurahan yang aktif dalam pembangunan	KELURAHAN SAWITAN	Kelurahan Sawitan	4 lembaga	1.001.550.000		4 lembaga	1.023.000.000
		Jumlah paket sarana dan prasarana kelurahan yang dibangun			6 paket			6 paket	
		Jumlah peserta musrenbang kelurahan			40 orang			40 orang	
		Jumlah proposal hibah/bansos yang terfasilitasi			6 proposal			6 proposal	
4.1.4.1.4.1.13.3.43.401.7	Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban serta Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah pokja yang dibina	KELURAHAN SAWITAN	Kelurahan Sawitan	4 pokja	137.350.000		4 pokja	205.000.000
		Jumlah posyandu yang dibina			7 posyandu			7 posyandu	
		Jumlah anggota satlinmas yang aktif dan terlatih			25 orang			25 orang	
Total						2.791.615.300			3.227.434.000

PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH

KABUPATEN MAGELANG

TAHUN 2021

Nama Perangkat Daerah : KECAMATAN MERTOYUDAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang				1.543.462.240			1.929.625.000
4.1	Administrasi Pemerintahan				1.543.462.240			1.929.625.000
4.1.4.1.4.1.14.1.7.401	Program Manajemen Administrasi Pelayanan Umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah			100 %	118.398.500	100 %	267.613.000
4.1.4.1.4.1.14.1.7.401.1	Pengelolaan Surat Menyurat, Kearsipan dan Bahan Pustaka	Jumlah surat yang dikelola	KECAMATAN MERTOYUDAN	Kecamatan Mertoyudan	1200 Surat	4.125.000	1200 Surat	7.500.000
		Jumlah arsip yang dikelola			1300 arsip		1300 arsip	
		jumlah bahan pustaka yang dikelola			200 buku		200 buku	
4.1.4.1.4.1.14.1.7.401.2	Penyelenggaraan Koordinasi dan Konsultasi Perangkat Daerah	Jumlah Rapat Koordinasi yang diselenggarakan	DONOROJO, MERTOYUDAN	Kecamatan Metoyudan	10 kali	24.800.000	10 kali	40.000.000
		Jumlah Perjalanan Dinas Dalam Daerah yang terlaksana			74 Kali		74 Kali	
		Jumlah layanan humas dan protokol yang dilaksanakan			2 jenis		2 jenis	
4.1.4.1.4.1.14.1.7.401.3	Pengadaan dan Pengelolaan Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya	Jumlah paket pengadaan perlengkapan gedung kantor	DONOROJO, MERTOYUDAN	kecamatan Mertoyudan	1 paket	0	1 paket	40.000.000
		Jumlah Paket Pengadaan Peralatan Gedung Kantor			1 paket		1 paket	
		Jumlah aset yang dikelola			400 unit		400 unit	
4.1.4.1.4.1.14.1.7.401.4	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya	Luas Gedung Kantor yang dipelihara	PASURUHAN, MERTOYUDAN	kecamatan mertoyudan	932 m2	51.786.000	932 m2	90.000.000
		Jumlah rekening / bulan yang dibayarkan			36 rekening		36 rekening	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
			Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
4.1.4.1.4.1.14.1.7.401.5	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya	Jumlah peralatan yang dipelihara	JOGONEGORO, MERTOYUDAN	kecamatan mertoyudan	14 unit	37.687.500		14 unit	72.613.000
		jumlah kendaraan dinas roda empat yang dipelihara			1 unit			1 unit	
		jumlah kendaraan dinas roda dua yang dipelihara			7 unit			7 unit	
4.1.4.1.4.1.14.1.7.401.6	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya	jumlah paket rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	DONOROJO, MERTOYUDAN	Kecamatan Mertoyudan	0 paket	0		0 paket	10.000.000
4.1.4.1.4.1.14.1.7.401.7	Peningkatan Kapasitas dan Disiplin Aparatur Sipil Negara	Jumlah JFT yang terfasilitasi penilaian angka kreditnya	KECAMATAN MERTOYUDAN	kecamatan Mertoyudan	1 orang	0		1 orang	7.500.000
		Jumlah ASN yang terfasilitasi penilaian kinerjanya			15 orang			15 orang	
		Frekuensi pembinaan ASN			12 kali			12 kali	
4.1.4.1.4.1.14.1.8.401	Program Perencanaan, Keuangan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Prosentase ketercapaian perencanaan, evaluasi kinerja OPD dan Keuangan perangkat daerah			100 %	28.900.000		100 %	52.955.000
4.1.4.1.4.1.14.1.8.401.1	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah kegiatan yang dikelola	KECAMATAN MERTOYUDAN	kecamatan mertoyudan	22 kegiatan	22.200.000		22 kegiatan	37.955.000
		Jumlah laporan Keuangan yang tersusun			5 laporan			5 laporan	
4.1.4.1.4.1.14.1.8.401.2	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renstra perangkat daerah yang tersusun	KECAMATAN MERTOYUDAN	kecamatan mertoyudan	0 dokumen	3.350.000		0 dokumen	5.000.000
		Jumlah Dokumen Renja perangkat daerah yang tersusun			2 dokumen			2 dokumen	
		Jumlah dokumen Rencana Kerja Operasional yang tersusun			1 dokumen			1 dokumen	
		Jumlah dokumen RPTK yang tersusun			1 dokumen			1 dokumen	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
4.1.4.1.4.1.14.1.8.401.3	Penyusunan Laporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen laporan tahunan yg tersusun	KECAMATAN MERTOYUDAN	kecamatan mertoyudan	4 dokumen	3.350.000	4 dokumen	5.000.000
		jumlah dokumen monitoring, evaluasi dan pelaporan tribulanan yang tersusun			8 dokumen		8 dokumen	
		Jumlah dokumen pelaporan bulanan yang tersusun			12 dokumen		12 dokumen	
		jumlah dokumen evaluasi jangka menengah yang tersusun			0 dokumen		0 dokumen	
4.1.4.1.4.1.14.1.8.401.4	Penyusunan Dokumen Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Perangkat Daerah	Jumlah dokumen SOP yang tersusun	KECAMATAN MERTOYUDAN	kecamatan mertoyudan	1 dokumen	0	1 dokumen	5.000.000
		Jumlah dokumen SP yang disusun			1 dokumen		1 dokumen	
		Jumlah dokumen Daftar Informasi Publik			1 dokumen		1 dokumen	
		Jumlah dokumen pengendalian intern (SIPP) yang tersusun			0 Dokumen		0 Dokumen	
		Jumlah dokumen data perangkat daerah yang tersusun			0 dokumen		0 dokumen	
4.1.4.1.4.1.14.1.42.401	Program Pelayanan Publik Kecamatan	Persentase Pelayanan Publik sesuai SOP dan SP			100 %	32.730.000	100 %	26.000.000
4.1.4.1.4.1.14.1.42.401.1	Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Kecamatan (PATEN)	jumlah dokumen yang terlayani	KECAMATAN MERTOYUDAN	kecamatan mertoyudan	12354 lembar	32.730.000	12354 lembar	26.000.000
4.1.4.1.4.1.14.1.43.401	Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	Persentase kegiatan yang dikoordinasikan			100 %	59.434.050	100 %	216.262.000
		Persentase desa/kel yang tertib Administrasi			64 %		64 %	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja
4.1.4.1.4.1.14.1.43.401.1	Peningkatan Tata Kelola Kecamatan Pemerintahan Desa/Kelurahan	Jumlah Desa terfasilitasi pengelolaan Keuangan Desa	KECAMATAN MERTOYUDAN	kecamatan mertoyudan	13 Desa/Kel	9.555.000	13 Desa/Kel	40.567.000
		Jumlah Kepala Desa Terpilih			1 desa		1 desa	
		Jumlah perangkat desa terisi			4 orang		4 orang	
		Desa lunas PBB			1 Desa		1 Desa	
		Jumlah perangkat desa yang terbina			0 orang		0 orang	
		Jumlah anggota BPD yang terbina			0 orang		0 orang	
		Jumlah desa yang terbina administrasinya			13 desa		13 desa	
4.1.4.1.4.1.14.1.43.401.2	Peningkatan Keberdayaan dan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa	Jumlah desa yang terfasilitasi bantuan keuangan kepada desa	JOGONEGORO, MERTOYUDAN	kecamatan mertoyudan	13 desa	15.570.000	13 desa	45.695.000
		Jumlah dokumen profil desa yang tersusun			13 dokumen		13 dokumen	
		Jumlah lembaga kemasyarakatan desa yang dibina			6 desa		6 desa	
		Jumlah desa yang terfasilitasi evaluasi perkembangan desa			6 desa		6 desa	
		Jumlah Dokumen Perencanaan Desa yang tersusun			13 dokumen		13 dokumen	
		Jumlah peserta musrenbangkec			105 orang		105 orang	
		4.1.4.1.4.1.14.1.43.401.3			Peningkatan Kualitas Kesejahteraan Masyarakat		Jumlah Desa terkoordinasi penanggulangan kemiskinan	
Jumlah TP PKK Desa/ Kel yang di bina	1 Desa/Kel		1 Desa/Kel					
Jumlah peserta yang dilatih dan dikirimkan dlm lomba Kebudayaan	75 orang		75 orang					
Jumlah desa/kel layak anak	13 desa		13 desa					
Jumlah kegiatan penyelenggaraan Festival Budaya	6 kegiatan		6 kegiatan					

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
			Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
4.1.4.1.4.1.14.1.43.401.4	Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Wawasan Kebangsaan	Jumlah Frekuensi koordinasi Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan	DONOROJO, MERTOYUDAN	kecamatan mertoyudan	12 kali	12.360.000		12 kali	55.000.000
		Jumlah desa yang difasilitasi penanggulangan bencana			13 desa/kel			13 desa/kel	
		jumlah satlinmas desa yang terbina			13 desa/kel			13 desa/kel	
		jumlah peraturan perundang undangan yang disosialisasikan			0 peraturan			0 peraturan	
		Jumlah paskibraka yang terbina			70 orang			70 orang	
4.1.4.1.4.1.14.2.7.401	Program Manajemen Administrasi Pelayanan Umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah			100 %	82.179.190		100 %	84.157.000
4.1.4.1.4.1.14.2.7.401.1	Pengelolaan Surat Menyurat, Kearsipan dan Bahan Pustaka	Jumlah surat yang dikelola	SUMBERREJO, MERTOYUDAN	RT.01/12	300 surat	2.115.190		300 surat	3.157.000
		Jumlah arsip yang dikelola			100 arsip			100 arsip	
		Jumlah bahan pustaka yang dikelola			100 buku			100 buku	
4.1.4.1.4.1.14.2.7.401.2	Penyelenggaraan Koordinasi dan Konsultasi Perangkat Daerah	Jumlah rapat koordinasi yang diselenggarakan	SUMBERREJO, MERTOYUDAN	RT.01/12	52 kali	5.360.000		52 kali	8.000.000
		Jumlah perjalanan dinas dalam daerah yang terlaksana			30 kali			30 kali	
		Jumlah layanan humas dan protokol yang dilaksanakan			2 layanan			2 layanan	
4.1.4.1.4.1.14.2.7.401.3	Pengadaan dan Pengelolaan Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya	Jumlah pengadaan perlengkapan gedung kantor yang dibeli	KELURAHAN SUMBERREJO	RT.01/12	1 paket	6.700.000		1 paket	10.000.000
		Jumlah Pengadaan peralatan kantor yang dibeli			1 paket			1 paket	
		Jumlah aset yang dikelola			400 unit			400 unit	
4.1.4.1.4.1.14.2.7.401.4	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya	Luas Gedung Kantor yang dipelihara	SUMBERREJO, MERTOYUDAN	RT.01/12	484.50 m2	47.904.000		484.50 m2	33.000.000
		Jumlah rekening/bulan yang dibayarkan selama 1 tahun			36 rekening bulan			36 rekening bulan	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
			Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
4.1.4.1.4.1.14.2.7.401.5	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya	Jumlah Peralatan kantor yg dipelihara	SUMBERREJO, MERTOYUDAN	RT.01/12	1 unit	20.100.000		1 unit	30.000.000
		Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara			1 unit			1 unit	
		jumlah kendaraan dinas roda dua yang dipelihara			5 unit			5 unit	
4.1.4.1.4.1.14.2.8.401	Program Perencanaan, Keuangan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian perencanaan, evaluasi kinerja OPD, dan keuangan perangkat daerah			100 %	4.295.000		100 %	6.500.000
4.1.4.1.4.1.14.2.8.401.1	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah kegiatan yang dikelola	SUMBERREJO, MERTOYUDAN	RT.01/12	10 kegiatan	2.345.000		10 kegiatan	3.500.000
		Jumlah laporan keuangan yang tersusun			2 laporan			2 laporan	
4.1.4.1.4.1.14.2.8.401.3	Penyusunan Laporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen laporan bulanan yang tersusun	SUMBERREJO, MERTOYUDAN	RT.01/12	12 laporan	1.950.000		12 laporan	3.000.000
4.1.4.1.4.1.14.2.43.401	Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	Persentase kegiatan yang dikoordinasikan			100 %	1.217.525.500		100 %	1.276.138.000
4.1.4.1.4.1.14.2.43.401.5	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Kelurahan	Frekuensi rakor pembinaan dan penyuluhan pemerintahan dan pembangunan	SUMBERREJO, MERTOYUDAN	RT.01/12	12 kali	7.370.000		12 kali	11.000.000
		Jumlah laporan kependudukan			12 laporan			12 laporan	
		Jumlah pokok pajak daerah PBB kelurahan yang terbayar			161879515 rupiah			161879515 rupiah	
4.1.4.1.4.1.14.2.43.401.6	Peningkatan Keberdayaan dan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan	Jumlah lembaga kelurahan yang aktif dalam pembangunan	SUMBERREJO, MERTOYUDAN	RT.01/12	4 lembaga	1.193.623.000		4 lembaga	1.195.138.000
		Jumlah paket sarana dan prasarana kelurahan yang dibangun			6 paket			6 paket	
		Jumlah peserta Musrenbang Kelurahan			40 orang			40 orang	
		Jumlah proposal hibah/bansos yang terfasilitasi			6 proposal			6 proposal	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja
4.1.4.1.4.1.14.2.43.401.7	Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban serta Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah pokja yang dibina	SUMBERREJO, MERTOYUDAN	RT.01/12	4 pokja	16.532.500	4 pokja	70.000.000
		Jumlah posyandu yang dibina			10 posyandu		10 posyandu	
		Jumlah anggota satlinmas yang aktif dan terlatih			25 orang		25 orang	
Total					1.543.462.240		1.929.625.000	

PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH

KABUPATEN MAGELANG

TAHUN 2021

Nama Perangkat Daerah : KECAMATAN TEMPURAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang				238.204.000			637.499.998
4.1	Administrasi Pemerintahan				238.204.000			637.499.998
4.1.4.1.4.1.15.1.7.401	Program Manajemen Administrasi Pelayanan Umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah			100 %	128.758.000	100 %	282.499.998
4.1.4.1.4.1.15.1.7.401.1	Pengelolaan Surat Menyurat, Kearsipan dan Bahan Pustaka	Jumlah Surat yang dikelola Jumlah arsip yang dikelola Jumlah bahan pustaka yang dikelola	KECAMATAN TEMPURAN	Kecamatan Tempuran	1500 surat 10000 arsip 40 buku	5.025.000	1500 surat 10000 arsip 40 buku	7.500.000
4.1.15.1.7.401.1.1	Belanja Barang dan Jasa		KECAMATAN TEMPURAN	Tempuran	8 buah	7.500.000		8.000.000
4.1.4.1.4.1.15.1.7.401.2	Penyelenggaraan Koordinasi dan Konsultasi Perangkat Daerah	Jumlah Rapat yang diselenggarakan Jumlah Perjalanan Dinas Dalam Daerah yang terlaksana Jumlah layanan humas dan protokol yang dilaksanakan	KECAMATAN TEMPURAN	Kecamatan Tempuran	50 kali 150 kali 50 layanan	7.500.000	50 kali 150 kali 50 layanan	44.999.998
4.1.4.1.4.1.15.1.7.401.3	Pengadaan dan Pengelolaan Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya	Jumlah paket pengadaan perlengkapan gedung kantor Jumlah paket pengadaan peralatan gedung kantor Jumlah aset yang dikelola	KECAMATAN TEMPURAN	Kec. Tempuran	0 paket 0 paket 5 unit	0	0 paket 0 paket 5 unit	50.000.000
4.1.4.1.4.1.15.1.7.401.4	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya	Luas gedung kantor yang dipelihara Jumlah rekening/bulan yang dibayar dalam 1 tahun	KECAMATAN TEMPURAN	Kecamatan Muntilan	5700 m2 60 rekening bulan	70.000.000	5700 m2 60 rekening bulan	70.000.000

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
4.1.4.1.4.1.15.1.7.401.5	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	KECAMATAN TEMPURAN	Kecamatan Tempuran	20 unit	46.233.000		20 unit	80.000.000
		Jumlah perlengkapan yang dipelihara			5 unit			5 unit	
		jumlah kendaraan roda dua yang dipelihara			7 unit			7 unit	
		Jumlah kendaraan dinas roda empat yang dipelihara			1 unit			1 unit	
4.1.4.1.4.1.15.1.7.401.6	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya	Jumlah paket rehab sedang/berat gedung kantor	KECAMATAN TEMPURAN	Kecamatan Tempuran	0 paket	0		0 paket	25.000.000
4.1.4.1.4.1.15.1.7.401.7	Peningkatan Kapasitas dan Disiplin Aparatur Sipil Negara	Frekuensi pembinaan ASN	KECAMATAN TEMPURAN	Kecamatan Tempuran	30 kali	0		30 kali	5.000.000
		Jumlah ASN yang terfasilitasi penilaian kinerjanya			15 orang			15 orang	
		Jumlah JFT yang terfasilitasi penilaian angka kreditnya			2 orang			2 orang	
4.1.4.1.4.1.15.1.8.401	Program Perencanaan, Keuangan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Presentase Ketercapaian perencanaan, evaluasi kinerja OPD dan keuangan perangkat daerah.			100 %	17.732.000		100 %	40.000.000
4.1.4.1.4.1.15.1.8.401.1	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah kegiatan yang dikelola	KECAMATAN TEMPURAN	Kec.Tempuran	14 kegiatan	16.200.000		14 kegiatan	25.000.000
		Jumlah laporan keuangan yang tersusun			6 dokumen			6 dokumen	
4.1.4.1.4.1.15.1.8.401.2	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Renstra PD yang tersusun	KECAMATAN TEMPURAN	Kecamatan Tempuran	0 dokumen	955.000		0 dokumen	5.000.000
		Jumlah dokumen Renja PD yang tersusun			2 dokumen			2 dokumen	
		Jumlah dokumen Rencana Kerja Operasional yang disusun			1 dokumen			1 dokumen	
		Jumlah dokumen RPTK yang tersusun			1 dokumen			1 dokumen	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
			Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
4.1.4.1.4.1.15.1.8.401.3	Penyusunan Laporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen pelaporan tahunan yang tersusun	KECAMATAN TEMPURAN	Kecamatan Tempuran	4 dokumen	577.000		4 dokumen	5.000.000
		Jumlah dokumen monitoring, evaluasi dan pelaporan tribulanan yang tersusun			8 dokumen			8 dokumen	
		Jumlah dokumen pelaporan bulanan yang tersusun			12 dokumen			12 dokumen	
		Jumlah dokumen evaluasi jangka menengah yang tersusun			0 dokumen			0 dokumen	
4.1.4.1.4.1.15.1.8.401.4	Penyusunan Dokumen Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Perangkat Daerah	Jumlah dokumen SOP yang disusun	KECAMATAN TEMPURAN	Kecamatan Tempuran	0 dokumen	0		0 dokumen	5.000.000
		Jumlah dokumen Standar Pelayanan yang disusun			0 dokumen			0 dokumen	
		Jumlah dokumen Daftar Informasi Publik			1 dokumen			1 dokumen	
		Jumlah dokumen pengendalian intern (SPIP) yang disusun			1 dokumen			1 dokumen	
		Jumlah dokumen data perangkat daerah yang tersusun			1 dokumen			1 dokumen	
4.1.4.1.4.1.15.1.42.401	Program Pelayanan Publik Kecamatan	Persentase pelayanan publik sesuai SOP dan SP			93 %	30.200.000		93 %	40.000.000
4.1.4.1.4.1.15.1.42.401.1	Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Kecamatan (PATEN)	Jumlah dokumen terlayani	KECAMATAN TEMPURAN	Kecamatan Tempuran	13000 dokumen	30.200.000		13000 dokumen	40.000.000
4.1.4.1.4.1.15.1.43.401	Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	Persentase kegiatan yang dikoordinasikan			100 %	61.514.000		100 %	275.000.000
		Persentase desa yang tertib administrasi			80 %		80 %		

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
4.1.4.1.4.1.15.1.43.401.1	Peningkatan Tata Kelola Kecamatan Pemerintahan Desa/Kelurahan	Jumlah Kepala Desa Terpilih	KECAMATAN TEMPURAN	Kecamatan Tempuran	0 orang	9.329.000		0 orang	70.000.000
		Jumlah Perangkat Desa Terisi			2 orang			2 orang	
		Jumlah Desa Lunas PBB			9 Desa			9 Desa	
		Jumlah Perangkat Desa yang Dibina			180 orang			180 orang	
		Jumlah Desa yang terfasilitasi pengelolaan keuangan desa			15 Desa			15 Desa	
		Jumlah Anggota BPD yang terbina			75 Orang			75 Orang	
		Jumlah desa yang terbina administrasinya			15 desa			15 desa	
4.1.4.1.4.1.15.1.43.401.2	Peningkatan Keberdayaan dan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa	Jumlah desa yang terfasilitasi bantuan keuangan kepada desa	KECAMATAN TEMPURAN	Kecamatan Tempuran	15 Desa	11.959.000		15 Desa	55.000.000
		Jumlah lembaga kemasyarakatan desa yang dibina			6 Lembaga			6 Lembaga	
		Jumlah desa yang terfasilitasi evaluasi perkembangan desa			15 Desa			15 Desa	
		Jumlah dokumen perencanaan desa yang tersusun			30 Dokumen			30 Dokumen	
		Jumlah dokumen profil desa yang tersusun			15 Dokumen			15 Dokumen	
		Jumlah peserta Musrenbangkec			120 orang			120 orang	
4.1.4.1.4.1.15.1.43.401.3	Peningkatan Kualitas Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah desa/kel terkoordinasi penanggulangan kemiskinan	KECAMATAN TEMPURAN	Kecamatan Tempuran	15 Desa	26.132.000		15 Desa	90.000.000
		Jumlah peserta yang dilatih dan dikirimkan dalam lomba kebudayaan			200 Orang			200 Orang	
		Jumlah kegiatan Penyelenggaraan Festival Budaya			6 Kali			6 Kali	
		Jumlah Desa/Kel Layak Anak			15 Desa			15 Desa	
		Jumlah TP PKK Desa/Kel yang dibina			15 Desa			15 Desa	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja
4.1.4.1.4.1.15.1.43.401.4	Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Wawasan Kebangsaan	Jumlah frekuensi koordinasi forum komunikasi pimpinan kecamatan	KECAMATAN TEMPURAN	Kecamatan Tempuran	12 Kali	14.094.000	12 Kali	60.000.000
		Jumlah Satlinmas desa yang dibina			60 orang		60 orang	
		Jumlah anggota paskibra yang terbina			80 Orang		80 Orang	
		Jumlah desa yang difasilitasi penanggulangan bencana			15 Desa		15 Desa	
		Jumlah peraturan perundangan-undangan yang disosialisasikan			4 Peraturan		4 Peraturan	
Total					238.204.000		637.499.998	

PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH

KABUPATEN MAGELANG

TAHUN 2021

Nama Perangkat Daerah : KECAMATAN KAJORAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang				259.143.000			600.000.000
4.1	Administrasi Pemerintahan				259.143.000			600.000.000
4.1.4.1.4.1.16.1.7.401	Program Manajemen Administrasi Pelayanan Umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Pelayanan Umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah			100 %	141.944.000	100 %	341.000.000
4.1.4.1.4.1.16.1.7.401.1	Pengelolaan Surat Menyurat, Kearsipan dan Bahan Pustaka	Jumlah surat yang dikelola	KECAMATAN KAJORAN	Kecamatan Kajoran	1400 surat	5.235.000	1400 surat	8.500.000
		Jumlah arsip yang dikelola			2000 arsip		2000 arsip	
		Jumlah bahan pustaka yang dikelola			429 buku		429 buku	
4.1.4.1.4.1.16.1.7.401.2	Penyelenggaraan Koordinasi dan Konsultasi Perangkat Daerah	Jumlah rapat koordinasi yang terselenggarakan	KECAMATAN KAJORAN	Kecamatan Kajoran	36 kali	7.400.000	36 kali	50.000.000
		Jumlah perjalanan dinas dalam daerah yang terlaksana			160 kali		160 kali	
		Jumlah layanan humas dan protokol yang dilaksanakan			2 layanan		2 layanan	
4.1.4.1.4.1.16.1.7.401.3	Pengadaan dan Pengelolaan Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya	Jumlah paket pengadaan perlengkapan gedung kantor	KECAMATAN KAJORAN	Kecamatan Kajoran	1 paket	0	1 paket	40.000.000
		Jumlah paket pengadaan peralatan gedung kantor			1 paket		1 paket	
		Jumlah aset yang dikelola			817 unit		817 unit	
4.1.4.1.4.1.16.1.7.401.4	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya	Luas gedung kantor yang dipelihara	KECAMATAN KAJORAN	Kecamatan Kajoran	5410 m2	69.990.000	5410 m2	104.000.000
		Jumlah rekening/bulan yang dibayar dalam 1 tahun			36 rekening bulan		36 rekening bulan	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja
4.1.4.1.4.1.16.1.7.401.5	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya	Jumlah peralatan yang dipelihara	KECAMATAN KAJORAN	Kecamatan Kajoran	15 unit	59.319.000	15 unit	71.000.000
		Jumlah perlengkapan yang dipelihara			96 unit		96 unit	
		Jumlah kendaraan roda empat yang dipelihara			1 unit		1 unit	
		Jumlah kendaraan roda dua yang dipelihara			7 unit		7 unit	
4.1.4.1.4.1.16.1.7.401.6	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya	Jumlah paket rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	KECAMATAN KAJORAN	Kecamatan Kajoran	1 paket	0	1 paket	60.000.000
4.1.4.1.4.1.16.1.7.401.7	Peningkatan Kapasitas dan Disiplin Aparatur Sipil Negara	Frekuensi pembinaan ASN	KECAMATAN KAJORAN	Kecamatan Kajoran	12 kali	0	12 kali	7.500.000
		Jumlah ASN yang terfasilitasi penilaian kinerjanya			15 orang		15 orang	
		Jumlah JFT yang terfasilitasi penilaian angka kreditnya			0 orang		0 orang	
4.1.4.1.4.1.16.1.8.401	Program Perencanaan, Keuangan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian perencanaan, evaluasi kinerja OPD, dan keuangan perangkat daerah			100 %	17.790.000	100 %	38.000.000
4.1.4.1.4.1.16.1.8.401.1	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah kegiatan yang dikelola	KECAMATAN KAJORAN	Kecamatan Kajoran	12 kegiatan	16.376.000	12 kegiatan	23.000.000
		Jumlah laporan keuangan yang tersusun			19 laporan		19 laporan	
4.1.4.1.4.1.16.1.8.401.2	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Renstra Perangkat Daerah yang tersusun	KECAMATAN KAJORAN	Kecamatan Kajoran	0 dokumen	869.000	0 dokumen	5.000.000
		Jumlah dokumen Renja Perangkat Daerah yang tersusun			2 dokumen		2 dokumen	
		Jumlah dokumen Rencana Kerja Operasional yang tersusun			1 dokumen		1 dokumen	
		Jumlah dokumen RPTK yang tersusun			1 dokumen		1 dokumen	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
			Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
4.1.4.1.4.1.16.1.8.401.3	Penyusunan Laporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen laporan Tahunan yang tersusun	KECAMATAN KAJORAN	Kecamatan Kajoran	4 dokumen	545.000		4 dokumen	5.000.000
		Jumlah dokumen monitoring, evaluasi dan laporan tribulanan yang tersusun			8 dokumen			8 dokumen	
		Jumlah dokumen pelaporan bulanan yang tersusun			12 dokumen			12 dokumen	
		Jumlah dokumen evaluasi jangka menengah yang tersusun			0 dokumen			0 dokumen	
4.1.4.1.4.1.16.1.8.401.4	Penyusunan Dokumen Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Standar Operasional Prosedur yang tersusun	KECAMATAN KAJORAN	Kecamatan Kajoran	1 dokumen	0		1 dokumen	5.000.000
		Jumlah dokumen Standar Pelayanan yang tersusun			1 dokumen			1 dokumen	
		Jumlah dokumen Daftar Informasi Publik			1 dokumen			1 dokumen	
		Jumlah dokumen pengendalian intern (SPIP) yang tersusun			0 dokumen			0 dokumen	
		Jumlah dokumen data perangkat daerah yang tersusun			1 dokumen			1 dokumen	
4.1.4.1.4.1.16.1.42.401	Program Pelayanan Publik Kecamatan	Persentase Pelayanan Publik Sesuai SOP dan SP			100 %	36.200.000		100 %	11.000.000
4.1.4.1.4.1.16.1.42.401.1	Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Kecamatan (PATEN)	Jumlah dokumen terlayani	KECAMATAN KAJORAN	Kecamatan Kajoran	20 Dokumen	36.200.000		20 Dokumen	11.000.000
4.1.4.1.4.1.16.1.43.401	Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	Persentase kegiatan yang dikoordinasikan			100 %	63.209.000		100 %	210.000.000
		Persentase desa yang tertib administrasi			48.28 %		48.28 %		

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
4.1.4.1.4.1.16.1.43.401.1	Peningkatan Tata Kelola Kecamatan Pemerintahan Desa/Kelurahan	Jumlah desa yang terfasilitasi pengelolaan keuangan desa	KECAMATAN KAJORAN	Kecamatan kajoran	29 desa	12.623.000		29 desa	70.000.000
		jumlah kepala desa terpilih			0 orang			0 orang	
		Jumlah perangkat desa yang terisi			5 orang			5 orang	
		Jumlah perangkat desa terbina			29 orang			29 orang	
		Jumlah desa yang lunas PBB			29 desa			29 desa	
		jumlah anggota BPD yang terbina			29 orang			29 orang	
		Jumlah desa yang terbina administrasinya			29 desa			29 desa	
4.1.4.1.4.1.16.1.43.401.2	Peningkatan Keberdayaan dan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa	jumlah dokumen perencanaan desa yang tersusun	KECAMATAN KAJORAN	Kecamatan Kajoran	29 dokumen	13.148.000		29 dokumen	40.000.000
		jumlah lembaga kemasyarakatan desa yang terbina			29 lembaga			29 lembaga	
		Jumlah desa yang difasilitasi bantuan keuangan kepada desa			29 desa			29 desa	
		Jumlah desa yang terfasilitasi evaluasi perkembangan desa			29 desa			29 desa	
		jumlah dokumen profil desa yang tersusun			29 dokumen			29 dokumen	
		Jumlah peserta musrenbang kecamatan			190 orang			190 orang	
4.1.4.1.4.1.16.1.43.401.3	Peningkatan Kualitas Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah desa/kel terkoordinasi penanggulangan kemiskinan	KECAMATAN KAJORAN	Kecamatan Kajoran	29 desa/kel	26.235.000		29 desa/kel	60.000.000
		Jumlah TP. PKK Desa yang dibina			29 TP PKK desa			29 TP PKK desa	
		jumlah peserta yang dilatih dan dikirimkan dalam lomba kebudayaan			45 orang			45 orang	
		jumlah desa/kel layak anak			1 desa/kel			1 desa/kel	
		Jumlah kegiatan penyelenggaraan festival seni dan budaya			1 kali			1 kali	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja
4.1.4.1.4.1.16.1.43.401.4	Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Wawasan Kebangsaan	Jumlah satuan linmas desa yang dibina	KECAMATAN KAJORAN	Kecamatan Kajoran	29 orang	11.203.000	29 orang	40.000.000
		Jumlah peraturan perundang-undangan yang disosialisasikan			1 peraturan		1 peraturan	
		Jumlah desa yang difasilitasi penanggulangan bencana			29 desa		29 desa	
		Jumlah/frekuensi koordinasi forum komunikasi pimpinan kecamatan			12 kali		12 kali	
		Jumlah anggota paskibra yang terbina			80 orang		80 orang	
Total					259.143.000		600.000.000	

PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH

KABUPATEN MAGELANG

TAHUN 2021

Nama Perangkat Daerah : KECAMATAN KALIANGKRIK

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang				255.603.750			493.824.000
4.1	Administrasi Pemerintahan				255.603.750			493.824.000
4.1.4.1.4.1.17.1.7.401	Program Manajemen Administrasi Pelayanan Umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah		100 %	138.027.750		100 %	250.000.000
4.1.4.1.4.1.17.1.7.401.1	Pengelolaan Surat Menyurat, Kearsipan dan Bahan Pustaka	Jumlah surat yang dikelola	KECAMATAN KALIANGKRIK	Kec Kaliangkrik	5.600 surat		5.600 surat	7.500.000
		Jumlah arsip yang dikelola			10 arsip		10 arsip	
		Jumlah bahan pustaka yang dikelola			0 buku		0 buku	
4.1.4.1.4.1.17.1.7.401.2	Penyelenggaraan Koordinasi dan Konsultasi Perangkat Daerah	Jumlah rapat koordinasi yang diselenggarakan	KECAMATAN KALIANGKRIK	Kecamatan Kaliangkrik	150 kali	16.140.000	150 kali	40.000.000
		Jumlah Layanan Humas dan protokol yang dilaksanakan			25 layanan		25 layanan	
		Jumlah perjalanan dinas dalam daerah yang terlaksana			25 kali		25 kali	
4.1.4.1.4.1.17.1.7.401.3	Pengadaan dan Pengelolaan Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya	Jumlah Paket pengadaan perlengkapan gedung kantor	KECAMATAN KALIANGKRIK	kecamatan Kaliangkrik	1 Paket	0	1 Paket	40.000.000
		Jumlah Paket pengadaan peralatan gedung kantor			1 Paket		1 Paket	
		Jumlah aset yang di kelola			300 unit		300 unit	
4.1.4.1.4.1.17.1.7.401.4	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya	Luas gedung yang dipelihara	KECAMATAN KALIANGKRIK	Kecamatan Kaliangkrik	4.500 M2.	68.174.000	4.500 M2.	75.000.000
		jumlah rekening/bulan yang dibayar dalam 1 tahun			48 rekening bulan		48 rekening bulan	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
			Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
4.1.4.1.4.1.17.1.7.401.5	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya	Jumlah Peralatan yang dipelihara	KECAMATAN KALIANGKRIK	Kecamatan Kaliangkrik	110 unit	45.453.750		110 unit	80.000.000
		Jumlah Perlengkapan yang dipelihara			1 unit			1 unit	
		Jumlah kendaraan Roda empat yang dipelihara			1 unit			1 unit	
		Jumlah kendaraan dinas roda dua yang dipelihara			8 unit			8 unit	
4.1.4.1.4.1.17.1.7.401.7	Peningkatan Kapasitas dan Disiplin Aparatur Sipil Negara	Frekuensi pembinaan ASN	KECAMATAN KALIANGKRIK	Kecamatan Kaliangkrik	12 kali	0		12 kali	7.500.000
		Jumlah ASN yang terfasilitasi penilaian kerjanya			0 orang			0 orang	
		Jumlah JFT yang terfasilitasi penilaian angka kreditnya			0 orang			0 orang	
4.1.4.1.4.1.17.1.8.401	Program Perencanaan, Keuangan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian perencanaan, evaluasi kinerja OPD, dan keuangan perangkat daerah			100 %	18.941.000		100 %	40.080.000
4.1.4.1.4.1.17.1.8.401.1	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah kegiatan yang dikelola	KECAMATAN KALIANGKRIK	Kecamatan Kaliangkrik	20 kegiatan	16.200.000		20 kegiatan	25.080.000
		Jumlah laporan keuangan yang tersusun			6 laporan			6 laporan	
4.1.4.1.4.1.17.1.8.401.2	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Renstra Perangkat Daerah yang tersusun	KECAMATAN KALIANGKRIK	Kecamatan Kaliangkrik	0 dokumen	1.425.000		0 dokumen	5.000.000
		Jumlah dokumen Renja Perangkat Daerah yang tersusun			2 dokumen			2 dokumen	
		jumlah dokumen Rencana Kerja Operasional yang tersusun			1 dokumen			1 dokumen	
		Jumlah dokumen RPTK yang tersusun			1 dokumen			1 dokumen	
4.1.4.1.4.1.17.1.8.401.3	Penyusunan Laporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen pelaporan tahunan yang tersusun	KECAMATAN KALIANGKRIK	Kecamatan Kaliangkrik	4 dokumen	1.316.000		4 dokumen	5.000.000
		Jumlah dokumen monitoring, evaluasi dan pelaporan tribulanan yang tersusun			8 dokumen			8 dokumen	
		Jumlah dokumen pelaporan bulanan yang tersusun			12 dokumen			12 dokumen	
		Jumlah dokumen evaluasi jangka menengah yang tersusun			0 dokumen			0 dokumen	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja
4.1.4.1.4.1.17.1.8.401.4	Penyusunan Dokumen Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Perangkat Daerah	Jumlah dokumen SOP yang tersusun	KECAMATAN KALIANGKRIK	Kecamatan Kaliangkrik	2 dokumen	0	2 dokumen	5.000.000
		Jumlah dokumen SP yang tersusun			1 dokumen		1 dokumen	
		Jumlah Daftar Informasi Publik			1 dokumen		1 dokumen	
		Jumlah dokumen pengendalian Intern yang tersusun			1 dokumen		1 dokumen	
		Jumlah Dokumen data perangkat daerah yang tersusun			1 dokumen		1 dokumen	
4.1.4.1.4.1.17.1.42.401	Program Pelayanan Publik Kecamatan	Persentase pelayanan publik sesuai SOP dan SP			100 PERSEN	39.200.000	100 PERSEN	15.000.000
4.1.4.1.4.1.17.1.42.401.1	Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Kecamatan (PATEN)	jumlah dokumen yang terlayani	KECAMATAN KALIANGKRIK	Kecamatan Kaliangkrik	20 dokumen	39.200.000	20 dokumen	15.000.000
4.1.4.1.4.1.17.1.43.401	Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	Persentase kegiatan yang dikoordinasikan			100 %	59.435.000	100 %	188.744.000
		Persentase desa yang tertib administrasi.			82 %		82 %	
4.1.4.1.4.1.17.1.43.401.1	Peningkatan Tata Kelola Kecamatan Pemerintahan Desa/Kelurahan	Jumlah desa yang terfasilitasi pengelolaan keuangan desa	KECAMATAN KALIANGKRIK	Kecamatan Kaliangkrik	20 desa	9.555.000	20 desa	50.000.000
		Jumlah Kepala Desa Terpilih			0 orang		0 orang	
		Jumlah perangkat desa terisi			20 orang		20 orang	
		Jumlah desa lunas PBB			20 desa		20 desa	
		Jumlah Perangkat Desa yang terbina			20 orang		20 orang	
		Jumlah Anggota BPD yang terbina			20 orang		20 orang	
		Jumlah desa yang terbina administrasinya			20 desa		20 desa	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
			Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
4.1.4.1.4.1.17.1.43.401.2	Peningkatan Keberdayaan dan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa	Jumlah desa yang terfasilitasi bantuan keuangan kepada desa	KECAMATAN KALIANGKRIK	Kecamatan Kaliangkrik	20 desa	15.570.000		20 desa	38.744.000
		Jumlah dokumen profil desa yang tersusun			20 dokumen			20 dokumen	
		Jumlah lembaga kemasyarakatan desa yang dibina			20 lembaga			20 lembaga	
		Jumlah desa yang terfasilitasi evaluasi perkembangan desa			20 desa			20 desa	
		Jumlah dokumen perencanaan desa yang tersusun			20 dokumen			20 dokumen	
		Jumlah peserta musrenbangkec			135 orang			135 orang	
4.1.4.1.4.1.17.1.43.401.3	Peningkatan Kualitas Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah desa/kel terkoordinasi penanggulangan kemiskinan	KECAMATAN KALIANGKRIK	Kecamatan Kaliangkrik	20 desa	21.950.000		20 desa	60.000.000
		Jumlah TP PKK Desa/Kel yang dibina			20 TP PKK Desa/Kel			20 TP PKK Desa/Kel	
		Jumlah peserta yang dilatih dan dikirimkan dalam lomba kebudayaan			20 orang			20 orang	
		Jumlah Desa/Kel Layak Anak			20 desa			20 desa	
		Jumlah kegiatan Penyelenggaraan Festival Budaya			3 kali			3 kali	
4.1.4.1.4.1.17.1.43.401.4	Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Wawasan Kebangsaan	Frekuensi koordinasi forum komunikasi pimpinan kecamatan	KECAMATAN KALIANGKRIK	Kecamatan Kaliangkrik	12 kali	12.360.000		12 kali	40.000.000
		Jumlah desa yang difasilitasi penanggulangan bencana			20 desa			20 desa	
		Jumlah satlinmas desa yang terbina			20 orang			20 orang	
		Jumlah peraturan perundang undangan yang disosialisasikan			4 peraturan			4 peraturan	
		Jumlah paskibra yang terbina			80 orang			80 orang	
Total						255.603.750		493.824.000	

PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH

KABUPATEN MAGELANG

TAHUN 2021

Nama Perangkat Daerah : KECAMATAN BANDONGAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang				266.376.550			535.000.000
4.1	Administrasi Pemerintahan				266.376.550			535.000.000
4.1.4.1.4.1.18.1.7.401	Program Manajemen Administrasi Pelayanan Umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah	Prosentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah			100 %	151.312.500	100 %	255.000.000
4.1.4.1.4.1.18.1.7.401.1	Pengelolaan Surat Menyurat, Kearsipan dan Bahan Pustaka	Jumlah Surat yang dikelola	KECAMATAN BANDONGAN	Kecamatan Bandongan	2500 surat		2500 surat	7.500.000
		Jumlah arsip yang dikelola			350 arsip		350 arsip	
		Jumlah bahan pustaka yang dikelola			630 buku		630 buku	
4.1.4.1.4.1.18.1.7.401.2	Penyelenggaraan Koordinasi dan Konsultasi Perangkat Daerah	jumlah rapat koordinasi yang diselenggarakan	KECAMATAN BANDONGAN	Kecamatan Bandongan	12 kali	24.800.000	12 kali	40.000.000
		jumlah perjalanan dinas dalam daerah yang terlaksana			78 kali		78 kali	
		jumlah layanan humas dan protokol yang dilaksanakan			12 layanan		12 layanan	
4.1.4.1.4.1.18.1.7.401.3	Pengadaan dan Pengelolaan Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya	jumlah paket pengadaan perlengkapan gedung kantor	KECAMATAN BANDONGAN	Kecamatan Bandongan	1 paket	0	1 paket	40.000.000
		jumlah paket pengadaan peralatan gedung kantor			1 paket		1 paket	
		Jumlah aset yang dikelola			2 unit		2 unit	
4.1.4.1.4.1.18.1.7.401.4	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya	luas gedung kantor yang dipelihara	KECAMATAN BANDONGAN	Kecamatan Bandongan	6500 m2	84.700.000	6500 m2	90.000.000
		jumlah rekening/bulan yang dibayar dalam 1 tahun			48 rekening bulan		48 rekening bulan	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
4.1.4.1.4.1.18.1.7.401.5	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya	Jumlah Peralatan yang dipelihara	KECAMATAN BANDONGAN	Kecamatan Bandongan	10 unit	37.687.500	10 unit	55.000.000
		Jumlah Perlengkapan yang dipelihara			5 unit		5 unit	
		Jumlah kendaraan dinas roda empat yang dipelihara			1 unit		1 unit	
		Jumlah kendaraan roda dua yang dipelihara			7 unit		7 unit	
4.1.4.1.4.1.18.1.7.401.6	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya	jumlah paket rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	KECAMATAN BANDONGAN	Kecamatan Bandongan	1 paket	0	1 paket	15.000.000
4.1.4.1.4.1.18.1.7.401.7	Peningkatan Kapasitas dan Disiplin Aparatur Sipil Negara	Frekuensi pembinaan ASN	KECAMATAN BANDONGAN	Kecamatan Bandongan	12 kali	0	12 kali	7.500.000
		Jumlah ASN yang terfasilitasi penilaian kerjanya			15 orang		15 orang	
		Jumlah JFT yang terfasilitasi penilaian angka kreditnya			1 orang		1 orang	
4.1.4.1.4.1.18.1.8.401	Program Perencanaan, Keuangan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Prosentase ketercapaian perencanaan, evaluasi kinerja OPD dan keuangan perangkat daerah			100 %	22.900.000	100 %	50.000.000
4.1.4.1.4.1.18.1.8.401.1	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	jumlah kegiatan yang dikelola	KECAMATAN BANDONGAN	Kecamatan Bandongan	16 kegiatan	16.200.000	16 kegiatan	35.000.000
		jumlah laporan keuangan yang tersusun			2 laporan		2 laporan	
4.1.4.1.4.1.18.1.8.401.2	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Renstra perangkat daerah yang tersusun	KECAMATAN BANDONGAN	Kecamatan Bandongan	0 dokumen	3.350.000	0 dokumen	5.000.000
		Jumlah dokumen Renja PD yang tersusun			2 dokumen		2 dokumen	
		Jumlah dokumen Rencana Kerja Operasional yang tersusun			1 dokumen		1 dokumen	
		Jumlah dokumen RPTK yang tersusun			1 dokumen		1 dokumen	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
4.1.4.1.4.1.18.1.8.401.3	Penyusunan Laporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	jumlah dokumen pelaporan tahunan yang tersusun	KECAMATAN BANDONGAN	Kecamatan Bandongan	4 dokumen	3.350.000	4 dokumen	5.000.000
		Jumlah dokumen monitoring, evaluasi, dan pelaporan tribulanan yang tersusun			8 dokumen		8 dokumen	
		jumlah dokumen bulanan tersusun			12 dokumen		12 dokumen	
		Jumlah dokumen evaluasi jangka menengah yang tersusun			0 dokumen		0 dokumen	
4.1.4.1.4.1.18.1.8.401.4	Penyusunan Dokumen Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Perangkat Daerah	jumlah dokumen standar operasional prosedur yang tersusun	KECAMATAN BANDONGAN	Kecamatan Bandongan	62 dokumen	0	62 dokumen	5.000.000
		jumlah dokumen standar pelayanan yang tersusun			12 dokumen		12 dokumen	
		Jumlah dokumen daftar informasi publik			12 dokumen		12 dokumen	
		jumlah dokumen SPIP yang tersusun			1 dokumen		1 dokumen	
		Jumlah dokumen data PD yang tersusun			1 dokumen		1 dokumen	
4.1.4.1.4.1.18.1.42.401	Program Pelayanan Publik Kecamatan	Prosentase pelayanan publik sesuai SOP dan SP			100 %	32.730.000	100 %	35.000.000
4.1.4.1.4.1.18.1.42.401.1	Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Kecamatan (PATEN)	jumlah dokumen yang terlayani	KECAMATAN BANDONGAN	Kecamatan Bandongan	5500 dokumen	32.730.000	5500 dokumen	35.000.000
4.1.4.1.4.1.18.1.43.401	Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	Prosentase kegiatan yang dikoordinasikan			100 %	59.434.050	100 %	195.000.000
		Prosentase desa yang tertib administrasi			100 %		100 %	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
4.1.4.1.4.1.18.1.43.401.1	Peningkatan Tata Kelola Kecamatan Pemerintahan Desa/Kelurahan	jumlah desa terfasilitasi pengelolaan keuangan desa	KECAMATAN BANDONGAN	Kecamatan Bandongan	14 Desa	9.555.000		14 Desa	60.000.000
		jumlah Kepala Desa terpilih			0 orang			0 orang	
		Jumlah perangkat desa terisi			0 orang			0 orang	
		jumlah anggota BPD yang terbina			108 orang			108 orang	
		jumlah desa lunas PBB			14 desa			14 desa	
		jumlah perangkat desa yang dibina			191 orang			191 orang	
		Jumlah desa yang terbina administrasinya			14 desa			14 desa	
4.1.4.1.4.1.18.1.43.401.2	Peningkatan Keberdayaan dan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa	jumlah dokumen perencanaan desa yang tersusun	KECAMATAN BANDONGAN	Kecamatan Bandongan	14 dokumen	15.570.000		14 dokumen	35.000.000
		jumlah desa yang terfasilitasi bantuan keuangan kepada desa			14 desa			14 desa	
		jumlah dokumen profil desa yang tersusun			14 dokumen			14 dokumen	
		jumlah lembaga kemasyarakatan desa yang terbina			14 lembaga			14 lembaga	
		Jumlah desa yang terfasilitasi evaluasi perkembangan desa			14 desa			14 desa	
		Jumlah peserta musrenbang kecamatan			120 orang			120 orang	
4.1.4.1.4.1.18.1.43.401.3	Peningkatan Kualitas Kesejahteraan Masyarakat	jumlah desa/kel terkoordinasi penanggulangan kemiskinan	KECAMATAN BANDONGAN	Kecamatan Bandongan	14 desa	21.949.050		14 desa	60.000.000
		jumlah TP PKK Desa yang dibina			14 TP PKK desa			14 TP PKK desa	
		jumlah peserta yang dilatih dan dikirimkan dalam lomba kebudayaan			0 peserta			0 peserta	
		jumlah desa/kel layak anak			1 desa			1 desa	
		Jumlah kegiatan penyelenggaraan festival seni dan budaya			2 kali			2 kali	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja
4.1.4.1.4.1.18.1.43.401.4	Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Wawasan Kebangsaan	jumlah satlinmas desa terbina	KECAMATAN BANDONGAN	Kecamatan Bandongan	14 desa	12.360.000	14 desa	40.000.000
		jumlah peraturan perundang-undangan yang disosialisasi			5 peraturan		5 peraturan	
		Frekuensi koordinasi Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan			12 kali		12 kali	
		jumlah paskibra yang terbina			37 orang		37 orang	
		Jumlah desa yang difasilitasi penanggulangan bencana			14 desa		14 desa	
Total					266.376.550		535.000.000	

PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH

KABUPATEN MAGELANG

TAHUN 2021

Nama Perangkat Daerah : KECAMATAN CANDIMULYO

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang				259.164.000			527.000.000
4.1	Administrasi Pemerintahan				259.164.000			527.000.000
4.1.4.1.4.1.19.1.7.401	Program Manajemen Administrasi Pelayanan Umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah			100 %	148.058.000	100 %	255.000.000
4.1.4.1.4.1.19.1.7.401.1	Pengelolaan Surat Menyurat, Kearsipan dan Bahan Pustaka	Jumlah surat yang dikelola	KECAMATAN CANDIMULYO	Kecamatan Candimulyo	1200 surat	5.025.000	1200 surat	7.500.000
		Jumlah arsip yang dikelola			1200 arsip		1200 arsip	
		Jumlah bahan pustaka yang dikelola			285 buku		285 buku	
4.1.4.1.4.1.19.1.7.401.2	Penyelenggaraan Koordinasi dan Konsultasi Perangkat Daerah	Jumlah perjalanan dinas dalam daerah yang terlaksana	KECAMATAN CANDIMULYO	Kecamatan Candimulyo	150 kali	26.800.000	150 kali	40.000.000
		Jumlah rapat koordinasi yang diselenggarakan			20 kali		20 kali	
		Jumlah layanan humas dan protokol yang dilaksanakan			15 layanan		15 layanan	
4.1.4.1.4.1.19.1.7.401.3	Pengadaan dan Pengelolaan Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya	Jumlah Paket pengadaan perlengkapan gedung kantor	KECAMATAN CANDIMULYO	Kecamatan Candimulyo	2 Paket	0	2 Paket	40.000.000
		Jumlah Paket pengadaan peralatan gedung kantor			2 Paket		2 Paket	
		Jumlah aset yang dikelola			480 unit		480 unit	
4.1.4.1.4.1.19.1.7.401.4	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya	Luas gedung kantor yang dipelihara	KECAMATAN CANDIMULYO	Kecamatan Candimulyo	2117 m2	70.000.000	2117 m2	70.000.000
		Jumlah rekening yang dibayar selama satu tahun			48 rekening bulan		48 rekening bulan	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
4.1.4.1.4.1.19.1.7.401.5	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya	Jumlah peralatan yang dipelihara	KECAMATAN CANDIMULYO	Kecamatan Candimulyo	20 unit	46.233.000		20 unit	80.000.000
		Jumlah kendaraan dinas roda empat yang dipelihara			1 unit			1 unit	
		Jumlah kendaraan dinas roda dua yang dipelihara			7 unit			7 unit	
		Jumlah perlengkapan yang dipelihara			30 unit			30 unit	
4.1.4.1.4.1.19.1.7.401.6	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya	Jumlah paket rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	KECAMATAN CANDIMULYO	Kecamatan Candimulyo	1 paket	0		1 paket	10.000.000
4.1.4.1.4.1.19.1.7.401.7	Peningkatan Kapasitas dan Disiplin Aparatur Sipil Negara	Frekuensi pembinaan ASN	KECAMATAN CANDIMULYO	Kecamatan Candimulyo	12 kali	0		12 kali	7.500.000
		Jumlah ASN yang terfasilitasi penilaian kinerjanya			22 orang			22 orang	
		Jumlah JFT yang terfasilitasi penilaian angka kreditnya			0 orang			0 orang	
4.1.4.1.4.1.19.1.8.401	Program Perencanaan, Keuangan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian perencanaan, evaluasi kinerja OPD, dan keuangan perangkat daerah			100 %	18.941.000		100 %	37.500.000
4.1.4.1.4.1.19.1.8.401.1	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah kegiatan yang dikelola	KECAMATAN CANDIMULYO	Kecamatan Candimulyo	16 kegiatan	16.200.000		16 kegiatan	22.500.000
		Jumlah laporan keuangan yang tersusun			6 laporan			6 laporan	
4.1.4.1.4.1.19.1.8.401.2	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Renstra Perangkat Daerah yang tersusun	KECAMATAN CANDIMULYO	Kecamatan Candimulyo	0 dokumen	1.425.000		0 dokumen	5.000.000
		Jumlah dokumen Renja Perangkat Daerah yang tersusun			2 dokumen			2 dokumen	
		jumlah dokumen Rencana Kerja Operasional yang tersusun			1 dokumen			1 dokumen	
		Jumlah dokumen RPTK yang tersusun			1 dokumen			1 dokumen	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
4.1.4.1.4.1.19.1.8.401.3	Penyusunan Laporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen laporan tahunan yang tersusun	KECAMATAN CANDIMULYO	Kecamatan Candimulyo	4 dokumen	1.316.000		4 dokumen	5.000.000
		Jumlah dokumen monitoring, evaluasi, dan pelaporan tribulanan yang tersusun			8 dokumen			8 dokumen	
		Jumlah dokumen pelaporan bulanan yang tersusun			12 dokumen			12 dokumen	
		Jumlah dokumen evaluasi jangka menengah yang tersusun			0 dokumen			0 dokumen	
4.1.4.1.4.1.19.1.8.401.4	Penyusunan Dokumen Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Perangkat Daerah	Jumlah dokumen SOP yang tersusun	KECAMATAN CANDIMULYO	Kecamatan Candimulyo	1 dokumen	0		1 dokumen	5.000.000
		Jumlah dokumen Daftar Informasi Publik			0 dokumen			0 dokumen	
		Jumlah dokumen SP yang tersusun			9 dokumen			9 dokumen	
		Jumlah dokumen Pengendalian Interen (SPIP) yang tersusun			1 dokumen			1 dokumen	
		Jumlah dokumen data perangkat daerah yang tersusun			0 dokumen			0 dokumen	
4.1.4.1.4.1.19.1.42.401	Program Pelayanan Publik Kecamatan	Persentase pelayanan publik sesuai SOP dan SP			100 %	32.730.000		100 %	35.000.000
4.1.4.1.4.1.19.1.42.401.1	Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Kecamatan (PATEN)	Jumlah dokumen terlayani	KECAMATAN CANDIMULYO	Kecamatan Candimulyo	6000 dokumen	32.730.000		6000 dokumen	35.000.000
4.1.4.1.4.1.19.1.43.401	Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	Persentase kegiatan yang dikoordinasikan			100 %	59.435.000		100 %	199.500.000
		Persentase desa yang tertib administrasi			84.21 %		84.21 %		

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
4.1.4.1.4.1.19.1.43.401.1	Peningkatan Tata Kelola Kecamatan Pemerintahan Desa/Kelurahan	Jumlah desa lunas PBB	KECAMATAN CANDIMULYO	Kecamatan Candimulyo	19 desa	9.555.000		19 desa	60.000.000
		Jumlah desa yang terfasilitasi pengelolaan keuangan desa			19 desa			19 desa	
		Jumlah perangkat desa yang terbina			231 orang			231 orang	
		Jumlah perangkat desa yang terisi			0 orang			0 orang	
		Jumlah Kepala Desa yang terpilih			0 orang			0 orang	
		Jumlah anggota BPD yang terbina			133 orang			133 orang	
		Jumlah desa yang terbina administrasinya			19 desa			19 desa	
4.1.4.1.4.1.19.1.43.401.2	Peningkatan Keberdayaan dan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa	Jumlah desa yang terfasilitasi bantuan keuangan kepada desa	KECAMATAN CANDIMULYO	Kecamatan Candimulyo	19 desa	15.570.000		19 desa	44.500.000
		Jumlah dokumen perencanaan desa yang tersusun			19 dokumen			19 dokumen	
		Jumlah dokumen profil desa yang tersusun			19 dokumen			19 dokumen	
		Jumlah lembaga kemasyarakatan desa yang dibina			19 lembaga			19 lembaga	
		Jumlah desa yang terfasilitasi evaluasi perkembangan desa			19 desa			19 desa	
		Jumlah peserta musrenbangkec			130 orang			130 orang	
4.1.4.1.4.1.19.1.43.401.3	Peningkatan Kualitas Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah desa terkoordinasi penanggulangan kemiskinan	KECAMATAN CANDIMULYO	Kecamatan Candimulyo	19 desa	21.950.000		19 desa	60.000.000
		Jumlah TP. PKK Desa/Kelurahan yang dibina			19 TP. PKK Desa			19 TP. PKK Desa	
		Jumlah peserta yang dilatih dan dikirimkan dalam lomba kebudayaan			45 orang			45 orang	
		Jumlah desa/kelurahan layak anak			1 desa			1 desa	
		Jumlah kegiatan penyelenggaraan Festival Budaya			3 kegiatan			3 kegiatan	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
4.1.4.1.4.1.19.1.43.401.4	Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Wawasan Kebangsaan	Jumlah frekuensi koordinasi forum komunikasi pimpinan kecamatan	KECAMATAN CANDIMULYO	Kecamatan Candimulyo	12 kali	12.360.000		12 kali	35.000.000
		Jumlah satlinmas desa yang terbina			95 orang			95 orang	
		Jumlah desa yang difasilitasi penanggulangan bencana			1 desa			1 desa	
		Jumlah anggota paskibra yang terbina			75 orang			75 orang	
		Jumlah peraturan perundang undangan yang disosialisasikan			2 peraturan			2 peraturan	
Total						259.164.000		527.000.000	

PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH

KABUPATEN MAGELANG

TAHUN 2021

Nama Perangkat Daerah : KECAMATAN PAKIS

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang				255.473.575			564.000.000
4.1	Administrasi Pemerintahan				255.473.575			564.000.000
4.1.4.1.4.1.20.1.7.401	Program Manajemen Administrasi Pelayanan Umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah	Presentase ketercapaian Pelayanan Umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah			100 %	139.533.750	100 %	245.000.000
4.1.4.1.4.1.20.1.7.401.1	Pengelolaan Surat Menyurat, Kearsipan dan Bahan Pustaka	Jumlah surat yang dikelola	KECAMATAN PAKIS	Kecamatan Pakis	2400 surat	8.260.000	2400 surat	7.500.000
		Jumlah arsip yang dikelola			450 surat		450 surat	
		Jumlah bahan pustaka yang dikelola			425 buku		425 buku	
4.1.4.1.4.1.20.1.7.401.2	Penyelenggaraan Koordinasi dan Konsultasi Perangkat Daerah	Jumlah Perjalanan Dinas Dalam Daerah yang terlaksana	KECAMATAN PAKIS	Kecamatan Pakis	180 kali	16.140.000	180 kali	40.000.000
		Jumlah Rapat Koordinasi yang diselenggarakan			30 kali		30 kali	
		Jumlah Layanan Humas dan protokol yang dilaksanakan			12 layanan		12 layanan	
4.1.4.1.4.1.20.1.7.401.3	Pengadaan dan Pengelolaan Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya	Jumlah Paket pengadaan perlengkapan gedung kantor	KECAMATAN PAKIS	Kecamatan Pakis	1 Paket	0	1 Paket	40.000.000
		Jumlah Paket pengadaan peralatan gedung kantor			1 Paket		1 Paket	
		Jumlah aset yang dikelola			2 unit		2 unit	
4.1.4.1.4.1.20.1.7.401.4	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya	jumlah rekening/bulan yang dibayar dalam 1 tahun	KECAMATAN PAKIS	Kecamatan Pakis	48 rekening bulan	69.680.000	48 rekening bulan	58.000.000
		Luas gedung kantor yang dipelihara			1000 M2		1000 M2	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
			Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
4.1.4.1.4.1.20.1.7.401.5	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	KECAMATAN PAKIS	Kecamatan Pakis	15 unit	45.453.750		15 unit	72.000.000
		Jumlah perlengkapan yang dipelihara			20 unit			20 unit	
		Jumlah kendaraan Roda empat yang dipelihara			1 unit			1 unit	
		Jumlah kendaraan dinas roda dua yang dipelihara			6 unit			6 unit	
4.1.4.1.4.1.20.1.7.401.6	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya	Jumlah Paket Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	KECAMATAN PAKIS	Kec.Pakis	1 Paket	0		1 Paket	20.000.000
4.1.4.1.4.1.20.1.7.401.7	Peningkatan Kapasitas dan Disiplin Aparatur Sipil Negara	Frekuensi pembinaan ASN	KECAMATAN PAKIS	Kecamatan Pakis.	12 kali	0		12 kali	7.500.000
		Jumlah ASN yang terfasilitasi penilaian kerjanya			0 orang			0 orang	
		Jumlah JFT yang terfasilitasi penilaian angka kreditnya			0 orang			0 orang	
4.1.4.1.4.1.20.1.8.401	Program Perencanaan, Keuangan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Presentase Ketercapaian perencanaan, evaluasi kinerja OPD dan keuangan perangkat daerah.			100 %	23.774.825		100 %	34.000.000
4.1.4.1.4.1.20.1.8.401.1	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah kegiatan yang dikelola	KECAMATAN PAKIS	Kecamatan Pakis.	16 kegiatan	21.033.825		16 kegiatan	19.000.000
		Jumlah Laporan Keuangan yang tersusun			5 dokumen			5 dokumen	
4.1.4.1.4.1.20.1.8.401.2	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renstra Perangkat Daerah yang tersusun	KECAMATAN PAKIS	Kec.Pakis	0 dokumen	1.425.000		0 dokumen	5.000.000
		Jumlah Dokumen Renja Perangkat Daerah yang tersusun			2 dokumen			2 dokumen	
		jumlah dokumen Rencana Kerja Operasional yang tersusun			1 dokumen			1 dokumen	
		Jumlah dokumen RPTK yang tersusun			1 dokumen			1 dokumen	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
4.1.4.1.4.1.20.1.8.401.3	Penyusunan Laporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen pelaporan tahunan yang tersusun	KECAMATAN PAKIS	Kecamatan Pakis.	4 dokumen	1.316.000		4 dokumen	5.000.000
		Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan pelaporan tribulanan yang tersusun			8 dokumen			8 dokumen	
		Jumlah dokumen pelaporan bulanan yang tersusun			12 dokumen			12 dokumen	
		Jumah Dokumen evaluasi jangka menengah yang tersusun			0 dokumen			0 dokumen	
4.1.4.1.4.1.20.1.8.401.4	Penyusunan Dokumen Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Perangkat Daerah	Jumlah Standar Operasional Prosedur yang tersusun	KECAMATAN PAKIS	Kecamatan Pakis	16 dokumen	0		16 dokumen	5.000.000
		Jumlah Standar Pelayanan yang tersusun			16 dokumen			16 dokumen	
		Jumlah Daftar Informasi Publik			1 dokumen			1 dokumen	
		Jumlah dokumen pengendalian Intern (SPIP) yang tersusun			1 dokumen			1 dokumen	
		Jumlah dokumen data perangkat daerah yang tersusun			1 dokumen			1 dokumen	
4.1.4.1.4.1.20.1.42.401	Program Pelayanan Publik Kecamatan	Persentase Pelayanan Publik Sesuai SOP dan SP			100 %	32.730.000		100 %	60.000.000
4.1.4.1.4.1.20.1.42.401.1	Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Kecamatan (PATEN)	Jumlah dokumen yang terlayani	KECAMATAN PAKIS	Kecamatan Pakis.	8 dokumen	32.730.000		8 dokumen	60.000.000
4.1.4.1.4.1.20.1.43.401	Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	Persentase Kegiatan yang dikoordinasikan.			100 %	59.435.000		100 %	225.000.000
		Persentase desa yang tertib administrasi			80 %		80 %		
4.1.4.1.4.1.20.1.43.401.1	Peningkatan Tata Kelola Kecamatan Pemerintahan Desa/Kelurahan	Jumlah Desa yang terfasilitasi pengelolaan keuangan desa	KECAMATAN PAKIS	Kecamatan Pakis.	20 desa	9.555.000		20 desa	70.000.000
		Jumlah Kepala Desa terpilih			0 orang			0 orang	
		Jumlah perangkat desa terisi			20 orang			20 orang	
		Jumlah Anggota BPD yang terbina			20 orang			20 orang	
		Jumlah Desa Lunas PBB			20 desa			20 desa	
		Jumlah Perangkat Desa yang terbina			251 orang			251 orang	
		Jumlah desa yang terbina administrasinya			20 desa			20 desa	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja
4.1.4.1.4.1.20.1.43.401.2	Peningkatan Keberdayaan dan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa	Jumlah dokumen perencanaan desa yang tersusun	KECAMATAN PAKIS	Kecamatan Pakis.	20 dokumen	15.570.000		20 dokumen
		Jumlah desa yang terfasilitasi bantuan keuangan kepada desa			20 desa			20 desa
		Jumlah dokumen profil desa yang tersusun			20 dokumen			20 dokumen
		Jumlah desa yang terfasilitasi evaluasi perkembangan desa			20 desa			20 desa
		Jumlah lembaga kemasyarakatan desa yang dibina			20 lembaga			20 lembaga
		Jumlah peserta musrenbangkec			135 orang			135 orang
4.1.4.1.4.1.20.1.43.401.3	Peningkatan Kualitas Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah desa/kel terkoordinasi penanggulangan kemiskinan	KECAMATAN PAKIS	Kecamatan Pakis.	20 desa	21.950.000		20 desa
		Jumlah TP PKK desa/kelurahan yang dibina			20 TP PKK Desa/Kel			20 TP PKK Desa/Kel
		Jumlah peserta yang dilatih dan dikirimkan dalam lomba kebudayaan			50 orang			50 orang
		Jumlah Desa Layak anak			4 desa			4 desa
		Jumlah kegiatan Penyelenggaraan Festival Budaya			1 kegiatan			1 kegiatan
4.1.4.1.4.1.20.1.43.401.4	Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Wawasan Kebangsaan	Jumlah satlinmas desa yang terbina	KECAMATAN PAKIS	Kecamatan Pakis.	20 orang	12.360.000		20 orang
		Jumlah peraturan perundangan-undangan yang disosialisasikan			2 peraturan			2 peraturan
		Jumlah frekuensi koordinasi forum komunikasi pimpinan kecamatan			12 kali			12 kali
		Jumlah desa yang difasilitasi penanggulangan bencana			20 desa			20 desa
		Jumlah anggota paskibra yang terbina			75 orang			75 orang
Total					255.473.575		564.000.000	

PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH

KABUPATEN MAGELANG

TAHUN 2021

Nama Perangkat Daerah : KECAMATAN NGABLAK

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang				228.204.000			557.000.000
4.1	Administrasi Pemerintahan				228.204.000			557.000.000
4.1.4.1.4.1.21.1.7.401	Program Manajemen Administrasi Pelayanan Umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah	Presentase ketercapaian Pelayanan Umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah			100 %	118.758.000	100 %	257.000.000
4.1.4.1.4.1.21.1.7.401.1	Pengelolaan Surat Menyurat, Kearsipan dan Bahan Pustaka	Jumlah Surat yang dikelola	KECAMATAN NGABLAK	kabupatem magelang	2500 surat	5.025.000	2500 surat	7.500.000
		Jumlah arsip yang dikelola			1500 arsip		1500 arsip	
		Jumlah Bahan Pustaka yang dikelola			2 buku		2 buku	
4.1.4.1.4.1.21.1.7.401.2	Penyelenggaraan Koordinasi dan Konsultasi Perangkat Daerah	Jumlah Perjalanan dinas dalam daerah yang terlaksana	KECAMATAN NGABLAK	kabupaten magelang	80 kali	7.500.000	80 kali	40.000.000
		Jumlah Layanan humas dan protokol yang dilaksanakan			2 layanan		2 layanan	
		Jumlah Rapat Koordinasi yang diselenggarakan			12 kali		12 kali	
4.1.4.1.4.1.21.1.7.401.3	Pengadaan dan Pengelolaan Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya	Jumlah paket pengadaan perlengkapan gedung kantor	KECAMATAN NGABLAK	Kabupaten Magelang	1 paket	0	1 paket	40.000.000
		Jumlah paket pengadaan peralatan gedung kantor			1 paket		1 paket	
		Jumlah aset yang dikelola			2 unit		2 unit	
4.1.4.1.4.1.21.1.7.401.4	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya	Luas gedung kantor yang dipelihara	KECAMATAN NGABLAK	Kabupaten Magelang	1700 M2	60.000.000	1700 M2	60.000.000
		jumlah rekening/bulan yang dibayar dalam 1 tahun			48 rekening bulan		48 rekening bulan	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
4.1.4.1.4.1.21.1.7.401.5	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	KECAMATAN NGABLAK	Kabupaten Magelang	10 unit	46.233.000		10 unit	77.000.000
		Jumlah perlengkapan yang dipelihara			3 unit			3 unit	
		Jumlah kendaraan dinas roda empat yang dipelihara			1 unit			1 unit	
		Jumlah kendaraan dinas roda 2 yang dipelihara			7 unit			7 unit	
4.1.4.1.4.1.21.1.7.401.6	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya	Jumlah paket rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	KECAMATAN NGABLAK	Kabupaten Magelang	1 paket	0		1 paket	25.000.000
4.1.4.1.4.1.21.1.7.401.7	Peningkatan Kapasitas dan Disiplin Aparatur Sipil Negara	Jumlah JFT yang terfasilitasi penilaian angka kreditnya	KECAMATAN NGABLAK	kecamatan Ngablak	1 Orang	0		1 Orang	7.500.000
		Jumlah ASN yang terfasilitasi penilaian kerjanya			12 orang			12 orang	
		Frekuensi pembinaan ASN			12 kali			12 kali	
4.1.4.1.4.1.21.1.8.401	Program Perencanaan, Keuangan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian perencanaan, evaluasi kinerja OPD, dan keuangan perangkat daerah			100 %	17.732.000		100 %	40.000.000
4.1.4.1.4.1.21.1.8.401.1	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah kegiatan yang dikelola	TEJOSARI, NGABLAK	Kecamatan Ngablak	12 kegiatan	16.200.000		12 kegiatan	25.000.000
		Jumlah laporan keuangan yang tersusun			12 dokumen			12 dokumen	
4.1.4.1.4.1.21.1.8.401.2	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Renstra perangkat daerah yang tersusun	SELOPROJO, NGABLAK	Kecamatan Ngablak	0 dokumen	955.000		0 dokumen	5.000.000
		Jumlah dokumen renja perangkat daerah yang tersusun			2 dokumen			2 dokumen	
		Jumlah dokumen Rencana Kerja Operasional yang tersusun			1 dokumen			1 dokumen	
		Jumlah dokumen RPTK yang tersusun			1 dokumen			1 dokumen	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
4.1.4.1.4.1.21.1.8.401.3	Penyusunan Laporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen pelaporan tahunan yang tersusun	KECAMATAN NGABLAK	kecamatan Ngablak	4 Dokumen	577.000	4 Dokumen	5.000.000
		Jumlah dokumen monitoring, evaluasi, dan pelaporan tribulanan yang tersusun			8 dokumen		8 dokumen	
		Jumlah dokumen pelaporan bulanan yang tersusun			12 Dokumen		12 Dokumen	
		Jumlah dokumen evaluasi jangka menengah yang tersusun			0 Dokumen		0 Dokumen	
4.1.4.1.4.1.21.1.8.401.4	Penyusunan Dokumen Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Perangkat Daerah	Jumlah dokumen SOP dan SP yang disusun	KECAMATAN NGABLAK	kecamatan Ngablak	16 Dokumen	0	16 Dokumen	5.000.000
		Jumlah standar pelayanan yang tersusun			16 Dokumen		16 Dokumen	
		Jumlah Daftar Informasi Publik			1 dokumen		1 dokumen	
		Jumlah dokumen pengendalian intern yang tersusun			1 Dokumen		1 Dokumen	
		Jumlah dokumen data perangkat daerah yang tersusun			1 Dokumen		1 Dokumen	
4.1.4.1.4.1.21.1.42.401	Program Pelayanan Publik Kecamatan	Prosentase pelayanan publik sesuai SOP dan SP			100 %	30.200.000	100 %	35.000.000
4.1.4.1.4.1.21.1.42.401.1	Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Kecamatan (PATEN)	jumlah dokumen yang terlayani	KECAMATAN NGABLAK	kecamatan Ngablak	16 dokumen	30.200.000	16 dokumen	35.000.000
4.1.4.1.4.1.21.1.43.401	Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	Prosentase kegiatan yang dikoordinasikan			100 %	61.514.000	100 %	225.000.000
		Persentase desa yang tertib administrasi			85 %		85 %	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
4.1.4.1.4.1.21.1.43.401.1	Peningkatan Tata Kelola Kecamatan Pemerintahan Desa/Kelurahan	Jumlah desa yg terfasilitasi pengelolaan keuangan desa	KECAMATAN NGABLAK	Kabupaten Magelang	16 desa	9.329.000		16 desa
		Jumlah kepala desa yang terpilih			0 orang			0 orang
		Jumlah perangkat desa terisi			16 orang			16 orang
		Jumlah Perangkat desa yang terbina			16 Orang			16 Orang
		Jumlah Desa Lunas PBB			16 Desa			16 Desa
		Jumlah Anggota BPD yang terbina			0 orang			0 orang
		Jumlah desa yang terbina administrasinya			16 desa			16 desa
4.1.4.1.4.1.21.1.43.401.2	Peningkatan Keberdayaan dan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa	Jumlah Dokumen Perencanaan Desa yang tersusun	KECAMATAN NGABLAK	kecamatan Ngablak	16 Dokumen	11.959.000		16 Dokumen
		Jumlah lembaga kemasyarakatan desa yang terbina			16 lembaga			16 lembaga
		Jumlah dokumen profil desa yang tersusun			16 dokumen			16 dokumen
		Jumlah desa yang terfasilitasi evaluasi perkembangan desa			16 desa			16 desa
		Jumlah desa yang terfasilitasi bantuan keuangan kepada desa			16 desa			16 desa
		Jumlah peserta musrenbangkec			115 orang			115 orang
4.1.4.1.4.1.21.1.43.401.3	Peningkatan Kualitas Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah peserta yang dilatih dan dikirimkan dalam lomba kebudayaan	KECAMATAN NGABLAK	kecamatan Ngablak	16 orang	26.132.000		16 orang
		jumlah desa terfasilitasi penanggulangan kemiskinan			16 Desa			16 Desa
		Jumlah TP PKK Desa/Kelurahan yang dibina			16 TP PKK Desa/Kel			16 TP PKK Desa/Kel
		Jumlah Desa layak Anak			3 Desa			3 Desa
		Jumlah kegiatan Penyelenggaraan Festival Budaya			1 Kegiatan			1 Kegiatan

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja
4.1.4.1.4.1.21.1.43.401.4	Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Wawasan Kebangsaan	Jumlah satlinmas desa yang terbina	KECAMATAN NGABLAK	Kecamatan Ngablak	16 satlinmas	14.094.000	16 satlinmas	35.000.000
		Jumlah peraturan perundang undangan yang dosialisasikan			2 Peraturan		2 Peraturan	
		Frekuensi koordinasi forum komunikasi pimpinan kecamatan			12 kali		12 kali	
		Jumlah desa yang difasilitasi penanggulangan bencana			16 desa		16 desa	
		jumlah paskibra yang terbina			55 orang		55 orang	
Total					228.204.000		557.000.000	

PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH

KABUPATEN MAGELANG

TAHUN 2021

Nama Perangkat Daerah : KECAMATAN GRABAG

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang				286.346.000			625.500.000
4.1	Administrasi Pemerintahan				286.346.000			625.500.000
4.1.4.1.4.1.22.1.7.401	Program Manajemen Administrasi Pelayanan Umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah		100 %	173.209.000		100 %	306.500.000
4.1.4.1.4.1.22.1.7.401.1	Pengelolaan Surat Menyurat, Kearsipan dan Bahan Pustaka	Jumlah surat yang dikelola	KECAMATAN GRABAG	Jl. Kyai Siraj Krajan, Desa Grabag, Kecamatan Grabag, Kabupaten Magelang	2000 surat	5.235.000	2000 surat	8.500.000
		Jumlah arsip yang dikelola		2000 arsip	2000 arsip			
		Jumlah bahan pustaka yang dikelola		23 buku	23 buku			
4.1.4.1.4.1.22.1.7.401.2	Penyelenggaraan Koordinasi dan Konsultasi Perangkat Daerah	Jumlah rapat koordinasi yang diselenggarakan	KECAMATAN GRABAG	Jl. Kyai Siraj Krajan, Desa Grabag, Kecamatan Grabag, Kabupaten Magelang	25 kali	7.400.000	25 kali	50.000.000
		Jumlah perjalanan dinas dalam daerah yang terlaksana		50 kali	50 kali			
		Jumlah layanan humas dan protokol yang dilaksanakan		15 layanan	15 layanan			
4.1.4.1.4.1.22.1.7.401.3	Pengadaan dan Pengelolaan Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya	Jumlah paket pengadaan perlengkapan gedung kantor	KECAMATAN GRABAG	Jl. Kyai Siraj Krajan, Desa Grabag, Kecamatan Grabag, Kabupaten Magelang	1 paket	0	1 paket	40.000.000
		Jumlah paket pengadaan peralatan gedung kantor		1 paket	1 paket			
		Jumlah aset yang dikelola		532 unit	532 unit			

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
4.1.4.1.4.1.22.1.7.401.4	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya	jumlah rekening/bulan yang dibayar dalam 1 tahun	KECAMATAN GRABAG	Jl. Kyai Siraj Krajan, Desa Grabag, Kecamatan Grabag, Kabupaten Magelang	48 rekening bulan	101.255.000		48 rekening bulan	72.000.000
		Luas gedung kantor yang dipelihara			4192 m2			4192 m2	
4.1.4.1.4.1.22.1.7.401.5	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya	Jumlah Kendaraan dinas roda empat yang dipelihara	KECAMATAN GRABAG	Jl. Kyai Siraj Krajan, Desa Grabag, Kecamatan Grabag, Kabupaten Magelang	1 unit	59.319.000		1 unit	98.500.000
		Jumlah peralatan yang dipelihara			29 unit			29 unit	
		Jumlah perlengkapan yang dipelihara			50 unit			50 unit	
		Jumlah kendaraan dinas roda dua yang dipelihara			7 unit			7 unit	
4.1.4.1.4.1.22.1.7.401.6	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya	Jumlah paket rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	KECAMATAN GRABAG	Jl. Kyai Siraj Krajan, Desa Grabag, Kecamatan Grabag, Kabupaten Magelang	1 paket	0		1 paket	30.000.000
4.1.4.1.4.1.22.1.7.401.7	Peningkatan Kapasitas dan Disiplin Aparatur Sipil Negara	Frekuensi pembinaan ASN	KECAMATAN GRABAG	Jl. Kyai Siraj Krajan, Desa Grabag, Kecamatan Grabag, Kabupaten Magelang	12 kali	0		12 kali	7.500.000
		Jumlah JFT yang terfasilitasi penilaian Angka Kreditnya			0 orang			0 orang	
		Jumlah ASN yang terfasilitasi penilaian kinerjanya			22 orang			22 orang	
4.1.4.1.4.1.22.1.8.401	Program Perencanaan, Keuangan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian perencanaan, evaluasi kinerja OPD, dan keuangan perangkat daerah			100 %	17.790.000		100 %	34.000.000
4.1.4.1.4.1.22.1.8.401.1	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah kegiatan yang dikelola	KECAMATAN GRABAG	Jl. Kyai Siraj Krajan, Desa Grabag, Kecamatan Grabag, Kabupaten Magelang	16 kegiatan	16.376.000		16 kegiatan	19.000.000
		Jumlah laporan keuangan yang tersusun			6 laporan			6 laporan	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
4.1.4.1.4.1.22.1.8.401.2	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Renstra Perangkat Daerah yang tersusun	KECAMATAN GRABAG	Jl. Kyai Siraj Krajan, Desa Grabag, Kecamatan Grabag, Kabupaten Magelang	0 dokumen	869.000		0 dokumen	5.000.000
		Jumlah dokumen Renja Perangkat Daerah yang tersusun			2 dokumen			2 dokumen	
		Jumlah dokumen RPTK yang tersusun			1 dokumen			1 dokumen	
		Jumlah dokumen Rencana Kerja Operasional yang disusun			1 dokumen			1 dokumen	
4.1.4.1.4.1.22.1.8.401.3	Penyusunan Laporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen laporan tahunan yang tersusun	KECAMATAN GRABAG	Jl. Kyai Siraj Krajan, Desa Grabag, Kecamatan Grabag, Kabupaten Magelang	4 dokumen	545.000		4 dokumen	5.000.000
		Jumlah dokumen monitoring , evaluasi, dan pelaporan tribulanan yang tersusun			8 dokumen			8 dokumen	
		Jumlah dokumen pelaporan bulanan yang tersusun			12 dokumen			12 dokumen	
		Jumlah dokumen evaluasi jangka menengah yang tersusun			0 dokumen			0 dokumen	
4.1.4.1.4.1.22.1.8.401.4	Penyusunan Dokumen Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Standar Pelayanan yang tersusun	KECAMATAN GRABAG	Jl. Kyai Siraj Krajan, Desa Grabag, Kecamatan Grabag, Kabupaten Magelang	0 dokumen	0		0 dokumen	5.000.000
		Jumlah dokumen Daftar Informasi Publik			1 dokumen			1 dokumen	
		Jumlah dokumen pengendalian intern yang tersusun			1 dokumen			1 dokumen	
		Jumlah dokumen data perangkat daerah yang tersusun			1 dokumen			1 dokumen	
		Jumlah dokumen SOP yang disusun			0 dokumen			0 dokumen	
4.1.4.1.4.1.22.1.42.401	Program Pelayanan Publik Kecamatan	Persentase pelayanan publik sesuai SOP dan SPP			100 %	32.138.000		100 %	45.000.000
4.1.4.1.4.1.22.1.42.401.1	Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Kecamatan (PATEN)	Jumlah dokumen yang terlayani	KECAMATAN GRABAG	Jl. Kyai Siraj Krajan, Desa Grabag, Kecamatan Grabag, Kabupaten Magelang	5000 dokumen	32.138.000		5000 dokumen	45.000.000

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
4.1.4.1.4.1.22.1.43.401	Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	Prosentase kegiatan yg dikoordinasikan			100 %	63.209.000		100 %	240.000.000
		Persentase desa yang tertib administrasi			100 %			100 %	
4.1.4.1.4.1.22.1.43.401.1	Peningkatan Tata Kelola Kecamatan Pemerintahan Desa/Kelurahan	Jumlah desa yang terfasilitasi pengelolaan keuangan desa	KECAMATAN GRABAG	Jl. Kyai Siraj Krajan, Desa Grabag, Kecamatan Grabag, Kabupaten Magelang	28 desa	12.623.000		28 desa	70.000.000
		Jumlah kepala desa terpilih			0 orang		0 orang		
		Jumlah perangkat desa terisi			20 orang		20 orang		
		Jumlah anggota BPD yang terbina			192 orang		192 orang		
		Jumlah desa lunas PBB			28 desa		28 desa		
		Jumlah Perangkat Desa yang terbina			302 orang		302 orang		
		Jumlah desa yang terbina administrasinya			28 desa		28 desa		
4.1.4.1.4.1.22.1.43.401.2	Peningkatan Keberdayaan dan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa	jumlah dokumen perencanaan desa yang tersusun	KECAMATAN GRABAG	Jl. Kyai Siraj Krajan, Desa Grabag, Kecamatan Grabag, Kabupaten Magelang	28 dokumen	13.148.000		28 dokumen	60.000.000
		Jumlah desa yang terfasilitasi bantuan keuangan kepada desa			28 desa		28 desa		
		Jumlah dokumen profil desa yang tersusun			28 dokumen		28 dokumen		
		Jumlah desa yang terfasilitasi evaluasi perkembangan desa			28 desa		28 desa		
		Jumlah lembaga kemasyarakatan desa yang dibina			28 lembaga		28 lembaga		
4.1.4.1.4.1.22.1.43.401.3	Peningkatan Kualitas Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah desa terkoordinasi penanggulangan kemiskinan	KECAMATAN GRABAG	Jl. Kyai Siraj Krajan, Desa Grabag, Kecamatan Grabag, Kabupaten Magelang	28 desa	26.235.000		28 desa	60.000.000
		Jumlah TP PKK Desa yang dibina			28 TP PKK Desa/Kel		28 TP PKK Desa/Kel		
		Jumlah peserta yang di latih dan dikirimkan dalam lomba kebudayaan			34 orang		34 orang		
		Jumlah kegiatan penyelenggaraan Festival Budaya			1 kegiatan		1 kegiatan		
		Jumlah desa layak anak			22 desa		22 desa		

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja
4.1.4.1.4.1.22.1.43.401.4	Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Wawasan Kebangsaan	jumlah satlimas desa yang terbina	KECAMATAN GRABAG	Jl. Kyai Siraj Krajan, Desa Grabag, Kecamatan Grabag, Kabupaten Magelang	84 orang	11.203.000	84 orang	50.000.000
		Jumlah Frekuensi koordinasi Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan			12 kali		12 kali	
		jumlah peraturan perundang indangan yang disosialisasikan			4 peraturan		4 peraturan	
		jumlah desa yang difasilitasi penanggulangan bencana			28 desa		28 desa	
		Jumlah anggota paskibraka yang terbina			70 orang		70 orang	
Total					286.346.000		625.500.000	

PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH

KABUPATEN MAGELANG

TAHUN 2021

Nama Perangkat Daerah : KECAMATAN TEGALREJO

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang				290.959.750			635.250.000
4.1	Administrasi Pemerintahan				290.959.750			635.250.000
4.1.4.1.4.1.23.1.7.401	Program Manajemen Administrasi Pelayanan Umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah	Presentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah			100 %	179.853.750	100 %	330.000.000
4.1.4.1.4.1.23.1.7.401.1	Pengelolaan Surat Menyurat, Kearsipan dan Bahan Pustaka	Jumlah Surat yang dikelola	KECAMATAN TEGALREJO	Kecamatan Tegalrejo	6000 surat	8.260.000		6000 surat
		Jumlah arsip yang dikelola			1300 arsip			1300 arsip
		Jumlah bahan pustaka yang dikelola			243 buku			243 buku
4.1.4.1.4.1.23.1.7.401.2	Penyelenggaraan Koordinasi dan Konsultasi Perangkat Daerah	Jumlah rapat koordinasi yang diselenggarakan	KECAMATAN TEGALREJO	Kecamatan Tegalrejo	25 kali	16.140.000		25 kali
		Jumlah perjalanan dinas dalam daerah yang terlaksana			150 kali			150 kali
		Jumlah layanan humas dan protokol yang dilaksanakan			12 layanan			12 layanan
4.1.4.1.4.1.23.1.7.401.3	Pengadaan dan Pengelolaan Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya	Jumlah paket pengadaan perlengkapan gedung kantor	KECAMATAN TEGALREJO	Kecamatan Tegalrejo	1 paket	0		1 paket
		Jumlah paket pengadaan peralatan gedung kantor			1 paket			1 paket
		Jumlah aset yang dikelola			400 unit			400 unit
4.1.4.1.4.1.23.1.7.401.4	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya	Luas gedung kantor yang dipelihara	KECAMATAN TEGALREJO	Kecamatan Tegalrejo	1148 m2	110.000.000		1148 m2
		Jumlah rekening/bulan yang dibayar dalam 1 tahun			60 rekening bulan			60 rekening bulan

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja
4.1.4.1.4.1.23.1.7.401.5	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya	Jumlah peralatan yang dipelihara	KECAMATAN TEGALREJO	Kecamatan Tegalrejo	26 unit	45.453.750	26 unit	90.000.000
		jumlah perlengkapan yang dipelihara			11 unit		11 unit	
		Jumlah kendaraan dinas roda empat yang dipelihara			1 unit		1 unit	
		Jumlah kendaraan dinas roda dua yang dipelihara			7 unit		7 unit	
4.1.4.1.4.1.23.1.7.401.6	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya	Jumlah paket rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	KECAMATAN TEGALREJO	Kecamatan Tegalrejo	1 Paket	0	1 Paket	25.000.000
4.1.4.1.4.1.23.1.7.401.7	Peningkatan Kapasitas dan Disiplin Aparatur Sipil Negara	Frekuensi pembinaan ASN	KECAMATAN TEGALREJO	Kecamatan Tegalrejo	12 kali	0	12 kali	7.500.000
		Jumlah ASN yang terfasilitasi penilaian kinerjanya			25 orang		25 orang	
		Jumlah JFT yang terfasilitasi penilaian angka kreditnya			1 orang		1 orang	
4.1.4.1.4.1.23.1.8.401	Program Perencanaan, Keuangan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Presentase Ketercapaian perencanaan, evaluasi kinerja OPD, dan keuangan perangkat daerah			100 %	18.941.000	100 %	40.250.000
4.1.4.1.4.1.23.1.8.401.1	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah kegiatan yang dikelola	KECAMATAN TEGALREJO	Kecamatan Tegalrejo	16 kegiatan	16.200.000	16 kegiatan	25.250.000
		Jumlah laporan keuangan yang tersusun			6 laporan		6 laporan	
4.1.4.1.4.1.23.1.8.401.2	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Renstra Perangkat Daerah yang tersusun	KECAMATAN TEGALREJO	Kecamatan Tegalrejo	0 dokumen	1.425.000	0 dokumen	5.000.000
		Jumlah dokumen Renja Perangkat Daerah yang tersusun			2 dokumen		2 dokumen	
		jumlah dokumen Rencana Kerja Operasional yang tersusun			1 dokumen		1 dokumen	
		Jumlah dokumen RPTK yang tersusun			1 dokumen		1 dokumen	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
4.1.4.1.4.1.23.1.8.401.3	Penyusunan Laporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen pelaporan tahunan yang tersusun	KECAMATAN TEGALREJO	Kecamatan Tegalrejo	4 dokumen	1.316.000		4 dokumen	5.000.000
		Jumlah dokumen monitoring, evaluasi, dan pelaporan tribulanan yang tersusun			8 dokumen			8 dokumen	
		Jumlah dokumen pelaporan bulanan yang tersusun			12 dokumen			12 dokumen	
		Jumlah dokumen evaluasi jangka menengah yang tersusun			0 dokumen			0 dokumen	
4.1.4.1.4.1.23.1.8.401.4	Penyusunan Dokumen Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Perangkat Daerah	Jumlah dokumen SOP yang tersusun	KECAMATAN TEGALREJO	Kecamatan Tegalrejo	10 dokumen	0		10 dokumen	5.000.000
		Jumlah dokumen SP yang tersusun			10 dokumen			10 dokumen	
		Jumlah dokumen Daftar Informasi Publik			10 dokumen			10 dokumen	
		Jumlah dokumen data perangkat daerah yang tersusun			1 dokumen			1 dokumen	
		Jumlah dokumen pengendalian intern (SIPP) yang tersusun			1 dokumen			1 dokumen	
4.1.4.1.4.1.23.1.42.401	Program Pelayanan Publik Kecamatan	Presentase Pelayanan Publik Sesuai SOP dan SP			100 %	32.730.000		100 %	35.000.000
4.1.4.1.4.1.23.1.42.401.1	Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Kecamatan (PATEN)	Jumlah dokumen terlayani	KECAMATAN TEGALREJO	Kecamatan Tegalrejo	6000 dokumen	32.730.000		6000 dokumen	35.000.000
4.1.4.1.4.1.23.1.43.401	Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	Presentase kegiatan yang dikoordinasikan			100 %	59.435.000		100 %	230.000.000
		Persentase desa yang tertib administrasi			85 %		85 %		

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
4.1.4.1.4.1.23.1.43.401.1	Peningkatan Tata Kelola Kecamatan Pemerintahan Desa/Kelurahan	Jumlah desa terfasilitasi pengelolaan keuangan desa	KECAMATAN TEGALREJO	Kecamatan Tegalrejo	21 desa	9.555.000		21 desa	70.000.000
		Jumlah Kepala Desa yang terpilih			0 orang			0 orang	
		Jumlah perangkat desa terisi			3 orang			3 orang	
		Jumlah desa lunas PBB			21 desa			21 desa	
		Jumlah Perangkat Desa yang terbina			242 orang			242 orang	
		Jumlah anggota BPD yang terbina			141 orang			141 orang	
		Jumlah desa yang terfasilitasi evaluasi perkembangan desa			21 desa			21 desa	
4.1.4.1.4.1.23.1.43.401.2	Peningkatan Keberdayaan dan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa	Jumlah dokumen perencanaan desa yang tersusun	KECAMATAN TEGALREJO	Kecamatan Tegalrejo	21 dokumen	15.570.000		21 dokumen	40.000.000
		Jumlah desa yang terfasilitasi bantuan keuangan kepada desa			21 desa			21 desa	
		Jumlah dokumen profil desa yang tersusun			21 dokumen			21 dokumen	
		Jumlah lembaga kemasyarakatan desa yang terbina			21 lembaga			21 lembaga	
		Jumlah peserta musrenbangkec			145 orang			145 orang	
		Jumlah desa yang terfasilitasi evaluasi perkembangan desa			21 desa			21 desa	
4.1.4.1.4.1.23.1.43.401.3	Peningkatan Kualitas Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah desa terkoordinasi penanggulangan kemiskinan	KECAMATAN TEGALREJO	Kecamatan Tegalrejo	21 desa	21.950.000		21 desa	80.000.000
		Jumlah TP PKK Desa yang dibina			21 TP PKK Desa			21 TP PKK Desa	
		Jumlah peserta yang dilatih dan dikirimkan dalam lomba kebudayaan			215 orang			215 orang	
		Jumlah desa layak anak			1 desa			1 desa	
		Jumlah kegiatan penyelenggaraan festival budaya			1 kegiatan			1 kegiatan	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja
4.1.4.1.4.1.23.1.43.401.4	Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Wawasan Kebangsaan	Jumlah satuan linmas desa yang terbina	KECAMATAN TEGALREJO	Kecamatan Tegalrejo	21 orang	12.360.000	21 orang	40.000.000
		Jumlah peraturan perundang-undangan yang disosialisasikan			1 peraturan		1 peraturan	
		Jumlah frekuensi koordinasi forum komunikasi pimpinan kecamatan			12 kali		12 kali	
		Jumlah desa yang difasilitasi penanggulangan bencana			21 desa		21 desa	
		Jumlah anggota paskibraka yang terbina			72 orang		72 orang	
Total						290.959.750		635.250.000

PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH

KABUPATEN MAGELANG

TAHUN 2021

Nama Perangkat Daerah : KECAMATAN SECANG

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang				1.548.874.250			1.961.295.400
4.1	Administrasi Pemerintahan				1.548.874.250			1.961.295.400
4.1.4.1.4.1.24.1.7.401	Program Manajemen Administrasi Pelayanan Umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah			100 %	139.533.750	100 %	227.500.000
4.1.4.1.4.1.24.1.7.401.1	Pengelolaan Surat Menyurat, Kearsipan dan Bahan Pustaka	Jumlah surat yang dikelola	KECAMATAN SECANG	Subbag Adm. Umum pada Kecamatan Secang	1700 surat	8.260.000	1700 surat	9.000.000
		Jumlah arsip yang dikelola			1800 arsip		1800 arsip	
		Jumlah bahan pustaka yang dikelola			834 buku		834 buku	
4.1.4.1.4.1.24.1.7.401.2	Penyelenggaraan Koordinasi dan Konsultasi Perangkat Daerah	Jumlah rapat koordinasi yang diselenggarakan	KECAMATAN SECANG	Subbag Adm. Umum pada Kecamatan Secang	34 kali	16.140.000	34 kali	54.000.000
		Jumlah perjalanan dinas dalam daerah yang terlaksana			33 kali		33 kali	
		Jumlah layanan humas dan protokol yang dilaksanakan			21 layanan		21 layanan	
4.1.4.1.4.1.24.1.7.401.3	Pengadaan dan Pengelolaan Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya	Jumlah paket pengadaan perlengkapan gedung kantor	SIDOMULYO, SECANG	Subbag Adm. Umum pada Kecamatan Secang	1 Paket	0	1 Paket	38.000.000
		Jumlah paket pengadaan peralatan gedung kantor			1 Paket		1 Paket	
		Jumlah aset yang dikelola			894 unit		894 unit	
4.1.4.1.4.1.24.1.7.401.4	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya	Luas gedung kantor yang dipelihara	KECAMATAN SECANG	Subbag Adm. Umum pada Kecamatan Secang	3390 m2	69.680.000	3390 m2	51.000.000
		Jumlah rekening/bulan yang dibayar dalam 1 tahun			60 rekening bulan		60 rekening bulan	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
4.1.4.1.4.1.24.1.7.401.5	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya	Jumlah peralatan yang dipelihara	KECAMATAN SECANG	Subbag Adm. Umum pada Kecamatan Secang	16 unit	45.453.750	16 unit	70.000.000
		Jumlah perlengkapan yang dipelihara			4 unit		4 unit	
		Jumlah kendaraan dinas roda empat yang dipelihara			1 unit		1 unit	
		Jumlah kendaraan dinas roda dua yang dipelihara			7 unit		7 unit	
4.1.4.1.4.1.24.1.7.401.7	Peningkatan Kapasitas dan Disiplin Aparatur Sipil Negara	Frekuensi pembinaan ASN	KECAMATAN SECANG	Subbag Adm. Umum pada Kecamatan Secang	12 kali	0	12 kali	5.500.000
		Jumlah ASN yang terfasilitasi penilaian kinerjanya			26 orang		26 orang	
		Jumlah JFT yang terfasilitasi penilaian angka kreditnya			1 orang		1 orang	
4.1.4.1.4.1.24.1.8.401	Program Perencanaan, Keuangan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian perencanaan, evaluasi kinerja OPD, dan keuangan perangkat daerah			100 %	24.941.000	100 %	52.000.000
4.1.4.1.4.1.24.1.8.401.1	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah kegiatan yang dikelola	KECAMATAN SECANG	Subbag Program dan Keuangan pada Kecamatan Secang	15 kegiatan	22.200.000	15 kegiatan	36.000.000
		Jumlah laporan keuangan yang tersusun			19 laporan		19 laporan	
4.1.4.1.4.1.24.1.8.401.2	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Renstra PD yang tersusun	KECAMATAN SECANG	Subbag Program dan Keuangan pada Kecamatan Secang	0 dokumen	1.425.000	0 dokumen	5.000.000
		Jumlah dokumen Renja PD yang tersusun			2 dokumen		2 dokumen	
		jumlah dokumen Rencana Kerja Operasional yang tersusun			1 dokumen		1 dokumen	
		Jumlah dokumen RPTK yang tersusun			1 dokumen		1 dokumen	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
4.1.4.1.4.1.24.1.8.401.3	Penyusunan Laporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen laporan tahunan yang tersusun	KECAMATAN SECANG	Subbag Program dan Keuangan pada Kecamatan Secang	4 dokumen	1.316.000		4 dokumen	6.000.000
		Jumlah dokumen monitoring, evaluasi, dan pelaporan tribunalan yang tersusun			8 dokumen			8 dokumen	
		Jumlah dokumen pelaporan bulanan yang tersusun			12 dokumen			12 dokumen	
		Jumlah dokumen evaluasi jangka menengah yang tersusun			0 dokumen			0 dokumen	
4.1.4.1.4.1.24.1.8.401.4	Penyusunan Dokumen Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Perangkat Daerah	Jumlah dokumen standar operasional prosedur yang tersusun	KECAMATAN SECANG	Subbag Program dan Keuangan pada Kecamatan Secang	1 dokumen	0		1 dokumen	5.000.000
		Jumlah dokumen Standar Pelayanan yang tersusun			1 dokumen			1 dokumen	
		Jumlah dokumen pengendalian intern (SIPP) yang tersusun			1 dokumen			1 dokumen	
		Jumlah dokumen data perangkat daerah yang tersusun			1 dokumen			1 dokumen	
		Jumlah dokumen daftar informasi publik			1 dokumen			1 dokumen	
4.1.4.1.4.1.24.1.42.401	Program Pelayanan Publik Kecamatan	Persentase pelayanan publik sesuai SOP dan SP			100 %	32.730.000		100 %	15.000.000
4.1.4.1.4.1.24.1.42.401.1	Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Kecamatan (PATEN)	Jumlah dokumen yang terlayani	KECAMATAN SECANG	Subbag Adm. Umum pada Kecamatan Secang	7500 dokumen	32.730.000		7500 dokumen	15.000.000
4.1.4.1.4.1.24.1.43.401	Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	Persentase kegiatan yang dikoordinasikan			100 %	59.435.000		100 %	233.000.000
		Persentase desa/kecamatan yang tertib administrasi			65,00 %		65,00 %		

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
4.1.4.1.4.1.24.1.43.401.1	Peningkatan Tata Kelola Kecamatan Pemerintahan Desa/Kelurahan	Jumlah desa/kelurahan terfasilitasi dalam pengelolaan keuangan desa	KECAMATAN SECANG	Seksi Tata Pemerintahan pada Kecamatan Secang	20 Desa/kel	9.555.000	20 Desa/kel	71.500.000
		Jumlah kepala desa terpilih			0 orang		0 orang	
		Jumlah perangkat desa terisi			0 orang		0 orang	
		Jumlah anggota BPD yang terbina			141 orang		141 orang	
		Jumlah Desa/Kelurahan lunas PBB			5 Desa/Kel		5 Desa/Kel	
		Jumlah perangkat desa yang terbina			232 orang		232 orang	
		Jumlah desakel yang terbina administrasinya			20 desa/kel		20 desa/kel	
4.1.4.1.4.1.24.1.43.401.2	Peningkatan Keberdayaan dan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa	Jumlah desa yang terfasilitasi bantuan keuangan kepada desa	KECAMATAN SECANG	Seksi Pemberdayaan Masyarakat pada Kecamatan Secang	19 desa	15.570.000	19 desa	46.000.000
		Jumlah dokumen profil desa yang tersusun			20 dokumen		20 dokumen	
		Jumlah lembaga kemasyarakatan desa yang dibina			7 lembaga		7 lembaga	
		Jumlah desa yang terfasilitasi evaluasi perkembangan desa			19 desa		19 desa	
		Jumlah dokumen perencanaan desa yang tersusun			19 dokumen		19 dokumen	
		Jumlah peserta musrenbangkec			140 orang		140 orang	
4.1.4.1.4.1.24.1.43.401.3	Peningkatan Kualitas Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah desa/kelurahan terkoordinasi penanggulangan kemiskinan	KECAMATAN SECANG	Seksi Kesejahteraan Rakyat pada Kecamatan Secang	20 Desa/Kel	21.950.000	20 Desa/Kel	75.000.000
		Jumlah TP PKK Desa/Kelurahan yang dibina			20 TP PKK Desa/Kel		20 TP PKK Desa/Kel	
		Jumlah peserta yang dilatih dan dikirimkan dalam lomba kebudayaan			56 orang		56 orang	
		Jumlah Desa/Kel layak anak			20 desa/kel		20 desa/kel	
		Jumlah kegiatan penyelenggaraan Festival Budaya			1 kegiatan		1 kegiatan	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
4.1.4.1.4.1.24.1.43.401.4	Peningkatan Ketertarikan dan Ketertiban Umum serta Wawasan Kebangsaan	Jumlah/Frekuensi koordinasi forum komunikasi pimpinan kecamatan	KECAMATAN SECANG	Seksi Ketertarikan dan Ketertiban pada Kecamatan Secang	12 kali	12.360.000	12 kali	40.500.000
		Jumlah desa/kelurahan yang difasilitasi penanggulangan bencana			20 desa/kel		20 desa/kel	
		Jumlah Satlimas desa/kelurahan yang terbina			20 orang		20 orang	
		Jumlah peraturan perundang-undangan yang disosialisasikan			5 peraturan		5 peraturan	
		Jumlah anggota paskibra yang terbina			80 orang		80 orang	
4.1.4.1.4.1.24.2.7.401	Program Manajemen Administrasi Pelayanan Umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah			100 %	46.507.500	100 %	63.495.000
4.1.4.1.4.1.24.2.7.401.1	Pengelolaan Surat Menyurat, Kearsipan dan Bahan Pustaka	Jumlah surat yang dikelola	KELURAHAN SECANG	Kelurahan Secang	2620 surat	3.500.000	2620 surat	3.850.000
		Jumlah arsip yang dikelola			420 arsip		420 arsip	
		Jumlah bahan pustaka yang dikelola			145 buku		145 buku	
4.1.4.1.4.1.24.2.7.401.2	Penyelenggaraan Koordinasi dan Konsultasi Perangkat Daerah	Jumlah rapat koordinasi yang diselenggarakan	KELURAHAN SECANG	Kelurahan Secang	12 kali	2.040.000	12 kali	2.244.000
		Jumlah perjalanan dinas dalam daerah yang terlaksana			72 kali		72 kali	
		Jumlah layanan humas dan protokol yang dilaksanakan			15 layanan		15 layanan	
4.1.4.1.4.1.24.2.7.401.3	Pengadaan dan Pengelolaan Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya	Jumlah paket pengadaan perlengkapan gedung kantor	KELURAHAN SECANG	Kelurahan Secang	2 paket	0	2 paket	10.000.000
		Jumlah paket pengadaan peralatan gedung kantor			2 paket		2 paket	
		Jumlah aset yang dikelola			100 unit		100 unit	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
4.1.4.1.4.1.24.2.7.401.4	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya	Luas gedung kantor yang dipelihara	KELURAHAN SECANG	Kelurahan Secang	1280 m2	24.910.000		1280 m2	27.401.000
		Jumlah rekening/bulan yang dibayar dalam 1 tahun			48 rekening bulan			48 rekening bulan	
4.1.4.1.4.1.24.2.7.401.5	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya	Jumlah peralatan yang dipelihara	KELURAHAN SECANG	Kel Secang	6 unit	16.057.500		6 unit	20.000.000
		Jumlah perlengkapan yang dipelihara			12 unit			12 unit	
		Jumlah kendaraan dinas roda empat yang dipelihara			5 unit			5 unit	
4.1.4.1.4.1.24.2.8.401	Program Perencanaan, Keuangan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian perencanaan, evaluasi kinerja, dan keuangan perangkat daerah			100 %	5.564.000		100 %	6.120.400
4.1.4.1.4.1.24.2.8.401.1	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah kegiatan yang dikelola	KELURAHAN SECANG	Kelurahan Secang	15 kegiatan	2.620.000		15 kegiatan	2.882.000
		Jumlah laporan keuangan yang tersusun			12 laporan			12 laporan	
4.1.4.1.4.1.24.2.8.401.3	Penyusunan Laporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen pelaporan tahunan yang tersusun	KELURAHAN SECANG	Kelurahan Secang	1 Laporan	1.644.000		1 Laporan	1.808.400
		Jumlah dokumen RFK yang tersusun			12 dokumen			12 dokumen	
4.1.4.1.4.1.24.2.8.401.4	Penyusunan Dokumen Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Standar Operasional Prosedur yang tersusun	KELURAHAN SECANG	Kelurahan Secang	22 dokumen	1.300.000		22 dokumen	1.430.000
		Jumlah dokumen SP yang tersusun			31 dokumen			31 dokumen	
		Jumlah dokumen Daftar Informasi Publik			12 dokumen			12 dokumen	
		Jumlah dokumen Pengendalian Intern (SPIP) tersusun			15 dokumen			15 dokumen	
		Jumlah dokumen data perangkat daerah yang tersusun			3 dokumen			3 dokumen	
4.1.4.1.4.1.24.2.43.401	Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	Persentase kegiatan yang dikoordinasikan			100 %	1.240.163.000		100 %	1.364.180.000

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
			Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
4.1.4.1.4.1.24.2.43.401.1	Peningkatan Tata Kelola Kecamatan Pemerintahan Desa/Kelurahan	Frekuensi rakor pembinaan dan penyuluhan pemerintahan dan pembangunan	KELURAHAN SECANG	Kelurahan Secang	4 kali	12.698.000		4 kali	13.968.000
		Jumlah laporan kependudukan			12 laporan			12 laporan	
		Jumlah pokok pajak daerah PBB kelurahan yang terbayar			139437900 rupiah			139437900 rupiah	
4.1.4.1.4.1.24.2.43.401.6	Peningkatan Keberdayaan dan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan	Jumlah lembaga kelurahan yang aktif dalam pembangunan	KELURAHAN SECANG	Kelurahan Secang	7 lembaga	1.206.856.000		7 lembaga	1.327.542.000
		Jumlah paket sarana dan prasarana yang dibangun			10 paket			10 paket	
		Jumlah peserta musrenbang kelurahan			40 orang			40 orang	
		Jumlah proposal hibah/bansos yang terfasilitasi			8 proposal			8 proposal	
4.1.4.1.4.1.24.2.43.401.7	Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban serta Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Pokja yang dibina	KELURAHAN SECANG	Kelurahan Secang	4 pokja	20.609.000		4 pokja	22.670.000
		Jumlah Posyandu yang dibina			13 posyandu			13 posyandu	
		Jumlah anggota Satlinmas yang aktif dan terlatih			40 orang			40 orang	
Total						1.548.874.250			1.961.295.400

PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH

KABUPATEN MAGELANG

TAHUN 2021

Nama Perangkat Daerah : KECAMATAN WINDUSARI

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang				250.639.750			437.500.000
4.1	Administrasi Pemerintahan				250.639.750			437.500.000
4.1.4.1.4.1.25.1.7.401	Program Manajemen Administrasi Pelayanan Umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah			100 %	139.533.750	100 %	187.500.000
4.1.4.1.4.1.25.1.7.401.1	Pengelolaan Surat Menyurat, Kearsipan dan Bahan Pustaka	Jumlah surat yang dikelola	KECAMATAN WINDUSARI	Kecamatan Windusari	1500 surat	8.260.000	1500 surat	7.500.000
		Jumlah arsip dikelola			1200 dokumen		1200 dokumen	
		Jumlah bahan pustaka yang dikelola			289 buku		289 buku	
4.1.4.1.4.1.25.1.7.401.2	Penyelenggaraan Koordinasi dan Konsultasi Perangkat Daerah	Jumlah rapat koordinasi yang diselenggarakan	KECAMATAN WINDUSARI	Kecamatan Windusari	15 kali	16.140.000	15 kali	20.000.000
		Jumlah perjalanan dinas dalam daerah yang terlaksana			30 kali		30 kali	
		Jumlah layanan humas dan protokol yang dilaksanakan			12 layanan		12 layanan	
4.1.4.1.4.1.25.1.7.401.3	Pengadaan dan Pengelolaan Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya	Jumlah Paket pengadaan perlengkapan gedung kantor	KECAMATAN WINDUSARI	Kecamatan Windusari	1 paket	0	1 paket	40.000.000
		Jumlah Paket pengadaan peralatan gedung kantor			1 paket		1 paket	
		Jumlah Aset yang dikelola			309 unit		309 unit	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja
4.1.4.1.4.1.25.1.7.401.4	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya	Luas gedung kantor yang dipelihara	KECAMATAN WINDUSARI	Kecamatan Windusari	1828 m2	69.680.000	1828 m2	43.000.000
		Jumlah rekening/bulan yang dibayar dalam 1 tahun			48 rekening bulan		48 rekening bulan	
4.1.4.1.4.1.25.1.7.401.5	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya	Jumlah peralatan yang dipelihara	KECAMATAN WINDUSARI	Kecamatan Windusari	11 unit	45.453.750	11 unit	77.000.000
		Jumlah perlengkapan yang dipelihara			4 unit		4 unit	
		Jumlah kendaraan dinas roda empat yang dipelihara			1 unit		1 unit	
		Jumlah kendaraan dinas roda dua yang dipelihara			7 unit		7 unit	
4.1.4.1.4.1.25.1.8.401	Program Perencanaan, Keuangan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian perencanaan, evaluasi kinerja OPD, dan keuangan perangkat daerah			100 %	18.941.000	100 %	40.000.000
4.1.4.1.4.1.25.1.8.401.1	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah kegiatan yang dikelola	KECAMATAN WINDUSARI	Kecamatan Windusari	19 kegiatan	16.200.000	19 kegiatan	25.000.000
		Jumlah Laporan Keuangan yang tersusun			3 laporan		3 laporan	
4.1.4.1.4.1.25.1.8.401.2	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Renja PD yang tersusun	KECAMATAN WINDUSARI	Kecamatan Windusari	2 dokumen	1.425.000	2 dokumen	5.000.000
		Jumlah dokumen Renstra PD yang tersusun			0 dokumen		0 dokumen	
		Jumlah dokumen Rencana Kerja Operasional yang tersusun			1 dokumen		1 dokumen	
		Jumlah dokumen RPTK yang tersusun			1 dokumen		1 dokumen	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
4.1.4.1.4.1.25.1.8.401.3	Penyusunan Laporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen laporan Tahunan yang tersusun	KECAMATAN WINDUSARI	Kecamatan Windusari	4 dokumen	1.316.000		4 dokumen	5.000.000
		Jumlah dokumen monitoring, evaluasi, dan pelaporan tribulanan yang tersusun			8 dokumen			8 dokumen	
		Jumlah dokumen pelaporan bulanan yang tersusun			12 dokumen			12 dokumen	
		Jumlah dokumen evaluasi jangka menengah yang tersusun			0 dokumen			0 dokumen	
4.1.4.1.4.1.25.1.8.401.4	Penyusunan Dokumen Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Perangkat Daerah	Jumlah dokumen SOP yang tersusun	KECAMATAN WINDUSARI	Kecamatan Windusari	1 dokumen	0		1 dokumen	5.000.000
		Jumlah dokumen SP yang tersusun			0 dokumen			0 dokumen	
		Jumlah dokumen Daftar Informasi Publik			1 dokumen			1 dokumen	
		Jumlah dokumen data perangkat daerah yang tersusun			1 dokumen			1 dokumen	
		Jumlah dokumen pengendalian intern (SPIP) yang tersusun			1 dokumen			1 dokumen	
4.1.4.1.4.1.25.1.42.401	Program Pelayanan Publik Kecamatan	Persentase pelayanan publik sesuai SOP dan SP			82,10 %	32.730.000		82,10 %	10.000.000
4.1.4.1.4.1.25.1.42.401.1	Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Kecamatan (PATEN)	Jumlah dokumen yang terlayani	KECAMATAN WINDUSARI	kecamatan windusari	1000 dokumen	32.730.000		1000 dokumen	10.000.000
4.1.4.1.4.1.25.1.43.401	Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	Persentase kegiatan yang dikoordinasikan			100 %	59.435.000		100 %	200.000.000
		Persentase desa yang tertib administrasi			90 %		90 %		

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
4.1.4.1.4.1.25.1.43.401.1	Peningkatan Tata Kelola Kecamatan Pemerintahan Desa/Kelurahan	Jumlah Desa terfasilitasi pengelolaan keuangan Desa	KECAMATAN WINDUSARI	kecamatan windusari	20 Desa	9.555.000	20 Desa	60.000.000
		Jumlah Kepala Desa terpilih			1 orang		1 orang	
		Jumlah Anggota BPD yang terbina			100 Orang		100 Orang	
		Jumlah Desa Lunas PBB			20 Desa		20 Desa	
		Jumlah perangkat desa terisi			20 orang		20 orang	
		Jumlah Perangkat Desa yang terbina			250 orang		250 orang	
		Jumlah desa yang terbina administrasinya			20 desa		20 desa	
4.1.4.1.4.1.25.1.43.401.2	Peningkatan Keberdayaan dan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa	Jumlah dokumen perencanaan desa yang tersusun	KECAMATAN WINDUSARI	kecamatan windusari	20 dokumen	15.570.000	20 dokumen	40.000.000
		Jumlah desa yang terfasilitasi bantuan keuangan kepada desa			20 Desa		20 Desa	
		Jumlah desa yang terfasilitasi evaluasi perkembangan desa			20 Desa		20 Desa	
		Jumlah dokumen profil desa yang tersusun			20 Desa		20 Desa	
		Jumlah lembaga kemasyarakatan desa yang terbina			7 lembaga		7 lembaga	
		Jumlah peserta musrenbang kecamatan			135 orang		135 orang	
4.1.4.1.4.1.25.1.43.401.3	Peningkatan Kualitas Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah desa/kel terkoordinasi penanggulangan kemiskinan	KECAMATAN WINDUSARI	kecamatan windusari	20 Desa	21.950.000	20 Desa	60.000.000
		Jumlah TP PKK Desa/Kel yang dibina			20 TP PKK Desa/Kelurahan		20 TP PKK Desa/Kelurahan	
		Jumlah peserta yang dilatih dan dikirimkan dalam lomba kebudayaan			130 Orang		130 Orang	
		Jumlah Desa/Kel Layak Anak			4 Desa//Kelurahan		4 Desa//Kelurahan	
		Jumlah kegiatan Penyelenggaraan Festival Budaya			2 kegiatan		2 kegiatan	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja
4.1.4.1.4.1.25.1.43.401.4	Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Wawasan Kebangsaan	Jumlah/frekuensi koordinasi forum komunikasi pimpinan kecamatan	KECAMATAN WINDUSARI	Kecamatan windusari	12 Kali	12.360.000	12 Kali	40.000.000
		Jumlah desa yang difasilitasi penanggulangan bencana			20 Desa		20 Desa	
		Jumlah satlinmas desa yang dibina			20 orang		20 orang	
		Jumlah peraturan perundangan- undangan yang disosialisasikan			2 Peraturan		2 Peraturan	
		Jumlah anggota paskibra yang terbina			80 Orang		80 Orang	
Total						250.639.750		437.500.000

PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH

KABUPATEN MAGELANG

TAHUN 2021

Nama Perangkat Daerah : INSPEKTORAT

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
4	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang				1.749.401.500			4.019.400.000	
4.2	Pengawasan				1.749.401.500			4.019.400.000	
4.2.4.2.4.2.1.1.7.402	Program Manajemen Administrasi Pelayanan Umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah			100 %	521.141.000		100 %	975.900.000
4.2.4.2.4.2.1.1.7.402.1	Pengelolaan Surat Menyurat, Kearsipan dan Bahan Pustaka	Jumlah surat yang dikelola	INSPEKTORAT	Inspektorat Kabupaten Magelang	2000 surat	46.535.000		2000 surat	66.400.000
		Jumlah bahan bacaan			10 buku			10 buku	
4.2.4.2.4.2.1.1.7.402.2	Penyelenggaraan Koordinasi dan Konsultasi Perangkat Daerah	Jumlah Rakor Luar Daerah	INSPEKTORAT	Inspektorat Kabupaten Magelang	200 kali	174.470.000		200 kali	315.000.000
		Jumlah Rakor Dalam Daerah			175 kali			175 kali	
		Jumlah rapat dinas pengawasan			1 rapat			1 rapat	
		Jumlah rapat koordinasi			15 kali			15 kali	
4.2.4.2.4.2.1.1.7.402.3	Pengadaan dan Pengelolaan Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor/ Rumah Dinas/ Gedung Pemerintah Lainnya	Jumlah pengadaan	INSPEKTORAT	Inspektorat Kabupaten Magelang	2 paket	0		2 paket	60.000.000
4.2.4.2.4.2.1.1.7.402.4	Pemeliharaan Rutin Berkala Gedung Kantor/ Rumah Dinas/ Gedung Pemerintah Lainnya	luas gedung kantor yang dipelihara	INSPEKTORAT	Inspektorat Kabupaten Magelang	710 m2	104.191.000		710 m2	9.500.000
		jumlah rekening dan bulan			12 rekening bulan			12 rekening bulan	
		jumlah rekening dan bulan			12 rekening bulan			12 rekening bulan	
		jumlah rekening dan bulan			12 rekening bulan			12 rekening bulan	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
4.2.4.2.4.2.1.1.7.402.5	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor/ Rumah Dinas/ Gedung Pemerintah Lainnya	Jumlah peralatan yang dipelihara	INSPEKTORAT	Inspektorat Kabupaten Magelang	26 unit	120.945.000		26 unit	255.000.000
		Jumlah perlengkapan yang dipelihara			15 unit			15 unit	
		Jumlah kendaraan roda 4 yang dipelihara			5 mobil			5 mobil	
		Jumlah kendaraan roda 2 yang dipelihara			22 motor			22 motor	
4.2.4.2.4.2.1.1.7.402.7	Peningkatan Kapasitas dan Disiplin Aparatur Sipil Negara	Jumlah Pelatihan Kalangan Sendiri (PKS)	INSPEKTORAT	Inspektorat Kabupaten Magelang	7 kali	75.000.000		7 kali	270.000.000
		Jumlah ASN yang bimtek/ sertifikasi			5 orang			5 orang	
		Jumlah JFT yang terfasilitasi angka kreditnya			23 orang			23 orang	
		Jumlah kunjungan sharing kajian			2 kunjungan			2 kunjungan	
4.2.4.2.4.2.1.1.8.402	Program Perencanaan, Keuangan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian perencanaan, evaluasi kinerja OPD, dan keuangan perangkat daerah			100 %	50.624.000		100 %	190.000.000
4.2.4.2.4.2.1.1.8.402.1	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah kegiatan yang dikelola	INSPEKTORAT	Inspektorat Kabupaten Magelang	22 kegiatan	42.493.000		22 kegiatan	40.000.000
		Jumlah laporan keuangan yang tersusun			1 laporan			1 laporan	
		Jumlah laporan SPJ Fungsional			12 laporan			12 laporan	
4.2.4.2.4.2.1.1.8.402.2	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Renstra	INSPEKTORAT	Inspektorat Kabupaten Magelang	0 dokumen	8.131.000		0 dokumen	55.000.000
		Jumlah Dokumen Renja			2 dokumen			2 dokumen	
		Jumlah dokumen PKPT			1 dokumen			1 dokumen	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
4.2.4.2.4.2.1.1.8.402.3	Penyusunan Laporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen laporan monitoring	INSPEKTORAT	Inspektorat Kabupaten Magelang	1 laporan	0	1 laporan	85.000.000
		Jumlah dokumen laporan LP2P			0 laporan		0 laporan	
		Jumlah dokumen laporan evaluasi Renja			4 laporan		4 laporan	
		Jumlah dokumen laporan verifikasi LHKASN			1 laporan		1 laporan	
		Jumlah laporan IHPS			2 laporan		2 laporan	
		Jumlah laporan LKjIP			1 laporan		1 laporan	
		Jumlah dokumen profil PD yang tersusun			1 dokumen		1 dokumen	
4.2.4.2.4.2.1.1.8.402.4	Penyusunan Dokumen Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Perangkat Daerah	Jumlah SOP yang tersusun	INSPEKTORAT	Inspektorat Kabupaten Magelang	3 SOP	0	3 SOP	10.000.000
4.2.4.2.4.2.1.1.20.402	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Persentase Laporan Hasil Pengawasan			100 PERSEN	1.177.636.500	100 PERSEN	2.853.500.000
		Persentase tindak lanjut yang terselesaikan			87 PERSEN		87 PERSEN	
		Persentase dokumen SPIP PD yang memadai			70 PERSEN		70 PERSEN	
		Angka capaian nilai aksi pencegahan korupsi			80 PERSEN		80 PERSEN	
4.2.4.2.4.2.1.1.20.402.6	Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan	Jumlah tindak lanjut LHP yang ditangani	INSPEKTORAT	Inspektorat Kabupaten Magelang	420 TLHP	112.047.000	420 TLHP	360.000.000
4.2.4.2.4.2.1.1.20.402.13	Pelaksanaan Pengawasan Internal	Jumlah laporan hasil pemeriksaan	INSPEKTORAT	Inspektorat Kabupaten Magelang	144 LHP	394.229.000	144 LHP	1.098.500.000
		Jumlah penanganan kasus			10 LHP		10 LHP	
		Jumlah Obrik Yang diperiksa			144 Obrik		144 Obrik	
4.2.4.2.4.2.1.1.20.402.15	Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB)	Jumlah laporan penilaian PMPRB	INSPEKTORAT	Inspektorat Kabupaten Magelang	1 laporan	23.357.000	1 laporan	50.000.000

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
4.2.4.2.4.2.1.1.20.402.16	Monitoring dan Evaluasi Aksi Pencegahan Korupsi	Jumlah laporan monitoring dan evaluasi pencegahan korupsi	INSPEKTORAT	Inspektorat Kabupaten Magelang	4 laporan	50.000.000		4 laporan	135.000.000
4.2.4.2.4.2.1.1.20.402.17	Implementasi SPIP	Jumlah dokumen penilaian maturitas SPIP SKPD	INSPEKTORAT	Inspektorat Kabupaten Magelang	23 dokumen	24.500.000		23 dokumen	110.000.000
4.2.4.2.4.2.1.1.20.402.18	Pelaksanaan Review	Jumlah laporan hasil review	INSPEKTORAT	Inspektorat Kabupaten Magelang	22 laporan	107.767.500		22 laporan	105.000.000
4.2.4.2.4.2.1.1.20.402.19	Pencegahan dan Pemberantasan Pungutan Liar	Jumlah laporan pencegahan dan pemberantasan pungli	INSPEKTORAT	Inspektorat Kabupaten Magelang	12 laporan	331.000.000		12 laporan	730.000.000
4.2.4.2.4.2.1.1.20.402.20	Peningkatan Kapabilitas APIP	Jumlah dokumen elemen penilaian kapabilitas APIP	INSPEKTORAT	Inspektorat Kabupaten Magelang	6 dokumen elemen	11.600.000		6 dokumen elemen	80.000.000
4.2.4.2.4.2.1.1.20.402.21	Evaluasi SAKIP SKPD	Jumlah laporan evaluasi SAKIP SKPD	INSPEKTORAT	Inspektorat Kabupaten Magelang	1 laporan	23.136.000		1 laporan	50.000.000
4.2.4.2.4.2.1.1.20.402.22	Penilaian Integritas Penyelenggara Pemerintah Daerah	Jumlah laporan penilaian integritas	INSPEKTORAT	Inspektorat Kabupaten Magelang	1 laporan	100.000.000		1 laporan	135.000.000
Total						1.749.401.500			4.019.400.000

PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH

KABUPATEN MAGELANG

TAHUN 2021

Nama Perangkat Daerah : BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang				3.877.363.000			10.551.705.000
4.3	Perencanaan				3.241.363.000			8.746.705.000
4.3.4.3.4.3.1.1.7.403	Program Manajemen Administrasi Pelayanan Umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah			100 %	885.639.000	100 %	1.035.866.000
4.3.4.3.4.3.1.1.7.403.1	Pengelolaan Surat Menyurat, Kearsipan dan Bahan Pustaka	Jumlah surat yang dikelola Jumlah arsip yang dikelola Jumlah bahan pustaka yang dikelola	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Bappeda dan Litbangda	5500 surat 1200 arsip 265 bahan pustaka	54.913.000	5500 surat 1200 arsip 265 bahan pustaka	69.402.000
4.3.4.3.4.3.1.1.7.403.2	Penyelenggaraan Koordinasi dan Konsultasi Perangkat Daerah	Jumlah perjalanan dinas luar daerah yang terlaksana Jumlah perjalanan dinas dalam daerah yang terlaksana Jumlah rapat koordinasi yang diselenggarakan Jumlah layanan humas dan protokol yang dilaksanakan	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Bappeda dan Litbangda	92 kali 78 kali 35 kali 9 layanan	223.448.000	92 kali 78 kali 35 kali 9 layanan	315.700.000
4.3.4.3.4.3.1.1.7.403.3	Pengadaan dan Pengelolaan Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor, Rumah Dinas dan Gedung Pemerintah Lainnya	Jumlah paket pengadaan perlengkapan gedung kantor Jumlah paket pengadaan peralatan gedung kantor	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Bappeda dan Litbangda	3 paket 3 paket	180.000.000	3 paket 3 paket	193.000.000

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
4.3.4.3.4.3.1.1.7.403.4	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor/ Rumah Dinas/ Gedung Pemerintah Lainnya	Luas gedung kantor yang dipelihara	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Bappeda dan Litbangda	1332 M2	101.269.000		1332 M2	89.483.000
		Jumlah rekening yang dibayar selama satu tahun			36 rekening bulan			36 rekening bulan	
4.3.4.3.4.3.1.1.7.403.5	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor, Rumah dinas dan Gedung Pemerintah Lainnya	Jumlah peralatan yang dipelihara	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Bappeda dan Litbangda	54 unit	226.009.000		54 unit	274.671.000
		Jumlah perlengkapan yang dipelihara			29 unit			29 unit	
		Jumlah kendaraan dinas roda empat yang dipelihara			7 unit			7 unit	
		Jumlah kendaraan dinas roda dua yang dipelihara			20 unit			20 unit	
		Jumlah aset yang dikelola			672 unit			672 unit	
4.3.4.3.4.3.1.1.7.403.6	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor, Rumah Dinas dan Gedung Pemerintah Lainnya	Jumlah paket rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Bappeda dan Litbangda	3 paket	0		3 paket	61.610.000
4.3.4.3.4.3.1.1.7.403.7	Peningkatan Kapasitas dan Disiplin Aparatur Sipil Negara	Frekuensi pembinaan ASN	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Bappeda dan Litbangda	12 kali	100.000.000		12 kali	32.000.000
		Jumlah ASN yang terfasilitasi penilaian kinerjanya			43 orang			43 orang	
		Jumlah JFT yang terfasilitasi penilaian angka kreditnya			12 orang			12 orang	
4.3.4.3.4.3.1.1.8.403	Program Perencanaan, Keuangan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian perencanaan, evaluasi kinerja OPD, dan keuangan perangkat daerah			100 %	83.193.000		100 %	1.325.740.000
4.3.4.3.4.3.1.1.8.403.1	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah kegiatan yang dikelola	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Bappeda dan Litbangda	26 kegiatan	74.116.000		26 kegiatan	77.000.000

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
4.3.4.3.4.3.1.1.8.403.2	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah yang tersusun	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Bappeda dan Litbangda	0 dokumen	5.281.000	0 dokumen	10.000.000
		Jumlah dokumen rencana kerja perangkat daerah yang tersusun			2 dokumen		2 dokumen	
4.3.4.3.4.3.1.1.8.403.3	Penyusunan Laporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen laporan tahunan yang tersusun	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Bappeda dan Litbangda	4 dokumen	3.796.000	4 dokumen	10.000.000
		Jumlah dokumen laporan tribulanan yang tersusun			2 dokumen		2 dokumen	
		Jumlah dokumen laporan bulanan yang tersusun			3 dokumen		3 dokumen	
4.3.4.3.4.3.1.1.8.403.4	Penyusunan Dokumen Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Perangkat Daerah	Jumlah SOP yang tersusun	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Bappeda dan Litbangda	5 SOP	0	5 SOP	10.000.000
		Jumlah dokumen SP yang tersusun			0 dokumen		0 dokumen	
		Jumlah Daftar Informasi Publik yang tersusun			1 dokumen		1 dokumen	
		Jumlah dokumen Rencana Tindak Pengendalian yang tersusun (RTP dan Evaluasi RTP)			2 dokumen		2 dokumen	
		Jumlah dokumen data perangkat daerah yang tersusun			1 dokumen		1 dokumen	
4.3.4.3.4.3.1.1.8.403.5	Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah klaster ekonomi yang terfasilitasi	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Bappeda dan Litbangda	7 klaster	0	7 klaster	1.218.740.000
		Jumlah laporan tahunan Program TPB/SDGs			1 dokumen		1 dokumen	
		Jumlah paket buku			1 buku		1 buku	
		Jumlah laporan kinerja penanggulangan kemiskinan			2 dokumen		2 dokumen	
		Jumlah laporan kegiatan penanganan masalah gizi			2 dokumen		2 dokumen	
		Jumlah peserta bimbingan teknis			40 orang		40 orang	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
4.3.4.3.4.3.1.1.21.403	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase kesepakatan Musrenbang yang masuk ke dalam RKPD			100 %	948.151.000		100 %	3.108.939.000
		Persentase pemenuhan dokumen perencanaan pembangunan jangka panjang dan menengah daerah			100 %			100 %	
		Konsistensi penjabaran program RPJMD ke dalam RKPD			100 %			100 %	
4.3.4.3.4.3.1.1.21.403.14	Perencanaan Umum Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen RKPD yang tersusun	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Kabupaten Magelang	2 dokumen	948.151.000		2 dokumen	1.054.987.000
4.3.4.3.4.3.1.1.21.403.34	Pengelolaan Data dan Laporan Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen data pembangunan daerah yang tersedia	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Bappeda dan Litbangda	1 dokumen	0		1 dokumen	225.000.000
		Jumlah laporan pelaksanaan kegiatan non APBD yang tersusun			4 laporan			4 laporan	
4.3.4.3.4.3.1.1.21.403.35	Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen evaluasi perencanaan pembangunan tahunan yang tersusun	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Kabupaten Magelang	2 dokumen	0		2 dokumen	128.952.000
		Jumlah dokumen evaluasi perencanaan pembangunan jangka menengah yang tersusun			1 dokumen			1 dokumen	
		Jumlah dokumen evaluasi perencanaan pembangunan jangka panjang yang tersusun			1 dokumen			1 dokumen	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
4.3.4.3.4.3.1.1.21.403.37	Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang dan Menengah Daerah	Jumlah rancangan teknokratik perencanaan pembangunan jangka menengah yang tersusun	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Bappeda dan Litbangda	0 dokumen	0	0 dokumen	1.700.000.000
		Jumlah dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah yang tersusun			1 dokumen		1 dokumen	
		Jumlah rancangan teknokratik perencanaan pembangunan jangka panjang yang tersusun			0 dokumen		0 dokumen	
4.3.4.3.4.3.1.1.27.403	Program Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam	Cakupan ketercapaian indikator kinerja program bidang ekonomi dan sumber daya alam			82.00 %	135.488.000	82.00 %	203.495.000
4.3.4.3.4.3.1.1.27.403.1	Perencanaan Pembangunan Dunia Usaha	Jumlah indikator kinerja program sektor pengembangan dunia usaha yang berpredikat sangat tinggi (>91%) dan tinggi (76%-90%)	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	MUNGKID, KOTA MAGELANG	14 indikator	135.488.000	14 indikator	113.495.000
		Jumlah dokumen perencanaan sektor pengembangan dunia usaha			1 dokumen		1 dokumen	
		Frekuensi koordinasi sektor pengembangan dunia usaha			12 kali		12 kali	
4.3.4.3.4.3.1.1.27.403.2	Perencanaan Pembangunan Sektor Pertanian dan Pangan	Jumlah indikator kinerja program sektor pertanian dan pangan yang berpredikat sangat tinggi (>91%) dan tinggi (76%-90%)	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Kabupaten Magelang	27 indikator	0	27 indikator	90.000.000
		Jumlah dokumen perencanaan sektor pertanian dan pangan			1 dokumen		1 dokumen	
		Frekuensi koordinasi sektor pertanian dan pangan			10 koordinasi		10 koordinasi	
4.3.4.3.4.3.1.1.28.403	Program Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan, Sosial dan Budaya	Cakupan ketercapaian indikator kinerja program bidang pemerintahan, sosial, dan budaya			67.14 %	638.243.000	67.14 %	1.122.665.000

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
4.3.4.3.4.3.1.1.28.403.1	Perencanaan Sektor Pemerintahan Umum	Jumlah indikator kinerja program Sektor Pemerintahan Umum yang berpredikat sangat tinggi (>91%) dan tinggi (76%-90%)	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Bappeda dan Litbangda	96 indikator	638.243.000		96 indikator	500.000.000
		Jumlah dokumen perencanaan Sektor Pemerintahan Umum			2 dokumen			2 dokumen	
		Frekuensi koordinasi Sektor Pemerintahan Umum			18 kali			18 kali	
4.3.4.3.4.3.1.1.28.403.2	Perencanaan Sektor Kesejahteraan Sosial	Jumlah indikator kinerja program Sektor Kesejahteraan Sosial yang berpredikat sangat tinggi (>91%) dan tinggi (76%-90%)	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Bappeda dan Litbangda	26 indikator	0		26 indikator	467.665.000
		Jumlah dokumen perencanaan Sektor Kesejahteraan Sosial			2 dokumen			2 dokumen	
		Frekuensi koordinasi Sektor Kesejahteraan Sosial			20 kali			20 kali	
4.3.4.3.4.3.1.1.28.403.3	Perencanaan Sektor Pendidikan dan Kebudayaan	Jumlah indikator kinerja program Sektor Pendidikan dan Kebudayaan yang berpredikat sangat tinggi (>91%) dan tinggi (76%-90%)	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Bappeda dan Litbangda	12 indikator	0		12 indikator	65.000.000
		Jumlah dokumen perencanaan Sektor Pendidikan dan Kebudayaan			1 dokumen			1 dokumen	
		Frekuensi koordinasi Sektor Pendidikan dan Kebudayaan			12 kali			12 kali	
4.3.4.3.4.3.1.1.28.403.4	Perencanaan Sektor Akuntabilitas Pemerintahan	Jumlah indikator kinerja program Sektor Akuntabilitas Pemerintahan yang berpredikat sangat tinggi (>91%) dan tinggi (76%-90%)	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Bappeda dan Litbangda	9 indikator	0		9 indikator	90.000.000
		Jumlah dokumen perencanaan Sektor Akuntabilitas Pemerintahan			2 dokumen			2 dokumen	
		Frekuensi koordinasi Sektor Akuntabilitas Pemerintahan			16 kali			16 kali	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
4.3.4.3.4.3.1.1.29.403	Program Perencanaan Pembangunan Bidang Tata Ruang, Pengembangan Wilayah dan Infrastruktur	Cakupan ketercapaian indikator kinerja program bidang tata ruang pengembangan wilayah dan infrastruktur			90,32 %	550.649.000		90,32 %	1.950.000.000
4.3.4.3.4.3.1.1.29.403.1	Perencanaan Tata Ruang dan Pengembangan Wilayah	Jumlah indikator kinerja program tata ruang dan pengembangan wilayah yang berpredikat sangat tinggi (>91%) dan tinggi (76%-90%)	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Bappeda dan Litbangda	36 indikator	550.649.000		36 indikator	1.050.000.000
		Jumlah dokumen perencanaan tata ruang dan pengembangan wilayah			5 dokumen			5 dokumen	
		Frekuensi koordinasi perencanaan tata ruang dan pengembangan wilayah			18 kali			18 kali	
4.3.4.3.4.3.1.1.29.403.2	Perencanaan Infrastruktur Daerah	Jumlah indikator kinerja program pengembangan infrastruktur yang berpredikat sangat tinggi (>91%) dan tinggi (76%-90%)	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Kabupaten Magelang	20 indikator	0		20 indikator	900.000.000
		Jumlah dokumen perencanaan infrastruktur			4 dokumen			4 dokumen	
		Frekuensi koordinasi perencanaan infrastruktur			18 kali			18 kali	
4.7	Perencanaan					636.000.000			1.805.000.000
4.7.4.7.4.3.1.1.15.407	Program Penelitian dan Pengkajian Daerah	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan			100 %	636.000.000		100 %	1.805.000.000
		Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah			100 %			100 %	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
4.7.4.7.4.3.1.1.15.407.1	Penelitian dan Pembangunan Pemerintahan Sosial dan Budaya	Jumlah kajian penelitian dan pengembangan pemerintahan, sosial, dan budaya yang tersusun	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Bappeda & Litbangda Kab Magelang	4 kajian	0	4 kajian	446.000.000
		Jumlah tulisan ilmiah penelitian dan dan pengembangan pemerintahan, sosial, dan budaya yang terbit			5 tulisan ilmiah		5 tulisan ilmiah	
		Jumlah seminar penelitian dan pengembangan pemerintahan, sosial, dan budaya			2 seminar		2 seminar	
		Jumlah fasilitasi DRD			3 fasilitasi		3 fasilitasi	
		Jumlah aplikasi penelitian dan pengembangan yang terbangun			1 aplikasi		1 aplikasi	
4.7.4.7.4.3.1.1.15.407.2	Penelitian dan Pembangunan Ekonomi dan Pembangunan Wilayah	Jumlah kajian penelitian dan pengembangan bidang ekonomi dan pengembangan wilayah yang tersusun	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Bappeda & Litbangda Kab. Magelang	4 kajian	0	4 kajian	796.000.000
		Jumlah tulisan ilmiah dan pengembangan bidang ekonomi dan pengembangan wilayah daerah yang dipublikasikan			5 tulisan ilmiah		5 tulisan ilmiah	
		Jumlah seminar penelitian dan pengembangan bidang ekonomi dan pengembangan wilayah			2 seminar		2 seminar	
		Frekuensi fasilitasi DRD			3 fasilitasi		3 fasilitasi	
4.7.4.7.4.3.1.1.15.407.3	Pembangunan Sistem Inovasi Daerah	Jumlah program roadmap SIDA yang terlaksana	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Bappeda & Litbangda Kabupaten Magelang	3 program	636.000.000	3 program	563.000.000
		Jumlah fasilitasi HaKI bagi masyarakat			2 fasilitasi		2 fasilitasi	
		Jumlah peserta Anugerah Krenova Kabupaten			20 peserta		20 peserta	
Total					3.877.363.000		10.551.705.000	

PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH

KABUPATEN MAGELANG

TAHUN 2021

Nama Perangkat Daerah : BADAN PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang				17.051.300.237			25.011.578.327
4.4	Keuangan				17.051.300.237			25.011.578.327
4.4.4.4.4.5.1.7.404	Program Manajemen Administrasi Pelayanan Umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah		100 persen	930.974.999		100 persen	5.217.000.000
4.4.4.4.4.5.1.7.404.1	Pengelolaan Surat Menyurat, Kearsipan dan Bahan Pustaka	Jumlah Surat yang dikelola	BADAN PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	BPPKAD	8000 surat	43.000.000	8000 surat	77.000.000
		Jumlah Arsip yang dikelola					1 paket	
4.4.4.4.4.5.1.7.404.2	Penyelenggaraan Koordinasi dan Konsultasi Perangkat Daerah	Jumlah Perjalanan Dinas luar daerah yang terlaksana	BADAN PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	BPPKAD	110 kali	201.225.000	110 kali	400.000.000
		Jumlah rapat koordinasi yang diselenggarakan					72 kali	
		Jumlah Perjalanan Dinas dalam daerah yang terlaksana					30 kali	
4.4.4.4.4.5.1.7.404.3	Pengadaan dan Pengelolaan Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya	Jumlah paket pengadaan perlengkapan gedung kantor	BADAN PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	BPPKAD	1 paket	0	1 paket	400.000.000
		Jumlah paket pengadaan peralatan gedung kantor					1 paket	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
4.4.4.4.4.5.1.7.404.4	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya	Luas gedung kantor yang dipelihara	BADAN PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	BPPKAD	2243 m2	293.000.000	2243 m2	480.000.000
		Jumlah rekening/tagihan yang dibayar			8 rekening/tagihan		8 rekening/tagihan	
4.4.4.4.4.5.1.7.404.5	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya	Jumlah pemeliharaan peralatan gedung kantor	BADAN PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	BPPKAD	12 bulan	393.749.999	12 bulan	1.100.000.000
		Jumlah pemeliharaan perlengkapan kantor			12 bulan		12 bulan	
		Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas			12 bulan		12 bulan	
		Jumlah aplikasi pendukung smart city			7 aplikasi		7 aplikasi	
4.4.4.4.4.5.1.7.404.6	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya	Jumlah paket rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	BADAN PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	BPPKAD	1 paket	0	1 paket	0
4.4.4.4.4.5.1.7.404.7	Peningkatan Kapasitas dan Disiplin Aparatur Sipil Negara	Jumlah ASN yang dibina	BADAN PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	BPPKAD	60 orang	0	60 orang	360.000.000
		Frekuensi pembinaan ASN			1 kali		1 kali	
		Jumlah JFT yang terfasilitasi angka kreditnya			5 orang		5 orang	
4.4.4.4.4.5.1.7.404.8	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah pengadaan kendaraan dinas	BADAN PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	BPPKAD	1 unit	0	1 unit	400.000.000
4.4.4.4.4.5.1.7.404.9	Pengadaan Tanah	Jumlah pengadaan tanah	BADAN PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	BPPKAD	1 lokasi	0	1 lokasi	2.000.000.000

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
4.4.4.4.4.5.1.8.404	Program Perencanaan, Keuangan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian perencanaan, evaluasi kinerja OPD, dan keuangan perangkat daerah			100 persen	240.831.000		100 persen	331.000.000
4.4.4.4.4.5.1.8.404.1	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah kegiatan yang dikelola	BADAN PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	BPPKAD Kab. Magelang	36 kegiatan	228.866.000		36 kegiatan	235.000.000
4.4.4.4.4.5.1.8.404.2	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen rencana strategis perangkat daerah yang tersusun	BADAN PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	BPPKAD	1 dokumen	6.965.000		1 dokumen	19.000.000
		Jumlah dokumen rencana kerja perangkat daerah yang tersusun			2 dokumen			2 dokumen	
4.4.4.4.4.5.1.8.404.3	Penyusunan Laporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen laporan tahunan yang tersusun	BADAN PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	BPPKAD	4 dokumen	5.000.000		4 dokumen	62.000.000
		Persentase peningkatan pelayanan data berbasis website			100 persen			100 persen	
		Jumlah dokumen laporan tribulanan yang tersusun			2 dokumen			2 dokumen	
		Jumlah dokumen laporan bulanan yang tersusun			3 dokumen			3 dokumen	
		Jumlah Dokumen Profil Perangkat Daerah yang tersusun			1 Dokumen			1 Dokumen	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
4.4.4.4.4.5.1.8.404.4	Penyusunan Dokumen Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Perangkat Daerah	Jumlah SOP yang tersusun	BADAN PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	BPPKAD	1 SOP	0	1 SOP	15.000.000
		Jumlah dokumen SP yang tersusun			1 dokumen		1 dokumen	
		Jumlah Daftar Informasi yang tersusun			1 dokumen		1 dokumen	
		Jumlah dokumen Rencana Tindak Pengendalian yang tersusun			1 dokumen		1 dokumen	
		jumlah dokumen data perangkat daerah yang tersusun			1 dokumen		1 dokumen	
4.4.4.4.4.5.1.18.404	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase kenaikan Pajak			11,28 persen	7.018.003.713	11,28 persen	9.799.363.994
		Persentase kenaikan retribusi			-16,15 persen		-16,15 persen	
		Persentase penyelesaian penagihan atas ketetapan pajak daerah			100 persen		100 persen	
4.4.4.4.4.5.1.18.404.1	Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah pelaksanaan rapat evaluasi pendapatan	BADAN PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	BPPKAD	4 kali rakor	752.276.180	4 kali rakor	1.150.000.000
		jumlah piket pos pare			4212 kali		4212 kali	
		Jumlah laporan kajian potensi pendapatan daera			1 dokumen		1 dokumen	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
4.4.4.4.4.5.1.18.404.2	Pendataan dan Pendaftaran Obyek dan Subyek Pajak	Jumlah wajib pajak daerah di Kabupaten Magelang	BADAN PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	kabupaten magelang	182 wajib pajak selain BPHTB, Gol C dan Katering	835.000.000	182 wajib pajak selain BPHTB, Gol C dan Katering	934.999.994
		Jumlah obyek pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan			1.044.773 OP dan paket kegiatan pembentukan basis data sismiop		1.044.773 OP dan paket kegiatan pembentukan basis data sismiop	
		Jumlah kegiatan pembentukan basis data sismiop			1 paket		1 paket	
4.4.4.4.4.5.1.18.404.3	Pengelolaan Penetapan Pajak dan Retribusi Daerah	Jumlah Ketetapan Pajak Dan Retribusi Daerah	BADAN PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	BPPKAD	11 10 pajak dan 1 retribusi	54.560.000	11 10 pajak dan 1 retribusi	85.932.000
4.4.4.4.4.5.1.18.404.4	Penerbitan SPPT dan DHKP	Jumlah SPPT DAN DHKP PBB P2	BADAN PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	BPPKAD	372 desa dan kelurahan	111.498.333	372 desa dan kelurahan	175.596.000
4.4.4.4.4.5.1.18.404.5	Sosialisasi Pajak Dan Retribusi Daerah	Jumlah jenis pajak dan retribusi daerah yang tersampaikan	BADAN PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	BPPKAD	11 10 pajak dan 1 retribusi	868.563.000	11 10 pajak dan 1 retribusi	1.302.500.000
		Jumlah media promosi			1 paket		1 paket	
4.4.4.4.4.5.1.18.404.6	Pemungutan dan Intensifikasi PAD dan PBB	Jumlah pelaksanaan intensifikasi pendapatan asli daerah dan pbb sewilayah kab magelang	BADAN PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	BPPKAD	21 kecamatan	908.736.000	21 kecamatan	1.573.000.000
4.4.4.4.4.5.1.18.404.7	Pengelolaan Administrasi Pemungutan Pajak Daerah	Jumlah pengelolaan administrasi PBB di kab Magelang	BADAN PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	BPPKAD	21 kecamatan	3.324.512.200	21 kecamatan	4.320.040.000
4.4.4.4.4.5.1.18.404.8	Penyelesaian Pajak dan Retribusi Daerah	Jumlah Ketetapan Pajak Dan Retribusi Daerah	BADAN PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	BPPKAD	21 kecamatan	162.858.000	21 kecamatan	257.296.000

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
4.4.4.4.4.5.1.19.404	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Tahapan Penganggaran yang dilakukan tepat waktu			100 persen	4.492.071.810		100 persen	6.564.566.593
		Persentase serapan APBD			100 persen			100 persen	
		Persentase penerimaan pendapatan di RKUD			100 persen			100 persen	
		Penerapan SAP berbasis akrual yang baik dan benar			100 persen			100 persen	
4.4.4.4.4.5.1.19.404.1	Penyusunan Peraturan tentang Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah Perbup Analisa Standar Belanja	BADAN PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	BPPKAD	1 perbup	200.000.000		1 perbup	485.150.996
		Jumlah Sisdur pengelolaan keuangan daerah			1 perbup			1 perbup	
		Jumlah peraturan pengelolaan keuangan daerah			1 perda/ perbup			1 perda/ perbup	
4.4.4.4.4.5.1.19.404.2	Penilaian RKA dan Pergeseran Anggaran	Jumlah penilaian RKA OPD RAPBD, Perubahan RAPBD	BADAN PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	BPPKAD	50 48 OPD dan 1 PPKD	300.165.635		50 48 OPD dan 1 PPKD	849.600.000
		Jumlah pergeseran anggaran			30 Usulan			30 Usulan	
4.4.4.4.4.5.1.19.404.3	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Perubahan APBD	Jumlah Raperda dan Raperbup tentang APBD dan Perubahan APBD	BADAN PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	BPPKAD	2 Raperda dan Raperbup	1.071.153.375		2 Raperda dan Raperbup	1.996.840.000
		Jumlah penyusunan E-Budgeting			1 paket			1 paket	
		Jumlah pelaksanaan sosialisasi pedoman penyusunan APBD			1 kali			1 kali	
4.4.4.4.4.5.1.19.404.4	Penelitian DPA/DPPA-SKPD	Jumlah penelitian DPA-OPD APBD, DPA/DPPA OPD Perubahan APBD	BADAN PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	BPPKAD	50 48 OPD dan 1 PPKD	240.000.000		50 48 OPD dan 1 PPKD	516.220.000

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
4.4.4.4.4.5.1.19.404.5	Pengelolaan Kas Daerah	Pelayanan pencairan dana tepat waktu	BADAN PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	BPPKAD	49 48 OPD dan 1 PPKD	634.850.500	49 48 OPD dan 1 PPKD	297.383.600
4.4.4.4.4.5.1.19.404.6	Pengendalian Perbendaharaan	Jumlah Laporan Pendapatan dan Belanja	BADAN PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	BPPKAD	48 laporan	45.000.000	48 laporan	163.220.000
4.4.4.4.4.5.1.19.404.7	Pengumpulan dan Pengolahan Data dalam rangka SAKD	Jumlah Data laporan keuangan	BADAN PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	Kab. Magelang	49 48 OPD dan 1 PPKD	372.800.000	49 48 OPD dan 1 PPKD	439.999.997
4.4.4.4.4.5.1.19.404.8	Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Laporan Keuangan	BADAN PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	BPPKAD	20 1 Perda, 1 Perbup, 2 Laporan Keuangan Triwulan, 1 Laporan Keuangan Semester, 1 Prognosis, 7 laporan Keuangan Unaudited dan 7 Laporan Keuangan Audited	519.948.000	20 1 Perda, 1 Perbup, 2 Laporan Keuangan Triwulan, 1 Laporan Keuangan Semester, 1 Prognosis, 7 laporan Keuangan Unaudited dan 7 Laporan Keuangan Audited	795.000.000
4.4.4.4.4.5.1.19.404.9	Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah paket buku	BADAN PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	BPPKAD	4 paket buku	1.108.154.300	4 paket buku	1.021.152.000
4.4.4.4.4.5.1.20.404	Program Pengelolaan Aset Daerah	Persentase PD tertib administrasi Pengelolaan BMD (Barang Milik Daerah/Aset)			100 persen	4.369.418.715	100 persen	3.099.647.740
4.4.4.4.4.5.1.20.404.1	Pembinaan, Pengelolaan, Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Daerah	Jumlah peserta pembinaan	BADAN PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	BPPKAD	300 orang	558.515.500	300 orang	1.430.000.000
		Jumlah Pengawasan dan pengendalian barang milik daerah			48 OPD		48 OPD	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
4.4.4.4.4.5.1.20.404.2	Penyusunan Peraturan Barang Milik Daerah dan Penyusunan RKBMD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik daerah	BADAN PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	BPPKAD	2 dokumen	103.000.000	2 dokumen	170.610.000
		Jumlah peraturan barang milik daerah			1 peraturan		1 peraturan	
4.4.4.4.4.5.1.20.404.3	Manajemen Pengelolaan BMD	Jumlah Manajemen Pengelolaan BMD	BADAN PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	BPPKAD Kab. Magelang	48 OPD	3.337.377.000	48 OPD	789.941.000
		Jumlah Papan nama milik Pemda			50 Papan Nama		50 Papan Nama	
4.4.4.4.4.5.1.20.404.4	Penyusunan Kajian Investasi	Jumlah Analisa Kajian Investasi dan Rancangan perjanjian kerjasama dengan investor	BADAN PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	BPPKAD	1 dokumen	0	1 dokumen	119.327.000
4.4.4.4.4.5.1.20.404.5	Pengolahan Data Barang Milik Daerah	Jumlah dokumen pengelolaan data BMD	BADAN PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	BPPKAD	4 dokumen	341.326.215	4 dokumen	519.769.740
4.4.4.4.4.5.1.20.404.6	Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TPTGR)	Jumlah laporan	BADAN PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	BPPKAD	2 laporan	29.200.000	2 laporan	70.000.000
Total						17.051.300.237		25.011.578.327

PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH

KABUPATEN MAGELANG

TAHUN 2021

Nama Perangkat Daerah : BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
4	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang				5.227.501.525			10.438.011.000	
4.5	Kepegawaian				5.227.501.525			10.438.011.000	
4.5.4.5.4.5.34.1.7.405	Program Manajemen Administrasi Pelayanan Umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah			100 %	289.722.250		100 %	664.106.500
4.5.4.5.4.5.34.1.7.405.1	Pengelolaan Surat Menyurat, Kearsipan dan Bahan Pustaka	Jumlah surat yang dikelola	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH	BKPPD KAB. MAGELANG	10000 surat	31.487.000		10000 surat	47.000.000
		Jumlah arsip yang dikelola			10000 dokumen			10000 dokumen	
		Jumlah bahan pustaka yang dikelola			20 buku			20 buku	
4.5.4.5.4.5.34.1.7.405.2	Penyelenggaraan Koordinasi dan Konsultasi Perangkat Daerah	Jumlah perjalanan dinas luar daerah yang terlaksana	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH	BKPPD KAB. MAGELANG	127 perjalanan	105.520.000		127 perjalanan	248.345.000
		Jumlah rapat koordinasi yang diselenggarakan			4 rapat			4 rapat	
		Jumlah perjalanan dinas dalam daerah yang terlaksana			81 perjalanan			81 perjalanan	
4.5.4.5.4.5.34.1.7.405.3	Pengadaan dan Pengelolaan Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya	Jumlah paket pengadaan perlengkapan gedung kantor	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH	BKPPD	0 paket	0		0 paket	65.000.000
		Jumlah paket pengadaan peralatan gedung kantor			0 paket			0 paket	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
4.5.4.5.4.5.34.1.7.405.4	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH	BKPPD	1 unit	13.783.000	1 unit	22.498.000
		Jumlah rekening telepon dan surat kabar			24 rekening		24 rekening	
4.5.4.5.4.5.34.1.7.405.5	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya	Jumlah peralatan yang dipelihara	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH	BKPPD	19 unit	138.932.250	19 unit	281.263.500
		Jumlah perlengkapan yang dipelihara			17 buah		17 buah	
		Jumlah kendaraan dinas roda empat yang dipelihara			6 kendaraan		6 kendaraan	
		Jumlah kendaraan dinas roda dua yang dipelihara			11 kendaraan		11 kendaraan	
4.5.4.5.4.5.34.1.8.405	Program Perencanaan, Keuangan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian perencanaan, evaluasi kinerja dan keuangan perangkat daerah			100 %	49.307.675	100 %	65.000.000
4.5.4.5.4.5.34.1.8.405.1	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah kegiatan yang dikelola	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH	BKPPD	23 kegiatan	39.519.175	23 kegiatan	45.000.000
		Jumlah laporan keuangan yang tersusun			14 laporan		14 laporan	
4.5.4.5.4.5.34.1.8.405.2	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Renstra Perangkat Daerah yang tersusun	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH	BKPPD	0 dokumen	6.633.000	0 dokumen	10.000.000
		Jumlah dokumen Renja Perangkat Daerah yang tersusun			2 dokumen		2 dokumen	
4.5.4.5.4.5.34.1.8.405.3	Penyusunan Laporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen pelaporan tahunan yang tersusun	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH	BKPPD	5 dokumen	3.155.500	5 dokumen	10.000.000
		Jumlah dokumen monitoring , evaluasi, dan pelaporan tribulanan yang tersusun			8 dokumen		8 dokumen	
		Jumlah dokumen pelaporan bulanan yang tersusun			12 dokumen		12 dokumen	
		Jumlah dokumen evaluasi jangka menengah yang tersusun			2 dokumen		2 dokumen	
		Jumlah Dokumen Profil Perangkat Daerah yang tersusun			1 Dokumen		1 Dokumen	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
			Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
4.5.4.5.4.5.34.1.32.405	Program Informasi dan Pengadaan Pegawai	Persentase kelengkapan dokumen kepegawaian dalam SIMPEG			75 %	955.445.600		75 %	1.314.904.500
		Persentase keterisian formasi pegawai			75,10 %			75,10 %	
4.5.4.5.4.5.34.1.32.405.1	Pengelolaan Kebutuhan Formasi	Jumlah dokumen yang disusun	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH	BKPPD	1 dokumen	0		1 dokumen	100.000.000
4.5.4.5.4.5.34.1.32.405.2	Validasi Database Kepegawaian ASN	Jumlah ASN yang diupdate database kepegawaiannya	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH	BKPPD	9228 ASN	0		9228 ASN	274.904.500
		Jumlah ASN yang diupdate dokumen kepegawaiannya			9228 ASN			9228 ASN	
4.5.4.5.4.5.34.1.32.405.3	Pengelolaan Manajemen Pengadaan dan Pelayanan ASN	Jumlah penetapan formasi Calon ASN	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH	BKPPD Kab. Magelang	575 formasi	955.445.600		575 formasi	890.000.000
		Jumlah usulan karpeg/karis/karsu dan taspen yang terselesaikan			1350 kartu			1350 kartu	
		Jumlah layanan mutasi			50 mutasi			50 mutasi	
4.5.4.5.4.5.34.1.32.405.4	Pengangkatan CPNS menjadi PNS	Jumlah CPNS menjadi PNS	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH	BKPPD	479 CPNS	0		479 CPNS	50.000.000
4.5.4.5.4.5.34.1.33.405	Program Pengembangan Sumber Daya Aparatur	Persentase ASN yang lulus diklat			100 %	3.701.135.000		100 %	7.679.000.000
		Persentase ASN yang meningkat kualifikasinya			9,70 %			9,70 %	
		Persentase keterisian Jabatan Pimpinan Tinggi, Administrator dan Pengawas			82 %			82 %	
		Persentase ASN yang terevaluasi kinerjanya			79 %			79 %	
4.5.4.5.4.5.34.1.33.405.1	Pengelolaan Diklat Dasar dan Penjurangan	Jumlah ASN yang mengikuti Pelatihan dasar	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH	BKPPD Kab Magelang	350 ASN	3.200.000.000		350 ASN	4.183.000.000
		Jumlah ASN yang mengikuti Diklat Kepemimpinan			19 ASN			19 ASN	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
4.5.4.5.4.5.34.1.33.405.2	Pengembangan kompetensi kualifikasi pendidikan ASN dan Sertifikasi	Jumlah ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi kualifikasi ASN	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH	BKPPD Kab. Magelang	300 ASN	0		300 ASN	225.000.000
		Jumlah peserta ujian			50 PNS			50 PNS	
4.5.4.5.4.5.34.1.33.405.3	Pengiriman Peserta Diklat Teknis dan Fungsional	Jumlah ASN yang mendapatkan Diklat Teknis, Fungsional, Sosial kultural dan Pemerintahan	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH	BKPPD Kab. Magelang	91 ASN	0		91 ASN	1.676.000.000
4.5.4.5.4.5.34.1.33.405.4	Penataan ASN	Jumlah mutasi/promosi/penugasan pejabat ASN	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH	BKPPD	240 ASN	451.135.000		240 ASN	970.000.000
4.5.4.5.4.5.34.1.33.405.5	Pengelolaan Penilaian Kinerja ASN	Jumlah ASN yang terevaluasi kinerjanya	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH	BKPPD	9228 ASN	0		9228 ASN	200.000.000
4.5.4.5.4.5.34.1.33.405.6	Fasilitasi Kepangkatan	Jumlah SK KP yang terbit	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH	BKPPD	1500 SK KP	50.000.000		1500 SK KP	125.000.000
		Jumlah SK PMK yang terbit			50 SK PMK			50 SK PMK	
		Jumlah SP KGB yang terbit			4500 SP KGB			4500 SP KGB	
4.5.4.5.4.5.34.1.33.405.7	Pengembangan Jabatan fungsional	Jumlah pejabat fungsional yang dikembangkan	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH	BKPPD	750 ASN	0		750 ASN	100.000.000
4.5.4.5.4.5.34.1.33.405.8	Penyelenggaraan Bintek	Jumlah ASN yang mengikuti bimbingan teknis	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH	BKPPD	226 ASN	0		226 ASN	200.000.000
4.5.4.5.4.5.34.1.34.405	Program Kesejahteraan dan Pembinaan Pegawai	Persentase pembinaan ASN			0,40 %	231.891.000		0,40 %	715.000.000
		Persentase ASN yang mendapat layanan administrasi kesejahteraan ASN			100 %			100 %	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
4.5.4.5.4.5.34.1.34.405.1	Fasilitasi Pemberhentian ASN	Jumlah PNS yang terlayani pemberhentiannya	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH	BKPPD	572 PNS	50.000.000		572 PNS	80.000.000
		Jumlah PNS yang terlayani klaim taspennya			572 PNS			572 PNS	
4.5.4.5.4.5.34.1.34.405.2	Fasilitasi Layanan Kesejahteraan dan Penghargaan ASN	Jumlah SKPD yang tercetak daftar gajinya	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH	BKPPD	48 SKPD	146.891.000		48 SKPD	200.000.000
		Jumlah PNS yang diusulkan tanda penghargaan Satyalancana			90 PNS			90 PNS	
		Jumlah ASN yang terlayani kesejahteraannya			9228 ASN			9228 ASN	
4.5.4.5.4.5.34.1.34.405.3	Penegakan Disiplin ASN	Jumlah instansi yang dimonitor kedisiplinannya	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH	BKPPD	48 SKPD	0		48 SKPD	310.000.000
		jumlah ASN yang diuji kesehatannya			10 PNS			10 PNS	
		Jumlah wajib LHKPN yang melaporkan LHKPN tepat waktu			186 wajib LHKPN			186 wajib LHKPN	
4.5.4.5.4.5.34.1.34.405.4	Penanganan Kasus- Kasus Kepegawaian	Jumlah kasus yang diproses	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH	BKPPD	40 kasus	35.000.000		40 kasus	125.000.000
Total						5.227.501.525			10.438.011.000

6.3. Pemetaan Program dan Kegiatan

Berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah bahwa penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah menggunakan Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur sebagaimana telah diatur dalam Peraturan tersebut.

Selanjutnya mempedomani ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan APBD TA 2021, mengingat bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah belum sesuai dengan ketentuan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, maka dalam Buku II disajikan hasil pemetaan program dan kegiatan sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019.

Hasil pemetaan program dan kegiatan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2021.

BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

7.1. Indikator Kinerja Utama Daerah Tahun 2021

Dalam rangka upaya pencapaian prioritas pembangunan daerah tahun 2021, maka ditetapkan target pada indikator kinerja utama daerah tahun 2021 sebagai berikut.

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Utama Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2021

No	Indikator Kinerja Utama Daerah	Rumusan Indikator	Satuan	Kondisi Awal Kinerja		Target Capaian Tahun 2021	Perangkat Daerah Koordinator
				2018	2019		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	rata-rata sederhana dari indeks harapan hidup (e_0), indeks pendidikan (angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah), dan indeks standar hidup layak	angka (0-100)	69,11	69,34	69,82	Sekretariat Daerah
2	Inflasi	Persentase kenaikan harga secara umum dan terus menerus dalam jangka waktu tertentu	persen	2,66	2,5-4,0	3,0±1	Sekretariat Daerah
3	Pengeluaran per kapita riil yang disesuaikan	kemampuan masyarakat dalam membelanjakan uangnya dalam bentuk barang maupun jasa.	ribu rupiah	9.025,00	9.262,68	9.762,42	Sekretariat Daerah
4	Angka Kemiskinan	persentase penduduk yang berada dibawah Garis Kemiskinan (GK)	persen	11,23	10,08-11,08	12,44-11,52	Sekretariat Daerah

No	Indikator Kinerja Utama Daerah	Rumusan Indikator	Satuan	Kondisi Awal Kinerja		Target Capaian Tahun 2021	Perangkat Daerah Koordinator
				2018	2019		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
5	Indeks Pembangunan Gender	indeks pencapaian kemampuan dasar pembangunan manusia yang memperhatikan ketimpangan gender	angka (0-100)	92,23	92,91	93,31	Sekretariat Daerah
6	Laju Pertumbuhan Ekonomi	Persentase pertumbuhan produksi barang dan jasa di suatu wilayah perekonomian dalam selang waktu tertentu.	persen	5,06*	5-5,5	3,3-4,3	Sekretariat Daerah
7	PDRB Per Kapita	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dibagi dengan jumlah penduduk	juta rupiah	23,70*	25,20	28,21	Sekretariat Daerah
8	Cakupan Pembangunan Infrastruktur Wilayah Berkelanjutan	(Persentase ketercapaian IKLH+Indeks pembangunan infrastruktur wilayah)/2	persen	64,24	66,86	72,98	Sekretariat Daerah
9	Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)	Peraturan Menteri PAN-RB No. 14 Th. 2014 ttg Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah	persen	56,45	63,82	67,25	Sekretariat Daerah

Di samping indikator tujuan pembangunan daerah yang menjadi indikator kinerja utama daerah kabupaten Magelang, tabel berikut ini menyajikan indikator sasaran daerah Kabupaten Magelang Tahun 2021.

Tabel 7.2
Indikator Sasaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2021

No	Indikator Kinerja Utama Daerah	Rumusan Indikator	Satuan	Kondisi Awal Kinerja		Target Capaian Tahun 2021	Perangkat Daerah Koordinator
				2018	2019		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Rata-rata Lama Sekolah	Lama sekolah (tahun) penduduk usia 15 tahun ke atas.	tahun	7,57	7,72	8,00	Disdikbud
2	Harapan Lama Sekolah	Lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang.	tahun	12,48	12,67	12,92	Disdikbud
3	Persentase SD & SMP yang berakreditasi minimal B	$((\text{Jumlah SD berakreditasi minimal B} / \text{Jumlah SD}) * 100\% + (\text{jumlah SMP berakreditasi minimal B} / \text{Jumlah SMP}) * 100\%) / 2$	persen	93,86	93,89	94,79	Disdikbud
4	Angka Harapan Hidup	Rata-rata lamanya hidup sejak lahir yang dicapai oleh sekelompok penduduk (BPS)	tahun	73,47	73,52	73,61	Dinkes
5	Cakupan Pembangunan Infrastruktur Wilayah	$(\text{Cakupan pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan penataan ruang} + \text{Cakupan pembangunan infrastruktur perhubungan}) / 2$	persen	56,55	61,63	73,81	DPUPR
6	Cakupan hunian layak dan berkualitas	$(\text{Persentase ketersediaan rumah layak huni} + \text{persentase kawasan permukiman berkualitas}) / 2$	persen	44,00	58,89	68,66	DPRKP

No	Indikator Kinerja Utama Daerah	Rumusan Indikator	Satuan	Kondisi Awal Kinerja		Target Capaian Tahun 2021	Perangkat Daerah Koordinator
				2018	2019		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
7	Cakupan ketentraman dan ketertiban masyarakat	(Cakupan penegakan hukum+Cakupan ketangguhan daerah menghadapi bencana+Cakupan peningkatan wawasan kebangsaan dan politik masyarakat)/3	persen	-	81,38	83,62	Satpol PP dan PK, Kesbangpol, BPBD
8	Indeks Pemberdayaan Gender	Indeks yang tersusun dari komponen sebagai berikut: Ipar= Indek keterwakilan perempuan di parlemen; IDM=Indek pengambilan keputusan, dan Linc-dist=indek distribusi pendapatan.	angka (0-100)	62,43	69,03	69,63	Dinsos PPKB PPPA
9	Persentase penurunan PMKS	(Jumlah PMKS tahun n - jumlah PMKS tahun 2018 (BDT 2018))*100%	persen	0,57	0,58	0,58	Dinsos PPKB PPPA
10	Kategori Kabupaten Layak Anak	Kategori Kabupaten Layak Anak dari Kementrian PPPA	Kategori	madya	madya	nindya	Dinsos PPKB PPPA
11	Tingkat Pengangguran Terbuka	Perbandingan penduduk yang mencari kerja terhadap angkatan kerja	persen	2,91	2,4-3,0	4,54-5,17	Disperinnaker
12	Nilai PDRB sektor industri pengolahan	Nilai PDRB sektor industri pengolahan tahun n	miliar rupiah	6.666,21*	7.157,40	8.139,80	Disperinnaker
13	Indeks ketahanan pangan	Indeks yang disusun berdasarkan tiga aspek ketahanan pangan, yaitu ketersediaan, keterjangkauan dan pemanfaatan pangan dengan mempertimbangkan ketersediaan data sampai dengan tingkat kabupaten	angka (0-100)	76,32	77,37	79,47	Distan dan Pangan
14	Nilai PDRB sektor pertanian, kehutanan dan perikanan	Nilai PDRB sektor pertanian, kehutanan dan perikanan tahun n	miliar rupiah	6.622,23*	6.997,70	7.748,63	Distan dan Pangan, Dispeterikan

No	Indikator Kinerja Utama Daerah	Rumusan Indikator	Satuan	Kondisi Awal Kinerja		Target Capaian Tahun 2021	Perangkat Daerah Koordinator
				2018	2019		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
15	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	$(IKA*30\%)+(IKU*30\%)+(IKTL*40\%)$	angka (0-100)	71,93	72,10	72,14	DLH
16	Indeks Desa Membangun	Indeks Komposit yang dibentuk dari Indeks Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi dan Indeks Ketahanan Ekologi Desa ($IDM = 1/3 (IKS + IKE + IKL)$)	angka (0-1)	0,66*	0,67	0,69	Dispermades
17	Indeks SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik)	Permen PANRB Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi SPBE	angka (0-5)	2,18	2,19-2,30	2,51-2,61	Diskominfo
18	Nilai PDRB sektor perdagangan	Nilai PDRB sektor perdagangan tahun n	miliar rupiah	4.189,74*	4.529,30	5.208,43	Disdagkop dan UKM
19	Nilai PDRB sektor pariwisata	Nilai PDRB sektor pariwisata tahun n	miliar rupiah	1.309,29*	1.416,24	1.630,14	Disparpora
20	Pertumbuhan Investasi	$((Investasi\ tahun\ n - Investasi\ tahun\ n-1)/Investasi\ tahun\ n-1) \times 100\%$	persen	0,92	5,00	5,00	DPMPPTSP
21	Nilai AKIP	Permenpan RB Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	angka (0-100) (huruf)	59,05 (CC)	61,04 (B)	65,02 (B)	Setda
22	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Permenpan RB nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik	angka (0-100)	82,01	82,74	83,75	Setda
23	Opini BPK	Hasil opini BPK	-	WTP	WTP	WTP	BPPKAD
24	Indek Sistem Merit	Permenpan RB 40/2018 tentang Pedoman Sistem Merit Dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara	angka (0-1)	-	0,49	0,6	BKPPD

No	Indikator Kinerja Utama Daerah	Rumusan Indikator	Satuan	Kondisi Awal Kinerja		Target Capaian Tahun 2021	Perangkat Daerah Koordinator
				2018	2019		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		dan KASN 5/2017 tentang Penilaian Mandiri Penerapan Sistem Merit dalam Manajemen ASN di Lingkungan Instansi Pemerintah					

7.2 Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah (IKU PD)

Indikator kinerja utama perangkat daerah merupakan indikator kinerja yang menjadi tanggung jawab Kepala Perangkat Daerah. Indikator ini berada pada level intermediate outcome, yang menghubungkan kinerja program dengan tujuan dan sasaran pembangunan daerah.

Tabel 7.3
Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2021

No	Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	Formula	Satuan	Kondisi Awal Kinerja		Target Capaian Tahun 2021	Kondisi kinerja pada akhir periode RPJMD
					2018	2019		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Disdikbud	Angka Partisipasi Kasar (APK)	(APK PAUD + APK SD/MI/Paket A + APK SMP/MTS/Paket B)/3	angka (0-100)	87,74	87,92	90,12	93,41
2	Disdikbud	Angka Partisipasi Murni (APM)	(APM SD/MI/Paket A + APM SMP/MTS/Paket B)/2	angka (0-100)	83,13	83,82	85,19	87,24
3	Disdikbud	Angka Partisipasi Sekolah (APS)**	(APS PAUD + APS SD/MI/Paket A + APS SMP/MTS/Paket B)/3	angka (0-100)	94,78	95,42	96,40	98,28
4	Disdikbud	Rerata Nilai UN	(Rerata Nilai UN SD + Rerata Nilai UN SMP)/2	angka (0-10)	6,61	6,64	6,71	6,81

No	Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	Formula	Satuan	Kondisi Awal Kinerja		Target Capaian Tahun	Kondisi kinerja pada akhir periode RPJMD
					2018	2019	2021	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
5	Disdikbud	Angka Kelulusan	(Angka Kelulusan SD+Angka kelulusan SMP)/2	angka (0-100)	99,88	99,90	99,94	100
6	Disdikbud	Cakupan pengelolaan kebudayaan	((Persentase Benda Situs dan Kawasan cagar Budaya yang dilestarikan)+(Persentase Karya Budaya yang Terlayani)+(Persentase Kelompok Seni Budaya yang Aktif))/3	persen	31,44	32,26	33,31	34,6
7	Dinkes	Persentase Kualitas pelayanan kesehatan	(Jumlah FKTP/FKTL/Lab yang terakreditasi)/(Jumlah FKTP/FKTL/Lab yang ada)* 100persen	persen	10	15	30	45
8	Dinkes	Angka kesakitan	Jumlah penderita baru yang ditemukan pada tahun n dibandingkan dengan jumlah penduduk pada tahun n	persen	41,58	41,52	40,87	39,93
9	Dinkes	Jumlah Kematian Ibu	Jumlah ibu hamil yang meninggal karena hamil, bersalin, dan nifas selama 1 tahun	jumlah kasus	6	6	6	6
10	Dinkes	Angka Kematian Bayi (AKB);	(Jumlah Kematian Bayi (berumur kurang 1 tahun) pada satu tahun tertentu / Jumlah Kelahiran Hidup pada satu tahun tertentu) x 1000 KH	per 1000 KH	5,72	5,71	5,69	5,66
11	Dinkes	Angka Kematian Balita (AKABa);	(Jumlah Kematian Bayi (berumur kurang 5 tahun) pada satu tahun tertentu/Jumlah Kelahiran Hidup pada satu tahun tertentu) x 1000 KH	per 1000 KH	6,70	6,69	6,67	6,64
12	Dinkes	Angka Kematian Neonatal (AKN)	(Jumlah Kematian Bayi (berumur kurang 1 bulan) pada satu tahun tertentu / Jumlah Kelahiran Hidup pada satu tahun tertentu) x 1000 KH	per 1000 KH	4	3,99	3,97	3,94

No	Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	Formula	Satuan	Kondisi Awal Kinerja		Target Capaian Tahun	Kondisi kinerja pada akhir periode RPJMD
					2018	2019	2021	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
13	Dinkes	Kualitas puskesmas dan rumah sakit	(Jumlah Puskesmas/RS yang berkualitas)/(jumlah Puskesmas/RS yang ada)* 100%	persen	50	55	65	80
14	RSUD Muntilan	Predikat Kelulusan Akreditasi Rumah Sakit	Permenkes 34 2017 tentang akreditasi RS	Akreditasi (dasar, madya, utama, paripurna)	Madya (Bintang 3)	Paripurna (Bintang 5)	Paripurna (Bintang 5)	Paripurna (Bintang 5)
15	DPUPR	Cakupan Pembangunan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan penataan ruang	{{Cakupan Peningkatan jalan dan bangunan pelengkap jalan + Persentase jalan dan bangunan pelengkap jalan dalam kondisi baik + cakupan layanan jaringan irigasi + Cakupan layanan Sumber Daya Air + Cakupan pembangunan gedung pemerintah dan publik + Cakupan bangunan gedung pemerintah dalam kondisi baik + Persentase terbangunnya landmark + Cakupan layanan air minum + Cakupan layanan sanitasi air limbah domestik + Cakupan sarana prasarana ke-PU-an + cakupan layanan Jasa konstruksi + Persentase dokumen rekomendasi perijinan + Persentase kesesuaian tata ruang + Cakupan kinerja pertanahan }/14}	persen	57,83	60,97	72	92,27
16	DPRKP	Persentase ketersediaan rumah layak huni	{{(Persentase peningkatan rumah layak huni + Persentase fasilitasi penyediaan rumah bagi MBR+Persentase penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana+Persentase fasilitasi penyediaan rumah bagi warga terdampak proyek pemerintah+Persentase Penanganan PSU Perumahan)/5} x 100%	persen	35,05	61,14	73,74	91,63

No	Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	Formula	Satuan	Kondisi Awal Kinerja		Target Capaian Tahun	Kondisi kinerja pada akhir periode RPJMD
					2018	2019	2021	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
17	DPRKP	Persentase kawasan permukiman berkualitas	$\{(\text{persentase penangan kawasan permukiman kumuh} + \text{persentase pengendalian kawasan permukiman} + \text{persentase penyediaan TPU} + \text{persentase penanganan PSU Permukiman}) / 4\} \times 100\%$	persen	52,96	56,63	63,98	100
18	Satpol PP dan PK	Cakupan penegakan hukum	$\{ ((\text{jml penindakan} / \text{jml pelanggaran}) * 100\%) + ((\text{jml penertiban} / (\text{jml target perencanaan penertiban} + \text{jml aduan})) * 100\%) + ((\text{jml satlinmas yang aktif} / \text{jml satlinmas kabupaten}) * 100\%) + (((\text{jml pengamanan} / \text{target pengamanan}) * 100\%) + (\text{jml pengawalan} / \text{jml permintaan pengawalan}) * 100\%) / 2) + (\text{jml layanan pemadaman, penyelamatan dna evakuasi korban dan terdampak kebakaran dalam tingkat waktu tanggap} / \text{jml kebakaran}) * 100\% \} / 4$	persen	-	83,34	85,70	89,68
19	BPBD	Cakupan ketangguhan daerah menghadapi bencana	$((\text{jml penduduk di Kawasan rawan bencana yang mendapat informasi bencana} / \text{jml penduduk di kawasan rawan bencana}) * 100\%) + ((\text{jml desa tangguh bencana} / \text{jml desa rawan bencana}) * 100) + ((\text{jml penanganan tanggap darurat yg dilakukan} / \text{jml sasaran dampak bencana yg harus dilakukan tanggap bencana}) * 100) + ((\text{jml kejadian bencana yg direkomendasikan rehabilitasi dan rekonstruksi} / \text{jml kejadian bencana yg harus dilakukan rehabilitasi dan rekontruksi}) * 100) / 4$	persen	42,03	61,80	65,84	73,78

No	Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	Formula	Satuan	Kondisi Awal Kinerja		Target Capaian Tahun	Kondisi kinerja pada akhir periode RPJMD
					2018	2019	2021	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
20	Kesbangpol	Cakupan peningkatan wawasan kebangsaan dan politik masyarakat	$((\text{Jml ormas, LSM dan OKP yg aktif tahun } n - \text{Jml ormas, LSM dan OKP yg aktif tahun } n-1) / \text{Jml ormas, LSM dan OKP yg tercatat tahun } n-1) + (\text{Jml konflik sosial tertangani tahun } n - \text{Jml konflik sosial tertangani tahun } n-1) / \text{Jml konflik sosial tahun } n) + (\text{Jumlah kegiatan pembinaan politik tahun } n - \text{Jumlah kegiatan pembinaan politik tahun } n-1) / \text{Jumlah kegiatan tahun } n-1) / 3$	persen	80	99,00	99,33	99,83
21	Dinsos PPKB PPPA	Cakupan penanganan PMKS	$\{(\text{Persentase PMKS yang tertangani} + \text{Persentase PSKS yang berperan dalam penanganan PMKS}) / 2\} \times 100\%$	persen	46,32	46,86	48,04	49,8
22	Dinsos PPKB PPPA	Cakupan Pemberdayaan perempuan	$((\text{Perempuan di lembaga legeslatif} + \text{peningkatan perempuan yang mendapatkan pendampingan menjadi pelaku usaha ekonomi} + \text{PD yang melaksanakan perencanaan penganggaran responsif gender (PPRG)}) / (\text{jumlah jabatan di legislatif} + \text{jumlah pekerja perempuan} + \text{jumlah PD})) \times 100$	persen	64,9	66,46	66,69	67,22
23	Dinsos PPKB PPPA	Rasio kekerasan	$(\text{jumlah kasus ditangani} / \text{jumlah rumah tangga}) \times 100\%$	persen	0,03	0,03	0,02	0,02
24	Dinsos PPKB PPPA	Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	Angka yang menunjukkan tingkat pertumbuhan penduduk pertahun dalam jangka waktu tertentu.	persen	0,79	0,76	0,71	0,65
25	Dinsos PPKB PPPA	Persentase keluarga Pra Sejahtera	$(\text{Jumlah Keluarga Pra sejahtera} / \text{Jumlah keluarga}) \times 100\%$	persen	21,23	20,69	19,61	18

No	Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	Formula	Satuan	Kondisi Awal Kinerja		Target Capaian Tahun	Kondisi kinerja pada akhir periode RPJMD
					2018	2019	2021	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
26	Disperinnaker	Indeks Produktivitas tenaga kerja	nilai PDRB/Total angkatan kerja yang bekerja	rupiah	30.328.586	31.021.506	31.194.768	31.512.510
27	Disperinnaker	Persentase Pertumbuhan Industri	((jumlah industri tahun n-jumlah industri tahun (n-1)) / (jumlah industri s/d tahun n)) x 100%	persen	2,10	2,21	2,39	12,16
28	Distan dan Pangan	Ketersediaan pangan utama beras	(Rata2 jumlah ketersediaan pangan utama beras per Tahun/Jumlah Penduduk)	kg/jiwa /tahun	212,65	211,91	210,66	208,99
29	Distan dan Pangan	Stabilitas harga pangan	inflasi harga bahan pangan pokok (BPS)	persen	93,95	93,96	93,98	94,3
30	Distan dan Pangan	Skor Pola Pangan Harapan	persen Angka Kecukupan Gizi (A) x bobot masing-masing kelompok pangan	persen	87,9	87,95	88	88,4
31	Distan dan Pangan	Produksi Padi	Jumlah produksi padi dalam 1 tahun	ton (GKP)	478.199	478.300	479.000	480.500
32	Distan dan Pangan	Produksi Jagung	Jumlah produksi jagung dalam 1 tahun	ton (pipilan kering)	51.446	51.448	51.500	51.650
33	Distan dan Pangan	Produksi Cabai	Jumlah produksi cabai dalam 1 tahun	ton (segar)	21.112,4	21.534,6	40.071	41.183
34	Distan dan Pangan	Produksi Kopi	Jumlah produksi kopi dalam 1 tahun	ton (ose kering)	1.468	1.480	1.500	1.530
35	Distan dan Pangan	Produksi Cengkeh	Jumlah produksi cengkeh dalam 1 tahun	ton (bunga kering)	161	163	167	173
36	Distan dan Pangan	Produksi kelengkeng	Jumlah produksi kelengkeng dalam 1 tahun	ton (segar)	88	90	95	100
37	Distan dan Pangan	Produksi jeruk	Jumlah produksi jeruk dalam 1 tahun	kuintal (segar)	2.646	2.650	2.660	2.675

No	Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	Formula	Satuan	Kondisi Awal Kinerja		Target Capaian Tahun	Kondisi kinerja pada akhir periode RPJMD
					2018	2019	2021	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
38	Distan dan Pangan	Produksi kelapa dalam	Jumlah produksi kelapa dalam 1 tahun	ton (kopra)	7.520	7.525	7.535	7.550
39	Distan dan Pangan	Produksi Salak	Jumlah produksi salak dalam 1 tahun	ton (segar)	69.362	69.372	69.390	69.420
40	Distan dan Pangan	Produksi Bawang putih	Jumlah produksi bawang putih dalam 1 tahun	ton (askip)	2.053,5	2.156,2	2.377,2	2.522,7
41	Distan dan Pangan	Persentase produk pertanian yang terstandarisasi	(produksi produk unggulan terstandarisasi : total produksi produk unggulan) x 100persen	persen	0,3	0,3	0,3	1,5
42	DLH	Persentase usaha dan/atau kegiatan yang minimal berpredikat PROPER biru	((Jumlah perusahaan peserta proper yang mencapai ranking emas + Jumlah perusahaan peserta proper yang mencapai ranking hijau + Jumlah perusahaan peserta proper yang mencapai ranking biru)/Jumlah perusahaan peserta proper)*100persen	persen	6	8	13	22
43	DLH	Persentase pengelolaan sampah	Neraca Jakstrada pengelolaan sampah	persen	32,42	39,80	42,90	54,91
44	DLH	Persentase ketersediaan RTH di wilayah perkotaan	(Persentase Ketersediaan RTH Publik di Wilayah Perkotaan+Persentase Ketersediaan RTH Privat di Wilayah Perkotaan)	persen	39,59	39,59	39,59	39,59
45	DLH	Cakupan konservasi sumber daya alam dan mitigasi dampak perubahan iklim	(Persentase luasan daerah resapan air yang dikonservasi + Persentase luasan daerah rawan bencana yang dikonservasi + Persentase mata air yang dikonservasi + Cakupan desa/kelurahan program kampung iklim + Persentase sekolah Adiwiyata)/5	persen	5,52	5,94	8,97	12,98

No	Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	Formula	Satuan	Kondisi Awal Kinerja		Target Capaian Tahun	Kondisi kinerja pada akhir periode RPJMD
					2018	2019	2021	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
46	Disdukcapil	Rasio Perekaman KTP - elektronik dan Keluarga yang Ber KK	$(\text{Persentase Penduduk yang melakukan perekaman KTP} + \text{Persentase penerbitan KK}) / 2$	angka	96,10	96,83	98,03	99,75
47	Disdukcapil	Rasio anak (0-18) yang berakta kelahiran, Pasangan berakta perkawinan, penduduk meninggal berakta kematian	$(\text{Persentase penerbitan Akta Kelahiran} + \text{Persentase Penerbitan Akta perkawinan} + \text{Persentase Penerbitan Akta Kematian}) / 3$	angka	55,01	63,75	74,16	96,67
48	Disdukcapil	Rasio Pengelolaan Informasi dan Pemanfaatan Data	$(\text{Persentase Pengelolaan Informasi} + \text{Persentase Pemanfaatan Data}) / 2$	angka	-	70	82,5	95
49	Dispermades	Persentase status desa maju, mandiri dan berkembang	$(\text{Jumlah Desa Maju, Mandiri dan Berkembang}) / \text{Jumlah Seluruh Desa} * 100 \text{persen}$	persen	-	82,29	87,74	100
50	Dishub	Cakupan pembangunanInfrastruktur perhubungan	$(\text{Persentase ketersediaan prasarana angkutan jalan} + \text{Persentase ketersediaan fasilitas perlengkapan jalan pendukung pengamanan dan keselamatan lalu lintas} + \text{Persentase masyarakat sadar bidang keselamatan berlalu lintas} + \text{Persentase angkutan umum layak jalan}) / 4$	persen	55,27	62,29	75,62	96,49
51	Diskominfo	Cakupan ketersediaan prasarana dan sarana TIK yang memenuhi standar keamanan informasi	$(\text{Cakupan PD dan Desa/Kelurahan terfasilitasi jaringan komunikasi data yang optimal dan stabil} + \text{Cakupan Layanan Komunikasi} + \text{Persentase PD yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi Perangkat Daerah}) / 3$	persen	31,28	37,26	52,44	76,67

No	Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	Formula	Satuan	Kondisi Awal Kinerja		Target Capaian Tahun	Kondisi kinerja pada akhir periode RPJMD
					2018	2019	2021	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
52	Diskominfo	Cakupan layanan informasi bagi Desa dan PD	(Persentase aplikasi sistem informasi PD yang terintegrasi dengan sistem informasi instansi vertikal+Persentase ketersediaan perencanaan dan pelaporan kinerja pengelolaan TIK+Persentase layanan domain dan subdomain bagi Desa dan PD)/3	persen	40,44	41,32	56,89	98,32
53	Diskominfo	Cakupan layanan dan diseminasi informasi publik	((Persentase layanan website PD dan Desa yang memenuhi kriteria+Persentase diseminasi informasi melalui media massa+Cakupan diseminasi informasi melalui media pertunjukan rakyat+Cakupan diseminasi melalui media interpersonal+Cakupan diseminasi informasi melalui media luar ruang+Cakupan diseminasi informasi melalui media baru portal berita daerah))/6	persen	36,67	57,36	87,74	94,15
54	Diskominfo	Cakupan pemanfaatan dan pengelolaan TI	(Cakupan Pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di tingkat kecamatan+Cakupan Konten Literasi TIK yang ramah anak, wanita, disabilitas dan pelajar)/2	persen	62,5	66,67	83,33	100
55	Disdagkop UKM	Cakupan Pelayanan Perdagangan	((Cakupan legalitas pelayanan perdaganganx 0,5) + (Cakupan Promosi perdagangan x 0,2) + (Cakupan Sarpras perdagangan x 0,3))	persen	-	-	72	78
56	Disdagkop UKM	Jumlah Pasar yang mendapat penghargaan Pasar Tertib Ukur	Penilaian dari Kementerian Perdagangan	unit	7	7	9	12

No	Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	Formula	Satuan	Kondisi Awal Kinerja		Target Capaian Tahun	Kondisi kinerja pada akhir periode RPJMD
					2018	2019	2021	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
57	Disdagkop UKM	Persentase koperasi aktif	$(\text{jumlah koperasi aktif} / \text{Jumlah total koperasi}) \times 100$ persen	persen	78,13	78,13	80,20	81
58	Disdagkop UKM	Peningkatan Omzet usaha Mikro	$(\text{nilai omzet tahun } n - \text{nilai omzet tahun } n-1) / (\text{nilai omzet tahun } n-1) \times 100$ persen	persen	5	5	5	5
59	DPMPTSP	Nilai investasi PMA	Jumlah investasi yang masuk dari LN (PMA)	milyar rupiah	68.858	75.000	82.687	95.721
60	DPMPTSP	Nilai investasi PMDN	Jumlah investasi yang masuk dr DN (PMDN)	triliun rupiah	1.907	2.174	2.630	3.501
61	DPMPTSP	Survey kepuasan pelayanan perijinan	Survey/kuesioner pengguna layanan perijinan	angka	86,3	86,5	87,5	89
62	Disparpora	Cakupan prestasi generasi muda	$((\text{jumlah pemuda berprestasi} / \text{jumlah pemuda peserta lomba}) \times 100) + ((\text{jumlah atlet berprestasi} / \text{jumlah atlet yang ikut kejuaraan}) \times 100) / 2$	persen	36,50	38,50	44,00	52,00
63	Disparpora	Persentase Peningkatan kunjungan wisatawan	$(\text{jumlah kunjungan wisatawan nusantara tahun ke } n - \text{jumlah kunjungan wisatawan nusantara tahun ke } n - 1 / \text{jumlah kunjungan wisatawan nusantara tahun ke } n - 1) \times 100 \times 0.35 + ((\text{jumlah kunjungan wisatawan manca negara tahun ke } n - \text{jumlah kunjungan wisatawan manca negara tahun ke } n - 1 / \text{jumlah kunjungan wisatawan mancanegara tahun ke } n - 1) \times 100 \times 0.65$	persen	1,82	5	5	25

No	Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	Formula	Satuan	Kondisi Awal Kinerja		Target Capaian Tahun	Kondisi kinerja pada akhir periode RPJMD
					2018	2019	2021	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
64	Disparpora	Persentase Peningkatan lama tinggal wisatawan	$((\text{lama tinggal wisatawan nusantara tahun ke } n - \text{lama tinggal wisatawan nusantara tahun ke } n - 1 / \text{lama tinggal wisatawan nusantara tahun ke } n - 1) * 100) * 0.35 + ((\text{lama tinggal wisatawan manca negara tahun ke } n - \text{lama tinggal wisatawan manca negara tahun ke } n - 1 / \text{lama tinggal wisatawan mancanegara tahun ke } n - 1) * 100) * 0.65$	persen	3,70	5,3	5,6	30
65	Dispuspa	Rasio pengunjung perpustakaan di perpustakaan kabupaten	$(\text{Jumlah pengunjung perpustakaan di perpustakaan kabupaten/jumlah penduduk}) \times 100 \text{persen}$	persen	0,06	0,067	0,08	0,10
66	Dispuspa	Persentase pengolah arsip yang melaksanakan pengolahan arsip secara baku	$(\text{Pengolah arsip yang melaksanakan pengolahan arsip secara baku} / \text{jumlah pengolah arsip}) \times 100 \text{ persen}$	persen	89,77	100	53,85	100
67	Dispeterikan	Produksi daging	Jumlah produksi daging dalam 1 tahun	ton	15.622,3	16.111,40	16.680,2	90.997,4
68	Dispeterikan	Produksi Telur	Jumlah produksi telur dalam 1 tahun	ton	16.204,2	16.787,5	17.359,8	105.078
69	Dispeterikan	Produksi susu	Jumlah produksi susu dalam 1 tahun	liter	803.000	810.000	833.804	4.249.734
70	Dispeterikan	Produksi benih ikan	Jumlah produksi benih dalam 1 tahun (ekor)	ekor (x1000)	2.008.038	2.008.038	2.205.000	13.603.826
71	Dispeterikan	Produksi ikan konsumsi	Jumlah produksi ikan (konsumsi) dalam 1 tahun	ton	24.293,84	24.293,84	25.357,50	156.444,00
72	Dispeterikan	Produksi perikanan tangkap	Jumlah produksi dalam 1 tahun	ton	278,14	280,50	309,25	1.907,94

No	Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	Formula	Satuan	Kondisi Awal Kinerja		Target Capaian Tahun	Kondisi kinerja pada akhir periode RPJMD
					2018	2019	2021	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
73	Setda	Capaian peningkatan kualitas kebijakan penyelenggaraan pemerintahan daerah	$((\text{jumlah kebijakan yang tidak bermasalah} / \text{jumlah kebijakan yang ada (Perda, Perbup, Keputusan Bupati, Peraturan bersama)}) + (\text{jumlah kebijakan yang ada} / \text{jumlah kebijakan yang seharusnya ada})) \times 100\%)) / 2$	persen	-	-	72,5	80,00
74	Setda	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	$((\text{Total Nilai Persepsi Per Unsur} / \text{Total unsur yang terisi}) \times \text{Nilai Penimbang})$	Angka (1-100)	83,25	83,50	84,00	85,00
75	Setwan	Persentase fasilitasi layanan produk-produk hukum daerah.	$((\text{jumlah fasilitasi raperda yang dikeluarkan} / \text{jumlah fasilitasi propemperda}) \times 100 \text{persen}) + (\text{jumlah fasilitasi kebijakan anggaran yang disepakati tepat waktu} / \text{jumlah fasilitasi kebijakan anggaran yang harus disepakati}) \times 100 \text{persen}) + (\text{jumlah fasilitasi rekomendasi DPRD yang dikirim kepada bupati} / \text{jumlah fasilitasi rekomendasi DPRD kepada bupati yang direncanakan}) \times 100 \text{persen})) / 3$	persen	92	82	94	100
76	Bappeda dan Litbangda	Persentase ketercapaian, keterukuran kinerja, dan konsistensi program perencanaan pembangunan daerah	$((\text{Jumlah indikator kinerja program daerah yang berpredikat sangat tinggi} (\geq 91 \text{persen}) \text{ dan tinggi (76persen-90persen)} / \text{Jumlah indikator kinerja program}) \times 100\%) + (\text{jumlah program RPJMD yang dijabarkan pada RKPD pada tahun berkenaan} / \text{jumlah program pada RPJMD tahun berkenaan}) \times 100\%)) / 2$	persen	-	-	86,92	93,38

No	Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	Formula	Satuan	Kondisi Awal Kinerja		Target Capaian Tahun	Kondisi kinerja pada akhir periode RPJMD
					2018	2019	2021	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
77	Bappeda dan Litbangda	Persentase implementasi rencana kelitbangan.	(Jumlah kelitbangan dalam RKPD/Jumlah kelitbangan dalam RPJMD) *100persen	persen	-	100	100	100
78	BPPKAD	Persentase kenaikan PAD	((PAD th-n - PAD th-n-1))/PAD th n-1)*100persen	persen	-19,44	10,49	7	7
79	BPPKAD	Persentase Penetapan APBD tepat waktu	(Jumlah APBD yang ditetapkan tepat waktu/jumlah APBD)x100 persen	persen	100	100	100	100
80	BPPKAD	Persentase kejelasan status aset daerah	(Jumlah Aset yang jelas statusnya / Jumlah aset seluruhnya) x 100 persen	persen	100	100	100	100
81	BKPPD	Indek profesionalitas ASN	IdxPro = koef(1-gaps) + Koef(Kj) + Koef(1 -δ Sl(inex)) + Koef(1-inDiscpl)	angka (0-100)	63	65	69	76
82	Inspektorat	Level kapabilitas APIP	Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 16 tahun 2015 tentang Pedoman Teknis peningkatan kapabilitas aparat pengawasan intern pemerintah	level (1-5)	2+	3	3	3+
83	Inspektorat	Nilai maturitas SPIP	Peraturan Kepala BPKP No. 4 Tahun 2016 tentang pedoman penilaian dan strategi peningkatan maturitas SPIP	level (0-5)	3	3	3,1	3,4
84.1	Kecamatan Bandongan	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Kecamatan	((Total Nilai Persepsi Per Unsur/Total unsur yang terisi)*Nilai Penimbang)	angka (0-100)	81.20	82	84	87
84.2	Kecamatan Borobudur	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat	((Total Nilai Persepsi Per Unsur/Total unsur yang terisi)*Nilai Penimbang)	angka (0-100)	82.01	82.74	85.71	88.68

No	Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	Formula	Satuan	Kondisi Awal Kinerja		Target Capaian Tahun	Kondisi kinerja pada akhir periode RPJMD
					2018	2019	2021	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		Kecamatan						
84.3	Kecamatan Candimulyo	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Kecamatan	((Total Nilai Persepsi Per Unsur/Total unsur yang terisi)*Nilai Penimbang)	angka (0-100)	80,03	81,35	83,99	87,95
84.4	Kecamatan Dukun	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Kecamatan	((Total Nilai Persepsi Per Unsur/Total unsur yang terisi)*Nilai Penimbang)	angka (0-100)	80	81	83	86
84.5	Kecamatan Grabag	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Kecamatan	((Total Nilai Persepsi Per Unsur/Total unsur yang terisi)*Nilai Penimbang)	angka (0-100)	84.65	85.25	85.71	90.16
84.6	Kecamatan Kajoran	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Kecamatan	((Total Nilai Persepsi Per Unsur/Total unsur yang terisi)*Nilai Penimbang)	angka (0-100)	82.01	82.74	83.75	86.00
84.7	Kecamatan Kaliangkrik	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Kecamatan	((Total Nilai Persepsi Per Unsur/Total unsur yang terisi)*Nilai Penimbang)	angka (0-100)	79,55	80	80	80
84.8	Kecamatan Mertoyudan	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Kecamatan	((Total Nilai Persepsi Per Unsur/Total unsur yang terisi)*Nilai Penimbang)	angka (0-100)	87,10	89,83	89,83	89,83
84.9	Kecamatan Mungkid	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Kecamatan	((Total Nilai Persepsi Per Unsur/Total unsur yang terisi)*Nilai Penimbang)	angka (0-100)	85,57	87,00	87,60	87,90

No	Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	Formula	Satuan	Kondisi Awal Kinerja		Target Capaian Tahun	Kondisi kinerja pada akhir periode RPJMD
					2018	2019	2021	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
84.10	Kecamatan Muntilan	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Kecamatan	((Total Nilai Persepsi Per Unsur/Total unsur yang terisi)*Nilai Penimbang)	angka (0-100)	87,73	87,9	89	90,25
84.11	Kecamatan Ngablak	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Kecamatan	((Total Nilai Persepsi Per Unsur/Total unsur yang terisi)*Nilai Penimbang)	angka (0-100)	82,01	82,74	83,75	86,00
84.12	Kecamatan Ngluwar	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Kecamatan	((Total Nilai Persepsi Per Unsur/Total unsur yang terisi)*Nilai Penimbang)	angka (0-100)	88,90	89,00	89,00	90,00
84.13	Kecamatan Pakis	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Kecamatan	((Total Nilai Persepsi Per Unsur/Total unsur yang terisi)*Nilai Penimbang)	angka (0-100)	82	84	88	95
84.14	Kecamatan Salam	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Kecamatan	((Total Nilai Persepsi Per Unsur/Total unsur yang terisi)*Nilai Penimbang)	angka (0-100)	81	82	84	87
84.15	Kecamatan Salaman	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Kecamatan	((Total Nilai Persepsi Per Unsur/Total unsur yang terisi)*Nilai Penimbang)	angka (0-100)	80	86	88	88
84.16	Kecamatan Sawangan	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Kecamatan	((Total Nilai Persepsi Per Unsur/Total unsur yang terisi)*Nilai Penimbang)	angka (0-100)	81,98	82,10	83,75	86,00

No	Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	Formula	Satuan	Kondisi Awal Kinerja		Target Capaian Tahun	Kondisi kinerja pada akhir periode RPJMD
					2018	2019	2021	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
84.17	Kecamatan Secang	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Kecamatan	$((\text{Total Nilai Persepsi Per Unsur} / \text{Total unsur yang terisi}) * \text{Nilai Penimbang})$	angka (0-100)	89,40	89,40	89,60	90,00
84.18	Kecamatan Srumbung	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Kecamatan	$((\text{Total Nilai Persepsi Per Unsur} / \text{Total unsur yang terisi}) * \text{Nilai Penimbang})$	angka (0-100)	82,01	82,74	83,75	86,00
84.19	Kecamatan Tegalrejo	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Kecamatan	$((\text{Total Nilai Persepsi Per Unsur} / \text{Total unsur yang terisi}) * \text{Nilai Penimbang})$	angka (0-100)	82	84	88	94
84.20	Kecamatan Tempuran	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Kecamatan	$((\text{Total Nilai Persepsi Per Unsur} / \text{Total unsur yang terisi}) * \text{Nilai Penimbang})$	angka (0-100)	85,80	86,4	87	88,3
84.21	Kecamatan Windusari	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Kecamatan	$((\text{Total Nilai Persepsi Per Unsur} / \text{Total unsur yang terisi}) * \text{Nilai Penimbang})$	angka (0-100)	-	81,98	82,10	82,40
85.1	Kecamatan Bandongan	Persentase penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	$((\text{Jumlah urusan yang dilaksanakan} / \text{jumlah urusan yang seharusnya dilaksanakan}) * 100 \text{persen}) + ((\text{Jumlah desa tertib administrasi} / \text{jumlah desa}) * 100 \text{persen}) / 2$	persen	-	100	100	100
85.2	Kecamatan Borobudur	Persentase penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	$((\text{Jumlah urusan yang dilaksanakan} / \text{jumlah urusan yang seharusnya dilaksanakan}) * 100 \text{persen}) + ((\text{Jumlah desa tertib administrasi} / \text{jumlah desa}) * 100 \text{persen}) / 2$	persen	87,5	90	90	92,5

No	Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	Formula	Satuan	Kondisi Awal Kinerja		Target Capaian Tahun	Kondisi kinerja pada akhir periode RPJMD
					2018	2019	2021	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
85.3	Kecamatan Candimulyo	Persentase penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	$((\text{Jumlah urusan yang dilaksanakan}/\text{jumlah urusan yang seharusnya dilaksanakan}) * 100 \text{persen}) + ((\text{Jumlah desa tertib administrasi}/\text{jumlah desa}) * 100 \text{persen}) / 2$	persen	86.84	86.84	92.10	100
85.4	Kecamatan Dukun	Persentase penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	$((\text{Jumlah urusan yang dilaksanakan}/\text{jumlah urusan yang seharusnya dilaksanakan}) * 100 \text{persen}) + ((\text{Jumlah desa tertib administrasi}/\text{jumlah desa}) * 100 \text{persen}) / 2$	persen	86,7	86,7	100	100
85.5	Kecamatan Grabag	Persentase penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	$((\text{Jumlah urusan yang dilaksanakan}/\text{jumlah urusan yang seharusnya dilaksanakan}) * 100 \text{persen}) + ((\text{Jumlah desa tertib administrasi}/\text{jumlah desa}) * 100 \text{persen}) / 2$	persen	100	100	100	100
85.6	Kecamatan Kajoran	Persentase penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	$((\text{Jumlah urusan yang dilaksanakan}/\text{jumlah urusan yang seharusnya dilaksanakan}) * 100 \text{persen}) + ((\text{Jumlah desa tertib administrasi}/\text{jumlah desa}) * 100 \text{persen}) / 2$	persen	63.80	67.24	74.14	84.49
85.7	Kecamatan Kaliangkrik	Persentase penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	$((\text{Jumlah urusan yang dilaksanakan}/\text{jumlah urusan yang seharusnya dilaksanakan}) * 100 \text{persen}) + ((\text{Jumlah desa tertib administrasi}/\text{jumlah desa}) * 100 \text{persen}) / 2$	persen	89	89	91	93

No	Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	Formula	Satuan	Kondisi Awal Kinerja		Target Capaian Tahun	Kondisi kinerja pada akhir periode RPJMD
					2018	2019	2021	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
85.8	Kecamatan Mertoyudan	Persentase penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	$((\text{Jumlah urusan yang dilaksanakan}/\text{jumlah urusan yang seharusnya dilaksanakan}) * 100 \text{persen}) + ((\text{Jumlah desa tertib administrasi}/\text{jumlah desa}) * 100 \text{persen}) / 2$	persen	50	50	82	83
85.9	Kecamatan Mungkid	Persentase penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	$((\text{Jumlah urusan yang dilaksanakan}/\text{jumlah urusan yang seharusnya dilaksanakan}) * 100 \text{persen}) + ((\text{Jumlah desa tertib administrasi}/\text{jumlah desa}) * 100 \text{persen}) / 2$	persen	89	90	91,5	93
85.10	Kecamatan Muntilan	Persentase penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	$((\text{Jumlah urusan yang dilaksanakan}/\text{jumlah urusan yang seharusnya dilaksanakan}) * 100 \text{persen}) + ((\text{Jumlah desa tertib administrasi}/\text{jumlah desa}) * 100 \text{persen}) / 2$	persen	-	-	83	86
85.11	Kecamatan Ngablak	Persentase penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	$((\text{Jumlah urusan yang dilaksanakan}/\text{jumlah urusan yang seharusnya dilaksanakan}) * 100 \text{persen}) + ((\text{Jumlah desa tertib administrasi}/\text{jumlah desa}) * 100 \text{persen}) / 2$	persen	63,8	67,2	92,5	92,5
85.12	Kecamatan Ngluwar	Persentase penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	$((\text{Jumlah urusan yang dilaksanakan}/\text{jumlah urusan yang seharusnya dilaksanakan}) * 100 \text{persen}) + ((\text{Jumlah desa tertib administrasi}/\text{jumlah desa}) * 100 \text{persen}) / 2$	persen	75	80	90	100

No	Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	Formula	Satuan	Kondisi Awal Kinerja		Target Capaian Tahun	Kondisi kinerja pada akhir periode RPJMD
					2018	2019	2021	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
85.13	Kecamatan Pakis	Persentase penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	$((\text{Jumlah urusan yang dilaksanakan}/\text{jumlah urusan yang seharusnya dilaksanakan}) * 100 \text{persen}) + ((\text{Jumlah desa tertib administrasi}/\text{jumlah desa}) * 100 \text{persen}) / 2$	persen	62,5	70	90	97,5
85.14	Kecamatan Salam	Persentase penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	$((\text{Jumlah urusan yang dilaksanakan}/\text{jumlah urusan yang seharusnya dilaksanakan}) * 100 \text{persen}) + ((\text{Jumlah desa tertib administrasi}/\text{jumlah desa}) * 100 \text{persen}) / 2$	persen	-	-	70,8	83,3
85.15	Kecamatan Salaman	Persentase penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	$((\text{Jumlah urusan yang dilaksanakan}/\text{jumlah urusan yang seharusnya dilaksanakan}) * 100 \text{persen}) + ((\text{Jumlah desa tertib administrasi}/\text{jumlah desa}) * 100 \text{persen}) / 2$	persen	88	95	95	95
85.16	Kecamatan Sawangan	Persentase penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	$((\text{Jumlah urusan yang dilaksanakan}/\text{jumlah urusan yang seharusnya dilaksanakan}) * 100 \text{persen}) + ((\text{Jumlah desa tertib administrasi}/\text{jumlah desa}) * 100 \text{persen}) / 2$	persen	-	-	85	100
85.17	Kecamatan Secang	Persentase penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	$((\text{Jumlah urusan yang dilaksanakan}/\text{jumlah urusan yang seharusnya dilaksanakan}) * 100 \text{persen}) + ((\text{Jumlah desa tertib administrasi}/\text{jumlah desa}) * 100 \text{persen}) / 2$	persen	65	70	82,5	100
85.18	Kecamatan Srumbung	Persentase penyelenggaraan pemerintahan	$((\text{Jumlah urusan yang dilaksanakan}/\text{jumlah urusan yang seharusnya dilaksanakan}) * 100 \text{persen}) + ((\text{Jumlah desa tertib administrasi}/\text{jumlah desa}) * 100 \text{persen}) / 2$	persen	58.5	58.5	73.5	93.5

No	Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	Formula	Satuan	Kondisi Awal Kinerja		Target Capaian Tahun	Kondisi kinerja pada akhir periode RPJMD
					2018	2019	2021	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		kecamatan	$\frac{\text{dilaksanakan} \times 100 \text{persen} + ((\text{Jumlah desa tertib administrasi} / \text{jumlah desa}) \times 100 \text{persen})}{2}$					
85.19	Kecamatan Tegalrejo	Persentase penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	$\frac{((\text{Jumlah urusan yang dilaksanakan} / \text{jumlah urusan yang seharusnya dilaksanakan}) \times 100 \text{persen}) + ((\text{Jumlah desa tertib administrasi} / \text{jumlah desa}) \times 100 \text{persen})}{2}$	persen	90	90,5	92,5	95
85.20	Kecamatan Tempuran	Persentase penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	$\frac{((\text{Jumlah urusan yang dilaksanakan} / \text{jumlah urusan yang seharusnya dilaksanakan}) \times 100 \text{persen}) + ((\text{Jumlah desa tertib administrasi} / \text{jumlah desa}) \times 100 \text{persen})}{2}$	persen	80	85	90	100
85.21	Kecamatan Windusari	Persentase penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	$\frac{((\text{Jumlah urusan yang dilaksanakan} / \text{jumlah urusan yang seharusnya dilaksanakan}) \times 100 \text{persen}) + ((\text{Jumlah desa tertib administrasi} / \text{jumlah desa}) \times 100 \text{persen})}{2}$	persen	87,5	90	95	100

- Keterangan:
- Kondisi awal tahun 2018 merupakan angka realisasi, kecuali yang bertanda *) merupakan angka proyeksi.
 - Kondisi awal tahun 2019 merupakan angka target/proyeksi sesuai yang tercantum dalam dokumen Perubahan RKPD Tahun 2019.

7.3. Indikator Kinerja Daerah

Indikator kinerja daerah merupakan indikator kinerja yang ditetapkan sebagai ukuran kinerja seluruh penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Magelang Tahun 2021, yang merupakan seluruh indikator tujuan dan sasaran pencapaian misi, serta IKU PD. Indikator kinerja daerah adalah sebagai berikut.

Tabel 7.4
Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Magelang Tahun 2021

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD		Target Capaian Tahun	Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	Perangkat Daerah Koordinator
			2018	2019	2021		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
A.	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT						
1	Nilai IPM (Index Pembangunan Manusia)	angka (0-100)	69,11	69,34	69,82	70,57	Setda
2	Angka Kemiskinan	persen	11,23	10,08-11,08	12,44-11,52	6,83-7,83	Setda
3	Indeks Pembangunan Gender	angka (0-100)	92,23	92,91	93,31	94,41	Setda
4	Indeks Pemberdayaan Gender	angka (0-100)	62,43	69,03	69,63	70,53	Dinsos PPKB PPPA
5	Persentase penurunan PMKS	persen	0,57	0,58	0,58	0,58	Dinsos PPKB PPPA
6	Kategori Kabupaten Layak Anak	kategori	madya	madya	nindya	utama	Dinsos PPKB PPPA
7	Angka Harapan Hidup	tahun	73,47	73,52	73,61	73,75	Dinkes
8	Rata-rata Lama Sekolah	tahun	7,57	7,72	8,00	8,41	Disdikbud
9	Harapan Lama Sekolah	tahun	12,48	12,67	12,92	13,27	Disdikbud
10	Persentase SD & SMP yang berakreditasi minimal B	persen	93,86	93,89	94,79	95,94	Disdikbud

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD		Target Capaian Tahun	Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	Perangkat Daerah Koordinator
			2018	2019	2021		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
11	Indeks ketahanan pangan	angka (0-100)	76,32	77,37	79,47	82,62	Distan dan Pangan
12	Cakupan hunian layak dan berkualitas	persen	44,00	58,89	68,66	95,81	DPRKP
13	Laju Pertumbuhan Ekonomi	persen	5,06*	5,0-5,5	3,3-4,3	5,5-6,0	Setda
14	Tingkat Pengangguran Terbuka	persen	2,91	2,4-3,0	4,54-5,17	2,25-2,55	Disperinnkaer
15	PDRB Per Kapita	juta rupiah	23,70*	25.20	28.21	32.72	Setda
16	Pengeluaran per kapita riil yang disesuaikan	ribu rupiah	9.025,00	9.262,68	9.762,42	10.400,12	Setda
17	Inflasi	persen	2,66	2,5-4,0	3,0±1	2,5-4,0	Setda
18	Nilai PDRB sektor perdagangan	miliar rupiah	4.189,74*	4.529,30	5.208,43	6.227,11	Disdagkop UKM
19	Nilai PDRB sektor pertanian, kehutanan dan perikanan	miliar rupiah	6.622,23*	6.997,70	7.748,63	8.875,03	Distan dan Pangan; Dispeterikan
20	Nilai PDRB sektor industri pengolahan	miliar rupiah	6.666,21*	7.157,40	8.139,80	9.613,39	Disperinnaker
21	Nilai PDRB sektor pariwisata	miliar rupiah	1.309,29*	1.416,24	1.630,14	1.951,00	Disparpora
B.	ASPEK PELAYANAN UMUM						
	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR						
1	Angka Partisipasi Kasar (APK)	angka (0-100)	87,74	87,92	90,12	93,41	Disdikbud
2	Angka Partisipasi Murni (APM)	angka (0-100)	83,13	83,82	85,19	87,24	Disdikbud
3	Angka Partisipasi Sekolah (APS)**	angka (0-100)	94,78	95,42	96,40	98,28	Disdikbud
4	Rerata Nilai UN	angka (0-100)	6,61	6,64	6,71	6,81	Disdikbud
5	Angka Kelulusan	angka (0-100)	99,88	99,90	99,94	100	Disdikbud
	KESEHATAN						

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD		Target Capaian Tahun	Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	Perangkat Daerah Koordinator
			2018	2019	2021		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
6	Persentase Kualitas pelayanan kesehatan	persen	10	15	30	45	Dinkes
7	Angka kesakitan	persen	41,58	41,52	40,87	39,93	Dinkes
8	Jumlah Kematian Ibu	jumlah kasus	6	6	6	6	Dinkes
9	Angka Kematian Bayi (AKB)	Angka per 1000 KH	5,72	5,71	5,69	5,66	Dinkes
10	Angka Kematian Balita (AKABa);	Angka per 1000 KH	6,70	6,69	6,67	6,64	Dinkes
11	Angka Kematian Neonatal (AKN)	angka	4	3,99	3,97	3,94	Dinkes
12	Kualitas puskesmas dan rumah sakit	persen	50	55	65	80	Dinkes
13	Predikat Kelulusan Akreditasi Rumah Sakit	Akreditasi (dasar, madya, utama, paripurna)	Madya (Bintang 3)	Paripurna (Bintang 5)	Paripurna (Bintang 5)	Paripurna (Bintang 5)	RSUD Muntilan
PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG							
14	Cakupan Pembangunan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan penataan ruang	persen	57,83	60,97	72	92,27	DPUPR
PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN							
15	Persentase ketersediaan rumah layak huni	persen	35,05	61,14	73,74	91,63	DPRKP
16	Persentase kawasan permukiman berkualitas	persen	52,96	56,63	63,98	100	DPRKP
KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT							
17	Cakupan penegakan hukum	persen	-	83,34	85,70	89,68	Satpol PP dan PK
18	Cakupan ketangguhan daerah menghadapi bencana	persen	42,03	61,80	65,84	73,78	BPBD

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD		Target Capaian Tahun	Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	Perangkat Daerah Koordinator
			2018	2019	2021		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
19	Cakupan peningkatan wawasan kebangsaan dan politik masyarakat	persen	80	99,00	99,33	99,83	Kesbangpol
	SOSIAL						
20	Cakupan penanganan PMKS	persen	46,32	46,86	48,04	49,8	Dinsos PPKB PPPA
21	Persentase keluarga Pra Sejahtera	persen	21,23	20,69	19,61	18,00	Dinsos PPKB PPPA
	URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR						
	TENAGA KERJA						
22	Indeks Produktivitas tenaga kerja	rupiah	30.328.586	31.021.506	31.194.768	31.512.510	Disperinnaker
	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK						
23	Cakupan Pemberdayaan perempuan	persen	64,9	66,46	66,69	67,22	Dinsos PPKB PPPA
24	Rasio kekerasan	persen	0,03	0,03	0,02	0,02	Dinsos PPKB PPPA
	PANGAN						
25	Ketersediaan pangan utama beras	kg/jiwa/ tahun	212,65	211,91	210,66	208,99	Distan dan Pangan
26	Stabilitas harga pangan	persen	93,95	93,96	93,98	94,3	Distan dan Pangan
27	Skor PPH	persen	87,9	87,95	88	88,4	Distan dan Pangan
	LINGKUNGAN HIDUP						
28	Persentase usaha dan/atau kegiatan yang minimal berpredikat PROPER biru	persen	6	8	13	22	DLH
29	Persentase pengelolaan sampah	persen	32,42	39,80	42,90	54,91	DLH
30	Persentase ketersediaan RTH di wilayah perkotaan	persen	39,59	39,59	39,59	39,59	DLH

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD		Target Capaian Tahun	Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	Perangkat Daerah Koordinator
			2018	2019	2021		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
31	Cakupan konservasi sumber daya alam dan mitigasi dampak perubahan iklim	persen	5,52	5,94	8,97	12,98	DLH
	ADIMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL						
32	Rasio Perekaman KTP - elektronik dan Keluarga yang Ber KK	angka (0-100)	96,10	96,83	98,03	99,75	Disdukcapil
33	Rasio anak (0-18) yang berakta kelahiran, Pasangan berakta perkawinan, penduduk meninggal berakta kematian	angka (0-100)	55,01	63,75	74,16	96,67	Disdukcapil
34	Rasio Pengelolaan Informasi dan Pemanfaatan Data	angka (0-100)	-	70	82,5	95	Disdukcapil
	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA						
35	Persentase status desa maju, mandiri dan berkembang	persen	-	82,29	87,74	100	Dispermades
	PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB						
36	Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	persen	0,79	0,76	0,71	0,65	Dinsos PPKB PPPA
	PERHUBUNGAN						
37	Cakupan pembangunan Infrastruktur perhubungan	persen	55,27	62,29	75,62	96,49	Dishub
	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA						
38	Cakupan layanan dan diseminasi informasi publik	persen	36,67	57,36	87,74	94,15	Diskominfo
39	Cakupan pemanfaatan dan pengelolaan TI	persen	62,5	66,67	83,33	100	Diskominfo

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD		Target Capaian Tahun	Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	Perangkat Daerah Koordinator
			2018	2019	2021		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	KOPERASI DAN UKM						
40	Persentase koperasi aktif	persen	78,13	78,13	80,20	81	Disdagkop UKM
41	Peningkatan Omzet usaha Mikro	persen	5	5	5	5	Disdagkop UKM
	PENANAMAN MODAL						
42	Nilai investasi PMA	milyar rupiah	68.858	75.000	82.687	95.721	DPMPSTP
43	Nilai investasi PMDN	triliun rupiah	1.907	2.174	2.630	3.501	DPMPSTP
44	Survey kepuasan pelayanan perijinan	angka (0-100)	86,3	86,5	87,5	89	DMPTSP
	KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA						
45	Cakupan prestasi generasi muda	persen	36,50	38,50	44,00	52,00	Disparpora
	STATISTIK						
46	Cakupan layanan informasi bagi Desa dan PD	persen	40,44	41,32	56,89	98,32	Diskominfo
	PERSANDIAN						
47	Cakupan ketersediaan prasarana dan sarana TIK yang memenuhi standar keamanan informasi	persen	31,28	37,26	52,44	76,67	Diskominfo
	KEBUDAYAAN						
48	Cakupan pengelolaan kebudayaan	persen	31,44	32,26	33,31	34,6	Disdikbud
	PERPUSTAKAAN						
49	Rasio pengunjung perpustakaan di perpustakaan kabupaten	persen	0,06	0,067	0,08	0,10	Dispuspa
	KEARSIPAN						

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD		Target Capaian Tahun	Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	Perangkat Daerah Koordinator
			2018	2019	2021		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
50	Persentase pengolah arsip yang melaksanakan pengolahan arsip secara baku	persen	89,77	100	53,85	100	Dispuspa
	URUSAN PILIHAN						
	KELAUTAN DAN PERIKANAN						
51	Produksi daging	ton	15.622,3	16.111,40	16.680,2	90.997,4	Dispeterikan
52	Produksi Telur	ton	16.204,2	16.787,5	17.359,8	105.078	Dispeterikan
53	Produksi susu	liter	803.000	810.000	833.804	4.249.734	Dispeterikan
54	Produksi benih ikan	ekor (x1000)	2.008.038	2.008.038	2.205.000	13.603.826	Dispeterikan
55	Produksi ikan konsumsi	ton	24.293,84	24.293,84	25.357,50	156.444,00	Dispeterikan
56	Produksi perikanan tangkap	ton	278,14	280,50	309,25	1.907,94	Dispeterikan
	PARIWISATA						
57	Persentase peningkatan kunjungan wisatawan	persen	1,82	5	5	25	Disparpora
58	Persentase peningkatan lama tinggal wisatawan	persen	3,70	5,3	5,6	30	Disparpora
	PERTANIAN						
59	Produksi Padi	ton (GKP)	478.199	478.300	479.000	480.500	Distan dan Pangan
60	Produksi Jagung	ton (pipilan kering)	51.446	51.448	51.500	51.650	Distan dan Pangan
61	Produksi Cabai	ton (segar)	21.112,4	21.534,6	40.071	41.183	Distan dan Pangan
62	Produksi Kopi	ton (ose kering)	1.468	1.480	1.500	1.530	Distan dan Pangan
63	Produksi Cengkeh	ton (bunga kering)	161	163	167	173	Distan dan Pangan
64	Produksi kelengkeng	ton (segar)	88	90	95	100	Distan dan Pangan

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD		Target Capaian Tahun	Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	Perangkat Daerah Koordinator
			2018	2019	2021		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
65	Produksi jeruk	kuintal (segar)	2.646	2.650	2.660	2.675	Distan dan Pangan
66	Produksi kelapa dalam	ton (kopra)	7.520	7.525	7.535	7.550	Distan dan Pangan
67	Produksi Salak	ton (segar)	69.362	69.372	69.390	69.420	Distan dan Pangan
68	Produksi Bawang putih	ton (askip)	2.053,5	2.156,2	2.377,2	2.522,7	Distan dan Pangan
69	Persentase produk pertanian yang terstandarisasi	persen	0,3	0,3	0,3	1,5	Distan dan Pangan
	PERDAGANGAN						
70	Cakupan Pelayanan Perdagangan	persen	-	-	72	78	Disdagkop UKM
71	Jumlah Pasar yang mendapat penghargaan Pasar Tertib Ukur	unit	7	7	9	12	Disdagkop UKM
	PERINDUSTRIAN						
72	Persentase Pertumbuhan Industri	persen	2,10	2,21	2,39	12,16	Disperinnaker
	FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						
	PERENCANAAN						
73	Persentase ketercapaian, keterukuran kinerja, dan konsistensi program perencanaan pembangunan daerah	persen	-	-	86,92	93,38	Bappeda dan Litbangda
	KEUANGAN						
74	Persentase kenaikan PAD	persen	-19,44	10,49	7	7	BPPKAD
75	Persentase Penetapan APBD tepat waktu	persen	100	100	100	100	BPPKAD
76	Persentase kejelasan status aset daerah	persen	100	100	100	100	BPPKAD

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD		Target Capaian Tahun	Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	Perangkat Daerah Koordinator
			2018	2019	2021		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN						
77	Indek profesionalitas ASN	Angka (0-100)	63	65	69	76	BKPPD
	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN						
78	Persentase implementasi rencana kelitbangan.	persen	-	100	100	100	Bappeda dan Litbangda
	PENGAWASAN						
79	Level kapabilitas APIP	Level (1-5)	2+	3	3	3+	Inspektorat
80	Nilai maturitas SPIP	Level (0-5)	3	3	3,1	3,4	Inspektorat
	FUNGSI LAINNYA						
81	Capaian peningkatan kualitas kebijakan penyelenggaraan pemerintah daerah	persen	-	-	72,5	80,00	Setda
82	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	Angka (1-100)	83,25	83,50	84,00	85,00	Setda
83	Persentase fasilitasi layanan produk- produk hukum daerah	persen	92	82	94	100	Setwan
C.	ASPEK DAYA SAING						
1	Cakupan Pembangunan Infrastruktur Wilayah Berkelanjutan	persen	64,24	66,86	72,98	83,29	Setda
2	IKLH	Angka (0-100)	71,93	72,10	72,14	72,20	Setda
3	Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)	persen	56,45	63,82	67,25	72,39	Setda

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD		Target Capaian Tahun	Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	Perangkat Daerah Koordinator
			2018	2019	2021		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
4	Cakupan ketentraman dan ketertiban masyarakat	persen	-	81,38	83,62	87,76	Satpol PP dan PK; Kesbangpol; BPBD
5	Nilai AKIP	angka (0-100) (huruf)	59,05 (CC)	61,04 (B)	65,02 (B)	71,00 (BB)	Setda
6	Indeks SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik)	angka (0-5)	2,18	2,19-2,30	2,51-2,61	2,86-3,1	Diskominfo
7	Opini BPK	-	WTP	WTP	WTP	WTP	BPPKAD
8	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	angka (0-100)	82,01	82,74	83,75	86,00	Setda
9	Indek Sistem Merit	angka (0-1)	-	0,49	0,6	0,71	BKPPD
10	Pertumbuhan Investasi	persen	0,92	5,00	5,00	5,00	DPMPTSP
11	Cakupan Pembangunan Infrastruktur Wilayah	persen	56,55	61,63	73,81	94,38	DPUPR
12	Indeks Desa Membangun	angka (0-1)	0,66*	0,67	0,69	0,72	Dispermades

Keterangan: - Kondisi awal tahun 2018 merupakan angka realisasi, kecuali yang bertanda *) merupakan angka proyeksi.
- Kondisi awal tahun 2019 merupakan angka target/proyeksi sesuai yang tercantum dalam dokumen Perubahan RKPD Tahun 2019.

7.4 Indikator Kinerja Program Prioritas Pembangunan

Pada Tabel 7.5 dibawah ini memuat seluruh indikator program prioritas dan targetnya pada setiap urusan penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan oleh OPD Kabupaten Magelang.

Tabel 7.5
Indikator Kinerja Program Prioritas Pembangunan Daerah
Tahun 2021

No	Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (<i>Outcome</i>)	Satuan	Target	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR				
1	PENDIDIKAN				
	Program Pendidikan Sekolah Dasar				
		Angka Putus Sekolah SD/MI	%	0,06	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Angka Melanjutkan SD/MI ke SMP/MTs	%	92	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Persentase SD dengan Siswa Ideal	%	40,56	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Persentase SD yang Menerapkan Pendidikan Karakter	%	50,08	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Persentase SD dengan sarpras sesuai Standar Nasional Pendidikan (SNP)	%	73,96	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

No	Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Program Pendidikan Sekolah Menengah Pertama				
		Angka Putus Sekolah SMP/MTs	%	0,23	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Angka Melanjutkan SMP/MTs ke SMA/SMK/MA	%	80,45	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Persentase SMP yang Menerapkan Pendidikan Karakter	%	53,85	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Persentase SMP dengan Jumlah Siswa Ideal	%	36,72	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Persentase SMP dengan Sarpras sesuai Standar Nasional Pendidikan (SNP)	%	74,42	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Program Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal				
		Persentase PNF Terakreditaasi (LKP, PKBM)	%	67,39	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Persentase PAUD Terakreditasi (TK, KB, SPS)	%	60,22	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Program Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan				
		Persentase Guru Bersertifikat	%	92	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Persentase Guru yang Lulus Uji Kompetensi Guru	%	67,45	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2	KESEHATAN				
	Program Pelayanan Kesehatan				
		Cakupan Mutu Pelayanan FKTP	%	35	Dinas Kesehatan
		Cakupan Mutu Pelayanan FKTL	%	35	Dinas Kesehatan

No	Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Cakupan Mutu Pelayanan Laboratorium	%	35	Dinas Kesehatan
	Program Peningkatan Kualitas Puskesmas dan Rumah Sakit				
		Persentase puskesmas/jejaring/jaringan/labkesmas/IFK yang memiliki sarana dan prasarana dalam kondisi baik	%	35	Dinas Kesehatan
		Persentase RS yang memiliki sarana dan prasarana dalam kondisi baik	%	35	Dinas Kesehatan
		Persentase Standar Pelayanan Minimal (SPM) RS yang Terpenuhi	%	69,5	RSUD Muntilan
		Nilai Kepuasan Masyarakat Pelayanan Rumah Sakit	%	79,8	RSUD Muntilan
	Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit				
		Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat *)	%	100	Dinas Kesehatan
		Pelayanan kesehatan orang terduga TB*)	%	100	Dinas Kesehatan
		Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV *)	%	100	Dinas Kesehatan
		Pelayanan kesehatan pada usia produktif *)	%	100	Dinas Kesehatan
		Cakupan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular	%	80	Dinas Kesehatan
		Cakupan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular	%	100	Dinas Kesehatan
		Cakupan Surveilans dan Imunisasi	%	70	Dinas Kesehatan

No	Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Pelayanan kesehatan penderita hipertensi *)	%	100	Dinas Kesehatan
		Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus *)	%	100	Dinas Kesehatan
	Program Sumber Daya Kesehatan				
		Cakupan sumber daya manusia kesehatan	%	84	Dinas Kesehatan
		Cakupan sarana prasarana dan pembinaan sumber daya kesehatan	%	88	Dinas Kesehatan
	Program Kesehatan Masyarakat				
		Pelayanan kesehatan bayi baru lahir*)	%	100	Dinas Kesehatan
		Pelayanan kesehatan balita*)	%	100	Dinas Kesehatan
		Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar*)	%	100	Dinas Kesehatan
		Pelayanan kesehatan pada usia lanjut *)	%	100	Dinas Kesehatan
		Cakupan Kesehatan Ibu, Anak, Lansia, Gizi	%	64	Dinas Kesehatan
		Cakupan Kesehatan Lingkungan, Kesjaor	%	78	Dinas Kesehatan
		Cakupan Pemberdayaan Masyarakat dan Promosi Kesehatan	%	62	Dinas Kesehatan
		Pelayanan kesehatan ibu hamil *)	%	100	Dinas Kesehatan
		Pelayanan kesehatan ibu bersalin *)	%	100	Dinas Kesehatan
3	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				
	Program Peningkatan akses dan kualitas jalan				
		Cakupan ketersediaan jalan dan bangunan pelengkap jalan	%	95,77	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

No	Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Persentase jalan dan bangunan pelengkap jalan dalam kondisi baik	%	78,89	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Program Peningkatan layanan Sumber Daya Air dan Jaringan irigasi					
		Cakupan layanan jaringan irigasi	%	85,25	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Cakupan layanan Sumber Daya Air	%	74,2	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Program Peningkatan dan Pengembangan Bangunan Gedung dan AMPL					
		Cakupan pembangunan gedung pemerintah dan publik	%	99,52	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Cakupan Bangunan Gedung Pemerintah dalam kondisi baik	%	25	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Cakupan layanan air minum *	%	89,91	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Cakupan layanan sanitasi air limbah domestik *	%	88,73	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Persentase terbangunnya Landmark	%	75	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Program Pengembangan Sarana dan Prasarana ke PU an					
		Cakupan sarana prasarana ke PU-an	%	86	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Cakupan layanan Jasa konstruksi	%	62,95	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Program Pemanfaatan dan Pengendalian Tata Ruang					
		Persentase Dokumen Rekomendasi Perijinan	%	45,96	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

No	Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Persentase kesesuaian tata ruang	%	50,87	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Cakupan kinerja pertanahan	%	50	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
4	PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN				
	Program Pengembangan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman				
		Persentase penanganan kawasan permukiman kumuh	%	84,23	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
		Persentase pengendalian kawasan permukiman	%	71,7	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
		Persentase penyediaan TPU	%	0	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
		Persentase penanganan PSU Permukiman	%	100	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
	Program Pengembangan dan Peningkatan Kualitas Perumahan				
		Persentase penanganan rumah tidak layak huni	%	48,16	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
		Persentase Fasilitasi penyediaan rumah bagi MBR	%	50	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
		Persentase penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana	%	68,52	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
		Persentase fasilitasi penyediaan rumah bagi relokasi warga yang terdampak proyek pemerintah*	%	100	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
		Persentase penanganan PSU Perumahan	%	100	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

No	Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4	KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT				
	Program Penanggulangan Bencana				
		Persentase Pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	%	41,39	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi	%	100	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		Persentase pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi	%	85	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		Persentase pelayanan informasi rawan bencana	%	36,96	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	Program Peningkatan Wawasan Kebangsaan dan Politik Masyarakat				
		Persentase ormas yang aktif	%	98	Kesatuan Bangsa dan Politik
		Persentase konflik sosial tertangani	%	100	Kesatuan Bangsa dan Politik
		Persentase kegiatan pembinaan politik	%	100	Kesatuan Bangsa dan Politik
	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat				
		Persentase penertiban yang dilaksanakan	%	100	Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran
		Persentase satlinmas yang aktif	%	72	Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran
		Persentase pengamanan dan pengawalan	%	100	Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran

No	Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Program Penegakan Perda				
		Persentase penegakan perda	%	95,80	Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran
	Program Penanggulangan Kebakaran				
		Persentase layanan pemadaman, penyelamatan, dan evakuasi korban dan terdampak kebakaran dalam tingkat waktu tanggap	%	61	Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran
5	SOSIAL				
	Program Penanganan dan Perlindungan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)				
		Persentase PMKS lainnya diluar panti yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar*	%	33,95	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		Persentase PMKS dan korban bencana yang mendapat perlindungan dan jaminan sosial	%	45,25	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		Persentase penyandang disabilitas, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial*	%	2,57	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana kabupaten **	%	100	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

No	Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Persentase Penyandang Disabilitas terlantar, Anak terlantar, Lanjut Usia terlantar, dan Gelandangan dan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti * **	%	100	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	Program Pemberdayaan Sosial				
		Persentase PSKS dapat melaksanakan usaha kesejahteraan sosial (UKS)	%	8,96	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		Persentase Fakir Miskin yang diberdayakan	%	0,20	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		Persentase fakir miskin yang divalidasi	%	100	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
B	URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR				
1	TENAGA KERJA				
	Program Pengembangan Kompetensi, Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja				
		Cakupan pengembangan kompetensi, penempatan dan perluasan kesempatan kerja	%	80,6	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
	Program Pembinaan Hubungan Industrial dan Produktivitas Pekerja				
		Cakupan Pembinaan Hubungan Industrial dan Produktivitas Pekerja	%	82,74	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja

No	Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK				
	Program Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Perempuan dan Anak				
		Persentase perempuan dalam organisasi kemasyarakatan yang mendapatkan peningkatan kapasitas pada sektor politik, hukum, ekonomi, sosial dan budaya*	%	45,13	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		Persentase lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan dan anak yang memiliki SDM dan sarpras sesuai standar	%	71	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		Persentase Perempuan dan anak korban kekerasan yang dilayani sesuai standar*	%	100	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		Persentase kelembagaan pelayanan pemenuhan hak anak sesuai standar	%	100	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
3	PANGAN				
	Program Peningkatan Ketahanan Pangan				
		Penanganan daerah rawan pangan	%	67,5	Dinas Pertanian dan Pangan
		Ketersediaan informasi pasokan harga dan akses pangan di daerah	%	91	Dinas Pertanian dan Pangan
		Stabilitas harga dan pasokan pangan	%	93,2	Dinas Pertanian dan Pangan
		Ketersediaan energi per kapita	Kkal	2000	Dinas Pertanian dan Pangan

No	Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Ketersediaan protein per kapita	gram	53	Dinas Pertanian dan Pangan
		Penguatan cadangan pangan	%	65	Dinas Pertanian dan Pangan
		Pencapaian skor Pola Pangan Harapan (PPH)	indeks	88,2	Dinas Pertanian dan Pangan
		Persentase pengawasan dan pembinaan keamanan pangan	%	90	Dinas Pertanian dan Pangan
4	LINGKUNGAN HIDUP				
	Program Pengendalian Pencemaran Lingkungan dan Gas Rumah Kaca				
		Persentase usaha dan/atau kegiatan yang mentaati persyaratan teknis pengendalian pencemaran udara	%	39	Dinas Lingkungan Hidup
		Proporsi limbah B3 yang dikelola sesuai peraturan perundangan (sektor industri)*	%	68	Dinas Lingkungan Hidup
		Persentase usaha dan/atau kegiatan mentaati persyaratan teknis pengendalian pencemaran air	%	46	Dinas Lingkungan Hidup
		Persentase parameter uji kualitas lingkungan yang terakreditasi	%	18	Dinas Lingkungan Hidup
	Program Peningkatan Kapasitas dan Tata Lingkungan Hidup				
		Persentase usaha dan/atau kegiatan yang berdokumen lingkungan	%	69	Dinas Lingkungan Hidup
		Persentase ketersediaan dokumen perencanaan dan pelaporan lingkungan hidup daerah	%	100	Dinas Lingkungan Hidup
		Persentase kasus lingkungan dan pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, PPLH, dan PUU LH yang ditangani	%	100	Dinas Lingkungan Hidup

No	Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Persentase Desa Bersih Sehat yang mendapat penghargaan di bidang LH	%	48	Dinas Lingkungan Hidup
	Program Peningkatan Kinerja Pengelolaan Sampah				
		Persentase jumlah sampah yang tertangani*	%	21,12	Dinas Lingkungan Hidup
		Persentase cakupan area pelayanan sampah	%	8,06	Dinas Lingkungan Hidup
		Persentase jumlah sampah yang berkurang melalui 3R*	%	21,78	Dinas Lingkungan Hidup
	Program Peningkatan Kinerja Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau				
		Persentase Ketersediaan RTH Publik di Wilayah Perkotaan	%	1,88	Dinas Lingkungan Hidup
		Persentase RTH Publik yang terkelola	%	25,37	Dinas Lingkungan Hidup
		Persentase Ketersediaan RTH Privat di Wilayah Perkotaan	%	37,71	Dinas Lingkungan Hidup
	Program Konservasi Sumber Daya Alam dan Mitigasi Dampak Perubahan Iklim				
		Persentase luasan daerah resapan air yang dikonservasi	%	2,62	Dinas Lingkungan Hidup
		Persentase luasan daerah rawan bencana yang dikonservasi	%	0,66	Dinas Lingkungan Hidup
		Persentase mata air yang dikonservasi	%	19	Dinas Lingkungan Hidup
		Cakupan desa/kelurahan program kampung iklim	%	5,91	Dinas Lingkungan Hidup
		Persentase sekolah Adiwiyata	%	16,82	Dinas Lingkungan Hidup

No	Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
5	ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN CAPIL				
	Program Pelayanan Administrasi Kependudukan				
		Persentase Penduduk yang melakukan perekaman KTP	%	98,2	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Persentase penerbitan KK	%	97,85	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	Program Pelayanan Pencatatan Sipil				
		Persentase penerbitan Akta Kelahiran	%	92,5	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Persentase Penerbitan Akta perkawinan	%	60	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Persentase Penerbitan Akta Kematian	%	70	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (PIAK) dan Pemanfaatan Data				
		Persentase Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	%	75	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Persentase Pemanfaatan Data	%	90	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
6	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA				
	Program Pemberdayaan Masyarakat dan Desa				
		Persentase fasilitasi TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD)	%	100	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		Persentase pasar desa dengan pengelolaan baik	%	49,18	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

No	Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Persentase BUMDES dalam strata maju, berkembang dan tumbuh	%	38,15	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		Persentase TTG yang difasilitasi	%	44,59	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		Persentase KP SPAMS yang berstatus mandiri	%	88,24	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		Persentase pengembangan partisipasi dan swadaya masyarakat	%	1,63	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Program Pembinaan Pemerintahan dan Kelembagaan Desa					
		Persentase pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa	%	100	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		Persentase Kecamatan yang selesai dipetakan batas desanya	%	4,76	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		Persentase LKD (LPM, Karangtaruna, PKK, RT, RW dan POSYANDU) berprestasi	%	0,54	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		Persentase pemutakhiran data-data desa dan kelurahan	%	48,39	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Program Perencanaan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa					
		Persentase pemenuhan perencanaan desa tepat waktu	%	100	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		Persentase desa yang difasilitasi pengelolaan keuangannya	%	100	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		Persentase desa yang akurat dan tertib administrasi pengelolaan aset desa nya	%	40,87	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

No	Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
7	PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA				
	Program Keluarga Berencana				
		Persentase Peningkatan partisipasi ber-KB	%	2,42	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat	%	91	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		Cakupan PUS yang ingin ber KB dan tidak terpenuhi (unmet need)*	%	11,92	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		Persentase peserta KB aktif menggunakan alat kontrasepsi modern (CPR)*	%	75,5	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)*	%	35,37	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	Program Pembangunan Ketahanan Keluarga				
		Usia Kawin Pertama (UKP)*	tahun	21,3	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

No	Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Cakupan pembangunan ketahanan keluarga	%	56,67	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		Persentase anggota UPPKS dari keluarga pra sejahtera	%	55,89	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		Persentase perangkat daerah yang berperan dalam pembangunan daerah melalui kampung KB	%	39,6	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
8	PERHUBUNGAN				
	Program peningkatan pelayanan angkutan				
		Persentase layanan uji kendaraan bermotor wajib uji	%	91,70	Dinas Perhubungan
	Program Pengembangan Jaringan Prasarana Angkutan Jalan				
		Persentase ketersediaan prasarana angkutan jalan	%	85,82	Dinas Perhubungan
	Program Peningkatan Pengamanan dan Keselamatan Lalu Lintas				
		Persentase ketersediaan fasilitas perlengkapan jalan pendukung pengamanan dan keselamatan lalu lintas	%	69,24	Dinas Perhubungan
		Persentase masyarakat sadar bidang keselamatan berlalu lintas	%	55,73	Dinas Perhubungan

No	Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
9	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				
	Program Pengembangan Sarana Prasarana Teknologi Informasi dan Komunikasi				
		Cakupan PD dan Desa/Kelurahan terfasilitasi jaringan komunikasi data yang optimal dan stabil	%	60,19	Dinas Komunikasi dan Informatika
		Cakupan Layanan Komunikasi	%	77	Dinas Komunikasi dan Informatika
	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika				
		Persentase urusan yang terintegrasi dalam pengelolaan BIG DATA	%	50	Dinas Komunikasi dan Informatika
		Persentase layanan domain dan subdomain pemerintah	%	20,68	Dinas Komunikasi dan Informatika
		Persentase ketersediaan dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja pengelolaan TIK	%	100	Dinas Komunikasi dan Informatika
	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik				
		Cakupan diseminasi informasi melalui media baru portal berita daerah	%	100	Dinas Komunikasi dan Informatika
		Cakupan Pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di tingkat kecamatan	%	100	Dinas Komunikasi dan Informatika
		Cakupan Konten Literasi TIK yang ramah anak, wanita, disabilitas dan pelajar	%	66,67	Dinas Komunikasi dan Informatika
		Persentase layanan website PD dan Desa yang memenuhi kriteria	%	26,45	Dinas Komunikasi dan Informatika

No	Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Cakupan diseminasi informasi melalui media massa	%	100	Dinas Komunikasi dan Informatika
		Cakupan diseminasi informasi melalui media pertunjukan rakyat	%	100	Dinas Komunikasi dan Informatika
		Cakupan diseminasi informasi melalui media interpersonal	%	100	Dinas Komunikasi dan Informatika
		Cakupan diseminasi informasi melalui media luar ruang	%	100	Dinas Komunikasi dan Informatika
10	KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH				
	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi				
		Cakupan peningkatan kualitas kelembagaan koperasi	%	78,13	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
	Program Pemberdayaan Usaha Mikro				
		Cakupan pemberdayaan usaha mikro	%	0,73	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
11	PENANAMAN MODAL				
	Program Peningkatan dan Pelayanan Investasi				
		Persentase realisasi investasi	%	61,2	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	Program Pemantauan dan Pengendalian Investasi				
		Persentase pemantauan dan pengendalian investasi	%	0,01	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

No	Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Program Pelayanan perizinan				
		Persentase pelayanan perizinan	%	1	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
12	KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA				
	Program Pembinaan dan Peningkatan Sarana Prasarana Olahraga				
		Cakupan pembinaan olahraga	%	44	Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga
	Program Peningkatan Peran Serta Pemuda dalam Pembangunan				
		Cakupan pembinaan pemuda	%	44	Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga
13	STATISTIK				
	Program Pengelolaan dan Pengembangan Statistik				
		Persentase ketersediaan data statistik sektoral	%	100	Dinas Komunikasi dan Informatika
		Persentase data statistik sektoral yang terintegrasi dalam sistem informasi	%	100	Dinas Komunikasi dan Informatika
14	PERSANDIAN				
	Program Persandian				
		Persentase PD yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi Perangkat Daerah	%	20	Dinas Komunikasi dan Informatika
15	KEBUDAYAAN				

No	Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Program Perlindungan dan Pengembangan Kebudayaan				
		Persentase Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan	%	11,59	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Persentase Karya Budaya yang Terlayani	%	4,20	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Persentase Kelompok Seni Budaya yang Aktif	%	84,13	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
16	PERPUSTAKAAN				
	Program Pengelolaan dan Pengembangan Perpustakaan				
		Rasio judul koleksi bahan pustaka di Perpustakaan Kabupaten	%	0,023	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
		Angka kepuasan pemustaka	angka	80	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
		Rasio Pustakawan dan Tenaga Teknis Perpustakaan yang Mengikuti Bimtek, Sosialisasi dan Workshop	%	56,25	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
17	KEARSIPAN				
	Program Pembinaan, Pengembangan dan Pengawasan Kearsipan				
		Persentase pencipta Arsip yang tertib arsip	%	53,85	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	Program Pengelolaan dan Pelestarian Arsip				
		Persentase peningkatan Arsip yang dikelola	%	6,45	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
C	URUSAN PILIHAN				
1	KELAUTAN DAN PERIKANAN				

No	Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Program Pengembangan Budidaya Perikanan, Kesehatan Ikan dan Lingkungan				
		Cakupan pengembangan budidaya perikanan	%	5	Dinas Peternakan dan Perikanan
		Cakupan kesehatan ikan dan lingkungan	%	100	Dinas Peternakan dan Perikanan
	Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan dan Sistem Penyuluhan				
		Cakupan optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan	%	5	Dinas Peternakan dan Perikanan
		Angka konsumsi ikan	kg perkapita pertahun	19,90	Dinas Peternakan dan Perikanan
		Cakupan bina kelompok pembudidaya ikan	%	5	Dinas Peternakan dan Perikanan
		Cakupan pengembangan kawasan budidaya perikanan air tawar	%	3	Dinas Peternakan dan Perikanan
2	PARIWISATA				
	Program Peningkatan Sarana Prasarana dan Industri Pariwisata				
		Cakupan peningkatan sarana prasarana dan industri pariwisata dalam kondisi baik	%	45,45	Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga
	Program Pengembangan Kelembagaan, Pemasaran Pariwisata dan ekonomi kreatif				
		Cakupan Pengembangan Kelembagaan, Pemasaran Pariwisata dan ekonomi kreatif	%	59,67	Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga
3	PERTANIAN				
	Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan				

No	Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Produktivitas cengkeh	kw/ha	1,92	Dinas Pertanian dan Pangan
		Produktivitas kelapa dalam	kw/ha	14,60	Dinas Pertanian dan Pangan
		Produktivitas salak	kw/pohon	0,07	Dinas Pertanian dan Pangan
		Produktivitas jeruk	kw/pohon	0,12	Dinas Pertanian dan Pangan
		Produktivitas kelengkeng	kw/pohon	0,79	Dinas Pertanian dan Pangan
		Produktivitas padi	kw/ha	60,3	Dinas Pertanian dan Pangan
		Produktivitas jagung	kw/ha	50,32	Dinas Pertanian dan Pangan
		Produktivitas kopi	kw/ha	9	Dinas Pertanian dan Pangan
		Produktivitas cabai	kw/ha	69,85	Dinas Pertanian dan Pangan
		Produktivitas bawang putih	kw/ha	61,72	Dinas Pertanian dan Pangan
	Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan				
		Cakupan Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	%	2	Dinas Peternakan dan Perikanan
		Cakupan peningkatan sarana dan prasarana peternakan	%	3	Dinas Peternakan dan Perikanan
		Cakupan penerapan teknologi peternakan	%	75	Dinas Peternakan dan Perikanan
		Cakupan peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan	%	3	Dinas Peternakan dan Perikanan
	Program Peningkatan Daya Saing Produk Pertanian				
		Persentase Peningkatan Kerjasama/ Kemitraan yang Terjalin	%	20	Dinas Pertanian dan Pangan
		Persentase luas lahan pertanian yang disertifikasi organik	%	5,45	Dinas Pertanian dan Pangan
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pertanian				

No	Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Cakupan ketersediaan sarana dan prasarana pertanian/ perkebunan	%	3,59	Dinas Pertanian dan Pangan
	Program Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Pertanian				
		Cakupan Pembinaan Kelompok Tani	%	37,60	Dinas Pertanian dan Pangan
	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Hewan				
		Cakupan pencegahan dan penanggulangan penyakit hewan	%	100	Dinas Peternakan dan Perikanan
4	PERDAGANGAN				
	Program Peningkatan dan Pengembangan Perdagangan				
		Peningkatan pertumbuhan ekspor barang non migas	%	3	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
		fluktuasi harga bapok (10 komoditas): beras,minyak goreng,gula pasir, cabe merah keriting, cabe rawit merah,daging sapi,daging ayam ras,telur ayam ras,bawang merah,terigu	%	<10	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
		Persentase pengawasan perdagangan sesuai dengan ketentuan	%	80	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
	Program Pemberdayaan dan Penataan Pasar				
		Persentase pasar rakyat dengan sarana prasarana dan pengelolaan yang baik	%	86	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
	Program Peningkatan dan Pengembangan Pelayanan Kemetrolgian				
		Persentase peningkatan jumlah UTTP bertanda tera sah	%	58	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

No	Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
5	PERINDUSTRIAN				
	Program Pengembangan industri				
		Cakupan Bina Industri Kecil	%	1,435	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
D	URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG				
1	ADMINISTRASI PEMERINTAHAN				
	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala daerah/ Wakil Kepala Daerah				
		Cakupan peningkatan pelayanan kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	%	100	Sekretariat Daerah - Bagian Umum
	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan dan Bantuan Hukum				
		Persentase Produk Hukum Daerah yang disusun tepat asas	%	100	Sekretariat Daerah - Bagian Hukum
		Persentase produk hukum daerah yang dikaji sesuai asas	%	100	Sekretariat Daerah - Bagian Hukum
		Persentase permasalahan hukum yang didampingi	%	100	Sekretariat Daerah - Bagian Hukum
	Program Perumusan dan Pengendalian Kebijakan Pemerintahan				
		Persentase kebijakan pemerintahan yang dijalankan	%	90	Sekretariat Daerah - Bagian Pemerintahan
	Program Perumusan dan Pengendalian Kebijakan Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan				
		Cakupan Perumusan dan Pengendalian Kebijakan Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan	%	100	Sekretariat Daerah - Bagian Kesejahteraan Rakyat

No	Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Program Perumusan dan Pengendalian Kebijakan Perekonomian				
		Persentase Kebijakan Perekonomian yang Dijalankan	%	100	Sekretariat Daerah - Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam
		Persentase BUMD yang Berkinerja Baik	%	100	Sekretariat Daerah - Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam
		Persentase Peningkatan Sumbangan BUMD pada PAD	%	12	Sekretariat Daerah - Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam
	Program Perumusan dan Pengendalian Kebijakan Pembangunan				
		Cakupan penyusunan pedoman perencanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pembangunan daerah	%	100	Sekretariat Daerah - Bagian Administrasi Pembangunan
	Program Pengembangan Kelembagaan, Tatalaksana dan Peningkatan Kinerja Organisasi				
		Persentase dokumen kelembagaan yang ditindaklanjuti	%	100	Sekretariat Daerah - Bagian Organisasi
		Persentase dokumen ketatalaksanaan yang diterapkan	%	100	Sekretariat Daerah - Bagian Organisasi
		Persentase unit pelayanan publik yang mendapat nilai baik	%	100	Sekretariat Daerah - Bagian Organisasi
		Persentase dokumen evaluasi kinerja PD yang disusun tepat waktu	%	100	Sekretariat Daerah - Bagian Organisasi
	Program Peningkatan Kualitas Pengadaan Barang/Jasa				

No	Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Indeks Kematangan UKPBJ	level	4	Sekretariat Daerah - Bagian Administrasi Pembangunan
	Program Kehumasan dan Layanan Keprotokolan				
		Cakupan Kinerja Kehumasan dan Layanan Keprotokolan	%	100	Sekretariat Daerah - Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan
	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan DPRD				
		Persentase Pemenuhan Fasilitasi Raperda	%	83,33	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
		Persentase Pemenuhan Fasilitasi Kebijakan Anggaran	%	100	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
		Persentase Pemenuhan Fasilitasi Rekomendasi DPRD	%	100	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
	Program Pelayanan Publik Kecamatan				
		Persentase pelayanan publik sesuai SOP dan SP	%	90	Kecamatan Salaman
		Persentase Pelayanan Publik Sesuai SOP dan SP	%	90	Kecamatan Borobudur
		Persentase Pelayanan Publik Sesuai SOP dan SP	%	100	Kecamatan Ngluwar
		Persentase pelayanan publik sesuai SOP da SP	%	90	Kecamatan Salam
		Persentase pelayanan publik sesuai SOP dan SP	%	100	Kecamatan Srumbung
		Persentase Pelayanan publik sesuai SOP dan SP	%	100	Kecamatan Dukun
		Persentase Pelayanan Publik Sesuai SOP dan SP	%	85	Kecamatan Sawangan

No	Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Persentase Pelayanan Publik Sesuai SOP dan SP	%	100	Kecamatan Muntilan
		Persentase pelayanan publik sesuai SOP dan SP	%	100	Kecamatan Mungkid
		Persentase Pelayanan Publik sesuai SOP dan SP	%	100	Kecamatan Mertoyudan
		Persentase pelayanan publik sesuai SOP dan SP	%	93	Kecamatan Tempuran
		Persentase Pelayanan Publik Sesuai SOP dan SP	%	100	Kecamatan Kajoran
		Persentase pelayanan publik sesuai SOP dan SP	%	100	Kecamatan Kaliangkrik
		Persentase pelayanan publik sesuai SOP dan SP	%	100	Kecamatan Bandongan
		Persentase pelayanan publik sesuai SOP dan SP	%	100	Kecamatan Candimulyo
		Persentase pelayanan publik sesuai SOP dan SP	%	100	Kecamatan Pakis
		Persentase pelayanan publik sesuai SOP dan SP	%	100	Kecamatan Ngablak
		Persentase pelayanan publik sesuai SOP dan SP	%	100	Kecamatan Grabag
		Persentase pelayanan publik Sesuai SOP dan SP	%	100	Kecamatan Tegalrejo
		Persentase pelayanan publik sesuai SOP dan SP	%	100	Kecamatan Secang
		Persentase pelayanan publik sesuai SOP dan SP	%	82,10	Kecamatan Windusari
	Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan				
		Persentase kegiatan yang dikoordinasikan	%	100	Kecamatan Salaman
		Persentase desa yang tertib administrasi	%	100	Kecamatan Salaman
		Persentase kegiatan yang dikoordinasikan	%	100	Kecamatan Borobudur

No	Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Persentase desa yang tertib administrasi	%	80	Kecamatan Borobudur
		Persentase desa yang tertib administrasi	%	80	Kecamatan Ngluwar
		Persentase kegiatan yang dikoordinasikan	%	100	Kecamatan Ngluwar
		Persentase kegiatan yang dikoordinasikan	%	100	Kecamatan Salam
		Persentase desa yang tertib adminstrasi	%	41,66	Kecamatan Salam
		Persentase kegiatan yang dikoordinasikan	%	87	Kecamatan Srumbung
		Persentase desa yang tertib administrasi	%	60	Kecamatan Srumbung
		Persentase kegiatan yang dikoordinasikan	%	100	Kecamatan Dukun
		Persentase desa yang tertib Administrasi	%	100	Kecamatan Dukun
		Persentase desa yang tertib administrasi	%	70	Kecamatan Sawangan
		Pesentase kegiatan yang dikoordinasikan	%	100	Kecamatan Sawangan
		Persentase kegiatan yang dikoordinasikan	%	100	Kecamatan Muntilan
		Persentase desa/kelurahan yang tertib administrasi	%	66	Kecamatan Muntilan
		Persentase desa/kelurahan yang tertib administrasi	%	83	Kecamatan Mungkid
		Persentase kegiatan yang dikoordinasikan	%	100	Kecamatan Mungkid
		Persentase desa/kelurahan yang tertib administrasi	%	64	Kecamatan Mertoyudan

No	Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Persentase kegiatan yang dikoordinasikan	%	100	Kecamatan Mertoyudan
		Persentase desa yang tertib administrasi	%	80	Kecamatan Tempuran
		Persentase kegiatan yang dikoordinasikan	%	100	Kecamatan Tempuran
		Persentase desa yang tertib administrasi	%	48,28	Kecamatan Kajoran
		Persentase kegiatan yang dikoordinasikan	%	100	Kecamatan Kajoran
		Persentase kegiatan yang dikoordinasikan	%	100	Kecamatan Kaliangkrik
		Persentase desa yang tertib administrasi	%	82	Kecamatan Kaliangkrik
		Persentase desa yang tertib administrasi	%	100	Kecamatan Bandongan
		Persentase kegiatan yang dikoordinasikan	%	100	Kecamatan Bandongan
		Persentase desa yang tertib administrasi	%	84,21	Kecamatan Candimulyo
		Persentase kegiatan yang dikoordinasikan	%	100	Kecamatan Candimulyo
		Persentase desa yang tertib administrasi	%	80	Kecamatan Pakis
		Persentase kegiatan yang dikoordinasikan	%	100	Kecamatan Pakis
		Persentase desa yang tertib administrasi	%	85	Kecamatan Ngablak
		Persentase kegiatan yang dikoordinasikan	%	100	Kecamatan Ngablak
		Persentase desa yang tertib administrasi	%	100	Kecamatan Grabag
		Persentase kegiatan yg dikoordinasikan	%	100	Kecamatan Grabag
		Persentase desa yang tertib administrasi	%	85	Kecamatan Tegalrejo

No	Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Persentase kegiatan yang dikoordinasikan	%	100	Kecamatan Tegalrejo
		Persentase desa/kelurahan yang tertib administrasi	%	65	Kecamatan Secang
		Persentase kegiatan yang dikoordinasikan	%	100	Kecamatan Secang
		Persentase kegiatan yang dikoordinasikan	%	100	Kecamatan Windusari
		Persentase desa yang tertib administrasi	%	90	Kecamatan Windusari
2	PENGAWASAN				
	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH				
		Persentase Laporan Hasil Pengawasan	%	100	Inspektorat
		Persentase tindak lanjut yang terselesaikan	%	87	Inspektorat
		Persentase dokumen SPIP PD yang memadai	%	70	Inspektorat
		Angka capaian nilai aksi pencegahan korupsi	%	80	Inspektorat
3	PERENCANAAN				
	Program Perencanaan Pembangunan Daerah				
		Persentase kesepakatan Musrenbang yang masuk ke dalam RKPD	%	100	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
		Persentase pemenuhan dokumen perencanaan pembangunan jangka panjang dan menengah daerah	%	100	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
		Konsistensi penjabaran program RPJMD ke dalam RKPD	%	100	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

No	Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Program Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam				
		Cakupan ketercapaian indikator kinerja program bidang ekonomi dan sumber daya alam	%	82	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
	Program Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan, Sosial dan Budaya				
		Cakupan ketercapaian indikator kinerja program bidang pemerintahan, sosial, dan budaya	%	67,14	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
	Program Perencanaan Pembangunan Bidang Tata Ruang, Pengembangan Wilayah dan Infrastruktur				
		Cakupan ketercapaian indikator kinerja program bidang tata ruang pengembangan wilayah dan infrastruktur	%	90,32	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
4	KEUANGAN				
	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah				
		Persentase kenaikan Pajak	%	11,28	Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
		Persentase kenaikan retribusi	%	-16,15	Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
		Persentase penyelesaian penagihan atas ketetapan pajak daerah	%	100	Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
	Program Pengelolaan Keuangan Daerah				
		Persentase Tahapan Penganggaran yang dilakukan tepat waktu	%	100	Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

No	Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Persentase serapan APBD	%	100	Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
		Persentase penerimaan pendapatan di RKUD	%	100	Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
		Penerapan SAP berbasis akrual yang baik dan benar	%	100	Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
	Program Pengelolaan Aset Daerah				
		Persentase PD tertib administrasi Pengelolaan BMD (Barang Milik Daerah/Aset)	%	100	Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5	KEPEGAWAIAN				
	Program Informasi dan Pengadaan Pegawai				
		Persentase kelengkapan dokumen kepegawaian dalam SIMPEG	%	75	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah
		Persentase keterisian formasi pegawai	%	75,10	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah
	Program Pengembangan Sumber Daya Aparatur				
		Persentase ASN yang lulus diklat	%	100	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah
		Persentase ASN yang meningkat kualifikasinya	%	9,70	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah
		Persentase keterisian Jabatan Pimpinan Tinggi, Administrator dan Pengawas	%	82	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah
		Persentase ASN yang terevaluasi kinerjanya	%	79	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah

No	Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Program Kesejahteraan dan Pembinaan Pegawai				
		Persentase pembinaan ASN	%	0,40	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah
		Persentase ASN yang mendapat layanan administrasi kesejahteraan ASN	%	100	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah
6	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN				
	Program Penelitian dan Pengkajian Daerah				
		Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	%	100	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
		Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah	%	100	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

BAB VIII

PENUTUP

RKPD Kabupaten Magelang Tahun 2021 merupakan tahun kedua pelaksanaan rencana pembangunan dalam RPJMD Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024 yang menjadi tahapan penting dalam pemantapan pencapaian pembangunan. Fokus pembangunan tahun 2021 untuk peningkatan kesejahteraan melalui pemerataan infrastruktur publik. Sehingga semua sektor dan prioritas pembangunan diarahkan untuk pencapaian sasaran dan target pembangunan daerah tahun 2021.

Pandemi covid-19 yang melanda Kabupaten Magelang membawa dampak yang sangat besar dalam pelaksanaan pembangunan tahun 2020 dengan adanya refocusing kegiatan untuk penanganan Covid-19. Hal ini juga sangat berpengaruh dalam perencanaan pembangunan tahun 2021 dalam upaya pemulihan dan kebangkitan ekonomi masyarakat setelah pandemi Covid-19.

Komitmen seluruh pemangku kepentingan dalam mengawal, melaksanakan dan mewujudkan keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan yang tertuang dalam RKPD Kabupaten Magelang Tahun 2021 sangat diperlukan. Pada saatnya RKPD ini akan menjadi titik awal dalam merancang KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2021. KUA dan PPAS tersebut akan menentukan bagaimana dalam merancang APBD Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2021 sudah mencerminkan pelaksanaan penjabaran visi, misi dan prioritas pembangunan Kabupaten Magelang pada Tahun 2021 yang sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Sehingga upaya untuk melaksanakan visi “Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Magelang yang Sejahtera, Berdaya Saing dan Amanah (Sedaya Amanah)” dapat tercapai.

Keberhasilan pelaksanaan program pembangunan Kabupaten Magelang Tahun 2021 memerlukan dukungan sikap mental, tekad, semangat, ketaatan dan disiplin aparat pemerintah, peran masyarakat dan dunia usaha untuk mencapai cita-cita dan harapan masyarakat.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


SARIFUDIN, S.H.

Pembina

NIP. 196702121993121001

BUPATI MAGELANG,

ttd

ZAENAL ARIFIN